LAPORAN KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

(*AUDITED*)

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL V
PERNYATAAN TELAH DIREVIU VIII
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB IX
RINGKASAN X
LAPORAN REALISASI ANGGARAN XIII
NERACA XIV
LAPORAN OPERASIONAL XVI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS XVII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
A. PENJELASAN UMUM 1
A.1. Dasar Hukum 1
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung 2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 4
A.4. Basis Akuntansi 6
A.5. Dasar Pengukuran 6
A.6. Kebijakan Akuntansi 6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 13
B.1. Pendapatan 16
B.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 16
B.2. Belanja 24
B.2.1. Belanja Pegawai 33
B.2.2. Belanja Barang 34
B.2.3. Belanja Modal 36
B.2.3.1. Belanja Modal Tanah 37
B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38
B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 39
B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 40
B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya 41
Program Prioritas Nasional 42
Tematik APBN 45
Capaian Output Strategis K/L 46
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 52
C.1. Aset Lancar 52
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 54
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan 55

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas 56
C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) 58
C.1.5. Piutang Bukan Pajak 59
C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 68
C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi . 69
C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 71
C.1.9. Persediaan 72
C.2. Aset Tetap 74
C.2.1. Tanah 76
C.2.2. Peralatan dan Mesin 79
C.2.3. Gedung dan Bangunan 82
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 85
C.2.5. Aset Tetap Lainnya 87
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 90
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 92
C.3. Piutang Jangka Panjang 93
C.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR 94
C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR 103
C.3.3. Piutang Jangka Panjang lainnya 104
C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya 106
C.4. Aset Lainnya 106
C.4.1. Aset Tak Berwujud 108
C.4.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya 110
C.4.3. Aset Lain-Lain 111
C.4.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 113
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 114
C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga 116
C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka 118
C.5.3. Uang Muka dari KPPN 119
C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 120
C.6. Ekuitas 121
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 122
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 122
D.2. Beban Pegawai 124
D.3. Beban Persediaan 126
D.4. Beban Barang dan Jasa 126
D.5. Beban Pemeliharaan 128
D.6. Beban Perjalanan Dinas 129

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 130
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 130
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 131
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar 132
D.11. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 132
D.12. Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 133
D.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 134
D.14. Pos Luar Biasa 135
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 136
E.1. Ekuitas Awal 136
E.2. Surplus/Defisit-LO 136
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi 136
E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 136
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset 136
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan 136
E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 137
E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap 138
E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 138
E.4.6. Koreksi Lain-Lain 140
E.5. Transaksi Antar Entitas 143
E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL) ... 143
E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar 143
E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung 146
E.6. Ekuitas Akhir 170
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 171
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 171
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 171
F.3. Rekening Pemerintah 187
F.4. P engungkapan Penting Lain-lain 187
F.4.1. Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 187
F.4.2. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri 195
F.4.2.1. Penerimaan Hibah Mahkamah Agung 195
F.4.2.2. Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan 232
F.4.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri 254
F.4.3. Catatan Penting Lainnya 265

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA 5
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 17
Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBP 18
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 32
Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program 33
Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja 33
Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai 34
Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang 35
Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal 36
Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah 37
Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38
Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 39
Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 41
Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya 41
Tabel 15. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun 52
Tabel 16. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Eselon I 53
Tabel 17. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I 54
Tabel 18. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran 54
Tabel 19. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satuan Kerja 55
Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I 55
Tabel 21. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Satuan Kerja 56
Tabel 22. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I 56
Tabel 23. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 57
Tabel 24. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Eselon I 58
Tabel 25. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 59
Tabel 26. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 59
Tabel 27. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja 60
Tabel 28. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 68
Tabel 29. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja 69
Tabel 30. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023 70
Tabel 31. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA Per Eselon I 70
Tabel 32. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 70
Tabel 33. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I 71

Tabel 34. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Satuan Kerja 72
Tabel 35. Perbandingan Rincian Persediaan Per Eselon I 72
Tabel 36. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun 73
Tabel 37. Rincian Kondisi Barang Persediaan Per Eselon I periode 31 Desember 2024 74
Tabel 38. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun 74
Tabel 39. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca Modul GLP SAKTI dan Modul Aset SAKTI 75
Tabel 40. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Eselon I 76
Tabel 41. Perbandingan Rincian Tanah Per Eselon I 76
Tabel 42. Mutasi Transaksi Tanah 77
Tabel 43. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I 79
Tabel 44. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin 79
Tabel 45. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I 82
Tabel 46. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan 83
Tabel 47. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Eselon I 86
Tabel 48. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 86
Tabel 49. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I 88
Tabel 50. Mutasi Transaksi Aset Tetap Lainnya 88
Tabel 51. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 91
Tabel 52. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 91
Tabel 53. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 93
Tabel 54. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Akun 93
Tabel 55. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Eselon I 94
Tabel 56. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Eselon I 95
Tabel 57. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing Debitur 103
Tabel 58. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I 104
Tabel 59. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur 104
Tabel 60. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Eselon I 105
Tabel 61. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Eselon I 106
Tabel 62. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing debitur 106
Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun 107
Tabel 64. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Eselon I 108
Tabel 65. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I 108
Tabel 66. Mutasi Transaksi Aset Tak Berwujud 109

Tabel 67. Perbandingan Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Eselon I 111
Tabel 68. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain 111
Tabel 69. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I 112
Tabel 70. Mutasi Transaksi Aset Lain-Lain 112
Tabel 71. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 114
Tabel 72. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun 115
Tabel 73. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Eselon I 115
Tabel 74. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I 116
Tabel 75. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Jenis Belanja 116
Tabel 76. Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I 119
Tabel 77. Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I 119
Tabel 78. Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I 120
Tabel 79. Perbandingan Rincian Ekuitas Per Eselon I 121
Tabel 80. Perbandingan Rincian PNBP Lainnya 122
Tabel 81. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 125
Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 126
Tabel 83. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 127
Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 128
Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 129
Tabel 86. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 130
Tabel 87. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 131
Tabel 88. Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 131
Tabel 89. Perbandingan Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar 132
Tabel 90. Perbandingan Rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 132
Tabel 91. Perbandingan Rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 133
Tabel 92. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 135
Tabel 93. Rincian Koreksi Nilai Persediaan 137
Tabel 94. Rincian Koreksi Nilai Persediaan 137
Tabel 95. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 138
Tabel 96. Rincian Koreksi Lain-lain 140
Tabel 97. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 143

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Februari 2025
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

SUGIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

RINGKASAN

RINGKASAN

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi pendapatan negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp105.803.944.468,00 atau mencapai 123,64 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp85.577.098.000,00.

Realisasi belanja negara pada 31 Desember 2024 sebesar Rp11.627.225.171.227,00 atau mencapai 97,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.925.492.498.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.244.542.056.931,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp52.804.620.679,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp32.067.633.421.986,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp3.728.776,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp124.100.285.490,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp110.776.105.869,00 dan Rp32.133.765.951.062,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp90.366.384.951,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp11.377.456.819.349,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp11.287.090.434.398,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.204.669.342,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.285.885.765.056,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp31.765.973.920.689,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp11.285.885.765.056,00, kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan, Koreksi yang Menambah/Mengurang Ekuitas sebesar (Rp82.698.599.647,00), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.736.376.395.076,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp32.133.765.951.062,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis Akrual.

6. RINGKASAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Ringkasan Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.803.944.468,00 berasal dari pendapatan teknis sebesar Rp75.143.960.113,00 dan pendapatan non teknis sebesar Rp30.659.984.355,00. Pada periode Tahun 2024 realisasi pendapatan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023 pada akun:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122), hal ini dikarenakan banyak satuan kerja yang melakukan penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah dihentikan penggunaanya melalui mekanisme lelang;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811), hal ini dikarenakan adanya penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan maupun BPK, serta tingginya penerimaan atas denda tersebut yang disebabkan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913), hal ini dikarenakan meningkatnya penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Badan Pengawasan.

Realisasi belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.627.225.171.227,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja per 31 Desember 2023. Pada Tahun 2024 terdapat kenaikan yang signifikan, antara lain:

(1) Secara umum terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai yang disebabkan adanya pembayaran 100% untuk Tunjangan Kinerja Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13, serta pembayaran Gaji PPPK.

(2) Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) berupa pembayaran honor penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

B. Ringkasan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca laporan keuangan Tahun 2024 mengalami kenaikan ekuitas dibandingkan dengan Tahun 2023 dikarenakan kenaikan nilai aset terutama Gedung dan Bangunan.

C. Ringkasan Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan meningkatnya beban pegawai dan beban barang operasional lainnya.

D. Ringkasan Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan Transaksi Antar Entitas, serta kenaikan nilai ekuitas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TA 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024				TA2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	**B.1**					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	85.577.098.000,00	105.803.944.468,00	20.226.846.468,00	123,64	102.285.676.891,00
JUMLAH PENDAPATAN		**85.577.098.000,00**	**105.803.944.468,00**	**20.226.846.468,00**	**123,64**	**102.285.676.891,00**
BELANJA	**B.2**					
Belanja Pegawai	B.2.1	7.765.344.168.000,00	7.565.805.289.661,00	(199.538.878.339,00)	97,43	7.068.570.734.587,00
Belanja Barang	B.2.2	3.040.038.103.000,00	2.957.012.815.204,00	(83.025.287.796,00)	97,27	2.697.845.237.941,00
Belanja Modal	B.2.3	1.120.110.227.000,00	1.104.407.066.362,00	(15.703.160.638,00)	98,60	1.827.810.385.072,00
JUMLAH BELANJA		**11.925.492.498.000,00**	**11.627.225.171.227,00**	**(298.267.326.773,00)**	**97,50**	**11.594.226.357.600,00**

Jakarta, 6 Mei 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

NERACA

NERACA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	2.160.000,00	34.246.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C. 1.2	389.500,00	38.270.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.3	50.102.091,00	32.772.439,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.4	19.977.655.953,00	19.977.046.358,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.5	8.474.768.753,00	1.329.159.585,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.6	(132.427.315,00)	(772.109.093,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		8.342.341.438,00	557.050.492,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.7	14.989.992,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.8	(74.950,00)	0,00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		14.915.042,00	0,00
Persediaan	C. 1.9	24.417.056.655,00	23.934.594.158,00
Jumlah Aset Lancar		**52.804.620.679,00**	**44.573.979.447,00**
ASET TETAP	C. 2		
Tanah	C. 2.1	20.014.331.807.703,00	20.042.057.573.980,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	5.005.464.644.692,00	4.820.922.714.383,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	13.252.752.386.154,00	11.821.324.680.170,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 2.4	58.350.280.852,00	58.399.600.852,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.5	51.619.330.318,00	75.032.921.320,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.6	475.263.059.024,00	915.655.052.073,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.7	(6.790.148.086.757,00)	(6.049.996.804.082,00)
Jumlah Aset Tetap		**32.067.633.421.986,00**	**31.683.395.738.696,00**
PIUTANG JANGKA PANJANG	C. 3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3.1	3.747.514,00	48.752.226,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3.2	(18.738,00)	(48.752.226,00)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		3.728.776,00	0,00
Piutang Jangka Panjang lainnya	C. 3.3	578.845.030,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C. 3.4	(578.845.030,00)	0,00
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (NETTO)		0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**3.728.776,00**	**0,00**
ASET LAINNYA	C. 4		
Aset Tak Berwujud	C. 4.1	98.803.896.742,00	110.013.999.715,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 4.2	62.522.083.798,00	164.453.156.381,00
Aset Lain-Lain	C. 4.3	161.372.376.431,00	161.921.949.010,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 4.4	(198.598.071.481,00)	(203.180.450.222,00)
Jumlah Aset Lainnya		**124.100.285.490,00**	**233.208.654.884,00**
Jumlah Aset		**32.244.542.056.931,00**	**31.961.178.373.027,00**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C. 5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 5.1	107.847.732.002,00	192.354.389.141,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 5.2	2.876.111.776,00	2.783.044.758,00
Uang Muka dari KPPN	C. 5.3	2.160.000,00	34.246.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 5.4	50.102.091,00	32.772.439,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**110.776.105.869,00**	**195.204.452.338,00**
Jumlah Kewajiban		**110.776.105.869,00**	**195.204.452.338,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 6	32.133.765.951.062,00	31.765.973.920.689,00
Jumlah Ekuitas		**32.133.765.951.062,00**	**31.765.973.920.689,00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**32.244.542.056.931,00**	**31.961.178.373.027,00**

Jakarta, 6 Mei 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TA 2024 DAN TA 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D. 1	90.366.384.951,00	89.442.053.517,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**90.366.384.951,00**	**89.442.053.517,00**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D. 2	7.564.817.147.430,00	7.068.326.395.723,00
Beban Persediaan	D. 3	87.108.661.808,00	87.067.531.291,00
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.849.209.178.781,00	1.590.790.224.987,00
Beban Pemeliharaan	D. 5	539.587.316.077,00	507.163.996.809,00
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	522.579.552.065,00	507.788.976.819,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	814.312.498.234,00	791.991.563.924,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D. 8	(157.535.046,00)	765.834.851,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**11.377.456.819.349,00**	**10.553.894.524.404,00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(11.287.090.434.398,00)**	**(10.464.452.470.887,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D. 9	5.378.348.355,00	2.895.311.185,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D. 10	13.189.918.823,00	26.430.145.867,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(7.811.570.468,00)**	**(23.534.834.682,00)**
DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	9.092.226.972,00	6.377.788.526,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	75.987.162,00	41.317.744,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**9.016.239.810,00**	**6.336.470.782,00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**D. 13**	**1.204.669.342,00**	**(17.198.363.900,00)**
POS LUAR BIASA	**D. 14**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		**(11.285.885.765.056,00)**	**(10.481.650.834.787,00)**

Jakarta, 6 Mei 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TA 2024 DAN TA 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	**E. 1**	**31.765.973.920.689,00**	**30.525.686.275.992,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**E. 2**	**(11.285.885.765.056,00)**	**(10.481.650.834.787,00)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**E. 4**	**(82.698.599.647,00)**	**66.338.556.929,00**
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	(380.261,00)	24.224.826,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	566.537.699,00	6.516.819.989,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	(83.102.392.527,00)	59.272.347.817,00
Lain-Lain	E. 4.6	(162.364.558,00)	525.164.297,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E. 5**	**11.736.376.395.076,00**	**11.655.599.922.555,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**367.792.030.373,00**	**1.240.287.644.697,00**
EKUITAS AKHIR	**E. 6**	**32.133.765.951.062,00**	**31.765.973.920.689,00**

Jakarta, 6 Mei 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

POS-POS PENJELASAN UMUM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2022 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung

Rencana Strategis Mahkamah Agung

Visi dan Misi Mahkamah Agung

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut: **"*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.*"**

Penjelasan:
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Tujuan

Mahkamah Agung bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Mahkamah Agung

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V/2020, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara di bidang yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yang memiliki visi "***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***", maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Agung.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database*, multi *user* dan/atau multi satuan kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *Unaudited*, dan *Audited.*

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran;
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu: Modul Komitmen (meliputi Sub-Modul Manajemen *Supplier* dan Sub-Modul Manajemen Komitmen), Modul Bendahara, dan Modul Pembayaran;
3. Proses pelaporan diperankan oleh Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Piutang, dan Modul GLP SAKTI.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada periode Tahun 2024, Laporan Keuangan Mahkamah Agung meliputi 7 (tujuh) satuan kerja Unit Eselon I dengan jumlah satuan kerja sebanyak 1.853 satuan kerja. Dari jumlah tersebut satuan kerja yang menyampaikan Laporan Keuangan sejumlah 1.853 satuan kerja (100%).

Rincian satuan kerja tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satuan Kerja
			KP		KD		
			M	TM	M	TM	
1	01	Badan Urusan Administrasi	1	0	923	0	924
2	02	Kepaniteraan	1	0	0	0	1
3	03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	0	416	0	417
4	04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1	0	446	0	447
5	05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1	0	61	0	62
6	06	Badan Litbang Diklat Kumdil	1	0	0	0	1
7	07	Badan Pengawasan	1	0	0	0	1
Jumlah			**7**	**0**	**1846**	**0**	**1.853**

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Mahkamah Agung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Mahkamah Agung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR;

- Persediaan dinilai sebesar:
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian ditambah pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan saat pengadaan persediaan, di luar biaya pendistribusian. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa;
  - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Nilai wajar didasarkan pada dokumen yang menyertainya. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar dari barang persediaan dalam hal harga perolehannya tidak diketahui.

Aset Tetap

b. **Aset Tetap**

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2019 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2019;

Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan;

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap;
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

ASET TETAP	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi;
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya;
- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

POS-POS PENJELASAN LRA

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal: Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung. Berdasarkan surat tersebut Mahkamah Agung mendapatkan tambahan anggaran belanja dari PNBP yang dapat digunakan kembali sebesar 40% dari PNBP yang telah disetorkan ke kas negara. Adapun besaran penggunaan dana ini ditentukan oleh masing-masing Unit Eselon I dengan tidak melebihi dari persetujuan yang ada. Unit Eselon I memiliki kewenangan dalam menentukan besaran yang akan digunakan kembali mengingat proses persetujuan ini selesai di Triwulan III setiap tahunnya.

Penggunaan dana PNBP dapat digunakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk membiayai:

1. Peningkatan pelayanan publik peradilan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan peradilan;
3. Peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan dan pengelola PNBP;
4. Pembinaan dan pengawasan layanan peradilan;
5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP.

Adapun data target PNBP Mahkamah Agung 2023 dan 2024 per Unit Eselon I:

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TARGET		Kenaikan/(Penurunan)	
		APBN 2023	APBN 2024	(Rp)	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.310.101.000,00	8.708.505.000,00	(1.601.596.000,00)	(15,53)
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.880.000,00	321.720.000,00	138.840.000,00	75,92
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.829.758.000,00	2.973.080.000,00	143.322.000,00	5,06
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.401.124.000,00	23.944.905.000,00	(456.219.000,00)	(1,87)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.898.844.000,00	50.957.408.000,00	2.058.564.000,00	4,21
JUMLAH KESELURUHAN		**86.622.707.000,00**	**86.905.618.000,00**	**282.911.000,00**	**0,33**

Sumber: Data Aplikasi DJA

Penyebab terjadinya perubahan estimasi pendapatan 2024 dibandingkan 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Kenaikan target terjadi pada PNBP Fungsional, hal ini disebabkan karena sebagian besar PNBP Mahkamah Agung ditentukan berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung;
2. Penurunan target terjadi pada PNBP Umum yang bersumber dari pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa BMN, hal ini disebabkan adanya bantuan sewa rumah dinas khususnya untuk pejabat negara (pimpinan dan hakim).

Berikut merupakan data perbandingan target pendapatan 2024 SatuDJA dan estimasi pendapatan 2024 SAKTI sampai dengan Tahun 2024:

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TARGET PENDAPATAN SATUDJA	ESTIMASI PENDAPATAN SAKTI	SELISIH
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	93.919.000,00	(93.919.000,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.708.505.000,00	8.654.738.000,00	53.767.000,00
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	321.720.000,00	318.578.000,00	3.142.000,00
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.973.080.000,00	2.916.980.000,00	56.100.000,00
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.944.905.000,00	23.535.053.000,00	409.852.000,00
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	50.957.408.000,00	50.057.829.000,00	899.579.000,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.000,00	(1.000,00)
TOTAL		**86.905.618.000,00**	**85.577.098.000,00**	**1.328.520.000,00**

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya kurang catat estimasi pendapatan PNBP, baik umum maupun fungsional pada Aplikasi SAKTI;
2. Terdapat satuan kerja yang mencatat estimasi pendapatan pada akun di luar ketentuan Mahkamah Agung, yaitu akun 425122 dan 425911:
   a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)
      Terdapat dua satuan kerja yang mencatat estimasi pendapatan untuk akun 425122 pada Aplikasi SAKTI, yaitu Pengadilan Tinggi Kendari (Rp74.500.000,00), dan Badan Pengawasan (Rp19.419.000,00).
   b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)
      Terdapat satu satuan kerja yang mencatat estimasi pendapatan untuk akun 425911 pada Aplikasi SAKTI yaitu Badan Pengawasan.

Jika dilihat dari pencatatan estimasi pendapatan per satuan kerja, terdapat 58 satuan kerja yang memiliki selisih akibat perbedaan nilai antara target pada SatuDJA dan estimasi pendapatan pada Aplikasi SAKTI:

No	KODE ES 1	KODE SATKER	KODE WILAYAH	SATUAN KERJA	Target Pendapatan SatuDJA	Estimasi Pendapatan SAKTI	Selisih
1	00507	663136	0199	BADAN PENGAWASAN	0,00	19.420.000,00	(19.420.000,00)
2	00501	663161	0100	PENGADILAN MILITER UTAMA	0,00	25.251.000,00	(25.251.000,00)
3	00501	097666	0200	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	0,00	32.360.000,00	(32.360.000,00)
4	00501	097844	0300	PENGADILAN NEGERI JEPARA	4.101.000,00	10.000.000,00	(5.899.000,00)
5	00501	400973	0300	PENGADILAN AGAMA KUDUS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6	00501	401002	0300	PENGADILAN AGAMA BLORA	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)
7	00501	403021	0300	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	0,00	72.000,00	(72.000,00)
8	00501	547657	0400	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	12.326.000,00	0,00	12.326.000,00
9	00501	401322	0500	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00
10	00501	401576	0500	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	415.000,00	0,00	415.000,00
11	00501	401658	0600	MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	3.174.000,00	0,00	3.174.000,00
12	00501	403061	0700	PENGADILAN AGAMA KISARAN	686.000,00	0,00	686.000,00
13	00501	401900	0800	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	6.809.000,00	0,00	6.809.000,00
14	00501	632001	0900	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00
15	00501	477368	1000	PENGADILAN NEGERI TEBO	4.026.000,00	0,00	4.026.000,00
16	00501	401943	1100	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	104.000,00	0,00	104.000,00
17	00501	547678	1200	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	13.530.000,00	0,00	13.530.000,00
18	00501	099087	1300	PENGADILAN NEGERI SINTANG	0,00	15.890.000,00	(15.890.000,00)
19	00501	099120	1400	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	15.814.000,00	0,00	15.814.000,00
20	00501	401918	1400	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	657.000,00	0,00	657.000,00
21	00501	402452	1400	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
22	00501	400534	1800	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	6.882.000,00	54.586.000,00	(47.704.000,00)
23	00501	681443	2000	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
24	00501	576253	2000	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	18.490.000,00	92.990.000,00	(74.500.000,00)
25	00501	307729	2000	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	3.533.000,00	0,00	3.533.000,00
26	00501	402710	2100	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	11.307.000,00	0,00	11.307.000,00
27	00501	614890	2500	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	10.472.000,00	0,00	10.472.000,00
28	00501	664522	2800	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	9.498.000,00	0,00	9.498.000,00
29	00501	099769	2800	PENGADILAN NEGERI SOASIU	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00
30	00501	307801	2800	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	0,00	654.000,00	(654.000,00)
31	00501	672948	3200	PENGADILAN NEGERI NATUNA	452.000,00	0,00	452.000,00
32	00501	099642	3400	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00
33	00501	307644	3400	PENGADILAN AGAMA MAJENE	580.000,00	1.392.000,00	(812.000,00)
34	00501	531823	0200	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	74.193.000,00	0,00	74.193.000,00
35	00503	099099	0300	PENGADILAN NEGERI KENDAL	51.511.000,00	0,00	51.511.000,00
36	00503	099104	0300	PENGADILAN NEGERI JEPARA	37.092.000,00	39.592.000,00	(2.500.000,00)
37	00503	099194	0700	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	18.025.000,00	22.320.000,00	(4.295.000,00)
38	00503	099227	1100	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	33.338.000,00	0,00	33.338.000,00
39	00503	099250	1400	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	17.828.000,00	0,00	17.828.000,00
40	00503	099255	1500	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
41	00503	400283	1500	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	26.568.000,00	0,00	26.568.000,00
42	00503	400535	1800	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	860.000,00	1.200.000,00	(340.000,00)
43	00503	403431	2100	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
44	00503	400560	2300	PENGADILAN TINGGI MATARAM	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
45	00503	664523	2800	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	690.000,00	0,00	690.000,00
46	00503	099770	2800	PENGADILAN NEGERI SOASIU	6.783.000,00	0,00	6.783.000,00
47	00503	403435	2800	PENGADILAN NEGERI BOBONG	700.000,00	0,00	700.000,00
48	00503	526707	3200	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	0,00	2.410.000,00	(2.410.000,00)
49	00504	400654	0100	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	627.876.000,00	0,00	627.876.000,00
50	00504	547658	0400	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	790.000,00	0,00	790.000,00
51	00504	401659	0600	MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	74.525.000,00	0,00	74.525.000,00
52	00504	402243	1100	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	307.516.000,00	0,00	307.516.000,00
53	00504	402453	1400	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	38.504.000,00	0,00	38.504.000,00
54	00504	309063	1800	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	40.738.000,00	0,00	40.738.000,00
55	00504	309064	1800	PENGADILAN AGAMA POSO	19.689.000,00	26.997.000,00	(7.308.000,00)
56	00504	690175	3500	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	39.715.000,00	0,00	39.715.000,00
57	00505	526705	0100	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	12.911.000,00	0,00	12.911.000,00
58	00505	526751	1100	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	72.673.000,00	0,00	72.673.000,00

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 41 satuan kerja yang belum mencatat estimasi pendapatan pada SAKTI;
2. Terdapat 9 satuan kerja yang tidak memiliki target, namun telah melakukan pencatatan estimasi pendapatan pada SAKTI;
3. Terdapat 8 satuan kerja yang mencatat estimasi pendapatan pada SAKTI melebihi target yang sebenarnya.

Berikut merupakan data penggunaan kembali PNBP Mahkamah Agung Tahun 2024 per Unit Eselon I:

ESELON I	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA	PENGEMBALIAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	**Total**	**22.636.550.000,00**	**17.209.105.194,00**	**76,02%**	**5.419.957.801,00**	**(3.576.200,00)**
	Belanja Bahan	458.443.000,00	364.493.186,00	**79,51%**	93.949.009,00	0,00
	Belanja Jasa Profesi	120.800.000,00	91.750.000,00	**75,95%**	29.050.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.248.000.000,00	12.914.960.000,00	**74,88%**	4.333.040.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Biasa	1.416.256.000,00	866.225.436,00	**61,16%**	550.030.564,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.780.000,00	20.470.000,00	**46,76%**	23.310.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.169.524.000,00	1.921.650.444,00	**88,57%**	240.387.356,00	(3.576.200,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.179.747.000,00	1.029.556.128,00	**87,27%**	150.190.872,00	0,00
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	**Total**	**356.740.000,00**	**316.789.000,00**	**88,80%**	**39.951.000,00**	0,00
	Belanja Bahan	2.500.000,00	2.500.000,00	**100,00%**	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.740.000,00	288.800.000,00	**87,85%**	39.940.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.500.000,00	25.489.000,00	**99,96%**	11,00	0,00
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	**Total**	**7.816.746.000,00**	**7.813.144.122,00**	**99,95%**	**3.601.878,00**	0,00
	Belanja Jasa Lainnya	367.346.000,00	365.175.000,00	**99,41%**	2.171.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.949.000.000,00	6.948.670.210,00	**100,00%**	32.979,00	0,00
	Belanja Perjalanan Biasa	499.550.000,00	498.448.912,00	**99,78%**	1.101.088,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,00	850,00	**100,00%**	0,00	0,00
KEPANITERAAN	**Total**	**62.192.000,00**	**23.088.000,00**	**37,12%**	**39.104.000,00**	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.192.000,00	23.088.000,00	**37,12%**	39.104.000,00	0,00
GRAND TOTAL		**30.872.228.000,00**	**25.362.126.316,00**	**82,15%**	**5.502.614.679,00**	**(3.576.200,00)**

Berdasarkan data diatas, realisasi atas penggunaan kembali PNBP Mahkamah Agung Tahun 2024 sebesar Rp25.362.126.316,00 atau 82,15% dari total pagu penggunaan kembali sebesar Rp30.872.228.000,00. Realisasi ini merupakan hasil proses revisi penambahan anggaran yang baru selesai di Kementerian Keuangan pada akhir Triwulan III.

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp105.803.944.468,00

B.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp105.803.944.468,00 atau mencapai 123,64 persen dari estimasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp85.577.098.000,00.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	31 Desember 2024				
		Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
4251	**Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	395.428.800,00	0,00	395.428.800,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	93.919.000,00	4.981.342.755,00	0,00	4.981.342.755,00	5.303,87
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	1.576.800,00	0,00	1.576.800,00	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.654.738.000,00	9.753.106.252,00	7.448.172,00	9.745.658.080,00	112,60
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	228.465.805,00	0,00	228.465.805,00	0,00
4252	**Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum**					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	318.578.000,00	100.380.000,00	0,00	100.380.000,00	31,51
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.916.980.000,00	2.916.160.000,00	420.000,00	2.915.740.000,00	99,96
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.535.053.000,00	23.786.760.000,00	980.000,00	23.785.780.000,00	101,07
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	50.057.829.000,00	48.345.734.113,00	3.674.000,00	48.342.060.113,00	96,57
4257	**Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan**					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	243.816.177,00	0,00	243.816.177,00	0,00
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0,00	376.798,00	0,00	376.798,00	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	46.742.494,00	0,00	46.742.494,00	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	36.252.226,00	0,00	36.252.226,00	0,00
4258	**Pendapatan Denda**					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	5.328.918.759,00	0,00	5.328.918.759,00	0,00
4259	**Pendapatan Lain-Lain**					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.000,00	655.118.420,00	0,00	655.118.420,00	65.511.842,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	960.793.485,00	0,00	960.793.485,00	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	7.772.360.191,00	1.991.018,00	7.770.369.173,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	245.582.450,00	0,00	245.582.450,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	19.967.133,00	425.000,00	19.542.133,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**85.577.098.000,00**	**105.818.882.658,00**	**14.938.190,00**	**105.803.944.468,00**	**123,64**

Perbandingan rincian realisasi PNBP Mahkamah Agung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBP

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi PNBP		Kenaikan/Penurunan	
		2024	2023	(Rp)	%
4251	**Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**				
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	395.428.800,00	428.470.848,00	(33.042.048,00)	(7,71)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.981.342.755,00	2.463.490.238,00	2.517.852.517,00	102,21
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.576.800,00	3.350.099,00	(1.773.299,00)	(52,93)
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	9.745.658.080,00	8.931.658.089,00	813.999.991,00	9,11
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	228.465.805,00	0,00	228.465.805,00	100,00
4252	**Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum**				
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.380.000,00	219.310.000,00	(118.930.000,00)	(54,23)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.915.740.000,00	2.926.702.500,00	(10.962.500,00)	(0,37)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.785.780.000,00	23.652.195.000,00	133.585.000,00	0,56
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.342.060.113,00	50.923.417.433,00	(2.581.357.320,00)	(5,07)
4257	**Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan**				
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	243.816.177,00	56.848.101,00	186.968.076,00	328,89
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	376.798,00	3.478,00	373.320,00	10.733,76
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	46.742.494,00	26.550.000,00	20.192.494,00	76,05
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	36.252.226,00	0,00	36.252.226,00	100,00
4258	**Pendapatan Denda**				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.328.918.759,00	2.141.063.695,00	3.187.855.064,00	148,89
4259	**Pendapatan Lain-Lain**				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	655.118.420,00	1.750.356.557,00	(1.095.238.137,00)	(62,57)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	960.793.485,00	2.434.843.800,00	(1.474.050.315,00)	(60,54)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.770.369.173,00	6.077.638.315,00	1.692.730.858,00	27,85
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	245.582.450,00	248.223.579,00	(2.641.129,00)	(1,06)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	997.770,00	(997.770,00)	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	19.542.133,00	557.389,00	18.984.744,00	3.406,01
Jumlah		**105.803.944.468,00**	**102.285.676.891,00**	**3.518.267.577,00**	**3,44**

Realisasi PNBP untuk periode 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.518.267.577,00 atau 3,44 persen.

Adapun kenaikan/penurunan ini antara lain:

1. Kenaikan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan banyak satuan kerja yang melakukan penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah dihentikan penggunaannya melalui mekanisme lelang;
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811), hal ini dikarenakan adanya penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Badan Pengawasan, serta tingginya penerimaan atas denda tersebut yang disebabkan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913), hal ini dikarenakan meningkatnya penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Badan Pengawasan.

Berdasarkan data diatas, terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp14.938.190,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	0500	401338	Pengadilan Agama Jember	Rp1.700.000,00	Terdapat kelebihan atas pembayaran PNBP yang timbul dari perkara.
2	504	0300	401087	Pengadilan Agama Cilacap	Rp1.348.000,00	
3	504	2600	690133	Pengadilan Agama Lebong	Rp252.000,00	
4	504	2000	690086	Pengadilan Agama Andoolo	Rp374.000,00	
Total					**Rp3.674.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	0300	98015	Pengadilan Negeri Cilacap	Rp425.000,00	Kelebihan Belanja Tunjangan Khusus Papua Bulan Maret 2024 atas 1 orang pegawai.
Total					**Rp425.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	1700	401925	Pengadilan Negeri Melonguane	Rp1.991.018,00	Terdapat kesalahan setoran temuan BPK atas pajak tapi terinput akun 425913.
Total					**Rp1.991.018,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	504	0200	400751	Pengadilan Agama Cirebon	Rp420.000,00	Terdapat kelebihan setor karena adanya kesalahan perekaman pada kode billing.
Total					**Rp420.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	504	0600	401659	Mahkamah Syar'iyah Takengon	Rp650.000,00	Terdapat kelebihan setor atas pendapatan ongkos Perkara dan pendaptan kejaksaan dan peradilan lainnya.
2	504	2000	690086	Pengadilan Agama Andoolo	Rp330.000,00	
Total					**Rp980.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	1700	307225	Pengadilan Agama Manado	Rp179.800,00	Kelebihan atas pembayaran PNBP Sewa Rumah Dinas karena PPABP belum update data aplikasi Gaji atas pegawai yang mutasi.
2	501	2000	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	Rp160.000,00	
3	501	1700	402681	Pengadilan Tinggi Agama Manado	Rp2.636.800,00	
4	501	2300	402788	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	Rp924.000,00	
5	501	2600	672994	Pengadilan Negeri Bintuhan	Rp505.200,00	
6	501	0100	400647	Pengadilan Agama Jakarta Timur	Rp10.400,00	
7	501	1200	402644	Pengadilan Agama Kalianda	Rp86.622,00	
8	501	0900	401908	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp162.219,00	
9	506	0199	610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	Rp478.400,00	
10	501	0200	531823	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Rp27.500,00	
11	501	0200	400766	Pengadilan Agama Indramayu	Rp71.850,00	
12	501	1700	526734	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	Rp608.454,00	
13	501	1900	307445	Pengadilan Agama Maros	Rp259.876,00	
14	501	0200	400477	Pengadilan Negeri Sumber	Rp239.100,00	
15	501	0500	401508	Pengadilan Agama Ngawi	Rp106.260,00	
16	501	3500	526722	Pengadilan Tinggi Agama	Rp739.200,00	

				Kalimantan Utara		
17	501	2200	526724	Pengadilan Tinggi Agama Bali	Rp118.800,00	
18	501	3000	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	Rp133.691,00	
Total					**Rp7.448.172,00**	
Grand Total					**Rp14.938.190,00**	

Selain penjelasan diatas, terdapat Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar Rp7.770.369.173,00 pada 37 satuan kerja, dan atas transaksi ini sudah dilakukan koreksi pada aset serta jurnal manual pada modul GLP.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan terdapat realisasi akun PNBP yang tidak sesuai dengan tusi Mahkamah Agung, antara lain:

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan - Jasa Giro (425764) sebesar Rp243.816.177,00,00 pada 11 satuan kerja merupakan pendapatan atas bunga bank yang didapat ketika pembukaan rekening baru (Proses TNP selesai H+1 Bulan).

No	Kodees1	Kode wil	Kode satker	Nama satker	nilai
1	501	1100	98963	Pengadilan Negeri Baturaja	Rp1.863.670,00
2	501	1600	401924	Pengadilan Negeri Penajam	Rp568.765,00
3	503	100	99064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Rp115.847.665,00
4	503	700	99199	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	Rp3.741.251,00
5	503	1000	99220	Pengadilan Negeri Jambi	Rp1.795.620,00
6	503	1100	99227	Pengadilan Negeri Kayuagung	Rp79.617.136,00
7	503	1400	99248	Pengadilan Negeri Muara Tewe	Rp131.770,00

8	503	700	400371	Pengadilan Negeri Simalungun	Rp1.467.118,00
9	503	2900	417845	Pengadilan Negeri Pandeglang	Rp3.164,00
10	504	1700	401996	Pengadilan Agama Lolak	Rp3.102,00
11	503	900	99215	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp38.776.916,00
Total					**Rp243.816.177,00**

2. Pendapatan dari Penutupan Rekening (425765) sebesar Rp376.798,00 pada 2 satuan kerja, antara lain:
   a. Pengadilan Tinggi Palembang (005.01.1100.098938) sebesar Rp45.000,00. Merupakan bunga yang timbul akibat ditutupnya rekening bendahara pengeluaran yang kemudian disetorkan ke kas negara.
   b. Pengadilan Agama Pontianak (005.04.1300.402362) sebesar Rp331.798,00. Merupakan bunga yang timbul akibat penutupan salah satu rekening RPL DIPA 04 pada Bank Kalbar, pihak bank memberikan jasa giro ke satuan kerja dan disetor ke kas negara.
3. Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) sebesar Rp19.542.133,00 terdapat pada 10 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengadilan Negeri Bangkalan (005.01.0500.098413) sebesar Rp2,00. Merupakan kelebihan atas penyetoran pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu. Satuan kerja seharusnya menyetorkan sebesar Rp5.416.824,00, akan tetapi melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5.416.826,00. Sehingga atas kelebihan tersebut dilakukan ralat ke akun 425999.
   b. Pengadilan Negeri Rantau Prapat (005.01.0700.098675) sebesar Rp3,00. Merupakan kelebihan atas penyetoran pengembalian uang persediaan. Satuan kerja seharusnya menyetorkan sebesar Rp8.897.146,00, akan tetapi melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp8.897.149,00. Sehingga atas kelebihan tersebut dilakukan ralat ke akun 425999.
   c. Pengadilan Agama Mamuju (005.01.3400.307651) sebesar Rp9.000,00. Merupakan kesalahan penggunaan akun dalam penyetoran pengembalian TUP yang seharusnya menggunakan 815511 akan tetapi menggunakan

815515. Atas kesalahan penyetoran tersebut kemudian diralat ke akun 425999.

d. Pengadilan Agama Kolaka (005.01.2000.307690) sebesar Rp19.650,00.
   Merupakan kelebihan atas penyetoran pengembalian uang persediaan.

e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram (005.01.2300.526736) sebesar Rp13.233,00.
   Merupakan kelebihan atas penyetoran pengembalian tambahan uang persediaan. Satuan kerja seharusnya menyetorkan sebesar Rp6.108.720,00, akan tetapi melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp6.121.953,00. Sehingga atas kelebihan tersebut dilakukan ralat ke akun 425999.

f. Pengadilan Negeri Kraksaan (005.03.0500.099158) sebesar Rp28.400,00.
   Merupakan pendapatan yang berasal dari kesalahan penggunaan kode satuan kerja di dalam penyetoran pengembalian sisa UP. Satuan kerja harusnya menggunakan kode satker DIPA 01 BUA, akan tetapi melakukan penyetoran ke kas negara menggunakan kode akun DIPA Teknis. Kemudian satuan kerja melakukan penyetoran lagi menggunakan kode satker yang benar. Atas kesalahan penyetoran pada kode satker DIPA Teknis tersebut, kemudian dilakukan ralat ke akun 425999.

g. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (005.03.3200.099218) sebesar Rp19.324.693,00.
   Merupakan uang tak bertuan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang kemudian disetorkan ke kas negara.

h. Pengadilan Negeri Malili (005.03.1900.673014) sebesar Rp69.600,00.
   Merupakan kelebihan atas penyetoran pengembalian tambahan uang persediaan. Satuan kerja seharusnya menyetorkan sebesar Rp8.077.720,00, akan tetapi melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp8.147.320,00. Sehingga atas kelebihan tersebut dilakukan ralat ke akun 425999.

i. Mahkamah Syar'iyah Aceh (005.04.0600.401583) sebesar Rp5.000,00.
   Merupakan kelebihan atas penyetoran sisa UP. Satuan kerja melakukan 2 kali penyetoran tehadap sisa Uang Persediaan (UP) bulan Maret Tahun 2024.

j. Badan Litbang Diklat Kumdil (005.06.0199.610378) sebesar Rp72.552,00.
   Merupakan kelebihan atas penyetoran sisa tambahan uang persediaan. Satuan kerja seharusnya menyetorkan sebesar Rp72.522,00, akan tetapi melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp72.552,00. Karena salah nominal penyetoran, kemudian satuan kerja melakukan penyetoran ulang dengan angka yang sesuai. Atas kesalahan penyetoran sebelumnya, kemudian diralat oleh satuan kerja ke akun 425999.

B.2. Belanja

Alokasi Pagu Anggaran pada Mahkamah Agung Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024

   Mahkamah Agung Tahun 2024 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp11.925.492.498.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

   Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Alokasi Pagu Anggaran
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	185.260.971.000,00
005.WA	Program Dukungan Manajemen	11.740.231.527.000,00
Jumlah		**11.925.492.498.000,00**

Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Eselon I	Rincian Alokasi Pagu Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000,00
005.02	Kepaniteraan	222.006.897.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	149.234.382.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	135.205.164.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	31.161.153.000,00
005.06	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan	249.828.011.000,00
005.07	Badan Pengawasan	88.013.162.000,00
Jumlah		**11.925.492.498.000,00**

Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Kode	Jenis Belanja	Rincian Alokasi Pagu Anggaran
51	Belanja Pegawai	7.765.344.168.000,00
52	Belanja Barang	3.040.038.103.000,00
53	Belanja Modal	1.120.110.227.000,00
Jumlah		**11.925.492.498.000,00**

Berdasarkan Sumber Dana

(Dalam Rupiah)

Kode	Sumber Dana	Rincian Alokasi Pagu Anggaran
A	**Rupiah Murni**	
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	11.707.479.325.000,00
	Jumlah Pagu Rupiah Murni	**11.888.407.746.000,00**
D	**PNBP**	
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.332.550.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	26.539.678.000,00
	Jumlah Pagu PNBP	**30.872.228.000,00**
J	**HIBAH**	
WA	Program Dukungan Manajemen	6.212.524.000,00
	Jumlah Pagu Hibah	**6.212.524.000,00**
Total Pagu		**11.925.492.498.000,00**

a. Alokasi pagu anggaran sebagian besar digunakan untuk belanja operasional, yaitu: pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja untuk ASN dan hakim, serta operasional satuan kerja pengadilan;

b. Pagu anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024 mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan Tahun 2023 untuk memenuhi:

   1) Belanja pegawai atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024;

   2) Belanja modal atas penyelesaian sisa pembangunan gedung kantor, serta kontrak yang sifatnya *multi years* dari tahun sebelumnya;

   3) Belanja dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan peradilan menuju modernisasi peradilan berbasis elektronik, pembebasan biaya perkara, sidang keliling, posbakum, dan *zitting plaats*.

2. Perubahan Rincian Anggaran

   Terdapat perubahan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024 pada Mahkamah Agung, hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan rincian anggaran tersebut sebagai berikut:

Penyesuaian Pagu Anggaran Tahun 2024 per Program

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Revisi
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,00	4.332.550.000,00	185.260.971.000,00
005.WA	Program Dukungan Manajemen	11.722.839.691.000,00	17.391.836.000,00	11.740.231.527.000,00
Jumlah		**11.903.768.112.000,00**	**21.724.386.000,00**	**11.925.492.498.000,00**

Penyesuaian Pagu Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Revisi
Belanja Pegawai	8.102.162.328.000,00	(336.818.160.000,00)	7.765.344.168.000,00
Belanja Barang	2.704.718.853.000,00	335.319.250.000,00	3.040.038.103.000,00
Belanja Modal	1.096.886.931.000,00	23.223.296.000,00	1.120.110.227.000,00
Jumlah	**11.903.768.112.000,00**	**21.724.386.000,00**	**11.925.492.498.000,00**

3. Penyesuaian Belanja yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Tahun 2024 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, perihal: *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024;
   b. Kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50.148.936.040.000,00 (Lima Puluh Triliun Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian besaran per Kementerian/Lembaga;
   c. Ketentuan dalam Kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2024 sebagai berikut:
      1) Bersumber dari dana Rupiah Murni (RM);
      2) Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan *Automatic Adjustment* sebagai berikut:
         a) Belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219);

b) Belanja Modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda;

c) Kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

3) Anggaran yang dikecualikan dalam *Automatic Adjustment* sebagai berikut:

a) Belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako;

b) Belanja terkait tahapan Pemilu;

c) Belanja terkait IKN;

d) Belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak;

e) Belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*/AP);

f) Belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi) /Kementerian/Lembaga Baru;

g) Belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

d. Mekanisme pelaksanaan *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2024, sebagai berikut:

1) Kementerian/Lembaga mengusulkan Kegiatan/KRO/RO/akun yang akan diblokir pada catatan halaman IV A DIPA sesuai dengan besaran *Automatic Adjustment* masing-masing Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir dan ditandai dengan memilih kode 9 pada aplikasi SAKTI;

2) Pengusulan sebagaimana pada huruf a di atas, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Surat usulan revisi *Automatic Adjusment* disampaikan kepada Dirjen Anggaran paling lambat pada tanggal 26 Januari 2024.

e. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 Kementerian/Lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA dengan besaran sesuai lampiran;

f. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usul relaksasi *Automatic Adjustment* pada Semester II tahun 2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

4. Adapun pelaksanaan *Automatic Adjustment* di lingkungan Mahkamah Agung pada Tahun 2024, antara lain:
   a. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 135/SEK/RA1.8/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, Perihal: Pemberitahuan *Automatic Adjustment* TA 2024 yang ditujukan untuk Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun yang dituangkan dalam surat ini, antara lain:
      1) Mahkamah Agung dikenakan *Automatic Adjustment* TA 2024 sebesar Rp886.688.954.000,00;
      2) Berdasarkan evaluasi atas *Automatic Adjustment* tersebut, diantaranya berasal dari belanja modal Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp402.441.441.000,00 dengan cakupan sebagai berikut:
         a) Belanja modal pembangunan gedung;
         b) Belanja modal renovasi dan perluasan gedung;
         c) Belanja modal pemenuhan sarling;
         d) Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor;
         e) Belanja modal *meubelair* gedung kantor pembangunan TA 2023-2024.
   b. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 136/SEK/RA1.8/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, Perihal: *Automatic Adjustment* Mahkamah Agung Republik Indonesia TA 2024 yang ditujukan untuk Para Unit Eselon I. Adapun yang dituangkan dalam surat ini, antara lain:
      1) Mahkamah Agung dikenakan *Automatic Adjustment* TA 2024 sebesar Rp886.688.954.000,00 yang dihitung dengan menggunakan proporsi presentase belanja perjalanan dinas pada 7 (tujuh) Unit Eselon I;
      2) Unit Eselon I melakukan pemblokiran pada kegiatan yang sifatnya tidak mendesak atau dapat ditunda khususnya pada 10 akun, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), belanja barang non operasional lainnya

(521219), serta tidak diperkenankan mengambil dari kegiatan yang sifatnya menjadi Prioritas Nasional.

Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Jumlah (Rp)
Program Dukungan Manajemen	
Badan Urusan Administrasi	843.590.929.000,00
Kepaniteraan	1.719.641.000,00
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10.000.000.000,00
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	10.000.000.000,00
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	1.764.000.000,00
Badan Pengawasan	15.190.027.000,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan	4.424.357.000,00
Jumlah	**886.688.954.000,00**

c. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 137/SEK/RA1.8/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, Perihal: *Automatic Adjustment* Mahkamah Agung Republik Indonesia TA 2024 yang ditujukan untuk Para Kepala Biro Badan Urusan Administrasi. Adapun *Automatic Adjustment* yang dilakukan pada Badan Urusan Administrasi, antara lain:

(Dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Jumlah (Rp)
Program Dukungan Manajemen	
Biro Hukum dan Humas	771.266.000,00
Biro Kepegawaian	621.128.000,00
Biro Keuangan	90.972.400.000,00
Biro Perencanaan dan Organisasi	1.472.087.000,00
Biro Perlengkapan	754.462.000,00
Biro Sekretariat Pimpinan	1.575.000.000,00
Biro Umum	211.852.000,00
Jumlah	**96.378.195.000,00**

d. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3471/SEK/RA1.8/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, Perihal: Usul Revisi Buka Blokir Mahkamah Agung RI TA 2024 yang ditujukan untuk Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas:

1) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-580/MK.02/2024 tanggal 9 Juli 2024, Hal: Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2024;
2) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-171/MK.02/2024 tanggal 29 Juli 2024, Hal: Penyampaian Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* Mahkamah Agung RI TA 2024;
3) Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-336/AG/AG.5/2024 tanggal 7 Agustus 2024, Hal: Pengesahan Revisi Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

NO	ESELON	USULAN	SELISIH KURANG	SETUJU AA		KETERANGAN
		886.688.954.000,00	15.141.871.000,00		871.547.083.000,00	
1	KEPANITERAAN	1.719.641.000,00	-		1.719.641.000,00	
2	BADILUM	10.000.000.000,00	-		10.000.000.000,00	
3	BADILAG	10.000.000.000,00	-		10.000.000.000,00	
4	MILTUN	1.764.000.000,00	-		1.764.000.000,00	
5	BAWAS	4.424.357.000,00	-		4.424.357.000,00	
6	DIKLAT	15.190.027.000,00	1.872.483.000,00		13.317.544.000,00	DIKLATSAR, OPERASIONAL TUSI
7	BUA				830.321.541.000,00	
a.	SATKER BUA	402.441.441.000,00	7.500.000.000,00	394.941.441.000,00		LANJUTAN PEMB GEDUNG DAN SARPRAS
b.	HUMAS	771.266.000,00	182.266.000,00	589.000.000,00		
c.	KEPEGAWAIAN	621.128.000,00	-	621.128.000,00		
d.	KEUANGAN	435.743.693.000,00	5.015.228.000,00	430.728.465.000,00		BEL. PEGAWAI, OPERASIONAL DAN TUSI
e.	RENOG	1.472.087.000,00	515.410.000,00	956.677.000,00		
f.	ROKAP	754.462.000,00	-	754.462.000,00		
g.	SESPIM	1.575.000.000,00	-	1.575.000.000,00		
h.	UMUM	211.852.000,00	56.484.000,00	155.368.000,00		

e. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024, Hal: Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Lembaga TA 2024. Adapun rincian penghematan, antara lain:

Kode	Unit Eselon I	Pagu Perjadin	Pagu Blokir Perjadin	Pagu Netto
005.01	Badan Urusan Administrasi	286.860.385.000,00	18.527.562.000,00	268.332.823.000,00
005.02	Kepaniteraan	11.085.987.000,00	857.103.000,00	10.228.884.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	51.410.449.000,00	2.111.973.000,00	49.298.476.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	69.482.228.000,00	1.517.360.000,00	67.964.868.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan TUN	14.656.859.000,00	357.423.000,00	14.299.436.000,00
005.06	Badan Litbang Diklat Kumdil	85.973.450.000,00	5.984.599.000,00	79.988.851.000,00
005.07	Badan Pengawasan	29.549.762.000,00	577.411.000,00	28.972.351.000,00
Jumlah		**549.019.120.000,00**	**29.933.431.000,00**	**519.085.689.000,00**

Posisi per 31 Desember 2024, pagu blokir per Eselon I per jenis belanja, antara lain:

Kode	Unit Eselon I	Pagu Akhir	Nilai Blokir	Pagu Neto
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000,00	26.526.764.000,00	11.023.516.965.000,00
51	Belanja Pegawai	7.477.623.727.000,00	0,00	7.477.623.727.000,00
52	Belanja Barang	2.501.057.478.000,00	18.849.160.000,00	2.482.208.318.000,00
53	Belanja Modal	1.071.362.524.000,00	7.677.604.000,00	1.063.684.920.000,00
005.02	Kepaniteraan	222.006.897.000,00	857.103.000,00	221.149.794.000,00
51	Belanja Pegawai	188.031.865.000,00	0,00	188.031.865.000,00
52	Belanja Barang	33.689.366.000,00	857.103.000,00	32.832.263.000,00
53	Belanja Modal	285.666.000,00	0,00	285.666.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	149.234.382.000,00	2.112.891.000,00	147.121.491.000,00
51	Belanja Pegawai	9.633.715.000,00	0,00	9.633.715.000,00
52	Belanja Barang	131.816.667.000,00	2.112.891.000,00	129.703.776.000,00
53	Belanja Modal	7.784.000.000,00	0,00	7.784.000.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	135.205.164.000,00	1.607.360.000,00	133.597.804.000,00
51	Belanja Pegawai	7.380.852.000,00	0,00	7.380.852.000,00
52	Belanja Baran	110.420.188.000,00	1.607.360.000,00	108.812.828.000,00
53	Belanja Modal	17.404.124.000,00	0,00	17.404.124.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan TUN	31.161.153.000,00	357.423.000,00	30.803.730.000,00
51	Belanja Pegawai	5.744.306.000,00	0,00	5.744.306.000,00
52	Belanja Barang	24.669.830.000,00	357.423.000,00	24.312.407.000,00
53	Belanja Modal	747.017.000,00	0,00	747.017.000,00
005.06	Badan Litbang Diklat Kumdil	249.828.011.000,00	7.327.599.000,00	242.500.412.000,00
51	Belanja Pegawai	27.461.430.000,00	0,00	27.461.430.000,00
52	Belanja Baran	204.382.015.000,00	5.984.599.000,00	198.397.416.000,00
53	Belanja Modal	17.984.566.000,00	1.343.000.000,00	16.641.566.000,00
005.07	Badan Pengawasan	88.013.162.000,00	577.411.000,00	87.435.751.000,00
51	Belanja Pegawai	49.468.273.000,00	0,00	49.468.273.000,00
52	Belanja Barang	34.000.939.000,00	577.411.000,00	33.423.528.000,00
53	Belanja Modal	4.543.950.000,00	0,00	4.543.950.000,00
Grand Total		**11.925.492.498.000,00**	**39.366.551.000,00**	**11.886.125.947.000,00**

Realisasi Belanja Negara Rp11.627.225.171.227,00

Realisasi belanja Mahkamah Agung pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.627.225.171.227,00 atau 97,50 persen dari anggaran belanja sebesar Rp11.925.492.498.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Mahkamah Agung per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.765.344.168.000,00	7.568.246.770.052,00	97,46
Belanja Barang	3.040.038.103.000,00	2.959.082.598.393,00	97,34
Belanja Modal	1.120.110.227.000,00	1.104.866.291.401,00	98,64
Total Belanja Bruto	**11.925.492.498.000,00**	**11.632.195.659.846,00**	**97,54**
Pengembalian Belanja	0,00	(4.970.488.619,00)	0,00
Jumlah	**11.925.492.498.000,00**	**11.627.225.171.227,00**	**97,50**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program		31 Desember 2024		%
		Anggaran	Realisasi	
01	**Rupiah Murni**			
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,00	176.763.672.879,00	97,70
WA	Program Dukungan Manajemen	11.707.479.325.000,00	11.419.050.860.535,00	97,54
Jumlah Belanja Rupiah Murni		**11.888.407.746.000,00**	**11.595.814.533.414,00**	**97,54**
04	**PNBP**			
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**4.332.550.000,00**	**3.432.171.981,00**	**79,22**
WA	Program Dukungan Manajemen	26.539.678.000,00	21.933.697.535,00	82,64
Jumlah Belanja PNBP		**30.872.228.000,00**	**25.365.869.516,00**	**82,16**
10	**Hibah Langsung Dalam Negeri**			
WA	Program Dukungan Manajemen	6.212.524.000,00	6.044.768.297,00	97,30
Jumlah Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri		**6.212.524.000,00**	**6.044.768.297,00**	**97,30**
Jumlah		**11.925.492.498.000,00**	**11.627.225.171.227,00**	**97,50**

Perbandingan rincian realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
Belanja Pegawai	7.565.805.289.661,00	7.068.570.734.587,00	497.234.555.074,00	7,03
Belanja Barang	2.957.012.815.204,00	2.697.845.237.941,00	259.167.577.263,00	9,61
Belanja Modal	1.104.407.066.362,00	1.827.810.385.072,00	(723.403.318.710,00)	(39,58)
Jumlah Belanja	**11.627.225.171.227,00**	**11.594.226.357.600,00**	**32.998.813.627,00**	**0,28**

Realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.998.813.627,00 atau sebesar 0,28 persen dibandingkan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Pegawai Rp7.565.805.289.661,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.565.805.289.661,00 dan Rp7.068.570.734.587,00.

Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp497.234.555.074,00 atau 7,03 persen dari realisasi belanja pegawai 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya pembayaran 100% untuk Tunjangan Kinerja atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, serta peningkatan belanja pegawai pada pembayaran gaji PPPK.

Perbandingan rincian realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.902.136.629.551,00	4.674.605.541.990,00	227.531.087.561,00	4,87
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	50.655.544.338,00	42.435.498.261,00	8.220.046.077,00	19,37
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	70.869.049.272,00	66.201.680.680,00	4.667.368.592,00	7,05
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	300.775.200,00	298.268.740,00	2.506.460,00	0,84
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	15.992.912.487,00	1.994.229.989,00	13.998.682.498,00	701,96
5122	Belanja Lembur	700.488.000,00	639.167.100,00	61.320.900,00	9,59
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	2.527.591.371.204,00	2.284.382.699.363,00	243.208.671.841,00	10,65
Realisasi Belanja Bruto		**7.568.246.770.052,00**	**7.070.557.086.123,00**	**497.689.683.929,00**	**7,04**
Pengembalian Belanja		(2.441.480.391,00)	(1.986.351.536,00)	(455.128.855,00)	22,91
Realisasi Belanja Neto		**7.565.805.289.661,00**	**7.068.570.734.587,00**	**497.234.555.074,00**	**7,03**

Realisasi Belanja Barang Rp2.957.012.815.204,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.957.012.815.204,00 dan Rp2.697.845.237.941,00.

Realisasi belanja barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp259.167.577.263,00 atau 9,61 persen dari realisasi belanja barang 31 Desember 2023. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan pada belanja operasional dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan peradilan menuju modernisasi peradilan berbasis elektronik, pembebasan biaya perkara, sidang keliling, posbakum, dan *zitting plaats*.

Perbandingan rincian realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.107.991.486.258,00	964.646.579.984,00	143.344.906.274,00	14,86
5212	Belanja Barang Non Operasional	76.616.364.543,00	60.813.560.432,00	15.802.804.111,00	25,99
5218	Belanja Barang Persediaan	96.672.639.841,00	96.372.599.406,00	300.040.435,00	0,31
5221	Belanja Jasa	625.928.426.130,00	558.291.857.315,00	67.636.568.815,00	12,11
5231	Belanja Pemeliharaan	531.411.539.430,00	512.435.524.597,00	18.976.014.833,00	3,70
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	509.500.236.753,00	499.486.177.269,00	10.014.059.484,00	2,00
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	10.961.905.438,00	7.326.846.133,00	3.635.059.305,00	49,61
Realisasi Belanja Bruto		**2.959.082.598.393,00**	**2.699.373.145.136,00**	**259.709.453.257,00**	**9,62**
Pengembalian Belanja		(2.069.783.189,00)	(1.527.907.195,00)	(541.875.994,00)	35,47
Realisasi Belanja Neto		**2.957.012.815.204,00**	**2.697.845.237.941,00**	**259.167.577.263,00**	**9,61**

Terdapat beberapa penjelasan terkait penggunaan akun belanja barang sebagai berikut:

1. Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian (522162) pada Badan Litbang Diklat Kumdil (005.06.0199.610378) sebesar Rp4.419.164.000,00 merupakan anggaran yang tersedia untuk melakukan transaksi resiprokal berupa kerjasama dengan satuan kerja BLU dalam rangka mendukung kegiatan BSDK;
2. Terdapat penggunaan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (00501.0400.547657) sebesar Rp2.197.800,00 yang digunakan untuk pembayaran sewa VPS CCTV;
3. Terdapat penggunaan akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (522119) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulau Punjung (00501.0800.401907) sebesar Rp2.610.659,00 merupakan belanja untuk lisensi video conference (zoom meeting);
4. Terdapat realisasi belanja menggunakan akun selain Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811) yang membentuk barang persediaan pada Modul Komitmen SAKTI. Terhadap hal tersebut satuan kerja telah melakukan pendetailan sebagai Persediaan;
5. Terdapat realisasi belanja yang menggunakan akun selain Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811), dan tidak membentuk Persediaan maupun Aset Tetap tetapi dikelompokkan pada Modul Komitmen SAKTI sebagai Persediaan.

Satuan kerja sudah melakukan koreksi kuantitas untuk menghapus pencatatan persediaan pada Modul Persediaan SAKTI.

Realisasi Belanja Modal Rp1.104.407.066.362,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.104.407.066.362,00 dan Rp1.827.810.385.072,00.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp723.403.318.710,00 atau 39,58 persen dari realisasi belanja modal 31 Desember 2023. Penurunan belanja modal dikarenakan pada tahun 2025 alokasi yang disediakan hanya untuk pembangunan yang bersifat penyelesaian tahun sebelumnya atau *multi years*.

Perbandingan rincian realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	1.131.840.348,00	46.080.606.184,00	(44.948.765.836,00)	(97,54)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.467.540.317,00	329.637.829.438,00	(207.170.289.121,00)	(62,85)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	980.771.207.286,00	1.421.890.681.000,00	(441.119.473.714,00)	(31,02)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	495.703.450,00	30.900.419.626,00	(30.404.716.176,00)	(98,40)
Realisasi Belanja Bruto		**1.104.866.291.401,00**	**1.828.509.536.248,00**	**(723.643.244.847,00)**	**(39,58)**
Pengembalian Belanja		(459.225.039,00)	(699.151.176,00)	239.926.137,00	(34,32)
Realisasi Belanja Neto		**1.104.407.066.362,00**	**1.827.810.385.072,00**	**(723.403.318.710,00)**	**(39,58)**

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp1.131.840.348,00

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.131.840.348,00 dan Rp46.080.606.184,00.

Realisasi belanja modal tanah 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp44.948.765.836,00 atau 97,54 persen dari realisasi belanja modal tanah 31 Desember 2023.

Perbandingan rincian realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
531111	Belanja Modal Tanah	0,00	45.871.606.184,00	(45.871.606.184,00)	(100,00)
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.131.840.348,00	200.000.000,00	931.840.348,00	100,00
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto		**1.131.840.348,00**	**46.080.606.184,00**	**(44.948.765.836,00)**	**(97,54)**
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto		**1.131.840.348,00**	**46.080.606.184,00**	**(44.948.765.836,00)**	**(97,54)**

Perbandingan rincian realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024 dengan aset yang dicatat tidak dapat berbanding lurus dengan mutasi tanah karena realisasi belanja modal tanah tercatat sebagai mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terlebih dahulu, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
KDP Tanah	1.029.035.645,00	Realisasi Belanja Modal Tanah berupa aset KDP direalisasikan untuk Pengurukan dan Pematangan Tanah pada PN Sumenep
KDP Gedung	102.804.703,00	Realisasi Belanja Modal Tanah berupa aset KDP direalisasikan untuk Pengurukan dan Pematangan Tanah pada PN Sumenep
Total	**1.131.840.348,00**	

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp122.467.540.317,00

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp122.467.540.317,00 dan Rp329.455.232.368,00.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp206.987.692.051,00 atau 62,83 persen dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin 31 Desember 2023.

Perbandingan rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut antara lain:

Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.356.098.317,00	329.258.471.938,00	(206.902.373.621,00)	(62,84)
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0,00	59.978.000,00	(59.978.000,00)	(100,00)
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	111.442.000,00	319.379.500,00	(207.937.500,00)	(65,11)
Realisasi Belanja Bruto		**122.467.540.317,00**	**329.637.829.438,00**	**(207.170.289.121,00)**	**(62,85)**
Pengembalian Belanja		0,00	(182.597.070,00)	182.597.070,00	(100,00)
Realisasi Belanja Neto		**122.467.540.317,00**	**329.455.232.368,00**	**(206.987.692.051,00)**	**(62,83)**

Perbandingan rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 dengan aset yang dicatat tidak dapat berbanding lurus dengan mutasi peralatan dan mesin karena pencatatan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tidak hanya dicatat sebagai peralatan dan mesin, tetapi ada juga yang direalisasikan untuk menjadi aset tetap lain, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Peralatan dan Mesin	120.764.488.822,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sesuai sebagai peralatan dan mesin
Gedung Bangunan	108.665.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Gedung Bangunan
Jalan Jembatan, Irigasi, Jaringan	2.751.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai Pembelian Jalan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan
Konstruksi Dalam Pengerjaaan	1.390.855.400,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai Perolehan/Penambahan KDP
Ekstrakomptabel	200.780.095,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai pembelian Peralatan Mesin berupa aset ekstrakomptabel
Total	**122.467.540.317,00**	

Untuk rincian daftar satuan kerja dan transaksi pada SAKTI, disajikan secara lengkap pada lampiran LRA vs Pencatatan Aset.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp980.311. 982.247,00

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp980.311.982.247,00 dan Rp1.421.374.126.894,00.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp441.062.144.647,00 atau 31,03 persen dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada 31 Desember 2023.

Perbandingan rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut antara lain:

Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	734.216.061.397,00	1.289.342.873.194,00	(555.126.811.797,00)	(43,06)
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	65.787.036,00	(65.787.036,00)	(100,00)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	246.555.145.889,00	132.482.020.770,00	114.073.125.119,00	86,10
Realisasi Belanja Bruto		**980.771.207.286,00**	**1.421.890.681.000,00**	**(441.119.473.714,00)**	**(31,02)**
Pengembalian Belanja		(459.225.039,00)	(516.554.106,00)	57.329.067,00	(11,10)
Realisasi Belanja Neto		**980.311.982.247,00**	**1.421.374.126.894,00**	**(441.062.144.647,00)**	**(31,03)**

Perbandingan rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 dengan aset yang dicatat tidak dapat berbanding lurus dengan mutasi gedung dan bangunan karena pencatatan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tidak hanya dicatat sebagai gedung dan bangunan, namun tercatat juga pada akun-akun lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Tanah	49.815.000,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Pembelian Tanah
Peralatan dan Mesin	499.000.000,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Pembelian Peralatan Mesin
Gedung Bangunan	15.586.710.510,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Gedung Bangunan
Aset Tetap Lainnya	88.753.158,00	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan direalisasikan sebagai Pembelian Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaaan	961.058.002.215,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Perolehan/Penambahan KDP
Ekstrakomptabel	81.470.813,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai aset ekstrakomptabel
Selisih RPATA	3.407.455.590,00	Selisih nilai Rpata dengan utang pada pihak ketiga lainnya
Pengembalian Belanja Modal	- 459.225.039,00	Pengembalian Belanja Modal
Total	**980.311.982.247,00**	

Untuk rincian daftar satuan kerja dan transaksi pada SAKTI, disajikan secara lengkap pada lampiran LRA vs Pencatatan Aset.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada 31 Desember 2023.

Perbandingan rincian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 antara lain:

Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
534131	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigiasi, jaringan pada periode Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp495.703.450,00

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp495.703.450,00 dan Rp30.900.419.626,00.

Realisasi belanja modal lainnya pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp30.404.716.176,00 atau 98,40 persen dari realisasi belanja modal lainnya pada 31 Desember 2023.

Perbandingan rincian realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 antara lain:

Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	362.903.450,00	30.867.119.626,00	(30.504.216.176,00)	(98,82)
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	132.800.000,00	33.300.000,00	99.500.000,00	298,80
Realisasi Belanja Bruto		**495.703.450,00**	**30.900.419.626,00**	**(30.404.716.176,00)**	**(98,40)**
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto		**495.703.450,00**	**30.900.419.626,00**	**(30.404.716.176,00)**	**(98,40)**

Perbandingan rincian realisasi belanja modal lainnya Tahun Anggaran 2024 dengan aset yang dicatat tidak dapat berbanding lurus dengan mutasi aset tetap lainnya/aset lainnya karena pencatatan realisasi belanja modal lainnya tidak hanya dicatat sebagai aset tetap lainnya/aset lainnya, namun tercatat juga pada akun peralatan dan mesin serta KDP, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Peralatan dan Mesin	99.930.300,00	Belanja Modal Lainnya direalisasikan sebagai pembelian Peralatan Mesin
Aset Tetap Lainnya	197.981.650,00	Belanja Modal Lainnya direalisasikan sebagai pembelian Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaaan	99.500.000,00	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya direalisasikan sebagai KDP
Aset Tak Berwujud	98.291.500,00	Belanja Modal Lainnya direalisasikan sebagai pembelian Aset Tak Berwujud berupa aset Intrakomptabel senilai Rp64.991.500,00. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya direalisasikan sebagai Aset Tak Berwujud berupa aset Intrakomptabel senilai Rp33.300.000,00
Total	**495.703.450,00**	

Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Mahkamah Agung RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III, VI, dan VII, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional III – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas, 3 (tiga) kegiatan prioritas, yang tersebar di 3 (tiga) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp7.363.042.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.062.798.276,00 (95,92%) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Nama Satuan Kerja	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Ditjen Badan Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda / Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan (Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum)	1.226.675.000,00	1.186.067.142,00	97,00	Orang	240	267	111,00

Ditjen Badan Peradilan Agama	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan / Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu)	2.777.813.000,00	2.747.888.020,00	98,92	Perkara	7.226	7.686	106,37
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda / Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA)	3.358.554.000,00	3.128.843.114,00	93,00	Orang	160	159	99,00
Jumlah		**7.363.042.000,00**	**7.062.798.276,00**	**95,92**				

Prioritas Nasional VI – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp3.256.997.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.144.595.439,00 (97,00%) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Nama Satuan Kerja	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup / Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu)	3.256.997.000,00	3.144.595.439,00	97,00	Orang	80	83	104,00
Jumlah		**3.256.997.000,00**	**3.144.595.439,00**	**97,00**				

Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas, yang tersebar di 5 (lima) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp94.334.161.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.787.165.624,00 (98,47%) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Nama Satuan Kerja	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Badan Urusan Administrasi	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Pengembangan Aplikasi eCourt Upaya Hukum Kasasi dan PK)	494.100.000,00	493.946.451,00	99,97	Layanan	1	1	100,00

	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP))	1.931.900.000,00	1.929.044.842,00	99,85	Sistem	1	1	100,00
	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan)	1.500.000.000,00	1.497.846.106,00	99,86	Sistem	1	1	100,00
Ditjen Badan Peradilan Umum	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif)	1.744.960.000,00	1.743.655.892,00	99,93	Orang	350	350	100,00
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara)	538.390.000,00	217.896.845,00	40,47	Perkara	786	978	124,00
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Sidang di luar Gedung Pengadilan)	8.247.925.000,00	7.961.664.242,00	97,00	Perkara	6.580	6.384	97,02
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Layanan Pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum)	13.134.500.000,00	13.092.500.866,00	99,68	Orang	44.491	49.972	112,00
Ditjen Badan Peradilan Agama	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Layanan Pos bantuan hukum diLingkungan Peradilan Agama)	22.455.902.000,00	22.409.345.202,00	99,79	Orang	213.405	234.784	110,02
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara di Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara)	11.791.763.000,00	11.350.880.770,00	96,26	Perkara	25.197	26.841	106,52
Ditjen Badan Peradilan Agama	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung)	24.446.350.000,00	24.334.057.373,00	99,54	Perkara	37.194	39.026	104,93
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah)	824.701.000,00	824.689.027,00	100,00	Pedoman	1	1	100,00

Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara)	1.007.400.000,00	1.003.967.239,00	99,66	Orang	2.928	3.088	105,46
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara)	626.550.000,00	531.756.048,00	84,87	Perkara	19	21	110.53
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer)	2.663.253.000,00	2.555.892.386,00	95,97	Perkara	402	437	108,71
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Diklat Sertifikasi Hakim Niaga)	2.034.400.000,00	1.947.981.956,00	96,00	Orang	80	80	100,00
	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Diklat Sertifikasi Hakim Mediator)	892.067.000,00	892.040.379,00	100,00	Orang	80	83	104,00
Jumlah		**94.334.161.000,00**	**92.787.165.624,00**	**98,47**				

Tematik APBN

Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Responsif Gender (ARG) (03)

(Dalam Rupiah)

Nama Satuan Kerja	RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan Dengan PN
Ditjen Badan Peradilan Umum	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	1.744.960.000,00	1.743.655.892,00	99,93	Orang	350	350	100,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	1.226.675.000,00	1.186.067.142,00	97,00	Orang	240	267	111,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Ditjen Badan Peradilan Agama	Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	824.701.000,00	824.689.027,00	100,00	Pedoman	1	1	100,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	Sosialisasi / Bimtek Kompetensi dan Administrasi Penyelesaian Perkara (Militer)	1.078.896.000,00	1.078.643.723,00	99,97	Orang	286	387	135,31	-
	Sosialisasi / Bimtek Kompetensi dan Administrasi Penyelesaian Perkara (TUN)	1.105.550.000,00	1.104.396.589,00	99,90	Orang	356	378	106,18	-
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	99.134.613.000,00	95.808.323.750,00	96,64	Orang	2.406	2.406	100,00	-
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	3.358.554.000,00	3.128.843.114,00	93,00	Orang	160	159	99,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Jumlah		**37.177.536.000,00**	**15.371.804.620,00**	**41,35**					

Capaian Output Strategis K/L

Capaian Output Strategis K/L

Selama periode Tahun 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

No	BA	Nama BA	Fungsi dan Subfungsi	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO Awal	Satuan RO Koreksi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	WA	1064	TBA	1	Pengembangan Aplikasi eCourt Upaya Hukum Kasasi dan PK	Layanan	-	494.100.000,00	493.946.451,00	99,97	1	1	100,00%	-
2	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	WA	1064	TBA	2	Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Layanan	-	1.931.900.000,00	1.929.044.842,00	99,85	1	1	100,00%	-
3	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	WA	1064	UAB	1	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	Sistem Informasi	-	1.500.000.000,00	1.497.846.106,00	99,86	1	1	100,00%	-
4	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1046	UAC	1	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	Orang	-	1.744.960.000,00	1.743.655.892,00	99,93	350	350	100,00%	-

5	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	BF	1046	UAC	2	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	Orang	-	1.226.675.000,00	1.186.067.142,00	97,00	240	267	111,00%	-
6	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1049	QBA	32	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Orang	-	13.134.500.000,00	13.092.500.866,00	99,68	44.491	49.972	112,00%	-
7	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1049	QCA	1	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Perkara	-	538.390.000,00	217.896.845,00	40,47	786	978	124,00%	-
8	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1049	QCA	2	Sidang di luar Gedung Pengadilan	Perkara	-	8.247.925.000,00	7.961.664.242,00	97,00	6.580	6.384	97,02%	-

9	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1053	QBA	3	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Orang	-	22.455.902.000,00	22.409.345.202,00	99,79	213.405	234.784	110,02%	-
10	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1053	QCA	1	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara	-	11.791.763.000,00	11.350.880.770,00	96,26	25.197	26.841	106,52%	-
11	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1053	QCA	2	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Perkara	-	24.446.350.000,00	24.334.057.373,00	99,54	37.194	39.026	104,93%	-
12	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1053	PFA	1	Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	Pedoman	-	824.701.000,00	824.689.027,00	100,00	1	1	100,00%	-

13	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1059	QBA	1	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Orang	-	1.007.400.000,00	1.003.967.239,00	99,66	2.928	3.088	105,46%	-
14	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1059	QCA	1	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Perkara	-	626.550.000,00	531.756.048,00	84,87	19	21	110,53%	-
15	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	BF	1058	QCA	1	Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	Perkara	-	2.663.253.000,00	2.555.892.386,00	95,97	402	437	108,71%	-
16	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	WA	1073	TBC	1	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	Orang	-	2.034.400.000,00	1.947.981.956,00	96,00	80	80	100,00%	-

17	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	WA	1073	TBC	2	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	Orang	-	892.067.000,00	892.040.379,00	100,00	80	83	104,00%	-
18	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	WA	1073	TBC	3	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	Orang	-	3.256.997.000,00	3.144.595.439,00	97,00	80	83	104,00%	-
19	5	Mahkamah Agung	Ketertiban dan Keamanan - Peradilan	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	WA	1073	TBC	4	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	Orang	-	3.358.554.000,00	3.128.843.114,00	93,00	160	159	99,00%	-

POS-POS PENJELASAN NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar Rp52.804.620.679,00

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.804.620.679,00 dan Rp44.573.979.447,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp8.230.641.232,00 atau 18,47 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per akun disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.160.000,00	34.246.000,00	(32.086.000,00)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	389.500,00	38.270.000,00	(37.880.500,00)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	50.102.091,00	32.772.439,00	17.329.652,00
4	Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)	19.977.655.953,00	19.977.046.358,00	609.595,00
5	Piutang Bukan Pajak	8.474.768.753,00	1.329.159.585,00	7.145.609.168,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(132.427.315,00)	(772.109.093,00)	639.681.778,00
7	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	14.989.992,00	0,00	14.989.992,00
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(74.950,00)	0,00	(74.950,00)
9	Persediaan	24.417.056.655,00	23.934.594.158,00	482.462.497,00
Jumlah Aset Lancar		**52.804.620.679,00**	**44.573.979.447,00**	**8.230.641.232,00**

Komposisi Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik

Komposisi Aset Lancar

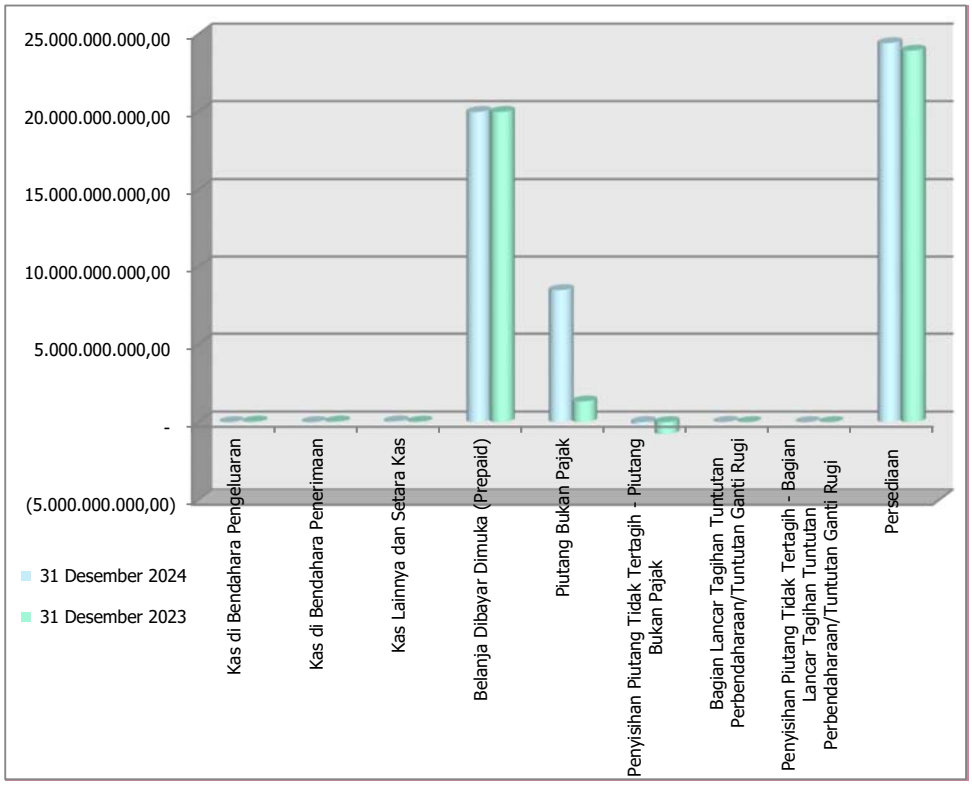

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	39.907.478.631,00	32.327.998.502,00	7.579.480.129,00
2	005.02	Kepaniteraan	1.474.600.174,00	2.014.823.404,00	(540.223.230,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	8.844.713.030,00	7.657.712.753,00	1.187.000.277,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.662.174.708,00	1.365.497.151,00	296.677.557,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	222.433.793,00	150.802.147,00	71.631.646,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	412.147.646,00	733.904.857,00	(321.757.211,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	281.072.697,00	323.240.633,00	(42.167.936,00)
Jumlah			**52.804.620.679,00**	**44.573.979.447,00**	**8.230.641.232,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp2.160.000,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Mahkamah Agung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.160.000,00 dan Rp34.246.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp32.086.000,00 atau 93,69 persen.

Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	2.160.000,00	34.246.000,00	(32.086.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**2.160.000,00**	**34.246.000,00**	**(32.086.000,00)**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke rekening kas negara pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2024	Penyetoran	Saldo per Tahun 2025
1	005.01	BUA	2.160.000,00	(2.160.000,00)	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**2.160.000,00**	**(2.160.000,00)**	**0,00**

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 per satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satuan Kerja

(*Dalam Rupiah*)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl Dok.	NTPN
005.01 BUA	0500	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	2.160.000,00	Terdapat kelebihan uang persediaan (UP) yang belum disetorkan pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2024 namun telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2025.	06 Januari 2025	60A796QTC93R0150
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran 005.01 BUA				**2.160.000,00**			
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran				**2.160.000,00**			

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran satuan kerja terlampir pada Laporan Pendukung.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp389.500,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp389.500,00 dan Rp38.270.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp37.880.500,00 atau 98,98 persen, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke rekening kas negara per tanggal Neraca.

Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	379.500,00	38.270.000,00	(37.890.500,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	10.000,00	0,00	10.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**389.500,00**	**38.270.000,00**	**(37.880.500,00)**

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 per satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Satuan Kerja

(*Dalam Rupiah*)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl. Dok.	NTPN
005.03	1100	099226	Pengadilan Negeri Palembang	379.500,00	Kas di Bendahara Penerimaan timbul akibat terdapat PNBP yang seharusnya dipungut oleh kasir pada 31 Desember 2024 namun belum dipungut pada hari tersebut. Kasir baru melakukan pemungutan atas PNBP tersebut pada Januari 2025 dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk kemudian disetorkan ke kas negara.	3 Januari 2025	4E76F1JNG80D3NJD
						3 Januari 2025	F72DA61QVCSB4OAU
						3 Januari 2025	F200S5SDFI9UNO0R
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan 005.03 Ditjen. Badilum				**379.500,00**			
005.04	0800	401901	Pengadilan Tinggi Agama Padang	10.000,00	Terdapat PNBP yang seharusnya dipungut oleh kasir pada 31 Desember 2024 namun belum dipungut pada hari tersebut. Kasir baru melakukan pemungutan atas PNBP tersebut pada Januari 2025 dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk kemudian disetorkan ke kas negara.	6 Januari 2024	188DC61QVCSE6UA9
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan 005.04 Ditjen. Badilag				**10.000,00**			
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan				**389.500,00**			

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp50.102.091,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.102.091,00 dan Rp32.772.439,00, terjadi kenaikan sebesar Rp17.329.652,00 atau 52,88 persen.

Perbandingan rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	26.330.445,00	32.692.439,00	(6.361.994,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	23.771.646,00	0,00	23.771.646,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**50.102.091,00**	**32.772.439,00**	**17.329.652,00**

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	50.102.091,00	32.772.439,00
2	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		**50.102.091,00**	**32.772.439,00**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2024 sebesar Rp50.102.091,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor		
						Tgl. Dok.	NTPN	Nilai
005.01	0200	097542	Pengadilan Negeri Garut	582.566,00	Terdapat 3 setoran pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan pada saat pajak tersebut dipungut melalui spby namun pada saat input kuitansi pencatatan pungutan pajak tersebut terlewat sehingga tidak masuk di buku pajak.	6 Januari 2025	D1BAF0T8DE4OTG52	445.945,00
						6 Januari 2025	6C8204EUCOEATHTN	121.621,00
						6 Januari 2025	118B81PLT8N53HFE	15.000,00
	1200	401952	Pengadilan Agama Mesuji	980.000,00	Terdapat 2 setoran pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan pada saat pajak tersebut dipungut melalui spby namun pada saat input kuitansi pencatatan pungutan pajak tersebut terlewat sehingga tidak masuk di buku pajak.	2 Januari 2025	57A394EUCO7IVJNR	770.000,00
						3 Januari 2025	1A2A01PLT8GDUQ0N	210.000,00
	0700	403083	Pengadilan Agama Simalungun	736.345,00	Terdapat 4 setoran pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan pada saat pajak tersebut dipungut melalui spby namun pada saat input kuitansi pencatatan pungutan pajak tersebut terlewat sehingga tidak masuk di buku pajak.	16 Januari 2025	7D47B0T8DF6LTI6V	88.636,00
						16 Januari 2025	F05DC00QTKK9SSLO	30.800,00
						16 Januari 2025	D120C3IGSUTR9Q47	26.000,00
						16 Januari 2025	85FCE0T8DF6LQ7PF	590.909,00
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	24.031.534,00	Terdapat kurang pungut dan setor PPN kegiatan Profile Assessment Calon Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2023, berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2024 Nomor : 69/LHPt/XVI/01/2025 tanggal 31 Januari 2025.	-	-	-
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.01 BUA				**26.330.445,00**				
005.06	0199	610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	23.771.646,00	Terdapat 9 setoran pajak yang terlambat setor karena bpp telat merekap setoran pajak sehingga baru menyetorkan pada tanggal 01 januari 2025.	1 Januari 2025	13FD14EU9R1UHHV5	2.720.500,00
						1 Januari 2025	AEF9C0T8AGOD4AM3	2.609.420,00
						1 Januari 2025	4FB7D746PAP4BS40	2.239.020,00
						1 Januari 2025	DFA9C00QQM60J1VA	2.649.040,00
						1 Januari 2025	175C200QQM60VK8P	1.990.176,00
						1 Januari 2025	DDA4F0T8AGOD1VDG	2.728.460,00
						1 Januari 2025	A01AB0T8AGOCRFDJ	2.704.580,00
						1 Januari 2025	1A58867P9G6NSOLN	2.894.100,00
						1 Februari 2025	BCDC70T8DDSQSSUV	3.236.350,00
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.06 Balitbang Diklat Kumdil				**23.771.646,00**				
Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas				**50.102.091,00**				

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp19.977.655.953,00

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Mahkamah Agung merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa (sewa kendaraan dinas, sewa gedung dan bangunan, *hosting*, lisensi *video conference*, langganan internet, lisensi antivirus, langganan *storage*, langganan *platform online*, sewa *domain*, langganan VPS, sewa pengharum ruangan, lisensi *Microsoft Office*).

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.977.655.953,00 dan Rp19.977.046.358,00, terjadi kenaikan sebesar Rp609.595,00 atau 0,003 persen.

Perbandingan rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	19.977.655.953,00	19.977.046.358,00	609.595,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**19.977.655.953,00**	**19.977.046.358,00**	**609.595,00**

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Jenis Akun disajikan sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Sewa Kendaraan dinas	18.642.077.882,00
2	Sewa Gedung dan Bangunan	650.480.833,00
3	Sewa Hosting	398.037.237,00
4	Lisensi Video Conference	170.184.427,00
5	Langganan internet	36.458.333,00
6	Lisensi Antivirus	24.147.642,00
7	Langganan storage	23.957.239,00
8	Langganan platform online	14.445.167,00
9	Sewa Domain	7.399.935,00
10	Sewa VPS	6.518.243,00
11	Sewa Pengharum Ruangan	2.798.125,00
12	Lisensi Microsoft Office	1.150.890,00
		19.977.655.953,00

Piutang Bukan Pajak Rp8.474.768.753,00

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.474.768.753,00 dan Rp1.329.159.585,00, terjadi kenaikan sebesar Rp7.145.609.168,00 atau 537,60 persen.

Perbandingan rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	8.474.168.753,00	1.245.950.585,00	7.228.218.168,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	60.000,00	78.552.500,00	(78.492.500,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	4.656.500,00	(4.656.500,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	540.000,00	0,00	540.000,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**8.474.768.753,00**	**1.329.159.585,00**	**7.145.609.168,00**

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 per satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak												
005.01	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	493.906.736,00	0,00	(116.592.492,00)	(377.314.244,00)	Sewa kantin Jl. Medan Merdeka Utara bulan April 2017 s.d Mei 2019, dilakukan Reklasifikasi Piutang Jangka Pendek menjadi Piutang Jangka Panjang sesuai surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-62/PUPNC.10.04/2024 tanggal 5 Agustus 2024 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara sehingga mengurangi Piutang PNBP sebesar Rp337.314.244,00	0,00	-	-	0,00
				234.211.454,00	0,00	(32.680.668,00)	(201.530.786,00)	Sewa Kantin Sekretariat Mahkamah Agung (A Yani) selama Tahun 2020, dilakukan Reklasifikasi Piutang Jangka Pendek menjadi Piutang Jangka Panjang sesuai surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-63/PUPNC.10.04/2024 tanggal 5 Agustus 2024 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara sehingga mengurangi Piutang PNBP sebesar Rp201.530.686,00,00	0,00	-	-	0,00
	0100	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	63.000.000,00	5.500.000,00	(8.500.000,00)	(11.000.000,00)	Sewa a.n. Rosida pada Semester I Tahun 2024 terdapat penambahan nilai denda atas piutang dari 1 Januari s.d 30 Juni 2024 sebesar Rp5.500.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat penambahan nilai denda atas piutang dari 1 Juli s.d 30 September 2024 sebesar Rp1.500.000,00. Triwulan IV terdapat penambahan nilai denda sebesar Rp500.000,00 atas piutang 1 Agustus 2024 s.d 31 Desember 2024. Belum terdapat pembayaran sewa 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2025 sampai dengan periode 31 Desember 2024 sehingga disajikan sebagai Piutang PNBP sebesar Rp25.000.000,00. Atas piutang tersebut dikenakan juga denda sebesar Rp3.500.000,00	10.000.000	19 Juli 2024	A11A248VVEVT21N1	49.000.000,00
									40.000.000	4 November 2024	B756F61QV4G4MLL3	0,00
				17.892.000,00	1.562.000,00	(14.200.000,00)	8.094.000,00	Sewa Kantin a.n Rika Fatmawati yang belum dibayarkan selama 2 Tahun dari tanggal 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2024 dan denda keterlambatan. Semester I Tahun 2024 dikenakan denda atas piutang sewa dari 1 Januari 2024 s.d 30 Juni 2024 sebesar Rp1.562.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2024	14.200.000	19 Juli 2024	C6FB36U8EUN291IE	13.348.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.158.000,00	terdapat penambahan piutang PNBP sebesar Rp7.100.000,00 disebabkan belum adanya pembayaran sewa kantin mulai dari 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2024. Atas piutang tersebut dikenakan denda dari 1 Juli 2024 s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp994.000,00	0,00	-	-	28.158.000,00
	0200	613519	Pengadilan Negeri Kab.Bogor Di Cibinong, Jawa Barat	20.135.200,00	(20.135.200,00)	0,00	0,00	Piutang PNBP atas sisa pokok pembayaran sewa BTN serta denda keterlambatan	20.135.200,00	28/03/2024	44E4E2G4VPFFLRLK	0,00
	1100	401946	Pengadilan Pagar Alam	0,00	0,00	0,00	185.338.503,00	Denda keterlambatan yang belum disetorkan ke kas negara atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp185.338.503,00	0,00	-	-	185.338.503,00

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak												
005.01	1400	099155	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	846.000,00	(846.000,00)	0,00	0,00	Piutang PNBP atas denda keterlambatan penyetoran sewa BMN	846.000,00	10/05/2024	F63923CIFK78VOJG	0,00
	0100	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	0,00	0,00	0,00	264.906,00	Merupakan Kekurangan pembayaran sewa Rumah dinas milik Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditempati oleh Ketua dan wakil ketua PA Jakarta Selatan	264.906,00	12 Februari 2025	81C6E3CIFT8CRNQH	264.906,00
	0900	402123	Pengadilan Agama Pasir Pangrayan	0,00	0,00	0,00	421.816,00	Merupakan kekurangan atas pembayaran sewa rumah dinas periode Bulan Juli dan Agustus 2024 sebesar Rp210.908,00 per bulan. Atas kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp421.816,00 belum disetorkan ke kas negara	0,00	-	-	421.816,00
	1900	099418	Pengadilan Tinggi Ujung Pandang	0,00	0,00	0,00	461.030,00	Merupakan sewa rumah dinas bulan Agustus 2024 s.d Desember 2024, yang baru disetorkan di Februari 2025	461.030,00	19 Februari 2025	721D53CIFT8KIOG4	461.030,00
	2000	099684	Pengadilan Negeri Kolaka	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Sselisih pembayaran atas sewa tanah untuk kantin sebesar Rp50.000 per bulan selama 8 bulan (periode Mei s.d. Desember 2024). Atas kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp400.000 sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan ke kas negara sehingga diakui sebagai Piutang PNBP	400.000,00	14 Februari 2025	C22C21JNG83NB0D4	400.000,00
	2300	307911	Pengadilan Agama Selong	0,00	0,00	0,00	147.110,00	Merupakan PNBP dari sewa rumah dinas Ketua bulan Desember yang belum dipotong di tahun 2024 dan baru di bayarkan di bulan Januari 2025	147.110,00	8 Januari 2025	831673CIFT5A35CK	147.110,00
	3200	098881	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	0,00	0,00	0,00	5.964.375,00	Sewa tanah untuk kantin tahun 2024 yang belum dibayarkan	5.964.375,00	30 Januari 2025	B5A5D55DFIAOLJBA	5.964.375,00
005.03	0900	400142	Pengadilan Negeri Bangkinang	0,00	0,00	0,00	60.000,00	PNBP perkara tanggal 31 Desember 2024 yang baru diserahkan oleh kasir kepada Bendahara Penerimaan pada bulan Januari 2025	50.000,00	7 Januari 2025	E25470NA0DE4SBAM	60.000,00
									10.000,00	7 Januari 2025	F59347QLV2184BQH	0,00
Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak				**829.991.390**								**283.563.740,00**

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Lainnya												
005.01	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	383.799.195,00	(383.799.195,00)	0,00	0,00	Dari perbandingan nilai kontrak Pengadaan BBM Kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina sebesar Rp4.692.000.000,- berdasarkan Perjanjian No.11/BUA.7/SP/12/2022 tgl 28 Desember 2022 dengan nilai yang terealisasikan bds bukti-bukti dan berdasarkan SPM Nomor 00730A , terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp383.799.195	383.799.195,00	27/05/2024	B31186U8EUH6LO9D	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Pengembalian atas kelebihan belanja barang untuk penyelenggaraan kegiatan Laporan Tahun MA Tahun 2022 tidak sesuai ketentuan berdasarkan LP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp300.000.000,00	0,00	-	-	300.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.192.466.350,00	Pengembalian atas kelebihan realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp2.670.226.459,00 dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp477.760.109,00	0,00	-	-	2.192.466.350,00
	0500	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	0,00	0,00	0,00	126.981.408,00	Kelebihan pembayaran belanja pegawai Gaji dan/atau Tunjangan Hakim sebesar Rp140.943.508,00, namun sudah dilakukan penyetoran sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp13.962.100,00. Sisa pengembalian belanja pegawai yang belum disetorkan sebesar Rp126.981.408,00 diakui sebagai Piutang Lainnya	0,00	-	-	126.981.408,00
	0600	401965	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	0,00	0,00	0,00	141.918.885,00	Pengembalian atas kelebiharn realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp141.918.885,00	0,00	-	-	141.918.885,00
	0600	401967	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	0,00	0,00	0,00	516.136.958,00	Pengembalian atas kelebihan realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp651.699.904,00 dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp135.562.946,00	0,00	-	-	516.136.958,00
	1100	401943	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	0,00	0,00	0,00	413.799.850,00	Pengembalian atas kelebiharn realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp577.475.524,00 dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp163.675.674,00	0,00	-	-	413.799.850,00
	1100	401944	Pengadilan Agama Martapura	0,00	0,00	0,00	278.275.000,00	Pengembalian atas kelebiharn realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp348.071.709,00 dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp69.796.709,00	0,00	-	-	278.275.000,00

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Lainnya												
005.01	1400	401868	Pengadilan Agama Nanga Bulik	0,00	0,00	0,00	596.825.349,00	Pengembalian atas kelebiharn realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp786.583.164,00 dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp189.757.815,00	0,00	-	-	596.825.349,00
	1400	401873	Pengadilan Agama Kasongan	0,00	0,00	0,00	645.390.189,00	Pengembalian atas kelebiharn realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp645.390.189,00	0,00	-	-	645.390.189,00
	1400	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	0,00	0,00	0,00	2.152.881.218,00	Pengembalian atas kelebiharn realisasi akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA dikarenakan tidak Sesuai Ketentuan berdasarkan LHP BPK No. 28/LHP/XVI/02/2024 sebesar Rp2.298.471.872,00 dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp145.590.654,00	0,00	-	-	2.152.881.218,00
	2600	401940	Pengadilan Agama Bintuhan	0,00	0,00	0,00	425.989.806,00	Tagihan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL yang belum diterima, berdasarkan hasil temuan BPK sesuai dengan LHP No. 33.b/LHP/XVI/05/2024	0,00	-	-	425.989.806,00
	2600	401941	Pengadilan Agama Tais	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Tagihan atas Sisa Pengembalian Belanja Modal TAYL yang belum diterima, berdasarkan hasil temuan BPK sesuai dengan LHP No. 33.b/LHP/XVI/05/2024	0,00	-	-	400.000.000,00
	3400	526714	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat	32.160.000,00	(32.160.000,00)	0,00	0,00	Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Hakim Tinggi dan Panitera Muda Hukum tahun 2023	1.060.000,00	07/05/2024	04A7C61QV3UC06DN	0,00
									31.100.000,00	07/05/2024	5C55F1JNFV2DV301	
005.03	0100	099065	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	12.150.000,00	(12.150.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp12.150.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	12.150.000,00	02/05/2024	2F7330NA04FS7U9B	0,00
	0500	099133	Pengadilan Negeri Surabaya	16.880.000,00	(16.880.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp16.880.000. yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	10.447.000,00	29/12/2023	56B616U8ELS8BP6F	0,00
									2.635.000,00	29/12/2023	A823948VV6534MQE	
									58.500,00	29/12/2023	51AAC6U8ELS8AGN5	
									120.000,00	29/12/2023	0F9FC0N9VRRHFGR0	
									20.000,00	29/12/2023	E597861QUR9RTG7G	
									81.000,00	29/12/2023	A06951JNFMDTSGVN	
									1.300.000,00	29/12/2023	EDF6948VV6533FHI	
									1.460.000,00	11/01/2024	CDB963CIFJRCODM9	
									70.000,00	11/01/2024	B320B8N3EJ9N6EQ3	
									130.000,00	11/01/2024	8BE792G4VP90BEBQ	
									217.500,00	11/01/2024	77DCA1JNFUMK1G3J	
									350.000,00	11/01/2024	2578A7QLUONASHQG	

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Lainnya												
005.03	1900	099423	Pengadilan Negeri Ujung Pandang	27.170.000,00	(27.170.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp27.170.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	2.800.000,00	31/01/2024	5E2252G4VP9J5GOG	0,00
									2.330.000,00	31/01/2024	AF5C17QLUONTJJKI	
									5.620.000,00	30/04/2024	EB2D11JNFV04LG3B	
									2.490.000,00	31/01/2024	3D6B555DF90OE8QV	
									4.140.000,00	27/01/2024	7857E1JNFUT24J12	
									9.110.000,00	27/01/2024	789B561QV3P18JU6	
									1.900.000,00	31/01/2024	CCE7A0NA044QCSK6	
									1.060.000,00	31/01/2024	ECBDB6U8EU5H7TCF	
									1.150.000,00	31/01/2024	480638N3EJAA1VMJ	
									1.100.000,00	31/01/2024	4109155DF90OE3L1	
									3.710.000,00	31/01/2024	476AD3CIFK4SJ773	
									610.000,00	31/01/2024	C850D2G4VPIH374P	
									1.490.000,00	31/01/2024	C850D2G4VPIH374P	
									70.000,00	28/02/2024	ABE7A1JNFUQ3FIO8	
									420.000,00	28/02/2024	EAF482G4VPCFSL7D	
									230.000,00	28/02/2024	B994555DF93L3GI0	
									340.000,00	28/02/2024	06EDF2G4VPCFSMEF	
									120.000,00	28/02/2024	125C33CIFJUS9IKQ	
									350.000,00	28/02/2024	22BE90NA04DO8G9E	
									370.000,00	28/02/2024	7AB9E7QLUP2UECOG	
									460.000,00	28/02/2024	9E2572G4VPKK0CM9	
	0900	099214	Pengadilan Negeri Pekanbaru	5.810.000,00	(5.810.000,00)	0,00	0,00	Pendapatan atas adanya PNBP Hak Kepaniteraan Lainnya-pendaftaran surat kuasa insidentil sebesar Rp5.810.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada bulan Maret 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di petugas PTSP	5.610.000,00	04/03/2024	56CA361QV3OAIEVQ	0,00
									10.000,00	04/03/2024	2E2026U8EUAM1QA0	
									30.000,00	01/03/2024	7CDA07QLUOT08D60	
									10.000,00	01/03/2024	B46A548VVEJEKBL6	
									150.000,00	01/03/2024	9EAA455DF95R1ICH	
	0900	099214	Pengadilan Negeri Pekanbaru	2.660.000,00	(2.660.000,00)	0,00	0,00	PNBP Ongkos Perkara sebesar Rp700.000 dan PNBP Hak Kepaniteraan Lainnya-pendaftaran surat kuasa insidentil sebesar Rp1.960.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada bulan Maret 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	1.960.000,00	01/03/2024	6BAF76U8EUAJTPTJ	0,00
									700.000,00	01/03/2024	E94621JNFUS9FPKG	
	1300	099239	Pengadilan Negeri Pontianak	334.500,00	(334.500,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp334.500 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada bulan Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	30.000,00	02/01/2024	254DD6U8EU4LJJ1J	0,00
									304.500,00	02/01/2024	EBBD748VVEDGCH22	
	3200	109064	Pengadilan Negeri Batam	4.373.000,00	(4.373.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp4.373.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada bulan Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	150.000,00	05/01/2024	BC1BD6IQV3IT3RS2	0,00
									500.000,00	15/01/2024	BBB917QLUONN03KL	
									953.000,00	15/01/2024	B92727QLUONN04CB	
									380.000,00	23/01/2024	9271448VVEE4A0FL	
									200.000,00	23/01/2024	A64B63CIFJRNSVJS	
									150.000,00	23/01/2024	C23BB61QV3IT3V9A	
									340.000,00	29/01/2024	E481655DF90N416R	
									40.000,00	16/02/2024	F7CD63CIFJUHBSD9	
									150.000,00	16/02/2024	EBF173CIFJUHBRHG	
									200.000,00	16/02/2024	D161E1JNFUPOHRUA	
									200.000,00	16/02/2024	98E0B6U8EU82VR40	
									150.000,00	16/02/2024	E968B0NA047C4R6E	
									410.000,00	22/02/2024	C81003CIFJUMRQGB	
									550.000,00	18/03/2024	15ACB61QV300F0DO	

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Lainnya												
005.03	1700	099355	Pengadilan Negeri Tondano	570.000,00	(570.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp570.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	90.000,00	25/04/2024	11FBA3CIFK4N4I4K	0,00
									20.000,00	25/04/2024	6D4A961QV3RSBH4G	
									420.000,00	25/04/2024	52F6F61QV3RSBHTV	
									40.000,00	16/01/2024	B4A542G4VP94QIGG	
	1100	099226	Pengadilan Negeri Palembang	660.000,00	(660.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp660.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	210.000,00	14/03/2024	D771355DF967LVU1	0,00
									400.000,00	14/03/2024	F9B6B48VVEJR926O	
									10.000,00	14/03/2024	43B7961QV3OK31TS	
									40.000,00	14/03/2024	5F5540NA04A9L2D8	
	0200	402023	Pengadilan Negeri Cikarang	2.410.000,00	(2.410.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp2.410.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	510.000,00	09/01/2024	E44997QLUON8IJS6	0,00
									110.000,00	10/01/2024	BA51161QV3IFQTD8	
									210.000,00	10/01/2024	90F7961QV3IFQS2E	
									620.000,00	10/01/2024	7D0B60NA0445CBDO	
									600.000,00	09/01/2024	A5F4D3CIFJRAIC0H	
									300.000,00	09/01/2024	3B8CF3CIFJRAHKBB	
									60.000,00	12/01/2024	55B767QLUONBVL4O	
	0500	626157	Pengadilan Negeri Kab. Malang, Jawa Timur	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp110.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	20.000,00	15/03/2024	F08C255DF967RJ9V	0,00
									90.000,00	22/04/2024	5611F3CIFK4LPQSP	

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Lainnya												
005.03	0400	099128	Pengadilan Negeri Yogyakarta	780.500,00	(780.500,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp780.500 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	730.500,00	17/01/2024	CA22B7QLUONGC348	0,00
									50.000,00	02/05/2024	5E7052G4VPKL0OBA	
	0500	400581	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	4.250.000,00	(4.250.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp4.250.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	510.000,00	15/03/2024	9C3EA0NA04A8P3SD	0,00
									1.040.000,00	20/02/2024	510F01JNFUPRU6HM	
									1.040.000,00	22/02/2024	28DDC7QLUOQJRMPJ	
									1.660.000,00	22/02/2024	8738C48VVEH3C0IG	
	0500	099145	Pengadilan Negeri Banyuwangi	190.000,00	(190.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp190.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	30.000,00	12/01/2024	EC18348VVEDQAF4C	0,00
									160.000,00	12/01/2024	2F08A8N3EJ9ODH8F	
	0500	099150	Pengadilan Negeri Trenggalek	204.500,00	(204.500,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp204.500 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	34.500,00	04/01/2024	D49346U8EU4MMVLL	0,00
									110.000,00	04/01/2024	188253CIFJR53013	
									60.000,00	04/01/2024	C64916U8EU4MN0R5	
005.04	0900	402082	Pengadilan Agama Rengat	160.000,00	(160.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp160.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	60.000,00	05/01/2024	EB1CD61QV3ICHJ20	0,00
									100.000,00	05/01/2024	EB1CD61QV3ICHJ20	

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak (Saldo Awal)	MUTASI			Keterangan	Bukti Setor			Saldo Akhir (31 Desember 2024)
					Semester I	Triwulan III	Semester II		Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN	
Piutang Lainnya												
005.04	1200	402325	Pengadilan Agama Tanjung Karang	311.500,00	(311.500,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp311.500 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	50.000,00	02/01/2024	5CAD861QV3I9549	0,00
									231.500,00	02/01/2024	E211E7QLUON1V48O	
									50.000,00	02/01/2024	5CAD861QV3I9549K	
	2900	604724	Pengadilan Agama Tiga Raksa	1.057.000,00	(1.057.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp1.057.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	110.000,00	08/01/2024	74BA18N3EJ9KP5NL	0,00
									160.000,00	08/01/2024	454EE55DF90357J7	
									787.000,00	08/01/2024	5EBA755DF903556V	
	2100	402003	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	3.070.000,00	(3.070.000,00)	0,00	0,00	PNBP sebesar Rp3.070.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	3.070.000,00	20/02/2024	1297F61QV3LPR5DL	0,00
	0200	400711	Pengadilan Agama Garut	58.000,00	(58.000,00)	0,00	0,00	PNBP Ongkos Perkara sebesar Rp58.000 yang baru disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024. Per 31 Desember 2023 posisi kas ada di Kasir	58.000,00	08/01/2024	21F602G4VP8TU938	0,00
005.05	0199	663122	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00	540.000,00	Merupakan kelebihan atas pembayaran tunjangan jabatan yang sampai 31 Desember 2024 belum dikembalikan ke kas negara.	0,00	-	-	540.000,00
Jumlah Piutang Lainnya				**499.168.195**								**8.191.205.013**
Jumlah				**1.329.159.585**								**8.474.768.753**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak (Rp132.427.315,00)

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp132.427.315,00) dan (Rp772.109.093,00), terjadi penurunan sebesar Rp639.681.778,00 atau 82,85 persen. Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	(132.424.315,00)	(771.693.046,00)	639.268.731,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	(300,00)	(392.764,00)	392.464,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	(23.283,00)	23.283,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	(2.700,00)	0,00	(2.700,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**(132.427.315,00)**	**(772.109.093,00)**	**639.681.778,00**

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 per satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak							
00501 BUA	0100	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Macet	90.506.000,00	100,00%	(90.506.000,00)
	3200	098881	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Lancar	5.964.375,00	0,50%	(29.822,00)
	1900	099418	Pengadilan Tinggi Ujung Pandang	Lancar	461.030,00	0,50%	(2.305,00)
	2000	099684	Pengadilan Negeri Kolaka	Lancar	400.000,00	0,50%	(2.000,00)
	2300	307911	Pengadilan Agama Selong	Lancar	147.110,00	0,50%	(736,00)
	0100	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Lancar	264.906,00	0,50%	(1.324,00)
	1100	401946	Pengadilan Agama Pagar Alam	Lancar	185.338.503,00	0,50%	(926.693,00)
	0900	402123	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan	Lancar	421.816,00	0,50%	(2.110,00)
00503 Ditjen. Badilum	0900	400142	Pengadilan Negeri Bangkinang	Lancar	60.000,00	0,50%	(300,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Bukan Pajak					**283.563.740,00**		**(91.471.290,00)**
Piutang Lainnya							
00501 BUA	0500	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	Lancar	126.981.408,00	0,50%	(634.907,00)
	1400	401868	Pengadilan Agama Nanga Bulik	Lancar	596.825.349,00	0,50%	(2.984.127,00)
	1400	401873	Pengadilan Agama Kasongan	Lancar	645.390.189,00	0,50%	(3.226.951,00)
	1400	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	Lancar	2.152.881.218,00	0,50%	(10.764.406,00)
	2600	401940	Pengadilan Agama Bintuhan	Lancar	425.989.806,00	0,50%	(2.129.949,00)
	2600	401941	Pengadilan Agama Tais	Lancar	400.000.000,00	0,50%	(2.000.000,00)
	1100	401943	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Lancar	413.799.850,00	0,50%	(2.068.999,00)
	1100	401944	Pengadilan Agama Martapura	Lancar	278.275.000,00	0,50%	(1.391.375,00)
	0600	401965	Mahkamah Syar'Iyah Blangpidie	Lancar	141.918.885,00	0,50%	(709.594,00)
	0600	401967	Mahkamah Syar'Iyah Kota Subulussalam	Lancar	516.136.958,00	0,50%	(2.580.685,00)
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	2.492.466.350,00	0,50%	(12.462.332,00)
00505 Ditjen. Badilmiltun	0199	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	Lancar	540.000,00	0,50%	(2.700,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya					**8.191.205.013,00**		**(40.956.025,00)**
Jumlah					**8.474.768.753,00**		**(132.427.315,000)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp14.989.992,00

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.989.992,00 dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	Bagian Lancar TP	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Lancar TGR	14.989.992,00	0,00	14.989.992,00
Jumlah		**14.989.992,00**	**0,00**	**14.989.992,00**

Perbandingan rincian saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	14.989.992,00	0,00	14.989.992,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**14.989.992,00**	**0,00**	**14.989.992,00**

Mutasi saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	**0,00**
Mutasi Tambah :	
Tagihan TGR Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Achmad Lohy, S.Ag.)	14.989.992,00
Jumlah Mutasi Tambah	**14.989.992,00**
Mutasi Kurang :	
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Jumlah Mutasi	**14.989.992,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**14.989.992,00**

Berdasarkan data diatas, terdapat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Satuan Kerja (00501.2100.539117) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon atas nama Achmad Lohy, S.Ag., kehilangan BMN berupa dua unit laptop dengan jenis/merk: Axioo Mybook Pro K3, tahun perolehan 2022, dengan nilai Kerugian Negara sebesar Rp29.980.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 34.KPTUN.W8-TUN4.PL.2.1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, pelunasan akan

dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji dalam jangka waktu 24 bulan, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp1.249.166,00 dan telah diangsur selama 9 bulan terhitung bulan April s.d Desember 2024 sebesar Rp11.242.494,00, sehingga sisa saldo Tagihan TP/TGR sebesar Rp18.737.506,00. Pada 31 Desember 2024 dilakukan reklasifikasi atas Piutang Jangka Panjang TGR ke Bagian Lancar TGR atas Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan sebesar Rp14.989.992,00 (Rp1.249.166,00 x 12 bulan).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Rp74.950,00)

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp74.950,00) dan Rp0,00.

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	(74.950,00)	0,00	(74.950,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**(74.950,00)**	**0,00**	**(74.950,00)**

Tabel 34. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	Penyisihan	Nilai Penyisihan
00501 BUA	2100	539117	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Lancar	14.989.992,00	0,50%	74.950,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi					**14.989.992,00**		**74.950,000**

Persediaan Rp24.417.056.655,00

C.1.9. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.417.056.655,00 dan Rp23.934.594.158,00, terjadi kenaikan sebesar Rp482.462.497,00 atau 2,02 persen.

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Rincian Persediaan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	11.544.672.753,00	11.809.756.166,00	(265.083.413,00)
2	005.02	Kepaniteraan	1.474.600.174,00	2.014.823.404,00	(540.223.230,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	8.844.273.830,00	7.541.203.017,00	1.303.070.813,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.662.164.708,00	1.360.863.934,00	301.300.774,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	221.896.493,00	150.802.147,00	71.094.346,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	388.376.000,00	733.904.857,00	(345.528.857,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	281.072.697,00	323.240.633,00	(42.167.936,00)
Jumlah			**24.417.056.655,00**	**23.934.594.158,00**	**482.462.497,00**

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Jenis Akun adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Kode Perkiraan	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	117111	Barang Konsumsi	23.329.265.799,00	22.993.736.223,00
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.087.790.856,00	940.857.935,00
Jumlah			**24.417.056.655,00**	**23.934.594.158,00**

Rincian mutasi persediaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**23.934.594.158,00**
Mutasi Tambah :		
M02	Pembelian	96.821.051.997,00
M13	Transfer Masuk Online	9.584.659.737,00
M98	Koreksi Nilai Tambah	1.473.847.433,00
M10	Reklasifikasi Masuk	1.385.879.360,00
M11	Reklasifikasi Dari Aset	435.745.000,00
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	71.697.860,00
M04	Hibah (Masuk)	27.500.000,00
M93	Batal Catat Usang Rusak	16.499.367,00
M06	Perolehan Lainnya	5.974.910,00
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	4.237.225,00
M01	Saldo Awal	1.903.400,00
Jumlah Mutasi Tambah :		**109.828.996.289,00**
Mutasi Kurang :		
K05	Rusak	(1.928.500,00)
K06	Keluar Lainnya	(2.036.000,00)
K98	Koreksi Nilai Kurang	(8.850.475,00)
K04	Usang	(82.074.081,00)
K11	Reklasifikasi ke Aset	(436.145.000,00)
P01	Hasil Opname Fisik	(595.462.231,00)
K10	Reklasifikasi Keluar	(1.385.879.360,00)
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	(1.484.779.106,00)
K13	Transfer Keluar Online	(9.656.357.597,00)
K01	Habis Pakai	(95.693.021.442,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(109.346.533.792,00)**
Jumlah Mutasi		**482.462.497,00**
Saldo Per 31 Desember 2024		**24.417.056.655,00**

Daftar satuan kerja dan transaksi secara rinci terlampir pada lampiran Transaksi Persediaan.

Penyajian persediaan per 31 Desember 2024 sudah melalui proses verifikasi dan dalam kondisi baik, rusak, dan usang, sedangkan kondisi usang dan rusak tidak terakumulasi pada Laporan Barang Persediaan tingkat Kementerian/Lembaga pada SAKTI.

Tabel 37. Rincian Kondisi Barang Persediaan Per Eselon I periode 31 Desember 2024

Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Usang	Rusak
1	005.01	BUA	32.000,00	290.000,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	75.001.553,00	396.957,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	1.928.500,00
Jumlah			**75.033.553,00**	**2.615.457,00**

Rincian penjelasan per satuan kerja atas ketidaksesuaian antara kode akun dengan persediaan sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Aset Tetap Rp32.067.633.421.986,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.067.633.421.986,00 dan Rp31.683.395.738.696,00, terjadi kenaikan sebesar Rp384.237.683.290,00 atau 1,21 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Jenis Akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 38. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1.	Tanah	20.014.331.807.703,00	20.042.057.573.980,00	(27.725.766.277,00)
2.	Peralatan dan Mesin	5.005.464.644.692,00	4.820.922.714.383,00	184.541.930.309,00
3.	Gedung dan Bangunan	13.252.752.386.154,00	11.821.324.680.170,00	1.431.427.705.984,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	58.350.280.852,00	58.399.600.852,00	(49.320.000,00)
5.	Aset Tetap Lainnya	51.619.330.318,00	75.032.921.320,00	(23.413.591.002,00)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	475.263.059.024,00	915.655.052.073,00	(440.391.993.049,00)
Jumlah		**38.857.781.508.743,00**	**37.733.392.542.778,00**	**1.124.388.965.965,00**
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.790.148.086.757,00)	(6.049.996.804.082,00)	(740.151.282.675,00)
Jumlah Aset Tetap		**32.067.633.421.986,00**	**31.683.395.738.696,00**	**384.237.683.290,00**

Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik

Komposisi Aset Tetap

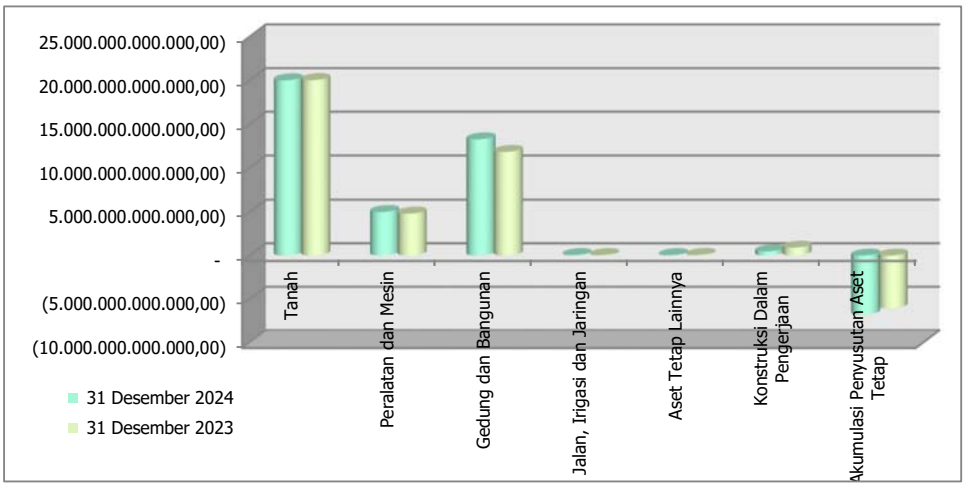

Posisi Aset Tetap pada Neraca Modul GLP dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Neraca Modul Aset SAKTI per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 39. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca Modul GLP SAKTI dan Modul Aset SAKTI

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca Modul GLP SAKTI	Aset Tetap dalam Neraca Modul Aset SAKTI	Selisih
1	Tanah	20.014.331.807.703,00	20.014.331.807.703,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.005.464.644.692,00	5.005.464.644.692,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	13.252.752.386.154,00	13.252.752.386.154,00	0,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	58.350.280.852,00	58.350.280.852,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	51.619.330.318,00	51.619.330.318,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	475.263.059.024,00	475.263.059.024,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.790.148.086.757,00)	(6.790.148.086.757,00)	0,00
Jumlah		**32.067.633.421.986,00**	**32.067.633.421.986,00**	**0,00**

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	31.047.866.676.247,00	30.661.116.043.060,00	386.750.633.187,00
2	005.02	Kepaniteraan	2.997.667.191,00	3.319.926.974,00	(322.259.783,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	666.776.176.757,00	669.619.563.512,00	(2.843.386.755,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.406.389.340,00	4.246.904.349,00	(2.840.515.009,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	20.755.882.009,00	20.975.549.103,00	(219.667.094,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	322.678.838.757,00	322.190.433.567,00	488.405.190,00
7	005.07	Badan Pengawasan	5.151.791.685,00	1.927.318.131,00	3.224.473.554,00
Jumlah			**32.067.633.421.986,00**	**31.683.395.738.696,00**	**384.237.683.290,00**

Rincian penjelasan per satuan kerja atas ketidaksesuaian kode akun vs BMN sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Tanah Rp20.014.331.807.703,00

C.2.1. Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.014.331.807.703,00 dan Rp20.042.057.573.980,00, terjadi penurunan sebesar Rp27.725.766.277,00 atau 0,14 persen.

Perbandingan rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Rincian Tanah Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	19.258.224.293.374,00	19.285.950.059.651,00	(27.725.766.277,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	643.540.660.329,00	643.540.660.329,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	19.218.950.000,00	19.218.950.000,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	93.347.904.000,00	93.347.904.000,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**20.014.331.807.703,00**	**20.042.057.573.980,00**	**(27.725.766.277,00)**

Mutasi transaksi Tanah pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 42. Mutasi Transaksi Tanah

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**20.042.057.573.980,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	12.744.947.019,00
101	Pembelian	49.815.000,00
102	Transfer Masuk	36.048.421.084,00
103	Hibah Masuk	30.515.020.091,00
107	Reklasifikasi Masuk	33.457.418.000,00
112	Perolehan Lainnya	1.413.329.734,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	35.280.428.362,00
208	Pengembangan Melalui KDP	1.140.840.348,00
Jumlah Mutasi Tambah		**150.650.219.638,00**
Mutasi Kurang :		
214	Koreksi Susulan	(793.331.324,00)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.303.656.367,00)
302	Transfer Keluar	(32.072.703.814,00)
303	Hibah Keluar	(4.765.411.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(33.457.418.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(105.983.465.410,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(178.375.985.915,00)**
Jumlah Mutasi		**(27.725.766.277,00)**
Saldo per 31 Desember 2024		**20.014.331.807.703,00**

Penjelasan mutasi kurang dan mutasi tambah Tanah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Saldo awal tanah merupakan hasil dari proses pemisahan nilai tanah yang sebelumnya tergabung dalam pencatatan gedung dan bangunan, atau pemisahan nilai tanah dari pencatatan sebelumnya di mana nilai gedung dan bangunan masih tergabung dalam tanah pada Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Agama Tarempa;
2. Terdapat transaksi pembelian tanah pada Pengadilan Agama Tahuna yang merupakan kesalahan pencatatan, sudah dilakukan koreksi menjadi penambahan nilai KDP;
3. Transfer masuk tanah merupakan transfer yang diterima oleh Pengadilan Agama Dumai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga merupakan transfer tanah antar satuan kerja di Mahkamah Agung RI karena berpindahnya penguasaan Tanah pada 9 (Sembilan) satuan kerja;

4. Terdapat hibah masuk pada 28 satuan kerja, tanah ini merupakan hibah dari Pemerintah Daerah setempat;
5. Terdapat reklasifikasi masuk pada 15 satuan kerja, transaksi ini dilakukan sebagai pasangan reklasifikasi keluar dalam rangka penyesuaian kodefikasi tanah sesuai dengan fungsinya;
6. Terdapat transaksi perolehan lainnya pada 2 satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Bengkalis dan Pengadilan Agama Parigi, merupakan pemecahan atas tanah yang sudah ada;
7. Terdapat transaksi koreksi pencatatan yang menyebabkan nilai tanah bertambah, dikarenakan sebelumnya nilai tanah tergabung dalam pencatatan gedung dan bangunan, atau adanya penyesuaian atas pencatatan sebelumnya di mana nilai gedung dan bangunan masih tergabung dalam tanah pada Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Pengadilan Agama Tarempa. Selain itu, terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis transaksi yang seharusnya dicatat sebagai transaksi koreksi kuantitas pada Pengadilan Negeri Demak;
8. Pengembangan Melalui KDP pada satuan kerja Pengadilan Agama Martapura dikarenakan Tanah Dalam Pengerjaan yang merupakan pembayaran sertifikat tanah bangunan gedung dan Pengadilan Negeri Sumenep terkait pekerjaan pematangan tanah.

Mutasi kurang:

1. Terdapat koreksi susulan pada Pengadilan Agama Parigi sebagai pengurangan nilai tanah yang dilakukan pemecahan;
2. Hibah keluar tanah yang sebagian besar kepada pemerintah daerah pada Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Agama Mungkid, Pengadilan Negeri Manokwari dan Pengadilan Agama Martapura;
3. Koreksi pencatatan nilai berkurang pada 8 satuan kerja, sebagai penyesuaian terhadap luasan dan nilai yang seharusnya;
4. Transfer keluar pada 9 satuan kerja merupakan transfer antar satuan kerja karena berpindahnya kepenguasaan tanah;
5. Reklasifikasi keluar pada 14 satuan kerja sebagai perbaikan atas kode barang yang selanjutnya melakukan reklasifikasi masuk;
6. Terdapat koreksi pencatatan pada 16 satuan kerja dimana menghilangkan aset dari neraca, merupakan koreksi perbaikan atau pemecahan dari 1 tanah menjadi 2 tanah.

Daftar satuan kerja dan transaksi disajikan secara rinci pada lampiran mutasi aset tanah secara substansi.

Peralatan dan Mesin Rp5.005.464 .644.692,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.005.464.644.692,00 dan Rp4.820.922.714.383,00, terjadi kenaikan sebesar Rp184.541.930.309,00 atau 3,83 persen.

Perbandingan rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	4.769.696.730.734,00	4.587.882.471.039,00	181.814.259.695,00
2	005.02	Kepaniteraan	21.029.723.296,00	26.395.013.879,00	(5.365.290.583,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	24.369.021.703,00	23.208.840.717,00	1.160.180.986,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	16.288.159.645,00	18.422.574.245,00	(2.134.414.600,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	13.402.868.513,00	12.977.896.513,00	424.972.000,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	141.353.625.977,00	137.104.324.273,00	4.249.301.704,00
7	005.07	Badan Pengawasan	19.324.514.824,00	14.931.593.717,00	4.392.921.107,00
Jumlah			**5.005.464.644.692,00**	**4.820.922.714.383,00**	**184.541.930.309,00**

Mutasi transaksi Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 44. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**4.820.922.714.383,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	116.974.265.233,00
101	Pembelian	113.435.610.872,00
112	Perolehan Lainnya	52.332.297.203,00
103	Hibah Masuk	50.296.432.728,00
102	Transfer Masuk	31.425.676.581,00
107	Reklasifikasi Masuk	11.238.241.006,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	7.677.101.716,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	5.867.983.652,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.373.301.400,00
106	Pembatalan Penghapusan	1.300.993.018,00
193	Batal Transfer Keluar	754.857.035,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	633.032.532,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	513.137.500,00
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	435.660.000,00
208	Pengembangan Melalui KDP	8.880.000,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	7.342.650,00
Jumlah Mutasi Tambah :		**395.274.813.126,00**
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(2.787.000,00)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(435.660.000,00)
209	Koreksi Manual	(2.600.712.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(6.125.364.284,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(12.744.731.039,00)
302	Transfer Keluar	(30.512.256.594,00)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(78.863.772.995,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(79.447.598.905,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(210.732.882.817,00)**
Jumlah Mutasi		**184.541.930.309,00**
Saldo Per 31 Desember 2024		**5.005.464.644.692,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024		**(4.101.320.297.181,00)**
Saldo Per 31 Desember 2024		**904.144.347.511,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Saldo awal peralatan mesin merupakan hasil dari proses pemisahan nilai peralatan mesin yang sebelumnya tergabung dalam pencatatan gedung dan bangunan pada 26 satuan kerja;
2. Pembelian peralatan mesin pada 314 satuan kerja, merupakan pengadaan peralatan mesin yang sumber pembiayaannya dari APBN;
3. Terdapat transaksi perolehan lainnnya pada 53 satuan kerja, transaksi ini merupakan tindak lanjut dari transaksi koreksi nilai berkurang atau koreksi pencatatan. Langkah ini bertujuan untuk memisahkan nilai peralatan mesin dari gedung dan bangunan, yang sebelumnya tercatat sebagai satu kesatuan nilai;
4. Transfer masuk pada 674 satuan kerja merupakan transfer antar satuan kerja, adapun yang dari luar MA adalah peralatan mesin yang berasal dari Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta kepada satuan kerja Badan Urusan Administrasi;
5. Terdapat transaksi hibah masuk pada 230 satuan kerja yang berasal dari Pemerintah Daerah, Bank, dan Perorangan;
6. Pengembangan nilai aset langsung pada 6 satuan kerja merupakan penambahan nilai terhadap peralatan mesin yang sudah ada sebelumnya;
7. Penyelesaian pengembangan dengan KDP terdapat pada Pengadilan Negeri Meureude, Pengadilan Negeri Tapak Tuan, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
8. Pembatalan penghapusan peralatan mesin dilakukan karena tidak terdapat dokumen dasar untuk melakukan penghapusan pada 30 Satuan Kerja;
9. Reklasifikasi masuk peralatan mesin pada 83 satuan kerja sebagai pasangan transaksi reklasifikasi keluar dengan tujuan menyesuaikan kode barang sebenarnya;
10. Pengembangan nilai aset (Langsung) pada 6 satuan kerja, merupakan penambahan nilai peralatan mesin dengan biaya dari APBN;
11. Penggunaan kembali BMN yang dihentikan pada 48 satuan kerja merupakan transaksi mengembalikan fungsi aset yang sebelumnya dihentikan penggunaan;
12. Penyelesaian pembangunan langsung peralatan mesin pada 4 satuan kerja, merupakan penyelesaian suatu aset PM yang diperoleh secara bertahap;
13. Perolehan reklasifikasi dari ekstra ke intra (jenis transaksi intrakomptabel) pada Badan Urusan Administrasi memiliki nilai +/- dengan transaksi Penghapusan reklasifikasi dari ekstra ke intra (jenis transaksi ekstrakomptabel) pada satuan kerja Badan Urusan Administrasi;

14. Pengembangan nilai aset (Langsung) peralatan dan mesin terdapat pada 6 Satuan Kerja;
15. Koreksi pencatatan nilai bertambah merupakan tindaklanjut atas transaksi koreksi nilai berkurang atau koreksi pencatatan peralatan mesin pada 11 satuan kerja;
16. Pengembangan melalui KDP peralatan mesin pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menambah nilai dari BMN berupa Server.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi manual atas peralatan mesin di Pengadilan Negeri Sumenep dilakukan terhadap aset Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci). Hal ini disebabkan oleh nilai perolehan tiga unit mesin ketik yang tidak wajar, yaitu sekitar Rp868.000.000,00 per unit. Sebagai tindak lanjut, satuan kerja melakukan penilaian kembali melalui KPKNL, sehingga nilai perolehan aset yang ditetapkan menjadi Rp1.250.000,00 per unit;
2. Koreksi nilai berkurang terjadi pada enam Satuan Kerja. Di BUA, koreksi dilakukan akibat kesalahan pencatatan SPM yang telah dirinci. Selain itu, koreksi juga dilakukan atas kelebihan perolehan mebel Graha serta kelebihan pembayaran fasilitas PTSP. Pada Pengadilan Agama Cianjur, terjadi kesalahan pencatatan di mana seharusnya tidak dilakukan koreksi nilai bertambah pada AC Split. Namun, karena koreksi nilai bertambah sudah terlanjur dilakukan, satuan kerja kemudian menginput koreksi nilai berkurang untuk mengembalikan nilai aset ke kondisi semula. Pada Pengadilan Agama Cibinong, terjadi kesalahan pencatatan harga perolehan barang, sehingga dilakukan koreksi nilai berkurang untuk menyesuaikan pencatatan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Di Pengadilan Tanjung Pinang, Rumah Genset senilai Rp45.000.000,00 sebelumnya tercatat menyatu dengan nilai Genset. Pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dilakukan koreksi atas pengembalian belanja modal sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pengawasan (Bawas). Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara koreksi ini merupakan tindak lanjut atas temuan tim BPK pada awal tahun 2024 dalam pemeriksaan Tahun Anggaran 2023;
3. Reklasifikasi keluar karena kesalahan pencatatan kodefikasi yang sebelumnya dalam kategori peralatan mesin direklasifikasi masuk kedalam kategori aset gedung bangunan pada 83 satuan kerja;
4. Koreksi pencatatan peralatan mesin dilakukan akibat kesalahan pencatatan, di mana aset tersebut seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai pada peralatan mesin lainnya atau sebagai koreksi nilai bertambah pada gedung dan bangunan pada 28 Satuan Kerja;

5. Penghapusan reklasifikasi dari intra ke ekstra pada Pengadilan Militer Banda Aceh (jenis transaksi intrakomptabel) memiliki transaksi +/- dengan perolehan reklasifikasi dari intra ke ekstra (jenis transaksi ekstrakomptabel);
6. Penghentian aset dari penggunaan karena aset tersebut dinilai sudah tidak dapat digunakan lagi oleh satuan kerja. Penghentian aset dari penggunaan terdapat pada 271 Satuan Kerja.

Daftar satuan kerja dan transaksi disajikan secara rinci pada lampiran mutasi aset peralatan dan mesin secara substansi.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp13.252.752.386.154,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp13.252.752.386.154,00 dan Rp11.821.324.680.170,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.431.427.705.984,00 atau 12,11 persen.

Perbandingan rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	13.000.276.735.735,00	11.577.160.711.388,00	1.423.116.024.347,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	32.295.984.557,00	32.114.698.570,00	181.285.987,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	714.703.416,00	714.703.416,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	219.464.962.446,00	211.334.566.796,00	8.130.395.650,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**13.252.752.386.154,00**	**11.821.324.680.170,00**	**1.431.427.705.984,00**

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 46. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**11.821.324.680.170,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	29.597.100.160,00
101	Pembelian	9.237.954.100,00
102	Transfer Masuk	144.723.484.092,00
103	Hibah Masuk	30.917.936.385,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.196.930.219.297,00
106	Pembatalan Penghapusan	1.041.501.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	48.558.626.416,00
112	Perolehan Lainnya	37.653.829.718,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.072.825.750,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	3,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	5.614.836.697,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	87.339.636.992,00
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	13.385.056.141,00
208	Pengembangan Melalui KDP	230.085.674.033,00
209	Koreksi Manual	218.465.000,00
Jumlah Mutasi Tambah :		**1.836.377.145.784,00**
Mutasi Kurang :		
214	Koreksi Susulan	(13.397.698.960,00)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(122.453.626.278,00)
301	Penghapusan	(631.515.000,00)
302	Transfer Keluar	(89.076.848.935,00)
303	Hibah Keluar	(2.932.417.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(47.408.881.783,00)
305	Koreksi Pencatatan	(121.239.804.891,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(11.820.457.953,00)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan a	4.011.811.000,00
Jumlah Mutasi Kurang :		**(404.949.439.800,00)**
Jumlah Mutasi		**1.431.427.705.984,00**
Saldo Per 31 Desember 2024		**13.252.752.386.154,00**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		**(2.664.076.141.301,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**10.588.676.244.853,00**

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Saldo awal gedung bangunan merupakan hasil dari proses pemisahan nilai Gedung Bangunan yang sebelumnya tergabung dalam pencatatan tanah, atau pemisahan nilai Gedung Bangunan dari pencatatan sebelumnya di mana nilai tanah masih tergabung dalam Gedung Bangunan pada 16 Satuan Kerja;
2. Pembelian pada 24 satuan kerja namun terdapat juga merupakan kesalahan pencatatan yang selanjutnya dikoreksi pencatatan kemudian nilainya ditambahkan ke gedung yang seharusnya;

3. Transfer masuk gedung bangunan pada 8 satuan kerja sebagian merupakan transfer dari luar Mahkamah Agung yaitu Pemberian Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan pemberian dari penyediaan perumahan Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Urusan Administrasi dan sebagian lainnya merupakan transfer antar kuasa pengguna barang di internal Mahkamah Agung;
4. Terdapat transaksi hibah masuk pada 63 Satuan Kerja yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah;
5. Penyelesaian pembangunan dengan KDP Gedung Bangunan terdapat pada 44 satuan kerja;
6. Pembatalan penghapusan dilakukan karena tidak terdapat dokumen dasar untuk melakukan penghapusan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Pengadilan Negeri Biak;
7. Reklasifikasi masuk gedung bangunan karena sebelumnya melakukan pencatatan kodefikasi barang yang salah pada 52 satuan kerja;
8. Perolehan lainnya gedung bangunan merupakan tindaklanjut dari transaksi koreksi nilai berkurang atau koreksi pencatatan yang bertujuan untuk memisahkan nilai gedung bangunan pada 14 satuan kerja;
9. Penyelesaian pembangunan langsung terdapat pada Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Agama Pagar Alam, dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
10. Perolehan reklasifikasi dari ekstra ke intra gedung bangunan (Intra) terdapat pada Pengadilan Militer Tinggi Surabaya yang memiliki nilai +/- dengan penghapusan reklasifikasi dari ekstra ke intra (Ekstra);
11. Pengembangan nilai aset (Langsung) gedung bangunan terdapat pada 33 satuan kerja;
12. Koreksi pencatatan nilai bertambah gedung bangunan terdapat pada 117 satuan kerja;
13. Penerimaan aset tetap renovasi yang sebagaian besar dari Pemerintah Daerah terdapat pada 24 satuan kerja;
14. Pengembangan melalui KDP terdapat pada 78 satuan kerja;
15. Koreksi manual pada Pengadilan Negeri Salatiga terkait koreksi aset berupa rumah negara.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi susulan merupakan tindaklanjut dari koreksi pencatatan yang bertujuan untuk menambahkan atau mengurangi dari nilai gedung bangunan pada 214 satuan kerja;
2. Koreksi pencatatan nilai berkurang dilakukan karena sebagian besar satuan kerja memasukan nilai peralatan mesin dan tanah dalam gedung bangunan pada 57 satuan kerja;
3. Penghapusan gedung bangunan terdapat pada Pengadilan Tinggi Palembang;
4. Hibah keluar gedung bangunan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh 3 satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Mungkid, Pengadilan Agama Maninjau, dan Pengadilan Agama Mojokerto;
5. Reklasifikasi keluar gedung bangunan dan reklasifikasi masuk kategori aset tetap lainnya pada 51 satuan kerja;
6. Koreksi pencatatan gedung bangunan karena aset dari gedung bangunan memiliki nilai yang menjadi satu dengan aset tanah atau peralatan mesin pada 89 satuan kerja;
7. Tidak terdapat penghapusan reklasifikasi dari ekstra ke intra gedung bangunan;
8. Penghentian aset dari penggunaan terdapat pada 26 satuan kerja;
9. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif karena aset gedung bangunan masih digunakan pada 9 satuan kerja.

Daftar satuan kerja dan transaksi atas mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan secara rinci pada lampiran mutasi aset Gedung dan Bangunan secara substansi.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp58.350. 280.852,00

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.350.280.852,00 dan Rp58.399.600.852,00, terjadi penurunan sebesar Rp49.320.000,00 atau 0,08 persen.

Perbandingan rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	17.548.935.151,00	17.598.255.151,00	(49.320.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	40.801.345.701,00	40.801.345.701,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**58.350.280.852,00**	**58.399.600.852,00**	**(49.320.000,00)**

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 48. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**58.399.600.852,00**
Mutasi Tambah :		
101	Pembelian	2.751.000,00
112	Perolehan Lainnya	512.728.798,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.834.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**517.313.798,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.834.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(564.799.798,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(566.633.798,00)**
Jumlah Mutasi		**(49.320.000,00)**
Saldo Per 31 Desember 2024		**58.350.280.852,00**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		**(24.164.506.704,00)**
Nilai Buku per 31 Desember 2024		**34.185.774.148,00**

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Pembelian terdapat pada Pengadilan Agama Cianjur yang merupakan salah catat instalasi AC, dan sudah dilakukan koreksi pencatatan menjadi peralatan mesin berupa AC;
2. Perolehan lainnya pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang merupakan kesalahan catat pemisahan peralatan mesin dari gedung bangunan, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan dicatat dengan kode barang yang sesuai pada peralatan dan mesin;
3. Koreksi nilai bertambah pada Pengadilan Agama Cianjur merupakan kesalahan catat, sudah dikoreksi menggunakan koreksi nilai berkurang;

Mutasi Kurang:

1. Pada satuan kerja Pengadilan Agama Maninjau terdapat jaringan listrik yang seharusnya menambah nilai gedung kantor lama. Satuan kerja telah melakukan koreksi catat dari jaringan lalu koreksi susulan yang menambah nilai gedung dan bangunan;
2. Pada satuan kerja Pengadilan Militer III-15 Kupang terdapat jaringan berupa router dan LAN yang seharusnya merupakan peralatan dan mesin. Satuan kerja telah melakukan koreksi catat pada jaringan lalu dilakukan pencatatan transaksi saldo awal menjadi peralatan dan mesin.

Rincian dan penjelasan atas Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp58.350.280.852,00 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Kode Satuan Kerja	Uraian Satuan Kerja	Penjelasan	Nilai
005.01.1700.099312	Pengadilan Tinggi Manado	Jalan komplek terpadu PT Manado, PTA Manado, PN Manado, PA Manado	17.016.775.887,00
005.01.3400.099638	Pengadilan Negeri Mamuju	Jalan disekeliling gedung kantor, belum bisa dilakukan koreksi nilai bertambah ke gedung kantor dikarenakan gedung kantor yang lama sudah dihapuskan dan masih dalam proses pembangunan ulang (KDP). Akan dilakukan penambahan nilai ke gedung kantor setelah KDP gedung bangunan didefinitifkan ke gedung kantor yang ditargetkan selesai pada Tahun 2024	79.674.000,00
005.01.2400.099905	Pengadilan Tinggi Kupang	Jalan menuju ke dalam gedung kantor	112.962.000,00
005.06.0199.610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	Jalan masuk diklat	2.419.333.263,00
Jumlah Jalan dan Jembatan			**19.628.745.150,00**
005.06.0199.610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	Saluran pembuangan air hujan, tetap merupakan kategori bangunan air	7.946.154.474,00
005.01.2600.401941	Pengadilan Agama Tais	Merupakan Bangunan Penguat Tebing yang sebelumnya tergabung dalam nilai bangunan gedung kantor PA Tais	230.653.264,00
Jumlah Irigasi			**8.176.807.738,00**
005.1500.01.099265	Pengadilan Negeri Rantau	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya berupa instalasi pengatur listrik dengan saklar yang melekat digedung bangunan kantor yang sedang direnovasi total atau dibangun ulang sehingga bangunan gedung kantor tersebut masih proses KDP sehingga belum dapat dilakukan koreksi	59.307.000,00
005.01.0100.401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA (tidak mempunyai gedung dan bangunan)	49.563.000,00
005.06.0199.610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	Merupakan jaringan telepon	30.435.857.964,00
Jumlah Jaringan			**30.544.727.964,00**
Jumlah Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan			**58.350.280.852,00**

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp51.619.330.318,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp51.619.330.318,00 dan Rp75.032.921.320,00, terjadi penurunan sebesar Rp23.413.591.002,00 atau 31,20 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	49.666.787.518,00	73.262.893.920,00	(23.596.106.402,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	128.459.011,00	128.459.011,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	1.273.680.104,00	1.091.164.704,00	182.515.400,00
7	005.07	Badan Pengawasan	535.403.685,00	535.403.685,00	0,00
Jumlah			**51.619.330.318,00**	**75.032.921.320,00**	**(23.413.591.002,00)**

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 50. Mutasi Transaksi Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**75.032.921.320,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	4.200.000,00
101	Pembelian	286.734.808,00
102	Transfer Masuk	197.981.650,00
103	Hibah Masuk	8.089.326.108,00
106	Pembatalan Penghapusan	3.400.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	362.365.400,00
193	Batal Transfer Keluar	143.000.000,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	31.668.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**9.118.675.966,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(168.956.984,00)
302	Transfer Keluar	(20.984.534.662,00)
303	Hibah Keluar	(143.000.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(8.173.129.266,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3.062.646.056,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(32.532.266.968,00)**
Jumlah Mutasi		**(23.413.591.002,00)**
Saldo Per 31 Desember 2024		**51.619.330.318,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024		**(587.141.571,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**51.032.188.747,00**

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Mutai Tambah:

1. Saldo awal aset tetap lainnya pada 1 satuan kerja Pengadilan Agama Wates tindak lanjut dari koreksi pencatatan alat kantor lainnya untuk ATL ini berupa buku brailer;
2. Pembelian aset tetap lainnya pada 1 satuan kerja Badan Urusan Administrasi membeli monografi menggunakan akun belanja 5461xx;
3. Transfer masuk pada 5 satuan kerja merupakan transfer antar kuasa pengguna barang berupa monografi;
4. Hibah masuk aset tetap lainnya pada Pengadilan Negeri Singaraja berupa lukisan canvas, dan Pengadilan Agama Denpasar berupa lukisan cat minyak;
5. Pembatalan penghapusan aset tetap lainnya karena aset sebelumnya yang terhapus tidak memilliki dokumen dasar penghapusan pada Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Reklasifikasi masuk aset tetap lainnya karena kesalahan kodefikasi barang yang terdapat pada 2 satuan kerja yaitu Balitbang Diklat Kumdil, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
7. Batal transfer pada 3 satuan kerja karena tidak jadi dilakukan transfer keluar yaitu Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Mutasi Kurang:

1. Koreksi pencatatan nilai berkurang pada 1 satuan kerja Badan Urusan Administrasi;
2. Transfer keluar aset tetap lainnya pada 2 satuan kerja yaitu Pengadilan Negeri Manokwari kepada Pemerintah Daerah, dan Badan Urusan Administrasi kepada Sekretariat Negara;
3. Penghentian aset dari penggunaan karena aset tetap lainnya telah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada 19 satuan kerja;
4. Penggunaan kembali BMN yang sudah diheentikan penggunaan aktif karena aset tetap lainnya masih digunakan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan Pengadilan Negeri Denpasar.

Daftar satuan kerja dan transaksi atas mutasi tambah dan mutasi kurang di atas disajikan secara rinci pada lampiran mutasi Aset Tetap Lainnya.

Terdapat Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.078.042.792,00 pada 4 satuan kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Aset Tetap Renovasi	Penjelasan
1	00501.0600.098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	616.526.900,00	Merupakan belanja pemeliharaan Gedung dan Banguanan (MAK 523111) yang direalisasikan untuk kegiatan renovasi gedung yang memenuhi batas mininmum kapitalisasi sebesar Rp271.958.400,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan diketahui terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang direalisasikan untuk pembuatan partisi gedung yang memenuhi batas minimum kapitalisasi sebesar Rp271.958.400,00, adapun gedung yang direnovasi merupakan gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh sehingga belanja tersebut seharusnya dibebankan dari Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (MAK 536121). Bukti pertanggungjawaban atas belanja renovasi tersebut berupa 13 kuitansi dan telah dibayar lunas serta dipertanggungjawabkan dengan SPM-GUP. Atas permasalahan tersebut PPK PT Banda Aceh menjelaskan bahwa pekerjaan renovasi tersebut menambah fungsi dari Gedung dan Bangunan, namun demikian pekerjaan tersebut direalisasikan dengan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (MAK 523111) dengan pertimbangan tidak tersediaanya anggaran Belanja Modal (MAK 53) untuk kegiatan tersebut. Renovasi tetap dilaksanakan meskipun tidak tersedia anggaran Belanja Modal dengan pertimbangan gedung sementara harus segera difungsikan sebagai kantor PT Banda Aceh karena kantor gedung lama akan segera dibongkar untuk pelaksanaan pembangunan gedung baru. Akan dilakukan mekanisme Hibah Keluar kepada Pemda pada periode 2025.
2	00501.0600.098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	179.850.000,00	Renovasi atas gedung pinjam pakai milik Dinas Pemuda dan Olahraga Banda Aceh yang difungsikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai tahun 2022-2024 sebagai gedung pinjam pakai, mengingat gedung tersebut awalnya merupakan aula dengan ruangan kosong. Untuk menunjang kegiatan operasional Pengadilan Negeri Banda Aceh maka dilakukan renovasi atas gedung pinjam pakai tersebut berupa partisi-partisi ruangan yang memisahkan antara PTSP, sub bagian dan panmud serta penambahan toilet untuk menunjang layanan terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Akan dilakukan mekanisme hibah keluar kepada Pemda pada periode 2025.
3	00501.0100.401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	217.008.008,00	Merupakan renovasi atas bangunan gedung kantor milik Pemda DKI Jakarta menggunakan belanja pemeliharaan gedung kantor, akan diserahkan ke PEMDA DKI.
4	00506.0199.610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	64.657.884,00	Akan diserahkan ke BUA pada Tahun 2024
Jumlah			**1.078.042.792,00**	

Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp475.263.059.024,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp475.263.059.024,00 dan Rp915.655.052.073,00, terjadi penurunan sebesar Rp440.391.993.049,00 atau 48,10 persen, diantaranya pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal Neraca.

Perbandingan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	475.263.059.024,00	915.655.052.073,00	(440.391.993.049,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**475.263.059.024,00**	**915.655.052.073,00**	**(440.391.993.049,00)**

Perbandingan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Wilayah

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**915.655.052.073,00**
Mutasi Tambah :		
503	Pengembangan KDP	914.457.263.518,00
502	Perolehan/Penambahan KDP	74.901.184.968,00
510	Perolehan Lainnya KDP	68.054.173.722,00
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	62.832.787.030,00
508	Hibah Masuk KDP	9.602.719.578,00
514	Reklasifikasi Masuk KDP	102.804.703,00
Jumlah Mutasi Tambah		**1.129.950.933.519,00**
Mutasi Kurang :		
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(102.804.703,00)
505	Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(1.588.454.024,00)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(34.586.243.239,00)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(103.431.867.024,00)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(1.430.633.557.578,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.570.342.926.568,00)**
Jumlah Mutasi		**(440.391.993.049,00)**
Saldo per 31 Desember 2024		**475.263.059.024,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Pengembangan KDP pada 117 satuan kerja, merupakan penginputan BAST pekerjaan yang diinput secara bertahap pada KDP;

2. Perolehan/Penambahan KDP 88 satuan kerja merupakan titik awal penginputan KDP, biasanya pengeluaran/biaya pertama yang dikeluarkan;
3. Koreksi pencatatan nilai bertambah KDP dilakukan sebagai bentuk perbaikan atas kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian nilai pada 23 satuan kerja;
4. Hibah masuk KDP pada 24 satuan kerja berasal dari Pemerintah Daerah;
5. Perolehan lainnya KDP karena pencatatan transaksi sebelumnya melakukan kesalahan perekaman kodefikasi BMN yang sudah di *approve* dan tidak dapat dilakukan ubah data transaksi, maka dilakukan perbaikan koreksi dan kemudian dilakukan penginputan kembali menggunakan menu perolehan lainnya KDP pada 11 satuan kerja;
6. Reklasifikasi masuk KDP pada Pengadilan Negeri Sumenep dengan pasangan transaksinya reklasifikasi keluar.

Mutasi Kurang :

1. Penghapusan/penghentian KDP pada 5 satuan kerja dikarenakan KDP mangkrak dan adanya kesalahan pencatatan yang kemudian dilakukan koreksi;
2. Koreksi pencatatan KDP karena kesalahan penginputan kuantitas KDP pada perekaman sebelumnya yang terdapat pada 25 satuan kerja;
3. Koreksi nilai KDP berkurang karena kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian terkait penginputan sebelumnya pada 20 satuan kerja;
4. Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi terdapat pada 114 satuan kerja.

Rincian daftar satuan kerja dan transaksi serta kode barang terhadap mutasi di atas dijelaskan dalam lampiran Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp6.790. 148.086. 757,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp6.790.148.086.757,00) dan (Rp6.049.996.804.082,00), terjadi kenaikan sebesar Rp740.151.282.675 atau 12,23 persen.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 53. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.005.464.644.692,00	(4.101.320.297.181,00)	904.144.347.511,00
2	Gedung dan Bangunan	13.252.752.386.154,00	(2.664.076.141.301,00)	10.588.676.244.853,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.350.280.852,00	(24.164.506.704,00)	34.185.774.148,00
4	Aset Tetap Lainnya	51.619.330.318,00	(587.141.571,00)	51.032.188.747,00
Jumlah		**18.368.186.642.016,00**	**(6.790.148.086.757,00)**	**11.578.038.555.259,00**

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp3.728.776,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.728.776,00 dan Rp0,00.

Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per akun disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 54. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	3.747.514,00	48.752.226,00	(45.004.712,00)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(18.738,00)	(48.752.226,00)	48.733.488,00
3	Piutang Jangka Panjang lainnya	578.845.030,00	0,00	578.845.030,00
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(578.845.030,00)	0,00	(578.845.030,00)
Jumlah Piutang Jk. Panjang		**3.728.776,00**	**0,00**	**3.728.776,00**

Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik

Komposisi Piutang Jangka Panjang

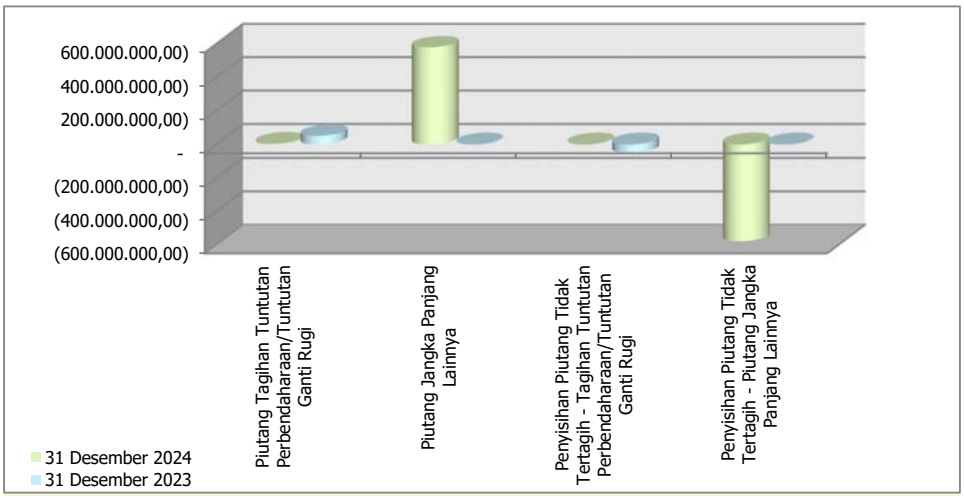

Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	3.728.776,00	0,00	3.728.776,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**3.728.776,00**	**0,00**	**3.728.776,00**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp3.747.514,00

C.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.747.514,00 dan Rp48.752.226,00.

Perbandingan rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	3.747.514,00	48.752.226,00	(45.004.712,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**3.747.514,00**	**48.752.226,00**	**(45.004.712,00)**

Mutasi saldo Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	**48.752.226,00**
Mutasi Tambah :	
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Agama Dompu (Amrih, S.H.)	4.000.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Subhan Attamimi, S.H.)	2.200.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Achmad Lohy, S.Ag.)	29.980.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Agama Muara Tebo (Abdul Muthalib, S.H.)	2.500.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Negeri Watampone (Usman, S.H.)	450.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Negeri Indramayu (Muriyanto, S.H.)	5.450.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Agama Pangkalpinang (Drs. H. Nurkholish, M.H.)	4.800.000,00
Piutang Tagihan TGR Pengadilan Tinggi Jakarta (Raulina Sibuea, S.H.)	3.600.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**52.980.000,00**
Mutasi Kurang :	
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Agama Dompu (Amrih, S.H.)	(4.000.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Subhan Attamimi, S.H.)	(2.200.000,00)
Angsuran Tagihan TGR Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bulan April s.d Desember 2024 (Achmad Lohy, S.Ag.)	(11.242.494,00)
ReklasifikasiTagihan TGR Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ke Bagian Lancar (Achmad Lohy, S.Ag.)	(14.989.992,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Agama Muara Tebo (Abdul Muthalib, S.H.)	(2.500.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Negeri Watampone (Usman, S.H.)	(450.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Negeri Indramayu (Muriyanto, S.H.)	(5.450.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Agama Pangkalpinang (Drs. H. Nurkholish, M.H.)	(4.800.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Tinggi Jakarta (Raulina Sibuea, S.H.)	(3.600.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Negeri Pandeglang (Sjamsudin UP, S.H., M.H.)	(12.500.000,00)
Pelunasan Tagihan TGR Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (I Made Subagio Wiryo)	(36.252.226,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(97.984.712,00)**
Jumlah Mutasi	**(45.004.712,00)**
Saldo per 31 Desember 2024	**3.747.514,00**

Penjelasan mutasi tambah dan kurang atas Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi di tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengadilan Agama Dompu

Nama	:	Amrih, S.H.
NIP	:	19650105 198703 2 003
Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / IIId
Jabatan	:	Panmud Permohonan
Merk	:	Honda
Type	:	Honda Supra NF 125 TD
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	2008
No. Kendaraan	:	EA 3471 R
Nilai Piutang TGR	:	Rp4.000.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	C8B7E6U8EUK3NVJH Tanggal 20 Juni 2024
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)	:	7/SEK/SKET.KU1.3/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024

   b. Pengadilan Agama Muara Tebo

Nama	:	Abdul Muthalib, S.H.
NIP	:	19840126 200312 1 002
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. I / IIIb
Jabatan	:	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala
Merk	:	Honda
Type	:	MCB 97 Sport
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	2004
No. Kendaraan	:	BH 5173 WZ
Nilai Piutang TGR	:	Rp2.500.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	792937QLUONN3CFA Tanggal 24 Januari 2024
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)	:	2/SEK/SKET.KU1.3/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024

c. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon terdapat 2 Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	:	Subhan Attamimi, S.H.
NIP	:	19770421 200604 1 009
Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / IIId
Jabatan	:	Juru Sita Pengganti / Bendahara Pengeluaran
Merk	:	Yamaha
Type	:	5 TP Jupiter-Z
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	2005
No. Kendaraan	:	DE 4738 AM
Nilai Piutang TGR	:	Rp2.200.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	74EE861QV3M0DDKJ Tanggal 29 Februari 2024
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)	:	5/SEK/SKET.KU1.3/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024

Nama	:	Achmad Lohy, S.Ag.
NIP	:	19721109 200604 1 009
Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb
Jabatan	:	Sekretaris
Merk	:	Axioo
Type	:	Mybook Pro K3
Jenis	:	2 unit Laptop
Tahun Perolehan	:	2022
Nilai Piutang TGR	:	Rp29.980.000,00 (belum lunas)
Cicilan / bulan	:	Rp1.249.166,00
Periode Cicilan	:	24 Bulan
Bukti Pembayaran	:	1. SPM 00019A Tanggal 15/3/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-1 bulan April 2024) 2. SPM 00023A Tanggal 1/4/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-2 bulan Mei 2024)

		3. SPM 00032A Tanggal 14/5/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-3 bulan Juni 2024) 4. SPM 00043A Tanggal 12/6/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-4 bulan Juli 2024) 5. SPM 00049A Tanggal 12/7/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-5 bulan Agustus 2024) 6. SPM 00066A Tanggal 5/9/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-6 bulan September 2024) 7. SPM 00058A Tanggal 15/8/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-7 bulan Oktober 2024) 8. SPM 00082A Tanggal 7/10/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-8 bulan November 2024) 9. SPM 00091A Tanggal 12/11/2024 sebesar Rp1.249.166,00 (cicilan ke-9 bulan Desember 2024)

d. Pengadilan Negeri Watampone

Nama	:	Usman, S.H.
NIP	:	19690212 199303 1 005
Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa
Jabatan	:	Sekretaris
BMN I		
Merk	:	Suzuki

Type	:	A 100
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	1993
No. Kendaraan	:	DD 4013 W
BMN II		
Merk	:	Honda
Type	:	CG 110
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	1982
No. Kendaraan	:	DD 901 W
Nilai Piutang TGR atas 2 BMN	:	Rp450.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	8B60361QV44KO8IK Tanggal 18 Juli 2024
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)	:	8A/SEK/SKET.KU1.3/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024

e. Pengadilan Negeri Indramayu

Nama	:	Muriyanto, S.H.
NIP	:	19720314 199303 1 003
Pangkat/Golongan	:	Pembina / Iva
Jabatan	:	Sekretaris
BMN I		
Merk	:	Suzuki
Type	:	RC 100
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	1992
No. Kendaraan	:	E 2539 P
BMN II		
Merk	:	Yamaha
Type	:	L2S
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	1982
No. Kendaraan	:	E 2033 P
BMN III		
Merk	:	Honda Mega Pro
Type	:	-

Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	2008
No. Kendaraan	:	E 4442 P
Nilai Piutang TGR atas 3 BMN	:	Rp5.450.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	31C886U8EUQBKQE1 Tanggal 29 Agustus 2024
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)	:	12/SEK/SKET.KU1.3/IX/2024 Tanggal 10 September 2024

f. Pengadilan Agama Pangkalpinang

Nama	:	Drs. H. Nurkholish, M.H.
NIP	:	19630426 199403 1 002
Pangkat/Golongan	:	Hakim Utama Muda / IVd
Jabatan	:	Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang
Merk	:	Honda
Type	:	Supra X 125 cc
Jenis	:	Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	:	2005
No. Kendaraan	:	BN 5458 PZ
Nilai Piutang TGR	:	Rp4.800.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	605C855DF9RBD00O Tanggal 23 Oktober 2024
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)	:	15/SEK/SKET.KU1.3/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024

g. Pengadilan Tinggi Jakarta

Nama	:	Raulina Sibuea, S.H.
NIP	:	040014949
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama / IVe
Jabatan	:	Pensiunan Panitera/Sekretaris
Merk	:	Toyota
Type	:	Kijang
Jenis	:	Kendaraan Roda Empat
Tahun Pembuatan	:	1995
No. Kendaraan	:	B 2606 HQ

Nilai Piutang TGR	:	Rp3.600.000,00 (lunas)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)	:	AD1BA55DFA1E6HNQ Tanggal 27 Desember 2024

Penjelasan:

1) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: A.03.KU.04.04 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pembebanan Ganti Rugi kepada Raulina Sibuea, S.H. Pembebanan Kerugian Negara terhadap Raulina Sibuea, S.H. dikenakan TGR sebesar Rp36.500.000,00 atas hilangnya kendaraan dinas mobil Toyota Kijang Tahun 1995 No. Pol. B 2606 HQ milik Pengadilan Tinggi Jakarta;
2) Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: A.KU.04.06-197 tanggal 31 Oktober 2003 Perihal: Usul Penghapusan Tuntutan Ganti Rugi a.n Raulina Sibuea, S.H. Pegawai PT. Bandung;
3) Surat Kepala Badan Urusan Adminitrasi Nomor: 324/BUA/KU.02/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 Hal: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n Raulina Sibuea, S.H. angka 8 menyatakan rincian hutang:
   a) Jumlah Kerugian Negara : Rp36.500.000,00
   b) Jumlah yang telah diangsur : Rp5.040.000,00
   c) Jumlah yang masih harus dibayar : Rp31.460.000,00
4) Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta Nomor: SP3N-461/PUPNC.10.04/2015 tanggal 27 Januari 2015 Hal: Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara a.n Raulina Sibuea, S.H. sebesar Rp31.460.000,00;
5) Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: W10.U/3243/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 Hal: Pelaporan Pembayaran Angsuran TGR a.n Raulina Sibuea, S.H. sebesar Rp10.000.000,00;
6) Surat a.n Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (Kabag Umum dan Keuangan) Nomor: W10-U/1258/KU.01/3/2016 tanggal 7 Maret 2016 Hal: Pelaporan Pembayaran Angsuran TGR a.n Raulina Sibuea, S.H. sebesar Rp10.000.000,00;
7) Surat a.n Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (Sekretaris) Nomor: W10-U/2036/KU.01/4/2017 tanggal 6 April 2017 Hal: Angsuran (pelunasan) TGR a.n Raulina Sibuea, S.H. sebesar Rp7.860.000,00;

8) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Mahkamah Agung pada KPKNL Jakarta IV Semester I Tahun 2024 Nomor: BAR-23/2024.1/REKON/MA/KN.4/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menyatakan telah melakukan rekonsiliasi data Piutang Negara pada Mahkamah Agung (MA) Semester I Tahun 2024 dari tanggal 29 Oktober 2024 s.d tanggal 30 Oktober 2024 terdapat kurang setor karena tidak terdapat bukti setor sebesar Rp3.600.000,00;
9) Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: 1805/BUA.3/KU1.3/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Hal: Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data Piutang Negara Periode Semester I Tahun 2024 dengan nilai sisa TGR yang masih harus disetor PT Jakarta sebesar Rp3.600.000,00;
10) Terdapat setoran pelunasan sebesar Rp3.600.000,00 dengan NTPN AD1BA55DFA1E6HNQ tanggal 27 Desember 2024 disertai Pernyataan Piutang Negara Lunas Nomor: SPPNL-4/PUPNC.10.04/2025 tanggal 06 Januari 2025 dari Panitia Urusan Piutang Negara.

2. Terdapat pelunasan Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi atas periode tahun sebelumnya atas nama:
   a. Sjamsudin UP, S.H., M.H. pada Satuan Kerja 00501.2900.417844 Pengadilan Negeri Pandeglang sebesar Rp12.500.000,00 yang berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) tanggal 7 Februari 2024 telah dibayar lunas dengan NTPN B42B16U8EU7PKOMR dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor 3/SEK/SKET.KU1.3/II/2024 pada tanggal 23 Februari 2024;
   b. I Made Subagio Wiryo pada Satuan Kerja 00501.2300.099883 Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebesar Rp36.252.226,00 yang berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) tanggal 2 April 2024 telah dibayar lunas dengan NTPN 63B533CIFK424MAD dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor 8/SEK/SKET.KU1.3/VI/2024 pada tanggal 27 Juni 2024.

Berikut disajikan rincian perhitungan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur:

Tabel 57. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing Debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR
1	00501.BUA	2100	539117	PTUN Ambon	Achmad Lohy, S.Ag.	Lancar	3.747.514,00
Jumlah							**3.747.514,00**

Berdasarkan data diatas, terdapat Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satuan Kerja 00501.2100.539117 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon atas nama Achmad Lohy, S.Ag., kehilangan BMN berupa dua unit laptop dengan jenis/merk: Axioo Mybook Pro K3, tahun perolehan 2022, dengan nilai Kerugian Negara sebesar Rp29.980.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 34.KPTUN.W8-TUN4.PL.2.1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, pelunasan akan dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji dalam jangka waktu 24 bulan, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp1.249.166,00 dan telah diangsur selama 9 bulan terhitung bulan April s.d Desember 2024 sebesar Rp11.242.494,00, sehingga sisa saldo Tagihan TP/TGR sebesar Rp18.737.506,00. Pada 31 Desember 2024 dilakukan reklasifikasi atas Piutang Jangka Panjang TGR ke Bagian Lancar TGR atas Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan sebesar Rp14.989.992,00 (Rp1.249.166,00 x 12 bulan), maka sisa saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.747.514,00 (Rp29.980.000,00-Rp11.242.494,00-Rp14.989.992,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Rp18.738,00)

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp18.738,00) dan (Rp48.752.226,00).

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	(18.738,00)	(48.752.226,00)	48.733.488,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**(18.738,00)**	**(48.752.226,00)**	**48.733.488,00**

Berikut disajikan rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur:

Tabel 59. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	00501.BUA	2100	539117	PTUN Ambon	Achmad Lohy, S.Ag.	Lancar	3.747.514,00	0,50%	(18.738,00)
Jumlah							**3.747.514,00**		**(18.738,00)**

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp578.845.030,00

C.3.3. Piutang Jangka Panjang lainnya

Piutang jangka panjang lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya karena macet kepada PUPN/DJKN dengan nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada Kementrian/Lembaga yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp578.845.030,00 dan Rp0,00.

Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	578.845.030,00	0,00	578.845.030,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**578.845.030,00**	**0,00**	**578.845.030,00**

Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan hasil reklasifikasi dari Piutang PNBP pada Badan Urusan Administrasi yang timbul akibat terdapat tunggakan atas pembayaran sewa lahan untuk kantin sebesar Rp578.845.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur a.n. Umar Maya

   Terdapat Piutang PNBP dengan debitur a.n. Umar Maya akibat tunggakan atas pembayaran sewa lahan untuk kantin pada Gedung Mahkamah Agung Medan Merdeka Utara periode April 2017 sampai dengan Mei 2019. Terdapat perubahan nilai piutang pada Semester I disebabkan adanya pengakuan setoran dengan NTPN E6A5248VUIIG5R7A sebesar Rp32.213.022,00 dan adanya koreksi pengenaan denda akibat kesalahan dalam penerapan persentase denda. Sebelumnya, persentase yang digunakan adalah 24%, sedangkan yang seharusnya digunakan adalah 48% (24 bulan x 2%) sehingga saldo piutang PNBP terkoreksi menjadi Rp377.314.244,00.

2. Debitur a.n. Nana Ratna Sari

   Terdapat piutang PNBP dengan debitur a.n. Nana Ratna Sari akibat tunggakan atas pembayaran sewa lahan untuk kantin pada Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ahmad Yani periode Oktober 2018 sampai dengan Tahun 2020. Terdapat perubahan nilai piutang pada semester 1 disebabkan adanya koreksi pengenaan denda akibat kesalahan dalam penerapan persentase denda. Sebelumnya, persentase yang digunakan adalah 24%, sedangkan yang seharusnya digunakan adalah 48% (24 bulan x 2%) sehingga saldo piutang PNBP terkoreksi menjadi Rp201.530.786,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya (Rp578.845.030,00)

C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp578.845.030,00) dan Rp0,00.

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	(578.845.030,00)	0,00	(578.845.030,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**(578.845.030,00)**	**-**	**(578.845.030,00)**

Berikut disajikan rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur:

Tabel 62. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	00501.BUA	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Umar Maya	Macet	377.314.244,00	100,00%	(377.314.244,00)
2	00501.BUA	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Nana Ratna Sari	Macet	201.530.786,00	100,00%	(201.530.786,00)
Jumlah							**578.845.030,00**		**(578.845.030,00)**

Aset Lainnya Rp124.100.285.490,00

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp124.100.285.490,00 dan Rp233.208.654.884,00, terjadi penurunan sebesar Rp109.108.369.394,00 atau 46,79 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per akun disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Tak Berwujud	98.803.896.742,00	110.013.999.715,00	(11.210.102.973,00)
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	62.522.083.798,00	164.453.156.381,00	(101.931.072.583,00)
3	Aset Lain-lain	161.372.376.431,00	161.921.949.010,00	(549.572.579,00)
Jumlah		**322.698.356.971,00**	**436.389.105.106,00**	**(113.690.748.135,00)**
4	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	(198.598.071.481,00)	(203.180.450.222,00)	4.582.378.741,00
Jumlah Aset Lainnya		**124.100.285.490,00**	**233.208.654.884,00**	**(109.108.369.394,00)**

Komposisi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik Komposisi Aset Lainnya

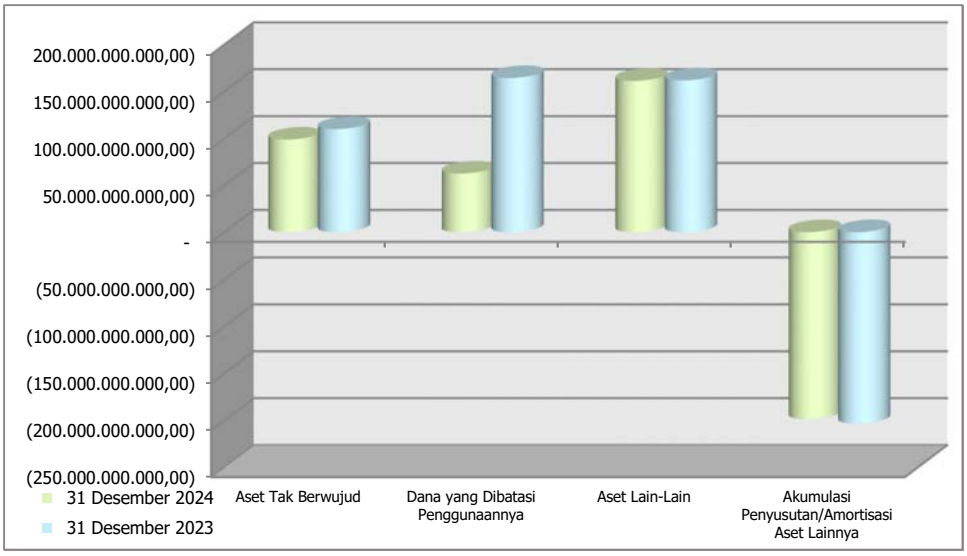

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	120.292.559.481,00	229.232.592.073,00	(108.940.032.592,00)
2	005.02	Kepaniteraan	282.736.652,00	280.130.437,00	2.606.215,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	12.152.662,00	26.527.737,00	(14.375.075,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	49.684.888,00	0,00	49.684.888,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	463.298.578,00	493.298.578,00	(30.000.000,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	2.551.203.309,00	3.176.106.059,00	(624.902.750,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	448.649.920,00	0,00	448.649.920,00
Jumlah			**124.100.285.490,00**	**233.208.654.884,00**	**(109.108.369.394,00)**

Aset Tak Berwujud Rp98.803.896.742,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp98.803.896.742,00 dan Rp110.013.999.715,00, terjadi penurunan sebesar Rp11.210.102.973,00 atau 10,19 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 65. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	91.020.560.703,00	98.365.168.590,00	(7.344.607.887,00)
2	005.02	Kepaniteraan	236.857.000,00	203.557.000,00	33.300.000,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	499.087.300,00	2.545.455.294,00	(2.046.367.994,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	113.285.000,00	113.285.000,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	428.139.384,00	1.533.280.130,00	(1.105.140.746,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	3.998.920.521,00	3.998.920.521,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	2.507.046.834,00	3.254.333.180,00	(747.286.346,00)
Jumlah			**98.803.896.742,00**	**110.013.999.715,00**	**(11.210.102.973,00)**

Mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 66. Mutasi Transaksi Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**110.013.999.715,00**
Mutasi Tambah :		
103	Hibah Masuk	2.176.300.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	572.692.199,00
106	Pembatalan Penghapusan	183.737.500,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	105.201.625,00
101	Pembelian	64.991.500,00
100	Saldo Awal	36.956.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	33.300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**3.173.178.824,00**
Mutasi Kurang :		
305	Koreksi Pencatatan	(16.000.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(572.692.199,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13.794.589.598,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(14.383.281.797,00)**
Jumlah Mutasi		**(11.210.102.973,00)**
Saldo per 31 Desember 2024		**98.803.896.742,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024		**(49.619.600.184,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**49.184.296.558,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Saldo awal aset tak berwujud merupakan hasil dari proses pemisahan aset tak berwujud yang sebelumnya nilainya masih tergabung sebagai satu kesatuan dengan gedung dan bangunan pada Mahkamah Syari'ah Blangpidie, dan Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam;
2. Pembelian aset tak berwujud pada Badan Pengawasan berupa lisensi menggunakan akun belanja 536111;
3. Hibah masuk aset tak berwujud berupa lisensi dan software komputer pada Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, dan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Pembatalan penghapusan aset tak berwujud karena aset sebelumnya yang terhapus tidak memilliki dokumen dasar penghapusan pada Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Pengadilan Negeri Kepahiang, dan Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Pengembangan nilai aset (Langsung) pada satuan kerja Kepaniteraan untuk *Software* komputer.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi pencatatan aset tak berwujud terdapat pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Sampang;
2. Penghentian aset dari penggunaan karena aset tak berwujud telah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada 48 satuan kerja.

Terdapat Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp4.662.130.394,00 pada 85 satuan kerja. Rincian penjelasan per satuan kerja atas Aset Tak Berwujud Lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Rincian Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp62.522.083.798,00

C.4.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya. Pencatatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan Tahun Anggaran 2024 berakhir menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir Tahun Anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir Tahun Anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp62.522.083.798,00 dan Rp164.453.156.381,00.

Perbandingan rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 67. Perbandingan Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	61.705.695.295,00	163.365.854.521,00	(101.660.159.226,00)
2	005.02	Kepaniteraan	232.094.340,00	236.652.000,00	(4.557.660,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	9.493.000,00	0,00	9.493.000,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	26.434.888,00	0,00	26.434.888,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	548.366.275,00	850.649.860,00	(302.283.585,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**62.522.083.798,00**	**164.453.156.381,00**	**(101.931.072.583)**

Aset Lain-Lain Rp161.372.376.431,00

C.4.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp161.372.376.431,00 dan Rp161.921.949.010,00, terjadi penurunan sebesar Rp549.572.579,00 atau 0,34 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 68. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	147.335.759.876,00	160.277.048.880,00	(12.941.289.004,00)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	14.036.616.555,00	1.644.900.130,00	12.391.716.425,00
Jumlah		**161.372.376.431,00**	**161.921.949.010,00**	**(549.572.579,00)**

Perbandingan rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 69. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	148.053.251.070,00	155.888.996.305,00	(7.835.745.235,00)
2	005.02	Kepaniteraan	7.698.657.533,00	0,00	7.698.657.533,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	2.156.751.994,00	3.833.029.679,00	(1.676.277.685,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	193.830.000,00	(193.830.000,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	2.381.811.972,00	1.276.671.226,00	1.105.140.746,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	268.400.000,00	268.400.000,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	813.503.862,00	461.021.800,00	352.482.062,00
Jumlah			**161.372.376.431,00**	**161.921.949.010,00**	**(549.572.579,00)**

Mutasi transaksi Aset Lain-Lain pada 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 70. Mutasi Transaksi Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**161.921.949.010,00**
Mutasi Tambah :		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	108.125.292.512,00
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	5.683.346.507,00
Jumlah Mutasi Tambah		**113.808.639.019,00**
Mutasi Kurang :		
301	Penghapusan	(570.492.300,00)
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(10.016.664.277,00)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(103.771.055.021,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(114.358.211.598,00)**
Jumlah Mutasi		**(549.572.579,00)**
Saldo Per 31 Desember 2024		**161.372.376.431,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024		**(148.978.471.297,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**12.393.905.134,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Lain-Lain sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya merupakan transaksi otomatis yang terbentuk dari transaksi penghentiaan aset dari penggunaan pada 305 satuan kerja;
2. Pencatatan pembatalan barang yang mau dihapuskan merupakan aset-aset yang dibatalkan penghapusan karena masih digunakan atau belum ada dokumen dasar untuk usulan pencatatan barang yang mau dihapuskan terdapat pada 15 satuan kerja.

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan yang masuk kedalam aset lainnya terdapat pada 7 satuan kerja;
2. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap merupakan transaksi otomatis yang terbentuk dari transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada 61 satuan kerja;
3. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan merupakan aset-aset yang akan dilakukan penghapusan, terdapat pada 299 satuan kerja.

Dari tabel di atas, dijelaskan secara rinci daftar satuan kerja, transaksi dan kode barangnya pada lampiran Aset Lain-Lain.

Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp198.598.071.481,00)

C.4.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp198.598.071.481,00) dan (Rp203.180.450.222,00), terjadi penurunan sebesar Rp4.582.378.741,00 atau 2,26 persen.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 71. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud			
	Software	59.883.255.953,00	(40.357.935.770,00)	19.525.320.183,00
	Lisensi	32.453.641.795,00	(9.261.664.414,00)	23.191.977.381,00
	Hasil Kajian/Penelitian	1.804.868.600,00	0,00	1.804.868.600,00
	Aset Tak Berwujud Lainnya	4.662.130.394,00	0,00	4.662.130.394,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	**98.803.896.742,00**	**(49.619.600.184,00)**	**49.184.296.558,00**
2	Aset Lain-Lain			
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	147.335.759.876,00	(135.700.921.184,00)	11.634.838.692,00
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	14.036.616.555,00	(13.277.550.113,00)	759.066.442,00
	Jumlah Aset Lain-lain	**161.372.376.431,00**	**(148.978.471.297,00)**	**12.393.905.134,00**
Jumlah		**260.176.273.173,00**	**(198.598.071.481,00)**	**61.578.201.692,00**

Kewajiban Jangka Pendek Rp110.776.105.869,00

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp110.776.105.869,00 dan Rp195.204.452.338,00, terjadi penurunan sebesar Rp84.428.346.469,00 atau 43,25 persen.

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per akun disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 72. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	107,847,732,002.00	192,354,389,141.00	(84,506,657,139.00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2,876,111,776.00	2,783,044,758.00	93,067,018.00
3	Uang Muka dari KPPN	2,160,000.00	34,246,000.00	(32,086,000.00)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	50,102,091.00	32,772,439.00	17,329,652.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**110,776,105,869.00**	**195,204,452,338.00**	**(84,428,346,469.00)**

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek

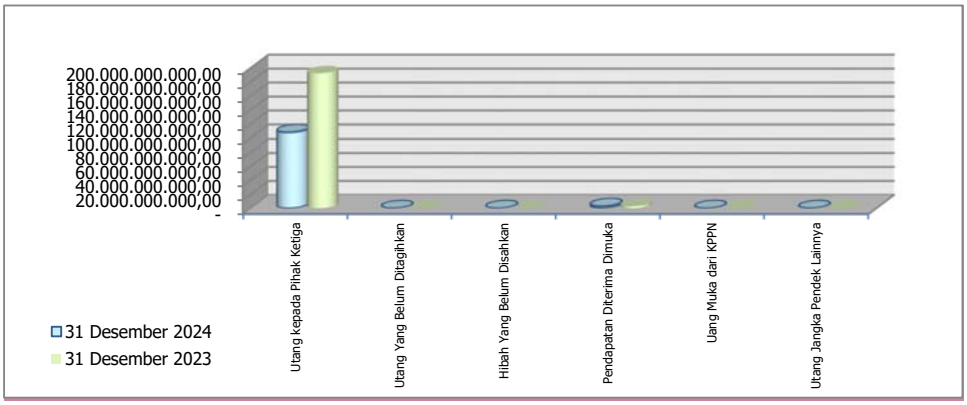

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	106,665,664,435.00	193,788,108,270.00	(87,122,443,835.00)
2	005.02	Kepaniteraan	248,781,259.00	312,290,309.00	(63,509,050.00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	2,249,978,628.00	135,648,045.00	2,114,330,583.00
4	005.04	Ditjen. Badilag	894,371,909.00	28,218,481.00	866,153,428.00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	4,213,000.00	62,880,518.00	(58,667,518.00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	696,826,588.00	854,228,785.00	(157,402,197.00)
7	005.07	Badan Pengawasan	16,270,050.00	23,077,930.00	(6,807,880.00)
Jumlah			**110,776,105,869.00**	**195,204,452,338.00**	**(84,428,346,469.00)**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp107.847.732.002,00

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp107.847.732.002,00 dan Rp192.354.389.141,00, terjadi penurunan sebesar Rp84.506.657.139,00 atau 43,93 persen.

Perbandingan rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	7.337.655.368,00	8.279.952.147,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	46.248.669.217,00	41.122.000.348,00
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	54.261.407.417,00	142.952.436.646,00
Dana Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah	**107.847.732.002,00**	**192.354.389.141,00**

Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 75. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	7.337.655.368,00	8.279.952.147,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	46.248.669.217,00	41.122.000.348,00
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	54.261.407.417,00	142.952.436.646,00
Dana Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah	**107.847.732.002,00**	**192.354.389.141,00**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 berasal dari:

1. Saldo akun Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, dan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berasal dari transaksi belanja pegawai yang belum dibayarkan ke pegawai, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan periode 31 Desember 2024;
   a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar
      - Kekurangan belanja uang makan dan kekurangan gaji pegawai yang disebabkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan, kenaikan kelas pengadilan Tahun 2024 sebesar Rp7.321.824.716,00.
      - Kekurangan gaji pegawai yang disebabkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan, kenaikan kelas pengadilan dan uang makan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp15.830.652,00.
   b. Belanja barang yang masih harus dibayar

No.	Uraian	Jumlah
1	Honorarium Penanganaan Perkara Bagi Hakim Agung bulan November dan Desember 2024	19,623,050,000.00
2	Langganan air	480,081,764.00
3	Langganan layanan call center	194,300.00
4	Sewa Domain	67,667.00
5	Langganan storage	47,730.00
7	Langganan Internet	806,455,536.00
8	Langganan Koran	6,525,000.00
9	Langganan air minum	1,771,999.00
10	Langganan Internet dan telepon	24,439,261.00
11	Pembayaran listrik	14,842,140,975.00
12	Perjalanan dinas mutasi pegawai	3,616,649,822.00
13	Pembayaran PBB Rumah Dinas	1,773,278.00
14	Pemeliharaan kendaraan dinas	2,267,734.00
15	Pembayaran pengiriman pos	321,031,893.00
16	Pembayaran retribusi sampah	1,229,400.00
17	Sewa hosting	332,000.00
18	Sewa rumah dinas	51,480,000.00
19	Langganan telepon	135,644,838.00
20	Pembaran Tunjangan Transport Hakim	6,318,901,000.00
21	Langganan Video Conference	8,004,920.00
22	Penjilidan berkas perkara	6,580,100.00
		46,248,669,217.00

2. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp54.261.407.417,00 terdapat pada 51 satuan kerja, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya berasal dari jurnal reklasifikasi akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya atas transaksi RPATA. Saldo Dana Penampungan di rekening, dan Utang Pihak Ketiga Lainnya (*Unaudited*) masing-masing sebesar Rp62.522.083.798,00 dan Rp56.984.273.681,00. Terdapat selisih sebesar Rp5.537.810.117,00 dikarenakan adanya pengajuan BAST pada 31 Desember 2024 yang telah selesai 100% dan belum 100%, sehingga total nilai utang kepada pihak ketiga terdapat selisih dengan akun dana penampungan di rekening penampungan. Terdapat 6 satuan kerja yang belum selesai 100% dan menyajikan aset sesuai dengan BAST yang diajukan per 31 Desember 2024 yaitu Pengadilan Agama Kuala Simpang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Muara Dua, dan Pengadilan Agama Bengkayang.

   Pada LK Audited nilai Utang Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp54.261.407.417,00, sedangkan nilai Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sebesar Rp62.522.083.798,00, terdapat selisih senilai Rp8.260.676.381,00 dikarenakan pekerjaan belum selesai 100% sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sehingga satuan kerja menginput BAST tidak sebesar pencatatan SPM Penampungan RPATA pada 6 satuan kerja yaitu Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Kuala Simpang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Muara Dua, dan Pengadilan Negeri Dobo.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp2.876.111.776,00

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.876.111.776,00 dan Rp2.783.044.758,00,00, terjadi kenaikan sebesar Rp93.067.018,00 atau 3,34 persen.

Perbandingan rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 76. Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	2.751.423.109,00	2.783.044.758,00	(31.621.649,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	124.688.667,00	0,00	124.688.667,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**2.876.111.776,00**	**2.783.044.758,00**	**93.067.018,00**

Berita Acara Rekonsiliasi Sewa BMN Non Rumah Negara dan rincian per satuan kerja atas Pendapatan Diterima Dimuka sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Uang Muka dari KPPN Rp2.160.000,00

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.160.000,00 dan Rp34.246.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp32.086.000,00,00 atau 93,69 persen, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Perbandingan rincian saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 77. Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	2.160.000,00	34.246.000,00	(32.086.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**2.160.000,00**	**34.246.000,00**	**(32.086.000,00)**

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp50.102.091,00

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.102.091,00 dan Rp32.772.439,00 merupakan utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

Tabel 78. Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	26.330.445,00	32.692.439,00	(6.361.994,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	80.000,00	(80.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	23.771.646,00	0,00	23.771.646,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**50.102.091,00**	**32.772.439,00**	**17.329.652,00**

Utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp50.102.091,00 terdapat pada satuan kerja:

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	Bukti Setor		
					Tgl. Dok.	NTPN	Nilai
005.01	0200	097542	Pengadilan Negeri Garut	582.566,00	6 Januari 2025	D1BAF0T8DE4OTG52	445.945,00
					6 Januari 2025	6C8204EUCOEATHTN	121.621,00
					6 Januari 2025	118B81PLT8N53HFE	15.000,00
	1200	401952	Pengadilan Agama Mesuji	980.000,00	2 Januari 2025	57A394EUCO7IVJNR	770.000,00
					3 Januari 2025	1A2A01PLT8GDUQ0N	210.000,00
	0700	403083	Pengadilan Agama Simalungun	736.345,00	16 Januari 2025	7D47B0T8DF6LTI6V	88.636,00
					16 Januari 2025	F05DC00QTKK9SSLO	30.800,00
					16 Januari 2025	D120C3IGSUTR9Q47	26.000,00
					16 Januari 2025	85FCE0T8DF6LQ7PF	590.909,00
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	24.031.534,00	-	-	-
005.06	0199	610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	23.771.646,00	1 Januari 2025	13FD14EU9R1UHHV5	2.720.500,00
					1 Januari 2025	AEF9C0T8AGOD4AM3	2.609.420,00
					1 Januari 2025	4FB7D746PAP4BS40	2.239.020,00
					1 Januari 2025	DFA9C00QQM60J1VA	2.649.040,00
					1 Januari 2025	175C200QQM60VK8P	1.990.176,00
					1 Januari 2025	DDA4F0T8AGOD1VDG	2.728.460,00
					1 Januari 2025	A01AB0T8AGOCRFDJ	2.704.580,00
					1 Januari 2025	1A58867P9G6NSOLN	2.894.100,00
					1 Februari 2025	BCDC70T8DDSQSSUV	3.236.350,00
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor				**50.102.091,00**			

Ekuitas **EKUITAS**

Rp32.133.765.951.062,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.133.765.951.062,00 dan Rp31.765.973.920.689,00, terjadi kenaikan sebesar Rp367.792.030.373,00 atau 1,16 persen.

Perbandingan rincian saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 79. Perbandingan Rincian Ekuitas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	31.101.404.778.700,00	30.728.888.525.365,00	372.516.253.335,00
2	005.02	Kepaniteraan	4.506.222.758,00	5.302.590.506,00	(796.367.748,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	673.383.063.821,00	677.168.155.957,00	(3.785.092.136,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	2.223.877.027,00	5.584.183.019,00	(3.360.305.992,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	21.437.401.380,00	21.556.769.310,00	(119.367.930,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	324.945.363.124,00	325.246.215.698,00	(300.852.574,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	5.865.244.252,00	2.227.480.834,00	3.637.763.418,00
Jumlah			**32.133.765.951.062,00**	**31.765.973.920.689,00**	**367.792.030.373,00**

Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

POS-POS PENJELASAN LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp90.366.384.951,00

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan pada Mahkamah Agung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.366.384.951,00 dan Rp89.442.053.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Perbandingan Rincian PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.640.420.140,00	9.417.029.740,00	2,37
425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(7.448.172,00)	(11.698.819,00)	(36,33)
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.380.000,00	219.310.000,00	(54,23)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.916.050.000,00	2.926.522.500,00	(0,36)
425232	Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	(420.000,00)	0,00	100,00
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.715.570.000,00	23.694.435.000,00	0,09
425233	Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara	(980.000,00)	0,00	100,00
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.228.494.613,00	51.001.592.433,00	(5,44)
425239	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	(3.674.000,00)	(3.610.000,00)	1,77
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	243.816.177,00	56.848.101,00	328,89
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	376.798,00	3.478,00	10.733,76
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.514.257.262,00	2.141.063.695,00	157,55
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	19.967.133,00	557.389,00	3.482,26
425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	(425.000,00)	0,00	100,00
Jumlah		**90.366.384.951,00**	**89.442.053.517,00**	**1,03**

Berdasarkan data diatas, terdapat pengembalian pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	0500	401338	Pengadilan Agama Jember	Rp1.700.000,00	Terdapat kelebihan atas pembayaran PNBP yang timbul dari perkara.
2	504	0300	401087	Pengadilan Agama Cilacap	Rp1.348.000,00	
3	504	2600	690133	Pengadilan Agama Lebong	Rp252.000,00	
4	504	2000	690086	Pengadilan Agama Andoolo	Rp374.000,00	
Total					**Rp3.674.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	0300	098015	Pengadilan Negeri Cilacap	Rp425.000,00	Kelebihan Belanja Tunjangan Khusus Papua Bulan Maret 2024 atas 1 orang pegawai.
Total					**Rp425.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	504	0200	400751	Pengadilan Agama Cirebon	Rp420.000,00	Terdapat kelebihan setor karena adanya kesalahan perekaman pada kode billing.
Total					**Rp420.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	504	0600	401659	Mahkamah Syar'iyah Takengon	Rp650.000,00	Terdapat kelebihan setor atas pendapatan ongkos Perkara dan pendaptan kejaksaan dan peradilan lainnya.
2	504	2000	690086	Pengadilan Agama Andoolo	Rp330.000,00	
Total					**Rp980.000,00**	

No	Kode Es I	Kode Wil	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Restitusi	Keterangan
1	501	1700	307225	Pengadilan Agama Manado	Rp179.800,00	Kelebihan atas pembayaran PNBP Sewa Rumah Dinas karena PPABP belum update data aplikasi Gaji atas pegawai yang mutasi.
2	501	2000	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	Rp160.000,00	
3	501	1700	402681	Pengadilan Tinggi Agama Manado	Rp2.636.800,00	
4	501	2300	402788	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	Rp924.000,00	
5	501	2600	672994	Pengadilan Negeri Bintuhan	Rp505.200,00	
6	501	0100	400647	Pengadilan Agama Jakarta Timur	Rp10.400,00	
7	501	1200	402644	Pengadilan Agama Kalianda	Rp86.622,00	
8	501	0900	401908	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp162.219,00	

9	506	0199	610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	Rp478.400,00	
10	501	0200	531823	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Rp27.500,00	
11	501	0200	400766	Pengadilan Agama Indramayu	Rp71.850,00	
12	501	1700	526734	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	Rp608.454,00	
13	501	1900	307445	Pengadilan Agama Maros	Rp259.876,00	
14	501	0200	400477	Pengadilan Negeri Sumber	Rp239.100,00	
15	501	0500	401508	Pengadilan Agama Ngawi	Rp106.260,00	
16	501	3500	526722	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	Rp739.200,00	
17	501	2200	526724	Pengadilan Tinggi Agama Bali	Rp118.800,00	
18	501	3000	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	Rp133.691,00	
Total					**Rp7.448.172,00**	
Grand Total					**Rp12.947.172,00**	

Beban Pegawai Rp7.564.817.147.430,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.564.817.147.430,00 dan Rp7.068.326.395.723,00 sebagai berikut:

Tabel 81. Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.726.977.882.150,00	1.610.472.834.541,00	7,23
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(154.699.447,00)	(148.407.285,00)	4,24
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.302.152,00	24.036.108,00	(3,05)
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(1.065.645,00)	(182.326,00)	484,47
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122.556.136.522,00	114.790.685.741,00	6,76
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(35.412.586,00)	(29.054.334,00)	21,88
511122	Beban Tunj. Anak PNS	34.174.989.387,00	32.338.024.513,00	5,68
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(3.029.333,00)	(2.259.634,00)	34,06
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	37.380.353.450,00	36.794.532.266,00	1,59
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(71.512.412,00)	(71.901.404,00)	(0,54)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.099.915.103.736,00	2.049.153.297.206,00	2,48
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(1.192.929.816,00)	(714.015.240,00)	67,07
511125	Beban Tunj. PPh PNS	338.404.320.943,00	302.426.241.700,00	11,90
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(7.406.484,00)	(32.403.380,00)	(77,14)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	83.337.351.610,00	84.231.228.720,00	(1,06)
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(3.991.150,00)	(5.807.480,00)	(31,28)
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	0,00	1.350.000,00	(100,00)
511129	Beban Uang Makan PNS	246.649.176.370,00	249.759.203.463,00	(1,25)
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(38.567.750,00)	(63.630.645,00)	(39,39)
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	63.750.000,00	69.525.000,00	(8,31)
511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	(125.000,00)	(125.000,00)	0,00
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.980.815.000,00	5.095.262.500,00	(2,25)
511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	(8.350.000,00)	(9.640.000,00)	(13,38)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19.210.133.756,00	18.164.175.000,00	5,76
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(96.174.593,00)	(118.692.594,00)	(18,97)
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	56.483.068.509,00	59.320.846.512,00	(4,78)
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	(95.150.000,00)	(81.350.000,00)	16,96
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	131.876.676.400,00	110.617.078.750,00	19,22
511158	Pengembalian Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	(16.155.000,00)	(40.112.500,00)	(59,73)
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	116.340.260,00	8.820.000,00	1.219,05
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	46.347.831.338,00	37.916.237.883,00	22,24
511224	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	(37.306.200,00)	(2.950.000,00)	1.164,62
511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	4.191.452.740,00	4.510.440.378,00	(7,07)
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	2.889.810.000,00	2.729.790.000,00	5,86
511311	Pengembalian Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	(1.288.800,00)	0,00	100,00
511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	38.980,00	36.710,00	6,18
511319	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	(34,00)	0,00	100,00
511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	275.121.000,00	256.179.000,00	7,39
511321	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	(128.880,00)	0,00	100,00
511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	17.220.000,00	11.088.000,00	55,30
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	50.414.813.000,00	46.865.783.000,00	7,57
511323	Pengembalian Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	(77.129.300,00)	(145.708.000,00)	(47,07)
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	12.647.337.707,00	11.724.298.890,00	7,87
511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	110.802.600,00	99.505.080,00	11,35
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.515.000.000,00	4.515.000.000,00	0,00
511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	300.775.200,00	298.268.740,00	0,84
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	10.946.346.604,00	1.526.325.900,00	617,17
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	(2.858.800,00)	0,00	100,00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	210.998,00	22.486,00	838,35
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	(2.221,00)	0,00	100,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	587.086.220,00	63.372.720,00	826,40
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	(285.880,00)	0,00	100,00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	153.183.378,00	16.611.448,00	822,16
511622	Pengembalian Beban Tunjangan Anak PPPK	(114.352,00)	0,00	100,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.612.203.000,00	222.836.000,00	623,49
511624	Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PPPK	(350.000,00)	0,00	100,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	571.836.460,00	76.899.262,00	643,62
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	(289.680,00)	0,00	100,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	1.932.407.600,00	312.966.650,00	517,45
511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	(527.100,00)	0,00	100,00
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5.100.000,00	425.000,00	1.100,00
512211	Beban Uang Lembur	682.027.000,00	634.970.100,00	7,41
512212	Beban Uang Lembur PPPK	18.461.000,00	2.821.000,00	554,41
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	2.502.713.621.871,00	2.283.903.768.268,00	9,58
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	(596.629.928,00)	(520.111.714,00)	14,71
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24.176.540.880,00	1.357.958.724,00	1.680,36
Jumlah		**7.564.817.147.430,00**	**7.068.326.395.723,00**	**7,02**

Beban Persediaan Rp87.108.661.808,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp87.108.661.808,00 dan Rp87.067.531.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	87.108.661.808,00	87.067.531.291,00	0,05
Jumlah		**87.108.661.808,00**	**87.067.531.291,00**	**0,05**

Beban Barang dan Jasa Rp1.849.209.178.781,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi Belanja Modal yang tidak menghasilkan Aset Tetap.

Adapun Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.849.209.178.781,00 dan Rp1.590.790.224.987,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	742.538.091.399,00	723.937.755.872,00	2,57
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(50.096.398,00)	(66.252.788,00)	(24,39)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	2.977.000,00	(100,00)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.879.694.684,00	18.977.597.516,00	(5,79)
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(8.772.560,00)	(1.650.000,00)	431,67
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43.522.792.692,00	67.396.824.348,00	(35,42)
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(44.011.760,00)	(14.586.800,00)	201,72
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	305.088.859.660,00	158.141.903.572,00	92,92
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(145.316.300,00)	(43.960.490,00)	230,56
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	2.965.700,00	(100,00)
521211	Beban Bahan	74.289.875.097,00	49.948.175.075,00	48,73
521211	Pengembalian Beban Bahan	(1.325.000,00)	(18.616.500,00)	(92,88)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	640.754.000,00	719.300.000,00	(10,92)
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(28.819,00)	(3.125.000,00)	(99,08)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.143.276.006,00	1.965.240.584,00	(41,83)
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	(150.000,00)	100,00
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	1.200.000,00	(100,00)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.232.040.124,00	7.795.043.702,00	(84,19)
521252	Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,00	(7.008.000,00)	100,00
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	55.928.000,00	518.896.900,00	(89,22)
521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	3.750.000,00	25.600.000,00	(85,35)
522111	Beban Langganan Listrik	183.086.517.272,00	170.649.473.558,00	7,29
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	(34.028.751,00)	0,00	100,00
522112	Beban Langganan Telepon	2.502.375.580,00	2.970.598.556,00	(15,76)
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	(2.246.764,00)	(1.799.774,00)	24,84
522113	Beban Langganan Air	0,00	6.914.775.364,00	(100,00)
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	6.848.075.344,00	(42.174,00)	(16.237.770,94)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.726.109.672,00	430.598.982,00	300,86
522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(1.800.000,00)	0,00	100,00
522131	Beban Jasa Konsultan	63.123.527.764,00	36.362.673.250,00	73,59
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(432.351,00)	0,00	100,00
522141	Beban Sewa	300.804.986.865,00	279.467.582.629,00	7,64
522141	Pengembalian Beban Sewa	(171.183.000,00)	(105.320.536,00)	62,54
522151	Beban Jasa Profesi	27.586.267.348,00	9.676.454.100,00	185,09
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(4.550.000,00)	(7.600.000,00)	(40,13)
522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	4.419.164.000,00	0,00	100,00
522191	Beban Jasa Lainnya	72.604.516.226,00	51.288.615.224,00	41,56
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(40.000,00)	(1.045.000,00)	(96,17)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	3.257.691.000,00	(100,00)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	576.408.751,00	609.439.117,00	(5,42)
Jumlah		**1.849.209.178.781,00**	**1.590.790.224.987,00**	**16,24**

- Terdapat akun Beban Jasa kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain (522162) pada Badan Litbang Diklat Kumdil (005.06.0199.610378) sebesar Rp4.419.164.000,00, akun ini merupakan anggaran yang tersedia untuk melakukan transaksi resiprokal berupa kerjasama dengan KL BLU (LAN, BPKP, dan BKN) dalam rangka mendukung kegiatan Badan Litbang Diklat Kumdil;
- Terdapat akun Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (595112) sebesar Rp576.408.751,00 pada 66 satuan kerja dengan rincian terlampir. Beban ini merupakan transaksi belanja modal dan hibah masuk Peralatan dan Mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi.

Beban Pemeliharaan Rp539.587.316.077,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Saldo Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp539.587.316.077,00 dan Rp507.163.996.809,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282.115.794.495,00	264.736.077.382,00	6,56
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(18.671.302,00)	(23.790.209,00)	(21,52)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.654.340.287,00	42.551.062.951,00	7,29
523119	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	(760.236,00)	(626.000,00)	21,44
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	202.422.334.044,00	190.720.768.111,00	6,14
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(7.640.182,00)	(23.347.277,00)	(67,28)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	76.521.300,00	(100,00)
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	9.323.795.051,00	9.054.111.299,00	2,98
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	98.123.920,00	73.219.252,00	34,01
Jumlah		**539.587.316.077,00**	**507.163.996.809,00**	**6,39**

- Terdapat akun Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (595113) sebesar Rp98.123.920,00 pada 6 satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah	Keterangan
1	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	16.980.000,00	Merupakan Hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa kanopi 1 unit
2	005.01.099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	5.182.000,00	Hibah masuk dari Pemprov Kalimantan Barat berupa Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen. Nilai tersebut merupakan nilai yang tercatat pada Pemprov, belum dilakukan penyesuaian nilai bangunan. Satuan kerja akan meminta KPKNL setempat untuk melakukan penilaian kembali
3	005.01.099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	5.620.000,00	Hibah dari Bank BTN berupa partisi dinding pada gedung kantor permanen senilai Rp31.372.000,00 dan bangunan dan fasum lainnya senilai Rp5.620.000,00 berupa tangki air
4	005.01.400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	8.300.000,00	Merupakan hibah masuk berupa bangunan terbuka lainnya dengan harga perolehan dibawah nilai kapitalisasi
5	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	37.042.000,00	Merupakan hibah masuk berupa Rumah Negara Golongan I Type C Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan harga perolehan dibawah nilai kapitalisasi
6	005.01.402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	24.999.920,00	Hibah dari PTWP PTA Palangkaraya berupa mess NUP 3 dengan harga perolehan dibawah nilai kapitalisasi
Jumlah			**98.123.920,00**	

Beban Perjalanan Dinas Rp522.579.552.065,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp522.579.552.065,00 dan Rp507.788.976.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	314.590.560.278,00	293.653.599.408,00	7,13
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(989.220.477,00)	(494.794.256,00)	99,93
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.829.705.763,00	124.654.665.744,00	(3,87)
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(136.975.348,00)	(102.458.259,00)	33,69
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.871.683.011,00	35.228.602.673,00	(18,04)
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(15.822.608,00)	(85.961.457,00)	(81,59)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49.899.058.699,00	48.133.349.508,00	3,67
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(416.840.739,00)	(524.872.675,00)	(20,58)
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	10.865.949.547,00	7.127.180.495,00	52,46
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(14.501.952,00)	0,00	100,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	95.955.891,00	199.665.638,00	(51,94)
Jumlah		**522.579.552.065,00**	**507.788.976.819,00**	**2,91**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp814.312.498.234,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp814.312.498.234,00 dan Rp791.991.563.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	413.701.593.068,00	416.481.145.668,00	(0,67)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	384.955.796.779,00	362.824.415.915,00	6,10
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.885.867.206,00	1.885.867.205,00	0,00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	314.879.210,00	303.346.547,00	3,80
591313	Beban Penyusutan Jaringan	718.846.167,00	720.611.168,00	(0,24)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	35.182.033,00	21.713.442,00	62,03
592115	Beban Amortisasi Software	8.415.028.827,00	5.682.325.169,00	48,09
592116	Beban Amortisasi Lisensi	3.292.557.741,00	3.205.071.187,00	2,73
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	68.041.696,00	1.050.000,00	6.380,16
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	924.705.507,00	866.017.623,00	6,78
Jumlah		**814.312.498.234,00**	**791.991.563.924,00**	**2,82**

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp157.535.046,00)

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp157.535.046,00) dan Rp765.834.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	(147.336.690,00)	767.493.868,00	(119,20)
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	38.460.182,00	(1.659.017,00)	(2.418,25)
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(12.406.312,00)	0,00	100,00
594991	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(36.252.226,00)	0,00	100,00
Jumlah		**(157.535.046,00)**	**765.834.851,00**	**(120,57)**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp5.378.348.355,00

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.378.348.355,00. Adapun rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebagai berikut:

Tabel 88. Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	395.428.800,00	428.470.848,00	(7,71)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.981.342.755,00	2.463.490.238,00	102,21
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.576.800,00	3.350.099,00	(52,93)
Jumlah		**5.378.348.355,00**	**2.895.311.185,00**	**85,76**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp13.189.918.823,00

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp13.189.918.823,00. Adapun rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebagai berikut:

Tabel 89. Perbandingan Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
596111	Kerugian Pelepasan Aset	13.189.918.823,00	26.430.145.867,00	(50,10)
Jumlah		**13.189.918.823,00**	**26.430.145.867,00**	**(50,10)**

Terdapat Beban Kerugian Pelepasan Aset (596111) sebesar Rp13.189.918.823,00 pada 71 satuan kerja (terlampir). Dalam rincian data terlampir, terdapat Beban Kerugian Pelepasan Aset (596111) sebesar Rp7.805.523,00 pada Pengadilan Agama Praya (005.04.309110) dikarenakan adanya penghapusan persediaan rusak/usang sesuai SK Penghapusan Nomor 1768/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024.

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp9.092.226.972,00

D.11. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp9.092.226.972,00. Adapun rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebagai berikut:

Tabel 90. Perbandingan Rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	228.465.805,00	0,00	100,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	52.980.000,00	26.550.000,00	99,55
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	750.479.828,00	1.749.567.557,00	(57,10)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	876.384.290,00	1.580.862.254,00	(44,56)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.937.693.799,00	0,00	100,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	245.582.450,00	248.223.579,00	(1,06)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	2.669.499.240,00	(100,00)
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	640.800,00	103.085.896,00	(99,38)
Jumlah		**9.092.226.972,00**	**6.377.788.526,00**	**42,56**

Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar Rp6.937.693.799,00 pada 8 satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	005.01.401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	596.825.349,00	Merupakan jurnal koreksi atas Piutang yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 28/LHP/XVI/02/2024. Atas transaksi ini belum dilakukan koreksi atas aset, dan akan dilakukan di Tahun 2025.
2	005.01.401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	645.390.189,00	
3	005.01.401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	2.152.881.218,00	
4	005.01.401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	413.799.850,00	
5	005.01.401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	278.275.000,00	
6	005.01.401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	141.918.885,00	
7	005.01.401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	516.136.958,00	
8	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.192.466.350,00	
Jumlah			**6.937.693.799,00**	

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp75.987.162,00

D.12. Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp75.987.162,00. Adapun rincian Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebagai berikut:

Tabel 91. Perbandingan Rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.483.948,00	5.389.380,00	57,42
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	67.503.214,00	35.928.364,00	87,88
Jumlah		**75.987.162,00**	**41.317.744,00**	**83,91**

- Terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sebesar Rp67.503.214,00 pada 12 satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	005.01.401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	32.000,00	Satuan kerja sudah melakukan pemusnahan atas persediaan berupa pita mesin ketik dan isi bolpoin spiral, saat ini dalam proses permohonan SK Penghapusan
2	005.01.576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	346.900,00	Satuan kerja masih dalam proses permohonan izin pemusnahan dan belum terbit SK Penghapusan
3	005.04.309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	7.805.523,00	Penghapusan persediaan rusak/usang sesuai SK Penghapusan Nomor 1768/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
4	005.04.400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	11.450.439,00	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1581/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
5	005.04.400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	8.460.672,00	Satuan kerja masih dalam proses permohonan izin pemusnahan dan belum terbit SK Penghapusan
6	005.04.400921	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	6.818.207,00	Penghapusan persediaan yang sudah usang berupa buku register induk dan lain-lain, status pemusnahan/penghapusan persediaan sudah diajukan ke MA, menunggu SK terbit
7	005.04.401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	6.871.638,00	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1333/SEK/SK.PL1.2.3/X/2024
8	005.04.401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	3.777.213,00	Penghapusan Buku Register Perkara, Sedang proses penghapusan dan sudah diajukan ke PTA melalui E-Sadewa
9	005.04.401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	6.524.386,00	Penghapusan persediaan yg sudah usang sesuai SK penghapusan Nomor 282/SEK/SK.PL1.2.3/III/2024
10	005.04.401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	5.661.203,00	Satuan kerja masih dalam proses permohonan izin pemusnahan dan belum terbit SK Penghapusan
11	005.04.402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	7.826.533,00	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1578/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
12	005.07.663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	1.928.500,00	Penghapusan persediaan rusak/usang sesuai SK Penghapusan Nomor 1622/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
Jumlah			**67.503.214,00**	

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp1.204.669.342,00

D.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.204.669.342,00 dan (Rp17.198.363.900,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	395.428.800,00	428.470.848,00	(7,71)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.981.342.755,00	2.463.490.238,00	102,21
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.576.800,00	3.350.099,00	(52,93)
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	228.465.805,00	0,00	100,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	52.980.000,00	26.550.000,00	99,55
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	750.479.828,00	1.749.567.557,00	(57,10)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	876.384.290,00	1.580.862.254,00	(44,56)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.939.684.817,00	0,00	100,00
425913	Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.991.018,00)	0,00	100,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	245.582.450,00	248.223.579,00	(1,06)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	2.669.499.240,00	(100,00)
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	640.800,00	103.085.896,00	(99,38)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	(13.189.918.823,00)	(26.430.145.867,00)	149,90
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(8.483.948,00)	(5.389.380,00)	57,42
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	(67.503.214,00)	(35.928.364,00)	87,88
Jumlah		**1.204.669.342,00**	**(17.198.363.900,00)**	**(107,00)**

Pos Luar Biasa Rp0,00

D.14. Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali Mahkamah Agung. Tidak terdapat saldo Pos-Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

POS-POS PENJELASAN LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp Rp31.765.973.920.689,00

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp31.765.973.920.689,00 dan Rp30.525.686.275.992,00.

Surplus/Defisit-LO (Rp11.285.885.765.056,00)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa.

Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp11.285.885.765.056,00) dan (Rp10.481.650.834.787,00).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0,00

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp0.00.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan dan aset akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan (Rp380.261,00)

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp380.261,00) dan Rp24.224.826,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(Dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi Nilai Persediaan
Barang Konsumsi	(380.261,00)
Jumlah	**(380.261,00)**

Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar (Rp380.261.00) terdapat pada 3 Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	005.01.307122	Pengadilan Agama Kotabaru	(37.400,00)	Kesalahan input kode barang persediaan yang seharusnya double tape 2 buah dengan nilai perbuah Rp13.000,00 tetapi diinput pengharum ruangan 2 buah dengan nilai perbuah Rp31.700,00 telah dilakukan reklasifikasi dan koreksi nilai
2	005.01.526730	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin	(7.488,00)	Koreksi nilai Bolpen Snowman V5 Rp2.812,00 menjadi Rp2.500,00 berkurang senilai Rp312,00 sebanyak 24 buah
3	005.04.402541	Pengadilan Agama Barabai	(335.373,00)	Koreksi nilai kurang terhadap barang persediaan hasil reklasifikasi karena kesalahan kode barang saat diinput pada modul komitmen
Jumlah			**(380.261,00)**	

Koreksi Nilai Persediaan merupakan nilai koreksi tambah kurang nilai persediaan yang berasal dari penginputan dan pengiriman Modul Persediaan, adanya penginputan saldo awal pada menu persediaan masuk, serta adanya jurnal manual.

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya Rp566.537. 699,00

E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan transaksi pencatatan/penghapusan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain/sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru.

Saldo Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp566.537.699,00 dan Rp6.516.819.989,00.

Rincian penjelasan per satuan kerja atas Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap.

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp83.102.392.527,00)

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp83.102.392.527,00) dan Rp59.272.347.817,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(83.227.937.027,00)	56.846.887.567,00
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	125.544.500,00	2.425.460.250,00
Jumlah		**(83.102.392.527,00)**	**59.272.347.817,00**

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Koreksi		Nilai
		Tambah	Kurang	
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	172.834.184,00	49.395.000,00	123.439.184,00
131111	Tanah	48.025.375.381,00	108.080.453.101,00	(60.055.077.720,00)
132111	Peralatan dan Mesin	123.497.571.234,00	167.040.235.184,00	(43.542.663.950,00)
133111	Gedung dan Bangunan	123.412.715.963,00	271.157.290.890,00	(147.744.574.927,00)
134112	Irigasi	0,00	224.756.352,00	(224.756.352,00)
134113	Jaringan	1.834.000,00	341.877.446,00	(340.043.446,00)
135111	Aset Tetap Renovasi	0,00	11.078.287.250,00	(11.078.287.250,00)
135121	Aset Tetap Lainnya	35.868.000,00	326.445.056,00	(290.577.056,00)
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	62.832.787.030,00	138.018.110.263,00	(75.185.323.233,00)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.481.240.569,00	50.363.994.641,00	63.117.245.928,00
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.300.301.813,00	16.673.941.432,00	626.360.381,00
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	30.570.000,00	0,00	30.570.000,00
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	132.423.008,00	27.463.258,00	104.959.750,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	99.825.824.421,00	14.569.966.877,00	85.255.857.544,00
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0,00	336.928.625,00	(336.928.625,00)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11.930.233.307,00	88.043.566.942,00	(76.113.333.635,00)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	253.088.625,00	51.125.000,00	201.963.625,00
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.751.295.538,00	840.518.575,00	9.910.776.963,00
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	4.696.089.095,00	322.202.000,00	4.373.887.095,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	1.375.065.068,00	0,00	1.375.065.068,00
391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	44.556.000,00	400.000,00	44.156.000,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	9.824.756.634,00	2.164.645.502,00	7.660.111.132,00
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	58.986.001,00	58.986.001,00	0,00
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	166.938.994.747,00	7.192.293.507,00	159.746.701.240,00
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	334.850.930,00	0,00	334.850.930,00
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0,00	24.514.813,00	(24.514.813,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.140.284,00	645.101.785,00	(552.961.501,00)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.950.000,00	4.400.000,00	(2.450.000,00)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.565.926,00	0,00	141.565.926,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	451.606.840,00	0,00	451.606.840,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	12.018.199,00	0,00	12.018.199,00
593113	Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31.372.000,00	31.372.000,00	0,00
595113	Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	15.274.000,00	198.244.500,00	(182.970.500,00)
596111	Kerugian Pelepasan Aset	0,00	1.065.766.824,00	(1.065.766.824,00)
Jumlah		**795.704.345.797,00**	**878.932.282.824,00**	**(83.227.937.027,00)**

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Koreksi		Nilai
		Tambah	Kurang	
162151	Software	58.317.625,00	11.802.793.174,00	(11.744.475.549,00)
162161	Lisensi	0,00	1.376.482.266,00	(1.376.482.266,00)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	83.840.000,00	631.314.158,00	(547.474.158,00)
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	13.982.814.598,00	0,00	13.982.814.598,00
169315	Akumulasi Amortisasi Software	11.726.225.149,00	66.788.125,00	11.659.437.024,00
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.100.983.311,00	0,00	1.100.983.311,00
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00	12.949.258.460,00	(12.949.258.460,00)
Jumlah		**26.952.180.683,00**	**26.826.636.183,00**	**125.544.500,00**

Rincian penjelasan per satuan kerja atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Koreksi Lain-lain (Rp162.364.558,00)

E.4.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, koreksi piutang, dan koreksi utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp162.364.558,00) dan Rp525.164.297,00. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Tabel 96. Rincian Koreksi Lain-lain

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Koreksi Lain-lain
1	Koreksi Piutang	(87.266.934,00)
2	Koreksi Penyisihan Piutang	(84.291.986,00)
3	Koreksi Kewajiban	(13.806.751,00)
4	Koreksi Pendapatan	128.555.844,00
5	Koreksi Beban	(105.554.731,00)
Jumlah		**(162.364.558,00)**

Rincian Koreksi Lain-lain Per Akun

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Koreksi Lain-lain
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	(123.519.160,00)
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	36.252.226,00
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang PNBP	(48.039.760,00)
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(36.252.226,00)
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	36.252.226,00
156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(36.252.226,00)
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(15.830.652,00)
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	2.023.901,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(9.842.869,00)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	20.000,00
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	28.480.000,00
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	39.010.000,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	70.888.713,00
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	179.800,00
521111	Beban Keperluan Perkantoran	(2.516.402,00)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345.364,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	128,00
522112	Beban Langganan Telepon	1.597.218,00
522113	Beban Langganan Air	(2.096.356,00)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,00
522141	Belanja Sewa	(103.064.488,00)
Jumlah		**(162.364.558,00)**

Koreksi lain-lain terdapat pada 27 Satuan Kerja. Rincian penjelasan per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	BAES 1	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Koreksi Lain-lain	Keterangan
1	005.01	0100	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	(22.285.760,00)	Koreksi saldo dari piutang pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan
2	005.01	0200	097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	(8.000,00)	Koreksi kurang catat beban langganan air sebesar Rp3.000,00 dan beban langganan telepon sebesar Rp5.000,00 tahun 2023
3	005.01	0200	097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	(1.567.885,00)	Koreksi kurang catat beban langganan air sebesar Rp1.414.840,00 dan beban langganan telepon sebesar Rp153.045,00
4	005.01	0500	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	5.550,00	Koreksi lebih catat beban langganan telepon bulan desember 2023
5	005.01	0500	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	(2.072.800,00)	Koreksi pendapatan karena tidak menyajikan akrual PDD tahun 2023 atas payment point BTN
6	005.01	0700	098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	635.000,00	Koreksi lebih catat beban pengiriman surat dinas pos pusat
7	005.01	0800	098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	(1.644.333,00)	Koreksi kurang catat atas belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 2023
8	005.01	1900	099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	646.020,00	Penerimaan sewa kantin tahun 2023
9	005.01	1900	099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	(106.731.162,00)	Koreksi atas kesalahan penginputan nilai akrual belanja dibayar dimuka sewa web hosting tahun 2023
10	005.01	1900	099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	(2.516.402,00)	Koreksi atas kesalahan penginputan nilai akrual belanja dibayar dimuka sewa zoom tahun 2023
11	005.01	2200	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	(2.616.000,00)	Koreksi kurang catat belanja tunjangan fungsional PNS gaji ke 13 Tahun 2023 sebesar Rp1.200.000,00, belanja tunjangan PPh PNS gaji ke 13 Tahun 2023 sebesar Rp108.000,00, belanja tunjangan fungsional PNS THR Tahun 2023 sebesar Rp1.200.000,00, dan belanja tunjangan PPh PNS THR Tahun 2023 sebesar Rp108.000,00
12	005.01	2200	099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	(1.622.889,00)	Koreksi kurang catat pendapatan diterima di muka tahun 2023
13	005.01	1900	307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	3.666.674,00	Koreksi atas kesalahan akrual tahun 2023 (web hosting) yang seharusnya merupakan belanja yang dibayar dimuka
14	005.01	3300	400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	2.023.901,00	Koreksi atas kesalahan pencatatan jurnal manual yang belum di jurnal balik pada awal tahun berupa belanja barang langganan internet bulan desember 2023 sebesar Rp1.816.800,00, belanja barang langganan air bulan desember 2023 sebesar Rp120.960,00, dan belanja langganan telepon bulan desember 2023 sebesar Rp86.141,00
15	005.01	0400	400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	(2.207.061,00)	Koreksi kurang catat atas belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 2023
16	005.01	0100	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	(6.793.200,00)	Koreksi pendapatan atas sewa ATM BRI
17	005.01	0200	400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	(1.081.874,00)	Koreksi kurang catat belanja pegawai yang masih harus dibayar atas kekurangan gaji tahun 2023
18	005.01	0200	400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	128,00	Koreksi kelebihan pembayaran belanja barang persediaan
19	005.01	0500	401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	(40.691,00)	koreksi kurang catat beban langganan air tahun 2023
20	005.01	0900	401938	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	5,00	Koreksi lebih catat beban langganan daya dan jasa lainnya tahun 2023
21	005.01	2200	402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	(1.406.416,00)	Koreksi kurang catat belanja pegawai yang masih harus dibayar atas kekurangan gaji pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2025
22	005.01	0700	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	822.252,00	Koreksi lebih catat beban langganan telepon bulan desember 2023
23	005.01	1800	604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	(2.044.433,00)	Koreksi kurang catat belanja pegawai yang masih harus dibayar atas kekurangan gaji dan tunjangan untuk satu orang pns dari bulan februari 2023 s.d. desember 2023 yang dibayarkan tahun 2025
24	005.01	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	(78.384.447,00)	Koreksi saldo dari piutang pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, dan koreksi atas rumah dinas yang berlokasi di sunter yang telah dilakukan transfer keluar ke Badilum
25	005.01	1800	670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	179.800,00	Koreksi lebih catat beban pembulatan gaji PNS tahun 2023
26	005.02	0199	004028	KEPANITERAAN	(4.830.535,00)	Koreksi kurang catat atas belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 2022 sebesar Rp258.395,00 dan tahun 2023 sebesar Rp4.572.140,00
27	005.03	1700	099330	PENGADILAN NEGERI MANADO	67.510.000,00	Tindak lanjut catatan hasil reviu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak Triwulan I tahun 2024 No.891/BUA.3/PWI.I.1/IV/2024 (PNBP tahun 2023 setor tahun 2024)
Jumlah					**(162.364.558,00)**	

Transaksi Antar Entitas Rp11.736.376.395.076,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.736.376.395.076,00 dan Rp11.655.599.922.555,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 97. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	11.621.080.760.712,00	11.578.619.101.165,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(105.803.944.468,00)	(102.285.676.891,00)
313211	Transfer Keluar	(173.712.397.104,00)	(89.949.581.968,00)
313221	Transfer Masuk	212.157.709.523,00	95.473.066.742,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	122.176.025.953,00	154.962.882.965,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(68.113.485,00)	(24.790.590,00)
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	60.546.353.945,00	18.804.921.132,00
Jumlah		**11.736.376.395.076,00**	**11.655.599.922.555,00**

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp11.621.080.760.712,00/ Diterima dari Entitas Lain (Rp105.803.944.468,00)

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja Mahkamah Agung yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 DKEL sebesar Rp11.621.080.760.712,00 sedangkan DDEL sebesar (Rp105.803.944.468,00).

Transfer Masuk Rp212.157.709.523,00/Transfer Keluar (RpRp173.712.397.104,00)

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp212.157.709.523,00 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp173.712.397.104,00) terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp212.157.709.523,00 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Nilai
117111	Barang Konsumsi	9.584.659.737,00
131111	Tanah	36.048.421.084,00
132111	Peralatan dan Mesin	31.425.676.581,00
133111	Gedung dan Bangunan	144.723.484.092,00
135121	Aset Tetap Lainnya	197.981.650,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.665.721.644,00)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.156.791.977,00)
Jumlah		**212.157.709.523,00**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp173.712.397.104,00) terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar

(Dalam Rupiah)

Akun	Jenis	Nilai
117111	Barang Konsumsi	(9.584.659.737,00)
131111	Tanah	(32.072.703.814,00)
132111	Peralatan dan Mesin	(29.757.399.559,00)
133111	Gedung dan Bangunan	(89.076.848.935,00)
135111	Aset Tetap Renovasi	(20.643.553.012,00)
135121	Aset Tetap Lainnya	(197.981.650,00)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.165.238.991,00
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.431.150.396,00
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	24.360.216,00
Jumlah		**(173.712.397.104,00)**

Terdapat selisih Pencatatan antara Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp38.445.312.419,00 dengan penjelaskan sebagai berikut:

- Terdapat transfer masuk dari instansi lain sebesar Rp55.088.787.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	BAES1	Satuan Kerja Pengirim	Nama Satuan Kerja Pengirim	Transfer Keluar	Akun	Nama Akun	BAES1	Satuan Kerja Penerima	Nama Satuan Kerja Penerima	Transfer Masuk
1	'03307	420163	Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	-	132111	Peralatan dan Mesin	00501	663157	Badan Urusan Administrasi	(1.668.277.022,00)
2	'03307	420163	Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	-	133111	Gedung dan Bangunan	00501	663157	Badan Urusan Administrasi	(55.037.102.489,00)
3	'03307	420163	Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	-	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	00501	663157	Badan Urusan Administrasi	500.482.653,00
4	'03307	420163	Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta	-	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	00501	663157	Badan Urusan Administrasi	1.651.113.075,00
5	10401	426474	BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA BARAT	-	133111	Gedung dan Bangunan	'00501	526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	(609.532.668,00)
6	10401	426474	BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA BARAT	-	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	'00501	526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	74.528.506,00
Jumlah				**-**	**Jumlah**					**(55.088.787.945,00)**

Atas transaksi di atas, telah dilakukan Transfer Masuk oleh Badan Urusan Administrasi di bulan Juni 2024.

- Terdapat Transfer masuk dari Kementerian ESDM dimana Kementerian ESDM melakukan penghapusan pada aplikasi SAKTI, bahwasannya tanah tersebut di alih statuskan kepada Mahkamah Agung sebesar Rp3.975.717.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	BAES1	Satuan Kerja Pengirim	Nama Satuan Kerja Pengirim	Transfer Keluar	Akun	Nama Akun	BAES1	Satuan Kerja Penerima	Nama Satuan Kerja Penerima	Transfer Masuk
1	99999	984515	Kementrian ESDM	0,00	131111	Tanah	00501	402622	Pengadilan Agama Dumai	3.975.717.270,00
Jumlah				**Rp0,00**	**Jumlah**					**3.975.717.270,00**

Atas transaksi di atas, Pengadilan Agama Dumai telah bertiket ke HAI DJPb dan sesuai jawaban dari HAI DJPb agar dapat dijelaskan secara memadai karena Kementerian ESDM tidak melakukan perekaman transaksi Transfer Keluar di aplikasi SAKTI modul Aset sehingga Pengadilan Agama Dumai mencatat dengan transaksi Transfer Masuk secara manual pada aplikasi SAKTI modul Aset.

- Terdapat Transfer keluar dari Badan Urusan Administrasi ke Instansi Lain sebesar Rp20.619.192.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	BAES1	Satuan Kerja Pengirim	Nama Satuan Kerja Pengirim	Transfer Keluar	Akun	Nama Akun	BAES1	Satuan Kerja Penerima	Nama Satuan Kerja Penerima	Transfer Masuk
1	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	20.643.553.012,00	135111	Aset Tetap Renovasi	'00701	403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	-
2	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	(24.360.216,00)	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	'00701	403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	-
Jumlah				**20.619.192.796,00**	**Jumlah**					**-**

Pengesahan Hibah Langsung Rp122.176.025.953,00/ Pengesahan Hibah Langsung TAYL Rp60.546.353.945,00/ Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung (RpRp68.113.485,00).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp122.176.025.953,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp60.546.353.945,00, sedangkan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung (Rp68.113.485,00).

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp122.176.025.953,00,00 pada 270 Satuan Kerja dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp60.546.353.945,00 pada 66 Satuan Kerja telah selesai proses pengesahan hibah dan telah tersaji di Neraca sebagai Aset serta di LPE sebagai Ekuitas Mahkamah Agung.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	2H32MKNA	402540	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
2	2BSK4ZSA	402964	PTA SEMARANG	BARANG	DN	Rp	1.617.098.803,00
3	2NNFYFLA	401777	PTA MEDAN	BARANG	DN	Rp	70.000.000,00
4	2F48CS6A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	58.745.390,00
5	26N3FZ8A	097500	PT BANDUNG	JASA	DN	Rp	16.256.713,00
6	23JGFZ8A	097762	PN PATI	BARANG	DN	Rp	5.200.000,00
7	2V621WJA	308170	PTA SURABAYA	BARANG	DN	Rp	1.782.612.700,00
8	23BQ48HA	307424	PTA MAKASSAR	BARANG	DN	Rp	20.000.000,00
9	294M2W6A	402010	PA BUKITTINGGI	BARANG	DN	Rp	35.800.000,00
10	2CQXNBUA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	550.000,00
11	2B1AMY3A	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	950.000,00
12	2E23CQGA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	900.000,00

13	26CA344A	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	1.050.000,00
14	2YP6D1ZA	402989	PTA PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	1.514.617.872,00
15	2JB1HPKA	402989	PTA PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	106.814.675,00
16	217LKC9A	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	3.438.000,00
17	2KURC4KA	099003	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp	20.599.380,00
18	2WMM3WCA	400832	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp	34.931.000,00
19	2X5MZLDA	098434	PT BANDA ACEH	BARANG	DN	Rp	42.447.906,00
20	2EEXQADA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	455.065.900,00
21	2CHWWBMA	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	299.700.000,00
22	2RCSDFBA	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	1.965.600.000,00
23	2G7941UA	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.698.300.000,00
24	2CND8DQA	526736	PTTUN MATARAM	BARANG	DN	Rp	544.110.000,00
25	2F9S7ADA	097762	PN PATI	BARANG	DN	Rp	149.074.000,00
26	2C4933TA	402593	PA AMBARAWA	BARANG	DN	Rp	32.200.000,00
27	294GCNZA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	250.000.000,00
28	2FD1GP8A	307580	PA PINRANG	BARANG	DN	Rp	17.740.000,00
29	2ZYKZZCA	401271	PA JOMBANG	BARANG	DN	Rp	22.000.000,00
30	2D518UWA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	7.900.000,00
31	2QWSF8HA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
32	27R34SUA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
33	2PW1BAEA	098832	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp	3.650.000,00
34	22WZ65JA	097691	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp	91.461.000,00
35	21NWDECA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	233.948.400,00
36	2C375WPA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	45.700.000,00
37	2BVM3HAA	099180	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	2.500.000,00
38	24YWCQVA	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	1.800.000,00
39	2PRDR7FA	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	431.774.000,00
40	2XSFASCA	400559	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp	13.675.000,00

41	2DHVS3QA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
42	2UB5YURA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	226.500.032,00
43	2LYACQHA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	399.380.000,00
44	21AN2KQA	307445	PA MAROS	BARANG	DN	Rp	7.600.000,00
45	26VUZC6A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
46	27XUVQNA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.925.000,00
47	2VLNLTPA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
48	23CELGAA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
49	2KRW86UA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.465.000,00
50	29JVMK8A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.465.000,00
51	287E2HDA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.925.000,00
52	2X8FGBVA	099219	PN KOTABARU	BARANG	DN	Rp	2.878.887.000,00
53	2GTF5V7A	401879	PA BELOPA	BARANG	DN	Rp	48.360.000,00
54	2KD7VAJA	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	3.233.000,00
55	25B5R5MA	417850	PA PANDEGLANG	BARANG	DN	Rp	25.000.000,00
56	2LNQ7GPA	578839	PTUN JAMBI	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
57	2G6712VA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
58	2PDQPXBA	099862	PN MATARAM	BARANG	DN	Rp	29.950.000,00
59	2PMF5W3A	402519	PA MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	166.775.000,00
60	2XXGYR4A	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	53.920.860,00
61	2Q5HK1VA	097467	PT JAKARTA	BARANG	DN	Rp	599.983.266,00
62	2JBPFVHA	099905	PN DOMPU	BARANG	DN	Rp	299.909.517,00
63	22GDRNRA	526704	PTTUN JAKARTA	BARANG	DN	Rp	117.800.000,00
64	2JXVVNRA	307580	PA PINRANG	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
65	22REJ6XA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	51.850.320,00
66	297MP6SA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	140.294.000,00
67	2YU4UTZA	400194	PN PUTUSSIBAU	BARANG	DN	Rp	69.000.000,00
68	2HZAXM2A	400245	PT KUPANG	BARANG	DN	Rp	47.790.000,00
69	2DEMFCYA	097687	PN INDRAMAYU	BARANG	DN	Rp	66.000.000,00

70	2MTT62SA	402449	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	28.200.000,00
71	2KZ6LY2A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	2.725.000,00
72	2G6S3Q3A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.200.000,00
73	22TMHQDA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.840.000,00
74	25WQZ86A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.700.000,00
75	2D3MEBNA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.585.000,00
76	2LUQ73YA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.750.000,00
77	2LAKD84A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
78	2KDEH39A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	2.800.000,00
79	2TWVAE9A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	273.731.000,00
80	2TWVAE9A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	2.780.000,00
81	2F1HCKTA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	46.775.000,00
82	2YKKVPGA	400409	PN CIBADAK	BARANG	DN	Rp	148.881.525,00
83	2L2ZRFVA	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	4.440.000,00
84	2NSA61MA	400446	PN KOTOBARU	BARANG	DN	Rp	35.000.000,00
85	2U46BY8A	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.700.000.000,00
86	2MBC1N9A	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	594.500.000,00
87	22GGH3JA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	18.370.000,00
88	2YXQXUUA	400075	PN SORONG	BARANG	DN	Rp	520.000.000,00
89	28JR9R6A	578864	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp	139.585.000,00
90	2C8493JA	099329	PN MANADO	JASA	DN	Rp	48.000.000,00
91	2GDUHXKA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	79.978.900,00
92	29WQSNNA	401375	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	349.999.930,00
93	2YGQG8PA	097577	PN RANGKAS BITUNG	JASA	DN	Rp	136.500.000,00
94	2B8W31PA	401463	PA KRAKSAAN	BARANG	DN	Rp	222.500.000,00
95	2H83DZ9A	402820	PA SOE	BARANG	DN	Rp	5.400.000,00
96	29MADRVA	401369	PA BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	492.155.136,00
97	2KRYUT3A	578822	PTUN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	15.250.000,00
98	2SPQ8PEA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	143.076.780,00

99	2RE59WQA	401919	PN NANGA BULIK	BARANG	DN	Rp	1.292.100,00
100	2UWE7H3A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	9.133.600,00
101	2EQ1YSAA	578839	PTUN JAMBI	BARANG	DN	Rp	9.000.000,00
102	2Y7KM39A	402480	PTA SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	10.411.500,00
103	2Y2BED4A	400967	PA PATI	BARANG	DN	Rp	149.148.000,00
104	2VNUDRNA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	37.840.500,00
105	2834ECCA	099197	PN BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	16.900.000,00
106	2T8JLHZA	401322	PA LAMONGAN	BARANG	DN	Rp	487.292.600,00
107	2W7GETMA	402010	PA BUKITTINGGI	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
108	26G3BZGA	401918	PN KUALA KURUN	BARANG	DN	Rp	1.600.000,00
109	2CMKGJCA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	46.800.000,00
110	2SKP8FNA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	47.311.000,00
111	2HR45NFA	098743	PT PADANG	BARANG	DN	Rp	412.790.250,00
112	23N7HE2A	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	42.860.000,00
113	2TB9ZF1A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	11.500.000,00
114	2TGQC95A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	41.578.000,00
115	2GECZS1A	097982	PN BOYOLALI	BARANG	DN	Rp	140.000.000,00
116	2XKHPBVA	097542	PN GARUT	BARANG	DN	Rp	299.000.000,00
117	2P8KPBJA	099308	PN BALIKPAPAN	BARANG	DN	Rp	43.452.900,00
118	2ZZWNJ1A	098959	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp	416.649.000,00
119	28181ABA	307712	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp	8.800.000,00
120	2R7LKF2A	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	8.325.000,00
121	23U8GHEA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	60.693.000,00
122	2A87AJ8A	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
123	24Z28HMA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
124	24YM6UTA	098260	PN TRENGGALEK	BARANG	DN	Rp	6.255.000,00
125	2Y3QVVYA	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	4.750.000,00
126	2BX4PC4A	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00

127	2RYSWDSA	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	2.000.000,00
128	253V1JFA	400172	PN BANTUL	BARANG	DN	Rp	7.900.000,00
129	2VFBBJ4A	098959	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp	332.955.600,00
130	2EM6T72A	097624	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp	1.718.000.000,00
131	2EM6T72A	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	325.000.000,00
132	2UVLVZ6A	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	20.800.000,00
133	2JGU2TFA	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	60.213.745,00
134	2T87B54A	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp	1.875.000.000,00
135	2Q2HXPCA	401877	PA PENAJAM	BARANG	DN	Rp	594.500.000,00
136	26QCGX8A	099286	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	33.378.100,00
137	2V85BCRA	578822	PTUN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	564.976.373,00
138	2CD3EBZA	400750	PA CIREBON	BARANG	DN	Rp	9.248.900,00
139	2HJ84ZLA	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	2.032.400.000,00
140	2H65RJGA	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	27.500.000,00
141	2AJ7D8NA	097556	PN CIAMIS	BARANG	DN	Rp	9.600.000,00
142	235QTE3A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	499.077.851,00
143	27TZPGGA	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	15.225.000,00
144	2NRV69MA	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	2.250.000,00
145	2PRQEY8A	097776	PN BREBES	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
146	2BVULU4A	401322	PA LAMONGAN	BARANG	DN	Rp	38.250.000,00
147	25HCVQMA	097720	PN SEMARANG	JASA	DN	Rp	407.750.000,00
148	22GCVSEA	097720	PN SEMARANG	BARANG	DN	Rp	860.450.710,00
149	2BC8GWRA	097975	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp	8.200.000,00
150	27123BPA	450737	PA TUBAN	BARANG	DN	Rp	30.460.000,00
151	2VPZ6Z4A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	190.537.000,00
152	2Q4XZSLA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	81.000.000,00
153	2V4ZW9GA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	90.000.000,00
154	2YW9E71A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	683.000.995,00
155	2K7TQEQA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	22.400.000,00

156	27DRECJA	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	30.060.220,00
157	219PAF1A	308170	PTA SURABAYA	BARANG	DN	Rp	57.500.000,00
158	2VNQSXDA	401545	PA BANGKALAN	BARANG	DN	Rp	34.087.000,00
159	2P1PDBAA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	29.700.000,00
160	2E4BEUEA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	20.000.000,00
161	2NEVTHPA	097577	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp	397.800.000,00
162	2J3R8TWA	099401	PN POSO	BARANG	DN	Rp	77.400.000,00
163	21RSJ7TA	097802	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
164	238BKXNA	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	145.600.000,00
165	28MBDTYA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	347.457.150,00
166	2F6YF5PA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	11.876.000,00
167	2EDQMSQA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	20.736.000,00
168	2T8PGP5A	097652	PN SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	20.400.000,00
169	2VASQUDA	098256	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	Rp	7.758.000,00
170	2P33X96A	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	38.010.000,00
171	21DJ2E6A	099773	PT DENPASAR	BARANG	DN	Rp	2.359.200.000,00
172	2WMVNJUA	403021	PA MUNGKID	BARANG	DN	Rp	404.166.000,00
173	2GN4Y64A	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	6.438.000,00
174	228ELTNA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	98.646.721,00
175	2JGNNHJA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	32.365.000,00
176	2YVJJSJA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	13.300.000,00
177	2V8C9PXA	097890	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp	68.564.900,00
178	2CHDDGVA	099439	PN SUNGGUMINASA	JASA	DN	Rp	22.022.000,00
179	2YKJE9MA	098629	PN MEDAN	BARANG	DN	Rp	92.000.000,00
180	2E78K92A	097780	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp	17.750.000,00
181	2U3Q8ZQA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	71.422.450,00
182	21U2Q8LA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	25.500.000,00
183	2EXS3HWA	400565	PN SLAWI	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
184	2HSNLQFA	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00

185	2BSP8DAA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	65.000.000,00
186	2VK5E2TA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	324.809.994,00
187	2XNXG6PA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	19.402.000,00
188	2M8BHJMA	526771	PTUN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	12.600.000,00
189	2127X9EA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	18.600.000,00
190	2VYGDZ2A	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	7.550.000,00
191	2AZ2W49A	098590	PN TAPAK TUAN	BARANG	DN	Rp	808.576.000,00
192	2JFF6Q4A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	6.750.000,00
193	2V1WHUZA	307445	PA MAROS	BARANG	DN	Rp	5.580.000,00
194	2LBSQ3PA	400483	PN BALE BANDUNG	JASA	DN	Rp	149.110.000,00
195	2SE5F7VA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	6.750.000,00
196	2AV6UDTA	402540	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp	10.036.000,00
197	2W7SX2JA	099621	PN MAJENE	BARANG	DN	Rp	113.141.960,00
198	28CPUX7A	099532	PN WATAMPONE	BARANG	DN	Rp	11.970.000,00
199	2CJWN98A	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
200	298BERCA	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
201	2SUHDBTA	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	24.800.000,00
202	2BLS861A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
203	21ZQKGDA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
204	2ZEAJVJA	098167	PN SIDOARJO	BARANG	DN	Rp	143.190.000,00
205	2MQNJGKA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
206	2HALQ98A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
207	2MKVXPUA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
208	29BT39ZA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
209	2BSUKB5A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
210	2E67EVTA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
211	2ARJMZJA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
212	2EFS3GWA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00

213	2XY8ULKA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
214	23N2KDMA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	431.920.000,00
215	2V6QD4KA	099638	PN MAMUJU	BARANG	DN	Rp	21.143.200,00
216	2DGBC5ZA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	87.814.510,00
217	22RYTSNA	477306	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	Rp	64.000.000,00
218	2CZGRJSA	663026	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp	230.558.020,00
219	21CBWKTA	400483	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	Rp	1.153.318.257,00
220	24EBNLYA	682260	PA BATULICIN	BARANG	DN	Rp	310.000.000,00
221	2WK4QMKA	099180	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	75.500.000,00
222	2EXERNBA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	96.638.000,00
223	2Q7KST6A	097514	PN BANDUNG	BARANG	DN	Rp	577.877.225,00
224	2LZQKLYA	401960	PA SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp	5.500.000,00
225	2S9BZ76A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	39.800.000,00
226	2E6L1NSA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	295.210.041,00
227	2WY4BXCA	097933	PN SURAKARTA	BARANG	DN	Rp	309.884.000,00
228	28E6HYCA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
229	27QJ5RLA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	4.260.000,00
230	2L6BNYJA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
231	2NZ8W7SA	400245	PT KUPANG	BARANG	DN	Rp	18.500.000,00
232	2UDUBQVA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	15.350.000,00
233	2F49PJZA	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	306.420.000,00
234	2MDK1DXA	400452	PN KALIANDA	BARANG	DN	Rp	30.000.000,00
235	2NEPR99A	099401	PN POSO	BARANG	DN	Rp	5.025.000.000,00
236	2X9UPN1A	400817	PA RANGKASBITUNG	BARANG	DN	Rp	10.600.000,00
237	2VQXTSLA	400327	PN DUMAI	BARANG	DN	Rp	1.070.147.943,00
238	2R2B6R8A	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	28.047.000,00
239	2ZNMSZLA	402500	PA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	11.600.000,00

240	23KH114A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	36.225.000,00
241	2XZMLDBA	099176	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp	9.475.000,00
242	28PQCN1A	400291	PN TANJUNG REDEB	BARANG	DN	Rp	25.905.180,00
243	2BWM125A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	13.140.000,00
244	2ABDB6MA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	23.697.000,00
245	2XY91C2A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	4.680.000,00
246	24PJ188A	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	77.700.000,00
247	2HD6MPZA	401879	PA BELOPA	BARANG	DN	Rp	37.660.000,00
248	29FQMB4A	097666	PN CIANJUR	BARANG	DN	Rp	409.297.044,00
249	238RNTTA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	3.580.000,00
250	2G8XVMYA	099418	PT UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
251	293JZXYA	099418	PT UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	13.900.000,00
252	2TK95CEA	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	11.000.000,00
253	2Z7PKLEA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	2.032.501.047,00
254	2X1USAXA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	168.100.000,00
255	2R52PFKA	477380	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp	933.220.600,00
256	2P486ENA	307491	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	273.220.000,00
257	2NA51YWA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	7.150.000,00
258	2WR6UJBA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	10.750.000,00
259	2CQC4KKA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	12.250.000,00
260	2ACRZ9SA	526704	PTTUN JAKARTA	BARANG	DN	Rp	135.000.000,00
261	2ZU8F5CA	400370	PN SIMALUNGUN	BARANG	DN	Rp	132.720.000,00
262	2V1PAX2A	099120	PN PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	73.000.000,00
263	242R2WDA	098832	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp	3.800.000,00
264	2G2395BA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	81.000.000,00
265	2TY8R1DA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	36.450.000,00
266	2XRB4J3A	108025	PN STABAT	BARANG	DN	Rp	17.900.000,00
267	2JD173AA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	159.840.000,00

268	279FQM8A	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	5.500.000,00
269	27HVM42A	097954	PN WONOGIRI	BARANG	DN	Rp	34.993.000,00
270	28296H8A	097954	PN WONOGIRI	BARANG	DN	Rp	10.000.000,00
271	22F5QGVA	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	199.825.000,00
272	2XNTJBRA	099581	PN BULUKUMBA	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
273	2P5L66VA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	136.700.000,00
274	2UX1ARXA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	5.928.000,00
275	282TZG1A	402525	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp	396.300.000,00
276	24G5G1SA	097577	PN RANGKAS BITUNG	JASA	DN	Rp	28.870.000,00
277	2MXL5KGA	099091	PN KETAPANG	BARANG	DN	Rp	105.843.708,00
278	26V6F5DA	663398	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp	1.124.564.000,00
279	226L6E9A	663398	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp	231.768.000,00
280	2JRXD68A	098701	PN PEMATANG SIANTAR	BARANG	DN	Rp	73.602.000,00
281	2UX9LREA	673013	PN MALILI	BARANG	DN	Rp	1.575.587.832,00
282	2QFDDL5A	098331	PN KRAKSAAN	BARANG	DN	Rp	410.783.250,00
283	2P6SA7XA	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	35.850.000,00
284	279F358A	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	54.179.714,00
285	2HD9LC7A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	41.300.000,00
286	2G27NG2A	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	28.310.550,00
287	2DHGW1PA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	9.500.000,00
288	2G7TZFQA	099802	PN NEGARA	BARANG	DN	Rp	2.300.000,00
289	2DEEJHBA	400208	PN LIMBOTO	BARANG	DN	Rp	66.434.000,00
290	2QDYA64A	098860	PN RENGAT	BARANG	DN	Rp	27.950.000,00
291	2RNLZY1A	604730	PA KAB. MALANG (KEPANJEN)	BARANG	DN	Rp	100.000.000,00
292	23TSB59A	526711	PTTUN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	2.100.000,00
293	2UKTUWVA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	58.986.000,00
294	2AKEJPSA	099286	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	65.467.050,00
295	2UH5UHZA	099197	PN BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	762.700.000,00

296	26EVCLPA	099308	PN BALIKPAPAN	BARANG	DN	Rp	90.168.000,00
297	2UWNAUBA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	87.900.000,00
298	2YF6EQFA	099230	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	10.036.000,00
299	2F33W7PA	099230	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	23.849.800,00
300	2MTLSFZA	098324	PN BANGIL	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
301	2YKYCE5A	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	23.550.000,00
302	2H4X722A	098171	PN MOJOKERTO	BARANG	DN	Rp	95.807.000,00
303	2NCKCT5A	098171	PN MOJOKERTO	BARANG	DN	Rp	29.193.000,00
304	2VGYVNKA	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	7.500.000,00
305	2QZCAJMA	099109	PN MEMPAWAH	BARANG	DN	Rp	203.210.000,00
306	2SRZTRNA	400951	PA PURWODADI	BARANG	DN	Rp	93.999.925,00
307	26GABS6A	400735	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	8.300.000,00
308	2VGP1AQA	400735	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
309	2PCZPUYA	400477	PN SUMBER	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
310	23N4YK6A	402562	PA TANJUNG	BARANG	DN	Rp	7.200.000,00
311	2GHBS7LA	402669	PA MEMPAWAH	BARANG	DN	Rp	13.000.000,00
312	2UUR7GMA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	40.236.000,00
313	2SCLGPZA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	366.746.000,00
314	2HERT1KA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	585.400.000,00
315	2KLBW1YA	097996	PN KLATEN	BARANG	DN	Rp	640.580.000,00
316	27Z5JT2A	400911	PA SEMARANG	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
317	2FBKC27A	663026	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp	547.000.000,00
318	23USSP8A	417844	PN PANDEGLANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
319	2EULT82A	097514	PN BANDUNG	JASA	DN	Rp	41.996.850,00
320	2TX8S33A	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	186.873.000,00
321	24NUUK5A	576274	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp	79.700.000,00
322	2HHZ11VA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	17.950.000,00
323	2QTUAS5A	097912	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	Rp	150.742.000,00
324	2VTEYJRA	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	199.691.000,00

325	2713Y78A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	8.600.000,00
326	2CAN3AWA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
327	26AHUCEA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
328	2LPQDNBA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
329	2L5WRL3A	402097	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	161.950.000,00
330	2P63QCJA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	129.523.000,00
331	2GHXFTCA	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	180.606.000,00
332	27VW4R4A	402324	PA TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
333	2A5BA1MA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	138.755.800,00
334	2R3SEG7A	401582	MS ACEH	BARANG	DN	Rp	1.535.404.380,00
335	2KKXE9TA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	39.000.000,00
336	22DBVXKA	400885	PA TEGAL	BARANG	DN	Rp	17.550.000,00
337	26N9EGKA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	43.537.300,00
338	272TAF8A	099492	PN PAREPARE	BARANG	DN	Rp	9.500.000,00
339	2BTUD1UA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	55.200.000,00
340	2BTUD1UA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	12.300.000,00
341	268ZZNQA	098849	PN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	77.250.000,00
342	264RCHWA	402117	PA BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	1.956.447.410,00
343	2QCZGT3A	098036	PN PURBALINGGA	BARANG	DN	Rp	7.788.000,00
344	25UDGLAA	400126	PN CURUP	BARANG	DN	Rp	35.685.000,00
345	27JZFQPA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	263.963.232,00
346	2XLSHWDA	400214	PN JAKARTA SELATAN	BARANG	DN	Rp	739.249.000,00
347	2LUQHQGA	099354	PA TONDANO	BARANG	DN	Rp	177.097.000,00
348	2MFNEYNA	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	49.900.000,00
349	2BGRNG2A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	7.699.000,00
350	2QE8B9CA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	155.000.000,00
351	2ML8S86A	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
352	2LV78S6A	099176	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp	6.597.000,00
353	2DW4K36A	098420	PN SAMPANG	BARANG	DN	Rp	32.116.000,00

354	2PSG3FCA	400194	PN PUTUSSIBAU	BARANG	DN	Rp	123.674.446,00
355	2EV8NFRA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
356	2FKVMR2A	401955	PA TULANG BAWANG TENGAH	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
357	23D2T2BA	097691	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp	43.100.000,00
358	2EQ792JA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	149.829.350,00
359	2XUNVQFA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	49.947.000,00
360	2GG4HX7A	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.500.000,00
361	21BGHSPA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	300.000.000,00
362	24VQG3GA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	12.124.000,00
363	2JV8F75A	400110	PN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	249.607.000,00
364	25M3VYXA	400110	PN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
365	2CGMA6HA	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	22.700.000,00
366	2152GPAA	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	2.500.000,00
367	26XTMZ2A	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	5.549.000,00
368	2QKECPQA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	26.000.000,00
369	2FLGUHHA	097467	PT JAKARTA	BARANG	DN	Rp	299.988.600,00
370	2SEEMTRA	099600	PN PALOPO	BARANG	DN	Rp	11.700.000,00
371	2J8QVNDA	098608	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp	7.250.000,00
372	2EB9YJUA	098608	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp	7.250.000,00
373	22WEZSZA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	331.350.000,00
374	2H4XRU4A	099706	PN AMBON	BARANG	DN	Rp	305.993.000,00
375	2YMBZD9A	400678	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	41.900.000,00
376	2C3BKT8A	097734	PN TEGAL	BARANG	DN	Rp	38.595.020,00
377	2LPQGMKA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	47.400.000,00
378	22XB7N1A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	49.013.381,00
379	2EDE115A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	3.200.000,00
380	25FJ922A	402355	PA METRO	BARANG	DN	Rp	166.500.000,00
381	2HL6XLEA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	343.057.144,00

382	2LJRL4RA	403009	PA SUMBER	BARANG	DN	Rp	200.056.000,00
383	232782XA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	334.552.775,00
384	2Y9DWBEA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	133.525.000,00
385	2RKVW8YA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	41.400.000,00
386	2Q3LZYDA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	159.094.590,00
387	2NP63VKA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	107.730.000,00
388	26GLD7QA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
389	2FMBV1LA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	119.880.000,00
390	2ZEX221A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	28.350.000,00
391	27YPNJSA	578864	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp	25.520.000,00
392	2WD3NJXA	614890	PN KOTA TIMIKA	BARANG	DN	Rp	84.582.000,00
393	2F7PRFKA	098324	PN BANGIL	BARANG	DN	Rp	76.500.000,00
394	22KDCRJA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	498.305.723,00
395	2VCY2KEA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	22.900.000,00
396	2SVMZR4A	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	1.900.000,00
397	2THAR8DA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
398	239NUHCA	098750	PN PADANG	BARANG	DN	Rp	120.000.000,00
399	2QZ2DP5A	402179	PA TAREMPA	BARANG	DN	Rp	196.442.690,00
400	24ZPGXUA	108025	PN STABAT	BARANG	DN	Rp	60.000.000,00
401	2YWZ4ZXA	604723	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	Rp	735.680.000,00
402	2CD88DXA	403083	PA SIMALUNGUN	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
403	24M8ZV2A	099031	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
404	2DGW1LNA	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	94.500.000,00
405	2MF17YHA	307932	PA DOMPU	BARANG	DN	Rp	99.988.000,00
406	2QMJARKA	097492	PN JAKARTA TIMUR	JASA	DN	Rp	165.000.000,00
407	2B3BSRGA	663403	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp	1.800.000,00
408	2RE9K5PA	099926	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp	17.858.200,00
409	2XLD47CA	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00

410	2JNVBS7A	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	181.000.000,00
411	26X7GE3A	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	1.004.880.000,00
412	2TCLQU5A	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.016.150.000,00
413	2YYEGETA	099879	PN RABA BIMA	BARANG	DN	Rp	99.500.000,00
414	25MAHEUA	099134	PN PANGKALAN BUN	BARANG	DN	Rp	225.888.975,00
415	2BEQ4VRA	099581	PN BULUKUMBA	BARANG	DN	Rp	1.080.900.000,00
416	216FD2RA	004028	KEPANITERAAN	BARANG	DN	Rp	245.357.950,00
417	2V5RPQBA	400239	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp	2.000.000,00
418	27B22A9A	097830	PN UNGARAN	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
419	25PUVYMA	097666	PN CIANJUR	BARANG	DN	Rp	40.000.000,00
420	2K666ZUA	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	17.950.000,00
421	2F7CJV8A	097624	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp	2.707.050.000,00
422	2VADKC6A	099684	PN KOLAKA	BARANG	DN	Rp	35.600.000,00
423	2SSYE9MA	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	16.208.750,00
424	2VVSJ6ZA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	21.014.241,00
425	2RN9S8KA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	50.771.400,00
426	2Z36FSDA	098722	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp	296.267.110,00
427	2N37N85A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	278.100.000,00
428	2N37N85A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	1.900.000,00
429	2QW4BFBA	097560	PN SERANG	JASA	DN	Rp	357.000.000,00
430	2QPBDHNA	401952	PA MESUJI	BARANG	DN	Rp	30.000.000,00
431	24UFR1AA	097776	PN BREBES	BARANG	DN	Rp	100.000.000,00
432	2AK87GZA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
433	2NSVNUZA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	131.314.000,00
434	21R3VNTA	477270	PN NUNUKAN	BARANG	DN	Rp	14.680.000,00
435	2KFLUTTA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	957.926.208,00
436	2D4LY88A	417722	PN TANJUNG SELOR	JASA	DN	Rp	180.000.000,00
437	2NQMR5KA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	6.500.000,00
438	222KVFQA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	40.000.000,00

439	2CVRL5ZA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
440	2B9MSJFA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	500.000,00
441	2U98ZNTA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	500.000,00
442	2387J8MA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
443	2GRMK38A	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
444	2WHJKPKA	402330	PA KRUI	BARANG	DN	Rp	28.970.000,00
445	293V826A	097975	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp	267.176.160,00
446	25HJRA3A	682228	MS SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	Rp	195.886.000,00
447	2VU7H5PA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	4.200.000,00
448	2RUEMM2A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
449	2QAT4Z4A	098192	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	Rp	55.646.850,00
450	21EHHWPA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	5.404.000,00
451	28DH1VYA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	5.250.000,00
452	2PUQEXMA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	2.400.000,00
453	27BVLRZA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	2.499.000,00
454	23J54F2A	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	144.000.000,00
455	2QS9V1LA	097514	PN BANDUNG	BARANG	DN	Rp	797.506.315,00
456	26VWHASA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
457	2YDRKFZA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	16.257.000,00
458	2BB3CBMA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
459	2U52WDSA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	239.600.000,00
460	22GWUGQA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	97.730.500,00
461	26FUVCSA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	33.400.002,00
462	2RDLC4XA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	342.957.482,00
463	25TDMN8A	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	117.000.000,00
464	241WCCBA	098519	PN LANGSA	BARANG	DN	Rp	373.831.776,00
465	2CXSBFEA	400492	PT RIAU	BARANG	DN	Rp	43.150.000,00
466	2GMHT77A	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	507.867.180,00
467	2MVPZXLA	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	160.506.000,00

468	2WTBK4BA	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	66.035.400,00
469	2LXSESJA	400710	PA GARUT	BARANG	DN	Rp	248.600.000,00
470	2MZBJFWA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	7.799.000,00
471	2CA3MCLA	098104	PN KAB. MALANG (KEPANJEN)	BARANG	DN	Rp	60.000.000,00
472	2BQ4EHKA	401926	PN LASUSUA	BARANG	DN	Rp	199.700.000,00
473	2T8NFG1A	401642	MS LHOKSUKON	BARANG	DN	Rp	95.000.000,00
474	2EMPER4A	672910	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp	322.202.000,00
475	2CJMQ8PA	099890	PN SELONG	BARANG	DN	Rp	19.000.000,00
476	2RU73TVA	099890	PN SELONG	BARANG	DN	Rp	800.000,00
477	2FDSXHZA	613519	PN CIBINONG	JASA	DN	Rp	723.298.405,00
478	2P5NTVPA	401913	PN MENTOK	BARANG	DN	Rp	305.848.489,00
479	239K7D8A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	10.532.000,00
480	2MRV96SA	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	325.000.000,00
481	2L2Z3UCA	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	96.000.000,00
482	2MEBQ3SA	097797	PN KENDAL	JASA	DN	Rp	115.500.000,00
483	2WDD7SSA	099070	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
484	22A797BA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
485	28NJLLAA	098125	PN BOJONEGORO	BARANG	DN	Rp	272.556.890,00
486	2CLB3EGA	401137	PA BOYOLALI	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
487	2LQFNCUA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	356.043.600,00
488	25XCRRRA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	95.948.400,00
489	2F5C4DKA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	226.795.200,00
490	2W7SLNPA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	96.158.441,00
491	2LJQV7KA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	186.480.000,00
492	2D1UBDLA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	336.487.557,00
493	2E487HEA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	476.224.379,00
494	24KHNAGA	400214	PN JAKARTA SELATAN	BARANG	DN	Rp	184.455.000,00
495	2R3SVSDA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	84.750.000,00

496	2KT3JQMA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	169.230.000,00
497	2G24WQ1A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	317.826.300,00
498	24XACTZA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	311.256.625,00
499	2PM522ZA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	6.458.000,00
500	27YMQF6A	400075	PN SORONG	BARANG	DN	Rp	82.694.000,00
501	2VCKTQNA	308021	PA CURUP	BARANG	DN	Rp	4.150.000,00
502	2N2LRXLA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
503	2ZA1HFVA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp	6.997.934.045,00
504	2CESZLMA	613519	PN CIBINONG	JASA	DN	Rp	849.664.260,00
505	2NKSHTHA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	177.584.377,00
506	2YK9S6RA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	84.501.297,00
507	25C7T35A	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	87.201.600,00
508	2AHT489A	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	114.600.000,00
509	2RKQM4BA	097851	PN BLORA	BARANG	DN	Rp	199.000.000,00
510	2218JJAA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	198.750.000,00
511	2218JJAA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	561.900.000,00
512	22PBN9JA	099816	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	Rp	721.802.991,00
513	23HRLCLA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	56.500.000,00
514	2QM984LA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	34.822.080,00
515	2TEQDSFA	663047	PN SUKADANA	BARANG	DN	Rp	90.000.000,00
516	2CEUGUYA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	663.621.000,00
517	2NTGDR5A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	513.762.000,00
518	26E6KSVA	578885	PTUN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	48.950.000,00
519	2CENAAQA	400409	PN CIBADAK	JASA	DN	Rp	132.600.000,00
520	2F6LHQ9A	663292	DILMIL II - 11 YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	180.000.000,00
521	264GL1EA	672973	PN KASONGAN	BARANG	DN	Rp	38.480.000,00
522	2R1MEHQA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	285.961.086,00
523	2UQ34C7A	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	9.102.000,00

524	23HZ211A	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	197.182.864,00
525	27DGWRBA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	246.707.500,00
526	2DK1RMPA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	317.682.000,00
527	27QM1XSA	098104	PN GRESIK	BARANG	DN	Rp	487.670.887,00
528	2WJ1PNJA	099780	PN DENPASAR	JASA	DN	Rp	180.000.000,00
529	2XEZNXKA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	212.417.126,00
530	2YDULG6A	098434	PT BANDA ACEH	BARANG	DN	Rp	1.499.744.000,00
531	2WKNRBZA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	895.254.494,00
532	2K7N4HGA	099443	PN PANGKAJENE	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
533	2A8JFGMA	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	719.040.200,00
534	22113U3A	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	448.646.000,00
535	2AKLGKBA	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	245.800.000,00
536	2YB5FFLA	401338	PA JEMBER	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
537	2CKLQT3A	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	10.865.000,00
538	2PCHZQZA	400389	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp	197.370.350,00
539	29FTEKCA	097488	PN JAKARTA BARAT	JASA	DN	Rp	200.000.000,00
540	29FTEKCA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	289.188.300,00
541	2MP57LGA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	618.500.000,00
542	2FL3A8NA	400220	PN JAKARTA UTARA	JASA	DN	Rp	156.000.000,00
543	2W6KLMXA	099155	PN KUALA KAPUAS	UANG	DN	Rp	500.000.000,00
544	2KAA633A	401877	PA PENAJAM	UANG	DN	Rp	440.000.000,00
545	26QKRDNA	401924	PN PENAJAM	UANG	DN	Rp	440.000.000,00
546	2264Y9WA	098938	PT PALEMBANG	UANG	DN	Rp	2.500.000.000,00
547	21ZRMZ6A	613519	PN CIBINONG	UANG	DN	Rp	482.524.000,00
548	22ZZUGHA	526716	PT PAPUA BARAT	UANG	DN	Rp	1.000.000.000,00
549	2B5ERZDA	663030	PN GUNUNG SUGIH	UANG	DN	Rp	200.000.000,00
550	2UNM5YPA	400741	PA CIANJUR	UANG	DN	Rp	50.000.000,00
551	275ESBKA	401293	PA GRESIK	UANG	DN	Rp	600.000.000,00

TOTAL	Rp 122.176.025.953,00

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL

(Dalam Rupiah)

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	286XBCXA	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	38.408.500,00
2	2YS9Q2TA	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
3	2ZJECSYA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	143.000.000,00
4	2PDMK6NA	097492	PN JAKARTA TIMUR	BARANG	DN	Rp	326.998.235,00
5	2TK1TQNA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	956.468.000,00
6	2EBB3QEA	099312	PT MANADO	BARANG	DN	Rp	605.000.000,00
7	2ZHPPZZA	098984	PN LAHAT	BARANG	DN	Rp	1.000.000.000,00
8	222RUFHA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
9	2GPD85AA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	1.000.000,00
10	2DWX2Y8A	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
11	2G7WKTZA	098612	PT MEDAN	BARANG	DN	Rp	1.343.300.000,00
12	27YR4RSA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	9.725.000,00
13	2GBKVZ5A	526710	PT SULAWESI BARAT	BARANG	DN	Rp	3.766.872.367,00
14	2H13A15A	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	355.417.000,00
15	27MMNC1A	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	149.800.000,00
16	2FH25RQA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	69.903.900,00
17	2AZCZFKA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	199.800.000,00
18	2QX25G4A	402443	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp	86.800.000,00
19	2WPTD99A	097645	PN BOGOR	BARANG	DN	Rp	180.000.000,00
20	2N3K9AZA	400141	PN BANGKINANG	BARANG	DN	Rp	1.307.163.900,00

21	2G7N6STA	670191	PN TAMIANG LAYANG	BARANG	DN	Rp	399.530.650,00
22	24YYUG6A	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	16.500.000,00
23	29X8T21A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	113.408.202,00
24	2QY9EWLA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	40.404.000,00
25	289BHSHA	401262	PA SIDOARJO	BARANG	DN	Rp	107.992.500,00
26	2EHZTQ6A	526720	PT KALIMANTAN UTARA	BARANG	DN	Rp	352.400.000,00
27	2BAB4JHA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	1.742.759.300,00
28	2DHQJR6A	307712	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp	14.650.000,00
29	24PKGAVA	097741	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp	63.519.750,00
30	2WWFFPAA	097741	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp	123.100.000,00
31	24S87GQA	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	180.567.000,00
32	27SR3CTA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	568.740.000,00
33	2J2Q5W7A	307885	PA MATARAM	BARANG	DN	Rp	559.880.000,00
34	2FNHCY9A	307885	PA MATARAM	BARANG	DN	Rp	185.500.000,00
35	27NTN3PA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	213.229.178,00
36	2FEJM61A	400415	PN JANTHOI	BARANG	DN	Rp	138.670.000,00
37	27RP2EGA	099219	PN KOTABARU	BARANG	DN	Rp	927.000.000,00
38	25LMCYPA	098409	PA SUMENEP	BARANG	DN	Rp	183.100.000,00
39	2QF3ZXRA	401551	PA SAMPANG	BARANG	DN	Rp	72.000.000,00
40	2J49EQ6A	098310	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp	34.980.000,00
41	28NLTHRA	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	60.000.000,00
42	26QUZK7A	402443	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp	349.460.901,00
43	2QF3U34A	526708	PTA KEPULAUAN RIAU	BARANG	DN	Rp	24.000.000,00
44	2HJTH7HA	097670	PN CIREBON	BARANG	DN	Rp	2.506.323.000,00
45	2GE5LNMA	401877	PA PENAJAM	BARANG	DN	Rp	622.290.000,00
46	28VQS9TA	099560	PN BANTAENG	BARANG	DN	Rp	148.891.000,00
47	21QK6BGA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	249.686.000,00
48	25QAC9WA	307818	PA LABUHAN BACAN	BARANG	DN	Rp	156.000.000,00

49	23H626MA	401966	MS SUKA MAKMUE	BARANG	DN	Rp	60.541.500,00
50	292643NA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.966.000,00
51	2VXDPAAA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	198.900.000,00
52	24E6VBKA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.610.000,00
53	2FBFA16A	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	7.500.000,00
54	2GSVZLYA	099180	PN MANDAILING NATAL	BARANG	DN	Rp	474.700.000,00
55	22UM2UCA	099422	PN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	250.109.000,00
56	2VX31E3A	401293	PA GRESIK	BARANG	DN	Rp	3.235.176.811,00
57	25456PQA	682164	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	Rp	45.226.894,00
58	2UAQC9PA	526722	PTA KALIMANTAN UTARA	BARANG	DN	Rp	352.400.000,00
59	2EGCVLVA	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	298.679.375,00
60	21ZT7V1A	307491	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	12.200.000,00
61	21Z3EW7A	097560	PN SERANG	JASA	DN	Rp	202.500.000,00
62	2LNSZAZA	631999	PA PANGKALAN KERINCI	BARANG	DN	Rp	16.100.000,00
63	2PX3QXLA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	489.921.000,00
64	225WUJTA	097851	PN BLORA	BARANG	DN	Rp	197.620.000,00
65	2WW11YSA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	269.174.000,00
66	2MWQCDXA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	11.500.000,00
67	2473SFVA	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	199.500.000,00
68	2D8WXE9A	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	349.200.000,00
69	2B6572YA	401950	PA GEDONGTATAAN	BARANG	DN	Rp	62.500.000,00
70	2M13T3GA	401752	MS SINGKIL	BARANG	DN	Rp	189.360.000,00
71	2FK8K1EA	099443	PN PANGKAJENE	BARANG	DN	Rp	188.450.000,00
72	28JQ5P7A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
73	2HHQKKZA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	230.000.000,00
74	28GWSY5A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	243.923.027,00
75	29DY132A	401611	MS SIGLI	BARANG	DN	Rp	388.942.000,00

76	2Q8EXYXA	402097	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	86.270.000,00
77	2NQHBG7A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	129.492.500,00
78	23V69BLA	526716	PT PAPUA BARAT	BARANG	DN	Rp	2.022.750.000,00
79	2B1CZL9A	401943	PA PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.400.000,00
80	21PRJLFA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	7.020.000,00
81	2N2V57QA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	456.842.700,00
82	2KZQVVXA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	186.158.454,00
83	25Y1BY5A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	55.268.920,00
84	257DTHNA	401965	MS BLANGPIDIE	BARANG	DN	Rp	19.435.200,00
85	28K6RBTA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	177.955.200,00
86	2LF4CPFA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	292.722.025,00
87	2WKELHZA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	39.588.705,00
88	2PNYP22A	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	356.938.038,00
89	2L2LUEHA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	646.298.077,00
90	2MAPSXCA	098640	PN TANJUNG BALAI	BARANG	DN	Rp	109.125.748,00
91	2F4JD2EA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	68.849.000,00
92	298Z5SJA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	94.236.500,00
93	2RL4JMGA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	53.066.492,00
94	23ATGP1A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	61.438.500,00
95	2B3Y5HEA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	65.700.000,00
96	27JCRH1A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	20.158.211,00
97	29TZNC7A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	69.000.000,00
98	2XBB9Y8A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	199.643.906,00
99	2H6PFCAA	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	57.500.000,00
100	2QN57PJA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	54.000.000,00
101	2GJB19AA	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	849.364.434,00
102	2QDCPEQA	672948	PN NATUNA	BARANG	DN	Rp	199.547.716,00
TOTAL						**Rp**	**35.863.708.316,00**

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL disajikan pada lampiran A3 Laporan Keuangan ini.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri

Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

(Dalam Rupiah)

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	13.955.252.892,00
2	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	4.778.398.475,00
3	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	5.948.994.262,00
TOTAL						**Rp**	**24.682.645.629,00**

Ekuitas Akhir Rp Rp32.133.765.951.062,00.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.133.765.951.062,00 dan Rp31.765.973.920.689,00.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

1. Perkembangan kasus Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 729 kasus Kerugian Negara, yang terdiri dari:

Tabel Kerugian Negara Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

Status Penyelesaian		Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2024	Sisa Angsuran
A	**SUDAH PENETAPAN**				
1	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2	TGR NON BENDAHARA	267	3.193.319.047,00	3.174.581.541,00	18.737.506,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
B	**PROSES PENETAPAN**				
1	TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0,00
2	TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C	**INFORMASI**				
1	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2	APIP	16	518.543.961,76	518.543.961,76	0,00
Jumlah		**729**	**29.953.912.263,74**	**29.935.174.757,74**	**18.737.506,00**

Dalam rangka penyelesaian kasus Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Mahkamah Agung atas nama Sdri. Rohmawati, Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun Anggaran 2011 sebagai tindak lanjut penilaian dan/atau penetapan atas status Kerugian Negara tersebut oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Surat Nomor: 84/S/MTP/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada Sdri. Rohmawati, Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun Anggaran 2011 melalui Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 06.TP.04-2011/III/2016.SKPBW tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan, dengan putusan bahwa Sdri. Rohmawati bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp22.772.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus

tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagai akibat kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara tersebut.

2. Berdasarkan dokumen bukti kuitansi pembayaran Kerugian Negara, diketahui bahwa atas Kerugian Negara sebesar Rp22.772.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Sdri. Rohmawati dan diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya langsung digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan membayar uang lembur pegawai.
3. Dengan telah dilakukannya pembayaran tersebut, maka Kerugian Negara telah dipulihkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, kasus tersebut dapat dikeluarkan dari Daftar Kerugian Negara.

GRAFIK JUMLAH KERUGIAN NEGARA

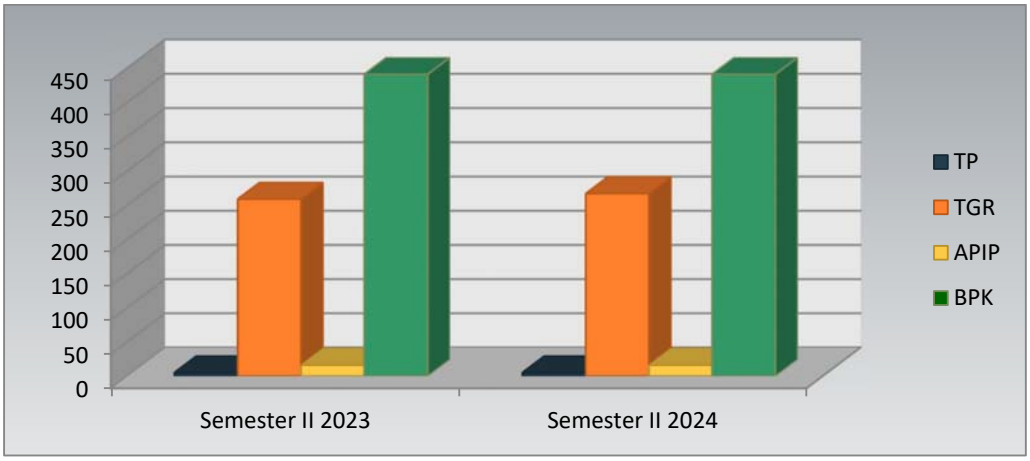

Kasus Kerugian Negara di Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2024 berjumlah 729 kasus, berupa kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP), kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan kasus Pihak Ketiga baik temuan Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku APIP, maupun temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024. Kasus Kerugian Negara tersebut diperoleh dari:

- Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tingkat Lembaga, Wilayah, maupun Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan;
- Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung ketika melakukan pemeriksaan regional secara rutin;
- Laporan Satuan Kerja yang mengalami kasus Kerugian Negara dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

2. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2024

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK : Auditorat Utama Keuangan Negara III/Auditorat III.A
ENTITAS : Mahkamah Agung
TAHUN PEMERIKSAAN : S.d Semester II Tahun 2024

Tahun	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-
2006	7	156.821.300,00	10	102.000.000,00	10	102.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156.821.300,00
2007	30	1.987.903.852,50	30	545.051.826,98	22	285.298.757,35	0	0,00	0	0,00	8	259.753.069,63	285.298.757,35
2008	25	1.179.088.506,33	43	770.918.650,10	43	770.918.650,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	785.825.239,65
2009	40	3.038.087.057,41	72	679.878.497,41	71	679.878.497,41	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1.014.852.808,81
2010	27	262.900.617,00	54	223.212.117,00	53	223.212.117,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	227.622.117,00
2011	54	3.653.976.655,88	93	2.403.651.829,36	93	2.174.781.829,36	0	0,00	0	0,00	0	228.870.000,00	2.293.770.801,36
2012	43	2.167.061.048,04	78	1.517.393.798,04	78	1.496.837.297,44	0	0,00	0	0,00	0	20.556.500,60	1.496.485.500,44
2013	67	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.047.510.082,58
2014	71	3.416.145.288,06	142	2.441.023.459,62	141	1.936.047.709,62	0	0,00	0	0,00	1	504.975.750,00	2.534.200.083,06
2015	25	8.214.492.976,92	72	7.357.200.084,30	72	7.172.355.990,99	0	0,00	0	0,00	0	184.844.093,31	7.897.315.183,76
2016	27	5.262.286.278,77	97	4.838.353.457,77	97	4.838.353.457,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.262.286.279,54
2017	33	8.006.124.606,67	91	7.148.221.693,19	91	5.703.382.278,07	0	0,00	0	0,00	0	1.444.839.415,12	6.975.586.920,25
2018	59	3.909.863.007,00	158	3.480.250.657,00	158	3.480.250.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.085.684.163,00
2019	35	2.120.302.977,86	110	1.588.924.414,86	110	1.588.924.414,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.007.644.786,86
2020	27	1.610.670.108,00	72	1.013.502.250,00	72	1.013.502.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.610.670.108,00
2021	86	5.231.864.796,00	298	2.772.005.596,00	298	2.772.005.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.307.816.869,00
2022	69	3.904.851.871,57	177	1.927.296.587,01	177	1.927.296.587,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.904.851.871,57
2023	64	15.460.590.829,61	197	14.928.168.748,33	185	7.348.095.038,33	12	7.580.073.710,00	0	0,00	0	0,00	6.556.407.290,61
2024	18	4.582.441.319,00	46	3.906.469.966,00	41	3.020.037.201,00	5	886.432.765,00	0	0,00	0	0,00	3.020.037.201,00
Jumlah	**813**	**75.978.564.120,05**	**1955**	**59.456.614.656,40**	**1927**	**48.346.269.352,74**	**17**	**8.466.506.475,00**	**0**	**0,00**	**11**	**2.643.838.828,66**	**57.470.687.363,84**

GRAFIK HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

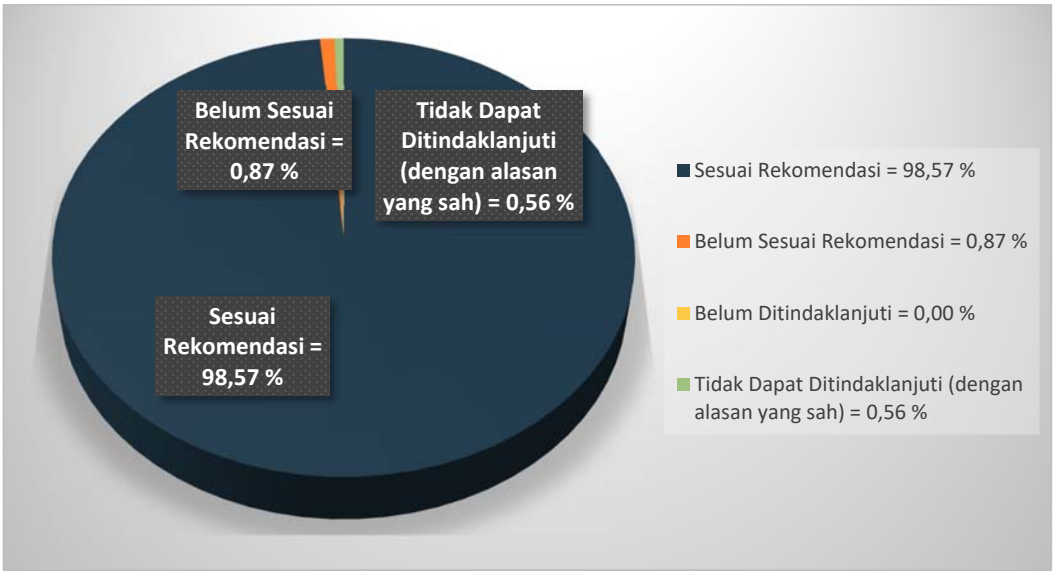

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2024 pada Mahkamah Agung Nomor: 69/LHPt/XVI/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 atas 48 LHP dengan 813 temuan dan 1.955 rekomendasi senilai Rp59.456.614.656,40, menunjukkan status tindak lanjut yang telah dilaksanakan MA adalah sebagai berikut:

1. Sesuai rekomendasi sebanyak 1.927 rekomendasi (98,57%) senilai Rp48.346.269.352,74;
2. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 17 rekomendasi (0,87%) senilai Rp8.466.506.475,00;
3. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi (0,56%) senilai Rp2.643.838.828,66.

Adapun rincian status tindak lanjut atas empat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 87.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2022. Terdapat 25 temuan sebesar Rp3.755.276.399,61 memuat 74 rekomendasi sebesar Rp3.228.275.627,33 dengan status pemantauan sebagai berikut:
   - Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 73 rekomendasi sebesar Rp3.071.234.219,33;
   - Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak satu rekomendasi sebesar Rp157.041.408,00;

- Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
- Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan telah mencapai penyelesaian 98,65%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 25/LHP/XVI/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. Terdapat 25 temuan sebesar Rp0,00 memuat 80 rekomendasi sebesar Rp0,00 dengan status pemantauan sebagai berikut:
   - Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 72 rekomendasi sebesar Rp0,00;
   - Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak delapan rekomendasi sebesar Rp0,00;
   - Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
   - Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

   Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan telah mencapai penyelesaian 90,00%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
3) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 28/LHP/XVI/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. Terdapat 14 temuan sebesar Rp11.705.314.430,00 memuat 43 rekomendasi sebesar Rp11.699.893.121,00 dengan status pemantauan sebagai berikut:
   - Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 40 rekomendasi sebesar Rp4.276.860.819,00;
   - Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak tiga rekomendasi sebesar Rp7.423.032.302,00;
   - Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
   - Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

   Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan telah mencapai penyelesaian 93,02%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
4) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 33.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Terdapat 18 temuan sebesar Rp4.582.441.319,00 memuat 46 rekomendasi sebesar Rp3.906.469.966,00 dengan status pemantauan sebagai berikut:

- Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 41 rekomendasi sebesar Rp3.020.037.201,00;
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak lima rekomendasi sebesar Rp886.432.765,00;
- Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
- Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan telah mencapai penyelesaian 89,13%, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Pada empat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diatas terdapat 17 rekomendasi temuan dengan status belum sesuai dengan rekomendasi senilai Rp8.466.506.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK BELUM SESUAI REKOMENDASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

NOMOR: 87.b/LHP/XVI/05/2023 TANGGAL: 24 MEI 2023

Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan	Satuan Kerja	Nama	Nominal Temuan	Nominal Setoran	Sisa	NTPN	Tanggal Setor
1 Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: b. Menginstruksikan KPA satker terkait untuk: 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai serta Pemotongan PPh Pasal 21; 2) Memerintahkan PPK satker terkait untuk: a) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai; b) Menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp1.269.870.595,00 (Rp838.917.383,00 + Rp430.953.212,00) yang terdiri dari: (1) Tunjangan Hakim sebesar Rp838.917.383,00 (Rp935.463.708,00 - Rp96.546.325,00); (2) Tunjangan Kinerja, Gaji dan/atau Tunjangan Struktural Pegawai sebesar Rp430.953.212,00 (Rp26.952.000,00 + Rp481.472.312,00 - Rp77.471.100,00); 3) Memerintahkan PPABP satker terkait: a) Lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan data kepegawaian; b) Lebih cermat dalam menyusun daftar gaji dan tunjangan Hakim serta pegawai sesuai ketentuan; c) Mengikuti diklat/sosialisasi terkait tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Hakim dan pegawai.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Belum terdapat bukti setor sebesar Rp157.041.408,00, dan apabila diajukan menjadi status tidak dapat ditindaklanjuti agar melampirkan yaitu:							
		1. Terkait Sdr. JB a. Belum ada surat atau penjelasan tertulis dari Direktorat Pembinaan Teknis Badilum tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA sesuai Surat Kepala Bawas Nomor 12/BP/PS.02/1/2022 tanggal 11 Januari 2022. Tindak lanjut tersebut berupa surat yang menyatakan pemberian sanksi hukuman disiplin atau pembebasan dari sanksi hukuman disiplin kepada Sdr. JB sehingga ada kepastian status hukuman disiplin terhadap hasil pemeriksaan Badan Pengawasan yang memberikan "peringatan" kepada pegawai yang bersangkutan; b. Hasil telaah dari Bawas terkait alasan pengajuan usulan status 4 sesuai ketentuan yang berlaku.	1 Pengadilan Negeri Kupang	Julius Bolla, S.H.	30.060.000,00	0,00	30.060.000,00	-	-
		2. Terkait Sdr. IIH Belum ada hasil telaah dari Bawas terkait alasan pengajuan usulan status 4 sesuai ketentuan yang berlaku.	2 Pengadilan Negeri Surabaya	Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.	140.943.508,00	13.962.100,00	126.981.408,00	75A3561QUR6LFK90	22 November 2023
Total							**157.041.408,00**		

REKAPITULASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK BELUM SESUAI REKOMENDASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PELAYANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2022 DAN 2023

(S.D SEMESTER I) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

NOMOR: 25/LHP/XVI/02/2024 TANGGAL: 2 FEBRUARI 2024

	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan
1	Pencantuman Biaya Perkara pada Putusan Tata Usaha Negara Belum Menggambarkan Seluruh Biaya Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara.	BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk menyusun usulan panduan atau kebijakan yang mengatur terkait mekanisme pencantuman seluruh biaya perkara yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara pada putusan termasuk biaya yang dikeluarkan di pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada Ketua Kamar TUN agar dapat menjadi acuan bagi seluruh satker pengadilan;	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu Ketua Kamar TUN belum menetapkan acuan yang telah diusulkan oleh Dirjen Badilmiltun.
2	Penetapan Panjar Biaya Perkara pada PTTUN Belum Sepenuhnya Memadai dan Penentuan Biaya Panjar Gugatan Tingkat Pertama Belum Dilaksanakan secara Elektronik.	BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar: 1) Memedomani hasil Rakornis Ditjen Badilmiltun dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara; 2) Menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara MA dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Diajukan belum sesuai rekomendasi karena belum melampirkan SK Penetapan Panjar Biaya Perkara untuk PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Medan yang telah memedomani hasil Rakornis Ditjen Badilmiltun.
3	Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding.	BPK merekomendasikan kepada: e. Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian court calendar pada SIPP oleh Majelis Hakim, serta menginstruksikan kepada Majelis Hakim untuk mengisi dan melengkapi court calendar atas 18 perkara di PTTUN Medan, 47 perkara di PTTUN Jakarta, 12 perkara di PTTUN Surabaya, dan 14 perkara di PTTUN Makassar;	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Dengan demikian, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu belum adanya tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Makassar atas pengisian dan melengkapi court calendar atas 14 perkara dengan bukti lampiran telah melengkapi court calendar tersebut.
4	Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai.	BPK merekomendasikan kepada c. Ketua PTUN Medan dan PTUN Makassar agar: 1) Membentuk dan menetapkan Satgas TIK pada tahun 2022 dan 2023; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 3) Menginstruksikan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Dengan demikian, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu SK Ketua PTUN Makassar tentang Satuan Tugas TIK dan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023.
		BPK merekomendasikan kepada d. Ketua PTUN Surabaya agar: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu belum dilampirkan tanggapan dari masing-masing pejabat atas perintah kepada Panitera, Panmud Perkara, dan Panmud Hukum.
5	Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Banding Belum Sepenuhnya Memadai.	BPK merekomendasikan kepada b. PTTUN Jakarta agar: 1) Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) TIK; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi; 3) Melakukan langkah-langkah untuk memindahkan berkas perkara inaktif yang menjadi milik PTTUN baru; 4) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 5) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 7) Memerintahkan Panitera Muda Hukum untuk cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Dengan demikian, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu belum ada SK dari Ketua PTTUN Jakarta tentang pembentukan Satgas TIK.
6	Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan MA.	BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar: a. Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua MA dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir;	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Belum sesuai rekomendasi karena belum ada draft perubahan SK Ketua MA yang telah ditetapkan atau disetujui.
7	Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan PK oleh MA ke PTUN Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu.	BPK merekomendasikan kepada: a. Panitera MA agar: 1) Menetapkan ketentuan pelaksanaan atau SOP yang mengatur batas waktu pengarsipan berkas Bundel B oleh Kepaniteraan MA; 2) Menginstruksikan Panitera Muda TUN MA agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara Kasasi/PK ke PTUN pengaju; 3) Menginstruksikan Koordinator Pengiriman Berkas pada Kepaniteraan Muda TUN agar melaksanakan pengiriman berkas perkara kasasi/PK ke PTUN pengaju sesuai SOP yang berlaku.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Panitera MA belum menetapkan ketentuan pelaksanaan atau SOP yang mengatur batas waktu pengarsipan berkas Bundel B oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK BELUM SESUAI REKOMENDASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023 (S.D TRIWULAN III) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

NOMOR: 28/LHP/XVI/02/2024 TANGGAL: 2 FEBRUARI 2024

	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan		Satuan Kerja	Nama	Nominal Temuan	Nominal Setoran	Sisa	NTPN	Tanggal Setor
1	Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Tahunan MA Tahun 2022 Tidak Sesuai Ketentuan.	b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Sekretariat Pimpinan supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran kepada PT IKI sebesar Rp300.000.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan pada Sem II 2024 diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: PT IKI belum belum menyetorkan kelebihan pembayaran dengan menyampaikan bukti setoran ke Kas Negara sebesar Rp300.000.000,00.	1	Biro Sekretariat Pimpinan BUA	PT Imageri Kreatif Indonesia	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	-	-
2	Pelaksanaan Pembangunan 18 Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA Tidak Sesuai Ketentuan.	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Meureudu, PN Blangpidie, MS Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, PA Pangkalan Balai, PA Martapura, PA Muaradua, PA Pagar Alam, PA Kasongan, PA Nanga Bulik, PA Pulang Pisau, PN Nanga Bulik, PN Pulang Pisau dan PPK BUA supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9.766.485.034,00 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp70.858.406,00; b) PT PNA KSO CV K pada PN Blangpidie sebesar Rp43.579.462,00; c) CV AL pada PN Blangpidie sebesar Rp30.261.230,00; d) PT MEGA KSO CV MK pada MS Blangpidie sebesar Rp141.918.885,00; e) PT PB pada MS Kota Subulussalam sebesar Rp651.699.904,00; f) PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp109.599.709,00; g) PT CD pada PA Sibuhuan sebesar Rp958.574.003,00; h) PT IDK pada PA Pangkalan Balai sebesar Rp577.475.524,00; i) PT DITS pada PA Martapura sebesar Rp348.071.709,00; j) PT IEU pada PA Muaradua sebesar Rp139.121.866,00; k) PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp53.800.327,00; l) PT HIU pada PA Kasongan sebesar Rp645.390.189,00; m) PT BER pada PA Nanga Bulik sebesar Rp786.583.164,00; n) PT BUK pada PA Pulang Pisau sebesar Rp2.298.471.872,00; o) PT RSS pada PN Nanga Bulik sebesar Rp148.844.466,00; p) CV SN pada PN Pulang Pisau sebesar Rp67.902.266,00; q) PT BA pada BUA sebesar Rp2.670.226.459,00; r) CV AJM pada BUA sebesar Rp24.105.593,00.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindak lanjut yang disampaikan pada Semester II Tahun 2024 diketahui bahwa: 1. MA telah menyampaikan bukti penyetoran sebesar Rp2.246.893.915,00. Atas bukti bukti setoran tersebut, telah dilakukan pengecekan pada SIMPONI dan OMSPAN; Kesimpulannya MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yaitu: Bukti setoran untuk sisa rekomendasi sebesar Rp6.937.693.799,00 (Rp9.766.485.034,00 - Rp581.897.320,00 - Rp2.246.893.915,00) Ket : Total Setoran Sem II Tahun 2024 sebesar Rp2.246.893.915,00 dan Total Setoran Sem I Tahun 2024 sebesar Rp581.897.320,00.	1	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	PT Mitra Eclat Gunung Arta KSO CV Mayang Karya	141.918.885,00	0,00	141.918.885,00	-	-
				2	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	PT Peduli Bangsa	651.699.904,00	135.562.946,00	516.136.958,00	5F3F17QLUP8VA7G4	5 Juli 2024
				3	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	PT Indi Daya Karya	577.475.524,00	163.675.674,00	413.799.850,00	3C9907QLUP9EO41L	19 Juli 2024
				4	Pengadilan Agama Martapura	PT Detiga Inti Sinergi	348.071.709,00	69.796.709,00	278.275.000,00	0EFC03CIFKD1941G	9 Juli 2024
				5	Pengadilan Agama Kasongan	PT Haryadi Indo Utama	645.390.189,00	0,00	645.390.189,00	-	-
				6	Pengadilan Agama Nanga Bulik	PT Bahtera Emas Raya	786.583.164,00	189.757.815,00	596.825.349,00	6592C0NA04M1B2AA	8 Juli 2024
				7	Pengadilan Agama Pulang Pisau	PT Buana Utama Karya	2.298.471.872,00	145.590.654,00	2.152.881.218,00	93AC57QLUP8V65CR	3 Juli 2024
				8	Biro Umum BUA	PT Brahmakerta Adiwira	2.670.226.459,00	477.760.109,00	2.192.466.350,00	E90AE2G4VPQN1O51	11 Juli 2024
		b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Meureudu, PN Sibuhuan, PA Muaradua dan PA Pagar Alam supaya menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.424.293.666,00 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp226.842.023,00; b) PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp692.686.560,00; c) PT IEU pada PA Muaradua sebesar Rp319.426.580,00; d) PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp185.338.503,00.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindak lanjut yang disampaikan pada Sem II 2024 diketahui bahwa: MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: Belum ada bukti setor PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp185.338.503,00.	1	Pengadilan Agama Pagar Alam	PT Araz Mulia Mandiri KSO PT Indi Daya Karya	185.338.503,00	0,00	185.338.503,00	-	-
Total									**7.423.032.302,00**		

REKAPITULASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK BELUM SESUAI REKOMENDASI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

NOMOR: 33.b/LHP/XVI/05/2024 TANGGAL: 20 MEI 2024

Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan	Satuan Kerja	Nama	Nominal Temuan	Nominal Setoran	Sisa	NTPN	Tanggal Setor
1 Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan TA 2023 Sebesar Rp55.011.775,00.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK: b. Menarik kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp55.011.775,00 dan menyetorkan ke Kas Negara;	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindak lanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa : 1. Sekretaris MA telah menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp55.011.775,00 dan menyetorkan ke Kas Negara; 2. KPA satker terkait telah memerintahkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp55.011.775,00 dan menyetorkan ke Kas Negara; 3. Surat Tanggapan PPK satker terkait yang menyatakan telah menarik kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp55.011.775,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Hasil Pengecekan terhadap bukti setor diketahui kelebihan pembayaran honorarium yang telah ditarik senilai Rp54.008.975,00 (bukti setor terlampir), sedangkan sebesar Rp1.002.800,00 merupakan kesalahan perhitungan pada SPMT namun belum dilengkapi verifikasi dan validasi dari Bawas. Dengan demikian perlu dilengkapi verifikasi dan validasi dari Bawas terkait hal tersebut. Atas bukti-bukti setoran senilai Rp54.008.975,00, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan.	1 Pengadilan Agama Pekanbaru	1 Sutikno Hadi, S.H.	6.964.200,00	6.190.400,00	773.800,00	C89D82G4VPTT30S5	13 Agustus 2024
				2 Sri Yunidarti, S.H.	2.290.000,00	2.061.000,00	229.000,00	CF8BC48VVF2LT12U	13 Agustus 2024
2 Pelaksanaan Pembangunan Delapan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA Tidak Sesuai Ketentuan.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk menginstruksikan KPA pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh, dan BUA supaya: a. Memerintahkan PPK satker terkait: 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut: a) PT. RJS pada PA Tais sebesar Rp642.515.102,00; b) PT. HMP pada PA Bintuhan sebesar Rp425.989.806,00; c) PT. AB pada PA Nanga Pinoh sebesar Rp739.501.578,00; d) PT. GMK pada PT Banda Aceh sebesar Rp96.549.005,00; e) PT. KMB pada PN Banda Aceh sebesar Rp52.652.684,00; f) CV KAM pada BUA sebesar Rp70.888.713,00; g) PT. JP pada BUA sebesar Rp168.956.984,00; h) PT. PRM pada BUA sebesar Rp286.455.753,00.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindak lanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa : 1. Sekretaris MA telah menginstruksikan KPA pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh, dan BUA supaya memerintahkan PPK satker terkait agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut: a) PT. RJS pada PA Tais sebesar Rp642.515.102,00; b) PT. HMP pada PA Bintuhan sebesar Rp425.989.806,00; c) PT. AB pada PA Nanga Pinoh sebesar Rp739.501.578,00; d) PT. GMK pada PT Banda Aceh sebesar Rp96.549.005,00; e) PT. KMB pada PN Banda Aceh sebesar Rp52.652.684,00; f) CV KAM pada BUA sebesar Rp70.888.713,00; g) PT. JP pada BUA sebesar Rp168.956.984,00; h) PT. PRM pada BUA sebesar Rp286.455.753,00; 2. KPA pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh, dan BUA telah memerintahkan PPK satker terkait agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara; 3. Surat tanggapan PPK satker terkait yang menyatakan telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan sudah disetorkan ke Kas Negara; Hasil Pengecekan terhadap bukti setor diketahui masih terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp825.989.806,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Jumlah yang telah disetorkan senilai Rp1.657.519.819,00. Atas bukti setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan.	1 Pengadilan Agama Tais	PT Ram Jejamou Sai	642.515.102,00	42.515.102,00	400.000.000,00	B5A5E61QV47NGUGK	23 Agustus 2024
						100.000.000,00		EEE992G4VQ6S2M6G	13 November 2024
						100.000.000,00		55AF97QLUPO2SG8B	10 Desember 2024
			2 Pengadilan Agama Bintuhan	PT Haberka Mitra Persada	425.989.806,00	0,00	425.989.806,00	-	-

	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan	Satuan Kerja	Nama	Nominal Temuan	Nominal Setoran	Sisa	NTPN	Tanggal Setor
3	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah Belum Tertib.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk menginstruksikan KPB satker terkait dan Kepala Biro Perlengkapan supaya melanjutkan upaya menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan dan diklaim pihak lain.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindak lanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah menginstruksikan KPB satker terkait dan Kepala Biro Perlengkapan supaya melanjutkan upaya menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan dan diklaim pihak lain; 2. Surat Tanggapan KPB satker terkait dan Kepala Biro Perlengkapan yang menyatakan akan melanjutkan upaya menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan dan diklaim pihak lain; 3. Update penyelesaian permasalahan Aset Tetap Tanah Biro Perlengkapan; 4. Update penyelesaian permasalahan Aset Tetap Tanah PT Gorontalo; 5. Update penyelesaian permasalahan Aset Tetap Tanah PN Bangkalan; 6. Surat Sekretaris Pengadilan Gorontalo Nomor 2059/KPT.W20-U/PL1.2.5/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang berisi Sekretaris PT Gorontalo meminta Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Surat Kuasa Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo; 7. Surat KPB PN Bangkalan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bangkalan Nomor 1155/SEK/W14.U23/PL.00/11/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Permohonan Pengamanan/Pemblokiran Aset BMN berupa Tanah Target K3 Pada Satuan Kerja BBWS Brantas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Dari tindak lanjut tersebut, aset tanah tersebut belum berstatus clean and clear dan belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Dengan demikian perlu dilengkapi bukti bahwa aset tanah tersebut telah clean and clear dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan.	1 Pengadilan Tinggi Gorontalo	-	0,00	0,00	0,00	-	-
				2 Pengadilan Negeri Bangkalan	-	0,00	0,00	0,00	-	-
4	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Belum Dilaksanakan secara Tertib.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk menginstruksikan KPA satker terkait supaya: d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait: 1) Memedomani ketentuan perpajakan atas PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN; 2) Menagih kekurangan pungut PPN sebesar Rp829.306.732,00; 3) Berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh sebesar Rp582.573.048,00.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Masih kurang bukti surat bebas PPN dari KPP sebesar Rp59.440.159,00 atau bukti setor PPN sebesar Rp59.440.159,00 pada satker BUA.	1 Biro Kepegawaian BUA	-	24.031.534,00	0,00	24.031.534,00	-	-
				2 Biro Umum BUA	-	35.408.625,00	0,00	35.408.625,00	-	-
5	Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Belum Tertib.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk: b. Menginstruksikan Sekretaris satker terkait selaku KPB supaya: 1) Memerintahkan Pengelola Persediaan lebih tertib melakukan penatausahaan barang persediaan dan melakukan stock opname;	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindak lanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah menginstruksikan Sekretaris satker terkait selaku KPB supaya memerintahkan Pengelola Persediaan lebih tertib melakukan penatausahaan barang persediaan dan melakukan stock opname; 2. Sekretaris satker terkait selaku KPB telah memerintahkan Pengelola Persediaan agar lebih tertib melakukan penatausahaan barang persediaan dan melakukan stock opname; 3. Surat Tanggapan Pengelola Persediaan yang menyatakan akan lebih tertib melakukan penatausahaan barang persediaan dan melakukan stock opname. Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu belum adanya Laporan Hasil Stock Opname.	Terlampir pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	-	0,00	0,00	0,00	-	-
			Total					**886.432.765,00**		

Sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung per 31 Desember 2024 (*Audited*) terdapat beberapa temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada Tahun 2024 sehingga tindak lanjut penyelesaian temuan akan melewati Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG BELUM DILAKUKAN PENYETORAN KE KAS NEGARA TAHUN 2024

No	LHP BPK	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan	Satuan Kerja	Nama	Nominal Temuan	Nominal Setoran	Sisa Yang Belum Disetor ke Kas Negara	NTPN	Tanggal Setor
1	87.b/LHP/XVI/05/2023	1 Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: b. Menginstruksikan KPA satker terkait untuk: 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai serta Pemotongan PPh Pasal 21; 2) Memerintahkan PPK satker terkait untuk: a) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai; b) Menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp1.269.870.595,00 (Rp838.917.383,00 + Rp430.953.212,00) yang terdiri dari: (1) Tunjangan Hakim sebesar Rp838.917.383,00 (Rp935.463.708,00 - Rp96.546.325,00); (2) Tunjangan Kinerja, Gaji dan/atau Tunjangan Struktural Pegawai sebesar Rp430.953.212,00 (Rp26.952.000,00 + Rp481.472.312,00 - Rp77.471.100,00); 3) Memerintahkan PPABP satker terkait: a) Lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan data kepegawaian; b) Lebih cermat dalam menyusun daftar gaji dan tunjangan Hakim serta pegawai sesuai ketentuan; c) Mengikuti diklat/sosialisasi terkait tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Hakim dan pegawai.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Terkait Sdr. IIH Belum ada hasil telaah dari Bawas terkait alasan pengajuan usulan status 4 sesuai ketentuan yang berlaku.	1 Pengadilan Negeri Surabaya	Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.	140.943.508,00	13.962.100,00	126.981.408,00	75A3561QUR6LFK90	22 November 2023
2	28/LHP/XVI/02/2024	1 Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Tahunan MA Tahun 2022 Tidak Sesuai Ketentuan.	b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Sekretariat Pimpinan supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran kepada PT IKI sebesar Rp300.000.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan pada Sem II 2024 diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: PT IKI belum belum menyetorkan kelebihan pembayaran dengan menyampaikan bukti setoran ke Kas Negara sebesar Rp300.000.000,00.	1 Biro Sekretariat Pimpinan BUA	PT Imageri Kreatif Indonesia	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	-	-
		2 Pelaksanaan Pembangunan 18 Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA Tidak Sesuai Ketentuan.	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Meureudu, PN Blangpidie, MS Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, PA Pangkalan Balai, PA Martapura, PA Muaradua, PA Pagar Alam, PA Kasongan, PA Nanga Bulik, PA Pulang Pisau, PN Nanga Bulik, PN Pulang Pisau dan PPK BUA supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9.766.485.034,00 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp70.858.406,00; b) PT PNA KSO CV K pada PN Blangpidie sebesar Rp43.579.462,00; c) CV AL pada PN Blangpidie sebesar Rp30.261.230,00; d) PT MEGA KSO CV MK pada MS Blangpidie sebesar Rp141.918.885,00; e) PT PB pada MS Kota Subulussalam sebesar Rp651.699.904,00; f) PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp109.599.709,00; g) PT CD pada PA Sibuhuan sebesar Rp958.574.003,00; h) PT IDK pada PA Pangkalan Balai sebesar Rp577.475.524,00; i) PT DITS pada PA Martapura sebesar Rp348.071.709,00; j) PT IEU pada PA Muaradua sebesar Rp139.121.866,00; k) PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp53.800.327,00; l) PT HIU pada PA Kasongan sebesar Rp645.390.189,00; m) PT BER pada PA Nanga Bulik sebesar Rp786.583.164,00; n) PT BUK pada PA Pulang Pisau sebesar Rp2.298.471.872,00; o) PT RSS pada PN Nanga Bulik sebesar Rp148.844.466,00; p) CV SN pada PN Pulang Pisau sebesar	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindak lanjut yang disampaikan pada Semester II Tahun 2024 diketahui bahwa: 1. MA telah menyampaikan bukti penyetoran sebesar Rp2.246.893.915,00. Atas bukti bukti setoran tersebut, telah dilakukan pengecekan pada SIMPONI dan OMSPAN; Kesimpulannya MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yaitu: Bukti setoran untuk sisa rekomendasi sebesar Rp6.937.693.799,00 (Rp9.766.485.034,00 - Rp581.897.320,00 - Rp2.246.893.915,00) Ket : Total Setoran Sem II Tahun 2024 sebesar Rp2.246.893.915,00 dan Total Setoran Sem I Tahun 2024 sebesar Rp581.897.320,00.	1 Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	PT Mitra Eclat Gunung Arta KSO CV Mayang Karya	141.918.885,00	0,00	141.918.885,00	-	-
					2 Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	PT Peduli Bangsa	651.699.904,00	135.562.946,00	516.136.958,00	5P3F17QLUP8VA7G4	5 Juli 2024
					3 Pengadilan Agama Pangkalan Balai	PT Indi Daya Karya	577.475.524,00	163.675.674,00	413.799.850,00	3C9907QLUP9EO41L	19 Juli 2024
					4 Pengadilan Agama Martapura	PT Detiga Inti Sinergi	348.071.709,00	69.796.709,00	278.275.000,00	0EPC03CIFKD1941G	9 Juli 2024
					5 Pengadilan Agama Kasongan	PT Haryadi Indo Utama	645.390.189,00	0,00	645.390.189,00	-	-
					6 Pengadilan Agama Nanga Bulik	PT Bahtera Emas Raya	786.583.164,00	189.757.815,00	596.825.349,00	6592C0NA04M1B2AA	8 Juli 2024
					7 Pengadilan Agama Pulang Pisau	PT Buana Utama Karya	2.298.471.872,00	145.590.654,00	2.152.881.218,00	93AC57QLUP8V65CR	3 Juli 2024
					8 Biro Umum BUA	PT Brahmakerta Adiwira	2.670.226.459,00	477.760.109,00	2.192.466.350,00	E90AE2G4VPQN1O51	11 Juli 2024
			b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Meureudu, PN Sibuhuan, PA Muaradua dan PA Pagar Alam supaya menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.424.293.666,00 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp226.842.023,00; b) PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp692.686.560,00; c) PT IEU pada PA Muaradua sebesar Rp319.426.580,00; d) PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindak lanjut yang disampaikan pada Sem II 2024 diketahui bahwa: MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: Belum ada bukti setor PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp185.338.503,00.	1 Pengadilan Agama Pagar Alam	PT Araz Mulia Mandiri KSO PT Indi Daya Karya	185.338.503,00	0,00	185.338.503,00	-	-

DAFTAR TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG BELUM DILAKUKAN PENYETORAN KE KAS NEGARA TAHUN 2024

No	LHP BPK		Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan		Satuan Kerja	Nama	Nominal Temuan	Nominal Setoran	Sisa Yang Belum Disetor ke Kas Negara	NTPN	Tanggal Setor
3	33.b/LHP/XVI/05/2024	1	Pelaksanaan Pembangunan Delapan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA Tidak Sesuai Ketentuan.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk menginstruksikan KPA pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh, dan BUA supaya: a. Memerintahkan PPK satker terkait: 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut: a) PT. RJS pada PA Tais sebesar Rp642.515.102,00; b) PT. HMP pada PA Bintuhan sebesar Rp425.989.806,00; c) PT. AB pada PA Nanga Pinoh sebesar Rp739.501.578,00; d) PT. GMK pada PT Banda Aceh sebesar Rp96.549.005,00; e) PT. KMB pada PN Banda Aceh sebesar Rp52.652.684,00; f) CV KAM pada BUA sebesar Rp70.888.713,00; g) PT. JP pada BUA sebesar Rp168.956.984,00; h) PT. PRM pada BUA sebesar Rp286.455.753,00.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindak lanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa : 1. Sekretaris MA telah menginstruksikan KPA pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh, dan BUA supaya memerintahkan PPK satker terkait agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut: a) PT. RJS pada PA Tais sebesar Rp642.515.102,00; b) PT. HMP pada PA Bintuhan sebesar Rp425.989.806,00; c) PT. AB pada PA Nanga Pinoh sebesar Rp739.501.578,00; d) PT. GMK pada PT Banda Aceh sebesar Rp96.549.005,00; e) PT. KMB pada PN Banda Aceh sebesar Rp52.652.684,00; f) CV KAM pada BUA sebesar Rp70.888.713,00; g) PT. JP pada BUA sebesar Rp168.956.984,00; h) PT. PRM pada BUA sebesar Rp286.455.753,00; 2. KPA pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh, dan BUA telah memerintahkan PPK satker terkait agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara; 3. Surat tanggapan PPK satker terkait yang menyatakan telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625,00 dan sudah disetorkan ke Kas Negara; Hasil Pengecekan terhadap bukti setor diketahui masih terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp825.989.806,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Jumlah yang telah disetorkan senilai Rp1.657.519.819,00 Atas bukti setoran tersebut, tim telah melakukan	1	Pengadilan Agama Tais	PT Ram Jejamou Sai	642.515.102,00	42.515.102,00	400.000.000,00	B5A5E61QV47NGUGK	23 Agustus 2024
										100.000.000,00		EEE992G4VQ6S2M6G	13 November 2024
										100.000.000,00		55AF97QLUPO2SG8B	10 Desember 2024
						2	Pengadilan Agama Bintuhan	PT Haberka Mitra Persada	425.989.806,00	-	425.989.806,00	-	-
		2	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Belum Dilaksanakan secara Tertib.	BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk menginstruksikan KPA satker terkait supaya: d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait: 1) Memedomani ketentuan perpajakan atas PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN; 2) Menagih kekurangan pungut PPN sebesar Rp829.306.732,00; 3) Berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh sebesar Rp582.573.048,00.	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Masih kurang bukti surat bebas PPN dari KPP sebesar Rp59.440.159,00 atau bukti setor PPN sebesar Rp59.440.159,00 pada satker BUA.	1	Biro Kepegawaian BUA	-	24.031.534,00	0,00	24.031.534,00	-	-
Total											**8.400.035.050,00**		

Dalam hal pelaporan keuangan perlu untuk dilakukan pengungkapan dan penyajian dalam Neraca Laporan Keuangan atas Laporan Hasil Pemantauan BPK yang belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara Tahun 2024 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang PNBP/Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp185.338.503,00 pada Pengadilan Agama Pagar Alam;
2. Piutang Lainnya/Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp126.981.408,00 pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Piutang Lainnya/Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp300.000.000,00 pada Biro Sekretariat Pimpinan BUA;
4. Piutang Lainnya/Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7.763.683.605,00 (Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebesar Rp141.918.885,00, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sebesar Rp516.136.958,00, Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebesar Rp413.799.850,00, Pengadilan Agama Martapura sebesar Rp278.275.000,00, Pengadilan Agama Kasongan sebesar Rp645.390.189,00, Pengadilan Agama Nanga Bulik sebesar Rp596.825.349,00, Pengadilan Agama Pulang Pisau sebesar Rp2.152.881.218,00, Biro Umum BUA sebesar Rp2.192.466.350,00, Pengadilan Agama Tais sebesar Rp400.000.000,00, dan Pengadilan Agama Bintuhan sebesar Rp425.989.806,00. Sehingga total Piutang Lainnya sebesar Rp8.190.665.013,00;
5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran/Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor sebesar Rp24.031.534,00 pada Biro Kepegawaian BUA.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Kerugian Negara dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kerugian Negara:
    a. Kepala Satuan Kerja dan/atau Pihak Yang Merugikan (pihak yang dikenai Kerugian Negara) tidak melaporkan adanya Kerugian Negara dan/atau tidak memahami langkah-langkah penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara;
    b. BMN yang telah lama hilang baru dilaporkan sehingga Pihak Kepolisian kesulitan dalam melakukan pemeriksaan fakta lapangan, dan pihak *dealer* sulit menentukan harga taksiran;
    c. Kerugian Negara yang telah diberikan Surat Penagihan (SPn) ke-3 dan dialihkan pelunasannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan tidak dapat terselesaikan dan Mahkamah Agung perlu melakukan penagihan pada pihak yang merugikan, pengampu, yang memperoleh hak, dan/atau ahli waris;

d. Proses penghapusan Piutang TP/TGR memerlukan persetujuan/rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, penghapusan Piutang TP/TGR secara bersyarat pada Kementerian Keuangan memerlukan waktu 2 tahun masa tunggu, untuk selanjutnya dapat diajukan penghapusan Piutang TP/TGR secara mutlak.

2. Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:
   a. Terdapat beberapa Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berupa penyusunan Peraturan/Kebijakan/Juknis/SOP yang penyusunan dan pembahasannya membutuhkan waktu yang lama (perlu penyusunan naskah urgensi, pembentukan POKJA untuk pembahasan, harmonisasi, rapat pimpinan, sampai dengan pengesahan oleh Kementerian terkait);
   b. Terdapat temuan pemeriksaan yang jumlahnya sangat material sehingga membutuhkan penyelesaian secara angsuran lebih dari 60 hari (tidak dapat dilakukan pelunasan dalam satu kali pembayaran) dan waktu pembayaran melebihi tahun anggaran berjalan;
   c. Terdapat temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut antara Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan penetapan status (4) yaitu "Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah";
   d. Pelaksanaan rekonsiliasi secara elektronik melalui SIPTL tidak dapat secara *realtime* memberikan informasi status tindak lanjut telah sesuai atau tidak sesuai rekomendasi dalam masa penugasan Tim Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan.

F.3. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah dan Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sampai dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama Rekening	Jumlah	Uraian	Saldo
A	**Total Rekening dalam bentuk Rupiah**			
1	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01	923	Rekening	6.075.050,00
2	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 03	416	Rekening	1.000,00
3	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 04	445	Rekening	0,00
4	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 05	61	Rekening	0,00
5	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran Pada Unit Eselon 1 Pusat	29	Rekening	0,00
6	Daftar Rekening Bendahara Penerimaan	5	Rekening	1,00
7	Rekening Lainnya	920	Rekening	6.020.218.542.515,89
8	Rekening Tidak Aktif	17	Rekening	49.974.562,00
8	Penutupan Rekening	85	Rekening	0,00
Total		**2.901**		**6.020.274.593.128,89**
B	**Total Rekening dalam bentuk Dollar**			
1	Rekening Lainnya dalam bentuk Dollar	1	Rekening	4.359.02
Total		**1**	**Rekening**	**4.359.02**

F.4. Pengungkapan Penting Lain-lain

F.4.1. Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata atau penyelesaian perkara tata usaha negara yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

1. Biaya kepaniteraan (*griffier kosten*) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNBP dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah;

2. Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang dititipkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitur (pihak yang berhutang) yang dijaminkan setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara.

Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya.

Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan Perkara, dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta diungkapkan dalam CaLK Mahkamah Agung RI.

Sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan asas full disclosure atas pelaporan keuangan Mahkamah Agung maka terhadap uang titipan pihak ketiga lainnya dicatat pada Buku Keuangan Perkara Lainnya serta diungkapkan dalam CaLK Mahkamah Agung.

Sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya khususnya pada Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga, diberikan pengungkapan sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Pengelolaan Biaya Proses

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Januari	Saldo Awal	4.597.579.927,00			
		Koreksi Awal Tahun		-202.738.542,00		
		Penerimaan		6.736.351.750,00		
		Pengeluaran			5.249.231.652,00	
		Saldo Akhir				5.942.502.482,00
		Jumlah	4.597.579.927,00	6.594.153.208,00	5.249.231.652,00	5.942.502.482,00
2	Februari	Saldo Awal	5.942.502.482,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.614.331.840,00		
		Pengeluaran			4.708.593.981,00	
		Saldo Akhir				5.848.294.341,00
		Jumlah	5.942.502.482,00	4.614.331.840,00	4.708.593.981,00	5.848.294.341,00
3	Maret	Saldo Awal	5.848.294.341,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.339.249.580,00		
		Pengeluaran			4.530.958.243,00	
		Saldo Akhir				5.656.585.672,00
		Jumlah	5.848.294.341,00	4.339.249.580,00	4.530.958.243,00	5.656.585.672,00
4	April	Saldo Awal	5.656.585.672,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.099.974.300,00		
		Pengeluaran			3.726.480.285,00	
		Saldo Akhir				6.030.079.687,00
		Jumlah	5.656.585.672,00	4.099.974.300,00	3.726.480.285,00	6.030.079.687,00
5	Mei	Saldo Awal	6.030.079.687,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.977.406.700,00		
		Pengeluaran			4.949.404.018,00	
		Saldo Akhir				7.058.082.369,00
		Jumlah	6.030.079.687,00	5.977.406.700,00	4.949.404.018,00	7.058.082.369,00
6	Juni	Saldo Awal	7.058.082.369,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.146.633.100,00		
		Pengeluaran			5.053.347.026,00	
		Saldo Akhir				7.151.368.443,00
		Jumlah	7.058.082.369,00	5.146.633.100,00	5.053.347.026,00	7.151.368.443,00
7	Juli	Saldo Awal	7.151.368.443,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		6.730.338.300,00		
		Pengeluaran			6.640.771.203,00	
		Saldo Akhir				7.240.935.540,00
		Jumlah	7.151.368.443,00	6.730.338.300,00	6.640.771.203,00	7.240.935.540,00
8	Agustus	Saldo Awal	7.240.935.540,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		6.164.266.028,00		
		Pengeluaran			6.202.705.187,00	
		Saldo Akhir				7.202.496.381,00
		Jumlah	7.240.935.540,00	6.164.266.028,00	6.202.705.187,00	7.202.496.381,00
9	September	Saldo Awal	7.202.496.381,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.665.577.850,00		
		Pengeluaran			5.554.471.738,00	
		Saldo Akhir				7.313.602.493,00
		Jumlah	7.202.496.381,00	5.665.577.850,00	5.554.471.738,00	7.313.602.493,00
10	Oktober	Saldo Awal	7.313.602.493,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		6.191.883.100,00		
		Pengeluaran			6.181.258.782,00	
		Saldo Akhir				7.324.232.811,00
		Jumlah	7.313.602.493,00	6.191.883.100,00	6.181.258.782,00	7.324.232.811,00
11	November	Saldo Awal	7.324.232.811,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.801.640.050,00		
		Pengeluaran			5.756.194.467,00	
		Saldo Akhir				7.369.678.394,00
		Jumlah	7.324.232.811,00	5.801.640.050,00	5.756.194.467,00	7.369.678.394,00
12	Desember	Saldo Awal	7.369.678.394,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.412.839.850,00		
		Pengeluaran			6.149.776.603,00	
		Saldo Akhir				5.632.741.641,00
		Jumlah	7.369.678.394,00	4.412.839.850,00	6.149.776.603,00	5.632.741.641,00

b. Rekapitulasi Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di
1	Januari	Biaya Perkara	158.141.396.433,97	-44.686.794,00	79.052.470.240,83	68.251.951.035,00	168.897.227.546,86	158.042.901.279,60	10.854.326.267,26
		Biaya Eksekusi	210.841.820.443,14	-42.824.000,00	11.686.846.870,00	13.588.535.243,00	208.322.147.070,14	207.438.763.601,29	1.483.383.468,85
		Biaya Konsinyasi	5.819.044.578.554,10	57.107.514.131,80	128.606.607.288,00	184.430.433.150,00	5.820.268.266.883,90	5.819.956.412.035,90	311.854.848,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	94.783.621.538,30	0,00	701.432.500,00	1.887.528.538,00	93.597.585.440,30	93.551.685.440,30	45.900.000,00
		PHI*)	7.014.978.870,23	0,00	958.107.433,27	1.002.191.823,27	6.970.894.480,23	6.691.527.082,39	279.367.397,84
		Jumlah	6.289.826.395.839,74	57.020.003.397,80	221.005.524.332,16	269.220.639.849,27	6.298.656.121.421,43	6.285.681.289.433,48	12.974.831.981,95
2	Februari	Biaya Perkara	168.897.227.546,86		55.073.423.521,00	55.339.496.971,00	168.571.154.096,86	157.685.771.057,60	10.885.383.039,26
		Biaya Eksekusi	208.322.147.070,14		6.865.834.375,00	8.979.460.600,00	206.808.521.445,14	205.335.819.332,29	1.472.702.112,85
		Biaya Konsinyasi	5.820.268.266.883,90		100.613.822.918,00	112.315.270.772,00	5.807.966.819.029,90	5.807.644.378.058,90	322.440.971,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	93.597.585.440,30		1.159.597.380,00	3.879.568.707,96	90.877.614.112,34	90.841.714.112,34	35.900.000,00
		PHI*)	6.970.894.480,23		1.396.653.651,48	1.990.173.841,48	6.377.374.290,23	6.727.897.123,39	249.477.166,84
		Jumlah	6.298.656.121.421,43		165.709.332.445,48	183.163.970.892,44	6.281.201.482.974,47	6.268.235.579.684,52	12.965.903.289,95
3	Maret	Biaya Perkara	168.571.177.096,86		45.438.612.983,00	53.766.342.856,00	160.243.447.223,86	149.230.112.189,20	11.013.335.034,66
		Biaya Eksekusi	206.808.521.445,14		18.566.622.357,00	11.148.291.758,00	214.226.852.044,14	212.543.275.060,29	1.671.576.983,85
		Biaya Konsinyasi	5.807.966.819.029,90		128.760.395.863,00	84.056.516.314,00	5.852.670.678.578,90	5.852.423.777.743,90	246.900.835,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	90.877.614.112,34		1.717.061.500,00	1.539.950.650,00	91.054.724.962,34	91.054.724.962,34	0,00
		PHI*)	6.377.374.290,23		303.557.600,00	1.588.344.619,00	5.691.987.271,23	5.339.230.813,39	352.756.457,84
		Jumlah	6.281.201.505.974,47		194.786.250.303,00	152.100.046.197,00	6.323.887.630.080,47	6.310.537.120.769,12	13.290.569.311,35
4	April	Biaya Perkara	160.243.447.223,86		46.124.914.888,00	41.322.541.178,00	165.045.820.933,86	153.819.366.465,91	11.226.454.467,95
		Biaya Eksekusi	214.226.852.044,14		123.476.227.396,00	17.808.602.218,00	325.894.477.822,14	324.506.975.089,29	1.387.502.732,85
		Biaya Konsinyasi	5.852.670.678.578,90		46.236.954.862,00	51.700.602.854,00	5.847.267.030.586,90	5.846.382.938.376,90	284.092.210,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	91.054.724.962,34		180.000.000,00	0,00	91.234.724.962,34	91.234.724.962,34	0,00
		PHI*)	5.691.987.271,23		183.880.100,00	267.685.500,00	5.608.181.871,23	5.255.419.073,39	352.762.797,84
		Jumlah	6.323.887.630.080,47		222.261.977.846,00	111.099.431.750,00	6.435.050.236.176,47	6.421.799.423.967,83	13.250.812.208,64
5	Mei	Biaya Perkara	165.045.820.933,86		70.685.101.082,00	63.270.775.316,80	172.460.146.699,06	162.339.987.561,04	10.120.159.138,02
		Biaya Eksekusi	325.894.477.822,14		33.427.791.433,84	8.473.321.646,00	350.848.947.609,98	349.325.281.026,13	1.523.666.583,85
		Biaya Konsinyasi	5.847.267.030.586,90		239.503.408.124,00	113.142.203.034,29	5.973.628.235.676,61	5.973.212.606.466,61	415.629.210,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	91.234.724.962,34		4.433.965.553,00	665.842.420,00	95.002.848.095,34	95.002.848.095,34	0,00
		PHI*)	5.608.181.871,23		478.403.900,00	310.063.100,00	5.776.522.671,23	5.504.253.673,39	272.268.997,84
		Jumlah	6.435.050.236.176,47		348.528.676.092,84	185.862.211.517,09	6.597.716.700.752,22	6.585.384.976.822,51	12.331.723.929,71
6	Juni	Biaya Perkara	172.460.146.699,06		56.541.422.015,00	58.934.515.664,00	170.067.053.050,06	159.006.858.622,20	11.060.194.427,86
		Biaya Eksekusi	350.848.947.609,98		14.823.824.628,28	37.133.301.850,00	328.539.470.388,26	326.312.760.797,41	2.226.709.590,85
		Biaya Konsinyasi	5.973.628.235.676,61		157.285.810.854,00	217.770.272.356,78	5.913.143.774.173,83	5.912.283.309.232,83	859.864.941,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	95.002.848.095,34		3.122.084.072,00	3.494.981.488,00	94.629.950.679,34	94.614.950.679,34	15.000.000,00
		PHI*)	5.776.522.671,23		1.583.124.080,00	1.326.542.700,00	6.033.104.051,23	5.738.221.953,39	294.882.097,84
		Jumlah	6.597.716.700.752,22		239.356.265.649,28	324.659.614.058,78	6.512.413.352.342,72	6.497.356.701.285,17	14.456.651.057,55
7	Juli	Biaya Perkara	170.067.053.050,06		70.981.845.830,00	75.342.603.323,00	165.706.295.557,06	155.143.200.581,20	10.563.094.975,86
		Biaya Eksekusi	328.539.470.388,26		162.179.132.707,60	168.022.796.352,48	322.695.806.743,38	321.309.048.619,53	1.386.758.123,85
		Biaya Konsinyasi	5.913.143.774.173,83		135.903.073.274,00	147.420.950.195,60	5.901.625.897.252,23	5.901.203.964.302,23	421.932.950,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	94.629.950.679,34		3.117.174.000,00	2.817.735.316,00	94.929.389.363,34	94.914.389.363,34	15.000.000,00
		PHI*)	6.033.104.051,23		296.557.500,00	1.078.011.038,00	5.251.650.513,23	5.078.284.905,39	172.365.607,84
		Jumlah	6.512.413.352.342,72		372.477.783.311,60	394.682.096.225,08	6.490.209.039.429,24	6.477.649.887.771,69	12.559.151.657,55
8	Agustus	Biaya Perkara	165.706.295.557,06		61.541.125.631,00	61.852.421.700,00	165.394.999.458,06	155.377.886.684,20	10.017.112.773,86
		Biaya Eksekusi	322.695.806.743,38		190.237.575.834,83	182.538.162.353,00	330.395.220.285,21	329.133.404.332,36	1.261.815.952,85
		Biaya Konsinyasi	5.901.625.897.252,23		132.192.052.727,00	248.696.233.342,00	5.785.121.716.037,23	5.784.796.685.980,23	325.030.057,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	94.929.389.363,34		826.966.000,00	3.795.025.000,00	91.961.330.363,34	91.926.330.363,34	35.000.000,00
		PHI*)	5.251.650.513,23		520.251.320,00	302.625.000,00	5.469.276.833,23	5.274.077.560,39	195.199.272,84
		Jumlah	6.490.209.039.429,24		385.317.971.512,83	497.184.468.025,00	6.378.342.542.977,07	6.366.508.384.920,52	11.834.158.056,55
9	September	Biaya Perkara	165.394.999.458,06		59.160.602.302,00	57.451.059.121,00	167.104.542.639,06	157.185.143.959,60	9.919.398.679,46
		Biaya Eksekusi	330.395.220.285,21		18.921.082.423,88	39.203.227.732,25	310.112.924.976,84	308.606.809.431,99	1.506.115.544,85
		Biaya Konsinyasi	5.785.121.716.037,23		74.731.715.080,00	74.818.536.472,00	5.785.034.894.645,23	5.784.614.935.353,23	419.959.286,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	91.961.330.363,34		5.976.753.743,00	144.000.000,00	97.794.084.106,34	97.749.084.106,34	45.000.000,00
		PHI*)	5.469.276.833,23		1.112.545.243,00	1.171.393.079,00	5.410.428.997,23	5.191.435.378,39	218.993.618,84
		Jumlah	6.378.342.542.977,07		159.962.698.791,88	172.788.216.404,25	6.365.516.875.364,70	6.353.347.408.235,55	12.169.467.129,15
10	Oktober	Biaya Perkara	167.104.853.639,06		60.348.997.364,98	66.054.777.732,20	161.398.073.271,84	150.625.766.455,98	10.772.306.815,86
		Biaya Eksekusi	310.114.424.976,84		94.864.464.752,28	107.303.646.166,16	297.675.243.562,96	296.379.444.487,11	1.295.799.075,85
		Biaya Konsinyasi	5.785.034.894.645,23		115.753.867.774,00	165.057.357.401,43	5.735.731.405.017,80	5.735.518.203.256,80	213.201.761,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	97.794.084.106,34		3.694.736.673,28	3.210.260.085,00	98.278.542.700,62	98.253.542.700,62	25.000.000,00
		PHI*)	5.410.428.997,23		548.116.585,00	455.870.740,00	5.502.674.842,23	5.274.722.603,39	227.952.238,84
		Jumlah	6.365.518.686.364,70		275.210.185.155,54	342.081.932.124,79	6.238.646.939.395,45	6.286.051.679.503,90	12.595.259.891,55
11	November	Biaya Perkara	161.399.313.271,84		44.538.383.333,87	48.325.620.932,65	157.612.075.673,06	147.681.283.031,59	9.930.792.641,47
		Biaya Eksekusi	297.672.993.562,96		13.832.753.745,64	32.531.234.834,81	278.974.512.473,79	277.741.230.267,94	1.233.282.205,85
		Biaya Konsinyasi	5.735.803.905.017,80		130.243.119.529,72	81.801.738.327,00	5.844.245.286.220,52	5.843.801.459.433,52	443.826.787,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	98.278.542.700,62		12.238.978.185,00	1.092.004.238,00	109.425.516.587,62	109.415.516.587,62	10.000.000,00
		PHI*)	5.502.674.842,23		391.235.867,00	479.303.217,00	5.414.667.492,23	5.183.621.410,39	231.046.081,84
		Jumlah	6.298.657.429.395,45		261.244.530.661,23	164.229.901.609,46	6.395.672.058.447,22	6.383.823.110.731,06	11.848.947.716,16
12	Desember	Biaya Perkara	157.612.100.673,06		34.304.930.246,07	45.135.804.723,07	146.781.226.196,06	138.452.833.778,59	8.328.452.417,47
		Biaya Eksekusi	278.974.512.473,79		21.244.952.588,00	147.641.341.550,00	152.577.523.511,79	151.349.566.607,94	1.227.956.903,85
		Biaya Konsinyasi	5.844.245.286.220,52		159.861.721.142,00	237.391.046.347,60	5.766.115.960.414,92	5.765.551.651.952,92	564.308.462,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	109.425.516.587,62		9.374.932.700,00	3.156.089.439,28	115.644.419.848,34	115.634.419.848,34	10.000.000,00
		PHI*)	5.414.667.492,23		384.068.400,00	348.536.400,00	5.450.199.492,23	5.241.657.610,39	208.541.881,84
		Jumlah	6.395.672.083.447,22		225.770.725.076,07	434.873.419.059,95	6.186.569.389.463,34	6.176.230.129.798,18	10.339.259.665,16

Sedangkan rincian rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 untuk masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1) Kepaniteraan

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	26.370.254.906,00	- 60.000,00	2.042.621.250,00	1.014.427.200,00	27.398.388.956,00	27.398.388.956,00	-
		Biaya Eksekusi		-		-	-		
		Biaya Konsinyasi		-		-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)		-		-	-		
		PHI *)	-	-		-	-		
		Jumlah	26.370.254.906,00	- 60.000,00	2.042.621.250,00	1.014.427.200,00	27.398.388.956,00	27.398.388.956,00	-
2	Februari	Biaya Perkara	27.398.388.956,00		2.270.902.280,00	591.160.000,00	29.078.131.236,00	29.078.131.236,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	27.398.388.956,00	-	2.270.902.280,00	591.160.000,00	29.078.131.236,00	29.078.131.236,00	-
3	Maret	Biaya Perkara	29.078.131.236,00		1.631.720.000,00	2.887.878.080,00	27.821.973.156,00	27.821.973.156,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	29.078.131.236,00	-	1.631.720.000,00	2.887.878.080,00	27.821.973.156,00	27.821.973.156,00	-
4	April	Biaya Perkara	27.821.973.156,00		1.615.665.390,00	2.624.486.680,00	26.813.151.866,00	26.813.151.866,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	27.821.973.156,00	-	1.615.665.390,00	2.624.486.680,00	26.813.151.866,00	26.813.151.866,00	-
5	Mei	Biaya Perkara	26.813.151.866,00		2.659.849.724,00	869.233.684,00	28.603.767.906,00	28.603.767.906,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	26.813.151.866,00	-	2.659.849.724,00	869.233.684,00	28.603.767.906,00	28.603.767.906,00	-
6	Juni	Biaya Perkara	28.603.767.906,00		1.680.168.887,00	1.214.431.087,00	29.069.505.706,00	29.069.505.706,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	28.603.767.906,00	-	1.680.168.887,00	1.214.431.087,00	29.069.505.706,00	29.069.505.706,00	-
7	Juli	Biaya Perkara	29.069.505.706,00		1.848.471.486,00	4.158.287.716,00	26.759.689.476,00	26.759.689.476,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	29.069.505.706,00	-	1.848.471.486,00	4.158.287.716,00	26.759.689.476,00	26.759.689.476,00	-
8	Agustus	Biaya Perkara	26.759.689.476,00		2.024.441.804,00	1.342.518.728,00	27.441.612.552,00	27.441.612.552,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	26.759.689.476,00	-	2.024.441.804,00	1.342.518.728,00	27.441.612.552,00	27.441.612.552,00	-
9	Septembe	Biaya Perkara	27.441.612.552,00		2.394.481.490,00	1.243.847.150,00	28.592.246.892,00	28.592.246.892,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	27.441.612.552,00	-	2.394.481.490,00	1.243.847.150,00	28.592.246.892,00	28.592.246.892,00	-
10	Oktober	Biaya Perkara	28.592.246.892,00		3.306.302.022,00	4.695.275.782,00	27.203.273.132,00	27.203.273.132,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	28.592.246.892,00	-	3.306.302.022,00	4.695.275.782,00	27.203.273.132,00	27.203.273.132,00	-
11	Novembe	Biaya Perkara	27.203.273.132,00		2.135.492.946,00	641.846.726,00	28.696.919.352,00	28.696.919.352,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	27.203.273.132,00	-	2.135.492.946,00	641.846.726,00	28.696.919.352,00	28.696.919.352,00	-
12	Desembe	Biaya Perkara	28.696.919.352,00		4.550.920.285,00	4.010.598.935,00	29.237.240.702,00	29.237.240.702,00	-
		Biaya Eksekusi				-	-		
		Biaya Konsinyasi				-	-		
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	28.696.919.352,00	-	4.550.920.285,00	4.010.598.935,00	29.237.240.702,00	29.237.240.702,00	-

2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	aldo Akhir di Branka
1	Januari	Biaya Perkara	107.423.710.455,97	- 18.852.294,00	12.695.380.395,00	15.349.521.691,00	104.750.715.565,86	101.080.612.221,60	3.670.103.344,26
		Biaya Eksekusi	204.289.245.490,14	3.000.000,00	10.321.824.870,00	12.743.321.243,00	201.870.749.117,14	200.758.974.248,29	1.111.774.868,85
		Biaya Konsinyasi	5.807.219.607.003,10	57.107.514.152,00	126.253.735.940,00	184.305.318.150,00	5.806.275.538.944,90	5.806.038.693.096,90	236.845.848,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	94.783.621.538,30	-	701.492.500,00	1.887.528.598,00	93.597.585.440,30	93.551.685.440,30	45.900.000,00
		PHI *)	7.014.978.870,23	-	958.107.433,27	1.002.191.823,27	6.970.894.480,23	6.691.527.082,39	279.367.398,00
		Jumlah	6.220.731.163.357,74	57.091.661.858,00	150.930.541.138,27	215.287.881.505,27	6.213.465.483.548,43	6.208.121.492.089,48	5.343.991.459,11
2	Februari	Biaya Perkara	104.750.715.565,86		11.552.805.788,00	13.798.960.490,00	102.504.560.863,86	99.169.402.023,60	3.335.158.840,26
		Biaya Eksekusi	201.870.749.117,14		6.204.092.975,00	8.323.855.800,00	199.750.986.292,14	198.873.357.379,29	877.628.912,85
		Biaya Konsinyasi	5.806.275.538.944,90		100.486.312.918,00	112.507.847.272,00	5.794.254.004.590,90	5.794.005.672.619,90	248.331.971,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	93.597.585.440,30		1.159.597.380,00	3.879.568.707,96	90.877.614.112,34	90.841.714.112,34	35.900.000,00
		PHI *)	6.970.894.480,23		1.996.653.651,48	1.990.173.841,48	6.977.374.290,23	6.727.897.123,39	249.477.167,00
		Jumlah	6.213.465.483.548,43	-	121.399.462.712,48	140.500.406.111,44	6.194.364.540.149,47	6.189.618.043.258,52	4.746.496.891,11
3	Maret	Biaya Perkara	102.504.560.863,86		11.757.549.467,00	14.241.031.535,00	100.021.078.795,86	96.827.879.187,20	3.193.199.608,66
		Biaya Eksekusi	199.750.986.292,14		17.428.727.857,00	10.353.211.358,00	206.826.502.791,14	205.616.754.207,29	1.209.748.583,85
		Biaya Konsinyasi	5.794.254.004.590,90		127.811.787.160,00	82.845.258.814,00	5.839.220.532.936,90	5.839.048.141.101,90	172.391.835,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	90.877.614.112,34		1.717.061.500,00	1.539.950.650,00	91.054.724.962,34	91.054.724.962,34	-
		PHI *)	6.977.374.290,23		303.557.600,00	1.588.944.619,00	5.691.987.271,23	5.339.230.813,39	352.756.458,00
		Jumlah	6.194.364.540.149,47	-	159.018.683.584,00	110.568.396.976,00	6.242.814.826.757,47	6.237.886.730.272,12	4.928.096.485,51
4	April	Biaya Perkara	100.021.078.795,86		9.287.475.804,00	10.248.925.223,00	99.059.629.376,86	95.711.110.408,91	3.348.518.967,95
		Biaya Eksekusi	206.826.502.791,14		128.913.657.996,00	17.214.687.918,00	318.525.472.869,14	317.637.654.736,29	887.818.132,85
		Biaya Konsinyasi	5.839.220.532.936,90		46.092.794.912,00	49.132.663.836,00	5.836.180.664.012,90	5.835.971.755.802,90	208.908.210,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	91.054.724.962,34		180.000.000,00	-	91.234.724.962,34	91.234.724.962,34	-
		PHI *)	5.691.987.271,23		183.880.100,00	267.685.500,00	5.608.181.871,23	5.255.419.073,39	352.762.798,00
		Jumlah	6.242.814.826.757,47	-	184.657.808.812,00	76.863.962.477,00	6.350.608.673.092,47	6.345.810.664.983,83	4.798.008.108,80
5	Mei	Biaya Perkara	99.059.629.376,86		13.224.122.893,00	13.288.426.265,80	98.995.326.004,06	95.873.460.302,04	3.121.865.702,02
		Biaya Eksekusi	318.525.472.869,14		32.296.133.033,84	7.844.949.946,00	342.976.655.956,98	342.110.285.473,13	866.370.483,85
		Biaya Konsinyasi	5.836.180.664.012,90		237.640.811.074,00	111.000.875.121,29	5.962.820.599.965,61	5.962.474.904.755,61	345.695.210,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	91.234.724.962,34		4.433.965.553,00	665.842.420,00	95.002.848.095,34	95.002.848.095,34	-
		PHI *)	5.608.181.871,23		478.409.900,00	310.069.100,00	5.776.522.671,23	5.504.253.673,39	272.268.998,00
		Jumlah	6.350.608.673.092,47	-	288.073.442.453,84	133.110.162.853,09	6.505.571.952.693,22	6.500.965.752.299,51	4.606.200.393,87
6	Juni	Biaya Perkara	98.995.326.004,06		12.149.775.869,00	12.466.269.262,00	98.678.832.611,06	95.604.710.025,20	3.074.122.585,86
		Biaya Eksekusi	342.976.655.956,98		13.955.417.128,28	36.217.107.850,00	320.714.965.235,26	319.022.019.044,41	1.692.946.190,85
		Biaya Konsinyasi	5.962.820.599.965,61		156.946.450.854,00	216.693.463.105,78	5.903.073.587.713,83	5.902.279.106.772,83	794.480.941,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	95.002.848.095,34		9.122.084.072,00	9.494.981.488,00	94.629.950.679,34	94.614.950.679,34	15.000.000,00
		PHI *)	5.776.522.671,23		1.583.124.080,00	1.326.542.700,00	6.033.104.051,23	5.738.221.953,39	294.882.098,00
		Jumlah	6.505.571.952.693,22	-	193.756.852.003,28	276.198.364.405,78	6.423.130.440.290,72	6.417.259.008.475,17	5.871.431.815,71
7	Juli	Biaya Perkara	98.678.832.611,06		15.893.007.568,00	17.151.873.793,00	97.419.966.386,06	94.072.544.562,20	3.347.421.823,86
		Biaya Eksekusi	320.714.965.235,26		161.010.910.207,60	167.101.571.252,48	314.624.304.190,38	313.763.994.366,53	860.309.823,85
		Biaya Konsinyasi	5.903.073.587.713,83		134.790.411.374,00	147.056.390.195,60	5.890.807.608.892,23	5.890.451.209.942,23	356.398.950,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	94.629.950.679,34		3.117.174.000,00	2.817.735.316,00	94.929.389.363,34	94.914.389.363,34	15.000.000,00
		PHI *)	6.033.104.051,23		296.557.500,00	1.078.011.038,00	5.251.650.513,23	5.079.284.905,39	172.365.608,00
		Jumlah	6.423.130.440.290,72	-	315.108.060.649,60	335.205.581.595,08	6.403.032.919.345,24	6.398.281.423.139,69	4.751.496.205,71
8	Agustus	Biaya Perkara	97.419.966.386,06		14.562.170.324,00	14.537.134.320,00	97.445.002.390,06	94.557.630.260,20	2.887.372.129,86
		Biaya Eksekusi	314.624.304.190,38		188.929.146.894,83	181.408.192.453,00	322.145.258.632,21	321.463.588.879,36	681.669.752,85
		Biaya Konsinyasi	5.890.807.608.892,23		127.836.790.159,00	246.180.855.699,00	5.772.463.543.352,23	5.772.307.319.320,23	156.224.032,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	94.929.389.363,34		826.966.000,00	3.795.025.000,00	91.961.330.363,34	91.926.330.363,34	35.000.000,00
		PHI *)	5.251.650.513,23		520.251.320,00	302.625.000,00	5.469.276.833,23	5.274.077.560,39	195.199.273,00
		Jumlah	6.403.032.919.345,24	-	332.675.324.697,83	446.223.832.472,00	6.289.484.411.571,07	6.285.528.946.383,52	3.955.465.187,71
9	Septembe	Biaya Perkara	97.445.002.390,06		13.670.945.556,00	13.410.048.317,00	97.705.899.629,06	94.918.410.564,60	2.787.489.064,46
		Biaya Eksekusi	322.145.258.632,21		16.361.757.423,88	36.858.266.232,25	301.648.749.823,84	300.782.612.278,99	866.137.544,85
		Biaya Konsinyasi	5.772.463.543.352,23		74.610.315.080,00	72.331.391.872,00	5.774.742.466.560,23	5.774.452.863.299,23	289.603.261,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	91.961.330.363,34		5.976.753.743,00	144.000.000,00	97.794.084.106,34	97.749.084.106,34	45.000.000,00
		PHI *)	5.469.276.833,23		1.112.545.243,00	1.171.393.079,00	5.410.428.997,23	5.191.435.378,39	218.993.619,00
		Jumlah	6.289.484.411.571,07	-	111.732.317.045,88	123.915.099.500,25	6.277.301.629.116,70	6.273.094.405.627,55	4.207.223.489,31
10	Oktober	Biaya Perkara	97.705.899.629,06		13.325.316.509,00	14.780.043.537,00	96.251.172.600,84	92.353.929.533,98	3.897.243.066,86
		Biaya Eksekusi	301.648.749.823,84		93.919.123.752,28	106.066.314.166,16	289.501.559.409,96	288.749.594.984,11	751.964.425,85
		Biaya Konsinyasi	5.774.742.466.560,23		92.202.234.674,00	157.459.900.544,43	5.709.484.800.689,80	5.709.284.932.928,80	199.867.761,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	97.794.084.106,34		3.694.738.679,28	3.210.280.085,00	98.278.542.700,62	98.253.542.700,62	25.000.000,00
		PHI *)	5.410.428.997,23		548.116.585,00	455.870.740,00	5.502.674.842,23	5.274.722.603,39	227.952.239,00
		Jumlah	6.277.301.629.116,70	-	203.689.530.199,56	281.972.409.072,59	6.199.018.750.243,45	6.193.916.722.750,90	5.102.027.492,71
11	Novembe	Biaya Perkara	96.251.172.600,84		12.272.000.737,00	13.998.620.824,00	94.524.552.514,06	91.312.594.717,59	3.211.957.796,47
		Biaya Eksekusi	289.501.559.409,96		12.318.888.745,00	31.590.881.634,81	270.229.566.520,79	269.478.064.114,94	751.502.405,85
		Biaya Konsinyasi	5.709.484.800.689,80		117.644.248.229,72	78.693.900.086,00	5.748.435.148.833,52	5.748.267.556.046,52	167.592.787,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	98.278.542.700,62		12.238.978.185,00	1.092.004.298,00	109.425.516.587,62	109.415.516.587,62	10.000.000,00
		PHI *)	5.502.674.842,23		391.295.867,00	479.303.217,00	5.414.667.492,23	5.183.621.410,39	231.046.082,00
		Jumlah	6.199.018.750.243,45	-	154.865.411.763,72	125.854.710.059,81	6.228.029.451.948,22	6.223.657.352.877,06	4.372.099.071,32
12	Desembe	Biaya Perkara	94.524.552.514,06		10.414.537.581,00	12.236.612.657,00	92.702.477.438,06	89.730.952.663,59	2.971.524.774,47
		Biaya Eksekusi	270.229.566.520,79		20.557.518.088,00	146.299.162.050,00	144.487.922.558,79	143.700.493.454,94	787.429.103,85
		Biaya Konsinyasi	5.748.435.148.833,52		155.802.748.327,00	163.203.054.774,00	5.741.034.842.386,92	5.740.878.417.924,92	156.424.462,00
		Uang Titipan Perkara Pidar	109.425.516.587,62		9.374.992.700,00	3.156.089.439,28	115.644.419.848,34	115.634.419.848,34	10.000.000,00
		PHI *)	5.414.667.492,23		984.068.400,00	948.536.400,00	5.450.199.492,23	5.241.657.610,39	208.541.882,00
		Jumlah	6.228.029.451.948,22	-	197.133.865.096,00	325.843.455.320,28	6.099.319.861.724,34	6.095.185.941.502,18	4.133.920.222,32

3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	21.286.257.290,00	- 24.225.500,00	63.500.708.946,00	50.990.741.945,00	33.771.998.792,00	26.878.725.897,00	6.893.272.895,00
		Biaya Eksekusi	6.525.372.545,00	- 27.343.000,00	1.362.822.000,00	843.484.000,00	7.042.206.545,00	6.672.359.945,00	369.846.600,00
		Biaya Konsinyasi	11.824.971.551,00	40,00	2.352.871.348,00	185.115.000,00	13.992.727.939,00	13.917.718.939,00	75.009.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)		-		-	-		
		PHI *)		-		-	-		
		Jumlah	39.636.601.386,00	- 51.568.460,00	67.216.402.294,00	52.019.340.945,00	54.806.933.276,00	47.468.804.781,00	7.338.128.495,00
2	Februari	Biaya Perkara	33.771.998.792,00		40.656.059.703,00	40.416.413.431,00	34.011.645.064,00	26.935.482.658,00	7.076.162.406,00
		Biaya Eksekusi	7.042.206.545,00		659.742.000,00	653.400.000,00	7.048.548.545,00	6.455.194.345,00	593.354.200,00
		Biaya Konsinyasi	13.992.727.939,00		127.510.000,00	407.423.500,00	13.712.814.439,00	13.638.705.439,00	74.109.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	54.806.933.276,00	-	41.443.311.703,00	41.477.236.931,00	54.773.008.048,00	47.029.382.442,00	7.743.625.606,00
3	Maret	Biaya Perkara	34.011.668.064,00		31.379.563.916,00	36.059.941.267,00	29.331.290.713,00	21.814.469.674,00	7.516.821.039,00
		Biaya Eksekusi	7.048.548.545,00		1.136.536.500,00	793.789.100,00	7.391.295.945,00	6.925.469.545,00	465.826.400,00
		Biaya Konsinyasi	13.712.814.439,00		948.608.703,00	1.211.257.500,00	13.450.145.642,00	13.375.636.642,00	74.509.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	54.773.031.048,00	-	33.464.709.119,00	38.064.987.867,00	50.172.732.300,00	42.115.575.861,00	8.057.156.439,00
4	April	Biaya Perkara	29.331.290.713,00		34.451.059.317,00	27.785.477.802,00	35.996.872.228,00	28.489.503.823,00	7.507.368.405,00
		Biaya Eksekusi	7.391.295.945,00		562.570.000,00	593.043.800,00	7.360.822.145,00	6.862.453.745,00	498.368.400,00
		Biaya Konsinyasi	13.450.145.642,00		204.159.950,00	2.567.939.018,00	11.086.366.574,00	11.011.182.574,00	75.184.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	50.172.732.300,00	-	35.217.789.267,00	30.946.460.620,00	54.444.060.947,00	46.363.140.142,00	8.080.920.805,00
5	Mei	Biaya Perkara	35.996.872.228,00		54.140.507.715,00	48.483.065.242,00	41.654.314.701,00	34.905.754.175,00	6.748.560.526,00
		Biaya Eksekusi	7.360.822.145,00		1.130.658.400,00	627.056.000,00	7.864.424.545,00	7.207.412.445,00	657.012.100,00
		Biaya Konsinyasi	11.086.366.574,00		1.862.597.050,00	2.141.327.913,00	10.807.635.711,00	10.737.701.711,00	69.934.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	54.444.060.947,00	-	57.133.763.165,00	51.251.449.155,00	60.326.374.957,00	52.850.868.331,00	7.475.506.626,00
6	Juni	Biaya Perkara	41.654.314.701,00		42.126.799.609,00	44.613.337.535,00	39.167.776.775,00	31.452.808.663,00	7.714.968.112,00
		Biaya Eksekusi	7.864.424.545,00		867.907.500,00	915.791.500,00	7.816.540.545,00	7.284.061.145,00	532.479.400,00
		Biaya Konsinyasi	10.807.635.711,00		339.360.000,00	1.076.809.251,00	10.070.186.460,00	10.004.802.460,00	65.384.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	60.326.374.957,00	-	43.334.067.109,00	46.605.938.286,00	57.054.503.780,00	48.741.672.268,00	8.312.831.512,00
7	Juli	Biaya Perkara	39.167.776.775,00		52.376.003.176,00	53.262.455.364,00	38.281.324.587,00	31.329.094.675,00	6.952.229.912,00
		Biaya Eksekusi	7.816.540.545,00		1.160.222.500,00	917.079.100,00	8.059.683.945,00	7.534.551.645,00	525.132.300,00
		Biaya Konsinyasi	10.070.186.460,00		1.112.661.900,00	364.560.000,00	10.818.288.360,00	10.752.754.360,00	65.534.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	57.054.503.780,00	-	54.648.887.576,00	54.544.094.464,00	57.159.296.892,00	49.616.400.680,00	7.542.896.212,00
8	Agustus	Biaya Perkara	38.281.324.587,00		44.272.335.353,00	45.279.668.792,00	37.273.991.148,00	30.382.790.450,00	6.891.200.698,00
		Biaya Eksekusi	8.059.683.945,00		1.307.929.000,00	1.129.281.400,00	8.238.331.545,00	7.658.185.345,00	580.146.200,00
		Biaya Konsinyasi	10.818.288.360,00		4.355.262.568,00	2.515.378.243,00	12.658.172.685,00	12.489.366.660,00	168.806.025,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	57.159.296.892,00	-	49.935.526.921,00	48.924.328.435,00	58.170.495.378,00	50.530.342.455,00	7.640.152.923,00
9	Septembe	Biaya Perkara	37.273.991.148,00		42.494.303.626,00	42.172.525.614,00	37.595.769.160,00	30.670.829.462,00	6.924.939.698,00
		Biaya Eksekusi	8.238.331.545,00		2.558.825.000,00	2.343.408.000,00	8.453.598.545,00	7.813.620.545,00	639.978.000,00
		Biaya Konsinyasi	12.658.172.685,00		181.400.000,00	2.487.144.600,00	10.352.428.085,00	10.162.072.060,00	190.356.025,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	58.170.495.378,00	-	45.234.528.626,00	47.003.078.214,00	56.401.795.790,00	48.646.522.067,00	7.755.273.723,00
10	Oktober	Biaya Perkara	37.596.080.160,00		43.006.074.734,00	45.902.775.933,00	34.699.378.961,00	28.085.234.842,00	6.614.144.119,00
		Biaya Eksekusi	8.455.098.545,00		944.041.000,00	1.235.408.700,00	8.163.730.845,00	7.620.251.695,00	543.479.150,00
		Biaya Konsinyasi	10.352.428.085,00		23.551.633.100,00	7.597.456.857,00	26.306.604.328,00	26.233.270.328,00	73.334.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	56.403.606.790,00	-	67.501.748.834,00	54.735.641.490,00	69.169.714.134,00	61.938.756.865,00	7.230.957.269,00
11	Novembe	Biaya Perkara	34.699.618.961,00		29.586.625.431,00	33.108.669.890,00	31.177.574.502,00	24.743.590.733,00	6.433.983.769,00
		Biaya Eksekusi	8.161.480.845,00		1.510.355.000,00	937.255.700,00	8.734.580.145,00	8.253.155.845,00	481.424.300,00
		Biaya Konsinyasi	26.319.104.328,00		72.598.871.300,00	3.107.838.241,00	95.810.137.387,00	95.533.903.387,00	276.234.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	69.180.204.134,00	-	103.695.851.731,00	37.153.763.831,00	135.722.292.034,00	128.530.649.965,00	7.191.642.069,00
12	Desembe	Biaya Perkara	31.177.599.502,00		18.754.338.009,00	28.320.269.540,00	21.611.667.971,00	16.491.022.032,00	5.120.645.939,00
		Biaya Eksekusi	8.734.580.145,00		687.434.500,00	1.342.349.000,00	8.079.665.645,00	7.640.451.345,00	439.214.300,00
		Biaya Konsinyasi	95.810.137.387,00		4.058.972.815,00	74.787.992.174,00	25.081.118.028,00	24.673.234.028,00	407.884.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	135.722.317.034,00	-	23.500.745.324,00	104.450.610.714,00	54.772.451.644,00	48.804.707.405,00	5.967.744.239,00

4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	3.061.173.782,00	- 1.549.000,00	813.759.650,00	897.260.199,00	2.976.124.233,00	2.685.174.205,00	290.950.028,00
		Biaya Eksekusi	27.202.408,00	- 18.481.000,00	2.200.000,00	1.730.000,00	9.191.408,00	7.429.408,00	1.762.000,00
		Biaya Konsinyasi	-	-	-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)		-		-	-		
		PHI *)		-		-	-		
		Jumlah	3.088.376.190,00	- 20.030.000,00	815.959.650,00	898.990.199,00	2.985.315.641,00	2.692.603.613,00	292.712.028,00
2	Februari	Biaya Perkara	2.976.124.233,00		593.655.750,00	592.963.050,00	2.976.816.933,00	2.502.755.140,00	474.061.793,00
		Biaya Eksekusi	9.191.408,00		2.000.000,00	2.204.800,00	8.986.608,00	7.267.608,00	1.719.000,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	2.985.315.641,00	-	595.655.750,00	595.167.850,00	2.985.803.541,00	2.510.022.748,00	475.780.793,00
3	Maret	Biaya Perkara	2.976.816.933,00		669.779.600,00	577.491.974,00	3.069.104.559,00	2.765.790.172,00	303.314.387,00
		Biaya Eksekusi	8.986.608,00		1.358.000,00	1.291.300,00	9.053.308,00	7.051.308,00	2.002.000,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	2.985.803.541,00	-	671.137.600,00	578.783.274,00	3.078.157.867,00	2.772.841.480,00	305.316.387,00
4	April	Biaya Perkara	3.069.104.559,00		770.714.377,00	663.651.473,00	3.176.167.463,00	2.805.600.368,00	370.567.095,00
		Biaya Eksekusi	9.053.308,00		-	870.500,00	8.182.808,00	6.866.608,00	1.316.200,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.078.157.867,00	-	770.714.377,00	664.521.973,00	3.184.350.271,00	2.812.466.976,00	371.883.295,00
5	Mei	Biaya Perkara	3.176.167.463,00		660.620.750,00	630.050.125,00	3.206.738.088,00	2.957.005.178,00	249.732.910,00
		Biaya Eksekusi	8.182.808,00		1.000.000,00	1.315.700,00	7.867.108,00	7.583.108,00	284.000,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.184.350.271,00	-	661.620.750,00	631.365.825,00	3.214.605.196,00	2.964.588.286,00	250.016.910,00
6	Juni	Biaya Perkara	3.206.738.088,00		584.677.650,00	640.477.780,00	3.150.937.958,00	2.879.834.228,00	271.103.730,00
		Biaya Eksekusi	7.867.108,00		500.000,00	402.500,00	7.964.608,00	6.680.608,00	1.284.000,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.214.605.196,00	-	585.177.650,00	640.880.280,00	3.158.902.566,00	2.886.514.836,00	272.387.730,00
7	Juli	Biaya Perkara	3.150.937.958,00		864.363.600,00	769.986.450,00	3.245.315.108,00	2.981.871.868,00	263.443.240,00
		Biaya Eksekusi	7.964.608,00		8.000.000,00	4.146.000,00	11.818.608,00	10.502.608,00	1.316.000,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.158.902.566,00	-	872.363.600,00	774.132.450,00	3.257.133.716,00	2.992.374.476,00	264.759.240,00
8	Agustus	Biaya Perkara	3.245.315.108,00		682.178.150,00	693.099.890,00	3.234.393.368,00	2.995.853.422,00	238.539.946,00
		Biaya Eksekusi	11.818.608,00		500.000,00	688.500,00	11.630.108,00	11.630.108,00	-
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.257.133.716,00	-	682.678.150,00	693.788.390,00	3.246.023.476,00	3.007.483.530,00	238.539.946,00
9	Septembe	Biaya Perkara	3.234.393.368,00		600.871.630,00	624.638.040,00	3.210.626.958,00	3.003.657.041,00	206.969.917,00
		Biaya Eksekusi	11.630.108,00		500.000,00	1.553.500,00	10.576.608,00	10.576.608,00	-
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.246.023.476,00	-	601.371.630,00	626.191.540,00	3.221.203.566,00	3.014.233.649,00	206.969.917,00
10	Oktober	Biaya Perkara	3.210.626.958,00		711.304.100,00	676.682.480,00	3.245.248.578,00	2.983.328.948,00	261.919.630,00
		Biaya Eksekusi	10.576.608,00		1.300.000,00	1.923.300,00	9.953.308,00	9.597.808,00	355.500,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.221.203.566,00	-	712.604.100,00	678.605.780,00	3.255.201.886,00	2.992.926.756,00	262.275.130,00
11	Novembe	Biaya Perkara	3.245.248.578,00		544.264.220,00	576.483.493,00	3.213.029.305,00	2.928.178.229,00	284.851.076,00
		Biaya Eksekusi	9.953.308,00		3.510.000,00	3.097.500,00	10.365.808,00	10.010.308,00	355.500,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.255.201.886,00	-	547.774.220,00	579.580.993,00	3.223.395.113,00	2.938.188.537,00	285.206.576,00
12	Desembe	Biaya Perkara	3.213.029.305,00		585.194.371,00	568.323.591,00	3.229.900.085,00	2.993.618.381,00	236.281.704,00
		Biaya Eksekusi	10.365.808,00		-	430.500,00	9.935.308,00	8.621.808,00	1.313.500,00
		Biaya Konsinyasi	-		-	-	-	-	-
		Uang Titipan Perkara Pidana *)				-	-		
		PHI *)				-	-		
		Jumlah	3.223.395.113,00	-	585.194.371,00	568.754.091,00	3.239.835.393,00	3.002.240.189,00	237.595.204,00

Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam CaLK Mahkamah Agung dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

F.4.2. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri

F.4.2.1. Penerimaan Hibah Mahkamah Agung

Penerimaan hibah Mahkamah Agung adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan. Penerimaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan serta mendukung pelayanan peradilan.

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau periode Semester II mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri dan luar negeri, baik yang sudah disahkan pada tahun anggaran berjalan (TAB) sejumlah Rp122.176.025.953,00 ditambah dengan hibah yang sudah disahkan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp60.546.353.945,00 sehingga nilai perolehan hibah sebesar Rp182.722.379.898,00 (*seratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

(Dalam Rupiah)

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Tahun Anggaran Berjalan Dalam Negeri	270	551	Rp	122.176.025.953,00
Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Dalam Negeri	65	102	Rp	35.863.708.316,00
Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Luar Negeri	1	3	Rp	24.682.645.629,00
TOTAL	**336**	**656**	**Rp**	**182.722.379.898,00**

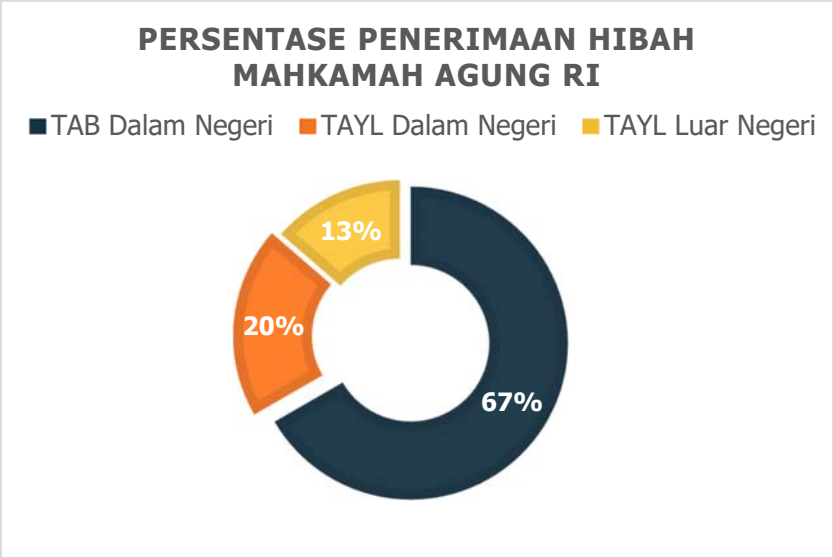

Jika dikelompokan menurut bentuknya, hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat dibagi menjadi hibah barang, hibah uang dan hibah jasa yang terdapat pada 336 satuan kerja dengan 656 dokumen hibah yang dapat dijelaskan berikut ini:

Hibah Menurut Bentuknya Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

(Dalam Rupiah)

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Barang	305	607	Rp	140.521.969.493,00
Hibah Uang	9	9	Rp	6.212.524.000,00
Hibah Jasa	22	40	Rp	35.987.886.405,00
TOTAL	**336**	**656**	**Rp**	**182.722.379.898,00**

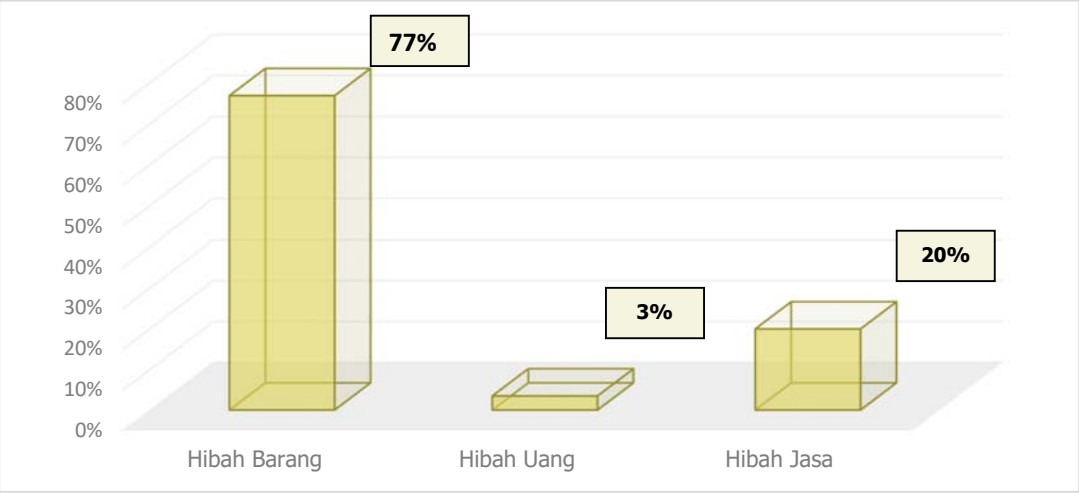

Lebih lanjut jika dikelompokan menurut sumber asal hibahnya, secara umum satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menerima hibah yang bersumber dari dalam negeri baik berasal dari individu atau perseorangan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten), lembaga perbankan atau keuangan dan juga organisasi dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Menurut Sumber Asal Hibahnya Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

(Dalam Rupiah)

NO	ASAL HIBAH	DOKUMEN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH		PERSENTASE (%)
1	Individu / Perseorangan	149	Rp	4.968.814.437,00	2,72%
2	Pemerintah Daerah	157	Rp	90.314.328.278,00	49,43%
3	Organisasi Lainnya	21	Rp	4.139.764.622,00	2,27%
4	Korporasi	36	Rp	1.307.733.561,00	0,72%
5	Bank BTN	211	Rp	51.275.848.767,00	28,06%
6	Lembaga Perbankan Lainnya	79	Rp	6.033.244.604,00	3,30%
7	Organisasi Luar Negeri	3	Rp	24.682.645.629,00	13,51%
TOTAL		**656**	**Rp**	**182.722.379.898,00**	**100,00%**

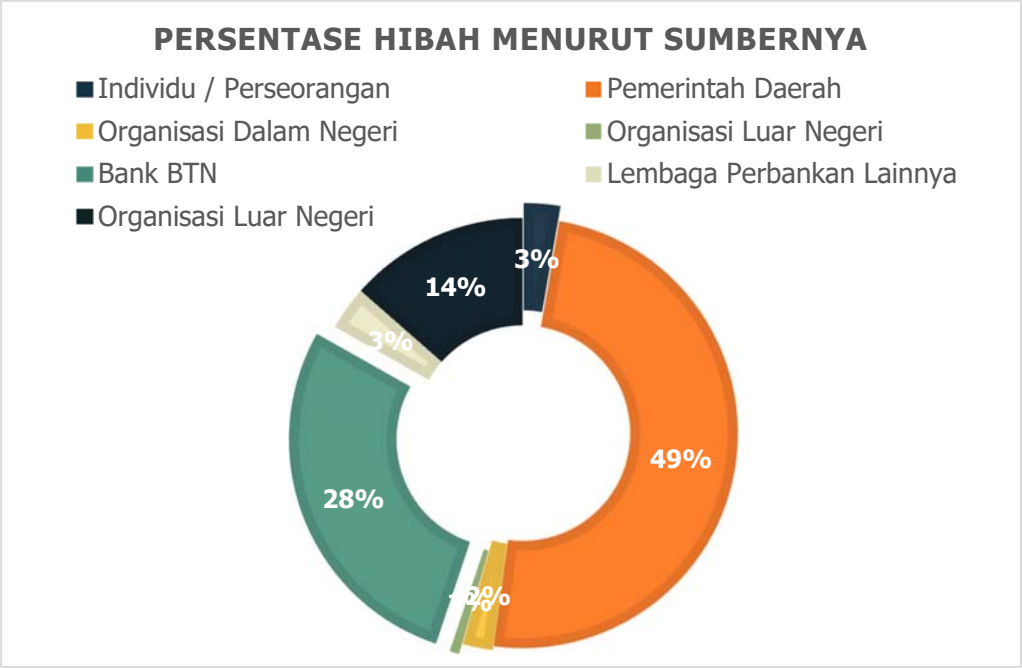

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menerima hibah dari Bank BTN yang telah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat dicatatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan persentase perolehan hibah sebesar 28,06% dari total persentase keseluruhan dalam penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Selain itu, Badan Urusan Administrasi sebagai satuan kerja selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 juga mendapatkan hibah langsung barang dari Bank BTN berupa perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 70 unit dengan nilai perolehan sejumlah Rp1.875.000.000,00. Tujuan pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi layanan peradilan dalam meningkatkan kinerja layanan putusan oleh para Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Panitera dan Panitera Muda Perkara pada Mahkamah Agung RI.

Secara umum Bank BTN memberikan hibah langsung berupa barang dan jasa. Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut ini:

Penerimaan Hibah dari Bank BTN Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
1	PN SUBANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruangan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Subang	1	38.408.500,00	38.408.500,00	38.408.500,00	NPH.NO: 99/PKS/PWK.II/BFSU/XII/2023 Tanggal: 21 Desember 2023
2	PN SUBANG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	5	8.500.000,00	42.500.000,00	50.000.000,00	NPH.NO: 87/PWK.11/XI/2023 Tanggal: 30 Oktober 2023
			Televisi 55 Inch	1	7.500.000,00	7.500.000,00		
3	PN JAKARTA TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	53.974.305,00	53.974.305,00	326.998.235,00	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/XII/2023 & 12963/SEK.W10-U5/PL1.2.4/12/2023 Tanggal: 19 Desember 2023
		PERALATAN DAN MESIN	Printer	10	4.409.087,00	44.090.870,00		
			Scanner	5	6.382.500,00	31.912.500,00		
			PC AIO HP	2	12.806.625,00	25.613.250,00		
			TV Monitor	1	23.088.000,00	23.088.000,00		
			AC Split	12	10.048.497,00	120.581.964,00		
			AC Standing	1	27.737.346,00	27.737.346,00		
4	PN JAKARTA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Metal Detector Walkthrough	1	34.200.000,00	34.200.000,00	956.468.000,00	NPH.NO: 9269/SEK.PN/W10.U5/PL1.2.4/XII/2023 & 6998/NPH/KGS/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023
			Hand Metal Detector	13	1.025.000,00	13.325.000,00		
			Access Control	18	5.935.000,00	106.830.000,00		
			Swing Gate	2	89.530.000,00	179.060.000,00		
			Xray Pemindai Bagasi	1	324.000.000,00	324.000.000,00		
			Barrier Gate In & Out	2	62.280.000,00	124.560.000,00		
			Inpection Mirror Convex	4	875.000,00	3.500.000,00		
			Bardi Smart IP Camera CCTV Indoor	1	674.750,00	674.750,00		

			Rak Besi Custom Galvanis	6	13.986.000,00	83.916.000,00		
			PPN		86.402.250,00	86.402.250,00		
5	PT BANDUNG	PERALATAN DAN MESIN	AC Standing Floor	1	18.348.300,00	18.348.300,00	58.745.390,00	NPH.NO: 005/BAST/Krw.II/BFSU/IX/23 & W11.U/5183/PL.09/09/2023 Tanggal: 5 September 2023
			AC Split 0,5 PK	2	2.489.175,00	4.978.350,00		
			Televisi 55 Inch	1	10.240.250,00	10.240.250,00		
			Televisi 65 Inch	1	16.717.515,00	16.717.515,00		
			Jam Dinding Ruang VIP	1	649.350,00	649.350,00		
			Jam Dinding Loby	1	541.125,00	541.125,00		
			Panggung	1	5.272.500,00	5.272.500,00		
			Pigura	4	499.500,00	1.998.000,00		
6	PT BANDUNG	JASA	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik Ruang Ketua	1	16.256.713,00	16.256.713,00	16.256.713,00	NPH.NO: 003/BAST/Krw.II/BFSU/IX/2023 & W11.U/5181/PL.09/09/2023 Tanggal: 5 September 2023
7	PN TANGERANG	JASA	Pembayaran Jasa Sewa Dedicated Cloud Server	9	33.300.000,00	299.700.000,00	299.700.000,00	NPH.NO: 13/TGR.I/PKS/FSU/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
8	PN TANGERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Tangerang	27-Dec	6.066.667,00	1.965.600.000,00	1.965.600.000,00	NPH.NO: 3/TGR.I/PKS/FSU/I/2024 Tanggal: 2 Januari 2024
9	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Lisensi	9	77.700.000,00	699.300.000,00	1.698.300.000,00	NPH.NO: 12/TGR.I/PKS/FSU/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
			Lisensi	9	77.700.000,00	699.300.000,00		
			Hub	9	2.220.000,00	19.980.000,00		
			Microphone	90	3.108.000,00	279.720.000,00		
10	PN YOGYAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Laptop	25	7.944.300,00	198.607.500,00	233.948.400,00	NPH.NO: 39/HIBAH/YYK.II/II/2024 & 65/SEK.PN.W13-U1/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024
			Scanner	3	6.480.300,00	19.440.900,00		
			AC Split 2 PK	2	7.950.000,00	15.900.000,00		
11	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang Cakra pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta	1	45.700.000,00	45.700.000,00	45.700.000,00	NPH.NO: 24/PWK.II/III/2024 Tanggal: 27 Desember 2023
12	PN MATARAM	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	3	8.000.000,00	24.000.000,00	29.950.000,00	NPH.NO: 519/SEK.PN.W25-U1/PL1.2.4/II/2024 & 0882/S/MTR.II/FSU/IV/2024 Tanggal: 15 Februari 2024
			Printer	2	2.975.000,00	5.950.000,00		

13	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	3	9.379.500,00	28.138.500,00	53.920.860,00	NPH.NO: 1020/SEK.PN.W13-U3/PL1.2.4/IV/2024 & 67/BAST/YYK/IV/2024 Tanggal: 16 April 2024
			AC Split 1 PK	2	5.821.950,00	11.643.900,00		
			Air Curtain	1	4.717.500,00	4.717.500,00		
			UPS	1	5.930.960,00	5.930.960,00		
			Mesin Absensi	1	3.490.000,00	3.490.000,00		
14	PT JAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Ruang PTSP Mandiri	1	182.540.016,00	182.540.016,00	599.983.266,00	NPH.NO: 947/NPH/KGS/II/2024 & 954/KPT.W10-U/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 19 Februari 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Televisi	1	120.990.000,00	120.990.000,00		
			Camera Digital	5	7.992.000,00	39.960.000,00		
			Televisi	4	6.549.000,00	26.196.000,00		
			Camera Digital	1	1.443.000,00	1.443.000,00		
			Mixer Sound System	1	27.750.000,00	27.750.000,00		
			Microphone/Wireless Mic	18	4.995.000,00	89.910.000,00		
			External Portable Harddisk	1	999.000,00	999.000,00		
			Monitor	2	1.887.000,00	3.774.000,00		
			PC Unit	2	16.650.000,00	33.300.000,00		
			Alat Kantor Lainnya	1	1.332.000,00	1.332.000,00		
			Splitter HDMI	5	416.250,00	2.081.250,00		
			Alat Kantor Lainnya	2	721.500,00	1.443.000,00		
			Mixer Sound System	1	8.880.000,00	8.880.000,00		
			Modulation Monitor Speaker Kaba	2	29.692.500,00	59.385.000,00		
15	PN BOGOR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	155.000.000,00	155.000.000,00	180.000.000,00	NPH.NO: 369/S/BGR.UT/FSU.BFS/X/2023 & 2651/SEK.PN.W11.U2/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 27 Oktober 2023
		PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	2	6.000.000,00	12.000.000,00		
			Kursi	5	500.000,00	2.500.000,00		
			Kursi	5	1.600.000,00	8.000.000,00		
			Kursi	5	500.000,00	2.500.000,00		
16	PN SERANG	PERALATAN DAN MESIN	Printer Brother T240W	1	20.000.000,00	20.000.000,00	140.294.000,00	NPH.NO: 165/Clg.II/IV/2024 & 1349/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/IV/2024
			Rak Besi	15	2.100.000,00	31.500.000,00		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000,00	30.000.000,00		
			Sound System JBL	1	16.650.000,00	16.650.000,00		
			Gordyn / Kray	8	4.620.000,00	36.960.000,00		
			Gordyn / Kray	2	2.592.000,00	5.184.000,00		
17	PN INDRAMAYU	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	1	9.976.000,00	9.976.000,00	66.000.000,00	NPH.NO: 75/CRB/FSU/III/2024 & W11.U12/621/PL.01/3/2024 Tanggal: 18 Maret 2024
			Printer	3	4.389.000,00	13.167.000,00		
			Mesin Parkir Otomatis	1	10.178.000,00	10.178.000,00		

			Rak Besi	1	5.850.000,00	5.850.000,00		
			Loudspeaker	2	2.600.000,00	5.200.000,00		
			Audio Mixing Console	1	2.600.000,00	2.600.000,00		
			Microphone / Wireless Mic	2	2.493.000,00	4.986.000,00		
			Televisi	1	6.543.000,00	6.543.000,00		
			Microphone Table Stand	2	3.750.000,00	7.500.000,00		
18	PN SLEMAN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	2	7.300.000,00	14.600.000,00	46.775.000,00	NPH.NO: 22/HIBAH/YYK.II/II/2024 & 509/SEK.PN.W13-U2/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 5 Februari 2024
			Access Gate Parking	1	32.175.000,00	32.175.000,00		
19	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Polytron 2 PK	2	5.702.000,00	11.404.000,00	16.500.000,00	NPH.NO: 83/PKS/BWI.III/FSU/XII/2023 & 3321/SEK.W14-U16/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 28 Desember 2023
			Printer Epson L121	2	1.573.000,00	3.146.000,00		
			APAR Powder ABC 6 Kg	3	650.000,00	1.950.000,00		
20	PN CIBADAK	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	1	13.492.717,00	13.492.717,00	148.881.525,00	NPH.NO: 74/NPH/SMI.III/FSU.CF/IV/2024 & 1195/SEK.W11.U18/PL.01.IV/2024 Tanggal: 19 April 2024
			Televisi	2	16.737.609,00	33.475.218,00		
			Televisi	1	14.957.718,00	14.957.718,00		
			Televisi	1	7.257.718,00	7.257.718,00		
			AC Split 2 PK	6	7.613.786,00	45.682.716,00		
			Printer	5	3.821.544,00	19.107.720,00		
			Scanner	2	7.453.859,00	14.907.718,00		
21	PN KOTOBARU	PERALATAN DAN MESIN	Meja Rapat	1	19.500.000,00	19.500.000,00	35.000.000,00	NPH.NO: 64/PKS/PDG.II/V/2024 & 464/SEK.PN.W3-U13/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 7 Mei 2024
			Kursi Rapat	10	850.000,00	8.500.000,00		
			Televisi 43 Inch	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
			AC Split 1 PK	1	4.000.000,00	4.000.000,00		
22	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	37	21.000.000,00	777.000.000,00	1.700.000.000,00	NPH.NO: 74/TGR.I/PKS/FSU/II/2024 Tanggal: 7 Februari 2024
			PC Unit	12	26.400.000,00	316.800.000,00		
			Printer	15	3.600.000,00	54.000.000,00		
			Printer	9	5.800.000,00	52.200.000,00		
			AC Split	10	50.000.000,00	500.000.000,00		
23	PN RANGKAS BITUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Rangkas Bitung	Mar-13	3.500.000,00	136.500.000,00	136.500.000,00	NPH.NO: 50/PKS/CLG.II/FSU/III/2024 & 328/W29.U3/SEK.03/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 1 Maret 2024
24	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pengaspalan Area Parkir Pengadilan Negeri Sumedang	1	113.408.202,00	113.408.202,00	113.408.202,00	NPH.NO: 2462/BDT/BFSU/XI/23 & 1872.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 10 November 2023

25	PN SUNGGUMINASA	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Fujitsu Fi-8150	2	20.202.000,00	40.404.000,00	40.404.000,00	NPH.NO: 420/PKS/PNK/FSU/XII/2023 & 2892/PAN.W22-U3/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 4 Desember 2023
26	PN TENGGARONG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 1 PK	9	4.204.500,00	37.840.500,00	37.840.500,00	NPH.NO: 14/BAST/SMR/FSU/IV/2024 & 1332/SEK.PN.W18-U3/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 22 April 2024
27	PN BANJARMASIN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Daikin 2 PK	2	8.450.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	NPH.NO: 711.b/SEK.PN.W15.U1/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 3 April 2024
28	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 0,5 PK	1	3.000.000,00	3.000.000,00	46.800.000,00	NPH.NO: 550/SEK/W11.U7/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 3 April 2024
			AC Split 0,5 PK	2	6.800.000,00	13.600.000,00		
			Layar Proyektor Otomatis	1	1.700.000,00	1.700.000,00		
			Filling Cabinet	2	2.600.000,00	5.200.000,00		
			Meja Kerja	1	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Kursi Zeis Putar	6	1.300.000,00	7.800.000,00		
			Meja Rapat	1	6.500.000,00	6.500.000,00		
			Bangku Panjang Besi / Metal	3	2.500.000,00	7.500.000,00		
29	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Bangunan Berupa Backdrop Ruang Sidang Garuda dan Ruang Sidang Anak	1	47.311.000,00	47.311.000,00	47.311.000,00	NPH.NO: 549/SEK/W11.U7/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 22 April 2024
30	PN BOYOLALI	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Gree 2 PK	5	6.000.000,00	30.000.000,00	140.000.000,00	NPH.NO: 16.A/PKS/SLO.II/FSU/IV/2024 & 781/SEK.PN.W12U17/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 2 April 2024
			Printer Epson L3250	3	3.000.000,00	9.000.000,00		
			Scanner Fujitsu 1130	1	8.000.000,00	8.000.000,00		
			Paper Shrader	1	2.500.000,00	2.500.000,00		
			Rak Besi Informa	6	2.400.000,00	14.400.000,00		
			PC Lenovo AIO IC3 22IAP7	2	10.000.000,00	20.000.000,00		
			Meja Kayu Informa	4	2.000.000,00	8.000.000,00		
			Kursi Besi Informa	6	1.600.000,00	9.600.000,00		
			LED TV Samsung 50 Inch	1	6.000.000,00	6.000.000,00		
			Audio Mixing Console FirstClass	1	2.600.000,00	2.600.000,00		
			Loudspeaker Pasif	2	1.900.000,00	3.800.000,00		

			FirstClass Pro					
			Microphone Mic Kondensor U87	4	500.000,00	2.000.000,00		
			Router Asus RT-AX53U	1	1.700.000,00	1.700.000,00		
			Router RB 1100 AHX-4	1	4.900.000,00	4.900.000,00		
			Camera Conference Logitech 950	1	7.000.000,00	7.000.000,00		
			Vertical Blind Jendela	26	200.000,00	5.200.000,00		
			Lensa Camera Canon	1	4.800.000,00	4.800.000,00		
			Peralatan Studio Lainnya Adapter DC Coupler	1	500.000,00	500.000,00		
31	PN BALIKPAPAN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Manager	1	2.400.000,00	2.400.000,00	43.452.900,00	NPH.NO: 74/NPH-BTN/BLP.III/FSU/V/2024 & 207/SEK.PN/W18-U2/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 2 Mei 2024
			Kursi Staf	21	1.050.000,00	22.050.000,00		
			Kursi Staf	8	1.750.000,00	14.000.000,00		
			Printer Canon G2020	2	2.501.450,00	5.002.900,00		
32	PN MALANG	PERALATAN DAN MESIN	Brother Scanner ADS 1700W	2	6.060.000,00	12.120.000,00	60.693.000,00	NPH.NO: 57/PKS/MLG.II/FSU/IV/2024 & 1270/SEK.PN.W14-U2/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 5 April 2024
			Brother Desktop Docuiment Scanner ADS-3300W	1	8.950.000,00	8.950.000,00		
			Synology Diskstation DS423+	1	22.475.000,00	22.475.000,00		
			PC AIO Acer C22-1700 i3-1215U	1	8.150.000,00	8.150.000,00		
			Printer Canon Pizma G4010	2	4.499.000,00	8.998.000,00		
33	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sekretaris pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Depok	1	213.229.178,00	213.229.178,00	213.229.178,00	NPH.NO: W11.U21/1832a/NPH.BTN/III/2023 & 388, 769/M/JKK.1/FSU/III/2023 Tanggal: 29 Maret 2023
34	PN KARAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Karawang	1	1.718.000.000,00	1.718.000.000,00	2.043.000.000,00	NPH.NO: 2272/S/Krw.I/BFSU/VI/2024 & 1154/SEK.W11-U10/PL1.1.3/VI/2024 Tanggal: 5 Juni 2024
35		JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Karawang	Oct-13	2.500.000,00	325.000.000,00		

36	PN BANJARBARU	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pemasangan Atap Plavon PVC	1	60.213.745,00	60.213.745,00	60.213.745,00	NPH.NO: 516/PAN.W15.U12/PL1.2.4/II/2024 & 39/PKS/BJB/BFSU/II/2024 Tanggal: 29 Februari 2024
37	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PERALATAN DAN MESIN	Tablet PC Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 512 GB / 12 GB RAM	10	28.500.000,00	285.000.000,00	1.875.000.000,00	NPH.NO: 10/NPH/LIFD/IV/2024 & 591/BUA.3/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 23 April 2024
			Tablet PC Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 256 GB / 12 GB RAM	60	26.500.000,00	1.590.000.000,00		
38	PN SAMARINDA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split	1	6.305.000,00	6.305.000,00	33.378.100,00	NPH.NO: 187/BAST/SMR/FSU/VI/2024 & 194/SEK.PN.W18-U1/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 4 Juni 2024
			Visitor Chair	13	1.259.000,00	16.367.000,00		
			Director Chair	2	5.353.050,00	10.706.100,00		
39	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Box Arsip File Perkara pada Pengadilan Negeri Denpasar	500	55.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	NPH.NO: 05/NPH/DPS.II/FSU/III/2024 & 588a/KPN.W.24-U1/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 6 Maret 2024
40	PN PURWODADI	PERALATAN DAN MESIN	Televisi LED Samsung 32 Inch	1	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	NPH.NO: 010/NPH/KDS.III/FSU/II/2024 & 341/SEK.PN.W12-U16/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 26 Februari 2024
41	PN SEMARANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Semarang	18-Dec	1.887.731,00	407.750.000,00	407.750.000,00	NPH.NO: 09/NPH/SMG/BFSU/II/2024 & 82/SEK-W12.U1/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 28 Februari 2024
42	PN SEMARANG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	1	11.709.000,00	11.709.000,00	860.450.710,00	NPH.NO: 23/NPH/SMG/BFSU/VI/2024 & 275/SEK.W12-U1/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 3 Juni 2024
			AC Standing 5 PK	1	37.482.750,00	37.482.750,00		
			AC Standing 5 PK	1	37.905.750,00	37.905.750,00		
			AC Split 2 PK	2	11.533.830,00	23.067.660,00		
			AC Split 2 PK	1	11.398.500,00	11.398.500,00		
			AC Split 2 PK	1	12.564.000,00	12.564.000,00		
			AC Standing 5 PK	1	36.929.250,00	36.929.250,00		
			AC Split 2 PK	1	10.718.550,00	10.718.550,00		
			AC Split 2 PK	1	12.564.000,00	12.564.000,00		
			Server	1	350.125.000,00	350.125.000,00		
			Kamera Digital	1	22.145.000,00	22.145.000,00		

			Laptop	2	15.700.000,00	31.400.000,00		
			Printer	4	3.200.000,00	12.800.000,00		
			Layar LED 55 Inch	2	10.665.000,00	21.330.000,00		
			Videotron	1	102.108.750,00	102.108.750,00		
			Mic Table Stand	60	1.129.500,00	67.770.000,00		
			Layar LED 70 Inch	1	15.232.500,00	15.232.500,00		
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Tram Jalan Perbaikan AC dan Railing Ruang Tunggu	25	1.728.000,00	43.200.000,00		
43	PN KARANGANYAR	PERALATAN DAN MESIN	Printer Canon G3010	2	2.450.000,00	4.900.000,00	8.200.000,00	NPH.NO: 18B/PKS/SLO.II/FSU/IV/2024 & 100.A/SEK.PN.W12-U31/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 16 April 2024
			Exhaust Fan Panasonic	2	1.300.000,00	2.600.000,00		
			Exhaust Fan Imatsu	1	700.000,00	700.000,00		
44	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Bagian Umum dan Kantin pada Pengadilan Tinggi Bandung	1	190.537.000,00	190.537.000,00	190.537.000,00	NPH.NO: 236/NPH/CKR/FSU/I/2024 & 1702/SEK.W11-U/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 4 Januari 2024
45	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	1	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	NPH.NO: 207/NPHD/CKR.I/FSU/III/2024 & 816/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 26 Maret 2024
46	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Lenovo AIO V530-22ICB	10	9.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	NPH.NO: 161/NPH/CKR/FSU/I/2024 & 286/SEK.W11-U23/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
47	PN CIKARANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cikarang	20-Dec	2.845.837,00	683.000.995,00	683.000.995,00	NPH.NO: 02/PKS/CKR/FSU/I/2024 & 169/SEK.PN.W11-U23/KS.OO/I/2024 Tanggal: 8 Januari 2024
48	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Panasonic 2 PK	1	11.721.600,00	11.721.600,00	30.060.220,00	NPH.NO: 1484/SEK.PN.W13-U3/PL1.2.4/VI/2024 & 113/BAST/YYK/VI/2024 Tanggal: 26 Juni 2024
			AC Split Panasonic 1 PK	1	8.260.620,00	8.260.620,00		
			Televisi LED Coocaa 50 Inch	2	5.039.000,00	10.078.000,00		
49	PN SINGARAJA	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi/Metal	10	1.300.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00	NPH.NO: 01/NPH/SGR.III/FSU/VI/2024 & 1703/SEK.PN.W24-U2/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024

			AC Split 2 PK	1	7.000.000,00	7.000.000,00		
50	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	CCTV	1	18.000.000,00	18.000.000,00	397.800.000,00	NPH.NO: 483/W29.U3/SEK.03/PL1.2.4/V/2024 & 103/CLG.II/V/2024 Tanggal: 3 Mei 2024
			Vertical Blind	6	12.000.000,00	72.000.000,00		
			Acces Control System	4	2.000.000,00	8.000.000,00		
			Tempat Sampah	6	1.500.000,00	9.000.000,00		
			Dispenser	2	2.500.000,00	5.000.000,00		
			Mic Conferenc e	1	2.000.000,00	2.000.000,00		
			Microphon e/Wireless Mic	2	4.500.000,00	9.000.000,00		
			Amplifier	1	2.000.000,00	2.000.000,00		
			Loadspeak er	4	1.500.000,00	6.000.000,00		
			Audio Mixing Console	2	5.000.000,00	10.000.000,00		
			Gimbal Tripod	1	4.000.000,00	4.000.000,00		
			Camera Digital	1	28.000.000,00	28.000.000,00		
			Bracket Standing Peralatan	1	2.500.000,00	2.500.000,00		
			Camera Conferenc e	1	10.000.000,00	10.000.000,00		
			Televisi 70 inch (SmartTV)	1	20.000.000,00	20.000.000,00		
			Televisi 50 inch (SmartTV)	8	7.000.000,00	56.000.000,00		
			AC SpIit1 PK	3	5.700.000,00	17.100.000,00		
			AC SpIit1.5 PK	4	7.500.000,00	30.000.000,00		
			Video Monitor (Videotron)	1	47.000.000,00	47.000.000,00		
			Kabel Extention USB 3.0 20Meter	2	1.100.000,00	2.200.000,00		
			Spliter HDMI 4 Port	3	1.500.000,00	4.500.000,00		
			Kabel HDMI 10 Meter	4	1.000.000,00	4.000.000,00		
			Kabel HDMI 20 Meter	4	1.200.000,00	4.800.000,00		
			Rak Server	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
			Router Dual Mode	1	3.500.000,00	3.500.000,00		
			Switch Gigabit 16 Port 100 Mbps	2	1.500.000,00	3.000.000,00		
			Switch Gigabit 16 Port 100 Mbps	2	2.500.000,00	5.000.000,00		
			Kabel UTP LAN	2	3.500.000,00	7.000.000,00		
			External Portable Harddisk 4TB	1	3.200.000,00	3.200.000,00		

51	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	4	5.750.000,00	23.000.000,00	50.000.000,00	NPH.NO: 013/NPH/KDS.III/FSU/IV/2024 & 161/SEK/UM.06.1/4/2024 Tanggal: 5 April 2024
			PC Unit	2	9.500.000,00	19.000.000,00		
			Printer	2	4.000.000,00	8.000.000,00		
52	PN BATANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Batang	05-Aug	1.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	NPH.NO: 277/PKS/PKL.II/BFSU/XII/2023 & 2500/SEK.W.2.U33/UM.03/12/2023 Tanggal: 29 Desember 2023
53	PN CILACAP	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 1 PK	3	5.000.000,00	15.000.000,00	145.600.000,00	NPH.NO: 028/PKS/PWK/FSU/VII/2024 & 1112/SEK.PN.W12-U7/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024
			PC Unit	2	14.000.000,00	28.000.000,00		
			Laptop	2	11.725.000,00	23.450.000,00		
			Televisi	1	8.000.000,00	8.000.000,00		
			PC Unit Standing	1	7.500.000,00	7.500.000,00		
			Printer	12	2.400.000,00	28.800.000,00		
			Rak Besi	5	1.350.000,00	6.750.000,00		
			Vacuum Cleaner	1	4.100.000,00	4.100.000,00		
			Scanner	2	7.500.000,00	15.000.000,00		
			Vertical Blind	3	3.000.000,00	9.000.000,00		
54	PN SERANG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Czur ET25	3	20.000.000,00	60.000.000,00	347.457.150,00	NPH.NO: 134/Clg.II/VII/2024 & 2406/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 17 Juli 2024
			PC Unit Asus	8	18.700.000,00	149.600.000,00		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000,00	30.000.000,00		
			Wallpaper Ruang Wakil Ketua	1	41.770.950,00	41.770.950,00		
			Backdrop Ruang Wakil Ketua	1	47.627.200,00	47.627.200,00		
			Focussing Screen/Layar Projector	1	12.687.000,00	12.687.000,00		
			Projector Spider Bracket	1	5.772.000,00	5.772.000,00		
55	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson DS-410	1	5.600.000,00	5.600.000,00	38.010.000,00	NPH.NO: 06/NPH/DPS.II/FSU/VII/2024 & 8946/KPN.W24-U1/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 15 Juli 2024
			AC Standing 4 PK	1	32.410.000,00	32.410.000,00		
56	PN MAGELANG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Gree 1 PK	7	4.552.600,00	31.868.200,00	68.564.900,00	NPH.NO: 015/PKS/Hibah/MGL.III/FSU/VII/2024 & 87/SEK.PN.W12.U6/HIBAH.01/VII/2024 Tanggal: 1 Juli 2024
			AC Split Gree 1,5 PK	1	6.826.500,00	6.826.500,00		
			AC Split Gree 2 PK	3	8.073.400,00	24.220.200,00		
			Projector Epson EBX 06	1	5.650.000,00	5.650.000,00		

57	PN SUNGGUMINASA	JASA	Jasa Rehabilitasi Ruang PTSP Pengadilan Negeri Sungguminasa	1	22.022.000,00	22.022.000,00	22.022.000,00	NPH.NO: 66/PKS/PNK/FSU/III/2024 & 764/PAN.W22-U3/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 6 Maret 2024
58	PN MEDAN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Hadap	10	1.500.000,00	15.000.000,00	92.000.000,00	NPH.NO: 07/MDN/HBH/FSU/III/2024 & 4650/SEK.PN.W2.U1/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 26 Maret 2024
			Kursi Susun	80	700.000,00	56.000.000,00		
			Kursi Direktur Hakim	10	1.500.000,00	15.000.000,00		
			Kursi Direktur	2	3.000.000,00	6.000.000,00		
59	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	1	11.500.000,00	11.500.000,00	17.750.000,00	NPH.NO: 83/PKS/PKL.II/FSU/V/2024 & 524.SEK.PN.W12-U21/PL1.2.5/V/2024 Tanggal: 27 Mei 2024
			Televisi	1	3.150.000,00	3.150.000,00		
			Portable Air Conditioner	1	3.100.000,00	3.100.000,00		
60	PN BATANG	PERALATAN DAN MESIN	Mesin Absensi	1	2.150.000,00	2.150.000,00	50.000.000,00	NPH.NO: 70/PKS/PKL.II/FSU/IV/2024 & 862/SEK.W12.U33/UM.03/5/2024 Tanggal: 22 April 2024
			Kursi Besi	20	760.000,00	15.200.000,00		
			Printer	4	4.750.000,00	19.000.000,00		
			AC Split 1 PK	3	4.550.000,00	13.650.000,00		
61	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Rak Arsip	10	6.500.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	NPH.NO: 583/NPH/CKR.I/FSU/VI/2024 & 1483/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024
62	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang VIP Pengadilan Tinggi Bandung	1	324.809.994,00	324.809.994,00	324.809.994,00	NPH.NO: 489/NPH/CKR.I/FSU/VI/2024 & 4090/SEK.W11-U/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 19 Juni 2024
63	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	1	19.402.000,00	19.402.000,00	19.402.000,00	NPH.NO: NPH.NO: 547/NPH/CKR.I/FSU/VI/2024 & 1422/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 12 Juni 2024
64	PN BALE BANDUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Bale Bandung	02-Oct	7.455.500,00	149.110.000,00	149.110.000,00	NPH.NO: 001.A/CMH/BFSU/V/2024 & 4438/SEK.PN.W11.U6/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024
65	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pengaspalan Area Parkir Pengadilan Tinggi Bandung	1	249.686.000,00	249.686.000,00	249.686.000,00	NPH.NO: 38/NPH/BKS.I/FSU/V/2023 & 3883/SEK.W11-U/PL1.2.4/V/2023 Tanggal: 22 Mei 2023
66	PN SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	PC HP M01-F2019d	7	9.500.000,00	66.500.000,00	143.190.000,00	NPH.NO: 10A/BAST/SDA/FSU/IV/2024 &W14.U8/995A/KU-05/IV/2024 Tanggal: 22 April 2024

			Televisi 50 inch (SmartTV)	2	6.000.000,00	12.000.000,00		
			Printer Epson L3251	5	4.500.000,00	22.500.000,00		
			Scanner Fujitsu IX1400 Duplex	2	9.500.000,00	19.000.000,00		
			AC Split Daikin 1 PK	1	9.000.000,00	9.000.000,00		
			PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	11	14.190.000,00	14.190.000,00		
67	PN MENGGALA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	4	5.830.000,00	23.320.000,00	230.558.020,00	NPH.NO: 98/BAST/BDL/FSU/V/2024 & 1016/SEK.PN.W9-U6/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 15 Mei 2024
			Kursi Kerja Executive Chairman	4	4.950.000,00	19.800.000,00		
			PC AIO Asus A3202 i5-1235U	8	7.929.350,00	63.434.800,00		
			Samsung Galaxy Tab S9 FE	2	7.895.800,00	15.791.600,00		
			Televisi LED Samsung 50 Inch	2	7.920.000,00	15.840.000,00		
			Kursi Tunggu Besi PTSP Frontliner	7	1.325.500,00	9.278.500,00		
			Printer Canon G1010	10	1.434.400,00	14.344.000,00		
			Televisi LED Samsung 43 Inch	3	3.960.000,00	11.880.000,00		
			AC Split Sharp 1 PK	9	3.960.000,00	35.640.000,00		
			Lemari Arsip Kaca Sliding	2	1.991.000,00	3.982.000,00		
			UPS APC Eay UPS BVX 1200VA 650	8	1.933.140,00	15.465.120,00		
			Sepatu Lapangan AP Boots	9	198.000,00	1.782.000,00		
68	PN BALE BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung	1	886.904.937,00	886.904.937,00	1.153.318.257,00	NPH.NO: 001/CMH/BFSU/V/2024 & 4437/SEK.PN.W11.U6/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Video Wall	1	216.561.000,00	216.561.000,00		
			Tripode Camera	1	5.174.820,00	5.174.820,00		
			Camera Digital	1	18.592.500,00	18.592.500,00		
			Drone	1	26.085.000,00	26.085.000,00		
69	PN PENAJAM	PERALATAN DAN MESIN	Televisi Samsung 50 Inch	4	7.550.000,00	30.200.000,00	96.638.000,00	NPH.NO: 128/NPH-BTN/BLP.III/FSU/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
			Televisi Samsung 43 Inch	1	5.550.000,00	5.550.000,00		
			Microfon Hardwell	1	8.050.000,00	8.050.000,00		

			Amplifier Ashley	1	2.700.000,00	2.700.000,00		
			Projector Epson EB-X500	1	8.199.000,00	8.199.000,00		
			Drone DJI Mini 2 SE	1	5.939.000,00	5.939.000,00		
			Speaker Standing Alpha Seven CS	1	6.350.000,00	6.350.000,00		
			Speaker Dinding ZS-1030B	4	1.750.000,00	7.000.000,00		
			Handy Talkie Baofeng	1	3.960.000,00	3.960.000,00		
			Harddisk CCTV	1	1.890.000,00	1.890.000,00		
			Lemari Besi Dry Box	1	3.150.000,00	3.150.000,00		
			Standing Microfon Betavo	2	1.200.000,00	2.400.000,00		
			USB Cabble 3.0 20 Meter	2	1.250.000,00	2.500.000,00		
			Ranjang Pasien	1	2.450.000,00	2.450.000,00		
			Layar Proyektor Otomatis	1	6.300.000,00	6.300.000,00		
70	PN BATANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Batang	05-Jan	1.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	NPH.NO: 116/PKS/PKL.III/BFSU/VI/2023 & W12-U33/1371/KU.01/7/2023 Tanggal: 27 Juni 2023
71	PN BANDUNG	PERALATAN DAN MESIN	Printer	14	3.075.148,00	43.052.072,00	577.877.225,00	NPH.NO: 331/SEK.W11-U1/PL1.2.4/I/2024 & 06/S/BDG/FSU/I/2024 Tanggal: 12 Januari 2024
			PC Unit	5	14.636.859,00	73.184.295,00		
			Scanner	6	6.122.148,00	36.732.888,00		
			AC Split	10	7.612.613,00	76.126.130,00		
			AC Split	4	9.459.460,00	37.837.840,00		
			Monitor	1	162.837.000,00	162.837.000,00		
			Lemari Kayu	6	4.000.000,00	24.000.000,00		
			UPS	1	39.006.000,00	39.006.000,00		
			Hard Disk	1	7.821.000,00	7.821.000,00		
			Camera Digital	1	15.000.000,00	15.000.000,00		
			Sice	1	28.000.000,00	28.000.000,00		
			Meja Kerja Kayu	2	2.250.000,00	4.500.000,00		
			Kursi Fiber	6	1.630.000,00	9.780.000,00		
			Lemari Besi / Metal	2	3.500.000,00	7.000.000,00		
			Televisi	1	13.000.000,00	13.000.000,00		
72	PN KAB. KEDIRI	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Ricoh Scansnap IX1600	3	10.200.000,00	30.600.000,00	39.800.000,00	NPH.NO: 773/BAST/KDI.II/BFSU/III/2024 & 164/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 27 Msret 2024
			Speaker JBL Partybox 310	1	9.200.000,00	9.200.000,00		

73	PN MAKASSAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP PN Makassar	1	250.109.000,00	250.109.000,00	250.109.000,00	NPH.NO: 010/BAST/MKS/FSU/VIII/2023 & W22.U1/5401/PL.01/8/2023 Tanggal: 22 Agustus 2023
74	PN SURAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	222.922.000,00	222.922.000,00	309.884.000,00	NPH.NO: 43C/PKS/SLO.II/FSU/VII/2024 & 335/SEK.PN/W12-U2/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 3 Juli 2024
			Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	86.962.000,00	86.962.000,00		
75	PN KALIANDA	PERALATAN DAN MESIN	SmartTV 4K 65 Inch	3	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	NPH.NO: 1109/BAST/BDL/FSU/VIII/2024 & 1413/SEK.PN.W9-U4/PL1.2.4/8/2024 Tanggal: 14 Agustus 2024
76	PN YOGYAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	2	9.999.000,00	19.998.000,00	28.047.000,00	NPH.NO: 154/HIBAH/YYK.II/VIII/2024 & 203/SEK.PN.W13-U1/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 1 Agustus 2024
			Televisi	1	4.309.000,00	4.309.000,00		
			UPS	2	1.065.000,00	2.130.000,00		
			Camera Conferenc e	1	1.610.000,00	1.610.000,00		
77	PN SUBANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	23.400.000,00	23.400.000,00	77.700.000,00	NPH.NO: 38/PWK.II/FSU/V2024 Tanggal: 27 Mei 2024
		PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	2	11.500.000,00	23.000.000,00		
			Printer	2	5.350.000,00	10.700.000,00		
			Lemari Besi / Metal	1	1.950.000,00	1.950.000,00		
			Lemari Besi / Metal	1	1.900.000,00	1.900.000,00		
			Filling Cabinet Besi	1	1.750.000,00	1.750.000,00		
			Lemari Besi / Metal	1	15.000.000,00	15.000.000,00		
78	PN SIMALUNGUN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi/Metal	8	1.700.000,00	13.600.000,00	132.720.000,00	NPH.NO: 466/SEK.PN.W2-U16/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 23 Juli 2024
			Kursi Besi/Metal	1	2.700.000,00	2.700.000,00		
			Kursi Besi/Metal	6	1.200.000,00	7.200.000,00		
			Kursi Besi/Metal	34	1.000.000,00	34.000.000,00		
			Bangku Panjang Besi / Metal	3	1.350.000,00	4.050.000,00		
			Sice	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
			Sice	2	2.000.000,00	4.000.000,00		
			Meja Kerja Kayu	1	3.500.000,00	3.500.000,00		
			Meja Kerja Kayu	10	2.250.000,00	22.500.000,00		
			Meja Kerja Kayu	5	1.200.000,00	6.000.000,00		

			Meja Kerja Kayu	12	1.000.000,00	12.000.000,00		
			Meja Rapat	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
			Lemari Besi / Metal	2	1.500.000,00	3.000.000,00		
			Printer	1	1.370.000,00	1.370.000,00		
			Printer	4	1.000.000,00	4.000.000,00		
			AC Split 1 PK	1	4.800.000,00	4.800.000,00		
79	PN WONOGIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri (Kanopi & Backdrop Ruang PTSP)	2	17.496.500,00	34.993.000,00	34.993.000,00	NPH.NO: 51A/PKS/SLO.II/FSU/VIII/2024 & 83/SEK.PN.W12-U29/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024
80	PN PONTIANAK	PERALATAN DAN MESIN	Logitech MeetUp Video	2	13.000.000,00	26.000.000,00	136.700.000,00	NPH.NO: 262/PTK/VII/2024 & 2291/SEK.PN.W17-U1/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 23 Juli 2024
			Printer Canon G2010	4	2.200.000,00	8.800.000,00		
			Scanner Canon R40	3	5.700.000,00	17.100.000,00		
			PC Unit Lenovo AIO 3 24ALC6	4	11.000.000,00	44.000.000,00		
			Televisi Sasmung 65 Inch UHD 4K	1	9.800.000,00	9.800.000,00		
			Televisi Samsung 55 Inch UHD 4K	2	8.000.000,00	16.000.000,00		
			Microphone Wireless Soundbest	2	3.000.000,00	6.000.000,00		
			Mic Wireless Sounbest Victory 2	2	2.000.000,00	4.000.000,00		
			Power Mix Flash-8	2	2.500.000,00	5.000.000,00		
81	PN RANGKAS BITUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Rangkas Bitung	02-May	2.887.000,00	28.870.000,00	28.870.000,00	NPH.NO: 1060/SEK.03/W29.U3/PL1.2.4/VIII/2024 & 148/PKS/CLG.II/FSU/VIII/2024 Tanggal: 1 Agustus 2024
82	PN KETAPANG	PERALATAN DAN MESIN	Alat Kantor Lainnya	1	8.500.000,00	8.500.000,00	105.843.708,00	NPH.NO: 121B/PTK/III/2024 & 1416/SEK.W17-U4/PL.01/III/2024 Tanggal: 25 Maret 2024
			Meja Kerja	1	4.500.000,00	4.500.000,00		
			Meja Kerja Kayu	1	1.850.000,00	1.850.000,00		
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Ketapang	2	15.686.000,00	31.372.000,00		
			Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1	54.001.708,00	54.001.708,00		
			Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	2	2.810.000,00	5.620.000,00		

83	PT BANTEN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedunga dan Bangunan Pengadilan Tinggi Banten	1	1.124.564.000,00	1.124.564.000,00	1.124.564.000,00	NPH.NO: 131/TGR.I/PKS/FSU/V/2024 & 1440/SEK.PT.W29-U/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 27 Mei 2024
84	PT BANTEN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi / Metal	24	4.551.000,00	109.224.000,00	231.768.000,00	NPH.NO: 132/TGR.I/PKS/FSU/VI/2024 & 1566/SEK.PT.W29-U/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 5 Juni 2024
			Meja Rapat	12	10.212.000,00	122.544.000,00		
85	PN PEMATANG SIANTAR	PERALATAN DAN MESIN	Portable Air Conditioner	3	24.534.000,00	73.602.000,00	73.602.000,00	NPH.NO: 2378/SEK.PN.W2-U2/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 27 Agustus 2024
86	PN KRAKSAAN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	2	9.700.000,00	19.400.000,00	410.783.250,00	NPH.NO: 137.1/SEK.PN.W14.U20/PL.04/I/2024 & 8A/PKS/SDA/FSU/I/2024 Tanggal: 19 Januari 2024
			AC Standing 5 PK	3	25.250.000,00	75.750.000,00		
			AC Standing 3 PK	3	22.500.000,00	67.500.000,00		
			Kursi Besi/Metal	10	550.000,00	5.500.000,00		
			Alat Kantor Lainnya	1	18.500.000,00	18.500.000,00		
			Camera Digital	1	8.500.000,00	8.500.000,00		
			Bracket Standing Peralatan	2	300.000,00	600.000,00		
			Proyektor Spider Bracket	2	275.000,00	550.000,00		
			Lemari Kayu	4	2.725.000,00	10.900.000,00		
			Lemari Kayu	4	1.900.000,00	7.600.000,00		
			Lemari Besi/Metal	3	2.725.000,00	8.175.000,00		
			Camera Digital	1	13.600.000,00	13.600.000,00		
			Lemari Besi/Metal	6	1.650.000,00	9.900.000,00		
			Meja Kerja Kayu	2	6.500.000,00	13.000.000,00		
			Kursi Besi/Metal	10	2.100.000,00	21.000.000,00		
			Lap Top	3	7.050.000,00	21.150.000,00		
			Printer	8	2.600.000,00	20.800.000,00		
			Televisi	2	7.925.000,00	15.850.000,00		
			P.C Unit	3	10.600.000,00	31.800.000,00		
			PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	11	40.708.250,00	40.708.250,00		
87	PN KAB. KEDIRI	PERALATAN DAN MESIN	Laptop HP 14-E0019TU i7	1	11.800.000,00	11.800.000,00	35.850.000,00	NPH.NO: 83/PKS/KDI.II/VII/2024 & 1570/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 17 Juli 2024
			Laptop HP 14-E0033AU AMD-R9	1	6.500.000,00	6.500.000,00		
			Televisi Aqua 43 Inch	4	3.500.000,00	14.000.000,00		

			Televisi Aqua 43 Inch	1	3.550.000,00	3.550.000,00		
88	PN SERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Serang	15-Sep	1.500.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	NPH.NO: 165/Clg.II/XII/2023 & 5620/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: **29 Desember 2023**
89	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Besi / Metal	10	3.500.000,00	35.000.000,00	41.300.000,00	NPH.NO: 608/NPH/FSU/CKR.I/VII/2024 & 1843/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 24 Juli 2024
			Televisi 55 Inch	1	6.300.000,00	6.300.000,00		
90	PN LIMBOTO	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit Lenovo AIO Core i3	4	9.550.000,00	38.200.000,00	66.434.000,00	NPH.NO: 401/SEK/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024
			Printer Epson L3210	2	2.950.000,00	5.900.000,00		
			AC Split Daikin 2 PK	2	11.167.000,00	22.334.000,00		
91	PN PRABUMULIH	PERALATAN DAN MESIN	AC Standing Polytron 3 PK	3	12.016.667,00	36.050.000,00	58.986.000,00	NPH.NO: 14/PKS/PLB/IV/2024 & 361/KPN.W6-U8/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 18 April 2024
			AC Split Polytron 2 PK	2	5.830.000,00	11.660.000,00		
			Kulkas	1	1.650.000,00	1.650.000,00		
			Televisi Samsung 43 Inch	1	4.278.000,00	4.278.000,00		
			Televisi Samsung 50 Inch	1	5.348.000,00	5.348.000,00		
92	PN SAMARINDA	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Petugas PTSP	13	1.359.000,00	17.667.000,00	65.467.050,00	NPH.NO: 320/BAST/SMR/FSU/IX/2024 & 393/SEK.PN.W18-U/PL1.2.4/IX/2024 Tanggal: 2 September 2024
			Kursi Pimpinan Rapat	2	2.259.000,00	4.518.000,00		
			Kursi Rapat	16	1.359.000,00	21.744.000,00		
			Meja Pelayanan InformasiPTSP	1	999.000,00	999.000,00		
			Televisi	1	14.249.050,00	14.249.050,00		
			Televisi	1	4.190.000,00	4.190.000,00		
			Standing Bracket TV	1	2.100.000,00	2.100.000,00		
93	PN BALIKPAPAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit Core i3	3	8.290.000,00	24.870.000,00	90.168.000,00	NPH.NO: 428/SEK.PN.W18-U2/PL1.2.4/VIII/2024 & 147/NPH-BTN/BLP.III/FSU/VIII/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024
			Printer Canon G2730	2	2.500.000,00	5.000.000,00		
			Printer Canon G3730	2	2.950.000,00	5.900.000,00		
			Scanner Fujitsu	1	8.000.000,00	8.000.000,00		
			Logitech WebCam	1	3.400.000,00	3.400.000,00		
			Handphone Realme C63	2	1.999.000,00	3.998.000,00		
			Rak Arsip	3	13.000.000,00	39.000.000,00		
94	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 0,5 PK	1	3.000.000,00	3.000.000,00	87.900.000,00	

			AC Split 1,5 PK	1	6.500.000,00	6.500.000,00		NPH.NO: 837/SEK/W11.U7/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 1 Juli 2024
			AC Split 1 PK	2	5.550.000,00	11.100.000,00		
			Printer Brother DCP-T420W	2	2.900.000,00	5.800.000,00		
			Laptop Lenovo Core i3	1	9.000.000,00	9.000.000,00		
			Televisi Samsuing 50 Inch	1	5.400.000,00	5.400.000,00		
			Kursi Besi	12	2.450.000,00	29.400.000,00		
			Bracket Standing	1	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Jam Listrik	1	1.400.000,00	1.400.000,00		
			Camera Conferenc e Jete	1	5.500.000,00	5.500.000,00		
			Kipas Angin	1	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Camera Conferenc e Logitech	1	6.500.000,00	6.500.000,00		
			Teko Listrik	1	1.300.000,00	1.300.000,00		
95	PN SANGGAU	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 1 PK	3	3.850.000,00	11.550.000,00	23.550.000,00	NPH.NO: 304/PTK/VIII/2024 & 491.a/SEK/HM2.1.2/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024
			Televisi Polytron 43 Inch	2	3.600.000,00	7.200.000,00		
			Sofa Tamu	1	4.800.000,00	4.800.000,00		
96	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	1	4.350.000,00	4.350.000,00	7.500.000,00	NPH.NO: 62/PKS/BWI.III/FSU/VIII/2024 & 2283/SEK.PN.W14-U16/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 9 Agustus 2024
			Printer	2	1.575.000,00	3.150.000,00		
97	PN MEMPAWAH	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	1	13.690.000,00	13.690.000,00	203.210.000,00	NPH.NO: 207/PTK/VI/2024 & W17-U5/1788/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 4 Maret 2024
			Meja Kerja Kayu	3	4.440.000,00	13.320.000,00		
			AC Split	5	9.000.000,00	45.000.000,00		
			Sice	1	25.000.000,00	25.000.000,00		
			Printer	7	2.600.000,00	18.200.000,00		
			Sound System	1	20.000.000,00	20.000.000,00		
			Televisi	2	9.000.000,00	18.000.000,00		
			Perlatan Komputer Lainnya	1	50.000.000,00	50.000.000,00		
98	PN BANDUNG	JASA	Pembayar an Jasa Tenaga Kebersiha n Outsourcin g di PN Bandung	01-Oct	4.199.685,00	41.996.850,00	41.996.850,00	NPH.NO: 2228/SEK.W11-U1/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 16 Mei 2024
99	PN SLEMAN	PERALATAN DAN MESIN	Printer	2	4.600.000,00	9.200.000,00	17.950.000,00	NPH.NO: 195/HIBAH/YYK.II/IX/2024 & 2606/SEK.PN.W13-U2/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 1 Oktober 2024
			Scanner	1	8.750.000,00	8.750.000,00		

100	PN JAKARTA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Portable Air Conditioner	2	36.699.000,00	73.398.000,00	129.523.000,00	NPH.NO: 3542/NPH/KGS/VII/2024 & 5955/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 5 Juli 2024
			AC Split	1	12.133.000,00	12.133.000,00		
			Kipas Angin	8	5.499.000,00	43.992.000,00		
101	PN BEKASI	PERALATAN DAN MESIN	Rak Arsip Siku	10	1.500.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/X/2023 & 5603/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **2 Oktober 2023**
			Lemari Arsip Besi	10	7.000.000,00	70.000.000,00		
			Vertical Blind Jendela	50	300.000,00	15.000.000,00		
			Partisi Ecourt Corner, Pos	1	10.000.000,00	10.000.000,00		
			Running Text/Signage, Papan Petunjuk PTSP	1	10.000.000,00	10.000.000,00		
			Neon Box 2m	1	10.000.000,00	10.000.000,00		
			Guiding Block Tactile	50	400.000,00	20.000.000,00		
102	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Fasad Ruang PTSP	1	20.000.000,00	20.000.000,00	230.000.000,00	NPH.NO: 32/NPH/BKS.I/FSU/IX/2023 & 4475/W11.U5/UM.00.1/IX/2023 Tanggal: **1 September 2023**
			Renovasi Ruang Tahanan menjadi Ruang Arsip	2	5.000.000,00	10.000.000,00		
			Pembuatan Sumur Dalam	1	150.000.000,00	150.000.000,00		
			Pemindahan Tiang Listrik	2	25.000.000,00	50.000.000,00		
103	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi	2	121.961.514,00	243.923.027,00	243.923.027,00	NPH.NO: 27/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 625/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: **26 Desember 2022**
104	PN JAKARTA BARAT	PERALATAN DAN MESIN	Server	1	138.755.800,00	138.755.800,00	138.755.800,00	NPH.NO: 5032/SEK.W10-U2/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 7 Agustus 2024
105	PN PEKANBARU	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson DS-770II	5	11.850.000,00	59.250.000,00	77.250.000,00	NPH.NO: 19/PKS/PKB/IX/2024 & 0579/SEK.PN.W4.U1/UM.01.10/IX/2024 Tanggal: 30 September 2024
			Scanner Epson DS-530	1	9.000.000,00	9.000.000,00		
			AC Split Daikin 1 PK	1	4.600.000,00	4.600.000,00		
			Meja Kerja	1	1.200.000,00	1.200.000,00		
			Kursi Hadap	4	800.000,00	3.200.000,00		
106	PN PURBALINGGA	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Besi / Metal	2	2.600.000,00	5.200.000,00	7.788.000,00	NPH.NO: 31/PKS/PWK/FSU/IX/2024 & 1348/SEK.PN.W12-U25/PL1.2.4/IX/2024 Tanggal: 17 September 2024
			Kipas Angin 20 Inch	1	1.499.000,00	1.499.000,00		
			Kipas Angin 16 Inch	1	1.089.000,00	1.089.000,00		

107	PN JAKARTA SELATAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	20	26.000.000,00	520.000.000,00	739.249.000,00	NPH.NO: 1456/M/JKK.I/FSU/X/2024 & 1075/SEK.W10-U3/PL1.2.3/X2024 Tanggal: 14 Oktober 2024
			Harddisk External	1	4.749.000,00	4.749.000,00		
			Hub	1	10.926.000,00	10.926.000,00		
			CCTV	1	100.000.000,00	100.000.000,00		
			Alat Studio Lainnya	6	2.679.000,00	16.074.000,00		
			AC Split 2 PK	7	12.500.000,00	87.500.000,00		
108	PN KAB. KEDIRI	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	1	5.000.000,00	5.000.000,00	49.900.000,00	NPH.NO: 85/PKS/KDI.II/VII/2024 & 1679/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 29 Juli 2024
			Meja Kerja Kayu	6	2.500.000,00	15.000.000,00		
			Kursi Besi / Metal	1	2.900.000,00	2.900.000,00		
			Kulkas Sharp	1	3.600.000,00	3.600.000,00		
			Lemari Besi	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
			Scanner Ricoh Scansnap IX1600	2	10.200.000,00	20.400.000,00		
109	PN BEKASI	JASA	**Persiapan Alat dan Pekerja:** Forklift, Hand Lift, Takel, Control, Hand Staker	1	15.000.000,00	15.000.000,00	155.000.000,00	NPH.NO: 48/NPH/BKS.I/FSU/X/2023 & 5604/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **20 Oktober 2023**
			Pembongkaran dan Pemasangan: AC, Furnitur, Peralatan Elektronik, Gudang Arsip, Ruang Server, CCTV, dan Jaringan Kabel	1	120.000.000,00	120.000.000,00		
			Pengemasan: Peralatan Elektronik, Arsip, Barang Pecah Belah, dan Furnitur	1	14.000.000,00	14.000.000,00		
			Pengangkutan: Barang ke Gedung Baru	1	6.000.000,00	6.000.000,00		
110	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	1	10.000.000,00	10.000.000,00	43.100.000,00	NPH.NO: 156A/CRB/FSU/IX/2024 & 1209A/SEK.PN.W11-U14/PL1.2.3/IX/2024 Tanggal: 2 September 2024
			Kursi Besi / Metal	4	1.000.000,00	4.000.000,00		
			Kursi Kayu	3	3.000.000,00	9.000.000,00		
			AC Split 2 PK	3	6.700.000,00	20.100.000,00		
111	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Tamu Ketua Pengadilan	1	152.079.070,00	152.079.070,00	300.000.000,00	NPH.NO: 21A/NPH/BKS.I/FSU/VIII/2024 & 3881/SEK.W11-U/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 1 Agustus 2024
			Perbaikan Ruang Istirahat Ketua Pengadilan	1	26.639.290,00	26.639.290,00		

			Pengecetan Pagar Depan dan Pagar Belakang Kantor	1	60.322.350,00	60.322.350,00		
			Perbaikan dan Penambahan Instalasi Listrik	1	60.959.290,00	60.959.290,00		
112	PT JAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta	1	299.988.600,00	299.988.600,00	299.988.600,00	NPH.NO: 4378/NPH/KGS/VIII/2024 & 6334/KPT.W10-U/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 20 Agustus 2024
113	PN SERANG	PERALATAN DAN MESIN	Laptop MSI	3	32.300.000,00	96.900.000,00	331.350.000,00	NPH.NO: 203/Clg.II/X/2024 & 3860/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 29 Oktober 2024
			Mesin Potong Rumput	1	7.500.000,00	7.500.000,00		
			Tangga Bafen	1	7.800.000,00	7.800.000,00		
			Partisi	4	8.232.000,00	32.928.000,00		
			Partisi	1	6.431.250,00	6.431.250,00		
			Partisi	1	4.373.250,00	4.373.250,00		
			Partisi	1	3.601.500,00	3.601.500,00		
			Partisi	2	2.058.000,00	4.116.000,00		
			Meja Kerja Kayu	1	6.000.000,00	6.000.000,00		
			Meja Kerja Kayu	1	5.500.000,00	5.500.000,00		
			Meja Resepsionis	1	16.200.000,00	16.200.000,00		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000,00	30.000.000,00		
			Televisi LG dan Samsung	3	9.000.000,00	27.000.000,00		
			Kursi Besi / Metal	3	2.000.000,00	6.000.000,00		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000,00	30.000.000,00		
			Dispenser	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
			Printer Epson	12	3.500.000,00	42.000.000,00		
114	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit AIO	3	12.750.000,00	38.250.000,00	47.400.000,00	NPH.NO: 1457/Sek/W11.U7/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 1 Oktober 2024
			Printer	1	2.900.000,00	2.900.000,00		
			Bangku Panjang Besi / Metal	1	1.750.000,00	1.750.000,00		
			Lemari Besi	1	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Kipas Angin	2	800.000,00	1.600.000,00		
			Jam Listrik	1	1.400.000,00	1.400.000,00		
115	PN BEKASI	PERALATAN DAN MESIN	Tempat Tidur King Size	1	10.050.000,00	10.050.000,00	129.492.500,00	NPH.NO: 40/NPH/BKS.I/FSU/VII/2023 & 4548/W11.U5/UM.00.1/VII/2023 Tanggal: **3 Juli 2023**
			Tempat Tidur King Size	1	5.850.000,00	5.850.000,00		
			Tempat Tidur Sorong	3	5.500.000,00	16.500.000,00		
			Lemari 3 Pintu	1	5.700.000,00	5.700.000,00		

			Lemari 2 Pintu Kayu	1	4.350.000,00	4.350.000,00		
			Lemari 2 Pintu	2	2.850.000,00	5.700.000,00		
			Lemari	1	3.200.000,00	3.200.000,00		
			Meja Makan 6 Seat Oval	1	8.500.000,00	8.500.000,00		
			Meja 2 Seat	2	2.850.000,00	5.700.000,00		
			Meja Makan 4 Seat	1	7.500.000,00	7.500.000,00		
			Meja Makan 4 Seat	1	5.700.000,00	5.700.000,00		
			Sofa	1	7.500.000,00	7.500.000,00		
			AC Split 1 PK	2	6.750.000,00	13.500.000,00		
			AC Split 1 PK	2	6.450.000,00	12.900.000,00		
			Kulkas 2 Pintu	2	4.125.000,00	8.250.000,00		
			Mesin Cuci	1	3.500.000,00	3.500.000,00		
			Printer	1	3.150.000,00	3.150.000,00		
			Exhaust Fan	1	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Kipas Angin Standing	1	442.500,00	442.500,00		
116	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit AIO	7	19.075.000,00	133.525.000,00	133.525.000,00	NPH.NO: 1831/BDT/VII/2024 & 1072.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
117	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	6	6.900.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	NPH.NO: 1827/BDT/VII/2024 & 1070.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
118	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi / Metal	15	10.606.306,00	159.094.590,00	159.094.590,00	NPH.NO: 1839/BDT/VII/2024 & 1076.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
119	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Laptop	6	17.955.000,00	107.730.000,00	107.730.000,00	NPH.NO: 1829/BDT/VII/2024 & 1071.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
120	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Loudspeaker	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	NPH.NO: 1833/BDT/VII/2024 & 1073.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024

121	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Vertikal Blind	200	599.400,00	119.880.000,00	119.880.000,00	NPH.NO: 1837/BDT/VII/2024 & 1075.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
122	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Printer	10	2.835.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	NPH.NO: 1835/BDT/VII/2024 & 1074.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
123	PN KOTA TIMIKA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	3	13.320.000,00	39.960.000,00	84.582.000,00	NPH.NO: 567/SEK.W30.U7/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 5 Agustus 2024
			AC Standing	1	41.070.000,00	41.070.000,00		
			Rak Besi	2	1.776.000,00	3.552.000,00		
124	PN BANGIL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gapura Pintu Masuk Area Tunggu Sidang dan Kanopi Area Merokok	25	1.060.000,00	26.500.000,00	76.500.000,00	NPH.NO: 99/SDA/BAST/VII/2024 & 1940/SEK.PN.W14-U21/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
			Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Musholla PN Bangil)	40	1.250.000,00	50.000.000,00		
125	PN STABAT	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	1	8.000.000,00	8.000.000,00	60.000.000,00	NPH.NO: 18/BAST/MDN/FSU/X/2024 & 5985/SEK.W2-U15/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 24 Oktober 2024
			AC Split 1 PK	5	4.000.000,00	20.000.000,00		
			Printer	5	900.000,00	4.500.000,00		
			Printer	1	4.500.000,00	4.500.000,00		
			Televisi 43 Inch	1	2.500.000,00	2.500.000,00		
			Televisi 50 Inch	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
			UPS	1	4.500.000,00	4.500.000,00		
			PC Unit	1	11.000.000,00	11.000.000,00		
126	PN JAKARTA TIMUR	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Jakarta Timur	06-Nov	2.500.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	NPH.NO: 18A/NPH/BKS.I/FSU/IV/2024 & 4900A/SEK.W10-U5/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 25 April 2024
127	PN KUPANG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner iScan 900 DPI	1	2.835.200,00	2.835.200,00	17.858.200,00	NPH.NO: 4455/KPN.W26-U1/PL1.2.4/X/2024 & 977/KPG.III/FSU/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
			Layar Proyektor Otomatis	1	2.144.600,00	2.144.600,00		
			Televisi Coocaa 50 Inch	3	4.292.800,00	12.878.400,00		

128	PN TANGERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Tangerang (Satpam 8 Orang ; Pramubakti 10 Orang ; Supir 2 Orang)	20-Dec	4.187.000,00	1.004.880.000,00	1.004.880.000,00	NPH.NO: 261/TGR.I/PKS/FSU/IX/2024 Tanggal: 22 Juli 2024
129	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Lensa Kamera	1	13.000.000,00	13.000.000,00	1.016.150.000,00	NPH.NO: 263/TGR.I/PKS/FSU/IX/2024 Tanggal: 9 September 2024
			Laptop	1	30.000.000,00	30.000.000,00		
			PC Unit	1	21.000.000,00	21.000.000,00		
			Scanner	4	12.000.000,00	48.000.000,00		
			Scanner	1	79.000.000,00	79.000.000,00		
			NAS (Network Attached Storage)	1	100.000.000,00	100.000.000,00		
			Software Aplikasi Digital Arsip	1	250.000.000,00	250.000.000,00		
			Hub	3	25.000.000,00	75.000.000,00		
			Hub	1	6.000.000,00	6.000.000,00		
			Hub	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
			Router	1	1.675.000,00	1.675.000,00		
			CCTV	35	4.585.000,00	160.475.000,00		
			Televisi	2	8.000.000,00	16.000.000,00		
			Mixer Sound System	5	10.600.000,00	53.000.000,00		
			Loudspeaker	10	12.500.000,00	125.000.000,00		
			VTR Recorder	1	35.000.000,00	35.000.000,00		
130	PN UNGARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Aula	100	707.030,00	70.703.000,00	80.000.000,00	NPH.NO: 068/NPH/SMG/BFSU/XI/2024 & 2698/SEK.PN.W12.U18/UM.01/XI/2024 Tanggal: 1 November 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	2	2.948.500,00	5.897.000,00		
			Focusing Screen/ Layar LCD Projector	1	3.400.000,00	3.400.000,00		
131	PN KARAWANG	JASA	Jasa Renovasi Ruang Tahanan	1	15.100.000,00	15.100.000,00	17.950.000,00	NPH.NO: 4844/KRW.I/BFSU/X/2024 & 2260/SEK.W11-U10/PL1.1.3/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
			Jasa Renovasi Ruang Kantin	1	2.850.000,00	2.850.000,00		
132	PN KARAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Karawang	1	1.667.585.655,00	1.667.585.655,00	2.707.050.000,00	NPH.NO: 4483/KRW.I/BFSU/X/2024 & 2258/SEK.W11-U10/PL1.1.3/X/2024 Tanggal: 18 Oktober 2024
			Renovasi Gedung Arsip Pengadilan Negeri Karawang	1	81.345.000,00	81.345.000,00		

			Renovasi Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Musholla PN Karawang	1	28.372.500,00	28.372.500,00		
		PERALATAN DAN MESIN	Video Wall	2	72.273.387,00	144.546.774,00		
			LCD Monitor	2	29.380.000,00	58.760.000,00		
			Komputer Alat Bantu Difabel	1	85.919.550,00	85.919.550,00		
			Server	1	54.675.585,00	54.675.585,00		
			Scanner	1	10.283.000,00	10.283.000,00		
			PC Unit	10	12.543.000,00	125.430.000,00		
			Printer	12	4.474.800,00	53.697.600,00		
			PC Unit	8	11.356.500,00	90.852.000,00		
			PC Unit	1	12.091.000,00	12.091.000,00		
			Printer	1	4.514.350,00	4.514.350,00		
			Kursi Besi / Metal	26	2.479.468,00	64.466.168,00		
			Kursi Besi / Metal	54	2.036.508,00	109.971.432,00		
			Bunga Plastik	17	312.298,00	5.309.066,00		
			Kursi Besi / Metal	16	4.518.870,00	72.301.920,00		
			Lampu	2	12.995.000,00	25.990.000,00		
			Sice	1	10.938.400,00	10.938.400,00		
133	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Panasonic 1,5 PK	1	7.417.500,00	7.417.500,00	16.208.750,00	NPH.NO: 2628/SEK.PN.W13-U3/PL1.2.4/XI/2024 & 235/BAST/YYK/XI/2024 Tanggal: 5 November 2024
			AC Split Panasonic 2 PK	1	8.791.250,00	8.791.250,00		
134	PN PRABUMULIH	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	1	4.740.000,00	4.740.000,00	21.014.241,00	NPH.NO: 1186/SEK.PN.W6.U8/HM2.1/XI/2024 & 71/PKS/PLB/XI/2024 Tanggal: 1 November 2024
			Smart Lock	3	388.700,00	1.166.100,00		
			Digimedia CCTV Outdoor	7	256.866,00	1.798.062,00		
			Digimedia Smart Indoor	1	294.400,00	294.400,00		
			Printer Epson	2	2.415.391,00	4.830.782,00		
			Kursi Bar Hidrolik	1	335.100,00	335.100,00		
			Sofa	1	2.461.700,00	2.461.700,00		
			AC Split Polytron 0,5 PK	1	3.400.000,00	3.400.000,00		
			Lemari Loker 18 Pintu	1	1.988.100,00	1.988.100,00		
135	PN BEKASI	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	4	7.004.100,00	28.016.400,00	50.771.400,00	NPH.NO: 44A/NPH/BKS.I/FSU/X/2024 & 4380/SEK.PN.W11.U5/KU.01/XI/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
			Printer	3	2.775.000,00	8.325.000,00		
			Printer	2	2.775.000,00	5.550.000,00		
			RAM Server	2	4.440.000,00	8.880.000,00		

136	PN SERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Serang	17-Dec	1.750.000,00	357.000.000,00	357.000.000,00	NPH.NO: 219/Clg.II/XII/2024 & 4373/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 3 Desember 2024
137	PN BEKASI	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Bekasi	14-Aug	3.907.165,00	437.602.480,00	957.926.208,00	NPH.NO: 16A/NPH/BKS.I/FSU/VI/2024 & 4382/SEK.W11.U5/KU.01/XI/2024 Tanggal: 14 Juni 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Outsourcing di PN Bekasi	14-Aug	3.999.574,00	447.952.288,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Pengemudi Outsourcing di PN Bekasi	02-Aug	4.523.215,00	72.371.440,00		
138	PT BANDUNG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split	2	8.075.000,00	16.150.000,00	150.000.000,00	NPH.NO: 4460A/KRW.I/BFSU/IX/2024 & 6598/SEK.PT.W11-U/PL1.2.4/10/2024 Tanggal: 26 September 2024
			PC Unit	4	9.989.000,00	39.956.000,00		
			Printer	3	2.600.000,00	7.800.000,00		
			Laptop	1	9.000.000,00	9.000.000,00		
			Scanner	3	6.238.000,00	18.714.000,00		
			Filling Cabinet Besi	3	3.150.000,00	9.450.000,00		
			Meja Kerja Kayu	2	10.345.000,00	20.690.000,00		
			Meja Kerja Kayu	1	7.947.000,00	7.947.000,00		
			Kursi Besi / Metal	3	4.381.000,00	13.143.000,00		
			Rak Besi	2	1.400.000,00	2.800.000,00		
			Alat Penghancur Kertas	1	4.350.000,00	4.350.000,00		
139	PN SLEMAN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 0,5 PK	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	NPH.NO: 251/NPH/YYK/XII/2024 & 3196/SEK.PN.W13-U2/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 2 Desember 2024
140	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Majelis Hakim	8	2.032.125,00	16.257.000,00	16.257.000,00	NPH.NO: 2115/BDT/BFSU/VII/2024 & 1078.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
141	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Filling Cabinet	6	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	NPH.NO: 2117/BDT/BFSU/VII/2024 & 1080.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024

142	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Ruang Kerja Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang	1	239.600.000,00	239.600.000,00	239.600.000,00	NPH.NO: 2114/BDT/BFSU/VII/24 & 1077.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
143	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang Anak pada Pengadilan Negeri Sumedang	1	97.730.500,00	97.730.500,00	97.730.500,00	NPH.NO: 2116/BDT/BFSU/VII/24 & 1079.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
144	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Pegawai	6	5.566.667,00	33.400.002,00	33.400.002,00	NPH.NO: 2118/BDT/BFSU/VII/2024 & 1081.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
145	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Videowall	1	342.957.482,00	342.957.482,00	342.957.482,00	NPH.NO: 2288/BDT/BFSU/VII/24 & 1082.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
146	PN KENDAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP, Ruang Kerja Ketua dan Toilet	1	507.867.180,00	507.867.180,00	507.867.180,00	NPH.NO: 46/NPH/SMG/BFSU/X/2024 & 323/SEK.W12-U22/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 3 Oktober 2024
147	PN KENDAL	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	2	8.880.000,00	17.760.000,00	160.506.000,00	NPH.NO: 45/NPH/SMG/BFSU/X/2024 & 322/SEK.W12-U22/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 3 Oktober 2024
			Kursi Kerja Kayu	2	4.440.000,00	8.880.000,00		
			PC Unit	6	16.650.000,00	99.900.000,00		
			Printer	6	2.053.500,00	12.321.000,00		
			Scanner	3	7.215.000,00	21.645.000,00		
148	PN KENDAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi PTSP pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kendal	1	66.035.400,00	66.035.400,00	66.035.400,00	NPH.NO: 069/NPH/SMG/BFSU/XI/2024 & 372/SEK.W12-U22/PL1.2.4/XI/2024 Tanggal: 4 November 2024
149	PN SANGGAU	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	1	5.499.000,00	5.499.000,00	7.799.000,00	NPH.NO: 470/PTK/XI/2024 & 732/SEK.W17-U6/PL1.2.4/XI/2024 Tanggal: 26 November 2024
			Printer	1	2.300.000,00	2.300.000,00		
150	PN KAB. MALANG (KEPANJEN)	PERALATAN DAN MESIN	Speaker Active	1	5.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	NPH.NO: 11/PKS/M.L.G II/FSU/III/2024 & 3486/SEK.PN.W.14-U.35/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 2 Juli 2024
			PC AIO	2	15.000.000,00	30.000.000,00		
			Kursi Besi/Metal	15	300.000,00	4.500.000,00		
			Kursi Besi/Metal	20	600.000,00	12.000.000,00		

			Microphone/Wireless Mic	1	1.000.000,00	1.000.000,00		
			Microphone/Wireless Mic	2	1.000.000,00	2.000.000,00		
			Televisi	1	5.500.000,00	5.500.000,00		
151	PN BALIGE	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Paving Blok Halaman Gedung Kantor PN Balige	1	322.202.000,00	322.202.000,00	322.202.000,00	NPH.NO: 52/PKS/STR/BFSU/VI/2024 & 1154/PKS/SEK.PN.W2.U18/PL.6/VI/2024 Tanggal: 3 Juni 2024
152	PN CIBINONG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	15-Jun	3.659.596,00	329.363.640,00	723.298.405,00	NPH.NO: 002/PKS/CBN.III/FSU/I/2024 & 5974/SEK.PN.W11-U20/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 15 Januari 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	16-Jan	3.511.955,00	56.191.285,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	18-May	3.752.705,00	337.743.480,00		
153	PN KARAWANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Pramubakti Outsourcing di PN Karawang	Oct-13	2.500.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	NPH.NO: 5678/KRW.I/BFSU/XII/2024 & 2668/SEK.W11-U10/PL1.1.3/XII/2024 Tanggal: 6 Desember 2024
154	PN BATANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Batang	05-Dec	1.600.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	NPH.NO: 262/PKS/PKL.II/FSU/X/2024 & 2047/SEK.W12-U33/UM.03/10/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024
155	PN BEKASI	JASA	Pembayaran Kegiatan Character Building	1	456.842.700,00	456.842.700,00	456.842.700,00	NPH.NO: 25/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 192/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: **12 Desember 2022**
156	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penyambungan Kembali Listrik Kantor Baru PN Bekasi	1	186.158.454,00	186.158.454,00	186.158.454,00	NPH.NO: 42/NPH/BKS.I/FSU/VI/2023 & 5599/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **26 Juni 2023**
157	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembongakaran dan Pemagaran Rumah Dinas Pengadilan Negeri Bekasi	1	55.268.920,00	55.268.920,00	55.268.920,00	NPH.NO: 36/NPH/BKS.I/FSU/I/2023 & 5595/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **2 Januari 2023**

158	PN KENDAL	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan dan Satpam Outsourcing di PN Kendal	06-Dec	2.400.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	NPH.NO: 05/NPH/SMG/BFSU/I/2024 & 115/SEK.W12-U22/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 25 Januari 2024
159	PN SINGKAWANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	3	9.600.000,00	28.800.000,00	50.000.000,00	NPH.NO: 482/PTK/XII/2024 & W17-U2/2581/KU.06/12/2024 Tanggal: 2 Desember 2024
			Printer	4	2.800.000,00	11.200.000,00		
			Camera Digital	1	10.000.000,00	10.000.000,00		
160	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja PP	32	4.207.500,00	134.640.000,00	356.043.600,00	NPH.NO: 284/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/15/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 23 Februari 2024
			Lemari PP	10	5.940.000,00	59.400.000,00		
			Kursi Kerja PP	32	3.960.000,00	126.720.000,00		
			PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	11	35.283.600,00	35.283.600,00		
161	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Pengadaan Perangkat Server	1	95.948.400,00	95.948.400,00	95.948.400,00	NPH.NO: 107/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/06/BTN.01.10/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
162	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Rak Arsip Custom	11	14.208.000,00	156.288.000,00	226.795.200,00	NPH.NO: 82/M/JKK.I.2024 & W11.U21/04/BTN.01.10/I/2024 Tanggal: 16 Januari 2024
			Rak Arsip Custom	4	17.626.800,00	70.507.200,00		
163	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja	3	6.217.475,00	18.652.425,00	96.158.441,00	NPH.NO: 395/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/11/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 2 Februari 2024
			Meja Kerja	1	6.382.500,00	6.382.500,00		
			Kursi Kerja	4	3.127.425,00	12.509.700,00		
			Buffet	1	14.176.043,00	14.176.043,00		
			PC Unit	2	18.753.827,00	37.507.654,00		
			Monitor LED	1	4.038.846,00	4.038.846,00		
			Printer Epson L3210	1	2.891.273,00	2.891.273,00		
164	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gapura Kanopi Gerbang Utama Pengadilan Negeri Depok	1	186.480.000,00	186.480.000,00	186.480.000,00	NPH.NO: 482/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/24/BTN.01.10/IV/2024 Tanggal: 1 April 2024
165	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembuatan Ruang Serbaguna (Lounge) Pengadilan Negeri Depok	1	336.487.557,00	336.487.557,00	336.487.557,00	NPH.NO: 682/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/28/BTN.01.10/V/2024 Tanggal: 20 Mei 2024
166	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan PTSP Virtual & Drive Thru Pengadilan Negeri Depok	1	476.224.379,00	476.224.379,00	476.224.379,00	NPH.NO: 86/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/03/BTN.01.10/I/2024 Tanggal: 18 Januari 2024
167	PN JAKARTA SELATAN	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	1	80.000.000,00	80.000.000,00	184.455.000,00	NPH.NO: 1627/M/JKK.I/FSU/XI/2024 & 1155/SEK.W10-U3/PL1.2.3/XI/2024 Tanggal: 8 November 2024
			Rak Besi	45	2.000.000,00	90.000.000,00		

			Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.000.000,00	1.000.000,00		
			Kursi Besi / Metal	9	1.495.000,00	13.455.000,00		
168	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Pos Jaga Permanen	1	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	NPH.NO: 2521/BDT/BFSU/X/2024 & 1515.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
169	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Motor	1	169.230.000,00	169.230.000,00	169.230.000,00	NPH.NO: 2516/BDT/BFSU/X/2024 & 1510.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
170	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Mobil	1	317.826.300,00	317.826.300,00	317.826.300,00	NPH.NO: 2519/BDT/BFSU/X/2024 & 1513.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
171	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pintu Pagar Area Muka Pengadilan Negeri Sumedang	1	311.256.625,00	311.256.625,00	311.256.625,00	NPH.NO: 2523/BDT/BFSU/X/2024 & 1517.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
172	PN CIBINONG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	19-Dec	3.726.598,00	849.664.260,00	849.664.260,00	NPH.NO: 007/PKS/CBN.III/FSU/I/2024 & 310a/SEK.PN.W11-U20/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 15 Januari 2024
173	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Ruang PTSP Pengadilan Negeri Depok	1	177.584.377,00	177.584.377,00	177.584.377,00	NPH.NO: 109/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/08/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 23 Januari 2024
174	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Sofa	1	28.830.000,00	28.830.000,00	84.501.297,00	NPH.NO: 14/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/02/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 4 Januari 2024
			Tabung APAR	15	3.153.153,00	47.297.295,00		
			PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	11	8.374.002,00	8.374.002,00		
175	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Coffe Table	1	16.400.000,00	16.400.000,00	87.201.600,00	NPH.NO: 447/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/20/BTN.01.10/III/2024 Tanggal: 27 Maret 2024
			Meja Café Kotak	3	693.333,00	2.080.000,00		
			Kursi Café	6	693.333,00	4.160.000,00		
			Kursi Standar	8	2.560.000,00	20.480.000,00		
			Meja Bulat	2	4.000.000,00	8.000.000,00		
			Meja Panjang	1	16.400.000,00	16.400.000,00		
			Kipas Angin	2	5.520.000,00	11.040.000,00		

			PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	11	8.641.600,00	8.641.600,00		
176	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Kanopi Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Depok	1	177.955.200,00	177.955.200,00	177.955.200,00	NPH.NO: 1756/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/79/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **8 Desember 2023**
177	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Dak Belakang Gedung Kantor Pengadilan Negeri Depok	1	292.722.025,00	292.722.025,00	292.722.025,00	NPH.NO: 1873/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/85/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **21 Desember 2023**
178	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembayaran Pengerjaan Canopy	1	39.588.705,00	39.588.705,00	39.588.705,00	NPH.NO: 1673/M/JKK.I/FSU/XI/2023 & W11.U21/76/BTN.01.10/XI/2023 Tanggal: **30 November 2023**
179	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Pagar pada Pengadilan Negeri Depok	1	356.938.038,00	356.938.038,00	356.938.038,00	NPH.NO: 1836/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/83/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **21 Desember 2023**
180	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Pemasangan Atap Baja Ringan Pengadilan Negeri Depok	1	646.298.077,00	646.298.077,00	646.298.077,00	NPH.NO: 1824/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/81/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **20 Desember 2023**
181	PN SUBANG	PERALATAN DAN MESIN	Televisi	4	6.000.000,00	24.000.000,00	114.600.000,00	NPH.NO: 79/PWK.II/FSU/X/2024 Tanggal: 28 Oktober 2024
			PC Unit	2	7.500.000,00	15.000.000,00		
			Printer	2	4.200.000,00	8.400.000,00		
			AC Split	1	4.000.000,00	4.000.000,00		
			Camera Digital	1	8.500.000,00	8.500.000,00		
			External/Portable Harddisk	1	1.850.000,00	1.850.000,00		
			Tripod Camera	1	950.000,00	950.000,00		
			Lemari Besi / Metal	2	1.600.000,00	3.200.000,00		
			Lemari Besi / Metal	2	1.500.000,00	3.000.000,00		
			Lemari Besi / Metal	1	8.000.000,00	8.000.000,00		
			Sice	1	10.000.000,00	10.000.000,00		
			Kursi Besi / Metal	9	800.000,00	7.200.000,00		
			Meja Kerja Kayu	9	1.500.000,00	13.500.000,00		
			Kursi Besi / Metal	2	3.500.000,00	7.000.000,00		
182	PN BEKASI	JASA	Jasa Lainnya berupa Sewa Dedicated	3	66.250.000,00	198.750.000,00	760.650.000,00	NPH.NO: 12/NPH/BKS.I/FSU/I/2024 & 1633/W11.U5/KU.1.13/V/2024 Tanggal: 8 Januari 2024

			Cloud Server					
183		PERALATAN DAN MESIN	Software Komputer	3	77.000.000,00	231.000.000,00		
			Software Komputer	3	77.000.000,00	231.000.000,00		
			Hardware Conf Off-Line Computer	3	2.200.000,00	6.600.000,00		
			Microphone	30	3.110.000,00	93.300.000,00		
184	PN KLUNGKUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP Gedung Kantor Pengadilan Negeri Semarapura	1	721.802.991,00	721.802.991,00	721.802.991,00	NPH.NO: 07/NPH/FSU/DPS.II/2024 & 631/KPN.W24-U3/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 1 Mei 2024
185	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Palang Pintu Otomatis	1	56.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	NPH.NO: 2520/BDT/BFSU/X/2024 & 1514.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
186	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pintu Gerbang Geser Otomatis	1	34.822.080,00	34.822.080,00	34.822.080,00	NPH.NO: 2522/BDT/BFSU/X/2024 & 1516.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
187	PN SUKADANA	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Pejabat Fungsional dan Struktural	12	4.500.000,00	54.000.000,00	90.000.000,00	NPH.NO: 419/BAST/BDL/FSU/II/2024 & 357/PAN.PN.W9.U8/HK.01/III/2024 Tanggal: 19 Februari 2024
			Kursi Staf Pejabat	8	3.000.000,00	24.000.000,00		
			AC Split 2 PK	1	9.000.000,00	9.000.000,00		
			Printer	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
188	PN CIBADAK	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibadak	Mar-13	3.400.000,00	132.600.000,00	132.600.000,00	NPH.NO: 512/NPH/SMI.III/FSU.CF/XII/2024 & 3411/SEK.PN.W11-U18/PL1.1.4/XII/2024 Tanggal: 27 Desember 2024
189	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Mobil	1	246.707.500,00	246.707.500,00	246.707.500,00	NPH.NO: 2518/BDT/BFSU/X/2024 & 1512.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
190	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Motor	1	317.682.000,00	317.682.000,00	317.682.000,00	NPH.NO: 2517/BDT/BFSU/X/2024 & 1511.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024

191	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok	1	212.417.126,00	212.417.126,00	212.417.126,00	NPH.NO: 281/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/14/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 23 Februari 2024
192	PN CIKARANG	JASA	Sewa Rumah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	12	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	NPH.NO: 18/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/18/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **16 Agustus 2022**
193	PN CIKARANG	JASA	Sewa Rumah Panitera Pengadilan Negeri Cikarang	12	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	NPH.NO: 15/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/15/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **16 Agustus 2022**
194	PN CIKARANG	JASA	Jasa Lainnya berupa Pembersihan Kaca & ACP Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang	1	20.158.211,00	20.158.211,00	20.158.211,00	NPH.NO: 12/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/12/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
195	PN CIKARANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cikarang	15-Dec	4.718.691,00	849.364.434,00	849.364.434,00	NPH.NO: 27/NPH/CKR/FSU/XII/2022 & W11.U23/4664/UM.10.10/XII/2022 Tanggal: **5 Desember 2022**
196	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Interior Public Smoking Area	1	53.066.492,00	53.066.492,00	53.066.492,00	NPH.NO: 20/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/20/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **23 Agustus 2022**
197	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Meubelair Public Smoking Area	1	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	NPH.NO: 21/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/21/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **23 Agustus 2022**
198	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Kayu Panitera Muda Perdata	1	61.438.500,00	61.438.500,00	61.438.500,00	NPH.NO: 22/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/22/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
199	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Arsip (Selasar Ruang Kepaniteraan)	2	47.118.250,00	94.236.500,00	94.236.500,00	NPH.NO: 13/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/13/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**

200	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Meubelair Ruang PTSP	1	199.643.906,00	199.643.906,00	199.643.906,00	NPH.NO: 7/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/2704/PL.10.10/IV/2022 Tanggal: **21 April 2022**
201	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Aplikasi Kepaniteraan	1	65.700.000,00	65.700.000,00	65.700.000,00	NPH.NO: 14/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/14/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
202	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehab Ruang Hakim pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang	1	68.849.000,00	68.849.000,00	68.849.000,00	NPH.NO: 17/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/17/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
203	PN JAKARTA UTARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1	197.182.864,00	197.182.864,00	197.182.864,00	NPH.NO: 5498/NPH/KGS/XI/2024 & 6840/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/XI/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
204	PN JAKARTA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Bracket Standing Peralatan	4	388.500,00	1.554.000,00	9.102.000,00	NPH.NO: 5499/NPH/KGS/X/2024 & 6842/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
			Set Top Box Android TV	4	1.887.000,00	7.548.000,00		
205	PN JAKARTA UTARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1	285.961.086,00	285.961.086,00	285.961.086,00	NPH.NO: 5497/NPH/KGS/X/2024 & 6841/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
206	PN DENPASAR	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibadak	10-Dec	1.500.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	NPH.NO: 04/NPH/DPS.II/FSU/III/2024 & 587a/KPN.W24-U1/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 6 Maret 2024
207	PN JAKARTA BARAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Masjid Lantai 5 Gedung	1	97.775.660,00	97.775.660,00	895.254.494,00	NPH.NO: 515/PKS/JKJ.I/XII/2024 & 7310/SEK.PN.W10-U2/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 23 Desember 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Videotron Indoor P2.5	1	228.112.104,00	228.112.104,00		
			Interactive Panel	1	83.250.000,00	83.250.000,00		
			Kursi Besi / Metal	2	4.884.000,00	9.768.000,00		
			Kursi Besi / Metal	8	3.908.310,00	31.266.480,00		
			AC Central	1	50.782.500,00	50.782.500,00		
			AC Split	28	11.433.000,00	320.124.000,00		
			AC Split	9	8.241.750,00	74.175.750,00		

208	PN JAKARTA BARAT	JASA	Jasa Tenaga Outsourcing Satpam (5 Orang x 4 Bulan) September s.d Desember 2024	05-Apr	2.500.000,00	50.000.000,00	489.188.300,00	NPH.NO: 516/PKS/JKJ.I/XII/2024 & 7311/SEK.PN.W10-U2/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 23 Desember 2024
			Jasa Tenaga Outsourcing Pramubakti (5 Orang x 4 Bulan) September s.d Desember 2024	05-Apr	2.500.000,00	50.000.000,00		
			Jasa Tenaga Outsourcing Tenaga Kebersihan (10 Orang x 4 Bulan) September s.d Desember 2024	10-Apr	2.500.000,00	100.000.000,00		
209		PERALATAN DAN MESIN	Rak Besi	4	6.637.800,00	26.551.200,00		
			Rak Besi	22	7.603.500,00	167.277.000,00		
			Rak Besi	2	5.178.150,00	10.356.300,00		
			Rak Besi	14	6.071.700,00	85.003.800,00		
210	PN JAKARTA UTARA	KENDARAAN RODA 4	Toyota Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS	1	618.500.000,00	618.500.000,00	618.500.000,00	NPH.NO: 7534/SEK.PN.W10-U4/PL1.2.4/XII/2024 & 6331/NPH/KGS/XII/2024 Tanggal: 6 Desember 2024
211	PN JAKARTA UTARA	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Jakarta Utara	Mar-13	4.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	NPH.NO: 6708/NPH/KGS/XII/2024 & 7552/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 31 Desember 2024
JUMLAH								**51.275.848.767,00**

F.4.2.2. Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan

Mahkamah Agung RI telah menerima hibah langsung dari dalam negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya baik yang disahkan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II sejumlah Rp158.039.734.269,00 (*seratus lima puluh delapan milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*). Lebih rinci untuk angka hibah langsung dalam negeri sudah disahkan tahun berjalan senilai Rp122.176.025.953,00; sedangkan hibah langsung dalam negeri sudah disahkan tahun anggaran yang lalu senilai Rp35.863.708.316,00. Angka perolehan tersebut didapatkan dari 335 satuan kerja

dengan 653 dokumen hibah. Hbah langsung dari dalam negeri yang sudah disahkan terbagi atas bentuk hibah yang diterima, diantaranya:

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang – Sudah Disahkan

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri bentuk uang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II yang sudah melakukan pengesahan pendapatannya sejumlah Rp6.212.524.000,00 (*enam milyar dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdapat pada 9 satuan kerja dengan 9 dokumen hibah yang sudah disahkan nilai pendapatan hibah uangnya. Berikut penjabaran satuan kerja yang telah menerima hibah uang.

Hibah Dalam Negeri Berupa Uang Sudah Disahkan

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	RINCIAN		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
1	**PA PENAJAM**	PEMKAB. PENAJAM PASER UTARA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 1)	Kesatu	Pembayaran	101.600.000,00	440.000.000,00	421/02/Keu-MPHD/Pem/2024 & 110/KPA.W17-A8/HM.01/I/2024 Tanggal: 31 Januari 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 2)	Kedua	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 3)	Ketiga	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 4)	Keempat	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 5)	Kelima	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 6)	Keenam	Pembayaran	37.600.000,00		

			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 7)	Ketujuh	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 8)	Kedelapan	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 9)	Kesembilan	Pembayaran	37.600.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 10)	Kesepuluh	Pembayaran	37.600.000,00		
2	**PN PENAJAM**	PEMKAB. PENAJAM PASER UTARA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Bulan Feb - April + THR)	Pertama	Pembayaran	140.400.000,00	440.000.000,00	421/02/Keu-MPHD/Pem/2024 & 91/KPN.W18-U9/II/2024 Tanggal: 31 Januari 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 2)	Kedua	Pembayaran	37.450.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 3)	Ketiga	Pembayaran	37.450.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 4)	Keempat	Pembayaran	37.450.000,00		

			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 5)	Kelima	Pembayaran	37.450.000,00		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 6)	Keenam	Pembayaran	74.900.000,00		
3	**PN KUALA KAPUAS**	PEMKAB. KAPUAS	Pembelian Sarana Prasarana dalam Menunjang Layanan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Kesatu	Belanja	500.000.000,00	500.000.000,00	900.1.13.5/03/Kesbangpol Tahun 2024 1292/SEK.PN.W16-U4/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024
4	**PT PALEMBANG**	PEMPROV. SUMATERA SELATAN	Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Kesatu	Belanja	103.935.128,00	2.500.000.000,00	028/NPHD/I/2024 & 2028/SEK.PT.W6.U/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 6 Juni 2024
			Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Kedua	Belanja	1.112.841.340,00		
			Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Ketiga	Belanja	1.220.497.710,00		
			Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Keempat	Pengembalian	62.725.822,00		
5	**PN CIBINONG**	PEMKAB. BOGOR	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Cibinong	Kesatu	Belanja	368.906.880,00	482.524.000,00	900.1/013-Bakesbangpol/II/2024 & 764/KPN.W11-U20/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 13 Februari 2024
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Cibinong	Kedua	Belanja	112.826.500,00		

			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Cibinong	Ketiga	Pengembalian	790.620,00		
6	**PA GRESIK**	PEMKAB. GRESIK	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Gresik	Kesatu	Belanja	495.760.739,00	600.000.000,00	124/572/437.77/2024 & 2680/W13-A17/KPA/KU.01.1/VII/2024 Tanggal: 24 Juli 2024
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Gresik	Kedua	Belanja	99.624.852,00		
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Gresik	Ketiga	Pengembalian + Admin Bank	4.597.043 + 17.366		
7	**PA CIANJUR**	PEMKAB. CIANJUR	Pemberian Bansos yang akan digunakan untuk belanja peralatan dan mesin berupa AC	Kesatu	Belanja	50.000.000,00	50.000.000,00	000.4.3.2/KEP.352-SETDA/2024 Tanggal: 29 Oktober 2024
8	**PT PAPUA BARAT**	PEMPROV. PAPUA BARAT	Pengadaan Rumah Dinas Ketua PT Papua Barat sebanyak 1 Unit Rumah	Kesatu	Belanja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	164/NPHD-KESBANGPOL-PB/XII/2024 Tanggal: 6 Desember 2024
9	**PN GUNUNG SUGIH**	PEMKAB. LAMPUNG TENGAH	Pembayaran Renovasi Ruang Sidang dan Ruang PTSP termasuk Meubelair	Kesatu	Belanja	200.000.000,00	200.000.000,00	914/NPHD/B.a.VII.06/2024 Tanggal: 13 Desember 2024
TOTAL PEROLEHAN HIBAH UANG								**6.212.524.000,00**

Adapun terdapat pengembalian hibah uang atas sisa realisasi belanja pada satker Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Agama Gresik yang sudah dilakukan pengesahan SP4HL-nya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sehingga menimbulkan angka pada pada akun (391132) sebagai Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sejumlah Rp68.113.485,00. Angka tersebut sudah dilakukan pengembalian uangnya ke rekening pemberi hibah sesuai dengan klausul di dalam Naskah Perjanjian Hibah.

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D 31 DESEMBER 2024

AKUN : **391132** Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	62.725.822,00
0.0	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	790.620,00
0.0	005.01.401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	4.597.043,00
TOTAL			**68.113.485,00**

B. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang – Sudah Disahkan

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri bentuk barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II baik penerimaan tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu, sudah disahkan sejumlah Rp140.521.969.493,00 (*seratus empat puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdapat pada 305 satuan kerja dengan 607 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah langsung dalam negeri berupa barang.

Hibah Dalam Negeri Berupa Barang Per Jenis Aset Sudah Disahkan

NO	ASET YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
1	Tanah	25	Rp	28.333.923.091,00
2	Gedung dan Bangunan	177	Rp	55.706.589.632,00
3	Kendaraan Roda 4	26	Rp	14.249.982.790,00
4	Kendaraan Roda 2	0	Rp	-
5	Peralatan dan Mesin	379	Rp	42.231.473.980,00
TOTAL		**607**	**Rp**	**140.521.969.493,00**

C. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa – Sudah Disahkan

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri bentuk jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II baik penerimaan tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu yang sudah disahkan sejumlah Rp11.661.240.776,00 (*sebelas milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang terdapat pada 19 satuan kerja dengan 37 dokumen

pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai manfaat apa saja yang telah diterima pada hibah langsung dalam negeri berupa jasa.

Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa Menurut Manfaat Yang Diterima

NO	JASA YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
1	Jasa Konsultan	0	Rp	-
2	Jasa Outsourcing	27	Rp	10.348.061.152,00
3	Jasa Lainnya	10	Rp	1.313.179.624,00
TOTAL		**37**	**Rp**	**11.661.240.776,00**

D. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) merupakan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima pada Tahun 2023 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibahnya. Penyelesaian administrasi dan pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga atas hibah yang diterima tahun anggaran yang lalu sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam tata cara penyelesaian hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Pengajuan permohonan nomor register hibah TAYL sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 dengan melampirkan Surat Pernyataan Hibah TAYL oleh kuasa pengguna anggaran satuan kerja atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu melalui aplikasi SEHATI yang akan terkirim kepada Kanwil DJPB setempat.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan hibah langsung dan pertanggungjawaban hibah langsung yang akuntabel, maka masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II yang mencatatkan pengesahan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang dan jasa tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp35.863.708.316,00 (*tiga puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah)* yang terdapat pada 65 satuan kerja dengan 102 dokumen pengesahan hibah yang NPH dan/atau BAST-nya tercatat pada penerimaan hibah TAYL. Angka ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari total perolehan hibah langsung bentuk barang dan jasa yang telah diungkapkan sebelumnya. Berikut lebih detail satker yang menerima hibah langsung bentuk barang TAYL.

Hibah Barang Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
1	PN SUBANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	38.408.500,00	NPH.NO: 99/PKS/PWK.II/BFSU/XII/2-23 Tanggal: 21 Desember 2023	286XBCXA
2	PN SUBANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	NPH.NO: 87/PWK.11/XI/2023 Tanggal: 30 Oktober 2023	2YS9Q2TA
3	PN MALANG	PEMKOT. MALANG	PERALATAN DAN MESIN	143.000.000,00	NPH.NO: W14-U2/7741/HM.01.1/II/2020 Tanggal: 2 November 2020	2ZJECSYA
4	PN JAKARTA TIMUR	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	326.998.235,00	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/XII/2023 & 12963/SEK.W10-U5/PL1.2.4/12/2023 Tanggal: 19 Desember 2023	2PDMK6NA
5	PN JAKARTA UTARA	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	956.468.000,00	NPH.NO: 9269/SEK.PN/W10.U5/PL1.2.4/XII/2023 & 6998/NPH/KGS/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	2TK1TQNA
6	PT MANADO	PT. BANK SULUT GO	KENDARAAN RODA 4	605.000.000,00	BAST.NO: W19.U/753/PL/IV/2022 Tanggal: 11 April 2022	2EBB3QEA
7	PN LAHAT	PEMKAB. LAHAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.000.000.000,00	NPH.NO: 600/03/PUPR/2023 & 326a/SEK01.W6.U3/PL1.2.4/III/2023 Tanggal: 20 Maret 2022	2ZHPPZZA

8	PN TANJUNG PATI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	12.000.000,00	NPH.NO: 1677a/SEK.W3-U12/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	222RUFHA
9	PN TANJUNG PATI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	1.000.000,00	NPH.NO: 1678a/SEK.W3-U12/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	2GPD85AA
10	PN TANJUNG PATI	PT. BANK BRI (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	6.000.000,00	NPH.NO: 1679a/SEK.W3-U12/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	2DWX2Y8A
11	PT MEDAN	PEMPROV. SUMATERA UTARA	KENDARAAN RODA 4	1.343.300.000,00	NPH.NO: 0001.7/13694/2023 & W2.U/7253/UM.01.10/12/2023 Tanggal: 23 Oktober 2023	2G7WKTZA
12	PN BATURAJA	PT. BANK BSI (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	9.725.000,00	NPH.NO: 03/890-3/18061 & 100/KPN.W6-U4/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 1 September 2023	27YR4RSA
13	PT SULAWESI BARAT	PEMPROV. SULAWESI BARAT	TANAH	3.766.872.367,00	NPH.NO: 6 TAHUN 2021 & W22-U12/2509/PL.09/12/2021 Tanggal: 14 Desember 2021	2GBKVZ5A
14	PN ROKAN HILIR	PEMKAB. ROKAN HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	355.417.000,00	NPH.NO: 29/NPHD/BMD-AS/2023 & W4.U9/79a/PL.01/1/2023 Tanggal: 5 Januari 2023	2H13A15A
15	PN IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	149.800.000,00	NPH.NO: 083/1468.1/2022 Tanggal: 26 Oktober 2022	27MMNC1A

16	PN IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	69.903.900,00	NPH.NO: 083/0507/2023 Tanggal: 17 Juli 2023	2FH25RQA
17	PN IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.800.000,00	NPH.NO: 083/0507a/2023 Tanggal: 17 Juli 2023	2AZCZFKA
18	PA MUARA TEWE	PEMKAB. BARITO UTARA	PERALATAN DAN MESIN	86.800.000,00	NPH.NO: 400/578/NPHD/KESRA & W16-A4/1714/PL.02/XII/2022 Tanggal: 26 Desember 2022	2QX25G4A
19	PN BOGOR	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	180.000.000,00	NPH.NO: 369/S/BGR.UT/FSU.BFS/X/2023 & 2651/SEK.PN.W11.U2/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 27 Oktober 2023	2WPTD99A
20	PN BANGKINANG	PEMKAB. KAMPAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.307.163.900,00	NPH.NO: 640/PUPR-CK-BG/XII/503 & 4923/KPN.W4.U6/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 19 Desember 2023	2N3K9AZA
21	PN TAMIANG LAYANG	PEMKAB. BARITO TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	399.530.650,00	NPH.NO: W16-U7/1539a/PL.01/12/2022 & 030/26/BUM/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2G7N6STA
22	PN BANYUWANGI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	16.500.000,00	NPH.NO: 83/PKS/BWI.III/FSU/XII/2023 & 3321/SEK.W14-U16/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 28 Desember 2023	24YYUG6A

23	PN SUMEDANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	113.408.202,00	NPH.NO: 2462/BDT/BFSU/XI/23 & 1872.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 10 November 2023	29X8T21A
24	PN SUNGGUMINASA	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	40.404.000,00	NPH.NO: 420/PKS/PNK/FSU/XII/2023 & 2892/PAN.W22-U3/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 4 Desember 2023	2QY9EWLA
25	PA SIDOARJO	PEMKAB. SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	107.992.500,00	NPH.NO: 900/1046/438.6.5/2020 & W13-A16/4627/KU.0.1/10/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020	289BHSHA
26	PT KALIMANTAN UTARA	PEMPROV. KALIMANTAN UTARA	KENDARAAN RODA 4	352.400.000,00	NPH.NO: 100.3.7/3419/BKAD/SETDA & 712/SEK.02.W34-U/PL.1.2.4/X/2023 Tanggal: 6 Oktober 2023	2EHZTQ6A
27	PN MALANG	PEMKOT. MALANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.742.759.300,00	NPH.NO: 640/2227.3/35.73.403/2023 & 6023/SEK.PN.W14-U2/HM1/IX/2023 Tanggal: 15 September 2023	2BAB4JHA
28	PA KENDARI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	14.650.000,00	NPH.NO: 20/SEK.W21-A1/PL1.2.4/IX/2023 Tanggal: 14 September 2023	2DHQJR6A

29	PN PEKALONGAN	PEMKAB. PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	63.519.750,00	NPH.NO: 100.3.7/2680.1/IX/2023 & 3052.1/SEK.PN.W12.U4/UM.01/XI/2023 Tanggal: 10 November 2023	24PKGAVA
30	PN PEKALONGAN	PEMKAB. PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	123.100.000,00	NPH.NO: 100.3.7/2523.1/X/2023 & 3052/SEK.PN.W12.U4/UM.01/X/2023 Tanggal: 23 Oktober 2023	2WWFFPAA
31	PN ROKAN HILIR	PEMKAB. ROKAN HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	180.567.000,00	NPH.NO: 31/NPHD/BMD-AS/2023 & 2405a/SEK.01.W4.U9/PL.1.2.4/12/2023 Tanggal: 1 Desember 2023	24S87GQA
32	PN MALANG	PEMKOT. BATU	PERALATAN DAN MESIN	568.740.000,00	NPH.NO: 979/0870/422.205/2023 & 5951/KPN.W14-U2/HJM1/XI/2023 Tanggal: 6 November 2023	27SR3CTA
33	PA MATARAM	PEMPROV. NUSA TENGGARA BARAT	KENDARAAN RODA 4	559.880.000,00	NPH.NO: 027/991.a/BKBPDN/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	2J2Q5W7A
34	PA MATARAM	PEMPROV. NUSA TENGGARA BARAT	PERALATAN DAN MESIN	185.500.000,00	NPH.NO: 23/957.a/XII/BKBPDN/2023 Tanggal: 18 Desember 2023	2FNHCY9A
35	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	213.229.178,00	NPH.NO: W11.U21/1832a/NPH.BTN/III/2023 & 388, 769/M/JKK.1/FSU/III/2023 Tanggal: 29 Maret 2023	27NTN3PA

36	PN JANTHOI	PEMKAB. ACEH BESAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	138.670.000,00	NPH.NO: 41/NPHD/2023 Tanggal: 18 Oktober 2023	2FEJM61A
37	PN KOTABARU	PEMKAB. KOTABARU	KENDARAAN RODA 4	927.000.000,00	NPH.NO: 032/380/NPHD/ASET.BPKAD Tanggal: 25 November 2023	27RP2EGA
38	PA SUMENEP	PEMKAB. SUMENEP	GEDUNG DAN BANGUNAN	183.100.000,00	NPH.NO: 600.1.15.2/1/NPHD/108.2023 & W13-A32/1555/PL1.2.4/12/2023 Tanggal: 27 Desember 2023	25LMCYPA
39	PA SAMPANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	72.000.000,00	NPH.NO: W13-A31/0742/PL.01/2022 & Al-Firdaus/01/08/2022 Tanggal: 3 Agustus 2022	2QF3ZXRA
40	PN LUMAJANG	PT. BANK BRI (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	34.980.000,00	NPH.NO: B.2931.KC-XVI/LYI/12/2023 Tanggal: 28 Desember 2023	2J49EQ6A
41	PN BATANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	60.000.000,00	NPH.NO: 277/PKS/PKL.II/BFSU/XII/2023 & 2500/SEK.W.2.U33/UM.03/12/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	28NLTHRA
42	PA MUARA TEWE	PEMKAB. BARITO UTARA	KENDARAAN RODA 4	349.460.901,00	NPH.NO: 400/9/NPHD/KESRA/2023 Tanggal: 4 Desember 2023	26QUZK7A
43	PTA KEPULAUAN RIAU	PEMPROV. KEPULAUAN RIAU	TANAH	24.000.000,00	NPH.NO: B/032/493.6/BKAD-SET/2023 & W32-A/534/PL.02/5/2023 Tanggal: 12 Maret 2023	2QF3U34A

44	PN CIREBON	PEMKOT. CIREBON	TANAH & GEDUNG DAN BANGUNAN	2.506.323.000,00	NPH.NO: 593.33/50-NPHD/BPKPD/2023 & W11.43/972/PL.02/5/2023 Tanggal: 11 Mei 2023	2HJTH7HA
45	PA PENAJAM	PEMKAB. PENAJAM PASER UTARA	KENDARAAN RODA 4	622.290.000,00	NPH.NO: 028/147/BK/II/2020 Tanggal: 18 Februari 2020	2GE5LNMA
46	PN BANTAENG	PEMKAB. BANTAENG	GEDUNG DAN BANGUNAN	148.891.000,00	NPH.NO: 600.1.15.2/117/DPUPR/IV/2023 & W22.U5/463/PL.01/04/2023 Tanggal: 10 April 2023	28VQS9TA
47	PT BANDUNG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	249.686.000,00	NPH.NO: 38/NPH/BKS.I/FSU/V/2023 & 3883/SEK.W11-U/PL1.2.4/V/2023 Tanggal: 22 Mei 2023	21QK6BGA
48	PA LABUHAN BACAN	PEMKAB. HALMAHERA SELATAN	PERALATAN DAN MESIN	156.000.000,00	NPH.NO: 027/40/BKBP/2023 Tanggal: 2 Juni 2023	25QAC9WA
49	MS SUKA MAKMUE	PEMKAB. NAGAN RAYA	PERALATAN DAN MESIN	60.541.500,00	NPH.NO: 030/632/NPHD/2023 Tanggal: 12 Desember 2023	23H626MA
50	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	PERALATAN DAN MESIN	199.966.000,00	NPH.NO: 1560 Tahun 2023 Tanggal: 5 Juli 2023	292643NA
51	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	PERALATAN DAN MESIN	198.900.000,00	NPH.NO: 1560 Tahun 2023 Tanggal: 5 Juli 2023	2VXDPAAA
52	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.610.000,00	NPH.NO: 2162 Tahun 2023 Tanggal: 4 Desember 2023	24E6VBKA

53	PN BATANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	7.500.000,00	NPH.NO: 116/PKS/PKL.III/BFSU/VI/2023 & W12-U33/1371/KU.01/7/2023 Tanggal: 27 Juni 2023	2FBFA16A
54	PN MANDAILING NATAL	PEMKAB. MANDAILING NATAL	KENDARAAN RODA 4	474.700.000,00	NPH.NO: 030/3487/BPKAD/2023 & 1846/KPN.W2-U17/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 6 Desember 2023	2GSVZLYA
55	PN MAKASSAR	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	250.109.000,00	NPH.NO: 010/BAST/MKS/FSU/VIII/2023 & W22.U1/5401/PL.01/8/2023 Tanggal: 22 Agustus 2023	22UM2UCA
56	PA GRESIK	PEMKAB. GRESIK	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.235.176.811,00	BAST.NO: 032/1168/437.77/2023 & 671/SEK.PA.W13.A17/PL.01/12/2023 Tanggal: 23 Oktober 2023	2VX31E3A
57	PA KOTA BANJAR	PT. BANK BRI (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	45.226.894,00	NPH.NO: B.4685.KC-VI/LYI/11/2023 Tanggal: 29 November 2023	25456PQA
58	PTA KALIMANTAN UTARA	PEMPROV. KALIMANTAN UTARA	KENDARAAN RODA 4	352.400.000,00	NPH.NO: 100.3.7/3418/BKAD/SETDA & 895.a/KPTA.W34-A/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 6 Oktober 2023	2UAQC9PA

59	PN BANGLI	PEMKAB. BANGLI	GEDUNG DAN BANGUNAN	298.679.375,00	NPH.NO: 640.6/297/NPHD/PKKP/2021 & W24.U8/1123/PL.09/12/2021 Tanggal: 31 Desember 2021	2EGCVLVA
60	PA SUNGGUMINASA	PT. BANK BSI (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	12.200.000,00	NPH.NO: 03/792-03/579 Tanggal: 21 Agustus 2023	21ZT7V1A
61	PN SERANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	202.500.000,00	NPH.NO: 165/Clg.II/XII/2023 & 5620/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	21Z3EW7A
62	PA PANGKALAN KERINCI	PEMKAB. PELALAWAN	PERALATAN DAN MESIN	16.100.000,00	NPH.NO: 032/BPKAD/NHPD/2023/01 Tanggal: 2 November 2023	2LNSZAZA
63	PN SENGKANG	PEMKAB. WAJO	GEDUNG DAN BANGUNAN	489.921.000,00	NPH.NO: 600/741.a/DPUPRP/2023 & 874/PN.W22-U9/PL1.2.4/IX/2023 Tanggal: 4 September 2023	2PX3QXLA
64	PN BLORA	PEMKAB. BLORA	GEDUNG DAN BANGUNAN	197.620.000,00	NPH.NO: 900/1596.A/2023 Tanggal: 12 Juli 2023	225WUJTA
65	PN SUNGGUMINASA	PEMKAB. GOWA	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	269.174.000,00	NPH.NO: 600.1.15.2/2866.a/DPUPR & 2290/SEK.W22-U3/HK1.3.1/X/2023 Tanggal: 25 Oktober 2023	2WW11YSA

66	PA BONTANG	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	11.500.000,00	NPH.NO: 208/CMT-GOV/BAS/CMR/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	2MWQCDXA
67	PN PULANG PISAU	PEMKAB. PULANG PISAU	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.500.000,00	NPH.NO: 600/379/NPHD/DPUPR.CK/XII/2023 Tanggal: 18 Desember 2023	2473SFVA
68	PN PULANG PISAU	PEMKAB. PULANG PISAU	GEDUNG DAN BANGUNAN	349.200.000,00	NPH.NO: 600/74/NPHD/DPUPR-TR/I/2023 Tanggal: 30 Juni 2023	2D8WXE9A
69	PA GEDONGTATAAN	PEMKAB. PESAWARAN	TANAH	62.500.000,00	NPH.NO: 01/PKS/KS/1.04/2023 & W8-A10/39/HM.00/1/2023 Tanggal: 11 Januari 2023	2B6572YA
70	MS SINGKIL	PEMKAB. ACEH SINGKIL	GEDUNG DAN BANGUNAN	189.360.000,00	NPH.NO: 032/0.1.4/NPHD/DPUPR/2022 & W1-A18/833/HM.01/II/2022 Tanggal: 4 Juli 2022	2M13T3GA
71	PN PANGKAJENE	PT. BANK Mandiri (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	188.450.000,00	NPH.NO: R10.Br.PHS/401/2022 & W22.U11/388/UM/X/2022 Tanggal: 29 September 2022	2FK8K1EA
72	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	150.000.000,00	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/X/2023 & 5603/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: 2 Oktober 2023	28JQ5P7A

73	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	230.000.000,00	NPH.NO: 32/NPH/BKS.I/FSU/IX/2023 & 4475/W11.U5/UM.00.1/IX/2023 Tanggal: 1 September 2023	2HHQKKZA
74	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	243.923.027,00	NPH.NO: 27/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 625/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: 26 Desember 2022	28GWSY5A
75	MS SIGLI	PEMKAB. PIDIE	GEDUNG DAN BANGUNAN	388.942.000,00	NPH.NO: 640/218/NPHD/PRKP/TAHUN 2022 Tanggal: 1 Desember 2022	29DY132A
76	PA TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	PERALATAN DAN MESIN	86.270.000,00	NPH.NO: 000.3/BKBP/X/2023/25 Tanggal: 27 Oktober 2023	2Q8EXYXA
77	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	129.492.500,00	NPH.NO: 40/NPH/BKS.I/FSU/VII/2023 & 4548/W11.U5/UM.00.1/VII/2023 Tanggal: 3 Juli 2023	2NQHBG7A
78	PT PAPUA BARAT	PEMPROV. PAPUA BARAT	TANAH	2.022.750.000,00	NPH.NO: 590/2028/GUB-PROV/VIII/2022 & 742/DJU/PL.02/8/2022 Tanggal: 3 Agustus 2022	23V69BLA
79	PA PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.400.000,00	NPH.NO: 32/NPHD/DPUPR/2023 Tanggal: 25 Desember 2023	2B1CZL9A
80	PA PARIGI	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	7.020.000,00	BAST.NO: 022239219/SKU/06/MKS/2023 Tanggal: 25 September 2023	21PRJLFA

81	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	456.842.700,00	NPH.NO: 25/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 192/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: 12 Desember 2022	2N2V57QA
82	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	186.158.454,00	NPH.NO: 42/NPH/BKS.I/FSU/VI/2023 & 5599/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: 26 Juni 2023	2KZQVVXA
83	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	55.268.920,00	NPH.NO: 36/NPH/BKS.I/FSU/I/2023 & 5595/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: 2 Januari 2023	25Y1BY5A
84	MS BLANGPIDIE	PEMKAB. ACEH BARAT DAYA	TANAH	19.435.200,00	NPH.NO: 032/191 & W1-A21/260/PL.02/1/2023 Tanggal: 30 Januari 2023	257DTHNA
85	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	177.955.200,00	NPH.NO: 1756/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/79/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 8 Desember 2023	28K6RBTA
86	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	292.722.025,00	NPH.NO: 1873/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/85/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 21 Desember 2023	2LF4CPFA
87	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	39.588.705,00	NPH.NO: 1673/M/JKK.I/FSU/XI/2023 & W11.U21/76/BTN.01.10/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	2WKELHZA

88	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	356.938.038,00	NPH.NO: 1836/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/83/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 21 Desember 2023	2PNYP22A
89	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	646.298.077,00	NPH.NO: 1824/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/81/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 20 Desember 2023	2L2LUEHA
90	PN TANJUNG BALAI	PEMKOT. TANJUNGBALAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	109.125.748,00	NPH.NO: 050.A/5345/PUPR/2022 Tanggal: 28 November 2022	2MAPSXCA
91	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	57.500.000,00	NPH.NO: 18/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/18/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 16 Agustus 2022	2H6PFCAA
92	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	69.000.000,00	NPH.NO: 15/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/15/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 16 Agustus 2022	29TZNC7A
93	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	20.158.211,00	NPH.NO: 12/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/12/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	27JCRH1A
94	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	849.364.434,00	NPH.NO: 27/NPH/CKR/FSU/XII/2022 & W11.U23/4664/UM.10.10/XII/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2GJB19AA

95	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	53.066.492,00	NPH.NO: 20/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/20/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 23 Agustus 2022	2RL4JMGA
96	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	54.000.000,00	NPH.NO: 21/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/21/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 23 Agustus 2022	2QN57PJA
97	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	61.438.500,00	NPH.NO: 22/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/22/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	23ATGP1A
98	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	94.236.500,00	NPH.NO: 13/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/13/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	298Z5SJA
99	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	199.643.906,00	NPH.NO: 7/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/2704/PL.10.10/IV/2022 Tanggal: 21 April 2022	2XBB9Y8A
100	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	65.700.000,00	NPH.NO: 14/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/14/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	2B3Y5HEA

101	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	68.849.000,00	NPH.NO: 17/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/17/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	2F4JD2EA
102	PN NATUNA	PEMKAB. NATUNA	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.547.716,00	NPH.NO: 645.8/283/NPHD/PKP-UP2/XII/2023 & 89/SEK.W32-U4/KU.1.1/XII/2023 Tanggal: 20 Desember 2023	2QDCPEQA
TOTAL PEROLEHAN HIBAH TAYL				**35.863.708.316,00**		

F.4.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Mahkamah Agung RI telah menerima hibah langsung dari luar negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya menjadi hibah jasa tahun anggaran yang lalu per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II sejumlah Rp24.682.645.629,00,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).

A. Hibah Langsung Luar Negeri Berupa Jasa

Penerimaan hibah langsung dari luar negeri berupa jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 yang sudah disahkan dan dicatatkan sebagai hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) senilai IDR 24.682.645.629,00,00 atau setara AUD 2.389.322,37 yang berasal dari *Government of the Commonwealth of Australia - Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dalam proyek *Australia Indonesia Partnership for Justice Phase II* (AIPJ2) yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Kemitraan berfokus untuk mendukung kegiatan: transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi; mengatasi kejahatan lintas batas dan memperkuat keamanan; mencegah ekstremisme kekerasan; reformasi pemasyarakatan; dan pengembangan kemitraan.

Sebagai salah satu Kementerian/Lembaga Penerima Manfaat (*Beneficiary*), Mahkamah Agung RI telah melakukan pengesahan BAST ke KPPN dengan nomor register hibah (29JPW1VA) yang terbit pada tahun 2018 dan telah dilakukan pemukhtahiran data pada tahun 2022 oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) selaku *Executing Agency* sebagaimana telah dimuat dalam Subsidary Arrangement (SA) antara pihak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia.

Adapun detail manfaat yang diterima Mahkamah Agung RI dari hibah jasa yang diberikan pihak DFAT melalui proyek AIPJ Phase II, diantaranya:

Daftar Perincian Manfaat Hibah Berupa Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan Dari *Government of the Commonwealth of Australia* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. Periode April 2017 – September 2018

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Persiapan penandatangan MoU antara MA dengan Family Court and Federal Court of Australia. 2. Biaya perjalanan MA untuk penandatanganan MoU antara MA dengan Family Court and Federal Court of Australia.	203.376,39	2.147.451.302,01	Memperbarui kerjasama antara Pengadilan Indonesia dan Australia, guna meningkatkan mekanisme tata kelola untuk reformasi hukum dan peradilan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis kepada MA melalui Tim Asistensi Pembaruan. 2. Memberikan bantuan operasional kepada Tim Asistensi Pembaruan. 3. Bantuan teknis kepada MA dalam kegiatan terkait *Ease of Doing Business* dan penyusunan Perma No.3 Tahun 2018 tentang e-Court	28.080,44	296.501.365,96	Lembaga peradilan yang akuntabel serta mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Penyusunan Perma No.3 Tahun 2017. 2. Penyusunan Buku Pedoman PBDH. 3. Sosialisasi Perma No.3 Tahun 2017 di 4 Daerah (Jakarta, Makassar, Yogyakarta dan Aceh).	221.085,88	2.334.445.806,92	Peningkatan akses terhadap keadilan dan layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.
		Total	**AUD 452.542,71**	**IDR 4.778.398.474,89**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.559*

B. Periode Juli s.d. Desember 2019

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan untuk pembahasan terkait Perma Dispensasi Kawin.	7.013,32	67.117.472,40	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam *Ease of Doing Business.* 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court.	76.025,54	727.564.417,80	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Penelitian simplifikasi template putusan untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di 4 lingkungan peradilan	41.161,59	393.916.416,30	Peningkatan layanan pengadilan terkait hasil putusan.
		Total	**AUD 124.200,45**	**IDR1.188.598.306,50**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 9.570*

C. Periode Januari s.d. Desember 2020

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan untuk pembahasan terkait Perma Dispensasi Kawin.	28.290,74	283.642.959,24	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam *Ease of Doing Business.* 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court.	74.797,94	749.924.146,44	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Penelitian simplifikasi template putusan untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di 4 lingkungan peradilan.	129.565,65	1.299.025.206,90	Peningkatan layanan pengadilan terkait hasil putusan.
		Total	**AUD 232.654,33**	**IDR 2.332.592.312,58**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.025,90*

D. Periode Januari s.d. Juni 2021

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan untuk pembahasan terkait Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5/2019 bagi Hakim.	44.282,24	485.997.584,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam *Ease of Doing Business* . 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court	37.452,36	411.039.651,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
		Total	**AUD 81.734,60**	**IDR 897.037.235,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.974,99*

E. Periode Juli s.d. Desember 2021

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan.	105.395,64	1.137.745.934,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam Ease of Doing Business 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court.	36.407,64	393.020.474,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
		Total	**AUD 141.803,28**	**IDR 1.530.766.408,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.795*

F. Periode Januari s.d. Desember 2022

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Imdonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.	36.234,00	373.689.395,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis tindak lanjut *Court Risk Assesment*	6.956,00	71.738.793,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business*
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Pelaksanaan event dan bantuan teknis penyusunan panduan implementasi keadilan restoratif (Konsorsium RJ-LeIP)	87.245,00	899.775.092,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan
4.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Pelaksanaan event dan bantuan teknis dalam pembaruan pengadilan niaga	154.080,00	1.589.061.708,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan mekanisme penanganan perkara komersil • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business*
		Total	**AUD 284.515,00**	**IDR 2.934.264.988,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.313*

G. Periode Januari s.d. Desember 2023

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan .	44.010,00	452.510.820,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis pelaksanaan tindaklanjut *Court Risk Assesment* • Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan • Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI • Pelaksanaan program oleh *Transparency International Indonesia* (TII)	122.659,00	1.261.175.725,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan.
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis penerapan prinsip keadilan restoratif: • Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penerapan Keadilan Restoratif. • Pelaksanaan program oleh Konsorsium Organisasi Masyarakat Sipil untuk penerapan keadilan restoratif (*Indonesian Judicial Research Society dan Institute for Criminal Justice Reform*). • Penyusunan rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung untuk penanganan	81.772,00	840.783.817,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan.

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
		perkara narkotika.			
4.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Dukungan untuk Penguatan Kepemimpinan Perempuan di Peradilan • Konferensi Internasional Hakim Perempuan di Marocco • Diskusi Merumuskan Spesifikasi Fungsional & Pengembangan Aplikasi Lentera untuk promosi dan mutasi hakim • Diskusi Publik Pembaruan Proses Promosi Mutasi Hakim di Lingkungan Badilum • Seminar pembentukan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia	135.038,00	1.388.464.212,00	• Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Penguatan akses keadilan dan peradilan inklusif
5.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Dukungan untuk peradilan inklusif dan perempuan berhadapan dengan hukum • Kunjungan kerja ke Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) • Pertukaran pengetahuan dengan tentang nafkah/tunjangan keluarga paska perceraian • Sosialisasi Gugatan Mandiri • Lokakarya Perspektif Gender & Disabilitas Bawas MA RI • MoU pendampiangan penguatan layanan dan kapasitas aparatur pengadilan untuk mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas (6	365.104,00	3.753.995.832,00	• Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Penguatan akses keadilan dan peradilan inklusif

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	**Dalam Rupiah Indonesia**	
		pengadilan) • Kegiatan Pokja Perempuan & Anak MA-RI • Bantuan teknis mitra organisasi masyarakat sipil (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak/SAPDA, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB, Legal Development Partner/LDP)			
6.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Dukungan untuk penguatan peradilan niaga dan peradilan elektronik (e-Court) • Bantuan Teknis Konsultan dan Pelaksanaan Program • *Seminar on Civil Procedural Law through Adoption of International Convention* • Sosialisasi B-Ready ke PN Surabaya • FGD Pembahasan Kertas Kerja Survey EODB (B-Ready) Bank Dunia Tahun 2023 • *International Seminar on Bankruptcy and Suspension of Payment* • *Support of Development of Indonesian Version of IP Bench Book*	323.289,00	3.324.057.498,00	• Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Penguatan kepastian hukum dan iklim usaha nasional
		Total	**AUD 1.071.872,00**	**IDR 11.020.987.904,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.282*

LAPORAN PHLN
TINGKAT MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR REGISTER 29JPW1VA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2024
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Hibah				
Penerimaan Hibah Luar Negeri (1)	xxx	xxx	xxx	Rp.24.682.645.629,00
Jumlah Pendapatan Hibah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**Rp24.682.645.629,00**
B. Belanja yang Bersumber dari PHLN				
1. Belanja Pegawai (2)	xxx	xxx	xxx	0
2. Belanja Barang (3)	xxx	xxx	xxx	0
3. Belanja Modal (4)	xxx	xxx	xxx	0
4. Belanja Bantuan Sosial (5)	xxx	xxx	xxx	0
5. Belanja Lain-lain (6)	xxx	xxx	xxx	Rp.24.682.645.629,00
Jumlah Belanja yang Bersumber dari PHLN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**Rp.24.682.645.629,00**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**0**
D. Pembiayaan				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (7)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D-C)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

F.4.3. Catatan Penting Lainnya

1. Tutup Permanen Periode 13 Tahun 2024

   Pada periode Laporan Keuangan Tahun 2024, seluruh satuan kerja telah melakukan tutup buku permanen dan data Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Neraca Percobaan Akrual, Neraca Percobaan Kas, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas telah final ditanggal 26 Februari 2025.
2. Ketidaksesuaian Kode Akun Belanja vs Kode Persediaan pada Mahkamah Agung sebanyak 31 data transaksi dengan 6 satuan kerja dikarenakan terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka perolehan persediaan dengan klasifikasi/kodefikasi barang yang dihasilkan sebagaimana penjelasan pada lampiran data pendukung.
3. Ketidaksesuaian Kode Akun Belanja vs Kode BMN pada Mahkamah Agung sebanyak 99 data transaksi dengan 30 satuan kerja dikarenakan terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka perolehan aset tetap/aset lainnya dengan klasifikasi/kodefikasi barang yang dihasilkan sebagaimana penjelasan pada lampiran data pendukung.
4. Rekonsiliasi SPAN – SAKTI pada Laporan Mahkamah Agung Tahun 2024 pada Monsakti tidak ada selisih TDK COA dan tidak ada selisih TDK Rupiah serta telah diterbitkan SHR oleh KPPN.
5. Berdasarkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2024 terdapat beberapa hal sebagai berikut:
   a. RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran.
   b. SP2D sudah dibayarkan dan terdapat perpanjangan dari KPPN atas aset/jasa telah 100% dan belum 100%.
   c. SP2D belum dibayarkan dan terdapat perpanjangan dari KPPN atas aset/jasa telah 100% dan belum 100%.
   d. Satuan kerja yang telah menginput BAST RPATA dengan jenis RPATA Realisasi Barang/Jasa pada tanggal 31 Desember 2024 telah melakukan jurnal manual atas akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111) menjadi Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191).

   Penjelasan terinci atas RPATA pada Mahkamah Agung sebagaimana terlampir Pada laporan Data Pendukung Laporan Keuangan.
6. Transaksi resiprokal telah sama/tidak ada selisih hanya meliputi transaksi Belanja - PNBP pada satuan kerja penerima kerja-pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN baik yang dibayarkan baik melalui mekanisme LS Bendahara atau Mekanisme UP pada satuan kerja pemberi kerja-belanja.

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara satuan kerja pemberi kerja-belanja dengan satuan kerja penerima kerja-pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh satuan kerja konsolidasi tingkat Kementerian Negara/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.

Eliminasi akun-akun timbal balik tersebut merupakan langkah penting dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah untuk menghindari lebih catat (*overstated*) dalam penyajian Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan tetap menyajikan secara *faithfulness* tidak menimbulkan distorsi informasi. Laporan Mahkamah Agung Tahun 2024 memiliki transaksi resiprokal sebagai berikut:

Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Tahun 2024

No	BAES1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BAES1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih
1	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	236.391.890,00	11701	700200	KANTOR PUSAT TVRI	236.391.890,00	0
2	'00504	401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	75.612.096,00	'02504	423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	75.612.096,00	0
3	'00501	'099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	4.000.000,00	11601	700158	RRI SINGARAJA	4.000.000,00	0
4	'00504	401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	64.584.152,00	'02504	423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	64.584.152,00	0
5	'00504	401241	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	88.160.714,00	'02504	423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	88.160.714,00	0
6	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	949.540.000,00	'08601	450417	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA	949.540.000,00	0
7	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	2.848.320.000,00	'08901	450460	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN	2.848.320.000,00	0
8	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	925.032.000,00	'08801	'020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	925.032.000,00	0
9	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	1.379.000.000,00	'00401	631648	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	1.379.000.000,00	0
10	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	765.600.000,00	'08701	418934	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	765.600.000,00	0

LAMPIRAN A1

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	**Tanah**	**8.060.651,00**	**20.014.331.807.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.014.331.807.703,00**
20101	Tanah Persil	7.943.050,00	19.865.176.902.252,00	0,00	0,00	0,00	19.865.176.902.252,00
20102	Tanah Non Persil	113.854,00	146.641.578.451,00	0,00	0,00	0,00	146.641.578.451,00
20103	Lapangan	3.747,00	2.513.327.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513.327.000,00
132111	**Peralatan Dan Mesin**	**616.968,00**	**5.005.464.644.692,00**	**(3.750.197.294.537,00)**	**(351.123.002.644,00)**	**(4.101.320.297.181,00)**	**904.144.347.511,00**
30101	Alat Besar Darat	2,00	46.980.711,00	(16.500.000,00)	(1.524.036,00)	(18.024.036,00)	28.956.675,00
30103	Alat Bantu	1.371,00	205.624.809.049,00	(129.236.292.499,00)	(14.049.859.349,00)	(143.286.151.848,00)	62.338.657.201,00
30201	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.190,00	627.946.870.573,00	(532.573.862.908,00)	(11.770.522.070,00)	(544.344.384.978,00)	83.602.485.595,00
30202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	886,00	2.167.869.295,00	(1.925.050.427,00)	(158.360.818,00)	(2.083.411.245,00)	84.458.050,00
30301	Alat Bengkel Bermesin	71,00	10.071.547.502,00	(9.638.430.422,00)	(147.671.146,00)	(9.786.101.568,00)	285.445.934,00
30302	Alat Bengkel Tak Bermesin	279,00	5.304.350.824,00	(1.185.244.623,00)	(934.232.254,00)	(2.119.476.877,00)	3.184.873.947,00
30303	Alat Ukur	218,00	1.428.026.431,00	(1.401.582.348,00)	90.108.622,00	(1.311.473.726,00)	116.552.705,00
30401	Alat Pengolahan	454,00	2.011.124.509,00	(1.471.810.910,00)	(154.837.039,00)	(1.626.647.949,00)	384.476.560,00
30501	Alat Kantor	93.774,00	536.736.275.555,00	(468.069.638.926,00)	(16.874.298.481,00)	(484.943.937.407,00)	51.792.338.148,00
30502	Alat Rumah Tangga	369.489,00	1.390.534.775.621,00	(1.034.262.007.418,00)	(87.628.600.325,00)	(1.121.890.607.743,00)	268.644.167.878,00
30601	Alat Studio	19.459,00	199.668.887.251,00	(132.798.666.631,00)	(19.992.103.711,00)	(152.790.770.342,00)	46.878.116.909,00
30602	Alat Komunikasi	8.015,00	50.736.926.556,00	(43.478.858.496,00)	(1.612.191.953,00)	(45.091.050.449,00)	5.645.876.107,00
30603	Peralatan Pemancar	1.080,00	126.721.720.558,00	(53.667.970.301,00)	(8.546.163.779,00)	(62.214.134.080,00)	64.507.586.478,00
30604	Peralatan Komunikasi Navigasi	12,00	133.372.941,00	(119.366.288,00)	(1.941.421,00)	(121.307.709,00)	12.065.232,00
30701	Alat Kedokteran	2.383,00	12.477.620.339,00	(8.742.357.724,00)	(911.201.357,00)	(9.653.559.081,00)	2.824.061.258,00
30702	Alat Kesehatan Umum	198,00	1.117.132.219,00	(604.639.776,00)	(167.005.579,00)	(771.645.355,00)	345.486.864,00
30801	Unit Alat Laboratorium	1.080,00	12.769.526.643,00	(5.977.906.861,00)	(1.012.298.743,00)	(6.990.205.604,00)	5.779.321.039,00
30802	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	46,00	593.203.308,00	(91.174.950,00)	(37.606.888,00)	(128.781.838,00)	464.421.470,00
30803	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	169,00	919.711.333,00	(297.618.576,00)	(58.888.486,00)	(356.507.062,00)	563.204.271,00
30804	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	7,00	750.630.700,00	(251.993.095,00)	(75.063.070,00)	(327.056.165,00)	423.574.535,00
30806	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	13,00	69.766.740,00	(42.118.878,00)	(1.974.846,00)	(44.093.724,00)	25.673.016,00
30807	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	18,00	1.717.513.080,00	(683.893.134,00)	(99.620.193,00)	(783.513.327,00)	933.999.753,00

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30808	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	15,00	176.037.000,00	(57.968.750,00)	(15.359.500,00)	(73.328.250,00)	102.708.750,00
30902	Persenjataan Non Senjata Api	45,00	6.719.471.380,00	(6.596.766.483,00)	(59.573.647,00)	(6.656.340.130,00)	63.131.250,00
30904	Alat Khusus Kepolisian	157,00	1.558.921.091,00	(1.137.292.771,00)	(215.387.192,00)	(1.352.679.963,00)	206.241.128,00
31001	Komputer Unit	66.405,00	892.900.841.607,00	(714.811.992.764,00)	(60.648.536.487,00)	(775.460.529.251,00)	117.440.312.356,00
31002	Peralatan Komputer	42.865,00	884.536.788.769,00	(587.669.175.779,00)	(124.334.105.211,00)	(712.003.280.990,00)	172.533.507.779,00
31101	Alat Eksplorasi Topografi	1,00	3.850.000,00	(2.695.000,00)	(770.000,00)	(3.465.000,00)	385.000,00
31102	Alat Eksplorasi Geofisika	8,00	272.740.109,00	(95.832.677,00)	(23.448.295,00)	(119.280.972,00)	153.459.137,00
31202	Alat Pengeboran Non Mesin	10,00	39.705.000,00	(4.931.000,00)	(3.970.500,00)	(8.901.500,00)	30.803.500,00
31301	Sumur	12,00	540.049.059,00	(200.845.766,00)	(54.540.499,00)	(255.386.265,00)	284.662.794,00
31303	Pengolahan Dan Pemurnian	12,00	5.973.000,00	(4.977.504,00)	(398.208,00)	(5.375.712,00)	597.288,00
31401	Alat Bantu Eksplorasi	18,00	17.655.000,00	(17.655.000,00)	0,00	(17.655.000,00)	0,00
31501	Alat Deteksi	172,00	330.157.500,00	(227.593.500,00)	(29.304.000,00)	(256.897.500,00)	73.260.000,00
31502	Alat Pelindung	10,00	5.490.450,00	(4.610.450,00)	(440.000,00)	(5.050.450,00)	440.000,00
31503	Alat Sar	13,00	1.490.739.650,00	(1.487.154.238,00)	(3.585.412,00)	(1.490.739.650,00)	0,00
31504	Alat Kerja Penerbangan	770,00	22.409.205.514,00	(7.417.695.299,00)	(2.425.234.548,00)	(9.842.929.847,00)	12.566.275.667,00
31601	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	46,00	482.936.694,00	(135.262.752,00)	(33.063.745,00)	(168.326.497,00)	314.610.197,00
31701	Unit Peralatan Proses/Produksi	16,00	512.416.496,00	(299.634.369,00)	(74.223.989,00)	(373.858.358,00)	138.558.138,00
31801	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	21,00	2.832.945.296,00	(2.480.708.190,00)	967.410.594,00	(1.513.297.596,00)	1.319.647.700,00
31901	Peralatan Olah Raga	158,00	1.080.079.339,00	(1.007.517.054,00)	(22.615.083,00)	(1.030.132.137,00)	49.947.202,00
133111	**Gedung Dan Bangunan**	**8.877,00**	**13.252.752.386.154,00**	**(2.277.932.308.669,00)**	**(386.143.832.632,00)**	**(2.664.076.141.301,00)**	**10.588.676.244.853,00**
40101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.401,00	11.690.654.131.602,00	(1.892.802.255.774,00)	(319.668.613.675,00)	(2.212.470.869.449,00)	9.478.183.262.153,00
40102	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.709,00	1.276.283.933.741,00	(352.106.972.782,00)	(58.598.758.830,00)	(410.705.731.612,00)	865.578.202.129,00
40201	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1,00	407.669.000,00	(51.544.361,00)	(9.371.702,00)	(60.916.063,00)	346.752.937,00
40301	Bangunan Menara Perambuan	6,00	2.033.349.084,00	(363.645.546,00)	(62.120.356,00)	(425.765.902,00)	1.607.583.182,00
40401	Tugu/Tanda Batas	760,00	283.373.302.727,00	(32.607.890.206,00)	(7.804.968.069,00)	(40.412.858.275,00)	242.960.444.452,00
134111	**Jalan Dan Jembatan**	**3.039,00**	**19.628.745.150,00**	**(6.868.145.387,00)**	**(1.885.867.206,00)**	**(8.754.012.593,00)**	**10.874.732.557,00**
50101	Jalan	3.009,00	17.843.242.150,00	(6.624.667.703,00)	(1.845.287.592,00)	(8.469.955.295,00)	9.373.286.855,00

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
50102	Jembatan	30,00	1.785.503.000,00	(243.477.684,00)	(40.579.614,00)	(284.057.298,00)	1.501.445.702,00
134112	**Irigasi**	**75,00**	**8.176.807.738,00**	**(1.711.176.005,00)**	**(314.879.210,00)**	**(2.026.055.215,00)**	**6.150.752.523,00**
50201	Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50203	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50204	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	1,00	230.653.264,00	(11.532.663,00)	(23.065.326,00)	(34.597.989,00)	196.055.275,00
50205	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	54,00	4.838.178.474,00	(1.186.035.816,00)	(199.157.866,00)	(1.385.193.682,00)	3.452.984.792,00
50206	Bangunan Air Bersih/Air Baku	1,00	54.664.000,00	(8.974.691,00)	(1.631.762,00)	(10.606.453,00)	44.057.547,00
50207	Bangunan Air Kotor	19,00	3.053.312.000,00	(504.632.835,00)	(91.024.256,00)	(595.657.091,00)	2.457.654.909,00
134113	**Jaringan**	**166,00**	**30.544.727.964,00**	**(12.696.162.729,00)**	**(688.276.167,00)**	**(13.384.438.896,00)**	**17.160.289.068,00**
50301	Instalasi Air Bersih / Air Baku	26,00	3.499.848.930,00	(1.356.623.452,00)	(116.661.634,00)	(1.473.285.086,00)	2.026.563.844,00
50302	Instalasi Air Kotor	19,00	1.795.564.901,00	(651.287.014,00)	(59.852.167,00)	(711.139.181,00)	1.084.425.720,00
50303	Instalasi Pengolahan Sampah	1,00	50.962.510,00	(50.962.510,00)	0,00	(50.962.510,00)	0,00
50305	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50306	Instalasi Gardu Listrik	40,00	17.981.745.413,00	(5.210.075.436,00)	(449.543.639,00)	(5.659.619.075,00)	12.322.126.338,00
50307	Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50309	Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310	Instalasi Lain	22,00	4.411.896.855,00	(4.431.216.855,00)	19.320.000,00	(4.411.896.855,00)	0,00
50401	Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50402	Jaringan Listrik	38,00	1.897.870.397,00	(530.379.917,00)	(47.446.775,00)	(577.826.692,00)	1.320.043.705,00
50403	Jaringan Telepon	20,00	906.838.958,00	(465.617.545,00)	(34.091.952,00)	(499.709.497,00)	407.129.461,00
50404	Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**4,00**	**1.078.042.792,00**	**(26.480.109,00)**	**26.480.109,00**	**0,00**	**1.078.042.792,00**
60702	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60703	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	4,00	1.078.042.792,00	(26.480.109,00)	26.480.109,00	0,00	1.078.042.792,00
60705	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1.038.354,00**	**50.541.287.526,00**	**(565.236.646,00)**	**(21.904.925,00)**	**(587.141.571,00)**	**49.954.145.955,00**
60101	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.036.315,00	35.704.558.095,00	(2.683.400,00)	0,00	(2.683.400,00)	35.701.874.695,00
60102	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	39,00	7.902.158.518,00	0,00	0,00	0,00	7.902.158.518,00
60103	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	732,00	3.858.996.379,00	0,00	(60.000,00)	(60.000,00)	3.858.936.379,00
60201	Barang Bercorak Kesenian	463,00	2.454.326.317,00	(562.553.246,00)	(21.844.925,00)	(584.398.171,00)	1.869.928.146,00
60202	Alat Bercorak Kebudayaan	377,00	576.705.267,00	0,00	0,00	0,00	576.705.267,00
60203	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	428,00	44.542.950,00	0,00	0,00	0,00	44.542.950,00
166112	**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan**	**86.650,00**	**147.335.759.876,00**	**(150.454.857.442,00)**	**14.753.936.258,00**	**(135.700.921.184,00)**	**11.634.838.692,00**
20101	Tanah Persil	600,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
30101	Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Alat Bantu	73,00	2.149.416.786,00	(2.691.189.209,00)	541.772.423,00	(2.149.416.786,00)	0,00
30201	Alat Angkutan Darat Bermotor	512,00	14.533.792.500,00	(12.013.469.418,00)	(2.362.025.939,00)	(14.375.495.357,00)	158.297.143,00
30202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25,00	14.865.000,00	(24.077.473,00)	9.212.473,00	(14.865.000,00)	0,00
30203	Alat Angkutan Apung Bermotor	2,00	623.405.000,00	(623.405.000,00)	0,00	(623.405.000,00)	0,00
30301	Alat Bengkel Bermesin	1,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	0,00
30302	Alat Bengkel Tak Bermesin	10,00	28.677.500,00	(32.244.600,00)	3.567.100,00	(28.677.500,00)	0,00
30303	Alat Ukur	101,00	452.338.880,00	(308.164.012,00)	(144.174.868,00)	(452.338.880,00)	0,00
30401	Alat Pengolahan	21,00	37.675.966,00	(122.026.375,00)	84.350.409,00	(37.675.966,00)	0,00
30501	Alat Kantor	7.575,00	11.685.598.455,00	(17.371.785.466,00)	5.692.709.961,00	(11.679.075.505,00)	6.522.950,00
30502	Alat Rumah Tangga	24.557,00	37.371.992.192,00	(43.888.562.000,00)	6.545.361.958,00	(37.343.200.042,00)	28.792.150,00
30601	Alat Studio	966,00	2.899.398.832,00	(3.129.241.802,00)	232.062.010,00	(2.897.179.792,00)	2.219.040,00
30602	Alat Komunikasi	911,00	2.247.056.017,00	(2.133.610.150,00)	(113.445.867,00)	(2.247.056.017,00)	0,00
30603	Peralatan Pemancar	83,00	2.669.103.948,00	(1.127.030.908,00)	(1.179.496.990,00)	(2.306.527.898,00)	362.576.050,00
30604	Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	(1.595.000,00)	1.595.000,00	0,00	0,00
30701	Alat Kedokteran	109,00	571.423.917,00	(440.827.859,00)	(130.596.058,00)	(571.423.917,00)	0,00
30702	Alat Kesehatan Umum	16,00	377.657.500,00	(277.799.500,00)	(66.572.000,00)	(344.371.500,00)	33.286.000,00

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30801	Unit Alat Laboratorium	3,00	21.689.500,00	(98.902.148,00)	78.389.302,00	(20.512.846,00)	1.176.654,00
30802	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1,00	7.150.000,00	0,00	(2.383.330,00)	(2.383.330,00)	4.766.670,00
30803	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3,00	13.910.000,00	(21.740.277,00)	9.409.913,00	(12.330.364,00)	1.579.636,00
30804	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30806	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30807	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902	Persenjataan Non Senjata Api	2,00	4.400.001,00	(4.400.001,00)	0,00	(4.400.001,00)	0,00
30904	Alat Khusus Kepolisian	1,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	(11.000.000,00)	0,00
31001	Komputer Unit	4.134,00	45.477.904.725,00	(49.970.032.472,00)	4.520.266.014,00	(45.449.766.458,00)	28.138.267,00
31002	Peralatan Komputer	2.640,00	6.939.996.499,00	(8.753.824.596,00)	1.821.473.718,00	(6.932.350.878,00)	7.645.621,00
31101	Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	(1.500.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00
31301	Sumur	1,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	0,00	(3.500.000,00)	0,00
31504	Alat Kerja Penerbangan	4,00	36.400.000,00	(498.752.021,00)	463.672.021,00	(35.080.000,00)	1.320.000,00
31701	Unit Peralatan Proses/Produksi	3,00	9.937.400,00	(9.948.400,00)	11.000,00	(9.937.400,00)	0,00
31801	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
31901	Peralatan Olah Raga	28,00	68.609.768,00	(22.249.268,00)	(46.360.500,00)	(68.609.768,00)	0,00
40101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	47,00	11.337.671.871,00	(5.027.083.459,00)	(493.183.520,00)	(5.520.266.979,00)	5.817.404.892,00
40102	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	53,00	6.014.725.910,00	(1.736.447.047,00)	(744.346.283,00)	(2.480.793.330,00)	3.533.932.580,00
40401	Tugu/Tanda Batas	2,00	66.151.000,00	(52.754.026,00)	29.072.611,00	(23.681.415,00)	42.469.585,00
50101	Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50206	Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50301	Instalasi Air Bersih / Air Baku	1,00	100.000,00	(100.000,00)	0,00	(100.000,00)	0,00
50305	Instalasi Pembangkit Listrik	1,00	5.000.000,00	(2.187.500,00)	(125.000,00)	(2.312.500,00)	2.687.500,00
50306	Instalasi Gardu Listrik	1,00	7.692.000,00	(2.980.650,00)	(192.300,00)	(3.172.950,00)	4.519.050,00
50310	Instalasi Lain	2,00	25.370.000,00	(25.370.000,00)	0,00	(25.370.000,00)	0,00
50401	Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50402	Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI,
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
50403	Jaringan Telepon	1,00	5.000.000,00	(3.625.000,00)	(250.000,00)	(3.875.000,00)	1.125.000,00
60101	Bahan Perpustakaan Tercetak	43.975,00	1.375.064.905,00	0,00	0,00	0,00	1.375.064.905,00
60102	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	12,00	119.218.999,00	0,00	0,00	0,00	119.218.999,00
60201	Barang Bercorak Kesenian	5,00	19.618.805,00	(23.411.805,00)	3.843.000,00	(19.568.805,00)	50.000,00
60202	Alat Bercorak Kebudayaan	6,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00
60203	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	161,00	2.987.000,00	0,00	0,00	0,00	2.987.000,00
60703	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60705	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1,00	94.150.000,00	0,00	0,00	0,00	94.150.000,00
JUMLAH		**9.814.784,00**	**38.529.854.209.595,00**	**(6.200.451.661.524,00)**	**(725.397.346.417,00)**	**(6.925.849.007.941,00)**	**31.604.005.201.654,00**

LAMPIRAN A2

Format A2 KDP sesuai dengan S-133/KN/KN.2/2024
Perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementrian / Lembaga Tahun 2024

Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024 (Audited)
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)		
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
1	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		526/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	14 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 695.178.903,00	Rp 208.553.671,00	78%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		526/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	14 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 695.178.903,00	Rp 278.071.562,00	90%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		501/SEK.PA.W16-A12/PL1.1.5/IX/2024	09 Agustus 2024	31 Desember 2024	Rp 19.500.000,00	Rp 16.575.000,00	90%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		442/KPA.W16-A12/KP7.1/VIII/2024	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	Rp 11.406.541,00	Rp 11.406.541,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		442/KPA.W16-A12/KP7.1/VIII/2024	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	Rp 2.714.000,00	Rp 2.714.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		50/BUA.UKPBJ/ST/IX/2024	24 September 2024	24 September 2024	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		68/BUA.UKPBJ/ST/IX/2024	24 September 2024	24 September 2024	Rp 759.459,00	Rp 759.459,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		584/KPA.W16-A12/HM3.1.2/X/2024	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		526/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	14 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 695.178.903,00	Rp 16.684.293,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		501/SEK.PA.W16-A12/PL1.1.5/IX/2024	09 Agustus 2024	31 Desember 2024	Rp 19.500.000,00	Rp 925.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		558/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	30 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 2.364.548.492,00	Rp 709.364.548,00	71%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		558/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	30 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 2.364.548.492,00	Rp 945.819.397,00	80%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		528/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	08 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 34.965.000,00	Rp 29.720.250,00	80%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		510/KPA.W16-A12/HM3.1.2/IX/2024	10 Agustus 2024	10 Agustus 2024	Rp 4.390.601,00	Rp 4.390.601,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		510/KPA.W16-A12/HM3.1.2/IX/2024	10 Agustus 2024	10 Agustus 2024	Rp 14.988.042,00	Rp 14.988.042,00	100%	Murni			√		
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		510/KPA.W16-A12/HM3.1.2/IX/2024	10 Agustus 2024	10 Agustus 2024	Rp 4.400.000,00	Rp 4.400.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		515/KPA.W16-A12/ST.DL1.10/IX/2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		515/KPA.W16-A12/ST.DL1.10/IX/2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	Rp 11.802.496,00	Rp 11.802.496,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		584/KPA.W16-A12/HM3.1.2/X/2024	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Rp 3.316.000,00	Rp 3.316.100,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		584/KPA.W16-A12/HM3.1.2/X/2024	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Rp 3.623.500,00	Rp 3.623.500,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		90/BUA.UKPBJ/ST/X/2024	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Rp 8.917.873,00	Rp 8.917.873,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		90/BUA.UKPBJ/ST/X/2024	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Rp 2.600.000,00	Rp 2.800.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		455/SEK.PA.W16-A12/SK.PL1.1/VIII/2024	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	Rp 2.800.000,00	Rp 2.600.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		554/KPA.W16-A12/DL1.10/X/2024	25 Oktober 2024	25 Oktober 2024	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		558/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	30 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 2.364.548.492,00	Rp 7.093.645,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		528/SEK.PA.W16-A12/PL1.1/X/2024	08 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 34.965.000,00	Rp 244.750,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		-	31 Desember 2024	31 Desember 2024	0	Rp 13.693.000,00	100%	Murni					
	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	7010101003	114		-	31 Desember 2024	31 Desember 2024	0	Rp 1.383.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 2.305.286.728,00**							
2	099265	Pengadilan Negeri Rantau	7010101003	2		357/SEK.W15-U9/PL.1.1.6/II/2024	15 Februari 2024	15 Maret 2024	Rp 28.860.000,00	Rp 28.860.000,00	100%	Murni					
	099265	Pengadilan Negeri Rantau	7010101003	2		838/SEK.W15-U9/PL1.1.6/VI/2024	20 Juni 2024	17 Oktober 2024	Rp 1.150.000.000,00	Rp 1.150.000.000,00	100%	Murni			√		
	099265	Pengadilan Negeri Rantau	7010101003	2		839/SEK.W15-U9/PL1.1.6/VI/2024	20 Juni 2024	17 Oktober 2024	Rp 89.743.500,00	Rp 89.743.500,00	100%	Murni					
	099265	Pengadilan Negeri Rantau	7010101003	2					Rp 69.993.861,00	Rp 69.993.861,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.338.597.361,00**							
3	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	7010101003	14	Rp 80.613.150,00	W22.U13/D1.16/PL.05/VIII/2024	21 Agustus 2024	30 Desember 2024	Rp 2.113.396.875,00	Rp 94.839.000,00	85%	Murni					
	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	7010101003	14		25/PPK/-PN.PKJ/PL.07/10/2024	24 Oktober 2024	30 Desember 2024		Rp 1.900.000.000,00	95%	Murni			√		
	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	7010101003	14		22/SEK.W22.U13/PL.1.1.6/X/2024	24 Oktober 2024	30 Desember 2024		Rp 66.558.375,00	100%	Murni					
	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	7010101003	14		Pengelola Kegiatan				Rp 51.999.500,00	100%	Murni					
	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene				Koreksi Audited				(Rp 721.489.081,00)							
						Total KDP				**Rp 1.391.907.794,00**							
4	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	1	Rp 3.263.300,00					Rp 3.263.300,00	1%	Murni					
	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	1		No : W7-U3/3/PPK/PL.01/6/2023	5 Juni 2023	2 September 2024		Rp 864.700.000,00	100%	Murni	Rp 216.175.000,00				
	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	1		No : 14/PPK.W7-U3/SP/PL.01/10/2023	31 Oktober 2023	9 Desember 2024		Rp 21.784.474.000,00	100%	Murni	Rp 3.131.239.350,00				
	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	1		No : 13/PPK.W7-U3/SP/PL.01/10/2023	30 Oktober 2023	9 Desember 2024	Rp 23.639.531.578,00	Rp 795.103.544,00	100%	Murni	Rp 108.439.119,00		√		
	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	1						Rp 58.830.832,00	96%	Murni					
	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	1						Rp 129.896.602,00	84%	Murni					
	400600	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	7010101003	2						Rp 3.263.300,00	1%	Murni					
						Total KDP				**Rp 23.639.531.578,00**							
5	400781	Pengadilan Agama Kuningan	7010101003	1		3056/SEK.03/W10-A14/PL1.1.1/IX/2024	04 September 2024	19 Agustus 2025	Rp 29.443.015.598,00	Rp 5.968.200.000,00	30%	Murni	Rp 1.193.640.000,00	Rp 1.173.740.780,00			
	400781	Pengadilan Agama Kuningan	7010101003	1		3055/SEK.03/W10-A14/PL1.1.1/IX/2025	04 September 2024	19 Agustus 2025	Rp 1.158.552.000,00	Rp 237.800.000,00	30%	Murni	Rp 47.560.000,00	Rp 46.037.400,00	√		
	400781	Pengadilan Agama Kuningan	7010101003	1		0885/SEK.03/W10-A14/PL1.1.1/IX/2026	04 September 2024	19 Agustus 2025	Rp 694.576.728,00	Rp 590.390.219,00	80%	Murni					
	400781	Pengadilan Agama Kuningan	7010101003	1			04 September 2024	19 Agustus 2025		Rp 167.292.840,00		Murni					
						Total KDP				**Rp 6.963.683.059,00**							
6	401024	Pengadilan Agama Temanggung	7010101003	1		1439/SEK.PA.03.W11-A21/PL.1.1/VIII/2024	12 Agustus 2024	9 November 2024	Rp 1.126.928.503,00	Rp 991.697.503,00	88%	Murni	Rp 225.385.833,00				
	401024	Pengadilan Agama Temanggung	7010101003	1		1805/SEK.PA.03.W11-A21/PL.1.1.7/X/2024	24 Oktober 2024	18 Oktober 2025	Rp 25.765.247.000,00	Rp 6.608.785.856,00	26%	Murni	Rp 3.864.787.050,00		√		
	401024	Pengadilan Agama Temanggung	7010101003	1		1806/SEK.PA.03.W11-A21/PL1.1.7/X/2024	24 Oktober 2024	18 Oktober 2025	Rp 967.500.000,00	Rp 248.163.750,00	26%	Murni	Rp 145.125.000,00				
	401024	Pengadilan Agama Temanggung	7010101003	1				-	Rp 424.607.000,00	Rp 197.970.037,00	47%	Murni					
						Total KDP				**Rp 8.046.617.146,00**							
7	401582	Mahkamah Syar'iyah Aceh	7010101003	1	Rp 39.882.000,00		-	-		Rp 39.882.000,00	7%	Murni					
	401582	Mahkamah Syar'iyah Aceh	7010101003	1		579/SEK.02.MS.W1-A/PL1.1/X.2024	03 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 599.257.600,00	Rp 39.340.600,00	13%	Murni			√		
	401582	Mahkamah Syar'iyah Aceh	7010101003	1		653/SEK.MSP.02.W1-A/PL1.1.7/XI/2024	03 Oktober 2024	31 Desember 2024		Rp 520.035.000,00	80%	Murni					
						Total KDP				**Rp 599.257.600,00**							
8	401870	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	7010101003	1	Rp 15.933.501.982,00					Rp 15.933.501.982,00	51,35%	Murni					
	401870	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	7010101003	1		W16-A9/0865/PL1.1.7/VIII/2023 (Kontrak Fisik)	01 September 2023	31 Desember 2024		Rp 14.246.381.214,00	97,26%	Murni					
	401870	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	7010101003	1		W16-A9/0866/PL1.1.5/VIII/2023 (Kontrak Pengawas)	01 September 2023	31 Desember 2024	Rp 31.029.365.468,00	Rp 411.004.308,00	98,59%	Murni			√		
	401870	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	7010101003	1		0216/SEK.PA.W16-A9/PL1.1.5/I/2024 (Kontrak Perencana)	31 Januari 2024	31 Desember 2024		Rp 62.250.836,00	98,79%	Murni					
	401870	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	7010101003	1		Pengelola Kegiatan	01 Januari 2024	31 Desember 2024		Rp 139.892.486,00	99,24%	Murni					
						Total KDP				**Rp 30.793.030.826,00**							
9	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	7010101003	1	Rp 25.629.939.627,00					Rp 25.629.939.627,00	100%	Murni					
	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	7010101003	1		W21-A8/75/SPK/PPK/8/2024	21 Agustus 2024	30 Desember 2024	Rp 9.882.605.000,00	Rp 9.882.605.000,00	100%	Murni					
	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	7010101003	1		W21-A8/73/SPK/PPK/8/2024	21 Agustus 2024	31 Desember 2024	Rp 486.975.000,00	Rp 486.975.000,00	100%	Murni			√		
	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	7010101003	1		W21-A8/69/SPK/8/2024	21 Agustus 2024	18 Desember 2024	Rp 197.128.984,00	Rp 197.128.984,00	100%	Murni					
	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	7010101003	1		Pengelola Kegiatan				Rp 290.635.871,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 36.487.284.482,00**							
10	401887	Pengadilan Agama Rumbia	7010101003	1	Rp 18.217.147.379,00					Rp 18.202.243.087,00	100%	Murni					
	401888	Pengadilan Agama Rumbia	7010101003	1		32/PPK.PA.W21-A10/Kontrak.PL1/IX/2024	18 September 2024	31 Desember 2024		Rp 9.184.000.000,00	100%	Murni		Rp 459.200.000,00			
	401888	Pengadilan Agama Rumbia	7010101003	1		34/PPK.PA.W21-A10/SPK.Pws.PL1/IX/2024	18 September 2024	31 Desember 2025	Rp 9.588.956.633,00	Rp 99.949.950,00	100%	Murni			√		
	401888	Pengadilan Agama Rumbia	7010101003	1		14/PPK.PA.W21-A10/SPK.Prc/PL1/VIII/2024	12 Agustus 2024	21 Agustus 2024		Rp 83.838.300,00	100%	Murni					
	401888	Pengadilan Agama Rumbia	7010101003	1		Pengelola Kegiatan				Rp 236.072.675,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 27.806.104.012,00**							
11	401893	Pengadilan Agama Kwandang	7010101003	1	Rp 13.449.857.843,00							Murni					
	401893	Pengadilan Agama Kwandang	7010101003	1		1112/SEK.03.PA.W26-A6/PL1/VIII/2024	28 Agustus 2024	26 September 2024	Rp 98.701.000,00	Rp 98.701.000,00	100%	Murni					
	401893	Pengadilan Agama Kwandang	7010101003	1		1309/SEK.03.W26-A6/PL1.1.7/X/2024	24 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 2.225.250.000,00	Rp 2.225.250.000,00	100%	Murni			√		
	401893	Pengadilan Agama Kwandang	7010101003	1		1308/SEK.03.W26-A6/PL1.1.7/X/2024	24 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 98.000.000,00	Rp 98.000.000,00	100%	Murni					
	401893	Pengadilan Agama Kwandang	7010101003	1		1490/SEK.03.W26-A6/PL1.1.7/XII/2024	20 Desember 2024	31 Desember 2024	Rp 172.000.000,00	Rp 172.000.000,00	100%	Murni					
	401893	Pengadilan Agama Kwandang	7010101003	1						Rp 79.716.021,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 2.673.667.021,00**							
12	401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	7010101003	5		868/SEK.PN.W1-U20/PL.1.1.5/VIII/2024	30 Agustus 2024	28 September 2024	Rp 99.955.500,00	Rp 99.955.500,00	100%	Murni					

Format A2 KDP sesuai dengan S-133/KN/KN.2/2024
Perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementrian / Lembaga Tahun 2024

Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024 (Audited)
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)		
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
	401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	7010101003	5		1004/SEK.PN.W1-U20/PL1.1.7/X/2024 (KONTRAK AWAL) 1083/SEK.PN.W1-U20/PL1.1.7/X/2024 (ADD I) 1167/SEK.PN.W1-U20/PL1.1.7/XI/2024 (ADD II) 1374/SEK.PN.W1-U20/PL1.1.7/XII/2024 (ADD III PEMBERIAN KESEMPATAN)	1 Oktober 2024	29 Desember 2024 (Pemberian Kesempatan sampai dengan 17 Februari 2025)	Rp 2.650.337.603,00	Rp 2.650.337.603,00	67,4%	Murni			√		
	401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	7010101003	5		1006/SEK.PN.W1-U20/PL1.1.5/X/2024 (KONTRAK AWAL) 1374.a/SEK.PN.W1-U20/PL1.1.7/XII/2024 (ADD I)	1 Oktober 2024	29 Desember 2024 (Perpanjangan mendampingi pelaksana sampai dengan 17 Februari 2025)	Rp 99.900.000,00	Rp 99.900.000,00	67,4%	Murni					
	401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	7010101003	5		Pengelola Kegiatan				Rp 64.969.200,00		Murni					
	401902	Pengadilan Negeri Blangpidie				Koreksi Audited				(Rp 895.202.340,00)							
						Total KDP				**Rp 2.019.959.963,00**							
13	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1	Rp 12.679.393.326,00												
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/274/PL.01/02/2023	24 Februari 2023	24 Mei 2024	Rp 1.045.779.000,00	Rp 836.623.200,00	80%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/274/PL.01/02/2023	24 Februari 2023	24 Mei 2024	Rp 1.045.779.000,00	Rp 52.288.950,00	5%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1599/PL.01/11/2023	28 November 2023	31 Desember 2023	Rp 998.002.526,00	Rp 36.079.375,00	3,45%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1599/PL.01/11/2023	01 Januari 2024	29 Juni 2024	Rp 998.002.526,00	Rp 73.011.000,00	11,55%	Murni					
						Jumlah Perencanaan 2023				Rp 998.002.525,00							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		243/SEK.W11.U22/PL.1.1/IX/2024	18 September 2024	24 September 2024	Rp 46.642.200,00	Rp 37.313.760,00	80%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		243/SEK.W11.U22/PL.1.1/IX/2024	18 September 2024	24 September 2024	Rp 46.642.200,00	Rp 9.328.440,00	20%	Murni					
						Jumlah Perencanaan 2024				Rp 46.642.200,00							
						Total Perencanaan 2023 dan 2024				**Rp 1.044.644.725,00**							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/895/PL.01/7/2023	14 Juli 2024	10 Januari 2024	Rp 1.461.270.000,00	Rp 336.092.100,00	23%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/895/PL.01/7/2023	14 Juli 2024	10 Januari 2024	Rp 930.892.100,00	Rp 297.400.000,00	40%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/895/PL.01/7/2023	14 Juli 2024	10 Januari 2024	Rp 930.892.100,00	Rp 297.400.000,00	37%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		Pengembalian Pemeriksaan Bawas				)Rp 56.250.000,00)							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		Jumlah Pengawasan 2023				Rp 874.642.100,00							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		1365/PPK.W11.U22/PL.1.1.7/X/2024	21 Oktober 2024	28 Oktober 2024	Rp 99.900.000,00	Rp 49.950.000,00	50%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		1365/PPK.W11.U22/PL.1.1.7/X/2024	21 Oktober 2024	28 Oktober 2024	Rp 99.900.000,00	Rp 49.950.000,00	50%	Murni					
						Jumlah Pengawasan 2024				Rp 99.900.000,00					√		
						Total Pengawasan 2023 dan 2024				**Rp 974.542.100,00**							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1543/PL.01/11/2023	15 November 2023	29 Juni 2024	Rp 29.091.000.000,00	Rp 4.363.650.000,00	15%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1543/PL.01/11/2023	15 November 2023	29 Juni 2024	Rp 29.091.000.000,00	Rp 6.690.930.000,00	30%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1543/PL.01/11/2023	15 November 2023	29 Juni 2024	Rp 23.595.864.000,00	Rp 6.270.642.000,00	28%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1543/PL.01/11/2023	15 November 2023	29 Juni 2024	Rp 23.595.864.000,00	Rp 5.090.848.800,00	23%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		W11.U22/1543/PL.01/11/2023	15 November 2023	29 Juni 2024	Rp 23.595.864.000,00	Rp 1.179.793.200,00	5%	Murni					
						Jumlah Pelaksanaan 2023				Rp 23.595.864.000,00							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		1337/PPK.W11.U22/PL1.1.7/X/2024	15 Oktober 2024	28 Desember 2024	Rp 5.384.834.202,00	Rp 1.615.450.261,00	30%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		1337/PPK.W11.U22/PL1.1.7/X/2024	15 Oktober 2024	28 Desember 2024	Rp 5.384.834.202,00	Rp 1.615.450.261,00	30%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		1337/PPK.W11.U22/PL1.1.7/X/2024	15 Oktober 2024	28 Desember 2024	Rp 5.883.492.000,00	Rp 2.358.416.878,00	35%	Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		1337/PPK.W11.U22/PL1.1.7/X/2024	15 Oktober 2024	28 Desember 2024	Rp 5.883.492.000,00	Rp 294.174.600,00	5%	Murni					
						Jumlah Pelaksanaan 2024				Rp 5.883.492.000,00							
						Total Pelaksanaan 2023 dan 2024				**Rp 29.479.356.000,00**							
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		Pengelola Kegiatan 2023				Rp 363.729.701,00		Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		Pengembalian Bawas 2023				)Rp 36.335.210,00)		Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		Total Pengelola Kegiatan 2023				Rp 327.394.491,00		Murni					
	401914	Pengadilan Negeri Banjar	7010101003	1		Pengelola Kegiatan 2024				Rp 152.092.057,00		Murni					
						Total Pengelola Kegiatan 2023 dan 2024				**Rp 479.486.548,00**		Murni					
						Total KDP				**Rp 31.978.029.373,00**							
14	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4						Rp 0,00	0%	Murni					
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4		3/PPK-W16-U10/PL.1/BM/VIII/2024	16 Agustus 2024	9 Desember 2024		Rp 99.890.357,00	100%	Murni					
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4		15/PPK-W16-U10/PL1.1.7/BM/IX/2024	30 September 2024	28 Desember 2024		Rp 2.771.542.000,00	100%	Murni	Rp 755.875.200,00	Rp 138.577.100,00			
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4		31/PPK-W16-U10/PL1.1.5/BM/IX/2024	1 Oktober 2024	28 Desember 2024		Rp 76.900.000,00	100%	Murni					
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4					Rp 3.245.349.557,00	Rp 46.827.200,00	100%	Murni			√		
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4		52/PPK-W16-U10/PL1.1.5/BM/XII/2024				Rp 28.900.000,00	100%	Murni					
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4		59/PPK-W16-U10/PL1.1.7/BM/XII/2024				Rp 199.500.000,00	100%	Murni					
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4		63/PPK-W16-U10/PL1.1.5/BM/XII/2024				Rp 19.750.000,00	100%	Murni					
	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	7010101003	4						Rp 2.040.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 3.245.349.557,00**							
15	401929	Pengadilan Negeri Dobo	7010101003	2		2/SP-KONS/PPK/VIII/2024	31 Agustus 2024	4 Desember 2024	Rp 1.207.420.000,00	Rp 360.222.600,00	30%	Murni	Rp 360.222.600,00				
										Rp 241.484.000,00	50%	Murni					
	401929	Pengadilan Negeri Dobo	7010101003	2		1/SPK-PRC/PPK/V/2024	10 Mei 2024	8 Juni 2024	Rp 24.419.445,00	Rp 19.824.000,00	100%	Murni					
	401929	Pengadilan Negeri Dobo	7010101003	2		Pengelola Kegiatan			Rp 118.001.000,00	Rp 19.968.000,00	17%	Murni			√		
										Rp 38.698.520,00	50%	Murni					
										Rp 25.000.000,00	71%	Murni					
										Rp 34.300.000,00	100%	Murni					
	401929	Pengadilan Negeri Dobo	7010101003			Koreksi Audited				Rp 612.853.436,00							
						Total KDP				**Rp 1.352.350.556,00**							
16	401939	Pengadilan Agama Mukomuko	7010101003	1		W7-A6/285/PL.01/2/2022	18 Februari 2022	6 Mei 2022	Rp 634.830.459,00	Rp 634.830.459,00	100%	Murni				√ Dihentikan sementara karena terdapat kasus wanprestasi dari penyedia, masih berproses dikejaksaan dan belum ada anggaran lanjutan di	
	401939	Pengadilan Agama Mukomuko	7010101003	1		W7-A6/999/PL.01/8/2022	19 Agustus 2022	19 Desember 2022	Rp 18.228.817.736,00	Rp 12.784.924.536,00	70%	Murni					
	401939	Pengadilan Agama Mukomuko	7010101003	1		W7-A6/998/PL.01/8/2022	19 Agustus 2022	19 Desember 2022	Rp 603.463.695,00	Rp 383.151.295,00	65%	Murni					
	401939	Pengadilan Agama Mukomuko	7010101003	1		Pengelola kegiatan 2023				Rp 147.166.350,00		Murni					
	401939	Pengadilan Agama Mukomuko	7010101003	1		Pengelola kegiatan 2024				Rp 126.276.132,00		Murni					
						Total KDP				**Rp 14.076.348.772,00**							
17	401940	Pengadilan Agama Bintuhan	7010101004	1	Rp 200.961.060,00				Rp 246.352.701,00	Rp 160.768.848,00	80%	Murni				√ dihentikan sementara, karena anggaran yang telah disediakan dioptimalisasi oleh	
	401940	Pengadilan Agama Bintuhan	7010101004	1		2024	1 Januari 2024	31 Desember 2024		Rp 85.583.853,00	100%	Murni					

Format A2 KDP sesuai dengan S-133/KN/KN.2/2024
Perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementrian / Lembaga Tahun 2024

Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024 (Audited)
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)		
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
						Total KDP				**Rp 246.352.701,00**							
18	401941	Pengadilan agama tais	7010101003	2		39/SEK.03/PL1.1.7/X/2024	02 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 99.987.135,00	Rp 99.987.135,00	100,00%	Murni					
	401941	Pengadilan agama tais	7010101003	2		41/SEK.03/PL1.1.5/X/2024	02 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 2.999.900.000,00	Rp 2.855.184.784,00	85%	Murni			√		
	401941	Pengadilan agama tais	7010101003	2		1198/SEK.03/PL1.1.5/VIII/2024	02 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 98.913.210,00	Rp 84.076.229,00	85%	Murni					
	401941	Pengadilan agama tais	7010101003	2		Pengelola Kegiatan	31 Agustus 2024	31 Desember 2024	Rp 79.875.342,00	Rp 79.875.342,00	100,00%	Murni					
	401941	Pengadilan agama tais				Koreksi Audited				(Rp 440.889.152,00)							
	401941	Pengadilan agama tais				Koreksi Audited				(Rp 512.167.888,00)							
						Total KDP				**Rp 2.166.066.450,00**							
19	401945	Pengadilan Agama Muaradua	7010101003	1	Rp 21.758.291.925,00				Rp 21.758.291.925,00	Rp 21.758.291.925,00	100%	Murni					
	401945	Pengadilan Agama Muaradua	7010101003	1		1160/SEK.PA.W6-A10/PL1.1.5/VIII/2024	14 Agustus 2024	31 Desember 2024	Rp 99.012.000,00	Rp 84.160.200,00	90%	Murni					
	401945	Pengadilan Agama Muaradua	7010101003	1		1802/SEK.PA.W6-A10/PL1.1.7/XII/2024	07 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 6.285.499.108,00	Rp 3.663.165.066,00	90%	Murni			√		
	401945	Pengadilan Agama Muaradua	7010101003	1		1445/SEK.PA.W6-A10/PL1.1.5/X/2024	07 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 99.308.592,00	Rp 59.585.156,00	90%	Murni					
	401945	Pengadilan Agama Muaradua	7010101003	1			01 Januari 2024	31 Desember 2024		Rp 113.444.284,00	100%	Murni					
	401945	Pengadilan Agama Muaradua	7010101003	1		RPATA	01 Januari 2025	31 Januari 2025		Rp 2.422.262.430,00	10%	Murni					
						Total KDP				**Rp 28.100.909.061,00**							
20	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	7010101003	1	Rp 23.251.549.068,00	1189/SEK.PA.W14-A10/PL1.1/IX/2024	20 September 2024	31 Desember 2024	Rp 8.876.230.721,00	Rp 32.127.779.789,00	100%	Murni	Rp 2.662.869.216,00	Rp 443.811.537,00		√ (tidak ada anggaran untuk lanjutan penyelesaian sarana lingkungan pada anggaran 2025/masih dalam	
	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	7010101003	1	Rp 770.823.326,00	1069/SEK.PA.W14-A10/PL.1.1.5/VIII/2024	16 Agustus 2024	31 Desember 2024	Rp 173.001.603,00	Rp 943.824.929,00	100%	Murni					
	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	7010101003	1	Rp 649.531.074,00	1188/SEK.PA.W14-A10/PL.1.1.5/IX/2024	20 September 2024	31 Desember 2024	Rp 99.745.049,00	Rp 749.276.123,00	100%	Murni					
	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	7010101003	1	Rp 281.165.712,00				Rp 114.831.473,00	Rp 395.997.185,00	0%	Murni					
						Total KDP				**Rp 34.216.878.026,00**							
21	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1	Rp 4.998.260.479,00					Rp 4.998.260.479,00	20%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 4.874.271.126,00	50%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		1753/SEK.03.PA.W14-A11/PL1.1.7/IX/2023	11 September 2023	25 Juli 2024	Rp 19.915.182.100,00	Rp 4.864.542.042,00	75%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 5.298.705.277,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 995.759.105,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 214.847.993,00	50%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		1754/SEK.03.PA.W14-A11/PL1.1.5/IX/2023	11 September 2023	25 Juli 2024	Rp 859.391.970,00	Rp 214.847.993,00	75%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 171.878.394,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 85.939.196,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		337/SEK.03.PA.W14-A11/PL1.1.5/I/2024	11 September 2023	25 Juli 2024	Rp 234.537.117,00	Rp 234.537.117,00	100%	Murni			√		
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		1525/SEK.03.PA.W14-A11/PL1.1.5/VII/2024	15 Juli 2024	24 Desember 2024	Rp 97.680.000,00	Rp 83.028.000,00	85%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 14.652.000,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 1.489.964.229,00	20%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		1875/SEK.03.PA.W14-A11/PL1.1.7/VIII/2024	27 Agustus 2024	24 Desember 2024	Rp 7.680.000.000,00	Rp 1.862.455.287,00	50%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 4.327.580.484,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 35.002.400,00	20%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		1841/SEK.03.PA.W14-A11/PL1.1.5/VIII/2024	27 Agustus 2024	24 Desember 2024	Rp 175.012.000,00	Rp 43.753.000,00	50%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1						Rp 96.256.600,00	100%	Murni					
	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	7010101003	1		Pengelola Kegiatan (AP Proyek)				Rp 205.472.950,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 30.111.753.672,00**							
22	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003	1		W28-U5/525a/PL.01/5/2023 PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	16 Oktober 2023	09 Nopember 2024	Rp 789.731.570,00	Rp 173.228.020,00	22%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003	2		720/PPK.W28- U5/PL.01/10/2024 PT. FASADE KOBETAMA	16 Oktober 2023	09 Nopember 2024	Rp 789.731.570,00	Rp 458.618.510,00	58%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003							Rp 157.885.040,00	20%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003	1		926/PPK-PN.SNN/W28- U5/PL.01/X/2023 DWI ELTIS KONSULTAN	16 Oktober 2023	09 Nopember 2024	Rp 1.392.916.800,00	Rp 818.338.620,00	59%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003	2		926/PPK-PN.SNN/W28- U5/PL.01/X/2023 DWI ELTIS KONSULTAN	16 Oktober 2023	09 Nopember 2024	Rp 1.392.916.800,00	Rp 416.693.140,00	30%	Murni			√		
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003							Rp 157.885.040,00	11%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003	1		916/PPK-PN.SNN/W28- U5/PL.01/X/2023 MERANTI JAYA PERMAI	16 Oktober 2023	09 Nopember 2024	Rp 38.783.350.400,00	Rp 23.596.046.801,00	61%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003	2		916/PPK-PN.SNN/W28- U5/PL.01/X/2023 MERANTI JAYA PERMAI	16 Oktober 2023	09 Nopember 2024	Rp 38.783.350.400,00	Rp 13.238.798.473,00	34%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana	7010101003							Rp 1.948.505.126,00	5%	Murni					
	401972	Pengadilan Negeri Sanana				Pengelola Kegiatan				Rp 229.190.000,00							
						Total KDP				**Rp 41.195.188.770,00**							
23	402562	Pengadilan Agama Tanjung	7010101003	1		Saldo Awal				Rp 5.828.671.580,00		Murni					
	402562	Pengadilan Agama Tanjung	7010101003	1	Rp 876.571.389,00	W15-A10/680/PL.01/4/2023	04/04/2023	22/12/2023	Rp 876.571.389,00		100%	Murni					
	402562	Pengadilan Agama Tanjung	7010101003	1	Rp 4.567.428.000,00	1356/SEK.PA.W15-A10/PL1.1.7/IX/2023	15/09/2023	22/11/2023	Rp 23.535.140.000,00	Rp 18.967.712.000,00	100%	Murni			√		
	402562	Pengadilan Agama Tanjung	7010101003	1	Rp 177.044.755,00	1354/SEK.PA.W15-A10/PL1.1.5/IX/2023	15/09/2023	22/11/2023	Rp 885.223.776,00	Rp 708.179.021,00	100%	Murni					
	402562	Pengadilan Agama Tanjung	7010101003	1	Rp 209.328.436,00	-	-	-	-	Rp 99.915.441,00	100%	Murni					
		Total KDP								**Rp 25.604.478.042,00**	100%						
24	403015	Pengadilan Agama Slawi	7010101003	1	Rp 17.737.865.000,00	W11-A34/3308/PL.01/VIII/2023	01 Agustus 2023	25 Juli 2024		Rp 17.737.865.000,00	100%	Murni	Rp 635.050.650,00				
	403015	Pengadilan Agama Slawi	7010101003	1	Rp 150.901.725,00	W11-A34/1915/PL.01/V/2023	15 Mei 2023	31 Desember 2023		Rp 150.901.725,00	100%	Murni			√		
	403015				Rp 445.728.000,00	22/SEK.PA.W11-A34/PL1.1/I/2024	05 Januari 2024	25 Juli 2024		Rp 445.728.000,00	100%	Murni		Rp 8.914.560,00	Proses KDP sudah Selesai sesuai BAST PHO 2 Tanggal 21 Januari 2025		
	403015	Pengadilan Agama Slawi	7010101003	1	Rp 739.110.000,00	W11-A34/1222/PL.01/III/2023	13 Maret 2023	27 November 2024	Rp 19.538.873.747,00	Rp 739.110.000,00	100%	Murni					
	403015				Rp 160.149.000,00	21/SEK.W11-A34/PL1.1/I/2024	05 Januari 2024	25 Juli 2024		Rp 160.149.000,00	100%	Murni					
	403015	Pengadilan Agama Slawi	7010101003	1	Rp 184.136.222,00	800/236, 317/Bua.UKPBJ/SK/XII/2022 dan 61/Bua.UKPBJ/SK/V/2023	13 Maret 2023	45.257		Rp 184.136.222,00	100%	Murni					
	403015				Rp 120.983.800,00	800/236 dan 203/Bua.UKPBJ/SK/XII/2023	05 Januari 2024	25 Juli 2024		Rp 120.983.800,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 19.538.873.747,00**							
25	450737	Pengadilan Agama Tuban	7010101003	1		502/SEK.PA.W13-A6/PL1.1.5/II/2024 dan Addendum No 2409/SEK.PPK.PA.W13-A6/PL1.1.5/X/2024	12 Februari 2024	10 Juni 2025	Rp 1.027.435.869,00	Rp 821.948.695,00	80%	Murni					
	450737	Pengadilan Agama Tuban	7010101003	1		2401/SEK.PPK.PA.W13-A6/PL1.1.7/X/2024	14 Oktober 2024	10 Juni 2025	Rp 31.476.355.812,00	Rp 7.613.554.000,00	9,24%	Murni	Rp 4.721.453.372,00	Rp 1.573.817.791,00	√		
	450737	Pengadilan Agama Tuban	7010101003	1		2400/SEK.PPK.PA.W13-A6/PL1.1.5/X/2024	14 Oktober 2024	10 Juni 2025	Rp 1.202.446.311,00	Rp 248.571.000,00	9,24%	Murni	Rp 180.366.947,00	Rp 108.194.820,00			
	450737	Pengadilan Agama Tuban	7010101003	1						Rp 111.624.145,00	28%						
						Total KDP				**Rp 8.795.697.840,00**							
26	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1	Rp 21.862.694.307,00					Rp 21.862.694.307,00	49,86%	Murni					
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		1006/SEK.02.W33-U/PL1.1.7/VIII/2023	30 Agustus 2023	29 Agustus 2024	Rp 33.727.684.000,00	Rp 13.513.435.880,00	30,82%	Murni		Rp 1.686.384.200,00			
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		1217/SEK.02.W33-U/PL1.1.7/X/2023	04 Oktober 2023	30 Juni 2024	Rp 1.511.209.500,00	Rp 440.939.175,00	1,01%	Murni					
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		341/SEK02.W33-U/PL1.1.7/II/2024	29 Februari 2024	29 Agustus 2024	Rp 75.357.900,00	Rp 75.357.900,00	0,17%	Murni			√		

Format A2 KDP sesuai dengan S-133/KN/KN.2/2024
Perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementrian / Lembaga Tahun 2024

Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024 (Audited)
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)		
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		1028/SEK02.W33-U/PL1.1.7/VIII/2024	21 Agustus 2024	4 September 2024	Rp 98.370.000,00	Rp 98.370.000,00	0,22%	Murni					
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		1278/SEK02.W33-U/PL1.1.7/IX/2024	27 September 2024	31 Desember 2024	Rp 7.671.914.000,00	Rp 7.671.914.000,00	17,50%	Murni	Rp 2.301.574.200,00	Rp 383.595.700,00			
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		1281/SEK02.W33-U/PL1.1.7/IX/2025	27 September 2024	31 Desember 2024	Rp 74.101.200,00	Rp 74.101.200,00	0,17%	Murni					
	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	7010101003	1		Pengelola Kegiatan				Rp 107.597.648,00	0,24%	Murni					
						Total KDP				**Rp 43.844.410.110,00**							
27	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-7/PL1.1.3/1/2024	25 Maret 2024	22 Juni 2024	Rp 117.760.000,00	Rp 117.760.000,00	10%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-7/PL1.1.3/1/2024	25 Maret 2024	31 Desember 2024	Rp 235.520.000,00	Rp 235.520.000,00	20%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-7/PL1.1.3/1/2024	25 Maret 2024	22 Juni 2024	Rp 353.280.000,00	Rp 353.280.000,00	30%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-7/PL1.1.3/1/2024	25 Maret 2024	23 Mei 2024	Rp 353.280.000,00	Rp 353.280.000,00	30%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-7/PL1.1.3/1/2024	25 Maret 2024	23 Mei 2024	Rp 117.760.000,00	Rp 117.760.000,00	10%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-17/PL1.1.7/8/2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2025	Rp 6.955.675.200,00	Rp 6.955.675.200,00	60.41%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-17/PL1.1.7/8/2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2025	Rp 2.279.287.400,00	Rp 2.279.287.400,00	19.8%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-17/PL1.1.7/8/2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2025	Rp 2.279.287.400,00	Rp 2.279.287.400,00	19.8%	Murni			√		
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-18/PL1.1.5/8/2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2025	Rp 227.812.500,00	Rp 227.812.500,00	50%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1		W31-U/PPK-18/PL1.1.5/8/2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2025	Rp 227.812.500,00	Rp 227.812.500,00	50%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1					Rp 115.206.086,00	Rp 115.206.086,00	100%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1					Rp 28.733.843,00	Rp 28.733.843,00	100%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1					Rp 34.090.000,00	Rp 34.090.000,00	100%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1					Rp 6.370.000,00	Rp 6.370.000,00	100%	Murni					
	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	7010101003	1					Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 13.335.474.929,00**							
28	526720	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	7010101003	1		495/SEK.02.W34-U/PL1.1.5/X/2024	9 Oktober 2024	7 Desember 2024	Rp 1.144.410.000,00	Rp 1.144.410.000,00	80%	Murni			√		
	526720	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	7010101003	1						Rp 92.934.360,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.237.344.360,00**							
29	526722	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	7010101003	1	Rp 0,00	970/SEK.02.W34-A/PL1.1.5/X/2024	14 Oktober 2024	12 Desember 2024	Rp 1.123.220.100,00	Rp 1.123.220.100,00	80%	Murni			√		
	526722	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara				Non kontraktual (Pengelola Kegiatan)			Rp 93.000.000,00	Rp 93.000.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.216.220.100,00**							
30	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 240.000,00	100%	Murni					
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 877.000,00	100%	Murni					
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 5.741.350,00	100%	Murni					
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1		399/SEK.PTTUN.W1-TUN/PL1.1/VIII/2024	22/08/2024	30/11/2024	Rp 1.192.027.668,00	Rp 1.192.027.668,00	100%	Murni			√		
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 22.700.934,00	100%	Murni					
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 15.247.893,00	100%	Murni					
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 6.982.696,00	100%	Murni					
	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	7010101003	1						Rp 359.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.244.176.541,00**							
31	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	7010101003	1	Rp 46.070.952,00					Rp 46.070.952,00	4%	Murni	Rp 323.780.000,00				
	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	7010101003	1		W7-TUN/831/PL1.1.5/X/2024	17 Oktober 2024	15 Desember 2024		Rp 323.780.000,00	32%	Murni					
	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	7010101003	1		W7-TUN/831/PL1.1.5/X/2024	17 Oktober 2024	15 Desember 2024	Rp 1.079.266.986,00	Rp 39.503.940,00	35%	Murni			√		
	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	7010101003	1		W7-TUN/831/PL1.1.5/X/2024	17 Oktober 2024	15 Desember 2024		Rp 755.486.986,00	99%	Murni					
	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	7010101003	1		W7-TUN/831/PL1.1.5/X/2024	17 Oktober 2024	15 Desember 2024		Rp 6.316.817,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.171.158.695,00**							
32	526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	7010101003	1							70%	Murni					
	526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	7010101003	1		No : 20/SP.PPK/W4-TUN1/PL.1.1.5/IX/2024	12 September 2024	20 Desember 2024	Rp 941.773.284,00	Rp 941.773.284,00	100%	Murni			√		
	526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	7010101003	1			12 September 2024	20 Desember 2024		Rp 76.322.755,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.018.096.039,00**							
33	531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin				1514/SEK.PTUN.W6.TUN1/PL 1.1/X/2024	16 Desember 2024	16 Desember 2024		Rp 957.792.102,00	100%	Murni					
	531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	7010101003	3			12 September 2024	18 Desember 2024	Rp 1.046.768.242,00	Rp 87.536.140,00	100%	Murni			√		
	531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin					24 Desember 2024	24 Desember 2024		Rp 1.440.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.046.768.242,00**							
34	578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	7010101003	1		545/PTUN.W1-TUN3/PL1.1.7/VIII/2024	23 Agustus 2024	20 Desember 2024		Rp 398.222.712,00	40%	Murni					
	578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	7010101003	1		545/PTUN.W1-TUN3/PL1.1.7/VIII/2024	23 Agustus 2024	20 Desember 2024	Rp 1.027.629.234,00	Rp 448.000.551,00	45%	Murni			√		
	578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	7010101003	1		545/PTUN.W1-TUN3/PL1.1.7/VIII/2025	23 Agustus 2024	21 Desember 2024		Rp 149.333.517,00	15%	Murni					
	578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	7010101003	1		545/PTUN.W1-TUN3/PL1.1.7/VIII/2025	23 Agustus 2024	21 Desember 2024		Rp 32.072.454,00	0%	Murni					
						Total KDP				**Rp 1.027.629.234,00**							
35	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1	Rp 9.764.958.000,00	1427/SEK.03.W14-A8/PL1.1.7/VIII/2023	31 August 2023	31 Desember 2024	Rp 14.852.250.000,00	Rp 22.736.045.139,00	96,84%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1		W14-A8/575/PL.01/III/2023	9 Maret 2023	31 Desember 2024		Rp 838.758.000,00	96,84%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1		1413/SEK.03.W14-A8/PL1.1.5/VIII/2023	31 August 2023	31 Desember 2024	Rp 810.044.136,00	Rp 1.075.453.558,00	96,84%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1			-	31 Desember 2024	Rp 185.472.096,00	Rp 354.914.096,00	100%	Murni			√		
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1		1811/SEK.03.W14-A8/PL1.1.7/X/2024	29 October 2024	31 Desember 2024	Rp 4.340.944.000,00	Rp 3.206.872.380,00	85,06%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1		1472/SEK.03.W14-A8/PL1.1.5/VIII/2024	26 August 2024	31 Desember 2024	Rp 93.960.000,00	Rp 84.564.000,00	85,06%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1		1812/SEK.03.W14-A8/PL1.1.5/X/2024	29 October 2024	31 Desember 2024	Rp 93.961.000,00	Rp 57.081.308,00	85,06%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1				31 Desember 2024	Rp 79.927.846,00	Rp 79.927.846,00	100%	Murni					
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	7010101003	1		koreksi Nilai Berkurang KDP		31 Desember 2024		)Rp 6.575.800,00)							
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang				Koreksi Audited				(Rp 2.988.643.653,00)							
	632039	Pengadilan Agama Bengkayang				Koreksi Audited				(Rp 1.466.020.266,00)							
						Total KDP				**Rp 23.972.376.608,00**							
36	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7010101003	172	Rp 98.500.000,00	329/BUA.7/SPK/10/2024 BUMI MADANI	17 Oktober 2024	31 Desember 2024	Rp 98.500.000,00	Rp 98.500.000,00	100%	Murni			√		
	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7010101003	172	Rp 99.500.000,00	390/BUA.7/SPK/12/2024 GEJA CAHAYA MANDIRI	02 Desember 2024	31 Desember 2024	Rp 99.500.000,00	Rp 99.500.000,00	100%	Murni					
						Total KDP				**Rp 198.000.000,00**							
37	682253	Pengadilan Agama Lebong	7010101003	1		337/SEK.W7-A5/PL.1.1.5/VIII/2024	23 Agustus 2024	21 Oktober 2024	Rp 282.029.740,00	Rp 282.029.740,00	100%	Murni			√		
						Total KDP				**Rp 282.029.740,00**							
38	401884	Pengadilan Agama Ampana				Koreksi Audited				Rp 976.170.289,00	100%	Murni			√		
						Total KDP				**Rp 976.170.289,00**							

LAMPIRAN A3

Lampiran A3 :
Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Berjalan (TAB)
Semester II TA 2024

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	2H32MKNA	402540	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
2	2BSK4ZSA	402964	PTA SEMARANG	BARANG	DN	Rp	1.617.098.803,00
3	2NNFYFLA	401777	PTA MEDAN	BARANG	DN	Rp	70.000.000,00
4	2F48CS6A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	58.745.390,00
5	26N3FZ8A	097500	PT BANDUNG	JASA	DN	Rp	16.256.713,00
6	23JGFZ8A	097762	PN PATI	BARANG	DN	Rp	5.200.000,00
7	2V621WJA	308170	PTA SURABAYA	BARANG	DN	Rp	1.782.612.700,00
8	23BQ48HA	307424	PTA MAKASSAR	BARANG	DN	Rp	20.000.000,00
9	294M2W6A	402010	PA BUKITTINGGI	BARANG	DN	Rp	35.800.000,00
10	2CQXNBUA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	550.000,00
11	2B1AMY3A	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	950.000,00
12	2E23CQGA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	900.000,00
13	26CA344A	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	1.050.000,00
14	2YP6D1ZA	402989	PTA PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	1.514.617.872,00
15	2JB1HPKA	402989	PTA PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	106.814.675,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
16	217LKC9A	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	3.438.000,00
17	2KURC4KA	099003	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp	20.599.380,00
18	2WMM3WCA	400832	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp	34.931.000,00
19	2X5MZLDA	098434	PT BANDA ACEH	BARANG	DN	Rp	42.447.906,00
20	2EEXQADA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	455.065.900,00
21	2CHWWBMA	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	299.700.000,00
22	2RCSDFBA	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	1.965.600.000,00
23	2G7941UA	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.698.300.000,00
24	2CND8DQA	526736	PTTUN MATARAM	BARANG	DN	Rp	544.110.000,00
25	2F9S7ADA	097762	PN PATI	BARANG	DN	Rp	149.074.000,00
26	2C4933TA	402593	PA AMBARAWA	BARANG	DN	Rp	32.200.000,00
27	294GCNZA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	250.000.000,00
28	2FD1GP8A	307580	PA PINRANG	BARANG	DN	Rp	17.740.000,00
29	2ZYKZZCA	401271	PA JOMBANG	BARANG	DN	Rp	22.000.000,00
30	2D518UWA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	7.900.000,00
31	2QWSF8HA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
32	27R34SUA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
33	2PW1BAEA	098832	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp	3.650.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
34	22WZ65JA	097691	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp	91.461.000,00
35	21NWDECA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	233.948.400,00
36	2C375WPA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	45.700.000,00
37	2BVM3HAA	099180	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	2.500.000,00
38	24YWCQVA	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	1.800.000,00
39	2PRDR7FA	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	431.774.000,00
40	2XSFASCA	400559	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp	13.675.000,00
41	2DHVS3QA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
42	2UB5YURA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	226.500.032,00
43	2LYACQHA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	399.380.000,00
44	21AN2KQA	307445	PA MAROS	BARANG	DN	Rp	7.600.000,00
45	26VUZC6A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
46	27XUVQNA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.925.000,00
47	2VLNLTPA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
48	23CELGAA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
49	2KRW86UA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.465.000,00
50	29JVMK8A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.465.000,00
51	287E2HDA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.925.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
52	2X8FGBVA	099219	PN KOTABARU	BARANG	DN	Rp	2.878.887.000,00
53	2GTF5V7A	401879	PA BELOPA	BARANG	DN	Rp	48.360.000,00
54	2KD7VAJA	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	3.233.000,00
55	25B5R5MA	417850	PA PANDEGLANG	BARANG	DN	Rp	25.000.000,00
56	2LNQ7GPA	578839	PTUN JAMBI	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
57	2G6712VA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
58	2PDQPXBA	099862	PN MATARAM	BARANG	DN	Rp	29.950.000,00
59	2PMF5W3A	402519	PA MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	166.775.000,00
60	2XXGYR4A	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	53.920.860,00
61	2Q5HK1VA	097467	PT JAKARTA	BARANG	DN	Rp	599.983.266,00
62	2JBPFVHA	099905	PN DOMPU	BARANG	DN	Rp	299.909.517,00
63	22GDRNRA	526704	PTTUN JAKARTA	BARANG	DN	Rp	117.800.000,00
64	2JXVVNRA	307580	PA PINRANG	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
65	22REJ6XA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	51.850.320,00
66	297MP6SA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	140.294.000,00
67	2YU4UTZA	400194	PN PUTUSSIBAU	BARANG	DN	Rp	69.000.000,00
68	2HZAXM2A	400245	PT KUPANG	BARANG	DN	Rp	47.790.000,00
69	2DEMFCYA	097687	PN INDRAMAYU	BARANG	DN	Rp	66.000.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
70	2MTT62SA	402449	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	28.200.000,00
71	2KZ6LY2A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	2.725.000,00
72	2G6S3Q3A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.200.000,00
73	22TMHQDA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.840.000,00
74	25WQZ86A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.700.000,00
75	2D3MEBNA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.585.000,00
76	2LUQ73YA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.750.000,00
77	2LAKD84A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
78	2KDEH39A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	2.800.000,00
79	2TWVAE9A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	273.731.000,00
80	2TWVAE9A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	2.780.000,00
81	2F1HCKTA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	46.775.000,00
82	2YKKVPGA	400409	PN CIBADAK	BARANG	DN	Rp	148.881.525,00
83	2L2ZRFVA	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	4.440.000,00
84	2NSA61MA	400446	PN KOTOBARU	BARANG	DN	Rp	35.000.000,00
85	2U46BY8A	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.700.000.000,00
86	2MBC1N9A	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	594.500.000,00
87	22GGH3JA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	18.370.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
88	2YXQXUUA	400075	PN SORONG	BARANG	DN	Rp	520.000.000,00
89	28JR9R6A	578864	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp	139.585.000,00
90	2C8493JA	099329	PN MANADO	JASA	DN	Rp	48.000.000,00
91	2GDUHXKA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	79.978.900,00
92	29WQSNNA	401375	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	349.999.930,00
93	2YGQG8PA	097577	PN RANGKAS BITUNG	JASA	DN	Rp	136.500.000,00
94	2B8W31PA	401463	PA KRAKSAAN	BARANG	DN	Rp	222.500.000,00
95	2H83DZ9A	402820	PA SOE	BARANG	DN	Rp	5.400.000,00
96	29MADRVA	401369	PA BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	492.155.136,00
97	2KRYUT3A	578822	PTUN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	15.250.000,00
98	2SPQ8PEA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	143.076.780,00
99	2RE59WQA	401919	PN NANGA BULIK	BARANG	DN	Rp	1.292.100,00
100	2UWE7H3A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	9.133.600,00
101	2EQ1YSAA	578839	PTUN JAMBI	BARANG	DN	Rp	9.000.000,00
102	2Y7KM39A	402480	PTA SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	10.411.500,00
103	2Y2BED4A	400967	PA PATI	BARANG	DN	Rp	149.148.000,00
104	2VNUDRNA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	37.840.500,00
105	2834ECCA	099197	PN BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	16.900.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
106	2T8JLHZA	401322	PA LAMONGAN	BARANG	DN	Rp	487.292.600,00
107	2W7GETMA	402010	PA BUKITTINGGI	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
108	26G3BZGA	401918	PN KUALA KURUN	BARANG	DN	Rp	1.600.000,00
109	2CMKGJCA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	46.800.000,00
110	2SKP8FNA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	47.311.000,00
111	2HR45NFA	098743	PT PADANG	BARANG	DN	Rp	412.790.250,00
112	23N7HE2A	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	42.860.000,00
113	2TB9ZF1A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	11.500.000,00
114	2TGQC95A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	41.578.000,00
115	2GECZS1A	097982	PN BOYOLALI	BARANG	DN	Rp	140.000.000,00
116	2XKHPBVA	097542	PN GARUT	BARANG	DN	Rp	299.000.000,00
117	2P8KPBJA	099308	PN BALIKPAPAN	BARANG	DN	Rp	43.452.900,00
118	2ZZWNJ1A	098959	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp	416.649.000,00
119	28181ABA	307712	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp	8.800.000,00
120	2R7LKF2A	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	8.325.000,00
121	23U8GHEA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	60.693.000,00
122	2A87AJ8A	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
123	24Z28HMA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
124	24YM6UTA	098260	PN TRENGGALEK	BARANG	DN	Rp	6.255.000,00
125	2Y3QVVYA	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	4.750.000,00
126	2BX4PC4A	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
127	2RYSWDSA	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	2.000.000,00
128	253V1JFA	400172	PN BANTUL	BARANG	DN	Rp	7.900.000,00
129	2VFBBJ4A	098959	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp	332.955.600,00
130	2EM6T72A	097624	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp	1.718.000.000,00
131	2EM6T72A	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	325.000.000,00
132	2UVLVZ6A	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	20.800.000,00
133	2JGU2TFA	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	60.213.745,00
134	2T87B54A	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp	1.875.000.000,00
135	2Q2HXPCA	401877	PA PENAJAM	BARANG	DN	Rp	594.500.000,00
136	26QCGX8A	099286	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	33.378.100,00
137	2V85BCRA	578822	PTUN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	564.976.373,00
138	2CD3EBZA	400750	PA CIREBON	BARANG	DN	Rp	9.248.900,00
139	2HJ84ZLA	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	2.032.400.000,00
140	2H65RJGA	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	27.500.000,00
141	2AJ7D8NA	097556	PN CIAMIS	BARANG	DN	Rp	9.600.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
142	235QTE3A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	499.077.851,00
143	27TZPGGA	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	15.225.000,00
144	2NRV69MA	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	2.250.000,00
145	2PRQEY8A	097776	PN BREBES	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
146	2BVULU4A	401322	PA LAMONGAN	BARANG	DN	Rp	38.250.000,00
147	25HCVQMA	097720	PN SEMARANG	JASA	DN	Rp	407.750.000,00
148	22GCVSEA	097720	PN SEMARANG	BARANG	DN	Rp	860.450.710,00
149	2BC8GWRA	097975	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp	8.200.000,00
150	27123BPA	450737	PA TUBAN	BARANG	DN	Rp	30.460.000,00
151	2VPZ6Z4A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	190.537.000,00
152	2Q4XZSLA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	81.000.000,00
153	2V4ZW9GA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	90.000.000,00
154	2YW9E71A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	683.000.995,00
155	2K7TQEQA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	22.400.000,00
156	27DRECJA	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	30.060.220,00
157	219PAF1A	308170	PTA SURABAYA	BARANG	DN	Rp	57.500.000,00
158	2VNQSXDA	401545	PA BANGKALAN	BARANG	DN	Rp	34.087.000,00
159	2P1PDBAA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	29.700.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
160	2E4BEUEA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	20.000.000,00
161	2NEVTHPA	097577	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp	397.800.000,00
162	2J3R8TWA	099401	PN POSO	BARANG	DN	Rp	77.400.000,00
163	21RSJ7TA	097802	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
164	238BKXNA	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	145.600.000,00
165	28MBDTYA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	347.457.150,00
166	2F6YF5PA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	11.876.000,00
167	2EDQMSQA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	20.736.000,00
168	2T8PGP5A	097652	PN SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	20.400.000,00
169	2VASQUDA	098256	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	Rp	7.758.000,00
170	2P33X96A	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	38.010.000,00
171	21DJ2E6A	099773	PT DENPASAR	BARANG	DN	Rp	2.359.200.000,00
172	2WMVNJUA	403021	PA MUNGKID	BARANG	DN	Rp	404.166.000,00
173	2GN4Y64A	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	6.438.000,00
174	228ELTNA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	98.646.721,00
175	2JGNNHJA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	32.365.000,00
176	2YVJJSJA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	13.300.000,00
177	2V8C9PXA	097890	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp	68.564.900,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
178	2CHDDGVA	099439	PN SUNGGUMINASA	JASA	DN	Rp	22.022.000,00
179	2YKJE9MA	098629	PN MEDAN	BARANG	DN	Rp	92.000.000,00
180	2E78K92A	097780	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp	17.750.000,00
181	2U3Q8ZQA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	71.422.450,00
182	21U2Q8LA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	25.500.000,00
183	2EXS3HWA	400565	PN SLAWI	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
184	2HSNLQFA	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
185	2BSP8DAA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	65.000.000,00
186	2VK5E2TA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	324.809.994,00
187	2XNXG6PA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	19.402.000,00
188	2M8BHJMA	526771	PTUN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	12.600.000,00
189	2127X9EA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	18.600.000,00
190	2VYGDZ2A	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	7.550.000,00
191	2AZ2W49A	098590	PN TAPAK TUAN	BARANG	DN	Rp	808.576.000,00
192	2JFF6Q4A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	6.750.000,00
193	2V1WHUZA	307445	PA MAROS	BARANG	DN	Rp	5.580.000,00
194	2LBSQ3PA	400483	PN BALE BANDUNG	JASA	DN	Rp	149.110.000,00
195	2SE5F7VA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	6.750.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
196	2AV6UDTA	402540	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp	10.036.000,00
197	2W7SX2JA	099621	PN MAJENE	BARANG	DN	Rp	113.141.960,00
198	28CPUX7A	099532	PN WATAMPONE	BARANG	DN	Rp	11.970.000,00
199	2CJWN98A	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
200	298BERCA	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
201	2SUHDBTA	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	24.800.000,00
202	2BLS861A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
203	21ZQKGDA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
204	2ZEAJVJA	098167	PN SIDOARJO	BARANG	DN	Rp	143.190.000,00
205	2MQNJGKA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
206	2HALQ98A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
207	2MKVXPUA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
208	29BT39ZA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
209	2BSUKB5A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
210	2E67EVTA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
211	2ARJMZJA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
212	2EFS3GWA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
213	2XY8ULKA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
214	23N2KDMA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	431.920.000,00
215	2V6QD4KA	099638	PN MAMUJU	BARANG	DN	Rp	21.143.200,00
216	2DGBC5ZA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	87.814.510,00
217	22RYTSNA	477306	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	Rp	64.000.000,00
218	2CZGRJSA	663026	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp	230.558.020,00
219	21CBWKTA	400483	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	Rp	1.153.318.257,00
220	24EBNLYA	682260	PA BATULICIN	BARANG	DN	Rp	310.000.000,00
221	2WK4QMKA	099180	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	75.500.000,00
222	2EXERNBA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	96.638.000,00
223	2Q7KST6A	097514	PN BANDUNG	BARANG	DN	Rp	577.877.225,00
224	2LZQKLYA	401960	PA SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp	5.500.000,00
225	2S9BZ76A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	39.800.000,00
226	2E6L1NSA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	295.210.041,00
227	2WY4BXCA	097933	PN SURAKARTA	BARANG	DN	Rp	309.884.000,00
228	28E6HYCA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
229	27QJ5RLA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	4.260.000,00
230	2L6BNYJA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
231	2NZ8W7SA	400245	PT KUPANG	BARANG	DN	Rp	18.500.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
232	2UDUBQVA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	15.350.000,00
233	2F49PJZA	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	306.420.000,00
234	2MDK1DXA	400452	PN KALIANDA	BARANG	DN	Rp	30.000.000,00
235	2NEPR99A	099401	PN POSO	BARANG	DN	Rp	5.025.000.000,00
236	2X9UPN1A	400817	PA RANGKASBITUNG	BARANG	DN	Rp	10.600.000,00
237	2VQXTSLA	400327	PN DUMAI	BARANG	DN	Rp	1.070.147.943,00
238	2R2B6R8A	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	28.047.000,00
239	2ZNMSZLA	402500	PA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	11.600.000,00
240	23KH114A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	36.225.000,00
241	2XZMLDBA	099176	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp	9.475.000,00
242	28PQCN1A	400291	PN TANJUNG REDEB	BARANG	DN	Rp	25.905.180,00
243	2BWM125A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	13.140.000,00
244	2ABDB6MA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	23.697.000,00
245	2XY91C2A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	4.680.000,00
246	24PJ188A	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	77.700.000,00
247	2HD6MPZA	401879	PA BELOPA	BARANG	DN	Rp	37.660.000,00
248	29FQMB4A	097666	PN CIANJUR	BARANG	DN	Rp	409.297.044,00
249	238RNTTA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	3.580.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
250	2G8XVMYA	099418	PT UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
251	293JZXYA	099418	PT UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	13.900.000,00
252	2TK95CEA	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	11.000.000,00
253	2Z7PKLEA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	2.032.501.047,00
254	2X1USAXA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	168.100.000,00
255	2R52PFKA	477380	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp	933.220.600,00
256	2P486ENA	307491	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	273.220.000,00
257	2NA51YWA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	7.150.000,00
258	2WR6UJBA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	10.750.000,00
259	2CQC4KKA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	12.250.000,00
260	2ACRZ9SA	526704	PTTUN JAKARTA	BARANG	DN	Rp	135.000.000,00
261	2ZU8F5CA	400370	PN SIMALUNGUN	BARANG	DN	Rp	132.720.000,00
262	2V1PAX2A	099120	PN PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	73.000.000,00
263	242R2WDA	098832	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp	3.800.000,00
264	2G2395BA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	81.000.000,00
265	2TY8R1DA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	36.450.000,00
266	2XRB4J3A	108025	PN STABAT	BARANG	DN	Rp	17.900.000,00
267	2JD173AA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	159.840.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
268	279FQM8A	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	5.500.000,00
269	27HVM42A	097954	PN WONOGIRI	BARANG	DN	Rp	34.993.000,00
270	28296H8A	097954	PN WONOGIRI	BARANG	DN	Rp	10.000.000,00
271	22F5QGVA	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	199.825.000,00
272	2XNTJBRA	099581	PN BULUKUMBA	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
273	2P5L66VA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	136.700.000,00
274	2UX1ARXA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	5.928.000,00
275	282TZG1A	402525	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp	396.300.000,00
276	24G5G1SA	097577	PN RANGKAS BITUNG	JASA	DN	Rp	28.870.000,00
277	2MXL5KGA	099091	PN KETAPANG	BARANG	DN	Rp	105.843.708,00
278	26V6F5DA	663398	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp	1.124.564.000,00
279	226L6E9A	663398	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp	231.768.000,00
280	2JRXD68A	098701	PN PEMATANG SIANTAR	BARANG	DN	Rp	73.602.000,00
281	2UX9LREA	673013	PN MALILI	BARANG	DN	Rp	1.575.587.832,00
282	2QFDDL5A	098331	PN KRAKSAAN	BARANG	DN	Rp	410.783.250,00
283	2P6SA7XA	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	35.850.000,00
284	279F358A	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	54.179.714,00
285	2HD9LC7A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	41.300.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
286	2G27NG2A	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	28.310.550,00
287	2DHGW1PA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	9.500.000,00
288	2G7TZFQA	099802	PN NEGARA	BARANG	DN	Rp	2.300.000,00
289	2DEEJHBA	400208	PN LIMBOTO	BARANG	DN	Rp	66.434.000,00
290	2QDYA64A	098860	PN RENGAT	BARANG	DN	Rp	27.950.000,00
291	2RNLZY1A	604730	PA KAB. MALANG (KEPANJEN)	BARANG	DN	Rp	100.000.000,00
292	23TSB59A	526711	PTTUN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	2.100.000,00
293	2UKTUWVA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	58.986.000,00
294	2AKEJPSA	099286	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	65.467.050,00
295	2UH5UHZA	099197	PN BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	762.700.000,00
296	26EVCLPA	099308	PN BALIKPAPAN	BARANG	DN	Rp	90.168.000,00
297	2UWNAUBA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	87.900.000,00
298	2YF6EQFA	099230	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	10.036.000,00
299	2F33W7PA	099230	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	23.849.800,00
300	2MTLSFZA	098324	PN BANGIL	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
301	2YKYCE5A	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	23.550.000,00
302	2H4X722A	098171	PN MOJOKERTO	BARANG	DN	Rp	95.807.000,00
303	2NCKCT5A	098171	PN MOJOKERTO	BARANG	DN	Rp	29.193.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
304	2VGYVNKA	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	7.500.000,00
305	2QZCAJMA	099109	PN MEMPAWAH	BARANG	DN	Rp	203.210.000,00
306	2SRZTRNA	400951	PA PURWODADI	BARANG	DN	Rp	93.999.925,00
307	26GABS6A	400735	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	8.300.000,00
308	2VGP1AQA	400735	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
309	2PCZPUYA	400477	PN SUMBER	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
310	23N4YK6A	402562	PA TANJUNG	BARANG	DN	Rp	7.200.000,00
311	2GHBS7LA	402669	PA MEMPAWAH	BARANG	DN	Rp	13.000.000,00
312	2UUR7GMA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	40.236.000,00
313	2SCLGPZA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	366.746.000,00
314	2HERT1KA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	585.400.000,00
315	2KLBW1YA	097996	PN KLATEN	BARANG	DN	Rp	640.580.000,00
316	27Z5JT2A	400911	PA SEMARANG	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
317	2FBKC27A	663026	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp	547.000.000,00
318	23USSP8A	417844	PN PANDEGLANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
319	2EULT82A	097514	PN BANDUNG	JASA	DN	Rp	41.996.850,00
320	2TX8S33A	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	186.873.000,00
321	24NUUK5A	576274	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp	79.700.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
322	2HHZ11VA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	17.950.000,00
323	2QTUAS5A	097912	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	Rp	150.742.000,00
324	2VTEYJRA	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	199.691.000,00
325	2713Y78A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	8.600.000,00
326	2CAN3AWA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
327	26AHUCEA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
328	2LPQDNBA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
329	2L5WRL3A	402097	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	161.950.000,00
330	2P63QCJA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	129.523.000,00
331	2GHXFTCA	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	180.606.000,00
332	27VW4R4A	402324	PA TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
333	2A5BA1MA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	138.755.800,00
334	2R3SEG7A	401582	MS ACEH	BARANG	DN	Rp	1.535.404.380,00
335	2KKXE9TA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	39.000.000,00
336	22DBVXKA	400885	PA TEGAL	BARANG	DN	Rp	17.550.000,00
337	26N9EGKA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	43.537.300,00
338	272TAF8A	099492	PN PAREPARE	BARANG	DN	Rp	9.500.000,00
339	2BTUD1UA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	55.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
340	2BTUD1UA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	12.300.000,00
341	268ZZNQA	098849	PN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	77.250.000,00
342	264RCHWA	402117	PA BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	1.956.447.410,00
343	2QCZGT3A	098036	PN PURBALINGGA	BARANG	DN	Rp	7.788.000,00
344	25UDGLAA	400126	PN CURUP	BARANG	DN	Rp	35.685.000,00
345	27JZFQPA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	263.963.232,00
346	2XLSHWDA	400214	PN JAKARTA SELATAN	BARANG	DN	Rp	739.249.000,00
347	2LUQHQGA	099354	PA TONDANO	BARANG	DN	Rp	177.097.000,00
348	2MFNEYNA	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	49.900.000,00
349	2BGRNG2A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	7.699.000,00
350	2QE8B9CA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	155.000.000,00
351	2ML8S86A	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
352	2LV78S6A	099176	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp	6.597.000,00
353	2DW4K36A	098420	PN SAMPANG	BARANG	DN	Rp	32.116.000,00
354	2PSG3FCA	400194	PN PUTUSSIBAU	BARANG	DN	Rp	123.674.446,00
355	2EV8NFRA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
356	2FKVMR2A	401955	PA TULANG BAWANG TENGAH	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
357	23D2T2BA	097691	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp	43.100.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
358	2EQ792JA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	149.829.350,00
359	2XUNVQFA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	49.947.000,00
360	2GG4HX7A	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.500.000,00
361	21BGHSPA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	300.000.000,00
362	24VQG3GA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	12.124.000,00
363	2JV8F75A	400110	PN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	249.607.000,00
364	25M3VYXA	400110	PN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
365	2CGMA6HA	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	22.700.000,00
366	2152GPAA	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	2.500.000,00
367	26XTMZ2A	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	5.549.000,00
368	2QKECPQA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	26.000.000,00
369	2FLGUHHA	097467	PT JAKARTA	BARANG	DN	Rp	299.988.600,00
370	2SEEMTRA	099600	PN PALOPO	BARANG	DN	Rp	11.700.000,00
371	2J8QVNDA	098608	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp	7.250.000,00
372	2EB9YJUA	098608	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp	7.250.000,00
373	22WEZSZA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	331.350.000,00
374	2H4XRU4A	099706	PN AMBON	BARANG	DN	Rp	305.993.000,00
375	2YMBZD9A	400678	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	41.900.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
376	2C3BKT8A	097734	PN TEGAL	BARANG	DN	Rp	38.595.020,00
377	2LPQGMKA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	47.400.000,00
378	22XB7N1A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	49.013.381,00
379	2EDE115A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	3.200.000,00
380	25FJ922A	402355	PA METRO	BARANG	DN	Rp	166.500.000,00
381	2HL6XLEA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	343.057.144,00
382	2LJRL4RA	403009	PA SUMBER	BARANG	DN	Rp	200.056.000,00
383	232782XA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	334.552.775,00
384	2Y9DWBEA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	133.525.000,00
385	2RKVW8YA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	41.400.000,00
386	2Q3LZYDA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	159.094.590,00
387	2NP63VKA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	107.730.000,00
388	26GLD7QA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
389	2FMBV1LA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	119.880.000,00
390	2ZEX221A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	28.350.000,00
391	27YPNJSA	578864	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp	25.520.000,00
392	2WD3NJXA	614890	PN KOTA TIMIKA	BARANG	DN	Rp	84.582.000,00
393	2F7PRFKA	098324	PN BANGIL	BARANG	DN	Rp	76.500.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
394	22KDCRJA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	498.305.723,00
395	2VCY2KEA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	22.900.000,00
396	2SVMZR4A	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	1.900.000,00
397	2THAR8DA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
398	239NUHCA	098750	PN PADANG	BARANG	DN	Rp	120.000.000,00
399	2QZ2DP5A	402179	PA TAREMPA	BARANG	DN	Rp	196.442.690,00
400	24ZPGXUA	108025	PN STABAT	BARANG	DN	Rp	60.000.000,00
401	2YWZ4ZXA	604723	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	Rp	735.680.000,00
402	2CD88DXA	403083	PA SIMALUNGUN	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
403	24M8ZV2A	099031	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
404	2DGW1LNA	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	94.500.000,00
405	2MF17YHA	307932	PA DOMPU	BARANG	DN	Rp	99.988.000,00
406	2QMJARKA	097492	PN JAKARTA TIMUR	JASA	DN	Rp	165.000.000,00
407	2B3BSRGA	663403	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp	1.800.000,00
408	2RE9K5PA	099926	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp	17.858.200,00
409	2XLD47CA	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
410	2JNVBS7A	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	181.000.000,00
411	26X7GE3A	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	1.004.880.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
412	2TCLQU5A	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.016.150.000,00
413	2YYEGETA	099879	PN RABA BIMA	BARANG	DN	Rp	99.500.000,00
414	25MAHEUA	099134	PN PANGKALAN BUN	BARANG	DN	Rp	225.888.975,00
415	2BEQ4VRA	099581	PN BULUKUMBA	BARANG	DN	Rp	1.080.900.000,00
416	216FD2RA	004028	KEPANITERAAN	BARANG	DN	Rp	245.357.950,00
417	2V5RPQBA	400239	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp	2.000.000,00
418	27B22A9A	097830	PN UNGARAN	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
419	25PUVYMA	097666	PN CIANJUR	BARANG	DN	Rp	40.000.000,00
420	2K666ZUA	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	17.950.000,00
421	2F7CJV8A	097624	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp	2.707.050.000,00
422	2VADKC6A	099684	PN KOLAKA	BARANG	DN	Rp	35.600.000,00
423	2SSYE9MA	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	16.208.750,00
424	2VVSJ6ZA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	21.014.241,00
425	2RN9S8KA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	50.771.400,00
426	2Z36FSDA	098722	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp	296.267.110,00
427	2N37N85A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	278.100.000,00
428	2N37N85A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	1.900.000,00
429	2QW4BFBA	097560	PN SERANG	JASA	DN	Rp	357.000.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
430	2QPBDHNA	401952	PA MESUJI	BARANG	DN	Rp	30.000.000,00
431	24UFR1AA	097776	PN BREBES	BARANG	DN	Rp	100.000.000,00
432	2AK87GZA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
433	2NSVNUZA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	131.314.000,00
434	21R3VNTA	477270	PN NUNUKAN	BARANG	DN	Rp	14.680.000,00
435	2KFLUTTA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	957.926.208,00
436	2D4LY88A	417722	PN TANJUNG SELOR	JASA	DN	Rp	180.000.000,00
437	2NQMR5KA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	6.500.000,00
438	222KVFQA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	40.000.000,00
439	2CVRL5ZA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
440	2B9MSJFA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	500.000,00
441	2U98ZNTA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	500.000,00
442	2387J8MA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
443	2GRMK38A	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
444	2WHJKPKA	402330	PA KRUI	BARANG	DN	Rp	28.970.000,00
445	293V826A	097975	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp	267.176.160,00
446	25HJRA3A	682228	MS SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	Rp	195.886.000,00
447	2VU7H5PA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	4.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
448	2RUEMM2A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
449	2QAT4Z4A	098192	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	Rp	55.646.850,00
450	21EHHWPA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	5.404.000,00
451	28DH1VYA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	5.250.000,00
452	2PUQEXMA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	2.400.000,00
453	27BVLRZA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	2.499.000,00
454	23J54F2A	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	144.000.000,00
455	2QS9V1LA	097514	PN BANDUNG	BARANG	DN	Rp	797.506.315,00
456	26VWHASA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
457	2YDRKFZA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	16.257.000,00
458	2BB3CBMA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
459	2U52WDSA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	239.600.000,00
460	22GWUGQA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	97.730.500,00
461	26FUVCSA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	33.400.002,00
462	2RDLC4XA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	342.957.482,00
463	25TDMN8A	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	117.000.000,00
464	241WCCBA	098519	PN LANGSA	BARANG	DN	Rp	373.831.776,00
465	2CXSBFEA	400492	PT RIAU	BARANG	DN	Rp	43.150.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
466	2GMHT77A	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	507.867.180,00
467	2MVPZXLA	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	160.506.000,00
468	2WTBK4BA	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	66.035.400,00
469	2LXSESJA	400710	PA GARUT	BARANG	DN	Rp	248.600.000,00
470	2MZBJFWA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	7.799.000,00
471	2CA3MCLA	098104	PN KAB. MALANG (KEPANJEN)	BARANG	DN	Rp	60.000.000,00
472	2BQ4EHKA	401926	PN LASUSUA	BARANG	DN	Rp	199.700.000,00
473	2T8NFG1A	401642	MS LHOKSUKON	BARANG	DN	Rp	95.000.000,00
474	2EMPER4A	672910	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp	322.202.000,00
475	2CJMQ8PA	099890	PN SELONG	BARANG	DN	Rp	19.000.000,00
476	2RU73TVA	099890	PN SELONG	BARANG	DN	Rp	800.000,00
477	2FDSXHZA	613519	PN CIBINONG	JASA	DN	Rp	723.298.405,00
478	2P5NTVPA	401913	PN MENTOK	BARANG	DN	Rp	305.848.489,00
479	239K7D8A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	10.532.000,00
480	2MRV96SA	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	325.000.000,00
481	2L2Z3UCA	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	96.000.000,00
482	2MEBQ3SA	097797	PN KENDAL	JASA	DN	Rp	115.500.000,00
483	2WDD7SSA	099070	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
484	22A797BA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
485	28NJLLAA	098125	PN BOJONEGORO	BARANG	DN	Rp	272.556.890,00
486	2CLB3EGA	401137	PA BOYOLALI	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
487	2LQFNCUA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	356.043.600,00
488	25XCRRRA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	95.948.400,00
489	2F5C4DKA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	226.795.200,00
490	2W7SLNPA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	96.158.441,00
491	2LJQV7KA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	186.480.000,00
492	2D1UBDLA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	336.487.557,00
493	2E487HEA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	476.224.379,00
494	24KHNAGA	400214	PN JAKARTA SELATAN	BARANG	DN	Rp	184.455.000,00
495	2R3SVSDA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	84.750.000,00
496	2KT3JQMA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	169.230.000,00
497	2G24WQ1A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	317.826.300,00
498	24XACTZA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	311.256.625,00
499	2PM522ZA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	6.458.000,00
500	27YMQF6A	400075	PN SORONG	BARANG	DN	Rp	82.694.000,00
501	2VCKTQNA	308021	PA CURUP	BARANG	DN	Rp	4.150.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
502	2N2LRXLA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
503	2ZA1HFVA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp	6.997.934.045,00
504	2CESZLMA	613519	PN CIBINONG	JASA	DN	Rp	849.664.260,00
505	2NKSHTHA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	177.584.377,00
506	2YK9S6RA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	84.501.297,00
507	25C7T35A	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	87.201.600,00
508	2AHT489A	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	114.600.000,00
509	2RKQM4BA	097851	PN BLORA	BARANG	DN	Rp	199.000.000,00
510	2218JJAA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	198.750.000,00
511	2218JJAA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	561.900.000,00
512	22PBN9JA	099816	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	Rp	721.802.991,00
513	23HRLCLA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	56.500.000,00
514	2QM984LA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	34.822.080,00
515	2TEQDSFA	663047	PN SUKADANA	BARANG	DN	Rp	90.000.000,00
516	2CEUGUYA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	663.621.000,00
517	2NTGDR5A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	513.762.000,00
518	26E6KSVA	578885	PTUN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	48.950.000,00
519	2CENAAQA	400409	PN CIBADAK	JASA	DN	Rp	132.600.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
520	2F6LHQ9A	663292	DILMIL II - 11 YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	180.000.000,00
521	264GL1EA	672973	PN KASONGAN	BARANG	DN	Rp	38.480.000,00
522	2R1MEHQA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	285.961.086,00
523	2UQ34C7A	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	9.102.000,00
524	23HZ211A	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	197.182.864,00
525	27DGWRBA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	246.707.500,00
526	2DK1RMPA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	317.682.000,00
527	27QM1XSA	098104	PN GRESIK	BARANG	DN	Rp	487.670.887,00
528	2WJ1PNJA	099780	PN DENPASAR	JASA	DN	Rp	180.000.000,00
529	2XEZNXKA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	212.417.126,00
530	2YDULG6A	098434	PT BANDA ACEH	BARANG	DN	Rp	1.499.744.000,00
531	2WKNRBZA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	895.254.494,00
532	2K7N4HGA	099443	PN PANGKAJENE	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
533	2A8JFGMA	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	719.040.200,00
534	22113U3A	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	448.646.000,00
535	2AKLGKBA	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	245.800.000,00
536	2YB5FFLA	401338	PA JEMBER	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
537	2CKLQT3A	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	10.865.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
538	2PCHZQZA	400389	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp	197.370.350,00
539	29FTEKCA	097488	PN JAKARTA BARAT	JASA	DN	Rp	200.000.000,00
540	29FTEKCA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	289.188.300,00
541	2MP57LGA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	618.500.000,00
542	2FL3A8NA	400220	PN JAKARTA UTARA	JASA	DN	Rp	156.000.000,00
543	2W6KLMXA	099155	PN KUALA KAPUAS	UANG	DN	Rp	500.000.000,00
544	2KAA633A	401877	PA PENAJAM	UANG	DN	Rp	440.000.000,00
545	26QKRDNA	401924	PN PENAJAM	UANG	DN	Rp	440.000.000,00
546	2264Y9WA	098938	PT PALEMBANG	UANG	DN	Rp	2.500.000.000,00
547	21ZRMZ6A	613519	PN CIBINONG	UANG	DN	Rp	482.524.000,00
548	22ZZUGHA	526716	PT PAPUA BARAT	UANG	DN	Rp	1.000.000.000,00
549	2B5ERZDA	663030	PN GUNUNG SUGIH	UANG	DN	Rp	200.000.000,00
550	2UNM5YPA	400741	PA CIANJUR	UANG	DN	Rp	50.000.000,00
551	275ESBKA	401293	PA GRESIK	UANG	DN	Rp	600.000.000,00
TOTAL						**Rp**	**122.176.025.953,00**

Lampiran A3:
Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
Semester II TA 2024

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	286XBCXA	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	38.408.500,00
2	2YS9Q2TA	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
3	2ZJECSYA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	143.000.000,00
4	2PDMK6NA	097492	PN JAKARTA TIMUR	BARANG	DN	Rp	326.998.235,00
5	2TK1TQNA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	956.468.000,00
6	2EBB3QEA	099312	PT MANADO	BARANG	DN	Rp	605.000.000,00
7	2ZHPPZZA	098984	PN LAHAT	BARANG	DN	Rp	1.000.000.000,00
8	222RUFHA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
9	2GPD85AA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	1.000.000,00
10	2DWX2Y8A	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
11	2G7WKTZA	098612	PT MEDAN	BARANG	DN	Rp	1.343.300.000,00
12	27YR4RSA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	9.725.000,00
13	2GBKVZ5A	526710	PT SULAWESI BARAT	BARANG	DN	Rp	3.766.872.367,00
14	2H13A15A	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	355.417.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
15	27MMNC1A	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	149.800.000,00
16	2FH25RQA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	69.903.900,00
17	2AZCZFKA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	199.800.000,00
18	2QX25G4A	402443	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp	86.800.000,00
19	2WPTD99A	097645	PN BOGOR	BARANG	DN	Rp	180.000.000,00
20	2N3K9AZA	400141	PN BANGKINANG	BARANG	DN	Rp	1.307.163.900,00
21	2G7N6STA	670191	PN TAMIANG LAYANG	BARANG	DN	Rp	399.530.650,00
22	24YYUG6A	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	16.500.000,00
23	29X8T21A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	113.408.202,00
24	2QY9EWLA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	40.404.000,00
25	289BHSHA	401262	PA SIDOARJO	BARANG	DN	Rp	107.992.500,00
26	2EHZTQ6A	526720	PT KALIMANTAN UTARA	BARANG	DN	Rp	352.400.000,00
27	2BAB4JHA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	1.742.759.300,00
28	2DHQJR6A	307712	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp	14.650.000,00
29	24PKGAVA	097741	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp	63.519.750,00
30	2WWFFPAA	097741	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp	123.100.000,00
31	24S87GQA	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	180.567.000,00
32	27SR3CTA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	568.740.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
33	2J2Q5W7A	307885	PA MATARAM	BARANG	DN	Rp	559.880.000,00
34	2FNHCY9A	307885	PA MATARAM	BARANG	DN	Rp	185.500.000,00
35	27NTN3PA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	213.229.178,00
36	2FEJM61A	400415	PN JANTHOI	BARANG	DN	Rp	138.670.000,00
37	27RP2EGA	099219	PN KOTABARU	BARANG	DN	Rp	927.000.000,00
38	25LMCYPA	098409	PA SUMENEP	BARANG	DN	Rp	183.100.000,00
39	2QF3ZXRA	401551	PA SAMPANG	BARANG	DN	Rp	72.000.000,00
40	2J49EQ6A	098310	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp	34.980.000,00
41	28NLTHRA	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	60.000.000,00
42	26QUZK7A	402443	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp	349.460.901,00
43	2QF3U34A	526708	PTA KEPULAUAN RIAU	BARANG	DN	Rp	24.000.000,00
44	2HJTH7HA	097670	PN CIREBON	BARANG	DN	Rp	2.506.323.000,00
45	2GE5LNMA	401877	PA PENAJAM	BARANG	DN	Rp	622.290.000,00
46	28VQS9TA	099560	PN BANTAENG	BARANG	DN	Rp	148.891.000,00
47	21QK6BGA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	249.686.000,00
48	25QAC9WA	307818	PA LABUHAN BACAN	BARANG	DN	Rp	156.000.000,00
49	23H626MA	401966	MS SUKA MAKMUE	BARANG	DN	Rp	60.541.500,00
50	292643NA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.966.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
51	2VXDPAAA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	198.900.000,00
52	24E6VBKA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.610.000,00
53	2FBFA16A	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	7.500.000,00
54	2GSVZLYA	099180	PN MANDAILING NATAL	BARANG	DN	Rp	474.700.000,00
55	22UM2UCA	099422	PN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	250.109.000,00
56	2VX31E3A	401293	PA GRESIK	BARANG	DN	Rp	3.235.176.811,00
57	25456PQA	682164	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	Rp	45.226.894,00
58	2UAQC9PA	526722	PTA KALIMANTAN UTARA	BARANG	DN	Rp	352.400.000,00
59	2EGCVLVA	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	298.679.375,00
60	21ZT7V1A	307491	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	12.200.000,00
61	21Z3EW7A	097560	PN SERANG	JASA	DN	Rp	202.500.000,00
62	2LNSZAZA	631999	PA PANGKALAN KERINCI	BARANG	DN	Rp	16.100.000,00
63	2PX3QXLA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	489.921.000,00
64	225WUJTA	097851	PN BLORA	BARANG	DN	Rp	197.620.000,00
65	2WW11YSA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	269.174.000,00
66	2MWQCDXA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	11.500.000,00
67	2473SFVA	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	199.500.000,00
68	2D8WXE9A	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	349.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
69	2B6572YA	401950	PA GEDONGTATAAN	BARANG	DN	Rp	62.500.000,00
70	2M13T3GA	401752	MS SINGKIL	BARANG	DN	Rp	189.360.000,00
71	2FK8K1EA	099443	PN PANGKAJENE	BARANG	DN	Rp	188.450.000,00
72	28JQ5P7A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
73	2HHQKKZA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	230.000.000,00
74	28GWSY5A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	243.923.027,00
75	29DY132A	401611	MS SIGLI	BARANG	DN	Rp	388.942.000,00
76	2Q8EXYXA	402097	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	86.270.000,00
77	2NQHBG7A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	129.492.500,00
78	23V69BLA	526716	PT PAPUA BARAT	BARANG	DN	Rp	2.022.750.000,00
79	2B1CZL9A	401943	PA PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.400.000,00
80	21PRJLFA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	7.020.000,00
81	2N2V57QA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	456.842.700,00
82	2KZQVVXA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	186.158.454,00
83	25Y1BY5A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	55.268.920,00
84	257DTHNA	401965	MS BLANGPIDIE	BARANG	DN	Rp	19.435.200,00
85	28K6RBTA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	177.955.200,00
86	2LF4CPFA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	292.722.025,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
87	2WKELHZA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	39.588.705,00
88	2PNYP22A	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	356.938.038,00
89	2L2LUEHA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	646.298.077,00
90	2MAPSXCA	098640	PN TANJUNG BALAI	BARANG	DN	Rp	109.125.748,00
91	2F4JD2EA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	68.849.000,00
92	298Z5SJA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	94.236.500,00
93	2RL4JMGA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	53.066.492,00
94	23ATGP1A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	61.438.500,00
95	2B3Y5HEA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	65.700.000,00
96	27JCRH1A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	20.158.211,00
97	29TZNC7A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	69.000.000,00
98	2XBB9Y8A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	199.643.906,00
99	2H6PFCAA	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	57.500.000,00
100	2QN57PJA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	54.000.000,00
101	2GJB19AA	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	849.364.434,00
102	2QDCPEQA	672948	PN NATUNA	BARANG	DN	Rp	199.547.716,00
TOTAL						**Rp**	**35.863.708.316,00**

Lampiran A3:
Hibah Langsung Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
Semester II TA 2024

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	13.955.252.892,00
2	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	4.778.398.475,00
3	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	5.948.994.262,00
TOTAL						**Rp**	**24.682.645.629,00**

LAPORAN PENDUKUNG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

(*AUDITED*)

DAFTAR ISI

1. BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (FACE)
3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
5. NERACA (FACE)
6. NERACA PERCOBAAN SALDO AWAL, KAS, DAN AKRUAL
7. LAPORAN OPERASIONAL
8. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
9. CALBMN, LAP. POSISI BMN DI NERACA (SAWAL & BERJALAN), LB PERSEDIAAN, LBP INTRA-EKSTRA-GABUNGAN, LBP ATB, LBKP BERSEJARAH, DAFTAR BARANG HILANG-RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA, DAFTAR BPYBDS, LAP. PENYUSUTAN BKP INTRA-EKSTRA-ATB, LAP. CRBMN
10. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
11. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT CHR BADAN PENGAWASAN ATAS LAPOAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG
12. KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
13. SELISIH TKTM
14. KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
15. KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
16. 134111 JALAN DAN JEMBATAN
17. 134112 IRIGASI
18. 134113 JARINGAN
19. 135111 ASET TETAP RENOVASI
20. 162191 ASET TAK BERWUJUD LAINNYA
21. 391113 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
22. 391116 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
23. 391118 KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI
24. 391151 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI
25. 491511 PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
26. 593311 BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
27. 595112 BEBAN EKSTRA PERALATAN DAN MESIN
28. 595113 BEBAN EKSTRA GEDUNG DAN BANGUNAN
29. 596111 BEBAN PELEPASAN ASET
30. 596121 BEBAN PERSEDIAAN RUSAK USANG
31. LAPORAN PENERIMAAN HIBAH TAHUN 2024
32. DATA PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK
33. DAFTAR REKENING PEMERINTAH DAN MONITORING PENUTUPAN REKENING
34. RINCIAN, PENJELASAN, DAN LINK DOKUMEN SUMBER RPATA
35. BERITA ACARA REKONSILIASI SEWA BARANG MILIK NEGARA NON RUMAH NEGARA
36. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN, DAN KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
37. LKJIP MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024
38. NOTA KESEPAKATAN FINAL, LAMPIRAN JURNAL KOREKSI, DAN SURAT REPRESENTASI

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Jalan Medan Merdeka Utara No.9, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10110
Telepon: (021) 3843348, 3810350 (Hunting) Tromol Pos No. 1020

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Periode Audited - Tahun Anggaran 2024
Nomor : 10/BUA.4/DL1.6/V/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Yudi Cahyadi, ST.
NIP : 197707162006041006
Jabatan : Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan, BUA
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Rama Rahim, SE., MM., MBA.
NIP : 198105202009121002
Jabatan : Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Audited - Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Audited Tahun Anggaran 2024		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) + (4)*
I	***POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)***	***31.776.085.831.357,00***	***377.542.848.976,00***	***32.153.628.680.333,00***
A	**ASET LANCAR**	**23.934.594.158,00**	**482.462.497,00**	**24.417.056.655,00**
1	Persediaan	23.934.594.158,00	482.462.497,00	24.417.056.655,00
B	**ASET TETAP**	**31.683.395.738.696,00**	**384.237.683.290,00**	**32.067.633.421.986,00**
1	Tanah	20.042.057.573.980,00	(27.725.766.277,00)	20.014.331.807.703,00
2	Peralatan dan Mesin	4.820.922.714.383,00	184.541.930.309,00	5.005.464.644.692,00
3	Gedung dan Bangunan	11.821.324.680.170,00	1.431.427.705.984,00	13.252.752.386.154,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.399.600.852,00	(49.320.000,00)	58.350.280.852,00
5	Aset Tetap dalam Renovasi	24.589.903.788,00	(23.511.860.996,00)	1.078.042.792,00
6	Aset Tetap Lainnya	50.443.017.532,00	98.269.994,00	50.541.287.526,00
7	Kontruksi Dalam Pengerjaan	915.655.052.073,00	(440.391.993.049,00)	475.263.059.024,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.049.996.804.082,00)	(740.151.282.675,00)	(6.790.148.086.757,00)
C	**ASET LAINNYA**	**68.755.498.503,00**	**(7.177.296.811,00)**	**61.578.201.692,00**
1	Aset Tidak Berwujud	110.013.999.715,00	(11.210.102.973,00)	98.803.896.742,00
2	Aset Lain-lain	161.921.949.010,00	(549.572.579,00)	161.372.376.431,00
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(203.180.450.222,00)	4.582.378.741,00	(198.598.071.481,00)
II	***BMN NON NERACA***	***15.429.459.309,00***	***(2.130.476.046,00)***	***13.298.983.263,00***
1	Ekstrakomptabel	36.574.981.203,00	1.122.470.666,00	37.697.451.869,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(21.145.521.894,00)	(3.252.946.712,00)	(24.398.468.606,00)
III	***TOTAL GABUNGAN (I + II)***	***31.791.515.290.666,00***	***375.412.372.930,00***	***32.166.927.663.596,00***

Rincian terlampir.

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Audited Tahun Anggaran 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unit Akuntansi Pengguna Barang,	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran,
Yudi Cahyadi, ST.	Rama Rahim, SE., MM., MBA.
NIP. 197707162006041006	NIP. 198108202009121002

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

keuangan barang

II. PERIODE

1 2 / 2 4

<bulan/sm/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 0 5 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - K P

<bagian anggaran> <eselon1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	ASET BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)**	**31.776.085.831.357,00**	**31.776.085.831.357,00**	**31.776.085.831.357,00**
A	ASET LANCAR	**23.934.594.158,00**	**23.934.594.158,00**	**23.934.594.158,00**
A.1	Persediaan	23.934.594.158,00	23.934.594.158,00	23.934.594.158,00
B	ASET TETAP	**31.683.395.738.696,00**	**31.683.395.738.696,00**	**31.683.395.738.696,00**
B.1	Tanah	20.042.057.573.980,00	20.042.057.573.980,00	20.042.057.573.980,00
B.2	Peralatan dan Mesin	4.820.922.714.383,00	4.820.922.714.383,00	4.820.922.714.383,00
B.3	Gedung dan Bangunan	11.821.324.680.170,00	11.821.324.680.170,00	11.821.324.680.170,00
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.399.600.852,00	58.399.600.852,00	58.399.600.852,00
B.5	Aset Tetap Lainnya	75.032.921.320,00	75.032.921.320,00	75.032.921.320,00
B.6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	915.655.052.073,00	915.655.052.073,00	915.655.052.073,00
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.049.996.804.082,00)	(6.049.996.804.082,00)	(6.049.996.804.082,00)
C	ASET LAINNYA	**68.755.498.503,00**	**68.755.498.503,00**	**68.755.498.503,00**
C.1	Aset Tidak Berwujud	110.013.999.715,00	110.013.999.715,00	110.013.999.715,00
C.2	Aset Lain-lain	161.921.949.010,00	161.921.949.010,00	161.921.949.010,00
C.3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
C.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(203.180.450.222,00)	(203.180.450.222,00)	(203.180.450.222,00)
II	**BMN NON NERACA**	**15.429.459.309,00**	**15.429.459.309,00**	**15.429.459.309,00**
1	Ekstrakomptabel	36.574.981.203,00	36.574.981.203,00	36.574.981.203,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(21.145.521.894,00)	(21.145.521.894,00)	(21.145.521.894,00)
III	**TOTAL (I+II)**	**31.791.515.290.666,00**	**31.791.515.290.666,00**	**31.791.515.290.666,00**

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
A	**ASET LANCAR**	**23.934.594.158,00**	-	-	**23.934.594.158,00**
A.1	Persediaan	23.934.594.158,00	-	-	23.934.594.158,00
B	**ASET TETAP**	**31.683.395.738.696,00**	-	-	**31.683.395.738.696,00**
B.1	Tanah	20.042.057.573.980,00	-	-	20.042.057.573.980,00
B.2	Peralatan dan Mesin	4.820.922.714.383,00	-	-	4.820.922.714.383,00
B.3	Gedung dan Bangunan	11.821.324.680.170,00	-	-	11.821.324.680.170,00
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.399.600.852,00	-	-	58.399.600.852,00
B.5	Aset Tetap Lainnya	75.032.921.320,00	-	-	75.032.921.320,00
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	915.655.052.073,00	-	-	915.655.052.073,00
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.049.996.804.082,00)	-	-	(6.049.996.804.082,00)
C	**ASET LAINNYA**	**68.755.498.503,00**	-	-	**68.755.498.503,00**
C.1	Aset Tidak Berwujud	110.013.999.715,00	-	-	110.013.999.715,00
C.2	Aset Lain-lain	161.921.949.010,00	-	-	161.921.949.010,00
C.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(203.180.450.222,00)	-	-	(203.180.450.222,00)
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**31.776.085.831.357,00**	-	-	**31.776.085.831.357,00**
E	**Ekstrakomptabel**	36.574.981.203,00	-	-	36.574.981.203,00
	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(21.145.521.894,00)	-	-	(21.145.521.894,00)
F	**TOTAL (D+E)**	**31.791.515.290.666,00**	-	-	**31.791.515.290.666,00**

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN		II. PERIODE
keuangan	barang	12 / 24
		<bulan/sm1/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 00 - 0000 - 000000 - 000 - KP
   <bagian anggaran> <eselon1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	Belanja Modal	Belanja Non Modal			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)
A	ASET LANCAR	0	96.667.121.199	0	0	96.667.121.199
A.1	Persediaan		96.667.121.199	0	0	96.667.121.199
B	ASET TETAP	1.126.865.858.142	273.691.037	0	0	1.127.139.549.179
B.1	Tanah	499.000.000		0	0	499.000.000
B.2	Peralatan dan Mesin	121.024.931.338	43.450.000	0	0	121.068.381.338
B.3	Gedung dan Bangunan	15.695.375.510	230.241.037	0	0	15.925.616.547
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.751.000		0	0	2.751.000
B.5	Aset Tetap Lainnya	286.734.808		0	0	286.734.808
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	989.357.065.486		0	0	989.357.065.486
C	ASET LAINNYA	98.291.500	0	0	0	98.291.500
C.1	Aset Tidak Berwujud	98.291.500		0	0	98.291.500
C.2	Aset Lain-lain			0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	1.126.964.149.642	96.940.812.236	0	0	1.223.904.961.878
E	Ekstrakomptabel	322.438.734	588.147.628	0	0	910.586.362
F	TOTAL (D+E)	1.127.286.588.376	97.528.959.864	0	0	1.224.815.548.240

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Audited Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp15.352.472.240,00

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PADA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA (K/L)

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN		II. PERIODE
keuangan	barang	12 / 24
		<bulan/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 00 - 0000 - 000000 - 000 - KP
   <bagian anggaran> <eselon1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL. SP2D	JENIS BLJ	URAIAN JENIS BELANJA	RUPIAH SPM	TOTAL RUPIAH SPP	SELISIH
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL. SP2D	JENIS BLJ	URAIAN JENIS BELANJA	RUPIAH SPM	TOTAL RUPIAH SPP	SELISIH
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL. SP2D	JENIS BLJ	URAIAN JENIS BELANJA	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (FACE)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 4:00 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**85,577,098,000**	**105,803,944,468**	**20,226,846,468**	**123.64**	**86,236,862,000**	**102,285,676,891**	**16,048,814,891**	**118.61**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	85,577,098,000	105,803,944,468	20,226,846,468	123.64	86,236,862,000	102,285,676,891	16,048,814,891	118.61
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**85,577,098,000**	**105,803,944,468**	**20,226,846,468**	**123.64**	**86,236,862,000**	**102,285,676,891**	**16,048,814,891**	**118.61**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,925,492,498,000	11,627,225,171,227	(298,267,326,773)	97.50	11,911,520,197,000	11,594,226,357,600	(317,293,839,400)	97.34
1. Belanja Pegawai	7,765,344,168,000	7,565,805,289,661	(199,538,878,339)	97.43	7,333,383,035,000	7,068,570,734,587	(264,812,300,413)	96.39
2. Belanja Barang	3,040,038,103,000	2,957,012,815,204	(83,025,287,796)	97.27	2,731,059,322,000	2,697,845,237,941	(33,214,084,059)	98.78
3. Belanja Modal	1,120,110,227,000	1,104,407,066,362	(15,703,160,638)	98.60	1,847,077,840,000	1,827,810,385,072	(19,267,454,928)	98.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 4:00 PM

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**11,925,492,498,000**	**11,627,225,171,227**	**(298,267,326,773)**	**97.50**	**11,911,520,197,000**	**11,594,226,357,600**	**(317,293,839,400)**	**97.34**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	395,428,800	0	395,428,800	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	93,919,000	4,981,342,755	0	4,981,342,755	5,303.87
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,576,800	0	1,576,800	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,654,738,000	9,753,106,252	7,448,172	9,745,658,080	112.6
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	228,465,805	0	228,465,805	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	8,748,657,000	15,359,920,412	7,448,172	15,352,472,240	175.48
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	318,578,000	100,380,000	0	100,380,000	31.51
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2,916,980,000	2,916,160,000	420,000	2,915,740,000	99.96
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23,535,053,000	23,786,760,000	980,000	23,785,780,000	101.07
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	50,057,829,000	48,345,734,113	3,674,000	48,342,060,113	96.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	76,828,440,000	75,149,034,113	5,074,000	75,143,960,113	97.81
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	243,816,177	0	243,816,177	0
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	376,798	0	376,798	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	46,742,494	0	46,742,494	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	36,252,226	0	36,252,226	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	327,187,695	0	327,187,695	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5,328,918,759	0	5,328,918,759	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	5,328,918,759	0	5,328,918,759	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000	655,118,420	0	655,118,420	65,511,842
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	960,793,485	0	960,793,485	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,772,360,191	1,991,018	7,770,369,173	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	245,582,450	0	245,582,450	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	19,967,133	425,000	19,542,133	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	1,000	9,653,821,679	2,416,018	9,651,405,661	965,140,566.1
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	85,577,098,000	105,818,882,658	14,938,190	105,803,944,468	123.64
	JUMLAH PENDAPATAN	85,577,098,000	105,818,882,658	14,938,190	105,803,944,468	123.64

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**					
005010100KD	BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA					
097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	30,381,000	13,551,250	0	13,551,250	44.6
097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	100,000,000	181,545,744	0	181,545,744	181.55
097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	34,559,000	178,762,622	0	178,762,622	517.27
097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	223,000	108,529,000	0	108,529,000	48667.71
400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	394,000	55,692,024	0	55,692,024	14135.03
400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	0	62,170,027	0	62,170,027	0
400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	969,000	22,489,108	0	22,489,108	2320.86
400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	0	12,027,000	0	12,027,000	0
400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	19,128,000	83,397,000	0	83,397,000	435.99
400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	3,962,000	8,581,065	10,400	8,570,665	216.32
400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	1,193,000	100,195,000	0	100,195,000	8398.58
401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	23,711,000	66,037,929	0	66,037,929	278.51
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	7,635,000	12,357,500	0	12,357,500	161.85
663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	25,251,000	42,573,720	0	42,573,720	168.6
663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	0	86,205,000	0	86,205,000	0
663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	0	62,265,000	0	62,265,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010100KD BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA	247,406,000	1,096,378,989	10,400	1,096,368,589	443.15
005010100KP	SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG					
663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	1,376,016,000	2,875,287,243	0	2,875,287,243	208.96
	JUMLAH PENDAPATAN 005010100KP SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG	1,376,016,000	2,875,287,243	0	2,875,287,243	208.96
005010200KD	BA(005) ES1(01) JAWA BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	43,297,000	76,841,453	0	76,841,453	177.48
097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	36,343,000	195,382,503	0	195,382,503	537.61
097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	7,941,000	12,188,939	0	12,188,939	153.49
097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	8,003,000	8,967,888	0	8,967,888	112.06
097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	14,460,000	21,150,400	0	21,150,400	146.27
097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	11,702,000	63,000,100	0	63,000,100	538.37
097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	18,321,000	17,925,350	0	17,925,350	97.84
097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	2,855,000	48,197,000	0	48,197,000	1688.16
097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	42,642,000	23,366,771	0	23,366,771	54.8
097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	3,056,000	2,784,761	0	2,784,761	91.12
097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	21,890,000	23,162,354	0	23,162,354	105.81
097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	31,435,000	32,556,669	0	32,556,669	103.57
097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	32,360,000	81,140,250	0	81,140,250	250.74
097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	6,643,000	2,840,070	0	2,840,070	42.75
097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	7,934,000	20,084,043	0	20,084,043	253.14
097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	19,831,000	12,188,700	0	12,188,700	61.46
097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	13,502,000	7,988,970	0	7,988,970	59.17
308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	105,123,000	143,880,241	0	143,880,241	136.87
400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	8,694,000	43,176,811	0	43,176,811	496.63
400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	1,229,000	3,611,195	239,100	3,372,095	274.38
400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	9,200,000	21,635,000	0	21,635,000	235.16
400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	0	3,258,500	0	3,258,500	0
400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	0	2,153,215	0	2,153,215	0
400690	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	390,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	2,266,000	5,067,650	0	5,067,650	223.64
400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	5,904,000	5,692,291	0	5,692,291	96.41
400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	4,560,000	2,986,632	0	2,986,632	65.5
400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	0	100	0	100	0
400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	0	14,615,038	0	14,615,038	0
400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	1,926,000	24,957,850	71,850	24,886,000	1292.11
400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	2,616,000	7,061,850	0	7,061,850	269.95
400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	0	3,450,000	0	3,450,000	0
400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	1,000,000	16,714,000	0	16,714,000	1671.4
400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	6,771,000	4,790,648	0	4,790,648	70.75
401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	599,000	165,760,084	0	165,760,084	27672.8
401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	557,000	18,345,689	0	18,345,689	3293.66
401957	PENGADILAN AGAMA SOREANG	0	946,050	0	946,050	0
401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	0	14,000	0	14,000	0
401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	0	2,406,500	0	2,406,500	0
402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	0	7,970,676	0	7,970,676	0
402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	981,000	2,904,466	0	2,904,466	296.07
403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	208,000	4,750,500	0	4,750,500	2283.89
477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	0	2,705,246	0	2,705,246	0
531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	0	32,965,300	27,500	32,937,800	0
604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	83,000	15,185,000	0	15,185,000	18295.18
613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	35,453,000	111,085,623	0	111,085,623	313.33
614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	770,000	7,654,321	0	7,654,321	994.07
652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	27,976,000	38,667,931	0	38,667,931	138.22

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
663271	PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG	0	6,091,500	0	6,091,500	0
682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	0	324,000	0	324,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010200KD BA(005) ES1(01) JAWA BARAT	538,521,000	1,370,594,128	338,450	1,370,255,678	254.45
005010300KD	BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH					
097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	45,466,000	24,728,562	0	24,728,562	54.39
097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	18,078,000	21,019,010	0	21,019,010	116.27
097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	14,150,000	17,701,434	0	17,701,434	125.1
097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	838,000	4,885,954	0	4,885,954	583.05
097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	6,835,000	35,111,299	0	35,111,299	513.7
097762	PENGADILAN NEGERI PATI	9,880,000	12,662,650	0	12,662,650	128.16
097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	2,384,000	88,673,898	0	88,673,898	3719.54
097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	9,439,000	24,859,756	0	24,859,756	263.37
097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	12,780,000	13,535,676	0	13,535,676	105.91
097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	4,150,000	11,960,000	0	11,960,000	288.19
097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	10,755,000	14,583,111	0	14,583,111	135.59
097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	0	6,317,934	0	6,317,934	0
097830	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	18,806,000	33,810,307	0	33,810,307	179.78
097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	10,000,000	9,701,033	0	9,701,033	97.01
097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	7,196,000	8,623,223	0	8,623,223	119.83
097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	6,291,000	73,673,800	0	73,673,800	1171.1
097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	1,535,000	1,778,931	0	1,778,931	115.89
097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	5,205,000	29,208,950	0	29,208,950	561.17
097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	6,791,000	12,565,150	0	12,565,150	185.03
097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	3,009,000	21,173,100	0	21,173,100	703.66

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	5,174,000	10,689,155	0	10,689,155	206.59
097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	7,533,000	14,383,975	0	14,383,975	190.95
097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	4,217,000	152,147,872	0	152,147,872	3607.96
097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	8,240,000	9,088,761	0	9,088,761	110.3
097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	5,084,000	7,870,691	0	7,870,691	154.81
097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	10,486,000	18,272,600	0	18,272,600	174.26
097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	2,244,000	94,118,043	0	94,118,043	4194.21
097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	5,507,000	48,288,000	0	48,288,000	876.85
097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	13,870,000	49,513,184	0	49,513,184	356.98
098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	17,677,000	17,592,112	0	17,592,112	99.52
098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	10,561,000	10,316,183	425,000	9,891,183	93.66
098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	7,627,000	2,977,440	0	2,977,440	39.04
098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	5,050,000	83,776,764	0	83,776,764	1658.95
098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	6,255,000	6,280,000	0	6,280,000	100.4
400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	11,252,000	10,945,522	0	10,945,522	97.28
400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	4,112,000	12,372,956	0	12,372,956	300.9
400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	0	63,480	0	63,480	0
400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	1,500,000	28,787,000	0	28,787,000	1919.13
400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	0	12,100,286	0	12,100,286	0
400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	2,900,000	3,576,000	0	3,576,000	123.31
400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	4,163,000	3,521,000	0	3,521,000	84.58
400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	0	1,750,000	0	1,750,000	0
400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	0	22,451,000	0	22,451,000	0
400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	2,472,000	5,871,725	0	5,871,725	237.53

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	1,200,000	51,877,966	0	51,877,966	4323.16
400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	2,147,000	2,341,152	0	2,341,152	109.04
400967	PENGADILAN AGAMA PATI	0	17,354,795	0	17,354,795	0
400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	0	1,505,050	0	1,505,050	0
400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	1,889,000	12,118,920	0	12,118,920	641.55
400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	330,000	15,186,106	0	15,186,106	4601.85
401002	PENGADILAN AGAMA BLORA	3,600,000	10,092,164	0	10,092,164	280.34
401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	0	16,648,000	0	16,648,000	0
401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	556,000	1,373,816	0	1,373,816	247.09
401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	0	465	0	465	0
401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	0	8,655,000	0	8,655,000	0
401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	252,000	13,304,000	0	13,304,000	5279.37
401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	560,000	0	0	0	0
401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	1,525,000	8,831,370	0	8,831,370	579.11
401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	915,000	3,286,179	0	3,286,179	359.15
401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100
401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	0	3,903,031	0	3,903,031	0
401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	2,282,000	0	0	0	0
401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	0	39	0	39	0
401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	0	8,310,000	0	8,310,000	0
401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	0	420,000	0	420,000	0
402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	2,068,000	9,698,126	0	9,698,126	468.96
402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	8,145,000	39,264,613	0	39,264,613	482.07
403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	0	28,740,835	0	28,740,835	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	72,000	71,672	0	71,672	99.54
531830	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	8,472,000	13,975,952	0	13,975,952	164.97
614710	PENGADILAN AGAMA KAJEN	0	25,784,378	0	25,784,378	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010300KD BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH	364,725,000	1,387,271,156	425,000	1,386,846,156	380.24
005010400KD	BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	19,970,000	64,913,000	0	64,913,000	325.05
098061	PENGADILAN NEGERI WATES	20,235,000	14,326,636	0	14,326,636	70.8
098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	8,270,000	7,139,910	0	7,139,910	86.34
098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	16,816,000	33,201,400	0	33,201,400	197.44
400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	8,140,000	23,217,599	0	23,217,599	285.23
400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	22,876,000	29,330,200	0	29,330,200	128.21
401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	2,970,000	2,969,808	0	2,969,808	99.99
401200	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	2,307,000	5,599,710	0	5,599,710	242.73
401219	PENGADILAN AGAMA WATES	248,000	2,483,712	0	2,483,712	1001.5
401225	PENGADILAN AGAMA BANTUL	0	3,727,795	0	3,727,795	0
401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	472,000	3,240,852	0	3,240,852	686.62
547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	0	13,119,581	0	13,119,581	0
578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	10,169,000	9,847,000	0	9,847,000	96.83
	JUMLAH PENDAPATAN 005010400KD BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA	112,473,000	213,117,203	0	213,117,203	189.48
005010500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya					
098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	7,214,000	60,565,500	0	60,565,500	839.56
098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	44,457,000	128,910,266	0	128,910,266	289.97
098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	10,122,000	62,609,580	0	62,609,580	618.55

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	7,240,000	17,910,600	0	17,910,600	247.38
098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	18,530,000	15,088,482	0	15,088,482	81.43
098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	13,163,000	74,032,100	0	74,032,100	562.43
098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	504,000	2,105,000	0	2,105,000	417.66
098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	2,715,000	5,973,297	0	5,973,297	220.01
098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	12,000,000	11,360,000	0	11,360,000	94.67
098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	8,314,000	29,812,000	0	29,812,000	358.58
098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	21,643,000	17,679,216	0	17,679,216	81.69
098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	30,392,000	38,453,632	0	38,453,632	126.53
098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	3,061,000	8,150,783	0	8,150,783	266.28
098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	25,490,000	19,917,600	0	19,917,600	78.14
098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	17,583,000	12,470,704	0	12,470,704	70.92
098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	4,473,000	10,349,922	0	10,349,922	231.39
098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	2,711,000	3,113,157	0	3,113,157	114.83
098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	16,131,000	17,146,092	0	17,146,092	106.29
098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	1,669,000	28,868,591	0	28,868,591	1729.69
098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	13,303,000	11,571,820	0	11,571,820	86.99
098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	9,750,000	19,397,231	0	19,397,231	198.95
098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	3,089,000	20,265,759	0	20,265,759	656.06
098324	PENGADILAN NEGERI BANGIL	5,219,000	14,213,085	0	14,213,085	272.33
098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	3,310,000	2,158,868	0	2,158,868	65.22
098345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	2,088,000	12,025,440	0	12,025,440	575.93
098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	20,627,000	23,274,020	0	23,274,020	112.83
098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	8,145,000	12,058,571	0	12,058,571	148.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	1,741,000	1,343,016	0	1,343,016	77.14
098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	5,491,000	8,657,000	0	8,657,000	157.66
098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	1,406,000	2,529,571	0	2,529,571	179.91
098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	452,000	6,727,338	0	6,727,338	1488.35
098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	1,482,000	9,440,775	0	9,440,775	637.03
098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	12,677,000	14,174,783	0	14,174,783	111.81
308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	7,999,000	42,170,153	0	42,170,153	527.19
400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	9,444,000	17,606,231	0	17,606,231	186.43
400596	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	622,000	8,109,548	0	8,109,548	1303.79
401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	3,456,000	3,669,000	0	3,669,000	106.16
401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	1,879,000	2,159,850	0	2,159,850	114.95
401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	0	4,494,935	0	4,494,935	0
401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	1,884,000	6,286,426	0	6,286,426	333.67
401287	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	0	1,136,100	0	1,136,100	0
401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	804,000	6,082,000	0	6,082,000	756.47
401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	0	30,000	0	30,000	0
401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	0	5,810,000	0	5,810,000	0
401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	1,575,000	21,867,000	1,700,000	20,167,000	1280.44
401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	0	5,808,000	0	5,808,000	0
401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	5,054,000	4,198,100	0	4,198,100	83.06
401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	1,454,000	3,965,300	0	3,965,300	272.72
401375	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	2,103,000	1,677,335	0	1,677,335	79.76
401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	32,201,000	19,153,203	0	19,153,203	59.48
401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	815,000	39,942,872	0	39,942,872	4900.97

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	345,000	6,565,772	0	6,565,772	1903.12
401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	695,000	1,561,980	0	1,561,980	224.75
401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	1,027,000	1,027,008	0	1,027,008	100
401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	0	164,600	0	164,600	0
401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	0	35,520,000	0	35,520,000	0
401472	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	3,300,000	3,780,000	0	3,780,000	114.55
401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	306,000	12,984,712	0	12,984,712	4243.37
401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	0	1,496,768	0	1,496,768	0
401508	PENGADILAN AGAMA NGAWI	0	7,001,260	106,260	6,895,000	0
401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	0	800,000	0	800,000	0
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	0	259,736	0	259,736	0
401545	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	0	15,220,000	0	15,220,000	0
401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	1,369,000	8,887,576	0	8,887,576	649.2
401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	2,400,000	17,474,888	0	17,474,888	728.12
401576	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	0	807,250	0	807,250	0
403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	901,000	0	0	0	0
403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	0	185,096	0	185,096	0
450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	446,000	360,000	0	360,000	80.72
526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	2,878,000	5,866,125	0	5,866,125	203.83
548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	5,670,000	24,501,713	0	24,501,713	432.13
604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	0	16,607,300	0	16,607,300	0
626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	1,926,000	5,502,893	0	5,502,893	285.72
663314	PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010500KD Pengadilan Tinggi Surabaya	426,745,000	1,088,094,529	1,806,260	1,086,288,269	254.55

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005010600KD	BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	34,144,000	214,553,990	0	214,553,990	628.38
098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	27,374,000	186,030,358	0	186,030,358	679.59
098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	10,888,000	12,077,620	0	12,077,620	110.93
098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	9,704,000	12,591,934	0	12,591,934	129.76
098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	5,893,000	11,253,815	0	11,253,815	190.97
098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	10,447,000	17,861,666	0	17,861,666	170.97
098497	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	11,462,000	10,832,105	0	10,832,105	94.5
098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	15,939,000	19,363,608	0	19,363,608	121.49
098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	7,928,000	25,742,220	0	25,742,220	324.7
098523	PENGADILAN NEGERI IDI	11,323,000	51,784,418	0	51,784,418	457.34
098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	15,960,000	22,876,146	0	22,876,146	143.33
098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	14,225,000	13,951,260	0	13,951,260	98.08
098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	18,065,000	8,955,698	0	8,955,698	49.57
098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	21,827,000	22,541,139	0	22,541,139	103.27
098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	14,446,000	13,555,879	0	13,555,879	93.84
098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	39,927,000	35,586,352	0	35,586,352	89.13
098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	12,486,000	12,294,705	0	12,294,705	98.47
098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	10,113,000	16,567,312	0	16,567,312	163.82
400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	10,852,000	10,422,143	0	10,422,143	96.04
401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	12,541,000	14,790,809	0	14,790,809	117.94
401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	7,200,000	4,980,000	0	4,980,000	69.17
401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	4,660,000	5,162,000	0	5,162,000	110.77
401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	1,430,000	3,566,640	0	3,566,640	249.42

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	2,287,000	1,306,800	0	1,306,800	57.14
401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	0	200,004	0	200,004	0
401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	884,000	990,000	0	990,000	111.99
401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	0	2,840,000	0	2,840,000	0
401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	0	830,000	0	830,000	0
401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	2,036,000	3,324,500	0	3,324,500	163.29
401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	3,842,000	4,579,296	0	4,579,296	119.19
401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	2,614,000	34,113,074	0	34,113,074	1305.01
401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	2,289,000	4,248,098	0	4,248,098	185.59
401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	3,028,000	3,530,648	0	3,530,648	116.6
401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	419,000	0	0	0	0
401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	584,000	1,015,925	0	1,015,925	173.96
401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	2,750,000	2,875,000	0	2,875,000	104.55
401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	1,294,000	1,627,700	0	1,627,700	125.79
401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	0	1,123,920	0	1,123,920	0
401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	274,000	73,840,692	0	73,840,692	26949.16
401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	0	70,858,406	0	70,858,406	0
401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	1,000,000	478,200	0	478,200	47.82
401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	0	18,047,398	0	18,047,398	0
401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	0	1,322,500	0	1,322,500	0
401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	0	143,210,946	0	143,210,946	0
402607	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	79,000	277,200	0	277,200	350.89
578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	13,968,000	5,167,272	0	5,167,272	36.99
663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	0	1,603,900	0	1,603,900	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	70,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010600KD BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	366,252,000	1,124,753,296	0	1,124,753,296	307.1
005010700KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA					
098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	86,479,000	78,744,702	0	78,744,702	91.06
098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	62,489,000	23,832,563	0	23,832,563	38.14
098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	3,000,000	64,657,324	0	64,657,324	2155.24
098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	1,436,000	5,068,473	0	5,068,473	352.96
098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	14,094,000	18,776,390	0	18,776,390	133.22
098661	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	9,824,000	4,991,032	0	4,991,032	50.8
098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	2,542,000	8,681,607	0	8,681,607	341.53
098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	13,617,000	14,551,585	0	14,551,585	106.86
098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	3,041,000	13,674,115	0	13,674,115	449.66
098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	12,992,000	21,148,020	0	21,148,020	162.78
098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	2,094,000	1,884,600	0	1,884,600	90
098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	9,209,000	14,472,625	0	14,472,625	157.16
098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	5,979,000	37,517,515	0	37,517,515	627.49
108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	1,256,000	2,408,486	0	2,408,486	191.76
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	18,605,000	18,007,061	0	18,007,061	96.79
400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	21,697,000	26,167,584	0	26,167,584	120.6
400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	17,970,000	36,791,337	0	36,791,337	204.74
401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	0	21,900,952	0	21,900,952	0
401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	1,229,000	2,356,704	0	2,356,704	191.76
401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	7,748,000	8,635,400	0	8,635,400	111.45

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401812	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	781,000	740,352	0	740,352	94.8
401834	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	0	951,000	0	951,000	0
401840	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	1,994,000	2,900,352	0	2,900,352	145.45
401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	2,989,000	4,409,800	0	4,409,800	147.53
401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	1,430,000	7,295,961	0	7,295,961	510.21
401871	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	1,533,000	1,628,479	0	1,628,479	106.23
401896	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	6,260,000	7,424,400	0	7,424,400	118.6
401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	0	139,524	0	139,524	0
401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	0	2,285,613,248	0	2,285,613,248	0
401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	0	968,044,813	0	968,044,813	0
401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	0	617	0	617	0
403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	0	1,062,491	0	1,062,491	0
403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	100
403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	488,000	1,016,405	0	1,016,405	208.28
477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	6,175,000	12,530,440	0	12,530,440	202.92
526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	10,740,000	41,751,791	0	41,751,791	388.75
526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	10,651,000	9,781,196	0	9,781,196	91.83
604744	PENGADILAN AGAMA PANDAN	1,272,000	516,347	0	516,347	40.59
631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	0	2,656,000	0	2,656,000	0
663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	0	10	0	10	0
672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	428,000	4,206,568	0	4,206,568	982.84
682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	0	1,207,320	0	1,207,320	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010700KD BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA	341,752,000	3,779,855,189	0	3,779,855,189	1,106.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005010800KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT					
098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	36,838,000	78,292,244	0	78,292,244	212.53
098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	23,335,000	50,366,180	0	50,366,180	215.84
098764	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	16,746,000	26,488,372	0	26,488,372	158.18
098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	8,720,000	17,242,806	0	17,242,806	197.74
098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	18,780,000	18,636,000	0	18,636,000	99.23
098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	10,476,000	10,579,668	0	10,579,668	100.99
098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	6,215,000	49,597,100	0	49,597,100	798.02
098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	19,202,000	21,017,106	0	21,017,106	109.45
098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	11,439,000	21,574,486	0	21,574,486	188.6
098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	22,587,000	30,173,988	0	30,173,988	133.59
400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	13,342,000	17,836,252	0	17,836,252	133.68
400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	6,557,000	11,204,800	0	11,204,800	170.88
400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	12,542,000	16,060,937	0	16,060,937	128.06
400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	24,311,000	22,976,198	0	22,976,198	94.51
400461	PENGADILAN NEGERI MUARO	8,400,000	10,458,042	0	10,458,042	124.5
401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	0	21,256,000	0	21,256,000	0
401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	0	2,885,840	0	2,885,840	0
401916	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	266,000	4,947,756	0	4,947,756	1860.06
401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	100
401931	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	0	2,000,000	0	2,000,000	0
401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	0	22,246,000	0	22,246,000	0
401947	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	0	2,155,000	0	2,155,000	0
401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	0	34,300,000	0	34,300,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	1,592,000	4,101,140	0	4,101,140	257.61
401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	3,284,000	700,701	0	700,701	21.34
401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	0	15,612,800	0	15,612,800	0
401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	2,216,000	6,638,200	0	6,638,200	299.56
402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	836,000	21,518,000	0	21,518,000	2573.92
402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	0	18,890,183	0	18,890,183	0
402035	PENGADILAN AGAMA TALU	273,000	580,306	0	580,306	212.57
402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	0	13,411,295	0	13,411,295	0
402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	0	1,836,600	0	1,836,600	0
402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	0	2,237,000	0	2,237,000	0
402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	1,688,000	59,252,514	0	59,252,514	3510.22
477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	9,511,000	15,934,225	0	15,934,225	167.53
531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	22,493,000	16,593,780	0	16,593,780	73.77
	JUMLAH PENDAPATAN 005010800KD BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT	282,909,000	670,861,519	0	670,861,519	237.13
005010900KD	BA(005) ES1(01) RIAU					
098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	21,866,000	46,456,036	0	46,456,036	212.46
098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	45,638,000	61,245,220	0	61,245,220	134.2
098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	5,924,000	24,110,596	0	24,110,596	407
098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	10,348,000	19,262,271	0	19,262,271	186.14
400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	13,254,000	27,171,254	0	27,171,254	205
400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	12,484,000	11,884,527	0	11,884,527	95.2
400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	27,072,000	73,868,382	0	73,868,382	272.86
401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	0	3,216,219	162,219	3,054,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401937	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	0	6,236,059	0	6,236,059	0
401938	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	0	219,000	0	219,000	0
402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	0	14,491,483	0	14,491,483	0
402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	1,903,000	1,902,880	0	1,902,880	99.99
402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	3,503,000	2,120,400	0	2,120,400	60.53
402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	3,621,000	4,462,628	0	4,462,628	123.24
402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	1,488,000	800,000	0	800,000	53.76
402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	2,618,000	5,503,232	0	5,503,232	210.21
402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	1,139,000	1,063,044	0	1,063,044	93.33
402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	10,895,000	30,434,400	0	30,434,400	279.34
477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	23,738,000	23,520,951	0	23,520,951	99.09
477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	30,097,000	32,029,768	0	32,029,768	106.42
477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	13,365,000	18,845,091	0	18,845,091	141
578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	15,852,000	21,457,520	0	21,457,520	135.36
631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	32,328,000	1,320,000	0	1,320,000	4.08
632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	0	2,425,500	0	2,425,500	0
662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	20,570,000	24,297,714	0	24,297,714	118.12
	JUMLAH PENDAPATAN 005010900KD BA(005) ES1(01) RIAU	297,703,000	458,344,175	162,219	458,181,956	153.91
005011000KD	BA(005) ES1(01) JAMBI					
098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	4,006,000	51,139,215	0	51,139,215	1276.57
098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	15,337,000	18,824,712	0	18,824,712	122.74
098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	5,855,000	5,902,700	0	5,902,700	100.81
098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	3,350,000	9,400,000	0	9,400,000	280.6
400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	21,400,000	20,899,275	0	20,899,275	97.66

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	15,408,000	17,029,000	0	17,029,000	110.52
400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	43,332,000	32,091,100	0	32,091,100	74.06
402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	0	7,375,200	0	7,375,200	0
402191	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	0	37	0	37	0
402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	1,161,000	756,750	0	756,750	65.18
402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	1,778,000	476,628	0	476,628	26.81
402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	0	14	0	14	0
477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	0	21,094,435	0	21,094,435	0
477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	15,600,000	19,780,000	0	19,780,000	126.79
477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	0	3,236,000	0	3,236,000	0
547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	21,780,000	2,159,360	0	2,159,360	9.91
578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	8,263,000	27,906,836	0	27,906,836	337.73
632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	51,000	0	0	0	0
632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	0	58,506	0	58,506	0
652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	1,526,000	4,025,584	0	4,025,584	263.8
652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	0	633,417	0	633,417	0
663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	672,000	10,869,200	0	10,869,200	1617.44
	JUMLAH PENDAPATAN 005011000KD BA(005) ES1(01) JAMBI	159,519,000	253,657,969	0	253,657,969	159.01
005011100KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN					
098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	36,883,000	33,395,690	0	33,395,690	90.54
098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	12,876,000	36,877,988	0	36,877,988	286.41
098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	21,498,000	18,924,045	0	18,924,045	88.03
098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	16,148,000	18,555,895	0	18,555,895	114.91
098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	11,527,000	11,687,562	0	11,687,562	101.39

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098984	PENGADILAN NEGERI LAHAT	17,400,000	27,950,972	0	27,950,972	160.64
098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	9,898,000	13,359,804	0	13,359,804	134.97
099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	26,054,000	33,353,030	0	33,353,030	128.02
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	0	3,272,080	0	3,272,080	0
401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	0	163,675,674	0	163,675,674	0
401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	0	79,387,471	0	79,387,471	0
401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	0	1,819,758,445	0	1,819,758,445	0
401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	95,000	428,911,327	0	428,911,327	451485.61
402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	3,155,000	4,684,608	0	4,684,608	148.48
402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	2,694,000	17,082,229	0	17,082,229	634.08
402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	1,114,000	1,345,410	0	1,345,410	120.77
402273	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	493,000	534,600	0	534,600	108.44
402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	55,000	659,187	0	659,187	1198.52
402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	329,000	806,992	0	806,992	245.29
402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	951,000	915,750	0	915,750	96.29
526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	30,098,000	13,604,823	0	13,604,823	45.2
663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	0	11,479,000	0	11,479,000	0
672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	0	39	0	39	0
672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	710,000	924,738	0	924,738	130.24
	JUMLAH PENDAPATAN 005011100KD BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN	191,978,000	2,741,147,359	0	2,741,147,359	1,427.84
005011200KD	BA(005) ES1(01) LAMPUNG					
099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	62,478,000	28,669,934	0	28,669,934	45.89
099045	PENGADILAN NEGERI METRO	15,011,000	20,181,872	0	20,181,872	134.45

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 20
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099052	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	8,791,000	7,452,296	0	7,452,296	84.77
400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	0	39,640,341	0	39,640,341	0
400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20,816,000	13,869,276	0	13,869,276	66.63
401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	2,256,000	140,000	0	140,000	6.21
401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	55,000	0	0	0	0
401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	104,000	70,830	0	70,830	68.11
401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	0	21,450,000	0	21,450,000	0
402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	2,139,000	1,352,000	0	1,352,000	63.21
402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	2,153,000	1,885,770	0	1,885,770	87.59
402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	168,000	0	0	0	0
402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	35,000	1,201,622	86,622	1,115,000	3185.71
477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	5,812,000	12,300,381	0	12,300,381	211.64
547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	0	14,134,866	0	14,134,866	0
559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	8,027,000	12,200,645	0	12,200,645	152
614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	1,152,000	1,416,000	0	1,416,000	122.92
614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	0	1,700,000	0	1,700,000	0
614883	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	8,507,000	33,993,039	0	33,993,039	399.59
652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	6,871,000	4,811,786	0	4,811,786	70.03
652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	728,000	782,172	0	782,172	107.44
663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	32,914,000	36,352,956	0	36,352,956	110.45
663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	15,590,000	14,949,630	0	14,949,630	95.89
663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	4,143,000	7,526,020	0	7,526,020	181.66
663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	8,122,000	31,840,753	0	31,840,753	392.03
	JUMLAH PENDAPATAN 005011200KD BA(005) ES1(01) LAMPUNG	205,872,000	307,922,189	86,622	307,835,567	149.53

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005011300KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	18,018,000	17,543,967	0	17,543,967	97.37
099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	19,780,000	35,896,365	0	35,896,365	181.48
099087	PENGADILAN NEGERI SINTANG	15,890,000	14,873,087	0	14,873,087	93.6
099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	5,728,000	35,753,803	0	35,753,803	624.19
099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	14,087,000	14,728,464	0	14,728,464	104.55
099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	19,780,000	18,378,648	0	18,378,648	92.92
400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	4,630,000	16,645,455	0	16,645,455	359.51
400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	35,770,000	67,716,941	0	67,716,941	189.31
401960	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	1,377,000	1,376,400	0	1,376,400	99.96
401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	0	739,501,578	0	739,501,578	0
402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	6,382,000	18,006,807	0	18,006,807	282.15
402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	6,180,000	6,004,697	0	6,004,697	97.16
402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	1,022,000	5,679,032	0	5,679,032	555.68
402392	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	5,691,000	5,528,954	0	5,528,954	97.15
402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	2,772,000	2,771,508	0	2,771,508	99.98
402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	4,457,000	4,861,200	0	4,861,200	109.07
402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	26,381,000	25,789,236	0	25,789,236	97.76
402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	694,000	4,159,200	0	4,159,200	599.31
531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	9,771,000	11,263,894	0	11,263,894	115.28
632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	0	6,575,800	0	6,575,800	0
670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	11,491,000	18,073,086	0	18,073,086	157.28
670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	3,536,000	14,536,962	0	14,536,962	411.11
681450	PENGADILAN NEGERI NGABANG	3,855,000	6,460,133	0	6,460,133	167.58

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005011300KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	217,292,000	1,092,125,217	0	1,092,125,217	502.61
005011400KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH					
099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	0	19,848,837	0	19,848,837	0
099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	17,782,000	19,679,118	0	19,679,118	110.67
099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	10,883,000	12,802,148	0	12,802,148	117.63
099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	6,510,000	9,020,958	0	9,020,958	138.57
099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	12,097,000	21,160,144	0	21,160,144	174.92
099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	16,559,000	17,330,801	0	17,330,801	104.66
400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	26,673,000	31,439,337	0	31,439,337	117.87
401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	0	190,106,625	0	190,106,625	0
401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	0	4,055,227	0	4,055,227	0
401874	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	0	19,818,038	0	19,818,038	0
401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	75,000	148,973,754	0	148,973,754	198631.67
401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	0	150,614,966	0	150,614,966	0
401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	0	99,672,266	0	99,672,266	0
402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	655,000	12,945,094	0	12,945,094	1976.35
402437	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	543,000	1,156,313	0	1,156,313	212.95
402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	3,203,000	2,229,492	0	2,229,492	69.61
402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	0	10,237,825	0	10,237,825	0
402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	2,781,000	5,216,280	0	5,216,280	187.57
402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	0	2,257,000	0	2,257,000	0
402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	6,373,000	6,263,615	0	6,263,615	98.28
578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	15,543,000	11,220,742	0	11,220,742	72.19

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	2,955,000	998,000	0	998,000	33.77
672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	676,000	943,866	0	943,866	139.63
	JUMLAH PENDAPATAN 005011400KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH	123,308,000	797,990,446	0	797,990,446	647.15
005011500KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN					
099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	12,282,000	72,547,829	0	72,547,829	590.68
099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	22,830,000	62,719,252	0	62,719,252	274.72
099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	10,832,000	9,631,939	0	9,631,939	88.92
099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	14,159,000	21,527,076	0	21,527,076	152.04
099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	16,728,000	20,256,858	0	20,256,858	121.1
099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	15,079,000	16,312,227	0	16,312,227	108.18
099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	12,591,000	51,689,412	0	51,689,412	410.53
099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	10,084,000	181,878,488	0	181,878,488	1803.63
099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	15,897,000	2,261,648,010	0	2,261,648,010	14226.89
307101	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	4,846,000	3,183,222	0	3,183,222	65.69
307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	1,493,000	947,400	0	947,400	63.46
307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	2,931,000	2,029,105	0	2,029,105	69.23
400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	21,710,000	15,816,453	0	15,816,453	72.85
400282	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	25,628,000	16,736,804	0	16,736,804	65.31
401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	0	678,799	0	678,799	0
402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	14,151,000	35,353,858	0	35,353,858	249.83
402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	4,400,000	24,312,164	0	24,312,164	552.55
402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	0	4,215,000	0	4,215,000	0
402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	3,924,000	8,864,345	0	8,864,345	225.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	2,471,000	9,880,100	0	9,880,100	399.84
402540	PENGADILAN AGAMA BARABAI	0	186,648	0	186,648	0
402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	4,178,000	6,733,804	0	6,733,804	161.17
402562	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	8,773,000	7,866,233	0	7,866,233	89.66
402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	0	2,009,753	0	2,009,753	0
531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	2,160,000	5,754,924	0	5,754,924	266.43
653458	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	29,720,000	23,926,194	0	23,926,194	80.51
670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	21,782,000	20,932,422	0	20,932,422	96.1
682260	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	0	1,240,008	0	1,240,008	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011500KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	278,649,000	2,888,878,327	0	2,888,878,327	1,036.74
005011600KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR					
099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	57,421,000	70,533,480	0	70,533,480	122.84
099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	5,095,000	28,472,400	0	28,472,400	558.83
099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	35,829,000	70,316,534	0	70,316,534	196.26
307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	2,478,000	860,064	0	860,064	34.71
307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	0	4,337,215	0	4,337,215	0
307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	0	1,971,000	0	1,971,000	0
307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	0	3,811,779	0	3,811,779	0
307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	1,081,000	5,720,004	0	5,720,004	529.14
400291	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	10,807,000	17,311,956	0	17,311,956	160.19
400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	14,305,000	17,166,376	0	17,166,376	120
400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	20,372,000	55,786,760	0	55,786,760	273.84
401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	0	142,417	0	142,417	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 25
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	0	53,295,040	0	53,295,040	0
401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	1,280,000	13,429,415	0	13,429,415	1049.17
402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	4,925,000	21,232,326	0	21,232,326	431.11
477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	8,423,000	21,997,764	0	21,997,764	261.16
559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	11,048,000	9,119,000	0	9,119,000	82.54
652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	0	4,298,925	0	4,298,925	0
652097	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	0	4,702,300	0	4,702,300	0
662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	31,350,000	40,783,500	0	40,783,500	130.09
662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	6,522,000	11,583,059	0	11,583,059	177.6
	JUMLAH PENDAPATAN 005011600KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	210,936,000	456,871,314	0	456,871,314	216.59
005011700KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA					
099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	50,112,000	92,484,659	0	92,484,659	184.56
099329	PENGADILAN NEGERI MANADO	11,987,000	46,378,696	0	46,378,696	386.91
099333	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	6,695,000	9,616,068	0	9,616,068	143.63
099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	27,528,000	21,766,716	0	21,766,716	79.07
099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	21,522,000	35,316,462	0	35,316,462	164.09
307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	0	3,868,688	179,800	3,688,888	0
307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	8,500,000	5,915,800	0	5,915,800	69.6
401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	0	3,737,172	0	3,737,172	0
401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	0	4,145,000	0	4,145,000	0
401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	0	17,580,000	0	17,580,000	0
401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	190,000	2,336,826	1,991,018	345,808	182
402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	7,465,000	45,841,609	2,636,800	43,204,809	578.77

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	1,335,000	2,113,750	0	2,113,750	158.33
526734	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	0	608,454	608,454	0	0
531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	11,471,000	11,993,364	0	11,993,364	104.55
568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	11,783,000	58,878,422	0	58,878,422	499.69
604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	1,535,000	57,073,586	0	57,073,586	3718.15
670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	0	37,408,926	0	37,408,926	0
673034	PENGADILAN NEGERI AMURANG	832,000	107,082,130	0	107,082,130	12870.45
682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	0	4,134,240	0	4,134,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011700KD BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA	160,955,000	568,280,568	5,416,072	562,864,496	349.7
005011800KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA					
099375	PENGADILAN NEGERI PALU	14,597,000	45,536,179	0	45,536,179	311.96
099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	6,625,000	7,518,750	0	7,518,750	113.49
099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	27,530,000	36,560,529	0	36,560,529	132.8
099401	PENGADILAN NEGERI POSO	21,412,000	31,811,824	0	31,811,824	148.57
307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	4,635,000	3,575,616	0	3,575,616	77.14
307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	759,000	11,864,240	0	11,864,240	1563.14
307292	PENGADILAN AGAMA POSO	7,308,000	6,211,800	0	6,211,800	85
307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	953,000	952,872	0	952,872	99.99
400534	PENGADILAN TINGGI PALU	54,586,000	53,821,034	0	53,821,034	98.6
477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	16,993,000	18,369,544	0	18,369,544	108.1
576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	20,230,000	20,260,094	0	20,260,094	100.15
578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	12,202,000	21,961,755	0	21,961,755	179.98
604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	3,284,000	3,049,232	0	3,049,232	92.85

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	3,655,000	12,249,788	0	12,249,788	335.15
652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	3,637,000	4,612,864	0	4,612,864	126.83
652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	910,000	909,216	0	909,216	99.91
670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	12,576,000	12,774,560	0	12,774,560	101.58
672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	0	120,483	0	120,483	0
682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	304,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011800KD BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA SULTENG]	212,196,000	292,160,380	0	292,160,380	137.68
005011900KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	34,696,000	42,109,733	0	42,109,733	121.37
099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	23,398,000	17,049,530	0	17,049,530	72.87
099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	5,430,000	14,870,683	0	14,870,683	273.86
099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	0	4,325,853	0	4,325,853	0
099450	PENGADILAN NEGERI BARRU	19,027,000	20,758,089	0	20,758,089	109.1
099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	10,235,000	16,219,623	0	16,219,623	158.47
099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	15,543,000	33,704,178	0	33,704,178	216.84
099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	12,797,000	8,791,557	0	8,791,557	68.7
099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	10,025,000	11,289,076	0	11,289,076	112.61
099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	4,779,000	6,998,983	0	6,998,983	146.45
099511	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	4,087,000	4,243,281	0	4,243,281	103.82
099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	20,956,000	23,131,632	0	23,131,632	110.38
099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	16,610,000	29,232,016	0	29,232,016	175.99
099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	15,454,000	12,537,228	0	12,537,228	81.13
099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	10,122,000	18,162,929	0	18,162,929	179.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	13,239,000	25,262,588	0	25,262,588	190.82
099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	1,147,000	3,135,652	0	3,135,652	273.38
099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	16,585,000	23,539,354	0	23,539,354	141.93
099595	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	26,522,000	1,783,753	0	1,783,753	6.73
099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	21,534,000	46,504,804	0	46,504,804	215.96
099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	20,884,000	25,097,611	0	25,097,611	120.18
307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	5,052,000	11,506,736	0	11,506,736	227.77
307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	3,200,000	410	0	410	0.01
307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	0	259,876	259,876	0	0
307466	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	1,937,000	259,876	0	259,876	13.42
307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	1,291,000	1,678,913	0	1,678,913	130.05
307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	9,664,000	10,426,908	0	10,426,908	107.89
307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	1,187,000	61,999,999	0	61,999,999	5223.25
307520	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	6,495,000	14,639,550	0	14,639,550	225.4
307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	0	2,207,700	0	2,207,700	0
307555	PENGADILAN AGAMA SINJAI	631,000	0	0	0	0
307562	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	1,464,000	2,410,800	0	2,410,800	164.67
307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	2,623,000	3,233,000	0	3,233,000	123.26
307619	PENGADILAN AGAMA PALOPO	390,000	1,247,400	0	1,247,400	319.85
307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	4,886,000	4,885,980	0	4,885,980	100
401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	0	338,000	0	338,000	0
401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	0	1,013,800	0	1,013,800	0
526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	14,136,000	99,570,356	0	99,570,356	704.37
526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	11,909,000	22,372,157	0	22,372,157	187.86

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
663356	PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR	0	63,065,315	0	63,065,315	0
672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	0	1,653,750	0	1,653,750	0
673013	PENGADILAN NEGERI MALILI	3,281,000	3,280,800	0	3,280,800	99.99
	JUMLAH PENDAPATAN 005011900KD BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN	371,216,000	694,799,479	259,876	694,539,603	187.1
005012000KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA					
099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	11,658,000	11,506,251	0	11,506,251	98.7
099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	6,072,000	6,928,400	0	6,928,400	114.1
099670	PENGADILAN NEGERI RAHA	2,955,000	2,848,600	0	2,848,600	96.4
099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	4,489,000	27,288,760	0	27,288,760	607.9
307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	105,000	50,053,778	0	50,053,778	47670.26
307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	2,644,000	3,505,400	0	3,505,400	132.58
307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	94,000	56,481,345	0	56,481,345	60086.54
307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	0	5,536,875	0	5,536,875	0
400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	9,683,000	13,190,561	0	13,190,561	136.22
401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	0	160,000	160,000	0	0
401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	0	18,827,800	0	18,827,800	0
401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	0	3,785,148	0	3,785,148	0
477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	4,242,000	3,944,606	0	3,944,606	92.99
576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	92,990,000	83,118,900	0	83,118,900	89.38
578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	15,160,000	15,942,675	0	15,942,675	105.16
604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	0	104,550	0	104,550	0
681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	412,000	0	0	0	0
681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	1,500,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	83,000	185,050	0	185,050	222.95
	JUMLAH PENDAPATAN 005012000KD BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA	152,087,000	303,408,699	160,000	303,248,699	199.39
005012100KD	BA(005) ES1(01) MALUKU					
099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	16,354,000	16,889,851	0	16,889,851	103.28
099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	13,347,000	23,215,140	0	23,215,140	173.94
099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	11,329,000	12,710,126	0	12,710,126	112.19
099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	11,148,000	13,717,400	0	13,717,400	123.05
307754	PENGADILAN AGAMA AMBON	14,870,000	18,318,983	0	18,318,983	123.19
307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	1,006,000	859,467	0	859,467	85.43
307775	PENGADILAN AGAMA MASOHI	4,554,000	4,380,489	0	4,380,489	96.19
401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	0	3,404,000	0	3,404,000	0
401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	0	3,912,884	0	3,912,884	0
401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	0	69,487,642	0	69,487,642	0
402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	0	10,824,354	0	10,824,354	0
539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	4,895,000	20,725,894	0	20,725,894	423.41
672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	18,696,000	17,427,253	0	17,427,253	93.21
	JUMLAH PENDAPATAN 005012100KD BA(005) ES1(01) MALUKU	96,199,000	215,873,483	0	215,873,483	224.4
005012200KD	BA(005) ES1(01) BALI					
099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	33,881,000	57,989,125	0	57,989,125	171.16
099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	25,812,000	120,923,631	0	120,923,631	468.48
099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	17,475,000	26,329,708	0	26,329,708	150.67
099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	9,208,000	12,249,444	0	12,249,444	133.03
099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	11,007,000	20,571,800	0	20,571,800	186.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	19,527,000	20,018,847	0	20,018,847	102.52
099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	5,172,000	10,119,512	0	10,119,512	195.66
099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	9,472,000	4,676,500	0	4,676,500	49.37
099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	17,779,000	18,636,611	0	18,636,611	104.82
307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	3,647,000	0	0	0	0
307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	2,800,000	3,609,144	0	3,609,144	128.9
402726	PENGADILAN AGAMA BANGLI	0	103	0	103	0
402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	1,619,000	12,665,512	0	12,665,512	782.3
402741	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	0	5,358,000	0	5,358,000	0
402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	7,342,000	7,341,600	0	7,341,600	99.99
402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	6,208,000	6,000,000	0	6,000,000	96.65
402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100
526724	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	0	118,873	118,800	73	0
559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	14,800,000	93,759,000	0	93,759,000	633.51
663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	0	1,574,000	0	1,574,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012200KD BA(005) ES1(01) BALI	191,749,000	427,941,410	118,800	427,822,610	223.12
005012300KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	24,210,000	18,743,180	0	18,743,180	77.42
099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	33,903,000	78,676,900	0	78,676,900	232.06
099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	7,919,000	44,933,764	0	44,933,764	567.42
099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	94,631,000	104,954,504	0	104,954,504	110.91
099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	19,405,000	22,691,728	0	22,691,728	116.94
099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	8,279,000	22,072,241	0	22,072,241	266.61
307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	0	3,772,900	0	3,772,900	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	4,179,000	9,881,000	0	9,881,000	236.44
307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	0	2,424,900	0	2,424,900	0
307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	10,033,000	7,687,658	0	7,687,658	76.62
307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	2,435,000	3,245,508	0	3,245,508	133.29
307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	0	12,767,902	0	12,767,902	0
400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	52,517,000	202,255,500	0	202,255,500	385.12
402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	12,657,000	9,605,125	924,000	8,681,125	68.59
526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	0	139,438	0	139,438	0
578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	11,553,000	61,593,926	0	61,593,926	533.14
614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	1,979,000	1,986,600	0	1,986,600	100.38
682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	0	1,100,022	0	1,100,022	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012300KD BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	283,700,000	608,532,796	924,000	607,608,796	214.17
005012400KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR					
099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	15,522,000	15,941,581	0	15,941,581	102.7
099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	33,076,000	39,027,395	0	39,027,395	117.99
099947	PENGADILAN NEGERI SO'E	10,428,000	10,608,423	0	10,608,423	101.73
099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	9,668,000	13,224,032	0	13,224,032	136.78
099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	16,787,000	37,981,048	0	37,981,048	226.25
099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	47,564,000	30,644,681	0	30,644,681	64.43
099989	PENGADILAN NEGERI ENDE	2,628,000	20,132,000	0	20,132,000	766.06
099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	7,565,000	8,328,667	0	8,328,667	110.09
307949	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	434,000	433,920	0	433,920	99.98
307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG	1,073,000	546,480	0	546,480	50.93

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 33
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307960	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	0	525,000	0	525,000	0
307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	2,277,000	3,640,000	0	3,640,000	159.86
307981	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	419,000	2,449,524	0	2,449,524	584.61
400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	6,098,000	8,139,013	0	8,139,013	133.47
400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	14,289,000	22,948,049	0	22,948,049	160.6
400157	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	3,435,000	4,463,781	0	4,463,781	129.95
400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	1,991,000	3,114,375	0	3,114,375	156.42
400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	21,728,000	46,173,194	0	46,173,194	212.51
402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	2,193,000	2,148,012	0	2,148,012	97.95
402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	45,000	0	0	0	0
402820	PENGADILAN AGAMA SOE	2,625,000	2,275,000	0	2,275,000	86.67
402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	490,000	500,288	0	500,288	102.1
402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	2,055,000	1,713,286	0	1,713,286	83.37
477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	12,238,000	12,714,000	0	12,714,000	103.89
477249	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	14,927,000	15,523,200	0	15,523,200	103.99
539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	14,256,000	61,072,000	0	61,072,000	428.4
576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	4,447,000	5,362,495	0	5,362,495	120.59
632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	299,000	92,800	0	92,800	31.04
663342	PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG	0	1,517,304	0	1,517,304	0
673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	3,557,000	2,710,140	0	2,710,140	76.19
682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	0	118,800	0	118,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012400KD BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR	252,114,000	374,068,488	0	374,068,488	148.37
005012500KD	BA(005) ES1(01) PAPUA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	27,774,000	22,909,837	0	22,909,837	82.49
400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	15,626,000	7,775,181	0	7,775,181	49.76
400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	5,248,000	4,724,008	0	4,724,008	90.02
400050	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	15,044,000	19,090,000	0	19,090,000	126.89
400090	PENGADILAN NEGERI BIAK	3,175,000	8,061,806	0	8,061,806	253.92
400101	PENGADILAN NEGERI NABIRE	7,883,000	7,565,843	0	7,565,843	95.98
400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	2,790,000	3,086,320	0	3,086,320	110.62
402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	14,433,000	14,513,136	0	14,513,136	100.56
402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	1,404,000	0	0	0	0
402891	PENGADILAN AGAMA BIAK	6,550,000	6,674,446	0	6,674,446	101.9
402927	PENGADILAN AGAMA NABIRE	2,194,000	3,155,000	0	3,155,000	143.8
402933	PENGADILAN AGAMA WAMENA	2,695,000	1,609,146	0	1,609,146	59.71
402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	0	3,960,000	0	3,960,000	0
402958	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	314,000	418,572	0	418,572	133.3
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	23,885,000	31,183,781	0	31,183,781	130.56
614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	910,000	1,552,782	0	1,552,782	170.64
614773	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	0	1,989,009	0	1,989,009	0
614780	PENGADILAN AGAMA PANIAI	0	14,850	0	14,850	0
614890	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	0	8,081,561	0	8,081,561	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012500KD BA(005) ES1(01) PAPUA	129,925,000	146,365,278	0	146,365,278	112.65
005012600KD	BA(005) ES1(01) BENGKULU					
308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	2,121,000	2,120,472	0	2,120,472	99.98
308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	4,678,000	4,677,276	0	4,677,276	99.98
308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	2,722,000	8,244,801	0	8,244,801	302.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	1,618,000	4,524,517	0	4,524,517	279.64
400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	16,288,000	26,604,217	0	26,604,217	163.34
400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	22,703,000	24,368,399	0	24,368,399	107.34
400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	36,087,000	24,566,053	0	24,566,053	68.07
400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	18,447,000	126,183,312	0	126,183,312	684.03
400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	29,425,000	40,356,065	0	40,356,065	137.15
401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	1,569,000	7,019,948	0	7,019,948	447.42
401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	0	125,074	0	125,074	0
401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	0	242,515,102	0	242,515,102	0
576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	16,717,000	28,568,729	0	28,568,729	170.9
578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	3,664,000	8,883,418	0	8,883,418	242.45
672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	1,576,000	19,165,200	505,200	18,660,000	1184.01
673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	0	300,000	0	300,000	0
673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	1,028,000	1,542,525	0	1,542,525	150.05
673055	PENGADILAN NEGERI TUBEI	718,000	3,391,928	0	3,391,928	472.41
	JUMLAH PENDAPATAN 005012600KD BA(005) ES1(01) BENGKULU	159,361,000	573,157,036	505,200	572,651,836	359.34
005012800KD	BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA					
099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	18,348,000	24,400,417	0	24,400,417	132.99
099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	4,867,000	3,985,532	0	3,985,532	81.89
099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	4,979,000	20,345,057	0	20,345,057	408.62
099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	0	8,816,261	0	8,816,261	0
307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	2,503,000	1,569,750	0	1,569,750	62.71
307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	1,560,000	4,286,626	0	4,286,626	274.78
307801	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	654,000	615,850	0	615,850	94.17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	868,000	1,043,629	0	1,043,629	120.23
401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	0	951,575	0	951,575	0
401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	0	1,251,344	0	1,251,344	0
440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	15,961,000	22,712,156	0	22,712,156	142.3
664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	0	42,823,535	0	42,823,535	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012800KD BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA	49,740,000	132,801,732	0	132,801,732	266.99
005012900KD	BA(005) ES1(01) BANTEN					
097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	7,699,000	35,951,618	0	35,951,618	466.96
097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	16,804,000	47,745,964	0	47,745,964	284.13
097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	213,522,000	93,937,500	0	93,937,500	43.99
400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	2,887,000	2,849,700	0	2,849,700	98.71
400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	0	1,753,750	0	1,753,750	0
400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	0	32,000,000	0	32,000,000	0
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	3,437,000	40,004,629	0	40,004,629	1163.94
417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	7,250,000	1,626,400	0	1,626,400	22.43
440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	2,451,000	25,368,956	0	25,368,956	1035.05
604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	22,628,000	31,251,516	0	31,251,516	138.11
652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	0	2,960,000	0	2,960,000	0
663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	41,478,000	35,235,877	0	35,235,877	84.95
689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	1,956,000	2,361,900	0	2,361,900	120.75
	JUMLAH PENDAPATAN 005012900KD BA(005) ES1(01) BANTEN	320,112,000	353,047,810	0	353,047,810	110.29
005013000KD	BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG					
099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	18,023,000	46,848,498	0	46,848,498	259.94

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	16,350,000	23,050,000	0	23,050,000	140.98
400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	18,642,000	510,733,926	0	510,733,926	2739.69
401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	0	133,691	133,691	0	0
402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	5,450,000	10,839,020	0	10,839,020	198.88
402318	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	617,000	616,968	0	616,968	99.99
403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	2,742,000	6,037,020	0	6,037,020	220.17
440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	33,139,000	32,877,746	0	32,877,746	99.21
663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	36,527,000	61,194,296	0	61,194,296	167.53
	JUMLAH PENDAPATAN 005013000KD BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG	131,490,000	692,331,165	133,691	692,197,474	526.43
005013100KD	BA(005) ES1(01) GORONTALO					
099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	16,285,000	28,098,370	0	28,098,370	172.54
307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	6,732,000	11,679,269	0	11,679,269	173.49
400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	22,710,000	13,735,792	0	13,735,792	60.48
401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	0	10,728	0	10,728	0
401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	0	119,679	0	119,679	0
401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	0	912,978	0	912,978	0
402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	1,854,000	7,528,154	0	7,528,154	406.05
440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	12,867,000	53,058,059	0	53,058,059	412.36
477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	15,754,000	15,354,399	0	15,354,399	97.46
652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	6,015,000	6,982,624	0	6,982,624	116.09
664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	23,017,000	22,737,070	0	22,737,070	98.78
670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	9,956,000	13,082,045	0	13,082,045	131.4
682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	0	3,850,000	0	3,850,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005013100KD BA(005) ES1(01) GORONTALO	115,190,000	177,149,167	0	177,149,167	153.79
005013200KD	PENGADILAN AGAMA BATAM					
098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	30,350,000	15,795,545	0	15,795,545	52.04
108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	42,469,000	14,455,471	0	14,455,471	34.04
402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	6,826,000	11,814,000	0	11,814,000	173.07
402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	0	38,242	0	38,242	0
402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	371,000	0	0	0	0
526706	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	0	11,166,070	0	11,166,070	0
526708	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	0	2,200,000	0	2,200,000	0
547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	7,838,000	3,032,600	0	3,032,600	38.69
614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	3,451,000	3,436,441	0	3,436,441	99.58
663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	16,209,000	11,802,278	0	11,802,278	72.81
689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	300,000	3,089,000	0	3,089,000	1029.67
	JUMLAH PENDAPATAN 005013200KD PENGADILAN AGAMA BATAM	107,814,000	76,829,647	0	76,829,647	71.26
005013300KD	BA(005) ES1(01) PAPUA BARAT					
400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	14,379,000	12,644,812	0	12,644,812	87.94
400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	9,361,000	18,125,282	0	18,125,282	193.63
400081	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	5,770,000	21,453,000	0	21,453,000	371.8
401899	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	0	8,769,548	0	8,769,548	0
401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	0	739,953,629	0	739,953,629	0
402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	690,000	1,378,236	0	1,378,236	199.74
402902	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	2,778,000	2,418,096	0	2,418,096	87.04
402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	1,980,000	4,882,039	0	4,882,039	246.57
	JUMLAH PENDAPATAN 005013300KD BA(005) ES1(01) PAPUA BARAT	34,958,000	809,624,642	0	809,624,642	2,315.99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005013400KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI BARAT					
099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	13,956,000	24,115,672	0	24,115,672	172.8
099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	4,261,000	6,186,213	0	6,186,213	145.18
099642	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	0	8,130,217	0	8,130,217	0
307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	1,094,000	1,335,000	0	1,335,000	122.03
307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	1,392,000	3,452,000	0	3,452,000	247.99
307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	0	4,782,495	0	4,782,495	0
526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	0	312,445,968	0	312,445,968	0
526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	0	32,160,085	0	32,160,085	0
681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	0	3,143,360	0	3,143,360	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005013400KD BA(005) ES1(01) SULAWESI BARAT	20,703,000	395,751,010	0	395,751,010	1,911.56
005013500KD	UAPPAW 005013500 KALIMANTAN UTARA					
099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	16,985,000	17,579,973	0	17,579,973	103.5
402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	4,320,000	5,320,092	0	5,320,092	123.15
417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	1,352,000	1,738,370	0	1,738,370	128.58
417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	4,487,000	4,014,048	0	4,014,048	89.46
417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	2,434,000	62,853,485	0	62,853,485	2582.31
477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	0	3,377,626	0	3,377,626	0
526722	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	0	5,448,721	739,200	4,709,521	0
682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	0	39	0	39	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005013500KD UAPPAW 005013500 KALIMANTAN UTARA	29,578,000	100,332,354	739,200	99,593,154	336.71
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8,561,143,000	29,545,605,392	11,085,790	29,534,519,602	344.98
02	**KEPANITERAAN**					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005020100KP	SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG					
004028	KEPANITERAAN	155,576,000	380,569,870	0	380,569,870	244.62
	JUMLAH PENDAPATAN 005020100KP SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG	155,576,000	380,569,870	0	380,569,870	244.62
	JUMLAH PENDAPATAN 02 KEPANITERAAN	155,576,000	380,569,870	0	380,569,870	244.62
03	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**					
005030100KD	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA					
099062	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	21,170,000	23,900,000	0	23,900,000	112.9
099063	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	400,000,000	1,575,793,400	0	1,575,793,400	393.95
099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	409,782,000	421,389,365	0	421,389,365	102.83
099065	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	328,634,000	500,709,100	0	500,709,100	152.36
400215	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	528,602,000	684,297,500	0	684,297,500	129.45
400221	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	272,029,000	301,599,500	0	301,599,500	110.87
	JUMLAH PENDAPATAN 005030100KD BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	1,960,217,000	3,507,688,865	0	3,507,688,865	178.94
005030100KP	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA					
097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	167,869,000	148,592,500	0	148,592,500	88.52
	JUMLAH PENDAPATAN 005030100KP BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	167,869,000	148,592,500	0	148,592,500	88.52
005030200KD	BA(005) ES1(03) JAWA BARAT					
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	28,650,000	22,080,000	0	22,080,000	77.07
099068	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	561,670,000	478,959,187	0	478,959,187	85.27
099069	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	98,293,000	36,131,000	0	36,131,000	36.76
099071	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	58,679,000	66,594,000	0	66,594,000	113.49
099072	PENGADILAN NEGERI GARUT	9,159,000	43,020,500	0	43,020,500	469.71
099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	22,475,000	33,483,000	0	33,483,000	148.98

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099078	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	38,330,000	51,230,000	0	51,230,000	133.66
099079	PENGADILAN NEGERI BEKASI	349,864,000	225,682,900	0	225,682,900	64.51
099080	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	91,839,000	103,289,500	0	103,289,500	112.47
099081	PENGADILAN NEGERI SUBANG	31,682,000	32,685,000	0	32,685,000	103.17
099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	73,731,000	118,547,500	0	118,547,500	160.78
099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	19,193,000	16,903,000	0	16,903,000	88.07
099084	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	39,572,000	34,650,000	0	34,650,000	87.56
099085	PENGADILAN NEGERI CIREBON	31,121,000	38,068,500	0	38,068,500	122.32
099086	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	20,953,000	29,636,500	0	29,636,500	141.44
099088	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	14,288,000	20,677,500	0	20,677,500	144.72
099089	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	18,401,000	14,526,500	0	14,526,500	78.94
400410	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	23,998,000	24,474,000	0	24,474,000	101.98
400478	PENGADILAN NEGERI SUMBER	3,821,000	50,994,500	0	50,994,500	1334.59
400484	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	168,518,000	205,786,502	0	205,786,502	122.12
402022	PENGADILAN NEGERI BANJAR	7,980,000	11,533,500	0	11,533,500	144.53
402023	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	102,614,000	137,651,000	0	137,651,000	134.14
477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	187,196,000	237,867,500	0	237,867,500	127.07
613520	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	165,761,000	243,605,500	0	243,605,500	146.96
	JUMLAH PENDAPATAN 005030200KD BA(005) ES1(03) JAWA BARAT	2,167,788,000	2,278,077,089	0	2,278,077,089	105.09
005030300KD	BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH					
099090	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	14,180,000	12,270,000	0	12,270,000	86.53
099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	285,579,000	357,789,300	0	357,789,300	125.29
099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	18,107,000	36,011,044	0	36,011,044	198.88
099094	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	29,797,000	48,483,000	0	48,483,000	162.71

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	29,610,000	44,455,000	0	44,455,000	150.14
099096	PENGADILAN NEGERI PATI	48,310,000	77,902,500	0	77,902,500	161.26
099097	PENGADILAN NEGERI BREBES	37,409,000	26,401,000	0	26,401,000	70.57
099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	42,242,000	46,639,853	0	46,639,853	110.41
099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	0	41,597,000	0	41,597,000	0
099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	41,671,000	34,039,000	0	34,039,000	81.69
099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	32,376,000	39,288,500	0	39,288,500	121.35
099102	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	29,296,000	35,827,500	0	35,827,500	122.29
099103	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	46,769,000	67,507,900	0	67,507,900	144.34
099104	PENGADILAN NEGERI JEPARA	39,592,000	52,330,500	0	52,330,500	132.17
099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	33,098,000	34,535,000	0	34,535,000	104.34
099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	16,443,000	20,913,500	0	20,913,500	127.19
099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	32,782,000	37,989,500	0	37,989,500	115.89
099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	40,310,000	37,534,500	0	37,534,500	93.11
099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	12,800,000	20,614,500	0	20,614,500	161.05
099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	18,689,000	20,582,500	0	20,582,500	110.13
099112	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	19,393,000	25,815,500	0	25,815,500	133.12
099114	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	34,584,000	51,596,000	0	51,596,000	149.19
099115	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	87,990,000	91,627,000	0	91,627,000	104.13
099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	53,340,000	50,053,500	0	50,053,500	93.84
099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	21,551,000	46,359,500	0	46,359,500	215.12
099118	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	59,351,000	64,675,500	0	64,675,500	108.97
099119	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	39,798,000	45,487,000	0	45,487,000	114.29
099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	24,664,000	41,703,500	0	41,703,500	169.09

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099122	PENGADILAN NEGERI KLATEN	70,586,000	79,418,000	0	79,418,000	112.51
099123	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	43,853,000	51,185,500	0	51,185,500	116.72
099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	46,329,000	42,388,500	0	42,388,500	91.49
099125	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	17,889,000	22,068,500	0	22,068,500	123.36
099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	21,433,000	21,652,500	0	21,652,500	101.02
099127	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	15,012,000	19,518,000	0	19,518,000	130.02
400566	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	23,366,000	30,698,500	0	30,698,500	131.38
400572	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	30,883,000	38,740,000	0	38,740,000	125.44
	JUMLAH PENDAPATAN 005030300KD BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH	1,459,082,000	1,815,698,597	0	1,815,698,597	124.44
005030400KD	BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA					
099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	95,267,000	119,782,500	0	119,782,500	125.73
099129	PENGADILAN NEGERI WATES	33,914,000	53,173,500	0	53,173,500	156.79
099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	29,673,000	47,454,100	0	47,454,100	159.92
099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	214,511,000	183,402,700	0	183,402,700	85.5
400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	52,033,000	73,406,000	0	73,406,000	141.08
400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	3,630,000	3,160,000	0	3,160,000	87.05
	JUMLAH PENDAPATAN 005030400KD BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA	429,028,000	480,378,800	0	480,378,800	111.97
005030500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya					
099132	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	21,370,000	21,110,000	0	21,110,000	98.78
099133	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	1,927,375,000	1,125,670,820	0	1,125,670,820	58.4
099135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	27,695,000	35,252,000	0	35,252,000	127.29
099136	PENGADILAN NEGERI TUBAN	34,488,000	44,412,000	0	44,412,000	128.78
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	34,268,000	34,896,000	0	34,896,000	101.83

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099138	PENGADILAN NEGERI GRESIK	77,385,000	96,200,500	0	96,200,500	124.31
099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	182,576,000	185,868,000	0	185,868,000	101.8
099140	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	69,208,000	62,004,900	0	62,004,900	89.59
099142	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	30,778,000	41,729,000	0	41,729,000	135.58
099143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	22,290,000	19,918,500	0	19,918,500	89.36
099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	72,650,000	89,600,500	0	89,600,500	123.33
099145	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	99,558,000	89,295,000	0	89,295,000	89.69
099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	36,820,000	37,972,000	0	37,972,000	103.13
099147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	29,333,000	30,557,500	0	30,557,500	104.17
099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	50,690,000	32,034,000	0	32,034,000	63.2
099149	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	45,206,000	64,457,500	0	64,457,500	142.59
099150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	13,199,000	17,640,000	0	17,640,000	133.65
099151	PENGADILAN NEGERI BLITAR	59,709,000	49,775,500	0	49,775,500	83.36
099152	PENGADILAN NEGERI MALANG	179,124,000	337,617,257	0	337,617,257	188.48
099153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	19,638,000	20,581,000	0	20,581,000	104.8
099154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	16,868,000	16,582,000	0	16,582,000	98.3
099156	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	31,263,000	28,986,000	0	28,986,000	92.72
099157	PENGADILAN NEGERI BANGIL	71,380,000	74,447,100	0	74,447,100	104.3
099158	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	13,215,000	27,499,400	0	27,499,400	208.09
099159	PENGADILAN NEGERI MADIUN	27,799,000	31,728,000	0	31,728,000	114.13
099160	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	31,666,000	26,868,500	0	26,868,500	84.85
099161	PENGADILAN NEGERI PACITAN	8,011,000	14,015,500	0	14,015,500	174.95
099163	PENGADILAN NEGERI NGAWI	15,474,000	17,223,500	0	17,223,500	111.31
099164	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	26,696,000	28,196,000	0	28,196,000	105.62

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	10,174,000	14,061,500	0	14,061,500	138.21
099166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	8,359,000	21,306,000	0	21,306,000	254.89
099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	27,044,000	36,705,000	0	36,705,000	135.72
099168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	7,750,000	15,257,500	0	15,257,500	196.87
400581	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	75,096,000	69,883,000	0	69,883,000	93.06
400597	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	47,064,000	25,874,500	0	25,874,500	54.98
626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	93,571,000	122,727,500	0	122,727,500	131.16
	JUMLAH PENDAPATAN 005030500KD Pengadilan Tinggi Surabaya	3,544,790,000	3,007,952,977	0	3,007,952,977	84.86
005030600KD	BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
099169	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	1,900,000	2,770,000	0	2,770,000	145.79
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	36,961,000	49,389,500	0	49,389,500	133.63
099171	PENGADILAN NEGERI SABANG	4,149,000	2,896,500	0	2,896,500	69.81
099172	PENGADILAN NEGERI SIGLI	24,545,000	23,869,500	0	23,869,500	97.25
099173	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	13,415,000	17,914,500	0	17,914,500	133.54
099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	29,983,000	37,218,500	0	37,218,500	124.13
099175	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	13,011,000	15,821,500	0	15,821,500	121.6
099177	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	7,770,000	11,616,500	0	11,616,500	149.5
099178	PENGADILAN NEGERI LANGSA	11,166,000	16,516,000	0	16,516,000	147.91
099179	PENGADILAN NEGERI IDI	6,112,000	5,798,000	0	5,798,000	94.86
099181	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	10,312,000	10,557,500	0	10,557,500	102.38
099182	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	2,209,000	2,006,000	0	2,006,000	90.81
099183	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	6,078,000	10,807,500	0	10,807,500	177.81
099184	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	8,685,000	5,444,500	0	5,444,500	62.69
099185	PENGADILAN NEGERI CALANG	2,941,000	3,715,000	0	3,715,000	126.32

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG	6,085,000	3,134,000	0	3,134,000	51.5
099187	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	9,480,000	3,780,500	0	3,780,500	39.88
099188	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	5,179,000	6,227,000	0	6,227,000	120.24
400416	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	24,987,000	16,682,500	0	16,682,500	66.76
402008	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	5,269,000	5,775,500	0	5,775,500	109.61
402009	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	7,490,000	10,151,500	0	10,151,500	135.53
402012	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	11,706,000	9,050,500	0	9,050,500	77.32
689969	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	5,733,000	4,193,000	0	4,193,000	73.14
	JUMLAH PENDAPATAN 005030600KD BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	255,166,000	275,335,500	0	275,335,500	107.9
005030700KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA					
099189	PENGADILAN TINGGI MEDAN	14,730,000	10,780,000	0	10,780,000	73.18
099190	PENGADILAN NEGERI MEDAN	505,261,000	515,641,500	0	515,641,500	102.05
099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	21,590,000	23,328,500	0	23,328,500	108.05
099192	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	24,547,000	18,587,000	0	18,587,000	75.72
099193	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	19,480,000	17,799,000	0	17,799,000	91.37
099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	22,320,000	16,996,500	0	16,996,500	76.15
099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	50,335,000	53,901,000	0	53,901,000	107.08
099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	14,864,000	20,275,000	0	20,275,000	136.4
099198	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	55,760,000	34,655,500	0	34,655,500	62.15
099199	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	41,824,000	57,774,751	0	57,774,751	138.14
099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	48,531,000	38,149,500	0	38,149,500	78.61
099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	27,958,000	22,144,000	0	22,144,000	79.2
099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	38,426,000	48,673,500	0	48,673,500	126.67

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
109063	PENGADILAN NEGERI STABAT	42,970,000	40,752,000	0	40,752,000	94.84
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	76,952,000	65,956,618	0	65,956,618	85.71
400390	PENGADILAN NEGERI KISARAN	49,948,000	48,379,500	0	48,379,500	96.86
400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	162,279,000	183,900,500	0	183,900,500	113.32
402013	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	29,016,000	35,240,000	0	35,240,000	121.45
402014	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	8,245,000	11,669,500	0	11,669,500	141.53
477401	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	16,366,000	16,488,000	0	16,488,000	100.75
672911	PENGADILAN NEGERI BALIGE	50,023,000	53,806,500	0	53,806,500	107.56
	JUMLAH PENDAPATAN 005030700KD BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA	1,321,425,000	1,334,898,369	0	1,334,898,369	101.02
005030800KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT					
099204	PENGADILAN TINGGI PADANG	4,480,000	4,220,000	0	4,220,000	94.2
099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	113,710,000	112,564,500	0	112,564,500	98.99
099206	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	1,714,000	3,250,000	0	3,250,000	189.61
099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	16,831,000	20,234,241	0	20,234,241	120.22
099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	12,386,000	18,252,000	0	18,252,000	147.36
099209	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	49,430,000	52,694,000	0	52,694,000	106.6
099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	22,226,000	19,587,500	0	19,587,500	88.13
099211	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	33,030,000	32,274,500	0	32,274,500	97.71
099212	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	10,286,000	9,571,500	0	9,571,500	93.05
099213	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	27,930,000	20,951,000	0	20,951,000	75.01
400189	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	6,737,000	5,914,500	0	5,914,500	87.79
400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	19,796,000	17,547,500	0	17,547,500	88.64
400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	17,557,000	17,866,500	0	17,866,500	101.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	22,531,000	19,766,500	0	19,766,500	87.73
400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	6,047,000	10,157,500	0	10,157,500	167.98
402015	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	3,685,000	13,429,500	0	13,429,500	364.44
477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	29,287,000	22,570,500	0	22,570,500	77.07
	JUMLAH PENDAPATAN 005030800KD BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT	397,663,000	400,851,741	0	400,851,741	100.8
005030900KD	BA(005) ES1(03) RIAU					
099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	604,000,000	219,707,000	0	219,707,000	36.38
099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	18,622,000	73,222,916	0	73,222,916	393.21
099216	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	17,531,000	18,499,000	0	18,499,000	105.52
099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	10,455,000	16,763,680	0	16,763,680	160.34
400142	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	40,714,000	92,707,700	0	92,707,700	227.7
400328	PENGADILAN NEGERI DUMAI	20,261,000	25,621,000	0	25,621,000	126.45
400493	PENGADILAN TINGGI RIAU	5,460,000	4,670,000	0	4,670,000	85.53
402016	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	11,486,000	21,457,000	0	21,457,000	186.81
477256	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	34,617,000	24,225,500	0	24,225,500	69.98
477262	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	28,673,000	56,280,500	0	56,280,500	196.28
477344	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	25,466,000	24,168,000	0	24,168,000	94.9
662991	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	22,408,000	29,617,000	0	29,617,000	132.17
	JUMLAH PENDAPATAN 005030900KD BA(005) ES1(03) RIAU	839,693,000	606,939,296	0	606,939,296	72.28
005031000KD	BA(005) ES1(03) JAMBI					
099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	70,160,000	80,435,620	0	80,435,620	114.65
099221	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	19,587,000	12,752,000	0	12,752,000	65.1
099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	17,873,000	12,040,000	0	12,040,000	67.36

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099224	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	35,390,000	26,665,000	0	26,665,000	75.35
400312	PENGADILAN NEGERI BANGKO	28,688,000	16,070,000	0	16,070,000	56.02
400431	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	12,956,000	15,404,000	0	15,404,000	118.89
400504	PENGADILAN TINGGI JAMBI	2,020,000	2,580,000	0	2,580,000	127.72
477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	12,470,000	11,733,000	0	11,733,000	94.09
477375	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	11,545,000	10,119,000	0	10,119,000	87.65
477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	8,654,000	8,850,500	0	8,850,500	102.27
663013	PENGADILAN NEGERI SENGETI	20,693,000	21,362,500	0	21,362,500	103.24
	JUMLAH PENDAPATAN 005031000KD BA(005) ES1(03) JAMBI	240,036,000	218,011,620	0	218,011,620	90.82
005031100KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN					
099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	4,410,000	3,170,000	0	3,170,000	71.88
099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	154,240,000	163,124,500	0	163,124,500	105.76
099227	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	0	100,103,636	0	100,103,636	0
099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	39,144,000	36,262,000	0	36,262,000	92.64
099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	42,970,000	26,592,500	0	26,592,500	61.89
099231	PENGADILAN NEGERI LAHAT	68,942,000	43,168,500	0	43,168,500	62.62
099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	39,778,000	11,048,500	0	11,048,500	27.78
099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	33,663,000	14,957,550	0	14,957,550	44.43
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	24,057,000	36,471,000	0	36,471,000	151.6
672953	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	8,724,000	5,897,500	0	5,897,500	67.6
672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	5,494,000	9,599,000	0	9,599,000	174.72
	JUMLAH PENDAPATAN 005031100KD BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN	421,422,000	450,394,686	0	450,394,686	106.87
005031200KD	BA(005) ES1(03) LAMPUNG					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	70,201,000	106,511,000	0	106,511,000	151.72
099237	PENGADILAN NEGERI METRO	15,484,000	73,115,300	0	73,115,300	472.2
099238	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	11,759,000	11,350,500	0	11,350,500	96.53
400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	0	3,310,000	0	3,310,000	0
400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	30,930,000	31,023,000	0	31,023,000	100.3
402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	8,664,000	5,729,000	0	5,729,000	66.12
477307	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	13,327,000	20,688,500	0	20,688,500	155.24
614884	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10,166,000	10,254,000	0	10,254,000	100.87
663027	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	31,115,000	26,000,499	0	26,000,499	83.56
663031	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	14,728,000	18,711,500	0	18,711,500	127.05
663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	14,097,000	15,892,000	0	15,892,000	112.73
663052	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	9,172,000	12,578,000	0	12,578,000	137.13
	JUMLAH PENDAPATAN 005031200KD BA(005) ES1(03) LAMPUNG	229,643,000	335,163,299	0	335,163,299	145.95
005031300KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT					
099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	120,438,000	131,837,000	0	131,837,000	109.46
099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	32,791,000	48,239,000	0	48,239,000	147.11
099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	0	26,294,000	0	26,294,000	0
099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	26,441,000	25,714,000	0	25,714,000	97.25
099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	60,554,000	92,463,500	0	92,463,500	152.7
099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	16,973,000	23,418,000	0	23,418,000	137.97
400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	9,117,000	4,831,508	0	4,831,508	52.99
400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1,630,000	1,480,000	0	1,480,000	90.8
670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	28,042,000	26,707,500	0	26,707,500	95.24
670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	7,194,000	7,110,000	0	7,110,000	98.83

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	18,049,000	12,552,500	0	12,552,500	69.55
	JUMLAH PENDAPATAN 005031300KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT	321,229,000	400,647,008	0	400,647,008	124.72
005031400KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH					
099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	84,414,000	101,598,000	0	101,598,000	120.36
099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	25,226,000	35,553,500	0	35,553,500	140.94
099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	17,477,000	10,923,270	0	10,923,270	62.5
099249	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	21,261,000	20,367,900	0	20,367,900	95.8
099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	0	7,848,000	0	7,848,000	0
099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	48,173,000	48,982,000	0	48,982,000	101.68
400359	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1,400,000	1,510,000	0	1,510,000	107.86
402024	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	10,966,000	9,233,500	0	9,233,500	84.2
402025	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	9,540,000	12,944,000	0	12,944,000	135.68
402026	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	4,245,000	3,793,000	0	3,793,000	89.35
670192	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	12,221,000	10,315,000	0	10,315,000	84.4
679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	7,383,000	9,007,000	0	9,007,000	122
	JUMLAH PENDAPATAN 005031400KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	242,306,000	272,075,170	0	272,075,170	112.29
005031500KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN					
099253	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	1,830,000	1,680,000	0	1,680,000	91.8
099254	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	73,550,000	84,416,500	0	84,416,500	114.77
099255	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	0	8,901,500	0	8,901,500	0
099256	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	14,838,000	10,216,500	0	10,216,500	68.85
099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	6,832,000	6,376,000	0	6,376,000	93.33
099258	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	43,477,000	37,901,000	0	37,901,000	87.17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099259	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	14,184,000	12,179,500	0	12,179,500	85.87
099260	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	12,220,000	8,364,500	0	8,364,500	68.45
099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	14,658,000	19,587,000	0	19,587,000	133.63
400261	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	9,245,000	16,619,500	0	16,619,500	179.77
400283	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	0	38,520,500	0	38,520,500	0
402027	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	4,989,000	6,624,000	0	6,624,000	132.77
653459	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	30,381,000	45,009,000	0	45,009,000	148.15
690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	16,108,000	15,711,500	0	15,711,500	97.54
	JUMLAH PENDAPATAN 005031500KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN	242,312,000	312,107,000	0	312,107,000	128.8
005031600KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR					
099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	163,281,000	125,338,000	0	125,338,000	76.76
099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	51,389,000	59,463,500	0	59,463,500	115.71
099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	111,822,000	174,430,000	0	174,430,000	155.99
400292	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	25,880,000	25,467,000	0	25,467,000	98.4
400303	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	11,597,000	17,807,000	0	17,807,000	153.55
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	4,340,000	4,500,000	0	4,500,000	103.69
402028	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	13,651,000	38,565,000	0	38,565,000	282.51
477381	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	18,404,000	19,587,500	0	19,587,500	106.43
662973	PENGADILAN NEGERI BONTANG	12,144,000	19,171,000	0	19,171,000	157.86
662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	26,902,000	36,576,500	0	36,576,500	135.96
	JUMLAH PENDAPATAN 005031600KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR	439,410,000	520,905,500	0	520,905,500	118.55
005031700KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA					
099313	PENGADILAN TINGGI MANADO	2,800,000	2,880,000	0	2,880,000	102.86

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099330	PENGADILAN NEGERI MANADO	190,225,000	239,834,500	0	239,834,500	126.08
099334	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	75,985,000	41,515,500	0	41,515,500	54.64
099341	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	40,406,000	38,134,000	0	38,134,000	94.38
099355	PENGADILAN NEGERI TONDANO	82,160,000	116,706,000	0	116,706,000	142.05
402031	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	13,447,000	19,228,000	0	19,228,000	142.99
568726	PENGADILAN NEGERI BITUNG	43,623,000	39,628,500	0	39,628,500	90.84
670211	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	66,194,000	75,347,500	0	75,347,500	113.83
673035	PENGADILAN NEGERI AMURANG	37,396,000	33,335,000	0	33,335,000	89.14
	JUMLAH PENDAPATAN 005031700KD BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA	552,236,000	606,609,000	0	606,609,000	109.85
005031800KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI					
099376	PENGADILAN NEGERI PALU	52,152,000	36,892,000	0	36,892,000	70.74
099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	9,705,000	12,634,500	0	12,634,500	130.19
099397	PENGADILAN NEGERI LUWUK	37,803,000	32,141,500	0	32,141,500	85.02
099402	PENGADILAN NEGERI POSO	35,758,000	42,789,000	0	42,789,000	119.66
400535	PENGADILAN TINGGI PALU	1,200,000	1,030,000	0	1,030,000	85.83
477203	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	24,929,000	12,483,500	0	12,483,500	50.08
670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	4,897,000	8,871,500	0	8,871,500	181.16
672981	PENGADILAN NEGERI PARIGI	22,657,000	18,590,500	0	18,590,500	82.05
	JUMLAH PENDAPATAN 005031800KD BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI SULTENG]	189,101,000	165,432,500	0	165,432,500	87.48
005031900KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN					
099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	11,830,000	7,030,000	0	7,030,000	59.43
099423	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	253,200,000	401,396,000	0	401,396,000	158.53
099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	45,215,000	38,377,000	0	38,377,000	84.88

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	0	11,299,000	0	11,299,000	0
099451	PENGADILAN NEGERI BARRU	13,532,000	20,219,000	0	20,219,000	149.42
099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	25,501,000	22,092,000	0	22,092,000	86.63
099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	25,370,000	20,458,500	0	20,458,500	80.64
099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	14,242,000	14,738,000	0	14,738,000	103.48
099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	19,503,000	23,322,000	0	23,322,000	119.58
099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	17,143,000	11,432,500	0	11,432,500	66.69
099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	24,444,000	26,132,000	0	26,132,000	106.91
099529	PENGADILAN NEGERI PINRANG	16,626,000	18,077,000	0	18,077,000	108.73
099533	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	55,632,000	47,354,000	0	47,354,000	85.12
099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	8,980,000	10,617,000	0	10,617,000	118.23
099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	28,090,000	27,535,000	0	27,535,000	98.02
099561	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	8,369,000	12,323,000	0	12,323,000	147.25
099575	PENGADILAN NEGERI SINJAI	16,679,000	11,498,000	0	11,498,000	68.94
099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	27,010,000	23,057,000	0	23,057,000	85.36
099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	9,051,000	6,242,500	0	6,242,500	68.97
099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	17,688,000	25,912,500	0	25,912,500	146.5
099618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	43,439,000	59,640,000	0	59,640,000	137.3
402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	17,668,000	13,287,500	0	13,287,500	75.21
672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	22,484,000	15,393,500	0	15,393,500	68.46
673014	PENGADILAN NEGERI MALILI	14,640,000	21,975,900	0	21,975,900	150.11
	JUMLAH PENDAPATAN 005031900KD BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN	736,336,000	889,408,900	0	889,408,900	120.79
005032000KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	56,524,000	62,820,000	0	62,820,000	111.14
099664	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	22,453,000	23,491,500	0	23,491,500	104.63
099671	PENGADILAN NEGERI RAHA	22,431,000	14,748,500	0	14,748,500	65.75
099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	19,612,000	6,058,000	0	6,058,000	30.89
400541	PENGADILAN TINGGI KENDARI	2,730,000	1,690,000	0	1,690,000	61.9
402032	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	2,839,000	1,669,500	0	1,669,500	58.81
402033	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	7,180,000	5,896,500	0	5,896,500	82.12
477225	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	26,716,000	19,734,500	0	19,734,500	73.87
681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	14,927,000	10,067,500	0	10,067,500	67.44
681444	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	19,474,000	13,668,500	0	13,668,500	70.19
	JUMLAH PENDAPATAN 005032000KD BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA	194,886,000	159,844,500	0	159,844,500	82.02
005032100KD	BA(005) ES1(03) MALUKU					
099692	PENGADILAN TINGGI AMBON	9,117,000	1,610,000	0	1,610,000	17.66
099707	PENGADILAN NEGERI AMBON	129,013,000	93,335,000	0	93,335,000	72.35
099711	PENGADILAN NEGERI MASOHI	9,077,000	12,313,500	0	12,313,500	135.66
099728	PENGADILAN NEGERI TUAL	5,767,000	9,862,500	0	9,862,500	171.02
402037	PENGADILAN NEGERI DOBO	4,163,000	6,066,000	0	6,066,000	145.71
402038	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	8,139,000	20,445,500	0	20,445,500	251.2
403431	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	0	15,404,000	0	15,404,000	0
403433	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	6,111,000	1,512,500	0	1,512,500	24.75
672932	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	11,890,000	8,722,000	0	8,722,000	73.36
	JUMLAH PENDAPATAN 005032100KD BA(005) ES1(03) MALUKU	183,277,000	169,271,000	0	169,271,000	92.36
005032200KD	BA(005) ES1(03) BALI					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 56
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099774	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	7,080,000	7,450,000	0	7,450,000	105.23
099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	409,353,000	492,778,000	0	492,778,000	120.38
099795	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	103,174,000	155,762,000	0	155,762,000	150.97
099803	PENGADILAN NEGERI NEGARA	32,146,000	47,176,500	0	47,176,500	146.76
099817	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	36,150,000	29,738,000	0	29,738,000	82.26
099821	PENGADILAN NEGERI TABANAN	72,831,000	86,126,000	0	86,126,000	118.25
099838	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	44,684,000	54,931,500	0	54,931,500	122.93
099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	76,079,000	75,873,000	0	75,873,000	99.73
099859	PENGADILAN NEGERI BANGLI	22,216,000	23,786,000	0	23,786,000	107.07
	JUMLAH PENDAPATAN 005032200KD BA(005) ES1(03) BALI	803,713,000	973,621,000	0	973,621,000	121.14
005032300KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT					
099863	PENGADILAN NEGERI MATARAM	161,625,000	138,527,500	0	138,527,500	85.71
099880	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	24,752,000	27,830,500	0	27,830,500	112.44
099884	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	25,675,000	34,130,000	0	34,130,000	132.93
099891	PENGADILAN NEGERI SELONG	102,264,000	69,587,500	0	69,587,500	68.05
099906	PENGADILAN NEGERI DOMPU	18,098,000	22,248,500	0	22,248,500	122.93
099913	PENGADILAN NEGERI PRAYA	94,377,000	76,603,000	0	76,603,000	81.17
400560	PENGADILAN TINGGI MATARAM	0	2,800,000	0	2,800,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005032300KD BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT	426,791,000	371,727,000	0	371,727,000	87.1
005032400KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR					
099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	105,748,000	139,674,000	0	139,674,000	132.08
099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	28,226,000	61,525,000	0	61,525,000	217.97
099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	23,557,000	11,686,000	0	11,686,000	49.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	7,812,000	7,910,500	0	7,910,500	101.26
099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	21,826,000	21,182,000	0	21,182,000	97.05
099973	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	13,876,000	12,678,500	0	12,678,500	91.37
099990	PENGADILAN NEGERI ENDE	15,001,000	14,468,500	0	14,468,500	96.45
099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	15,121,000	11,740,000	0	11,740,000	77.64
240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	24,722,000	30,097,500	0	30,097,500	121.74
400008	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	11,561,000	11,725,500	0	11,725,500	101.42
400014	PENGADILAN NEGERI RUTENG	18,708,000	17,229,500	0	17,229,500	92.1
400158	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	22,741,000	23,177,500	0	23,177,500	101.92
400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	14,299,000	8,844,000	0	8,844,000	61.85
400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	2,130,000	2,760,000	0	2,760,000	129.58
477231	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	11,296,000	8,577,000	0	8,577,000	75.93
477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	8,866,000	11,232,000	0	11,232,000	126.69
673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	30,103,000	24,103,500	0	24,103,500	80.07
	JUMLAH PENDAPATAN 005032400KD BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR	375,593,000	418,611,000	0	418,611,000	111.45
005032500KD	BA(005) ES1(03) PAPUA					
400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	1,820,000	1,200,000	0	1,200,000	65.93
400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	84,237,000	83,577,700	0	83,577,700	99.22
400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	8,653,000	18,420,000	0	18,420,000	212.87
400051	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	34,801,000	48,763,000	0	48,763,000	140.12
400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	16,871,000	18,448,000	0	18,448,000	109.35
400102	PENGADILAN NEGERI NABIRE	23,856,000	35,399,000	0	35,399,000	148.39
400277	PENGADILAN NEGERI SERUI	8,197,000	10,295,500	0	10,295,500	125.6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
614891	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	32,834,000	25,715,000	0	25,715,000	78.32
	JUMLAH PENDAPATAN 005032500KD BA(005) ES1(03) PAPUA	211,269,000	241,818,200	0	241,818,200	114.46
005032600KD	BA(005) ES1(03) BENGKULU					
400111	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	25,939,000	37,643,500	0	37,643,500	145.12
400127	PENGADILAN NEGERI CURUP	13,192,000	19,917,500	0	19,917,500	150.98
400133	PENGADILAN NEGERI MANNA	6,928,000	7,901,500	0	7,901,500	114.05
400240	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	13,927,000	17,702,000	0	17,702,000	127.11
400513	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	100
402018	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	6,351,000	5,790,000	0	5,790,000	91.17
672995	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	11,968,000	4,965,000	0	4,965,000	41.49
673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	14,719,000	5,344,000	0	5,344,000	36.31
673042	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	2,699,000	4,548,500	0	4,548,500	168.53
673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	2,268,000	1,777,000	0	1,777,000	78.35
	JUMLAH PENDAPATAN 005032600KD BA(005) ES1(03) BENGKULU	99,021,000	106,619,000	0	106,619,000	107.67
005032800KD	BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA					
099732	PENGADILAN NEGERI TERNATE	30,498,000	31,111,000	0	31,111,000	102.01
099749	PENGADILAN NEGERI TOBELO	19,644,000	22,321,000	0	22,321,000	113.63
099753	PENGADILAN NEGERI LABUHA	35,749,000	13,388,000	0	13,388,000	37.45
099770	PENGADILAN NEGERI SOASIU	0	7,679,000	0	7,679,000	0
403434	PENGADILAN NEGERI SANANA	1,890,000	4,523,000	0	4,523,000	239.31
403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG	0	995,500	0	995,500	0
664523	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	0	480,000	0	480,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005032800KD BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA	87,781,000	80,497,500	0	80,497,500	91.7

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005032900KD	BA(005) ES1(03) BANTEN					
099074	PENGADILAN NEGERI SERANG	102,451,000	162,521,000	0	162,521,000	158.63
099075	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	25,691,000	28,790,500	0	28,790,500	112.06
099077	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	242,370,000	618,456,000	0	618,456,000	255.17
417845	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	9,145,000	19,514,664	0	19,514,664	213.39
663399	PENGADILAN TINGGI BANTEN	9,330,000	11,370,000	0	11,370,000	121.86
	JUMLAH PENDAPATAN 005032900KD BA(005) ES1(03) BANTEN	388,987,000	840,652,164	0	840,652,164	216.11
005033000KD	BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG					
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	31,149,000	32,524,500	0	32,524,500	104.42
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	26,124,000	28,997,500	0	28,997,500	111
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	16,161,000	16,729,500	0	16,729,500	103.52
402020	PENGADILAN NEGERI KOBA	11,192,000	7,253,500	0	7,253,500	64.81
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	10,113,000	4,697,500	0	4,697,500	46.45
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	260,000	750,000	0	750,000	288.46
	JUMLAH PENDAPATAN 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG	94,999,000	90,952,500	0	90,952,500	95.74
005033100KD	BA(005) ES1(03) GORONTALO					
099362	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	58,377,000	72,221,500	0	72,221,500	123.72
400209	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	24,253,000	23,381,500	0	23,381,500	96.41
477219	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	9,821,000	7,280,500	0	7,280,500	74.13
664540	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	530,000	970,000	0	970,000	183.02
670185	PENGADILAN NEGERI MARISA	9,628,000	14,439,000	0	14,439,000	149.97
	JUMLAH PENDAPATAN 005033100KD BA(005) ES1(03) GORONTALO	102,609,000	118,292,500	0	118,292,500	115.28
005033200KD	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	44,001,000	58,606,693	0	58,606,693	133.19
109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	149,716,000	148,513,500	0	148,513,500	99.2
526707	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	2,410,000	1,240,000	0	1,240,000	51.45
663006	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	22,934,000	17,741,000	0	17,741,000	77.36
672949	PENGADILAN NEGERI NATUNA	4,311,000	4,680,500	0	4,680,500	108.57
	JUMLAH PENDAPATAN 005033200KD PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG	223,372,000	230,781,693	0	230,781,693	103.32
005033300KD	BA(005) ES1(03) PAPUA BARAT					
400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	31,691,000	27,804,000	0	27,804,000	87.73
400076	PENGADILAN NEGERI SORONG	35,977,000	45,051,500	0	45,051,500	125.22
400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	10,949,000	23,967,650	0	23,967,650	218.9
402039	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	9,229,000	6,437,000	0	6,437,000	69.75
526717	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	0	900,000	0	900,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005033300KD BA(005) ES1(03) PAPUA BARAT	87,846,000	104,160,150	0	104,160,150	118.57
005033400KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT					
099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	8,316,000	7,367,000	0	7,367,000	88.59
099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	17,521,000	13,324,500	0	13,324,500	76.05
099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	34,997,000	44,090,500	0	44,090,500	125.98
526713	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	0	490,000	0	490,000	0
689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	0	4,935,500	0	4,935,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005033400KD BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT	60,834,000	70,207,500	0	70,207,500	115.41
005033500KD	UAPPAW 005033500 KALIMANTAN UTARA					
099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	20,213,000	23,511,000	0	23,511,000	116.32
417705	PENGADILAN NEGERI MALINAU	6,038,000	6,433,500	0	6,433,500	106.55

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
417723	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	12,654,000	16,648,500	0	16,648,500	131.57
477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	12,366,000	12,129,000	0	12,129,000	98.08
526721	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	0	210,000	0	210,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005033500KD UAPPAW 005033500 KALIMANTAN UTARA	51,271,000	58,932,000	0	58,932,000	114.94
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	19,549,001,000	22,063,156,124	0	22,063,156,124	112.86
04	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**					
005040100KD	BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA					
400617	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	289,692,000	261,460,000	0	261,460,000	90.25
400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	347,703,000	285,466,000	0	285,466,000	82.1
400632	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	474,373,000	362,964,000	0	362,964,000	76.51
400648	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	657,017,000	530,098,000	0	530,098,000	80.68
400654	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	0	509,901,500	0	509,901,500	0
401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	2,250,000	1,770,000	0	1,770,000	78.67
	JUMLAH PENDAPATAN 005040100KD BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA	1,771,035,000	1,951,659,500	0	1,951,659,500	110.2
005040100KP	BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA					
663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	130,000	61,550,000	0	61,550,000	47346.15
	JUMLAH PENDAPATAN 005040100KP BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA	130,000	61,550,000	0	61,550,000	47,346.15
005040200KD	BA(005) ES1(04) JAWA BARAT					
309124	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	3,570,000	2,940,000	0	2,940,000	82.35
400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	603,504,000	759,425,000	0	759,425,000	125.84
400679	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	487,268,000	424,837,500	0	424,837,500	87.19
400691	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	604,810,000	585,022,500	0	585,022,500	96.73
400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	552,970,000	532,283,500	0	532,283,500	96.26

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	601,739,000	597,116,500	0	597,116,500	99.23
400730	PENGADILAN AGAMA BOGOR	232,117,000	186,849,500	0	186,849,500	80.5
400736	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	96,931,000	87,392,500	0	87,392,500	90.16
400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	422,826,000	424,470,000	0	424,470,000	100.39
400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	108,713,000	91,876,000	420,000	91,456,000	84.13
400767	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	904,367,000	860,271,200	0	860,271,200	95.12
400773	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	455,465,000	413,324,000	0	413,324,000	90.75
400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	392,437,000	304,163,000	0	304,163,000	77.51
400833	PENGADILAN AGAMA BEKASI	538,970,000	551,245,500	0	551,245,500	102.28
400849	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	477,045,000	434,767,000	0	434,767,000	91.14
400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	391,032,000	219,769,900	0	219,769,900	56.2
402588	PENGADILAN AGAMA SUBANG	558,348,000	446,969,500	0	446,969,500	80.05
402996	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	274,121,000	283,419,000	0	283,419,000	103.39
403010	PENGADILAN AGAMA SUMBER	815,998,000	744,784,500	0	744,784,500	91.27
403419	PENGADILAN AGAMA SOREANG	801,801,000	825,765,500	0	825,765,500	102.99
403420	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	166,787,000	150,080,000	0	150,080,000	89.98
403421	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	325,069,000	323,881,000	0	323,881,000	99.63
604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	930,491,000	845,185,500	0	845,185,500	90.83
614707	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	400,558,000	366,458,000	0	366,458,000	91.49
652063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	457,144,000	364,363,500	0	364,363,500	79.7
690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	234,415,000	210,404,500	0	210,404,500	89.76
690030	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	97,704,000	83,104,000	0	83,104,000	85.06
	JUMLAH PENDAPATAN 005040200KD BA(005) ES1(04) JAWA BARAT	11,936,200,000	11,120,168,600	420,000	11,119,748,600	93.16
005040300KD	BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	56,293,000	50,789,500	0	50,789,500	90.22
400880	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	434,188,000	407,881,500	0	407,881,500	93.94
400886	PENGADILAN AGAMA TEGAL	59,433,000	54,158,000	0	54,158,000	91.12
400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	556,941,000	471,936,500	0	471,936,500	84.74
400906	PENGADILAN AGAMA BATANG	216,261,000	191,192,000	0	191,192,000	88.41
400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	361,406,000	296,859,500	0	296,859,500	82.14
400921	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	40,963,000	43,881,500	0	43,881,500	107.12
400937	PENGADILAN AGAMA KENDAL	279,348,000	248,367,500	0	248,367,500	88.91
400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	323,595,000	302,281,000	0	302,281,000	93.41
400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	378,855,000	341,252,500	0	341,252,500	90.07
400968	PENGADILAN AGAMA PATI	341,062,000	292,903,000	0	292,903,000	85.88
400974	PENGADILAN AGAMA KUDUS	196,159,000	166,789,000	0	166,789,000	85.03
400983	PENGADILAN AGAMA JEPARA	274,939,000	250,363,500	0	250,363,500	91.06
400999	PENGADILAN AGAMA REMBANG	137,194,000	130,116,000	0	130,116,000	94.84
401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	252,027,000	232,851,500	0	232,851,500	92.39
401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	29,347,000	27,116,500	0	27,116,500	92.4
401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	160,533,000	146,537,000	0	146,537,000	91.28
401031	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	253,080,000	239,922,500	0	239,922,500	94.8
401050	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	186,724,000	166,075,000	0	166,075,000	88.94
401056	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	303,079,000	282,292,500	0	282,292,500	93.14
401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	307,083,000	273,981,500	0	273,981,500	89.22
401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	179,466,000	178,513,000	0	178,513,000	99.47
401087	PENGADILAN AGAMA CILACAP	674,847,000	605,717,500	1,348,000	604,369,500	89.56
401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	285,195,000	266,250,000	0	266,250,000	93.36

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 64
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401107	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	305,153,000	259,559,500	0	259,559,500	85.06
401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	233,084,000	199,565,000	0	199,565,000	85.62
401138	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	203,153,000	183,636,000	0	183,636,000	90.39
401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	272,209,000	243,088,000	0	243,088,000	89.3
401153	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	191,310,000	167,456,500	0	167,456,500	87.53
401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	176,963,000	174,991,000	0	174,991,000	98.89
401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	158,637,000	139,416,500	0	139,416,500	87.88
401181	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	111,215,000	111,472,000	0	111,472,000	100.23
402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	449,030,000	211,316,500	0	211,316,500	47.06
402965	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4,510,000	3,120,000	0	3,120,000	69.18
403016	PENGADILAN AGAMA SLAWI	313,629,000	358,617,500	0	358,617,500	114.34
403022	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	280,638,000	231,167,000	0	231,167,000	82.37
614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	241,819,000	201,891,500	0	201,891,500	83.49
	JUMLAH PENDAPATAN 005040300KD BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH	9,229,368,000	8,153,325,000	1,348,000	8,151,977,000	88.33
005040400KD	BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA					
401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	98,055,000	89,013,300	0	89,013,300	90.78
401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	207,770,000	181,720,300	0	181,720,300	87.46
401220	PENGADILAN AGAMA WATES	72,861,000	59,011,000	0	59,011,000	80.99
401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	200,165,000	190,213,000	0	190,213,000	95.03
401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	162,077,000	134,254,500	0	134,254,500	82.83
547658	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	0	840,000	0	840,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005040400KD BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA	740,928,000	655,052,100	0	655,052,100	88.41
005040500KD	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309125	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	5,160,000	4,740,000	0	4,740,000	91.86
401241	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	1,091,712,000	938,827,800	0	938,827,800	86
401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	352,158,000	331,814,600	0	331,814,600	94.22
401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	529,198,000	520,225,500	0	520,225,500	98.3
401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	388,043,000	351,450,000	0	351,450,000	90.57
401288	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	18,897,000	14,720,000	0	14,720,000	77.9
401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	262,880,000	250,178,000	0	250,178,000	95.17
401308	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	306,865,000	274,605,000	0	274,605,000	89.49
401323	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	298,040,000	262,034,000	0	262,034,000	87.92
401339	PENGADILAN AGAMA JEMBER	796,958,000	776,810,500	0	776,810,500	97.47
401345	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	243,825,000	220,906,500	0	220,906,500	90.6
401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	243,208,000	214,526,500	0	214,526,500	88.21
401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	576,562,000	463,615,000	0	463,615,000	80.41
401376	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	441,859,000	373,914,000	0	373,914,000	84.62
401382	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	333,953,000	300,061,000	0	300,061,000	89.85
401391	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	211,329,000	194,357,000	0	194,357,000	91.97
401403	PENGADILAN AGAMA BLITAR	475,470,000	370,897,500	0	370,897,500	78.01
401411	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	244,825,000	252,017,500	0	252,017,500	102.94
401427	PENGADILAN AGAMA MALANG	372,373,000	243,981,000	0	243,981,000	65.52
401433	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	263,201,000	250,114,000	0	250,114,000	95.03
401442	PENGADILAN AGAMA BANGIL	298,084,000	250,510,500	0	250,510,500	84.04
401458	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	63,345,000	63,517,000	0	63,517,000	100.27
401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	350,471,000	294,791,500	0	294,791,500	84.11
401473	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	324,803,000	307,775,000	0	307,775,000	94.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401489	PENGADILAN AGAMA MADIUN	47,762,000	45,875,500	0	45,875,500	96.05
401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	164,387,000	138,233,500	0	138,233,500	84.09
401509	PENGADILAN AGAMA NGAWI	218,558,000	195,097,500	0	195,097,500	89.27
401515	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	202,739,000	195,671,500	0	195,671,500	96.51
401521	PENGADILAN AGAMA PACITAN	130,061,000	105,044,500	0	105,044,500	80.77
401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	204,063,000	219,244,000	0	219,244,000	107.44
401546	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	217,634,000	213,186,000	0	213,186,000	97.96
401552	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	184,454,000	165,877,500	0	165,877,500	89.93
401561	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	208,208,000	219,176,500	0	219,176,500	105.27
401577	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	67,723,000	66,255,000	0	66,255,000	97.83
403031	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	173,692,000	155,682,000	0	155,682,000	89.63
403047	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	108,600,000	83,320,500	0	83,320,500	76.72
450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	322,237,000	287,228,000	0	287,228,000	89.14
604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	876,309,000	715,574,500	0	715,574,500	81.66
	JUMLAH PENDAPATAN 005040500KD Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	11,619,646,000	10,331,855,900	0	10,331,855,900	88.92
005040600KD	BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
401583	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	1,420,000	1,085,000	0	1,085,000	76.41
401592	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	86,096,000	73,963,000	0	73,963,000	85.91
401603	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	10,194,000	8,944,500	0	8,944,500	87.74
401612	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	78,227,000	65,351,000	0	65,351,000	83.54
401628	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	20,320,000	19,693,000	0	19,693,000	96.91
401634	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	90,171,000	64,139,000	0	64,139,000	71.13
401643	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	119,621,000	152,466,400	0	152,466,400	127.46

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 67
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401659	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	0	62,022,000	650,000	61,372,000	0
401665	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	43,192,000	36,342,500	0	36,342,500	84.14
401671	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	84,357,000	62,185,972	0	62,185,972	73.72
401690	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	33,665,000	48,866,000	0	48,866,000	145.15
401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	59,500,000	52,010,000	0	52,010,000	87.41
401710	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	11,545,000	13,423,500	0	13,423,500	116.27
401716	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	38,439,000	37,573,500	0	37,573,500	97.75
401722	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	36,925,000	37,207,000	0	37,207,000	100.76
401731	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	11,720,000	5,038,500	0	5,038,500	42.99
401747	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	15,965,000	15,605,500	0	15,605,500	97.75
401753	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	18,311,000	15,313,500	0	15,313,500	83.63
401762	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	25,273,000	26,426,500	0	26,426,500	104.56
402608	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	74,449,000	65,324,500	0	65,324,500	87.74
403426	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	20,348,000	16,198,500	0	16,198,500	79.61
403427	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	41,931,000	35,339,000	0	35,339,000	84.28
403428	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	19,820,000	13,772,500	0	13,772,500	69.49
690108	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG	43,412,000	41,198,500	0	41,198,500	94.9
	JUMLAH PENDAPATAN 005040600KD BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	984,901,000	969,489,372	650,000	968,839,372	98.37
005040700KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA					
401778	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	0	1,250,000	0	1,250,000	0
401784	PENGADILAN AGAMA BINJAI	0	78,223,000	0	78,223,000	0
401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	22,589,000	17,234,000	0	17,234,000	76.29
401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	353,051,000	416,504,000	0	416,504,000	117.97

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 68
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401813	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	139,951,000	200,218,500	0	200,218,500	143.06
401829	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	36,098,000	30,103,000	0	30,103,000	83.39
401835	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	47,820,000	37,922,000	0	37,922,000	79.3
401841	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	7,081,000	9,906,500	0	9,906,500	139.9
401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	22,024,000	26,271,000	0	26,271,000	119.28
401866	PENGADILAN AGAMA BALIGE	3,449,000	3,602,500	0	3,602,500	104.45
401872	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	12,885,000	14,920,000	0	14,920,000	115.79
401881	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	69,786,000	48,485,000	0	48,485,000	69.48
401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	7,674,000	3,956,000	0	3,956,000	51.55
402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	62,749,000	56,971,000	0	56,971,000	90.79
403062	PENGADILAN AGAMA KISARAN	221,307,000	222,525,000	0	222,525,000	100.55
403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	263,236,000	256,308,500	0	256,308,500	97.37
403084	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	126,106,000	99,892,500	0	99,892,500	79.21
403399	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	103,647,000	96,010,000	0	96,010,000	92.63
547683	PENGADILAN AGAMA STABAT	199,542,000	173,816,500	0	173,816,500	87.11
604745	PENGADILAN AGAMA PANDAN	24,969,000	26,069,000	0	26,069,000	104.41
631980	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	2,610,000	1,899,500	0	1,899,500	72.78
631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	56,487,000	64,584,000	0	64,584,000	114.33
690112	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	0	38,336,500	0	38,336,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005040700KD BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA	1,783,061,000	1,925,008,000	0	1,925,008,000	107.96
005040800KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT					
401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	660,000	730,000	0	730,000	110.61
401917	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	126,538,000	89,218,500	0	89,218,500	70.51

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401923	PENGADILAN AGAMA SOLOK	34,885,000	34,689,500	0	34,689,500	99.44
401932	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	17,523,000	11,820,000	0	11,820,000	67.45
401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	61,062,000	59,168,500	0	59,168,500	96.9
401954	PENGADILAN AGAMA PADANG	200,183,000	180,009,000	0	180,009,000	89.92
401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	29,597,000	27,315,000	0	27,315,000	92.29
401979	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	36,159,000	24,428,000	0	24,428,000	67.56
401985	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	63,471,000	56,781,100	0	56,781,100	89.46
401991	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	34,567,000	30,643,500	0	30,643,500	88.65
402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	65,783,000	79,183,100	0	79,183,100	120.37
402011	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	82,605,000	75,126,500	0	75,126,500	90.95
402030	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	39,450,000	38,533,500	0	38,533,500	97.68
402036	PENGADILAN AGAMA TALU	72,234,000	76,175,000	0	76,175,000	105.46
402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	18,867,000	19,798,500	0	19,798,500	104.94
402051	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	73,283,000	70,327,000	0	70,327,000	95.97
402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	45,579,000	50,100,000	0	50,100,000	109.92
402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	42,523,000	31,577,500	0	31,577,500	74.26
403400	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	31,739,000	49,266,000	0	49,266,000	155.22
	JUMLAH PENDAPATAN 005040800KD BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT	1,076,708,000	1,004,890,200	0	1,004,890,200	93.33
005040900KD	BA(005) ES1(04) RIAU					
402073	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	221,698,000	218,226,500	0	218,226,500	98.43
402082	PENGADILAN AGAMA RENGAT	83,135,000	69,051,000	0	69,051,000	83.06
402098	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	189,756,000	103,367,500	0	103,367,500	54.47
402102	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	165,430,000	123,861,500	0	123,861,500	74.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	77,321,000	73,746,000	0	73,746,000	95.38
402124	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	110,781,000	97,848,500	0	97,848,500	88.33
402133	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	32,612,000	27,595,500	0	27,595,500	84.62
402623	PENGADILAN AGAMA DUMAI	55,935,000	123,772,500	0	123,772,500	221.28
402971	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	1,070,000	670,000	0	670,000	62.62
403402	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	67,814,000	74,121,500	0	74,121,500	109.3
403403	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	47,843,000	40,184,500	0	40,184,500	83.99
632000	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	59,081,000	54,679,000	0	54,679,000	92.55
632002	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	91,604,000	107,599,500	0	107,599,500	117.46
	JUMLAH PENDAPATAN 005040900KD BA(005) ES1(04) RIAU	1,204,080,000	1,114,723,500	0	1,114,723,500	92.58
005041000KD	BA(005) ES1(04) JAMBI					
402186	PENGADILAN AGAMA JAMBI	126,493,000	114,789,000	0	114,789,000	90.75
402192	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	47,509,000	55,808,500	0	55,808,500	117.47
402206	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	57,699,000	55,898,000	0	55,898,000	96.88
402212	PENGADILAN AGAMA BANGKO	48,996,000	54,894,000	0	54,894,000	112.04
402221	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	0	51,029,500	0	51,029,500	0
403053	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	51,841,000	50,309,000	0	50,309,000	97.04
547662	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	290,000	350,000	0	350,000	120.69
632019	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	44,707,000	41,737,000	0	41,737,000	93.36
632023	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	46,525,000	34,181,000	0	34,181,000	73.47
652021	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	51,239,000	48,872,000	0	48,872,000	95.38
652035	PENGADILAN AGAMA SENGETI	60,355,000	75,494,000	0	75,494,000	125.08
	JUMLAH PENDAPATAN 005041000KD BA(005) ES1(04) JAMBI	535,654,000	583,362,000	0	583,362,000	108.91
005041100KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402237	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	660,000	570,000	0	570,000	86.36
402243	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	0	276,713,500	0	276,713,500	0
402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	120,131,000	65,983,500	0	65,983,500	54.93
402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	67,313,000	57,765,000	0	57,765,000	85.82
402274	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	159,479,000	97,319,000	0	97,319,000	61.02
402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	126,708,000	120,282,300	0	120,282,300	94.93
402299	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	175,114,000	168,357,500	0	168,357,500	96.14
402639	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	98,064,000	95,179,000	0	95,179,000	97.06
403408	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	95,846,000	101,289,500	0	101,289,500	105.68
403409	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	131,870,000	128,711,000	0	128,711,000	97.6
403410	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	39,798,000	39,805,000	0	39,805,000	100.02
403411	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	28,605,000	24,448,000	0	24,448,000	85.47
403412	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	40,629,000	34,694,500	0	34,694,500	85.39
	JUMLAH PENDAPATAN 005041100KD BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN	1,084,217,000	1,211,117,800	0	1,211,117,800	111.7
005041200KD	BA(005) ES1(04) LAMPUNG					
402325	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	201,873,000	194,416,500	0	194,416,500	96.31
402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	63,641,000	72,044,500	0	72,044,500	113.2
402350	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	95,473,000	105,487,500	0	105,487,500	110.49
402356	PENGADILAN AGAMA METRO	67,004,000	47,743,500	0	47,743,500	71.25
402645	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	212,229,000	197,395,500	0	197,395,500	93.01
403413	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	73,767,000	86,295,000	0	86,295,000	116.98
403414	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	80,329,000	80,565,500	0	80,565,500	100.29
403415	PENGADILAN AGAMA MESUJI	40,915,000	36,044,500	0	36,044,500	88.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403416	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	70,809,000	60,082,500	0	60,082,500	84.85
403418	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	251,823,000	261,645,500	0	261,645,500	103.9
547679	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	630,000	490,000	0	490,000	77.78
614685	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	58,426,000	59,527,500	0	59,527,500	101.89
614692	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	96,423,000	109,915,500	0	109,915,500	113.99
652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	289,327,000	291,684,500	0	291,684,500	100.81
652056	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	59,993,000	63,135,000	0	63,135,000	105.24
	JUMLAH PENDAPATAN 005041200KD BA(005) ES1(04) LAMPUNG	1,662,662,000	1,666,473,000	0	1,666,473,000	100.23
005041300KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT					
402362	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	144,745,000	125,826,798	0	125,826,798	86.93
402371	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	210,443,000	146,462,000	0	146,462,000	69.6
402387	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	102,460,000	95,377,000	0	95,377,000	93.09
402393	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	47,138,000	36,985,000	0	36,985,000	78.46
402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	57,355,000	45,878,500	0	45,878,500	79.99
402413	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	27,438,000	26,993,000	0	26,993,000	98.38
402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	300,000	410,000	0	410,000	136.67
402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	76,116,000	51,344,500	0	51,344,500	67.46
403422	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	36,360,000	29,562,500	0	29,562,500	81.31
403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	25,221,000	21,918,500	0	21,918,500	86.91
403425	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	97,642,000	85,451,500	0	85,451,500	87.52
632040	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	16,782,000	14,486,500	0	14,486,500	86.32
	JUMLAH PENDAPATAN 005041300KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT	842,000,000	680,695,798	0	680,695,798	80.84
005041400KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401974	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	27,785,000	18,581,000	0	18,581,000	66.87
401975	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	13,189,000	19,212,500	0	19,212,500	145.67
401976	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	22,563,000	15,695,500	0	15,695,500	69.56
401977	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	14,813,000	14,959,500	0	14,959,500	100.99
401980	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	10,617,000	11,649,000	0	11,649,000	109.72
401981	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	20,135,000	18,503,000	0	18,503,000	91.89
401982	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	4,813,000	6,005,000	0	6,005,000	124.77
402422	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	53,272,000	50,667,500	0	50,667,500	95.11
402438	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	67,539,000	72,159,500	0	72,159,500	106.84
402444	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	57,066,000	50,810,000	0	50,810,000	89.04
402453	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	0	24,909,500	0	24,909,500	0
402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	90,311,000	61,193,000	0	61,193,000	67.76
402475	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	93,934,000	73,425,500	0	73,425,500	78.17
402990	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	300,000	100,000	0	100,000	33.33
	JUMLAH PENDAPATAN 005041400KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH	476,337,000	437,870,500	0	437,870,500	91.92
005041500KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN					
309048	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	62,418,000	66,535,500	0	66,535,500	106.6
309049	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	101,178,000	84,026,000	0	84,026,000	83.05
309050	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	53,328,000	43,569,500	0	43,569,500	81.7
402450	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	560,000	640,000	0	640,000	114.29
402501	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	174,452,000	176,579,000	0	176,579,000	101.22
402520	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	105,148,000	128,279,000	0	128,279,000	122
402526	PENGADILAN AGAMA RANTAU	54,761,000	56,332,500	0	56,332,500	102.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	49,676,000	42,078,000	0	42,078,000	84.7
402541	PENGADILAN AGAMA BARABAI	66,074,000	64,109,500	0	64,109,500	97.03
402557	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	81,358,000	78,482,500	0	78,482,500	96.47
402563	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	60,235,000	52,496,000	0	52,496,000	87.15
402572	PENGADILAN AGAMA NEGARA	16,386,000	18,741,000	0	18,741,000	114.37
632044	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	95,819,000	100,123,500	0	100,123,500	104.49
690140	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	88,644,000	70,379,500	0	70,379,500	79.4
	JUMLAH PENDAPATAN 005041500KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	1,010,037,000	982,371,500	0	982,371,500	97.26
005041600KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR					
309052	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	180,293,000	161,508,500	0	161,508,500	89.58
309053	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	241,060,000	241,008,500	0	241,008,500	99.98
309054	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	76,834,000	59,680,000	0	59,680,000	77.67
309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	225,407,000	202,139,500	0	202,139,500	89.68
309056	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	60,404,000	59,183,000	0	59,183,000	97.98
401983	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	48,862,000	38,695,500	0	38,695,500	79.19
401986	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	20,533,000	23,994,000	0	23,994,000	116.86
402481	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	620,000	500,000	0	500,000	80.65
652081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	65,530,000	50,911,500	0	50,911,500	77.69
652098	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	95,603,000	80,221,500	0	80,221,500	83.91
	JUMLAH PENDAPATAN 005041600KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR	1,015,146,000	917,842,000	0	917,842,000	90.41
005041700KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA					
309058	PENGADILAN AGAMA MANADO	41,039,000	55,423,000	0	55,423,000	135.05
309059	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	36,943,000	34,664,000	0	34,664,000	93.83

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309060	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	4,995,000	5,980,500	0	5,980,500	119.73
401996	PENGADILAN AGAMA LOLAK	49,920,000	56,682,602	0	56,682,602	113.55
401997	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	15,922,000	20,488,000	0	20,488,000	128.68
401998	PENGADILAN AGAMA BOROKO	25,730,000	16,217,500	0	16,217,500	63.03
401999	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	12,163,000	14,927,500	0	14,927,500	122.73
402682	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	130,000	130,000	0	130,000	100
402702	PENGADILAN AGAMA TONDANO	10,842,000	9,794,000	0	9,794,000	90.33
604752	PENGADILAN AGAMA BITUNG	33,445,000	22,013,500	0	22,013,500	65.82
682172	PENGADILAN AGAMA AMURANG	6,655,000	7,156,500	0	7,156,500	107.54
	JUMLAH PENDAPATAN 005041700KD BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA	237,784,000	243,477,102	0	243,477,102	102.39
005041800KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA					
309062	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	98,949,000	101,566,500	0	101,566,500	102.65
309063	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	0	37,830,500	0	37,830,500	0
309064	PENGADILAN AGAMA POSO	26,997,000	27,680,500	0	27,680,500	102.53
309066	PENGADILAN AGAMA LUWUK	66,313,000	65,390,000	0	65,390,000	98.61
401992	PENGADILAN AGAMA AMPANA	28,581,000	35,428,000	0	35,428,000	123.96
576250	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	140,000	240,000	0	240,000	171.43
604766	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	49,675,000	58,993,000	0	58,993,000	118.76
652103	PENGADILAN AGAMA BUOL	26,245,000	38,625,000	0	38,625,000	147.17
652120	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	57,882,000	48,382,000	0	48,382,000	83.59
652124	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	29,975,000	19,998,000	0	19,998,000	66.72
690072	PENGADILAN AGAMA PARIGI	51,920,000	60,382,000	0	60,382,000	116.3
	JUMLAH PENDAPATAN 005041800KD BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA PALU]	436,677,000	494,515,500	0	494,515,500	113.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005041900KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN					
309067	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	1,800,000	1,480,000	0	1,480,000	82.22
309068	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	62,771,000	64,160,500	0	64,160,500	102.21
309069	PENGADILAN AGAMA MAROS	108,027,000	77,181,500	0	77,181,500	71.45
309070	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	380,370,000	354,141,000	0	354,141,000	93.1
309071	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	59,701,000	58,037,000	0	58,037,000	97.21
309073	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	74,615,000	57,441,500	0	57,441,500	76.98
309074	PENGADILAN AGAMA BARRU	50,723,000	43,969,500	0	43,969,500	86.69
309075	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	130,029,000	173,758,500	0	173,758,500	133.63
309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	171,138,000	144,520,000	0	144,520,000	84.45
309077	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	250,856,000	119,147,500	0	119,147,500	47.5
309078	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	97,599,000	71,444,000	0	71,444,000	73.2
309079	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	42,585,000	65,882,500	0	65,882,500	154.71
309080	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	94,671,000	91,443,500	0	91,443,500	96.59
309081	PENGADILAN AGAMA SINJAI	57,634,000	48,949,000	0	48,949,000	84.93
309082	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	19,037,000	20,767,000	0	20,767,000	109.09
309083	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	64,607,000	50,098,500	0	50,098,500	77.54
309084	PENGADILAN AGAMA PINRANG	129,011,000	84,408,000	0	84,408,000	65.43
309085	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	44,505,000	35,740,000	0	35,740,000	80.31
309087	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	109,111,000	95,877,500	0	95,877,500	87.87
309088	PENGADILAN AGAMA PALOPO	43,980,000	36,550,500	0	36,550,500	83.11
309089	PENGADILAN AGAMA MAKALE	9,644,000	6,805,500	0	6,805,500	70.57
401987	PENGADILAN AGAMA BELOPA	82,100,000	65,632,500	0	65,632,500	79.94
401989	PENGADILAN AGAMA MALILI	51,055,000	49,235,000	0	49,235,000	96.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
632052	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	51,095,000	57,178,500	0	57,178,500	111.91
	JUMLAH PENDAPATAN 005041900KD BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN	2,186,664,000	1,873,849,000	0	1,873,849,000	85.69
005042000KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA					
309094	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	58,261,000	65,295,500	0	65,295,500	112.07
309095	PENGADILAN AGAMA RAHA	50,816,000	45,063,500	0	45,063,500	88.68
309096	PENGADILAN AGAMA KENDARI	119,701,000	122,937,500	0	122,937,500	102.7
309097	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	50,871,000	49,374,500	0	49,374,500	97.06
401993	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	27,568,000	19,957,500	0	19,957,500	72.39
401994	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	28,473,000	30,209,000	0	30,209,000	106.1
401995	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	30,287,000	25,826,500	0	25,826,500	85.27
576254	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	430,000	440,000	0	440,000	102.33
604773	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	55,446,000	61,438,000	0	61,438,000	110.81
690086	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	47,119,000	45,012,000	704,000	44,308,000	94.03
690090	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	45,694,000	42,345,500	0	42,345,500	92.67
	JUMLAH PENDAPATAN 005042000KD BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	514,666,000	507,899,500	704,000	507,195,500	98.55
005042100KD	BA(005) ES1(04) MALUKU					
309098	PENGADILAN AGAMA AMBON	70,715,000	61,199,000	0	61,199,000	86.54
309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	14,443,000	6,308,000	0	6,308,000	43.68
309100	PENGADILAN AGAMA MASOHI	18,899,000	20,858,500	0	20,858,500	110.37
402002	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	14,721,000	15,287,000	0	15,287,000	103.84
402003	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	10,876,000	23,465,000	0	23,465,000	215.75
402006	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	44,055,000	34,951,000	0	34,951,000	79.33
402711	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	140,000	110,000	0	110,000	78.57

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005042100KD BA(005) ES1(04) MALUKU	173,849,000	162,178,500	0	162,178,500	93.29
005042200KD	BA(005) ES1(04) BALI					
309105	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	63,990,000	73,889,000	0	73,889,000	115.47
309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	16,596,000	22,434,000	0	22,434,000	135.18
402727	PENGADILAN AGAMA BANGLI	860,000	1,507,000	0	1,507,000	175.23
402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	24,370,000	26,255,000	0	26,255,000	107.73
402742	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	3,936,000	3,977,000	0	3,977,000	101.04
402758	PENGADILAN AGAMA TABANAN	9,124,000	10,790,000	0	10,790,000	118.26
402764	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	1,829,000	2,970,500	0	2,970,500	162.41
402773	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	3,995,000	5,907,000	0	5,907,000	147.86
526727	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	0	250,000	0	250,000	0
614732	PENGADILAN AGAMA BADUNG	33,348,000	32,589,500	0	32,589,500	97.73
	JUMLAH PENDAPATAN 005042200KD BA(005) ES1(04) BALI	158,048,000	180,569,000	0	180,569,000	114.25
005042300KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT					
309107	PENGADILAN AGAMA MATARAM	76,297,000	73,796,500	0	73,796,500	96.72
309109	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	116,848,000	101,968,000	0	101,968,000	87.27
309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	193,204,000	189,889,000	0	189,889,000	98.28
309111	PENGADILAN AGAMA SELONG	172,359,000	162,479,000	0	162,479,000	94.27
309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	189,073,000	173,848,500	0	173,848,500	91.95
309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	99,061,000	99,599,000	0	99,599,000	100.54
402789	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1,350,000	720,000	0	720,000	53.33
614728	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	180,796,000	177,445,500	0	177,445,500	98.15
690154	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	34,924,000	37,461,500	0	37,461,500	107.27
	JUMLAH PENDAPATAN 005042300KD BA(005) ES1(04) NUSA	1,063,912,000	1,017,207,000	0	1,017,207,000	95.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	TENGGARA BARAT					
005042400KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR					
309115	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	2,273,000	1,985,500	0	1,985,500	87.35
309116	PENGADILAN AGAMA KUPANG	21,715,000	16,911,500	0	16,911,500	77.88
309117	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	4,792,000	5,293,000	0	5,293,000	110.45
309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	7,473,000	7,812,000	0	7,812,000	104.54
309119	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	2,002,000	3,751,000	0	3,751,000	187.36
402795	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	3,849,000	5,314,500	0	5,314,500	138.07
402809	PENGADILAN AGAMA RUTENG	4,185,000	3,185,000	0	3,185,000	76.11
402815	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	2,692,000	1,434,500	0	1,434,500	53.29
402821	PENGADILAN AGAMA SOE	1,152,000	1,030,500	0	1,030,500	89.45
402840	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	495,000	446,000	0	446,000	90.1
402846	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	1,788,000	1,118,000	0	1,118,000	62.53
402852	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	5,454,000	5,232,500	0	5,232,500	95.94
576261	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	80,000	80,000	0	80,000	100
632065	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	4,264,000	2,787,000	0	2,787,000	65.36
682282	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	6,367,000	8,541,000	0	8,541,000	134.14
	JUMLAH PENDAPATAN 005042400KD BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	68,581,000	64,922,000	0	64,922,000	94.66
005042500KD	BA(005) ES1(04) PAPUA					
402861	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	150,000	80,000	0	80,000	53.33
402877	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	48,922,000	43,233,000	0	43,233,000	88.37
402892	PENGADILAN AGAMA BIAK	6,896,000	5,018,500	0	5,018,500	72.77
402928	PENGADILAN AGAMA NABIRE	15,838,000	17,930,000	0	17,930,000	113.21

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402934	PENGADILAN AGAMA WAMENA	4,128,000	2,947,500	0	2,947,500	71.4
402943	PENGADILAN AGAMA SERUI	4,430,000	3,270,000	0	3,270,000	73.81
402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	36,401,000	37,746,500	0	37,746,500	103.7
614770	PENGADILAN AGAMA SENTANI	17,381,000	18,695,000	0	18,695,000	107.56
614774	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	27,816,000	24,473,000	0	24,473,000	87.98
614781	PENGADILAN AGAMA PANIAI	775,000	436,500	0	436,500	56.32
690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	11,299,000	10,493,000	0	10,493,000	92.87
	JUMLAH PENDAPATAN 005042500KD BA(005) ES1(04) PAPUA	174,036,000	164,323,000	0	164,323,000	94.42
005042600KD	BA(005) ES1(04) BENGKULU					
309120	PENGADILAN AGAMA MANNA	45,319,000	49,952,500	0	49,952,500	110.22
309121	PENGADILAN AGAMA CURUP	56,138,000	68,680,500	0	68,680,500	122.34
309122	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	81,509,000	83,491,500	0	83,491,500	102.43
309123	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	110,025,000	101,655,500	0	101,655,500	92.39
403404	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	34,553,000	35,027,000	0	35,027,000	101.37
403405	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	24,985,000	31,653,500	0	31,653,500	126.69
403406	PENGADILAN AGAMA TAIS	46,297,000	42,523,000	0	42,523,000	91.85
403407	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	40,839,000	45,047,000	0	45,047,000	110.3
576275	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	230,000	280,000	0	280,000	121.74
690133	PENGADILAN AGAMA LEBONG	23,321,000	19,959,000	252,000	19,707,000	84.5
	JUMLAH PENDAPATAN 005042600KD BA(005) ES1(04) BENGKULU	463,216,000	478,269,500	252,000	478,017,500	103.2
005042800KD	BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA					
309101	PENGADILAN AGAMA TERNATE	96,962,000	132,680,000	0	132,680,000	136.84
309102	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	29,124,000	16,874,000	0	16,874,000	57.94
309103	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	28,851,000	25,961,000	0	25,961,000	89.98

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	34,504,000	44,175,500	0	44,175,500	128.03
440741	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	190,000	120,000	0	120,000	63.16
	JUMLAH PENDAPATAN 005042800KD BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA	189,631,000	219,810,500	0	219,810,500	115.91
005042900KD	BA(005) ES1(04) BANTEN					
400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	628,043,000	500,078,500	0	500,078,500	79.62
400818	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	161,535,000	162,201,500	0	162,201,500	100.41
400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	431,747,000	325,376,000	0	325,376,000	75.36
417851	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	171,751,000	134,194,500	0	134,194,500	78.13
440713	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	1,160,000	900,000	0	900,000	77.59
604724	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	755,805,000	674,238,000	0	674,238,000	89.21
652077	PENGADILAN AGAMA CILEGON	97,024,000	84,994,000	0	84,994,000	87.6
	JUMLAH PENDAPATAN 005042900KD BA(005) ES1(04) BANTEN	2,247,065,000	1,881,982,500	0	1,881,982,500	83.75
005043000KD	BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG					
402303	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	53,598,000	48,363,000	0	48,363,000	90.23
402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	104,678,000	88,941,000	0	88,941,000	84.97
403093	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	123,366,000	94,947,000	0	94,947,000	76.96
440729	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	160,000	110,000	0	110,000	68.75
690129	PENGADILAN AGAMA MENTOK	40,817,000	31,692,500	0	31,692,500	77.65
	JUMLAH PENDAPATAN 005043000KD BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG	322,619,000	264,053,500	0	264,053,500	81.85
005043100KD	BA(005) ES1(04) GORONTALO					
309061	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	69,502,000	59,110,000	0	59,110,000	85.05
402000	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	63,362,000	49,630,500	0	49,630,500	78.33
402001	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	39,530,000	31,939,500	0	31,939,500	80.8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	113,271,000	93,298,000	0	93,298,000	82.37
440735	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	180,000	130,000	0	130,000	72.22
652131	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	25,649,000	28,246,500	0	28,246,500	110.13
682186	PENGADILAN AGAMA MARISA	50,052,000	37,830,000	0	37,830,000	75.58
	JUMLAH PENDAPATAN 005043100KD BA(005) ES1(04) GORONTALO	361,546,000	300,184,500	0	300,184,500	83.03
005043200KD	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG					
402149	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	98,081,000	89,165,000	0	89,165,000	90.91
402155	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	20,937,000	15,698,500	0	15,698,500	74.98
402161	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	56,808,000	58,437,500	0	58,437,500	102.87
402180	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	12,319,000	9,382,500	0	9,382,500	76.16
526709	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	0	220,000	0	220,000	0
547700	PENGADILAN AGAMA BATAM	229,719,000	226,345,000	0	226,345,000	98.53
614671	PENGADILAN AGAMA NATUNA	21,529,000	27,074,500	0	27,074,500	125.76
	JUMLAH PENDAPATAN 005043200KD PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	439,393,000	426,323,000	0	426,323,000	97.03
005043300KD	BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT					
402007	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	7,458,000	4,977,500	0	4,977,500	66.74
402883	PENGADILAN AGAMA SORONG	42,371,000	38,138,000	0	38,138,000	90.01
402903	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	11,753,000	12,228,000	0	12,228,000	104.04
402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	45,547,000	32,277,500	0	32,277,500	70.87
526719	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	0	40,000	0	40,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005043300KD BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT	107,129,000	87,661,000	0	87,661,000	81.83
005043400KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT					
309091	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	117,189,000	104,856,500	0	104,856,500	89.48

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309092	PENGADILAN AGAMA MAJENE	34,386,000	34,481,000	0	34,481,000	100.28
309093	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	59,497,000	65,058,000	0	65,058,000	109.35
401988	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	28,038,000	32,519,500	0	32,519,500	115.98
526715	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	0	130,000	0	130,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005043400KD BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT	239,110,000	237,045,000	0	237,045,000	99.14
005043500KD	UAPPAW 005043500 KALIMANTAN UTARA					
402676	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	66,680,000	58,580,000	0	58,580,000	87.85
417658	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	62,974,000	53,925,500	0	53,925,500	85.63
526723	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	0	120,000	0	120,000	0
690175	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	0	39,235,500	0	39,235,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005043500KD UAPPAW 005043500 KALIMANTAN UTARA	129,654,000	151,861,000	0	151,861,000	117.13
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	56,485,690,000	52,523,585,872	3,374,000	52,520,211,872	92.98
05	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**					
005050100KD	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA					
526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	0	13,709,500	0	13,709,500	0
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	94,220,000	104,028,500	0	104,028,500	110.41
	JUMLAH PENDAPATAN 005050100KD BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	94,220,000	117,738,000	0	117,738,000	124.96
005050100KP	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA					
663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	0	56,578,000	0	56,578,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050100KP BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	0	56,578,000	0	56,578,000	
005050200KD	BA(005) ES1(05) JAWA BARAT					
531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	47,784,000	64,230,500	0	64,230,500	134.42
	JUMLAH PENDAPATAN 005050200KD BA(005) ES1(05) JAWA BARAT	47,784,000	64,230,500	0	64,230,500	134.42

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 84
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005050300KD	BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH					
531831	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	30,453,000	43,156,000	0	43,156,000	141.71
	JUMLAH PENDAPATAN 005050300KD BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH	30,453,000	43,156,000	0	43,156,000	141.71
005050400KD	BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA					
578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	4,364,000	5,468,500	0	5,468,500	125.31
	JUMLAH PENDAPATAN 005050400KD BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA	4,364,000	5,468,500	0	5,468,500	125.31
005050500KD	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya					
526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	97,999,000	101,650,000	0	101,650,000	103.73
548941	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	1,970,000	2,124,500	0	2,124,500	107.84
	JUMLAH PENDAPATAN 005050500KD Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	99,969,000	103,774,500	0	103,774,500	103.81
005050600KD	BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
578819	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	13,061,000	19,089,200	0	19,089,200	146.15
	JUMLAH PENDAPATAN 005050600KD BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	13,061,000	19,089,200	0	19,089,200	146.15
005050700KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA					
526726	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	3,650,000	6,297,000	0	6,297,000	172.52
526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	53,872,000	79,258,300	0	79,258,300	147.12
	JUMLAH PENDAPATAN 005050700KD BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA	57,522,000	85,555,300	0	85,555,300	148.73
005050800KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT					
531845	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	32,896,000	23,827,300	0	23,827,300	72.43
	JUMLAH PENDAPATAN 005050800KD BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT	32,896,000	23,827,300	0	23,827,300	72.43
005050900KD	BA(005) ES1(05) RIAU					
578823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	44,349,000	37,168,450	0	37,168,450	83.81
	JUMLAH PENDAPATAN 005050900KD BA(005) ES1(05) RIAU	44,349,000	37,168,450	0	37,168,450	83.81

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005051000KD	BA(005) ES1(05) JAMBI					
578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	17,515,000	9,473,000	0	9,473,000	54.09
	JUMLAH PENDAPATAN 005051000KD BA(005) ES1(05) JAMBI	17,515,000	9,473,000	0	9,473,000	54.09
005051100KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN					
526729	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	0	2,049,500	0	2,049,500	0
526751	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	0	33,010,000	0	33,010,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005051100KD BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN	0	35,059,500	0	35,059,500	
005051200KD	BA(005) ES1(05) LAMPUNG					
559841	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	14,884,000	16,773,500	0	16,773,500	112.69
	JUMLAH PENDAPATAN 005051200KD BA(005) ES1(05) LAMPUNG	14,884,000	16,773,500	0	16,773,500	112.69
005051300KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT					
531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	13,518,000	18,171,200	0	18,171,200	134.42
	JUMLAH PENDAPATAN 005051300KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT	13,518,000	18,171,200	0	18,171,200	134.42
005051400KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH					
578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	12,236,000	12,780,000	0	12,780,000	104.45
	JUMLAH PENDAPATAN 005051400KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH	12,236,000	12,780,000	0	12,780,000	104.45
005051500KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN					
526731	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	0	3,045,500	0	3,045,500	0
531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	8,954,000	2,830,400	0	2,830,400	31.61
	JUMLAH PENDAPATAN 005051500KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN	8,954,000	5,875,900	0	5,875,900	65.62
005051600KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR					
559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	28,209,000	16,842,500	0	16,842,500	59.71
	JUMLAH PENDAPATAN 005051600KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR	28,209,000	16,842,500	0	16,842,500	59.71

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 86
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005051700KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA					
526735	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	0	3,930,000	0	3,930,000	0
531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	24,994,000	9,980,000	0	9,980,000	39.93
	JUMLAH PENDAPATAN 005051700KD BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA	24,994,000	13,910,000	0	13,910,000	55.65
005051800KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH					
578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	31,177,000	35,833,500	0	35,833,500	114.94
	JUMLAH PENDAPATAN 005051800KD BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH	31,177,000	35,833,500	0	35,833,500	114.94
005051900KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN					
526712	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	2,190,000	3,306,500	0	3,306,500	150.98
526772	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	35,994,000	55,880,000	0	55,880,000	155.25
	JUMLAH PENDAPATAN 005051900KD BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN	38,184,000	59,186,500	0	59,186,500	155
005052000KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA					
578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	27,011,000	16,154,000	0	16,154,000	59.81
	JUMLAH PENDAPATAN 005052000KD BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA	27,011,000	16,154,000	0	16,154,000	59.81
005052100KD	BA(005) ES1(05) MALUKU					
539118	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	3,919,000	5,846,000	0	5,846,000	149.17
	JUMLAH PENDAPATAN 005052100KD BA(005) ES1(05) MALUKU	3,919,000	5,846,000	0	5,846,000	149.17
005052200KD	BA(005) ES1(05) BALI					
559862	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	16,605,000	23,277,000	0	23,277,000	140.18
	JUMLAH PENDAPATAN 005052200KD BA(005) ES1(05) BALI	16,605,000	23,277,000	0	23,277,000	140.18
005052300KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT					
526737	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	0	1,170,000	0	1,170,000	0
578872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	18,726,000	12,610,500	0	12,610,500	67.34

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 87
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005052300KD BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT	18,726,000	13,780,500	0	13,780,500	73.59
005052400KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR					
539122	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	11,785,000	8,516,500	0	8,516,500	72.27
	JUMLAH PENDAPATAN 005052400KD BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR	11,785,000	8,516,500	0	8,516,500	72.27
005052500KD	BA(005) ES1(05) PAPUA					
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	24,213,000	13,614,000	0	13,614,000	56.23
	JUMLAH PENDAPATAN 005052500KD BA(005) ES1(05) PAPUA	24,213,000	13,614,000	0	13,614,000	56.23
005052600KD	BA(005) ES1(05) BENGKULU					
578886	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	20,437,000	7,830,500	0	7,830,500	38.32
	JUMLAH PENDAPATAN 005052600KD BA(005) ES1(05) BENGKULU	20,437,000	7,830,500	0	7,830,500	38.32
005052900KD	BA(005) ES1(05) BANTEN					
690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	40,944,000	20,427,500	0	20,427,500	49.89
	JUMLAH PENDAPATAN 005052900KD BA(005) ES1(05) BANTEN	40,944,000	20,427,500	0	20,427,500	49.89
005053200KD	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG					
690197	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	12,382,000	18,082,500	0	18,082,500	146.04
	JUMLAH PENDAPATAN 005053200KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG	12,382,000	18,082,500	0	18,082,500	146.04
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	6,972,000	6,643,500	0	6,643,500	95.29
403430	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	8,985,000	4,152,000	0	4,152,000	46.21
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	15,957,000	10,795,500	0	10,795,500	67.65
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	806,268,000	918,815,350	0	918,815,350	113.96
06	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN**					
005060100KP	SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	0	367,729,952	478,400	367,251,552	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005060100KP SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG	0	367,729,952	478,400	367,251,552	
	JUMLAH PENDAPATAN 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	0	367,729,952	478,400	367,251,552	
07	**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG**					
005070100KP	BADAN URUSAN ADMINISTRASI					
663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	19,420,000	19,420,098	0	19,420,098	100
	JUMLAH PENDAPATAN 005070100KP BADAN URUSAN ADMINISTRASI	19,420,000	19,420,098	0	19,420,098	100
	JUMLAH PENDAPATAN 07 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	19,420,000	19,420,098	0	19,420,098	100
	JUMLAH PENDAPATAN	85,577,098,000	105,818,882,658	14,938,190	105,803,944,468	123.64

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	395,428,800	0	395,428,800	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	74,500,000	4,543,328,005	0	4,543,328,005	6098.43
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,576,800	0	1,576,800	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,486,643,000	9,471,495,352	6,969,772	9,464,525,580	111.52
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	228,465,805	0	228,465,805	0
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,700,000	1,700,000	0	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	2,432,435	0	2,432,435	0
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	45,000	0	45,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	46,742,494	0	46,742,494	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	36,252,226	0	36,252,226	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5,328,918,759	0	5,328,918,759	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	556,265,822	0	556,265,822	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	914,544,365	0	914,544,365	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,772,360,191	1,991,018	7,770,369,173	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	245,582,450	0	245,582,450	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	466,888	425,000	41,888	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8,561,143,000	29,545,605,392	11,085,790	29,534,519,602	345.11
02	KEPANITERAAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	93,355,750	0	93,355,750	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	96,000	0	0	0	0
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	11,400,000	11,800,000	0	11,800,000	103.51
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	144,080,000	176,080,000	0	176,080,000	122.21
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	98,852,500	0	98,852,500	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	481,620	0	481,620	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 KEPANITERAAN	155,576,000	380,569,870	0	380,569,870	244.62
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	167,869,000	148,592,500	0	148,592,500	88.52
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	254,270,000	93,880,000	0	93,880,000	36.92
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	922,990,000	1,141,550,000	0	1,141,550,000	123.68
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	4,873,978,000	6,553,125,000	0	6,553,125,000	134.45
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	13,329,894,000	13,851,883,791	0	13,851,883,791	103.92
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	241,380,640	0	241,380,640	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,321,500	0	13,321,500	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	19,422,693	0	19,422,693	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN	19,549,001,000	22,063,156,124	0	22,063,156,124	112.86
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	61,550,000	0	61,550,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	130,000	0	0	0	0
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	64,308,000	6,490,000	0	6,490,000	10.09
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,971,920,000	1,721,650,000	420,000	1,721,230,000	87.29
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	18,448,145,000	17,030,885,000	980,000	17,029,905,000	92.31
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	36,001,187,000	33,697,752,972	1,974,000	33,695,778,972	93.6
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	3,102	0	3,102	0
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	331,798	0	331,798	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,918,000	0	4,918,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	5,000	0	5,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN	56,485,690,000	52,523,585,872	3,374,000	52,520,211,872	92.99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	29,050,000	0	29,050,000	0
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000	0	10,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	22,070,000	52,960,000	0	52,960,000	239.96
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	201,530,000	190,950,000	0	190,950,000	94.75
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	582,668,000	618,317,350	0	618,317,350	106.12
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,528,000	0	27,528,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN	806,268,000	918,815,350	0	918,815,350	113.96
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	234,639,000	0	234,639,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	133,018,400	478,400	132,540,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	72,552	0	72,552	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 BADAN PENELITIAN DAN	0	367,729,952	478,400	367,251,552	
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	19,419,000	19,420,000	0	19,420,000	100.01
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000	98	0	98	9.8
	JUMLAH PENDAPATAN 07 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH	19,420,000	19,420,098	0	19,420,098	100
	JUMLAH PENDAPATAN	85,577,098,000	105,818,882,658	14,938,190	105,803,944,468	123.65

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,819,341,200,000	1,756,462,712,000	1,727,024,674,746	154,699,447	1,726,869,975,299	98.32	29,592,736,701
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	606,054,000	29,571,000	23,144,826	1,065,645	22,079,181	78.27	7,491,819
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	136,391,865,000	127,657,706,000	122,558,038,767	35,412,586	122,522,626,181	96.01	5,135,079,819
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,974,052,000	36,166,478,000	34,175,663,449	3,029,333	34,172,634,116	94.5	1,993,843,884
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	39,321,837,000	39,230,815,000	37,379,820,000	71,512,412	37,308,307,588	95.28	1,922,507,412
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,093,161,075,000	2,125,208,381,000	2,099,977,739,344	1,192,929,816	2,098,784,809,528	98.81	26,423,571,472
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	375,489,334,000	349,930,108,000	338,420,859,030	7,406,484	338,413,452,546	96.71	11,516,655,454
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85,164,873,000	86,709,767,000	83,337,977,920	3,991,150	83,333,986,770	96.11	3,375,780,230
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	145,800,000	0	0	0	0		0
511129	Belanja Uang Makan PNS	276,997,053,000	269,910,807,000	246,631,712,720	38,567,750	246,593,144,970	91.38	23,317,662,030
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	54,025,000	73,100,000	63,750,000	125,000	63,625,000	87.21	9,475,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	5,402,422,000	5,156,814,000	4,981,215,000	8,350,000	4,972,865,000	96.59	183,949,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	69,000,000	69,000,000	0	0	0	0	69,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,436,267,000	21,882,687,000	19,210,688,840	96,174,593	19,114,514,247	87.79	2,768,172,753
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	67,988,946,000	59,819,545,000	56,474,668,509	95,150,000	56,379,518,509	94.41	3,440,026,491
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	117,418,139,000	132,750,103,000	131,876,676,400	16,155,000	131,860,521,400	99.34	889,581,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,075,961,942,000	5,011,057,594,000	4,902,136,629,551	1,724,569,216	4,900,412,060,335	97.83	110,645,533,665
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri							
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	729,120,000	130,061,000	116,340,260	0	116,340,260	89.45	13,720,740
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	43,752,314,000	47,170,835,000	46,347,751,338	37,306,200	46,310,445,138	98.26	860,389,862
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	5,606,668,000	4,595,526,000	4,191,452,740	0	4,191,452,740	91.21	404,073,260
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	50,088,102,000	51,896,422,000	50,655,544,338	37,306,200	50,618,238,138	97.61	1,278,183,862
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2,804,550,000	2,890,230,000	2,889,810,000	1,288,800	2,888,521,200	99.99	1,708,800
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	42,000	42,000	38,980	34	38,946	92.81	3,054
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	262,948,000	275,590,000	275,121,000	128,880	274,992,120	99.83	597,880
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	11,844,000	17,220,000	17,220,000	0	17,220,000	100	0
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	47,065,746,000	50,444,814,000	50,414,813,000	77,129,300	50,337,683,700	99.94	107,130,300
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	11,763,302,000	12,656,256,000	12,646,243,692	0	12,646,243,692	99.92	10,012,308
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	100,954,000	110,880,000	110,802,600	0	110,802,600	99.93	77,400
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,515,000,000	4,515,000,000	4,515,000,000	0	4,515,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	66,524,386,000	70,910,032,000	70,869,049,272	78,547,014	70,790,502,258	99.94	119,529,742
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	350,000,000	350,000,000	300,775,200	0	300,775,200	85.94	49,224,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	350,000,000	350,000,000	300,775,200	0	300,775,200	85.94	49,224,800
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	6,820,682,000	11,340,459,000	11,076,965,404	2,858,800	11,074,106,604	97.68	266,352,396
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,463,000	1,720,000	212,719	2,221	210,498	12.37	1,509,502
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	595,866,000	701,334,000	594,278,960	285,880	593,993,080	84.74	107,340,920
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	245,899,000	241,499,000	155,083,794	114,352	154,969,442	64.22	86,529,558
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	985,066,000	1,704,686,000	1,635,342,000	350,000	1,634,992,000	95.93	69,694,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	595,438,000	706,639,000	579,252,610	289,680	578,962,930	81.97	127,676,070
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,541,626,000	2,266,541,000	1,946,677,000	527,100	1,946,149,900	85.89	320,391,100
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	40,320,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	10,826,360,000	16,967,978,000	15,992,912,487	4,428,033	15,988,484,454	94.25	979,493,546
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	956,547,000	744,821,000	682,027,000	0	682,027,000	91.57	62,794,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	24,120,000	18,588,000	18,461,000	0	18,461,000	99.32	127,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	980,667,000	763,409,000	700,488,000	0	700,488,000	91.76	62,921,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,889,430,871,000	2,588,118,733,000	2,503,414,830,324	596,629,928	2,502,818,200,396	96.73	85,300,532,604
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8,000,000,000	25,280,000,000	24,176,540,880	0	24,176,540,880	95.64	1,103,459,120
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,897,430,871,000	2,613,398,733,000	2,527,591,371,204	596,629,928	2,526,994,741,276	96.72	86,403,991,724
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	8,102,162,328,000	7,765,344,168,000	7,568,246,770,052	2,441,480,391	7,565,805,289,661	97.46	199,538,878,339
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	726,433,341,000	746,152,015,000	742,909,689,902	50,096,398	742,859,593,504	99.57	3,292,421,496
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,921,061,000	19,182,415,000	17,786,193,756	8,772,560	17,777,421,196	92.72	1,404,993,804
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,496,414,000	44,123,955,000	43,522,792,692	44,011,760	43,478,780,932	98.64	645,174,068
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	226,343,627,000	321,029,281,000	303,772,809,908	145,316,300	303,627,493,608	94.62	17,401,787,392
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,029,194,443,000	1,130,487,666,000	1,107,991,486,258	248,197,018	1,107,743,289,240	98.01	22,744,376,760
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	52,914,162,000	75,819,863,000	74,284,154,997	1,325,000	74,282,829,997	97.97	1,537,033,003
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	883,504,000	684,920,000	640,754,000	28,819	640,725,181	93.55	44,194,819
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,787,554,000	1,242,406,000	1,143,276,006	0	1,143,276,006	92.02	99,129,994
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	316,239,000	515,822,000	512,899,540	0	512,899,540	99.43	2,922,460
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	35,280,000	35,280,000	0	35,280,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	55,901,459,000	78,298,291,000	76,616,364,543	1,353,819	76,615,010,724	97.85	1,683,280,276
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	90,991,399,000	97,164,533,000	96,672,639,841	5,518,642	96,667,121,199	99.49	497,411,801
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	90,991,399,000	97,164,533,000	96,672,639,841	5,518,642	96,667,121,199	99.49	497,411,801
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	140,435,719,000	186,105,234,000	182,787,452,598	34,028,751	182,753,423,847	98.22	3,351,810,153
522112	Belanja Langganan Telepon	7,600,813,000	3,109,883,000	2,534,119,769	2,246,764	2,531,873,005	81.49	578,009,995
522113	Belanja Langganan Air	9,084,784,000	7,487,406,000	6,895,615,299	1,800,000	6,893,815,299	92.1	593,590,701
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	998,350,000	1,723,913,000	1,711,596,296	0	1,711,596,296	99.29	12,316,704
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	204,000	0	0	0	0		0
522131	Belanja Jasa Konsultan	37,554,473,000	38,517,439,000	38,440,882,135	432,351	38,440,449,784	99.8	76,989,216
522141	Belanja Sewa	306,526,996,000	307,117,696,000	300,796,211,689	171,183,000	300,625,028,689	97.94	6,492,667,311
522151	Belanja Jasa Profesi	13,813,043,000	27,920,814,000	27,586,267,348	4,550,000	27,581,717,348	98.8	339,096,652
522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	8,247,900,000	4,419,317,000	4,419,164,000	0	4,419,164,000	100	153,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	38,061,622,000	61,371,604,000	60,757,116,996	40,000	60,757,076,996	99	614,527,004
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	562,323,904,000	637,773,306,000	625,928,426,130	214,280,866	625,714,145,264	98.14	12,059,160,736
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,885,246,000	284,907,657,000	283,173,758,934	18,671,302	283,155,087,632	99.39	1,752,569,368
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	44,804,197,000	45,916,721,000	45,662,157,627	760,236	45,661,397,391	99.45	255,323,609
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,888,386,000	205,322,845,000	202,575,622,869	7,640,182	202,567,982,687	98.66	2,754,862,313
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10,306,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	490,588,135,000	536,147,223,000	531,411,539,430	27,071,720	531,384,467,710	99.12	4,762,755,290
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	264,268,424,000	331,156,881,000	310,869,607,280	989,220,477	309,880,386,803	93.87	21,276,494,197
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113,797,730,000	128,751,400,000	119,859,887,763	136,975,348	119,722,912,415	93.09	9,028,487,585
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,793,605,000	35,604,697,000	28,871,683,011	15,822,608	28,855,860,403	81.09	6,748,836,597
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48,088,541,000	53,504,792,000	49,899,058,699	416,840,739	49,482,217,960	93.26	4,022,574,040
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	465,948,300,000	549,017,770,000	509,500,236,753	1,558,859,172	507,941,377,581	92.8	41,076,392,419
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	9,133,487,000	10,962,848,000	10,865,949,547	14,501,952	10,851,447,595	99.12	111,400,405
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	637,726,000	186,466,000	95,955,891	0	95,955,891	51.46	90,510,109
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	9,771,213,000	11,149,314,000	10,961,905,438	14,501,952	10,947,403,486	98.32	201,910,514
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,704,718,853,000	3,040,038,103,000	2,959,082,598,393	2,069,783,189	2,957,012,815,204	97.34	83,025,287,796
53	BELANJA MODAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 3:53 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5311	Belanja Modal Tanah							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1,220,000,000	1,179,999,000	1,131,840,348	0	1,131,840,348	95.92	48,158,652
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	1,220,000,000	1,179,999,000	1,131,840,348	0	1,131,840,348	95.92	48,158,652
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,683,365,000	136,085,380,000	122,356,098,317	0	122,356,098,317	89.91	13,729,281,683
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	111,561,000	111,442,000	0	111,442,000	99.89	119,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	60,683,365,000	136,196,941,000	122,467,540,317	0	122,467,540,317	89.92	13,729,400,683
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	841,627,542,000	735,151,361,000	734,216,061,397	451,606,840	733,764,454,557	99.87	1,386,906,443
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	193,322,550,000	247,083,299,000	246,555,145,889	7,618,199	246,547,527,690	99.79	535,771,310
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,034,950,092,000	982,234,660,000	980,771,207,286	459,225,039	980,311,982,247	99.85	1,922,677,753
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	364,993,000	362,903,450	0	362,903,450	99.43	2,089,550
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	33,474,000	133,634,000	132,800,000	0	132,800,000	99.38	834,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	33,474,000	498,627,000	495,703,450	0	495,703,450	99.41	2,923,550
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,096,886,931,000	1,120,110,227,000	1,104,866,291,401	459,225,039	1,104,407,066,362	98.64	15,703,160,638
	JUMLAH BELANJA	11,903,768,112,000	11,925,492,498,000	11,632,195,659,846	4,970,488,619	11,627,225,171,227	97.54	298,267,326,773

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**							
04	**PERADILAN**							
BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**							
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	126,185,400,000	126,185,400,000	121,012,084,192	0	121,012,084,192	95.9	5,173,315,808
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	23,773,080,000	23,773,080,000	24,517,137,856	899,844,384	23,617,293,472	99.34	155,786,528
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	676,836,600,000	676,836,600,000	656,958,314,152	315,079,608	656,643,234,544	97.02	20,193,365,456
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	539,403,904,000	574,064,304,000	561,587,570,432	458,812,240	561,128,758,192	97.75	12,935,545,808
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	5,672,984,000	5,672,984,000	5,510,992,792	0	5,510,992,792	97.14	161,991,208
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	46,211,960,000	46,211,960,000	45,712,798,488	166,620,000	45,546,178,488	98.56	665,781,512
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	29,325,440,000	29,325,440,000	28,093,193,200	2,976,000	28,090,217,200	95.79	1,235,222,800
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
	JUMLAH PROGRAM Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	**1,447,427,368,000**	**1,482,087,768,000**	**1,443,410,091,112**	**1,843,332,232**	**1,441,566,758,880**	**97.39**	**40,521,009,120**
WA	**Program Dukungan Manajemen**							
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	576,491,874,000	842,435,314,000	826,833,961,226	1,585,701,390	825,248,259,836	97.96	17,187,054,164
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	94,064,334,000	108,064,334,000	104,046,094,530	27,720,000	104,018,374,530	96.26	4,045,959,470
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	47,682,046,244,000	46,268,931,702,000	44,373,969,277,106	12,180,284,760	44,361,788,992,346	95.88	1,907,142,709,654
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	197,588,790,000	195,480,978,000	177,336,126,086	1,042,767,964	176,293,358,122	90.18	19,187,619,878
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	83,504,428,000	83,504,428,000	81,587,868,978	507,857,938	81,080,011,040	97.1	2,424,416,960
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	278,340,132,000	331,540,132,000	316,820,336,350	0	316,820,336,350	95.56	14,719,795,650
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	2,954,078,750,000	3,081,514,604,000	3,078,766,218,808	0	3,078,766,218,808	99.91	2,748,385,192
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	14,924,420,000,000	14,999,052,656,000	14,866,445,697,502	6,429,150,546	14,860,016,546,956	99.07	139,036,109,044
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	519,154,356,000	1,521,472,834,000	1,468,909,247,316	4,956,868	1,468,904,290,448	96.54	52,568,543,552
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	235,065,180,000	197,194,620,000	194,071,953,124	76,478,388	193,995,474,736	98.38	3,199,145,264
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	1,056,872,250,000	1,246,399,378,000	1,209,195,834,952	5,232,612	1,209,190,602,340	97.01	37,208,775,660
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	471,263,212,000	532,525,322,000	488,669,805,036	0	488,669,805,036	91.76	43,855,516,964
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	350,306,796,000	357,953,806,000	355,368,187,580	82,614,000	355,285,573,580	99.25	2,668,232,420

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	I, II, III, IV							
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	881,877,472,000	874,230,462,000	809,970,573,090	56,626,710	809,913,946,380	92.64	64,316,515,620
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	1,377,269,495,000	1,443,636,054,000	1,438,395,203,021	688,776,277	1,437,706,426,744	99.59	5,929,627,256
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	346,892,525,000	373,675,148,000	363,208,619,697	144,629,576	363,063,990,121	97.16	10,611,157,879
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	350,617,617,000	399,703,339,000	359,222,905,006	4,731,035,274	354,491,869,732	88.69	45,211,469,268
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	135,996,735,000	132,741,651,000	129,916,149,167	16,181,746	129,899,967,421	97.86	2,841,683,579
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	37,898,252,000	38,649,716,000	38,534,537,545	1,199,850,792	37,334,686,753	96.6	1,315,029,247
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	19,142,340,000	19,282,340,000	19,365,877,132	94,869,124	19,271,008,008	99.94	11,331,992
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	21,090,783,000	21,090,783,000	21,130,900,378	40,180,000	21,090,720,378	100	62,622
6983	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	18,371,899,000	18,371,899,000	17,596,255,600	24,230,500	17,572,025,100	95.65	799,873,900
6984	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	6,326,572,000	7,946,162,000	7,939,646,239	2,275,000	7,937,371,239	99.89	8,790,761
6985	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	8,420,293,000	11,329,283,000	11,326,694,043	9,129,967	11,317,564,076	99.9	11,718,924
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	44,585,314,417,000	44,395,044,029,000	43,579,753,410,529	15,229,650,786	43,564,523,759,743	98.13	830,520,269,257
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	**117,212,414,746,00**	**117,501,770,974,000**	**114,338,381,380,04**	**44,180,200,218**	**114,294,201,179,82**	**97.31**	**3,207,569,794,177**
	JUMLAH SUBFUNGSI PERADILAN	**118,659,842,114,00**	**118,983,858,742,00**	**115,781,791,471,15**	**46,023,532,450**	**115,735,767,938,70**	**97.31**	**3,248,090,803,29**
	JUMLAH FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**118,659,842,114,00**	**118,983,858,742,00**	**115,781,791,471,15**	**46,023,532,450**	**115,735,767,938,70**	**97.31**	**3,248,090,803,29**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI							
005010100KD	BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA							
097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	47,923,437,000	45,638,275,000	44,975,218,559	187,665	44,975,030,894	98.55	663,244,106
097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	41,537,649,000	44,901,349,000	44,479,228,593	93,633	44,479,134,960	99.06	422,214,040
097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	25,712,664,000	25,193,982,000	24,781,755,064	28,588,165	24,753,166,899	98.25	440,815,101
097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	21,849,920,000	24,313,520,000	24,236,863,432	12,554,940	24,224,308,492	99.63	89,211,508
400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	24,723,211,000	24,973,211,000	24,613,527,360	4,100	24,613,523,260	98.56	359,687,740
400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	23,864,734,000	23,690,174,000	23,416,500,660	2,710	23,416,497,950	98.84	273,676,050
400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	11,535,392,000	10,700,692,000	10,602,758,654	19,039,464	10,583,719,190	98.91	116,972,810
400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	12,211,140,000	10,796,140,000	10,766,946,546	186,804	10,766,759,742	99.73	29,380,258
400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	10,015,632,000	9,983,132,000	9,882,734,980	1,782	9,882,733,198	98.99	100,398,802
400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	14,275,416,000	12,852,416,000	12,711,889,692	2,093	12,711,887,599	98.91	140,528,401
400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	15,823,404,000	13,073,404,000	13,050,492,361	352,219	13,050,140,142	99.82	23,263,858
401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	26,135,257,000	21,226,257,000	20,960,701,150	5,024,650	20,955,676,500	98.73	270,580,500
526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	15,818,091,000	15,101,391,000	14,472,285,500	2,791,630	14,469,493,870	95.82	631,897,130
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	14,232,636,000	16,722,636,000	16,252,784,090	2,694	16,252,781,396	97.19	469,854,604
663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	6,276,640,000	6,124,622,000	6,102,603,013	18,200,380	6,084,402,633	99.34	40,219,367
663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	10,959,300,000	8,712,282,000	8,575,231,387	9,560,492	8,565,670,895	98.32	146,611,105
663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	6,249,860,000	7,277,302,000	7,165,846,282	440,203	7,165,406,079	98.46	111,895,921
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA	329,144,383,000	321,280,785,000	317,047,367,323	97,033,624	316,950,333,699	98.68	4,330,451,301
005010100KP	SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG							
663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	3,746,835,518,000	3,698,950,937,000	3,552,009,303,241	1,096,023,718	3,550,913,279,523	96	148,037,657,477
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG	3,746,835,518,000	3,698,950,937,000	3,552,009,303,241	1,096,023,718	3,550,913,279,523	96.03	148,037,657,477
005010200KD	BA(005) ES1(01) JAWA BARAT							
097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	42,718,258,000	44,743,258,000	44,468,043,715	56,956,165	44,411,087,550	99.26	332,170,450
097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	29,313,749,000	32,060,449,000	31,892,928,892	188,788	31,892,740,104	99.48	167,708,896
097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	6,458,566,000	5,649,766,000	5,538,706,062	540,970	5,538,165,092	98.02	111,600,908
097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	9,203,038,000	9,648,251,000	9,517,692,466	1,464	9,517,691,002	98.65	130,559,998
097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	6,115,033,000	6,015,033,000	5,609,051,974	963	5,609,051,011	93.25	405,981,989
097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	4,811,428,000	5,695,017,000	5,682,157,999	1,238	5,682,156,761	99.77	12,860,239
097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	7,605,036,000	7,805,036,000	7,671,982,245	191,860	7,671,790,385	98.29	133,245,615
097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	19,903,882,000	23,366,021,000	23,196,288,220	248,313	23,196,039,907	99.27	169,981,093
097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	11,023,412,000	10,823,412,000	10,667,636,601	5,181,542	10,662,455,059	98.51	160,956,941
097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	6,591,837,000	6,850,837,000	6,731,069,270	1,627,477	6,729,441,793	98.23	121,395,207

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	11,256,801,000	12,520,201,000	12,359,630,680	732,179	12,358,898,501	98.71	161,302,499
097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	5,412,725,000	5,455,685,000	5,438,212,700	2,693,670	5,435,519,030	99.63	20,165,970
097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	6,303,872,000	6,481,472,000	6,273,721,736	1,218	6,273,720,518	96.79	207,751,482
097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	6,442,330,000	7,138,290,000	7,059,021,184	1,088	7,059,020,096	98.89	79,269,904
097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	6,409,163,000	6,881,443,000	6,817,467,775	1,423	6,817,466,352	99.07	63,976,648
097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	5,301,040,000	5,051,040,000	4,968,817,502	185,894	4,968,631,608	98.37	82,408,392
097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	6,121,969,000	5,287,969,000	5,111,909,793	789	5,111,909,004	96.67	176,059,996
308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	19,704,280,000	23,356,600,000	23,237,942,348	4,436,708	23,233,505,640	99.47	123,094,360
400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	5,674,768,000	5,524,768,000	5,142,890,423	660	5,142,889,763	93.09	381,878,237
400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	8,301,876,000	8,566,876,000	8,500,768,056	921,632	8,499,846,424	99.22	67,029,576
400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	13,535,276,000	13,645,655,000	13,512,759,913	325,945	13,512,433,968	99.02	133,221,032
400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	11,794,474,000	12,519,474,000	12,432,281,843	7,022,490	12,425,259,353	99.25	94,214,647
400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	8,555,974,000	7,575,974,000	7,506,678,962	2,110,229	7,504,568,733	99.06	71,405,267
400690	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	9,601,520,000	10,048,740,000	9,996,214,070	1,741	9,996,212,329	99.48	52,527,671
400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	9,202,204,000	7,802,204,000	7,463,848,085	5,353,578	7,458,494,507	95.59	343,709,493
400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	10,717,946,000	8,060,946,000	7,575,194,354	1,042,474	7,574,151,880	93.96	486,794,120
400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	7,441,067,000	7,306,067,000	7,064,544,589	3,431,854	7,061,112,735	96.65	244,954,265
400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	4,379,172,000	4,486,372,000	4,358,405,235	907	4,358,404,328	97.15	127,967,672
400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	6,497,403,000	7,147,403,000	6,988,392,322	658,564	6,987,733,758	97.77	159,669,242
400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	5,184,593,000	4,489,593,000	4,260,113,805	10,931	4,260,102,874	94.89	229,490,126
400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	12,537,940,000	12,939,940,000	11,569,669,928	14,304,646	11,555,365,282	89.3	1,384,574,718
400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	8,556,170,000	7,856,170,000	7,529,456,714	1,156,253	7,528,300,461	95.83	327,869,539
400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	40,033,188,000	13,577,088,000	13,189,007,328	576,438	13,188,430,890	97.14	388,657,110
400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	10,311,584,000	9,041,584,000	8,631,969,542	1,071,796	8,630,897,746	95.46	410,686,254
400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	9,739,457,000	6,890,977,000	6,634,670,181	847	6,634,669,334	96.28	256,307,666
400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	5,668,517,000	6,838,237,000	6,783,384,048	17,965,081	6,765,418,967	98.94	72,818,033
401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	17,848,110,000	23,945,399,000	23,877,021,803	92,771,314	23,784,250,489	99.33	161,148,511
401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	8,361,206,000	6,956,161,000	6,688,914,155	2,831,164	6,686,082,991	96.12	270,078,009
401957	PENGADILAN AGAMA SOREANG	8,513,475,000	9,138,475,000	8,953,839,789	1,670	8,953,838,119	97.98	184,636,881
401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	29,166,866,000	31,206,193,000	31,113,417,181	183,140,531	30,930,276,650	99.12	275,916,350
401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	28,412,372,000	29,547,372,000	29,510,161,343	4,841,405	29,505,319,938	99.86	42,052,062
402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	8,378,014,000	6,998,014,000	6,800,552,354	60,544,038	6,740,008,316	96.31	258,005,684
402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	5,329,157,000	5,815,157,000	5,772,190,701	1,339,574	5,770,851,127	99.24	44,305,873
403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	11,248,920,000	10,258,920,000	10,089,377,955	1,524	10,089,376,431	98.35	169,543,569

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	10,595,154,000	11,477,457,000	11,378,070,813	1,642	11,378,069,171	99.13	99,387,829
531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	11,186,414,000	12,561,414,000	12,299,516,731	912,181	12,298,604,550	97.91	262,809,450
604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	13,825,356,000	10,825,356,000	10,555,031,730	2,083	10,555,029,647	97.5	270,326,353
613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	15,663,776,000	15,196,300,000	14,880,963,076	4,957,252	14,876,005,824	97.89	320,294,176
614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	7,055,611,000	7,571,611,000	7,184,642,618	546,346	7,184,096,272	94.88	387,514,728
652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	11,447,935,000	10,097,935,000	9,832,628,026	671,852	9,831,956,174	97.37	265,978,826
663271	PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG	5,955,997,000	4,921,779,000	4,649,901,941	164	4,649,901,777	94.48	271,877,223
682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	4,858,928,000	5,821,088,000	5,518,215,784	492,897	5,517,722,887	94.79	303,365,113
682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	3,997,449,000	4,397,449,000	4,361,145,331	21,580,630	4,339,564,701	98.68	57,884,299
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) JAWA BARAT	600,274,288,000	585,883,928,000	574,848,121,891	503,584,082	574,344,537,809	98.12	11,539,390,191
005010300KD	BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH							
097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	42,525,149,000	48,974,451,000	48,727,509,027	48,358,245	48,679,150,782	99.4	295,300,218
097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	30,874,158,000	32,758,838,000	32,590,333,011	189,538	32,590,143,473	99.49	168,694,527
097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	8,314,123,000	8,617,123,000	8,574,217,329	186,460	8,574,030,869	99.5	43,092,131
097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	5,270,032,000	5,424,032,000	5,366,232,961	1,058	5,366,231,903	98.93	57,800,097
097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	6,635,374,000	6,620,934,000	6,288,229,629	4,483,950	6,283,745,679	94.91	337,188,321
097762	PENGADILAN NEGERI PATI	8,527,533,000	9,396,933,000	9,322,172,561	186,010	9,321,986,551	99.2	74,946,449
097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	5,330,985,000	5,999,025,000	5,882,742,532	186,160	5,882,556,372	98.06	116,468,628
097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	5,258,023,000	6,665,103,000	6,607,217,996	185,996	6,607,032,000	99.13	58,071,000
097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	5,598,172,000	5,758,172,000	5,658,602,780	7,959,743	5,650,643,037	98.13	107,528,963
097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	4,776,106,000	5,461,106,000	5,398,988,266	370,885	5,398,617,381	98.86	62,488,619
097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	5,295,595,000	5,923,995,000	5,756,552,792	2,475,122	5,754,077,670	97.13	169,917,330
097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	5,532,876,000	5,732,876,000	5,706,793,620	1,770	5,706,791,850	99.55	26,084,150
097830	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	6,702,304,000	7,269,232,000	7,201,282,125	1,013,920	7,200,268,205	99.05	68,963,795
097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	5,055,319,000	5,625,318,000	5,533,750,432	1,586	5,533,748,846	98.37	91,569,154
097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	5,333,143,000	5,512,743,000	5,334,016,114	844,834	5,333,171,280	96.74	179,571,720
097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	3,974,610,000	4,119,590,000	4,049,042,918	1,884,154	4,047,158,764	98.24	72,431,236
097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	4,522,624,000	4,882,875,000	4,174,290,919	185,868	4,174,105,051	85.48	708,769,949
097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	6,422,793,000	6,478,193,000	6,271,010,552	1,185	6,271,009,367	96.8	207,183,633
097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	6,012,475,000	6,413,475,000	6,396,352,041	41,019	6,396,311,022	99.73	17,163,978
097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	5,584,786,000	6,034,106,000	5,914,409,311	1,271,902	5,913,137,409	98	120,968,591
097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	4,859,778,000	4,949,778,000	4,859,213,320	777	4,859,212,543	98.17	90,565,457
097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	4,839,297,000	5,243,197,000	5,141,660,020	819	5,141,659,201	98.06	101,537,799
097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	21,660,446,000	20,006,446,000	19,670,540,581	483,422	19,670,057,159	98.32	336,388,841

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	9,124,898,000	11,710,258,000	11,672,194,427	187,366	11,672,007,061	99.67	38,250,939
097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	5,437,425,000	5,782,425,000	5,729,213,710	185,742	5,729,027,968	99.08	53,397,032
097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	10,833,702,000	11,171,702,000	11,093,493,282	1,942	11,093,491,340	99.3	78,210,660
097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	6,021,416,000	6,076,416,000	5,944,879,354	1,323	5,944,878,031	97.84	131,537,969
097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	5,431,204,000	6,085,204,000	6,032,042,506	249,886	6,031,792,620	99.12	53,411,380
097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	13,159,141,000	12,615,201,000	11,912,075,218	9,229,917	11,902,845,301	94.35	712,355,699
098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	7,257,875,000	7,102,875,000	6,909,696,886	1,908,296	6,907,788,590	97.25	195,086,410
098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	8,766,032,000	10,100,632,000	10,035,553,319	1,581	10,035,551,738	99.36	65,080,262
098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	4,804,862,000	4,279,862,000	4,162,097,763	370,610	4,161,727,153	97.24	118,134,847
098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	5,051,406,000	5,797,406,000	5,762,885,006	371,625	5,762,513,381	99.4	34,892,619
098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	4,659,704,000	4,659,704,000	4,576,336,524	442	4,576,336,082	98.21	83,367,918
400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	4,638,227,000	5,094,127,000	5,019,892,195	185,661	5,019,706,534	98.54	74,420,466
400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	5,715,032,000	5,835,332,000	5,795,224,342	1,400,433	5,793,823,909	99.29	41,508,091
400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	5,226,337,000	4,830,377,000	4,812,413,879	3,724,528	4,808,689,351	99.55	21,687,649
400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	7,870,222,000	6,780,222,000	6,548,443,258	2,350,662	6,546,092,596	96.55	234,129,404
400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	3,529,057,000	3,594,057,000	3,586,031,626	1,012	3,586,030,614	99.78	8,026,386
400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	9,396,989,000	8,183,989,000	8,177,974,326	1,244	8,177,973,082	99.93	6,015,918
400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	4,158,223,000	4,342,223,000	4,293,313,658	304	4,293,313,354	98.87	48,909,646
400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	9,117,358,000	9,224,358,000	9,220,616,957	373,217	9,220,243,740	99.96	4,114,260
400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	4,167,526,000	3,892,766,000	3,817,407,228	180,552	3,817,226,676	98.06	75,539,324
400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	9,029,891,000	7,699,891,000	7,678,800,335	1,428	7,678,798,907	99.73	21,092,093
400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	4,542,294,000	3,942,294,000	3,846,324,032	656	3,846,323,376	97.57	95,970,624
400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	5,461,952,000	9,841,952,000	9,688,312,835	1,377	9,688,311,458	98.44	153,640,542
400967	PENGADILAN AGAMA PATI	11,160,313,000	8,520,280,000	8,501,059,472	1,382	8,501,058,090	99.77	19,221,910
400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	4,290,055,000	4,903,055,000	4,886,026,761	371,016	4,885,655,745	99.65	17,399,255
400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	4,860,619,000	7,258,619,000	7,242,297,614	1,731	7,242,295,883	99.78	16,323,117
400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	4,004,716,000	3,787,716,000	3,739,418,202	41,462	3,739,376,740	98.72	48,339,260
401002	PENGADILAN AGAMA BLORA	4,126,912,000	4,392,912,000	4,383,226,732	442,727	4,382,784,005	99.77	10,127,995
401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	2,996,960,000	3,433,760,000	3,395,301,907	1,005,759	3,394,296,148	98.85	39,463,852
401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	19,099,802,000	11,940,514,000	11,899,175,241	675	11,899,174,566	99.65	41,339,434
401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	6,956,032,000	6,356,032,000	6,054,776,658	1,544	6,054,775,114	95.26	301,256,886
401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	4,668,925,000	4,618,925,000	4,565,959,309	821	4,565,958,488	98.85	52,966,512
401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	8,354,118,000	6,695,318,000	6,578,078,848	325,352	6,577,753,496	98.24	117,564,504
401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	8,013,427,000	8,048,427,000	8,015,077,328	361,467	8,014,715,861	99.58	33,711,139

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	4,720,721,000	4,084,841,000	4,015,216,487	513,890	4,014,702,597	98.28	70,138,403
401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	13,258,431,000	10,858,431,000	10,162,879,879	362,607	10,162,517,272	93.59	695,913,728
401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	7,062,354,000	6,202,354,000	6,185,982,425	186,094	6,185,796,331	99.73	16,557,669
401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	5,998,780,000	6,475,580,000	6,393,997,138	1,091	6,393,996,047	98.74	81,583,953
401121	PENGADILAN AGAMA KLATEN	4,812,641,000	4,827,541,000	4,811,009,818	992	4,811,008,826	99.66	16,532,174
401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	7,505,305,000	8,244,305,000	8,216,583,538	733,660	8,215,849,878	99.65	28,455,122
401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	8,636,961,000	6,605,961,000	6,523,973,086	366,298	6,523,606,788	98.75	82,354,212
401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	4,450,824,000	4,380,824,000	4,279,306,142	6,970,488	4,272,335,654	97.52	108,488,346
401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	3,812,160,000	4,727,760,000	4,698,131,479	1,405	4,698,130,074	99.37	29,629,926
401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	4,176,335,000	4,246,235,000	4,228,168,890	551,028	4,227,617,862	99.56	18,617,138
401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	6,536,198,000	6,195,398,000	6,164,450,979	1,082	6,164,449,897	99.5	30,948,103
402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	4,294,615,000	4,644,615,000	4,575,137,824	913	4,575,136,911	98.5	69,478,089
402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	21,026,137,000	25,943,137,000	25,306,528,375	3,445	25,306,524,930	97.55	636,612,070
403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	18,923,933,000	19,410,633,000	19,372,128,540	1,204,031	19,370,924,509	99.8	39,708,491
403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	7,270,764,000	7,470,764,000	7,371,389,298	16,160,446	7,355,228,852	98.45	115,535,148
531830	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	10,475,013,000	12,951,653,000	12,500,769,816	3,923,247	12,496,846,569	96.49	454,806,431
614710	PENGADILAN AGAMA KAJEN	4,772,691,000	4,867,691,000	4,832,258,867	18,400,752	4,813,858,115	98.89	53,832,885
663288	PENGADILAN MILITER II - 10 DI SEMARANG	3,824,300,000	3,917,282,000	3,810,467,868	0	3,810,467,868	97.27	106,814,132
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH	582,396,516,000	598,521,377,000	589,449,162,024	142,979,632	589,306,182,392	98.48	9,215,194,608
005010400KD	BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	16,632,005,000	17,448,115,000	17,214,560,971	609,106	17,213,951,865	98.66	234,163,135
098061	PENGADILAN NEGERI WATES	6,717,683,000	6,964,683,000	6,934,981,245	2,036,942	6,932,944,303	99.54	31,738,697
098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	3,521,859,000	4,921,859,000	4,856,551,030	740,482	4,855,810,548	98.66	66,048,452
098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	15,536,251,000	13,636,251,000	13,431,182,989	1,961	13,431,181,028	98.5	205,069,972
400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	7,273,062,000	7,399,217,000	7,335,234,808	376,889	7,334,857,919	99.13	64,359,081
400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	28,484,233,000	37,234,233,000	37,093,317,333	857,218	37,092,460,115	99.62	141,772,885
401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	9,660,808,000	10,255,808,000	10,162,591,055	383,933	10,162,207,122	99.09	93,600,878
401200	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	11,460,054,000	12,030,054,000	12,001,938,883	6,747,701	11,995,191,182	99.71	34,862,818
401219	PENGADILAN AGAMA WATES	4,463,203,000	4,381,928,000	4,324,399,165	835	4,324,398,330	98.69	57,529,670
401225	PENGADILAN AGAMA BANTUL	6,311,448,000	7,021,448,000	6,920,416,725	181,653	6,920,235,072	98.56	101,212,928
401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	5,089,229,000	4,123,809,000	3,987,826,482	370,995	3,987,455,487	96.69	136,353,513
547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	16,869,853,000	13,087,053,000	12,658,201,039	1,740	12,658,199,299	96.72	428,853,701
578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	6,823,370,000	7,403,091,000	7,307,518,073	1,674	7,307,516,399	98.71	95,574,601
663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	3,402,841,000	4,273,263,000	4,123,511,360	370,166	4,123,141,194	96.49	150,121,806

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA	142,245,899,000	150,180,812,000	148,352,231,158	12,681,295	148,339,549,863	98.78	1,841,262,137
005010500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya							
098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	49,203,634,000	47,964,634,000	47,752,100,995	8,681,231	47,743,419,764	99.54	221,214,236
098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	36,169,653,000	35,229,653,000	34,923,483,405	4,815,658	34,918,667,747	99.12	310,985,253
098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	6,492,668,000	6,402,668,000	6,266,488,480	188,644	6,266,299,836	97.87	136,368,164
098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	6,325,336,000	6,632,700,000	6,193,492,519	973	6,193,491,546	93.38	439,208,454
098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	6,275,589,000	6,275,589,000	6,067,152,737	1,228	6,067,151,509	96.68	208,437,491
098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	12,118,206,000	12,478,206,000	12,145,344,927	2,006	12,145,342,921	97.33	332,863,079
098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	21,515,771,000	19,598,491,000	19,131,890,672	1,353,971	19,130,536,701	97.61	467,954,299
098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	7,840,262,000	8,860,262,000	8,769,001,998	340,596	8,768,661,402	98.97	91,600,598
098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	5,834,982,000	6,638,982,000	6,611,887,815	902	6,611,886,913	99.59	27,095,087
098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	5,172,698,000	5,552,698,000	5,497,249,376	325,807	5,496,923,569	99	55,774,431
098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	8,936,510,000	8,736,510,000	8,461,367,452	1,959,518	8,459,407,934	96.83	277,102,066
098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	8,482,039,000	8,082,039,000	7,796,215,701	808,499	7,795,407,202	96.45	286,631,798
098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	5,604,987,000	5,548,719,000	5,518,058,270	1,825,894	5,516,232,376	99.41	32,486,624
098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	6,878,090,000	6,428,090,000	6,334,157,247	1,129,803	6,333,027,444	98.52	95,062,556
098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	6,069,107,000	6,596,385,000	6,524,816,116	2,765	6,524,813,351	98.91	71,571,649
098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	7,455,150,000	7,808,150,000	7,711,480,690	663,907	7,710,816,783	98.75	97,333,217
098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	4,593,087,000	4,793,087,000	4,697,279,654	1,039	4,697,278,615	98	95,808,385
098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	7,438,657,000	7,438,657,000	7,316,468,274	1,030,280	7,315,437,994	98.34	123,219,006
098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	11,785,213,000	11,475,213,000	11,267,429,119	2,563	11,267,426,556	98.19	207,786,444
098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	4,923,996,000	4,723,996,000	4,459,585,891	590	4,459,585,301	94.4	264,410,699
098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	3,618,329,000	4,197,673,000	4,163,001,873	624,306	4,162,377,567	99.16	35,295,433
098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	4,926,926,000	5,410,226,000	5,364,046,909	36,800,830	5,327,246,079	98.47	82,979,921
098324	PENGADILAN NEGERI BANGIL	7,548,697,000	6,628,697,000	6,555,883,891	859	6,555,883,032	98.9	72,813,968
098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	5,455,235,000	5,943,235,000	5,867,536,504	546,424	5,866,990,080	98.72	76,244,920
098345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	6,893,190,000	6,450,690,000	6,387,398,501	60,600,926	6,326,797,575	98.08	123,892,425
098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	5,896,499,000	5,796,499,000	5,730,347,870	3,811,043	5,726,536,827	98.79	69,962,173
098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	4,066,935,000	3,996,935,000	3,855,536,184	692	3,855,535,492	96.46	141,399,508
098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	4,965,132,000	5,130,582,000	4,930,343,857	371,150	4,929,972,707	96.09	200,609,293
098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	4,830,636,000	4,977,996,000	4,891,708,174	87,410	4,891,620,764	98.26	86,375,236
098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	7,942,608,000	7,922,608,000	7,338,032,508	3,886,321	7,334,146,187	92.57	588,461,813
098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	6,683,007,000	6,617,006,000	6,375,006,541	645,502	6,374,361,039	96.33	242,644,961
098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	4,853,703,000	4,903,703,000	4,763,532,294	657	4,763,531,637	97.14	140,171,363

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	5,115,092,000	5,178,899,000	4,876,379,584	519	4,876,379,065	94.16	302,519,935
308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	24,987,245,000	28,630,629,000	28,611,931,944	16,511,315	28,595,420,629	99.88	35,208,371
400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	7,893,636,000	8,408,636,000	8,366,517,420	1,666,570	8,364,850,850	99.48	43,785,150
400596	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	5,008,790,000	5,233,090,000	4,796,430,577	6,068,582	4,790,361,995	91.54	442,728,005
401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	14,116,494,000	13,468,808,000	13,386,100,219	3,816,526	13,382,283,693	99.36	86,524,307
401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	6,545,974,000	6,843,054,000	6,742,139,481	1,179	6,742,138,302	98.53	100,915,698
401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	12,576,042,000	9,841,404,000	9,549,254,609	15,742,461	9,533,512,148	96.87	307,891,852
401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	6,351,525,000	7,635,615,000	7,593,044,034	38,180,703	7,554,863,331	98.94	80,751,669
401287	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	2,811,193,000	3,054,683,000	2,944,996,663	931	2,944,995,732	96.41	109,687,268
401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	5,465,062,000	7,846,062,000	7,812,373,184	900,851	7,811,472,333	99.56	34,589,667
401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	9,135,753,000	7,242,858,000	7,208,719,108	841,701	7,207,877,407	99.52	34,980,593
401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	10,193,117,000	8,408,117,000	8,169,277,032	801,164	8,168,475,868	97.15	239,641,132
401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	13,011,706,000	11,098,206,000	10,882,475,313	12,891,110	10,869,584,203	97.94	228,621,797
401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	4,854,020,000	5,196,435,000	5,173,409,725	181,148	5,173,228,577	99.55	23,206,423
401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	4,946,491,000	5,389,491,000	5,378,239,029	371,553	5,377,867,476	99.78	11,623,524
401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	10,754,186,000	9,396,686,000	9,321,826,449	1,164	9,321,825,285	99.2	74,860,715
401375	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	10,887,383,000	10,072,873,000	9,873,803,186	186,565	9,873,616,621	98.02	199,256,379
401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	8,509,856,000	8,101,021,000	8,035,427,109	361,492	8,035,065,617	99.19	65,955,383
401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	4,950,066,000	5,182,066,000	5,176,190,342	1,040	5,176,189,302	99.89	5,876,698
401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	9,901,503,000	9,821,503,000	9,610,343,949	1,908	9,610,342,041	97.85	211,160,959
401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	5,750,352,000	5,498,009,000	5,483,555,807	1,112,264	5,482,443,543	99.72	15,565,457
401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	10,621,241,000	8,648,721,000	8,600,315,087	10,172,562	8,590,142,525	99.32	58,578,475
401432	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	5,840,044,000	6,292,844,000	6,277,463,908	3,314,972	6,274,148,936	99.7	18,695,064
401441	PENGADILAN AGAMA BANGIL	4,707,953,000	5,928,813,000	5,917,126,331	901,144	5,916,225,187	99.79	12,587,813
401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	3,819,887,000	3,881,007,000	3,857,170,778	1,461	3,857,169,317	99.39	23,837,683
401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	5,530,460,000	5,928,460,000	5,888,808,898	1,691	5,888,807,207	99.33	39,652,793
401472	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	7,592,337,000	7,152,337,000	7,035,450,513	721,650	7,034,728,863	98.36	117,608,137
401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	3,708,705,000	4,351,785,000	4,308,632,245	6,974,165	4,301,658,080	98.85	50,126,920
401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	4,193,327,000	4,288,327,000	4,222,387,252	2,000,594	4,220,386,658	98.42	67,940,342
401508	PENGADILAN AGAMA NGAWI	5,148,319,000	5,723,309,000	5,493,467,629	2,114,498	5,491,353,131	95.95	231,955,869
401514	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	7,471,693,000	7,165,753,000	6,977,481,657	1,045	6,977,480,612	97.37	188,272,388
401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	4,476,672,000	4,600,672,000	4,585,877,182	771	4,585,876,411	99.68	14,795,589
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	5,306,451,000	6,018,047,000	5,865,303,548	1,105	5,865,302,443	97.46	152,744,557
401545	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	5,384,415,000	5,202,535,000	5,065,222,465	684	5,065,221,781	97.36	137,313,219

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	4,127,078,000	4,387,078,000	4,306,381,893	850	4,306,381,043	98.16	80,696,957
401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	5,231,288,000	5,687,268,000	5,651,046,100	1,052	5,651,045,048	99.36	36,222,952
401576	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	3,277,210,000	3,153,450,000	3,111,529,230	2,849,675	3,108,679,555	98.58	44,770,445
403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	4,892,701,000	7,696,859,000	7,563,776,356	4,213,831	7,559,562,525	98.22	137,296,475
403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	4,511,079,000	4,320,863,000	4,204,628,491	1,180	4,204,627,311	97.31	116,235,689
450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	29,506,243,000	15,748,079,000	15,623,502,454	558,364	15,622,944,090	99.21	125,134,910
526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	12,186,507,000	12,536,507,000	12,501,070,023	1,734	12,501,068,289	99.72	35,438,711
548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	16,944,833,000	14,644,833,000	14,008,222,756	239,925	14,007,982,831	95.65	636,850,169
604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	10,318,910,000	9,703,405,000	9,676,309,344	1,420	9,676,307,924	99.72	27,097,076
626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	8,927,902,000	7,894,902,000	7,515,027,572	1,192	7,515,026,380	95.19	379,875,620
663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	10,412,490,000	10,245,472,000	9,921,995,031	11,584,090	9,910,410,941	96.73	335,061,059
663314	PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA	6,150,453,000	4,869,715,000	4,690,625,628	799	4,690,624,829	96.32	179,090,171
663321	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	3,508,470,000	3,053,887,000	2,992,161,958	406	2,992,161,552	97.98	61,725,448
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Surabaya	674,358,686,000	655,913,652,000	644,520,745,537	275,813,600	644,244,931,937	98.26	11,668,720,063
005010600KD	BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	64,224,274,000	59,546,773,000	59,466,963,891	5,788,473	59,461,175,418	99.86	85,597,582
098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	56,451,620,000	57,128,313,000	56,894,483,062	2,401,974	56,892,081,088	99.59	236,231,912
098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	4,129,278,000	3,649,278,000	3,582,530,644	730	3,582,529,914	98.17	66,748,086
098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	4,753,109,000	5,038,316,000	4,951,963,599	1,920,505	4,950,043,094	98.25	88,272,906
098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	4,815,934,000	4,519,888,000	4,497,120,522	544	4,497,119,978	99.5	22,768,022
098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	6,312,628,000	5,693,930,000	5,618,009,725	381,033	5,617,628,692	98.66	76,301,308
098497	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	5,489,859,000	4,545,050,000	4,464,989,161	924	4,464,988,237	98.24	80,061,763
098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	4,082,605,000	3,968,805,000	3,867,703,119	1,110,975	3,866,592,144	97.42	102,212,856
098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	4,222,936,000	4,271,936,000	4,216,364,610	864	4,216,363,746	98.7	55,572,254
098523	PENGADILAN NEGERI IDI	4,373,236,000	3,604,208,000	3,591,325,420	1,242,505	3,590,082,915	99.61	14,125,085
098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	4,553,779,000	4,508,779,000	4,440,644,062	841,682	4,439,802,380	98.47	68,976,620
098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	3,701,479,000	3,351,479,000	3,254,135,306	801	3,254,134,505	97.1	97,344,495
098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	4,635,808,000	4,485,808,000	4,288,874,273	470	4,288,873,803	95.61	196,934,197
098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	4,122,491,000	3,822,491,000	3,779,507,303	404	3,779,506,899	98.88	42,984,101
098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	3,464,306,000	3,264,306,000	3,111,066,588	769	3,111,065,819	95.31	153,240,181
098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	3,909,153,000	3,866,153,000	3,712,290,065	381	3,712,289,684	96.02	153,863,316
098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	3,813,790,000	3,516,621,000	3,480,438,551	456	3,480,438,095	98.97	36,182,905
098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	3,607,107,000	3,690,290,000	3,610,726,677	370,697	3,610,355,980	97.83	79,934,020
400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	4,758,496,000	4,957,106,000	4,923,059,772	866	4,923,058,906	99.31	34,047,094

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	16,677,510,000	20,314,036,000	20,150,477,755	742,653	20,149,735,102	99.19	164,300,898
401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	13,500,100,000	14,213,101,000	13,995,913,993	5,345,863	13,990,568,130	98.43	222,532,870
401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	2,885,999,000	3,522,133,000	3,497,074,671	495	3,497,074,176	99.29	25,058,824
401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	4,541,816,000	4,416,316,000	4,236,813,488	869	4,236,812,619	95.94	179,503,381
401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	3,814,926,000	3,188,366,000	3,143,010,977	490,427	3,142,520,550	98.56	45,845,450
401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	5,208,011,000	4,219,584,000	4,154,621,438	378	4,154,621,060	98.46	64,962,940
401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	4,258,662,000	4,270,302,000	4,192,422,953	185,654	4,192,237,299	98.17	78,064,701
401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	4,344,819,000	3,720,803,000	3,709,398,995	976	3,709,398,019	99.69	11,404,981
401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	3,684,472,000	3,756,115,000	3,712,173,038	312	3,712,172,726	98.83	43,942,274
401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	2,979,386,000	3,301,992,000	3,188,450,222	354	3,188,449,868	96.56	113,542,132
401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	3,381,906,000	3,217,562,000	3,207,113,502	635	3,207,112,867	99.68	10,449,133
401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	4,191,860,000	4,502,219,000	4,301,411,250	675,389	4,300,735,861	95.52	201,483,139
401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	3,194,042,000	3,194,042,000	3,110,920,922	274	3,110,920,648	97.4	83,121,352
401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	3,393,444,000	3,093,444,000	2,998,243,671	400	2,998,243,271	96.92	95,200,729
401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	3,115,915,000	2,915,915,000	2,844,396,900	1,480,100	2,842,916,800	97.5	72,998,200
401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	3,244,631,000	3,244,631,000	3,189,530,119	274	3,189,529,845	98.3	55,101,155
401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	2,719,976,000	2,874,752,000	2,673,219,418	533	2,673,218,885	92.99	201,533,115
401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	2,896,929,000	2,691,098,000	2,683,610,114	611,609	2,682,998,505	99.7	8,099,495
401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	3,592,148,000	3,128,648,000	3,119,587,607	185,398	3,119,402,209	99.7	9,245,791
401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	3,620,716,000	6,201,274,000	6,139,338,633	1,298	6,139,337,335	99	61,936,665
401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	4,093,120,000	4,409,430,000	4,332,144,490	579	4,332,143,911	98.25	77,286,089
401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	3,669,478,000	3,138,578,000	3,045,960,384	590	3,045,959,794	97.05	92,618,206
401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	2,596,864,000	5,666,230,000	5,530,356,852	185,298	5,530,171,554	97.6	136,058,446
401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	2,811,042,000	2,805,642,000	2,786,254,506	910	2,786,253,596	99.31	19,388,404
401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	3,010,763,000	5,540,621,000	5,526,814,439	308	5,526,814,131	99.75	13,806,869
402607	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	3,906,092,000	3,408,092,000	3,405,726,901	980,278	3,404,746,623	99.9	3,345,377
578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	6,975,527,000	6,188,527,000	6,049,260,840	60,703	6,049,200,137	97.75	139,326,863
663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	3,865,888,000	4,603,570,000	4,560,033,649	248	4,560,033,401	99.05	43,536,599
673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	3,553,966,000	3,603,966,000	3,485,614,728	654	3,485,614,074	96.72	118,351,926
682228	MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG	3,076,484,000	2,980,284,000	2,896,449,366	326	2,896,449,040	97.19	83,834,960
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	328,228,380,000	329,760,803,000	325,618,542,171	25,018,838	325,593,523,333	98.74	4,167,279,667
005010700KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA							
098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	39,125,446,000	39,704,446,000	39,205,026,916	372,933	39,204,653,983	98.74	499,792,017
098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	31,680,828,000	32,887,588,000	32,566,573,810	2,622	32,566,571,188	99.02	321,016,812

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	6,671,260,000	6,446,260,000	6,384,783,648	925,847	6,383,857,801	99.03	62,402,199
098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	4,348,586,000	4,341,445,000	4,272,938,645	1,257	4,272,937,388	98.42	68,507,612
098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	4,105,380,000	4,366,880,000	4,358,497,860	474	4,358,497,386	99.81	8,382,614
098661	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	6,685,011,000	6,385,011,000	6,022,239,883	950	6,022,238,933	94.32	362,772,067
098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	5,491,613,000	5,541,613,000	5,461,606,332	371,004	5,461,235,328	98.55	80,377,672
098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	5,787,587,000	5,863,587,000	5,259,420,668	779	5,259,419,889	89.7	604,167,111
098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	5,399,203,000	5,439,203,000	5,348,003,270	185,749	5,347,817,521	98.32	91,385,479
098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	6,473,639,000	6,029,459,000	5,974,069,118	878	5,974,068,240	99.08	55,390,760
098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	4,816,625,000	4,887,228,000	4,793,833,837	1,052	4,793,832,785	98.09	93,395,215
098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	5,900,046,000	5,910,046,000	5,822,290,662	953,199	5,821,337,463	98.5	88,708,537
098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	5,056,997,000	5,556,997,000	5,374,573,221	3,600,735	5,370,972,486	96.65	186,024,514
108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	6,634,477,000	6,199,477,000	6,081,527,908	186,303	6,081,341,605	98.09	118,135,395
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5,399,187,000	5,340,185,000	5,292,776,861	894	5,292,775,967	99.11	47,409,033
400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	5,214,073,000	5,369,073,000	5,316,383,884	186,376	5,316,197,508	99.02	52,875,492
400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	15,480,433,000	15,675,433,000	15,545,883,855	2,037,501	15,543,846,354	99.16	131,586,646
401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	15,947,784,000	16,380,284,000	16,166,701,077	11,278,588	16,155,422,489	98.63	224,861,511
401783	PENGADILAN AGAMA BINJAI	3,373,866,000	3,385,946,000	3,296,850,280	482	3,296,849,798	97.37	89,096,202
401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	2,454,681,000	2,603,321,000	2,589,773,635	738	2,589,772,897	99.48	13,548,103
401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	10,486,444,000	10,670,324,000	10,391,274,536	2,270,542	10,389,003,994	97.36	281,320,006
401812	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	3,452,120,000	4,127,920,000	4,074,135,532	546	4,074,134,986	98.7	53,785,014
401828	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	2,688,273,000	2,560,273,000	2,533,334,110	490,476	2,532,843,634	98.93	27,429,366
401834	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	3,136,960,000	3,238,960,000	3,219,930,815	185,596	3,219,745,219	99.41	19,214,781
401840	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	2,034,903,000	2,374,743,000	2,357,169,737	300	2,357,169,437	99.26	17,573,563
401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	2,986,379,000	2,836,379,000	2,790,390,016	522,639	2,789,867,377	98.36	46,511,623
401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	2,529,399,000	2,529,399,000	2,411,596,474	2,292,368	2,409,304,106	95.25	120,094,894
401871	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	2,556,005,000	2,606,005,000	2,562,319,486	356,832	2,561,962,654	98.31	44,042,346
401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	2,454,734,000	2,452,934,000	2,164,890,078	482	2,164,889,596	88.26	288,044,404
401896	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	2,784,211,000	2,882,611,000	2,867,411,285	3,806,851	2,863,604,434	99.34	19,006,566
401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	5,357,171,000	4,756,671,000	4,745,876,786	1,013,342	4,744,863,444	99.75	11,807,556
401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	3,193,762,000	3,374,562,000	3,362,898,914	1,585,537	3,361,313,377	99.61	13,248,623
401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	3,028,646,000	2,799,946,000	2,743,610,545	3,660,910	2,739,949,635	97.86	59,996,365
401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	3,479,717,000	3,510,097,000	3,454,841,411	185,000	3,454,656,411	98.42	55,440,589
403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	4,942,753,000	4,512,003,000	4,339,061,459	1,769,950	4,337,291,509	96.13	174,711,491
403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	8,324,117,000	8,885,957,000	8,880,543,904	1,780	8,880,542,124	99.94	5,414,876

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	3,538,301,000	3,634,941,000	3,624,191,339	1,872,073	3,622,319,266	99.65	12,621,734
477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	4,274,958,000	4,274,958,000	4,221,553,006	501,024	4,221,051,982	98.74	53,906,018
526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	31,856,139,000	11,497,014,000	11,008,496,178	1,144	11,008,495,034	95.75	488,518,966
526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	9,013,030,000	9,763,030,000	9,657,897,008	191,472	9,657,705,536	98.92	105,324,464
547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	4,976,681,000	4,356,761,000	4,272,939,395	4,300,749	4,268,638,646	97.98	88,122,354
604744	PENGADILAN AGAMA PANDAN	2,611,388,000	2,431,388,000	2,303,650,915	170	2,303,650,745	94.75	127,737,255
631978	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	2,539,828,000	2,699,828,000	2,676,668,930	442	2,676,668,488	99.14	23,159,512
631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	2,928,028,000	2,936,628,000	2,910,908,364	723	2,910,907,641	99.12	25,720,359
663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	8,134,586,000	8,255,890,000	7,997,265,948	439	7,997,265,509	96.87	258,624,491
663199	PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN	4,330,383,000	5,073,965,000	4,875,250,581	1,111,223	4,874,139,358	96.06	199,825,642
672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	4,442,334,000	4,905,334,000	4,774,759,976	605,050	4,774,154,926	97.33	131,179,074
682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	2,354,263,000	2,454,763,000	2,430,871,699	620	2,430,871,079	99.03	23,891,921
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA	330,482,235,000	314,716,766,000	308,787,493,797	46,836,641	308,740,657,156	98.12	5,976,108,844
005010800KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT							
098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	17,238,612,000	23,781,624,000	23,680,247,954	10,373,629	23,669,874,325	99.53	111,749,675
098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	14,022,203,000	15,040,443,000	14,974,131,623	16,904,382	14,957,227,241	99.45	83,215,759
098764	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	3,410,810,000	4,131,250,000	4,126,466,018	700,721	4,125,765,297	99.87	5,484,703
098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	4,285,964,000	4,471,237,000	4,385,730,583	1,686,905	4,384,043,678	98.05	87,193,322
098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	4,250,019,000	4,270,019,000	4,227,843,415	1,096	4,227,842,319	99.01	42,176,681
098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	5,709,793,000	5,709,793,000	5,365,260,885	540,705	5,364,720,180	93.96	345,072,820
098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	4,141,076,000	5,065,116,000	4,944,437,172	185,890	4,944,251,282	97.61	120,864,718
098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	6,246,070,000	5,736,070,000	5,614,985,977	961,150	5,614,024,827	97.87	122,045,173
098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	4,072,909,000	4,178,909,000	4,157,114,999	222,599	4,156,892,400	99.47	22,016,600
098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	4,910,187,000	4,796,667,000	4,795,785,227	844	4,795,784,383	99.98	882,617
400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	4,350,080,000	4,350,080,000	4,175,082,820	746	4,175,082,074	95.98	174,997,926
400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	4,590,949,000	4,446,529,000	4,432,252,773	698	4,432,252,075	99.68	14,276,925
400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	4,165,743,000	4,195,605,000	4,188,615,032	859	4,188,614,173	99.83	6,990,827
400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	5,099,315,000	4,699,315,000	4,538,175,191	490,547	4,537,684,644	96.56	161,630,356
400461	PENGADILAN NEGERI MUARO	3,622,691,000	3,837,466,000	3,760,102,273	520	3,760,101,753	97.98	77,364,247
401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	13,754,453,000	15,221,613,000	15,190,328,858	1,267,926	15,189,060,932	99.79	32,552,068
401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	4,033,314,000	4,110,974,000	4,104,205,379	800	4,104,204,579	99.84	6,769,421
401916	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	4,805,077,000	5,115,077,000	5,099,919,141	361,279	5,099,557,862	99.7	15,519,138
401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	3,344,945,000	3,331,985,000	3,249,106,091	897	3,249,105,194	97.51	82,879,806
401931	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	2,639,993,000	2,662,632,000	2,629,386,244	898	2,629,385,346	98.75	33,246,654

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	3,121,776,000	2,662,976,000	2,601,795,692	1,828,360	2,599,967,332	97.63	63,008,668
401947	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	3,663,136,000	3,800,156,000	3,792,273,941	2,528,431	3,789,745,510	99.73	10,410,490
401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	11,360,982,000	11,960,982,000	11,934,170,157	1,935	11,934,168,222	99.78	26,813,778
401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	3,405,565,000	3,400,865,000	3,376,094,698	875	3,376,093,823	99.27	24,771,177
401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	3,179,772,000	3,141,812,000	3,107,289,875	516	3,107,289,359	98.9	34,522,641
401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	3,786,801,000	3,447,601,000	3,363,320,289	462,434	3,362,857,855	97.54	84,743,145
401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	2,969,360,000	2,812,880,000	2,758,663,964	185,498	2,758,478,466	98.07	54,401,534
402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	3,145,475,000	3,421,955,000	3,297,225,150	516	3,297,224,634	96.35	124,730,366
402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	5,127,187,000	4,677,187,000	4,640,113,700	650	4,640,113,050	99.21	37,073,950
402029	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	3,667,497,000	3,366,017,000	3,344,243,584	342	3,344,243,242	99.35	21,773,758
402035	PENGADILAN AGAMA TALU	3,444,059,000	3,786,899,000	3,757,286,835	570,802	3,756,716,033	99.2	30,182,967
402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	3,132,286,000	2,885,326,000	2,857,615,986	580	2,857,615,406	99.04	27,710,594
402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	3,960,819,000	3,707,035,000	3,682,911,116	452	3,682,910,664	99.35	24,124,336
402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	3,863,283,000	4,658,283,000	4,399,572,802	585,892	4,398,986,910	94.43	259,296,090
402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	3,188,567,000	3,549,555,000	3,535,734,807	18,530,777	3,517,204,030	99.09	32,350,970
477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	4,044,603,000	4,972,523,000	4,969,581,218	675,745	4,968,905,473	99.93	3,617,527
531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	5,425,664,000	5,760,664,000	5,614,342,703	932	5,614,341,771	97.46	146,322,229
663204	PENGADILAN MILITER I - 03 DI PADANG	3,288,429,000	3,456,931,000	3,415,382,052	570,376	3,414,811,676	98.78	42,119,324
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT	192,469,464,000	204,622,051,000	202,086,796,224	59,648,204	202,027,148,020	98.76	2,594,902,980
005010900KD	BA(005) ES1(01) RIAU							
098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	12,179,128,000	15,322,028,000	15,176,824,581	2,249	15,176,822,332	99.05	145,205,668
098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	5,940,065,000	5,883,793,000	5,883,471,263	1,169	5,883,470,094	99.99	322,906
098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	4,281,819,000	4,531,042,000	4,517,240,075	87,113	4,517,152,962	99.69	13,889,038
098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	4,308,479,000	4,361,479,000	4,339,832,260	678	4,339,831,582	99.5	21,647,418
400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	5,247,756,000	5,903,750,000	5,889,212,115	5,586,232	5,883,625,883	99.66	20,124,117
400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	7,446,961,000	6,806,402,000	6,783,132,767	430	6,783,132,337	99.66	23,269,663
400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	24,962,017,000	26,848,880,000	26,873,969,097	31,251,945	26,842,717,152	99.98	6,162,848
401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	4,352,885,000	5,397,266,000	5,378,083,200	707	5,378,082,493	99.64	19,183,507
401937	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	14,288,519,000	14,408,219,000	14,342,432,462	1,135,536	14,341,296,926	99.54	66,922,074
401938	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	18,879,132,000	18,329,132,000	18,303,319,737	185,700	18,303,134,037	99.86	25,997,963
402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	13,328,805,000	12,228,805,000	12,212,085,287	3,267,301	12,208,817,986	99.84	19,987,014
402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	4,219,620,000	3,969,620,000	3,871,902,244	1,350,574	3,870,551,670	97.5	99,068,330
402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	3,949,967,000	4,368,967,000	4,278,933,815	765	4,278,933,050	97.94	90,033,950
402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	5,456,192,000	4,942,392,000	4,758,307,885	185,671	4,758,122,214	96.27	184,269,786

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	4,130,967,000	3,714,467,000	3,605,107,561	820	3,605,106,741	97.06	109,360,259
402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	4,190,599,000	3,865,599,000	3,826,518,846	725,721	3,825,793,125	98.97	39,805,875
402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	3,287,789,000	3,307,789,000	3,290,903,825	1,296,935	3,289,606,890	99.45	18,182,110
402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	4,085,514,000	4,091,514,000	4,048,197,726	2,700,553	4,045,497,173	98.88	46,016,827
402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	13,547,184,000	15,827,534,000	15,769,430,135	8,100,345	15,761,329,790	99.58	66,204,210
477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	6,123,030,000	5,495,060,000	5,481,131,435	5,900,651	5,475,230,784	99.64	19,829,216
477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	4,934,065,000	4,832,301,000	4,821,575,494	624,803	4,820,950,691	99.77	11,350,309
477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	4,208,407,000	4,363,452,000	4,337,919,164	785	4,337,918,379	99.41	25,533,621
578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	6,579,336,000	6,714,336,000	6,652,345,126	536,099	6,651,809,027	99.07	62,526,973
631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	3,356,974,000	3,930,474,000	3,875,618,306	365,661	3,875,252,645	98.6	55,221,355
632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	3,574,835,000	3,971,035,000	3,924,471,553	5,330,550	3,919,141,003	98.69	51,893,997
662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	4,812,241,000	4,589,482,000	4,549,583,079	185,718	4,549,397,361	99.13	40,084,639
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) RIAU	191,672,286,000	198,004,818,000	196,791,549,038	68,824,711	196,722,724,327	99.39	1,282,093,673
005011000KD	BA(005) ES1(01) JAMBI							
098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	12,152,920,000	13,377,987,000	13,345,334,687	558,366	13,344,776,321	99.75	33,210,679
098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	5,351,159,000	5,340,159,000	5,329,881,635	826	5,329,880,809	99.81	10,278,191
098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	4,656,901,000	4,333,001,000	4,295,255,474	371,146	4,294,884,328	99.12	38,116,672
098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	3,911,358,000	3,768,798,000	3,759,843,850	542	3,759,843,308	99.76	8,954,692
400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	6,271,273,000	5,209,646,000	5,029,656,585	1,143	5,029,655,442	96.55	179,990,558
400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	4,400,442,000	4,285,442,000	4,275,340,497	35,811	4,275,304,686	99.76	10,137,314
400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	24,489,488,000	22,677,608,000	22,606,766,210	2,471	22,606,763,739	99.69	70,844,261
402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	9,172,725,000	7,879,365,000	7,785,240,426	1,192	7,785,239,234	98.81	94,125,766
402191	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	2,895,216,000	2,976,986,000	2,940,079,080	481	2,940,078,599	98.76	36,907,401
402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	4,139,883,000	3,857,163,000	3,803,017,035	585	3,803,016,450	98.6	54,146,550
402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	3,457,935,000	3,505,935,000	3,439,011,179	185,746	3,438,825,433	98.09	67,109,567
402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	3,300,295,000	3,415,825,000	3,193,944,334	684	3,193,943,650	93.5	221,881,350
403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	3,734,233,000	3,697,113,000	3,681,849,549	518	3,681,849,031	99.59	15,263,969
477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	3,978,085,000	4,476,585,000	4,448,958,270	782	4,448,957,488	99.38	27,627,512
477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	4,764,496,000	5,131,696,000	4,857,880,220	186,275	4,857,693,945	94.66	274,002,055
477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	4,179,374,000	4,190,374,000	4,188,124,627	747,944	4,187,376,683	99.93	2,997,317
547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	11,391,045,000	12,364,285,000	12,285,548,710	2,073	12,285,546,637	99.36	78,738,363
578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	4,299,734,000	4,309,734,000	4,211,501,571	646	4,211,500,925	97.72	98,233,075
632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	3,269,464,000	2,969,464,000	2,902,562,081	500	2,902,561,581	97.75	66,902,419
632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	3,148,096,000	2,945,936,000	2,859,337,194	586	2,859,336,608	97.06	86,599,392

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	2,932,665,000	2,736,985,000	2,704,797,990	572	2,704,797,418	98.82	32,187,582
652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	4,538,365,000	4,613,365,000	4,529,442,244	1,064	4,529,441,180	98.18	83,923,820
663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	4,707,532,000	5,139,332,000	5,132,673,710	240,896	5,132,432,814	99.87	6,899,186
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) JAMBI	135,142,684,000	133,202,784,000	131,606,047,158	2,340,849	131,603,706,309	98.8	1,599,077,691
005011100KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	26,527,409,000	30,767,751,000	30,549,262,031	64,587,672	30,484,674,359	99.08	283,076,641
098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	19,189,022,000	21,203,382,000	20,992,435,245	187,969	20,992,247,276	99	211,134,724
098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	5,852,976,000	5,452,976,000	5,205,740,707	1,166	5,205,739,541	95.47	247,236,459
098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	5,087,256,000	6,154,406,000	5,985,939,295	1,674,433	5,984,264,862	97.24	170,141,138
098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	6,663,311,000	7,666,329,000	7,489,140,759	4,935,038	7,484,205,721	97.62	182,123,279
098984	PENGADILAN NEGERI LAHAT	4,384,772,000	4,724,772,000	4,668,086,142	5,668,292	4,662,417,850	98.68	62,354,150
098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	4,835,626,000	4,683,626,000	4,555,025,198	998	4,555,024,200	97.25	128,601,800
099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	4,670,537,000	4,745,874,000	4,634,255,646	5,500,610	4,628,755,036	97.53	117,118,964
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3,095,749,000	4,805,749,000	4,728,393,596	2,100,412	4,726,293,184	98.35	79,455,816
401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	8,168,353,000	8,381,953,000	8,349,123,839	738	8,349,123,101	99.61	32,829,899
401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	3,917,672,000	3,455,540,000	3,407,230,898	185,484	3,407,045,414	98.6	48,494,586
401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	9,389,733,000	9,442,749,000	9,409,652,590	354	9,409,652,236	99.65	33,096,764
401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	3,412,184,000	4,137,406,000	4,062,906,949	466	4,062,906,483	98.2	74,499,517
401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	3,128,287,000	3,273,341,000	3,207,329,976	595	3,207,329,381	97.98	66,011,619
402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	14,788,506,000	16,227,417,000	16,116,283,764	63,188,058	16,053,095,706	98.93	174,321,294
402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	9,954,757,000	11,784,595,000	11,309,614,624	187,687	11,309,426,937	95.97	475,168,063
402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	3,925,370,000	3,736,048,000	3,708,442,526	910	3,708,441,616	99.26	27,606,384
402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	4,068,668,000	4,549,384,000	4,443,055,400	1,780,996	4,441,274,404	97.62	108,109,596
402273	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	4,591,680,000	4,444,074,000	4,428,304,985	1,291,141	4,427,013,844	99.62	17,060,156
402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	4,654,138,000	4,317,083,000	4,279,022,994	491	4,279,022,503	99.12	38,060,497
402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	4,151,785,000	4,156,035,000	4,050,154,526	1,007	4,050,153,519	97.45	105,881,481
402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	4,193,554,000	3,676,061,000	3,612,943,802	82,980	3,612,860,822	98.28	63,200,178
526728	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	22,102,679,000	27,472,808,000	27,292,457,849	911,012	27,291,546,837	99.34	181,261,163
526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	7,011,245,000	7,080,245,000	6,848,428,054	421,646	6,848,006,408	96.72	232,238,592
663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	4,219,945,000	4,825,147,000	4,773,191,871	196	4,773,191,675	98.92	51,955,325
672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	5,361,729,000	4,876,729,000	4,712,780,655	946	4,712,779,709	96.64	163,949,291
672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	4,136,631,000	4,705,131,000	4,569,209,848	504	4,569,209,344	97.11	135,921,656
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN	201,483,574,000	220,746,611,000	217,388,413,769	152,711,801	217,235,701,968	98.48	3,510,909,032
005011200KD	BA(005) ES1(01) LAMPUNG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	16,337,242,000	17,962,692,000	17,653,180,235	3,971	17,653,176,264	98.28	309,515,736
099045	PENGADILAN NEGERI METRO	7,505,251,000	6,907,858,000	6,773,750,185	721,586	6,773,028,599	98.05	134,829,401
099052	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	4,725,245,000	5,149,918,000	4,926,948,147	185,957	4,926,762,190	95.67	223,155,810
400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	31,124,808,000	29,050,122,000	28,332,232,082	12,487,542	28,319,744,540	97.49	730,377,460
400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	5,977,226,000	5,743,868,000	5,725,163,998	1,183	5,725,162,815	99.67	18,705,185
401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	5,620,119,000	5,650,342,000	5,512,548,924	2,986,409	5,509,562,515	97.51	140,779,485
401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	3,431,831,000	3,461,889,000	3,306,281,264	185,723	3,306,095,541	95.5	155,793,459
401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	4,600,910,000	3,837,535,000	3,712,343,322	582	3,712,342,740	96.74	125,192,260
401952	PENGADILAN AGAMA MESUJI	2,977,014,000	2,981,712,000	2,946,875,769	541	2,946,875,228	98.83	34,836,772
401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	3,285,072,000	3,193,753,000	3,154,717,221	699	3,154,716,522	98.78	39,036,478
401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	5,296,511,000	4,774,663,000	4,716,164,757	636,213	4,715,528,544	98.76	59,134,456
402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	7,759,633,000	7,582,015,000	7,569,030,038	187,198	7,568,842,840	99.83	13,172,160
402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	3,624,658,000	3,292,840,000	3,216,605,079	365,366	3,216,239,713	97.67	76,600,287
402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	4,970,415,000	4,791,239,000	4,694,320,212	901,008	4,693,419,204	97.96	97,819,796
402355	PENGADILAN AGAMA METRO	5,407,965,000	5,548,801,000	5,423,834,758	1,403	5,423,833,355	97.75	124,967,645
402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	4,684,924,000	5,616,824,000	5,553,359,950	246,950	5,553,113,000	98.87	63,711,000
477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	4,084,852,000	4,907,080,000	3,923,796,218	864	3,923,795,354	79.96	983,284,646
547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	14,845,589,000	17,938,043,000	17,874,128,725	2,451	17,874,126,274	99.64	63,916,726
559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	5,946,576,000	6,241,076,000	6,178,503,879	44,799,153	6,133,704,726	98.28	107,371,274
614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	3,533,591,000	3,708,091,000	3,676,951,889	514	3,676,951,375	99.16	31,139,625
614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	4,035,678,000	4,381,878,000	4,346,052,507	1,014	4,346,051,493	99.18	35,826,507
614883	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	3,868,706,000	4,008,030,000	3,993,203,857	185,666	3,993,018,191	99.63	15,011,809
652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	4,726,446,000	5,664,811,000	5,446,642,950	777	5,446,642,173	96.15	218,168,827
652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	3,413,287,000	4,088,287,000	3,613,369,586	618	3,613,368,968	88.38	474,918,032
663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	4,542,422,000	4,485,872,000	4,429,628,604	538	4,429,628,066	98.75	56,243,934
663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	5,005,950,000	5,746,234,000	5,248,233,496	472	5,248,233,024	91.33	498,000,976
663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	4,330,175,000	4,966,051,000	4,765,782,018	1,025,212	4,764,756,806	95.95	201,294,194
663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	4,511,954,000	4,757,613,000	4,467,041,042	263,840	4,466,777,202	93.89	290,835,798
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) LAMPUNG	180,174,050,000	186,439,137,000	181,180,690,712	65,193,450	181,115,497,262	97.18	5,323,639,738
005011300KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT							
099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	13,792,326,000	14,543,644,000	14,107,803,456	1,528	14,107,801,928	97	435,842,072
099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	5,418,283,000	5,468,283,000	5,403,378,002	3,936,172	5,399,441,830	98.74	68,841,170
099087	PENGADILAN NEGERI SINTANG	3,965,214,000	3,691,540,000	3,682,449,298	560	3,682,448,738	99.75	9,091,262
099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	4,938,979,000	5,174,545,000	4,923,979,600	928	4,923,978,672	95.16	250,566,328

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 16
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	5,277,940,000	5,024,531,000	5,006,520,961	3,080,811	5,003,440,150	99.58	21,090,850
099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	4,476,728,000	4,413,228,000	4,292,068,995	2,301	4,292,066,694	97.25	121,161,306
400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	4,054,885,000	3,564,640,000	3,541,408,265	370,878	3,541,037,387	99.34	23,602,613
400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	25,274,416,000	21,215,416,000	20,958,635,717	1,351,673	20,957,284,044	98.78	258,131,956
401960	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	3,578,782,000	3,178,782,000	3,161,333,980	550,723	3,160,783,257	99.43	17,998,743
401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	12,582,599,000	12,295,695,000	12,230,481,091	185,678	12,230,295,413	99.47	65,399,587
401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	21,072,701,000	29,022,701,000	28,948,792,660	365,910	28,948,426,750	99.74	74,274,250
402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	8,035,851,000	6,912,491,000	6,775,017,925	1,357	6,775,016,568	98.01	137,474,432
402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	4,441,571,000	3,980,031,000	3,944,343,454	1,710,504	3,942,632,950	99.06	37,398,050
402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	3,714,759,000	3,710,439,000	3,638,336,041	965,888	3,637,370,153	98.03	73,068,847
402392	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	3,828,897,000	3,779,747,000	3,712,606,602	314	3,712,606,288	98.22	67,140,712
402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	2,935,041,000	5,723,497,000	5,637,918,476	243,219	5,637,675,257	98.5	85,821,743
402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	3,119,496,000	2,799,496,000	2,744,507,267	428	2,744,506,839	98.04	54,989,161
402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	11,772,352,000	12,902,352,000	12,878,318,005	1,719	12,878,316,286	99.81	24,035,714
402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	3,513,358,000	3,470,918,000	3,434,134,514	648	3,434,133,866	98.94	36,784,134
531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	6,876,028,000	8,880,028,000	8,740,721,661	1,139	8,740,720,522	98.43	139,307,478
632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	19,367,222,000	23,873,087,000	23,755,723,652	401	23,755,723,251	99.51	117,363,749
663225	PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK	3,746,570,000	4,543,552,000	4,481,188,848	382	4,481,188,466	98.63	62,363,534
670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	4,540,609,000	4,772,214,000	4,753,837,465	964	4,753,836,501	99.61	18,377,499
670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	4,023,027,000	4,356,695,000	3,629,215,879	828	3,629,215,051	83.3	727,479,949
681450	PENGADILAN NEGERI NGABANG	4,291,583,000	5,011,518,000	4,982,983,545	734	4,982,982,811	99.43	28,535,189
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	188,639,217,000	202,309,070,000	199,365,705,359	12,775,687	199,352,929,672	98.55	2,956,140,328
005011400KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH							
099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	12,067,596,000	12,749,276,000	12,472,904,638	187,610	12,472,717,028	97.83	276,558,972
099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	5,297,182,000	5,328,182,000	5,324,502,679	1,524,724	5,322,977,955	99.9	5,204,045
099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	3,811,768,000	4,097,430,000	4,082,132,543	749	4,082,131,794	99.63	15,298,206
099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	4,687,152,000	5,977,105,000	5,971,757,760	1,058	5,971,756,702	99.91	5,348,298
099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	3,998,095,000	4,620,592,000	4,477,597,266	713	4,477,596,553	96.91	142,995,447
099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	4,995,959,000	4,600,959,000	4,586,825,603	149	4,586,825,454	99.69	14,133,546
400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	24,180,995,000	19,544,238,000	18,386,774,578	1,461,809	18,385,312,769	94.07	1,158,925,231
401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	5,897,327,000	6,397,327,000	6,256,097,531	2,210,684	6,253,886,847	97.76	143,440,153
401869	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	14,852,005,000	14,471,910,000	14,449,613,679	1,499,339	14,448,114,340	99.84	23,795,660
401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	18,690,400,000	18,501,140,000	18,172,393,266	370,390	18,172,022,876	98.22	329,117,124
401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	4,731,997,000	5,237,463,000	5,178,740,035	310	5,178,739,725	98.88	58,723,275

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401874	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	22,560,270,000	22,295,677,000	22,225,596,976	759	22,225,596,217	99.69	70,080,783
401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	4,496,547,000	7,070,683,000	6,763,339,474	182	6,763,339,292	95.65	307,343,708
401876	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	16,551,611,000	18,848,226,000	18,693,566,487	5,936,778	18,687,629,709	99.15	160,596,291
401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	3,710,393,000	3,847,285,000	3,411,425,124	797	3,411,424,327	88.67	435,860,673
401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	7,345,254,000	7,110,254,000	7,093,169,555	4,150,916	7,089,018,639	99.7	21,235,361
401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	4,020,467,000	4,085,467,000	4,072,200,781	936	4,072,199,845	99.68	13,267,155
402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	7,242,089,000	5,838,494,000	5,582,131,327	670,399	5,581,460,928	95.6	257,033,072
402437	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	3,805,648,000	3,805,648,000	3,507,010,634	482	3,507,010,152	92.15	298,637,848
402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	2,994,668,000	3,015,787,000	2,810,185,066	288	2,810,184,778	93.18	205,602,222
402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	2,808,671,000	3,186,671,000	3,034,421,688	540,703	3,033,880,985	95.21	152,790,015
402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	4,197,018,000	3,996,458,000	3,900,373,480	642	3,900,372,838	97.6	96,085,162
402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	3,696,887,000	4,413,788,000	4,306,432,083	4,644,514	4,301,787,569	97.46	112,000,431
402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	13,531,761,000	15,306,761,000	15,196,170,104	37,081,931	15,159,088,173	99.04	147,672,827
578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	4,942,224,000	4,267,444,000	4,079,208,977	185,538	4,079,023,439	95.58	188,420,561
670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	4,389,241,000	4,676,577,000	4,672,979,243	186,024	4,672,793,219	99.92	3,783,781
672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	3,869,560,000	4,012,776,000	3,982,211,118	491,076	3,981,720,042	99.23	31,055,958
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH	213,372,785,000	217,303,618,000	212,689,761,695	61,149,500	212,628,612,195	97.88	4,675,005,805
005011500KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	32,444,190,000	31,516,630,000	30,975,660,406	187,822	30,975,472,584	98.28	541,157,416
099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	12,065,565,000	14,787,105,000	14,711,738,911	2,225	14,711,736,686	99.49	75,368,314
099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	4,858,611,000	4,308,611,000	4,181,304,867	586	4,181,304,281	97.05	127,306,719
099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	4,597,445,000	4,847,445,000	4,729,859,084	976	4,729,858,108	97.57	117,586,892
099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	4,615,532,000	5,006,382,000	4,886,353,372	716	4,886,352,656	97.6	120,029,344
099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	6,054,406,000	5,514,406,000	5,305,735,504	978	5,305,734,526	96.22	208,671,474
099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	4,342,248,000	4,762,248,000	4,595,991,415	625	4,595,990,790	96.51	166,257,210
099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	4,891,400,000	4,718,440,000	4,479,869,662	2,970,497	4,476,899,165	94.88	241,540,835
099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	6,481,698,000	5,731,698,000	5,533,074,612	185,741	5,532,888,871	96.53	198,809,129
307101	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	3,864,168,000	3,264,168,000	3,128,230,605	185,524	3,128,045,081	95.83	136,122,919
307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	5,473,935,000	4,710,455,000	4,676,775,759	560,621	4,676,215,138	99.27	34,239,862
307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	3,356,527,000	3,268,657,000	3,210,146,693	683	3,210,146,010	98.21	58,510,990
400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	4,627,238,000	4,527,238,000	4,410,908,220	647	4,410,907,573	97.43	116,330,427
400282	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	5,170,650,000	5,120,650,000	5,001,808,702	1,626	5,001,807,076	97.68	118,842,924
401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	9,864,819,000	10,915,284,000	10,786,067,861	678	10,786,067,183	98.82	129,216,817
402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	15,667,742,000	16,984,262,000	16,687,202,329	7,448,314	16,679,754,015	98.21	304,507,985

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 18
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	11,753,861,000	11,230,581,000	10,886,088,873	1,122,570	10,884,966,303	96.92	345,614,697
402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	5,152,254,000	4,786,314,000	4,666,052,930	770,517	4,665,282,413	97.47	121,031,587
402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	2,848,353,000	2,823,113,000	2,775,163,538	663	2,775,162,875	98.3	47,950,125
402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	3,128,447,000	3,045,447,000	3,041,875,695	1,350,638	3,040,525,057	99.84	4,921,943
402540	PENGADILAN AGAMA BARABAI	4,032,493,000	4,072,493,000	4,030,354,113	1,351,022	4,029,003,091	98.93	43,489,909
402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	4,131,945,000	3,983,945,000	3,874,496,756	834	3,874,495,922	97.25	109,449,078
402562	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	22,664,210,000	22,477,080,000	22,436,526,551	526	22,436,526,025	99.82	40,553,975
402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	2,843,130,000	2,730,130,000	2,669,895,352	386	2,669,894,966	97.79	60,235,034
526730	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	7,710,056,000	8,125,056,000	7,920,050,225	555,832	7,919,494,393	97.47	205,561,607
531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	6,970,165,000	7,060,165,000	6,375,972,118	2,537,234	6,373,434,884	90.27	686,730,116
632043	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	3,902,063,000	4,290,623,000	4,246,260,698	265,277	4,245,995,421	98.96	44,627,579
653458	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	6,136,634,000	5,906,634,000	5,828,020,740	726,097	5,827,294,643	98.66	79,339,357
663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	3,862,427,000	3,614,069,000	3,388,879,087	316	3,388,878,771	93.77	225,190,229
670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	4,804,516,000	4,721,016,000	4,593,678,097	494	4,593,677,603	97.3	127,338,397
682260	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	4,061,991,000	3,841,991,000	3,767,115,419	3,875,576	3,763,239,843	97.95	78,751,157
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	222,378,719,000	222,692,336,000	217,801,158,194	24,106,241	217,777,051,953	97.8	4,915,284,047
005011600KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR							
099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	11,421,907,000	13,651,107,000	13,541,875,411	1,355,446	13,540,519,965	99.19	110,587,035
099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	5,439,327,000	5,456,607,000	5,119,835,387	2,135,632	5,117,699,755	93.79	338,907,245
099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	8,527,376,000	8,032,376,000	7,969,680,446	1,927	7,969,678,519	99.22	62,697,481
307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	4,169,225,000	4,565,145,000	4,523,821,866	141,782	4,523,680,084	99.09	41,464,916
307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	7,911,627,000	8,343,467,000	8,265,560,133	1,271,606	8,264,288,527	99.05	79,178,473
307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	3,431,627,000	3,443,147,000	3,428,718,913	756	3,428,718,157	99.58	14,428,843
307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	7,660,815,000	6,077,521,000	5,932,209,205	361,233	5,931,847,972	97.6	145,673,028
307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	3,258,191,000	3,263,951,000	3,015,519,916	4,206,635	3,011,313,281	92.26	252,637,719
400291	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	4,501,048,000	4,229,048,000	4,222,310,863	365,798	4,221,945,065	99.83	7,102,935
400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	4,122,408,000	4,284,688,000	4,197,622,112	1,004	4,197,621,108	97.97	87,066,892
400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	24,363,626,000	19,921,026,000	19,695,349,758	9,775,162	19,685,574,596	98.82	235,451,404
401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	3,200,429,000	3,419,565,000	3,403,602,738	359	3,403,602,379	99.53	15,962,621
401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	22,907,735,000	22,289,899,000	21,978,793,884	456	21,978,793,428	98.6	311,105,572
401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	4,553,346,000	5,443,166,000	5,396,511,417	792	5,396,510,625	99.14	46,655,375
402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	14,425,459,000	11,971,419,000	11,734,701,456	2,286,909	11,732,414,547	98	239,004,453
477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	4,088,734,000	3,708,734,000	3,664,997,823	1,351,090	3,663,646,733	98.78	45,087,267
559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	6,152,567,000	5,252,567,000	5,134,263,553	480,752	5,133,782,801	97.74	118,784,199

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	3,503,693,000	3,487,693,000	3,462,145,406	722	3,462,144,684	99.27	25,548,316
652097	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	3,816,337,000	3,574,094,000	3,369,511,508	548	3,369,510,960	94.28	204,583,040
662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	4,105,451,000	4,153,331,000	4,130,636,767	6,050,515	4,124,586,252	99.31	28,744,748
662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	4,285,817,000	4,343,017,000	4,304,117,781	624	4,304,117,157	99.1	38,899,843
663246	PENGADILAN MILITER I - 07 DI BALIKPAPAN	3,735,536,000	5,148,417,000	5,076,875,056	220	5,076,874,836	98.61	71,542,164
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	159,582,281,000	154,059,985,000	151,568,661,399	29,789,968	151,538,871,431	98.38	2,521,113,569
005011700KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA							
099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	21,663,819,000	17,597,069,000	17,361,833,163	186,678	17,361,646,485	98.66	235,422,515
099329	PENGADILAN NEGERI MANADO	12,104,267,000	12,149,267,000	11,912,229,791	1,658	11,912,228,133	98.05	237,038,867
099333	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	5,974,844,000	6,217,844,000	6,128,471,818	186,211	6,128,285,607	98.56	89,558,393
099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	5,645,682,000	5,773,682,000	5,703,297,882	1,041,132	5,702,256,750	98.76	71,425,250
099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	5,139,968,000	5,623,968,000	5,540,748,433	1,074,961	5,539,673,472	98.5	84,294,528
307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	6,267,404,000	5,950,384,000	5,926,896,158	1,491	5,926,894,667	99.61	23,489,333
307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	4,900,155,000	4,025,155,000	3,941,752,306	185,796	3,941,566,510	97.92	83,588,490
307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	6,591,826,000	6,412,946,000	6,303,292,830	2,888,422	6,300,404,408	98.25	112,541,592
401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	3,558,899,000	4,780,906,000	4,728,828,870	584	4,728,828,286	98.91	52,077,714
401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	3,808,120,000	9,154,570,000	9,059,223,250	511	9,059,222,739	98.96	95,347,261
401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	4,919,603,000	6,825,649,000	6,530,210,181	9,700,634	6,520,509,547	95.53	305,139,453
401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	5,060,277,000	8,156,746,000	7,945,912,234	2,566,543	7,943,345,691	97.38	213,400,309
401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	4,280,714,000	4,153,740,000	4,127,242,323	659	4,127,241,664	99.36	26,498,336
402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	11,257,867,000	11,727,967,000	11,591,489,294	186,129	11,591,303,165	98.83	136,663,835
402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	3,383,957,000	3,358,957,000	3,189,068,344	3,492,750	3,185,575,594	94.84	173,381,406
526734	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	7,268,384,000	8,648,384,000	8,463,101,854	768	8,463,101,086	97.86	185,282,914
531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	5,877,221,000	5,072,221,000	4,769,453,157	816	4,769,452,341	94.03	302,768,659
568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	7,438,808,000	7,124,608,000	7,118,515,018	12,412,144	7,106,102,874	99.74	18,505,126
604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	3,326,075,000	3,245,251,000	3,093,060,884	185,780	3,092,875,104	95.3	152,375,896
663360	PENGADILAN MILITER III - 17 DI MANADO	3,749,507,000	3,729,209,000	3,658,968,702	262	3,658,968,440	98.12	70,240,560
670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	5,572,604,000	4,535,629,000	4,446,202,161	576	4,446,201,585	98.03	89,427,415
673034	PENGADILAN NEGERI AMURANG	9,594,157,000	9,626,687,000	9,602,011,375	1,310	9,602,010,065	99.74	24,676,935
682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	2,787,186,000	3,172,186,000	3,160,921,945	685,590	3,160,236,355	99.62	11,949,645
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA	150,171,344,000	157,063,025,000	154,302,731,973	34,801,405	154,267,930,568	98.24	2,795,094,432
005011800KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA							
099375	PENGADILAN NEGERI PALU	10,624,935,000	11,694,935,000	11,418,447,378	529,693	11,417,917,685	97.63	277,017,315
099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	4,185,431,000	4,625,431,000	4,508,076,128	1,182	4,508,074,946	97.46	117,356,054

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 20
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	4,799,220,000	4,690,061,000	4,657,864,242	185,772	4,657,678,470	99.31	32,382,530
099401	PENGADILAN NEGERI POSO	6,045,607,000	6,006,621,000	5,955,077,061	541,414	5,954,535,647	99.13	52,085,353
307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	7,345,708,000	7,311,508,000	7,311,006,947	1,923	7,311,005,024	99.99	502,976
307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	18,232,512,000	20,678,403,000	20,575,922,579	280,236	20,575,642,343	99.5	102,760,657
307292	PENGADILAN AGAMA POSO	3,666,323,000	3,335,523,000	3,307,589,896	1,169	3,307,588,727	99.16	27,934,273
307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	3,743,369,000	3,670,629,000	3,609,586,879	912	3,609,585,967	98.34	61,043,033
400534	PENGADILAN TINGGI PALU	15,399,007,000	12,662,072,000	12,564,486,482	1,451,666	12,563,034,816	99.22	99,037,184
401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	4,960,739,000	4,304,939,000	4,177,309,914	1,065	4,177,308,849	97.04	127,630,151
477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	4,431,603,000	4,571,603,000	4,548,973,343	186,136	4,548,787,207	99.5	22,815,793
576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	10,746,922,000	12,541,531,000	12,472,361,313	71,998	12,472,289,315	99.45	69,241,685
578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	5,097,896,000	4,494,749,000	4,440,866,728	881,320	4,439,985,408	98.78	54,763,592
604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	4,790,841,000	4,929,041,000	4,804,587,906	651,833	4,803,936,073	97.46	125,104,927
652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	3,246,372,000	3,243,312,000	3,184,031,182	746	3,184,030,436	98.17	59,281,564
652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	3,326,790,000	3,280,990,000	3,187,764,229	670,762	3,187,093,467	97.14	93,896,533
652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	11,586,714,000	13,477,690,000	13,468,492,167	663	13,468,491,504	99.93	9,198,496
670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	3,657,707,000	3,757,707,000	3,722,467,800	915	3,722,466,885	99.06	35,240,115
672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	4,421,679,000	4,660,319,000	4,537,768,250	371,129	4,537,397,121	97.36	122,921,879
682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	3,421,624,000	3,854,524,000	3,788,756,648	17,251,010	3,771,505,638	97.85	83,018,362
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA SULTENG]	133,730,999,000	137,791,588,000	136,241,437,072	23,081,544	136,218,355,528	98.88	1,573,232,472
005011900KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	38,188,936,000	43,326,880,000	43,156,444,164	5,101,084	43,151,343,080	99.59	175,536,920
099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	26,950,376,000	31,644,578,000	31,436,455,647	61,708	31,436,393,939	99.34	208,184,061
099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	9,749,456,000	9,818,186,000	9,693,951,663	237,004	9,693,714,659	98.73	124,471,341
099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	5,825,613,000	6,978,103,000	6,587,098,164	941,260	6,586,156,904	94.38	391,946,096
099450	PENGADILAN NEGERI BARRU	4,300,829,000	4,331,183,000	4,253,123,972	813	4,253,123,159	98.2	78,059,841
099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	5,178,686,000	4,981,935,000	4,825,900,514	1,192	4,825,899,322	96.87	156,035,678
099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	7,502,941,000	7,476,294,000	7,136,224,807	371,622	7,135,853,185	95.45	340,440,815
099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	5,033,727,000	4,863,336,000	4,819,743,797	690	4,819,743,107	99.1	43,592,893
099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	5,992,632,000	5,394,072,000	5,370,453,469	370,814	5,370,082,655	99.56	23,989,345
099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	4,355,254,000	4,518,946,000	4,441,601,418	365,927	4,441,235,491	98.28	77,710,509
099511	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	4,743,880,000	5,090,920,000	5,075,467,321	150,386	5,075,316,935	99.69	15,603,065
099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	4,562,217,000	4,558,767,000	4,557,905,507	862	4,557,904,645	99.98	862,355
099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	8,482,656,000	8,539,661,000	8,473,226,484	523,634	8,472,702,850	99.22	66,958,150
099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	4,285,312,000	4,595,312,000	4,514,691,300	873	4,514,690,427	98.25	80,621,573

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 21
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	5,755,685,000	5,514,248,000	5,491,708,693	1,708	5,491,706,985	99.59	22,541,015
099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	4,894,012,000	4,691,318,000	4,614,262,381	300,905	4,613,961,476	98.35	77,356,524
099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	4,808,719,000	5,123,599,000	5,105,004,389	1,866,022	5,103,138,367	99.6	20,460,633
099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	5,506,606,000	5,189,415,000	5,171,282,826	74,810	5,171,208,016	99.65	18,206,984
099595	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	4,430,979,000	4,061,736,000	4,056,201,533	952	4,056,200,581	99.86	5,535,419
099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	5,262,531,000	5,555,181,000	5,283,410,770	1,046	5,283,409,724	95.11	271,771,276
099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	5,692,314,000	5,334,163,000	5,311,674,629	1,332	5,311,673,297	99.58	22,489,703
307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	18,137,892,000	24,102,641,000	24,025,840,549	38,029,342	23,987,811,207	99.52	114,829,793
307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	4,240,924,000	4,481,472,000	4,422,256,365	1,210	4,422,255,155	98.68	59,216,845
307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	5,696,417,000	5,946,417,000	5,852,565,772	1,065	5,852,564,707	98.42	93,852,293
307452	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	16,957,938,000	13,972,938,000	13,492,663,247	28,240,256	13,464,422,991	96.36	508,515,009
307466	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	3,431,394,000	3,276,394,000	3,016,579,627	434	3,016,579,193	92.07	259,814,807
307470	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	3,944,466,000	3,794,466,000	3,722,107,618	1,416	3,722,106,202	98.09	72,359,798
307487	PENGADILAN AGAMA BARRU	3,514,784,000	3,468,824,000	3,431,794,884	333	3,431,794,551	98.93	37,029,449
307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	6,523,069,000	6,423,069,000	6,266,867,992	522,250	6,266,345,742	97.56	156,723,258
307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	13,527,229,000	8,750,924,000	8,524,443,710	542,034	8,523,901,676	97.41	227,022,324
307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	4,812,969,000	7,505,454,000	7,252,958,245	1,313	7,252,956,932	96.64	252,497,068
307520	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	5,132,728,000	4,382,728,000	4,328,926,243	1,459	4,328,924,784	98.77	53,803,216
307534	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	3,571,326,000	3,346,326,000	3,246,417,724	769	3,246,416,955	97.01	99,909,045
307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	3,829,418,000	4,365,418,000	4,250,863,316	595	4,250,862,721	97.38	114,555,279
307555	PENGADILAN AGAMA SINJAI	3,278,269,000	3,513,079,000	3,402,789,388	323,179	3,402,466,209	96.85	110,612,791
307562	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	3,229,548,000	3,209,548,000	3,165,068,473	802,469	3,164,266,004	98.59	45,281,996
307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	4,778,900,000	4,355,566,000	4,074,524,765	190,940	4,074,333,825	93.54	281,232,175
307580	PENGADILAN AGAMA PINRANG	4,693,492,000	7,543,492,000	7,447,939,343	1,315	7,447,938,028	98.73	95,553,972
307597	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	3,394,639,000	3,324,639,000	3,302,352,799	185,613	3,302,167,186	99.32	22,471,814
307602	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	4,011,871,000	4,590,911,000	4,534,126,168	748	4,534,125,420	98.76	56,785,580
307619	PENGADILAN AGAMA PALOPO	3,281,390,000	3,121,390,000	3,098,723,364	490,951	3,098,232,413	99.26	23,157,587
307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	2,864,094,000	2,814,094,000	2,763,924,462	690	2,763,923,772	98.22	50,170,228
401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	3,156,092,000	3,633,312,000	3,564,168,922	185,838	3,563,983,084	98.09	69,328,916
401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	3,109,574,000	2,981,574,000	2,952,018,490	462	2,952,018,028	99.01	29,555,972
401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	3,666,984,000	3,609,296,000	3,587,951,086	370,571	3,587,580,515	99.4	21,715,485
526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	11,741,902,000	9,741,902,000	9,666,591,128	186,689	9,666,404,439	99.23	75,497,561
526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	11,292,201,000	11,212,201,000	11,122,622,327	92,518	11,122,529,809	99.2	89,671,191
632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	3,253,923,000	3,293,923,000	3,236,110,077	490,518	3,235,619,559	98.23	58,303,441

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
663356	PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR	3,903,085,000	4,320,447,000	4,160,618,148	158	4,160,617,990	96.3	159,829,010
672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	3,533,563,000	4,162,822,000	4,131,964,598	185,801	4,131,778,797	99.25	31,043,203
673013	PENGADILAN NEGERI MALILI	3,486,916,000	3,878,210,000	3,769,213,363	2,100,443	3,767,112,920	97.14	111,097,080
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN	341,500,358,000	354,711,310,000	349,190,825,641	83,326,023	349,107,499,618	98.44	5,603,810,382
005012000KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA							
099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	12,320,049,000	12,888,571,000	12,712,995,031	1,123,018	12,711,872,013	98.63	176,698,987
099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	4,944,338,000	5,415,338,000	5,316,640,984	926,175	5,315,714,809	98.16	99,623,191
099670	PENGADILAN NEGERI RAHA	4,893,772,000	4,942,272,000	4,830,476,283	34,758	4,830,441,525	97.74	111,830,475
099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	5,850,913,000	5,554,873,000	5,411,397,802	736,423	5,410,661,379	97.4	144,211,621
307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	3,335,477,000	4,096,477,000	4,077,552,328	37,863	4,077,514,465	99.54	18,962,535
307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	3,472,370,000	4,021,370,000	3,998,324,186	1,018	3,998,323,168	99.43	23,046,832
307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	7,188,631,000	7,181,631,000	7,000,359,763	980	7,000,358,783	97.48	181,272,217
307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	3,583,664,000	3,548,664,000	3,475,818,136	413	3,475,817,723	97.95	72,846,277
400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	20,136,754,000	17,978,994,000	17,744,141,396	10,730,115	17,733,411,281	98.63	245,582,719
401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	13,922,311,000	13,831,421,000	13,543,522,303	490,149	13,543,032,154	97.91	288,388,846
401886	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	2,942,647,000	2,981,647,000	2,911,282,304	490,594	2,910,791,710	97.62	70,855,290
401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	12,497,475,000	12,322,475,000	12,270,699,089	3,773,795	12,266,925,294	99.55	55,549,706
401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	3,729,338,000	4,360,040,000	4,095,015,633	5,010,911	4,090,004,722	93.81	270,035,278
401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	3,786,838,000	4,119,561,000	4,114,937,704	626	4,114,937,078	99.89	4,623,922
477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	5,478,458,000	5,641,998,000	5,547,917,594	371,006	5,547,546,588	98.33	94,451,412
576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	16,264,129,000	13,726,837,000	13,617,394,393	1,282,052	13,616,112,341	99.19	110,724,659
578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	5,415,114,000	5,365,114,000	5,055,479,089	794,053	5,054,685,036	94.21	310,428,964
604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	3,930,184,000	3,990,184,000	3,933,843,392	1,324,605	3,932,518,787	98.55	57,665,213
681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	4,252,126,000	4,704,736,000	4,652,699,688	490,954	4,652,208,734	98.88	52,527,266
681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	4,561,249,000	4,663,749,000	4,662,391,816	740,510	4,661,651,306	99.96	2,097,694
682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	3,133,157,000	3,083,157,000	3,028,635,941	671	3,028,635,270	98.23	54,521,730
682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	3,256,347,000	3,498,347,000	3,338,161,588	1,197	3,338,160,391	95.42	160,186,609
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA	148,895,341,000	147,917,456,000	145,339,686,443	28,361,886	145,311,324,557	98.26	2,606,131,443
005012100KD	BA(005) ES1(01) MALUKU							
099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	19,696,225,000	13,931,101,000	13,728,639,237	7,611,528	13,721,027,709	98.49	210,073,291
099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	12,992,302,000	14,685,944,000	14,433,044,908	187,235	14,432,857,673	98.28	253,086,327
099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	5,527,386,000	5,287,386,000	5,218,734,892	752,725	5,217,982,167	98.69	69,403,833
099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	5,249,061,000	4,906,061,000	4,890,973,513	712,277	4,890,261,236	99.68	15,799,764
307754	PENGADILAN AGAMA AMBON	7,509,249,000	7,154,249,000	7,054,648,317	1,212	7,054,647,105	98.61	99,601,895

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 23
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	3,118,172,000	3,256,172,000	3,183,498,941	329	3,183,498,612	97.77	72,673,388
307775	PENGADILAN AGAMA MASOHI	3,909,235,000	3,484,235,000	3,454,188,728	1,573,120	3,452,615,608	99.09	31,619,392
401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	32,710,924,000	32,617,924,000	32,574,446,998	1,219	32,574,445,779	99.87	43,478,221
401895	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	38,382,388,000	38,251,387,000	38,131,041,805	1,502,054	38,129,539,751	99.68	121,847,249
401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	3,400,704,000	3,448,454,000	3,392,278,229	299,599	3,391,978,630	98.36	56,475,370
401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	5,198,109,000	5,296,342,000	5,230,237,486	873,522	5,229,363,964	98.74	66,978,036
401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	3,816,961,000	4,905,058,000	4,763,733,994	994	4,763,733,000	97.12	141,325,000
401970	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	29,619,122,000	29,270,692,000	29,114,340,658	778	29,114,339,880	99.47	156,352,120
401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	38,772,507,000	37,022,507,000	36,768,944,462	1,841,450	36,767,103,012	99.31	255,403,988
402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	13,322,313,000	14,613,673,000	14,484,819,513	1,369	14,484,818,144	99.12	128,854,856
539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	5,590,313,000	5,640,312,000	4,872,296,788	346	4,872,296,442	86.38	768,015,558
663377	PENGADILAN MILITER III - 18 DI AMBON	4,130,080,000	4,698,062,000	4,609,309,420	185,515	4,609,123,905	98.11	88,938,095
672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	4,752,163,000	4,462,162,000	4,355,803,928	540,444	4,355,263,484	97.6	106,898,516
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) MALUKU	237,697,214,000	232,931,721,000	230,260,981,817	16,085,716	230,244,896,101	98.85	2,686,824,899
005012200KD	BA(005) ES1(01) BALI							
099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	26,925,763,000	28,590,717,000	28,469,369,982	18,574,818	28,450,795,164	99.51	139,921,836
099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	16,586,393,000	18,751,365,000	18,504,230,061	962,368	18,503,267,693	98.68	248,097,307
099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	7,154,311,000	7,936,323,000	7,861,439,259	774,307	7,860,664,952	99.05	75,658,048
099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	4,495,020,000	4,689,041,000	4,673,032,060	1,218	4,673,030,842	99.66	16,010,158
099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	5,750,593,000	5,237,639,000	5,061,802,211	1,149	5,061,801,062	96.64	175,837,938
099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	7,124,881,000	6,009,881,000	5,979,444,430	11,982,886	5,967,461,544	99.29	42,419,456
099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	5,017,697,000	4,883,809,000	4,697,490,118	675,894	4,696,814,224	96.17	186,994,776
099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	7,488,705,000	6,481,705,000	6,418,473,528	1,356	6,418,472,172	99.02	63,232,828
099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	4,651,320,000	4,584,308,000	4,542,997,141	2,239	4,542,994,902	99.1	41,313,098
307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	5,385,103,000	4,835,103,000	4,592,112,366	540,450	4,591,571,916	94.96	243,531,084
307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	3,218,560,000	2,957,560,000	2,951,492,355	446	2,951,491,909	99.79	6,068,091
402726	PENGADILAN AGAMA BANGLI	3,039,482,000	2,619,482,000	2,502,266,497	409,486	2,501,857,011	95.51	117,624,989
402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	3,122,712,000	2,932,712,000	2,914,411,854	3,151,390	2,911,260,464	99.27	21,451,536
402741	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	2,739,641,000	2,449,641,000	2,399,560,715	632,947	2,398,927,768	97.93	50,713,232
402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	2,906,584,000	2,751,584,000	2,677,006,243	382	2,677,005,861	97.29	74,578,139
402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	3,100,132,000	2,500,132,000	2,451,977,341	579	2,451,976,762	98.07	48,155,238
402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	3,378,793,000	2,878,793,000	2,518,239,197	187	2,518,239,010	87.48	360,553,990
526724	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	14,364,204,000	14,351,474,000	14,263,793,634	1,707	14,263,791,927	99.39	87,682,073
559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	7,476,582,000	6,999,632,000	6,916,209,184	7,928,326	6,908,280,858	98.69	91,351,142

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 24
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
614731	PENGADILAN AGAMA BADUNG	3,077,101,000	2,727,101,000	2,581,065,806	262	2,581,065,544	94.65	146,035,456
663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	4,260,802,000	4,837,564,000	4,775,374,577	418	4,775,374,159	98.71	62,189,841
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BALI	141,264,379,000	140,005,566,000	137,751,788,559	45,642,815	137,706,145,744	98.39	2,299,420,256
005012300KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT							
099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	16,468,893,000	14,575,793,000	14,401,600,143	1,771	14,401,598,372	98.8	174,194,628
099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	6,587,395,000	6,287,395,000	6,104,809,813	7,242,510	6,097,567,303	96.98	189,827,697
099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	5,786,559,000	5,786,559,000	5,485,660,689	2,701,361	5,482,959,328	94.75	303,599,672
099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	6,768,939,000	6,698,939,000	6,608,933,895	1,081,124	6,607,852,771	98.64	91,086,229
099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	5,810,006,000	5,560,006,000	5,442,133,345	1,108	5,442,132,237	97.88	117,873,763
099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	6,777,841,000	6,607,841,000	6,441,426,781	186,047	6,441,240,734	97.48	166,600,266
307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	11,057,571,000	9,516,798,000	9,465,849,882	373,018	9,465,476,864	99.46	51,321,136
307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	5,147,139,000	4,967,139,000	4,905,858,710	756	4,905,857,954	98.77	61,281,046
307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	9,270,484,000	9,327,404,000	9,270,300,687	186,663	9,270,114,024	99.39	57,289,976
307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	6,876,347,000	6,500,227,000	6,265,392,059	1,351,319	6,264,040,740	96.37	236,186,260
307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	7,232,427,000	7,124,727,000	7,063,291,198	1,691	7,063,289,507	99.14	61,437,493
307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	5,462,374,000	5,166,274,000	4,977,709,231	1,181	4,977,708,050	96.35	188,565,950
400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	29,258,104,000	29,394,104,000	28,776,916,465	2,716	28,776,913,749	97.9	617,190,251
402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	17,784,419,000	17,209,419,000	16,987,693,405	3,129	16,987,690,276	98.71	221,728,724
526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	15,970,673,000	9,376,285,000	8,845,807,284	88,420,817	8,757,386,467	93.4	618,898,533
578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	5,583,702,000	5,476,702,000	5,425,128,111	349,391	5,424,778,720	99.05	51,923,280
614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	6,585,256,000	6,045,256,000	5,850,134,194	1,199	5,850,132,995	96.77	195,123,005
682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	3,188,399,000	3,262,972,000	3,240,498,492	2,114,994	3,238,383,498	99.25	24,588,502
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	171,616,528,000	158,883,840,000	155,559,144,384	104,020,795	155,455,123,589	97.91	3,428,716,411
005012400KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR							
099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	12,310,498,000	12,708,698,000	12,672,848,290	1,170,903	12,671,677,387	99.71	37,020,613
099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	5,269,774,000	5,505,774,000	5,190,726,473	844	5,190,725,629	94.28	315,048,371
099947	PENGADILAN NEGERI SO'E	4,856,769,000	4,364,288,000	4,284,809,772	327,260	4,284,482,512	98.17	79,805,488
099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	4,272,858,000	4,222,858,000	4,027,001,756	586	4,027,001,170	95.36	195,856,830
099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	4,856,997,000	5,092,742,000	5,084,154,594	380,137	5,083,774,457	99.82	8,967,543
099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	4,163,734,000	4,121,064,000	3,962,984,433	824	3,962,983,609	96.16	158,080,391
099989	PENGADILAN NEGERI ENDE	3,844,535,000	3,907,427,000	3,857,661,131	770	3,857,660,361	98.73	49,766,639
099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	4,745,731,000	4,514,995,000	4,398,396,045	908	4,398,395,137	97.42	116,599,863
307949	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	2,634,911,000	2,464,071,000	2,368,403,318	370,537	2,368,032,781	96.1	96,038,219
307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG	3,609,514,000	3,736,434,000	3,746,047,557	21,464,856	3,724,582,701	99.68	11,851,299

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 25
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
307960	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	3,099,229,000	2,918,389,000	2,888,670,708	458	2,888,670,250	98.98	29,718,750
307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	2,971,245,000	2,889,265,000	2,845,734,405	7,533,183	2,838,201,222	98.23	51,063,778
307981	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	2,812,099,000	2,643,139,000	2,599,962,920	188	2,599,962,732	98.37	43,176,268
400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	3,880,164,000	4,086,722,000	4,018,259,909	1,461,014	4,016,798,895	98.29	69,923,105
400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	3,644,413,000	3,644,413,000	3,513,308,771	746	3,513,308,025	96.4	131,104,975
400157	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	4,310,289,000	4,555,289,000	4,427,667,416	384	4,427,667,032	97.2	127,621,968
400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	4,415,715,000	4,798,972,000	4,543,069,440	450	4,543,068,990	94.67	255,903,010
400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	22,880,532,000	17,424,535,000	17,391,493,965	17,184,933	17,374,309,032	99.71	50,225,968
402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	2,859,199,000	2,646,009,000	2,638,778,834	518	2,638,778,316	99.73	7,230,684
402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	3,198,028,000	2,998,015,000	2,955,544,484	478	2,955,544,006	98.58	42,470,994
402814	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	2,720,036,000	2,597,756,000	2,589,154,032	4,320,100	2,584,833,932	99.5	12,922,068
402820	PENGADILAN AGAMA SOE	3,022,966,000	3,077,006,000	3,072,322,105	180,500	3,072,141,605	99.84	4,864,395
402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	2,681,560,000	2,302,240,000	2,236,160,991	114	2,236,160,877	97.13	66,079,123
402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	2,614,265,000	2,544,265,000	2,438,082,985	394	2,438,082,591	95.83	106,182,409
402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	2,721,253,000	2,709,273,000	2,668,707,111	185,442	2,668,521,669	98.5	40,751,331
477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	3,677,985,000	3,486,796,000	3,393,575,908	9,106,806	3,384,469,102	97.07	102,326,898
477249	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	4,230,481,000	4,421,756,000	4,344,245,691	1,016	4,344,244,675	98.25	77,511,325
539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	5,355,489,000	4,905,489,000	4,743,957,597	185,608	4,743,771,989	96.7	161,717,011
576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	12,057,814,000	13,552,734,000	13,569,193,733	32,402,025	13,536,791,708	99.88	15,942,292
632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	3,140,045,000	2,931,045,000	2,927,172,016	490,880	2,926,681,136	99.85	4,363,864
663342	PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG	2,953,470,000	3,480,452,000	3,334,914,119	6,500	3,334,907,619	95.82	145,544,381
673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	4,026,957,000	3,899,757,000	3,808,308,376	1,057	3,808,307,319	97.65	91,449,681
681418	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	4,778,290,000	4,578,290,000	4,465,136,915	8,331,788	4,456,805,127	97.35	121,484,873
682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	2,836,122,000	2,713,441,000	2,712,669,098	444	2,712,668,654	99.97	772,346
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR	161,452,967,000	156,443,399,000	153,719,124,898	105,112,651	153,614,012,247	98.26	2,829,386,753
005012500KD	BA(005) ES1(01) PAPUA							
400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	17,789,554,000	13,909,554,000	13,487,335,360	1,801,224	13,485,534,136	96.95	424,019,864
400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	13,573,477,000	13,573,477,000	13,010,774,504	2,635,942	13,008,138,562	95.83	565,338,438
400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	9,041,599,000	9,191,599,000	9,030,307,331	185,516	9,030,121,815	98.24	161,477,185
400050	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	5,326,181,000	5,022,988,000	4,915,742,025	425,502	4,915,316,523	97.86	107,671,477
400090	PENGADILAN NEGERI BIAK	4,487,982,000	4,539,582,000	4,497,018,545	1,000,598	4,496,017,947	99.04	43,564,053
400101	PENGADILAN NEGERI NABIRE	4,812,268,000	4,389,268,000	4,119,087,591	218,476	4,118,869,115	93.84	270,398,885
400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	4,434,350,000	4,434,350,000	4,353,573,257	425,558	4,353,147,699	98.17	81,202,301
402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	14,891,606,000	18,686,856,000	18,647,333,085	172,221,447	18,475,111,638	98.87	211,744,362

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 26
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	4,141,634,000	4,195,754,000	4,135,669,788	995,412	4,134,674,376	98.54	61,079,624
402891	PENGADILAN AGAMA BIAK	2,589,575,000	2,713,925,000	2,682,642,503	3,527,722	2,679,114,781	98.72	34,810,219
402927	PENGADILAN AGAMA NABIRE	2,667,935,000	2,664,515,000	2,600,449,413	284	2,600,449,129	97.6	64,065,871
402933	PENGADILAN AGAMA WAMENA	6,145,359,000	6,349,969,000	6,167,211,256	8,650,653	6,158,560,603	96.99	191,408,397
402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	3,532,665,000	2,991,625,000	2,898,753,059	294	2,898,752,765	96.9	92,872,235
402958	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	3,017,718,000	2,807,718,000	2,761,115,198	4,259,425	2,756,855,773	98.19	50,862,227
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	6,215,548,000	5,706,454,000	5,609,978,713	361,072	5,609,617,641	98.3	96,836,359
614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	3,790,423,000	3,551,223,000	3,436,972,042	510	3,436,971,532	96.78	114,251,468
614773	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	3,146,466,000	3,031,466,000	2,992,674,322	550,872	2,992,123,450	98.7	39,342,550
614780	PENGADILAN AGAMA PANIAI	5,334,812,000	5,411,002,000	5,386,304,941	270	5,386,304,671	99.54	24,697,329
614890	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	5,192,308,000	5,192,308,000	4,695,318,178	753	4,695,317,425	90.43	496,990,575
663381	PENGADILAN MILITER III - 19 DI JAYAPURA	38,003,562,000	39,394,096,000	39,241,291,462	231	39,241,291,231	99.61	152,804,769
682300	PENGADILAN AGAMA ARSO	3,779,964,000	3,309,184,000	3,280,006,160	314	3,280,005,846	99.12	29,178,154
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) PAPUA	161,914,986,000	161,066,913,000	157,949,558,733	197,262,075	157,752,296,658	98.06	3,314,616,342
005012600KD	BA(005) ES1(01) BENGKULU							
308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	3,617,614,000	3,301,114,000	3,283,875,403	1,350,860	3,282,524,543	99.44	18,589,457
308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	4,028,541,000	4,010,541,000	3,954,893,388	185,691	3,954,707,697	98.61	55,833,303
308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	3,822,013,000	4,112,053,000	3,990,609,769	3,600,516	3,987,009,253	96.96	125,043,747
308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	7,860,699,000	7,515,119,000	7,417,749,459	802,032	7,416,947,427	98.69	98,171,573
400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	10,420,340,000	12,035,790,000	12,038,677,716	9,658,481	12,029,019,235	99.94	6,770,765
400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	5,024,254,000	4,906,134,000	4,890,799,254	710	4,890,798,544	99.69	15,335,456
400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	4,405,993,000	4,570,274,000	4,528,193,096	186,076	4,528,007,020	99.08	42,266,980
400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	4,653,623,000	4,418,906,000	4,407,297,887	989,772	4,406,308,115	99.71	12,597,885
400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	20,592,318,000	22,599,318,000	22,569,277,625	72,802,720	22,496,474,905	99.54	102,843,095
401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	3,769,688,000	3,575,388,000	3,569,439,450	328,945	3,569,110,505	99.82	6,277,495
401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	3,179,518,000	2,980,518,000	2,939,903,112	724	2,939,902,388	98.64	40,615,612
401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	6,114,306,000	4,155,142,000	4,076,111,065	632	4,076,110,433	98.1	79,031,567
401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	6,669,026,000	7,050,026,000	7,005,165,025	186,080	7,004,978,945	99.36	45,047,055
401942	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	3,033,578,000	3,261,034,000	3,242,272,762	675,631	3,241,597,131	99.4	19,436,869
576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	12,825,850,000	14,497,861,000	14,478,222,681	2,240	14,478,220,441	99.86	19,640,559
578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	5,082,285,000	4,922,523,000	4,835,601,536	186,004	4,835,415,532	98.23	87,107,468
672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	3,964,167,000	3,630,167,000	3,586,376,384	2,000,420	3,584,375,964	98.74	45,791,036
673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	4,787,216,000	4,579,482,000	4,557,703,014	588	4,557,702,426	99.52	21,779,574
673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	3,885,318,000	4,580,918,000	4,562,420,558	959	4,562,419,599	99.6	18,498,401

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 27
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
673055	PENGADILAN NEGERI TUBEI	3,938,261,000	3,451,761,000	3,408,362,165	331	3,408,361,834	98.74	43,399,166
682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	9,963,166,000	3,384,196,000	3,315,267,973	185,774	3,315,082,199	97.96	69,113,801
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BENGKULU	131,637,774,000	127,538,265,000	126,658,219,322	93,145,186	126,565,074,136	99.31	973,190,864
005012800KD	BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA							
099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	12,159,741,000	9,669,741,000	9,279,837,318	860	9,279,836,458	95.97	389,904,542
099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	4,280,777,000	4,976,640,000	4,914,383,313	1,040	4,914,382,273	98.75	62,257,727
099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	5,714,331,000	5,742,153,000	5,158,264,694	387	5,158,264,307	89.83	583,888,693
099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	5,063,336,000	5,379,986,000	5,310,790,483	1,084	5,310,789,399	98.71	69,196,601
307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	5,647,490,000	6,025,892,000	6,000,944,233	2,170	6,000,942,063	99.59	24,949,937
307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	3,761,791,000	3,670,402,000	3,539,068,954	1,235,902	3,537,833,052	96.39	132,568,948
307801	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	4,347,721,000	3,467,663,000	3,432,794,564	497	3,432,794,067	98.99	34,868,933
307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	3,597,745,000	3,726,442,000	3,680,981,752	690,469	3,680,291,283	98.76	46,150,717
401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	29,928,966,000	31,387,195,000	31,259,813,125	2,750,373	31,257,062,752	99.59	130,132,248
401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	3,800,633,000	5,055,720,000	4,665,975,964	172	4,665,975,792	92.29	389,744,208
440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	14,515,244,000	16,748,712,000	16,288,568,958	1,785	16,288,567,173	97.25	460,144,827
664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	12,677,116,000	11,256,007,000	11,178,932,112	143,565	11,178,788,547	99.31	77,218,453
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA	105,494,891,000	107,106,553,000	104,710,355,470	4,828,304	104,705,527,166	97.76	2,401,025,834
005012900KD	BA(005) ES1(01) BANTEN							
097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	20,339,170,000	18,079,270,000	17,736,275,858	371,562	17,735,904,296	98.1	343,365,704
097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	5,046,440,000	4,934,440,000	4,744,180,596	701,179	4,743,479,417	96.13	190,960,583
097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	23,860,986,000	25,659,986,000	25,493,655,109	559,950	25,493,095,159	99.35	166,890,841
400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	11,597,869,000	10,289,117,000	9,978,648,924	1,887	9,978,647,037	96.98	310,469,963
400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	4,196,945,000	5,352,065,000	5,297,447,822	1,963	5,297,445,859	98.98	54,619,141
400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	9,202,284,000	10,562,284,000	10,485,931,649	3,404,327	10,482,527,322	99.24	79,756,678
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	6,176,968,000	4,356,968,000	4,139,714,433	326	4,139,714,107	95.01	217,253,893
417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	4,290,548,000	4,859,898,000	4,838,200,656	5,373,714	4,832,826,942	99.44	27,071,058
440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	14,089,046,000	12,393,926,000	12,385,674,212	1,660	12,385,672,552	99.93	8,253,448
604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	11,865,641,000	10,471,358,000	10,352,762,196	6,806,260	10,345,955,936	98.8	125,402,064
652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	4,090,912,000	5,005,912,000	4,839,617,368	858	4,839,616,510	96.68	166,295,490
663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	24,890,089,000	31,821,089,000	31,492,068,385	2,640,070	31,489,428,315	98.96	331,660,685
689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	8,373,420,000	10,113,660,000	9,966,258,633	5,041,433	9,961,217,200	98.49	152,442,800
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BANTEN	148,020,318,000	153,899,973,000	151,750,435,841	24,905,189	151,725,530,652	98.6	2,174,442,348
005013000KD	BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG							
099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	11,457,932,000	10,912,932,000	10,839,881,741	726,816	10,839,154,925	99.32	73,777,075

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 28
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	6,453,671,000	6,478,671,000	6,365,135,877	1,107	6,365,134,770	98.25	113,536,230
400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	22,027,085,000	21,777,085,000	21,331,341,720	917	21,331,340,803	97.95	445,744,197
401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	4,627,229,000	3,722,229,000	3,666,904,811	435,544	3,666,469,267	98.5	55,759,733
401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	4,406,553,000	4,406,553,000	4,184,866,633	490,537	4,184,376,096	94.96	222,176,904
401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	4,424,182,000	3,899,182,000	3,855,308,550	28,997,803	3,826,310,747	98.13	72,871,253
402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	4,335,614,000	4,315,614,000	4,259,493,927	540,642	4,258,953,285	98.69	56,660,715
402318	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	3,762,359,000	3,762,359,000	3,741,970,981	599	3,741,970,382	99.46	20,388,618
403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	4,337,729,000	4,318,484,000	3,953,283,375	2,185,840	3,951,097,535	91.49	367,386,465
440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	10,498,374,000	9,198,374,000	9,036,521,236	1,004	9,036,520,232	98.24	161,853,768
663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	15,053,236,000	13,354,236,000	13,313,671,049	7,275,262	13,306,395,787	99.64	47,840,213
682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	3,030,477,000	2,910,477,000	2,745,524,682	1,350,652	2,744,174,030	94.29	166,302,970
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG	94,414,441,000	89,056,196,000	87,293,904,582	42,006,723	87,251,897,859	98.02	1,804,298,141
005013100KD	BA(005) ES1(01) GORONTALO							
099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	9,589,751,000	10,856,043,000	10,771,147,120	5,195,070	10,765,952,050	99.17	90,090,950
307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	6,615,068,000	5,475,068,000	5,320,945,090	181,917	5,320,763,173	97.18	154,304,827
400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	6,562,389,000	6,562,389,000	6,213,724,554	556,301	6,213,168,253	94.68	349,220,747
401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	3,798,584,000	3,934,734,000	3,867,069,008	504,464	3,866,564,544	98.27	68,169,456
401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	17,251,387,000	19,583,351,000	19,596,627,841	172,959,415	19,423,668,426	99.18	159,682,574
401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	19,935,056,000	23,320,651,000	23,276,149,783	1,611	23,276,148,172	99.81	44,502,828
402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	4,884,741,000	5,007,741,000	4,978,548,901	186,181	4,978,362,720	99.41	29,378,280
440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	13,620,354,000	12,780,767,000	12,645,088,376	6,230,716	12,638,857,660	98.89	141,909,340
477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	4,576,479,000	4,576,479,000	4,424,697,630	1,038,351	4,423,659,279	96.66	152,819,721
652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	3,417,180,000	3,290,180,000	3,115,280,799	650	3,115,280,149	94.68	174,899,851
664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	15,195,493,000	12,949,493,000	12,876,000,630	982,236	12,875,018,394	99.42	74,474,606
670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	4,953,467,000	4,953,467,000	4,509,915,910	185,875	4,509,730,035	91.04	443,736,965
682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	3,298,333,000	3,513,333,000	3,481,933,258	735,640	3,481,197,618	99.09	32,135,382
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) GORONTALO	113,698,282,000	116,803,696,000	115,077,128,900	188,758,427	114,888,370,473	98.52	1,915,325,527
005013200KD	PENGADILAN AGAMA BATAM							
098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	13,521,050,000	11,645,310,000	11,584,808,370	5,062,442	11,579,745,928	99.44	65,564,072
108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	10,293,446,000	11,239,800,000	11,177,099,956	808,334	11,176,291,622	99.43	63,508,378
402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	6,335,290,000	5,750,840,000	5,677,572,762	1,068	5,677,571,694	98.73	73,268,306
402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	2,964,305,000	2,945,105,000	2,885,978,371	180,109	2,885,798,262	97.99	59,306,738
402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	3,621,364,000	3,674,364,000	3,611,518,719	1,350,485	3,610,168,234	98.25	64,195,766
402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	3,419,557,000	3,264,557,000	3,158,284,503	8,835,138	3,149,449,365	96.47	115,107,635

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 29
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
526706	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	23,541,404,000	27,682,153,000	27,488,389,939	988	27,488,388,951	99.3	193,764,049
526708	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	23,698,725,000	23,231,725,000	23,161,726,457	3,201,264	23,158,525,193	99.68	73,199,807
547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	8,074,898,000	6,236,898,000	6,177,879,503	3,421,562	6,174,457,941	99	62,440,059
614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	3,514,464,000	3,464,464,000	3,420,683,868	179	3,420,683,689	98.74	43,780,311
663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	4,858,752,000	4,905,872,000	4,862,874,174	574,870	4,862,299,304	99.11	43,572,696
672948	PENGADILAN NEGERI NATUNA	6,201,716,000	6,051,120,000	5,977,826,484	636	5,977,825,848	98.79	73,294,152
689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	5,376,189,000	4,686,689,000	4,213,860,122	536	4,213,859,586	89.91	472,829,414
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN AGAMA BATAM	115,421,160,000	114,778,897,000	113,398,503,228	23,437,611	113,375,065,617	98.8	1,403,831,383
005013300KD	BA(005) ES1(01) PAPUA BARAT							
400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	7,514,554,000	7,696,182,000	7,687,893,544	2,215,721	7,685,677,823	99.86	10,504,177
400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	8,304,238,000	8,310,436,000	7,947,742,165	8,670,181	7,939,071,984	95.53	371,364,016
400081	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	5,756,882,000	4,928,882,000	4,835,618,898	2,088,174	4,833,530,724	98.07	95,351,276
401899	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	20,050,902,000	20,652,901,000	20,382,976,636	2,544,278	20,380,432,358	98.68	272,468,642
401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	4,446,001,000	13,599,001,000	13,404,795,212	942	13,404,794,270	98.57	194,206,730
402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	3,388,959,000	3,245,959,000	3,245,184,919	714	3,245,184,205	99.98	774,795
402902	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	3,580,403,000	3,553,403,000	3,551,502,543	243	3,551,502,300	99.95	1,900,700
402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	4,022,265,000	3,752,265,000	3,619,561,396	366	3,619,561,030	96.46	132,703,970
526716	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	35,696,218,000	23,048,065,000	22,955,987,784	551,065	22,955,436,719	99.6	92,628,281
526718	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	24,106,104,000	13,348,011,000	13,071,060,433	1,104	13,071,059,329	97.93	276,951,671
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) PAPUA BARAT	116,866,526,000	102,135,105,000	100,702,323,530	16,072,788	100,686,250,742	98.6	1,448,854,258
005013400KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI BARAT							
099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	3,789,372,000	3,791,551,000	3,738,659,370	396	3,738,658,974	98.61	52,892,026
099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	20,499,243,000	20,979,243,000	20,824,704,816	70,917	20,824,633,899	99.26	154,609,101
099642	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	4,416,076,000	4,576,076,000	4,495,856,929	742	4,495,856,187	98.25	80,219,813
307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	4,032,646,000	4,032,646,000	3,776,385,753	538	3,776,385,215	93.65	256,260,785
307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	2,964,773,000	4,023,773,000	3,866,219,910	120,662	3,866,099,248	96.08	157,673,752
307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	3,314,404,000	3,784,404,000	3,726,706,366	527,464	3,726,178,902	98.46	58,225,098
401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	16,642,281,000	19,039,621,000	18,791,488,546	365	18,791,488,181	98.7	248,132,819
526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	43,770,224,000	34,185,510,000	33,721,618,917	5,036,400	33,716,582,517	98.63	468,927,483
526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	44,546,654,000	47,074,758,000	45,836,929,760	4,944,311	45,831,985,449	97.36	1,242,772,551
681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	4,534,579,000	4,224,579,000	4,166,740,185	837,099	4,165,903,086	98.61	58,675,914
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI BARAT	148,510,252,000	145,712,161,000	142,945,310,552	11,538,894	142,933,771,658	98.1	2,778,389,342
005013500KD	UAPPAW 005013500 KALIMANTAN UTARA							
099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	4,507,859,000	4,857,859,000	4,765,823,922	666,346	4,765,157,576	98.09	92,701,424

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 30
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	3,131,185,000	3,316,185,000	3,287,589,011	530,487	3,287,058,524	99.12	29,126,476
417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	3,492,421,000	3,481,061,000	3,396,157,925	3,438,462	3,392,719,463	97.46	88,341,537
417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	3,216,339,000	3,136,339,000	3,086,457,396	496	3,086,456,900	98.41	49,882,100
417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	4,602,072,000	5,036,072,000	4,933,934,465	564,377	4,933,370,088	97.96	102,701,912
477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	4,249,999,000	4,338,999,000	4,165,169,760	263	4,165,169,497	95.99	173,829,503
526720	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	33,149,561,000	11,130,561,000	11,005,648,430	186,022	11,005,462,408	98.88	125,098,592
526722	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	38,615,708,000	12,802,289,000	12,696,951,094	4,226,508	12,692,724,586	99.14	109,564,414
682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	3,929,230,000	3,509,230,000	3,364,227,908	2,400,321	3,361,827,587	95.8	147,402,413
	JUMLAH BELANJA UAPPAW 005013500 KALIMANTAN UTARA	98,894,374,000	51,608,595,000	50,701,959,911	12,013,282	50,689,946,629	98.24	918,648,371
	JUMLAH BELANJA 01	11,140,083,099,000	11,050,043,729,000	10,784,665,171,546	3,730,913,155	10,780,934,258,391	97.6	269109470609
02	KEPANITERAAN							
005020100KP	SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG							
004028	KEPANITERAAN	212,525,960,000	222,006,897,000	220,611,539,527	98,396,611	220,513,142,916	99.33	1,493,754,084
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG	212,525,960,000	222,006,897,000	220,611,539,527	98,396,611	220,513,142,916	99.37	1,493,754,084
	JUMLAH BELANJA 02	212,525,960,000	222,006,897,000	220,611,539,527	98,396,611	220,513,142,916	99.37	1493754084
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM							
005030100KD	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA							
099062	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	409,015,000	409,015,000	408,842,320	0	408,842,320	99.96	172,680
099063	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	1,167,222,000	1,167,222,000	1,142,047,760	0	1,142,047,760	97.84	25,174,240
099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	738,728,000	738,728,000	717,756,262	0	717,756,262	97.16	20,971,738
099065	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	805,648,000	806,967,000	804,501,091	0	804,501,091	99.69	2,465,909
400215	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	648,199,000	648,199,000	635,224,005	0	635,224,005	98	12,974,995
400221	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	833,637,000	833,637,000	831,186,355	0	831,186,355	99.71	2,450,645
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	4,602,449,000	4,603,768,000	4,539,557,793	0	4,539,557,793	98.61	64,210,207
005030100KP	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA							
097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	60,676,366,000	64,629,807,000	63,223,075,714	318,101,904	62,904,973,810	97.33	1,724,833,190
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	60,676,366,000	64,629,807,000	63,223,075,714	318,101,904	62,904,973,810	97.82	1,724,833,190
005030200KD	BA(005) ES1(03) JAWA BARAT							
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	485,860,000	555,860,000	554,776,351	0	554,776,351	99.81	1,083,649
099068	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	955,310,000	1,055,310,000	1,050,216,502	0	1,050,216,502	99.52	5,093,498
099069	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	154,860,000	154,860,000	151,037,800	0	151,037,800	97.53	3,822,200
099071	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	131,240,000	151,240,000	147,054,560	0	147,054,560	97.23	4,185,440
099072	PENGADILAN NEGERI GARUT	262,294,000	300,879,000	290,620,345	0	290,620,345	96.59	10,258,655
099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	132,515,000	132,515,000	129,114,600	0	129,114,600	97.43	3,400,400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 31
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099078	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	206,170,000	206,170,000	201,125,900	0	201,125,900	97.55	5,044,100
099079	PENGADILAN NEGERI BEKASI	453,850,000	453,850,000	449,457,746	0	449,457,746	99.03	4,392,254
099080	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	150,010,000	150,010,000	147,512,568	4,037,000	143,475,568	95.64	6,534,432
099081	PENGADILAN NEGERI SUBANG	226,883,000	318,223,000	317,811,375	0	317,811,375	99.87	411,625
099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	114,740,000	144,262,000	143,055,287	0	143,055,287	99.16	1,206,713
099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	189,500,000	189,500,000	185,728,160	0	185,728,160	98.01	3,771,840
099084	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	196,200,000	196,200,000	194,357,000	0	194,357,000	99.06	1,843,000
099085	PENGADILAN NEGERI CIREBON	146,700,000	146,700,000	143,816,850	0	143,816,850	98.03	2,883,150
099086	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	200,750,000	200,750,000	200,286,500	0	200,286,500	99.77	463,500
099088	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	112,280,000	112,280,000	107,842,945	0	107,842,945	96.05	4,437,055
099089	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	204,778,000	204,778,000	183,052,500	0	183,052,500	89.39	21,725,500
400410	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	170,978,000	170,978,000	165,214,381	0	165,214,381	96.63	5,763,619
400478	PENGADILAN NEGERI SUMBER	185,100,000	185,100,000	184,286,000	0	184,286,000	99.56	814,000
400484	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	350,140,000	350,140,000	329,568,000	0	329,568,000	94.12	20,572,000
402022	PENGADILAN NEGERI BANJAR	75,140,000	75,140,000	71,378,096	0	71,378,096	94.99	3,761,904
402023	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	351,450,000	351,450,000	348,124,419	0	348,124,419	99.05	3,325,581
477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	365,940,000	365,940,000	360,842,280	0	360,842,280	98.61	5,097,720
613520	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	402,140,000	457,140,000	452,236,300	0	452,236,300	98.93	4,903,700
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) JAWA BARAT	6,224,828,000	6,629,275,000	6,508,516,465	4,037,000	6,504,479,465	98.18	124,795,535
005030300KD	BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH							
099090	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	464,000,000	464,000,000	456,403,934	0	456,403,934	98.36	7,596,066
099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	514,200,000	514,200,000	504,293,248	0	504,293,248	98.07	9,906,752
099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	131,510,000	118,860,000	117,359,600	0	117,359,600	98.74	1,500,400
099094	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	186,240,000	186,240,000	178,593,585	0	178,593,585	95.89	7,646,415
099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	103,050,000	103,050,000	101,030,112	70,000	100,960,112	97.97	2,089,888
099096	PENGADILAN NEGERI PATI	196,396,000	196,396,000	194,248,112	0	194,248,112	98.91	2,147,888
099097	PENGADILAN NEGERI BREBES	107,340,000	107,340,000	104,989,600	0	104,989,600	97.81	2,350,400
099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	136,253,000	136,253,000	134,971,400	0	134,971,400	99.06	1,281,600
099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	100,840,000	100,840,000	98,172,100	0	98,172,100	97.35	2,667,900
099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	114,600,000	144,600,000	143,832,500	0	143,832,500	99.47	767,500
099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	155,408,000	155,408,000	154,076,550	0	154,076,550	99.14	1,331,450
099102	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	121,300,000	121,300,000	112,361,080	0	112,361,080	92.63	8,938,920
099103	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	119,500,000	119,500,000	119,330,000	0	119,330,000	99.86	170,000
099104	PENGADILAN NEGERI JEPARA	155,315,000	155,315,000	153,255,100	0	153,255,100	98.67	2,059,900

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 32
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	96,000,000	96,000,000	94,021,100	0	94,021,100	97.94	1,978,900
099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	135,840,000	135,840,000	133,716,300	0	133,716,300	98.44	2,123,700
099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	105,319,000	120,319,000	120,142,260	0	120,142,260	99.85	176,740
099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	147,410,000	147,410,000	141,398,115	0	141,398,115	95.92	6,011,885
099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	64,150,000	64,150,000	64,130,000	0	64,130,000	99.97	20,000
099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	77,900,000	77,900,000	77,353,000	0	77,353,000	99.3	547,000
099112	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	96,338,000	96,338,000	94,249,800	0	94,249,800	97.83	2,088,200
099114	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	74,500,000	74,500,000	73,002,135	0	73,002,135	97.99	1,497,865
099115	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	298,170,000	298,170,000	294,398,360	10,000	294,388,360	98.73	3,781,640
099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	77,500,000	77,500,000	77,454,500	0	77,454,500	99.94	45,500
099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	63,600,000	63,600,000	62,460,120	0	62,460,120	98.21	1,139,880
099118	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	125,290,000	125,290,000	120,250,000	0	120,250,000	95.98	5,040,000
099119	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	151,700,000	151,700,000	150,607,425	0	150,607,425	99.28	1,092,575
099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	106,948,000	106,948,000	105,328,000	0	105,328,000	98.49	1,620,000
099122	PENGADILAN NEGERI KLATEN	139,000,000	139,000,000	137,291,125	0	137,291,125	98.77	1,708,875
099123	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	137,054,000	137,054,000	136,051,250	2,000	136,049,250	99.27	1,004,750
099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	259,947,000	259,947,000	255,215,480	0	255,215,480	98.18	4,731,520
099125	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	72,500,000	82,500,000	82,384,500	0	82,384,500	99.86	115,500
099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	117,910,000	117,910,000	115,132,770	40,000	115,092,770	97.61	2,817,230
099127	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	101,800,000	101,800,000	101,034,000	0	101,034,000	99.25	766,000
400566	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	110,470,000	110,470,000	108,005,630	0	108,005,630	97.77	2,464,370
400572	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	120,400,000	120,400,000	120,258,700	0	120,258,700	99.88	141,300
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH	5,285,698,000	5,328,048,000	5,236,801,491	122,000	5,236,679,491	98.29	91,368,509
005030400KD	BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA							
099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	337,423,000	297,423,000	292,128,000	0	292,128,000	98.22	5,295,000
099129	PENGADILAN NEGERI WATES	121,532,000	121,532,000	119,437,500	0	119,437,500	98.28	2,094,500
099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	108,421,000	108,421,000	108,371,345	0	108,371,345	99.95	49,655
099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	317,010,000	317,010,000	314,468,548	0	314,468,548	99.2	2,541,452
400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	139,510,000	139,510,000	137,669,200	0	137,669,200	98.68	1,840,800
400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	162,560,000	162,560,000	161,066,050	0	161,066,050	99.08	1,493,950
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA	1,186,456,000	1,146,456,000	1,133,140,643	0	1,133,140,643	98.84	13,315,357
005030500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya							
099132	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	634,900,000	564,900,000	563,574,986	0	563,574,986	99.77	1,325,014
099133	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	1,109,100,000	1,195,700,000	1,122,929,231	0	1,122,929,231	93.91	72,770,769

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 33
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	196,250,000	196,250,000	194,710,650	835,000	193,875,650	98.79	2,374,350
099136	PENGADILAN NEGERI TUBAN	224,500,000	204,500,000	202,854,348	0	202,854,348	99.2	1,645,652
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	134,500,000	134,500,000	132,304,732	0	132,304,732	98.37	2,195,268
099138	PENGADILAN NEGERI GRESIK	209,657,000	209,657,000	206,724,996	0	206,724,996	98.6	2,932,004
099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	336,400,000	336,400,000	324,166,333	0	324,166,333	96.36	12,233,667
099140	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	182,060,000	181,910,000	181,069,492	0	181,069,492	99.54	840,508
099142	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	176,266,000	176,266,000	176,066,000	0	176,066,000	99.89	200,000
099143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	151,000,000	146,800,000	145,472,578	0	145,472,578	99.1	1,327,422
099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	283,840,000	283,840,000	283,122,500	0	283,122,500	99.75	717,500
099145	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	216,980,000	215,480,000	215,125,902	0	215,125,902	99.84	354,098
099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	107,940,000	87,940,000	87,605,995	0	87,605,995	99.62	334,005
099147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	130,510,000	130,510,000	129,214,979	0	129,214,979	99.01	1,295,021
099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	142,510,000	140,969,000	130,138,678	0	130,138,678	92.32	10,830,322
099149	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	176,340,000	176,340,000	175,555,400	0	175,555,400	99.56	784,600
099150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	116,400,000	115,404,000	114,409,000	0	114,409,000	99.14	995,000
099151	PENGADILAN NEGERI BLITAR	189,717,000	189,717,000	189,043,660	0	189,043,660	99.65	673,340
099152	PENGADILAN NEGERI MALANG	362,710,000	362,710,000	353,640,915	0	353,640,915	97.5	9,069,085
099153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	124,100,000	124,100,000	124,094,100	0	124,094,100	100	5,900
099154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	126,180,000	126,180,000	123,741,009	0	123,741,009	98.07	2,438,991
099156	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	213,840,000	213,840,000	207,789,152	0	207,789,152	97.17	6,050,848
099157	PENGADILAN NEGERI BANGIL	254,850,000	254,750,000	254,653,045	0	254,653,045	99.96	96,955
099158	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	162,950,000	142,950,000	140,835,985	0	140,835,985	98.52	2,114,015
099159	PENGADILAN NEGERI MADIUN	92,550,000	92,550,000	87,704,500	0	87,704,500	94.76	4,845,500
099160	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	199,500,000	199,500,000	185,748,200	0	185,748,200	93.11	13,751,800
099161	PENGADILAN NEGERI PACITAN	59,840,000	59,840,000	58,394,436	0	58,394,436	97.58	1,445,564
099163	PENGADILAN NEGERI NGAWI	140,360,000	125,360,000	116,752,500	0	116,752,500	93.13	8,607,500
099164	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	139,500,000	139,500,000	138,688,000	0	138,688,000	99.42	812,000
099165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	100,237,000	100,237,000	95,634,150	0	95,634,150	95.41	4,602,850
099166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	105,635,000	105,635,000	105,177,860	0	105,177,860	99.57	457,140
099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	99,866,000	99,866,000	95,521,940	0	95,521,940	95.65	4,344,060
099168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	171,100,000	192,050,000	191,980,500	0	191,980,500	99.96	69,500
400581	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	164,000,000	164,000,000	163,566,277	0	163,566,277	99.74	433,723
400597	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	134,327,000	116,460,000	112,450,000	0	112,450,000	96.56	4,010,000
626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	195,766,000	195,766,000	189,179,248	0	189,179,248	96.64	6,586,752

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 34
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Surabaya	7,566,181,000	7,502,377,000	7,319,641,277	835,000	7,318,806,277	97.56	183,570,723
005030600KD	BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
099169	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	337,474,000	559,549,000	546,348,039	600	546,347,439	97.64	13,201,561
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	418,490,000	399,635,000	395,490,000	0	395,490,000	98.96	4,145,000
099171	PENGADILAN NEGERI SABANG	58,900,000	55,188,000	54,128,000	0	54,128,000	98.08	1,060,000
099172	PENGADILAN NEGERI SIGLI	135,250,000	123,760,000	111,400,500	0	111,400,500	90.01	12,359,500
099173	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	155,500,000	143,341,000	143,325,000	0	143,325,000	99.99	16,000
099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	187,450,000	170,020,000	163,148,500	0	163,148,500	95.96	6,871,500
099175	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	173,150,000	161,348,000	154,462,630	0	154,462,630	95.73	6,885,370
099177	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	93,900,000	86,100,000	81,024,000	0	81,024,000	94.1	5,076,000
099178	PENGADILAN NEGERI LANGSA	101,000,000	93,272,000	92,750,400	0	92,750,400	99.44	521,600
099179	PENGADILAN NEGERI IDI	109,500,000	100,205,000	99,650,400	0	99,650,400	99.45	554,600
099181	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	143,340,000	118,283,000	112,115,620	0	112,115,620	94.79	6,167,380
099182	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	46,200,000	42,340,000	42,019,050	0	42,019,050	99.24	320,950
099183	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	87,100,000	80,905,000	79,065,000	0	79,065,000	97.73	1,840,000
099184	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	105,100,000	93,613,000	87,425,000	0	87,425,000	93.39	6,188,000
099185	PENGADILAN NEGERI CALANG	55,420,000	51,460,000	51,096,460	0	51,096,460	99.29	363,540
099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG	48,569,000	46,399,000	45,221,000	0	45,221,000	97.46	1,178,000
099187	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	75,500,000	69,335,000	63,210,000	0	63,210,000	91.17	6,125,000
099188	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	365,840,000	355,840,000	347,788,800	0	347,788,800	97.74	8,051,200
400416	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	141,500,000	114,350,000	114,197,000	0	114,197,000	99.87	153,000
402008	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	63,700,000	59,710,000	58,553,430	0	58,553,430	98.06	1,156,570
402009	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	97,000,000	90,070,000	89,998,500	0	89,998,500	99.92	71,500
402012	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	82,760,000	75,560,000	71,891,000	0	71,891,000	95.14	3,669,000
689969	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	72,500,000	67,460,000	63,880,400	0	63,880,400	94.69	3,579,600
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,155,143,000	3,157,743,000	3,068,188,729	600	3,068,188,129	97.16	89,554,871
005030700KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA							
099189	PENGADILAN TINGGI MEDAN	434,830,000	604,830,000	594,851,636	0	594,851,636	98.35	9,978,364
099190	PENGADILAN NEGERI MEDAN	1,300,170,000	1,300,170,000	1,232,780,500	0	1,232,780,500	94.82	67,389,500
099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	192,900,000	192,900,000	191,166,000	0	191,166,000	99.1	1,734,000
099192	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	180,379,000	180,379,000	175,810,143	0	175,810,143	97.47	4,568,857
099193	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	147,810,000	147,810,000	146,576,225	0	146,576,225	99.17	1,233,775
099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	181,020,000	181,020,000	177,487,000	0	177,487,000	98.05	3,533,000
099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	424,987,000	424,987,000	424,431,500	0	424,431,500	99.87	555,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 35
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	166,394,000	166,394,000	161,898,060	0	161,898,060	97.3	4,495,940
099198	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	361,750,000	361,750,000	350,035,000	1,100,000	348,935,000	96.46	12,815,000
099199	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	154,100,000	154,100,000	151,826,500	0	151,826,500	98.52	2,273,500
099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	241,700,000	241,700,000	228,811,500	0	228,811,500	94.67	12,888,500
099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	527,342,000	512,340,000	493,393,000	0	493,393,000	96.3	18,947,000
099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	206,180,000	186,180,000	181,402,000	757,000	180,645,000	97.03	5,535,000
109063	PENGADILAN NEGERI STABAT	652,362,000	639,452,000	630,344,760	0	630,344,760	98.58	9,107,240
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	312,500,000	312,500,000	312,247,950	0	312,247,950	99.92	252,050
400390	PENGADILAN NEGERI KISARAN	264,510,000	264,510,000	262,967,780	0	262,967,780	99.42	1,542,220
400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	855,600,000	815,984,000	809,211,210	0	809,211,210	99.17	6,772,790
402013	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	265,760,000	265,760,000	261,929,000	0	261,929,000	98.56	3,831,000
402014	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	110,510,000	110,510,000	102,876,500	0	102,876,500	93.09	7,633,500
477401	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	254,619,000	254,619,000	248,030,000	7,000	248,023,000	97.41	6,596,000
672911	PENGADILAN NEGERI BALIGE	278,701,000	268,582,000	239,896,250	1,330,000	238,566,250	88.82	30,015,750
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA	7,514,124,000	7,586,477,000	7,377,972,514	3,194,000	7,374,778,514	97.25	211,698,486
005030800KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT							
099204	PENGADILAN TINGGI PADANG	256,280,000	328,043,000	311,825,600	0	311,825,600	95.06	16,217,400
099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	539,470,000	512,949,000	484,660,500	0	484,660,500	94.49	28,288,500
099206	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	55,000,000	53,526,000	53,488,500	0	53,488,500	99.93	37,500
099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	89,500,000	89,500,000	89,362,800	0	89,362,800	99.85	137,200
099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	63,410,000	63,410,000	63,174,310	0	63,174,310	99.63	235,690
099209	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	219,900,000	219,900,000	219,889,560	0	219,889,560	100	10,440
099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	114,902,000	106,700,000	88,520,185	0	88,520,185	82.96	18,179,815
099211	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	111,850,000	116,850,000	116,759,500	0	116,759,500	99.92	90,500
099212	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	66,400,000	67,900,000	67,900,000	0	67,900,000	100	0
099213	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	93,840,000	99,240,000	98,043,780	0	98,043,780	98.79	1,196,220
400189	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	58,750,000	52,000,000	51,716,090	0	51,716,090	99.45	283,910
400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	121,515,000	126,627,000	125,100,660	0	125,100,660	98.79	1,526,340
400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	134,473,000	152,675,000	152,619,320	0	152,619,320	99.96	55,680
400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	159,900,000	159,900,000	158,901,700	0	158,901,700	99.38	998,300
400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	72,680,000	72,680,000	72,349,200	0	72,349,200	99.54	330,800
402015	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	87,086,000	89,086,000	85,433,190	0	85,433,190	95.9	3,652,810
477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	159,956,000	143,616,000	143,616,000	0	143,616,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT	2,404,912,000	2,454,602,000	2,383,360,895	0	2,383,360,895	97.1	71,241,105

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
005030900KD	BA(005) ES1(03) RIAU							
099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	548,190,000	548,190,000	540,233,640	4,630,500	535,603,140	97.7	12,586,860
099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	593,252,000	592,672,000	592,666,930	0	592,666,930	100	5,070
099216	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	151,100,000	151,100,000	146,198,000	0	146,198,000	96.76	4,902,000
099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	148,360,000	148,360,000	146,302,300	0	146,302,300	98.61	2,057,700
400142	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	240,840,000	240,840,000	240,839,000	0	240,839,000	100	1,000
400328	PENGADILAN NEGERI DUMAI	228,600,000	228,600,000	228,547,955	0	228,547,955	99.98	52,045
400493	PENGADILAN TINGGI RIAU	235,514,000	235,514,000	235,483,834	0	235,483,834	99.99	30,166
402016	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	155,500,000	257,350,000	251,540,419	0	251,540,419	97.74	5,809,581
477256	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	202,340,000	154,784,000	152,277,310	0	152,277,310	98.38	2,506,690
477262	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	232,500,000	232,500,000	230,644,000	8,160,000	222,484,000	95.69	10,016,000
477344	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	164,100,000	164,100,000	161,149,865	0	161,149,865	98.2	2,950,135
662991	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	221,732,000	221,732,000	216,067,915	0	216,067,915	97.45	5,664,085
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) RIAU	3,122,028,000	3,175,742,000	3,141,951,168	12,790,500	3,129,160,668	98.94	46,581,332
005031000KD	BA(005) ES1(03) JAMBI							
099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	355,130,000	355,130,000	352,062,850	273,500	351,789,350	99.06	3,340,650
099221	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	157,500,000	157,500,000	157,275,450	0	157,275,450	99.86	224,550
099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	127,440,000	127,440,000	126,228,160	0	126,228,160	99.05	1,211,840
099224	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	102,220,000	102,220,000	102,213,280	0	102,213,280	99.99	6,720
400312	PENGADILAN NEGERI BANGKO	187,140,000	187,140,000	174,355,110	0	174,355,110	93.17	12,784,890
400431	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	119,220,000	117,880,000	117,783,800	0	117,783,800	99.92	96,200
400504	PENGADILAN TINGGI JAMBI	219,850,000	219,850,000	219,664,050	0	219,664,050	99.92	185,950
477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	119,000,000	112,779,000	112,746,760	0	112,746,760	99.97	32,240
477375	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	141,400,000	126,400,000	119,054,698	0	119,054,698	94.19	7,345,302
477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	90,000,000	103,620,000	96,104,200	150,000	95,954,200	92.6	7,665,800
663013	PENGADILAN NEGERI SENGETI	148,620,000	148,620,000	145,036,524	0	145,036,524	97.59	3,583,476
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) JAMBI	1,767,520,000	1,758,579,000	1,722,524,882	423,500	1,722,101,382	97.95	36,477,618
005031100KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN							
099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	229,500,000	229,500,000	228,850,595	760,000	228,090,595	99.39	1,409,405
099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	786,485,000	591,740,000	475,544,100	0	475,544,100	80.36	116,195,900
099227	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	233,360,000	263,360,000	257,062,840	0	257,062,840	97.61	6,297,160
099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	532,922,000	532,922,000	507,225,000	1,020,000	506,205,000	94.99	26,717,000
099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	375,650,000	295,650,000	273,487,900	0	273,487,900	92.5	22,162,100
099231	PENGADILAN NEGERI LAHAT	435,639,000	435,639,000	405,530,196	0	405,530,196	93.09	30,108,804

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 37
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	358,940,000	358,940,000	355,669,050	0	355,669,050	99.09	3,270,950
099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	227,270,000	227,270,000	219,007,290	0	219,007,290	96.36	8,262,710
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	171,800,000	171,800,000	167,544,841	0	167,544,841	97.52	4,255,159
672953	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	134,750,000	134,750,000	125,789,781	125,000	125,664,781	93.26	9,085,219
672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	83,100,000	83,100,000	67,983,000	0	67,983,000	81.81	15,117,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN	3,569,416,000	3,324,671,000	3,083,694,593	1,905,000	3,081,789,593	92.75	242,881,407
005031200KD	BA(005) ES1(03) LAMPUNG							
099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	535,480,000	535,480,000	515,188,165	0	515,188,165	96.21	20,291,835
099237	PENGADILAN NEGERI METRO	142,010,000	142,010,000	141,453,500	0	141,453,500	99.61	556,500
099238	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	224,400,000	224,400,000	217,889,000	0	217,889,000	97.1	6,511,000
400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	256,240,000	256,240,000	253,940,788	0	253,940,788	99.1	2,299,212
400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	232,500,000	232,500,000	232,240,000	0	232,240,000	99.89	260,000
402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	135,800,000	135,800,000	134,843,600	0	134,843,600	99.3	956,400
477307	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	179,325,000	179,325,000	152,479,800	0	152,479,800	85.03	26,845,200
614884	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	164,350,000	164,350,000	163,871,950	0	163,871,950	99.71	478,050
663027	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	225,720,000	225,720,000	201,073,950	0	201,073,950	89.08	24,646,050
663031	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	218,840,000	218,840,000	217,746,000	0	217,746,000	99.5	1,094,000
663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	243,370,000	218,370,000	216,694,300	0	216,694,300	99.23	1,675,700
663052	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	129,200,000	129,200,000	129,197,900	0	129,197,900	100	2,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) LAMPUNG	2,687,235,000	2,662,235,000	2,576,618,953	0	2,576,618,953	96.78	85,616,047
005031300KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT							
099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	472,960,000	460,260,000	449,880,059	0	449,880,059	97.74	10,379,941
099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	156,560,000	150,200,000	150,190,000	0	150,190,000	99.99	10,000
099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	192,270,000	192,270,000	191,957,500	0	191,957,500	99.84	312,500
099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	150,837,000	144,697,000	144,173,490	0	144,173,490	99.64	523,510
099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	202,670,000	202,670,000	200,084,888	0	200,084,888	98.72	2,585,112
099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	265,291,000	244,341,000	243,590,824	52,000	243,538,824	99.67	802,176
400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	73,500,000	73,500,000	73,479,545	0	73,479,545	99.97	20,455
400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	290,800,000	360,800,000	354,751,764	0	354,751,764	98.32	6,048,236
670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	149,590,000	148,519,000	148,040,200	29,000	148,011,200	99.66	507,800
670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	100,170,000	100,170,000	94,354,500	0	94,354,500	94.19	5,815,500
689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	105,156,000	105,156,000	101,962,000	0	101,962,000	96.96	3,194,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT	2,159,804,000	2,182,583,000	2,152,464,770	81,000	2,152,383,770	98.62	30,199,230
005031400KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 38
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	281,060,000	245,450,000	229,473,150	0	229,473,150	93.49	15,976,850
099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	205,000,000	205,000,000	204,938,000	0	204,938,000	99.97	62,000
099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	172,510,000	172,510,000	170,161,125	0	170,161,125	98.64	2,348,875
099249	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	163,500,000	203,500,000	198,800,000	0	198,800,000	97.69	4,700,000
099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	109,500,000	109,500,000	100,602,432	0	100,602,432	91.87	8,897,568
099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	255,500,000	255,500,000	254,908,500	0	254,908,500	99.77	591,500
400359	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	220,090,000	285,700,000	274,028,230	0	274,028,230	95.91	11,671,770
402024	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	88,922,000	88,922,000	86,519,500	0	86,519,500	97.3	2,402,500
402025	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	103,815,000	103,815,000	102,975,623	0	102,975,623	99.19	839,377
402026	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	193,591,000	193,591,000	192,531,715	0	192,531,715	99.45	1,059,285
670192	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	84,840,000	84,840,000	84,271,000	0	84,271,000	99.33	569,000
679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	109,500,000	109,500,000	109,207,996	0	109,207,996	99.73	292,004
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	1,987,828,000	2,057,828,000	2,008,417,271	0	2,008,417,271	97.6	49,410,729
005031500KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN							
099253	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	254,650,000	254,650,000	244,585,637	9,000	244,576,637	96.04	10,073,363
099254	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	466,060,000	466,060,000	457,268,140	0	457,268,140	98.11	8,791,860
099255	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	159,315,000	159,315,000	159,313,000	0	159,313,000	100	2,000
099256	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	246,840,000	205,500,000	204,225,670	0	204,225,670	99.38	1,274,330
099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	116,340,000	116,340,000	110,858,150	0	110,858,150	95.29	5,481,850
099258	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	258,170,000	258,170,000	257,856,172	0	257,856,172	99.88	313,828
099259	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	97,000,000	97,000,000	93,610,800	0	93,610,800	96.51	3,389,200
099260	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	68,526,000	68,526,000	65,751,425	0	65,751,425	95.95	2,774,575
099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	103,670,000	103,670,000	102,125,000	0	102,125,000	98.51	1,545,000
400261	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	159,670,000	159,670,000	158,391,170	0	158,391,170	99.2	1,278,830
400283	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	214,850,000	214,850,000	211,730,000	0	211,730,000	98.55	3,120,000
402027	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	65,500,000	65,500,000	65,286,000	0	65,286,000	99.67	214,000
653459	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	124,420,000	124,420,000	123,665,100	0	123,665,100	99.39	754,900
690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	146,500,000	146,500,000	144,942,600	0	144,942,600	98.94	1,557,400
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN	2,481,511,000	2,440,171,000	2,399,608,864	9,000	2,399,599,864	98.34	40,571,136
005031600KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR							
099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	418,600,000	409,730,000	405,506,650	50,000	405,456,650	98.96	4,273,350
099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	293,340,000	293,340,000	292,198,700	0	292,198,700	99.61	1,141,300
099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	234,340,000	234,340,000	232,021,540	0	232,021,540	99.01	2,318,460
400292	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	143,440,000	143,440,000	138,681,800	0	138,681,800	96.68	4,758,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 39
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
400303	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	121,870,000	121,870,000	118,319,410	0	118,319,410	97.09	3,550,590
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	280,690,000	280,690,000	262,060,200	0	262,060,200	93.36	18,629,800
402028	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	95,635,000	95,635,000	95,057,600	0	95,057,600	99.4	577,400
477381	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	111,770,000	111,770,000	107,664,458	0	107,664,458	96.33	4,105,542
662973	PENGADILAN NEGERI BONTANG	110,040,000	110,040,000	106,935,829	405,000	106,530,829	96.81	3,509,171
662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	151,670,000	151,670,000	145,705,500	0	145,705,500	96.07	5,964,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR	1,961,395,000	1,952,525,000	1,904,151,687	455,000	1,903,696,687	97.52	48,828,313
005031700KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA							
099313	PENGADILAN TINGGI MANADO	193,775,000	193,775,000	187,401,760	0	187,401,760	96.71	6,373,240
099330	PENGADILAN NEGERI MANADO	421,310,000	396,310,000	356,808,630	0	356,808,630	90.03	39,501,370
099334	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	154,733,000	154,733,000	150,330,000	0	150,330,000	97.15	4,403,000
099341	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	312,112,000	312,112,000	297,395,326	0	297,395,326	95.28	14,716,674
099355	PENGADILAN NEGERI TONDANO	183,310,000	163,310,000	160,907,502	0	160,907,502	98.53	2,402,498
402031	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	264,000,000	264,185,000	263,892,890	0	263,892,890	99.89	292,110
568726	PENGADILAN NEGERI BITUNG	147,150,000	147,150,000	145,346,900	0	145,346,900	98.77	1,803,100
670211	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	113,170,000	113,170,000	108,098,500	0	108,098,500	95.52	5,071,500
673035	PENGADILAN NEGERI AMURANG	95,810,000	95,810,000	94,575,580	0	94,575,580	98.71	1,234,420
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA	1,885,370,000	1,840,555,000	1,764,757,088	0	1,764,757,088	95.88	75,797,912
005031800KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI							
099376	PENGADILAN NEGERI PALU	299,000,000	299,000,000	271,199,450	0	271,199,450	90.7	27,800,550
099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	88,320,000	88,320,000	85,043,000	0	85,043,000	96.29	3,277,000
099397	PENGADILAN NEGERI LUWUK	136,138,000	136,138,000	135,610,000	0	135,610,000	99.61	528,000
099402	PENGADILAN NEGERI POSO	264,500,000	264,500,000	263,707,459	0	263,707,459	99.7	792,541
400535	PENGADILAN TINGGI PALU	183,322,000	183,322,000	159,265,116	0	159,265,116	86.88	24,056,884
477203	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	123,840,000	123,840,000	123,771,460	0	123,771,460	99.94	68,540
670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	100,296,000	100,296,000	65,290,000	0	65,290,000	65.1	35,006,000
672981	PENGADILAN NEGERI PARIGI	128,955,000	128,955,000	121,462,910	0	121,462,910	94.19	7,492,090
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI SULTENG]	1,324,371,000	1,324,371,000	1,225,349,395	0	1,225,349,395	92.52	99,021,605
005031900KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN							
099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	361,420,000	411,420,000	408,221,492	0	408,221,492	99.22	3,198,508
099423	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	725,631,000	595,631,000	566,560,958	0	566,560,958	95.12	29,070,042
099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	143,253,000	143,253,000	141,696,500	0	141,696,500	98.91	1,556,500
099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	75,230,000	75,230,000	64,926,000	0	64,926,000	86.3	10,304,000
099451	PENGADILAN NEGERI BARRU	62,170,000	62,170,000	57,124,280	65,000	57,059,280	91.78	5,110,720

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 40
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	113,185,000	113,185,000	99,427,675	0	99,427,675	87.85	13,757,325
099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	118,840,000	118,646,000	114,118,750	0	114,118,750	96.18	4,527,250
099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	95,170,000	95,170,000	94,377,500	0	94,377,500	99.17	792,500
099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	108,610,000	108,610,000	107,973,000	0	107,973,000	99.41	637,000
099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	80,040,000	80,040,000	75,141,975	0	75,141,975	93.88	4,898,025
099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	104,770,000	104,770,000	103,783,640	0	103,783,640	99.06	986,360
099529	PENGADILAN NEGERI PINRANG	113,770,000	143,770,000	143,659,285	0	143,659,285	99.92	110,715
099533	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	145,257,000	145,257,000	134,547,500	0	134,547,500	92.63	10,709,500
099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	76,771,000	76,771,000	73,585,665	0	73,585,665	95.85	3,185,335
099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	155,966,000	155,966,000	149,730,172	0	149,730,172	96	6,235,828
099561	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	91,500,000	91,500,000	87,430,600	0	87,430,600	95.55	4,069,400
099575	PENGADILAN NEGERI SINJAI	95,124,000	95,124,000	94,831,000	0	94,831,000	99.69	293,000
099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	113,570,000	113,570,000	111,957,300	0	111,957,300	98.58	1,612,700
099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	156,849,000	156,849,000	156,409,120	0	156,409,120	99.72	439,880
099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	123,840,000	113,840,000	111,628,500	0	111,628,500	98.06	2,211,500
099618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	105,750,000	105,750,000	104,842,965	0	104,842,965	99.14	907,035
402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	79,670,000	79,670,000	74,944,410	0	74,944,410	94.07	4,725,590
672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	87,900,000	87,900,000	86,105,500	0	86,105,500	97.96	1,794,500
673014	PENGADILAN NEGERI MALILI	116,809,000	101,809,000	93,211,775	0	93,211,775	91.56	8,597,225
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN	3,451,095,000	3,375,901,000	3,256,235,562	65,000	3,256,170,562	96.46	119,730,438
005032000KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA							
099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	259,000,000	259,000,000	257,023,159	0	257,023,159	99.24	1,976,841
099664	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	97,000,000	97,000,000	96,775,000	0	96,775,000	99.77	225,000
099671	PENGADILAN NEGERI RAHA	172,000,000	172,000,000	168,030,000	3,970,000	164,060,000	95.38	7,940,000
099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	176,553,000	176,553,000	176,530,945	0	176,530,945	99.99	22,055
400541	PENGADILAN TINGGI KENDARI	229,720,000	269,720,000	268,158,916	3,350,000	264,808,916	98.18	4,911,084
402032	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	100,640,000	100,640,000	95,524,572	0	95,524,572	94.92	5,115,428
402033	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	131,646,000	131,646,000	131,551,000	0	131,551,000	99.93	95,000
477225	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	149,316,000	149,316,000	147,534,900	0	147,534,900	98.81	1,781,100
681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	89,920,000	89,920,000	88,175,000	0	88,175,000	98.06	1,745,000
681444	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	304,648,000	304,648,000	302,980,000	0	302,980,000	99.45	1,668,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA	1,710,443,000	1,750,443,000	1,732,283,492	7,320,000	1,724,963,492	98.96	25,479,508
005032100KD	BA(005) ES1(03) MALUKU							
099692	PENGADILAN TINGGI AMBON	264,680,000	234,680,000	225,605,300	0	225,605,300	96.13	9,074,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 41
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099707	PENGADILAN NEGERI AMBON	413,981,000	437,981,000	411,277,500	0	411,277,500	93.9	26,703,500
099711	PENGADILAN NEGERI MASOHI	144,271,000	144,271,000	117,818,000	0	117,818,000	81.66	26,453,000
099728	PENGADILAN NEGERI TUAL	86,562,000	86,562,000	85,994,000	0	85,994,000	99.34	568,000
402037	PENGADILAN NEGERI DOBO	65,000,000	65,000,000	60,249,888	0	60,249,888	92.69	4,750,112
402038	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	67,300,000	67,300,000	65,226,000	0	65,226,000	96.92	2,074,000
403431	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	69,730,000	69,730,000	66,153,000	0	66,153,000	94.87	3,577,000
403433	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	80,518,000	80,518,000	65,407,000	0	65,407,000	81.23	15,111,000
672932	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	152,092,000	152,092,000	143,654,175	0	143,654,175	94.45	8,437,825
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) MALUKU	1,344,134,000	1,338,134,000	1,241,384,863	0	1,241,384,863	92.77	96,749,137
005032200KD	BA(005) ES1(03) BALI							
099774	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	183,900,000	183,900,000	182,504,718	0	182,504,718	99.24	1,395,282
099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	846,240,000	846,240,000	751,626,050	0	751,626,050	88.82	94,613,950
099795	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	207,500,000	207,500,000	200,717,000	0	200,717,000	96.73	6,783,000
099803	PENGADILAN NEGERI NEGARA	126,500,000	126,500,000	126,270,760	0	126,270,760	99.82	229,240
099817	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	94,071,000	94,071,000	92,947,180	0	92,947,180	98.81	1,123,820
099821	PENGADILAN NEGERI TABANAN	97,000,000	97,000,000	96,609,280	0	96,609,280	99.6	390,720
099838	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	61,700,000	61,700,000	61,671,000	0	61,671,000	99.95	29,000
099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	106,680,000	106,680,000	105,675,620	0	105,675,620	99.06	1,004,380
099859	PENGADILAN NEGERI BANGLI	78,340,000	78,340,000	78,318,590	0	78,318,590	99.97	21,410
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BALI	1,801,931,000	1,801,931,000	1,696,340,198	0	1,696,340,198	94.14	105,590,802
005032300KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT							
099863	PENGADILAN NEGERI MATARAM	465,029,000	415,029,000	407,998,560	250,000	407,748,560	98.25	7,280,440
099880	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	274,736,000	274,736,000	263,041,664	0	263,041,664	95.74	11,694,336
099884	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	181,686,000	196,688,000	184,996,135	0	184,996,135	94.06	11,691,865
099891	PENGADILAN NEGERI SELONG	162,750,000	142,750,000	141,322,515	0	141,322,515	99	1,427,485
099906	PENGADILAN NEGERI DOMPU	154,213,000	130,450,000	128,554,190	0	128,554,190	98.55	1,895,810
099913	PENGADILAN NEGERI PRAYA	136,024,000	136,024,000	116,080,750	0	116,080,750	85.34	19,943,250
400560	PENGADILAN TINGGI MATARAM	182,320,000	182,320,000	178,246,569	0	178,246,569	97.77	4,073,431
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT	1,556,758,000	1,477,997,000	1,420,240,383	250,000	1,419,990,383	96.09	58,006,617
005032400KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR							
099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	371,508,000	371,508,000	358,989,575	408,000	358,581,575	96.52	12,926,425
099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	93,070,000	93,070,000	88,327,962	0	88,327,962	94.9	4,742,038
099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	100,000,000	100,000,000	99,435,700	0	99,435,700	99.44	564,300
099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	55,300,000	55,300,000	53,617,500	0	53,617,500	96.96	1,682,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 42
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	109,500,000	109,500,000	107,389,200	0	107,389,200	98.07	2,110,800
099973	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	102,981,000	102,981,000	98,261,500	0	98,261,500	95.42	4,719,500
099990	PENGADILAN NEGERI ENDE	103,840,000	103,840,000	100,982,500	0	100,982,500	97.25	2,857,500
099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	87,000,000	87,000,000	84,853,000	0	84,853,000	97.53	2,147,000
240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	136,760,000	136,760,000	116,218,118	0	116,218,118	84.98	20,541,882
400008	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	69,670,000	69,670,000	66,636,000	0	66,636,000	95.65	3,034,000
400014	PENGADILAN NEGERI RUTENG	96,300,000	96,300,000	94,691,900	0	94,691,900	98.33	1,608,100
400158	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	85,081,000	85,081,000	82,352,000	0	82,352,000	96.79	2,729,000
400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	119,500,000	119,500,000	103,150,000	0	103,150,000	86.32	16,350,000
400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	371,488,000	371,488,000	372,053,500	4,915,000	367,138,500	98.83	4,349,500
477231	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	50,000,000	50,000,000	48,269,000	0	48,269,000	96.54	1,731,000
477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	74,840,000	74,840,000	71,485,460	0	71,485,460	95.52	3,354,540
673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	69,400,000	69,400,000	68,999,600	0	68,999,600	99.42	400,400
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR	2,096,238,000	2,096,238,000	2,015,712,515	5,323,000	2,010,389,515	96.16	85,848,485
005032500KD	BA(005) ES1(03) PAPUA							
400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	271,460,000	232,875,000	223,562,011	0	223,562,011	96	9,312,989
400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	371,519,000	346,519,000	303,830,200	0	303,830,200	87.68	42,688,800
400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	55,500,000	50,500,000	48,914,000	0	48,914,000	96.86	1,586,000
400051	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	306,272,000	291,272,000	282,794,200	0	282,794,200	97.09	8,477,800
400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	85,010,000	85,010,000	76,085,000	0	76,085,000	89.5	8,925,000
400102	PENGADILAN NEGERI NABIRE	65,500,000	65,500,000	61,181,000	0	61,181,000	93.41	4,319,000
400277	PENGADILAN NEGERI SERUI	210,020,000	279,735,000	276,758,000	0	276,758,000	98.94	2,977,000
614891	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	124,347,000	117,414,000	115,705,500	0	115,705,500	98.54	1,708,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) PAPUA	1,489,628,000	1,468,825,000	1,388,829,911	0	1,388,829,911	94.55	79,995,089
005032600KD	BA(005) ES1(03) BENGKULU							
400111	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	462,840,000	462,840,000	455,206,750	0	455,206,750	98.35	7,633,250
400127	PENGADILAN NEGERI CURUP	91,770,000	101,770,000	101,557,000	0	101,557,000	99.79	213,000
400133	PENGADILAN NEGERI MANNA	91,100,000	89,515,000	87,922,000	0	87,922,000	98.22	1,593,000
400240	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	158,740,000	158,740,000	157,400,720	0	157,400,720	99.16	1,339,280
400513	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	181,300,000	181,300,000	180,448,500	0	180,448,500	99.53	851,500
402018	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	84,000,000	74,000,000	73,462,796	0	73,462,796	99.27	537,204
672995	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	75,070,000	75,070,000	71,874,240	0	71,874,240	95.74	3,195,760
673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	84,140,000	84,140,000	78,215,000	0	78,215,000	92.96	5,925,000
673042	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	112,375,000	112,375,000	105,246,520	0	105,246,520	93.66	7,128,480

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 43
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	56,500,000	56,500,000	55,017,000	0	55,017,000	97.38	1,483,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BENGKULU	1,397,835,000	1,396,250,000	1,366,350,526	0	1,366,350,526	97.86	29,899,474
005032800KD	BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA							
099732	PENGADILAN NEGERI TERNATE	566,712,000	541,712,000	498,803,000	1,510,000	497,293,000	91.8	44,419,000
099749	PENGADILAN NEGERI TOBELO	338,700,000	338,700,000	333,172,160	0	333,172,160	98.37	5,527,840
099753	PENGADILAN NEGERI LABUHA	72,840,000	72,840,000	67,903,000	0	67,903,000	93.22	4,937,000
099770	PENGADILAN NEGERI SOASIU	335,350,000	335,350,000	324,215,240	0	324,215,240	96.68	11,134,760
403434	PENGADILAN NEGERI SANANA	256,090,000	251,090,000	243,101,000	291,351	242,809,649	96.7	8,280,351
403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG	45,500,000	45,500,000	43,413,500	0	43,413,500	95.41	2,086,500
664523	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	216,290,000	216,290,000	216,270,556	0	216,270,556	99.99	19,444
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA	1,831,482,000	1,801,482,000	1,726,878,456	1,801,351	1,725,077,105	95.86	76,404,895
005032900KD	BA(005) ES1(03) BANTEN							
099074	PENGADILAN NEGERI SERANG	611,940,000	611,940,000	567,390,450	0	567,390,450	92.72	44,549,550
099075	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	104,840,000	113,111,000	107,975,500	0	107,975,500	95.46	5,135,500
099077	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	569,720,000	549,720,000	529,408,539	0	529,408,539	96.31	20,311,461
417845	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	142,100,000	157,100,000	154,396,300	0	154,396,300	98.28	2,703,700
663399	PENGADILAN TINGGI BANTEN	201,444,000	201,444,000	198,234,739	0	198,234,739	98.41	3,209,261
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BANTEN	1,630,044,000	1,633,315,000	1,557,405,528	0	1,557,405,528	95.35	75,909,472
005033000KD	BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG							
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	351,699,000	306,699,000	305,794,400	0	305,794,400	99.71	904,600
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	257,500,000	227,500,000	227,160,500	0	227,160,500	99.85	339,500
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	139,700,000	139,700,000	137,010,141	0	137,010,141	98.07	2,689,859
402020	PENGADILAN NEGERI KOBA	117,310,000	134,645,000	133,579,000	0	133,579,000	99.21	1,066,000
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	108,170,000	123,170,000	121,831,500	0	121,831,500	98.91	1,338,500
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	154,500,000	154,500,000	154,229,600	0	154,229,600	99.82	270,400
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG	1,128,879,000	1,086,214,000	1,079,605,141	0	1,079,605,141	99.39	6,608,859
005033100KD	BA(005) ES1(03) GORONTALO							
099362	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	323,641,000	323,641,000	290,540,140	630,000	289,910,140	89.58	33,730,860
400209	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	127,740,000	127,740,000	126,150,400	0	126,150,400	98.76	1,589,600
477219	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	74,062,000	74,062,000	64,469,000	0	64,469,000	87.05	9,593,000
664540	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	146,110,000	146,110,000	142,987,415	0	142,987,415	97.86	3,122,585
670185	PENGADILAN NEGERI MARISA	94,000,000	94,000,000	91,685,000	0	91,685,000	97.54	2,315,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) GORONTALO	765,553,000	765,553,000	715,831,955	630,000	715,201,955	93.51	50,351,045
005033200KD	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 44
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	525,878,000	475,878,000	457,325,316	13,000	457,312,316	96.1	18,565,684
109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	414,840,000	414,840,000	414,227,858	120,000	414,107,858	99.82	732,142
526707	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	122,000,000	122,000,000	118,885,318	0	118,885,318	97.45	3,114,682
663006	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	120,840,000	120,840,000	119,221,400	10,000	119,211,400	98.65	1,628,600
672949	PENGADILAN NEGERI NATUNA	202,678,000	202,678,000	188,205,326	0	188,205,326	92.86	14,472,674
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG	1,386,236,000	1,336,236,000	1,297,865,218	143,000	1,297,722,218	97.13	38,513,782
005033300KD	BA(005) ES1(03) PAPUA BARAT							
400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	413,700,000	388,700,000	377,759,695	0	377,759,695	97.19	10,940,305
400076	PENGADILAN NEGERI SORONG	320,700,000	320,700,000	316,259,516	0	316,259,516	98.62	4,440,484
400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	70,400,000	70,400,000	69,662,813	0	69,662,813	98.95	737,187
402039	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	173,200,000	168,200,000	163,295,000	0	163,295,000	97.08	4,905,000
526717	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	100,860,000	100,860,000	99,827,786	0	99,827,786	98.98	1,032,214
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) PAPUA BARAT	1,078,860,000	1,048,860,000	1,026,804,810	0	1,026,804,810	97.9	22,055,190
005033400KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT							
099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	64,380,000	64,380,000	59,219,000	0	59,219,000	91.98	5,161,000
099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	114,990,000	114,990,000	101,889,335	0	101,889,335	88.61	13,100,665
099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	146,710,000	146,710,000	145,254,400	0	145,254,400	99.01	1,455,600
526713	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	113,000,000	113,000,000	112,831,531	0	112,831,531	99.85	168,469
689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	72,170,000	72,170,000	64,132,000	0	64,132,000	88.86	8,038,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT	511,250,000	511,250,000	483,326,266	0	483,326,266	94.54	27,923,734
005033500KD	UAPPAW 005033500 KALIMANTAN UTARA							
099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	150,580,000	200,580,000	196,580,402	0	196,580,402	98.01	3,999,598
417705	PENGADILAN NEGERI MALINAU	79,840,000	79,840,000	79,017,740	0	79,017,740	98.97	822,260
417723	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	87,000,000	87,000,000	84,340,000	0	84,340,000	96.94	2,660,000
477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	129,900,000	129,900,000	118,569,325	0	118,569,325	91.28	11,330,675
526721	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	90,620,000	90,620,000	89,468,500	0	89,468,500	98.73	1,151,500
	JUMLAH BELANJA UAPPAW 005033500 KALIMANTAN UTARA	537,940,000	587,940,000	567,975,967	0	567,975,967	96.6	19,964,033
	JUMLAH BELANJA 03	145,280,941,000	149,234,382,000	145,342,864,983	357,486,855	144,985,378,128	97.39	4249003872
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA							
005040100KD	BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA							
400617	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	136,400,000	136,400,000	136,082,700	0	136,082,700	99.77	317,300
400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	652,287,000	652,287,000	647,467,613	0	647,467,613	99.26	4,819,387
400632	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	141,600,000	141,600,000	141,500,000	0	141,500,000	99.93	100,000
400648	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	152,000,000	152,000,000	152,000,000	0	152,000,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 45
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
400654	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	157,200,000	157,200,000	157,199,900	0	157,199,900	100	100
401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	135,015,000	224,365,000	206,083,000	0	206,083,000	91.85	18,282,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA	1,374,502,000	1,463,852,000	1,440,333,213	0	1,440,333,213	98.39	23,518,787
005040100KP	BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA							
663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	57,259,581,000	64,271,827,000	58,363,571,838	685,063,682	57,678,508,156	89.74	6,593,318,844
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA	57,259,581,000	64,271,827,000	58,363,571,838	685,063,682	57,678,508,156	90.81	6,593,318,844
005040200KD	BA(005) ES1(04) JAWA BARAT							
309124	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	255,454,000	444,204,000	402,253,592	0	402,253,592	90.56	41,950,408
400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	140,800,000	140,800,000	140,791,800	0	140,791,800	99.99	8,200
400679	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	199,645,000	199,645,000	199,645,000	0	199,645,000	100	0
400691	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	553,500,000	553,500,000	542,822,000	0	542,822,000	98.07	10,678,000
400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	312,200,000	344,346,000	344,346,000	0	344,346,000	100	0
400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	314,990,000	314,990,000	314,990,000	0	314,990,000	100	0
400730	PENGADILAN AGAMA BOGOR	101,800,000	101,800,000	101,800,000	0	101,800,000	100	0
400736	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	84,600,000	84,600,000	84,600,000	0	84,600,000	100	0
400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	398,180,000	398,180,000	398,094,000	0	398,094,000	99.98	86,000
400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	47,350,000	52,432,000	50,383,600	0	50,383,600	96.09	2,048,400
400767	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	382,750,000	382,750,000	389,650,000	7,000,000	382,650,000	99.97	100,000
400773	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	208,504,000	208,504,000	208,322,772	69,500	208,253,272	99.88	250,728
400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	192,500,000	192,500,000	192,497,000	0	192,497,000	100	3,000
400833	PENGADILAN AGAMA BEKASI	96,000,000	96,000,000	93,802,000	90,000	93,712,000	97.62	2,288,000
400849	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	222,940,000	222,940,000	222,786,880	123,520	222,663,360	99.88	276,640
400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	183,500,000	183,500,000	183,500,000	0	183,500,000	100	0
402588	PENGADILAN AGAMA SUBANG	189,357,000	189,357,000	189,094,804	0	189,094,804	99.86	262,196
402996	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	242,292,000	242,292,000	242,292,000	100,000	242,192,000	99.96	100,000
403010	PENGADILAN AGAMA SUMBER	192,748,000	192,748,000	188,061,000	0	188,061,000	97.57	4,687,000
403419	PENGADILAN AGAMA SOREANG	301,200,000	301,200,000	301,198,362	0	301,198,362	100	1,638
403420	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	101,000,000	101,000,000	100,995,000	0	100,995,000	100	5,000
403421	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	242,800,000	242,800,000	228,854,372	0	228,854,372	94.26	13,945,628
604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	553,276,000	553,276,000	553,272,800	0	553,272,800	100	3,200
614707	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	199,800,000	202,100,000	185,136,000	0	185,136,000	91.61	16,964,000
652063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	200,300,000	200,300,000	200,300,000	0	200,300,000	100	0
690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	67,600,000	76,454,000	76,274,280	0	76,274,280	99.76	179,720
690030	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	66,000,000	66,000,000	65,936,000	0	65,936,000	99.9	64,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 46
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) JAWA BARAT	6,051,086,000	6,288,218,000	6,201,699,262	7,383,020	6,194,316,242	98.62	93,901,758
005040300KD	BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH							
400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	37,200,000	37,190,000	37,190,000	0	37,190,000	100	0
400880	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	65,360,000	65,360,000	65,360,000	0	65,360,000	100	0
400886	PENGADILAN AGAMA TEGAL	36,420,000	36,420,000	36,313,060	0	36,313,060	99.71	106,940
400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	112,600,000	112,600,000	112,600,000	0	112,600,000	100	0
400906	PENGADILAN AGAMA BATANG	48,000,000	48,000,000	47,872,264	0	47,872,264	99.73	127,736
400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	123,200,000	123,200,000	122,840,000	0	122,840,000	99.71	360,000
400921	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	39,860,000	39,860,000	40,895,000	1,035,000	39,860,000	100	0
400937	PENGADILAN AGAMA KENDAL	162,080,000	162,080,000	162,079,900	0	162,079,900	100	100
400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	68,610,000	68,610,000	68,610,000	0	68,610,000	100	0
400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	130,600,000	130,600,000	130,003,000	0	130,003,000	99.54	597,000
400968	PENGADILAN AGAMA PATI	99,520,000	99,520,000	99,520,000	0	99,520,000	100	0
400974	PENGADILAN AGAMA KUDUS	46,680,000	46,680,000	46,558,000	0	46,558,000	99.74	122,000
400983	PENGADILAN AGAMA JEPARA	86,000,000	86,000,000	86,000,000	0	86,000,000	100	0
400999	PENGADILAN AGAMA REMBANG	64,400,000	64,400,000	64,400,000	0	64,400,000	100	0
401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	69,000,000	67,500,000	67,500,000	0	67,500,000	100	0
401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	40,500,000	40,500,000	40,500,000	0	40,500,000	100	0
401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	69,180,000	69,180,000	69,180,000	0	69,180,000	100	0
401031	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	150,635,000	150,612,000	146,281,700	0	146,281,700	97.12	4,330,300
401050	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	66,360,000	66,360,000	66,360,000	0	66,360,000	100	0
401056	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	173,000,000	173,000,000	172,978,000	0	172,978,000	99.99	22,000
401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	52,300,000	52,300,000	52,190,000	0	52,190,000	99.79	110,000
401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	83,250,000	83,250,000	83,250,000	0	83,250,000	100	0
401087	PENGADILAN AGAMA CILACAP	212,600,000	212,600,000	212,600,000	0	212,600,000	100	0
401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	70,360,000	70,360,000	70,360,000	0	70,360,000	100	0
401107	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	124,880,000	124,880,000	124,880,000	0	124,880,000	100	0
401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	61,000,000	100	0
401138	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	63,960,000	62,160,000	62,084,000	0	62,084,000	99.88	76,000
401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	91,200,000	91,200,000	91,200,000	0	91,200,000	100	0
401153	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	67,920,000	67,920,000	67,920,000	0	67,920,000	100	0
401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	57,240,000	57,240,000	57,240,000	0	57,240,000	100	0
401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	83,610,000	83,610,000	83,528,000	0	83,528,000	99.9	82,000
401181	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	47,460,000	51,624,000	51,106,000	0	51,106,000	99	518,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 47
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	98,650,000	95,967,000	95,967,000	0	95,967,000	100	0
402965	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	214,988,000	443,338,000	395,831,835	0	395,831,835	89.28	47,506,165
403016	PENGADILAN AGAMA SLAWI	110,780,000	110,780,000	110,780,000	0	110,780,000	100	0
403022	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	113,450,000	113,450,000	113,450,000	0	113,450,000	100	0
614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	73,500,000	73,500,000	73,500,000	0	73,500,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH	3,316,353,000	3,542,851,000	3,489,927,759	1,035,000	3,488,892,759	98.51	53,958,241
005040400KD	BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	105,750,000	105,750,000	105,631,600	0	105,631,600	99.89	118,400
401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	138,250,000	138,250,000	138,250,000	0	138,250,000	100	0
401220	PENGADILAN AGAMA WATES	92,500,000	92,500,000	92,500,000	0	92,500,000	100	0
401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	179,250,000	179,250,000	179,244,000	0	179,244,000	100	6,000
401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	190,220,000	190,220,000	190,086,667	0	190,086,667	99.93	133,333
547658	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	126,950,000	209,750,000	192,566,129	0	192,566,129	91.81	17,183,871
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA	832,920,000	915,720,000	898,278,396	0	898,278,396	98.1	17,441,604
005040500KD	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya							
309125	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	251,446,000	491,496,000	443,149,578	0	443,149,578	90.16	48,346,422
401241	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	179,000,000	179,000,000	189,078,800	10,225,000	178,853,800	99.92	146,200
401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	169,000,000	169,000,000	169,000,000	0	169,000,000	100	0
401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	148,300,000	148,300,000	147,154,336	0	147,154,336	99.23	1,145,664
401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	170,801,000	170,801,000	170,679,000	1,040,000	169,639,000	99.32	1,162,000
401288	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	46,400,000	46,400,000	46,400,000	0	46,400,000	100	0
401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	132,100,000	152,100,000	152,000,000	0	152,000,000	99.93	100,000
401308	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	194,050,000	198,050,000	198,050,000	0	198,050,000	100	0
401323	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	186,740,000	186,740,000	186,512,500	0	186,512,500	99.88	227,500
401339	PENGADILAN AGAMA JEMBER	235,000,000	235,000,000	235,000,000	0	235,000,000	100	0
401345	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	169,800,000	169,800,000	169,060,000	0	169,060,000	99.56	740,000
401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	171,500,000	171,500,000	171,500,000	0	171,500,000	100	0
401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	211,000,000	211,000,000	211,000,000	0	211,000,000	100	0
401376	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	156,500,000	156,500,000	156,450,000	0	156,450,000	99.97	50,000
401382	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	159,250,000	183,250,000	183,250,000	0	183,250,000	100	0
401391	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	184,640,000	184,640,000	184,607,500	3,629,000	180,978,500	98.02	3,661,500
401403	PENGADILAN AGAMA BLITAR	134,350,000	134,350,000	132,585,000	0	132,585,000	98.69	1,765,000
401411	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	131,240,000	131,240,000	131,240,000	0	131,240,000	100	0
401427	PENGADILAN AGAMA MALANG	135,661,000	135,661,000	135,585,008	0	135,585,008	99.94	75,992

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 48
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401433	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	181,000,000	181,000,000	181,000,000	0	181,000,000	100	0
401442	PENGADILAN AGAMA BANGIL	153,200,000	153,200,000	153,200,000	0	153,200,000	100	0
401458	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	100,400,000	100,400,000	100,400,000	0	100,400,000	100	0
401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	159,800,000	159,800,000	159,800,000	0	159,800,000	100	0
401473	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	156,400,000	156,400,000	156,400,000	0	156,400,000	100	0
401489	PENGADILAN AGAMA MADIUN	52,200,000	52,200,000	52,200,000	0	52,200,000	100	0
401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	119,250,000	119,250,000	119,250,000	0	119,250,000	100	0
401509	PENGADILAN AGAMA NGAWI	101,000,000	101,000,000	101,000,000	110,000	100,890,000	99.89	110,000
401515	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	139,200,000	139,200,000	139,200,000	0	139,200,000	100	0
401521	PENGADILAN AGAMA PACITAN	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	100	0
401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	122,000,000	100	0
401546	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	165,000,000	165,000,000	153,804,400	0	153,804,400	93.21	11,195,600
401552	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	184,684,000	194,684,000	194,365,580	0	194,365,580	99.84	318,420
401561	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	210,200,000	210,200,000	210,200,000	0	210,200,000	100	0
401577	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	116,500,000	116,500,000	116,500,000	0	116,500,000	100	0
403031	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	112,000,000	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000	100	0
403047	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	98,500,000	98,500,000	98,500,000	0	98,500,000	100	0
450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	135,000,000	135,000,000	135,000,000	0	135,000,000	100	0
604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	185,858,000	185,858,000	185,832,000	0	185,832,000	99.99	26,000
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	5,788,970,000	6,087,020,000	6,032,953,702	15,004,000	6,017,949,702	99.11	69,070,298
005040600KD	BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
401583	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	200,639,000	373,789,000	339,159,000	0	339,159,000	90.74	34,630,000
401592	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	132,800,000	132,800,000	127,480,000	0	127,480,000	95.99	5,320,000
401603	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	46,350,000	46,350,000	46,270,000	0	46,270,000	99.83	80,000
401612	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	144,490,000	144,490,000	142,839,970	0	142,839,970	98.86	1,650,030
401628	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	67,300,000	67,300,000	66,254,000	0	66,254,000	98.45	1,046,000
401634	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	120,988,000	120,988,000	120,988,000	0	120,988,000	100	0
401643	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	151,200,000	151,200,000	151,200,000	0	151,200,000	100	0
401659	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	187,700,000	187,700,000	176,637,000	0	176,637,000	94.11	11,063,000
401665	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	76,850,000	76,850,000	76,850,000	0	76,850,000	100	0
401671	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	136,600,000	136,600,000	136,600,000	0	136,600,000	100	0
401690	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	71,000,000	71,000,000	71,000,000	0	71,000,000	100	0
401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	153,300,000	153,300,000	153,300,000	0	153,300,000	100	0
401710	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	63,325,000	63,325,000	63,058,300	0	63,058,300	99.58	266,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 49
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401716	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	86,035,000	86,035,000	80,115,000	0	80,115,000	93.12	5,920,000
401722	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	82,115,000	82,115,000	82,115,000	0	82,115,000	100	0
401731	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	109,972,000	109,972,000	105,397,000	0	105,397,000	95.84	4,575,000
401747	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	92,850,000	92,850,000	92,850,000	0	92,850,000	100	0
401753	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	77,700,000	77,700,000	77,179,500	0	77,179,500	99.33	520,500
401762	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	106,600,000	106,600,000	105,078,000	0	105,078,000	98.57	1,522,000
402608	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	159,000,000	159,000,000	159,000,000	0	159,000,000	100	0
403426	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	104,275,000	104,275,000	104,275,000	0	104,275,000	100	0
403427	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	70,450,000	70,450,000	70,450,000	0	70,450,000	100	0
403428	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	98,000,000	98,000,000	96,231,000	0	96,231,000	98.19	1,769,000
690108	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG	119,900,000	119,900,000	119,750,000	0	119,750,000	99.87	150,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2,659,439,000	2,832,589,000	2,764,076,770	0	2,764,076,770	97.58	68,512,230
005040700KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA							
401778	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	181,516,000	356,466,000	321,092,000	0	321,092,000	90.08	35,374,000
401784	PENGADILAN AGAMA BINJAI	114,100,000	114,100,000	114,100,000	0	114,100,000	100	0
401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	83,000,000	83,000,000	74,201,000	0	74,201,000	89.4	8,799,000
401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	149,200,000	149,200,000	148,100,238	0	148,100,238	99.26	1,099,762
401813	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	135,800,000	135,800,000	135,800,000	0	135,800,000	100	0
401829	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	171,500,000	181,910,000	181,910,000	0	181,910,000	100	0
401835	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	65,000,000	65,000,000	65,000,000	1,200,000	63,800,000	98.15	1,200,000
401841	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	67,700,000	67,700,000	67,100,000	0	67,100,000	99.11	600,000
401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	64,250,000	64,250,000	64,250,000	0	64,250,000	100	0
401866	PENGADILAN AGAMA BALIGE	56,300,000	56,300,000	50,350,500	0	50,350,500	89.43	5,949,500
401872	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	35,500,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	100	0
401881	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	63,600,000	63,600,000	63,600,000	0	63,600,000	100	0
401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	54,680,000	54,680,000	54,680,000	0	54,680,000	100	0
402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	81,710,000	81,710,000	77,670,000	1,050,000	76,620,000	93.77	5,090,000
403062	PENGADILAN AGAMA KISARAN	130,000,000	130,000,000	130,000,000	650,000	129,350,000	99.5	650,000
403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	240,200,000	240,200,000	240,200,000	0	240,200,000	100	0
403084	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	211,700,000	211,700,000	211,700,000	600,000	211,100,000	99.72	600,000
403399	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	100,275,000	100,275,000	100,275,000	0	100,275,000	100	0
547683	PENGADILAN AGAMA STABAT	146,646,000	136,736,000	136,676,000	0	136,676,000	99.96	60,000
604745	PENGADILAN AGAMA PANDAN	99,510,000	99,510,000	99,310,000	0	99,310,000	99.8	200,000
631980	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	44,000,000	44,000,000	43,997,000	0	43,997,000	99.99	3,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 50
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	104,600,000	104,600,000	104,595,000	4,210,000	100,385,000	95.97	4,215,000
690112	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	33,840,000	33,840,000	33,810,000	0	33,810,000	99.91	30,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA	2,434,627,000	2,609,577,000	2,553,416,738	7,710,000	2,545,706,738	97.85	63,870,262
005040800KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT							
401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	173,110,000	318,160,000	289,031,050	1,040,000	287,991,050	90.52	30,168,950
401917	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	130,180,000	130,180,000	128,346,400	0	128,346,400	98.59	1,833,600
401923	PENGADILAN AGAMA SOLOK	124,500,000	124,500,000	124,500,000	0	124,500,000	100	0
401932	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	89,900,000	85,520,000	83,833,000	0	83,833,000	98.03	1,687,000
401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	124,520,000	124,520,000	124,669,000	149,000	124,520,000	100	0
401954	PENGADILAN AGAMA PADANG	267,000,000	267,000,000	266,389,500	0	266,389,500	99.77	610,500
401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	82,700,000	82,700,000	81,336,500	0	81,336,500	98.35	1,363,500
401979	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	113,200,000	113,200,000	113,200,000	72,000	113,128,000	99.94	72,000
401985	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	253,500,000	253,500,000	253,423,100	0	253,423,100	99.97	76,900
401991	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	80,100,000	80,100,000	80,068,500	0	80,068,500	99.96	31,500
402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	99,320,000	99,320,000	99,310,800	0	99,310,800	99.99	9,200
402011	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	119,850,000	119,850,000	119,742,000	0	119,742,000	99.91	108,000
402030	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	208,500,000	208,500,000	208,399,000	0	208,399,000	99.95	101,000
402036	PENGADILAN AGAMA TALU	139,200,000	139,200,000	136,284,200	511,910	135,772,290	97.54	3,427,710
402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	98,460,000	97,300,000	97,300,000	0	97,300,000	100	0
402051	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	130,760,000	133,230,000	133,230,000	52,000	133,178,000	99.96	52,000
402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	165,700,000	164,200,000	164,200,000	0	164,200,000	100	0
402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	123,400,000	123,500,000	123,500,000	0	123,500,000	100	0
403400	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	116,550,000	115,548,000	114,480,000	750,000	113,730,000	98.43	1,818,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT	2,640,450,000	2,780,028,000	2,741,243,050	2,574,910	2,738,668,140	98.6	41,359,860
005040900KD	BA(005) ES1(04) RIAU							
402073	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	151,000,000	151,000,000	151,000,000	0	151,000,000	100	0
402082	PENGADILAN AGAMA RENGAT	128,900,000	128,900,000	128,900,000	0	128,900,000	100	0
402098	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	166,800,000	166,800,000	166,800,000	0	166,800,000	100	0
402102	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	193,550,000	193,550,000	193,550,000	0	193,550,000	100	0
402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	311,141,000	311,141,000	310,132,000	0	310,132,000	99.68	1,009,000
402124	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	150,900,000	150,900,000	150,900,000	0	150,900,000	100	0
402133	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	154,814,000	154,814,000	154,814,000	0	154,814,000	100	0
402623	PENGADILAN AGAMA DUMAI	108,400,000	108,400,000	108,400,000	0	108,400,000	100	0
402971	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	160,570,000	260,770,000	240,698,135	167,000	240,531,135	92.24	20,238,865

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
403402	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	234,550,000	234,550,000	234,525,000	0	234,525,000	99.99	25,000
403403	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	120,500,000	120,500,000	120,500,000	0	120,500,000	100	0
632000	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
632002	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	140,050,000	140,050,000	140,800,000	750,000	140,050,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) RIAU	2,171,175,000	2,271,375,000	2,251,019,135	917,000	2,250,102,135	99.1	21,272,865
005041000KD	BA(005) ES1(04) JAMBI							
402186	PENGADILAN AGAMA JAMBI	194,707,000	194,707,000	194,707,000	0	194,707,000	100	0
402192	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	114,050,000	114,050,000	114,050,000	0	114,050,000	100	0
402206	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	112,455,000	112,455,000	107,055,000	0	107,055,000	95.2	5,400,000
402212	PENGADILAN AGAMA BANGKO	118,500,000	118,500,000	118,490,000	0	118,490,000	99.99	10,000
402221	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	91,000,000	91,000,000	90,735,000	0	90,735,000	99.71	265,000
403053	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	126,500,000	126,500,000	126,500,000	0	126,500,000	100	0
547662	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	148,892,000	264,042,000	240,080,000	0	240,080,000	90.92	23,962,000
632019	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	95,190,000	95,190,000	95,190,000	0	95,190,000	100	0
632023	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	83,800,000	83,800,000	83,800,000	0	83,800,000	100	0
652021	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	153,500,000	153,500,000	153,500,000	0	153,500,000	100	0
652035	PENGADILAN AGAMA SENGETI	105,900,000	105,900,000	105,900,000	0	105,900,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) JAMBI	1,344,494,000	1,459,644,000	1,430,007,000	0	1,430,007,000	97.97	29,637,000
005041100KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN							
402237	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	159,300,000	273,250,000	248,424,511	200,000	248,224,511	90.84	25,025,489
402243	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	100,040,000	100,040,000	100,040,000	0	100,040,000	100	0
402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	223,400,000	223,400,000	206,377,000	0	206,377,000	92.38	17,023,000
402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	123,000,000	123,000,000	123,000,000	0	123,000,000	100	0
402274	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	216,320,000	216,320,000	202,320,000	0	202,320,000	93.53	14,000,000
402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	193,241,000	193,241,000	192,171,000	0	192,171,000	99.45	1,070,000
402299	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	299,440,000	299,440,000	299,440,000	0	299,440,000	100	0
402639	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	156,300,000	156,300,000	156,300,000	0	156,300,000	100	0
403408	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	116,500,000	116,500,000	116,495,820	0	116,495,820	100	4,180
403409	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	184,485,000	184,485,000	182,960,000	0	182,960,000	99.17	1,525,000
403410	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	81,500,000	81,500,000	78,150,000	0	78,150,000	95.89	3,350,000
403411	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	66,800,000	52,800,000	48,300,000	0	48,300,000	91.48	4,500,000
403412	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	58,000,000	58,000,000	58,000,000	0	58,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN	1,978,326,000	2,078,276,000	2,011,978,331	200,000	2,011,778,331	96.81	66,497,669
005041200KD	BA(005) ES1(04) LAMPUNG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 52
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402325	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	85,000,000	85,000,000	84,250,000	0	84,250,000	99.12	750,000
402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	183,500,000	183,500,000	182,786,375	0	182,786,375	99.61	713,625
402350	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	239,500,000	239,500,000	239,470,000	0	239,470,000	99.99	30,000
402356	PENGADILAN AGAMA METRO	49,000,000	49,000,000	48,955,000	0	48,955,000	99.91	45,000
402645	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	275,000,000	275,000,000	274,538,900	0	274,538,900	99.83	461,100
403413	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	132,000,000	132,000,000	130,887,000	0	130,887,000	99.16	1,113,000
403414	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	102,000,000	102,000,000	101,059,000	0	101,059,000	99.08	941,000
403415	PENGADILAN AGAMA MESUJI	175,340,000	175,340,000	175,340,000	0	175,340,000	100	0
403416	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	148,100,000	148,100,000	148,000,000	0	148,000,000	99.93	100,000
403418	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	221,000,000	221,000,000	220,658,000	0	220,658,000	99.85	342,000
547679	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	161,682,000	276,832,000	253,582,460	0	253,582,460	91.6	23,249,540
614685	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	164,000,000	164,000,000	164,000,000	0	164,000,000	100	0
614692	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	213,682,000	213,682,000	213,164,000	0	213,164,000	99.76	518,000
652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	292,530,000	292,530,000	292,529,950	0	292,529,950	100	50
652056	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	289,500,000	289,500,000	287,422,501	0	287,422,501	99.28	2,077,499
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) LAMPUNG	2,731,834,000	2,846,984,000	2,816,643,186	0	2,816,643,186	98.93	30,340,814
005041300KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT							
402362	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	173,000,000	173,000,000	171,425,000	0	171,425,000	99.09	1,575,000
402371	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	299,000,000	299,000,000	299,000,000	0	299,000,000	100	0
402387	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	251,400,000	251,400,000	251,382,000	0	251,382,000	99.99	18,000
402393	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	148,975,000	148,975,000	148,796,000	0	148,796,000	99.88	179,000
402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	166,000,000	166,000,000	166,000,000	0	166,000,000	100	0
402413	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	142,890,000	142,890,000	142,890,000	0	142,890,000	100	0
402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	149,150,000	294,900,000	265,702,393	0	265,702,393	90.1	29,197,607
402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	180,300,000	180,300,000	179,727,000	0	179,727,000	99.68	573,000
403422	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	68,600,000	68,600,000	68,218,000	0	68,218,000	99.44	382,000
403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	83,700,000	83,700,000	83,637,000	0	83,637,000	99.92	63,000
403425	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	109,800,000	109,800,000	109,800,000	0	109,800,000	100	0
632040	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	126,510,000	126,510,000	126,510,000	0	126,510,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT	1,899,325,000	2,045,075,000	2,013,087,393	0	2,013,087,393	98.44	31,987,607
005041400KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH							
401974	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	105,440,000	105,440,000	83,255,000	1,190,000	82,065,000	77.83	23,375,000
401975	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	56,140,000	56,140,000	56,140,000	0	56,140,000	100	0
401976	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	67,012,000	67,012,000	65,296,500	0	65,296,500	97.44	1,715,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 53
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401977	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	60,540,000	60,540,000	60,540,000	0	60,540,000	100	0
401980	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	87,420,000	87,420,000	87,420,000	0	87,420,000	100	0
401981	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	68,140,000	68,140,000	68,140,000	0	68,140,000	100	0
401982	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	55,140,000	55,140,000	54,780,000	0	54,780,000	99.35	360,000
402422	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	130,190,000	130,190,000	130,190,000	0	130,190,000	100	0
402438	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	133,940,000	133,940,000	133,262,000	0	133,262,000	99.49	678,000
402444	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	127,968,000	127,968,000	127,937,000	0	127,937,000	99.98	31,000
402453	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	161,840,000	161,840,000	161,840,000	0	161,840,000	100	0
402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	138,740,000	138,740,000	138,740,000	0	138,740,000	100	0
402475	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	178,940,000	178,940,000	178,130,000	0	178,130,000	99.55	810,000
402990	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	150,150,000	268,300,000	240,507,280	0	240,507,280	89.64	27,792,720
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH	1,521,600,000	1,639,750,000	1,586,177,780	1,190,000	1,584,987,780	96.73	54,762,220
005041500KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN							
309048	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	78,190,000	86,690,000	86,690,000	0	86,690,000	100	0
309049	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	209,350,000	209,350,000	209,350,000	0	209,350,000	100	0
309050	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	64,600,000	64,600,000	64,523,000	0	64,523,000	99.88	77,000
402450	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	153,168,000	272,518,000	247,678,730	0	247,678,730	90.89	24,839,270
402501	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	140,500,000	140,500,000	140,500,000	0	140,500,000	100	0
402520	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	189,575,000	189,575,000	184,833,000	0	184,833,000	97.5	4,742,000
402526	PENGADILAN AGAMA RANTAU	86,600,000	86,600,000	86,600,000	0	86,600,000	100	0
402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	139,150,000	139,150,000	139,150,000	0	139,150,000	100	0
402541	PENGADILAN AGAMA BARABAI	124,100,000	137,086,000	137,086,000	0	137,086,000	100	0
402557	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	142,450,000	142,450,000	142,450,000	0	142,450,000	100	0
402563	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	106,850,000	106,850,000	106,749,996	0	106,749,996	99.91	100,004
402572	PENGADILAN AGAMA NEGARA	99,050,000	99,050,000	96,950,000	0	96,950,000	97.88	2,100,000
632044	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	59,500,000	59,500,000	59,500,000	0	59,500,000	100	0
690140	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	115,880,000	107,380,000	107,380,000	0	107,380,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	1,708,963,000	1,841,299,000	1,809,440,726	0	1,809,440,726	98.27	31,858,274
005041600KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR							
309052	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	347,600,000	347,600,000	347,594,925	0	347,594,925	100	5,075
309053	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	118,500,000	118,500,000	114,360,000	0	114,360,000	96.51	4,140,000
309054	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	104,200,000	104,200,000	103,170,000	0	103,170,000	99.01	1,030,000
309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	107,250,000	107,250,000	105,769,000	0	105,769,000	98.62	1,481,000
309056	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	265,000,000	265,000,000	263,835,000	0	263,835,000	99.56	1,165,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401983	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	88,000,000	88,000,000	86,782,000	0	86,782,000	98.62	1,218,000
401986	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	210,400,000	210,400,000	209,113,856	0	209,113,856	99.39	1,286,144
402481	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	136,754,000	240,404,000	211,651,994	0	211,651,994	88.04	28,752,006
652081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	73,482,000	73,482,000	73,482,000	0	73,482,000	100	0
652098	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	199,760,000	199,760,000	199,760,000	0	199,760,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR	1,650,946,000	1,754,596,000	1,715,518,775	0	1,715,518,775	97.77	39,077,225
005041700KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA							
309058	PENGADILAN AGAMA MANADO	182,350,000	182,350,000	182,200,000	0	182,200,000	99.92	150,000
309059	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	126,800,000	126,800,000	123,800,000	0	123,800,000	97.63	3,000,000
309060	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	309,040,000	309,040,000	309,040,000	0	309,040,000	100	0
401996	PENGADILAN AGAMA LOLAK	155,900,000	155,900,000	155,700,000	0	155,700,000	99.87	200,000
401997	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	158,880,000	158,880,000	129,445,800	0	129,445,800	81.47	29,434,200
401998	PENGADILAN AGAMA BOROKO	137,160,000	137,160,000	135,380,000	0	135,380,000	98.7	1,780,000
401999	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	151,000,000	151,000,000	150,768,000	0	150,768,000	99.85	232,000
402682	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	137,762,000	257,112,000	232,651,220	0	232,651,220	90.49	24,460,780
402702	PENGADILAN AGAMA TONDANO	89,900,000	89,900,000	89,900,000	0	89,900,000	100	0
604752	PENGADILAN AGAMA BITUNG	110,000,000	110,000,000	109,002,000	0	109,002,000	99.09	998,000
682172	PENGADILAN AGAMA AMURANG	113,510,000	113,510,000	113,510,000	0	113,510,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA	1,672,302,000	1,791,652,000	1,731,397,020	0	1,731,397,020	96.64	60,254,980
005041800KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA							
309062	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	152,750,000	152,750,000	151,318,750	0	151,318,750	99.06	1,431,250
309063	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	207,290,000	207,290,000	193,040,000	0	193,040,000	93.13	14,250,000
309064	PENGADILAN AGAMA POSO	190,300,000	190,300,000	189,250,000	0	189,250,000	99.45	1,050,000
309066	PENGADILAN AGAMA LUWUK	338,375,000	338,375,000	338,375,000	0	338,375,000	100	0
401992	PENGADILAN AGAMA AMPANA	193,660,000	193,660,000	172,812,500	0	172,812,500	89.23	20,847,500
576250	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	137,762,000	257,112,000	221,134,500	0	221,134,500	86.01	35,977,500
604766	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	378,589,000	378,589,000	376,763,500	0	376,763,500	99.52	1,825,500
652103	PENGADILAN AGAMA BUOL	140,200,000	140,200,000	139,474,100	0	139,474,100	99.48	725,900
652120	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	154,710,000	154,710,000	153,122,500	0	153,122,500	98.97	1,587,500
652124	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	116,280,000	127,740,000	122,715,000	0	122,715,000	96.07	5,025,000
690072	PENGADILAN AGAMA PARIGI	149,850,000	149,850,000	149,850,000	0	149,850,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA PALU]	2,159,766,000	2,290,576,000	2,207,855,850	0	2,207,855,850	96.39	82,720,150
005041900KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
309067	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	197,857,000	351,607,000	320,005,560	0	320,005,560	91.01	31,601,440

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 55
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
309068	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	117,000,000	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000	100	0
309069	PENGADILAN AGAMA MAROS	101,215,000	101,215,000	101,173,000	0	101,173,000	99.96	42,000
309070	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	248,721,000	248,721,000	226,266,900	0	226,266,900	90.97	22,454,100
309071	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	129,600,000	129,600,000	122,660,000	0	122,660,000	94.65	6,940,000
309073	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	83,800,000	83,800,000	83,789,000	0	83,789,000	99.99	11,000
309074	PENGADILAN AGAMA BARRU	181,500,000	181,500,000	181,500,000	0	181,500,000	100	0
309075	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	121,319,000	121,319,000	121,218,600	0	121,218,600	99.92	100,400
309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	181,642,000	134,804,000	134,803,153	0	134,803,153	100	847
309077	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	124,210,000	124,210,000	124,210,000	0	124,210,000	100	0
309078	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	104,514,000	104,514,000	104,514,000	0	104,514,000	100	0
309079	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	87,335,000	96,471,000	96,467,000	0	96,467,000	100	4,000
309080	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	90,679,000	90,679,000	90,679,000	0	90,679,000	100	0
309081	PENGADILAN AGAMA SINJAI	94,380,000	94,380,000	93,440,000	0	93,440,000	99	940,000
309082	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	215,505,000	223,107,000	191,642,000	130,000	191,512,000	85.84	31,595,000
309083	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	84,048,000	84,048,000	83,028,940	0	83,028,940	98.79	1,019,060
309084	PENGADILAN AGAMA PINRANG	133,983,000	133,983,000	133,983,000	0	133,983,000	100	0
309085	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	81,951,000	81,951,000	81,951,000	0	81,951,000	100	0
309087	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	101,434,000	101,434,000	101,434,000	0	101,434,000	100	0
309088	PENGADILAN AGAMA PALOPO	57,184,000	57,184,000	57,172,003	0	57,172,003	99.98	11,997
309089	PENGADILAN AGAMA MAKALE	105,179,000	105,179,000	105,179,000	0	105,179,000	100	0
401987	PENGADILAN AGAMA BELOPA	152,034,000	152,034,000	152,034,000	0	152,034,000	100	0
401989	PENGADILAN AGAMA MALILI	101,335,000	101,335,000	101,335,000	0	101,335,000	100	0
632052	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	149,985,000	149,985,000	149,985,000	0	149,985,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN	3,046,410,000	3,170,060,000	3,075,470,156	130,000	3,075,340,156	97.02	94,719,844
005042000KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							
309094	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	163,942,000	163,942,000	160,560,000	3,000	160,557,000	97.94	3,385,000
309095	PENGADILAN AGAMA RAHA	297,883,000	297,883,000	297,776,450	0	297,776,450	99.96	106,550
309096	PENGADILAN AGAMA KENDARI	208,700,000	172,640,000	165,880,000	0	165,880,000	96.08	6,760,000
309097	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	109,399,000	109,399,000	109,399,000	0	109,399,000	100	0
401993	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	157,247,000	157,247,000	152,280,000	0	152,280,000	96.84	4,967,000
401994	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	112,469,000	112,469,000	112,469,000	0	112,469,000	100	0
401995	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	146,015,000	146,015,000	145,474,500	135,000	145,339,500	99.54	675,500
576254	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	142,762,000	262,112,000	238,005,700	7,376,200	230,629,500	87.99	31,482,500
604773	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	338,604,000	338,604,000	338,554,000	0	338,554,000	99.99	50,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 56
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
690086	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	202,069,000	199,419,000	199,419,000	0	199,419,000	100	0
690090	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	171,019,000	179,129,000	162,359,500	0	162,359,500	90.64	16,769,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	2,050,109,000	2,138,859,000	2,082,177,150	7,514,200	2,074,662,950	97.35	64,196,050
005042100KD	BA(005) ES1(04) MALUKU							
309098	PENGADILAN AGAMA AMBON	359,384,000	359,384,000	359,379,600	0	359,379,600	100	4,400
309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	403,430,000	403,430,000	403,430,000	0	403,430,000	100	0
309100	PENGADILAN AGAMA MASOHI	327,500,000	318,500,000	316,730,000	0	316,730,000	99.44	1,770,000
402002	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	280,330,000	280,330,000	279,810,000	0	279,810,000	99.81	520,000
402003	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	291,370,000	291,370,000	281,301,000	0	281,301,000	96.54	10,069,000
402006	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	262,160,000	262,160,000	257,015,000	0	257,015,000	98.04	5,145,000
402711	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	130,356,000	255,956,000	220,517,215	0	220,517,215	86.15	35,438,785
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) MALUKU	2,054,530,000	2,171,130,000	2,118,182,815	0	2,118,182,815	97.56	52,947,185
005042200KD	BA(005) ES1(04) BALI							
309105	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	52,450,000	52,450,000	52,450,000	0	52,450,000	100	0
309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	48,054,000	48,054,000	48,044,000	0	48,044,000	99.98	10,000
402727	PENGADILAN AGAMA BANGLI	31,050,000	31,050,000	31,050,000	840,000	30,210,000	97.29	840,000
402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	63,922,000	63,922,000	64,195,900	278,400	63,917,500	99.99	4,500
402742	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	38,460,000	38,460,000	38,460,000	0	38,460,000	100	0
402758	PENGADILAN AGAMA TABANAN	46,425,000	46,425,000	46,380,500	0	46,380,500	99.9	44,500
402764	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	37,750,000	37,750,000	37,750,000	0	37,750,000	100	0
402773	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	37,200,000	37,200,000	37,200,000	0	37,200,000	100	0
526727	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	99,383,000	222,683,000	191,807,000	0	191,807,000	86.13	30,876,000
614732	PENGADILAN AGAMA BADUNG	57,150,000	57,150,000	55,550,000	0	55,550,000	97.2	1,600,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BALI	511,844,000	635,144,000	602,887,400	1,118,400	601,769,000	94.92	33,375,000
005042300KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT							
309107	PENGADILAN AGAMA MATARAM	208,900,000	208,900,000	180,885,000	0	180,885,000	86.59	28,015,000
309109	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	224,540,000	224,540,000	223,790,000	0	223,790,000	99.67	750,000
309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	392,100,000	392,100,000	368,243,862	0	368,243,862	93.92	23,856,138
309111	PENGADILAN AGAMA SELONG	246,100,000	246,100,000	245,920,000	0	245,920,000	99.93	180,000
309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	255,000,000	255,000,000	251,700,000	0	251,700,000	98.71	3,300,000
309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	179,400,000	179,400,000	179,329,000	0	179,329,000	99.96	71,000
402789	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	138,057,000	243,807,000	222,021,840	0	222,021,840	91.06	21,785,160
614728	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	653,630,000	653,630,000	640,168,625	0	640,168,625	97.94	13,461,375
690154	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	138,900,000	138,900,000	136,399,000	0	136,399,000	98.2	2,501,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 57
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	2,436,627,000	2,542,377,000	2,448,457,327	0	2,448,457,327	96.31	93,919,673
005042400KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR							
309115	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	18,387,000	18,387,000	18,098,500	0	18,098,500	98.43	288,500
309116	PENGADILAN AGAMA KUPANG	145,500,000	145,500,000	139,057,000	0	139,057,000	95.57	6,443,000
309117	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	108,000,000	108,000,000	99,650,000	0	99,650,000	92.27	8,350,000
309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	87,000,000	87,000,000	87,850,000	850,000	87,000,000	100	0
309119	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	16,200,000	16,200,000	16,156,500	0	16,156,500	99.73	43,500
402795	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	155,770,000	155,770,000	155,761,000	0	155,761,000	99.99	9,000
402809	PENGADILAN AGAMA RUTENG	79,450,000	79,450,000	79,450,000	0	79,450,000	100	0
402815	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	68,369,000	68,369,000	68,154,000	0	68,154,000	99.69	215,000
402821	PENGADILAN AGAMA SOE	36,540,000	36,540,000	36,514,000	0	36,514,000	99.93	26,000
402840	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	6,420,000	6,420,000	6,234,000	0	6,234,000	97.1	186,000
402846	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	112,400,000	112,400,000	104,628,000	0	104,628,000	93.09	7,772,000
402852	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	112,388,000	112,388,000	112,336,500	0	112,336,500	99.95	51,500
576261	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	158,926,000	279,476,000	254,244,812	0	254,244,812	90.97	25,231,188
632065	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	83,500,000	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000	100	0
682282	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	128,680,000	128,680,000	128,680,000	0	128,680,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	1,317,530,000	1,438,080,000	1,390,314,312	850,000	1,389,464,312	96.68	48,615,688
005042500KD	BA(005) ES1(04) PAPUA							
402861	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	148,486,000	282,486,000	254,245,982	0	254,245,982	90	28,240,018
402877	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	110,800,000	110,800,000	107,872,000	0	107,872,000	97.36	2,928,000
402892	PENGADILAN AGAMA BIAK	87,130,000	87,130,000	86,820,000	0	86,820,000	99.64	310,000
402928	PENGADILAN AGAMA NABIRE	103,500,000	103,500,000	103,052,400	0	103,052,400	99.57	447,600
402934	PENGADILAN AGAMA WAMENA	62,400,000	62,400,000	62,400,000	0	62,400,000	100	0
402943	PENGADILAN AGAMA SERUI	74,500,000	74,500,000	74,302,000	0	74,302,000	99.73	198,000
402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	196,000,000	196,000,000	193,654,778	0	193,654,778	98.8	2,345,222
614770	PENGADILAN AGAMA SENTANI	119,225,000	119,225,000	118,990,000	0	118,990,000	99.8	235,000
614774	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	85,000,000	85,000,000	83,011,000	0	83,011,000	97.66	1,989,000
614781	PENGADILAN AGAMA PANIAI	38,660,000	38,660,000	38,330,000	0	38,330,000	99.15	330,000
690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	86,900,000	86,900,000	86,716,000	0	86,716,000	99.79	184,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) PAPUA	1,112,601,000	1,246,601,000	1,209,394,160	0	1,209,394,160	97.02	37,206,840
005042600KD	BA(005) ES1(04) BENGKULU							
309120	PENGADILAN AGAMA MANNA	117,400,000	117,400,000	117,400,000	0	117,400,000	100	0
309121	PENGADILAN AGAMA CURUP	171,400,000	171,400,000	171,400,000	0	171,400,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
309122	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	179,040,000	179,040,000	179,030,000	0	179,030,000	99.99	10,000
309123	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	123,000,000	123,000,000	121,050,000	0	121,050,000	98.41	1,950,000
403404	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	135,990,000	135,990,000	135,990,000	0	135,990,000	100	0
403405	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	91,750,000	91,750,000	91,750,000	0	91,750,000	100	0
403406	PENGADILAN AGAMA TAIS	112,110,000	112,110,000	112,110,000	0	112,110,000	100	0
403407	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	126,800,000	126,800,000	126,800,000	0	126,800,000	100	0
576275	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	148,689,000	248,889,000	227,687,000	0	227,687,000	91.48	21,202,000
690133	PENGADILAN AGAMA LEBONG	84,000,000	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BENGKULU	1,290,179,000	1,390,379,000	1,367,217,000	0	1,367,217,000	98.33	23,162,000
005042800KD	BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA							
309101	PENGADILAN AGAMA TERNATE	188,840,000	188,840,000	187,986,793	0	187,986,793	99.55	853,207
309102	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	166,337,000	166,337,000	166,252,800	0	166,252,800	99.95	84,200
309103	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	161,520,000	161,520,000	161,473,350	0	161,473,350	99.97	46,650
309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	159,000,000	159,000,000	156,783,500	0	156,783,500	98.61	2,216,500
440741	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	98,050,000	224,700,000	199,353,000	0	199,353,000	88.72	25,347,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA	773,747,000	900,397,000	871,849,443	0	871,849,443	96.83	28,547,557
005042900KD	BA(005) ES1(04) BANTEN							
400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	585,911,000	585,911,000	560,832,400	0	560,832,400	95.72	25,078,600
400818	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	195,000,000	225,000,000	224,960,000	0	224,960,000	99.98	40,000
400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	110,000,000	110,000,000	109,999,800	0	109,999,800	100	200
417851	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	308,093,000	308,093,000	299,036,000	0	299,036,000	97.06	9,057,000
440713	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	114,180,000	206,330,000	184,921,000	1,480,000	183,441,000	88.91	22,889,000
604724	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	480,000,000	432,100,000	425,598,000	0	425,598,000	98.5	6,502,000
652077	PENGADILAN AGAMA CILEGON	125,000,000	125,000,000	124,324,992	0	124,324,992	99.46	675,008
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BANTEN	1,918,184,000	1,992,434,000	1,929,672,192	1,480,000	1,928,192,192	96.85	64,241,808
005043000KD	BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG							
402303	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	124,000,000	107,000,000	96,680,000	0	96,680,000	90.36	10,320,000
402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	235,598,000	235,598,000	235,598,000	0	235,598,000	100	0
403093	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	295,452,000	295,452,000	286,327,000	0	286,327,000	96.91	9,125,000
440729	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	103,050,000	203,250,000	172,855,838	0	172,855,838	85.05	30,394,162
690129	PENGADILAN AGAMA MENTOK	102,490,000	102,490,000	102,306,800	0	102,306,800	99.82	183,200
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG	860,590,000	943,790,000	893,767,638	0	893,767,638	94.7	50,022,362
005043100KD	BA(005) ES1(04) GORONTALO							
309061	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	286,219,000	269,280,000	269,078,640	0	269,078,640	99.93	201,360

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402000	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	269,151,000	286,090,000	286,090,000	0	286,090,000	100	0
402001	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	158,724,000	158,724,000	158,724,000	0	158,724,000	100	0
402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	217,875,000	217,875,000	217,875,000	0	217,875,000	100	0
440735	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	126,950,000	230,600,000	209,869,701	0	209,869,701	91.01	20,730,299
652131	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	215,320,000	215,320,000	215,220,000	0	215,220,000	99.95	100,000
682186	PENGADILAN AGAMA MARISA	158,722,000	158,722,000	158,702,000	0	158,702,000	99.99	20,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) GORONTALO	1,432,961,000	1,536,611,000	1,515,559,341	0	1,515,559,341	98.63	21,051,659
005043200KD	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG							
402149	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	135,100,000	135,100,000	135,100,000	0	135,100,000	100	0
402155	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	122,560,000	122,560,000	121,969,000	0	121,969,000	99.52	591,000
402161	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	170,300,000	170,300,000	170,040,000	0	170,040,000	99.85	260,000
402180	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	102,280,000	102,280,000	102,202,000	0	102,202,000	99.92	78,000
526709	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	104,180,000	204,380,000	177,893,250	0	177,893,250	87.04	26,486,750
547700	PENGADILAN AGAMA BATAM	118,100,000	118,100,000	118,100,000	0	118,100,000	100	0
614671	PENGADILAN AGAMA NATUNA	129,560,000	129,560,000	129,560,000	0	129,560,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	882,080,000	982,280,000	954,864,250	0	954,864,250	97.21	27,415,750
005043300KD	BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT							
402007	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	161,306,000	161,306,000	161,106,000	0	161,106,000	99.88	200,000
402883	PENGADILAN AGAMA SORONG	479,806,000	479,806,000	479,806,000	0	479,806,000	100	0
402903	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	242,196,000	242,196,000	242,196,000	0	242,196,000	100	0
402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	271,300,000	271,300,000	271,300,000	0	271,300,000	100	0
526719	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	107,877,000	237,677,000	211,717,000	0	211,717,000	89.08	25,960,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT	1,262,485,000	1,392,285,000	1,366,125,000	0	1,366,125,000	98.12	26,160,000
005043400KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT							
309091	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	148,720,000	148,720,000	144,180,000	0	144,180,000	96.95	4,540,000
309092	PENGADILAN AGAMA MAJENE	137,750,000	137,750,000	141,560,000	5,510,000	136,050,000	98.77	1,700,000
309093	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	137,958,000	137,958,000	136,042,200	0	136,042,200	98.61	1,915,800
401988	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	115,850,000	110,946,000	110,651,000	0	110,651,000	99.73	295,000
526715	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	88,158,000	190,758,000	168,831,270	0	168,831,270	88.51	21,926,730
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT	628,436,000	726,132,000	701,264,470	5,510,000	695,754,470	96.58	30,377,530
005043500KD	UAPPAW 005043500 KALIMANTAN UTARA							
402676	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	122,715,000	112,715,000	105,924,000	0	105,924,000	93.98	6,791,000
417658	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	562,466,000	572,466,000	566,383,000	4,735,000	561,648,000	98.11	10,818,000
526723	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	76,190,000	178,490,000	157,828,537	0	157,828,537	88.42	20,661,463

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 60
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
690175	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	324,025,000	324,025,000	321,365,000	0	321,365,000	99.18	2,660,000
	JUMLAH BELANJA UAPPAW 005043500 KALIMANTAN UTARA	1,085,396,000	1,187,696,000	1,151,500,537	4,735,000	1,146,765,537	96.95	40,930,463
	JUMLAH BELANJA 04	123,860,368,000	135,205,164,000	127,737,329,115	742,415,212	126,994,913,903	94.48	8210250097
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN							
005050100KD	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA							
526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	99,230,000	99,230,000	99,004,897	0	99,004,897	99.77	225,103
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	71,020,000	63,660,000	62,550,000	0	62,550,000	98.26	1,110,000
663162	PENGADILAN MILITER UTAMA	468,110,000	468,110,000	464,874,264	0	464,874,264	99.31	3,235,736
663251	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	270,614,000	270,614,000	270,090,200	0	270,090,200	99.81	523,800
663268	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	213,680,000	213,680,000	203,427,700	0	203,427,700	95.2	10,252,300
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	1,122,654,000	1,115,294,000	1,099,947,061	0	1,099,947,061	98.62	15,346,939
005050100KP	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA							
663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	22,994,826,000	23,176,754,000	22,771,593,797	3,940,959	22,767,652,838	98.23	409,101,162
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	22,994,826,000	23,176,754,000	22,771,593,797	3,940,959	22,767,652,838	98.25	409,101,162
005050200KD	BA(005) ES1(05) JAWA BARAT							
531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	64,710,000	64,710,000	64,709,925	0	64,709,925	100	75
663272	PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG	151,200,000	151,200,000	151,200,000	0	151,200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) JAWA BARAT	215,910,000	215,910,000	215,909,925	0	215,909,925	100	75
005050300KD	BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH							
531831	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	49,910,000	49,910,000	49,435,000	0	49,435,000	99.05	475,000
663289	PENGADILAN MILITER II - 10 DI SEMARANG	83,332,000	83,332,000	83,263,234	0	83,263,234	99.92	68,766
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH	133,242,000	133,242,000	132,698,234	0	132,698,234	99.59	543,766
005050400KD	BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	42,310,000	41,800,000	41,749,000	0	41,749,000	99.88	51,000
663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	93,972,000	93,972,000	92,411,000	0	92,411,000	98.34	1,561,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA	136,282,000	135,772,000	134,160,000	0	134,160,000	98.81	1,612,000
005050500KD	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya							
526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	52,420,000	52,420,000	52,268,222	158,000	52,110,222	99.41	309,778
548941	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	104,100,000	104,100,000	102,768,200	0	102,768,200	98.72	1,331,800
663301	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	409,430,000	409,430,000	416,577,730	15,807,500	400,770,230	97.88	8,659,770
663315	PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA	181,780,000	181,780,000	179,014,195	0	179,014,195	98.48	2,765,805
663322	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	71,135,000	71,135,000	69,765,000	0	69,765,000	98.07	1,370,000
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	818,865,000	818,865,000	820,393,347	15,965,500	804,427,847	100.19	14,437,153
005050600KD	BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 61
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
578819	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	110,660,000	110,150,000	72,538,271	0	72,538,271	65.85	37,611,729
663183	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	204,675,000	204,675,000	204,135,000	0	204,135,000	99.74	540,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	315,335,000	314,825,000	276,673,271	0	276,673,271	87.88	38,151,729
005050700KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA							
526726	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	165,900,000	165,900,000	158,905,379	0	158,905,379	95.78	6,994,621
526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	49,910,000	49,400,000	49,400,000	0	49,400,000	100	0
663179	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	547,462,000	547,462,000	530,765,900	0	530,765,900	96.95	16,696,100
663200	PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN	148,810,000	148,810,000	148,709,060	0	148,709,060	99.93	100,940
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA	912,082,000	911,572,000	887,780,339	0	887,780,339	97.39	23,791,661
005050800KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT							
531845	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	42,820,000	42,515,000	42,514,500	0	42,514,500	100	500
663205	PENGADILAN MILITER I - 03 DI PADANG	205,064,000	205,064,000	204,355,305	5,020,000	199,335,305	97.21	5,728,695
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT	247,884,000	247,579,000	246,869,805	5,020,000	241,849,805	99.71	5,729,195
005050900KD	BA(005) ES1(05) RIAU							
578823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	42,710,000	42,518,000	42,518,000	0	42,518,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) RIAU	42,710,000	42,518,000	42,518,000	0	42,518,000	100	0
005051000KD	BA(005) ES1(05) JAMBI							
578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	42,710,000	42,710,000	42,200,000	0	42,200,000	98.81	510,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) JAMBI	42,710,000	42,710,000	42,200,000	0	42,200,000	98.81	510,000
005051100KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN							
526729	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	166,300,000	166,300,000	153,929,566	0	153,929,566	92.56	12,370,434
526751	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	46,710,000	46,710,000	46,680,000	0	46,680,000	99.94	30,000
663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	172,680,000	172,680,000	169,764,713	0	169,764,713	98.31	2,915,287
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN	385,690,000	385,690,000	370,374,279	0	370,374,279	96.03	15,315,721
005051200KD	BA(005) ES1(05) LAMPUNG							
559841	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	45,420,000	45,420,000	45,295,500	0	45,295,500	99.73	124,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) LAMPUNG	45,420,000	45,420,000	45,295,500	0	45,295,500	99.73	124,500
005051300KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT							
531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	42,310,000	35,320,000	35,310,500	0	35,310,500	99.97	9,500
663226	PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK	100,335,000	100,335,000	100,335,000	0	100,335,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT	142,645,000	135,655,000	135,645,500	0	135,645,500	99.99	9,500
005051400KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH							
578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	42,310,000	42,310,000	42,310,000	0	42,310,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH	42,310,000	42,310,000	42,310,000	0	42,310,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 62
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
005051500KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN							
526731	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	135,500,000	152,387,000	151,445,268	0	151,445,268	99.38	941,732
531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	44,910,000	44,910,000	44,393,100	0	44,393,100	98.85	516,900
663233	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	80,120,000	80,120,000	65,030,450	0	65,030,450	81.17	15,089,550
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN	260,530,000	277,417,000	260,868,818	0	260,868,818	94.03	16,548,182
005051600KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR							
559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	102,690,000	102,690,000	95,425,285	0	95,425,285	92.93	7,264,715
663247	PENGADILAN MILITER I - 07 DI BALIKPAPAN	107,834,000	107,834,000	107,816,915	0	107,816,915	99.98	17,085
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR	210,524,000	210,524,000	203,242,200	0	203,242,200	96.54	7,281,800
005051700KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA							
526735	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	150,200,000	150,200,000	146,948,207	0	146,948,207	97.84	3,251,793
531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	51,910,000	51,910,000	51,907,330	0	51,907,330	99.99	2,670
663361	PENGADILAN MILITER III - 17 DI MANADO	233,930,000	233,930,000	231,603,915	0	231,603,915	99.01	2,326,085
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA	436,040,000	436,040,000	430,459,452	0	430,459,452	98.72	5,580,548
005051800KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH							
578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	51,910,000	51,910,000	51,910,000	0	51,910,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH	51,910,000	51,910,000	51,910,000	0	51,910,000	100	0
005051900KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN							
526712	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	129,500,000	129,500,000	113,687,060	0	113,687,060	87.79	15,812,940
526772	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	98,010,000	98,010,000	97,621,793	214,000	97,407,793	99.39	602,207
663357	PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR	179,004,000	179,004,000	178,774,200	0	178,774,200	99.87	229,800
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN	406,514,000	406,514,000	390,083,053	214,000	389,869,053	95.96	16,644,947
005052000KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA							
578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	47,910,000	47,910,000	47,908,000	0	47,908,000	100	2,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA	47,910,000	47,910,000	47,908,000	0	47,908,000	100	2,000
005052100KD	BA(005) ES1(05) MALUKU							
539118	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	138,610,000	138,610,000	134,463,200	0	134,463,200	97.01	4,146,800
663378	PENGADILAN MILITER III - 18 DI AMBON	194,521,000	194,521,000	193,083,000	0	193,083,000	99.26	1,438,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) MALUKU	333,131,000	333,131,000	327,546,200	0	327,546,200	98.32	5,584,800
005052200KD	BA(005) ES1(05) BALI							
559862	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	45,910,000	45,910,000	45,834,000	0	45,834,000	99.83	76,000
663336	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	98,150,000	98,150,000	98,112,900	0	98,112,900	99.96	37,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) BALI	144,060,000	144,060,000	143,946,900	0	143,946,900	99.92	113,100
005052300KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
526737	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	123,100,000	123,100,000	122,372,648	0	122,372,648	99.41	727,352
578872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	97,490,000	97,490,000	91,274,150	0	91,274,150	93.62	6,215,850
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT	220,590,000	220,590,000	213,646,798	0	213,646,798	96.85	6,943,202
005052400KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR							
539122	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	137,410,000	137,410,000	107,439,285	0	107,439,285	78.19	29,970,715
663343	PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG	99,902,000	99,902,000	98,452,900	0	98,452,900	98.55	1,449,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR	237,312,000	237,312,000	205,892,185	0	205,892,185	86.76	31,419,815
005052500KD	BA(005) ES1(05) PAPUA							
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	150,680,000	150,680,000	149,603,240	0	149,603,240	99.29	1,076,760
663382	PENGADILAN MILITER III - 19 DI JAYAPURA	554,319,000	554,319,000	546,252,850	0	546,252,850	98.54	8,066,150
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) PAPUA	704,999,000	704,999,000	695,856,090	0	695,856,090	98.7	9,142,910
005052600KD	BA(005) ES1(05) BENGKULU							
578886	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	42,310,000	42,310,000	41,942,500	0	41,942,500	99.13	367,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) BENGKULU	42,310,000	42,310,000	41,942,500	0	41,942,500	99.13	367,500
005052900KD	BA(005) ES1(05) BANTEN							
690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	50,420,000	49,910,000	49,654,000	0	49,654,000	99.49	256,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) BANTEN	50,420,000	49,910,000	49,654,000	0	49,654,000	99.49	256,000
005053200KD	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG							
690197	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	114,850,000	114,850,000	96,219,464	0	96,219,464	83.78	18,630,536
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG	114,850,000	114,850,000	96,219,464	0	96,219,464	83.78	18,630,536
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	77,250,000	77,250,000	74,986,650	0	74,986,650	97.07	2,263,350
403430	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	42,310,000	42,310,000	41,251,800	0	41,251,800	97.5	1,058,200
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	119,560,000	119,560,000	116,238,450	0	116,238,450	97.22	3,321,550
	JUMLAH BELANJA 05	30,979,225,000	31,161,153,000	30,539,783,168	25,140,459	30,514,642,709	98.01	646510291
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN							
005060100KP	SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG							
610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	163,025,357,000	249,828,011,000	240,060,488,602	6,190,562	240,054,298,040	96.09	9,773,712,960
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI MAHKAMAH AGUNG	163,025,357,000	249,828,011,000	240,060,488,602	6,190,562	240,054,298,040	96.09	9,773,712,960
	JUMLAH BELANJA 06	163,025,357,000	249,828,011,000	240,060,488,602	6,190,562	240,054,298,040	96.09	9773712960
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG							
005070100KP	BADAN URUSAN ADMINISTRASI							
663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	88,013,162,000	88,013,162,000	83,238,482,905	9,945,765	83,228,537,140	94.56	4,784,624,860
	JUMLAH BELANJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI	88,013,162,000	88,013,162,000	83,238,482,905	9,945,765	83,228,537,140	94.58	4,784,624,860

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 07	88,013,162,000	88,013,162,000	83,238,482,905	9,945,765	83,228,537,140	94.58	4784624860
	JUMLAH BELANJA	11,903,768,112,000	11,925,492,498,000	11,632,195,659,846	4,970,488,619	11,627,225,171,227	97.54	298,267,326,773

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI							
51	BELANJA PEGAWAI	7,822,482,806,000	7,477,623,727,000	7,285,298,864,769	2,325,905,724	7,282,972,959,045	97.4	194,650,767,955
52	BELANJA BARANG	2,251,570,293,000	2,501,059,098,000	2,437,477,328,384	945,782,392	2,436,531,545,992	97.42	64,527,552,008
53	BELANJA MODAL	1,066,030,000,000	1,071,360,904,000	1,061,888,978,393	459,225,039	1,061,429,753,354	99.07	9,931,150,646
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI	11,140,083,099,000	11,050,043,729,000	10,784,665,171,546	3,730,913,155	10,780,934,258,391	97.6	269,109,470,609
02	KEPANITERAAN							
51	BELANJA PEGAWAI	178,770,600,000	188,031,865,000	187,846,931,908	98,396,611	187,748,535,297	99.85	283,329,703
52	BELANJA BARANG	33,501,391,000	33,689,366,000	32,518,298,619	0	32,518,298,619	96.52	1,171,067,381
53	BELANJA MODAL	253,969,000	285,666,000	246,309,000	0	246,309,000	86.22	39,357,000
	JUMLAH BELANJA (02) KEPANITERAAN	212,525,960,000	222,006,897,000	220,611,539,527	98,396,611	220,513,142,916	99.37	1,493,754,084
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	10,643,181,000	9,633,715,000	9,588,129,186	6,295,267	9,581,833,919	99.46	51,881,081
52	BELANJA BARANG	129,939,455,000	131,816,667,000	127,971,910,911	351,191,588	127,620,719,323	96.82	4,195,947,677
53	BELANJA MODAL	4,698,305,000	7,784,000,000	7,782,824,886	0	7,782,824,886	99.98	1,175,114
	JUMLAH BELANJA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	145,280,941,000	149,234,382,000	145,342,864,983	357,486,855	144,985,378,128	97.39	4,249,003,872
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA							
51	BELANJA PEGAWAI	7,380,852,000	7,380,852,000	6,807,860,810	5,502,588	6,802,358,222	92.16	578,493,778
52	BELANJA BARANG	105,031,638,000	110,420,188,000	107,858,817,905	736,912,624	107,121,905,281	97.01	3,298,282,719
53	BELANJA MODAL	11,447,878,000	17,404,124,000	13,070,650,400	0	13,070,650,400	75.1	4,333,473,600
	JUMLAH BELANJA (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	123,860,368,000	135,205,164,000	127,737,329,115	742,415,212	126,994,913,903	94.48	8,210,250,097
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	6,259,030,000	5,744,306,000	5,742,596,835	1,611,678	5,740,985,157	99.94	3,320,843
52	BELANJA BARANG	24,199,416,000	24,669,830,000	24,090,234,333	23,528,781	24,066,705,552	97.56	603,124,448
53	BELANJA MODAL	520,779,000	747,017,000	706,952,000	0	706,952,000	94.64	40,065,000
	JUMLAH BELANJA (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	30,979,225,000	31,161,153,000	30,539,783,168	25,140,459	30,514,642,709	98.01	646,510,291
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	23,157,586,000	27,461,430,000	27,375,639,040	373,758	27,375,265,282	99.69	86,164,718
52	BELANJA BARANG	126,131,771,000	204,382,015,000	196,044,394,840	5,816,804	196,038,578,036	95.92	8,343,436,964
53	BELANJA MODAL	13,736,000,000	17,984,566,000	16,640,454,722	0	16,640,454,722	92.53	1,344,111,278
	JUMLAH BELANJA (06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	163,025,357,000	249,828,011,000	240,060,488,602	6,190,562	240,054,298,040	96.09	9,773,712,960
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG							
51	BELANJA PEGAWAI	53,468,273,000	49,468,273,000	45,586,747,504	3,394,765	45,583,352,739	92.15	3,884,920,261
52	BELANJA BARANG	34,344,889,000	34,000,939,000	33,121,613,401	6,551,000	33,115,062,401	97.39	885,876,599
53	BELANJA MODAL	200,000,000	4,543,950,000	4,530,122,000	0	4,530,122,000	99.7	13,828,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	88,013,162,000	88,013,162,000	83,238,482,905	9,945,765	83,228,537,140	94.58	4,784,624,860
	JUMLAH BELANJA	11,903,768,112,000	11,925,492,498,000	11,632,195,659,846	4,970,488,619	11,627,225,171,227	97.54	298,267,326,773

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,819,341,200,000	1,756,462,712,000	1,727,024,674,746	154,699,447	1,726,869,975,299	98.32	29,592,736,701
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	606,054,000	29,571,000	23,144,826	1,065,645	22,079,181	78.27	7,491,819
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	136,391,865,000	127,657,706,000	122,558,038,767	35,412,586	122,522,626,181	96.01	5,135,079,819
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,974,052,000	36,166,478,000	34,175,663,449	3,029,333	34,172,634,116	94.5	1,993,843,884
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	39,321,837,000	39,230,815,000	37,379,820,000	71,512,412	37,308,307,588	95.28	1,922,507,412
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,093,161,075,000	2,125,208,381,000	2,099,977,739,344	1,192,929,816	2,098,784,809,528	98.81	26,423,571,472
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	375,489,334,000	349,930,108,000	338,420,859,030	7,406,484	338,413,452,546	96.71	11,516,655,454
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85,164,873,000	86,709,767,000	83,337,977,920	3,991,150	83,333,986,770	96.11	3,375,780,230
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	145,800,000	0	0	0	0	0	0
511129	Belanja Uang Makan PNS	276,997,053,000	269,910,807,000	246,631,712,720	38,567,750	246,593,144,970	91.38	23,317,662,030
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	54,025,000	73,100,000	63,750,000	125,000	63,625,000	87.21	9,475,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	5,402,422,000	5,156,814,000	4,981,215,000	8,350,000	4,972,865,000	96.59	183,949,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	69,000,000	69,000,000	0	0	0	0	69,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,436,267,000	21,882,687,000	19,210,688,840	96,174,593	19,114,514,247	87.79	2,768,172,753
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	67,988,946,000	59,819,545,000	56,474,668,509	95,150,000	56,379,518,509	94.41	3,440,026,491
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	117,418,139,000	132,750,103,000	131,876,676,400	16,155,000	131,860,521,400	99.34	889,581,600
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	729,120,000	130,061,000	116,340,260	0	116,340,260	89.45	13,720,740
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	43,752,314,000	47,170,835,000	46,347,751,338	37,306,200	46,310,445,138	98.26	860,389,862
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	5,606,668,000	4,595,526,000	4,191,452,740	0	4,191,452,740	91.21	404,073,260
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2,804,550,000	2,890,230,000	2,889,810,000	1,288,800	2,888,521,200	99.99	1,708,800
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	42,000	42,000	38,980	34	38,946	92.81	3,054
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	262,948,000	275,590,000	275,121,000	128,880	274,992,120	99.83	597,880
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	11,844,000	17,220,000	17,220,000	0	17,220,000	100	0
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	47,065,746,000	50,444,814,000	50,414,813,000	77,129,300	50,337,683,700	99.94	107,130,300
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	11,763,302,000	12,656,256,000	12,646,243,692	0	12,646,243,692	99.92	10,012,308
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	100,954,000	110,880,000	110,802,600	0	110,802,600	99.93	77,400
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,515,000,000	4,515,000,000	4,515,000,000	0	4,515,000,000	100	0
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	350,000,000	350,000,000	300,775,200	0	300,775,200	85.94	49,224,800
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	6,820,682,000	11,340,459,000	11,076,965,404	2,858,800	11,074,106,604	97.68	266,352,396
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,463,000	1,720,000	212,719	2,221	210,498	12.37	1,509,502
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	595,866,000	701,334,000	594,278,960	285,880	593,993,080	84.74	107,340,920
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	245,899,000	241,499,000	155,083,794	114,352	154,969,442	64.22	86,529,558
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	985,066,000	1,704,686,000	1,635,342,000	350,000	1,634,992,000	95.93	69,694,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	595,438,000	706,639,000	579,252,610	289,680	578,962,930	81.97	127,676,070
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,541,626,000	2,266,541,000	1,946,677,000	527,100	1,946,149,900	85.89	320,391,100
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	40,320,000	0	0	0	0	0	0
512211	Belanja Uang Lembur	956,547,000	744,821,000	682,027,000	0	682,027,000	91.57	62,794,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	24,120,000	18,588,000	18,461,000	0	18,461,000	99.32	127,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,889,430,871,000	2,588,118,733,000	2,503,414,830,324	596,629,928	2,502,818,200,396	96.73	85,300,532,604
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8,000,000,000	25,280,000,000	24,176,540,880	0	24,176,540,880	95.64	1,103,459,120
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**8,102,162,328,000**	**7,765,344,168,000**	**7,568,246,770,052**	**2,441,480,391**	**7,565,805,289,661**	**97.46**	**199,538,878,339**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	726,433,341,000	745,272,015,000	742,029,689,902	50,096,398	741,979,593,504	99.56	3,292,421,496
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,921,061,000	19,182,415,000	17,786,193,756	8,772,560	17,777,421,196	92.72	1,404,993,804
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,496,414,000	44,123,955,000	43,522,792,692	44,011,760	43,478,780,932	98.64	645,174,068
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	226,343,627,000	321,029,261,000	303,772,809,908	145,316,300	303,627,493,608	94.62	17,401,767,392
521211	Belanja Bahan	52,914,162,000	75,358,920,000	73,917,161,811	1,325,000	73,915,836,811	98.09	1,443,083,189
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	883,504,000	684,920,000	640,754,000	28,819	640,725,181	93.55	44,194,819
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,787,554,000	1,242,406,000	1,143,276,006	0	1,143,276,006	92.02	99,129,994
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	316,239,000	514,222,000	512,899,540	0	512,899,540	99.74	1,322,460
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	35,280,000	35,280,000	0	35,280,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	90,991,399,000	97,164,533,000	96,672,639,841	5,518,642	96,667,121,199	99.49	497,411,801
522111	Belanja Langganan Listrik	140,435,719,000	186,105,234,000	182,787,452,598	34,028,751	182,753,423,847	98.22	3,351,810,153
522112	Belanja Langganan Telepon	7,600,813,000	3,109,883,000	2,534,119,769	2,246,764	2,531,873,005	81.49	578,009,995
522113	Belanja Langganan Air	9,084,784,000	7,487,406,000	6,895,615,299	1,800,000	6,893,815,299	92.1	593,590,701
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	998,350,000	1,723,913,000	1,711,596,296	0	1,711,596,296	99.29	12,316,704
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	204,000	0	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	37,554,473,000	38,517,439,000	38,440,882,135	432,351	38,440,449,784	99.8	76,989,216
522141	Belanja Sewa	306,526,996,000	307,117,696,000	300,796,211,689	171,183,000	300,625,028,689	97.94	6,492,667,311
522151	Belanja Jasa Profesi	13,813,043,000	27,800,014,000	27,494,517,348	4,550,000	27,489,967,348	98.9	310,046,652
522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	8,247,900,000	4,419,317,000	4,419,164,000	0	4,419,164,000	100	153,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	38,061,622,000	61,004,258,000	60,391,941,996	40,000	60,391,901,996	99	612,356,004
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,885,246,000	284,907,657,000	283,173,758,934	18,671,302	283,155,087,632	99.39	1,752,569,368
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	44,804,197,000	45,916,721,000	45,662,157,627	760,236	45,661,397,391	99.45	255,323,609
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190,888,386,000	205,322,845,000	202,575,622,869	7,640,182	202,567,982,687	98.66	2,754,862,313
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10,306,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	264,268,424,000	329,241,075,000	309,504,932,932	987,740,477	308,517,192,455	94.01	20,723,882,545
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113,797,730,000	128,706,770,000	119,838,567,763	136,975,348	119,701,592,415	93.11	9,005,177,585
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,793,605,000	33,409,673,000	26,920,800,367	12,079,408	26,908,720,959	80.58	6,500,952,041
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48,088,541,000	52,325,045,000	48,869,502,571	416,840,739	48,452,661,832	93.4	3,872,383,168
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	9,133,487,000	10,962,848,000	10,865,949,547	14,501,952	10,851,447,595	99.12	111,400,405
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	637,726,000	186,466,000	95,955,891	0	95,955,891	51.46	90,510,109
	JUMLAH BELANJA BARANG	**2,704,718,853,000**	**3,032,872,187,000**	**2,953,012,247,087**	**2,064,559,989**	**2,950,947,687,098**	**97.37**	**81,924,499,902**
53	**BELANJA MODAL**							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1,220,000,000	1,179,999,000	1,131,840,348	0	1,131,840,348	95.92	48,158,652
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,322,999,000	110,253,069,000	100,937,349,509	0	100,937,349,509	91.55	9,315,719,491

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	111,561,000	111,442,000	0	111,442,000	99.89	119,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	841,627,542,000	731,651,361,000	730,778,787,219	451,606,840	730,327,180,379	99.88	1,324,180,621
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	193,322,550,000	246,496,774,000	245,971,240,150	7,618,199	245,963,621,951	99.79	533,152,049
536111	Belanja Modal Lainnya	0	364,993,000	362,903,450	0	362,903,450	99.43	2,089,550
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	33,474,000	133,634,000	132,800,000	0	132,800,000	99.38	834,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**1,081,526,565,000**	**1,090,191,391,000**	**1,079,426,362,676**	**459,225,039**	**1,078,967,137,637**	**99.01**	**11,224,253,363**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**11,888,407,746,000**	**11,888,407,746,000**	**11,600,685,379,815**	**4,965,265,419**	**11,595,720,114,396**	**97.58**	**292,687,631,604**
04	**PNBP**							
52	**BELANJA BARANG**							
521211	Belanja Bahan	0	460,943,000	366,993,186	0	366,993,186	79.62	93,949,814
522151	Belanja Jasa Profesi	0	120,800,000	91,750,000	0	91,750,000	75.95	29,050,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	367,346,000	365,175,000	0	365,175,000	99.41	2,171,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,915,806,000	1,364,674,348	1,480,000	1,363,194,348	71.23	552,611,652
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	44,630,000	21,320,000	0	21,320,000	47.77	23,310,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	2,195,024,000	1,950,882,644	3,743,200	1,947,139,444	88.88	247,884,556
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,179,747,000	1,029,556,128	0	1,029,556,128	87.27	150,190,872
	JUMLAH BELANJA BARANG	**0**	**6,284,296,000**	**5,190,351,306**	**5,223,200**	**5,185,128,106**	**82.59**	**1,099,167,894**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,360,366,000	24,587,932,000	20,175,518,210	0	20,175,518,210	82.05	4,412,413,790
	JUMLAH BELANJA MODAL	**15,360,366,000**	**24,587,932,000**	**20,175,518,210**	**0**	**20,175,518,210**	**82.05**	**4,412,413,790**
	JUMLAH PNBP	**15,360,366,000**	**30,872,228,000**	**25,365,869,516**	**5,223,200**	**25,360,646,316**	**82.16**	**5,511,581,684**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	880,000,000	880,000,000	0	880,000,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	20,000	0	0	0	0	20,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	**0**	**881,620,000**	**880,000,000**	**0**	**880,000,000**	**99.82**	**1,620,000**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,244,379,000	1,243,230,598	0	1,243,230,598	99.91	1,148,402
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3,500,000,000	3,437,274,178	0	3,437,274,178	98.21	62,725,822
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	586,525,000	583,905,739	0	583,905,739	99.55	2,619,261
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**5,330,904,000**	**5,264,410,515**	**0**	**5,264,410,515**	**98.75**	**66,493,485**
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**6,212,524,000**	**6,144,410,515**	**0**	**6,144,410,515**	**98.9**	**68,113,485**
	TOTAL	**11,903,768,112,000**	**11,925,492,498,000**	**11,632,195,659,846**	**4,970,488,619**	**11,627,225,171,227**	**97.54**	**298,267,326,773**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	15,773,175,000	15,773,175,000	15,126,510,524	0	15,126,510,524	95.9	646,664,476
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2,971,635,000	2,971,635,000	3,064,642,232	112,480,548	2,952,161,684	99.34	19,473,316
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	84,604,575,000	84,604,575,000	82,119,789,269	39,384,951	82,080,404,318	40360.25	2,524,170,682
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67,425,488,000	67,425,488,000	66,766,274,323	52,128,330	66,714,145,993	44251.1	711,342,007
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	709,123,000	709,123,000	688,874,099	0	688,874,099	97.14	20,248,901
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5,776,495,000	5,776,495,000	5,714,099,811	20,827,500	5,693,272,311	2355.47	83,222,689
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3,665,680,000	3,665,680,000	3,511,649,150	372,000	3,511,277,150	3768.21	154,402,850
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	**180,928,421,000**	**180,928,421,000**	**176,994,089,408**	**225,193,329**	**176,768,896,079**	**97.825**	**4,159,524,921**
WA	Program Dukungan Manajemen							
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	41,177,991,000	60,173,951,000	59,059,568,659	113,264,385	58,946,304,274	97.96	1,227,646,726
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6,718,881,000	7,718,881,000	7,431,863,895	1,980,000	7,429,883,895	96.26	288,997,105
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3,405,860,446,000	3,304,923,693,000	3,169,569,234,079	870,020,340	3,168,699,213,739	95.88	136,224,479,261
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	14,113,485,000	13,962,927,000	12,666,866,149	74,483,426	12,592,382,723	90.18	1,370,544,277
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	5,964,602,000	5,964,602,000	5,827,704,927	36,275,567	5,791,429,360	97.1	173,172,640
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	19,881,438,000	23,681,438,000	22,630,024,025	0	22,630,024,025	95.56	1,051,413,975
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	211,005,625,000	220,108,186,000	219,911,872,772	0	219,911,872,772	99.91	196,313,228

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,066,030,000,000	1,066,030,000,000	1,056,624,567,878	459,225,039	1,056,165,342,839	38072.39	9,864,657,161
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	37,082,454,000	108,676,631,000	104,922,089,094	354,062	104,921,735,032	96.54	3,754,895,968
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,790,370,000	14,085,330,000	13,862,282,366	5,462,742	13,856,819,624	98.38	228,510,376
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	75,490,875,000	89,028,527,000	86,371,131,068	373,758	86,370,757,310	97.01	2,657,769,690
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	33,661,658,000	38,037,523,000	34,904,986,074	0	34,904,986,074	91.76	3,132,536,926
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	25,021,914,000	25,568,129,000	25,383,441,970	5,901,000	25,377,540,970	99.25	190,588,030
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	62,991,248,000	62,445,033,000	57,855,040,935	4,044,765	57,850,996,170	92.64	4,594,036,830
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	196,722,290,000	206,171,530,000	205,461,941,003	98,396,611	205,363,544,392	99.61	807,985,608
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	45,692,770,000	45,565,418,000	44,073,801,549	20,661,368	44,053,140,181	96.68	1,512,277,819
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	38,796,477,000	38,796,477,000	37,536,881,445	675,862,182	36,861,019,263	95.01	1,935,457,737
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	19,253,293,000	18,634,353,000	18,270,649,881	2,311,678	18,268,338,203	98.04	366,014,797
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,414,036,000	5,521,388,000	5,504,933,935	171,407,256	5,333,526,679	96.6	187,861,321
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	2,734,620,000	2,754,620,000	2,766,553,876	13,552,732	2,753,001,144	99.94	1,618,856
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	3,012,969,000	3,012,969,000	3,018,700,054	5,740,000	3,012,960,054	100	8,946
6983	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	2,624,557,000	2,624,557,000	2,513,750,800	3,461,500	2,510,289,300	95.65	114,267,700
6984	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	903,796,000	1,135,166,000	1,134,235,177	325,000	1,133,910,177	99.89	1,255,823
6985	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	1,202,899,000	1,590,469,000	1,590,110,149	1,304,281	1,588,805,868	99.9	1,663,132
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6,369,330,631,000	6,341,267,527,000	6,224,799,058,647	2,175,664,398	6,222,623,394,249	90302.4	118,644,132,751
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**11,707,479,325,000**	**11,707,479,325,000**	**11,423,691,290,407**	**4,740,072,090**	**11,418,951,218,317**	**97.576**	**288,528,106,683**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**11,888,407,746,000**	**11,888,407,746,000**	**11,600,685,379,815**	**4,965,265,419**	**11,595,720,114,396**	**97.58**	**292,687,631,604**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/25 3:54 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
04	**PNBP**							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	0	4,332,550,000	3,432,171,981	5,223,200	3,426,948,781	2686.35	905,601,219
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	**0**	**4,332,550,000**	**3,432,171,981**	**5,223,200**	**3,426,948,781**	**79.218**	**905,601,219**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	30,495,000	62,192,000	23,088,000	0	23,088,000	37.12	39,104,000
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	3,863,305,000	7,816,746,000	7,813,144,122	0	7,813,144,122	99.95	3,601,878
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	11,291,754,000	18,304,000,000	13,780,676,413	0	13,780,676,413	75.29	4,523,323,587
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	174,812,000	328,740,000	288,800,000	0	288,800,000	87.85	39,940,000
6985	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	0	28,000,000	27,989,000	0	27,989,000	99.96	11,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**15,360,366,000**	**26,539,678,000**	**21,933,697,535**	**0**	**21,933,697,535**	**82.645**	**4,605,980,465**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**15,360,366,000**	**30,872,228,000**	**25,365,869,516**	**5,223,200**	**25,360,646,316**	**82.164**	**5,511,581,684**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
WA	Program Dukungan Manajemen							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	5,330,904,000	5,264,410,515	0	5,264,410,515	696.83	66,493,485
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	0	881,620,000	880,000,000	0	880,000,000	200	1,620,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**6,212,524,000**	**6,144,410,515**	**0**	**6,144,410,515**	**98.904**	**68,113,485**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**6,212,524,000**	**6,144,410,515**	**0**	**6,144,410,515**	**98.904**	**68,113,485**
	JUMLAH	**11,903,768,112,000**	**11,925,492,498,000**	**11,632,195,659,846**	**4,970,488,619**	**11,627,225,171,227**	**97.54**	**298,267,326,773**

NERACA (FACE)

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak 07/05/25 3:46 PM
Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,160,000	34,246,000	(32,086,000)	(93.69)
Kas di Bendahara Penerimaan	389,500	38,270,000	(37,880,500)	(98.98)
Kas Lainnya dan Setara Kas	50,102,091	32,772,439	17,329,652	52.88
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	19,977,655,953	19,977,046,358	609,595	0.00
Piutang Bukan Pajak	8,474,768,753	1,329,159,585	7,145,609,168	537.60
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(132,427,315)	(772,109,093)	639,681,778	(82.85)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	8,342,341,438	557,050,492	7,785,290,946	1,397.59
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	14,989,992	0	14,989,992	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(74,950)	0	(74,950)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	14,915,042	0	14,915,042	0.00
Persediaan	24,417,056,655	23,934,594,158	482,462,497	2.02
JUMLAH ASET LANCAR	**52,804,620,679**	**44,573,979,447**	**8,230,641,232**	**18.47**
ASET TETAP				
Tanah	20,014,331,807,703	20,042,057,573,980	(27,725,766,277)	(0.14)
Peralatan dan Mesin	5,005,464,644,692	4,820,922,714,383	184,541,930,309	3.83
Gedung dan Bangunan	13,252,752,386,154	11,821,324,680,170	1,431,427,705,984	12.11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	58,350,280,852	58,399,600,852	(49,320,000)	(0.08)
Aset Tetap Lainnya	51,619,330,318	75,032,921,320	(23,413,591,002)	(31.20)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	475,263,059,024	915,655,052,073	(440,391,993,049)	(48.10)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,790,148,086,757)	(6,049,996,804,082)	(740,151,282,675)	12.23
JUMLAH ASET TETAP	**32,067,633,421,986**	**31,683,395,738,696**	**384,237,683,290**	**1.21**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	3,747,514	48,752,226	(45,004,712)	(92.31)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(18,738)	(48,752,226)	48,733,488	(99.96)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	3,728,776	0	3,728,776	0.00
Piutang Jangka Panjang lainnya	578,845,030	0	578,845,030	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(578,845,030)	0	(578,845,030)	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**3,728,776**	**0**	**3,728,776**	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	98,803,896,742	110,013,999,715	(11,210,102,973)	(10.19)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	62,522,083,798	164,453,156,381	(101,931,072,583)	(61.98)
Aset Lain-lain	161,372,376,431	161,921,949,010	(549,572,579)	(0.34)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(198,598,071,481)	(203,180,450,222)	4,582,378,741	(2.26)
JUMLAH ASET LAINNYA	**124,100,285,490**	**233,208,654,884**	**(109,108,369,394)**	**(46.79)**
JUMLAH ASET	**32,244,542,056,931**	**31,961,178,373,027**	**283,363,683,904**	**0.89**

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak 07/05/25 3:46 PM
Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	107,847,732,002	192,354,389,141	(84,506,657,139)	(43.93)
Pendapatan Diterima Dimuka	2,876,111,776	2,783,044,758	93,067,018	3.34
Uang Muka dari KPPN	2,160,000	34,246,000	(32,086,000)	(93.69)
Utang Jangka Pendek Lainnya	50,102,091	32,772,439	17,329,652	52.88
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**110,776,105,869**	**195,204,452,338**	**(84,428,346,469)**	**(43.25)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**110,776,105,869**	**195,204,452,338**	**(84,428,346,469)**	**(43.25)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	32,133,765,951,062	31,765,973,920,689	367,792,030,373	1.16
JUMLAH EKUITAS	**32,133,765,951,062**	**31,765,973,920,689**	**367,792,030,373**	**1.16**
JUMLAH EKUITAS	**32,133,765,951,062**	**31,765,973,920,689**	**367,792,030,373**	**1.16**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**32,244,542,056,931**	**31,961,178,373,027**	**283,363,683,904**	**0.89**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN SALDO AWAL, KAS, DAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Tgl. Cetak 07/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	34,246,000	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	38,270,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	32,772,439	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	19,977,046,358	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	829,991,390	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	499,168,195	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	769,723,341
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	2,385,752
0.0	117111	Barang Konsumsi	22,993,736,223	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	940,857,935	0
0.0	131111	Tanah	20,042,057,573,980	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,820,922,714,383	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,821,324,680,170	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	19,628,745,150	0
0.0	134112	Irigasi	8,176,807,738	0
0.0	134113	Jaringan	30,594,047,964	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	24,589,903,788	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	50,443,017,532	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	915,655,052,073	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,750,197,294,537
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,277,932,308,669
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,868,145,387
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,711,176,005
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	12,696,162,729
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	591,716,755
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	48,752,226	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	48,752,226
0.0	162151	Software	71,232,278,701	0
0.0	162161	Lisensi	32,316,840,061	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,660,012,353	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	164,453,156,381	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	160,277,048,880	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,644,900,130	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	150,454,857,442
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	44,029,441,166
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	7,060,151,484
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,636,000,130

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Tgl. Cetak 07/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	8,279,952,147
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	41,122,000,348
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	142,952,436,646
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,783,044,758
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	34,246,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	32,772,439
0.0	391111	Ekuitas	0	31,765,973,920,689
JUMLAH			**38,215,176,488,650**	**38,215,176,488,650**

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,627,225,171,227
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	105,803,944,468	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	395,428,800
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,981,342,755
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,576,800
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	7,448,172	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,753,106,252
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	228,465,805
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	100,380,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	2,916,160,000
3.1	425232	Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah	420,000	0
3.1	425233	Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara	980,000	0
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	23,786,760,000
3.1	425239	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3,674,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	48,345,734,113
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	243,816,177
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	376,798
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	46,742,494
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	36,252,226
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5,328,918,759
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	655,118,420
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	960,793,485
3.1	425913	Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun	1,991,018	0
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	7,772,360,191
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	245,582,450
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	19,967,133
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	425,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	154,699,447
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,727,024,674,746	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,065,645
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,144,826	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122,558,038,767	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	35,412,586
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,175,663,449	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	3,029,333
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	37,379,820,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	71,512,412
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,099,977,739,344	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,192,929,816
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	7,406,484
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	338,420,859,030	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	83,337,977,920	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	3,991,150
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	246,631,712,720	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	38,567,750
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	63,750,000	0
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat	0	125,000
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	8,350,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	4,981,215,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,210,688,840	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	96,174,593
3.1	511157	Pengembalian Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	95,150,000
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	56,474,668,509	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	131,876,676,400	0
3.1	511158	Pengembalian Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	16,155,000
3.0	511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	116,340,260	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	46,347,751,338	0
3.1	511224	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	37,306,200
3.0	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	4,191,452,740	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2,889,810,000	0
3.1	511311	Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	0	1,288,800
3.0	511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	38,980	0
3.1	511319	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	0	34
3.1	511321	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	0	128,880
3.0	511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	275,121,000	0
3.0	511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	17,220,000	0
3.0	511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	50,414,813,000	0
3.1	511323	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	0	77,129,300
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	12,646,243,692	0
3.0	511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	110,802,600	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,515,000,000	0
3.0	511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	300,775,200	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	11,076,965,404	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	2,858,800
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	212,719	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,221

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	594,278,960	0
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	285,880
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	155,083,794	0
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	114,352
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	350,000
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,635,342,000	0
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	289,680
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	579,252,610	0
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	527,100
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,946,677,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,100,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	682,027,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	18,461,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,503,414,830,324	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	596,629,928
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24,176,540,880	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	50,096,398
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	742,909,689,902	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	8,772,560
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,786,193,756	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,522,792,692	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	44,011,760
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	303,772,809,908	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	145,316,300
3.0	521211	Belanja Bahan	74,284,154,997	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	1,325,000
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	28,819
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	640,754,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,143,276,006	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	512,899,540	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	35,280,000	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	5,518,642
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	96,672,639,841	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	34,028,751
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	182,787,452,598	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	2,246,764
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,534,119,769	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,895,615,299	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	1,800,000
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,711,596,296	0
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	432,351
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	38,440,882,135	0
3.0	522141	Belanja Sewa	300,796,211,689	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	171,183,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	4,550,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	27,586,267,348	0
3.0	522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	4,419,164,000	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	40,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	60,757,116,996	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283,173,758,934	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	18,671,302
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45,662,157,627	0
3.1	523119	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	760,236
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	7,640,182
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	202,575,622,869	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	989,220,477
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	310,869,607,280	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,859,887,763	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	136,975,348
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28,871,683,011	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	15,822,608
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	416,840,739
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49,899,058,699	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	10,865,949,547	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	14,501,952
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	95,955,891	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1,131,840,348	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122,356,098,317	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	111,442,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	734,216,061,397	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	451,606,840
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	246,555,145,889	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	7,618,199
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	362,903,450	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	132,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

JUMLAH	**11,738,014,542,504**	**11,738,014,542,504**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,160,000	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	389,500	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	50,102,091	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	19,977,655,953	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	283,563,740	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	8,191,205,013	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	14,989,992	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	91,471,290
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	40,956,025
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan	0	74,950
0.0	117111	Barang Konsumsi	23,329,265,799	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,087,790,856	0
0.0	131111	Tanah	20,014,331,807,703	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,005,464,644,692	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,252,752,386,154	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	19,628,745,150	0
0.0	134112	Irigasi	8,176,807,738	0
0.0	134113	Jaringan	30,544,727,964	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	1,078,042,792	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	50,541,287,526	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	475,263,059,024	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,101,320,297,181
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,664,076,141,301
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	8,754,012,593
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,026,055,215
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	13,384,438,896
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	587,141,571
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	3,747,514	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	578,845,030	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	18,738
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	0	578,845,030
0.0	162151	Software	59,883,255,953	0
0.0	162161	Lisensi	32,453,641,795	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,662,130,394	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	62,522,083,798	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	147,335,759,876	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	14,036,616,555	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	135,700,921,184
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	40,357,935,770
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	9,261,664,414
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	13,277,550,113
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	7,337,655,368
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	46,248,669,217
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	54,261,407,417
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,876,111,776
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,160,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	50,102,091
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,621,080,760,712
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	105,803,944,468	0
0.0	313211	Transfer Keluar	173,712,397,104	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	212,157,709,523
0.0	391111	Ekuitas	0	31,765,973,920,689
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	380,261	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	83,227,937,027	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	125,544,500
0.0	391119	Koreksi Lainnya	162,364,558	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	122,176,025,953
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	68,113,485	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	60,546,353,945
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset	0	566,537,699
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	395,428,800
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,981,342,755
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,576,800
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,632,971,968
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	228,465,805
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	100,380,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	2,915,630,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	23,714,590,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	48,224,820,613
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	243,816,177
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	376,798
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	52,980,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5,514,257,262
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	750,479,828
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	876,384,290

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	6,937,693,799
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	245,582,450
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	19,542,133
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	640,800
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,726,823,182,703	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22,236,507	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122,520,723,936	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	34,171,960,054	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	37,308,841,038	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,098,722,173,920	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	338,396,914,459	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	83,333,360,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	246,610,608,620	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	63,625,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4,972,465,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,113,959,163	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	56,387,918,509	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	131,860,521,400	0
3.0	511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	116,340,260	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	46,310,525,138	0
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	4,191,452,740	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	2,888,521,200	0
3.0	511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	38,946	0
3.0	511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	274,992,120	0
3.0	511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	17,220,000	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	50,337,683,700	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	12,647,337,707	0
3.0	511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	110,802,600	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,515,000,000	0
3.0	511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	300,775,200	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	10,943,487,804	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	208,777	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	586,800,340	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	153,069,026	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,611,853,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	571,546,780	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,931,880,500	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,100,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	682,027,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	18,461,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,502,116,991,943	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24,176,540,880	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	742,487,995,001	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,870,922,124	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43,478,780,932	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	304,943,543,360	0
3.0	521211	Beban Bahan	74,288,550,097	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	640,725,181	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,143,276,006	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,232,040,124	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	55,928,000	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	3,750,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	183,052,488,521	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,500,128,816	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,846,275,344	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,726,109,672	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	63,123,095,413	0
3.0	522141	Beban Sewa	300,633,803,865	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	27,581,717,348	0
3.0	522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	4,419,164,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	72,604,476,226	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282,097,123,193	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45,653,580,051	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	202,414,693,862	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	313,601,339,801	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,692,730,415	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28,855,860,403	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49,482,217,960	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	10,851,447,595	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	95,955,891	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	413,701,593,068	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	384,955,796,779	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,885,867,206	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	314,879,210	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	718,846,167	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	35,182,033	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:46 PM
Halaman : 5
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	8,415,028,827	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	3,292,557,741	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	68,041,696	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	924,705,507	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	87,108,661,808	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,323,795,051	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8,483,948	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	147,336,690
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	38,460,182	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	0	12,406,312
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	0	36,252,226
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	576,408,751	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	98,123,920	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	13,189,918,823	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	67,503,214	0
JUMLAH			**50,987,893,438,667**	**50,987,893,438,667**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (005) MAHKAMAH AGUNG**

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:45 PM
Halaman : 1
lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	90,366,384,951	89,442,053,517	924,331,434	1.033
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	90,366,384,951	89,442,053,517	924,331,434	1.033
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	90,366,384,951	89,442,053,517	924,331,434	1.033
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,564,817,147,430	7,068,326,395,723	496,490,751,707	7.024
Beban Persediaan	87,108,661,808	87,067,531,291	41,130,517	0.047
Beban Barang dan Jasa	1,849,209,178,781	1,590,790,224,987	258,418,953,794	16.245
Beban Pemeliharaan	539,587,316,077	507,163,996,809	32,423,319,268	6.393
Beban Perjalanan Dinas	522,579,552,065	507,788,976,819	14,790,575,246	2.913
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (005) MAHKAMAH AGUNG**

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	814,312,498,234	791,991,563,924	22,320,934,310	2.818
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(157,535,046)	765,834,851	(923,369,897)	(120.57)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	11,377,456,819,349	10,553,894,524,404	823,562,294,945	7.803
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(11,287,090,434,398)	(10,464,452,470,887)	(822,637,963,511)	7.861
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(7,811,570,468)	(23,534,834,682)	15,723,264,214	(66.808)
Pendapatan Pelepasan Aset	5,378,348,355	2,895,311,185	2,483,037,170	85.761
Beban Pelepasan Aset	13,189,918,823	26,430,145,867	(13,240,227,044)	(50.095)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,016,239,810	6,336,470,782	2,679,769,028	42.291
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,092,226,972	6,377,788,526	2,714,438,446	42.561
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	75,987,162	41,317,744	34,669,418	83.909
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,204,669,342	(17,198,363,900)	18,403,033,242	(107.005)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11,285,885,765,056)	(10,481,650,834,787)	(804,234,930,269)	7.673
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(11,285,885,765,056)	(10,481,650,834,787)	(804,234,930,269)	7.673

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 3:45 PM
Halaman : 1
lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	31,765,973,920,689	30,525,686,275,992	1,240,287,644,697	4.06
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11,285,885,765,056)	(10,481,650,834,787)	(804,234,930,269)	7.67
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(82,698,599,647)	66,338,556,929	(149,037,156,576)	(224.66)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(380,261)	24,224,826	(24,605,087)	(101.57)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	566,537,699	6,516,819,989	(5,950,282,290)	(91.31)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(83,102,392,527)	59,272,347,817	(142,374,740,344)	(240.2)
LAIN-LAIN	(162,364,558)	525,164,297	(687,528,855)	(130.92)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,736,376,395,076	11,655,599,922,555	80,776,472,521	0.69
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	367,792,030,373	1,240,287,644,697	(872,495,614,324)	(70.35)
EKUITAS AKHIR	32,133,765,951,062	31,765,973,920,689	367,792,030,373	1.16

Keterangan :

FINAL

CALBMN, LAP. POSISI BMN DI NERACA (SAWAL & BERJALAN), LB PERSEDIAAN, LBP INTRA-EKSTRA-GABUNGAN, LBP ATB, LBKP BERSEJARAH, DAFTAR BARANG HILANG-RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA, DAFTAR BPYBDS, LAP. PENYUSUTAN BKP INTRA-EKSTRA-ATB, LAP. CRBMN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

MAHKAMAH AGUNG RI

PERIODE 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

A. Saldo Awal

Nilai Saldo awal BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp37.014.589.520.788 (*Tiga puluh tujuh triliun empat belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp38.529.854.209.595 (*Tiga puluh delapan triliun lima ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp37.697.451.869 (*Tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*).

A. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Saldo Awal TAYL		Rp 23.934.594.158,00
Mutasi Tambah :		
M02	Pembelian	Rp 96.821.051.997,00
M13	Transfer Masuk Online	Rp 9.584.659.737,00
M98	Koreksi Nilai Tambah	Rp 1.473.847.433,00
M10	Reklasifikasi Masuk	Rp 1.385.879.360,00
M11	Reklasifikasi Dari Aset	Rp 435.745.000,00
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	Rp 71.697.860,00
M04	Hibah (Masuk)	Rp 27.500.000,00
M93	Batal Catat Usang Rusak	Rp 16.499.367,00
M06	Perolehan Lainnya	Rp 5.974.910,00
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	Rp 4.237.225,00
M01	Saldo Awal	Rp 1.903.400,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 109.828.996.289,00
Mutasi Kurang :		
K05	Rusak	(Rp 1.928.500,00)
K06	Keluar Lainnya	(Rp 2.036.000,00)
K98	Koreksi Nilai Kurang	(Rp 8.850.475,00)
K04	Usang	(Rp 82.074.081,00)
K11	Reklasifikasi ke Aset	(Rp 436.145.000,00)
P01	Hasil Opname Fisik	(Rp 595.462.231,00)
K10	Reklasifikasi Keluar	(Rp 1.385.879.360,00)
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	(Rp 1.484.779.106,00)
K13	Transfer Keluar Online	(Rp 9.656.357.597,00)
K01	Habis Pakai	(Rp 95.693.021.442,00)
Mutasi Berkurang		(Rp 109.346.533.792,00)
Saldo 31 Desember 2024 Audited		Rp 24.417.056.655,00

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp24.417.056.655 (*dua puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp23.934.594.158 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp109.828.996.289 (*seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp109.346.533.792 (*seratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*)

Mutasi Barang Persediaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Penyajian persediaan per 31 Desember 2024 sudah melalui proses pelaksanaan pemeriksaan fisik (stock opname) dan dalam kondisi baik, rusak, dan usang.

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) seluas 8.060.651 m2 dengan nilai sebesar Rp20.014.331.807.703 (*Dua puluh triliun empat belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 8.050.474 m2 dengan nilai sebesar Rp20.042.057.573.980 (*Dua puluh triliun empat puluh dua milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp150.650.219.638 (*Seratus lima puluh milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp178375985915 (*Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 20.042.057.573.980,00	Rp 0,00
Mutasi Bertambah			
100	Saldo Awal	Rp 12.744.947.019,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 49.815.000,00	Rp 0,00
102	Transfer Masuk	Rp 36.048.421.084,00	Rp 0,00
103	Hibah Masuk	Rp 30.515.020.091,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 33.457.418.000,00	Rp 0,00
112	Perolehan Lainnya	Rp 1.413.329.734,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 35.280.428.362,00	Rp 0,00
208	Pengembangan Melalui KDP	Rp 1.140.840.348,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 150.650.219.638,00	Rp 0,00
Mutasi Berkurang			
214	Koreksi Susulan	(Rp 793.331.324,00)	Rp 0,00
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 1.303.656.367,00)	Rp 0,00
302	Transfer Keluar	(Rp 32.072.703.814,00)	Rp 0,00
303	Hibah Keluar	(Rp 4.765.411.000,00)	Rp 0,00
304	Reklasifikasi Keluar	(Rp 33.457.418.000,00)	Rp 0,00
305	Koreksi Pencatatan	(Rp 105.983.465.410,00)	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 178.375.985.915,00)	Rp 0,00
Saldo Audited		Rp 20.014.331.807.703,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		Rp 0,00	Rp 0,00
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan)		Rp 20.014.331.807.703,00	Rp 0,00

Tabel 2. Rincian Mutasi Tanah

Penjelasan terhadap rincian transaksi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal tanah merupakan hasil dari proses pemisahan nilai tanah yang sebelumnya tergabung dalam pencatatan gedung dan bangunan, atau pemisahan nilai tanah dari pencatatan sebelumnya di mana nilai gedung dan bangunan masih tergabung dalam tanah pada Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Agama Tarempa;
2. Terdapat transaksi pembelian Tanah pada PA Tahuna yang merupakan kesalahan pencatatan, sudah dilakukan koreksi menjadi penambahan nilai KDP.
3. Transfer Masuk Tanah merupakan transfer yang diterima oleh Pengadilan Agama Dumai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga merupakan Transfer tanah antar satuan kerja di Mahkamah Agung RI karena berpindahnya penguasaan Tanah pada 9 (Sembilan) satuan kerja;
4. Terdapat Hibah masuk pada 28 satuan kerja, tanah ini merupakan hibah dari Pemerintah Daerah setempat.
5. Terdapat Reklasifikasi masuk pada 15 satuan kerja, transaksi ini dilakukan sebagai pasangan reklasifikasi keluar dalam rangka penyesuaian kodefikasi tanah sesuai dengan fungsinya.
6. Terdapat transaksi perolehan lainnya pada 2 satuan kerja yaitu PA Bengkalis dan PA Parigi, merupakan pemecahan atas tanah yang sudah ada.
7. Terdapat transaksi koreksi pencatatan yang menyebabkan nilai tanah bertambah, dikarenakan sebelumnya nilai tanah tergabung dalam pencatatan gedung dan bangunan, atau adanya penyesuaian atas pencatatan sebelumnya di mana nilai gedung dan bangunan masih tergabung dalam tanah pada Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Pengadilan Agama Tarempa. Selain itu, terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis transaksi yang seharusnya dicatat sebagai transaksi

koreksi kuantitas pada Pengadilan Negeri Demak;

8. Pengembangan Melalui KDP pada satuan kerja Pengadilan Agama Martapura dikarenakan Tanah Dalam Pengerjaan yang merupakan pembayaran sertifikat tanah bangunan gedung dan Pengadilan Negeri Sumenep terkait pekerjaan pematangan tanah;
9. Terdapat Koreksi Susulan pada PA Parigi sebagai pengurangan nilai Tanah yang dilakukan pemecahan;
10. Hibah Keluar Tanah yang sebagian besar kepada pemerintah daerah pada Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Agama Mungkid, Pengadilan Negeri Manokwari dan Pengadilan Agama Martapura;
11. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada 8 satuan kerja, sebagai penyesuaian terhadap luasan dan nilai yang seharusnya;
12. Transfer keluar pada 9 satuan kerja merupakan transfer antar satuan kerja karena berpindahnya kepenguasaan tanah;
13. Reklasifikasi Keluar pada 14 satuan kerja sebagai perbaikan atas kode barang yang selanjutnya melakukan Reklasifikasi Masuk;
14. Terdapat Koreksi Pencatatan pada 16 satuan kerja dimana menghilangkan asset dari neraca, merupakan koreksi perbaikan atau pemecahan dari 1 tanah menjadi 2 tanah.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.131.840.348,00 dengan rincian menjadi aset sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp1.131.840.348,00	Realisasi Belanja Modal Tanah berupa aset KDP direalisasikan untuk Pengurukan dan Pematangan Tanah PN Sumenep.

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal Tanah Mahkamah Agung Tahun 2024 (*Audited*)

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 721.533 buah dengan nilai sebesar Rp5.039.576.672.797 (*Lima triliun tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 720.381 buah dengan nilai sebesar Rp4.853.232.449.333 (*Empat triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 29.323 buah dengan nilai sebesar Rp397.767.781.025 (*Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 28.171 buah dengan nilai Rp211.423.557.561 (*Dua ratus sebelas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu*

dua ratus sebelas rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 4.820.922.714.383,00	Rp 32.309.734.950,00
Mutasi Bertambah			
100	Saldo Awal	Rp 116.974.265.233,00	Rp 197.049.765,00
101	Pembelian	Rp 113.435.610.872,00	Rp 755.241.291,00
112	Perolehan Lainnya	Rp 52.332.297.203,00	Rp 627.723.102,00
103	Hibah Masuk	Rp 50.296.432.728,00	Rp 589.726.251,00
102	Transfer Masuk	Rp 31.425.676.581,00	Rp 234.222.738,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 11.238.241.006,00	Rp 42.586.066,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 7.677.101.716,00	Rp 0,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp 5.867.983.652,00	Rp 26.226.186,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 2.373.301.400,00	Rp 0,00
106	Pembatalan Penghapusan	Rp 1.300.993.018,00	Rp 17.319.500,00
193	Batal Transfer Keluar	Rp 754.857.035,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 633.032.532,00	Rp 1.000,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 513.137.500,00	Rp 0,00
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp 435.660.000,00	Rp 85.000,00
208	Pengembangan Melalui KDP	Rp 8.880.000,00	Rp 0,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 7.342.650,00	Rp 0,00
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	Rp 0,00	Rp 2.787.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 395.274.813.126,00	Rp 2.492.967.899,00
Mutasi Berkurang			
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 0,00	(Rp 7.342.650,00)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(Rp 2.787.000,00)	Rp 0,00
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp 435.660.000,00)	(Rp 85.000,00)
209	Koreksi Manual	(Rp 2.600.712.000,00)	Rp 0,00
305	Koreksi Pencatatan	(Rp 6.125.364.284,00)	(Rp 52.096.268,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(Rp 12.744.731.039,00)	(Rp 42.586.066,00)
302	Transfer Keluar	(Rp 30.512.256.594,00)	(Rp 10.743.860,00)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 78.863.772.995,00)	(Rp 2.072.000,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp 79.447.598.905,00)	(Rp 583.176.550,00)
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 210.732.882.817,00)	(Rp 690.674.744,00)
Saldo Audited		Rp 5.005.464.644.692,00	Rp 34.112.028.105,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 4.101.320.297.181,00)	(Rp 22.908.697.208,00)
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan)		Rp 904.144.347.511,00	Rp 11.203.330.897,00

Tabel 4. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Penjelasan terhadap rincian transaksi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal Peralatan Mesin merupakan hasil dari proses pemisahan nilai Peralatan Mesin yang sebelumnya tergabung dalam pencatatan gedung dan bangunan pada 26 satuan kerja;

2. Pembelian Peralatan Mesin pada 314 satuan kerja, merupakan pengadaan peralatan mesin yang sumber pembiayaannya dari APBN;

3. Terdapat transaksi perolehan lainnnya pada 53 satuan kerja, transaksi ini merupakan tindak lanjut dari transaksi koreksi Nilai Berkurang atau koreksi pencatatan. Langkah ini bertujuan untuk memisahkan nilai Peralatan Mesin dari Gedung dan Bangunan, yang sebelumnya tercatat sebagai satu kesatuan nilai.

4. Transfer Masuk pada 674 satuan kerja merupakan transfer antar satuan kerja, adapun yang dari luar MA adalah Peralatan Mesin yang berasal dari Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta kepada satuan kerja Badan Urusan Administrasi;

5. Terdapat transaksi Hibah Masuk pada 230 satuan kerja yang berasal dari Pemerintah Daerah, Bank, dan Perorangan;

6. Pengembangan nilai aset langsung pada 6 satuan kerja merupakan penambahan nilai terhadap peralatan mesin yang sudah ada sebelumnya,

7. Penyelesaian Pembangan Dengan KDP terdapat pada Pengadilan Negeri Meureude, Pengadilan Negeri Tapak Tuan, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

8. Pembatalan Penghapusan Peralatan Mesin dilakukan karena tidak terdapat dokumen dasar untuk melakukan penghapusan pada 30 Satuan Kerja;

9. Reklasifikasi Masuk Peralatan Mesin pada 83 satuan kerja sebagai pasangan transaksi Reklasifikasi keluar dengan tujuan menyesuaikan kode barang sebenarnya.

10. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) pada 6 satuan kerja, merupakan penambahan nilai peralatan mesin denga biaya dari apbn.

11. Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan pada 48 satuan kerja merupakan transaksi mengembalikan fungsi aset yang sebelumnya dihentikan penggunaan.

12. Penyelesaian Pembangunan Langsung Peralatan Mesin Pada 4 satuan kerja, merupakan penyelesaian suatu aset PM yang diperoleh secara bertahap.

13. Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra (Jenis Transaksi Intrakomptabel) pada Badan Urusan Administrasi memiliki nilai +- dengan transaksi Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra (Jenis Transaksi Ekstrakomptabel) pada satuan kerja Badan Urusan Administrasi;

14. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Peralatan dan Mesin terdapat pada 6 Satuan Kerja;

15. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah merupakan tindaklanjut atas transaksi koreksi nilai berkurang atau koreksi pencatatan Peralatan Mesin pada 11 satuan kerja;

16. Pengembangan Melalui KDP Peralatan Mesin pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menambah nilai dari BMN berupa Server;

17. Koreksi manual atas Peralatan Mesin di Pengadilan Negeri Sumenep dilakukan terhadap aset Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci). Hal ini disebabkan oleh nilai perolehan tiga unit mesin ketik yang tidak wajar, yaitu sekitar Rp868 juta per unit. Sebagai tindak lanjut, satuan kerja melakukan penilaian kembali melalui KPKNL, sehingga nilai perolehan aset yang ditetapkan menjadi Rp1.250.000 per unit;

18. Koreksi nilai berkurang terjadi pada enam Satuan Kerja. Di BUA, koreksi dilakukan akibat kesalahan pencatatan SPM yang telah dirinci. Selain itu, koreksi juga dilakukan atas kelebihan perolehan mebel Graha serta kelebihan pembayaran fasilitas PTSP. Pada Pengadilan Agama Cianjur, terjadi kesalahan pencatatan di mana seharusnya tidak dilakukan koreksi nilai bertambah pada AC Split. Namun, karena koreksi nilai bertambah sudah terlanjur dilakukan, satuan kerja kemudian menginput koreksi nilai berkurang untuk mengembalikan nilai aset ke kondisi semula. Pada Pengadilan Agama Cibinong, terjadi kesalahan pencatatan harga perolehan barang, sehingga dilakukan koreksi nilai berkurang untuk menyesuaikan pencatatan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Di Pengadilan Tanjung Pinang, Rumah Genset senilai Rp 45.000.000 sebelumnya tercatat menyatu dengan nilai Genset. Pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dilakukan koreksi atas pengembalian belanja modal sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pengawasan (Bawas). Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Koreksi ini merupakan tindak lanjut atas temuan tim BPK pada awal tahun 2024 dalam pemeriksaan Tahun Anggaran 2023;

19. Reklasifikasi Keluar karena kesalahan pencatatan kodefikasi yang sebelumnya dalam kategori Peralatan Mesin direklasifikasi Masuk kedalam kategori aset Gedung Bangunan pada 83 satuan kerja;

20. Koreksi pencatatan Peralatan Mesin dilakukan akibat kesalahan pencatatan, di mana aset tersebut seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai pada Peralatan Mesin lainnya atau sebagai koreksi nilai bertambah pada Gedung dan Bangunan pada 28 Satuan Kerja;

21. Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra pada Pengadilan Militer Banda Aceh (Jenis Transaksi Intrakomptabel) memiliki transaksi +- dengan Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra (jenis transaksi Ekstrakomptabel);

22. Penghentian Aset Dari Penggunaan karena aset tersebut dinilai sudah tidak dapat digunakan lagi oleh satuan kerja. Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada 271 Satuan Kerja.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo alat besar (3.01) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024

(*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

301	ALAT BESAR	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.527**	**205.721.660.403**	**1.373**	**205.671.789.760**	**154**	**49.870.643**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.471**	**184.879.809.082**	**1.323**	**184.831.287.539**	**148**	**48.521.543**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	9	3.044.435.224	9	3.044.435.224	0	0
101	Pembelian	45	7.517.150.308	28	7.510.034.908	17	7.115.400
103	Hibah Masuk	1	1.499.744.000	1	1.499.744.000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	502.823.400	1	502.823.400	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	14	6.130.343.390	14	6.130.343.390	0	0
112	Perolehan Lainnya	42	5.307.365.961	40	5.305.869.961	2	1.496.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	513.137.500	2	513.137.500	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1	435.660.000	1	435.660.000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	42.517.500	0	42.517.500	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**115**	**24.993.177.283**	**96**	**24.984.565.883**	**19**	**8.611.400**
Mutasi Kurang							
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(45.171.692)	0	(45.171.692)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(23)	(2.509.165.770)	(14)	(2.505.463.470)	(9)	(3.702.300)
305	Koreksi Pencatatan	(3)	(478.177.500)	(3)	(478.177.500)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(33)	(1.118.811.000)	(29)	(1.115.251.000)	(4)	(3.560.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(59)**	**(4.151.325.962)**	**(46)**	**(4.144.063.662)**	**(13)**	**(7.262.300)**

Tabel 5. Rincian Mutasi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

302	ALAT ANGKUTAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**8.138**	**630.772.862.148**	**8.076**	**630.114.739.868**	**62**	**658.122.280**
Saldo per 1 Januari 2024		**8.415**	**614.425.536.217**	**8.312**	**613.764.928.737**	**103**	**660.607.480**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	12	37.296.000	12	37.296.000	0	0
101	Pembelian	70	11.698.848.999	70	11.698.848.999	0	0
102	Transfer Masuk	7	1.929.242.636	7	1.929.242.636	0	0
103	Hibah Masuk	32	17.042.682.790	32	17.042.682.790	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	74.232.000	1	74.232.000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	17	585.263.545	17	585.263.545	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	4	744.232.445	4	744.232.445	0	0
112	Perolehan Lainnya	3	458.232.000	3	458.232.000	0	0
193	Batal Transfer Keluar	1	339.000.000	1	339.000.000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	52.412.001	0	52.412.001	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	162.829.999	0	162.829.999	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	28	663.476.903	26	653.476.903	2	10.000.000
Jumlah Mutasi Tambah		**175**	**33.787.749.318**	**173**	**33.777.749.318**	**2**	**10.000.000**
Mutasi Kurang							
302	Transfer Keluar	(8)	(2.268.242.636)	(8)	(2.268.242.636)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(45)	(827.142.395)	(30)	(814.859.895)	(15)	(12.282.500)
305	Koreksi Pencatatan	(36)	(616.734.699)	(9)	(616.731.999)	(27)	(2.700)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(363)	(13.728.303.657)	(362)	(13.728.103.657)	(1)	(200.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(452)**	**(17.440.423.387)**	**(409)**	**(17.427.938.187)**	**(43)**	**(12.485.200)**

Tabel 6. Rincian Mutasi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**754**	**16.862.207.976**	**568**	**16.803.924.757**	**186**	**58.283.219**
Saldo per 1 Januari 2024		**789**	**16.741.404.072**	**605**	**16.684.324.593**	**184**	**57.079.479**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	15	74.418.450	15	74.418.450	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	1	240.000	0	0	1	240.000
107	Reklasifikasi Masuk	1	527.340	0	0	1	527.340
112	Perolehan Lainnya	10	231.599.614	5	230.413.214	5	1.186.400
Jumlah Mutasi Tambah		**27**	**306.785.404**	**20**	**304.831.664**	**7**	**1.953.740**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(4.340.000)	(3)	(4.340.000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(18.830.000)	(1)	(18.830.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(58)	(162.811.500)	(53)	(162.061.500)	(5)	(750.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(62)**	**(185.981.500)**	**(57)**	**(185.231.500)**	**(5)**	**(750.000)**

Tabel 7. Rincian Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur

d. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian (3.04) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

304	ALAT PERTANIAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**980**	**2.034.709.109**	**454**	**2.011.124.509**	**526**	**23.584.600**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.023**	**2.036.899.439**	**493**	**2.011.450.720**	**530**	**25.448.719**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	16	61.000.000	16	61.000.000	0	0
101	Pembelian	21	76.747.500	21	76.747.500	0	0
102	Transfer Masuk	16	47.177.635	16	47.177.635	0	0
103	Hibah Masuk	1	900.000	0	0	1	900.000
193	Batal Transfer Keluar	9	22.104.875	9	22.104.875	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**63**	**207.930.010**	**62**	**207.030.010**	**1**	**900.000**
Mutasi Kurang							
302	Transfer Keluar	(25)	(69.282.510)	(25)	(69.282.510)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(11)	(17.142.060)	(8)	(14.400.000)	(3)	(2.742.060)
305	Koreksi Pencatatan	(18)	(65.567.500)	(18)	(65.567.500)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(52)	(58.128.270)	(50)	(58.106.211)	(2)	(22.059)
Jumlah Mutasi Kurang		**(106)**	**(210.120.340)**	**(101)**	**(207.356.221)**	**(5)**	**(2.764.119)**

Tabel 8. Rincian Mutasi Alat Pertanian

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Mahkamah Agung RI PeriodeTahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**553.931**	**1.956.512.468.293**	**463.263**	**1.927.271.051.176**	**90.668**	**29.241.417.117**
Saldo per 1 Januari 2024		**552.727**	**1.838.444.748.299**	**463.010**	**1.810.813.138.602**	**89.717**	**27.631.609.697**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	2.288	110.776.382.508	2.068	110.613.435.782	220	162.946.726
101	Pembelian	8.129	47.565.393.272	7.171	46.932.539.721	958	632.853.551
102	Transfer Masuk	1.495	4.295.326.043	1.179	4.061.103.305	316	234.222.738
103	Hibah Masuk	4.484	17.776.283.065	3.254	17.229.488.264	1.230	546.794.801
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3	982.446.000	3	982.446.000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	351	202.546.973	209	185.737.473	142	16.809.500
107	Reklasifikasi Masuk	426	3.194.161.140	381	3.160.642.414	45	33.518.726
112	Perolehan Lainnya	3.433	37.809.092.009	1.796	37.233.009.921	1.637	576.082.088
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	6	85.000	0	0	6	85.000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	1	1.220.000	0	0	1	1.220.000
193	Batal Transfer Keluar	50	283.063.660	50	283.063.660	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	14	7.342.650	14	7.342.650	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	7.526.129.715	0	7.526.129.715	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	78.386.033	0	78.385.033	0	1.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	812	3.627.967.103	672	3.612.946.915	140	15.020.188
Jumlah Mutasi Tambah		**21.492**	**234.125.825.171**	**16.797**	**231.906.270.853**	**4.695**	**2.219.554.318**
Mutasi Kurang							
209	Koreksi Manual	0	(2.600.712.000)	0	(2.600.712.000)	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(78.737.271.303)	0	(78.736.501.303)	0	(770.000)
302	Transfer Keluar	(490)	(2.686.633.803)	(472)	(2.675.889.943)	(18)	(10.743.860)
304	Reklasifikasi Keluar	(280)	(2.322.409.019)	(272)	(2.317.183.019)	(8)	(5.226.000)
305	Koreksi Pencatatan	(312)	(4.144.850.853)	(240)	(4.093.507.285)	(72)	(51.343.568)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(6)	(85.000)	0	0	(6)	(85.000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1)	(1.220.000)	(1)	(1.220.000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(14)	(7.342.650)	0	0	(14)	(7.342.650)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(19.185)	(25.557.580.549)	(15.559)	(25.023.344.729)	(3.626)	(534.235.820)
Jumlah Mutasi Kurang		**(20.288)**	**(116.058.105.177)**	**(16.544)**	**(115.448.358.279)**	**(3.744)**	**(609.746.898)**

Tabel 9. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**34.084**	**378.749.955.516**	**28.566**	**377.260.907.306**	**5.518**	**1.489.048.210**
Saldo per 1 Januari 2024		**34.118**	**363.853.394.747**	**28.622**	**362.423.602.017**	**5.496**	**1.429.792.730**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	203	1.658.074.835	172	1.642.731.796	31	15.343.039
101	Pembelian	312	15.224.467.712	260	15.192.416.412	52	32.051.300
102	Transfer Masuk	19	2.678.183.412	19	2.678.183.412	0	0
103	Hibah Masuk	287	3.148.001.926	268	3.135.373.926	19	12.628.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	569.660.000	1	569.660.000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	26	249.883.000	23	249.703.000	3	180.000
107	Reklasifikasi Masuk	44	288.695.507	41	287.128.307	3	1.567.200
112	Perolehan Lainnya	213	3.832.348.147	191	3.816.543.005	22	15.805.142
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	349.300.000	0	349.300.000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	16	6.522.000	10	5.710.000	6	812.000
Jumlah Mutasi Tambah		**1.121**	**28.005.136.539**	**985**	**27.926.749.858**	**136**	**78.386.681**
Mutasi Kurang							
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(67.100.000)	0	(67.100.000)	0	0
302	Transfer Keluar	(19)	(2.678.183.412)	(19)	(2.678.183.412)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(52)	(3.758.081.985)	(52)	(3.758.081.985)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(8)	(501.870.000)	(8)	(501.870.000)	0	0
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1)	(435.660.000)	(1)	(435.660.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.075)	(5.667.680.373)	(961)	(5.648.549.172)	(114)	(19.131.201)
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.155)**	**(13.108.575.770)**	**(1.041)**	**(13.089.444.569)**	**(114)**	**(19.131.201)**

Tabel 10. Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**4.225**	**14.327.265.890**	**2.581**	**13.594.752.558**	**1.644**	**732.513.332**
Saldo per 1 Januari 2024		**4.175**	**13.805.690.126**	**2.537**	**13.072.441.174**	**1.638**	**733.248.952**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	8	10.460.000	5	9.010.000	3	1.450.000
101	Pembelian	54	599.349.384	53	598.799.384	1	550.000
103	Hibah Masuk	10	35.375.300	10	35.375.300	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	38	75.306.750	25	68.333.950	13	6.972.800
112	Perolehan Lainnya	5	1.302.000	0	0	5	1.302.000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	1	1.567.000	0	0	1	1.567.000
Jumlah Mutasi Tambah		**116**	**723.360.434**	**93**	**711.518.634**	**23**	**11.841.800**
Mutasi Kurang							
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(1.302.000)	0	0	0	(1.302.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(43)	(58.171.000)	(34)	(51.010.000)	(9)	(7.161.000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1)	(1.567.000)	(1)	(1.567.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(22)	(140.744.670)	(14)	(136.630.250)	(8)	(4.114.420)
Jumlah Mutasi Kurang		**(66)**	**(201.784.670)**	**(49)**	**(189.207.250)**	**(17)**	**(12.577.420)**

Tabel 11. Rincian Mutasi Alat Kedokteran dan Kesehatan

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium (3.08) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

308	ALAT LABORATORIUM	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.883**	**17.103.526.872**	**1.348**	**16.996.388.804**	**535**	**107.138.068**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.812**	**15.695.427.871**	**1.312**	**15.609.364.569**	**500**	**86.063.302**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	44	48.203.700	12	31.643.700	32	16.560.000
103	Hibah Masuk	28	579.876.800	28	579.876.800	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	244.140.000	1	244.140.000	0	0
112	Perolehan Lainnya	76	1.185.259.057	57	1.168.983.785	19	16.275.272
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2	2.400.000	2	2.400.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**151**	**2.059.879.557**	**100**	**2.027.044.285**	**51**	**32.835.272**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(70)	(615.973.056)	(59)	(608.640.550)	(11)	(7.332.506)
305	Koreksi Pencatatan	(2)	(20.000.000)	(2)	(20.000.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8)	(15.807.500)	(3)	(11.379.500)	(5)	(4.428.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(80)**	**(651.780.556)**	**(64)**	**(640.020.050)**	**(16)**	**(11.760.506)**

Tabel 12. Rincian Mutasi Alat Laboratorium

i. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan (3.09) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

309	ALAT PERSENJATAAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**433**	**8.313.296.771**	**202**	**8.278.392.471**	**231**	**34.904.300**
Saldo per 1 Januari 2024		**421**	**8.199.651.751**	**199**	**8.170.223.451**	**222**	**29.428.300**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	1	4.840.000	1	4.840.000	0	0
101	Pembelian	7	8.713.000	2	7.143.000	5	1.570.000
103	Hibah Masuk	10	38.545.600	4	33.889.600	6	4.656.000
112	Perolehan Lainnya	5	77.324.700	2	75.757.500	3	1.567.200
Jumlah Mutasi Tambah		**23**	**129.423.300**	**9**	**121.630.100**	**14**	**7.793.200**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(11)	(15.778.280)	(6)	(13.461.080)	(5)	(2.317.200)
Jumlah Mutasi Kurang		**(11)**	**(15.778.280)**	**(6)**	**(13.461.080)**	**(5)**	**(2.317.200)**

Tabel 13. Rincian Mutasi Alat Persenjataan

j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

310	KOMPUTER	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**112.526**	**1.778.991.075.251**	**109.270**	**1.777.437.630.376**	**3256**	**1.553.444.875**
Saldo per 1 Januari 2024		**112.413**	**1.765.514.997.136**	**109.258**	**1.764.062.373.699**	**3155**	**1.452.623.437**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	96	935.761.264	95	935.011.264	1	750.000
101	Pembelian	2.677	30.787.160.512	2.582	30.706.059.472	95	81.101.040
102	Transfer Masuk	1.787	22.709.969.593	1.787	22.709.969.593	0	0
103	Hibah Masuk	1.024	10.262.967.498	985	10.240.002.048	39	22.965.450
106	Pembatalan Penghapusan	68	280.379.000	65	280.289.000	3	90.000
107	Reklasifikasi Masuk	65	774.162.500	65	774.162.500	0	0
112	Perolehan Lainnya	108	3.374.065.966	90	3.361.059.966	18	13.006.000
193	Batal Transfer Keluar	11	110.688.500	11	110.688.500	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	98.560.000	0	98.560.000	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	8.880.000	0	8.880.000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	121	1.116.691.811	116	1.116.297.813	5	393.998
Jumlah Mutasi Tambah		**5.957**	**70.459.286.644**	**5.796**	**70.340.980.156**	**161**	**118.306.488**
Mutasi Kurang							
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(15.000.000)	0	(15.000.000)	0	0
302	Transfer Keluar	(1.798)	(22.820.658.093)	(1.798)	(22.820.658.093)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(33)	(383.200.000)	(33)	(383.200.000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(13)	(283.430.000)	(12)	(282.680.000)	-1	(750.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(4.000)	(33.480.920.436)	(3.941)	(33.464.185.386)	-59	(16.735.050)
Jumlah Mutasi Kurang		**(5.844)**	**(56.983.208.529)**	**(5.784)**	**(56.965.723.479)**	**(60)**	**(17.485.050)**

Tabel 14. Rincian Mutasi Komputer

k. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi (3.11) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

311	ALAT EKSPLORASI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**9**	**276.590.109**	**9**	**276.590.109**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**9**	**276.590.109**	**9**	**276.590.109**	**0**	**0**

Tabel 15. Rincian Mutasi Alat Eksplorasi

l. Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran (3.12) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

312	ALAT PENGEBORAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**11**	**39.899.250**	**10**	**39.705.000**	**1**	**194.250**
Saldo per 1 Januari 2024		**5**	**27.734.250**	**4**	**27.540.000**	**1**	**194.250**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	6	12.165.000	6	12.165.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**6**	**12.165.000**	**6**	**12.165.000**	**0**	**0**

Tabel 16. Rincian Mutasi Alat Pengeboran

m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**26**	**546.616.059**	**24**	**546.022.059**	**2**	**594.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**25**	**475.116.059**	**23**	**474.522.059**	**2**	**594.000**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	1	71.500.000	1	71.500.000	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**1**	**71.500.000**	**1**	**71.500.000**	**0**	**0**

Tabel 17. Rincian Mutasi Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi (3.14) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

314	ALAT BANTU EKSPLORASI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**18**	**17.655.000**	**18**	**17.655.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**18**	**17.655.000**	**18**	**17.655.000**	**0**	**0**

Tabel 18. Rincian Mutasi Alat Bantu Eksplorasi

o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja (3.15) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

315	ALAT KESELAMATAN KERJA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.131**	**24.322.894.603**	**965**	**24.235.593.114**	**166**	**87.301.489**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.098**	**22.993.649.516**	**943**	**22.909.133.027**	**155**	**84.516.489**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	12	334.725.755	12	334.725.755	0	0
101	Pembelian	8	399.068.000	8	399.068.000	0	0
103	Hibah Masuk	19	501.782.000	10	500.000.000	9	1.782.000
107	Reklasifikasi Masuk	2	73.398.000	2	73.398.000	0	0
112	Perolehan Lainnya	28	683.430.851	26	682.427.851	2	1.003.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	477.152.021	1	477.152.021	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**70**	**2.469.556.627**	**59**	**2.466.771.627**	**11**	**2.785.000**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(25)	(1.055.911.540)	(25)	(1.055.911.540)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(8)	(48.000.000)	(8)	(48.000.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(4)	(36.400.000)	(4)	(36.400.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(37)**	**(1.140.311.540)**	**(37)**	**(1.140.311.540)**	**0**	**0**

Tabel 19. Rincian Mutasi Alat Keselamatan Kerja

p. Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga (3.16) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

316	ALAT PERAGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**71**	**494.416.619**	**46**	**482.936.694**	**25**	**11.479.925**
Saldo per 1 Januari 2024		**72**	**301.955.647**	**45**	**288.653.222**	**27**	**13.302.425**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	3	203.525.972	3	203.525.972	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**3**	**203.525.972**	**3**	**203.525.972**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(4)	(11.065.000)	(2)	(9.242.500)	(2)	(1.822.500)
Jumlah Mutasi Kurang		**(4)**	**(11.065.000)**	**(2)**	**(9.242.500)**	**(2)**	**(1.822.500)**

Tabel 20. Rincian Mutasi Alat Peraga

q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**18**	**512.591.496**	**16**	**512.416.496**	**2**	**175.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**19**	**326.669.784**	**17**	**326.494.784**	**2**	**175.000**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	1	188.635.712	1	188.635.712	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**1**	**188.635.712**	**1**	**188.635.712**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(2.714.000)	(2)	(2.714.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(2)**	**(2.714.000)**	**(2)**	**(2.714.000)**	**0**	**0**

Tabel 21. Rincian Mutasi Peralatan Proses/Produksi

r. Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu (3.17) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

318	RAMBU - RAMBU	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.595**	**2.886.859.646**	**21**	**2.832.945.296**	**1.574**	**53.914.350**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.595**	**4.092.296.646**	**21**	**4.038.382.296**	**1.574**	**53.914.350**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	1	3.500.000	1	3.500.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**1**	**3.500.000**	**1**	**3.500.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(1.208.937.000)	(1)	(1.208.937.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(1)**	**(1.208.937.000)**	**(1)**	**(1.208.937.000)**	**0**	**0**

Tabel 22. Rincian Mutasi Rambu-Rambu

s. Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga (3.19) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

319	PERALATAN OLAH RAGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**173**	**1.082.694.136**	**158**	**1.080.079.339**	**15**	**2.614.797**
Saldo per 1 Januari 2024		**176**	**1.123.223.582**	**161**	**1.120.608.785**	**15**	**2.614.797**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	2	20.344.054	2	20.344.054	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**2**	**20.344.054**	**2**	**20.344.054**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(5)	(60.873.500)	(5)	(60.873.500)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(5)**	**(60.873.500)**	**(5)**	**(60.873.500)**	**0**	**0**

Tabel 23. Rincian Peralatan Olahraga

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Satuan Kerja Mahkamah Agung Periode

Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp4.124.228.994.389,00 (*empat triliun seratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah),* dengan rincian nilai penyusutan intrakomptabel terlampir pada Laporan Penyusutan Intra (A1).

Monitoring Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.925.409.884,00 dengan rincian menjadi aset sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Peralatan Mesin	Rp 86.222.358.389,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sesuai
Gedung Bangunan	Rp 108.665.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Gedung Bangunan berupa aset intrakomptabel
Jalan Jembatan, Irigasi, Jaringan	Rp 2.751.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai Pembelian Jalan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan berupa aset intrakomptabel senilai Rp 2.751.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaaan	Rp 1.390.855.400,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sebagai Perolehan/Penambahan KDP
Ekstrakomptabel	Rp 200.780.095,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan sebegai aset ekstrakomtabel
Total	Rp 87.925.409.884	

Tabel 24. Monitoring Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 9.063 unit dengan nilai sebesar Rp13.254.977.859.070 (*Tiga belas triliun dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 8.971 unit dengan nilai sebesar Rp11.823.747.171.387 (*Sebelas triliun delapan ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 661 unit dengan nilai sebesar Rp1.837.014.323.525 (*Satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 569 buah dengan nilai Rp405.783.635.842 (*Empat ratus lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 11.821.324.680.170,00	Rp 2.422.491.217,00
Mutasi Bertambah			
100	Saldo Awal	Rp 29.597.100.160,00	Rp 21,00
101	Pembelian	Rp 9.237.954.100,00	Rp 105.530.071,00
102	Transfer Masuk	Rp 144.723.484.092,00	Rp 0,00
103	Hibah Masuk	Rp 30.917.936.385,00	Rp 129.495.920,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan K	Rp 1.196.930.219.297,00	Rp 94.642.500,00
106	Pembatalan Penghapusan	Rp 1.041.501.000,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 48.558.626.416,00	Rp 99.969.229,00
112	Perolehan Lainnya	Rp 37.653.829.718,00	Rp 20.648.000,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 1.072.825.750,00	Rp 38.684.000,00
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp 0,00	Rp 400.000,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke I	Rp 3,00	Rp 0,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 5.614.836.697,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 87.339.636.992,00	Rp 147.808.000,00
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 13.385.056.141,00	Rp 0,00
208	Pengembangan Melalui KDP	Rp 230.085.674.033,00	Rp 0,00
209	Koreksi Manual	Rp 218.465.000,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 1.836.377.145.784,00	Rp 637.177.741,00
Mutasi Berkurang			
214	Koreksi Susulan	(Rp 13.397.698.960,00)	Rp 0,00
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 122.453.626.278,00)	Rp 0,00
301	Penghapusan	(Rp 631.515.000,00)	Rp 0,00
302	Transfer Keluar	(Rp 89.076.848.935,00)	Rp 0,00
303	Hibah Keluar	(Rp 2.932.417.000,00)	Rp 0,00
304	Reklasifikasi Keluar	(Rp 47.408.881.783,00)	(Rp 105.589.229,00)
305	Koreksi Pencatatan	(Rp 121.239.804.891,00)	(Rp 445.909.810,00)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 0,00	(Rp 3,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp 11.820.457.953,00)	(Rp 565.394.000,00)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp 4.011.811.000,00	Rp 282.697.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 404.949.439.800,00)	(Rp 834.196.042,00)
Saldo Audited		Rp 13.252.752.386.154,00	Rp 2.225.472.916,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 2.664.076.141.301,00)	(Rp 351.312.853,00)
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan		Rp 10.588.676.244.853,00	Rp 1.874.160.063,00

Tabel 25. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Gedung Bangunan merupakan hasil dari proses pemisahan nilai Gedung Bangunan yang sebelumnya tergabung dalam pencatatan tanah, atau pemisahan nilai Gedung Bangunan dari pencatatan sebelumnya di mana nilai tanah masih tergabung dalam Gedung Bangunan pada 16 Satuan Kerja;
2. Pembelian pada 24 satuan kerja namun terdapat juga merupakan kesalahan pencatatan yang selanjutnya dikoreksi pencatatan kemudian nilainya ditambahkan ke Gedung yang seharusnya;
3. Transfer Masuk Gedung Bangunan pada 8 satuan kerja sebagian merupakan transfer dari luar MA

yaitu Pemberian Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Dan Pemberian Dari Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta Kepada Badan Urusan Administrasi dan sebagian lainnya merupakan Transfer antar kuasa pengguna barang di internal MA;

4. Terdapat Transaksi Hibah Masuk Pada 63 Satuan Kerja Yang Sebagian Besar Berasal Dari Pemerintah Daerah;
5. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Gedung Bangunan terdapat pada 44 Satuan Kerja;
6. Pembatalan Penghapusan dilakukan karena tidak terdapat dokumen dasar untuk melakukan penghapusan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Negeri Biak;
7. Reklasifikasi Masuk Gedung Bangunan karena sebelumnya melakukan pencatatan kodefikasi barang yang salah pada 52 satuan kerja;
8. Perolehan Lainnya Gedung Bangunan merupakan tindaklanjut dari transaksi koreksi nilai berkurang atau koreksi pencatatan yang bertujuan untuk memisahkan nilai gedung bangunan pada 14 Satuan Kerja;
9. Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Agama Pagar Alam, dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
10. Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra Gedung Bangunan (Intra) terdapat pada Pengadilan Militer Tinggi Surabaya yang memiliki nilai +- dengan Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra (Ekstra);
11. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Gedung Bangunan terdapat pada 33 Satuan Kerja;
12. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gedung Banguan terdapat pada 117 Satuan Kerja;
13. Penerimaan Aset Tetap Renovasi yang sebagaian besar dari Pemerintah Daerah terdapat pada 24 Satuan Kerja;
14. Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 78 Satuan Kerja;
15. Koreksi Manual pada Pengadilan Negeri Salatiga terkait Koreksi Aset berupa Rumah Negara;
16. Koreksi Susulan merupakan tindaklanjut dari koreksi pencatatan yang bertujuan untuk menambahkan atau mengurangi dari nilei Gedung Bangunan pada 214 Satuan Kerja;
17. Koreksi pencatatan nilai berkurang dilakukan karena sebagian besar satuan kerja memasukan nilai Peralatan Mesin dan Tanah dalam Gedung Bangunan pada 57 satuan kerja;
18. Penghapusan Gedung Bangunan terdapat pada Pengadilan Tinggi Palembang;
19. Hibah Keluar Gedung Bangunan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh 3 Satuan Kerja yaitu Pengadilan Agama Mungkid, Pengadilan Agama Maninjau, Pengadilan Agama Mojokerto;
20. Reklasifikasi Keluar Gedung Bangunan dan Reklasifikasi Masuk kategori aset tetap lainnya pada 51 satuan kerja;
21. Koreksi Pencatatan Gedung Bangunan karena aset dari Gedung Bangunan memiliki nilai yang menjadi satu dengan aset tanah atau peralatan mesin pada 89 Satuan Kerja;
22. Tidak Terdapat Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra Gedung Bangunan;
23. Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada 26 Satuan Kerja;

24. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif karena aset gedung bangunan masih digunakan pada 9 Satuan Kerja.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung (401) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

401	BANGUNAN GEDUNG	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**8.272**	**12.968.971.420.419**	**8.110**	**12.966.938.065.343**	**162**	**2.033.355.076**
Saldo per 1 Januari 2024		**8.207**	**11.573.983.292.383**	**8.058**	**11.571.755.519.006**	**149**	**2.227.773.377**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	57	11.546.206.428	37	11.546.206.408	20	20
101	Pembelian	167	9.048.061.423	24	8.967.046.165	143	81.015.258
102	Transfer Masuk	19	144.723.484.092	19	144.723.484.092	0	0
103	Hibah Masuk	93	29.766.238.002	83	29.636.742.082	10	129.495.920
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	91	1.189.008.036.875	74	1.188.913.394.375	17	94.642.500
106	Pembatalan Penghapusan	2	1.041.501.000	2	1.041.501.000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	119	45.451.692.742	111	45.351.723.513	8	99.969.229
112	Perolehan Lainnya	32	31.619.855.039	31	31.599.207.039	1	20.648.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	17	1.111.509.750	12	1.072.825.750	5	38.684.000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1	400.000	0	0	1	400.000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2	2	2	2	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	4.989.757.194	0	4.989.757.194	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	84.775.035.780	0	84.627.227.780	0	147.808.000
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	12.717.208.058	0	12.717.208.058	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	227.547.605.926	0	227.547.605.926	0	0
209	Koreksi Manual	0	218.465.000	0	218.465.000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	22	4.294.508.000	21	4.011.811.000	1	282.697.000
Jumlah Mutasi Tambah		**622**	**1.797.859.565.311**	**416**	**1.796.964.205.384**	**206**	**895.359.927**
Mutasi Kurang							
214	Koreksi Susulan	0	(13.971.113.749)	0	(13.971.113.749)	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(122.278.808.952)	0	(122.278.808.952)	0	0
301	Penghapusan	(1)	(631.515.000)	(1)	(631.515.000)	0	0
302	Transfer Keluar	(16)	(89.076.848.935)	(16)	(89.076.848.935)	0	0
303	Hibah Keluar	(5)	(2.932.417.000)	(5)	(2.932.417.000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(121)	(47.116.866.793)	(111)	(47.011.277.564)	(10)	(105.589.229)
305	Koreksi Pencatatan	(353)	(114.478.014.891)	(174)	(114.059.219.894)	(179)	(418.794.997)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(2)	(2)	0	0	(2)	(2)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(59)	(12.385.851.953)	(57)	(11.820.457.953)	(2)	(565.394.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(557)**	**(402.871.437.275)**	**(364)**	**(401.781.659.047)**	**(193)**	**(1.089.778.228)**

Tabel 26. Rincian Mutasi Bangunan dan Gedung

b. Monumen (402)

Saldo Monumen (402) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

402	MONUMEN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**5**	**422.181.953**	**1**	**407.669.000**	**4**	**14.512.953**
Saldo per 1 Januari 2024		**6**	**424.681.953**	**1**	**407.669.000**	**5**	**17.012.953**
Mutasi Kurang							
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(2.500.000)	0	0	(1)	(2.500.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(1)**	**(2.500.000)**	**0**	**0**	**(1)**	**(2.500.000)**

Tabel 27. Rincian Mutasi Monumen

c. Bangunan Menara (403)

Saldo Bangunan Menara (403) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

403	BANGUNAN MENARA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**6**	**2.033.349.084**	**6**	**2.033.349.084**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**6**	**2.033.349.084**	**6**	**2.033.349.084**	**0**	**0**

Tabel 28. Rincian Mutasi Bangunan Menara

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Titik Kontrol/Pasti (404) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**780**	**283.550.907.614**	**760**	**283.373.302.727**	**20**	**177.604.887**
Saldo per 1 Januari 2024		**752**	**247.305.847.967**	**731**	**247.128.143.080**	**21**	**177.704.887**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	13	18.050.893.753	12	18.050.893.752	1	1
101	Pembelian	5	295.422.748	2	270.907.935	3	24.514.813
103	Hibah Masuk	4	1.281.194.303	4	1.281.194.303	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	8.016.824.922	4	8.016.824.922	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	3	3.206.902.903	3	3.206.902.903	0	0
112	Perolehan Lainnya	9	6.054.622.679	9	6.054.622.679	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	1	1	1	1	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	625.079.503	0	625.079.503	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	2.712.409.212	0	2.712.409.212	0	0
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	667.848.083	0	667.848.083	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	2.538.068.107	0	2.538.068.107	0	0
214	Koreksi Susulan	0	573.414.789	0	573.414.789	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**39**	**44.022.681.003**	**35**	**43.998.166.189**	**4**	**24.514.814**
Mutasi Kurang							
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(174.817.326)	0	(174.817.326)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(397.604.219)	(1)	(397.604.219)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(9)	(7.205.199.810)	(5)	(7.180.584.997)	(4)	(24.614.813)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(1)	(1)	0	0	(1)	(1)
Jumlah Mutasi Kurang		**(11)**	**(7.777.621.356)**	**(6)**	**(7.753.006.542)**	**(5)**	**(24.614.814)**

Tabel 29. Rincian Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.664.427.454.154,00 (*dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah).* Dengan rincian nilai penyusutan intra terlampir pada tabel -A1. Penyusutan-

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp971.975.091.172,00 dengan rincian menjadi aset sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Tanah	Rp 49.815.000,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Tanah
Peralatan Mesin	Rp 499.000.000,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Pembelian Peralatan Mesin
Gedung Bangunan	15.077.916.489	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Gedung
Aset Tetap Lainnya	Rp 88.753.158,00	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan direalisasikan sebagai

		Pembelian Aset Tetalp Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 951.354.197.482,00	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Perolehan/Penambahan KDP
Ekstrakomptabel	81.470.813	Belanja Modal Gedung Bangunan direalisasikan sebagai Ekstrakomptabel
Selisih RPATA	Rp 5.283.163.269,00	Selisih Dana Rpata Dengan progress 31 Desember 2024
Pengembalian	(Rp 459.225.039,00)	Pengembalian belanja modal
Grand Total	Rp 971.975.091.172,00	

Tabel 30. Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebanyak 3.280 buah dengan nilai sebesar Rp58.350.280.852,00 (*lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3.282 buah dengan nilai sebesar Rp58.399.600.852,00 (*lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp517.313.798,00 *(lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)*, dan mutasi kurang sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp566.633.798,00 (*lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).*

Rincian mutasi Jalan, Jembatan, Irigas dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 58.399.600.852,00	Rp 0,00
Mutasi Bertambah			
101	Pembelian	Rp 2.751.000,00	Rp 0,00
112	Perolehan Lainnya	Rp 512.728.798,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 1.834.000,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 517.313.798,00	Rp 0,00
Mutasi Berkurang			
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 1.834.000,00)	Rp 0,00
305	Koreksi Pencatatan	(Rp 564.799.798,00)	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 566.633.798,00)	Rp 0,00
Saldo Audited		Rp 58.350.280.852,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 24.164.506.704,00)	Rp 0,00
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutai		Rp 34.185.774.148,00	Rp 0,00

Tabel 31. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Penjelasan mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

1. Pembelian terdapat pada PA Cianjur yang merupakan salah catat instalasi AC, dan sudah dilakukan koreksi pencatatan menjadi peralatan mesin berupa AC.
2. Perolehan Lainnya pada PN Dataran Hunimoa yang merupakan kesalahan catat pemisahan Peralatan Mesin dari Gedung Bangunan, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan dicatat dengan kode barang yang sesuai pada peralatan dan mesin.
3. Koreksi Nilai Bertambah pada PA Cianjur merupakan kesalahan catat, sudah dikoreksi menggunakan koreksi nilai berkurang.
4. Koreksi pencatatan pada 2 satuan kerja yaitu PA Maninjau dan Dilmil Kupang dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Pada satuan kerja PA Maninjau terdapat Jaringan listrik yang seharusnya menambah nilai Gedung Kantor lama. Satuan kerja telah melakukan koreksi catat dari Jaringan lalu koreksi susulan yang menambah nilai Gedung dan Bangunan
   b. Pada Satuan Kerja Pengadilan Militer III-15 Kupang terdapat jaringan berupa router dan LAN yang seharusnya merupakan Peralatan dan Mesin. Satuan kerja telah melakukan koreksi catat pada Jaringan lalu dilakukan pencatatan transaksi saldo awal menjadi Peralatan Dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp24.164.506.704 (*dua puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus enam ribu tujuh ratus empat rupiah),* dengan rincian nilai penyusutan terlampir pada Laporan Penyusutan Intra (A1).

6. Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp1.078.042.792 (*Satu milyar tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp24.589.903.788 (*Dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 30 unit dengan nilai sebesar Rp8.495.979.266 (*Delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 36 buah dengan nilai Rp32.007.840.262 (*tiga puluh dua milyar tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Renovasi adalah sebagai berikut:

607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**4**	**1.078.042.792**	**4**	**1.078.042.792**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**10**	**24.589.903.788**	**10**	**24.589.903.788**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	1	88.753.158	1	88.753.158	0	0
103	Hibah Masuk	27	8.084.376.108	27	8.084.376.108	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	1	179.850.000	1	179.850.000	0	0
193	Batal Transfer Keluar	1	143.000.000	1	143.000.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**30**	**8.495.979.266**	**30**	**8.495.979.266**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(168.956.984)	0	(168.956.984)	0	0
302	Transfer Keluar	(4)	(20.786.553.012)	(4)	(20.786.553.012)	0	0
303	Hibah Keluar	(1)	(143.000.000)	(1)	(143.000.000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(28)	(8.173.129.266)	(28)	(8.173.129.266)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(2.736.201.000)	(3)	(2.736.201.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(36)**	**(32.007.840.262)**	**(36)**	**(32.007.840.262)**	**0**	**0**

Tabel 32. Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi (ATR)

Penjelasan rincian mutasi ATR adalah sebagai berikut:

1. Terdapat mutasi tambah Aset Tetap Renovasi pada 24 satuan kerja yang didominasi oleh transaksi Hibah Masuk terhadap aset berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi;
2. Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Renovasi pada 24 satuan kerja yang didominasi oleh transaksi koreksi pencatatan terhadap aset berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi.

7. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 1.041.952 buah dengan nilai sebesar Rp50.746.817.284 (*Lima puluh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 1.060.132 buah dengan nilai sebesar Rp50.647.897.290 (*Lima puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 8.881 buah dengan nilai sebesar Rp623.446.700 (*Enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 27.061 buah dengan nilai Rp524.526.706 (*Lima ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 75.032.921.320,00	Rp 204.879.758,00
Mutasi Bertambah			
100	Saldo Awal	Rp 4.200.000,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 286.734.808,00	Rp 0,00
102	Transfer Masuk	Rp 197.981.650,00	Rp 0,00
103	Hibah Masuk	Rp 8.089.326.108,00	Rp 0,00
106	Pembatalan Penghapusan	Rp 3.400.000,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 362.365.400,00	Rp 0,00
112	Perolehan Lainnya	Rp 0,00	Rp 750.000,00
193	Batal Transfer Keluar	Rp 143.000.000,00	Rp 0,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp 31.668.000,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 9.118.675.966,00	Rp 750.000,00
Mutasi Berkurang			
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 168.956.984,00)	Rp 0,00
302	Transfer Keluar	(Rp 20.984.534.662,00)	Rp 0,00
303	Hibah Keluar	(Rp 143.000.000,00)	Rp 0,00
305	Koreksi Pencatatan	(Rp 8.173.129.266,00)	Rp 0,00
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp 3.062.646.056,00)	(Rp 100.000,00)
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 32.532.266.968,00)	(Rp 100.000,00)
Saldo Audited		Rp 51.619.330.318,00	Rp 205.529.758,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 587.141.571,00)	(Rp 286.000,00)
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan)		Rp 51.032.188.747,00	Rp 205.243.758,00

Tabel 33. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

1. Saldo Awal Aset Tetap Lainnya pada 1 satuan kerja Pengadilan Agama Wates tindak lanjut dari koreksi pencatatan Alat Kantor Lainnya untuk ATL ini berupa buku brailer;
2. Pembelian Aset Tetap Lainnya pada 1 satuan kerja Badan Urusan Administrasi membeli monografi menggunakan akun belanja 5461xx;
3. Transfer Masuk pada 5 satuan kerja merupakan transfer antar kuasa pengguna barang berupa monografi;
4. Hibah Masuk Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Singaraja berupa Lukisan Canvas dan Pengadilan Agama Denpasar berupa Lukisan Cat Minyak;
5. Pembatalan Penghapusan Aset Tetap Lainnya karena aset sebelumnya yang terhapus tidak memilliki dokumen dasar penghapusan pada Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya karena kesalahan kodefikasi barang yang terdapat pada 2 satuan kerja Diklat, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
7. Batal Transfer pada 3 satuan kerja karena tidak jadi dilakukan transfer keluar yaitu PA Nganjuk, PTA Manado dan PTUN Jayapura;
8. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada 1 Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi;
9. Transfer Keluar Aset Tetap Lainnya pada 2 Satuan Kerja yaitu Pengadilan Negeri Manokwari kepada Pemerintah Daerah dan Badan Urusan Administrasi kepada Sekretariat Negara;

10. Penghentian Aset Dari Penggunaan karena Aset Tetap Lainnya telah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada 19 Satuan Kerja;
11. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif karena Aset Tetap Lainnya masih digunakan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Negeri Denpasar.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (601)

Saldo Bahan Perpustakaan (601) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

601	BAHAN PERPUSTAKAAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.037.134**	**47.465.760.992**	**1.037.086**	**47.465.712.992**	**48**	**48.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.055.243**	**47.547.948.398**	**1.055.195**	**47.547.900.398**	**48**	**48.000**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	1	4.200.000	1	4.200.000	0	0
101	Pembelian	100	197.981.650	100	197.981.650	0	0
102	Transfer Masuk	100	197.981.650	100	197.981.650	0	0
103	Hibah Masuk	11	3.450.000	11	3.450.000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	94	3.400.000	94	3.400.000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	8.564	31.668.000	8.564	31.668.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**8.870**	**438.681.300**	**8.870**	**438.681.300**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
302	Transfer Keluar	(100)	(197.981.650)	(100)	(197.981.650)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(26.879)	(322.887.056)	(26.879)	(322.887.056)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(26.979)**	**(520.868.706)**	**(26.979)**	**(520.868.706)**	**0**	**0**

Tabel 34. Rincian Mutasi Bahan Perpustakaan

b. Barang Bercorak (602)

Saldo Barang Bercorak (602) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.462**	**3.084.597.543**	**1.268**	**3.075.574.534**	**194**	**9.023.009**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.536**	**2.904.240.143**	**1.338**	**2.895.117.134**	**198**	**9.123.009**
Mutasi Tambah							
103	Hibah Masuk	2	1.500.000	2	1.500.000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	6	182.515.400	6	182.515.400	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**8**	**184.015.400**	**8**	**184.015.400**	0	**0**
Mutasi Kurang							
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(82)	(3.658.000)	(78)	(3.558.000)	(4)	(100.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(82)**	**(3.658.000)**	**(78)**	**(3.558.000)**	(4)	**(100.000)**

Tabel 35. Rincian Mutasi Barang Bercorak

c. Tanaman (605)

Saldo Tanaman (605) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

605	TANAMAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**3.356**	**196.458.749**	**0**	**0**	**3.356**	**196.458.749**
Saldo per 1 Januari 2024		**3.353**	**195.708.749**	**0**	**0**	**3.353**	**195.708.749**
Mutasi Tambah							
112	Perolehan Lainnya	3	750.000	0	0	3	750.000
Jumlah Mutasi Tambah		**3**	**750.000**	**0**	**0**	3	**750.000**

Tabel 36. Rincian Mutasi Tanaman

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp587.141.571 (*lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)*, dengan rincian nilai penyusutan terlampir pada Laporan Penyusutan Intra (A1).

Monitoring Realisasi Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp397.411.950,00 dengan rincian menjadi aset sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai	Keterangan
Peralatan Mesin	Rp 99.930.300,00	Belanja Modal Lainnya direalisasikan sebagai pembelian Peralatan Mesin berupa aset Intrakomptabel senilai Rp 99.930.300,00
Peralatan Mesin	Rp 197.981.650,00	Belanja Modal Lainnya direalisasikan sebagai pembelian Aset Tetap Lainnya berupa aset Intrakomptabel senilai Rp 197.981.650,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 99.500.000,00	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya direalisasikan sebagai KDP senilai Rp 99.500.000,00
Grand Total	Rp 397.411.950,00	

Tabel 37. Monitoring Realisasi Belanja Modal Lainnya

8. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak -52.054 unit dengan nilai sebesar Rp475.263.059.024 (*Empat ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak -51.824 unit dengan

nilai sebesar Rp915.655.052.073 (*Sembilan ratus lima belas milyar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 407 unit dengan nilai sebesar Rp1.129.950.933.519 (*Satu triliun seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 637 buah dengan nilai Rp1.570.342.926.568 (*satu triliun lima ratus tujuh puluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 915.655.052.073,00	Rp 0,00
Mutasi Bertambah			
503	Pengembangan KDP	Rp 914.457.263.518,00	Rp 0,00
502	Perolehan/Penambahan KDP	Rp 74.901.184.968,00	Rp 0,00
510	Perolehan Lainnya KDP	Rp 68.054.173.722,00	Rp 0,00
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp 62.832.787.030,00	Rp 0,00
508	Hibah Masuk KDP	Rp 9.602.719.578,00	Rp 0,00
514	Reklasifikasi Masuk KDP	Rp 102.804.703,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 1.129.950.933.519,00	Rp 0,00
Mutasi Berkurang			
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(Rp 102.804.703,00)	Rp 0,00
505	Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(Rp 1.588.454.024,00)	Rp 0,00
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(Rp 34.586.243.239,00)	Rp 0,00
517	Koreksi Pencatatan KDP	(Rp 103.431.867.024,00)	Rp 0,00
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(Rp 1.430.633.557.578,00)	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 1.570.342.926.568,00)	Rp 0,00
Saldo Audited		Rp 475.263.059.024,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		Rp 0,00	Rp 0,00
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan)		Rp 475.263.059.024,00	Rp 0,00

Tabel 38. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan KDP pada 117 satuan kerja, merupakan penginputan bast pekerjaan yang diinput secara bertahap pada KDP;
2. Perolehan/Penambahan KDP 88 satuan kerja merupakan titik awal penginputan KDP, biasanya pengeluaran/biaya pertama yang dikeluarkan;
3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah KDP dilakukan sebagai bentuk perbaikan atas kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian nilai pada 23 satuan kerja;
4. Hibah Masuk KDP pada 24 Satuan Kerja berasal dari pemerintah daerah;
5. Perolehan lainnya KDP karena pencatatan transaksi sebelumnya melakukan kesalahan perekaman kodefikasi BMN yang sudah di approve dan tidak dapat dilakukan ubah data transaksi. maka dilakukan perbaikan koreksi dan kemudian dilakukan penginputan kembali menggunakan menu perolehan lainnya KDP pada 11 Satuan Kerja
6. Reklasifikasi Masuk KDP pada PN Sumenep dengan pasangan transaksinya Reklasifikasi Keluar;

7. Penghapusan/Penghentian KDP pada 5 satuan kerja dikarenakan KDP Mangkrak dan adanya kesalahan pencatatan yang kemudian dilakukan koreksi;
8. Koreksi Pencatatan KDP karena kesalahan penginputan kuantitas KDP pada perekaman sebelumnya yang terdapat pada 25 satuan kerja
9. Koreksi Nilai KDP Berkurang karena kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian terkait penginputan sebelumnya pada 20 Satuan Kerja
10. Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi terdapat pada 114 Satuan Kerja;

9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 1.613 buah dengan nilai sebesar Rp98.803.896.742 (*Sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 1.840 buah dengan nilai sebesar Rp110.013.999.715 (*Seratus sepuluh milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 61 buah dengan nilai sebesar Rp3.173.178.824 (*Tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 288 buah dengan nilai Rp14.383.281.797 (*Empat belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tak berwujud dapat dilihat sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 110.013.999.715,00	Rp 0,00
Mutasi Bertambah			
103	Hibah Masuk	Rp 2.176.300.000,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 572.692.199,00	Rp 0,00
106	Pembatalan Penghapusan	Rp 183.737.500,00	Rp 0,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp 105.201.625,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 64.991.500,00	Rp 0,00
100	Saldo Awal	Rp 36.956.000,00	Rp 0,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 33.300.000,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 3.173.178.824,00	Rp 0,00
Mutasi Berkurang			
305	Koreksi Pencatatan	(Rp 16.000.000,00)	Rp 0,00
304	Reklasifikasi Keluar	(Rp 572.692.199,00)	Rp 0,00
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp 13.794.589.598,00)	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 14.383.281.797,00)	Rp 0,00
Saldo Audited		Rp 98.803.896.742,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 49.619.600.184,00)	Rp 0,00
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan)		Rp 49.184.296.558,00	Rp 0,00

Tabel 39. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Penjelasan mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

a. Saldo awal Aset Tak Berwujud merupakan hasil dari proses pemisahan Aset Tak Berwujud yang sebelumnya nilainya masih tergabung sebagai satu kesatuan dengan Gedung dan Bangunan pada MS Blangpidie dan MS Kota Subulussalam;
b. Pembelian Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawasan berupa Lisensi menggunakan akun belanja 536111;
c. Hibah Masuk Aset Tak Berwujud berupa Lisensi dan Software Komputer pada Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, dan Pengadilan Negeri Cikarang;
d. Pembatalan Penghapusan Aset Tak Berwujud karena aset sebelumnya yang terhapus tidak memilliki dokumen dasar penghapusan pada Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Pengadilan Negeri Kepahiang, dan Pengadilan Negeri Tangerang;
e. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) pada satuan kerja Kepaniteraan untuk Software Komputer;
f. Koreksi Pencatatan Aset Tak Berwujud terdapat pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Sampang;
g. Penghentian Aset Dari Penggunaan karena Aset Tak Berwujud telah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada 48 Satuan Kerja.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang adalah sebagai berikut:

a. Software (801)

Saldo Software (801) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

801	SOFTWARE	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1.262**	**59.883.255.953**	**1.262**	**59.883.255.953**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**1.503**	**71.232.278.701**	**1.503**	**71.232.278.701**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
100	Saldo Awal	2	36.956.000	2	36.956.000	0	0
103	Hibah Masuk	8	777.700.000	8	777.700.000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	7	134.045.000	7	134.045.000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	1	11.550.000	1	11.550.000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	33.300.000	0	33.300.000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3	21.361.625	3	21.361.625	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**21**	**1.014.912.625**	**21**	**1.014.912.625**	0	**0**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(18)	(561.142.199)	(18)	(561.142.199)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(244)	(11.802.793.174)	(244)	(11.802.793.174)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(262)**	**(12.363.935.373)**	**(262)**	**(12.363.935.373)**	0	**0**

Tabel 40. Rincian Mutasi Software

b. Lisensi (801)

Saldo Lisensi (801) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

801	LISENSI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**113**	**32.453.641.795**	**113**	**32.453.641.795**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**110**	**32.316.840.061**	**110**	**32.316.840.061**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
101	Pembelian	2	64.991.500	2	64.991.500	0	0
103	Hibah Masuk	18	1.398.600.000	18	1.398.600.000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	1	49.692.500	1	49.692.500	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**21**	**1.513.284.000**	**21**	**1.513.284.000**	0	**0**
Mutasi Kurang							
305	Koreksi Pencatatan	(2)	(16.000.000)	(2)	(16.000.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(16)	(1.360.482.266)	(16)	(1.360.482.266)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(18)**	**(1.376.482.266)**	**(18)**	**(1.376.482.266)**	0	**0**

Tabel 41. Rincian Mutasi Lisensi

c. Hasil Kajian/Penelitian (801)

Saldo Hasil Kajian/Penelitian (801) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (Audited) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

801	HASIL KAJIAN/PENELITIAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**10**	**1.804.868.600**	**10**	**1.804.868.600**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**10**	**1.804.868.600**	**10**	**1.804.868.600**	**0**	**0**

Tabel 42. Rincian Mutasi Hasil Kajian/Penelitian

d. Aset Tak Berwujud Lainnya (801)

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya (801) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

801	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**228**	**4.662.130.394**	**228**	**4.662.130.394**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**217**	**4.660.012.353**	**217**	**4.660.012.353**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
107	Reklasifikasi Masuk	18	561.142.199	18	561.142.199	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	83.840.000	1	83.840.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**19**	**644.982.199**	**19**	**644.982.199**	0	**0**
Mutasi Kurang							
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(11.550.000)	(1)	(11.550.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(7)	(631.314.158)	(7)	(631.314.158)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(8)**	**(642.864.158)**	**(8)**	**(642.864.158)**	0	**0**

Tabel 43. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya

10. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah pada Laporan Barang

Pengguna Mahkamah Agung Periode 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 94.451 buah dengan nilai sebesar Rp162.534.225.171 (*Seratus enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 95.403 buah dengan nilai sebesar Rp166.296.025.288 (*Seratus enam puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2024 (Audited) sebanyak 54.023 buah dengan nilai sebesar Rp112.287.110.633 (*Seratus dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 54.975 buah dengan nilai Rp116.048.910.750 (*seratus enam belas milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomptable	Ekstrakomptable
Saldo Awal			
000	Saldo Awal TAYL	Rp 161.921.949.010,00	Rp 1.637.875.278,00
Mutasi Bertambah			
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 108.125.292.512,00	Rp 1.148.670.550,00
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp 5.683.346.507,00	Rp 66.002.064,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 113.808.639.019,00	Rp 1.214.672.614,00
Mutasi Berkurang			
301	Penghapusan	(Rp 570.492.300,00)	Rp 0,00
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(Rp 10.016.664.277,00)	(Rp 308.923.186,00)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(Rp 103.771.055.021,00)	(Rp 1.381.775.966,00)
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 114.358.211.598,00)	(Rp 1.690.699.152,00)
Saldo Audited		Rp 161.372.376.431,00	Rp 1.161.848.740,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 148.978.471.297,00)	(Rp 1.138.172.545,00)
Total (Saldo Audited + Akumulasi Penyusutan)		Rp 12.393.905.134,00	Rp 23.676.195,00

Tabel 44. Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan mutasi Aset Lain-Lain sebagai berikut:

a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya merupakan transaksi otomatis yang terbentuk dari transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan pada 305 satuan kerja;
b. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan merupakan aset-aset yang dibatalkan penghapusan karena masih digunakan atau belum ada dokumen dasar untuk usulan pencatatan barang yang mau dihapuskan terdapat pada 15 Satuan Kerja
c. Penghapusan yang masuk kedalam Aset Lainnya terdapat pada 7 Satuan Kerja
d. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap merupakan transaksi otomatis yang terbentuk dari transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada 61 satuan kerja;
e. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan merupakan aset-aset yang akan dilakukan penghapusan, terdapat pada 299 Satuan Kerja

Rincian mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan per bidang adalah sebagai berikut:

a. Tanah (201)

Saldo Tanah (201) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

201	TANAH	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**600**	**4.000.000**	**600**	**4.000.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**600**	**4.000.000**	**600**	**4.000.000**	**0**	**0**

Tabel 45. Rincian Mutasi Tanah yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

b. Alat Besar (301)

Saldo Alat Besar (301) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

301	ALAT BESAR	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**73**	**2.149.416.786**	**73**	**2.149.416.786**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**74**	**2.691.189.209**	**74**	**2.691.189.209**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	33	1.118.811.000	29	1.115.251.000	4	3.560.000
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	7	9.880.000	7	9.880.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**40**	**1.128.691.000**	**36**	**1.125.131.000**	**4**	**3.560.000**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(41)	(1.670.463.423)	(37)	(1.666.903.423)	(4)	(3.560.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(41)**	**(1.670.463.423)**	**(37)**	**(1.666.903.423)**	(4)	**(3.560.000)**

Tabel 46. Rincian Mutasi Alat Besar yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

c. Alat Angkutan (302)

Saldo Alat Angkutan (302) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

302	ALAT ANGKUTAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**541**	**15.207.147.500**	**539**	**15.172.062.500**	**2**	**35.085.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**526**	**12.705.856.891**	**521**	**12.660.951.891**	**5**	**44.905.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	363	13.728.303.657	362	13.728.103.657	1	200.000
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	14	448.576.003	14	448.576.003	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**377**	**14.176.879.660**	**376**	**14.176.679.660**	**1**	**200.000**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(28)	(663.476.903)	(26)	(653.476.903)	(2)	(10.000.000)
301	Penghapusan	(1)	(17.242.500)	(1)	(17.242.500)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(333)	(10.994.869.648)	(331)	(10.994.849.648)	(2)	(20.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(362)**	**(11.675.589.051)**	**(358)**	**(11.665.569.051)**	**(4)**	**(10.020.000)**

Tabel 47. Rincian Mutasi Alat Angkutan yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

d. Alat Bengkel (303)

Saldo Alat Bengkel (303) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**121**	**483.056.380**	**112**	**482.216.380**	**9**	**840.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**98**	**366.387.096**	**80**	**365.013.096**	**18**	**1.374.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	58	162.811.500	53	162.061.500	5	750.000
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	4	4.068.000	4	4.068.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**62**	**166.879.500**	**57**	**166.129.500**	**5**	**750.000**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(39)	(50.210.216)	(25)	(48.926.216)	(14)	(1.284.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(39)**	**(50.210.216)**	**(25)**	**(48.926.216)**	**(14)**	**(1.284.000)**

Tabel 48. Rincian Mutasi Alat Bengkel yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

e. Alat Pertanian (304)

Saldo Alat Pertanian (304) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

304	ALAT PERTANIAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**22**	**37.695.966**	**21**	**37.675.966**	**1**	**20.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**58**	**122.276.376**	**56**	**122.026.375**	**2**	**250.001**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	52	58.128.270	50	58.106.211	2	22.059
Jumlah Mutasi Tambah		**52**	**58.128.270**	**50**	**58.106.211**	**2**	**22.059**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(88)	(142.708.680)	(85)	(142.456.620)	(3)	(252.060)
Jumlah Mutasi Kurang		**(88)**	**(142.708.680)**	**(85)**	**(142.456.620)**	**(3)**	**(252.060)**

Tabel 49. Rincian Mutasi Alat Pertanian yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

f. Alat Kantor dan Rumah (305)

Saldo Alat Kantor dan Rumah (305) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**38.921**	**50.034.948.030**	**32.132**	**49.057.590.647**	**6.789**	**977.357.383**
Saldo per 1 Januari 2024		**49.149**	**62.676.504.912**	**39.469**	**61.319.281.866**	**9.680**	**1.357.223.046**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	19.185	25.557.580.549	15.559	25.023.344.729	3.626	534.235.820
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.302	1.722.630.517	818	1.658.311.453	484	64.319.064
Jumlah Mutasi Tambah		**20.487**	**27.280.211.066**	**16.377**	**26.681.656.182**	**4.110**	**598.554.884**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(812)	(3.627.967.103)	(672)	(3.612.946.915)	(140)	(15.020.188)
301	Penghapusan	(27)	(73.328.800)	(27)	(73.328.800)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(29.876)	(36.220.472.045)	(23.015)	(35.257.071.686)	(6.861)	(963.400.359)
Jumlah Mutasi Kurang		**(30.715)**	**(39.921.767.948)**	**(23.714)**	**(38.943.347.401)**	**(7.001)**	**(978.420.547)**

Tabel 50. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

g. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (306)

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (306) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**2.497**	**7.859.388.583**	**1.960**	**7.815.558.797**	**537**	**43.829.786**
Saldo per 1 Januari 2024		**2.697**	**6.506.875.395**	**2.040**	**6.456.000.713**	**657**	**50.874.682**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.075	5.667.680.373	961	5.648.549.172	114	19.131.201
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	73	175.747.137	59	174.064.137	14	1.683.000
Jumlah Mutasi Tambah		**1.148**	**5.843.427.510**	**1.020**	**5.822.613.309**	**128**	**20.814.201**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(16)	(6.522.000)	(10)	(5.710.000)	(6)	(812.000)
301	Penghapusan	(10)	(8.910.000)	(10)	(8.910.000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1.322)	(4.475.482.322)	(1.080)	(4.448.435.225)	(242)	(27.047.097)
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.348)**	**(4.490.914.322)**	**(1.100)**	**(4.463.055.225)**	**(248)**	**(27.859.097)**

Tabel 51. Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

h. Alat Kedokteran dan Kesehatan (307)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan (307) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**133**	**953.195.837**	**125**	**949.081.417**	**8**	**4.114.420**
Saldo per 1 Januari 2024		**121**	**818.620.359**	**119**	**818.485.359**	**2**	**135.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	22	140.744.670	14	136.630.250	8	4.114.420
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1	5.910.192	1	5.910.192	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**23**	**146.654.862**	**15**	**142.540.442**	**8**	**4.114.420**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(11)	(12.079.384)	(9)	(11.944.384)	(2)	(135.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(11)**	**(12.079.384)**	**(9)**	**(11.944.384)**	**(2)**	**(135.000)**

Tabel 52. Rincian Mutasi Alat Kedokteran dan Kesehatan yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

i. Alat Laboratorium (308)

Saldo Alat Laboratorium (308) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

308	ALAT LABORATORIUM	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**12**	**47.177.500**	**7**	**42.749.500**	**5**	**4.428.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**23**	**134.275.198**	**21**	**132.345.198**	**2**	**1.930.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	8	15.807.500	3	11.379.500	5	4.428.000
Jumlah Mutasi Tambah		**8**	**15.807.500**	**3**	**11.379.500**	**5**	**4.428.000**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(2)	(2.400.000)	(2)	(2.400.000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(17)	(100.505.198)	(15)	(98.575.198)	(2)	(1.930.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(19)**	**(102.905.198)**	**(17)**	**(100.975.198)**	**(2)**	**(1.930.000)**

Tabel 53. Rincian Mutasi Alat Laboratorium yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

j. Alat Persenjataan (309)

Saldo Alat Persenjataan (309) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

309	ALAT PERSENJATAAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**3**	**15.400.001**	**3**	**15.400.001**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**3**	**15.400.001**	**3**	**15.400.001**	**0**	**0**

Tabel 54. Rincian Mutasi Alat Persenjataan yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

k. Komputer (310)

Saldo Komputer (310) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

310	KOMPUTER	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**6.953**	**52.502.050.375**	**6.774**	**52.417.901.224**	**179**	**84.149.151**
Saldo per 1 Januari 2024		**8.336**	**58.923.822.706**	**8.093**	**58.754.874.157**	**243**	**168.948.549**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.000	33.480.920.436	3.941	33.464.185.386	59	16.735.050
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	246	1.973.351.722	246	1.973.351.722	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**4.246**	**35.454.272.158**	**4.187**	**35.437.537.108**	**59**	**16.735.050**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(121)	(1.116.691.811)	(116)	(1.116.297.813)	(5)	(393.998)
301	Penghapusan	(9)	(46.099.000)	(9)	(46.099.000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(5.499)	(40.713.253.678)	(5.381)	(40.612.113.228)	(118)	(101.140.450)
Jumlah Mutasi Kurang		**(5.629)**	**(41.876.044.489)**	**(5.506)**	**(41.774.510.041)**	**(123)**	**(101.534.448)**

Tabel 55. Rincian Mutasi Komputer yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

l. Alat Eksplorasi (311)

Saldo Alat Eksplorasi (311) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

311	ALAT EKSPLORASI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**1**	**1.500.000**	**1**	**1.500.000**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1	1.500.000	1	1.500.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**1**	**1.500.000**	**1**	**1.500.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(2)	(3.000.000)	(2)	(3.000.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(2)**	**(3.000.000)**	**(2)**	**(3.000.000)**	**0**	**0**

Tabel 56. Rincian Mutasi Alat Eksplorasi yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

m. Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian (313)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian (313) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mmutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1**	**3.500.000**	**1**	**3.500.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**1**	**3.500.000**	**1**	**3.500.000**	**0**	**0**

Tabel 57. Rincian Mutasi Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

n. Alat Keselamatan Kerja (315)

Saldo Alat Keselamatan Kerja (315) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

315	ALAT KESELAMATAN KERJA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**4**	**36.400.000**	**4**	**36.400.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**2**	**498.752.021**	**2**	**498.752.021**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4	36.400.000	4	36.400.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**4**	**36.400.000**	**4**	**36.400.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1)	(477.152.021)	(1)	(477.152.021)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1)	(21.600.000)	(1)	(21.600.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(2)**	**(498.752.021)**	**(2)**	**(498.752.021)**	**0**	**0**

Tabel 58. Rincian Mutasi Alat Keselamatan Kerja yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

o. Alat Peralatan Proses/Produksi (317)

Saldo Alat Peralatan Proses/Produksi (317) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**12**	**10.612.400**	**3**	**9.937.400**	**9**	**675.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**13**	**10.623.400**	**4**	**9.948.400**	**9**	**675.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2	2.714.000	2	2.714.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**2**	**2.714.000**	**2**	**2.714.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(3)	(2.725.000)	(3)	(2.725.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(3)**	**(2.725.000)**	**(3)**	**(2.725.000)**	**0**	**0**

Tabel 59. Rincian Mutasi Alat Peralatan Proses/Produksi yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

p. Rambu-rambu (318)

Saldo Rambu-rambu (318) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

318	RAMBU - RAMBU	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**1**	**20.000**	**1**	**20.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1)	(20.000)	(1)	(20.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(1)**	**(20.000)**	**(1)**	**(20.000)**	**0**	**0**

Tabel 60. Rincian Mutasi Rambu-Rambu yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

q. Peralatan Olahraga (319)

Saldo Peralatan Olahraga (319) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

319	PERALATAN OLAH RAGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**32**	**69.369.768**	**28**	**68.609.768**	**4**	**760.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**42**	**23.159.268**	**37**	**22.249.268**	**5**	**910.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5	60.873.500	5	60.873.500	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1	281.000	1	281.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**6**	**61.154.500**	**6**	**61.154.500**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(16)	(14.944.000)	(15)	(14.794.000)	(1)	(150.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(16)**	**(14.944.000)**	**(15)**	**(14.794.000)**	**(1)**	**(150.000)**

Tabel 61. Rincian Mutasi Peralatan Olahraga yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

r. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung (401) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

401	BANGUNAN GEDUNG	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**101**	**17.362.017.781**	**100**	**17.352.397.781**	**1**	**9.620.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**92**	**14.636.839.781**	**91**	**14.627.219.781**	**1**	**9.620.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	59	12.385.851.953	57	11.820.457.953	2	565.394.000
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1	1.210.142.000	1	1.210.142.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**60**	**13.595.993.953**	**58**	**13.030.599.953**	**2**	**565.394.000**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(22)	(4.294.508.000)	(21)	(4.011.811.000)	(1)	(282.697.000)
301	Penghapusan	(2)	(252.510.000)	(2)	(252.510.000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(27)	(6.323.797.953)	(26)	(6.041.100.953)	(1)	(282.697.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(51)**	**(10.870.815.953)**	**(49)**	**(10.305.421.953)**	**(2)**	**(565.394.000)**

Tabel 62. Rincian Mutasi Bangunan Gedung yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

s. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti (404) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**2**	**66.151.000**	**2**	**66.151.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**3**	**255.824.000**	**3**	**255.824.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1)	(189.673.000)	(1)	(189.673.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(1)**	**(189.673.000)**	**(1)**	**(189.673.000)**	**0**	**0**

Tabel 63. Rincian Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

t. Instalasi (503)

Saldo Instalasi (503) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

503	INSTALASI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**5**	**38.162.000**	**5**	**38.162.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**5**	**38.162.000**	**5**	**38.162.000**	**0**	**0**

Tabel 64. Rincian Mutasi Instalasi yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

u. Jaringan (504)

Saldo Jaringan (504) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

504	JARINGAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**0**	**0**

Tabel 65. Rincian Mutasi Jaringan yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

v. Bahan Perpustakaan (601)

Saldo Bahan Perpustakaan (601) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

601	BAHAN PERPUSTAKAAN	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**43.987**	**1.494.283.904**	**43.987**	**1.494.283.904**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**33.275**	**1.446.690.700**	**33.275**	**1.446.690.700**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	26.879	322.887.056	26.879	322.887.056	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	259	7.880.000	259	7.880.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**27.138**	**330.767.056**	**27.138**	**330.767.056**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(8.564)	(31.668.000)	(8.564)	(31.668.000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(7.862)	(251.505.852)	(7.862)	(251.505.852)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(16.426)**	**(283.173.852)**	**(16.426)**	**(283.173.852)**	**0**	**0**

Tabel 66. Rincian Mutasi Bahan Perpustakaan yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

w. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (602)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (602) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**183**	**24.484.805**	**172**	**23.514.805**	**11**	**970.000**
Saldo per 1 Januari 2024		**172**	**29.644.845**	**155**	**28.614.845**	**17**	**1.030.000**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	82	3.658.000	78	3.558.000	4	100.000
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	2	1.157.000	2	1.157.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**84**	**4.815.000**	**80**	**4.715.000**	**4**	**100.000**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(73)	(9.975.040)	(63)	(9.815.040)	(10)	(160.000)
Jumlah Mutasi Kurang		**(73)**	**(9.975.040)**	**(63)**	**(9.815.040)**	**(10)**	**(160.000)**

Tabel 67. Rincian Mutasi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

x. ATR yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (607)

Saldo ATR yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (607) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**1**	**94.150.000**	**1**	**94.150.000**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**3**	**2.736.201.000**	**3**	**2.736.201.000**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(2)	(2.642.051.000)	(2)	(2.642.051.000)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(2)**	**(2.642.051.000)**	**(2)**	**(2.642.051.000)**	**0**	**0**

Tabel 68. Rincian Mutasi ATR yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

y. ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (801)

Saldo ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (801) pada Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

801	ASET TAK BERWUJUD	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Saldo per 31 Desember 2024		**246**	**14.036.616.555**	**246**	**14.036.616.555**	**0**	**0**
Saldo per 1 Januari 2024		**107**	**1.644.900.130**	**107**	**1.644.900.130**	**0**	**0**
Mutasi Tambah							
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	267	13.794.589.598	267	13.794.589.598	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	18	188.225.000	18	188.225.000	0	0
Jumlah Mutasi Tambah		**285**	**13.982.814.598**	**285**	**13.982.814.598**	**0**	**0**
Mutasi Kurang							
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(4)	(105.201.625)	(4)	(105.201.625)	0	0
301	Penghapusan	(10)	(172.402.000)	(10)	(172.402.000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(132)	(1.313.494.548)	(132)	(1.313.494.548)	0	0
Jumlah Mutasi Kurang		**(146)**	**(1.591.098.173)**	**(146)**	**(1.591.098.173)**	**0**	**0**

Tabel 69. Rincian Mutasi ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Satuan Kerja Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp150.116.643.842,00 (*seratus lima puluh miliar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*), dengan rincian nilai penyusutan terlampir pada Laporan Penyusutan Intra (A1).

Koreksi Perubahan Audited

Terdapat perubahan penyajian neraca akibat adanya pemeriksaan BPK RI dan usulan mandiri MA RI, adapun untuk perubahan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Unit/Es	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Unaudited	Nilai Koreksi	Audited
'00501	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	162151	Software	3.850.000	- 3.850.000	-
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	3.850.000	3.850.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 3.850.000	3.850.000	-
	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	162151	Software	57.645.000	- 2.145.000	55.500.000
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	2.145.000	2.145.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 43.770.000	2.145.000	- 41.625.000
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	- 2.145.000	- 2.145.000
	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	- 32.729.025	16.361.625	- 16.367.400
	400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	133111	Gedung dan Bangunan	12.255.164.750	43.300.000	12.298.464.750
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 2.627.449.222	- 1.299.000	- 2.628.748.222

Unit/Es	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Unaudited	Nilai Koreksi	Audited
	400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.830.025.860	- 10.499.998	- 1.840.525.858
			117111	Barang Konsumsi	4.530.650	- 400.450	4.130.200
	401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	- 7.400.000	2.500.000	- 4.900.000
	401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	- 7.400.000	2.500.000	- 4.900.000
	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	133111	Gedung dan Bangunan	26.844.700.237	- 1.015.954.289	25.828.745.948
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.861.989.676	10.159.543	- 1.851.830.133
	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	133111	Gedung dan Bangunan	36.657.875.630	1.847.055	36.659.722.685
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.088.884.145	- 15.416	- 1.088.899.561
	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	133111	Gedung dan Bangunan	21.576.515.175	512.167.888	22.088.683.063
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 647.295.456	- 15.365.037	- 662.660.493
	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	132111	Peralatan dan Mesin	4.941.423.110	5.211.874.906	10.153.298.016
			133111	Gedung dan Bangunan	37.674.318.396	- 5.236.567.396	32.437.751.000
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 3.568.865.856	- 502.342.240	- 4.071.208.096
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 991.746.053	119.459.520	- 872.286.533
			132111	Peralatan dan Mesin	3.972.139.766	5.780.576.254	9.752.716.020
			133111	Gedung dan Bangunan	36.773.337.195	- 6.008.224.147	30.765.113.048
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.170.990.296	- 564.693.340	- 2.735.683.636
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 367.733.372	60.082.241	- 307.651.131
	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	133111	Gedung dan Bangunan	51.444.300.327	- 138.129.076	51.306.171.251
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 818.647.220	1.381.291	- 817.265.929
	402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 891.280.641	- 7.933.737	- 899.214.378
	402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	132111	Peralatan dan Mesin	3.283.264.388	17.450.000	3.300.714.388
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.489.656.619	- 2.181.250	- 2.491.837.869
	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	132111	Peralatan dan Mesin	3.178.578.118	- 370.337	3.178.207.781
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.618.303.070	370.337	- 2.617.932.733
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	348.262.268	- 12.617.468	335.644.800
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	- 348.262.268	12.617.468	- 335.644.800
	477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	162151	Software	24.200.000	- 24.200.000	-
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	24.200.000	24.200.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 24.200.000	24.200.000	-
	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	117111	Barang Konsumsi	40.426.750	- 150.000	40.276.750
	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	162151	Software	243.520.000	- 108.015.000	135.505.000
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	108.015.000	108.015.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 243.520.000	108.015.000	- 135.505.000
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	- 108.015.000	- 108.015.000

Unit/Es	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Unaudited	Nilai Koreksi	Audited
	526728	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	132111	Peralatan dan Mesin	2.328.328.770	133.355.844	2.461.684.614
			133111	Gedung dan Bangunan	38.325.943.051	- 133.355.844	38.192.587.207
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 669.744.359	- 13.335.575	- 683.079.934
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 383.259.431	1.333.559	- 381.925.872
	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	132111	Peralatan dan Mesin	4.106.100.304	- 17.000.000	4.089.100.304
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 3.739.291.324	17.000.000	- 3.722.291.324
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	17.000.000	17.000.000
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	- 17.000.000	- 17.000.000
	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	133111	Gedung dan Bangunan	12.087.762.000	53.284.000	12.141.046.000
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 2.864.313.919	- 6.055.000	- 2.870.368.919
	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	132111	Peralatan dan Mesin	2.736.872.174	10.883.000	2.747.755.174
			133111	Gedung dan Bangunan	5.773.752.500	135.402.000	5.909.154.500
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.515.191.977	- 945.443	- 2.516.137.420
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.467.821.213	- 37.114.780	- 1.504.935.993
	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	117111	Barang Konsumsi	28.467.449	256.400	28.723.849
	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	132111	Peralatan dan Mesin	2.607.922.517	1.648.929.436	4.256.851.953
			133111	Gedung dan Bangunan	-	1.269.375.670	1.269.375.670
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 1.854.165.687	- 152.062.671	- 2.006.228.358
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	- 12.693.757	- 12.693.757
	652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	132111	Peralatan dan Mesin	3.106.198.281	13.137.000	3.119.335.281
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.803.134.506	- 1.637.400	- 2.804.771.906
			117111	Barang Konsumsi	4.410.101.737	1.376.714	4.411.478.451
			162151	Software	51.960.862.040	- 6.992.863.170	44.967.998.870
			162161	Lisensi	32.027.920.561	- 1.222.597.266	30.805.323.295
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.198.677.955	- 269.063.955	929.614.000
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	47.960.000	8.484.524.391	8.532.484.391
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 33.461.429.597	6.962.025.720	- 26.499.403.877
			169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	- 10.061.054.021	1.056.017.432	- 9.005.036.589
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	- 47.960.000	- 8.018.043.152	- 8.066.003.152
	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	132111	Peralatan dan Mesin	3.092.764.756	182.782.840	3.275.547.596
			133111	Gedung dan Bangunan	4.128.765.000	- 190.682.840	3.938.082.160
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.706.496.511	- 18.929.834	- 2.725.426.345
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 680.565.656	31.431.238	- 649.134.418
	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	162151	Software	17.490.000	- 5.940.000	11.550.000
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	5.940.000	5.940.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 17.490.000	5.940.000	- 11.550.000

Unit/Es	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Unaudited	Nilai Koreksi	Audited
	670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	117111	Barang Konsumsi	9.006.915	- 585.000	8.421.915
	672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	162151	Software	60.275.000	- 23.015.000	37.260.000
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	23.015.000	23.015.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 60.275.000	23.015.000	- 37.260.000
	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	162151	Software	3.392.000	- 3.392.000	-
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	3.392.000	3.392.000
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 3.392.000	3.392.000	-
	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	132111	Peralatan dan Mesin	47.932.115.070	4.106.500	47.936.221.570
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 46.963.755.921	- 410.650	- 46.964.166.571
	'097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	162151	Software	187.616.848	- 139.070.548	48.546.300
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	139.070.548	139.070.548
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 180.741.848	132.195.548	- 48.546.300
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	- 132.195.548	- 132.195.548
	'097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	117111	Barang Konsumsi	17.682.596	- 570.580	17.112.016
	'097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	132111	Peralatan dan Mesin	5.126.450.191	25.289.400	5.151.739.591
			133111	Gedung dan Bangunan	3.473.723.276	- 25.289.400	3.448.433.876
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 4.050.915.964	- 2.528.940	- 4.053.444.904
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.324.648.810	- 542.874.154	- 1.867.522.964
	'097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.267.959.460	- 34.637.484	- 1.302.596.944
	'098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	132111	Peralatan dan Mesin	3.448.304.589	21.489.600	3.469.794.189
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.978.626.134	- 2.148.960	- 2.980.775.094
	'098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	133111	Gedung dan Bangunan	3.527.535.208	- 232.272.633	3.295.262.575
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.138.525.157	2.322.727	- 1.136.202.430
	'099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	162151	Software	37.181.829	- 12.181.829	25.000.000
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	12.181.829	12.181.829
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 37.181.829	12.181.829	- 25.000.000
	'099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 17.551.676.549	- 8.742.663	- 17.560.419.212
	'099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	132111	Peralatan dan Mesin	3.031.852.594	21.489.600	3.053.342.194
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 2.315.858.352	- 2.148.960	- 2.318.007.312
	'099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	132111	Peralatan dan Mesin	3.610.926.266	10.323.000	3.621.249.266
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 3.306.906.096	- 727.050	- 3.307.633.146
	'099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	132111	Peralatan dan Mesin	4.841.075.583	5.900.000	4.846.975.583
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 4.111.529.347	- 590.000	- 4.112.119.347
	'099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	132111	Peralatan dan Mesin	12.744.163.903	25.946.250	12.770.110.153
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 8.813.929.414	- 2.594.625	- 8.816.524.039
'00503	477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	117111	Barang Konsumsi	70.663.500	- 185.000	70.478.500

Unit/Es	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Unaudited	Nilai Koreksi	Audited
	'097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	132111	Peralatan dan Mesin	24.412.000.903	- 42.979.200	24.369.021.703
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 21.313.107.506	4.297.920	- 21.308.809.586
			162151	Software	2.545.455.294	- 2.046.367.994	499.087.300
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	2.046.367.994	2.046.367.994
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 2.542.795.632	2.046.367.994	- 496.427.638
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	- 2.046.367.994	- 2.046.367.994
	'099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	117111	Barang Konsumsi	7.005.600	- 374.250	6.631.350
	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	132111	Peralatan dan Mesin	16.305.609.645	- 17.450.000	16.288.159.645
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 14.898.951.555	2.181.250	- 14.896.770.305
'00505	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	162151	Software	1.081.231.552	- 848.092.168	233.139.384
			162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	452.048.578	- 257.048.578	195.000.000
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	1.105.140.746	1.105.140.746
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 1.069.981.552	848.092.168	- 221.889.384
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	- 848.092.168	- 848.092.168
'00507	663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	117111	Barang Konsumsi	251.749.997	28.752.700	280.502.697
			162151	Software	2.867.425.185	- 812.277.846	2.055.147.339
			166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	812.277.846	812.277.846
			169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 2.867.425.185	812.277.846	- 2.055.147.339
			169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	- 812.277.846	- 812.277.846
Grand Total					3.037.540.392.279	-	3.037.540.392.279

Tabel 70 Daftar Koreksi Perubahan Audited

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Tanggal : 06/05/25 8:41 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	22,993,736,223
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	940,857,935
131111	Tanah	20,042,057,573,980
132111	Peralatan dan Mesin	4,820,922,714,383
133111	Gedung dan Bangunan	11,821,324,680,170
134111	Jalan dan Jembatan	19,628,745,150
134112	Irigasi	8,176,807,738
134113	Jaringan	30,594,047,964
135111	Aset Tetap Renovasi	24,589,903,788
135121	Aset Tetap Lainnya	50,443,017,532
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	915,655,052,073
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,750,197,294,537)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,277,932,308,669)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(6,868,145,387)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,711,176,005)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(12,696,162,729)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(591,716,755)
162151	Software	71,232,278,701
162161	Lisensi	32,316,840,061
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,660,012,353
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	160,277,048,880
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,644,900,130
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(150,454,857,442)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(44,029,441,166)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(7,060,151,484)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,636,000,130)
J U M L A H		**31,776,085,831,357**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

Tgl.Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:41 AM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	23,329,265,799
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,087,790,856
131111	Tanah	20,014,331,807,703
132111	Peralatan dan Mesin	5,005,464,644,692
133111	Gedung dan Bangunan	13,252,752,386,154
134111	Jalan dan Jembatan	19,628,745,150
134112	Irigasi	8,176,807,738
134113	Jaringan	30,544,727,964
135111	Aset Tetap Renovasi	1,078,042,792
135121	Aset Tetap Lainnya	50,541,287,526
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	475,263,059,024
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,101,320,297,181)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,664,076,141,301)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(8,754,012,593)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(2,026,055,215)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13,384,438,896)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(587,141,571)
162151	Software	59,883,255,953
162161	Lisensi	32,453,641,795
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,662,130,394
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	147,335,759,876
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	14,036,616,555
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(135,700,921,184)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(40,357,935,770)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(9,261,664,414)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(13,277,550,113)
J U M L A H		**32,153,628,680,333**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	1,197,139,676
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	101,120,358
1010301003	Penjepit Kertas	310,114,820
1010301004	Penghapus/Korektor	58,062,996
1010301005	Buku Tulis	389,292,614
1010301006	Ordner Dan Map	1,498,369,064
1010301007	Penggaris	24,484,687
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	115,855,422
1010301009	Pita Mesin Ketik	3,433,300
1010301010	Alat Perekat	349,714,849
1010301011	Stadler HD	373,867,833
1010301012	Staples	106,230,287
1010301013	Isi Staples	99,625,126
1010301014	Barang Cetakan	2,857,174,619
1010301015	Seminar Kit	860,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	573,246,336
1010302001	Kertas HVS	2,620,037,432
1010302002	Berbagai Kertas	365,913,955
1010302003	Kertas Cover	61,265,125
1010302004	Amplop	327,750,677
1010302005	Kop Surat	195,419,655
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	69,212,320
1010303001	Transparant Sheet	14,235,104
1010303002	Tinta Cetak	86,991,845
1010303003	Plat Cetak	1,220,125
1010303004	Stensil Sheet	49,900
1010303005	Chenical/Bahan Kimia Cetak	450,000
1010303006	Film Cetak	1,965,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	36,336,410
1010304001	Continuous Form	663,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	36,779,460
1010304003	Pita Printer	8,610,700
1010304004	Tinta/Toner Printer	4,718,728,673
1010304005	Disket	5,970,468
1010304006	USB/Flash Disk	207,051,054
1010304007	kartu Memori	597,250
1010304008	CD/DVD Drive	33,496,982
1010304009	Harddisk Internal	868,000
1010304010	Mouse	51,718,202
1010304011	CD/DVD	72,804,766
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	124,831,244
1010306001	Kabel Listrik	35,819,396
1010306002	Lampu Listrik	739,582,155
1010306003	Stop Kontak	29,249,784
1010306004	Saklar	12,619,145

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode	Uraian	Jumlah
1010306005	Stacker	4,483,999
1010306006	Balast	14,333,896
1010306007	Starter	1,916,350
1010306008	Vitting	29,156,250
1010306010	Batu Baterai	294,512,320
1010306999	Alat Listrik Lainnya	75,317,698
1010307001	Bahan Baku Pakaian	21,520,344
1010307002	Penutup Kepala	60,000
1010307006	Atribut	1,833,858,290
1010307007	Perlengkapan Lapangan	611,250
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	46,224,500
1010309001	Meterai	50,792,750
1010309003	Stempel	6,390,898
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	59,231,954
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	16,721,700
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	17,473,334
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	10,254,500
1010312999	Alat/Bahan Penunjang Kegiatan Keamanan Lainnya	195,800
1010313002	Minyak Pelumas (Barang Konsumsi)	16,000
1010313999	Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya (Barang Konsumsi)	65,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	84,811,674
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	253,714,326
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	514,250
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	609,326
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	23,564,844
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	228,896,160
1010317002	Label Legalisasi	50,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,335,138,572
Jumlah Barang Konsumsi		**23,329,265,799**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305001	Sapu Dan Sikat	63,772,959
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	110,604,031
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	11,242,382
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	69,975,820
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	2,350,660
1010305006	Alat Pengikat	12,172,910
1010305007	Peralatan Ledeng	138,500
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	348,526,620
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	7,500,256
1010305012	Pengharum Ruangan	266,199,787
1010305013	Kuas	282,000
1010305014	Segel/Tanda Pengaman	207,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	194,817,931
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**1,087,790,856**
TOTAL		**24,417,056,655**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 686,957 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 75,033,553 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**8,050,474**	**20,042,057,573,980**	**338,058**	**150,650,219,638**	**327,881**	**178,375,985,915**	**8,060,651**	**20,014,331,807,703**
20101	TANAH PERSIL	7,943,391	19,896,983,356,529	327,303	146,569,531,638	327,644	178,375,985,915	7,943,050	19,865,176,902,252
20102	TANAH NON PERSIL	103,099	142,560,890,451	10,755	4,080,688,000	0	0	113,854	146,641,578,451
20103	LAPANGAN	3,984	2,513,327,000	0	0	237	0	3,747	2,513,327,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**616,912**	**4,820,922,714,383**	**24,204**	**395,274,813,126**	**24,148**	**210,732,882,817**	**616,968**	**5,005,464,644,692**
30101	ALAT BESAR DARAT	1	16,500,000	1	30,480,711	0	0	2	46,980,711
30103	ALAT BANTU	1,322	184,814,787,539	95	24,954,085,172	46	4,144,063,662	1,371	205,624,809,049
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7,412	611,568,673,931	148	33,689,354,318	370	17,311,157,676	7,190	627,946,870,573
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	900	2,196,254,806	25	88,395,000	39	116,780,511	886	2,167,869,295
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	64	9,832,226,464	9	241,221,038	2	1,900,000	71	10,071,547,502
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	276	5,267,085,728	11	63,610,626	8	26,345,530	279	5,304,350,824
30303	ALAT UKUR	265	1,585,012,401	0	0	47	156,985,970	218	1,428,026,431
30401	ALAT PENGOLAHAN	493	2,011,450,720	62	207,030,010	101	207,356,221	454	2,011,124,509
30501	ALAT KANTOR	94,410	525,711,084,158	2,941	21,936,334,913	3,577	10,911,143,516	93,774	536,736,275,555
30502	ALAT RUMAH TANGGA	368,600	1,285,102,054,444	13,856	209,969,935,940	12,967	104,537,214,763	369,489	1,390,534,775,621
30601	ALAT STUDIO	19,344	191,030,194,602	720	13,322,603,241	605	4,683,910,592	19,459	199,668,887,251
30602	ALAT KOMUNIKASI	8,167	50,036,353,114	225	1,940,460,309	377	1,239,886,867	8,015	50,736,926,556
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,099	121,223,681,360	40	12,663,686,308	59	7,165,647,110	1,080	126,721,720,558
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	12	133,372,941	0	0	0	0	12	133,372,941
30701	ALAT KEDOKTERAN	2,350	12,025,325,455	82	641,502,134	49	189,207,250	2,383	12,477,620,339
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	187	1,047,115,719	11	70,016,500	0	0	198	1,117,132,219
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,087	11,761,055,777	48	1,618,080,916	55	609,610,050	1,080	12,769,526,643
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	13	531,578,041	34	68,775,267	1	7,150,000	46	593,203,308
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	172	931,201,333	4	6,520,000	7	18,010,000	169	919,711,333
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	7	750,630,700	0	0	0	0	7	750,630,700
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	10	42,118,878	3	27,647,862	0	0	13	69,766,740
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	8	1,416,742,840	11	306,020,240	1	5,250,000	18	1,717,513,080
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	15	176,037,000	0	0	0	0	15	176,037,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	45	6,644,713,880	2	75,757,500	2	1,000,000	45	6,719,471,380
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	154	1,525,509,571	7	45,872,600	4	12,461,080	157	1,558,921,091
31001	KOMPUTER UNIT	67,657	899,457,573,382	1,652	28,976,319,442	2,904	35,533,051,217	66,405	892,900,841,607
31002	PERALATAN KOMPUTER	41,601	864,604,800,317	4,144	41,364,660,714	2,880	21,432,672,262	42,865	884,536,788,769
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	8	272,740,109	0	0	0	0	8	272,740,109
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	27,540,000	6	12,165,000	0	0	10	39,705,000
31301	SUMUR	11	468,549,059	1	71,500,000	0	0	12	540,049,059
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	12	5,973,000	0	0	0	0	12	5,973,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	0	0	0	0	18	17,655,000
31501	ALAT DETEKSI	172	330,157,500	0	0	0	0	172	330,157,500
31502	ALAT PELINDUNG	10	5,490,450	0	0	0	0	10	5,490,450
31503	ALAT SAR	13	1,490,739,650	0	0	0	0	13	1,490,739,650
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	748	21,082,745,427	59	2,466,771,627	37	1,140,311,540	770	22,409,205,514
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	45	288,653,222	3	203,525,972	2	9,242,500	46	482,936,694
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	17	326,494,784	1	188,635,712	2	2,714,000	16	512,416,496
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	21	4,038,382,296	1	3,500,000	1	1,208,937,000	21	2,832,945,296
31901	PERALATAN OLAH RAGA	161	1,120,608,785	2	20,344,054	5	60,873,500	158	1,080,079,339
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8,796**	**11,821,324,680,170**	**451**	**1,842,634,659,592**	**370**	**411,206,953,608**	**8,877**	**13,252,752,386,154**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,344	10,351,462,377,436	306	1,708,438,244,538	249	369,246,490,372	3,401	11,690,654,131,602
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,714	1,220,293,141,570	110	89,952,448,865	115	33,961,656,694	4,709	1,276,283,933,741
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	407,669,000	0	0	0	0	1	407,669,000
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	6	2,033,349,084	0	0	0	0	6	2,033,349,084
40401	TUGU/TANDA BATAS	731	247,128,143,080	35	44,243,966,189	6	7,998,806,542	760	283,373,302,727
134111	**Jalan dan Jembatan**	**3,039**	**19,628,745,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,039**	**19,628,745,150**
50101	JALAN	3,009	17,843,242,150	0	0	0	0	3,009	17,843,242,150
50102	JEMBATAN	30	1,785,503,000	0	0	0	0	30	1,785,503,000
134112	**Irigasi**	**75**	**8,176,807,738**	**2**	**224,756,352**	**2**	**224,756,352**	**75**	**8,176,807,738**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0	0	0	0	0	0	0
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	0	0	0	0	0	0	0	0
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0	0	0	0	0	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	230,653,264	0	0	0	0	1	230,653,264
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	54	4,838,178,474	0	0	0	0	54	4,838,178,474
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	54,664,000	0	0	0	0	1	54,664,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	19	3,053,312,000	2	224,756,352	2	224,756,352	19	3,053,312,000
134113	**Jaringan**	**168**	**30,594,047,964**	**8**	**292,557,446**	**10**	**341,877,446**	**166**	**30,544,727,964**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	26	3,499,848,930	0	0	0	0	26	3,499,848,930
50302	INSTALASI AIR KOTOR	19	1,795,564,901	0	0	0	0	19	1,795,564,901
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	50,962,510	0	0	0	0	1	50,962,510
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	17,981,745,413	0	0	0	0	40	17,981,745,413
50307	INSTALASI PERTAHANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	23	4,431,216,855	8	292,557,446	9	311,877,446	22	4,411,896,855
50401	JARINGAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50402	JARINGAN LISTRIK	38	1,897,870,397	0	0	0	0	38	1,897,870,397
50403	JARINGAN TELEPON	21	936,838,958	0	0	1	30,000,000	20	906,838,958
50404	JARINGAN GAS	0	0	0	0	0	0	0	0
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**10**	**24,589,903,788**	**30**	**8,495,979,266**	**36**	**32,007,840,262**	**4**	**1,078,042,792**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	8	21,980,619,788	29	8,422,979,266	33	29,325,556,262	4	1,078,042,792
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	2,609,284,000	1	73,000,000	3	2,682,284,000	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,056,533**	**50,443,017,532**	**8,878**	**622,696,700**	**27,057**	**524,426,706**	**1,038,354**	**50,541,287,526**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,054,422	35,789,025,501	8,857	435,171,300	26,964	519,638,706	1,036,315	35,704,558,095
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	39	7,902,158,518	0	0	0	0	39	7,902,158,518
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	734	3,856,716,379	13	3,510,000	15	1,230,000	732	3,858,996,379
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	458	2,271,517,917	8	184,015,400	3	1,207,000	463	2,454,326,317
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	379	577,855,267	0	0	2	1,150,000	377	576,705,267
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	501	45,743,950	0	0	73	1,201,000	428	44,542,950
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**84,652**	**160,277,048,880**	**49,413**	**99,825,824,421**	**47,415**	**112,767,113,425**	**86,650**	**147,335,759,876**
20101	TANAH PERSIL	600	4,000,000	0	0	0	0	600	4,000,000
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	74	2,691,189,209	36	1,125,131,000	37	1,666,903,423	73	2,149,416,786
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	485	12,013,469,418	363	14,130,526,599	336	11,610,203,517	512	14,533,792,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	34	24,077,473	13	46,153,061	22	55,365,534	25	14,865,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2	623,405,000	0	0	0	0	2	623,405,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	2	2,400,000	1	1,200,000	1	1,200,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	15	32,244,600	6	4,740,530	11	8,307,630	10	28,677,500
30303	ALAT UKUR	65	332,768,496	49	158,988,970	13	39,418,586	101	452,338,880
30401	ALAT PENGOLAHAN	56	122,026,375	50	58,106,211	85	142,456,620	21	37,675,966
30501	ALAT KANTOR	9,336	17,384,287,466	3,590	7,385,872,738	5,351	13,084,561,749	7,575	11,685,598,455
30502	ALAT RUMAH TANGGA	30,133	43,934,994,400	12,787	19,295,783,444	18,363	25,858,785,652	24,557	37,371,992,192
30601	ALAT STUDIO	957	3,143,103,003	601	2,067,703,508	592	2,311,407,679	966	2,899,398,832
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,000	2,134,462,650	375	1,215,023,061	464	1,102,429,694	911	2,247,056,017
30603	PERALATAN PEMANCAR	82	1,176,785,060	44	2,539,886,740	43	1,047,567,852	83	2,669,103,948
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1	1,650,000	0	0	1	1,650,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	103	440,827,859	15	142,540,442	9	11,944,384	109	571,423,917
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	16	377,657,500	0	0	0	0	16	377,657,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	16	98,902,148	1	2,689,500	14	79,902,148	3	21,689,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	1	7,150,000	0	0	1	7,150,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	33,443,050	1	1,540,000	3	21,073,050	3	13,910,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:42 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	4,400,001	0	0	0	0	2	4,400,001
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	4,796	49,988,494,609	2,749	30,730,530,462	3,411	35,241,120,346	4,134	45,477,904,725
31002	PERALATAN KOMPUTER	3,297	8,766,379,548	1,438	4,707,006,646	2,095	6,533,389,695	2,640	6,939,996,499
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	1,500,000	1	1,500,000	2	3,000,000	0	0
31301	SUMUR	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	498,752,021	4	36,400,000	2	498,752,021	4	36,400,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	9,948,400	2	2,714,000	3	2,725,000	3	9,937,400
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	20,000	0	0	1	20,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	37	22,249,268	6	61,154,500	15	14,794,000	28	68,609,768
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	42	10,052,522,871	31	9,191,013,953	26	7,905,864,953	47	11,337,671,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	49	4,574,696,910	27	3,839,586,000	23	2,399,557,000	53	6,014,725,910
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	255,824,000	0	0	1	189,673,000	2	66,151,000
50101	JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	7,692,000	0	0	0	0	1	7,692,000
50310	INSTALASI LAIN	2	25,370,000	0	0	0	0	2	25,370,000
50401	JARINGAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50403	JARINGAN TELEPON	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	33,257	1,326,896,701	27,123	329,537,056	16,405	281,368,852	43,975	1,375,064,905
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	18	119,793,999	15	1,230,000	21	1,805,000	12	119,218,999
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	7	23,701,805	5	2,364,000	7	6,447,000	5	19,618,805
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	22	2,452,000	2	1,150,000	18	2,693,000	6	909,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	126	2,461,040	73	1,201,000	38	675,040	161	2,987,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	126,917,000	1	126,917,000	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	2	2,609,284,000	1	2,515,134,000	1	94,150,000
TOTAL			**36,978,014,539,585**		**2,498,021,506,541**		**946,181,836,531**		**38,529,854,209,595**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:42 AM

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**Peralatan dan Mesin**	**103,469**	**32,309,734,950**	**5,120**	**2,492,967,899**	**4,024**	**698,102,394**	**104,565**	**34,104,600,455**
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	148	48,521,543	19	8,611,400	13	7,262,300	154	49,870,643
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	59	631,791,700	2	10,000,000	37	6,952,700	24	634,839,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	44	28,815,780	0	0	6	5,532,500	38	23,283,280
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	15	9,317,000	0	0	0	0	15	9,317,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	125	33,955,779	6	1,426,400	5	750,000	126	34,632,179
30303	ALAT UKUR	44	13,806,700	1	527,340	0	0	45	14,334,040
30401	ALAT PENGOLAHAN	530	25,448,719	1	900,000	5	2,764,119	526	23,584,600
30501	ALAT KANTOR	20,512	3,483,217,953	545	246,961,006	1,331	126,448,983	19,726	3,603,729,976
30502	ALAT RUMAH TANGGA	69,205	24,148,391,744	4,150	1,972,593,312	2,413	483,297,915	70,942	25,637,687,141
30601	ALAT STUDIO	2,828	891,958,540	66	48,162,142	60	5,449,000	2,834	934,671,682
30602	ALAT KOMUNIKASI	2,501	516,982,601	65	25,636,384	54	13,682,201	2,512	528,936,784
30603	PERALATAN PEMANCAR	167	20,851,589	5	4,588,155	0	0	172	25,439,744
30701	ALAT KEDOKTERAN	1,368	627,979,041	12	7,838,000	17	12,577,420	1,363	623,239,621
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	270	105,269,911	11	4,003,800	0	0	281	109,273,711
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	468	64,283,061	49	30,935,272	16	11,760,506	501	83,457,827
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	13	7,220,240	0	0	0	0	13	7,220,240
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	18	14,410,001	2	1,900,000	0	0	20	16,310,001
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5	350,000	4	3,885,000	0	0	9	4,235,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	217	29,078,300	10	3,908,200	5	2,317,200	222	30,669,300
31001	KOMPUTER UNIT	253	239,063,706	0	0	1	390,000	252	238,673,706
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,902	1,213,559,731	161	118,306,488	59	17,095,050	3,004	1,314,771,169
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	1	194,250	0	0	0	0	1	194,250
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2	594,000	0	0	0	0	2	594,000
31502	ALAT PELINDUNG	6	675,276	9	1,782,000	0	0	15	2,457,276
31503	ALAT SAR	4	1,041,625	0	0	0	0	4	1,041,625
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	145	82,799,588	2	1,003,000	0	0	147	83,802,588
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	27	13,302,425	0	0	2	1,822,500	25	11,479,925
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	175,000	0	0	0	0	2	175,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1,574	53,914,350	0	0	0	0	1,574	53,914,350
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	15	2,614,797	0	0	0	0	15	2,614,797
133111	**Gedung dan Bangunan**	**175**	**2,422,491,217**	**210**	**919,874,741**	**199**	**1,116,893,042**	**186**	**2,225,472,916**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	138	2,064,187,851	202	831,096,007	191	1,055,696,228	149	1,839,587,630
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	11	163,585,526	4	64,263,920	2	34,082,000	13	193,767,446
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	17,012,953	0	0	1	2,500,000	4	14,512,953
40401	TUGU/TANDA BATAS	21	177,704,887	4	24,514,814	5	24,614,814	20	177,604,887
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**3,599**	**204,879,758**	**3**	**750,000**	**4**	**100,000**	**3,598**	**205,529,758**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	48	48,000	0	0	0	0	48	48,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	286,000	0	0	0	0	1	286,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	11	522,000	0	0	0	0	11	522,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	186	8,315,009	0	0	4	100,000	182	8,215,009
60501	TANAMAN	3,353	195,708,749	3	750,000	0	0	3,356	196,458,749
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**10,641**	**1,637,875,278**	**4,328**	**1,214,672,614**	**7,414**	**1,690,699,152**	**7,555**	**1,161,848,740**
30103	ALAT BANTU	0	0	4	3,560,000	4	3,560,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	44,905,000	1	200,000	4	10,020,000	2	35,085,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	15	1,114,000	5	750,000	12	1,074,000	8	790,000
30303	ALAT UKUR	3	260,000	0	0	2	210,000	1	50,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	2	250,001	2	22,059	3	252,060	1	20,000
30501	ALAT KANTOR	1,939	251,576,562	1,474	135,695,766	2,031	228,924,589	1,382	158,347,739
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,741	1,105,646,484	2,636	462,859,118	4,970	749,495,958	5,407	819,009,644
30601	ALAT STUDIO	435	18,287,500	65	5,515,000	119	8,045,500	381	15,757,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	218	32,064,382	63	15,299,201	127	19,513,597	154	27,849,986
30603	PERALATAN PEMANCAR	4	522,800	0	0	2	300,000	2	222,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	10,000	8	4,114,420	1	10,000	8	4,114,420
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	125,000	0	0	1	125,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	1,930,000	5	4,428,000	2	1,930,000	5	4,428,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	57	107,049,675	1	390,000	32	76,238,000	26	31,201,675
31002	PERALATAN KOMPUTER	186	61,898,874	58	16,345,050	91	25,296,448	153	52,947,476
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	675,000	0	0	0	0	9	675,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	5	910,000	0	0	1	150,000	4	760,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	9,620,000	2	565,394,000	2	565,394,000	1	9,620,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	17	1,030,000	4	100,000	10	160,000	11	970,000
TOTAL			**36,574,981,203**		**4,628,265,254**		**3,505,794,588**		**37,697,451,869**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**8,050,474**	**20,042,057,573,980**	**338,058**	**150,650,219,638**	**327,881**	**178,375,985,915**	**8,060,651**	**20,014,331,807,703**
20101	TANAH PERSIL	7,943,391	19,896,983,356,529	327,303	146,569,531,638	327,644	178,375,985,915	7,943,050	19,865,176,902,252
20102	TANAH NON PERSIL	103,099	142,560,890,451	10,755	4,080,688,000	0	0	113,854	146,641,578,451
20103	LAPANGAN	3,984	2,513,327,000	0	0	237	0	3,747	2,513,327,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**720,381**	**4,853,232,449,333**	**29,324**	**397,767,781,025**	**28,172**	**211,430,985,211**	**721,533**	**5,039,569,245,147**
30101	ALAT BESAR DARAT	1	16,500,000	1	30,480,711	0	0	2	46,980,711
30103	ALAT BANTU	1,470	184,863,309,082	114	24,962,696,572	59	4,151,325,962	1,525	205,674,679,692
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7,471	612,200,465,631	150	33,699,354,318	407	17,318,110,376	7,214	628,581,709,573
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	944	2,225,070,586	25	88,395,000	45	122,313,011	924	2,191,152,575
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	79	9,841,543,464	9	241,221,038	2	1,900,000	86	10,080,864,502
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	401	5,301,041,507	17	65,037,026	13	27,095,530	405	5,338,983,003
30303	ALAT UKUR	309	1,598,819,101	1	527,340	47	156,985,970	263	1,442,360,471
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,023	2,036,899,439	63	207,930,010	106	210,120,340	980	2,034,709,109
30501	ALAT KANTOR	114,922	529,194,302,111	3,486	22,183,295,919	4,908	11,037,592,499	113,500	540,340,005,531
30502	ALAT RUMAH TANGGA	437,805	1,309,250,446,188	18,006	211,942,529,252	15,380	105,020,512,678	440,431	1,416,172,462,762
30601	ALAT STUDIO	22,172	191,922,153,142	786	13,370,765,383	665	4,689,359,592	22,293	200,603,558,933
30602	ALAT KOMUNIKASI	10,668	50,553,335,715	290	1,966,096,693	431	1,253,569,068	10,527	51,265,863,340
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,266	121,244,532,949	45	12,668,274,463	59	7,165,647,110	1,252	126,747,160,302
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	12	133,372,941	0	0	0	0	12	133,372,941
30701	ALAT KEDOKTERAN	3,718	12,653,304,496	94	649,340,134	66	201,784,670	3,746	13,100,859,960
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	457	1,152,385,630	22	74,020,300	0	0	479	1,226,405,930
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,555	11,825,338,838	97	1,649,016,188	71	621,370,556	1,581	12,852,984,470
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	26	538,798,281	34	68,775,267	1	7,150,000	59	600,423,548
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	190	945,611,334	6	8,420,000	7	18,010,000	189	936,021,334
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	7	750,630,700	0	0	0	0	7	750,630,700
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	10	42,118,878	3	27,647,862	0	0	13	69,766,740
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	9	1,416,892,840	11	306,020,240	1	5,250,000	19	1,717,663,080
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	15	176,037,000	0	0	0	0	15	176,037,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	50	6,645,063,880	6	79,642,500	2	1,000,000	54	6,723,706,380
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	371	1,554,587,871	17	49,780,800	9	14,778,280	379	1,589,590,391
31001	KOMPUTER UNIT	67,910	899,696,637,088	1,652	28,976,319,442	2,905	35,533,441,217	66,657	893,139,515,313
31002	PERALATAN KOMPUTER	44,503	865,818,360,048	4,305	41,482,967,202	2,939	21,449,767,312	45,869	885,851,559,938
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	8	272,740,109	0	0	0	0	8	272,740,109
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	5	27,734,250	6	12,165,000	0	0	11	39,899,250
31301	SUMUR	11	468,549,059	1	71,500,000	0	0	12	540,049,059
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	14	6,567,000	0	0	0	0	14	6,567,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	0	0	0	0	18	17,655,000
31501	ALAT DETEKSI	172	330,157,500	0	0	0	0	172	330,157,500
31502	ALAT PELINDUNG	16	6,165,726	9	1,782,000	0	0	25	7,947,726
31503	ALAT SAR	17	1,491,781,275	0	0	0	0	17	1,491,781,275
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	893	21,165,545,015	61	2,467,774,627	37	1,140,311,540	917	22,493,008,102
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	72	301,955,647	3	203,525,972	4	11,065,000	71	494,416,619
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	19	326,669,784	1	188,635,712	2	2,714,000	18	512,591,496
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1,595	4,092,296,646	1	3,500,000	1	1,208,937,000	1,595	2,886,859,646
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	176	1,123,223,582	2	20,344,054	5	60,873,500	173	1,082,694,136
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8,971**	**11,823,747,171,387**	**661**	**1,843,554,534,333**	**569**	**412,323,846,650**	**9,063**	**13,254,977,859,070**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,482	10,353,526,565,287	508	1,709,269,340,545	440	370,302,186,600	3,550	11,692,493,719,232
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,725	1,220,456,727,096	114	90,016,712,785	117	33,995,738,694	4,722	1,276,477,701,187
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	6	424,681,953	0	0	1	2,500,000	5	422,181,953
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	6	2,033,349,084	0	0	0	0	6	2,033,349,084
40401	TUGU/TANDA BATAS	752	247,305,847,967	39	44,268,481,003	11	8,023,421,356	780	283,550,907,614
134111	**Jalan dan Jembatan**	**3,039**	**19,628,745,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,039**	**19,628,745,150**
50101	JALAN	3,009	17,843,242,150	0	0	0	0	3,009	17,843,242,150
50102	JEMBATAN	30	1,785,503,000	0	0	0	0	30	1,785,503,000
134112	**Irigasi**	**75**	**8,176,807,738**	**2**	**224,756,352**	**2**	**224,756,352**	**75**	**8,176,807,738**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0	0	0	0	0	0	0
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	0	0	0	0	0	0	0	0
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0	0	0	0	0	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	230,653,264	0	0	0	0	1	230,653,264
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	54	4,838,178,474	0	0	0	0	54	4,838,178,474
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	54,664,000	0	0	0	0	1	54,664,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	19	3,053,312,000	2	224,756,352	2	224,756,352	19	3,053,312,000
134113	**Jaringan**	**168**	**30,594,047,964**	**8**	**292,557,446**	**10**	**341,877,446**	**166**	**30,544,727,964**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	26	3,499,848,930	0	0	0	0	26	3,499,848,930
50302	INSTALASI AIR KOTOR	19	1,795,564,901	0	0	0	0	19	1,795,564,901
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	50,962,510	0	0	0	0	1	50,962,510
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	17,981,745,413	0	0	0	0	40	17,981,745,413
50307	INSTALASI PERTAHANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	23	4,431,216,855	8	292,557,446	9	311,877,446	22	4,411,896,855

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50401	JARINGAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	38	1,897,870,397	0	0	0	0	38	1,897,870,397
50403	JARINGAN TELEPON	21	936,838,958	0	0	1	30,000,000	20	906,838,958
50404	JARINGAN GAS	0	0	0	0	0	0	0	0
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**10**	**24,589,903,788**	**30**	**8,495,979,266**	**36**	**32,007,840,262**	**4**	**1,078,042,792**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	8	21,980,619,788	29	8,422,979,266	33	29,325,556,262	4	1,078,042,792
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	2,609,284,000	1	73,000,000	3	2,682,284,000	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,060,132**	**50,647,897,290**	**8,881**	**623,446,700**	**27,061**	**524,526,706**	**1,041,952**	**50,746,817,284**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,054,470	35,789,073,501	8,857	435,171,300	26,964	519,638,706	1,036,363	35,704,606,095
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	39	7,902,158,518	0	0	0	0	39	7,902,158,518
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	734	3,856,716,379	13	3,510,000	15	1,230,000	732	3,858,996,379
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	459	2,271,803,917	8	184,015,400	3	1,207,000	464	2,454,612,317
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	390	578,377,267	0	0	2	1,150,000	388	577,227,267
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	687	54,058,959	0	0	77	1,301,000	610	52,757,959
60501	TANAMAN	3,353	195,708,749	3	750,000	0	0	3,356	196,458,749
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**95,293**	**161,914,924,158**	**53,741**	**101,040,497,035**	**54,829**	**114,457,812,577**	**94,205**	**148,497,608,616**
20101	TANAH PERSIL	600	4,000,000	0	0	0	0	600	4,000,000
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	74	2,691,189,209	40	1,128,691,000	41	1,670,463,423	73	2,149,416,786
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	490	12,058,374,418	364	14,130,726,599	340	11,620,223,517	514	14,568,877,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	34	24,077,473	13	46,153,061	22	55,365,534	25	14,865,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2	623,405,000	0	0	0	0	2	623,405,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	2	2,400,000	1	1,200,000	1	1,200,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	30	33,358,600	11	5,490,530	23	9,381,630	18	29,467,500
30303	ALAT UKUR	68	333,028,496	49	158,988,970	15	39,628,586	102	452,388,880
30401	ALAT PENGOLAHAN	58	122,276,376	52	58,128,270	88	142,708,680	22	37,695,966
30501	ALAT KANTOR	11,275	17,635,864,028	5,064	7,521,568,504	7,382	13,313,486,338	8,957	11,843,946,194
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,874	45,040,640,884	15,423	19,758,642,562	23,333	26,608,281,610	29,964	38,191,001,836
30601	ALAT STUDIO	1,392	3,161,390,503	666	2,073,218,508	711	2,319,453,179	1,347	2,915,155,832
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,218	2,166,527,032	438	1,230,322,262	591	1,121,943,291	1,065	2,274,906,003
30603	PERALATAN PEMANCAR	86	1,177,307,860	44	2,539,886,740	45	1,047,867,852	85	2,669,326,748
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1	1,650,000	0	0	1	1,650,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	104	440,837,859	23	146,654,862	10	11,954,384	117	575,538,337
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	17	377,782,500	0	0	1	125,000	16	377,657,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	18	100,832,148	6	7,117,500	16	81,832,148	8	26,117,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	1	7,150,000	0	0	1	7,150,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	33,443,050	1	1,540,000	3	21,073,050	3	13,910,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	4,400,001	0	0	0	0	2	4,400,001
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
31001	KOMPUTER UNIT	4,853	50,095,544,284	2,750	30,730,920,462	3,443	35,317,358,346	4,160	45,509,106,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	3,483	8,828,278,422	1,496	4,723,351,696	2,186	6,558,686,143	2,793	6,992,943,975
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	1,500,000	1	1,500,000	2	3,000,000	0	0
31301	SUMUR	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	498,752,021	4	36,400,000	2	498,752,021	4	36,400,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	13	10,623,400	2	2,714,000	3	2,725,000	12	10,612,400
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	20,000	0	0	1	20,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	42	23,159,268	6	61,154,500	16	14,944,000	32	69,369,768
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	43	10,062,142,871	33	9,756,407,953	28	8,471,258,953	48	11,347,291,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	49	4,574,696,910	27	3,839,586,000	23	2,399,557,000	53	6,014,725,910
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	255,824,000	0	0	1	189,673,000	2	66,151,000
50101	JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	7,692,000	0	0	0	0	1	7,692,000
50310	INSTALASI LAIN	2	25,370,000	0	0	0	0	2	25,370,000
50401	JARINGAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50403	JARINGAN TELEPON	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	33,257	1,326,896,701	27,123	329,537,056	16,405	281,368,852	43,975	1,375,064,905
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	18	119,793,999	15	1,230,000	21	1,805,000	12	119,218,999
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	7	23,701,805	5	2,364,000	7	6,447,000	5	19,618,805
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	22	2,452,000	2	1,150,000	18	2,693,000	6	909,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	143	3,491,040	77	1,301,000	48	835,040	172	3,957,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	126,917,000	1	126,917,000	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	2	2,609,284,000	1	2,515,134,000	1	94,150,000
TOTAL			**37,014,589,520,788**		**2,502,649,771,795**		**949,687,631,119**		**38,567,551,661,464**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	**Software**	**1,503**	**71,232,278,701**	**21**	**1,014,912,625**	**262**	**12,363,935,373**	**1,262**	**59,883,255,953**
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,503	71,232,278,701	21	1,014,912,625	262	12,363,935,373	1,262	59,883,255,953
162161	**Lisensi**	**110**	**32,316,840,061**	**21**	**1,513,284,000**	**18**	**1,376,482,266**	**113**	**32,453,641,795**
80101	ASET TAK BERWUJUD	110	32,316,840,061	21	1,513,284,000	18	1,376,482,266	113	32,453,641,795
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**	**10**	**1,804,868,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1,804,868,600**
80101	ASET TAK BERWUJUD	10	1,804,868,600	0	0	0	0	10	1,804,868,600
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**	**217**	**4,660,012,353**	**19**	**644,982,199**	**8**	**642,864,158**	**228**	**4,662,130,394**
80101	ASET TAK BERWUJUD	217	4,660,012,353	19	644,982,199	8	642,864,158	228	4,662,130,394
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan**	**107**	**1,644,900,130**	**285**	**13,982,814,598**	**146**	**1,591,098,173**	**246**	**14,036,616,555**
80101	ASET TAK BERWUJUD	107	1,644,900,130	285	13,982,814,598	146	1,591,098,173	246	14,036,616,555
TOTAL			**111,658,899,845**		**17,155,993,422**		**15,974,379,970**		**112,840,513,297**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7
131111	**Tanah**	**5**	**0**	**0**	**5**
2010311001	Tanah Untuk Monumen	5	0	0	5
132111	**Peralatan dan Mesin**	**1**	**0**	**0**	**1**
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	0	0	1
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**82**	**0**	**0**	**82**
6010101001	Monografi	82	0	0	82
TOTAL		**88**	**0**	**0**	**88**

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL MAHKAMAH AGUNG

KD KL 005

Kode LAP : daftar_bmn_dbh_kl_poc

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.04.001	1	Sepeda Motor	BAIK	20-10-2007	Honda	-	20-10-2007	16,975,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
2	3.02.01.04.001	2	Sepeda Motor	BAIK	27-11-2007	-	-	27-11-2007	12,400,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									29,375,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.04.001	3	Sepeda Motor	BAIK	01-07-2006	HONDA	-	01-07-2006	14,575,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									43,950,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	BAIK	07-03-2007	Yamaha Yupiter Z	-	07-03-2007	13,000,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									56,950,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.04.001	16	Sepeda Motor	BAIK	16-06-2008	JUFITER MX/AT	-	16-06-2008	15,469,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									72,419,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	4	Lap Top	BAIK	21-02-2011	-	-	21-02-2011	14,820,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									87,239,000		

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL MAHKAMAH AGUNG

KD KL 005

Kode LAP : daftar_bmn_dbh_kl_poc

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	4	Lap Top	BAIK	16-08-2011	TOSHIBA	-	16-08-2011	15,000,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									102,239,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	5	Lap Top	BAIK	21-02-2011	-	-	21-02-2011	14,820,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									117,059,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	5	Lap Top	BAIK	06-02-2009	Intel Pentium core 2 Duo	-	06-02-2009	10,875,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									127,934,000		

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.003	1	Note Book	BAIK	13-03-2007	Toshiba	-	13-03-2007	20,000,000	-	Hilang-Usul Hapus SIMAK
JUMLAH									147,934,000		

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.01.03.04.003	3	Stationary Generating Set	RUSAK BERAT	14-12-	FIRMAN	2688/SEK.PT.W7-U/PL1.2.5/XII/2023	14-12-2011	7,135,000	Surat Keterangan Reklasifikasi BMN	RB-Henti Guna
JUMLAH									7,135,000		7,135,000

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.01.03.05.010	1	Pompa Air	RUSAK BERAT	03-03-	NATIONAL	-	03-03-2009	2,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									9,635,000		9,635,000

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.01.03.05.010	1	Pompa Air	RUSAK BERAT	18-11-	Pompa Zumi Zu 100 BIt	-	18-11-2020	820,000	-	RB-Henti Guna
2	3.01.03.05.010	2	Pompa Air	RUSAK BERAT	27-11-	Pompa air shimisu jet 108 bit	-	27-11-2020	950,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									11,405,000		11,405,000

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.01.03.05.010	3	Pompa Air	RUSAK BERAT	03-03-	NATIONAL	-	03-03-2009	2,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									13,905,000		13,905,000

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.01.03.05.010	3	Pompa Air	RUSAK BERAT	04-06-	SHIMIZU	-	04-06-2021	840,000	-	RB-Henti Guna
2	3.01.03.05.010	5	Pompa Air	RUSAK BERAT	08-11-	SHIMIZU	-	08-11-2022	950,000	Shimizu jet 100 bit	RB-Henti Guna
JUMLAH									15,695,000		15,695,000

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.01.003	1	Station Wagon	RUSAK BERAT	21-11-	KIJANG INNOVA E	-	21-11-2008	157,000,003	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									172,695,003		172,695,003

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	RUSAK BERAT	10-12-	HONDA	-	10-12-2005	13,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									186,195,003		186,195,003

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.02.01.04.001	13	Sepeda Motor	BAIK	31-12-	Honda New Vario	-	31-12-2009	14,535,000	-	Hilang - Henti Guna
JUMLAH									200,730,003		200,730,003

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.03.02.11.008	1	Cermin Besar	RUSAK BERAT	01-01-	CERMIN HAKIM	-	01-01-2005	150,000	-	RB-Henti Guna
2	3.03.02.11.008	2	Cermin Besar	RUSAK BERAT	01-01-	CERMIN HAKIM	-	01-01-2005	150,000	-	RB-Henti Guna
3	3.03.02.11.008	3	Cermin Besar	RUSAK BERAT	01-01-	CERMIN HAKIM	-	01-01-2005	150,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.01.002	16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	RUSAK BERAT	31-12-	Olimpia	-	31-12-2002	4,159,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.01.002	22	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	RUSAK BERAT	31-12-	olivetti	-	31-12-1993	457,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									205,796,003		205,796,003

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	1	Lemari Kayu	RUSAK RINGAN	03-05-	Kayu	-	03-05-2001	388,721	-	Non RB/U/H - Aktif
JUMLAH									206,184,724		206,184,724

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	1	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	21-02-	-	-	21-02-2005	1,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									207,184,724		207,184,724

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	2	Lemari Kayu	RUSAK RINGAN	20-10-	Olimpic	-	20-10-2002	1,912,094	-	Non RB/U/H - Aktif
JUMLAH									209,096,818		209,096,818

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	11	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	11-10-	-	-	11-10-2005	850,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									209,946,818		209,946,818

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	11	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	1,895,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									211,842,318		211,842,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	12	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	11-12-	-	-	11-12-2005	850,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									212,692,318		212,692,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	12	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	1,895,500	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.002	13	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	1,895,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									216,483,318		216,483,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	18	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	11-12-	-	-	11-12-2005	850,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									217,333,318		217,333,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	27	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	3,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									220,833,318		220,833,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	27	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	PRINCESS	-	31-03-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.002	29	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	PRINCESS	-	31-03-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									222,333,318		222,333,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	32	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									223,034,318		223,034,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	32	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	PRINCESS	-	31-03-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									223,784,318		223,784,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	33	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.002	34	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.002	35	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.04.002	36	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.04.002	37	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.01.04.002	38	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Buku/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									227,990,318		227,990,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	40	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	1,625,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									229,615,318		229,615,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	41	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	Lemari Kaca/	-	31-12-2002	701,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									230,316,318		230,316,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	61	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	16-12-	OSR-1060	-	16-12-2011	1,365,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									231,681,318		231,681,318

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.002	801	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Lemari Kamar Tidur Utama ty	-	21-11-2012	45,100,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.002	817	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Lemari Kamar Tidur Anak	-	21-11-2012	14,850,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.002	818	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Lemari Kamar Tidur Anak	-	21-11-2012	14,850,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.04.002	828	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Lemari pakaian pembantu	-	21-11-2012	7,260,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.04.002	910	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Lemari Kamar Tidur Utama type A	-	29-10-2013	52,250,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.01.04.002	920	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Lemari Kamar Tidur Anak	-	29-10-2013	17,210,600	-	RB-Henti Guna
7	3.05.01.04.002	921	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Lemari Kamar Tidur Anak	-	29-10-2013	17,210,600	-	RB-Henti Guna
8	3.05.01.04.002	934	Lemari Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Lemari pakaian pembantu	-	29-10-2013	8,131,200	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									408,543,718		408,543,718

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.003	1	Rak Besi	RUSAK BERAT	29-03-	-	-	29-03-2007	1,202,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									409,746,218		409,746,218

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.003	1	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	/	-	31-12-1990	239,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									409,985,218		409,985,218

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.003	2	Rak Besi	RUSAK BERAT	29-03-	-	-	29-03-2007	1,202,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									411,187,718		411,187,718

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.003	2	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	/	-	31-12-1990	239,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.003	3	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	/	-	31-12-1998	239,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.003	4	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	/	-	31-12-1999	417,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.04.003	5	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2000	571,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.04.003	6	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2000	571,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.01.04.003	7	Rak Besi	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2000	571,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									413,795,718		413,795,718

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.004	2	Rak Kayu	RUSAK BERAT	21-02-	-	-	21-02-2005	2,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.004	12	Rak Kayu	RUSAK BERAT	05-03-	-	-	05-03-2009	450,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.004	13	Rak Kayu	RUSAK BERAT	05-03-	-	-	05-03-2009	450,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									416,695,718		416,695,718

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.005	1	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	01-10-	LION	-	01-10-2007	2,100,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.005	2	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	01-10-	LION	-	01-10-2007	2,100,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.005	3	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	01-10-	LION	-	01-10-2007	2,100,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.04.005	4	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	01-10-	LION	-	01-10-2007	2,100,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.04.005	6	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	10-04-	TOP	-	10-04-2008	1,800,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.01.04.005	7	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	10-04-	TOP	-	10-04-2008	1,800,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.01.04.005	8	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	10-04-	TOP	-	10-04-2008	1,800,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.01.04.005	10	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	10-04-	TOP	-	10-04-2008	1,800,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									432,295,718		432,295,718

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.005	23	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	20-12-	Brother	-	20-12-2010	1,885,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.005	24	Filing Cabinet Besi	RUSAK BERAT	20-12-	Brother	-	20-12-2010	1,885,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.006	7	Filing Cabinet Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	BIG PANEL	-	31-03-2008	500,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.04.006	8	Filing Cabinet Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	BIG PANEL	-	31-03-2008	500,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.04.006	9	Filing Cabinet Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	BIG PANEL	-	31-03-2008	500,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.01.04.013	3	Buffet	RUSAK BERAT	29-09-	Glory Royal Series CD.02	-	29-09-2011	5,170,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									442,735,718		442,735,718

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.04.013	75	Buffet	RUSAK BERAT	21-11-	Credenza TV type A	-	21-11-2012	27,225,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.04.013	84	Buffet	RUSAK BERAT	21-11-	Credenza TV type B	-	21-11-2012	7,150,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.04.013	106	Buffet	RUSAK BERAT	29-10-	Credenza TV type A	-	29-10-2013	31,553,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									508,664,218		508,664,218

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.001	1	Tabung Pemadam Api	RUSAK BERAT	22-08-	WORNER	-	22-08-2011	2,835,960	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.001	2	Tabung Pemadam Api	RUSAK BERAT	22-08-	WORNER	-	22-08-2011	2,835,960	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.05.001	3	Tabung Pemadam Api	RUSAK BERAT	22-08-	WORNER	-	22-08-2011	2,835,960	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.05.001	4	Tabung Pemadam Api	RUSAK BERAT	22-08-	WORNER	-	22-08-2011	2,835,960	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.05.001	5	Tabung Pemadam Api	RUSAK BERAT	22-08-	WORNER	-	22-08-2011	2,835,960	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									522,844,018		522,844,018

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	1	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	PAPAN MONITORING	-	31-12-1982	55,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.008	2	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	37,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.05.008	3	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	37,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									522,973,018		522,973,018

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	6	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1995	50,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									523,023,018		523,023,018

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	6	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	17-09-	MOVING BOARD	-	17-09-2010	5,543,550	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									528,566,568		528,566,568

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	6	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	PAPAN MONITORING	-	31-12-1989	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									528,581,568		528,581,568

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	7	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	17-09-	MOVING BOARD	-	17-09-2010	5,543,550	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,125,118		534,125,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	7	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama Hakim/	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.008	8	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama Hakim di persidangan/	-	31-12-1990	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,195,118		534,195,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	9	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	PAPAN MONITORING	-	31-12-1989	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,210,118		534,210,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	9	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama Hakim di persidangan/	-	31-12-1990	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,230,118		534,230,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	10	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	PAPAN MONITORING	-	31-12-1989	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,245,118		534,245,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	10	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama Hakim di persidangan/	-	31-12-1990	20,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.008	11	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama jaksa di persidangan/	-	31-12-1990	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,285,118		534,285,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	12	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	PAPAN MONITORING	-	31-12-1989	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,300,118		534,300,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	12	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama panitera di persdgn.	-	31-12-1990	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,320,118		534,320,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	13	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	PAPAN MONITORING	-	31-12-1989	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,335,118		534,335,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	13	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama pembela/	-	31-12-1990	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,355,118		534,355,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	14	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1989	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,370,118		534,370,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.008	14	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	Papan nama dharma wanita/	-	31-12-1990	100,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.008	16	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	/Papan nama koperasi	-	31-12-1998	150,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.05.008	18	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	papan nama pembela	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.01.05.008	19	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	papan nama hakim	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.01.05.008	20	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	papan nama hakim	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.01.05.008	21	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	papan nama hakim	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.01.05.008	22	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	papan nama panitera	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.01.05.008	23	Papan Visual/Papan Nama	RUSAK BERAT	31-12-	papan nama jaksa	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,920,118		534,920,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.010	1	White Board	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	19,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.010	2	White Board	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	19,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.01.05.010	3	White Board	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1989	29,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									534,987,118		534,987,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.010	3	White Board	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.010	5	White Board	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1990	50,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									535,087,118		535,087,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.012	1	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	RUSAK BERAT	31-12-	DETECTOR LOGAM	-	31-12-1995	109,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.01.05.012	2	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	RUSAK BERAT	31-12-	DETECTOR LOGAM	-	31-12-1995	109,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									535,305,118		535,305,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.015	1	Alat Penghancur Kertas	RUSAK BERAT	11-10-	-	-	11-10-2018	1,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									536,805,118		536,805,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.080	1	Mesin Antrian	RUSAK BERAT	18-04-	mONITOR TOUCHCREEN	-	18-04-2019	27,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									563,805,118		563,805,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.01.05.999	1	Perkakas Kantor Lainnya	RUSAK BERAT	04-08-	Matsunaga SVC-500N	-	04-08-2011	329,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									564,134,118		564,134,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.002	2	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	1/2 BIRO	-	31-12-1984	37,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.002	3	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	1/2 BIRO	-	31-12-1984	37,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.002	5	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	1/2 BIRO	-	31-12-1984	37,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.002	6	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	1/2 BIRO	-	31-12-1984	37,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									564,282,118		564,282,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.002	19	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	1,135,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.002	20	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	1,135,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.002	24	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	1,135,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.002	33	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	4,738,750	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.002	34	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	3,179,500	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.002	35	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	3,066,250	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									578,671,618		578,671,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.002	49	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	21-02-	-	-	21-02-2005	400,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									579,071,618		579,071,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.002	50	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	MJ 1/2 BIRO	-	04-12-2008	1,300,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.002	51	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	MJ 1/2 BIRO	-	04-12-2008	1,300,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									581,671,618		581,671,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.002	59	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	EXPO	-	31-03-2008	600,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.002	60	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	EXPO	-	31-03-2008	600,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.002	63	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	EXPO	-	31-03-2008	600,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.002	66	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	EXPO	-	31-03-2008	600,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.002	67	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	31-03-	EXPO	-	31-03-2008	600,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.002	77	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	22-12-	-	-	22-12-2010	1,586,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.002	80	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	845,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.002	81	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	845,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									587,947,618		587,947,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.002	4736	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Meja belajar	-	21-11-2012	3,300,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.002	4737	Meja Kerja Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Meja belajar	-	21-11-2012	3,300,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									594,547,618		594,547,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	4	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	21-02-	KURSI PUTAR BESI	-	21-02-2005	400,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	8	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	21-02-	KURSI PUTAR BESI	-	21-02-2005	400,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									595,347,618		595,347,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	41	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1994	181,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	43	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1994	55,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.003	45	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	KURSI LIPAT CHITOS	-	31-12-1994	19,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.003	48	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	KURSI LIPAT	-	31-12-1998	19,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.003	49	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	KURSI LIPAT	-	31-12-1998	19,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.003	50	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	KURSI LIPAT	-	31-12-1998	19,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.003	51	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	31-12-	KURSI LIPAT	-	31-12-1998	19,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									595,678,618		595,678,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	82	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	11-10-	CHITOSE	-	11-10-2005	185,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									595,863,618		595,863,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	95	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	96	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.003	97	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.003	98	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.003	99	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.003	100	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.003	101	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.003	102	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.01.003	103	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
10	3.05.02.01.003	104	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
11	3.05.02.01.003	105	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
12	3.05.02.01.003	106	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
13	3.05.02.01.003	107	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
14	3.05.02.01.003	108	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
15	3.05.02.01.003	109	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
16	3.05.02.01.003	110	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									605,463,618		605,463,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	111	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	11-10-	CHITOSE	-	11-10-2005	185,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									605,648,618		605,648,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	111	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	112	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									606,848,618		606,848,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	113	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	11-10-	CHITOSE	-	11-10-2005	185,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									607,033,618		607,033,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	113	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	114	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									608,233,618		608,233,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	115	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	11-10-	CHITOSE	-	11-10-2005	185,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									608,418,618		608,418,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	115	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									609,018,618		609,018,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	116	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	11-10-	CHITOSE	-	11-10-2005	185,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									609,203,618		609,203,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	116	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	117	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.003	118	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.003	119	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.003	128	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.003	129	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.003	130	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	05-01-	FUTURA	-	05-01-2009	600,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									613,403,618		613,403,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	164	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	BROTHER	-	23-12-2011	5,700,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	165	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	BROTHER	-	23-12-2011	5,700,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.003	166	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	BROTHER	-	23-12-2011	5,700,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.003	167	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	BROTHER	-	23-12-2011	5,700,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.003	176	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	CHITOS ELEPHANT	-	23-12-2011	1,000,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.003	192	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	CHITOS ELEPHANT	-	23-12-2011	1,000,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.003	193	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	CHITOS ELEPHANT	-	23-12-2011	1,000,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.003	194	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	CHITOS ELEPHANT	-	23-12-2011	1,000,000	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.01.003	195	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	CHITOS ELEPHANT	-	23-12-2011	1,000,000	-	RB-Henti Guna
10	3.05.02.01.003	196	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-12-	CHITOS ELEPHANT	-	23-12-2011	1,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									642,203,618		642,203,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	220	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	15-12-	CHITOSE	-	15-12-2005	220,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	221	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	15-12-	CHITOSE	-	15-12-2005	220,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.003	231	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	15-12-	CHITOSE	-	15-12-2005	220,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.003	233	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	15-12-	CHITOSE	-	15-12-2005	220,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.003	235	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	15-12-	CHITOSE	-	15-12-2005	220,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.003	263	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-03-	-	-	23-03-2006	210,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.003	264	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-03-	-	-	23-03-2006	210,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.003	265	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	23-03-	-	-	23-03-2006	210,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									643,933,618		643,933,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.003	1073	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi Belajar	-	21-11-2012	1,430,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.003	1073	Kursi Besi/Metal	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi Belajar	-	21-11-2012	1,430,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									646,793,618		646,793,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.004	3	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1978	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									646,813,618		646,813,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.004	10	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	400,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.004	11	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	400,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.004	12	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	400,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.004	13	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	400,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.004	14	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	01-10-	KOBLEN	-	01-10-2007	400,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									648,813,618		648,813,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.004	17	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1978	20,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.004	18	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1978	20,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.004	19	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1978	20,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.004	20	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1978	20,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.004	21	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1978	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									648,913,618		648,913,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.004	37	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.KTUA MAJELIS	-	04-12-2008	1,925,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.004	38	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.KTUA MAJELIS	-	04-12-2008	1,925,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.004	39	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.KTUA MAJELIS	-	04-12-2008	1,925,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.004	40	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.004	41	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.004	42	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.004	43	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.004	44	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.01.004	45	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
10	3.05.02.01.004	46	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
11	3.05.02.01.004	47	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG HKM	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
12	3.05.02.01.004	48	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG PAN/PU/PH	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
13	3.05.02.01.004	49	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG PAN/PU/PH	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
14	3.05.02.01.004	50	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	04-12-	K.SDG PAN/PU/PH	-	04-12-2008	1,100,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									666,788,618		666,788,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.004	4738	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi Makan	-	21-11-2012	2,117,500	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.004	4739	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi Makan	-	21-11-2012	2,117,500	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.004	4740	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi Makan	-	21-11-2012	2,117,500	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.004	4741	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi Makan	-	21-11-2012	2,117,500	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.004	4753	Kursi Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi rias	-	21-11-2012	880,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									676,138,618		676,138,618

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.005	3	Sice	RUSAK BERAT	01-10-	CIKINDO	-	01-10-2007	7,500,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.005	5	Sice	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	6,801,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									690,440,118		690,440,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.005	23	Sice	RUSAK BERAT	31-03-	-	-	31-03-2008	5,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.005	30	Sice	RUSAK BERAT	05-03-	-	-	05-03-2009	3,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									698,940,118		698,940,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.005	907	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Meja Sudut type A	-	21-11-2012	2,057,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.005	916	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Meja Sudut type B	-	21-11-2012	2,057,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.005	925	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Meja sofa tamu type A	-	21-11-2012	3,025,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.005	934	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Meja sofa keluarga	-	21-11-2012	3,388,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.005	950	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi sofa tamu 1 seat type	-	21-11-2012	4,840,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.005	951	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi sofa tamu 1 seat type	-	21-11-2012	4,840,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.005	961	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi sofa tamu 2 seat type	-	21-11-2012	6,534,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.005	977	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi sofa kel. 2 seat	-	21-11-2012	6,715,500	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.01.005	978	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi sofa kel. 2 seat	-	21-11-2012	6,715,500	-	RB-Henti Guna
10	3.05.02.01.005	988	Sice	RUSAK BERAT	21-11-	Kursi sofa kel. 3 seat	-	21-11-2012	9,680,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									748,792,118		748,792,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	13	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1988	93,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.007	14	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1988	93,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.007	21	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	01-04-	-	-	01-04-2008	505,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									749,483,118		749,483,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	21	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									750,683,118		750,683,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	22	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	01-04-	-	-	01-04-2008	505,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									751,188,118	751,188,118	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	22	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									752,388,118		752,388,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	23	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	01-04-	-	-	01-04-2008	505,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									752,893,118		752,893,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	23	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									754,093,118		754,093,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	24	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	01-04-	-	-	01-04-2008	505,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									754,598,118		754,598,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	24	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									755,798,118		755,798,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	25	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	01-04-	-	-	01-04-2008	505,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									756,303,118		756,303,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	25	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									757,503,118		757,503,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	26	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	01-04-	-	-	01-04-2008	505,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									758,008,118		758,008,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	26	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.007	27	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.007	28	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									761,608,118		761,608,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.007	32	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.007	33	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.007	34	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.007	35	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.007	36	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.007	37	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.007	38	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.007	39	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.01.007	40	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
10	3.05.02.01.007	41	Bangku Panjang Kayu	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2002	351,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									765,118,118		765,118,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.008	2	Meja Rapat	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1984	55,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.008	3	Meja Rapat	RUSAK BERAT	31-12-	MEJA SIDANG	-	31-12-1986	87,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.008	6	Meja Rapat	RUSAK BERAT	13-10-	MEJA SIDANG GARUDA/CAKRA	-	13-10-2010	5,200,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.009	1	Meja Komputer	RUSAK BERAT	10-03-	OLIMPIK	-	10-03-2009	425,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									770,885,118		770,885,118

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.009	10	Meja Komputer	RUSAK BERAT	02-03-	-	-	02-03-2009	295,475	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.009	12	Meja Komputer	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,000,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.009	13	Meja Komputer	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,000,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.009	14	Meja Komputer	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,000,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.009	15	Meja Komputer	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	1,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									775,180,593		775,180,593

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.011	3	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	23-03-	-	-	23-03-2006	3,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									778,680,593	778,680,593	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.011	50	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Tempat Tidur Utama	-	21-11-2012	15,400,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.011	66	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Tempat tidur anak	-	21-11-2012	12,100,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.011	67	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Tempat tidur anak	-	21-11-2012	12,100,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.011	77	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Tempat tidur pembantu	-	21-11-2012	7,865,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.011	124	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Tempat tidur utama	-	29-10-2013	17,765,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.011	134	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Tempat tidur anak	-	29-10-2013	14,023,900	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.011	135	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Tempat tidur anak	-	29-10-2013	14,023,900	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.011	148	Tempat Tidur Kayu	RUSAK BERAT	29-10-	Tempat tidur pembantu	-	29-10-2013	9,114,600	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									881,072,993		881,072,993

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.014	1	Meja Resepsionis	RUSAK BERAT	13-10-	Meja security	-	13-10-2010	2,924,530	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.014	2	Meja Resepsionis	RUSAK BERAT	29-02-	MEJA INFORMASI	-	29-02-2016	6,950,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									890,947,523		890,947,523

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.019	491	Meja Makan Kayu	RUSAK BERAT	21-11-	Meja makan type A	-	21-11-2012	6,050,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									896,997,523		896,997,523

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.020	1	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	10-03-	-	-	10-03-2009	260,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.020	2	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	10-03-	-	-	10-03-2009	260,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									897,517,523		897,517,523

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.020	10	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	31-12-	Kursi plastik/	-	31-12-1996	20,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.020	88	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	1,250,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.020	89	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	1,250,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.020	90	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	1,250,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.020	91	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	1,250,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.01.020	92	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	1,250,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.01.020	93	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.01.020	94	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.01.020	95	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
10	3.05.02.01.020	96	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
11	3.05.02.01.020	97	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
12	3.05.02.01.020	98	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
13	3.05.02.01.020	99	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
14	3.05.02.01.020	100	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	04-12-	ERGOTECH	-	04-12-2008	750,000	-	RB-Henti Guna
15	3.05.02.01.020	101	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	31-12-	kursi pimpinan/Indachi	-	31-12-2002	1,500,000	-	RB-Henti Guna
16	3.05.02.01.020	102	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	31-12-	kursi pimpinan/Indachi	-	31-12-2002	1,500,000	-	RB-Henti Guna
17	3.05.02.01.020	103	Kursi Fiber Glas/Plastik	RUSAK BERAT	31-12-	kursi pimpinan/Indachi	-	31-12-2002	1,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									914,287,523		914,287,523

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.026	706	Nakas	RUSAK BERAT	21-11-	Nakas	-	21-11-2012	3,267,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.026	707	Nakas	RUSAK BERAT	21-11-	Nakas	-	21-11-2012	3,267,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.01.026	708	Nakas	RUSAK BERAT	21-11-	Nakas	-	21-11-2012	3,267,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.01.026	754	Nakas	RUSAK BERAT	29-10-	Nakas	-	29-10-2013	3,785,100	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.01.026	755	Nakas	RUSAK BERAT	29-10-	Nakas	-	29-10-2013	3,785,100	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									931,658,723		931,658,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.01.999	1	Meubelair Lainnya	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	5,850,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.01.999	2	Meubelair Lainnya	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	5,850,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									943,358,723		943,358,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.02.001	1	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.02.001	2	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.02.001	3	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.02.001	4	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.02.001	5	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.02.001	6	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.02.001	7	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
8	3.05.02.02.001	8	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
9	3.05.02.02.001	9	Jam Mekanis	RUSAK BERAT	10-04-	-	-	10-04-2008	150,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									944,708,723		944,708,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.02.003	4	Jam Elektronik	RUSAK BERAT	31-12-	SEIKO	-	31-12-1989	19,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.02.003	5	Jam Elektronik	RUSAK BERAT	31-12-	JAMDINDING SEIKO	-	31-12-1990	15,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.02.003	6	Jam Elektronik	RUSAK BERAT	31-12-	JAMDINDING SEIKO	-	31-12-1990	15,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.02.003	9	Jam Elektronik	RUSAK BERAT	31-12-	SEIKO	-	31-12-2000	19,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.02.003	10	Jam Elektronik	RUSAK BERAT	31-12-	SEIKO	-	31-12-2000	19,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									944,795,723		944,795,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.03.003	2	Mesin Pemotong Rumput	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	1,725,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									946,520,723		946,520,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	2	A.C. Split	RUSAK BERAT	04-12-	LG JET COOL 1/2PK	-	04-12-2008	3,300,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.04.004	3	A.C. Split	RUSAK BERAT	04-12-	LG JET COOL 1/2PK	-	04-12-2008	3,300,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.04.004	5	A.C. Split	RUSAK BERAT	04-12-	LG JET COOL 1/2PK	-	04-12-2008	3,300,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									956,420,723		956,420,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	8	A.C. Split	RUSAK BERAT	27-07-	-	-	27-07-2009	3,750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									960,170,723	960,170,723	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	8	A.C. Split	RUSAK BERAT	04-12-	LG JET COOL 3/4PK	-	04-12-2008	3,700,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									963,870,723		963,870,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	9	A.C. Split	RUSAK BERAT	27-07-	-	-	27-07-2009	3,750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									967,620,723	967,620,723	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	9	A.C. Split	RUSAK BERAT	04-12-	LG JET COOL 1PK	-	04-12-2008	4,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									972,120,723		972,120,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	13	A.C. Split	RUSAK BERAT	23-04-	A.C Split 3/4 PK merek LG	-	23-04-2010	3,750,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.04.004	14	A.C. Split	RUSAK BERAT	23-04-	AC Split 3/4 PK merek LG	-	23-04-2010	3,750,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.04.004	22	A.C. Split	RUSAK BERAT	23-04-	AC Split 3/4 merek LG	-	23-04-2010	3,750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									983,370,723		983,370,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	31	A.C. Split	RUSAK BERAT	05-03-	LG	-	05-03-2009	4,800,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									988,170,723		988,170,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.04.004	41	A.C. Split	RUSAK BERAT	29-03-	DAIKIN	-	29-03-2017	5,750,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.04.006	4	Kipas Angin	RUSAK BERAT	31-12-	GANTUNG/MASPION	-	31-12-1991	73,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.04.006	5	Kipas Angin	RUSAK BERAT	31-12-	MASPION	-	31-12-1994	73,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.04.006	10	Kipas Angin	RUSAK BERAT	31-12-	KIPAS ANGIN DUDUK/NATIONAL	-	31-12-2002	264,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.06.002	2	Televisi	RUSAK BERAT	27-03-	SAMSUNG	-	27-03-2017	11,250,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,005,580,723		1,005,580,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.002	13	Televisi	RUSAK BERAT	02-03-	LG LCD 42 INCI	-	02-03-2015	9,017,200	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.002	14	Televisi	RUSAK BERAT	08-06-	LG 55" UHD TV 4K	-	08-06-2017	20,275,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,034,872,923		1,034,872,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.002	16	Televisi	RUSAK BERAT	05-03-	-	-	05-03-2009	1,250,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.002	22	Televisi	RUSAK BERAT	20-12-	-	-	20-12-2010	1,250,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,037,372,923		1,037,372,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.004	1	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1995	116,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,037,488,923		1,037,488,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.004	1	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	RUSAK BERAT	14-09-	ROADMASTER	-	14-09-2007	1,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.007	1	Loudspeaker	RUSAK BERAT	02-03-	-	-	02-03-2009	94,775	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,038,583,698		1,038,583,698

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.007	1	Loudspeaker	RUSAK BERAT	22-11-	SAMSUNG TYPE HW-M360/XD	-	22-11-2017	3,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,042,083,698		1,042,083,698

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.007	2	Loudspeaker	RUSAK BERAT	02-03-	-	-	02-03-2009	94,775	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,042,178,473		1,042,178,473

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.008	1	Sound System	RUSAK BERAT	13-11-	-	-	13-11-2008	6,200,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,048,378,473	1,048,378,473	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.008	2	Sound System	RUSAK BERAT	04-12-	ALS PRO	-	04-12-2008	7,100,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,055,478,473		1,055,478,473

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.008	2	Sound System	RUSAK BERAT	23-05-	KAROKE SYSTEM	-	23-05-2012	12,100,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.012	1	Wireless	RUSAK BERAT	31-12-	TENS	-	31-12-2000	1,010,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.012	2	Wireless	RUSAK BERAT	08-05-	Edimax Cap300	-	08-05-2018	1,495,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.06.012	3	Wireless	RUSAK BERAT	08-05-	Edimax Cap300	-	08-05-2018	1,495,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.06.012	4	Wireless	RUSAK BERAT	08-05-	Edimax Cap300	-	08-05-2018	1,495,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.06.012	5	Wireless	RUSAK BERAT	08-05-	Edimax Cap300	-	08-05-2018	1,495,000	-	RB-Henti Guna
7	3.05.02.06.012	6	Wireless	RUSAK BERAT	08-05-	Edimax Cap300	-	08-05-2018	1,495,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,076,063,473		1,076,063,473

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.014	6	Microphone	RUSAK BERAT	04-03-	-	-	04-03-2009	167,250	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.014	7	Microphone	RUSAK BERAT	04-03-	-	-	04-03-2009	167,250	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,076,397,973		1,076,397,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.015	1	Microphone Table Stand	RUSAK BERAT	31-12-	STANDING MIC	-	31-12-1989	55,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.015	2	Microphone Table Stand	RUSAK BERAT	31-12-	STANDING MIC	-	31-12-1989	55,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,076,507,973		1,076,507,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.019	5	Stabilisator	RUSAK BERAT	04-08-	PROLINK	-	04-08-2011	1,330,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.019	6	Stabilisator	RUSAK BERAT	04-08-	PROLINK	-	04-08-2011	1,330,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.019	7	Stabilisator	RUSAK BERAT	04-08-	PROLINK	-	04-08-2011	1,330,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.06.019	8	Stabilisator	RUSAK BERAT	04-08-	PROLINK	-	04-08-2011	1,330,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,081,827,973		1,081,827,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.025	1	Alat Hiasan	RUSAK BERAT	31-12-	Bingkai Kaca/	-	31-12-1997	27,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.025	2	Alat Hiasan	RUSAK BERAT	31-12-	Bingkai Kaca/	-	31-12-1997	27,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.025	3	Alat Hiasan	RUSAK BERAT	31-12-	Bingkai Kaca/	-	31-12-1997	27,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,081,908,973		1,081,908,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.026	1	Lambang Garuda Pancasila	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	10,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.026	2	Lambang Garuda Pancasila	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	10,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.026	3	Lambang Garuda Pancasila	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	10,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,081,938,973		1,081,938,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.026	3	Lambang Garuda Pancasila	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2004	100,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.026	4	Lambang Garuda Pancasila	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2004	100,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,082,138,973		1,082,138,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.027	1	Gambar Presiden/Wakil Presiden	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2004	50,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.027	2	Gambar Presiden/Wakil Presiden	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2004	50,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.027	3	Gambar Presiden/Wakil Presiden	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2004	50,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.06.027	4	Gambar Presiden/Wakil Presiden	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-2004	50,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,082,338,973		1,082,338,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.030	8	Tiang Bendera	RUSAK BERAT	04-12-	TIANG BNDRA SDG	-	04-12-2008	550,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.030	9	Tiang Bendera	RUSAK BERAT	04-12-	TIANG BNDRA SDG	-	04-12-2008	550,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.030	10	Tiang Bendera	RUSAK BERAT	04-12-	TIANG BNDRA SDG	-	04-12-2008	550,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,083,988,973		1,083,988,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.034	1	Tangga Aluminium	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	2,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.034	2	Tangga Aluminium	RUSAK BERAT	05-01-	-	-	05-01-2009	2,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,087,988,973		1,087,988,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.035	1	Kaca Hias	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1989	19,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.035	2	Kaca Hias	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1994	19,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.036	1	Dispenser	RUSAK BERAT	18-04-	MIYAKO	-	18-04-2019	1,100,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.06.036	2	Dispenser	RUSAK BERAT	18-04-	MIYAKO	-	18-04-2019	1,100,000	-	RB-Henti Guna
5	3.05.02.06.036	3	Dispenser	RUSAK BERAT	18-04-	MIYAKO	-	18-04-2019	1,100,000	-	RB-Henti Guna
6	3.05.02.06.040	1	Palu Sidang	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	20,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,091,346,973		1,091,346,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.040	1	Palu Sidang	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	390,250	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,091,737,223	1,091,737,223	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.040	2	Palu Sidang	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1987	20,000	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.040	3	Palu Sidang	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1994	15,000	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.040	4	Palu Sidang	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1994	15,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.06.040	5	Palu Sidang	RUSAK BERAT	31-12-	-	-	31-12-1994	15,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,091,802,223		1,091,802,223

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.058	1	Gordyin/Kray	RUSAK BERAT	30-04-	-	-	30-04-2008	69,650,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,161,452,223		1,161,452,223

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.058	41	Gordyin/Kray	BAIK	10-08-	Kain	-	10-08-2007	375,000	-	Non RB/U/H - Aktif
2	3.05.02.06.058	42	Gordyin/Kray	BAIK	10-08-	Kain	-	10-08-2007	375,000	-	Non RB/U/H - Aktif
JUMLAH									1,162,202,223		1,162,202,223

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.05.02.06.060	1	Asbak Tinggi	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	250,875	-	RB-Henti Guna
2	3.05.02.06.060	2	Asbak Tinggi	RUSAK BERAT	17-04-	-	-	17-04-2008	250,875	-	RB-Henti Guna
3	3.05.02.06.060	5	Asbak Tinggi	RUSAK BERAT	13-05-	-	-	13-05-2013	165,000	-	RB-Henti Guna
4	3.05.02.06.060	6	Asbak Tinggi	RUSAK BERAT	13-05-	-	-	13-05-2013	165,000	-	RB-Henti Guna
5	3.06.01.01.048	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	17-03-	POWER	-	17-03-2008	171,750	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,163,205,723		1,163,205,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.01.01.048	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	15-06-	SK Kesalahan Pencatatan	-	15-06-2017	10,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,173,205,723		1,173,205,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.01.01.048	2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	17-03-	POWER	-	17-03-2008	171,750	-	RB-Henti Guna
2	3.06.01.01.048	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	17-03-	POWER	-	17-03-2008	171,750	-	RB-Henti Guna
3	3.06.01.01.048	4	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	17-03-	POWER	-	17-03-2008	171,750	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,173,720,973		1,173,720,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.01.01.048	8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	21-04-	Montero	-	21-04-2011	750,000	-	RB-Henti Guna
2	3.06.01.01.048	9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	19-10-	UPS 600 VA SPC	-	19-10-2009	400,000	-	RB-Henti Guna
3	3.06.01.01.048	16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	15-01-	MONTERO	-	15-01-2010	399,000	-	RB-Henti Guna
4	3.06.01.01.048	27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	30-04-	KYOWA SVR 1000N	-	30-04-2019	1,160,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,176,429,973		1,176,429,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.01.01.048	35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	30-03-	Prolink	-	30-03-2016	3,615,000	-	RB-Henti Guna
2	3.06.01.01.048	37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	08-06-	APC Pro 1500	-	08-06-2017	9,505,000	-	RB-Henti Guna
3	3.06.01.01.048	40	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	17-12-	APC Back-UPS	-	17-12-2019	2,534,000	-	RB-Henti Guna
4	3.06.01.01.048	42	Uninterruptible Power Supply (UPS)	RUSAK BERAT	17-12-	APC Back-UPS	-	17-12-2019	2,534,000	-	RB-Henti Guna
5	3.06.01.01.999	1	Peralatan Studio Audio Lainnya	RUSAK BERAT	04-11-	-	-	04-11-2014	250,000	-	RB-Henti Guna
6	3.06.01.02.033	1	Camera Wall Box	RUSAK BERAT	26-04-	-	-	26-04-2011	29,000,000	-	RB-Henti Guna
7	3.06.01.02.033	2	Camera Wall Box	RUSAK BERAT	26-04-	-	-	26-04-2011	29,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,252,867,973		1,252,867,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.02.01.003	2	Pesawat Telephone	RUSAK BERAT	31-12-	KX-TS5TP/TORIPHONE	-	31-12-2002	250,000	-	RB-Henti Guna
2	3.06.02.01.003	3	Pesawat Telephone	RUSAK BERAT	01-01-	VITAPHONE	-	01-01-2005	300,000	-	RB-Henti Guna
3	3.06.02.01.003	4	Pesawat Telephone	RUSAK BERAT	01-01-	FAVORITE	-	01-01-2005	300,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,253,717,973		1,253,717,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.02.01.006	1	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
2	3.06.02.01.006	2	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
3	3.06.02.01.006	3	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
4	3.06.02.01.006	4	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
5	3.06.02.01.006	5	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
6	3.06.02.01.006	6	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
7	3.06.02.01.006	7	Handy Talky (HT)	RUSAK BERAT	12-06-	Motorola CP1660	-	12-06-2017	3,960,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,281,437,973		1,281,437,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.02.01.010	1	Facsimile	RUSAK BERAT	31-12-	/Panasonic	-	31-12-2000	1,125,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,282,562,973		1,282,562,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.02.01.010	2	Facsimile	RUSAK BERAT	23-12-	PANASONIC	-	23-12-2011	2,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,284,562,973		1,284,562,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.02.01.010	3	Facsimile	RUSAK BERAT	29-03-	PANASONIC	-	29-03-2017	3,900,000	-	RB-Henti Guna
2	3.06.02.99.999	1	Alat Komunikasi Lainnya	RUSAK BERAT	18-04-	ADVAN	-	18-04-2019	2,499,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,290,961,973		1,290,961,973

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.06.03.47.002	1	Genset	RUSAK BERAT	25-11-	Maxtron	-	25-11-2016	150,356,300	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,441,318,273		1,441,318,273

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	2	P.C Unit	RUSAK BERAT	17-03-	LG	-	17-03-2008	9,498,250	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	5	P.C Unit	RUSAK BERAT	24-04-	LENOVO	-	24-04-2008	9,735,000	-	RB-Henti Guna
3	3.10.01.02.001	6	P.C Unit	RUSAK BERAT	24-04-	LENOVO	-	24-04-2008	9,735,000	-	RB-Henti Guna
4	3.10.01.02.001	8	P.C Unit	RUSAK BERAT	24-04-	LENOVO	-	24-04-2008	9,735,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,480,021,523		1,480,021,523

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	8	P.C Unit	RUSAK BERAT	01-01-	RAKITAN	-	01-01-2005	15,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	9	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-10-	RAKITAN	-	31-10-2008	17,288,400	-	RB-Henti Guna
3	3.10.01.02.001	10	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-10-	RAKITAN	-	31-10-2008	17,288,400	-	RB-Henti Guna
4	3.10.01.02.001	11	P.C Unit	RUSAK BERAT	31-10-	RAKITAN	-	31-10-2008	17,288,400	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,546,886,723		1,546,886,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	11	P.C Unit	RUSAK BERAT	16-02-	TECH	-	16-02-2009	8,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,554,886,723		1,554,886,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	12	P.C Unit	RUSAK BERAT	14-09-	HP	-	14-09-2009	21,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,576,386,723		1,576,386,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	13	P.C Unit	RUSAK BERAT	12-08-	-	-	12-08-2011	9,999,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,586,385,723		1,586,385,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	13	P.C Unit	RUSAK BERAT	14-09-	HP	-	14-09-2009	21,500,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	14	P.C Unit	RUSAK BERAT	04-08-	ACER ASPIRE Z5801	-	04-08-2011	16,283,100	-	RB-Henti Guna
3	3.10.01.02.001	15	P.C Unit	RUSAK BERAT	04-08-	ACER ASPIRE Z5801	-	04-08-2011	17,283,100	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,641,451,923		1,641,451,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	16	P.C Unit	RUSAK BERAT	24-03-	LG	-	24-03-2010	8,750,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	18	P.C Unit	RUSAK BERAT	24-03-	LG	-	24-03-2010	8,750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,658,951,923		1,658,951,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	19	P.C Unit	RUSAK BERAT	06-12-	LENOVO	-	06-12-2016	19,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	20	P.C Unit	RUSAK BERAT	09-05-	DELL	-	09-05-2017	10,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,687,951,923		1,687,951,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	22	P.C Unit	RUSAK BERAT	28-03-	ACER M3970	-	28-03-2012	8,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	23	P.C Unit	RUSAK BERAT	28-03-	ACER M3970	-	28-03-2012	8,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,703,951,923		1,703,951,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	24	P.C Unit	RUSAK BERAT	07-06-	DELL	-	07-06-2017	10,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	27	P.C Unit	RUSAK BERAT	20-09-	DELL	-	20-09-2018	12,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,725,951,923		1,725,951,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	27	P.C Unit	RUSAK BERAT	30-04-	SIMBADA	-	30-04-2013	8,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,733,951,923		1,733,951,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	30	P.C Unit	RUSAK BERAT	02-03-	LENIOVO THINKPAD	-	02-03-2015	8,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,742,451,923		1,742,451,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.001	39	P.C Unit	RUSAK BERAT	18-04-	HP ALL IN ONE	-	18-04-2019	4,700,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.001	40	P.C Unit	RUSAK BERAT	18-04-	HP ALL IN ONE	-	18-04-2019	4,700,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,751,851,923		1,751,851,923

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	2	Lap Top	RUSAK BERAT	31-10-	TOSHIBA M300 T8310	-	31-10-2008	19,537,400	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,771,389,323		1,771,389,323

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	2	Lap Top	RUSAK BERAT	16-12-	TOSHIBA SATELITE L745-1105U	-	16-12-2011	9,970,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,781,359,323		1,781,359,323

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	3	Lap Top	RUSAK BERAT	29-10-	ADVAN GT75	-	29-10-2008	8,750,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,790,109,323		1,790,109,323

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	3	Lap Top	RUSAK BERAT	31-10-	TOSHIBA M300 T8310	-	31-10-2008	19,537,400	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,809,646,723		1,809,646,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	4	Lap Top	RUSAK BERAT	24-04-	MSI	-	24-04-2008	14,080,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,823,726,723		1,823,726,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	4	Lap Top	RUSAK BERAT	23-04-	TOSHIBA M500-D432	-	23-04-2010	19,800,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,843,526,723		1,843,526,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	4	Lap Top	RUSAK BERAT	16-12-	TOSHIBA SATELITE L745-1105U	-	16-12-2011	9,970,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,853,496,723		1,853,496,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	5	Lap Top	RUSAK BERAT	24-04-	MSI	-	24-04-2008	14,080,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,867,576,723		1,867,576,723

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	5	Lap Top	RUSAK BERAT	23-04-	TOSHIBA M500-D432	-	23-04-2010	19,800,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.002	6	Lap Top	RUSAK BERAT	04-08-	TOSHIBA QOSMIO F750	-	04-08-2011	18,996,950	-	RB-Henti Guna
3	3.10.01.02.002	7	Lap Top	RUSAK BERAT	04-08-	TOSHIBA QOSMIO F750	-	04-08-2011	18,996,950	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,925,370,623		1,925,370,623

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	8	Lap Top	RUSAK BERAT	28-03-	ACER	-	28-03-2012	5,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,930,370,623		1,930,370,623

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	8	Lap Top	RUSAK BERAT	04-08-	TOSHIBA QOSMIO F750	-	04-08-2011	18,996,950	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.002	9	Lap Top	RUSAK BERAT	04-08-	TOSHIBA QOSMIO F750	-	04-08-2011	18,996,950	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,968,364,523		1,968,364,523

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	10	Lap Top	RUSAK BERAT	15-04-	FUJITSU	-	15-04-2016	14,950,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.002	13	Lap Top	RUSAK BERAT	31-07-	FUJITSU	-	31-07-2018	12,497,500	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									1,995,812,023		1,995,812,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.002	19	Lap Top	RUSAK BERAT	15-08-	FUJITSU	-	15-08-2018	13,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,008,812,023		2,008,812,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.01.02.003	14	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.01.02.003	15	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
3	3.10.01.02.003	17	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
4	3.10.01.02.003	18	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
5	3.10.01.02.003	20	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
6	3.10.01.02.003	21	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
7	3.10.01.02.003	24	Note Book	RUSAK BERAT	13-12-	TOSHIBA	-	13-12-2010	9,680,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,076,572,023		2,076,572,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.02.010	1	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	RUSAK BERAT	08-05-	HP	-	08-05-2015	3,465,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.02.010	2	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	RUSAK BERAT	23-07-	HP	-	23-07-2020	5,300,000	-	RB-Henti Guna
3	3.10.02.03.003	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	14-09-	CAONON PIXMA iP1880	-	14-09-2007	580,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,085,917,023		2,085,917,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	16-05-	EPSON LX-1170	-	16-05-2006	5,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,090,917,023		2,090,917,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	02-03-	CANON IP 1980	-	02-03-2009	2,500,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	02-03-	CANON IP 1980	-	02-03-2009	2,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,095,917,023		2,095,917,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	16-02-	HP	-	16-02-2009	2,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,097,917,023		2,097,917,023

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	12-08-	-	-	12-08-2011	2,498,750	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,100,415,773		2,100,415,773

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	19-10-	HP Laserjet P1102	-	19-10-2016	2,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,102,415,773		2,102,415,773

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	12-08-	-	-	12-08-2011	2,498,750	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	12-08-	-	-	12-08-2011	2,498,750	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,107,413,273		2,107,413,273

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	24-03-	CANON	-	24-03-2010	1,250,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	24-03-	CANON	-	24-03-2010	1,250,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,109,913,273		2,109,913,273

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	05-04-	BROTHER	-	05-04-2016	1,175,460	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	09-05-	BROTHER	-	09-05-2017	2,500,000	-	RB-Henti Guna
3	3.10.02.03.003	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	09-05-	BROTHER	-	09-05-2017	2,500,000	-	RB-Henti Guna
4	3.10.02.03.003	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	09-05-	BROTHER	-	09-05-2017	2,500,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,118,588,733		2,118,588,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	24-06-	CANON	-	24-06-2016	2,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,120,588,733		2,120,588,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	30-04-	HP LASERZET PRO M1132	-	30-04-2013	2,000,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	30-04-	CANON E500	-	30-04-2013	1,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,123,588,733		2,123,588,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	06-02-	PRINTER EPSON TYPE L120	-	06-02-2017	1,700,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,125,288,733		2,125,288,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	11-04-	EPSON L120	-	11-04-2019	1,900,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,127,188,733		2,127,188,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	17-12-	Printer Canon IP2770	-	17-12-2020	950,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,128,138,733		2,128,138,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	18-04-	PIXMA MP497	-	18-04-2019	2,250,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,130,388,733		2,130,388,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	17-05-	Epson L3110	-	17-05-2021	2,594,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	25-11-	Canon G1020	-	25-11-2021	2,390,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,135,372,733		2,135,372,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.03.003	54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	20-12-	EPSON L5190	-	20-12-2019	4,550,000	-	RB-Henti Guna
2	3.10.02.03.003	55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	28-12-	Canon G1010/BL	-	28-12-2020	1,649,000	-	RB-Henti Guna
3	3.10.02.03.004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	28-03-	FUJITSU	-	28-03-2012	5,000,000	-	RB-Henti Guna
4	3.10.02.03.004	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	28-03-	FUJITSU	-	28-03-2012	5,000,000	-	RB-Henti Guna
5	3.10.02.03.004	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	RUSAK BERAT	15-04-	HP	-	15-04-2016	5,000,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,156,571,733		2,156,571,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	3.10.02.04.014	1	Rak Server	RUSAK BERAT	20-09-	-	-	20-09-2018	7,250,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,163,821,733	2,163,821,733	

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	4.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	RUSAK BERAT	01-02-	-	-	01-02-2001	105,375,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,269,196,733		2,269,196,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	4.01.02.02.007	10	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	RUSAK BERAT	31-12-	Rumah Negara Tipe C Permanen	W9-U6/ 963 /PL.01/6/2023	31-12-1985	33,316,000	Rumah Dinas Jalur 2 Pemda	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,302,512,733		2,302,512,733

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	6.01.01.01.999	51	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Kumpulan Peraturan PerUUan Tambang Mineral & Batu	-	02-01-2013	89,500	-	RB-Henti Guna
2	6.01.01.01.999	52	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Kumpulan Peraturan PerUUan Tambang Mineral & Batu	-	02-01-2013	89,500	-	RB-Henti Guna
3	6.01.01.01.999	61	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Pedoman Terbaru Outsourcing & Kontrak Kerja	-	02-01-2013	35,000	-	RB-Henti Guna
4	6.01.01.01.999	107	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XIX Np.218 th 2003	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
5	6.01.01.01.999	108	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XIX No.226 Tahun 2004	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
6	6.01.01.01.999	109	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XIX No. 227 Tahun 2004	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
7	6.01.01.01.999	110	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XIX No. 228 Th 2004	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
8	6.01.01.01.999	111	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.229 Th 2004	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
9	6.01.01.01.999	112	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th.XX No.231 Th 2004	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
10	6.01.01.01.999	113	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th.XX No.232 Tahun 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
11	6.01.01.01.999	114	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.233 Th 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
12	6.01.01.01.999	115	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.235 Th	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	2005	-			-	RB-Henti Guna
13	6.01.01.01.999	116	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.236 Th 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
14	6.01.01.01.999	117	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.239 Th 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
15	6.01.01.01.999	118	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.240 Th 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
16	6.01.01.01.999	119	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XX No.242 Th 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
17	6.01.01.01.999	120	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.243 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
18	6.01.01.01.999	121	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.244 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
19	6.01.01.01.999	122	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.245 Tahun 2005	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
20	6.01.01.01.999	123	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.246 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
21	6.01.01.01.999	124	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.247 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
22	6.01.01.01.999	125	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.248 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
23	6.01.01.01.999	126	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.249 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
24	6.01.01.01.999	127	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.250 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
25	6.01.01.01.999	128	Buku Lainnya	RUSAK	02-01-	Varia Peradilan	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	BERAT	02-01-	Th XXI N0.251 Tahun 2006	-			-	Guna
26	6.01.01.01.999	129	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th.XXI No.253 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
27	6.01.01.01.999	130	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.254 Tahun 2006	-	02-01-2013	10,000	-	RB-Henti Guna
28	6.01.01.01.999	131	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.255 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
29	6.01.01.01.999	132	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.256 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
30	6.01.01.01.999	133	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.256 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
31	6.01.01.01.999	134	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.256 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
32	6.01.01.01.999	135	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th. XXII No.257 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
33	6.01.01.01.999	136	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th. XXII No.257 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
34	6.01.01.01.999	137	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.258 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
35	6.01.01.01.999	138	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.258 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
36	6.01.01.01.999	139	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.259 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
37	6.01.01.01.999	140	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.259 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
38	6.01.01.01.999	141	Buku Lainnya	RUSAK	02-01-	Varia Peradilan	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	BERAT	02-01-	Th XXII No.260 Tahun 2007	-			-	Guna
39	6.01.01.01.999	142	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.260 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
40	6.01.01.01.999	143	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.261 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
41	6.01.01.01.999	144	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.261 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
42	6.01.01.01.999	145	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.262 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
43	6.01.01.01.999	146	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXI No.262 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
44	6.01.01.01.999	147	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.263 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
45	6.01.01.01.999	148	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.264 Tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
46	6.01.01.01.999	149	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.265 tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
47	6.01.01.01.999	150	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.265 tahun 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
48	6.01.01.01.999	151	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.266 Th 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
49	6.01.01.01.999	152	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.266 Th 2007	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
50	6.01.01.01.999	153	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.271 Th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
51	6.01.01.01.999	154	Buku Lainnya	RUSAK	02-01-	Varia Peradilan	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	BERAT	02-01-	Th XXII No.271 Th 2008	-			-	Guna
52	6.01.01.01.999	155	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.272 Th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
53	6.01.01.01.999	156	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.273 Th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
54	6.01.01.01.999	157	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.273 Th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
55	6.01.01.01.999	158	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.273 Th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
56	6.01.01.01.999	159	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.274 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
57	6.01.01.01.999	160	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.274 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
58	6.01.01.01.999	161	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXII No.274 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
59	6.01.01.01.999	162	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.267 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
60	6.01.01.01.999	163	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No. 268 tahun 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
61	6.01.01.01.999	164	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No. 268 tahun 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
62	6.01.01.01.999	165	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.269 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
63	6.01.01.01.999	166	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.269 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
64	6.01.01.01.999	167	Buku Lainnya	RUSAK	02-01-	Varia Peradilan	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	BERAT	02-01-	Th XXIII No.269 th 2008	-			-	Guna
65	6.01.01.01.999	168	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.270 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
66	6.01.01.01.999	169	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.270 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
67	6.01.01.01.999	170	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th.XXIII No.275 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
68	6.01.01.01.999	171	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.276 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
69	6.01.01.01.999	172	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.276 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
70	6.01.01.01.999	173	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIII No.277 th 2008	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
71	6.01.01.01.999	174	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIV No.278 th 2009	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
72	6.01.01.01.999	175	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXIV No.279 th 2009	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
73	6.01.01.01.999	176	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXV No.292 th 2010	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
74	6.01.01.01.999	177	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXV No.293 th 2010	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
75	6.01.01.01.999	178	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXVI No.300 th 2010	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
76	6.01.01.01.999	179	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	02-01-	Varia Peradilan Th XXVI No.301 th 2010	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti Guna
77	6.01.01.01.999	180	Buku Lainnya	RUSAK	02-01-	Varia Peradilan	-	02-01-2013	15,000	-	RB-Henti

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	BERAT	02-01-	Th XXVI No.301 th 2010	-			-	Guna
78	6.01.01.01.999	266	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Buku Putih Persatuan Wartawan Indonesia Cab. Kep.	-	01-12-2006	30,000	-	RB-Henti Guna
79	6.01.01.01.999	267	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Buku Putih Persatuan Wartawan Indonesia Cab. Kep.	-	01-12-2006	30,000	-	RB-Henti Guna
80	6.01.01.01.999	324	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar Perguruan Tinggi Th 2012	-	01-12-2012	33,000	-	RB-Henti Guna
81	6.01.01.01.999	325	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar Perguruan Tinggi Th 2012	-	01-12-2012	33,000	-	RB-Henti Guna
82	6.01.01.01.999	326	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar Perguruan Tinggi Th 2012	-	01-12-2012	33,000	-	RB-Henti Guna
83	6.01.01.01.999	327	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar Perguruan Tinggi Th 2012	-	01-12-2012	33,000	-	RB-Henti Guna
84	6.01.01.01.999	328	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar Perguruan Tinggi Th 2012	-	01-12-2012	33,000	-	RB-Henti Guna
85	6.01.01.01.999	329	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar PT thd Put.Pengadilan 2010	-	01-12-2010	35,000	-	RB-Henti Guna
86	6.01.01.01.999	330	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar PT thdp Put.Pengadilan Th 2005	-	01-12-2007	45,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

KD KL : 005

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
87	6.01.01.01.999	331	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Komentar PT Thd Put.Pengadilan Th 2006	-	01-12-2006	78,000	-	RB-Henti Guna
88	6.01.01.01.999	332	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Komentar PT Thd Put.Pengadilan Th 2006	-	01-12-2006	78,000	-	RB-Henti Guna
89	6.01.01.01.999	333	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Komentar PT Thd Put.Pengadilan Th.2009	-	01-12-2008	50,000	-	RB-Henti Guna
90	6.01.01.01.999	334	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Komentar PT Thd Put.Pengadilan Th.2009	-	01-12-2008	50,000	-	RB-Henti Guna
91	6.01.01.01.999	335	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Komentar PT Thd Putusan Pengadilan Th.2009	-	01-12-2009	33,000	-	RB-Henti Guna
92	6.01.01.01.999	350	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.PERMA & SEMA MA RI Th.1951-2008	-	01-12-2008	45,000	-	RB-Henti Guna
93	6.01.01.01.999	351	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.PERMA & SEMA MA RI Th.1951-2008	-	01-12-2008	45,000	-	RB-Henti Guna
94	6.01.01.01.999	352	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.PERMA & SEMA MA RI Th.1951-2008	-	01-12-2008	45,000	-	RB-Henti Guna
95	6.01.01.01.999	375	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket. Pidana diluar KUHP Jilid 1	-	01-12-2007	45,000	-	RB-Henti Guna
96	6.01.01.01.999	376	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket. Pidana diluar KUHP Jilid 1	-	01-12-2007	45,000	-	RB-Henti Guna
97	6.01.01.01.999	377	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 2	-	01-12-2007	45,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
98	6.01.01.01.999	378	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 2	-	01-12-2007	45,000	-	RB-Henti Guna
99	6.01.01.01.999	379	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 3	-	01-12-2007	46,000	-	RB-Henti Guna
100	6.01.01.01.999	380	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 3	-	01-12-2007	46,000	-	RB-Henti Guna
101	6.01.01.01.999	381	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 5	-	01-12-2010	51,000	-	RB-Henti Guna
102	6.01.01.01.999	382	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 4	-	01-12-2010	58,000	-	RB-Henti Guna
103	6.01.01.01.999	383	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Perpu Memuat Ket.Pidana Diluar KUHP Jilid 6	-	01-12-2010	47,000	-	RB-Henti Guna
104	6.01.01.01.999	393	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & Putusan PT	-	01-12-2012	46,000	-	RB-Henti Guna
105	6.01.01.01.999	394	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & Putusan PT	-	01-12-2012	46,000	-	RB-Henti Guna
106	6.01.01.01.999	395	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & Putusan PT	-	01-12-2012	46,000	-	RB-Henti Guna
107	6.01.01.01.999	409	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusab PN & PT Perkara Perdata Th.2008	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
108	6.01.01.01.999	410	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusab PN & PT Perkara Perdata Th.2008	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
109	6.01.01.01.999	411	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2009	-	01-12-2009	42,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
110	6.01.01.01.999	412	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2011	-	01-12-2011	43,000	-	RB-Henti Guna
111	6.01.01.01.999	413	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2011	-	01-12-2011	43,000	-	RB-Henti Guna
112	6.01.01.01.999	414	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2011	-	01-12-2011	43,000	-	RB-Henti Guna
113	6.01.01.01.999	415	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PN Perkara Pidana Th.2005	-	01-12-2007	49,000	-	RB-Henti Guna
114	6.01.01.01.999	416	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp. Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2006	-	01-12-2006	43,000	-	RB-Henti Guna
115	6.01.01.01.999	417	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp. Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2006	-	01-12-2006	43,000	-	RB-Henti Guna
116	6.01.01.01.999	418	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2007	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
117	6.01.01.01.999	419	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2007	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
118	6.01.01.01.999	420	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2008	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
119	6.01.01.01.999	421	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2008	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
120	6.01.01.01.999	422	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2010	-	01-12-2010	43,000	-	RB-Henti Guna
121	6.01.01.01.999	423	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2011	-	01-12-2011	45,000	-	RB-Henti Guna
122	6.01.01.01.999	424	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2011	-	01-12-2011	45,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
123	6.01.01.01.999	425	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2005	-	01-12-2007	42,000	-	RB-Henti Guna
124	6.01.01.01.999	426	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2005	-	01-12-2007	42,000	-	RB-Henti Guna
125	6.01.01.01.999	427	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2006	-	01-12-2006	41,000	-	RB-Henti Guna
126	6.01.01.01.999	428	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2006	-	01-12-2006	41,000	-	RB-Henti Guna
127	6.01.01.01.999	429	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2007	-	01-12-2007	37,000	-	RB-Henti Guna
128	6.01.01.01.999	430	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Perdata Th.2007	-	01-12-2007	37,000	-	RB-Henti Guna
129	6.01.01.01.999	431	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana TH.2010	-	01-12-2010	37,000	-	RB-Henti Guna
130	6.01.01.01.999	432	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana TH.2010	-	01-12-2010	37,000	-	RB-Henti Guna
131	6.01.01.01.999	433	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2012	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
132	6.01.01.01.999	434	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2012	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
133	6.01.01.01.999	435	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Putusan PN & PT Perkara Pidana Th.2012	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
134	6.01.01.01.999	448	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp. SEMA & PERMA Serta SK KMA Th.1951-2002	-	01-12-2007	47,000	-	RB-Henti Guna
135	6.01.01.01.999	449	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp. SEMA & PERMA Serta SK KMA Th.1951-	-	01-12-2008	50,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	2008	-			-	RB-Henti Guna
136	6.01.01.01.999	451	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp. SEMA & PERMA RI Th.1951-2005	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
137	6.01.01.01.999	452	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp. SEMA & PERMA RI Th.1951-2005	-	01-12-2007	38,000	-	RB-Henti Guna
138	6.01.01.01.999	453	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.SEMA & PERMA RI Th.1951-2007	-	01-12-2007	46,000	-	RB-Henti Guna
139	6.01.01.01.999	457	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan SK MA & Instruksi MA Th 1951-1994	-	01-12-2006	36,000	-	RB-Henti Guna
140	6.01.01.01.999	465	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Lap.Penelitian Hukum Pidana Adat di Ind.Pengkajian	-	01-12-2010	35,000	-	RB-Henti Guna
141	6.01.01.01.999	564	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kumpulan Hasil Penelitian Hkm Adat PT Aceh	-	01-12-2010	29,000	-	RB-Henti Guna
142	6.01.01.01.999	565	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitan Hk.Adat PT Ambon	-	01-12-2010	35,000	-	RB-Henti Guna
143	6.01.01.01.999	569	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian HK.Adat PT Banjarmasin	-	01-12-2010	27,000	-	RB-Henti Guna
144	6.01.01.01.999	570	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Banten	-	01-12-2010	40,000	-	RB-Henti Guna
145	6.01.01.01.999	571	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Bengkulu 2011	-	01-12-2011	39,000	-	RB-Henti Guna
146	6.01.01.01.999	572	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Gorontalo	-	01-12-2010	43,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
147	6.01.01.01.999	573	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Jakarta	-	01-12-2012	38,000	-	RB-Henti Guna
148	6.01.01.01.999	574	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Jakarta	-	01-12-2012	38,000	-	RB-Henti Guna
149	6.01.01.01.999	575	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Jambi	-	01-12-2010	43,000	-	RB-Henti Guna
150	6.01.01.01.999	576	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Jayapura Jilid II	-	01-12-2008	36,000	-	RB-Henti Guna
151	6.01.01.01.999	577	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Jayapura Jilid II	-	01-12-2008	36,000	-	RB-Henti Guna
152	6.01.01.01.999	578	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Jayapura Jilid II	-	01-12-2008	36,000	-	RB-Henti Guna
153	6.01.01.01.999	579	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian HK.Adat PT Kupang Jilid II T	-	01-12-2008	43,000	-	RB-Henti Guna
154	6.01.01.01.999	580	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian HK.Adat PT Kupang Jilid II T	-	01-12-2008	43,000	-	RB-Henti Guna
155	6.01.01.01.999	581	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian HK.Adat PT Kupang Jilid II T	-	01-12-2008	43,000	-	RB-Henti Guna
156	6.01.01.01.999	582	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Makasar 2011	-	01-12-2011	46,000	-	RB-Henti Guna
157	6.01.01.01.999	583	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Manado	-	01-12-2010	44,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
158	6.01.01.01.999	584	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Manado Palu	-	01-12-2012	31,000	-	RB-Henti Guna
159	6.01.01.01.999	585	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Manado Palu	-	01-12-2012	31,000	-	RB-Henti Guna
160	6.01.01.01.999	586	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Manado Palu	-	01-12-2012	31,000	-	RB-Henti Guna
161	6.01.01.01.999	587	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Mataram	-	01-12-2010	44,000	-	RB-Henti Guna
162	6.01.01.01.999	588	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Medan Jilid II Th	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
163	6.01.01.01.999	589	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Medan Jilid II Th	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
164	6.01.01.01.999	590	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Medan Jilid II Th	-	01-12-2008	41,000	-	RB-Henti Guna
165	6.01.01.01.999	591	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasl Penelitian Hk.Adat PT Padang	-	01-12-2010	41,000	-	RB-Henti Guna
166	6.01.01.01.999	592	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Palangkarya,Ponti	-	01-12-2011	41,000	-	RB-Henti Guna
167	6.01.01.01.999	593	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Palembang	-	01-12-2010	33,000	-	RB-Henti Guna
168	6.01.01.01.999	594	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.	-	01-12-2011	40,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Adat PT Palembang 2011	-			-	RB-Henti Guna
169	6.01.01.01.999	595	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Pontianak Jilid I	-	01-12-2008	26,000	-	RB-Henti Guna
170	6.01.01.01.999	596	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Pontianak Jilid I	-	01-12-2008	26,000	-	RB-Henti Guna
171	6.01.01.01.999	597	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Pontianak Jilid I	-	01-12-2008	26,000	-	RB-Henti Guna
172	6.01.01.01.999	598	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Surabaya Jilid II	-	01-12-2008	26,000	-	RB-Henti Guna
173	6.01.01.01.999	599	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Surabaya Jilid II	-	01-12-2008	26,000	-	RB-Henti Guna
174	6.01.01.01.999	600	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Surabaya Jilid II	-	01-12-2008	26,000	-	RB-Henti Guna
175	6.01.01.01.999	601	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Kump.Hasil Penelitian Hk.Adat PT Yogyakarta Th.201	-	01-12-2011	38,000	-	RB-Henti Guna
176	6.01.01.01.999	604	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Lap.Kegiatan MA RI Tahun 1999-2000	-	01-12-2007	25,000	-	RB-Henti Guna
177	6.01.01.01.999	726	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	PP RI No.8 Tahun 2006 Ttg Pelaporan Keuangan & Kin	-	01-12-2008	38,000	-	RB-Henti Guna
178	6.01.01.01.999	752	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Rangkuman SK KMA RI Th.1951-1994	-	01-12-2006	37,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
179	6.01.01.01.999	753	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Rangkuman SK KMA RI Th.1951-1994	-	01-12-2006	37,000	-	RB-Henti Guna
180	6.01.01.01.999	755	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Relevansi Hukum Pidana Adat Dlm Pembaharuan Hkm Pi	-	01-12-2006	24,000	-	RB-Henti Guna
181	6.01.01.01.999	756	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Relevansi Hukum Pidana Adat Dlm Pembaharuan Hkm Pi	-	01-12-2006	24,000	-	RB-Henti Guna
182	6.01.01.01.999	818	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	SEMA & PERMA RI Th.1951-2002	-	01-12-2006	49,000	-	RB-Henti Guna
183	6.01.01.01.999	838	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU Pertambangan Mineral & Batubara No.4 Th 2009	-	01-12-2010	30,000	-	RB-Henti Guna
184	6.01.01.01.999	853	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
185	6.01.01.01.999	854	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
186	6.01.01.01.999	855	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
187	6.01.01.01.999	856	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
188	6.01.01.01.999	857	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
189	6.01.01.01.999	858	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	KDRT	-			-	RB-Henti Guna
190	6.01.01.01.999	859	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
191	6.01.01.01.999	860	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
192	6.01.01.01.999	861	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
193	6.01.01.01.999	862	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
194	6.01.01.01.999	863	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
195	6.01.01.01.999	864	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT	-	01-12-2008	34,000	-	RB-Henti Guna
196	6.01.01.01.999	882	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No.3 Th.2009 Ttg Perbhan Kedua atas UU No.14	-	01-12-2009	34,000	-	RB-Henti Guna
197	6.01.01.01.999	883	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	UU RI No.3 Th.2009 Ttg Perbhan Kedua atas UU No.14	-	01-12-2009	34,000	-	RB-Henti Guna
198	6.01.01.01.999	931	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Put. PN&PT Perkara Perselisihan Hub.Indu 2013	-	01-12-2013	50,000	-	RB-Henti Guna
199	6.01.01.01.999	932	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Put.PN&PT Perkara	-	01-12-2013	43,000	-	RB-Henti Guna

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT KL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_kl_poc

KD KL : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
			Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Perselisihan Hub.Indu 2013	-			-	RB-Henti Guna
200	6.01.01.01.999	933	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Put.PN&PT Perkara Perselisihan Hub.Indu 2013	-	01-12-2013	43,000	-	RB-Henti Guna
201	6.01.01.01.999	934	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar PT Thd Putusan Pengadilan 2013	-	01-12-2013	36,000	-	RB-Henti Guna
202	6.01.01.01.999	935	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Komentar PT Thd Putusan Pengadilan 2013	-	01-12-2013	36,000	-	RB-Henti Guna
203	6.01.01.01.999	936	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Putusan PN & PT Perkara Perdata 2013	-	01-12-2013	36,000	-	RB-Henti Guna
204	6.01.01.01.999	937	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himpunan Putusan PN & PT Perkara Perdata 2013	-	01-12-2013	36,000	-	RB-Henti Guna
205	6.01.01.01.999	961	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Eksplorasi Metafisika Jiwa Manusia	-	01-12-2013	32,000	-	RB-Henti Guna
206	6.01.01.01.999	963	Buku Lainnya	RUSAK BERAT	01-12-	Himp.Put.PN & PT Perkara Pidana 2009	-	01-12-2009	38,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									2,308,766,733		2,308,766,733

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

TANGGAL : 06-05-2025

NM KL : MAHKAMAH AGUNG

Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_kl_poc

KD ES1 : 005

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
				TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data										
JUMLAH										

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	**Tanah**	**8,060,651**	**20,014,331,807,703**	**0**	**0**	**0**	**20,014,331,807,703**
20101	TANAH PERSIL	7,943,050	19,865,176,902,252	0	0	0	19,865,176,902,252
20102	TANAH NON PERSIL	113,854	146,641,578,451	0	0	0	146,641,578,451
20103	LAPANGAN	3,747	2,513,327,000	0	0	0	2,513,327,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**616,968**	**5,005,464,644,692**	**(3,750,197,294,537)**	**(351,123,002,644)**	**(4,101,320,297,181)**	**904,144,347,511**
30101	ALAT BESAR DARAT	2	46,980,711	(16,500,000)	(1,524,036)	(18,024,036)	28,956,675
30103	ALAT BANTU	1,371	205,624,809,049	(129,236,292,499)	(14,049,859,349)	(143,286,151,848)	62,338,657,201
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7,190	627,946,870,573	(532,573,862,908)	(11,770,522,070)	(544,344,384,978)	83,602,485,595
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	886	2,167,869,295	(1,925,050,427)	(158,360,818)	(2,083,411,245)	84,458,050
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	71	10,071,547,502	(9,638,430,422)	(147,671,146)	(9,786,101,568)	285,445,934
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	279	5,304,350,824	(1,185,244,623)	(934,232,254)	(2,119,476,877)	3,184,873,947
30303	ALAT UKUR	218	1,428,026,431	(1,401,582,348)	90,108,622	(1,311,473,726)	116,552,705
30401	ALAT PENGOLAHAN	454	2,011,124,509	(1,471,810,910)	(154,837,039)	(1,626,647,949)	384,476,560
30501	ALAT KANTOR	93,774	536,736,275,555	(468,069,638,926)	(16,874,298,481)	(484,943,937,407)	51,792,338,148
30502	ALAT RUMAH TANGGA	369,489	1,390,534,775,621	(1,034,262,007,418)	(87,628,600,325)	(1,121,890,607,743)	268,644,167,878
30601	ALAT STUDIO	19,459	199,668,887,251	(132,798,666,631)	(19,992,103,711)	(152,790,770,342)	46,878,116,909
30602	ALAT KOMUNIKASI	8,015	50,736,926,556	(43,478,858,496)	(1,612,191,953)	(45,091,050,449)	5,645,876,107
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,080	126,721,720,558	(53,667,970,301)	(8,546,163,779)	(62,214,134,080)	64,507,586,478
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	12	133,372,941	(119,366,288)	(1,941,421)	(121,307,709)	12,065,232
30701	ALAT KEDOKTERAN	2,383	12,477,620,339	(8,742,357,724)	(911,201,357)	(9,653,559,081)	2,824,061,258
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	198	1,117,132,219	(604,639,776)	(167,005,579)	(771,645,355)	345,486,864
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,080	12,769,526,643	(5,977,906,861)	(1,012,298,743)	(6,990,205,604)	5,779,321,039
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	46	593,203,308	(91,174,950)	(37,606,888)	(128,781,838)	464,421,470
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	169	919,711,333	(297,618,576)	(58,888,486)	(356,507,062)	563,204,271
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	7	750,630,700	(251,993,095)	(75,063,070)	(327,056,165)	423,574,535
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	13	69,766,740	(42,118,878)	(1,974,846)	(44,093,724)	25,673,016
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	18	1,717,513,080	(683,893,134)	(99,620,193)	(783,513,327)	933,999,753
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	15	176,037,000	(57,968,750)	(15,359,500)	(73,328,250)	102,708,750
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	45	6,719,471,380	(6,596,766,483)	(59,573,647)	(6,656,340,130)	63,131,250
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	157	1,558,921,091	(1,137,292,771)	(215,387,192)	(1,352,679,963)	206,241,128
31001	KOMPUTER UNIT	66,405	892,900,841,607	(714,811,992,764)	(60,648,536,487)	(775,460,529,251)	117,440,312,356
31002	PERALATAN KOMPUTER	42,865	884,536,788,769	(587,669,175,779)	(124,334,105,211)	(712,003,280,990)	172,533,507,779
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	3,850,000	(2,695,000)	(770,000)	(3,465,000)	385,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	8	272,740,109	(95,832,677)	(23,448,295)	(119,280,972)	153,459,137
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10	39,705,000	(4,931,000)	(3,970,500)	(8,901,500)	30,803,500
31301	SUMUR	12	540,049,059	(200,845,766)	(54,540,499)	(255,386,265)	284,662,794
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	12	5,973,000	(4,977,504)	(398,208)	(5,375,712)	597,288

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	(17,655,000)	0	(17,655,000)	0
31501	ALAT DETEKSI	172	330,157,500	(227,593,500)	(29,304,000)	(256,897,500)	73,260,000
31502	ALAT PELINDUNG	10	5,490,450	(4,610,450)	(440,000)	(5,050,450)	440,000
31503	ALAT SAR	13	1,490,739,650	(1,487,154,238)	(3,585,412)	(1,490,739,650)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	770	22,409,205,514	(7,417,695,299)	(2,425,234,548)	(9,842,929,847)	12,566,275,667
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	46	482,936,694	(135,262,752)	(33,063,745)	(168,326,497)	314,610,197
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	16	512,416,496	(299,634,369)	(74,223,989)	(373,858,358)	138,558,138
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	21	2,832,945,296	(2,480,708,190)	967,410,594	(1,513,297,596)	1,319,647,700
31901	PERALATAN OLAH RAGA	158	1,080,079,339	(1,007,517,054)	(22,615,083)	(1,030,132,137)	49,947,202
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8,877**	**13,252,752,386,154**	**(2,277,932,308,669)**	**(386,143,832,632)**	**(2,664,076,141,301)**	**10,588,676,244,853**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,401	11,690,654,131,602	(1,892,802,255,774)	(319,668,613,675)	(2,212,470,869,449)	9,478,183,262,153
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,709	1,276,283,933,741	(352,106,972,782)	(58,598,758,830)	(410,705,731,612)	865,578,202,129
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	407,669,000	(51,544,361)	(9,371,702)	(60,916,063)	346,752,937
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	6	2,033,349,084	(363,645,546)	(62,120,356)	(425,765,902)	1,607,583,182
40401	TUGU/TANDA BATAS	760	283,373,302,727	(32,607,890,206)	(7,804,968,069)	(40,412,858,275)	242,960,444,452
134111	**Jalan dan Jembatan**	**3,039**	**19,628,745,150**	**(6,868,145,387)**	**(1,885,867,206)**	**(8,754,012,593)**	**10,874,732,557**
50101	JALAN	3,009	17,843,242,150	(6,624,667,703)	(1,845,287,592)	(8,469,955,295)	9,373,286,855
50102	JEMBATAN	30	1,785,503,000	(243,477,684)	(40,579,614)	(284,057,298)	1,501,445,702
134112	**Irigasi**	**75**	**8,176,807,738**	**(1,711,176,005)**	**(314,879,210)**	**(2,026,055,215)**	**6,150,752,523**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0	0	0	0	0
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	0	0	0	0	0	0
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0	0	0	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	230,653,264	(11,532,663)	(23,065,326)	(34,597,989)	196,055,275
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	54	4,838,178,474	(1,186,035,816)	(199,157,866)	(1,385,193,682)	3,452,984,792
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	54,664,000	(8,974,691)	(1,631,762)	(10,606,453)	44,057,547
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	19	3,053,312,000	(504,632,835)	(91,024,256)	(595,657,091)	2,457,654,909
134113	**Jaringan**	**166**	**30,544,727,964**	**(12,696,162,729)**	**(688,276,167)**	**(13,384,438,896)**	**17,160,289,068**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	26	3,499,848,930	(1,356,623,452)	(116,661,634)	(1,473,285,086)	2,026,563,844
50302	INSTALASI AIR KOTOR	19	1,795,564,901	(651,287,014)	(59,852,167)	(711,139,181)	1,084,425,720
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	50,962,510	(50,962,510)	0	(50,962,510)	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	17,981,745,413	(5,210,075,436)	(449,543,639)	(5,659,619,075)	12,322,126,338
50307	INSTALASI PERTAHANAN	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	22	4,411,896,855	(4,431,216,855)	19,320,000	(4,411,896,855)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	38	1,897,870,397	(530,379,917)	(47,446,775)	(577,826,692)	1,320,043,705

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
50403	JARINGAN TELEPON	20	906,838,958	(465,617,545)	(34,091,952)	(499,709,497)	407,129,461
50404	JARINGAN GAS	0	0	0	0	0	0
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**4**	**1,078,042,792**	**(26,480,109)**	**26,480,109**	**0**	**1,078,042,792**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	4	1,078,042,792	(26,480,109)	26,480,109	0	1,078,042,792
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,038,354**	**50,541,287,526**	**(565,236,646)**	**(21,904,925)**	**(587,141,571)**	**49,954,145,955**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,036,315	35,704,558,095	(2,683,400)	0	(2,683,400)	35,701,874,695
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	39	7,902,158,518	0	0	0	7,902,158,518
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	732	3,858,996,379	0	(60,000)	(60,000)	3,858,936,379
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	463	2,454,326,317	(562,553,246)	(21,844,925)	(584,398,171)	1,869,928,146
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	377	576,705,267	0	0	0	576,705,267
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	428	44,542,950	0	0	0	44,542,950
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**86,650**	**147,335,759,876**	**(150,454,857,442)**	**14,753,936,258**	**(135,700,921,184)**	**11,634,838,692**
20101	TANAH PERSIL	600	4,000,000	0	0	0	4,000,000
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	73	2,149,416,786	(2,691,189,209)	541,772,423	(2,149,416,786)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	512	14,533,792,500	(12,013,469,418)	(2,362,025,939)	(14,375,495,357)	158,297,143
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	25	14,865,000	(24,077,473)	9,212,473	(14,865,000)	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2	623,405,000	(623,405,000)	0	(623,405,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	1,200,000	0	(1,200,000)	(1,200,000)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10	28,677,500	(32,244,600)	3,567,100	(28,677,500)	0
30303	ALAT UKUR	101	452,338,880	(308,164,012)	(144,174,868)	(452,338,880)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	21	37,675,966	(122,026,375)	84,350,409	(37,675,966)	0
30501	ALAT KANTOR	7,575	11,685,598,455	(17,371,785,466)	5,692,709,961	(11,679,075,505)	6,522,950
30502	ALAT RUMAH TANGGA	24,557	37,371,992,192	(43,888,562,000)	6,545,361,958	(37,343,200,042)	28,792,150
30601	ALAT STUDIO	966	2,899,398,832	(3,129,241,802)	232,062,010	(2,897,179,792)	2,219,040
30602	ALAT KOMUNIKASI	911	2,247,056,017	(2,133,610,150)	(113,445,867)	(2,247,056,017)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	83	2,669,103,948	(1,127,030,908)	(1,179,496,990)	(2,306,527,898)	362,576,050
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0	0	(1,595,000)	1,595,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	109	571,423,917	(440,827,859)	(130,596,058)	(571,423,917)	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	16	377,657,500	(277,799,500)	(66,572,000)	(344,371,500)	33,286,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	21,689,500	(98,902,148)	78,389,302	(20,512,846)	1,176,654
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	7,150,000	0	(2,383,330)	(2,383,330)	4,766,670
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	3	13,910,000	(21,740,277)	9,409,913	(12,330,364)	1,579,636
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	4,400,001	(4,400,001)	0	(4,400,001)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	11,000,000	(11,000,000)	0	(11,000,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	4,134	45,477,904,725	(49,970,032,472)	4,520,266,014	(45,449,766,458)	28,138,267
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,640	6,939,996,499	(8,753,824,596)	1,821,473,718	(6,932,350,878)	7,645,621
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0	(1,500,000)	1,500,000	0	0
31301	SUMUR	1	3,500,000	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	4	36,400,000	(498,752,021)	463,672,021	(35,080,000)	1,320,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	9,937,400	(9,948,400)	11,000	(9,937,400)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	(20,000)	20,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	28	68,609,768	(22,249,268)	(46,360,500)	(68,609,768)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	47	11,337,671,871	(5,027,083,459)	(493,183,520)	(5,520,266,979)	5,817,404,892
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	53	6,014,725,910	(1,736,447,047)	(744,346,283)	(2,480,793,330)	3,533,932,580
40401	TUGU/TANDA BATAS	2	66,151,000	(52,754,026)	29,072,611	(23,681,415)	42,469,585
50101	JALAN	0	0	0	0	0	0
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	0	0	0	0
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1	100,000	(100,000)	0	(100,000)	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	5,000,000	(2,187,500)	(125,000)	(2,312,500)	2,687,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	7,692,000	(2,980,650)	(192,300)	(3,172,950)	4,519,050
50310	INSTALASI LAIN	2	25,370,000	(25,370,000)	0	(25,370,000)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0
50403	JARINGAN TELEPON	1	5,000,000	(3,625,000)	(250,000)	(3,875,000)	1,125,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	43,975	1,375,064,905	0	0	0	1,375,064,905
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	12	119,218,999	0	0	0	119,218,999
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	5	19,618,805	(23,411,805)	3,843,000	(19,568,805)	50,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	6	909,000	0	0	0	909,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	161	2,987,000	0	0	0	2,987,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	1	94,150,000	0	0	0	94,150,000
JUMLAH		**9,814,784**	**38,529,854,209,595**	**(6,200,451,661,524)**	**(725,397,346,417)**	**(6,925,849,007,941)**	**31,604,005,201,654**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**104,565**	**34,104,600,455**	**(19,112,788,802)**	**(3,795,908,406)**	**(22,908,697,208)**	**11,195,903,247**
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	154	49,870,643	(15,015,910)	(3,291,770)	(18,307,680)	31,562,963
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	24	634,839,000	(625,523,839)	(9,315,161)	(634,839,000)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	38	23,283,280	(20,018,530)	(3,264,750)	(23,283,280)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	15	9,317,000	(1,659,350)	(879,350)	(2,538,700)	6,778,300
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	126	34,632,179	(20,022,871)	(4,111,310)	(24,134,181)	10,497,998
30303	ALAT UKUR	45	14,334,040	(6,068,710)	(2,812,480)	(8,881,190)	5,452,850
30401	ALAT PENGOLAHAN	526	23,584,600	(10,714,668)	(3,517,432)	(14,232,100)	9,352,500
30501	ALAT KANTOR	19,726	3,603,729,976	(2,571,298,592)	(212,791,235)	(2,784,089,827)	819,640,149
30502	ALAT RUMAH TANGGA	70,942	25,637,687,141	(13,546,240,749)	(3,055,440,291)	(16,601,681,040)	9,036,006,101
30601	ALAT STUDIO	2,834	934,671,682	(541,708,161)	(107,063,232)	(648,771,393)	285,900,289
30602	ALAT KOMUNIKASI	2,512	528,936,784	(411,634,635)	(35,755,784)	(447,390,419)	81,546,365
30603	PERALATAN PEMANCAR	172	25,439,744	(11,990,360)	(1,684,301)	(13,674,661)	11,765,083
30701	ALAT KEDOKTERAN	1,363	623,239,621	(264,760,082)	(96,130,147)	(360,890,229)	262,349,392
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	281	109,273,711	(36,682,478)	(22,563,761)	(59,246,239)	50,027,472
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	501	83,457,827	(29,040,709)	(5,626,442)	(34,667,151)	48,790,676
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	13	7,220,240	(722,025)	(481,350)	(1,203,375)	6,016,865
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	20	16,310,001	(1,875,002)	(1,024,002)	(2,899,004)	13,410,997
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	150,000	(145,000)	(5,000)	(150,000)	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	9	4,235,000	(350,000)	(1,942,500)	(2,292,500)	1,942,500
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	222	30,669,300	(24,235,375)	(2,195,151)	(26,430,526)	4,238,774
31001	KOMPUTER UNIT	252	238,673,706	(229,060,894)	(3,340,312)	(232,401,206)	6,272,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	3,004	1,314,771,169	(700,557,330)	(208,442,629)	(908,999,959)	405,771,210
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	1	194,250	(19,425)	(19,425)	(38,850)	155,400
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2	594,000	(495,000)	(39,600)	(534,600)	59,400
31502	ALAT PELINDUNG	15	2,457,276	(675,276)	(356,400)	(1,031,676)	1,425,600
31503	ALAT SAR	4	1,041,625	(793,719)	(247,906)	(1,041,625)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	147	83,802,588	(6,434,136)	(8,330,118)	(14,764,254)	69,038,334
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	25	11,479,925	(2,910,672)	(858,118)	(3,768,790)	7,711,135
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	175,000	(175,000)	0	(175,000)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1,574	53,914,350	(29,345,507)	(4,378,449)	(33,723,956)	20,190,394
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	15	2,614,797	(2,614,797)	0	(2,614,797)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**186**	**2,225,472,916**	**(404,231,664)**	**52,918,811**	**(351,312,853)**	**1,874,160,063**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	149	1,839,587,630	(317,761,098)	60,469,231	(257,291,867)	1,582,295,763
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	13	193,767,446	(34,559,205)	(3,823,528)	(38,382,733)	155,384,713
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	14,512,953	(1,777,723)	(40,259)	(1,817,982)	12,694,971
40401	TUGU/TANDA BATAS	20	177,604,887	(50,133,638)	(3,686,633)	(53,820,271)	123,784,616
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**3,598**	**205,529,758**	**(286,000)**	**0**	**(286,000)**	**205,243,758**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	48	48,000	0	0	0	48,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	286,000	(286,000)	0	(286,000)	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	11	522,000	0	0	0	522,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	182	8,215,009	0	0	0	8,215,009
60501	TANAMAN	3,356	196,458,749	0	0	0	196,458,749
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**7,555**	**1,161,848,740**	**(1,628,215,428)**	**490,042,883**	**(1,138,172,545)**	**23,676,195**
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	35,085,000	(44,905,000)	9,820,000	(35,085,000)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	8	790,000	(1,114,000)	324,000	(790,000)	0
30303	ALAT UKUR	1	50,000	(260,000)	210,000	(50,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	20,000	(250,001)	230,001	(20,000)	0
30501	ALAT KANTOR	1,382	158,347,739	(251,576,562)	93,343,823	(158,232,739)	115,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,407	819,009,644	(1,104,691,984)	295,730,015	(808,961,969)	10,047,675
30601	ALAT STUDIO	381	15,757,000	(18,287,500)	2,530,500	(15,757,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	154	27,849,986	(32,064,382)	6,281,966	(25,782,416)	2,067,570
30603	PERALATAN PEMANCAR	2	222,800	(522,800)	300,000	(222,800)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	8	4,114,420	(10,000)	(3,059,420)	(3,069,420)	1,045,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	(125,000)	125,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	5	4,428,000	(965,000)	(1,802,500)	(2,767,500)	1,660,500
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	26	31,201,675	(107,049,675)	75,848,000	(31,201,675)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	153	52,947,476	(61,730,124)	10,203,898	(51,526,226)	1,421,250
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	675,000	(675,000)	0	(675,000)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	4	760,000	(910,000)	150,000	(760,000)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	9,620,000	(3,078,400)	(192,400)	(3,270,800)	6,349,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	11	970,000	0	0	0	970,000
JUMLAH		**115,904**	**37,697,451,869**	**(21,145,521,894)**	**(3,252,946,712)**	**(24,398,468,606)**	**13,298,983,263**

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tanggal : 06/05/25 8:43 AM

Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
162151	**Software**	**1,262**	**59,883,255,953**	**(44,029,441,166)**	**3,671,505,396**	**(40,357,935,770)**	**19,525,320,183**
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,262	59,883,255,953	(44,029,441,166)	3,671,505,396	(40,357,935,770)	19,525,320,183
162161	**Lisensi**	**113**	**32,453,641,795**	**(7,060,151,484)**	**(2,201,512,930)**	**(9,261,664,414)**	**23,191,977,381**
80101	ASET TAK BERWUJUD	113	32,453,641,795	(7,060,151,484)	(2,201,512,930)	(9,261,664,414)	23,191,977,381
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**	**10**	**1,804,868,600**	**0**	**0**	**0**	**1,804,868,600**
80101	ASET TAK BERWUJUD	10	1,804,868,600	0	0	0	1,804,868,600
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**	**228**	**4,662,130,394**	**0**	**0**	**0**	**4,662,130,394**
80101	ASET TAK BERWUJUD	228	4,662,130,394	0	0	0	4,662,130,394
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan**	**246**	**14,036,616,555**	**(1,636,000,130)**	**(11,641,549,983)**	**(13,277,550,113)**	**759,066,442**
80101	ASET TAK BERWUJUD	246	14,036,616,555	(1,636,000,130)	(11,641,549,983)	(13,277,550,113)	759,066,442
JUMLAH		**1,859**	**112,840,513,297**	**(52,725,592,780)**	**(10,171,557,517)**	**(62,897,150,297)**	**49,943,363,000**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER BIDANG BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

131111 Tanah

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		8,060,651	20,014,331,807,703	8,060,651	20,014,331,807,70	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	8,050,474	20,042,057,573,980	8,050,474	20,042,057,573,98	0	0
100	Saldo Awal	-	20,087	12,744,947,019	20,087	12,744,947,019	0	0
101	Pembelian	-	14,000	49,815,000	14,000	49,815,000	0	0
102	Transfer Masuk	-	37,025	36,048,421,084	37,025	36,048,421,084	0	0
103	Hibah Masuk	-	159,977	30,515,020,091	159,977	30,515,020,091	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	29,379	33,457,418,000	29,379	33,457,418,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	5,559	1,413,329,734	5,559	1,413,329,734	0	0
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	-	(155,888)	0	(155,888)	0	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	35,280,428,362	0	35,280,428,362	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	1,140,840,348	0	1,140,840,348	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	(793,331,324)	0	(793,331,324)	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(1,303,656,367)	0	(1,303,656,367)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(32,386)	(32,072,703,814)	(32,386)	(32,072,703,814)	0	0
303	Hibah Keluar	-	(7,172)	(4,765,411,000)	(7,172)	(4,765,411,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(28,229)	(33,457,418,000)	(28,229)	(33,457,418,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(32,175)	(105,983,465,410)	(32,175)	(105,983,465,410)	0	0
TOTAL				**20,014,331,807,703**		**20,014,331,807,703**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		1,527	205,721,660,403	1,373	205,671,789,760	154	49,870,643
000	Saldo Awal TAYL	-	1,471	184,879,809,082	1,323	184,831,287,539	148	48,521,543
100	Saldo Awal	-	9	3,044,435,224	9	3,044,435,224	0	0
101	Pembelian	-	45	7,517,150,308	28	7,510,034,908	17	7,115,400
103	Hibah Masuk	-	1	1,499,744,000	1	1,499,744,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	1	502,823,400	1	502,823,400	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	14	6,130,343,390	14	6,130,343,390	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	42	5,307,365,961	40	5,305,869,961	2	1,496,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	2	513,137,500	2	513,137,500	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	1	435,660,000	1	435,660,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	42,517,500	0	42,517,500	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(45,171,692)	0	(45,171,692)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(23)	(2,509,165,770)	(14)	(2,505,463,470)	(9)	(3,702,300)
305	Koreksi Pencatatan	-	(3)	(478,177,500)	(3)	(478,177,500)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(33)	(1,118,811,000)	(29)	(1,115,251,000)	(4)	(3,560,000)
302	ALAT ANGKUTAN		8,138	630,772,862,148	8,076	630,114,739,868	62	658,122,280
000	Saldo Awal TAYL	-	8,415	614,425,536,217	8,312	613,764,928,737	103	660,607,480
100	Saldo Awal	-	12	37,296,000	12	37,296,000	0	0
101	Pembelian	-	70	11,698,848,999	70	11,698,848,999	0	0
102	Transfer Masuk	-	7	1,929,242,636	7	1,929,242,636	0	0
103	Hibah Masuk	-	32	17,042,682,790	32	17,042,682,790	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	1	74,232,000	1	74,232,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Pembatalan Penghapusan	-	17	585,263,545	17	585,263,545	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	4	744,232,445	4	744,232,445	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	3	458,232,000	3	458,232,000	0	0
193	Batal Transfer Keluar	-	1	339,000,000	1	339,000,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	52,412,001	0	52,412,001	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	162,829,999	0	162,829,999	0	0
302	Transfer Keluar	-	(8)	(2,268,242,636)	(8)	(2,268,242,636)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(45)	(827,142,395)	(30)	(814,859,895)	(15)	(12,282,500)
305	Koreksi Pencatatan	-	(36)	(616,734,699)	(9)	(616,731,999)	(27)	(2,700)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(363)	(13,728,303,657)	(362)	(13,728,103,657)	(1)	(200,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	28	663,476,903	26	653,476,903	2	10,000,000
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		754	16,862,207,976	568	16,803,924,757	186	58,283,219
000	Saldo Awal TAYL	-	789	16,741,404,072	605	16,684,324,593	184	57,079,479
101	Pembelian	-	15	74,418,450	15	74,418,450	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	1	240,000	0	0	1	240,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	527,340	0	0	1	527,340
112	Perolehan Lainnya	-	10	231,599,614	5	230,413,214	5	1,186,400
304	Reklasifikasi Keluar	-	(3)	(4,340,000)	(3)	(4,340,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(18,830,000)	(1)	(18,830,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(58)	(162,811,500)	(53)	(162,061,500)	(5)	(750,000)
304	ALAT PERTANIAN		980	2,034,709,109	454	2,011,124,509	526	23,584,600
000	Saldo Awal TAYL	-	1,023	2,036,899,439	493	2,011,450,720	530	25,448,719

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Saldo Awal	-	16	61,000,000	16	61,000,000	0	0
101	Pembelian	-	21	76,747,500	21	76,747,500	0	0
102	Transfer Masuk	-	16	47,177,635	16	47,177,635	0	0
103	Hibah Masuk	-	1	900,000	0	0	1	900,000
193	Batal Transfer Keluar	-	9	22,104,875	9	22,104,875	0	0
302	Transfer Keluar	-	(25)	(69,282,510)	(25)	(69,282,510)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(11)	(17,142,060)	(8)	(14,400,000)	(3)	(2,742,060)
305	Koreksi Pencatatan	-	(18)	(65,567,500)	(18)	(65,567,500)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(52)	(58,128,270)	(50)	(58,106,211)	(2)	(22,059)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		553,931	1,956,512,468,293	463,263	1,927,271,051,176	90,668	29,241,417,117
000	Saldo Awal TAYL	-	552,727	1,838,444,748,299	463,010	1,810,813,138,602	89,717	27,631,609,697
100	Saldo Awal	-	2,288	110,776,382,508	2,068	110,613,435,782	220	162,946,726
101	Pembelian	-	8,129	47,565,393,272	7,171	46,932,539,721	958	632,853,551
102	Transfer Masuk	-	1,495	4,295,326,043	1,179	4,061,103,305	316	234,222,738
103	Hibah Masuk	-	4,484	17,776,283,065	3,254	17,229,488,264	1,230	546,794,801
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	3	982,446,000	3	982,446,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	351	202,546,973	209	185,737,473	142	16,809,500
107	Reklasifikasi Masuk	-	426	3,194,161,140	381	3,160,642,414	45	33,518,726
112	Perolehan Lainnya	-	3,433	37,809,092,009	1,796	37,233,009,921	1,637	576,082,088
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	6	85,000	0	0	6	85,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	1	1,220,000	0	0	1	1,220,000
193	Batal Transfer Keluar	-	50	283,063,660	50	283,063,660	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	14	7,342,650	14	7,342,650	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	7,526,129,715	0	7,526,129,715	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	78,386,033	0	78,385,033	0	1,000
209	Koreksi Manual	-	0	(2,600,712,000)	0	(2,600,712,000)	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(78,737,271,303)	0	(78,736,501,303)	0	(770,000)
302	Transfer Keluar	-	(490)	(2,686,633,803)	(472)	(2,675,889,943)	(18)	(10,743,860)
304	Reklasifikasi Keluar	-	(280)	(2,322,409,019)	(272)	(2,317,183,019)	(8)	(5,226,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(312)	(4,144,850,853)	(240)	(4,093,507,285)	(72)	(51,343,568)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-	(6)	(85,000)	0	0	(6)	(85,000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(1)	(1,220,000)	(1)	(1,220,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(14)	(7,342,650)	0	0	(14)	(7,342,650)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(19,185)	(25,557,580,549)	(15,559)	(25,023,344,729)	(3,626)	(534,235,820)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	812	3,627,967,103	672	3,612,946,915	140	15,020,188
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		34,084	378,749,955,516	28,566	377,260,907,306	5,518	1,489,048,210
000	Saldo Awal TAYL	-	34,118	363,853,394,747	28,622	362,423,602,017	5,496	1,429,792,730
100	Saldo Awal	-	203	1,658,074,835	172	1,642,731,796	31	15,343,039
101	Pembelian	-	312	15,224,467,712	260	15,192,416,412	52	32,051,300
102	Transfer Masuk	-	19	2,678,183,412	19	2,678,183,412	0	0
103	Hibah Masuk	-	287	3,148,001,926	268	3,135,373,926	19	12,628,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	1	569,660,000	1	569,660,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	26	249,883,000	23	249,703,000	3	180,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Reklasifikasi Masuk	-	44	288,695,507	41	287,128,307	3	1,567,200
112	Perolehan Lainnya	-	213	3,832,348,147	191	3,816,543,005	22	15,805,142
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	349,300,000	0	349,300,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(67,100,000)	0	(67,100,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(19)	(2,678,183,412)	(19)	(2,678,183,412)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(52)	(3,758,081,985)	(52)	(3,758,081,985)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(8)	(501,870,000)	(8)	(501,870,000)	0	0
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-	(1)	(435,660,000)	(1)	(435,660,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1,075)	(5,667,680,373)	(961)	(5,648,549,172)	(114)	(19,131,201)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	16	6,522,000	10	5,710,000	6	812,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		4,225	14,327,265,890	2,581	13,594,752,558	1,644	732,513,332
000	Saldo Awal TAYL	-	4,175	13,805,690,126	2,537	13,072,441,174	1,638	733,248,952
100	Saldo Awal	-	8	10,460,000	5	9,010,000	3	1,450,000
101	Pembelian	-	54	599,349,384	53	598,799,384	1	550,000
103	Hibah Masuk	-	10	35,375,300	10	35,375,300	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	38	75,306,750	25	68,333,950	13	6,972,800
112	Perolehan Lainnya	-	5	1,302,000	0	0	5	1,302,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	1	1,567,000	0	0	1	1,567,000
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(1,302,000)	0	0	0	(1,302,000)
304	Reklasifikasi Keluar	-	(43)	(58,171,000)	(34)	(51,010,000)	(9)	(7,161,000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(1)	(1,567,000)	(1)	(1,567,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(22)	(140,744,670)	(14)	(136,630,250)	(8)	(4,114,420)

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	ALAT LABORATORIUM		1,883	17,103,526,872	1,348	16,996,388,804	535	107,138,068
000	Saldo Awal TAYL	-	1,812	15,695,427,871	1,312	15,609,364,569	500	86,063,302
100	Saldo Awal	-	44	48,203,700	12	31,643,700	32	16,560,000
103	Hibah Masuk	-	28	579,876,800	28	579,876,800	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	1	244,140,000	1	244,140,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	76	1,185,259,057	57	1,168,983,785	19	16,275,272
304	Reklasifikasi Keluar	-	(70)	(615,973,056)	(59)	(608,640,550)	(11)	(7,332,506)
305	Koreksi Pencatatan	-	(2)	(20,000,000)	(2)	(20,000,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(8)	(15,807,500)	(3)	(11,379,500)	(5)	(4,428,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	2	2,400,000	2	2,400,000	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		433	8,313,296,771	202	8,278,392,471	231	34,904,300
000	Saldo Awal TAYL	-	421	8,199,651,751	199	8,170,223,451	222	29,428,300
100	Saldo Awal	-	1	4,840,000	1	4,840,000	0	0
101	Pembelian	-	7	8,713,000	2	7,143,000	5	1,570,000
103	Hibah Masuk	-	10	38,545,600	4	33,889,600	6	4,656,000
112	Perolehan Lainnya	-	5	77,324,700	2	75,757,500	3	1,567,200
304	Reklasifikasi Keluar	-	(11)	(15,778,280)	(6)	(13,461,080)	(5)	(2,317,200)
310	KOMPUTER		112,526	1,778,991,075,251	109,270	1,777,437,630,376	3,256	1,553,444,875
000	Saldo Awal TAYL	-	112,413	1,765,514,997,136	109,258	1,764,062,373,699	3,155	1,452,623,437
100	Saldo Awal	-	96	935,761,264	95	935,011,264	1	750,000
101	Pembelian	-	2,677	30,787,160,512	2,582	30,706,059,472	95	81,101,040
102	Transfer Masuk	-	1,787	22,709,969,593	1,787	22,709,969,593	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Hibah Masuk	-	1,024	10,262,967,498	985	10,240,002,048	39	22,965,450
106	Pembatalan Penghapusan	-	68	280,379,000	65	280,289,000	3	90,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	65	774,162,500	65	774,162,500	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	108	3,374,065,966	90	3,361,059,966	18	13,006,000
193	Batal Transfer Keluar	-	11	110,688,500	11	110,688,500	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	98,560,000	0	98,560,000	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	8,880,000	0	8,880,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(15,000,000)	0	(15,000,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(1,798)	(22,820,658,093)	(1,798)	(22,820,658,093)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(33)	(383,200,000)	(33)	(383,200,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(13)	(283,430,000)	(12)	(282,680,000)	(1)	(750,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(4,000)	(33,480,920,436)	(3,941)	(33,464,185,386)	(59)	(16,735,050)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	121	1,116,691,811	116	1,116,297,813	5	393,998
311	ALAT EKSPLORASI		9	276,590,109	9	276,590,109	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	9	276,590,109	9	276,590,109	0	0
312	ALAT PENGEBORAN		11	39,899,250	10	39,705,000	1	194,250
000	Saldo Awal TAYL	-	5	27,734,250	4	27,540,000	1	194,250
101	Pembelian	-	6	12,165,000	6	12,165,000	0	0
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		26	546,616,059	24	546,022,059	2	594,000
000	Saldo Awal TAYL	-	25	475,116,059	23	474,522,059	2	594,000
100	Saldo Awal	-	1	71,500,000	1	71,500,000	0	0
314	ALAT BANTU EKSPLORASI		18	17,655,000	18	17,655,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	-	18	17,655,000	18	17,655,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		1,131	24,322,894,603	965	24,235,593,114	166	87,301,489
000	Saldo Awal TAYL	-	1,098	22,993,649,516	943	22,909,133,027	155	84,516,489
100	Saldo Awal	-	12	334,725,755	12	334,725,755	0	0
101	Pembelian	-	8	399,068,000	8	399,068,000	0	0
103	Hibah Masuk	-	19	501,782,000	10	500,000,000	9	1,782,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	2	73,398,000	2	73,398,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	28	683,430,851	26	682,427,851	2	1,003,000
304	Reklasifikasi Keluar	-	(25)	(1,055,911,540)	(25)	(1,055,911,540)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(8)	(48,000,000)	(8)	(48,000,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(4)	(36,400,000)	(4)	(36,400,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	477,152,021	1	477,152,021	0	0
316	ALAT PERAGA		71	494,416,619	46	482,936,694	25	11,479,925
000	Saldo Awal TAYL	-	72	301,955,647	45	288,653,222	27	13,302,425
101	Pembelian	-	3	203,525,972	3	203,525,972	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(4)	(11,065,000)	(2)	(9,242,500)	(2)	(1,822,500)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		18	512,591,496	16	512,416,496	2	175,000
000	Saldo Awal TAYL	-	19	326,669,784	17	326,494,784	2	175,000
100	Saldo Awal	-	1	188,635,712	1	188,635,712	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(2)	(2,714,000)	(2)	(2,714,000)	0	0
318	RAMBU - RAMBU		1,595	2,886,859,646	21	2,832,945,296	1,574	53,914,350
000	Saldo Awal TAYL	-	1,595	4,092,296,646	21	4,038,382,296	1,574	53,914,350

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	-	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(1,208,937,000)	(1)	(1,208,937,000)	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA		173	1,082,694,136	158	1,080,079,339	15	2,614,797
000	Saldo Awal TAYL	-	176	1,123,223,582	161	1,120,608,785	15	2,614,797
101	Pembelian	-	2	20,344,054	2	20,344,054	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(5)	(60,873,500)	(5)	(60,873,500)	0	0
TOTAL				**5,039,569,245,147**		**5,005,464,644,692**		**34,104,600,455**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	BANGUNAN GEDUNG		8,272	12,968,971,420,419	8,110	12,966,938,065,34	162	2,033,355,076
000	Saldo Awal TAYL	-	8,207	11,573,983,292,383	8,058	11,571,755,519,00	149	2,227,773,377
100	Saldo Awal	-	57	11,546,206,428	37	11,546,206,408	20	20
101	Pembelian	-	167	9,048,061,423	24	8,967,046,165	143	81,015,258
102	Transfer Masuk	-	19	144,723,484,092	19	144,723,484,092	0	0
103	Hibah Masuk	-	93	29,766,238,002	83	29,636,742,082	10	129,495,920
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	91	1,189,008,036,875	74	1,188,913,394,375	17	94,642,500
106	Pembatalan Penghapusan	-	2	1,041,501,000	2	1,041,501,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	119	45,451,692,742	111	45,351,723,513	8	99,969,229
112	Perolehan Lainnya	-	32	31,619,855,039	31	31,599,207,039	1	20,648,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	17	1,111,509,750	12	1,072,825,750	5	38,684,000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	1	400,000	0	0	1	400,000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	2	2	2	2	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	4,989,757,194	0	4,989,757,194	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	84,775,035,780	0	84,627,227,780	0	147,808,000
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	0	12,717,208,058	0	12,717,208,058	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	227,547,605,926	0	227,547,605,926	0	0
209	Koreksi Manual	-	0	218,465,000	0	218,465,000	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	(13,971,113,749)	0	(13,971,113,749)	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(122,278,808,952)	0	(122,278,808,952)	0	0
301	Penghapusan	-	(1)	(631,515,000)	(1)	(631,515,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(16)	(89,076,848,935)	(16)	(89,076,848,935)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	Hibah Keluar	-	(5)	(2,932,417,000)	(5)	(2,932,417,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(121)	(47,116,866,793)	(111)	(47,011,277,564)	(10)	(105,589,229)
305	Koreksi Pencatatan	-	(353)	(114,478,014,891)	(174)	(114,059,219,894)	(179)	(418,794,997)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(2)	(2)	0	0	(2)	(2)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(59)	(12,385,851,953)	(57)	(11,820,457,953)	(2)	(565,394,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	22	4,294,508,000	21	4,011,811,000	1	282,697,000
402	MONUMEN		5	422,181,953	1	407,669,000	4	14,512,953
000	Saldo Awal TAYL	-	6	424,681,953	1	407,669,000	5	17,012,953
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(2,500,000)	0	0	(1)	(2,500,000)
403	BANGUNAN MENARA		6	2,033,349,084	6	2,033,349,084	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	6	2,033,349,084	6	2,033,349,084	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		780	283,550,907,614	760	283,373,302,727	20	177,604,887
000	Saldo Awal TAYL	-	752	247,305,847,967	731	247,128,143,080	21	177,704,887
100	Saldo Awal	-	13	18,050,893,753	12	18,050,893,752	1	1
101	Pembelian	-	5	295,422,748	2	270,907,935	3	24,514,813
103	Hibah Masuk	-	4	1,281,194,303	4	1,281,194,303	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	4	8,016,824,922	4	8,016,824,922	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	3	3,206,902,903	3	3,206,902,903	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	9	6,054,622,679	9	6,054,622,679	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	1	1	1	1	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	625,079,503	0	625,079,503	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	2,712,409,212	0	2,712,409,212	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	0	667,848,083	0	667,848,083	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	2,538,068,107	0	2,538,068,107	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	573,414,789	0	573,414,789	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(174,817,326)	0	(174,817,326)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(397,604,219)	(1)	(397,604,219)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(9)	(7,205,199,810)	(5)	(7,180,584,997)	(4)	(24,614,813)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(1)	(1)	0	0	(1)	(1)
TOTAL				**13,254,977,859,070**		**13,252,752,386,154**		**2,225,472,916**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

134111 Jalan dan Jembatan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	JALAN DAN JEMBATAN		3,039	19,628,745,150	3,039	19,628,745,150	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	3,039	19,628,745,150	3,039	19,628,745,150	0	0
TOTAL				**19,628,745,150**		**19,628,745,150**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

134112 Irigasi

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	BANGUNAN AIR		75	8,176,807,738	75	8,176,807,738	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	75	8,176,807,738	75	8,176,807,738	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	2	224,756,352	2	224,756,352	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(2)	(224,756,352)	(2)	(224,756,352)	0	0
TOTAL				**8,176,807,738**		**8,176,807,738**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

134113 Jaringan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	INSTALASI		108	27,740,018,609	108	27,740,018,609	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	109	27,759,338,609	109	27,759,338,609	0	0
101	Pembelian	-	1	2,751,000	1	2,751,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	7	287,972,446	7	287,972,446	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	1,834,000	0	1,834,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(1,834,000)	0	(1,834,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(9)	(310,043,446)	(9)	(310,043,446)	0	0
504	JARINGAN		58	2,804,709,355	58	2,804,709,355	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	59	2,834,709,355	59	2,834,709,355	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(30,000,000)	(1)	(30,000,000)	0	0
TOTAL				**30,544,727,964**		**30,544,727,964**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

135111 Aset Tetap Renovasi

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI		4	1,078,042,792	4	1,078,042,792	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	10	24,589,903,788	10	24,589,903,788	0	0
101	Pembelian	-	1	88,753,158	1	88,753,158	0	0
103	Hibah Masuk	-	27	8,084,376,108	27	8,084,376,108	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	179,850,000	1	179,850,000	0	0
193	Batal Transfer Keluar	-	1	143,000,000	1	143,000,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(168,956,984)	0	(168,956,984)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(4)	(20,786,553,012)	(4)	(20,786,553,012)	0	0
303	Hibah Keluar	-	(1)	(143,000,000)	(1)	(143,000,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(28)	(8,173,129,266)	(28)	(8,173,129,266)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(3)	(2,736,201,000)	(3)	(2,736,201,000)	0	0
TOTAL				**1,078,042,792**		**1,078,042,792**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

135121 Aset Tetap Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		1,037,134	47,465,760,992	1,037,086	47,465,712,992	48	48,000
000	Saldo Awal TAYL	-	1,055,243	47,547,948,398	1,055,195	47,547,900,398	48	48,000
100	Saldo Awal	-	1	4,200,000	1	4,200,000	0	0
101	Pembelian	-	100	197,981,650	100	197,981,650	0	0
102	Transfer Masuk	-	100	197,981,650	100	197,981,650	0	0
103	Hibah Masuk	-	11	3,450,000	11	3,450,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	94	3,400,000	94	3,400,000	0	0
302	Transfer Keluar	-	(100)	(197,981,650)	(100)	(197,981,650)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(26,879)	(322,887,056)	(26,879)	(322,887,056)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	8,564	31,668,000	8,564	31,668,000	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		1,462	3,084,597,543	1,268	3,075,574,534	194	9,023,009
000	Saldo Awal TAYL	-	1,536	2,904,240,143	1,338	2,895,117,134	198	9,123,009
103	Hibah Masuk	-	2	1,500,000	2	1,500,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	6	182,515,400	6	182,515,400	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(82)	(3,658,000)	(78)	(3,558,000)	(4)	(100,000)
605	TANAMAN		3,356	196,458,749	0	0	3,356	196,458,749
000	Saldo Awal TAYL	-	3,353	195,708,749	0	0	3,353	195,708,749
112	Perolehan Lainnya	-	3	750,000	0	0	3	750,000
TOTAL				**50,746,817,284**		**50,541,287,526**		**205,529,758**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		(52,054)	475,263,059,024	(52,054)	475,263,059,024	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	(51,824)	915,655,052,073	(51,824)	915,655,052,073	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	-	349	74,901,184,968	349	74,901,184,968	0	0
503	Pengembangan KDP	-	0	914,457,263,518	0	914,457,263,518	0	0
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	-	0	62,832,787,030	0	62,832,787,030	0	0
505	Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	-	(9)	(1,588,454,024)	(9)	(1,588,454,024)	0	0
508	Hibah Masuk KDP	-	46	9,602,719,578	46	9,602,719,578	0	0
510	Perolehan Lainnya KDP	-	11	68,054,173,722	11	68,054,173,722	0	0
513	Reklasifikasi Keluar KDP	-	(1)	(102,804,703)	(1)	(102,804,703)	0	0
514	Reklasifikasi Masuk KDP	-	1	102,804,703	1	102,804,703	0	0
517	Koreksi Pencatatan KDP	-	(525)	(103,431,867,024)	(525)	(103,431,867,024)	0	0
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	-	0	(34,586,243,239)	0	(34,586,243,239)	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-	(102)	(1,430,633,557,578)	(102)	(1,430,633,557,578)	0	0
TOTAL				**475,263,059,024**		**475,263,059,024**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER BIDANG BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

162151 Software

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		1,262	59,883,255,953	1,262	59,883,255,953	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1,503	71,232,278,701	1,503	71,232,278,701	0	0
100	Saldo Awal	-	2	36,956,000	2	36,956,000	0	0
103	Hibah Masuk	-	8	777,700,000	8	777,700,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	7	134,045,000	7	134,045,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	11,550,000	1	11,550,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	33,300,000	0	33,300,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(18)	(561,142,199)	(18)	(561,142,199)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(244)	(11,802,793,174)	(244)	(11,802,793,174)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	3	21,361,625	3	21,361,625	0	0
TOTAL				**59,883,255,953**		**59,883,255,953**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

162161 Lisensi

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		113	32,453,641,795	113	32,453,641,795	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	110	32,316,840,061	110	32,316,840,061	0	0
101	Pembelian	-	2	64,991,500	2	64,991,500	0	0
103	Hibah Masuk	-	18	1,398,600,000	18	1,398,600,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	1	49,692,500	1	49,692,500	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(2)	(16,000,000)	(2)	(16,000,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(16)	(1,360,482,266)	(16)	(1,360,482,266)	0	0
TOTAL				**32,453,641,795**		**32,453,641,795**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

162171 Hasil Kajian/Penelitian

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		10	1,804,868,600	10	1,804,868,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	10	1,804,868,600	10	1,804,868,600	0	0
TOTAL				**1,804,868,600**		**1,804,868,600**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		228	4,662,130,394	228	4,662,130,394	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	217	4,660,012,353	217	4,660,012,353	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	18	561,142,199	18	561,142,199	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(11,550,000)	(1)	(11,550,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(7)	(631,314,158)	(7)	(631,314,158)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	83,840,000	1	83,840,000	0	0
TOTAL				**4,662,130,394**		**4,662,130,394**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		600	4,000,000	600	4,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	600	4,000,000	600	4,000,000	0	0
301	ALAT BESAR		73	2,149,416,786	73	2,149,416,786	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	74	2,691,189,209	74	2,691,189,209	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	33	1,118,811,000	29	1,115,251,000	4	3,560,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(41)	(1,670,463,423)	(37)	(1,666,903,423)	(4)	(3,560,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	7	9,880,000	7	9,880,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		541	15,207,147,500	539	15,172,062,500	2	35,085,000
000	Saldo Awal TAYL	-	526	12,705,856,891	521	12,660,951,891	5	44,905,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(28)	(663,476,903)	(26)	(653,476,903)	(2)	(10,000,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	363	13,728,303,657	362	13,728,103,657	1	200,000
301	Penghapusan	-	(1)	(17,242,500)	(1)	(17,242,500)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(333)	(10,994,869,648)	(331)	(10,994,849,648)	(2)	(20,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	14	448,576,003	14	448,576,003	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		121	483,056,380	112	482,216,380	9	840,000
000	Saldo Awal TAYL	-	98	366,387,096	80	365,013,096	18	1,374,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	58	162,811,500	53	162,061,500	5	750,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(39)	(50,210,216)	(25)	(48,926,216)	(14)	(1,284,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	4	4,068,000	4	4,068,000	0	0
304	ALAT PERTANIAN		22	37,695,966	21	37,675,966	1	20,000
000	Saldo Awal TAYL	-	58	122,276,376	56	122,026,375	2	250,001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	52	58,128,270	50	58,106,211	2	22,059
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(88)	(142,708,680)	(85)	(142,456,620)	(3)	(252,060)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		38,921	50,034,948,030	32,132	49,057,590,647	6,789	977,357,383
000	Saldo Awal TAYL	-	49,149	62,676,504,912	39,469	61,319,281,866	9,680	1,357,223,046
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(812)	(3,627,967,103)	(672)	(3,612,946,915)	(140)	(15,020,188)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	19,185	25,557,580,549	15,559	25,023,344,729	3,626	534,235,820
301	Penghapusan	-	(27)	(73,328,800)	(27)	(73,328,800)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(29,876)	(36,220,472,045)	(23,015)	(35,257,071,686)	(6,861)	(963,400,359)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1,302	1,722,630,517	818	1,658,311,453	484	64,319,064
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		2,497	7,859,388,583	1,960	7,815,558,797	537	43,829,786
000	Saldo Awal TAYL	-	2,697	6,506,875,395	2,040	6,456,000,713	657	50,874,682
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(16)	(6,522,000)	(10)	(5,710,000)	(6)	(812,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1,075	5,667,680,373	961	5,648,549,172	114	19,131,201
301	Penghapusan	-	(10)	(8,910,000)	(10)	(8,910,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1,322)	(4,475,482,322)	(1,080)	(4,448,435,225)	(242)	(27,047,097)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	73	175,747,137	59	174,064,137	14	1,683,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		133	953,195,837	125	949,081,417	8	4,114,420
000	Saldo Awal TAYL	-	121	818,620,359	119	818,485,359	2	135,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	22	140,744,670	14	136,630,250	8	4,114,420
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(11)	(12,079,384)	(9)	(11,944,384)	(2)	(135,000)

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1	5,910,192	1	5,910,192	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		12	47,177,500	7	42,749,500	5	4,428,000
000	Saldo Awal TAYL	-	23	134,275,198	21	132,345,198	2	1,930,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(2)	(2,400,000)	(2)	(2,400,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	8	15,807,500	3	11,379,500	5	4,428,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(17)	(100,505,198)	(15)	(98,575,198)	(2)	(1,930,000)
309	ALAT PERSENJATAAN		3	15,400,001	3	15,400,001	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	3	15,400,001	3	15,400,001	0	0
310	KOMPUTER		6,953	52,502,050,375	6,774	52,417,901,224	179	84,149,151
000	Saldo Awal TAYL	-	8,336	58,923,822,706	8,093	58,754,874,157	243	168,948,549
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(121)	(1,116,691,811)	(116)	(1,116,297,813)	(5)	(393,998)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	4,000	33,480,920,436	3,941	33,464,185,386	59	16,735,050
301	Penghapusan	-	(9)	(46,099,000)	(9)	(46,099,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(5,499)	(40,713,253,678)	(5,381)	(40,612,113,228)	(118)	(101,140,450)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	246	1,973,351,722	246	1,973,351,722	0	0
311	ALAT EKSPLORASI		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	1,500,000	1	1,500,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2)	(3,000,000)	(2)	(3,000,000)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1	1,500,000	1	1,500,000	0	0
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		1	3,500,000	1	3,500,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	-	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		4	36,400,000	4	36,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	2	498,752,021	2	498,752,021	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(1)	(477,152,021)	(1)	(477,152,021)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	4	36,400,000	4	36,400,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1)	(21,600,000)	(1)	(21,600,000)	0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		12	10,612,400	3	9,937,400	9	675,000
000	Saldo Awal TAYL	-	13	10,623,400	4	9,948,400	9	675,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	2	2,714,000	2	2,714,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(3)	(2,725,000)	(3)	(2,725,000)	0	0
318	RAMBU - RAMBU		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	20,000	1	20,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1)	(20,000)	(1)	(20,000)	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA		32	69,369,768	28	68,609,768	4	760,000
000	Saldo Awal TAYL	-	42	23,159,268	37	22,249,268	5	910,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	5	60,873,500	5	60,873,500	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(16)	(14,944,000)	(15)	(14,794,000)	(1)	(150,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1	281,000	1	281,000	0	0
401	BANGUNAN GEDUNG		101	17,362,017,781	100	17,352,397,781	1	9,620,000
000	Saldo Awal TAYL	-	92	14,636,839,781	91	14,627,219,781	1	9,620,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(22)	(4,294,508,000)	(21)	(4,011,811,000)	(1)	(282,697,000)

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	59	12,385,851,953	57	11,820,457,953	2	565,394,000
301	Penghapusan	-	(2)	(252,510,000)	(2)	(252,510,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(27)	(6,323,797,953)	(26)	(6,041,100,953)	(1)	(282,697,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1	1,210,142,000	1	1,210,142,000	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		2	66,151,000	2	66,151,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	3	255,824,000	3	255,824,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1)	(189,673,000)	(1)	(189,673,000)	0	0
503	INSTALASI		5	38,162,000	5	38,162,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	5	38,162,000	5	38,162,000	0	0
504	JARINGAN		1	5,000,000	1	5,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	5,000,000	1	5,000,000	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		43,987	1,494,283,904	43,987	1,494,283,904	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	33,275	1,446,690,700	33,275	1,446,690,700	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(8,564)	(31,668,000)	(8,564)	(31,668,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	26,879	322,887,056	26,879	322,887,056	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(7,862)	(251,505,852)	(7,862)	(251,505,852)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	259	7,880,000	259	7,880,000	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		183	24,484,805	172	23,514,805	11	970,000
000	Saldo Awal TAYL	-	172	29,644,845	155	28,614,845	17	1,030,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	82	3,658,000	78	3,558,000	4	100,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau	-	(73)	(9,975,040)	(63)	(9,815,040)	(10)	(160,000)

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dihapuskan							
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	2	1,157,000	2	1,157,000	0	0
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI		1	94,150,000	1	94,150,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	3	2,736,201,000	3	2,736,201,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2)	(2,642,051,000)	(2)	(2,642,051,000)	0	0
TOTAL				**148,497,608,616**		**147,335,759,876**		**1,161,848,740**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		246	14,036,616,555	246	14,036,616,555	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	107	1,644,900,130	107	1,644,900,130	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(4)	(105,201,625)	(4)	(105,201,625)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	267	13,794,589,598	267	13,794,589,598	0	0
301	Penghapusan	-	(10)	(172,402,000)	(10)	(172,402,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(132)	(1,313,494,548)	(132)	(1,313,494,548)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	18	188,225,000	18	188,225,000	0	0
TOTAL				**14,036,616,555**		**14,036,616,555**		**0**

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kuesioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Kinerja BPK Terkait Hasil Pemeriksaan

Lembaga : Mahkamah Agung

Pemeriksaan atas : Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Mahkamah Agung

Mohon penilaian ditunjukkan dengan memberi tanda *tickmark* (√) pada kolom yang disediakan.

No.	Aspek Kualitas Informasi	1 Tidak Memuaskan	2 Kurang Memuaskan	3 Cukup Memuaskan	4 Memuaskan	5 Sangat Memuaskan
	Independensi					
1	Pemeriksaan dilakukan bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa.					√
2	Pemeriksaan dilakukan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk mempengaruhi dan membatasi segala kegiatan pemeriksaan.					√
3	Pemeriksaan bebas dari kewajiban pihak lain untuk mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan.					√
4	Pemeriksaan bebas dari bahasa atau istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir.					√
5	Isi laporan pemeriksaan bebas dari pengaruh pihak tertentu.					√
6	Pemeriksa dapat diandalkan dan dipercaya.					√
7	Dalam kegiatan pemeriksaan, mengemukakan pendapat menurut apa adanya dan tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan.					√
8	Pemeriksa tidak mencari-cari kesalahan dilakukan oleh objek pemeriksaan.					√
9	Pemeriksa dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku.					√
	Integritas					
1	Pemeriksa bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.					√
2	Pemeriksa bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.					√
3	Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa harus taat pada peraturan-peraturan yang berlaku.					√
4	Pemeriksa bekerja sesuai sebenarnya, tidak menambah mengurangi fakta yang ada.					√
5	Pemeriksa tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya.					√
6	Pemeriksa tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna pendapatnya.					√

No.	Aspek Kualitas Informasi	1 Tidak Memuaskan	2 Kurang Memuaskan	3 Cukup Memuaskan	4 Memuaskan	5 Sangat Memuaskan
7	Pemeriksa tidak mempertimbangkan seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk membenarkan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.					√
	Profesionalisme					
1	Kejelasan pengungkapan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.					√
2	Sistematika Penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan.					√
3	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk membantu fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.					√
4	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk melakukan fungsi penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.					√
5	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.					√
6	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.					√
7	Pemeriksa memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis, teori organisasi, auditing, akuntansi dan pengetahuan tentang sektor publik yang memadai dalam melakukan pemeriksaan.					√

Catatan Tambahan :

Jakarta, 17 Mei 2024

Mengetahui,
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 196711241992121001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kuesioner Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Kinerja BPK Terkait Hasil Pemeriksaan

Lembaga : Mahkamah Agung

Pemeriksaan atas : Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Mahkamah Agung

Mohon penilaian ditunjukkan dengan memberi tanda *tickmark* (√) pada kolom yang disediakan.

No.	Aspek Kualitas Informasi	1 Tidak Memuaskan	2 Kurang Memuaskan	3 Cukup Memuaskan	4 Memuaskan	5 Sangat Memuaskan
	Independensi					
1	Pemeriksaan dilakukan bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa.					√
2	Pemeriksaan dilakukan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk mempengaruhi dan membatasi segala kegiatan pemeriksaan.					√
3	Pemeriksaan bebas dari kewajiban pihak lain untuk mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan.					√
4	Pemeriksaan bebas dari bahasa atau istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir.					√
5	Isi laporan pemeriksaan bebas dari pengaruh pihak tertentu.					√
6	Pemeriksa dapat diandalkan dan dipercaya.					√
7	Dalam kegiatan pemeriksaan, mengemukakan pendapat menurut apa adanya dan tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan.					√
8	Pemeriksa tidak mencari-cari kesalahan dilakukan oleh objek pemeriksaan.					√
9	Pemeriksa dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku.					√
	Integritas					
1	Pemeriksa bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.					√
2	Pemeriksa bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.					√
3	Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa harus taat pada peraturan-peraturan yang berlaku.					√
4	Pemeriksa bekerja sesuai sebenarnya, tidak menambah mengurangi fakta yang ada.					√
5	Pemeriksa tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya.					√
6	Pemeriksa tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna pendapatnya.					√

No.	Aspek Kualitas Informasi	1 Tidak Memuaskan	2 Kurang Memuaskan	3 Cukup Memuaskan	4 Memuaskan	5 Sangat Memuaskan
7	Pemeriksa tidak mempertimbangkan seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk membenarkan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.					√
	Profesionalisme					
1	Kejelasan pengungkapan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.					√
2	Sistematika Penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan.					√
3	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk membantu fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.					√
4	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk melakukan fungsi penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.					√
5	Manfaat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.					√
6	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.					√
7	Pemeriksa memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis, teori organisasi, auditing, akuntansi dan pengetahuan tentang sektor publik yang memadai dalam melakukan pemeriksaan.					√

Catatan Tambahan :

Jakarta, 17 Mei 2024

Mengetahui,
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 196711241992121001

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1.	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi dan Penegakan Hukum Tidak Tertib	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA supaya: 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP; 2) Memerintahkan Bendahara Penerimaan satker terkait untuk memedomani Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dalam pengelolaan PNBP ke kas negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA supaya: 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP; 2) Memerintahkan Bendahara Penerimaan satker terkait untuk memedomani Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dalam pengelolaan PNBP ke kas negara.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		b. BPK merekomendasikan Ketua pengadilan satker terkait agar menginstruksikan Panitera supaya: 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP; 2) Memerintahkan Kasir untuk: a) Memedomani Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dalam menatausahakan pengelolaan PNBP; b) Menyetorkan PNBP PN Surabaya sebesar Rp16.880.000 (Rp11.190.000 + Rp5.690.000) dan PNBP PN Makassar sebesar Rp1.760.000 ke kas negara.	Ketua pengadilan satker terkait akan menginstruksikan Panitera supaya: 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP; 2) Memerintahkan Kasir untuk: a) Memedomani Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dalam menatausahakan pengelolaan PNBP; b) Menyetorkan PNBP PN Surabaya sebesar Rp16.880.000 (Rp11.190.000 + Rp5.690.000) dan PNBP PN Makassar sebesar Rp1.760.000 ke kas negara.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi Ketua Pengadilan kepada Panitera
2.	Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Penyedia Jasa Keamanan dan Pengadaan Penyedia Jasa Kebersihan	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan PPK Biro Umum supaya lebih cermat dalam menyusun RAB pada kontrak dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan;	Sekretaris MA akan menginstruksikan PPK Biro Umum supaya lebih cermat dalam menyusun RAB pada	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada PPK Biro Umum

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
	dan Perawatan Taman MA TA 2023 Sebesar Rp151.727.747		kontrak dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.		
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan PPK Biro Umum supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp151.727.747 dan menyetorkan ke kas negara, dengan rincian PT TDP sebesar 29.058.207 dan PT MP sebesar Rp122.669.540.	Sekretaris MA akan menginstruksikan PPK Biro Umum supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp151.727.747 dan menyetorkan ke kas negara, dengan rincian PT TDP sebesar 29.058.207 dan PT MP sebesar Rp122.669.540.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada PPK Biro Umum
3.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Belum Dilaksanakan secara Tertib	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait supaya memerintahkan PPK pada satker terkait supaya: 1) Lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 2) Menarik kelebihan pembayaran pajak kepada penyedia terkait atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh satker sebesar Rp68.823.273 pada: 1) Lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 2) Menarik kelebihan pembayaran pajak kepada penyedia terkait atas kewajiban pajak yang	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA terkait untuk memerintahkan PPK pada satker terkait agar: 1) Lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 2) Menarik kelebihan pembayaran pajak kepada penyedia terkait atas kewajiban pajak yang	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		ditanggung oleh satker sebesar Rp68.823.273 pada: a) PA Pekanbaru sebesar Rp254.050; b) PN Jakarta Selatan sebesar Rp16.225.646; c) PT Pontianak sebesar Rp5.487.673; d) PA Dompu sebesar Rp3.743.681; e) PA Bogor sebesar Rp1.274.000; f) PA Magetan sebesar Rp2.080.540; g) PA Muara Bulian sebesar Rp7.098.221; h) PT Banten sebesar Rp3.568.241; i) PN Adoolo sebesar Rp978.676; j) PA Tigaraksa sebesar Rp258.000; k) PTA Sulawesi Barat sebesar Rp27.854.545.	ditanggung oleh satker sebesar Rp68.823.273 pada: a) Lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; b) Menarik kelebihan pembayaran pajak kepada penyedia terkait atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh satker sebesar Rp68.823.273 pada: 1. PA Pekanbaru sebesar Rp254.050; 2. PN Jakarta Selatan sebesar Rp16.225.646; 3. PT Pontianak sebesar Rp5.487.673; 4. PA Dompu sebesar Rp3.743.681; 5. PA Bogor sebesar Rp1.274.000;		

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			6. PA Magetan sebesar Rp2.080.540; 7. PA Muara Bulian sebesar Rp7.098.221; 8. PT Banten sebesar Rp3.568.241; 9. PN Adoolo sebesar Rp978.676; 10. PA Tigaraksa sebesar Rp258.000; 11. PTA Sulawesi Barat sebesar Rp27.854.545.		
		c. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait supaya memerintahkan PPSPM satker terkait lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA terkait supaya memerintahkan PPSPM satker terkait lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA
		d. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait untuk: 1) Memedomani ketentuan perpajakan atas PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA terkait supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait untuk:	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		2) Menagih kekurangan pungut PPN sebesar Rp829.306.732; 3) Berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh sebesar Rp582.573.048.	1) Memedomani ketentuan perpajakan atas PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN; 2) Menagih kekurangan pungut PPN sebesar Rp829.306.732; 3) Berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh sebesar Rp582.573.048.		
4.	Pengendalian atas Penggunaan Aplikasi Presensi selain SIKEP Tidak Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Transportasi Hakim Sebesar Rp9.902.000	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya mematuhi penerapan presensi pada aplikasi SIKEP di lingkungan satuan kerjanya;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya mematuhi penerapan presensi pada aplikasi SIKEP di lingkungan satuan kerjanya.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan pengelola presensi pada masing-masing satker lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan pengelola presensi pada masing-masing satker lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA
		c. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9.902.000 dan menyetorkan ke kas negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9.902.000 dan menyetorkan ke kas negara.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
5.	Kekurangan *Volume* Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 pada Tiga Satuan Kerja Sebesar Rp37.712.552	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk memerintahkan PPK PTA Pekanbaru, PN Pekanbaru, dan PA Pekanbaru supaya lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait untuk memerintahkan PPK PTA Pekanbaru, PN Pekanbaru, dan PA Pekanbaru supaya lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk memerintahkan PPK PTA Pekanbaru untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV ITJ sebesar Rp9.340.250 dan menyetorkan ke kas negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait untuk memerintahkan PPK PTA Pekanbaru untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV ITJ sebesar Rp9.340.250 dan menyetorkan ke kas negara.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
6.	Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan dan Tidak Sesuai Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya lebih cermat dalam menyusun penganggaran pakaian dinas sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya lebih cermat dalam menyusun penganggaran pakaian dinas sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
		b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK pada PA Tanjung Pinang, PTUN Kepulauan Riau, PTA Kepulauan Riau, dan Badilmiltun supaya memedomani PMK terkait SBM dalam melaksanakan pengadaan pakaian dinas pegawai;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK pada PA Tanjung Pinang, PTUN Kepulauan Riau, PTA Kepulauan Riau, dan	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			Badilmiltun supaya memedomani PMK terkait SBM dalam melaksanakan pengadaan pakaian dinas pegawai.		
		c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK PTA Kepulauan Riau supaya memedomani ketentuan penggunaan seragam pakaian dinas pegawai dalam merencanakan dan merealisasikan belanja pakaian dinas pegawai.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK PTA Kepulauan Riau supaya memedomani ketentuan penggunaan seragam pakaian dinas pegawai dalam merencanakan dan merealisasikan belanja pakaian dinas pegawai.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
7.	Pengadaan Sewa Mesin Fotokopi dan Sewa Kendaraan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA Kepaniteraan dan KPA Badilmiltun supaya memerintahkan PPK Kepaniteraan dan Badilmiltun supaya lebih cermat dalam merencanakan pengadaan barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA Kepaniteraan dan KPA Badilmiltun supaya memerintahkan PPK Kepaniteraan dan Badilmiltun supaya lebih cermat dalam merencanakan pengadaan barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA Kepaniteraan dan KPA Badilmiltun
		b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA Kepaniteraan dan KPA Badilmiltun supaya memerintahkan PPK Kepaniteraan untuk menarik kelebihan pembayaran dari PT SAR sebesar Rp481.620 dan menyetorkannya ke kas negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA Kepaniteraan dan KPA Badilmiltun supaya memerintahkan PPK	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA Kepaniteraan dan KPA Badilmiltun

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			Kepaniteraan untuk menarik kelebihan pembayaran dari PT SAR sebesar Rp481.620 dan menyetorkannya ke kas negara.		
8.	Terdapat Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang yang Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp58.548.000	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK Biro Umum, PTUN Tanjungpinang, dan PT Riau untuk: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp50.022.000 yang terdiri dari Biro Umum sebesar Rp48.322.000 dan PTUN Tanjungpinang sebesar Rp1.700.000 serta menyetorkan ke kas negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK Biro Umum, PTUN Tanjungpinang, dan PT Riau untuk: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp50.022.000 yang terdiri dari Biro Umum sebesar Rp48.322.000 dan PTUN Tanjungpinang sebesar Rp1.700.000 serta menyetorkan ke kas negara.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PSPM satker terkait supaya lebih cermat dalam menguji SPP beserta dokumen pendukungnya.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PSPM satker terkait supaya	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			lebih cermat dalam menguji SPP beserta dokumen pendukungnya.		
9.	Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk Pengadaan Seminar Kit Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menyusun kebijakan internal yang mengatur jenis seminar kit dan batasan nilai, serta kriteria kegiatan yang dapat diberikan seminar kit yang menjadi panduan bagi satuan kerja dalam menyusun dan melaksanakan anggaran belanja agar efektif dan efisien;	Sekretaris MA akan menyusun kebijakan internal yang mengatur jenis seminar kit dan batasan nilai, serta kriteria kegiatan yang dapat diberikan seminar kit yang menjadi panduan bagi satuan kerja dalam menyusun dan melaksanakan anggaran belanja agar efektif dan efisien.	Semester II Tahun 2024	Kebijakan internal yang mengatur jenis seminar kit dan batasan nilai, serta kriteria kegiatan yang dapat diberikan seminar kit
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perlengkapan, dan Biro Humas untuk memedomani Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 dalam merealisasikan belanja seminar kit.	Sekretaris MA akan memerintahkan PPK Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perlengkapan, dan Biro Humas untuk memedomani Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 dalam merealisasikan belanja seminar kit.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada PPK Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perlengkapan, dan Biro Humas
10.	Pembebanan Belanja Barang Sebesar Rp13.641.469.882 Tidak Sesuai Klasifikasi	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memerintahkan KPA satker terkait supaya lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya terkait dengan kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA dan SAP.	Sekretaris MA akan memerintahkan KPA satker terkait supaya lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya terkait dengan kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA dan SAP.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA
11.	Realisasi Belanja Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa Tidak Sesuai Ketentuan	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan PPK Biro Umum supaya lebih cermat dalam melaksanakan pembayaran Belanja	Sekretaris MA akan menginstruksikan PPK Biro Umum supaya lebih cermat	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada PPK Biro Umum

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa dengan mempertimbangkan dasar hukum pembayaran dan penetapan tarif yang jelas;	dalam melaksanakan pembayaran Belanja Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa dengan mempertimbangkan dasar hukum pembayaran dan penetapan tarif yang jelas.		
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan PPK Biro Umum supaya lebih cermat dalam melaksanakan pengujian materiil terhadap kebenaran hasil pekerjaan;	Sekretaris MA akan menginstruksikan PPK Biro Umum supaya lebih cermat dalam melaksanakan pengujian materiil terhadap kebenaran hasil pekerjaan.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada PPK Biro Umum
		c. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan PPK Biro Umum supaya menarik kelebihan pembayaran atas duplikasi penerima pembayaran Belanja Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa sebesar Rp10.488.000 dan menyetorkan ke kas negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan PPK Biro Umum supaya menarik kelebihan pembayaran atas duplikasi penerima pembayaran Belanja Bantuan Pengamanan Unjuk Rasa sebesar Rp10.488.000 dan menyetorkan ke kas negara.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada PPK Biro Umum
12.	Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan TA 2023 Sebesar Rp55.011.775	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK untuk memedomani Standar Biaya Masukan dalam melaksanakan pembayaran honorarium;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK untuk memedomani Standar Biaya Masukan dalam melaksanakan pembayaran honorarium.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		Keuangan sebesar Rp55.011.775 dan menyetorkan ke kas negara.	pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp55.011.775 dan menyetorkan ke kas negara.		
13.	Pelaksanaan Pembangunan Delapan Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA Tidak Sesuai Ketentuan	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA menginstruksikan KPA satker terkait agar memerintahkan PPK pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh dan BUA supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT RJS pada PA Tais sebesar Rp642.515.102; b) PT HMP pada PA Bintuhan sebesar Rp425.989.806; c) PT AB pada PA Nanga Pinoh sebesar Rp739.501.578; d) PT GMK pada PT Banda Aceh sebesar Rp96.549.005; e) PT KMB pada PN Banda Aceh sebesar Rp52.652.684; f) CV KAM pada BUA sebesar Rp70.888.713; g) PT JP pada BUA sebesar Rp168.956.984; h) PT PRM pada BUA sebesar Rp286.455.753;	Sekretaris MA menginstruksikan KPA satker terkait agar memerintahkan PPK pada PA Tais, PA Bintuhan, PA Nanga Pinoh, PT Banda Aceh, PN Banda Aceh dan BUA supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.483.509.625 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT RJS pada PA Tais sebesar Rp642.515.102; b) PT HMP pada PA Bintuhan sebesar Rp425.989.806;	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			c) PT AB pada PA Nanga Pinoh sebesar Rp739.501.578; d) PT GMK pada PT Banda Aceh sebesar Rp96.549.005; e) PT KMB pada PN Banda Aceh sebesar Rp52.652.684; f) CV KAM pada BUA sebesar Rp70.888.713; g) PT JP pada BUA sebesar Rp168.956.984; h) PT PRM pada BUA sebesar Rp286.455.753;		
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA menginstruksikan KPA satker terkait agar Memerintahkan PPK PT Aceh supaya melaksanakan pekerjaan pembesian area ramp sebesar Rp104.390.671 di Tahun 2024 dan memastikan item tersebut tidak masuk dalam kontrak Pembangunan Gedung Kantor PT Banda Aceh Tahap III.	Sekretaris MA menginstruksikan KPA satker terkait agar Memerintahkan PPK PT Aceh supaya melaksanakan pekerjaan pembesian area ramp sebesar Rp104.390.671 di Tahun 2024 dan memastikan item tersebut tidak masuk dalam kontrak Pembangunan Gedung Kantor PT Banda Aceh Tahap III.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
14.	Belanja Modal Peralatan Mesin di MA Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp199.000.976	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan Pejabat Pengadaan PN Batam dan PTUN Tanjungpinang lebih cermat dalam proses pengadaan langsung dengan memedomani ketentuan pengadaan langsung;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait supaya memerintahkan Pejabat Pengadaan PN Batam dan PTUN Tanjungpinang lebih cermat dalam proses pengadaan langsung dengan memedomani ketentuan pengadaan langsung.	Semester II Tahun 2024	
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA supaya Memerintahkan PPK PN Jakut dan BUA: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp114.826.276 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT FEC pada BUA sebesar Rp55.325.800; b) PT CKM pada PN Jakut sebesar Rp59.500.476.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA supaya Memerintahkan PPK PN Jakut dan BUA: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp114.826.276 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: 1) PT FEC pada BUA sebesar Rp55.325.800; 2) PT CKM pada PN Jakut sebesar Rp59.500.476.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPA satker terkait
15.		a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan Kepala Biro Umum BUA supaya	Sekretaris MA akan menginstruksikan Kepala Biro	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada Kepala Biro Umum

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
	Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Belum Tertib	memerintahkan Petugas Poliklinik Biro Umum BUA untuk melakukan *stock opname* obat setiap semester;	Umum BUA supaya memerintahkan Petugas Poliklinik Biro Umum BUA untuk melakukan *stock opname* obat setiap semester.		
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar Menginstruksikan Sekretaris satker terkait selaku KPB supaya: 1) Memerintahkan Pengelola Persediaan untuk lebih tertib melakukan penatausahaan barang persediaan dan melakukan *stock opname*; dan 2) Lebih optimal melakukan pengawasan dalam pelaksanaan *stock opname* dan pengendalian pengelolaan persediaan.	Sekretaris MA akan Menginstruksikan Sekretaris satker terkait selaku KPB supaya: 1) Memerintahkan Pengelola Persediaan untuk lebih tertib melakukan penatausahaan barang persediaan dan melakukan *stock opname*; dan 2) Lebih optimal melakukan pengawasan dalam pelaksanaan *stock opname* dan pengendalian pengelolaan persediaan.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPB satker terkait
16.	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah Belum Tertib	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPB satker terkait dan Kepala Biro Perlengkapan supaya melanjutkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan dan diklaim pihak lain.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPB satker terkait dan Kepala Biro Perlengkapan supaya melanjutkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan dan diklaim pihak lain.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPB satker terkait

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
17.	Penatausahaan Aset Tetap Peralatan Mesin Belum Tertib	a. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPB satker BUA supaya melakukan inventarisasi atau penelusuran atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya serta menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPB satker BUA supaya melakukan inventarisasi atau penelusuran atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya serta menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPB satker terkait
		b. BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPB satker BUA supaya memerintahkan Pengelola aplikasi SIMAN pada satker BUA untuk lebih tertib dalam memutakhirkan data pencatatan BMN.	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPB satker BUA supaya memerintahkan Pengelola aplikasi SIMAN pada satker BUA untuk lebih tertib dalam memutakhirkan data pencatatan BMN.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada KPB satker terkait
18.	Pemutakhiran Rekening Pemerintah Lainnya dalam Aplikasi KOMDANAS Belum Dilakukan secara Tertib	a. BPK merekomendasikan kepada Ketua pengadilan satker terkait agar menginstruksikan Panitera supaya memerintahkan Kasir untuk melaporkan dan memutakhirkan data rekening bank pada aplikasi KOMDANAS secara periodik;	Ketua pengadilan satker terkait agar menginstruksikan Panitera supaya memerintahkan Kasir untuk melaporkan dan memutakhirkan data rekening bank pada aplikasi KOMDANAS secara periodik.	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi Ketua Pengadilan kepada Panitera satker terkait
		b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan Kepala Biro Keuangan supaya memerintahkan Kepala Bagian Perbendaharaan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas data rekening bank yang dilaporkan satker pada aplikasi KOMDANAS.	Sekretaris MA akan menginstruksikan Kepala Biro Keuangan supaya memerintahkan Kepala Bagian Perbendaharaan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas data rekening bank	Semester II Tahun 2024	Surat Instruksi SEKMA kepada Kepala Biro Keuangan

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			yang dilaporkan satker pada aplikasi KOMDANAS.		

Jakarta, 17 Mei 2024
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 196711241992121001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl.Gatot Subroto 31 Jakarta Pusat 10210 Telp 021-25549000 ext 3562 Fax 021-5700501

Nomor : 49/S/XVI/05/2024 Jakarta, 13 Mei 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, serta Permintaan Rencana Aksi, Representasi Tertulis, dan Kuesioner Penilaian Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung
di
Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan. Selanjutnya, mengacu pada SPAP SA 580 tentang Representasi tertulis, BPK harus memperoleh surat representasi dari entitas. Surat representasi tersebut menggambarkan representasi tertulis dari MA atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, kami sampaikan juga formulir Rencana Aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjut atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, dan kuesioner penilaian pelaksanaan pemeriksaan sebagai umpan balik atas independensi, integritas, dan profesionalisme pemeriksa.

Kami harapkan rencana aksi dan kuesioner penilaian pelaksanaan tersebut sudah kami terima pada tanggal 17 Mei 2024, dan disampaikan pada alamat di bawah ini.

Auditorat Utama Keuangan Negara III
Tower BPK Lt. 4
Jl. Gatot Subroto 31, Jakarta Pusat 10210
Telp 021-25549000 ext 3562 Fax 021-5700501

Atas perhatian Sekretaris MA, kami menyampaikan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Auditor Utama Keuangan Negara III,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Dr. Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CGAE, CA, CSFA, ERMCP, CGCAE, CFrA.
NIP 197504291995031002

Tembusan:
Anggota III BPK

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan III 2024 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	Penatausahaan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada: a. Sekretaris PN Jakarta Utara, PN Bekasi, PN Bale Bandung, PA Semarang, dan PA Jakarta Pusat untuk: 1) Mengajukan usul pemanfaatan BMN kepada KPKNL melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penetapan nilai sewa kepada Sekretaris MA; dan 2) Membuat perjanjian sewa dan memberlakukan secara retroaktif sejak pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: a. Sekretaris PN Jakarta Utara, PN Bekasi, PN Bale Bandung, PA Semarang, dan PA Jakarta Pusat untuk: 1) Mengajukan usul pemanfaatan BMN kepada KPKNL melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penetapan nilai sewa kepada Sekretaris MA; dan 2) Membuat perjanjian sewa dan memberlakukan secara retroaktif sejak pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA Surat Usulan Persetujuan Sewa BMN Perjanjian Sewa BMN
		b. Sekretaris PTUN Jakarta untuk: 1) Mengidentifikasi BMN yang dapat dilakukan prosedur sewa BMN; 2) Mengajukan usulan penetapan tarif sewa kepada KPKNL sesuai ketentuan; dan	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: b. Sekretaris PTUN Jakarta untuk: 1) Mengidentifikasi BMN yang dapat dilakukan prosedur sewa BMN; 2) Mengajukan usulan penetapan tarif sewa kepada KPKNL sesuai ketentuan; dan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA Surat Usulan Penetapan Tarif Sewa BMN Perjanjian Sewa BMN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		3) Mengajukan usulan luasan objek sewa sesuai perhitungan yang tepat; dan 4) Membuat perjanjian sewa dan memberlakukan secara retroaktif sejak pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.	3) Mengajukan usulan luasan objek sewa sesuai perhitungan yang tepat; dan 4) Membuat perjanjian sewa dan memberlakukan secara retroaktif sejak pemanfaatan aset oleh pihak ketiga		
		c. Sekretaris PN Semarang untuk: 1) Mengidentifikasi BMN yang dapat dilakukan prosedur sewa BMN; 2) Mengajukan usulan penetapan tarif sewa kepada KPKNL sesuai ketentuan; 3) Mengajukan permohonan persetujuan sewa dengan informasi luasan objek BMN yang akurat; 4) Membuat perjanjian sewa dan memberlakukan secara retroaktif sejak pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; 5) Menerapkan harga standar satuan gedung bangunan rumah negara dalam penetapan tarif sewa rumah negara; dan 6) Menagih kekurangan sewa rumah negara kepada penghuni rumah dinas atas kesalahan perhitungan harga satuan bangunan sebesar Rp12.274.293.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: c. Sekretaris PN Semarang untuk: 1) Mengidentifikasi BMN yang dapat dilakukan prosedur sewa BMN; 2) Mengajukan usulan penetapan tarif sewa kepada KPKNL sesuai ketentuan; 3) Mengajukan permohonan persetujuan sewa dengan informasi luasan objek BMN yang akurat; 4) Membuat perjanjian sewa dan memberlakukan secara retroaktif sejak pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; 5) Menerapkan harga standar satuan gedung bangunan rumah negara dalam penetapan tarif sewa rumah negara; dan 6) Menagih kekurangan sewa rumah negara kepada penghuni rumah dinas atas kesalahan perhitungan harga satuan bangunan sebesar Rp12.274.293.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA Surat Usulan Penetapan Tarif Sewa BMN Perjanjian Sewa BMN Bukti Setor ke Kas Negara atas kekurangan sewa rumah negara sebesar Rp.12.274.293

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		d. Sekretaris PN Pariaman untuk 1) Menerapkan harga standar satuan gedung bangunan rumah negara dalam penetapan tarif sewa rumah negara; dan 2) Menagih kekurangan sewa rumah negara kepada penghuni rumah dinas atas kesalahan perhitungan harga satuan bangunan sebesar Rp25.067.025.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: d. Sekretaris PN Pariaman untuk 1) Menerapkan harga standar satuan gedung bangunan rumah negara dalam penetapan tarif sewa rumah negara; dan 2) Menagih kekurangan sewa rumah negara kepada penghuni rumah dinas atas kesalahan perhitungan harga satuan bangunan sebesar Rp25.067.025.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA Bukti Setor ke Kas Negara atas kekurangan sewa rumah negara sebesar RP.25.067.025
2	PNBP Belum Dipungut Sebesar Rp80.700.000, Belum Disetor Rp152.266.500, dan Terlambat Disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp579.763.840	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan: a. Ketua Pengadilan PN Tangerang dan PN Surabaya untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas penggunaan PNBP yang tidak sesuai ketentuan;	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: a. Ketua Pengadilan PN Tangerang dan PN Surabaya untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas penggunaan PNBP yang tidak sesuai ketentuan;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA
		b. Ketua Pengadilan terkait memerintahkan 1) Panitera pengadilan terkait lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas fungsi dan tugas Kasir; 2) Kasir pengadilan terkait: a) Memungut PNBP dan menyerahkan PNBP kepada	b. Ketua Pengadilan terkait memerintahkan 1) Panitera pengadilan terkait lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas fungsi dan tugas Kasir; 2) Kasir pengadilan terkait: a) Memungut PNBP dan menyerahkan PNBP kepada	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti Setor ke Kas Negara atas PNBP yang belum dipungut sebesar Rp.199.588.000 Surat Rekonsiliasi Internal atas PNBP

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		Bendahara Penerimaan secara tepat waktu; b) Memungut PNBP dan menyerahkannya kepada Bendahara Penerimaan atas PNBP yang belum dipungut sebesar Rp80.700.000; dan c) Menyerahkan PNBP kepada Bendahara Penerimaan atas PNBP yang telah dipungut sebesar Rp118.888.000 (Rp85.153.000 + Rp33.735.000). 3) Bendahara Penerimaan terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp199.588.000 (Rp80.700.000 + Rp118.888.000); 4) Bendahara Penerimaan dan Kasir pada PN Tangerang dan PN Surabaya melakukan rekonsiliasi internal atas PNBP secara tertib; dan 5) Bendahara Penerimaan PN Tangerang menyetorkan PNBP ke Kas Negara secara tepat waktu	Bendahara Penerimaan secara tepat waktu; b) Memungut PNBP dan menyerahkannya kepada Bendahara Penerimaan atas PNBP yang belum dipungut sebesar Rp80.700.000; dan c) Menyerahkan PNBP kepada Bendahara Penerimaan atas PNBP yang telah dipungut sebesar Rp118.888.000 (Rp85.153.000 + Rp33.735.000). 3) Bendahara Penerimaan terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp199.588.000 (Rp80.700.000 + Rp118.888.000); 4) Bendahara Penerimaan dan Kasir pada PN Tangerang dan PN Surabaya melakukan rekonsiliasi internal atas PNBP secara tertib; dan 5) Bendahara Penerimaan PN Tangerang menyetorkan PNBP ke Kas Negara secara tepat waktu		
3	Penetapan Besaran Panjar Biaya Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait untuk memerintahkan:	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Terkait untuk memerintahkan: a. Panitera Pengadilan Negeri lebih optimal dalam melakukan pengawasan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		a. Panitera Pengadilan Negeri lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penetapan besaran biaya panjar eksekusi; dan	atas penetapan besaran biaya panjar eksekusi; dan		
		b. Panmud Perdata Pengadilan Negeri lebih cermat dalam memperhitungkan besaran panjar biaya eksekusi sesuai SK Ketua Pengadilan.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Terkait untuk memerintahkan: b. Panmud Perdata Pengadilan Negeri lebih cermat dalam memperhitungkan besaran panjar biaya eksekusi sesuai SK Ketua Pengadilan.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
4	Penetapan Taksiran Panjar Biaya Perkara pada *E-Court* Belum Sesuai SK Panjar Biaya Perkara	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: a. Panitera Pengadilan terkait lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penetapan besaran biaya panjar sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara; dan	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: a. Panitera pengadilan lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penetapan besaran biaya panjar sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara; dan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		b. Panmud Perdata Pengadilan terkait supaya: 1) Berkoordinasi dengan Administrator *e-court* untuk melakukan pemutakhiran konfigurasi biaya pada *e-court* sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara; dan 2) Lebih cermat dalam melakukan validasi panjar biaya perkara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: b. Panmud Perdata pengadilan supaya: 1) Berkoordinasi dengan Administrator *e-court* untuk melakukan pemutakhiran konfigurasi biaya pada *e-court* sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara; dan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
			2) Lebih cermat dalam melakukan validasi panjar biaya perkara.		
5	Realisasi Pemeriksaan Setempat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Riil sebesar Rp1.272.273.000, Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp129.523.600, dan Tidak Sesuai Bukti Pengeluaran sebesar Rp546.887.719	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada: a. Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban pemeriksaan setempat yang tidak lengkap pada PN Penajam, PTUN Jakarta, PA Semarang, PN Depok, PA Jakarta Selatan, PN Surabaya, PN Jakarta Utara, dan PN Tangerang sebesar Rp1.272.273.000 dan jika terdapat kelebihan pembebanan agar pelaksana PS segera dikembalikan kepada para pihak sesuai nomor perkara terlampir dan jika enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak tidak diambil oleh para pihak, untuk menyetorkan kelebihan pemeriksaan setempat tersebut ke kas negara; dan b. Ketua Pengadilan terkait: 1) Untuk menetapkan tarif biaya pemeriksaan setempat pada SK Panjar Biaya Perkara memedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Badilum Nomor 1269/DJU/PS.01/12/2021 tentang Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat; 2) Memerintahkan pelaksana pemeriksaan setempat agar	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: a. Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban pemeriksaan setempat yang tidak lengkap pada PN Penajam, PTUN Jakarta, PA Semarang, PN Depok, PA Jakarta Selatan, PN Surabaya, PN Jakarta Utara, dan PN Tangerang sebesar Rp1.272.273.000 dan jika terdapat kelebihan pembebanan agar pelaksana PS segera dikembalikan kepada para pihak sesuai nomor perkara terlampir dan jika enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak tidak diambil oleh para pihak, untuk menyetorkan kelebihan pemeriksaan setempat tersebut ke kas negara; dan b. Ketua Pengadilan terkait: 1) Untuk menetapkan tarif biaya pemeriksaan setempat pada SK Panjar Biaya Perkara memedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Badilum Nomor 1269/DJU/PS.01/12/2021 tentang Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Hasil validasi Badan Pengawasan MA Bukti pengembalian kelebihan biaya pemeriksaan setempat kepada para pihak atau bukti setor ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		kedepannya setiap kegiatan pemeriksaan setempat melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Kasir, serta dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat memedomani ketentuan yang berlaku; dan 3) Untuk memerintahkan pelaksana pemeriksaan setempat mengembalikan kelebihan pembayaran biaya pemeriksaan setempat kepada para pihak sebesar Rp676.410.719. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara dengan perincian sebagai berikut: a) Pelaksanaan pemeriksaan setempat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp129.523.600 yang terdiri dari: (1) PN Balikpapan sebesar Rp47.750.000; dan (2) PTUN Jakarta sebesar Rp81.773.600. b) Biaya transportasi yang tidak sesuai kondisi riil sebesar Rp475.977.000 pada:	2) Memerintahkan pelaksana pemeriksaan setempat agar kedepannya setiap kegiatan pemeriksaan setempat melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Kasir, serta dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat memedomani ketentuan yang berlaku; dan 3) 3) Untuk memerintahkan pelaksana pemeriksaan setempat mengembalikan kelebihan pembayaran biaya pemeriksaan setempat kepada para pihak sebesar Rp676.410.719. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara dengan perincian sebagai berikut: a) Pelaksanaan pemeriksaan setempat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp129.523.600 yang terdiri dari: (1) PN Balikpapan sebesar Rp47.750.000; dan (2) PTUN Jakarta sebesar Rp81.773.600.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		(1) PA Semarang sebesar Rp5.879.000; (2) PA Jakarta Selatan sebesar Rp35.200.000; (3) PN Jakarta Utara sebesar Rp36.400.000; (4) PN Surabaya sebesar Rp41.609.000; (5) PN Tangerang sebesar Rp318.889.000; dan (6) PA Surabaya sebesar Rp38.000.000. c) Uang makan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada PTUN Jakarta tidak sesuai kondisi riil sebesar Rp70.910.719.	b) Biaya transportasi yang tidak sesuai kondisi riil sebesar Rp475.977.000 pada: (1) PA Semarang sebesar Rp5.879.000; (2) PA Jakarta Selatan sebesar Rp35.200.000; (3) PN Jakarta Utara sebesar Rp36.400.000; (4) PN Surabaya sebesar Rp41.609.000; (5) PN Tangerang sebesar Rp318.889.000; dan (6) PA Surabaya sebesar Rp38.000.000. c) Uang makan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada PTUN Jakarta tidak sesuai kondisi riil sebesar Rp70.910.719.		
		c. Panitera pengadilan terkait agar dalam menyetujui penghitungan biaya panjar pelaksanaan pemeriksaan setempat memedomani ketentuan yang berlaku.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: c. Panitera pengadilan terkait agar dalam menyetujui penghitungan biaya panjar pelaksanaan pemeriksaan setempat memedomani ketentuan yang berlaku.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
6	Realisasi Penggunaan Biaya Sumpah Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp395.506.000, Tidak Memiliki Dasar Hukum Sebesar Rp1.900.000, dan Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp331.926.000	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: a. Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban biaya sumpah yang tidak didukung bukti pengeluaran riil pada PA Surabaya dan PN Tangerang sebesar Rp331.926.000. Jika terdapat kelebihan pembebanan agar segera dikembalikan kepada para pihak. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara b. Panitera PA Surabaya, PN Tangerang, dan PN Bekasi untuk: 1) Merealisasikan biaya sumpah sesuai peruntukannya; dan 2) Mengembalikan biaya sumpah kepada para pihak sebesar Rp395.506.000 atas pembayaran biaya sumpah kepada para pegawai yang bukan petugas sumpah/tidak melaksanakan kegiatan sumpah. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara dengan perincian sebagai berikut:	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: a. Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban biaya sumpah yang tidak didukung bukti pengeluaran riil pada PA Surabaya dan PN Tangerang sebesar Rp331.926.000. Jika terdapat kelebihan pembebanan agar segera dikembalikan kepada para pihak. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara b. Panitera PA Surabaya, PN Tangerang, dan PN Bekasi untuk: 1) Merealisasikan biaya sumpah sesuai peruntukannya; dan 2) Mengembalikan biaya sumpah kepada para pihak sebesar Rp395.506.000 atas pembayaran biaya sumpah kepada para pegawai yang bukan petugas sumpah/tidak melaksanakan kegiatan sumpah. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara dengan perincian sebagai berikut:	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Hasil validasi Badan Pengawasan MA Bukti pengembalian kelebihan biaya sumpah kepada para pihak atau bukti setor ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		a) PA Surabaya sebesar Rp288.990.000; b) PN Tangerang sebesar Rp64.600.000; dan c) PN Bekasi sebesar Rp41.916.000.	a) PA Surabaya sebesar Rp288.990.000; b) PN Tangerang sebesar Rp64.600.000; dan c) PN Bekasi sebesar Rp41.916.000.		
		b. Panitera PN Bandung untuk: 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pengeluaran biaya sumpah yang dilakukan oleh Kasir; 2) Memerintahkan Kasir PN Bandung untuk menghentikan pemungutan biaya sumpah sesuai dengan SK Ketua PN No. 1063/KPN.W11.U1/HK.02/1/2024; dan 3) Memerintahkan kepada kasir untuk mengembalikan biaya sumpah yang tidak sesuai SK Panjar kepada para pihak sebesar Rp1.900.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait untuk memerintahkan: b. Panitera PN Bandung untuk: 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pengeluaran biaya sumpah yang dilakukan oleh Kasir; 2) Memerintahkan Kasir PN Bandung untuk menghentikan pemungutan biaya sumpah sesuai dengan SK Ketua PN No. 1063/KPN.W11.U1/HK.02/1/2024; dan 3) Memerintahkan kepada kasir untuk mengembalikan biaya sumpah yang tidak sesuai SK Panjar kepada para pihak sebesar Rp1.900.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti pengembalian biaya sumpah yang tidak sesuai SK Panjar kepada para pihak atau bukti setor ke kas negara
7	Biaya Panggilan/Pemberitahuan pada Lima Pengadilan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada: a. Ketua PA Semarang memerintahkan:	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: a. Ketua PA Semarang memerintahkan:	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
	Tidak Sesuai Kondisi Riil Sebesar Rp1.361.120.000	1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas panggilan/pemberitahuan melalui media massa; dan 2) JS/JSP terkait mengembalikan kelebihan pembayaran panggilan melalui media massa kepada para pihak sebesar Rp66.760.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas panggilan/pemberitahuan melalui media massa; dan 2) JS/JSP terkait mengembalikan kelebihan pembayaran panggilan melalui media massa kepada para pihak sebesar Rp66.760.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.		
		b. Ketua PN Bale Bandung memerintahkan: 1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas panggilan/pemberitahuan melalui media massa; dan 2) JS/JSP terkait mengembalikan kelebihan pembayaran panggilan melalui media massa kepada para pihak sebesar Rp45.560.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: b. Ketua PN Bale Bandung memerintahkan: 1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas panggilan/pemberitahuan melalui media massa; dan 2) JS/JSP terkait mengembalikan kelebihan pembayaran panggilan melalui media massa kepada para pihak sebesar Rp45.560.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti pengembalian kelebihan pembayaran panggilan memalui media massa kepada para pihak atau bukti setor ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		c) Ketua PA Jakarta Selatan memerintahkan: 1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi biaya panggilan/pemberitahuan dan delegasi melebihi yang seharusnya; dan 2) Koordinator pengiriman surat tercatat mengembalikan kelebihan biaya panggilan/pemberitahuan dan biaya delegasi kepada para pihak sebesar Rp31.686.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: c) Ketua PA Jakarta Selatan memerintahkan: 1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi biaya panggilan/pemberitahuan dan delegasi melebihi yang seharusnya; dan 2) Koordinator pengiriman surat tercatat mengembalikan kelebihan biaya panggilan/pemberitahuan dan biaya delegasi kepada para pihak sebesar Rp31.686.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti pengembalian kelebihan pembayaran panggilan memalui media massa kepada para pihak atau bukti setor ke kas negara
		c. Ketua PN Surabaya memerintahkan: 1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas: a) Pengiriman surat melalui pos yang biayanya menggunakan tarif pengiriman langsung oleh jurusita; b) Pengenaan biaya praposting sesuai kebutuhan riil; dan	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: c. Ketua PN Surabaya memerintahkan: 1) Panitera lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas: a) Pengiriman surat melalui pos yang biayanya menggunakan tarif pengiriman langsung oleh jurusita;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti pengembalian kelebihan pembayaran biaya panggilan/pemberitahuan dan biaya delegasi kepada para pihak atau bukti setor ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		c) Realisasi biaya panggilan/pemberitahuan kepada jurusita atas penyampaian surat panggilan/pemberitahuan untuk Hakim Pengawas. 2) Koordinator pengiriman surat tercatat mengembalikan kelebihan biaya panggilan/pemberitahuan dan biaya delegasi sebesar Rp31.686.000 kepada para pihak, dan jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak tidak diambil, disetorkan ke Kas Negara 3) JS/JSP terkait mengembalikan kelebihan biaya panggilan/pemberitahuan dan realisasi biaya praposting yang melebihi kebutuhan riil kepada para pihak sebesar Rp1.048.950.000 (Rp954.096.000 + Rp54.600.000 + Rp33.590.000 + Rp6.664.000). Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	b) Pengenaan biaya praposting sesuai kebutuhan riil; dan c) Realisasi biaya panggilan/pemberitahuan kepada jurusita atas penyampaian surat panggilan/pemberitahuan untuk Hakim Pengawas. 2) Koordinator pengiriman surat tercatat mengembalikan kelebihan biaya panggilan/pemberitahuan dan biaya delegasi sebesar Rp31.686.000 kepada para pihak, dan jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak tidak diambil, disetorkan ke Kas Negara 3) JS/JSP terkait mengembalikan kelebihan biaya panggilan/pemberitahuan dan realisasi biaya praposting yang melebihi kebutuhan riil kepada para pihak sebesar Rp1.048.950.000 (Rp954.096.000 + Rp54.600.000 + Rp33.590.000 + Rp6.664.000). Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
8	Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Eksekusi Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban biaya eksekusi yang tidak lengkap pada pengadilan terkait sebesar Rp3.888.347.198 Jika terdapat kelebihan pembebanan agar segera dikembalikan kepada para pihak. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban biaya eksekusi yang tidak lengkap pada pengadilan terkait sebesar Rp3.888.347.198 Jika terdapat kelebihan pembebanan agar segera dikembalikan kepada para pihak. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA Hasil validasi Badan Pengawasan
		BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar pelaksanaan kegiatan eksekusi wajib didukung dan dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai dan menyampaikan kepada Kasir;	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar pelaksanaan kegiatan eksekusi wajib didukung dan dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai dan menyampaikan kepada Kasir;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar merealisasikan biaya eksekusi sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019;	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar merealisasikan biaya eksekusi sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera PN Bale Bandung, PN Tangerang, dan PA Surabaya merealisasikan biaya ekesekusi sesuai dengan SK Panjar Ketua Pengadilan; dan	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan Panitera PN Bale Bandung, PN Tangerang, dan PA Surabaya merealisasikan biaya ekesekusi sesuai dengan SK Panjar Ketua Pengadilan; dan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		d. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar Jurusita PN Tangerang untuk: 1) Mengembalikan realisasi biaya eksekusi yang tidak dapat dijelaskan rincian penggunaannya sebesar Rp660.594.000 ke RPL PN Tangerang; dan 2) Mengembalikan realisasi biaya iklan melebihi kondisi riil sebesar Rp24.000.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan kepada Jurusita PN Tangerang untuk: 1) Mengembalikan realisasi biaya eksekusi yang tidak dapat dijelaskan rincian penggunaannya sebesar Rp660.594.000 ke RPL PN Tangerang; dan 2) Mengembalikan realisasi biaya iklan melebihi kondisi riil sebesar Rp24.000.000. Jika dalam waktu enam bulan setelah diberitahukan kepada para pihak dan tidak diambil, agar disetorkan ke Kas Negara.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti pengembalian biaya eksekusi yang tidak dapat dijelaskan rincian penggunaannya ke RPL PN Tangerang Bukti pengembalian realisasi biaya iklan melebihi kondisi riil
9	Realisasi Pembayaran Insentif Pengelola Biaya Proses Tidak Sesuai	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan Ketua PN Pariaman agar:	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan Ketua PN Pariaman agar:	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
	Ketentuan Sebesar Rp8.550.000	a. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 69/KPN.W3-U8/SK.KP/VII/2024 dan menghentikan pembayaran insentif pengelola biaya proses; dan b. Memerintahkan kepada Panitera untuk menagih kepada para penerima insentif pengelola biaya proses untuk mengembalikan penerimaan insentif selama Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp6.660.000 ke RPL PN Pariaman.	a. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 69/KPN.W3-U8/SK.KP/VII/2024 dan menghentikan pembayaran insentif pengelola biaya proses; dan b. Memerintahkan kepada Panitera untuk menagih kepada para penerima insentif pengelola biaya proses untuk mengembalikan penerimaan insentif selama Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp6.660.000 ke RPL PN Pariaman.		Bukti pengembalian insentif pengelola biaya proses ke RPL PN Pariaman
10	Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Tidak Sesuai Ketentuan Terlambat Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp296.274.400, dan Sisa Panjar Bersaldo Minus Belum Dapat Dijelaskan Sebesar Rp36.684.700	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan Ketua Pengadilan terkait untuk: a. Segera memberitahukan sisa panjar biaya perkara yang telah putus kepada pemohon/penggugat;	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar: a. Segera memberitahukan sisa panjar biaya perkara yang telah putus kepada pemohon/penggugat;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pemberitahuan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara;	b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pemberitahuan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		c. Memerintahkan Panitera Pengadilan terkait untuk: 1) Mematuhi ketentuan pemberitahuan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pemohon/termohon; 2) Memerintahkan kepada Kasir PN Bale Bandung, Kasir PN Balikpapan,	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar: c. Memerintahkan Panitera Pengadilan terkait untuk: 1) Mematuhi ketentuan pemberitahuan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pemohon/termohon;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan Bukti setor PNBP sisa panjar ke kas negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		Kasir PA Jakarta Selatan, Kasir PN Padang, Kasir PN Pariaman, dan Kasir PTUN Jakarta untuk segera menyetorkan sisa panjar ke kas negara sebesar Rp296.274.400 dengan rincian: a) PN Bale Bandung sebesar Rp16.987.000; b) PN Balikpapan sebesar Rp62.289.000; c) PA Jakarta Selatan sebesar Rp13.693.000; d) PN Padang sebesar Rp77.108.000; e) PN Pariaman sebesar Rp9.522.200; dan f) PTUN Jakarta sebesar Rp116.675.200. 3) Memerintahkan kepada Kasir PN Jakarta Utara, PN Tangerang, PN Serang, PN Surabaya, PN Bandung, PN Semarang, PN Bekasi, PN Padang, PA Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PN Jakarta Timur, dan PTUN Jakarta untuk segera mengembalikan biaya panjar perkara *e-Court* ditolak kepada para pemohon sebesar Rp218.037.777 dengan rincian:	2) Memerintahkan kepada Kasir PN Bale Bandung, Kasir PN Balikpapan, Kasir PA Jakarta Selatan, Kasir PN Padang, Kasir PN Pariaman, dan Kasir PTUN Jakarta untuk segera menyetorkan sisa panjar ke kas negara sebesar Rp296.274.400 dengan rincian: a) PN Bale Bandung sebesar Rp16.987.000; b) PN Balikpapan sebesar Rp62.289.000; c) PA Jakarta Selatan sebesar Rp13.693.000; d) PN Padang sebesar Rp77.108.000; e) PN Pariaman sebesar Rp9.522.200; dan f) PTUN Jakarta sebesar Rp116.675.200. 3) Memerintahkan kepada Kasir PN Jakarta Utara, PN Tangerang, PN Serang, PN Surabaya, PN Bandung, PN Semarang, PN Bekasi, PN Padang, PA Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PN Jakarta Timur, dan PTUN Jakarta untuk segera mengembalikan biaya panjar perkara *e-Court* ditolak kepada para		

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		a) PTUN Jakarta sebesar Rp5.737.000; b) PN Jakarta Timur sebesar Rp59.901.500; c) PA Jakarta Timur sebesar Rp16.291.000; d) PN Jakarta Selatan sebesar Rp8.509.500; e) PA Jakarta Pusat sebesar Rp9.212.000; f) PN Padang sebesar Rp20.319.777; g) PN Bekasi sebesar Rp6.927.000; h) PN Semarang sebesar Rp80.482.500; dan i) PN Bandung sebesar Rp10.657.500	pemohon sebesar Rp218.037.777 dengan rincian: a) PTUN Jakarta sebesar Rp5.737.000; b) PN Jakarta Timur sebesar Rp59.901.500; c) PA Jakarta Timur sebesar Rp16.291.000; d) PN Jakarta Selatan sebesar Rp8.509.500; e) PA Jakarta Pusat sebesar Rp9.212.000; f) PN Padang sebesar Rp20.319.777; g) PN Bekasi sebesar Rp6.927.000; h) PN Semarang sebesar Rp80.482.500; dan i) PN Bandung sebesar Rp10.657.500		
		d. Memerintahkan Kasir Biaya Perkara pada Pengadilan terkait untuk lebih cermat dalam: 1) Mengidentifikasi sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh pihak yang berperkara dan membuat surat pemberitahuan sisa panjar perkara kepada pemohon/ penggugat; 2) Menatausahakan sisa panjar biaya perkara yang telah diputus dan tidak	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar: c. Memerintahkan Kasir Biaya Perkara pada Pengadilan terkait untuk lebih cermat dalam: 1) Mengidentifikasi sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh pihak yang berperkara dan membuat surat pemberitahuan sisa	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		diambil oleh pemohon dalam jangka waktu enam bulan melalui pencatatan tersendiri sebagai uang tak bertuan dan menyetorkan ke kas negara; dan 3) Melakukan pencatatan pengeluaran biaya perkara dengan tertib dan valid serta membuat perhitungan dan permintaan tambah panjar biaya perkara jika terdapat kekurangan panjar biaya perkara.	panjar perkara kepada pemohon/ penggugat; 2) Menatausahakan sisa panjar biaya perkara yang telah diputus dan tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu enam bulan melalui pencatatan tersendiri sebagai uang tak bertuan dan menyetorkan ke kas negara; dan 3) Melakukan pencatatan pengeluaran biaya perkara dengan tertib dan valid serta membuat perhitungan dan permintaan tambah panjar biaya perkara jika terdapat kekurangan panjar biaya perkara.		
11	Pembayaran Ganda Uang Konsinyasi pada PN Serang untuk Ganti Rugi Objek Tanah yang Sama kepada Dua Pihak yang Berbeda pada Proyek Jalan Tol Serang - Panimbang I Sebesar Rp764.308.000	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan: a. Sdr. Nr selaku Ketua PN Serang Tahun 2023 lebih cermat dalam menetapkan pencairan uang titipan ganti kerugian perkara terutama dalam melakukan pemeriksaan berkas konsinyasi terutama atas pencairan yang telah terjadi sebelumnya;	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: a. Sdr. Nr selaku Ketua PN Serang Tahun 2023 lebih cermat dalam menetapkan pencairan uang titipan ganti kerugian perkara terutama dalam melakukan pemeriksaan berkas konsinyasi terutama atas pencairan yang telah terjadi sebelumnya;	Tahun 2025	Surat instruksi Sekretaris MA kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang periode tahun 2023
		b. Sdr. Sg selaku Panitera PN Serang Tahun 2023 lebih cermat dalam: 1) Membuat buku jurnal keuangan konsinyasi per perkara permohonan dan memperhatikan posisi saldo uang	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan:	Tahun 2025	Surat instruksi Sekretaris MA kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang periode tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		konsinyasi atas setiap objek/bidang tanah yang akan dilakukan pencairan; 2) Menyusun konsep penetapan pencairan konsinyasi perkara dengan melakukan pemeriksaan berkas konsinyasi terutama atas pencairan yang telah terjadi sebelumnya pada permohonan konsinyasi terkait; dan 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.	b. Sdr. Sg selaku Panitera PN Serang Tahun 2023 lebih cermat dalam: 1) Membuat buku jurnal keuangan konsinyasi per perkara permohonan dan memperhatikan posisi saldo uang konsinyasi atas setiap objek/bidang tanah yang akan dilakukan pencairan; 2) Menyusun konsep penetapan pencairan konsinyasi perkara dengan melakukan pemeriksaan berkas konsinyasi terutama atas pencairan yang telah terjadi sebelumnya pada permohonan konsinyasi terkait; dan 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.		Konsep surat Ketua Pengadilan atas penetapan pencairan konsinyasi perkara dengan melakukan pemeriksaan berkas konsinyasi terutama atas pencairan yang telah terjadi sebelumnya pada permohonan konsinyasi terkait Laporan Ketua Pengadilan atas monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya
		c. Kepada Ketua PN Serang untuk: 1) Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Serang dan pihak terkait agar uang konsinyasi sebesar Rp764.308.000 dapat diserahkan kembali ke PN Serang; 2) Memerintahkan Panitera PN Serang ntuk lebih cermat dalam	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: d. Kepada Ketua PN Serang untuk: 1) Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Serang dan pihak terkait agar uang konsinyasi sebesar Rp764.308.000 dapat diserahkan kembali ke PN Serang;	Tahun 2025	Surat instruksi Sekretaris MA kepada Ketua PN Serang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		menatausahakan pencatatan penerimaan dan penyerahan uang konsinyasi ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi per perkara permohonan dan buku kas bantu konsinyasi; dan 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.	2) Memerintahkan Panitera PN Serang ntuk lebih cermat dalam menatausahakan pencatatan penerimaan dan penyerahan uang konsinyasi ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi per perkara permohonan dan buku kas bantu konsinyasi; dan 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
12	Penatausahaan Uang Titipan Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan: a. Direktur Jenderal Badilum menetapkan SOP tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan uang titipan pihak ketiga terkait: 1) Mekanisme pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang titipan konsinyasi; dan 2) Mekanisme pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang titipan pihak ketiga berupa uang sisa hasil lelang yang tidak diambil oleh debitur dan uang jaminan penangguhan penahanan.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: a. Direktur Jenderal Badilum menetapkan SOP tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan uang titipan pihak ketiga terkait: 1) Mekanisme pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang titipan konsinyasi; dan 2) Mekanisme pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang titipan pihak ketiga berupa uang sisa hasil lelang yang tidak diambil oleh debitur dan uang jaminan penangguhan penahanan.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA kepada Direktur Jenderal Badilum SOP tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan uang titipan pihak ketiga terkait: 1) Mekanisme pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang titipan konsinyasi; dan 2) Mekanisme pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang titipan pihak ketiga berupa uang sisa hasil lelang yang tidak diambil oleh debitur dan uang jaminan penangguhan penahanan
		b. Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada:	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA kepada Kepala Badan Pengawasan MA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		pada PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PN Bekasi, dan PN Bale Bandung dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.	b. Kepala Badan Pengawasan MA untuk melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga pada PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PN Bekasi, dan PN Bale Bandung dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.		Hasil verifikasi Badan Pengawasan
		c. Ketua PN Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PN Bekasi, dan PN Bale Bandung: 1) Agar lebih cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya; dan 2) Membentuk tim penelusuran atas adanya selisih yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak dapat diketahui pemiliknya.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: c. Ketua PN Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PN Bekasi, dan PN Bale Bandung: 1) Agar lebih cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya; dan 2) Membentuk tim penelusuran atas adanya selisih yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak dapat diketahui pemiliknya.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		d. Ketua PN Jakarta Selatan agar lebih cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya; dan	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada: d. Ketua PN Jakarta Selatan agar lebih cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saldo uang titipan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya; dan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		e. Panmud Perdata PN Jakarta Timur, PN Bekasi, PN Jakarta Selatan, dan PN Bale Bandung serta Panmud Gugatan PA Jakarta Pusat agar lebih cermat dalam mengarsipkan dan menatausahakan uang titipan pihak ketiga dengan tertib dan akurat.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan: e. Panmud Perdata PN Jakarta Timur, PN Bekasi, PN Jakarta Selatan, dan PN Bale Bandung serta Panmud Gugatan PA Jakarta Pusat agar lebih cermat dalam mengarsipkan dan menatausahakan uang titipan pihak ketiga dengan tertib dan akurat.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
13	Pelaporan Sisa Panjar pada Aplikasi SIPP PN Penajam, PN Jakarta Timur, dan PN Bekasi Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA untuk menginstruksikan: a. Ketua Pengadilan dan Panitera PN Penajam, Jakarta Timur dan PN Bekasi lebih optimal dalam memberikan bimbingan dan pengarahan untuk mendukung kelancaran administrasi perkara dalam SIPP sesuai tanggung jawabnya;	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan: a. Ketua Pengadilan dan Panitera PN Penajam, Jakarta Timur dan PN Bekasi lebih optimal dalam memberikan bimbingan dan pengarahan untuk mendukung kelancaran administrasi perkara dalam SIPP sesuai tanggung jawabnya;	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan
		b. Panmud Perdata PN Penajam, PN Jakarta Timur, dan PN Bekasi lebih cermat dalam mengoordinasikan pemasukan dan pengelolaan data keuangan panjar biaya perkara dalam SIPP; dan	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan: b. Panmud Perdata PN Penajam, PN Jakarta Timur, dan PN Bekasi lebih cermat dalam mengoordinasikan pemasukan dan pengelolaan data keuangan panjar biaya perkara dalam SIPP; dan	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

No	Judul	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
		c. Kasir PN Penajam, PN Jakarta Timur, dan PN Bekasi agar memasukkan data pengembalian sisa panjar biaya perkara ke dalam SIPP sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Sekretaris MA akan menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan terkait agar memerintahkan: c. Kasir PN Penajam, PN Jakarta Timur, dan PN Bekasi agar memasukkan data pengembalian sisa panjar biaya perkara ke dalam SIPP sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Tahun 2025	Surat Instruksi Sekretaris MA dan Surat Perintah Ketua Pengadilan

Jakarta, 16 Januari 2025

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

(SUGIYANTO, S.H., M.H.)

NIP 19671124 199212 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT CHR BADAN PENGAWASAN ATAS LAPOAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021)3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol pos Nomor 1020 jakarta 10110

Nomor :2427/SEK/PW1.1.2/III/2024 Jakarta, 20 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian *Action Plan* Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 (*Unaudited*)

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Jl. Jenderal A. Yani Kav No.58, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Sehubungan disampaikannya Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 (*Unaudited*), bersama ini kami sampaikan Tindak Lanjut *Action Plan* Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawasan Mahkamah Agung dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 (*UNAUDITED*)

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Penyelenggaraan Akuntansi					
1.	Terdapat 33 Data Ketidaksesuaian Akun VS Kode Barang Persediaan.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang persediaan agar melakukan koreksi.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA akan melakukan Sosialisasi/Pembinaan/TOT kepada Operator/PPK Satuan Kerja terkait penginputan kode barang pada Modul Komitmen. Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
2.	Terdapat 376 Data Ketidaksesuaian Akun VS Kode Barang Aset Tetap/ATB.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi aset tetap agar melakukan koreksi.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA akan melakukan Sosialisasi/Pembinaan/TOT kepada Operator/PPK Satuan Kerja terkait penginputan kode barang pada Modul Komitmen. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi kedepannya akan menyesuaikan akun saat penyusunan anggaran belanja yang membentuk aset tetap. Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Laporan Realisasi Anggaran – Pendapatan					
1.	Terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) pada 18 (Delapan Belas) Satuan Kerja Sebesar Rp56.848.101,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Akun Pendapatan Jasa Giro yang masih terdapat pada 18 satuan kerja atas pengelolaan rekening satuan kerja agar dilakukan penertiban rekening pemerintah pada satuan kerja yaitu Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang mewajibkan pengelolaanya melalui TNP (*Treasury National Pooling*). Agar satker menjelaskan dan mengungkapkan pada CaLK.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (425764) sebesar Rp56.848.101,00 pada 18 Satuan Kerja dan telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) ke dalam program TNP (*Treasury Notional Pooling*) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Namun pada Satuan Kerja 00501.1200.099045 Pengadilan Negeri Metro sebesar Rp63.000,00 merupakan pendapatan jasa giro akibat pemindahan rekening RPL. Saat ini Satuan Kerja sudah terdaftar dalam program *Treasury Notional Polling* (TNP). Satuan kerja akan menindaklanjuti dengan melakukan koreksi/ralat kode satuan kerja 099045 menjadi kode satuan kerja 099237 pada saat penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Audited*). Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 *Unaudited* (Lampiran I).
2.	Terdapat pendapatan dari penutupan rekening (425765) pada Pengadilan Tinggi Agama	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Pendapatan dari penutupan rekening agar dilakukan penertiban rekening pemerintah pada	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Pendapatan dari Penutupan Rekening (425765) sebesar Rp3.478,00 pada satuan kerja 00501.3500.526722 Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara merupakan pendapatan dari penutupan rekening Bendahara Pengeluaran

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Kalimantan Utara sebesar Rp3.478,00.	satuan kerja yaitu Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang mewajibkan pengelolaanya melalui TNP (*Treasury National Pooling*). Agar satker menjelaskan dan mengungkapkan pada CaLK.			yang sementara digunakan untuk Tunjangan Kinerja (Remunerasi) pegawai. Rekening tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke dalam program *Treasury Notional Pooling* (TNP), namun terdapat kesalahan dan kegagalan teknis dari pihak BRI yang menyebabkan munculnya pendapatan tersebut. Satuan kerja telah menyetorkan pendapatan tersebut ke kas negara pada 28 Februari 2023 dan saat ini rekening telah terdaftar dalam program *Treasury Notional Polling* (TNP). Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA juga telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (*Treasury Notional Pooling*) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
3.	Terdapat Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) pada Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp997.770,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) agar dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) sebesar Rp997.770,00 pada satuan kerja 00501.0500.098277 Pengadilan Negeri Blitar merupakan persekot gaji dengan sumber data SBS berasal dari uang muka belanja pegawai pindah yang diajukan pada bulan Juni 2010, namun baru dilunasi pada Tahun 2023.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
4.	Terdapat Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) pada 9 (Sembilan) Satuan Kerja yaitu PN Pariaman, PN Masohi, PN Biak, PN Jakarta Utara, PT Bengkulu, PA Tamiyang Layang, PA Muara Tewe, Dirjen Badilum dan MS Takengon sebesar Rp1.667.389,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Pendapatan Anggaran Lain- lain agar dilakukan identifikasi dan koreksi.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) pada 9 Satuan Kerja dengan penjelasan terlampir (Lampiran II). Namun pada Satuan Kerja: 1. 00501.1400.401874 Pengadilan Agama Tamiyang Layang sebesar Rp925.000,00 merupakan Kesalahan penyetoran/potongan SPM Nomor 00205A tanggal 2 November 2023 seharusnya akun Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124); 2. 00501.1400.402443 Pengadilan Agama Muara Tewe sebesar Rp185.000,00 merupakan kesalahan penyetoran/potongan SPM Nomor 00104A tanggal 16 November seharusnya akun Belanja Tunjangan Umum PNS (511151). Atas hal tersebut, satuan kerja akan melakukan koreksi/ralat SPM pada saat penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Audited*). Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
5.	Terdapatan pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap pendapatan penjualan hasil produksi	Semester II Tahun 2023.	Bagian PNBP dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian PNBP dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) sebesar Rp2.500.000,00 pada satuan kerja

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	(425119) pada Badan Pengawasan sebesar Rp2.500.000,00.	non litbang lainnya pada Badan Pengawasan agar dilakukan koreksi pencatatan.			00507.0199.663136 Badan Pengawasan merupakan penjualan atas hasil pemusnahan arsip inaktif. Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN B5D8961QUQKD3SK8 tanggal 16 Mei 2023. Satuan Kerja akan melakukan koreksi/ralat menjadi akun Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*). Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
6.	Terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) pada 13 Satker yang tidak sesuai.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) pada 13 satker yang tidak sesuai agar dilakukan koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian PNBP dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian PNBP dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) pada 13 satker dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pengajuan restitusi atas kesalahan pemotongan sewa.
Laporan Realisasi Anggaran – Belanja					
1.	Terdapat Belanja Uang Lembur (512211) pada 5 (Lima) Satuan Kerja yaitu Pengadilan Agama Selayar, Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badilmiltun sebesar Rp636.346.100,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Uang Lembur agar dilakukan identifikasi.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Uang Lembur (512211) pada 5 Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut: 1) 00501.1900.307562 Pengadilan Agama Selayar sebesar Rp8.935.100,00; 2) 00502.0199.004028 Kepaniteraan sebesar Rp102.015.000,00; 3) 00503.0199.097450 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp148.401.000,00; 4) 00504.0199.663712 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp119.182.000,00; dan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					5) 00505.0199.663122 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milliter dan Peradilan Tata Usaha sebesar Rp157.813.000,00. Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Satuan Kerja terkait yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kantor, pelaksanaan tugas pada jam kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Jam kerja lembur diberlakukan karena tugas bersifat segera dan tidak dimungkinkan selesai melalui jam kerja biasa. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
2.	Terdapat Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh (521113) pada 4 (Empat) Satuan Kerja yaitu PN Wonogiri, PA Sragen, PA Pandeglang dan PA Kota Tasikmalaya sebesar Rp8.897.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Penambahan daya tahan tubuh agar dijelaskan pada CaLK.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (521113) pada 4 (Empat) Satuan Kerja dengan penjelasan terlampir (Lampiran III). Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
3.	Terdapat Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) pada Pengadilan Agama Kota Cimahi	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 agar	Semester II Tahun 2023.	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) pada pada satuan kerja 00501.0200.401958 Pengadilan Agama Kota Cimahi sebesar Rp854.700,00 merupakan pembelian vitamin/obat untuk kebutuhan penanganan Pandemi

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	sebesar Rp854.700,00.	dilakukan ralat/koreksi pencatatan.			COVID-19 bulan April 2023. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023, hal: Penggunaan Akun Khusus COVID-19 menerangkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan s.d Semester I Tahun 2023 atau s.d berakhirnya status pandemi COVID-19 yaitu 21 Juni 2023, maka berdasarkan hal tersebut satuan kerja telah menggunakan akun belanja khusus COVID-19 pada bulan April 2023. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
4.	Terdapat Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) pada Badan Litbang Diklat Kumdil sebesar Rp1.200.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Barang non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 agar dilakukan ralat/koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) pada satuan kerja 00506.0199.610378 Badan Litbang Diklat Kumdil sebesar Rp1.200.000,00 merupakan pembelian vitamin/obat untuk kebutuhan penanganan Pandemi COVID-19 bulan Maret 2023. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023, hal: Penggunaan Akun Khusus COVID-19 menerangkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan s.d Semester I Tahun 2023 atau s.d berakhirnya status pandemi COVID-19 yaitu 21 Juni 2023, maka berdasarkan hal tersebut satuan kerja telah menggunakan akun belanja khusus COVID-19 pada bulan Maret 2023. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
5.	Terdapat Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) pada Badan Urusan Administrasi sebesar Rp3.257.691.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 agar dilakukan ralat/koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) terdapat pada satuan kerja 00501.0199.663157 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp3.257.691.000,00 merupakan jasa penyemprotan disinfektan untuk kebutuhan penanganan Pandemi COVID-19 s.d bulan Juni 2023 sebesar Rp2.567.180.000,00, realisasi di bulan Juli 2023 sebesar Rp641.795.000,00, dan realisasi di bulan Agustus 2023 sebesar Rp48.716.000,00. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023, hal: Penggunaan Akun Khusus COVID-19 menerangkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan s.d Semester I Tahun 2023 atau s.d berakhirnya status pandemi COVID-19 yaitu 21 Juni 2023,

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					maka berdasarkan hal tersebut satuan kerja telah menggunakan akun belanja khusus COVID-19 s.d Agustus 2023. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
6.	Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) pada 5 Satuan Kerja yaitu PN Sleman, PN Padang, PN Ujung Pandang, PA Kendari, dan PA Surakarta sebesar Rp40.040.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada 5 Satuan Kerja yaitu PN Sleman, PN Padang, PN Ujung Pandang, PA Kendari, dan PA Surakarta agar dilakukan revisi pada periode berikutnya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) pada 5 Satuan Kerja merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Tingkat Banding di Hotel. Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja.
7.	Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) pada 5 (Lima) Satuan Kerja yaitu PN Mataram, PN Sumbawa Besar, PN Selong, PN Praya, dan PA Tarakan sebesar Rp10.806.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap terhadap Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) pada 5 (Lima) Satuan Kerja yaitu PN Mataram, PN Sumbawa Besar, PN Selong, PN Praya, dan PA Tarakan agar dilakukan revisi pada periode berikutnya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) pada 5 (Lima) Satuan Kerja merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Tingkat Banding di Hotel. Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
8.	Terdapat realisasi belanja akun 521252, 521111, 532111, 521211 yang membentuk barang Persediaan sebesar Rp40.989.920,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap ketidaksesuaian akun belanja barang/persediaan/modal agar ditelusur kembali untuk memastikan bukan merupakan kesalahan dalam pendetilan kode persediaan dan aset pada modul komitmen dan selanjutnya agar diungkap/dijelaskan dalam CaLK dan jika dimungkinkan dilakukan ralat/koreksi pencatatannya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah melakukan verifikasi terhadap realisasi belanja akun 521252, 521111, 532111, 521211. Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*). https://drive.google.com/file/d/1JrcMhb1ZM_q7Zy8_LdP53wp7pxf2JM_T/view?usp=sharing
9.	Terdapat realisasi belanja modal akun 521111, 521252, 521811, 523111, 531114, 532111, 533111, 533121 dan 536111 yang tidak sesuai dengan kode BMN sebesar Rp58.362.739.295,00	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap ketidaksesuaian akun belanja barang/persediaan/modal agar ditelusur kembali untuk memastikan bukan merupakan kesalahan dalam pendetilan kode persediaan dan aset pada modul komitmen dan selanjutnya agar diungkap/dijelaskan dalam CaLK dan jika dimungkinkan dilakukan	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah melakukan verifikasi terhadap realisasi belanja modal akun 521111, 521252, 521811, 523111, 531114, 532111, 533111, 533121 dan 536111. Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*). https://drive.google.com/drive/folders/1IaMXxtWpOqjvuMvNayTFPVivd1np3xir

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
		ralat/koreksi pencatatannya.			
10.	Terdapat Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges (521813) sebesar Rp20.000,00 pada PN Blitar.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges yang tercatat agar dilakukan ralat/koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges (521813) pada Pengadilan Negeri Blitar pada satuan kerja 00503.0500.099151 Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp20.000,00 merupakan pembelian materai atas SPM Nomor 00016A tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp10.000,00 dan SPM Nomor 00017A tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp10.000,00.
11.	Terdapat Belanja Uang Lembur PPPK (512212) pada Ditjen Badilmiltun sebesar Rp2.821.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Belanja Uang Lembur PPPK agar dilakukan identifikasi.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi terhadap akurasi data saldo akun Belanja Uang Lembur PPPK (512212) pada Ditjen Badilmiltun sebesar Rp2.821.000,00 merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Satuan Kerja terkait yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kantor, pelaksanaan tugas pada jam kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Jam kerja lembur diberlakukan karena tugas bersifat segera dan tidak dimungkinkan selesai melalui jam kerja biasa. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
Laporan Operasional					
1.	Terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sebesar	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap beban persediaan rusak/ usang	Semester II Tahun 2023.	Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro	Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA akan melakukan Sosialisasi/Pembinaan/TOT kepada Pengelola Persediaan Satuan Kerja terkait penatausahaan barang persediaan rusak/usang.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Rp35.928.364,00 pada 9 (sembilan) satuan kerja.	agar dilakukan identifikasi dan melakukan penghapusan pada periode selanjutnya.		Perlengkapan BUA.	Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
2.	Terdapat Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (595113) sebesar Rp55.403.752,00 pada 5 (lima) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan agar kedepan pengelola keuangan lebih cermat dalam merealisasikan anggarannya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi, Bagian Penyusunan Rencana Anggaran, dan Bagian IKN.	Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah melakukan identifikasi atas Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (595113) sebesar Rp55.403.752,00 pada 5 (lima) satuan kerja. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi kedepannya akan menyesuaikan akun saat penyusunan anggaran belanja yang membentuk aset tetap ataupun belanja aset tetap dibawah nilai kapitalisasi. Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
3.	Terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (595112) sebesar Rp588.789.117,00 pada 52 (lima puluh dua) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terdapat Beban Aset Ekstrakomptabel peralatan dan mesin agar kedepan pengelola keuangan lebih cermat dalam merealisasikan anggarannya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi, Bagian Penyusunan Rencana Anggaran, dan Bagian IKN	Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah melakukan identifikasi atas Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (595112) sebesar Rp588.789.117,00 pada 52 (lima puluh dua) satuan kerja. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi kedepannya akan menyesuaikan akun saat penyusunan anggaran belanja yang membentuk aset tetap ataupun belanja aset tetap dibawah nilai kapitalisasi. Bagian Akuntansi Biro Keuangan, dan Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
Laporan Perubahan Ekuitas					
1.	Terdapat Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar Rp24.224.826,00 pada 8 (delapan) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap koreksi nilai persediaan agar Pengelola Persediaan lebih tertib dalam penatausahaan barang persediaan.	Semester II Tahun 2023 *Audited.*	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap saldo akun Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar Rp24.224.826,00 pada 8 Satuan Kerja. Koreksi Nilai Persediaan sudah benar dan telah dijelaskan/diungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2023.
2.	Terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) sebesar Rp58.279.767.165,00 pada 668 (enam ratus enam puluh delapan) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi agar Pengelola Aset lebih tertib dalam penatausahaan BMN.	Semester II Tahun 2023 *Audited.*	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap saldo akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) sebesar Rp58.279.767.165,00 pada 668 (enam ratus enam puluh delapan) dan telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Mahkamah Agung Semester II Tahun 2023.
3.	Terdapat Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118) sebesar Rp2.425.460.250,00 pada 8 (delapan) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi agar Pengelola Aset lebih tertib dalam penatausahaan BMN.	Semester II Tahun 2023 *Audited.*	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap saldo akun Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118) sebesar Rp2.425.460.250,00 pada 8 (delapan) satuan kerja. dan telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Pendukung Semester II Tahun 2023.
4.	Terdapat Koreksi lainnya (391119) sebesar Rp613.075.318,00	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap saldo akun Koreksi Lainnya (391119)	Semester II Tahun 2023 *Audited.*	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan	Terdapat saldo akun Koreksi Lainnya (391119) sebesar Rp613.075.318,00 pada 67 (enam puluh tujuh) satuan kerja merupakan koreksi selain yang terkait BMN, antara lain koreksi kurang catat atau lebih catat atas Beban, Koreksi atas

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	pada 67 (enam puluh tujuh) satuan kerja.	agar pengelola transaksi belanja, pendapatan dan saldo akrual lebih tertib		Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Pendapatan, Koreksi eliminasi akibat kesalahan sistem dan Belanja yang Masih Harus Dibayar belum dilakukan jurnal balik tahun lalu. Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2023.
Neraca					
1.	Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) sebesar Rp34.246.000,00 pada PT Kendari, PA Buol, dan PN Buol.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Kas di Bendahara Pengeluaran TUP agar disetorkan dan diungkapkan pada CaLK. Kedepannya Bendahara Pengeluaran lebih tertib dalam pengelolaan kas.	Semester II Tahun 2023. Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) sebesar Rp34.246.000,00 pada PT Kendari, PA Buol, dan PN Buol merupakan sisa TUP yang terlambat disetorkan ke kas negara pada Tahun 2023. Satuan Kerja telah melakukan penyetoran pada bulan Januari Tahun 2024 dan telah diungkapkan/dijelaskan dalam LK MA Tahun 2023 (*Unaudited*) dan akan diungkap kembali pada LK MA Tahun 2023 (*Audited*)
2.	Terdapat Kas di Bendahara Penerimaan (111711) sebesar Rp160.000,00 pada PN Ketapang.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Kas di Bendahara Penerimaan agar disetorkan dan diungkap pada CaLK. Kedepannya Bendahara Penerimaan lebih tertib dalam penyetoran PNBP.	Semester II Tahun 2023.	Bagian PNBP dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Kas di Bendahara Penerimaan sebesar sebesar Rp160.000,00 pada PN Ketapang merupakan PNBP yang diterima pada akhir Desember 2023 dan disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2024 serta telah diungkapkan/dijelaskan pada LK MA Tahun 2023 (*Unaudited*).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
3.	Terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821) sebesar Rp2.764.820,00 pada PTUN Gorontalo, PN Buol, PA Batulicin dan PN Buol.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran agar disetorkan dan diungkap pada CaLK. Kedepannya Bendahara Pengeluaran lebih tertib dalam penyetoran PNBP.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821) sebesar Rp2.764.820,00 pada PTUN Gorontalo, PN Buol, PA Batulicin dan PN Buol merupakan utang pajak yang belum disetorkan pada Tahun 2023. Satuan kerja telah menyetorkan utang pajak tersebut ke kas Negara pada Januari Tahun 2024. Penjelasan atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran telah diungkapkan/dijelaskan pada LK MA Tahun 2023 (*Unaudited*).
4.	Terdapat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah (111822) sebesar Rp32.975,00 dengan PN Cikarang.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah agar disetorkan dan diungkap pada CaLK. Kedepannya Bendahara lebih tertib dalam penyetoran PNBP.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi, Bagian IKN Biro Perlengkapan, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah (111822) sebesar Rp32.975,00 dengan PN Cikarang merupakan kesalahan penggunaan akun pada saat penyetoran pengembalian hibah uang, satuan kerja akan melakukan koreksi/ralat akun pada pelaporan keuangan Tahun 2023 (*Audited*). Hal tersebut telah diungkapkan/dijelaskan pada Laporan Keuangan MA Tahun 2023 (*Unaudited*).
5.	Terdapat Jalan dan Jembatan (134111) sebesar Rp19.628.745.150,00 pada PT Manado, PN Mamuju, PT Kupang dan Badan Litbang Diklat Kumdil.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset Jalan dan Jembatan agar dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pada periode selanjutnya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA akan membuat surat edaran agar Satuan Kerja melakukan verifikasi atas pencatatan Jalan dan Jembatan, yang kemudian hasilnya akan dijadikan dasar Satuan Kerja untuk melakukan koreksi.
6.	Terdapat Irigasi (134112) sebesar Rp7.946.154.474,00	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset Irigasi agar	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA telah melakukan verifikasi dan diketahui irigasi pada diklat adalah memang benar saluran air.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	pada Badan Litbang Diklat Kumdil.	dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pada periode selanjutnya.			
7.	Terdapat Jaringan (134113) sebesar Rp30.594.047.964,00 pada 5 (lima) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset Jaringan agar dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pada periode selanjutnya.	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA akan membuat surat edaran agar Satuan Kerja melakukan verifikasi atas pencatatan Jaringan, yang kemudian hasilnya akan dijadikan dasar Satuan Kerja untuk melakukan koreksi.
8.	Terdapat Aset Tetap yang Belum Diregister (139111) sebesar Rp4.400.000,00 pada Pengadilan Tinggi Jakarta.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset tetap yang belum diregister agar melakukan identifikasi dan pencatatan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian IKN Biro Perlegkapan telah melakukan verifkasi dan diketahui bahwa asset tetap belum register sudah dilakukan void, dan pada LK 2023 unaudited sudah tidak tersaji.
9.	Terdapat Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) sebesar Rp164.453.156.381,00 pada 35 (tiga puluh lima) satuan kerja	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga agar diidentifikasi dan diungkapkan/dijelaskan pada CaLK.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Penjelasan atas Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) sebesar Rp164.453.156.381,00 pada 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dijelaskan pada LK MA Tahun 2023 (*Unaudited*).
10.	Terdapat Aset Tetap Renovasi (135111) sebesar Rp23.662.924.034,00 pada 6 (enam) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset Tetap Renovasi agar dilakukan identifikasi dan melakukan penyerahan	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (Lampiran IX).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
		aset pada periode pelaporan selanjutnya.			
11.	Terdapat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sebesar Rp160.277.048.880,00 pada 526 (lima ratus dua puluh enam) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi (Aset Henti Guna) perlu dilakukan penghentian penggunaan oleh satker dengan melakukan penghapusan BMN melalui Biro Perlengkapan dengan menggunakan aplikasi e-SADEWA.	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN, Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian IKN, Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan pembinaan pada 14 wilayah untuk Satuan Kerja melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut terhadap Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan agar segera dilakukan penghapusan. Bagian IKN akan berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Penghapusan terkait tindak lanjut aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
12.	Terdapat Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sebesar Rp1.644.900.130,00 pada 53 (lima puluh tiga) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi (Aset Henti Guna) perlu dilakukan penghentian penggunaan oleh satker dengan melakukan penghapusan BMN melalui Biro Perlengkapan dengan menggunakan aplikasi e-SADEWA.	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN, Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian IKN, Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah melakukan pembinaan pada 14 wilayah untuk Satuan Kerja melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut terhadap Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan agar segera dilakukan penghapusan. Bagian IKN akan berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Penghapusan terkait tindak lanjut aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
13.	Terdapat Hibah Langsung yang belum disahkan (218211) sebesar Rp326.998.235,00 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Hibah langsung yang belum disahkan, agar diungkapkan/dijelaskan pada CaLK.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas Hibah Langsung yang Belum Disahkan (218211) sebesar Rp326.998.235,00. Satuan Kerja akan melakukan koreksi atas pengesahan hibah pada Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 (*Unaudited*).
14.	Terdapat Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) sebesar Rp2.746.082,00 pada PTUN Gorontalo, PA Batulicin dan PN Buol.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor agar segera dilakukan penyetoran dan melakukan pelaporan.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait dan menerbitkan surat Kepala Biro Keuangan Nomor: 1256/BUA.3/KU.1/X/2023 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 dimana didalamnya pada point 40 (c) tidak diperbolehkan terdapat transaksi yang prosesnya masih menggantung antara lain sudah pungut pajak tetapi belum disetor yang diinput pada Modul Bendahara. Satuan kerja telah menyetorkan utang pajak tersebut ke kas Negara pada Januari Tahun 2024. Penjelasan atas Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor telah diungkapkan/dijelaskan pada LK MA Tahun 2023 (*Unaudited*).
15.	Terdapat Konstruksi Dalam pengerjaan (136111) sebesar Rp955.654.479.579,00 pada 56 (lima puluh enam) satuan kerja	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap kontruksi dalam pengerjaan agar diidentifikasi dan diungkapkan/dijelaskan di CaLK.	Semester II Tahun 2023.	Bagian IKN Biro Perlengkapan BUA.	Bagian IKN Bersama dengan Bagian PB sudah melakukan verifikasi dan menyajikan KDP pada lampiran A2 LK 2023 Unaudited.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Catatan atas Laporan Keuangan					
1.	Tim Reviu belum memperoleh dokumen CaLK.	Badan Pengawasan merekomendasikan terhadap dokumen CaLK agar disusun dan diterima oleh Auditor Badan Pengawasan sebelum batas waktu penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023.	Semester II Tahun 2023.	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA.	Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 telah disusun dan diterima oleh Auditor Badan Pengawasan pada tanggal 29 Februari 2024 sehingga pada saat terbitnya Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, dokumen CaLK masih dalam proses penyusunan.

Jakarta, 20 Maret 2024
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER I TAHUN 2024

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Penyelenggaraan Akuntansi					
1.	Penugasan Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dilaksanaan pada periode 6 SAKTI dan olah data dilakukan per tanggal 29 Juli 2024.				
2.	Terdapat entitas akuntansi tahun 2024 teralokasi DIPA tahun 2024 sebanyak 1853 satuan kerja dengan alokasi anggaran Rp11.905.148.120.000,00 direalisasikan untuk periode berakhir 30 Juni 2024 sebesar Rp6.074.740.205.269,00 atau sebesar 51,03 persen.				
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 telah menggunakan SAKTI full module untuk seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung yang masih terdapat perubahan data pada aplikasi SAKTI sehingga proses reviu atas LK terbatas pada data Aplikasi MonSakti (role: APIP) per tanggal 29 Juli 2024, aplikasi e-SADEWA dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester 1 Tahun 2024.				
4.	Terdapat 13 Data Ketidaksesuaian Kode Akun VS Kode BMN.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar satuan kerja melakukan perbaikan melalui mekanisme revisi anggaran dan mengajukan koreksi atas SPM dan SP2D.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Terhadap Ketidaksesuaian Kode Akun VS Kode BMN pada Mahkamah Agung sudah diberikan penjelasan pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester 1 Tahun 2024, diantaranya terdapat beberapa satuan kerja yang tidak dapat melakukan revisi karena dalam satu SP2D terdapat belanja lainnya. Selain itu juga terdapat 2 transaksi dengan tanggal buku pada bulan Juli (termasuk Semester 2 Tahun 2024). Selanjutnya akan dibuatkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja sebagai bentuk mitigasi agar

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					satuan kerja lebih cermat dalam hal penginputan kode akun belanja dan kode barang pada aplikasi SAKTI.
5.	Terdapat 30 Data Ketidaksesuaian Kode Akun VS Kode Persediaan.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar melakukan koreksi atas Ketidaksesuaian Kode Akun VS Kode Persediaan.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Terhadap Ketidaksesuaikan Kode Akun Belanja vs Kode Persediaan sudah dijelaskan secara rinci pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester 1 Tahun 2024. Selanjutnya akan dibuatkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja sebagai bentuk mitigasi agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penginputan kode akun belanja dan kode persediaan pada aplikasi SAKTI.
6.	Terdapat 3 Rincian Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (51xxxx) Periode Bulan 06.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar melakukan koreksi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Surat Setorat Pengembalian Belanja (SSPB).	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Pelaksanaan Anggaran	Akan melakukan koreksi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Surat Setorat Pengembalian Belanja (SSPB).
7.	Terdapat 3 Rincian Saldo Akun Tidak Normal Periode	Badan Pengawasan merekomendasikan agar menyelesaikan	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Akuntansi	Terdapat 3 Satuan Kerja, yaitu Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan Pengadilan Negeri Tegal akan melakukan koreksi, dan sudah

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Sampai Dengan Bulan 06.	dan melakukan koreksi atas saldo akun tidak normal.			disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Semester I tahun 2024, dan akan dilakukan koreksi pada periode berikutnya.
8.	Terdapat 127 Rincian Pagu Minus (Basis Sp2d) Akun 51xxxx Periode Bulan 06.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar menyelesaikan Pagu Minus (Basis Sp2d) Akun 51xxxx Periode Bulan 06.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Pelaksanaan Anggaran	Akan menyelesaikan Pagu Minus (Basis Sp2d) Akun 51xxxx Periode Bulan 06 dengan melakukan revisi.
9.	Terdapat 907 Data Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) Sampai Dengan Periode Bulan 06.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar melakukan monitoring atas Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) di periode berikutnya.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Akuntansi	Penjelasan sudah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Semester I tahun 2024.
Pendapatan					
1.	Terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) pada 6 (enam) Satuan Kerja Sebesar Rp9.439.588,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan penertiban rekening pemerintah pada satuan kerja yaitu Rekening Bendahara	Triwulan III Tahun 2024	Bagian PNBP	Telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (Treasury Notional Pooling) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
		Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang mewajibkan pengelolaanya melalui TNP (*Treasury National Pooling*).			Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024.
2.	Terdapat pendapatan dari penutupan rekening (425765) pada Pengadilan Tinggi Palembang sebesar Rp45.000,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan penertiban rekening pemerintah pada satuan kerja yaitu Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang mewajibkan pengelolaanya melalui TNP (*Treasury National Pooling*).	Triwulan III Tahun 2024	Bagian PNBP	Telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (Treasury Notional Pooling) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024.
3.	Terdapat Pendapatan Anggaran Lain- lain (425999) pada 7 (Tujuh) Satuan Kerja yaitu PN Cilacap, PN	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan penertiban rekening pemerintah pada	Triwulan III Tahun 2024	Bagian PNBP	Telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (Treasury Notional Pooling) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Suka Makmue, PA Pangkalan Balai, PN Pagar Alam, PN Simpang Tiga Redelong, PN Tanjung Pinang dan MS Aceh sebesar Rp1.667.389,00.	satuan kerja yaitu Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang mewajibkan pengelolaanya melalui TNP (*Treasury National Pooling*).			Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024.
Belanja					
-					
Laporan Operasional					
1.	Terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sebesar Rp21.148.116,00 pada 3 (tiga) satuan kerja yaitu PA Praya, PA Salatiga dan PA Kraksaan.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan penghapusan pada periode selanjutnya.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Terhadap Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sudah diberikan penjelasan pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester 1 Tahun 2024. Diketahui untuk PA Kraksaan sudah terbit SK Penghapusan persediaan, namun untuk satuan kerja lainnya akan diminta melakukan penghapusan pada periode Semester 2 tahun 2024.
2.	Terdapat Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain (522162) sebesar Rp2.621.400.000,00	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan ralat dan revisi.	Triwulan III Tahun 2024	Badan Litbang Diklat Kumdil	Merupakan anggaran yang tersedia untuk melakukan transaksi resiprokal berupa kerjasama dengan KL BLU dalam rangka mendukung kegiatan BSDK sehingga akun yang digunakan tersebut akan dilakukan ralat dan revisi pada Semester II ke KPPN.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	pada Badan Litbang Diklat Kumdil.				Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024.
3.	Terdapat Beban Jasa Pos dan Giro (522121) sebesar Rp70.000,00 pada Pengadilan Negeri Tebo.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan ralat dan revisi.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Akuntansi	Satuan kerja akan melakukan ralat dan revisi atas akun Beban Jasa Pos dan Giro (522121) sebesar Rp70.000,00.
Laporan Perubahan Ekuitas					
1.	Terdapat Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar Rp372.773,00 pada PA Kotabaru dan PA Barabai.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar Pengelola Persediaan lebih tertib dalam penatausahaan barang persediaan.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap Koreksi Nilai Persediaan (391113) pada 2 satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Semester 1 Tahun 2024, merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan nilai. Selanjutnya akan dibuatkan surat edaran kepada satuan kerja sebagai bentuk mitigasi agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penginputan nilai persediaan pada aplikasi SAKTI. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 dan Laporan Pendukung.
2.	Terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)	Badan Pengawasan merekomendasikan agar Pengelola	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan	Terhadap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) pada 116 (seratus enam belas) satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	sebesar Rp12.035.949.289,00 pada 116 (seratus enam belas) satuan kerja.	Persediaan lebih tertib dalam penatausahaan BMN.		Negara Biro Perlengkapan	dan Laporan Barang Pengguna Semester 1 Tahun 2024. Selanjutnya akan dibuatkan surat edaran kepada satuan kerja sebagai bentuk mitigasi agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penatausahaan aset pada aplikasi SAKTI. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 dan Laporan Pendukung.
3.	Terdapat Koreksi lainnya (391119) sebesar Rp234.193.167,00 pada 18 (delapan belas) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar Pengelola Persediaan lebih tertib dalam penatausahaan BMN.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Akuntansi	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 dan Laporan Pendukung.
Neraca					
1.	Terdapat Uang muka Belanja pegawai (prepayment) (114211) sebesar Rp158.000,00 pada Pengadilan Negeri Tegal.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar melakukan koreksi.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi	Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment) (114211) yang berasal dari kesalahan penggunaan akun 425991 – Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji untuk pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu telah dijelaskan pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024. Satuan kerja telah mengajukan ralat akun menjadi akun 425911– Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu ke KPPN setempat pada periode bulan Juli 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
2.	Terdapat Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan diterima (115614) sebesar Rp69.250.000,00 pada PN Manokwari dan PA Bitung.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan monitoring.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan	Piutang dari KUN sebesar Rp69.250.000,00 pada PN Manokwari dan PA Bitung merupakan jurnal yang terbentuk otomatis pada saat penerbitan resume tagihan atas pengajuan UP/TUP pertama kali pada modul pembayaran yang akan tereliminasi pada saat SP2D atas UP/TUP tersebut terbit pada bulan Juli 2024. Penjelasan atas Piutang dari KUN telah diungkapkan/dijelaskan dalam CaLK MA Semester I Tahun 2024.
3.	Terdapat Aset Tetap Renovasi (135111) sebesar Rp24.500.878.093,00 pada 7 (tujuh) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar melakukan penyerahan aset pada periode pelaporan selanjutnya.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap Aset Tetap Renovasi (135111) pada 7 (tujuh) satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2024 Mahkamah Agung. Selanjutnya Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan akan membuat surat edaran kepada satuan kerja agar melakukan penyerahan Aset Tetap Renovasi pada periode pelaporan Triwulan III Tahun 2024.
4.	Terdapat Hibah Langsung yang belum disahkan (218211) sebesar Rp7.509.780.859,00 pada 14 (empat belas) satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dijelaskan dan diungkapkan pada CaLK.	Triwulan III Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Merupakan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan jasa pada 14 (empat belas) satuan kerja yang belum dilakukan proses pengajuan pengesahan hibah ke KPPN atau baru memulai mengajukan nomor register hibah ke Kanwil DJPB setempat sampai dengan periode pelaporan Semester I Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan satuan kerja mengalami kendala teknis dalam proses pengajuan pengesahan hibah dan bahkan terdapat satker yang baru saja menerima Naskah Perjanjian Hibah dan atau Berita Acara Serah Terima Hibah pada saat pelaporan dan pencatatan rekonsiliasi Semester I Tahun 2024 sedang berlangsung. Hal

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					tersebut telah diungkapkan/dijelaskan dalam CaLK MA Semester I Tahun 2024. Satuan kerja akan melakukan proses pengesahan hibah pada periode pelaporan Triwulan III Tahun 2024.
5.	Terdapat Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) sebesar Rp82.710.086,00 pada 70 satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar segera dilakukan penyetoran dan melakukan pelaporan.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) sebesar Rp82.710.086,00 pada 75 satuan kerja berasal dari pungutan pajak yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran tetapi belum disetorkan ke kas negara. Satuan kerja telah menyetorkan ke kas Negara pada bulan Juli Tahun 2024.
6.	Terdapat selisih Transfer keluar (313211) dan Transfer masuk (313221). Transfer keluar (313211) sebesar Rp116.786.018.270,00 dan Transfer masuk (313221) sebesar Rp171.211.102.054,00	Badan Pengawasan merekomendasikan agar berkonsultasi kepada Koordinator Wilayah, Eselon I dan DJPB/KPPN setempat.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap selisih Transfer keluar (313211) dan Transfer masuk (313221) kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Semester 1 Tahun 2024 yang merupakan selisih dengan Kementerian lain. Namun terdapat kesalahan transaksi transfer keluar pada satu satuan kerja yang seharusnya menggunakan transaksi hibah keluar. Terhadap hal ini sudah berkoordinasi dengan DJPB melalui haiDJPB dan akan dilakukan monitoring pada semester 2 tahun 2024. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 dan Laporan Pendukung.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
7.	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software sebesar Rp136.594.204,00 pada 14 satuan kerja.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar dilakukan koreksi.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Setelah dilakukan verifikasi terhadap lampiran CHR, ketidaksesuaian tersebut merupakan kesalahan kode barang website yang tercatat sebagai software komputer, dimana seharusnya dicatat sebagai Aset Tak Berwujud Lainnya. Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan akan membuat surat edaran kepada satuan kerja agar melakukan reklasifikasi kode barang di Modul Aset Tetap pada Triwulan III Tahun 2024.
8.	Terdapat Persediaan senilai Rp698.957,00 dalam kondisi rusak dan Rp524.047.915,00 dalam kondisi usang.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar segera dilakukan penghapusan.	Triwulan III Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap persediaan dalam kondisi rusak dan Rp524.047.915 dalam kondisi usang, sudah dilakukan verifikasi terdapat pada 12 satuan kerja. Selanjutnya Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan akan membuat surat edaran kepada satuan kerja agar melakukan pemusnahan/penghapusan atas persediaan tersebut.

Jakarta, 19 Agustus 2024
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TRIWULAN III TAHUN 2024

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Penyelenggaraan Akuntansi					
1.	Penugasan Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dilaksanaan pada periode ke-9 SAKTI dan olah data dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2024.				
2.	Tahun 2024 terdapat entitas akuntansi sebanyak 1853 satuan kerja dengan alokasi anggaran Rp11.921.742,498,000,00. Realisasi untuk periode berakhir 30 September 2024 sebesar Rp8.566.694.181.535,00 atau sebesar 72,00%. Anggaran pada Semester I sebesar Rp11.905.148.120.000,00 berubah menjadi Rp11.921.742,498,000,00.				
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 telah menggunakan SAKTI *full module* untuk seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung. Masih terdapat perubahan data pada aplikasi SAKTI sehingga proses reviu atas LK terbatas pada data Aplikasi MonSakti (role: APIP) per tanggal 21 Oktober 2024, aplikasi e-SADEWA dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.				
4.	Sampai dengan tanggal 30 September 2024, terdapat 62 data ketidaksesuaian Kode Akun *vs* Kode BMN. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam	Badan Pengawasan merekomendasikan agar: a) Melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Terhadap Ketidaksesuaian Kode Akun VS Kode BMN pada Mahkamah Agung sudah diberikan penjelasan pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024 dengan mayoritas tidak bisa dilakukan revisi anggaran karena ketidaksesuaiannya hanya sebagian dibandingkan dengan nilai SPM nya. Biro Perlengkapan telah membuat surat edaran Nomor 103/BUA.4/PWI.2.1/VIII/2024, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 yang berisi arahan agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penginputan kode akun belanja dan kode barang persediaan pada aplikasi SAKTI.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka perolehan aset tetap/aset lainnya dengan klasifikasi/ kodefikasi barang yang dihasilkan. Perlu mengidentifikasi apakah kesalahan terjadi dalam penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan yang terjadi dalam pemilihan kodefikasi aset tetap yang tidak sesuai dengan subtansinya.	Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, jika ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN disebabkan karena adanya penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya; b) Melakukan reklasifikasi BAST untuk penyesuaian rincian barang jika ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan klasifikasi/ kodefikasi aset tetap dan belum dilakukan pendetailan. Namun apabila sudah dilakukan pendetailan, Satker melakukan koreksi			

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
		transaksi pada modul persediaan/modul aset tetap dan selanjutnya dapat melakukan jurnal manual pada modul GLP apabila diperlukan.			
5.	Sampai dengan tanggal 30 September 2024, terdapat 31 data ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka	Badan Pengawasan merekomendasikan agar: a) Melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, jika ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Terhadap Ketidaksesuaian Kode Akun Belanja VS Kode Persedian pada Mahkamah Agung sudah diberikan penjelasan pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024 dengan mayoritas tidak bisa dilakukan revisi anggaran karena ketidaksesuaiannya hanya sebagian dibandingkan dengan nilai SPM nya. Biro Perlengkapan telah membuat surat edaran Nomor 103/BUA.4/PWI.2.1/VIII/2024, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 yang berisi arahan agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penginputan kode akun belanja dan kode persediaan pada aplikasi SAKTI.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	perolehan persediaan dengan klasifikasi/ kodefikasi barang yang dihasilkan. Perlu mengidentifikasi apakah kesalahan terjadi dalam penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan yang terjadi dalam pemilihan kodefikasi persediaan yang tidak sesuai dengan subtansinya.	Persediaan disebabkan karena adanya penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya; b) Melakukan reklasifikasi BAST untuk menyesuaikan rincian barang, jika ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan klasifikasi/ kodefikasi persediaan dan belum dilakukan pendetailan. Namun apabila sudah dilakukan pendetailan, Satker melakukan koreksi transaksi pada modul persediaan/modul aset tetap dan selanjutnya dapat melakukan jurnal			

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
		manual pada modul GLP apabila diperlukan.			
6.	Terdapat 2 Rincian Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (51xxxx) Periode Bulan 09. Terjadinya pengembalian belanja melebihi realisasi belanja tidak hanya terjadi pada segmen Satker dan akun BAS namun terjadi pula pada segmen CoA yang lain diantaranya program, kegiatan output, dan lain-lain.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar: a) Agar Satker memastikan bahwa segmen CoA yang digunakan untuk pengembalian belanja telah sama dengan segmen CoA yang digunakan dalam realisasi belanja; b) Melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D/SSPB dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan	Semester II Tahun 2024	Bagian Pelaksanaan Anggaran	- Terdapat kesalahan akun potongan 511119 sebesar Rp490.000,00 dan Rp490.073,00 pada PA. Manna. Kesalahan ini telah diperbaiki dengan melakukan ralat SPM pada bulan Oktober ke akun 511123 masing masing sebesar Rp490.000,00 dengan total Rp980.000,00 dan akun 511119 sebesar Rp73,00; - Terdapat kesalahan akun potongan 511119 pada PN. Pacitan. Kesalahan ini telah diperbaiki dengan melakukan ralat SPM pada bulan Oktober dan koreksi catat ke akun 425131.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
		dan Anggaran Negara.			
7.	Sampai dengan periode ke-9, Terdapat 6 Satuan Kerja yang memiliki Saldo Akun Tidak Normal. Kondisi ini menunjukan bahwa terdapat nilai saldo per akun pada neraca percobaan yang tidak sesuai dengan posisi saldo normal, baik debit atau kredit.	Badan Pengawasan merekomendasikan agar mengidentifikasi penyebab adanya Saldo Tidak Normal melalui buku besar, misalkan saldo tidak normal terjadi karena adanya kesalahan jurnal manual yang dilakukan sehingga diperlukan perbaikan atas jurnal manual. Atas kondisi ini telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III	Semester II Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi, Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Bagian Rencana dan Program	- Terdapat saldo tidak normal pada: 1. Terdapat kesalahan akun potongan 511119 sebesar Rp490.000,00 dan Rp490.073,00 pada PA. Manna. Kesalahan ini telah diperbaiki dengan melakukan ralat SPM pada bulan Oktober ke akun 511123 masing masing sebesar Rp490.000,00 dengan total Rp980.000,00 dan akun 511119 sebesar Rp73,00; 2. Terdapat kesalahan akun potongan 511119 pada PN. Pacitan. Kesalahan ini telah diperbaiki dengan melakukan ralat SPM pada bulan Oktober dan koreksi catat ke akun 425131. - Terdapat saldo tidak normal pada: 1. Pengadilan Negeri Tegal sebesar (Rp158.000,00) disebabkan kesalahan penggunaan akun Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) pada potongan SPM Nomor 00133T tanggal 3 September 2024 atas kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional bulan November Tahun 2023 sejumlah Rp1.580.000,00 yang diangsur 10 bulan dimana seharusnya merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dengan akun Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911). Satuan Kerja telah mengajukan ralat akun ke KPPN setempat pada periode bulan Oktober 2024 dan telah dilakukan pencatatan pada Modul Pembayaran per tanggal 2 Oktober 2024; 2. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebesar (Rp420.987,00) disebabkan kesalahan penggunaan akun Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) pada potongan SPM Nomor 00214T tanggal 11 September 2024 yang merupakan kelebihan pembayaran gaji pegawai akibat kesalahan penerbitan SK KGB dengan pembayaran dilakukan dengan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					angsuran, dimana seharusnya merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dengan akun Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911). Satuan Kerja telah mengajukan ralat akun ke KPPN setempat pada periode bulan September 2024 namun pengesahan baru pada bulan Oktober 2024. - Terdapat saldo tidak normal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Lamongan disebabkan terdapat kesalahan pencatatan tanggal buku uang masuk pada Modul Bendahara Pengeluaran sehingga uang masuk tersebut tercatat pada bulan Oktober, sedangkan uang keluar dicatat dengan tanggal buku bulan September; - Terdapat saldo tidak normal Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengadilan Negeri Kab. Bogor di Cibinong, Jawa Barat disebabkan pada satuan kerja tersebut telah dilakukan pencatatan transaksi berupa perekaman BAST pada Modul Komitmen namun pada periode pelaporan Triwulan III Tahun 2024 belum terbit pengesahan belanja yang bersumber dari hibah yang dilakukan dengan pencatatan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) pada Modul Pembayaran; - Terdapat saldo tidak normal Persediaan Belum Diregister pada satuan kerja Pengadilan Negeri Kutai Barat. Terdapat Void BAST No. 00019/UP_TUP/477381/2024. Proses void BAST telah berhasil namun masih terdapat saldo Persediaan yang Belum Diregister disebabkan jurnal void BAST belum tercatat pada buku besar SAKTI sedangkan satker telah melakukan pendetailan pada Modul Persediaan. Telah bertiket ke HaiDJPB dan disampaikan ke pembina DJPB Pusat namun masih menunggu proses STP dari DJPB; - Terdapat saldo tidak normal Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satuan kerja:

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					1. Pengadilan Negeri Selong berupa PTUP belum SP2D sampai dengan periode 30 September 2024; 2. Pengadilan Negeri Lumajang berupa PTUP belum SP2D sampai dengan periode 30 September 2024; 3. Pengadilan Agama Jambi berupa PTUP belum SP2D sampai dengan periode 30 September 2024; 4. Pengadilan Agama Lamongan berupa kesalahan pencatatan tanggal buku pada saat mencatat uang masuk pada Modul Bendahara sehingga tercatat bulan Oktober.
8.	Terdapat 2 Satuan Kerja yang menggunakan Akun Pendapatan Pajak Non DJP dan DJBC sampai dengan bulan ke-09. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pendapatan pajak yang dibukukan oleh Satker diluar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang umumnya berasal dari kesalahan akun potongan SPM dengan tidak menunjuk kode Satker pada	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.	Semester II Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan	Akan melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	DJP/DJBC.				
9.	Terdapat 50 Rincian Pagu Minus (Basis Sp2d) Akun 51xxxx Periode Bulan 09. Terjadinya pagu minus tidak hanya terjadi pada segmen Satker dan akun BAS namun terjadi pula pada segmen CoA lainnya diantaranya program, kegiatan, output, dan lain-lain.	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk melakukan revisi anggaran secara berjenjang mulai dari KPA, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat PA, dan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Semester II Tahun 2024	Bagian Pelaksanaan Anggaran	Akan menyelesaikan Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51xxxx Periode Bulan 06 dengan melakukan revisi.
10.	Terdapat 886 Data Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) Sampai Dengan Periode Bulan 09. Kondisi ini menunjukkan bahwa	Badan Pengawasan merekomendasikan agar melakukan monitoring atas Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) di periode berikutnya.	Semester II Tahun 2024	Bagian Akuntansi	Penjelasan sudah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	masih terdapat saldo akun utang yang belum diterima tagihannya pada neraca percobaan akrual yang timbul pada saat perekaman BAST pada modul komitmen dan/atau validasi SPBy pada modul pembayaran. Akun tersebut akan tereliminasi apabila telah diterbitkan resume tagihan/Surat Perintah Pembayaran (SPP).				
Pendapatan					
1.	Terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan-Jasa Giro (425764) pada 11 (sebelas) Satuan Kerja Sebesar Rp205.371.059,00.	Kondisi ini telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III.	Semester II Tahun 2024	Bagian PNBP	Telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (*Treasury Notional Pooling*) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.
2.	Terdapat pendapatan dari penutupan rekening (425765) pada Pengadilan Tinggi Palembang sebesar Rp45.000,00.	Kondisi ini telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III.	Semester II Tahun 2024	Bagian PNBP	Telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (*Treasury Notional Pooling*) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.
3.	Terdapat Pendapatan Anggaran Lain- lain (425999) dengan total sebesar Rp19.341.474,00 pada 9 (sembilan) Satuan Kerja yakni: 1. PN Cilacap; 2. PA Pangkalan Balai; 3. PA Kuala Tungkal; 4. PN Pagar Alam; 5. PN Simpang Tiga Redelong; 6. PN Surakarta;	Kondisi ini telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III.	Semester II Tahun 2024	Bagian PNBP	Telah melakukan pembinaan dan *sharing knowledge* ke Satuan Kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan Rekening Bendahara Pengeluaran ke dalam program TNP (*Treasury Notional Pooling*) yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B-82/Bua.3/XII/2021 tentang Penertiban Rekening Satuan Kerja. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	7. PN Tanjung Pinang; 8. MS Aceh, dan 9. PN Cilacap.				
4.	Terdapat ketidaksesuain kode Eselon I pada penyetoran PNBP akun 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada PA Tasikmalaya yang disajikan pada DIPA 04 yang seharusnya pada DIPA 01 sebesar Rp2.567.650,00.	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III.	Semester II Tahun 2024	Bagian PNBP	Terdapat kesalahan penginputan kode Eselon oleh KPPN, namun telah diperbaiki per Oktober 2024.
Belanja					
-					
Laporan Operasional					
1.	Terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) dengan total sebesar	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III dan	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian	Terhadap Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sudah diberikan penjelasan pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024. Diketahui untuk PA Kraksaan sudah terbit SK Penghapusan persediaan, namun untuk satuan kerja lainnya akan diminta melakukan penghapusan pada periode Tahun

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Rp35.616.891,00 pada 6 (enam) Satuan Kerja yakni: 1. PTA Bengkulu; 2. PA Praya; 3. PA Brebes; 4. PA Salatiga; 5. PA Kraksaan, dan 6. PA Magetan.	diperlukan monitoring untuk pemusnahan persediaan rusak/usang tersebut baik bagi Satuan Kerja yang telah diterbitkan SK Penghapusannya maupun yang belum.		Akuntansi Biro Keuangan	2024 berdasarkan surat edaran Nomor 103/BUA.4/PWI.2.1/VIII/2024, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2024 yang berisi arahan agar satuan kerja melakukan penghapusan atas persediaan rusak/usang pada periode semester 2 tahun 2024 dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2.	Terdapat Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain (522162) sebesar Rp3.903.684.000,00 pada Badan Litbang Diklat Kumdil.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III dimana beban tersebut termasuk pada transaksi resprokal. Untuk itu perlu segera dimonitoring atas ralat dan revisi ke KPPN.	Semester II Tahun 2024	Badan Litbang Diklat Kumdil	Merupakan anggaran yang tersedia untuk melakukan transaksi resiprokal berupa kerjasama dengan KL BLU dalam rangka mendukung kegiatan BSDK sehingga akun yang digunakan tersebut akan dilakukan ralat dan revisi pada Semester II ke KPPN. Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.
3.	Terdapat akun 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada 41 Satuan Kerja sebesar Rp305.915.575,00. (Sudah dijelaskan pada CaLK Triwulan	Sudah dijelaskan pada CaLK Triwulan III Tahun 2024.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	III Tahun 2024).				
4.	Terdapat akun 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada 7 Satuan Kerja sebesar Rp103.555.920,00. (Sudah dijelaskan pada CaLK Triwulan III Tahun 2024).	Sudah dijelaskan pada CaLK Triwulan III Tahun 2024.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA telah menjelaskan dan mengungkapkan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2024.
Laporan Perubahan Ekuitas					
1.	Terdapat Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar Rp380.261,00 pada 3 (tiga) Satuan Kerja yakni PA Kotabaru, PTTUN Banjarmasin, dan PA Barabai.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III. Diperlukan pembinaan dan pendampingan dalam ketertiban pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan dan BMN.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap Koreksi Nilai Persediaan (391113) pada 3 satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tahun 2024, merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan nilai. Selanjutnya akan dibuatkan surat edaran kepada satuan kerja sebagai bentuk mitigasi agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penginputan nilai persediaan pada aplikasi SAKTI.
2.	Terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) sebesar	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) pada 164 (seratus enam puluh empat) satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tahun 2024. Selanjutnya akan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Rp69.560.801.092,00 pada 164 (seratus enam puluh empat) Satuan Kerja.	Triwulan III. Diperlukan pembinaan dan pendampingan dalam ketertiban pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan dan BMN.			dibuatkan surat edaran kepada satuan kerja sebagai bentuk mitigasi agar satuan kerja lebih cermat dalam hal penatausahaan aset pada aplikasi SAKTI.
3.	Terdapat Koreksi lainnya (391119) sebesar Rp162.474.175,00 pada 17 (tujuh belas) Satuan Kerja.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III. Diperlukan pembinaan dan pendampingan dalam ketertiban pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan dan BMN.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap Koreksi Lainnya yang merupakan jurnal atas kesalahan pencatatan nilai maupun akun jurnal akrual sataun kerja telah memberikan penjelasan pada Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024.
Neraca					
1.	Terdapat Uang muka Belanja pegawai (prepayment) (114211) sebesar Rp578.987,00 pada Pengadilan Negeri Tegal dan PN Tanjung Pinang.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III dan juga telah dilakukan ralat.	Semester II Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Akuntansi	Uang Muka Belanja tersebut merupakan kesalahan penggunaan akun Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) dimana penggunaan akun tersebut membentuk akun Uang Muka Belanja di Neraca. Satuan kerja telah mengajukan ralat akun namun pengesahan ralat tersebut terbit pada periode Semester II Tahun 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
2.	Terdapat Aset Tetap Renovasi (135111) sebesar Rp24.305.896.804,00 pada 7 (tujuh) Satuan Kerja.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III namun perlu diperhatikan sampai dengan periode Triwulan III masih terdapat Aset Tetap Renovasi yang belum dilakukan penyerahan yakni pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi dengan nilai Aset Tetap Renovasi sebesar Rp20.643.533.012,00 dan Balitbang Diklat Kumdil sebesar Rp64.657.884,00.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap Aset Tetap Renovasi (135111) pada 7 (tujuh) satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tahun 2024. Biro Perlengkapan telah membuat surat edaran Nomor 103/BUA.4/PWI.2.1/VIII/2024, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2024 yang berisi arahan agar satuan kerja melakukan penyerahan ATR pada Semester II Tahun 2024.
3.	Terdapat Hibah Langsung yang belum disahkan (218211) sebesar Rp4.185.227.338,00 pada 25 (dua puluh lima) Satuan Kerja.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III dan perlu dilakukan monitoring terhadap proses pengesahan hibah tersebut.	Semester II Tahun 2024	Bagian Rencana dan Program	Hibah Langsung yang Belum Disahkan (218211) sebesar Rp4.185.227.338,00 terapat pada 25 satuan kerja merupakan hibah yang sampai pada periode pelaporan Triwulan III Tahun 2024 belum melakukan proses pengajuan pengesahan hibah ke KPPN maupun baru mengajukan nomor register hibah ke Kanwil DJPB setempat. Satuan kerja akan melanjutkan proses sampai dengan pengesahan hibah pada periode pelaporan Semester II Tahun 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
4.	Terdapat Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) sebesar Rp37.284.084,00 pada 44 (empat puluh empat) Satuan Kerja.	Atas kondisi ini agar dilakukan penertiban akan kepatuhan pemungutan dan penyetoran pajak secara tepat waktu.	Semester II Tahun 2024	Bagian Perbendaharaan	Terdapat Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum Disetor (219961) sebesar Rp37.284.084,00 pada 44 (empat puluh empat) satuan kerja merupakan pajak yang sampai dengan periode pelaporan keuangan Triwulan III belum di setor ke kas negara dan masih ada di Bendahara Pengeluaran. Satuan kerja akan melakukan penyetoran pajak tersebut ke kas negara dan mencatat setoran tersebut di Modul Bendahara Pengeluaran pada periode Semester II Tahun 2024.
5.	Terdapat selisih antara Transfer Keluar (313211) dengan Transfer Masuk (313221).	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap selisih Transfer keluar (313211) dan Transfer masuk (313221) satuan kerja sudah diberikan penjelasan pada Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 yang merupakan selisih dengan Kementerian lain. Namun terdapat kesalahan transaksi transfer keluar pada satu satuan kerja yang seharusnya menggunakan transaksi hibah keluar. Terhadap hal ini sudah berkoordinasi dengan DJPB melalui haiDJPB dan belum mendapat balasan.
6.	Terdapat Persediaan dalam kondisi rusak senilai Rp698.957,00 dan persediaan sebesar Rp92.027.181,00 dalam kondisi usang.	Atas kondisi ini perlu segera dilakukan penghapusan.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap persediaan senilai Rp698.957,00 dalam kondisi rusak dan senilai Rp92.027.181,00 dalam kondisi usang, sudah dilakukan verifikasi terdapat pada 12 satuan kerja. Selanjutnya akan dibuatkan surat edaran kepada satuan kerja agar melakukan pemusnahan/penghapusan atas persediaan tersebut. Biro Perlengkapan telah membuat surat edaran Nomor 103/BUA.4/PWI.2.1/VIII/2024, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2024 yang berisi arahan agar satuan kerja melakukan pemusnahan /penghapusan atas persediaan tersebut.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
7.	Terdapat akun 117199 Persediaan Lainnya pada Pengadilan Militer I-02 Medan sebesar Rp3.000,00.	Kondisi ini telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI Triwulan III dan juga telah dilakukan reklasifikasi.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Terhadap akun Persediaan Lainnya (117199) pada Pengadilan Militer I-02 Medan, sudah dilakukan reklasifikasi menjadi Bahan Untuk Pemeliharaan (117113) pada periode bulan Oktober tahun 2024.
8.	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software sebesar Rp70.305.545,00 pada 7 satuan kerja.	Beberapa Satuan Kerja telah menindaklanjuti dengan melakukan reklasifikasi kode barang. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut terhadap 7 (tujuh) Satuan Kerja yang belum melakukan reklasifikasi kode barang pada modul aset tetap.	Semester II Tahun 2024	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Setelah dilakukan verifikasi terhadap lampiran CHR, ternyata merupakan kesalahan kode barang website yang tercatat sebagai software computer Dimana seharusnya dicatat sebagai Aset Tak Berwujud Lainnya. Biro Perlengkapan telah membuat surat edaran Nomor 103/BUA.4/PWI.2.1/VIII/2024, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2024 yang berisi arahan agar satuan kerja melakukan reklasifikasi kode barang pada semester 2 tahun 2024.
9.	Terdapat Hasil Kajian/ Penelitian (162171) yakni pada Balitbang Diklat Kumdil sebesar Rp1.804.868.600,00 yang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan mengingat	Atas kondisi ini agar dikoordinasikan kepada Balitbang Diklat Kumdil apakah Hasil Kajian/ Penelitian sebesar Rp1.804.868.600,00 tersebut akan diserahkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau	Semester II Tahun 2024	Balitbang Diklat Kumdil, dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Akan dilakukan koordinasi untuk memastikan kembali hasil kajian tersebut akan dilakukan pengembangan atau pemanfaatan oleh Badan Strategi Kebijakan.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	perubahan nomenklatur pada Satuan kerja Balitbang Diklat Kumdil.	dihapuskan.			

Jakarta, 29 November 2024
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024 *(UNAUDITED)*

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
LAPORAN OPERASIONAL					
1.	Terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) dengan total sebesar Rp67.503.214,00 pada 12 (dua belas) Satuan Kerja. Kondisi ini telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan MA-RI, namun terdapat perbedaan nilai Beban Persediaan Rusak/Usang yang disajikan menurut LK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited* dengan data pada Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2024 menurut Monsakti. Nilai Beban Persediaan Usang menurut LK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited* disajikan sebesar Rp35.616.891,- sedangkan nilai Beban Persediaan Rusak/Usang menurut Monsakti sebesar Rp67.503.214,00.	Terhadap perbedaan nilai Beban Persediaan Rusak/Usang yang disajikan menurut LK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited* dengan data pada Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2024 menurut Monsakti agar dipastikan validitas nilai dan kebenaran dalam penjelasannya.	*Audited* 2024	Bagian IKN Biro Perlangkapan	Data di CALK terkait Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sudah sesuai dengan data pada Neraca Percobaan Akrual pada MonSakti yakni sebesar Rp67.503.214,00. Nilai sebesar sebesar Rp35.616.891,00 merupakan saldo Beban Persediaan Rusak/Usang pada periode Triwulan III 2024.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS					
1.	Terdapat Koreksi Lainnya (391119) sebesar Rp158.062.779,00 pada 25 Satuan Kerja.	Terhadap Koreksi Lainnya (391119) sebesar Rp158.062.779,00 pada 25 Satuan Kerja agar diberikan penjelasan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Audited*.	*Audited* 2024	Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Akan diberikan penjelasan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Audited*.
NERACA					
1.	Terdapat Pencatatan yang kurang tepat (belum sesuai kodefikasi barang) atas Pembangunan gedung kantor PTTUN Palembang yang telah selesai pada tahun 2024, atas pembangunan gedung tersebut baru tercatat sebagai gedung dan bangunan dalam 3 NUP yang berbeda yaitu NUP 1 dengan nilai Rp36.475.207.651,00, NUP 2 dengan nilai Rp.129.527.000,00 dan NUP 3 dengan nilai Rp.1.721.208.400,00. Dari informasi yang ada pada kontrak Pembangunan gedung tersebut yang setidaknya ada beberapa aset selain Gedung Kantor, seperti 1 Bangunan Ruang Generator set, 2 Unit pos jaga, Pagar serta Halaman yang nilainya di atas kapitalisasi dan ada beberapa peralatan dan mesin diantaranya berupa sound system, tiang bendera dan CCTV. Atas kondisi ini belum dijelaskan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited*.	Terhadap Pencatatan yang kurang tepat (belum sesuai kodefikasi barang) atas Pembangunan gedung kantor PTTUN Palembang yang telah selesai pada tahun 2024 agar dilakukan koreksi pencatatan kodefikasi barang berdasarkan pengadaan aset yang telah direalisasikan berdasarkan kontrak pembangunan.	*Audited* 2024	Bagian IKN Biro Perlangkapan	Akan dimasukkan dalam usulan koreksi audited dengan melakukan transaksi koreksi pencatatan, koreksi nilai berkurang dan perolehan lainnya pada modul aset tetap dan jurnal manual pada modul GLP.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
2.	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software sebesar Rp81.290.454,00 pada 10 satuan kerja. Atas kondisi ini telah dijelaskan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited*.	Terhadap Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software sebesar Rp81.290.454,00 pada 10 satuan kerja agar dilakukan reklasifikasi kode barang pada modul aset tetap.	*Audited* 2024	Bagian IKN Biro Perlangkapan	Akan dimasukkan dalam usulan koreksi audited dengan melakukan transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk pada modul aset tetap.
3.	Terdapat Hasil Kajian/ Penelitian (162171) yakni pada Balitbang Diklat Kumdil sebesar Rp1.804.868.600,00 yang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan mengingat perubahan nomenklatur pada Satuan kerja Balitbang Diklat Kumdil. Atas kondisi ini belum dijelaskan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited*.	Terhadap Hasil Kajian/ Penelitian (162171) yakni pada Balitbang Diklat Kumdil sebesar Rp1.804.868.600,00 yang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan mengingat perubahan nomenklatur pada Satuan kerja Balitbang Diklat Kumdil agar dikoordinasikan kepada Balitbang Diklat Kumdil apakah Hasil Kajian/ Penelitian sebesar Rp1.804.868.600,00 tersebut akan diserahkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dihapuskan dan mengungkapkan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited*.	Semester 1 Tahun 2025	Bagian IKN Biro Perlangkapan	Biro Perlengkapan akan bersurat kepada Sekretaris BDSK untuk memastikan bahwa aset ini masih digunakan atau tidak. Jika sudah tidak digunakan maka akan dilakukan penyerahan kepada BRIN melalui mekanisme alih status penggunaan.
4.	Terdapat kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA yaitu pada Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Agama Ampana,	Terhadap kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA yaitu pada Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Agama	*Audited* 2024	Bagian IKN Biro Perlangkapan	Akan dimasukkan dalam usulan koreksi audited dengan melakukan koreksi nilai berkurang pada modul aset tetap.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Agama Tais dan Pengadilan Agama Bengkayang. Atas kondisi ini belum dijelaskan pada CaLK Mahkamah Agung RI Tahun 2024 *Unaudited*.	Ampana, Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Agama Tais dan Pengadilan Agama Bengkayang agar dilakukan koreksi pencatatan atas aset KDP berdasarkan progress pekerjaan per 31 Desember 2024.			
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN					
1.	Belum mengungkapkan hasil Opname Fisik Persediaan Biaya Proses/ ATK Perkara.	Atas kondisi ini agar segera mengungkapkan hasil Opname Fisik Persediaan Biaya Proses/ ATK Perkara sebagaimana yang telah diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	Semester 1 2025	Bagian IKN Biro Perlangkapan	Masih memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang atas biaya proses.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUN
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO, SH., MH

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

4. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat KL

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
TA 2024 (*AUDITED*)

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN					
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI					
		Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.					
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI					
		Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI					
		To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
2		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah					
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
		a. Pagu/DIPA		√	Tidak
		b. Estimasi PNBP		√	Tidak
		c. Belanja		√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
		e. Pendapatan		√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
		g. Kas BLU		√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
		i. Kas Hibah		√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
		Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
		Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak norma di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak

6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL					
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
		Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	-	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	-	-	
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	-	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
		Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**-**	
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	**-**	**38.445.312.419**	
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	√	**-**	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√	**-**	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	√	**-**	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak
		PENGECEKAN NERACA			
		Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2		Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
		PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
		Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun		√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
		PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
		Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya

2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
		(Penjelasan terlampir)			
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)					
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN					
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU					
		LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya

		LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

Rekon Internal

1 Tidak Terdapat selisih rekonsiliasi internal.

To Do List

1. Terdapat ketidaksesuaian akun vs kode barang persediaan yang menggunakan akun :
1)521111 – Belanja Keperluan Perkantoran
2)521119 – Belanja Barang Operasional Lainnya
3)521211 - Belanja Bahan

Ketidaksesuaian akun vs Kode Barang Persediaan disebabkan oleh :
1) Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya tidak dikategorikan sebagai barang persediaan karena tidak membentuk stok, namun langsung digunakan.
(Terlampir)

2. Terdapat ketidaksesuain akun vs kode barang aset tetap/atb yang menggunakan akun :
1)532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2)523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3)533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Ketidaksesuaian akun vs kode barang aset tetap/atb yang menggunakan akun :
1)Kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang /aset dengan nilai dibawah kapitalisasi.
2)Kesalahan penggunaan akun saat merealisasikan belanja barang untuk membeli barang/aset dengan nilai diatas kapitalisasi
3)Kesalahan penggunaan akun saat merealisasikan belanja barang untuk membayar renovasi Gedung diatas nilai kapitalisasi
(Terlampir)

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas

1 a. 425173 - Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN : Terdapat pada 1 Satuan Kerja sejumlah Rp228.465.805,00;

b. 425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) : Terdapat pada 11 Satuan Kerja sejumlah Rp243.816.177,00;

c. 425765 - Pendapatan dari Penutupan Rekening : Terdapat pada 2 Satuan Kerja sejumlah Rp376.798,00;

c. 425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain : Terdapat pada 10 Satuan Kerja sejumlah Rp19.542.133,00;

Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

Terdapat Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp640.800,00, dan akun 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp8.483.948,00 (penjelasan terlampir)

2. Terdapat akun Beban Jasa kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain (522162) sebesar Rp4.419.164.000,00 pada Badan Litbang Diklat Kumdil yang merupakan anggaran yang tersedia untuk melakukan transaksi resiprokal berupa kerjasama dengan KL BLU dalam rangka mendukung kegiatan BSDK.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Rama Rahim, S.E., M.M., M.B.A.)
NIP. 19810520 200912 1 002

Jakarta, Mei 2025
Penelaah,

(Ika Zulianancy, S.E.,M.H.)
NIP. 19840703 201101 2 011

SELISIH TKTM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING SELISIH TRANSFER KELUAR/MASUK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BA ES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BA ES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
1	'03307	420163	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	132111	Peralatan dan Mesin	0	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	1668277022	-1.668.277.022	Terdapat Pengiriman dari Instansi Lain kepada Badan Urusan Administrasi
2	'03307	420163	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	55037102489	-55.037.102.489	
3	'03307	420163	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	-500482653	500.482.653	
4	'03307	420163	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	-1651113075	1.651.113.075	
5	10401	426474	BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA BARAT	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00501	526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	609532668	-609.532.668	Terdapat Pengiriman dari Instansi Lain kepada PTTUN Mataram
6	10401	426474	BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA BARAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	'00501	526736	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	-74528506	74.528.506	
7	99999	984515	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	131111	Tanah	0	'00501	402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	3975717270	-3.975.717.270	Terdapat Pengiriman dari Instansi Lain kepada PA Dumai
8	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	135111	Aset Tetap Renovasi	20.643.553.012	'00701	403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	0	20.643.553.012	Terdapat Pengiriman dari BUA ke Instansi Lain
9	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-24.360.216	'00701	403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	0	-24.360.216	
TOTAL											**-38.445.312.419**	

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1	'00501	Jawa Barat	097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/UP_TUP/097514/2024	21-02-2024	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembayaran Belanja Barang Berupa Percetakan spanduk dan akrilik	1010301014	1	538.500	538.500	'240951301002328	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena spanduk dan akrilik tersebut langsung digunakan (tidak di stok) namun sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521111 Beban keperluan perkantoran; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
2	'00501	Bali	'099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	'05-06-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	PEMBAYARAN BEA METERAI PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI TABANAN	1010309001	1	10.000	10.000	'240371301014385	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena materai tersebut langsung digunakan (tidak di stok) namun materai tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521111 Beban keperluan perkantoran; Kredit-593111 Beban persediaan konsumsi
3	'00501	Sumatera Barat	402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00059/UP_TUP/402613/2024	21-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat BA 1214 T dalam rangka perjalanan dinas ke PTA Padang tanggal 21 Agustus 2024	1010313001	1	400.000	400.000	'240111301008712	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pada modul aset dan modul aset tetapnya.
4	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010302002	2	10.000	20.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
5	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301999	3	10.000	30.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
6	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301005	3	12.000	36.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
7	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010302001	2	55.000	110.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
8	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010302001	2	49.000	98.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
9	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301006	1	90.000	90.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
10	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301001	1	30.000	30.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
11	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301006	6	11.000	66.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
12	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301005	3	18.000	54.000	'240451301003686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
13	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301003	1	6.000	6.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
14	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010302002	1	10.000	10.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
15	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301013	2	4.000	8.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
16	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301012	2	18.000	36.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
17	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301003	1	23.000	23.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
18	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301003	1	14.000	14.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
19	'00505	Kalimantan Selatan	531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/ 531866/2024	30-01-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian ATK Posbakum	1010301003	2	7.000	14.000	'24045130100 3686	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
20	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/UP_TUP/ 531873/2024	'03-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaam	1010302001	5	60.900	304.500	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
21	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/UP_TUP/ 531873/2024	'03-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaam	1010301006	2	49.000	98.000	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
22	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/UP_TUP/ 531873/2024	'03-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaam	1010301006	12	5.190	62.280	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
23	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/UP_TUP/ 531873/2024	'03-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaam	1010302001	5	67.690	338.450	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
24	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/UP_TUP/ 531873/2024	'03-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaam	1010301001	2	27.300	54.600	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
25	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003/UP_TUP/ 531873/2024	11-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaan	1010302001	10	57.750	577.500	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
26	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003/UP_TUP/ 531873/2024	11-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaan	1010301001	4	25.000	100.000	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
27	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003/UP_TUP/ 531873/2024	11-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaan	1010302001	10	64.000	640.000	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
28	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003/UP_TUP/ 531873/2024	11-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaan	1010301011	1	160.000	160.000	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
29	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004/UP_TUP/ 531873/2024	25-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaan	1010304004	2	252.000	504.000	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
30	'00505	Sulawesi Utara	531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004/UP_TUP/ 531873/2024	25-06-2024	521211	Belanja Bahan	Pembelian Barang Persediaan	1010304004	2	304.500	609.000	'24049130201 1002	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
31	'00505	Bali	559862	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001/UP_TUP/559862/2024	19-03-2024	521211	Belanja Bahan	BAST ATK POSBAKUM	1010302001	4	70.000	280.000	'240371301007312	Kesalahan satuan kerja dalam melakukan pencatatan rincian aset di modul komitmen. Seharusnya tidak masuk persediaan karena persediaan tersebut langsung digunakan (tidak di stok) dan persediaan tersebut sudah dihabispakaikan. Sudah dilakukan jurnal manual antar Debit- 521211 Beban bahan; Kredit- 593111 Beban persediaan konsumsi
TOTAL														**5.321.830**		

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1	'00501	Jawa Tengah	'097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	BAST NONKONTRAKTUAL	'1501/SEK.PN.W12-U16/PL1.1.5/XII/2024	10-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Meubelair 24 unit	3050201004	9	791.985	7.127.865	'241631303002223	Belanja modal paket pengadaan meubelair senilai Rp. 49.499.118,- yg dimana dalam pengadaan tersebut terdapat item barang yg nilainya dibawah kapitalisasi berupa Kursi Mediasi
2	'00501	Jawa Timur	'098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	BAST NONKONTRAKTUAL	'00005/UP_TUP/098409/2024	'05-09-2024	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Pembayaran belanja modal (perjalanan dinas) kelompok kerja (POKJA) tanggal 28 Agustus 2024 s.d 30 Agustus 2024 untuk 3 (tiga) orang	7010101003	1	8.613.473	8.613.473	'240361301008802	Terdapat ketidaksesuaian akun vs kode bmn senilai 102.804.703 atas kesalahan pencatatan kode barang, pekerjaan berupa pengurukan tanah kosong yang seharusnya menggunakan kode barang Tanah dalam pengerjaan namun satker menggunakan Gedung bangunan dalam pengerjaan. Sudah dilakukan koreksi kode barang pada modul aset tetap
3	'00501	Jawa Timur	'098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	BAST NONKONTRAKTUAL	'00006/UP_TUP/098409/2024	'05-09-2024	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Pembayaran belanja modal (perjalanan dinas) kelompok kerja (POKJA) Surat Tugas Nomor : 39/KPN.W14-U15/KP.1/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, selama tanggal 28 Agustus 2024 s.d 30 Agustus 2024 untuk 4 (empat) orang	7010101003	1	8.840.000	8.840.000	'240361301008802	Terdapat ketidaksesuaian akun vs kode bmn senilai 102.804.703 atas kesalahan pencatatan kode barang, pekerjaan berupa pengurukan tanah kosong yang seharusnya menggunakan kode barang Tanah dalam pengerjaan namun satker menggunakan Gedung bangunan dalam pengerjaan. Sudah dilakukan koreksi kode barang pada modul aset tetap.
4	'00501	Jawa Timur	'098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	BAST KONTRAKTUAL	'11/W14.U15/PL1.1.5/08/2024	'03-09-2024	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Jasa Konsultansi Perencanaan Pengurukan dan Pematangan Tanah Pengadilan Negeri Sumenep Tahun Anggaran 2024	7010101003	1	85.351.230	85.351.230	'240361301008739	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa prasarana disabilitas namun menggunakan belanja modal, tidak bisa dilakukan revisi SPM dikarenakan dalam satu BAST terdapat aset intra dan ekstra dan sudah dilakukan jurnal manual
5	'00501	Kalimantan Selatan	'099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'170/SEK.W15-U4/RT1.1.1/III/2024	15-03-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Prasarana Pendukung Disabilitas	3090402019	1	450.000	450.000	'240811301001099	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa prasarana disabilitas namun menggunakan belanja modal, tidak bisa dilakukan revisi SPM dikarenakan dalam satu BAST terdapat aset intra dan ekstra dan sudah dilakukan jurnal manual
6	'00501	Kalimantan Selatan	'099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'170/SEK.W15-U4/RT1.1.1/III/2024	15-03-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Prasarana Pendukung Disabilitas	3090402020	1	300.000	300.000	'240811301001099	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa prasarana disabilitas namun menggunakan belanja modal, tidak bisa dilakukan revisi SPM dikarenakan dalam satu BAST terdapat aset intra dan ekstra dan sudah dilakukan jurnal manual
7	'00501	Kalimantan Selatan	'099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'170/SEK.W15-U4/RT1.1.1/III/2024	15-03-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Prasarana Pendukung Disabilitas	3070108161	1	550.000	550.000	'240811301001099	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa prasarana disabilitas namun menggunakan belanja modal, tidak bisa dilakukan revisi SPM dikarenakan dalam satu BAST terdapat aset intra dan ekstra dan sudah dilakukan jurnal manual
8	'00501	Kalimantan Selatan	'099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'170/SEK.W15-U4/RT1.1.1/III/2024	15-03-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Prasarana Pendukung Disabilitas	3050299999	1	555.000	555.000	'240811301001099	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa prasarana disabilitas namun menggunakan belanja modal, tidak bisa dilakukan revisi SPM dikarenakan dalam satu BAST terdapat aset intra dan ekstra dan sudah dilakukan jurnal manual

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
9	'00501	Gorontalo	'099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038/UP_TUP/099361/2024	30-10-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Belanja keperluan perkantoran berupa Pengadaan Penggantian Inventaris pada Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo.	3050201020	2	899.000	1.798.000	'240501301021071	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa kursi sejumlah 2 unit menggunakan akun belanja keperluan kantor, tidak bisa dilakukan revisi SPM dikarenakan dalam satu BAST terdapat aset intra dan ekstra dan sudah dilakukan jurnal manual
10	'00501	Sulawesi Utara	307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	BAST KONTRAKTUAL	'4/SEK.PA.W18-A2/RT1.1/III/2024/R	28-03-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu	4010101001	1	102.906.102	102.906.102	'241581302000730	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung untuk merenovasi gedung yang bisa dikapitalisasikan. Tidak bisa dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja modal penambahan nilai gedung.
11	'00501	Sulawesi Utara	307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	BAST KONTRAKTUAL	'7/SEK.PA.W18-A2/RT1.1/III/2024/R	28-03-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu	4010101001	1	52.612.000	52.612.000	'241581302000729	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung untuk merenovasi gedung yang bisa dikapitalisasikan. Tidak bisa dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja modal penambahan nilai gedung.
12	'00501	Sulawesi Utara	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	BAST KONTRAKTUAL	'75/SEK.PA.W18-A3/PL1.1.5/III/2024	22-03-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Reviu Perencanaan	2010104001	1	49.815.000	49.815.000	'240831302000515	Kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya menambah nilai gedung tapi tercatat sebafai tanah, sudah dilakukan Koreksi Pencatatan kemudian sudah dilakukan koreksi nilai bertambah pada KDP
13	'00501	Jawa Barat	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015	30-05-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan gedung dan bangunan (pembelian AC)	3050204004	1	11.000.000	11.000.000	'240951301011819	Merupakan kesalahan pengguna akun belanja pemeliharaan gedung untuk membeli aset berupa AC. Tidak bisa dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja modal perevisian dan mesin
14	'00501	Jawa Barat	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015	30-05-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan gedung dan bangunan (pembelian AC)	3050204004	1	8.500.000	8.500.000	'240951301011819	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung untuk membeli aset berupa AC. Tidak bisa dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja modal perevisian dan mesin
15	'00501	Jawa Barat	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	11-07-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMBELIAN 1 UNIT AC	3050204004	1	11.000.000	11.000.000	'240951301016487	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung untuk membeli aset berupa AC. Tidak bisa dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja modal perevisian dan mesin
16	'00501	Jawa Barat	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	11-07-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMBELIAN 1 UNIT AC	3050204004	1	11.000.000	11.000.000	'240951301017589	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung untuk membeli aset berupa AC. Tidak bisa dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja modal perevisian dan mesin

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
17	'00501	Jawa Barat	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	21-10-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	PEMBELIAN 10 BUAH KURSI KANTOR	3050201003	10	928.000	9.280.000	'240951301025353	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset extrakomptable berupa kursi. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran.
18	'00501	Jawa Barat	400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00065/UP_TUP/400741/2024	27-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pembelian 4 Unit AC 2 PK, 1 Unit 1 PK, 1 Unit 1/2 PK, beserta instalasi dan pembayaran jasa bongkar dan pemasangan AC existing sebanyak 1 paket berdasarkan kuitansi nomor 718/W10-A13/PPK.KU1.1.2/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024	5031001002	1	2.751.000	2.751.000	'241280600530001	Merupakan kesalahan pencatatan Kode Barang yang seharusnya nilai Instalasi digabungkan kedalam nilai perolehan AC. Sudah dilakukan koreksi pencatatan Jaringan Instalasi AC NUP 1 serta input Koreksi Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin berupa AC Split NUP 5 s.d 10 di aplikasi SAKTI
19	'00501	Jawa Tengah	400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	BAST NONKONTRAKTUAL	'3161/SEK.PA.W11-A3/PL1.1.2/XII/2024	'02-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2024	3050201003	5	570.000	2.850.000	'241631303002112	belanja modal paket pengadaan mebeler senilai Rp. 49.886.000,- yg dimana dalam pengadaan tersebut terdapat item barang yg nilainya dibawah kapitalisasi berupa Kursi staf BR 510 AH
20	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00144/UP_TUP/401293/2024	'05-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran hibah meubelair	3050201003	4	398.392	1.593.568		Pembelian 4 unit kursi kantor yang nilainya di bawah kapitalisasi. Sudah dilakukan tinjut revisi ke akun 521252 dengan melakukan void SPHL dan dilakukan pengajuan SP3HL ulang
21	'00501	Kalimantan Tengah	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	BAST KONTRAKTUAL	'956/SEK.PA.W16-A7/PL1.1.2/X/2024	20-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PAKET PRODUK 62232-PE2-181844380 VERTICALBLINDAG DENGAN KUANTITAS 211.0	4010101001	1	108.665.000	108.665.000	'241021303001522	Kesalahan penggunaan kode barang yang seharusnya menggunakan kode 3050206057 Vertikal Blind
22	'00501	Kalimantan Tengah	401869	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	BAST KONTRAKTUAL	'005.2/BAST/PJ-PBN/XI/2024	'04-11-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SURAT PESANAN PENGADAAN BARANG PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	3050201003	22	599.000	13.178.000	'241021303001323	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja barang berupa kursi besi/metal di bawah nilai kapitalisasi yang seharusnya menggunakan akun belanja peralatan mesin - ekstrakomptabel
23	'00501	Kalimantan Tengah	401876	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	BAST KONTRAKTUAL	'016/AAM/PLK/XII/2024	16-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Meubelair TA. 2024	3050201002	2	799.000	1.598.000	'240431303012787	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja barang berupa mebeulair di bawah nilai kapitalisasi yang seharusnya menggunakan akun belanja peralatan mesin - ekstrakomptabel
24	'00501	Sulawesi Selatan	401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032/UP_TUP/401883/2024	25-11-2024	536111	Belanja Modal Lainnya	Belanja Modal Lainnya berupa Horden Kantor	3050206058	1	99.930.300	99.930.300	'240581701000268	Merupakan kesalahan akun belanja seharusnya belanja modal peralatan dan mesin karena satuan kerja mendapatkan anggaran tambahan biaya pada akun belanja modal lainnya
25	'00501	Sulawesi Utara	401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	BAST KONTRAKTUAL	'311/SEK.PA.W18-A10/PL.1.1.2/IX/2024	'02-10-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN (GENSET) PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	3060347002	1	499.000.000	499.000.000	'241581303000449	Merupakan kesalahan akun belanja seharusnya Belanja modal peralatan dan mesin tetapi pagunya anggarannya belanja modal gedung dan bangunan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
26	'00501	Maluku	401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	BAST KONTRAKTUAL	'105/PPK.W24-A4/PL1.1.2/XI/2024	14-11-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2024	3050206040	3	250.000	750.000	'241731301007997	Tercatat pembelian 3 buah Palu Sidang dengan kode barang 3050206040 dengan total nilai Rp250.000,- pada bulan november yang menggunakan akun 532111 (Belanja Modal PM). Tidak perlu dilakukan jurnal manual D 521252 K 595112, dikarenakan neraca percobaan akrual satker untuk akun 521252 telah disisi debet dengan nilai Rp 750.000 dan untuk akun neraca 595112 tidak ada neraca percobaan akrual satuan kerja
27	'00501	Jawa Barat	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	BAST KONTRAKTUAL	'748/SEK.PN.W11-U23/BAST.PL1.1.3/III/2024	18-03-2024	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Pengadilan Negeri Cikarang sepanjang 18m2	4040104001	1	74.722.935	74.722.935	'241711304000052	Merupakan kesalahan pengguna akun belanja pemeliharaan gedung untuk renovasi pagar dengan nilai diatas kapitalisasi tapi salah catat sebagai NUP Baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada NUP Pagar Permanen yang dilakukan renovasi. Satuan kerja tidak bisa dilakukan revisi SPM karena tidak memiliki anggaran belanja modal penambahan nilai gedung
28	'00501	Kalimantan Selatan	401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	BAST KONTRAKTUAL	'112/PPK.PN.W15-U13/PL1.1.7/XII/2024	20-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair pada Kantor Pengadilan Negeri Paringin Tahun Anggaran 2024	3050201004	6	850.000	5.100.000	'241511301008431	Pengadaan barang ekstrakomptabel berupa Kursi Kayu dengan harga satun Rp.850.000 sebanyak 6 unit
29	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014/UP_TUP/401946/2024	'01-10-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa nKOnsultasi dan Koordinasi Tentang Gedung kantor Pengadilan Agama Pagar Alam ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 s.d. 3 September 2024 a.n. Dwi Husna Sari, Maryanto, dan Fachrurrozi Repado	4010101001	1	14.225.000	14.225.000	'241441701000100	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan jurnal ke akun 595113 Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan pada tanggal 16 Januari 2025
30	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015/UP_TUP/401946/2024	'01-10-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Konsultasi dan Koordinasi Tentang Gedung kantor Pengadilan Agama Pagar Alam ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 4 s.d. 6 September 2024 a.n. Sutomo, Dwi Husna Sari, dan Maryanto	4010101001	1	14.604.000	14.604.000	'241441701000100	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan jurnal ke akun 595113 Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan pada tanggal 16 Januari 2025
31	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016/UP_TUP/401946/2024	'01-10-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Konsultasi dan Koordinasi Terkait Gedung Baru Pengadilan Agama Pagar Alam ke Jakarta pada tanggal 23 s.d. 25 September 2024 a.n. Maryanto	4010101001	1	5.290.000	5.290.000	'241441701000100	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan jurnal ke akun 595113 Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan pada tanggal 16 Januari 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
32	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017/UP_TUP/401946/2024	'01-10-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Sewa Mesin (Printer dan Kamera)	4010101001	1	2.500.000	2.500.000	'241441701000100	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan jurnal ke akun 595113 Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan pada tanggal 16 Januari 2025
33	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018/UP_TUP/401946/2024	'01-10-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembelian ATK Terkait Gedung Baru Pengadilan Agama Pagar Alam	4010101001	1	2.065.000	2.065.000	'241441701000100	Kesalahan penggunaan akun belanja atas belanja gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan jurnal ke akun 595113 Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan pada tanggal 16 Januari 2025
34	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'02-10-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa Penggantian Inventaris Kantor (Sofa, Meja, Kursi)	3050201003	1	743.820	743.820	'240951301024252	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
35	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'02-10-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa Penggantian Inventaris Kantor (Sofa, Meja, Kursi)	3050201005	3	979.020	2.937.060	'240951301024252	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
36	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'02-10-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa Penggantian Inventaris Kantor (Sofa, Meja, Kursi)	3050104004	1	391.020	391.020	'240951301024252	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
37	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'02-10-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa Penggantian Inventaris Kantor (Sofa, Meja, Kursi)	3050201002	1	734.020	734.020	'240951301024252	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
38	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00076	'04-11-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa Penggantian Inventaris Sofa 4pcs	3050201005	4	999.000	3.996.000	'240951301027448	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
39	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00081	'04-11-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa penggantian inventaris Sofa 1 pcs dan meja 3 pcs	3050201005	1	999.000	999.000	'240951301027448	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
40	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00081	'04-11-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa penggantian inventaris Sofa 1 pcs dan meja 3 pcs	3050201002	3	979.000	2.937.000	'240951301027448	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.
41	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00160/UP_TUP/401958/2024	'01-11-2024	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan Perkantoran berupa Clip On NYK Gaming Necro	3050206014	1	180.000	180.000	'240951301028397	Merupakan kesalahan penggunaan akun belanja alat rumah tangga kantor untuk membeli aset ekstrakomtabel. Tidak dilakukan revisi SPM karena satuan kerja tidak memiliki anggaran belanja peralatan mesin ekstrakomtabel.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
42	'00501	Sumatera Barat	401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017/UP_TUP/401962/2024	26-09-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BELANJA MODAL BERUPA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG DARI 7700KVA MENJADI 33000KVA	4010101001	1	9.000.000	9.000.000	'240111301009878	Kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya menambah nilai tapi tercatat sebagai NUP Baru gedung kantor. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen
43	'00501	Maluku	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	BAST KONTRAKTUAL	'450/SEK-W27-U8/PL1.1.2/XII/2024	16-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Meubelair) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	3050201003	40	500.000	20.000.000	'241731301009216	Tercatat pembelian 40 buah Kursi Besi/Metal dengan kode barang 3050201003 dengan total nilai Rp20.000.000,- pada bulan november yang menggunakan akun 532111 (Belanja Modal PM). Tidak perlu dilakukan jurnal manual D 521252 K 595112, dikarenakan neraca percobaan akrual satker untuk akun 521252 telah disisi debet dengan nilai Rp 20.000.000 dan untuk akun neraca 595112 tidak ada neraca percobaan akrual satuan kerja
44	'00501	Papua	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00006/UP_TUP/402860/2024	'03-12-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	honor pejabat pengadaan	4040104001	1	1.972.000	1.972.000	'240631301021387	Merupakan Biaya honor pejabat pengadaan yang seharusnya masuk sebagai niai penambahan dari 4.04.01.04.001 nup 2 telah dilakukan koreksi pencatatan untuk aset 4.04.01.04.001 nup 4 tersebut dan dilakukan koreksi pencatatan nilai bertambah untuk 4.04.01.04.001 nup 2
45	'00501	Papua	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00007/UP_TUP/402860/2024	13-12-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengelolaan Pengadaan Pagar Mess	4040104001	1	3.000.000	3.000.000	'240631701002348	Merupakan Biaya honor pejabat pengadaan yang seharusnya masuk sebagai niai penambahan dari 4.04.01.04.001 nup 2 telah dilakukan koreksi pencatatan untuk aset 4.04.01.04.001 nup 7 tersebut dan dilakukan koreksi pencatatan nilai bertambah untuk 4.04.01.04.001 nup 2
46	'00501	Papua	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BAST KONTRAKTUAL	'2094/SEK.02.W25-A/PL1.1/XII/2024	31-12-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Pagar Mess PTA Jayapura	4040104001	1	19.542.813	19.542.813	'259991304000675	Merupakan Biaya honor pejabat pengadaan yang seharusnya masuk sebagai niai penambahan dari 4.04.01.04.001 nup 2 telah dilakukan koreksi pencatatan untuk aset 4.04.01.04.001 nup 6 tersebut dan dilakukan koreksi pencatatan nilai bertambah untuk 4.04.01.04.001 nup 2
47	'00501	Papua	402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	BAST NONKONTRAKTUAL	'008/BAST/402876/2024	19-11-2024	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA BARANG PEMELIHARAAN CCTV BERUPA PERGANTIAN HDD CCTV 4TB SESUAI KWITANSI NOMOR : 56/M/KW-IP/XI/2024 TANGGAL 18/11/2024	3050105007	1	1.950.000	1.950.000	'240631302015109	Merupakan pengganti sparepart hdd cctv yang lama rusak menjadi yang baru. Merupakan pemeliharaan tidak menambah volume dari aset, maka dilakukan koreksi nilai berkurang untuk cctv nup 17 senilai 1.950.000, dan dilakukan jurnal manual pada glp. D : 523121 K : 391116 Rp 1.950.000
48	'00501	Jawa Tengah	403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	BAST KONTRAKTUAL	'0563/SEK.PA.W11-A34/PL1.1.2/XII/2024	20-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Pengadilan Agama Slawi	3050201003	61	579.420	35.344.620	'241181301006186	Belanja modal renovasi pagar permanen yang dimana terdapat honor pejabat pengadaan didalamnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
49	'00501	Jawa Tengah	403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	BAST KONTRAKTUAL	'0563/SEK.PA.W11-A34/PL1.1.2/XII/2024	20-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Pengadilan Agama Slawi	3050206057	97	874.680	84.843.960	'241181301006186	Belanja modal renovasi pagar permanen yang didalamnya terdapat belanja keperluan (penjilidan laporan, dll)
50	'00501	Lampung	663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00007/UP_TUP/663047/2024	'01-04-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Alat Bantu Dengar	3050299999	1	700.000	700.000	'241261301001876	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin untuk membeli aset dengan nilai dibawah kapitalisasi yang seharusnya menggunakan akun belanja peralatan mesin ekstrakomptabel. Sudah dilakukan jurnal manual D 521252 K 595112
51	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'208/BAST/PPK/BUA.6/12/2024	16-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Beserta Perangkat Pendukungnya	3100204003	1	590.000	590.000	'241751301056960	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin untuk membeli aset dengan nilai dibawah kapitalisasi yang seharusnya menggunakan akun belanja peralatan mesin ekstrakomptabel. Tidak perlu dilakukan jurnal manual karena dalam satu SPM ada belanja lain tapi masuk ke intrakomptabel otomatis membentuk beban aset ekstra 521252.
52	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'346/BUA.7/SPMK/XI/2024	'04-11-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor	3050205002	7	566.100	3.962.700	'241751302058480	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin untuk membeli aset dengan nilai dibawah kapitalisasi yang seharusnya menggunakan akun belanja peralatan mesin ekstrakomptabel. Tidak perlu dilakukan jurnal manual karena dalam satu SPM ada belanja lain tapi masuk ke intrakomptabel otomatis membentuk beban aset ekstra 521252.
53	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'346/BUA.7/SPMK/XI/2024	'04-11-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor	3050201004	7	482.850	3.379.950	'241751302058480	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin untuk membeli aset dengan nilai dibawah kapitalisasi yang seharusnya menggunakan akun belanja peralatan mesin ekstrakomptabel. Tidak perlu dilakukan jurnal manual karena dalam satu SPM ada belanja lain tapi masuk ke intrakomptabel otomatis membentuk beban aset ekstra 521252.
54	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST KONTRAKTUAL	'154/SEK.PMT.W3-Mil/PL1.1.1/VIII/2024	27-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencana Renovasi Gedung Kantor (Atap/Plafond) Dilmilti III Surabaya T.A 2024	6070301001	1	88.753.158	88.753.158	'241351301016316	Kesalahan pencatatan kode barang penambahan nilai gedung sebagai ATR, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas ATR (Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi) dan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada Bangunan Gedung Kantor yang dorenovasi
55	'00501	Papua	663381	PENGADILAN MILITER III - 19 DI JAYAPURA	BAST KONTRAKTUAL	'1447/W3.Mil-08/PL.04/XII/2024	19-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Militer III-19 Jayapura	3050201003	50	390.000	19.500.000	'240631304007021	Terdapat pembelian kursi sebanyakn 50 unit yang bernilai ekstrakomptable tidak dapat dilakukan koreksi SPM dikarenakan dalam satu SPM terdiri dari barang intrakomptable dan ekstrakomptable

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
56	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00008/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
57	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00009/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
58	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
59	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00011/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
60	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
61	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
62	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Konsultan Perencanaan berdasarkan SK No. 6/SEK.03/SK.PL1.1.7/I/2024 tanggal 2 Januari 2024	4010101001	1	600.000	600.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
63	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa menghadiri undangan evaluasi dokumen kualifikasi seleksi konsultan perencana pelapis tebing PA Lebong bedasarkan SPD No: 1/PPK.W7-A5/KU.01/I/2024	4010101001	1	168.000	168.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
64	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa menghadiri undangan evaluasi dokumen kualifikasi seleksi konsultan perencana pelapis tebing PA Lebong bedasarkan SPD No: 1/PPK.W7-A5/KU.01/I/2024	4010101001	1	207.500	207.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
65	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa menghadiri undangan evaluasi dokumen kualifikasi seleksi konsultan perencana pelapis tebing PA Lebong bedasarkan SPD No: 1/PPK.W7-A5/KU.01/I/2024	4010101001	2	376.000	752.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
66	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa menghadiri undangan evaluasi dokumen kualifikasi seleksi konsultan perencana pelapis tebing PA Lebong bedasarkan SPD No: 2/PPK.W7-A5/KU.01/I/2024	4010101001	1	168.000	168.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
67	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa menghadiri undangan evaluasi dokumen kualifikasi seleksi konsultan perencana pelapis tebing PA Lebong bedasarkan SPD No: 2/PPK.W7-A5/KU.01/I/2024	4010101001	1	207.500	207.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
68	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa menghadiri undangan evaluasi dokumen kualifikasi seleksi konsultan perencana pelapis tebing PA Lebong bedasarkan SPD No: 2/PPK.W7-A5/KU.01/I/2024	4010101001	2	376.000	752.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
69	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	3	128.000	384.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
70	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	10	15.000	150.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
71	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	76.000	76.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
72	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	385.000	385.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
73	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	420.000	420.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
74	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	65.000	130.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
75	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya ATK kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	55.000	110.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
76	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	15	5.000	75.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
77	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	15	1.500	22.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
78	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	5	4.500	22.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
79	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	5	3.500	17.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
80	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	5	1.500	7.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
81	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	15	3.500	52.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
82	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	5	4.500	22.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
83	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	5	1.500	7.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
84	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	5	5.500	27.500	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
85	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	17.000	17.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
86	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	15.000	30.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
87	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	17.000	17.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
88	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	3	15.000	45.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
89	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	17.000	34.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
90	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	17.000	34.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
91	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	15.000	15.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
92	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	18.000	18.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
93	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	20.000	40.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
94	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	2	20.000	40.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
95	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022/UP_TUP/682253/2024	20-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa biaya konsumsi kebutuhan Rapat Pokja Pemilihan Pelapis Tebing Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	17.000	17.000	'241461301005377	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
96	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00024/UP_TUP/682253/2024	27-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa rapat persiapan Penunjukkan Penyedia dan Perumusan Kontrak Konsultan Perencana Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Lainnya PA Lebong	4010101001	1	150.000	150.000	'241461301005622	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
97	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00025/UP_TUP/682253/2024	27-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa rapat persiapan Penunjukkan Penyedia dan Perumusan Kontrak Konsultan Perencana Pembangunan Pelapis Tebing dan Sarpras Lainnya PA Lebong	4010101001	1	150.000	150.000	'241461301005622	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
98	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00026/UP_TUP/682253/2024	27-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa rapat pemeriksaan administrasi penunjukkan penyedia pembangunan pelapis tebing dan sarpras lainnya Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	150.000	150.000	'241461301005622	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
99	'00501	Bengkulu	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00027/UP_TUP/682253/2024	27-08-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa rapat pemeriksaan administrasi penunjukkan penyedia pembangunan pelapis tebing dan sarpras lainnya Pengadilan Agama Lebong	4010101001	1	150.000	150.000	'241461301005622	Kesalahan pencatatan kode barang atas pekerjaan KDP sebagai Bangunan Gedung Kantor NUP baru. Sudah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan BMN dengan kode barang 4010101001 dan mencatat kode barang perolehan BMN kedalam konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang seharusnya melalui menu perolehan lainnya KDP
TOTAL														**1.533.250.594**		

134111 JALAN DAN JEMBATAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
134111 - JALAN DAN JEMBATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Sulawesi Utara	005.01.099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	17.016.775.887	Merupakan jalan komplek terpadu PT Manado, PTA Manado, PN Manado, PA Manado
0.0	Sulawesi Barat	005.01.099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	79.674.000	Merupakan jalan disekeliling gedung kantor, akan dilakukan penambahan nilai kegedung kantor baru pada periode 2025
0.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	112.962.000	Merupakan jalan Menuju Ke Dalam Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Kupang
0.0	Litbang	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	2.419.333.263	Merupakan jalan masuk diklat
TOTAL				**19.628.745.150**	

134112 IRIGASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
134112 - IRIGASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Bengkulu	005.01.401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	230.653.264	Merupakan Bangunan Penguat Tebing yang sebelumnya tergabung dalam nilai bangunan gedung kantor PA Tais
0.0	Litbang	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	7.946.154.474	Merupakan saluran pembuangan air hujan, Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan, dan Sumur Artesis
TOTAL				**8.176.807.738**	

134113 JARINGAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
134113 - JARINGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	59.307.000	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya berupa Instalasi Penatur Listrik dengan saklar yang melekat digedung bangunan kantor yang sedang direnovasi total atau dibangun ulang sehingga bangunan gedung kantor tersebut masih proses KDP jadi belum bisa dilakukan koreksi
0.0	Jakarta	005.01.401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	49.563.000	Merupakan Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA (satker tidak mempunyai gedung dan bangunan/catatan calk)
0.0	Litbang	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	30.435.857.964	Merupakan jaringan telepon, jaringan listrik, instalasi AC, instalasi air, instalasi generating set, Instalasi Building Automation System (BAS), instalasi komputer, bangunan tempat penampung sampah, dan instalasi lain-lain
TOTAL				**30.544.727.964**	

135111 ASET TETAP RENOVASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
135111 - ASET TETAP RENOVASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Aceh	005.01.098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	616.526.900	Merupakan belanja pemeliharaan gedung dan banguanan (MAK 523111) direalisasikan untuk kegiatan renovasi gedung yang memenuhi batas mininmum kapitalisasi sebesar Rp271.958.400. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban belanja pemeliharaan gedung dan bangunan diketahui terdapat belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang direalisasikan untuk pembuatan partisi gedung yang memenuhi batas minimum kapitalisasi sebesar Rp271.958.400 adapun gedung yang direnovasi merupakan gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh. sehingga belanja tersebut seharusnya dibebankan dari belanja penambahan nilai aset tetap lainnya dan/atau aset lainnya (MAK 536121). Bukti pertanggungjawaban atas belanja renovasi tersebut berupa 13 kuitansi dan telah dibayar lunas serta dipertanggungjawabkan denagn SPM-GUP. Atas permasalahan tersebut PPK PT Banda Aceh menjelaskan bahwa pekerjaan renovasi tersebut menambah fungsi dari gedung dan bangunan. namun demikian pekerjaan tersebut direalisasikan dengan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (MAK 523111) dengan pertimbangann tidak tersediaanya anggaran belanja modal (MAK 53) untuk kegiatan tersebut. renovasi tetap dilaksanakan meskipun tidak tersedia anggaran belanja modal dengan pertimbangan gedung sementaraharus segera difungsikan sebagai kantor PT Banda Aceh karena kantor gedung lama akan segera dibongkar untuk pelaksanaan pembangunan gedung baru. Akan dilakukan mekanisme hibah keluar kepada Pemda pada periode 2025.
0.0	Aceh	005.01.098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	179.850.000	Renovasi atas gedung pinjam pakai milik Dinas Pemuda dan Olahraga Banda Aceh yang difungsikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai tahun 2022-2024 sebagai gedung pinjam pakai, mengingat gedung tersebut awalnya aula dengan ruangan kosong. Untuk menunjang kegiatan operasional Pengadilan Negeri Banda Aceh maka dilakukan renovasi atas gedung pinjam pakai tersebut berupa partisi-partisi ruangan yang memisahkan antara PTSP, sub bagian dan panmud serta penambahan toilet untuk menunjang layanan terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Akan dilakukan mekanisme hibah keluar kepada Pemda pada periode 2025.
0.0	Jakarta	005.01.401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	217.008.008	Merupakan renovasi atas bangunan gedung kantor milik PEMDA DKI Jakarta menggunakan belanja pemeliharaan gedung kantor, akan diserahkan ke PEMDA DKI
0.0	Litbang	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	64.657.884	ATR akan diserahkan ke BUA pada periode 2025
TOTAL				**1.078.042.792**	

162191 ASET TAK BERWUJUD LAINNYA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
162191 - ASET TAK BERWUJUD LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Aceh	005.01.401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	4.400.000	Website
0.0	Aceh	005.01.098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	5.100.000	Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi Website
0.0	Badilag	005.04.663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	23.250.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Bangka Belitung	005.01.682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	6.500.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Bangka Belitung	005.01.402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	6.000.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Bangka Belitung	005.01.663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	11.678.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Banten	005.01.400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	29.200.000	Software, akan dilakukan koreksi pada periode 14 tahun 2024
0.0	Banten	005.01.417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	14.700.000	Software, akan dilakukan koreksi pada periode 14 tahun 2024
0.0	Banten	005.01.097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	87.649.500	Aplikasi e-keuangan perkara, perubahan data kependudukan, dan cuti online serta OS Virtualisasi, akan dilakukan koreksi pada periode 14 tahun 2024
0.0	Banten	005.01.689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	99.004.550	Asset tak berwujud lainnya (Website)
0.0	Bawas	005.07.663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	386.907.995	ATB Lainnya berupa website
0.0	BUA	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	929.614.000	Website Satuan Kerja
0.0	Gorontalo	005.01.400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	17.000.000	Website PN Limboto
0.0	Jakarta	005.01.663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	38.593.750	Website satker
0.0	Jakarta	005.01.526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	83.840.000	Aset Tak Berwujud Lainnya dan Software Komputer
0.0	Jakarta	005.01.663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	5.940.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jambi	005.01.402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	42.500.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jambi	005.01.400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	69.080.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jambi	005.01.098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	46.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jawa Barat	005.01.682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	19.195.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	72.955.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	77.900.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.663271	PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG	65.900.000	Website SIAD Perkara Pengadilan Mil
0.0	Jawa Barat	005.01.400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	6.500.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	31.979.880	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	74.247.500	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	9.847.100	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	597.960.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	23.550.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	115.180.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Barat	005.01.097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	103.290.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Jawa Tengah	005.01.401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	2.497.000	Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi Website
0.0	Jawa Tengah	005.01.401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	2.500.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jawa Tengah	005.01.097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	8.470.000	Aset Tak Berwujud Lainnya berupa Website Utama PN Klaten
0.0	Jawa Timur	005.01.401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	6.815.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jawa Timur	005.01.401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	8.475.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jawa Timur	005.01.663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	200.224.550	Website satker

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
162191 - ASET TAK BERWUJUD LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Timur	005.01.098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	59.530.000	Website Satuan Kerja
0.0	Jawa Timur	005.01.098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	1.250.000	Website Satuan Kerja
0.0	Kalimantan Barat	005.01.531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	54.500.000	Website Satuan Kerja
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	4.500.000	Aset Tak Berwujud Lainnya berupa website
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	31.738.750	Aset Tak Berwujud Lainnya berupa website
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	24.475.000	Aset Tak Berwujud Lainnya berupa website
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	3.392.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	12.181.829	ATB Lainnya berupa website
0.0	Kalimantan Timur	005.01.400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	9.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Lampung	005.01.614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	45.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Miltun	005.05.663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA	195.000.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	12.815.000	Aset Tak Berwujud Lainnya WEB/Portal dan Software
0.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	15.000.000	Aset Tak Berwujud Lainnya Software Animasi
0.0	Papua	005.01.400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	32.500.000	Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi Website
0.0	Papua	005.01.400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	100.000.000	Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi Website jaringan
0.0	Riau	005.01.402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	3.967.150	Website Satuan Kerja
0.0	Riau	005.01.400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	19.345.000	Website Satuan Kerja
0.0	Riau	005.01.098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	7.500.000	Website Satuan Kerja
0.0	Riau	005.01.400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	41.790.000	Website Satuan Kerja
0.0	Riau	005.01.477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	24.200.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	24.349.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	24.349.000	Websiter Satker
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	38.495.000	Website Satker
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	30.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	3.850.000	ATB lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	3.850.000	ATB lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	6.950.000	Aset Tak Berwujud Lainnya dan Software
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.307292	PENGADILAN AGAMA POSO	3.850.000	ATB lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	3.850.000	ATB lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	4.400.000	ATB lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	3.850.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	10.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	10.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	27.390.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	20.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sulawesi Utara	005.01.568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	44.000.000	Merupakan Video Profile PTSP PN Bitung senilai 18.000.000 dan Aplikasi Posbakum senilai 26.000.000, aplikasi posbakum akan dikoreksi pada periode 14 tahun 2024
0.0	Sumatera Barat	005.01.098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	22.000.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Sumatera Barat	005.01.098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	12.760.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Sumatera Barat	005.01.400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	24.090.000	ATB Lainnya berupa website

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
162191 - ASET TAK BERWUJUD LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Sumatera Selatan	005.01.672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	23.015.000	ATB Lainnya berupa website
0.0	Sumatera Utara	005.01.403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	2.900.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sumatera Utara	005.01.663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	35.090.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sumatera Utara	005.01.400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	8.000.000	Website Satuan Kerja
0.0	Sumatera Utara	005.01.098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	173.408.840	Website Satuan Kerja
0.0	Sumatera Utara	005.01.526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	30.000.000	WEBSITE PTTUN MEDAN
0.0	Yogyakata	005.01.663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	23.155.000	Website satker
0.0	Yogyakata	005.01.098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	7.400.000	WEB DESIGN, HOSTING, DOMAIN
0.0	Yogyakata	005.01.578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	9.000.000	Website Satuan Kerja
TOTAL				**4.662.130.394**	

391113 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391113 - KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	37.400	Kesalahan input kode barang persediaan yang seharusnya doubel tape 2 buah dengan nilai perbuah Rp.13.000 tetapi diinput pengharum ruangan 2 buah dengan nilai perbuah Rp.31.700, dilakukan reklasifikasi dan koreksi nilai
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.526730	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	7.488	Koreksi nilai Bolpen Snowman V5 Rp 2.812 menjadi Rp.2.500 berkurang senilai Rp.312 sebanyak 24 buah
0.0	Badilag	005.04.402541	PENGADILAN AGAMA BARABAI	335.373	Koreksi nilai kurang terhadap barang persediaan hasil reklasifikasi karena kesalahan kodebarang saat diinput pada modul komitmen.
TOTAL				**380.261**	

391116 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Satker Pusat	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	557.620.747	Terdapat koreksi pencatatan gedung garasi, yang nilainya ditambahkan pada bangunan klinik.
0.0	Satker Pusat	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	(201.846.403,)	merupakan koreksi nilai berkurang pengembalian nilai gedung
0.0	Satker Pusat	005.03.097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	70.888.713	Merupakan koreksi nilai berkurang atas pengembalian belanja yang berasal dari temuan BPK, yang sebelumnya aset tersebut tercatat pada Badan Urusan Administrasi dan dilakukan transfer keluar ke Badilum sehingga koreksi nilai berkurang dilakukan oleh satker Badilum
0.0	Aceh	005.01.401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	475.533.294	Akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan perubahan nilai berkurang bangunan gedung kantor karena pemisahan aset peralatan dan mesin dari bangunan gedung kantor
0.0	Aceh	005.01.401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	468.935.037	Akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan perubahan nilai berkurang bangunan gedung kantor karena pemisahan aset peralatan dan mesin dari bangunan gedung kantor
0.0	Aceh	005.01.401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	-1.187.446.630	Merupakan hasil dari koreksi nilai bertambah gedung bangunan kantor permanen yang disamakan dengan nilai gedung PN Lhokseumawe
0.0	Aceh	005.01.401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	11.668.260	Merupakan akumulasi penyusutan dari hibah mushalla
0.0	Aceh	005.01.401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	5.680.800	Merupakan Akumulasi Penyusutan Hibah Masuk Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
0.0	Aceh	005.01.401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	5.937.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk PM (LCD Monitor, Camera Conference, Loudspeaker, Audio Mixing Console, Printer, dan Mic) dengan tahun perolehan di bawah tahun 2024
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	859.651.671	Koreksi Pencatatan nilai berkurang terhadap bangunan gedung kantor permanen berupa peralatan mesin
0.0	Jawa Timur	005.01.401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	40.114.959	1. Merupakan akumulasi penyusutan atas Hibah masuk berupa kursi dan meja dengan tahun perolehan dibawah tahun 2024 2. Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel chair
0.0	Sumatera Selatan	005.01.402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	-20.600.770	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi perubahan nilai bertambah ke gedung kantor karena pembuatan jalur disabilitas
0.0	Jawa Barat	005.01.400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	10.316.459	Merupakan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk Genset karena kesalahan kode barang sebelumnya tercatat dalam kelompok alat studio (36)
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	356.114.020	koreksi pencatatan nilai berkurang bangunan gedung kantor permanen
0.0	Riau	005.01.402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	307.383.270	Merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan Atas Transaksi Hibah Masuk Berupa tanah, timbunan halaman kantor, tempat parkir, penataan taman
0.0	Bengkulu	005.01.401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	-12.969.608	merupakan akumulasi penyusutan dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang pada BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen Nup 1 sebesar 870.970.998.27
0.0	Jawa Timur	005.01.401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	7.040.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk Automatic Transfer Switch (ATS); Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang Automatic Transfer Switch (ATS)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Sulawesi Utara	005.01.401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	-94.455.669	Koreksi pencatatan nilai berkurang, karena ada aset peralatan dan mesin yang tergabung dengan Bangunan Gedung Kantor.
0.0	Kalimantan Timur	005.01.652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	45.886.953	merupakan nilai penyusutan atas hibah TAYL berupa AC, Infocus dan Speaker
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	-470.894	merupakan akumulasi penyusutan atas toilet dan jalur disabilitas yang tercatat sebagai nup baru sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah ke Gedung kantor nup 3. Belum bisa dilakukan koreksi karena menunggu hibah mushola karena toilet dan jalur disabilitas gabung dengan mushola.
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	-3.866.523	Merupakan akumulasi nilai penyusutan transaksi penggabungan 3 NUP menjadi 1 NUP berupa bangunan gedung kantor permanen
0.0	Jawa Barat	005.01.400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	-31.544.229	Merupakan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk Genset karena kesalahan kode barang sebelumnya tercatat dalam kelompok alat studio (36)
0.0	Jawa Barat	005.01.604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	8.918.974	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai penggantian keramik toilet sebesar 42.. yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor melalui koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Jawa Barat	005.01.400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	-83.333	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan pada Bangunan Gedung Kantor Pemanen melalui Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah
0.0	Lampung	005.01.401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	227.516.276	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas pemisahan peralatan mesin dari bangunan gedung kantor melalui transaksi koreksi nilai berkurang bangunan gedung kantor dan saldo awal berupa peralatan mesin; dan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk Genset karena kesalahan kodefikasi barang
0.0	Jawa Timur	005.01.401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	6.349.570.504	1. Merupakan nilai buku aset yang masih memiliki sisa masa manfaat atas penghapusan BMN memiliki masa berupa meubelair sesuai SK Penghapusan Nomor 521/SEK/SK.PL1.2.3/V/2024 2. Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah hibah renovasi gedung kantor.
0.0	Jawa Barat	005.01.400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	7.824.581	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai Prasarana Disabilitas berupa guiding block yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor melalui koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Jawa Timur	005.01.401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	-7.440.261	Merupakan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan atas reklas hasll dari renovasi gedung n bangunan dijadikan pagar permanen
0.0	Jawa Timur	005.01.401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	-5.211.810	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel chair
0.0	Sumatera Utara	005.01.401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	64.337.349	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	292.436.161	Merupakan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan atas transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP, untuk gedung NUP 1
0.0	Sumatera Selatan	005.01.402273	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	320.085	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi Koreksi Pencatatan Gedung NUP 3 berupa jaringan yang seharusnya menambah nilai Gedung NUP 2. Telah dilakukan koreksi pencatatan nilai bertambah
0.0	Jawa Timur	005.01.403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	12.857.143	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk Stationary Generating set; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang Stationary Generating set
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	1.465.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk TAYL berupa Sice, Kursi Besi/Metal, Lemari Es,
0.0	Jawa Barat	005.01.682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	1.845.282	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa kanopi; akumulasi penyusutan atas koreksi perubahan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor permanen karena kesalahan pencatatan hibah sebagai nup baru; dan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai berkurang bangunan gedung kantor karena pembatalan BAST Hibah barang
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	3.782.020	Merupakan nilai akumulasi pencatatan atas transaksi koreksi pencatatan bangunan gedung kantor NUP 6 dan koreksi nilai bertambah ke bangunan gedung kantor NUP 5
0.0	Maluku Utara	005.01.307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	17.780.000	koreksi tersbut merupakan koreksi atas dobel pencatatan hibah berupa ac standing
0.0	Jawa Timur	005.01.401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	-185.481.234	1. Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan saldo awal; tindak lanjut atas kesalahan koreksi pencatatan gedung bangunan arsip yang terlanjur dihapus oleh satker seharusnya menghapus aset tetap renovasi namun terhapus bangunan gedung arsip sehingga dilakukan penginputan saldo awal atas gedung arsip tersebut 2. . Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah; tindak lanjut atas kesalahan pendetailan hibah aset tetap renovasi yang membentuk nup baru seharusnya menambah nilai gedung kantor
0.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	10.614.182	perbedaan penyusutan terhadap transaksi koreksi pencatatan gedung yang seharusnya menambah nilai gedung yang lama.
0.0	Sulawesi Utara	005.01.401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	351.075.625	Koreksi pencatatan nilai berkurang, karena ada aset peralatan dan mesin yang tergabung dengan Bangunan Gedung Kantor.
0.0	Sumatera Utara	005.01.403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	2.156.043	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Jawa Timur	005.01.401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	30.885.480	Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas tindak lanjut Penggabungan 2 NUP Gedung Bangunan menjadi 1 NUP dengan SK 95/SEK.PA.W13-A2/PL.1/I/224 2. Akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) koreksi ketidaksesuaian kode barang wheel chair

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Sumatera Barat	005.01.402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	-19.320.000	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas koreksi jaringan listrik yang membentuk nup baru seharusnya menambah nilai gedung bangunan.
0.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	58.541.431	Merupakan Akumulasi Penyusutan atas transaksi hibah masuk berupa Peralatan Mesin TAYL berupa meubelair dan station wagon
0.0	Jawa Timur	005.01.401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	-554.648.418	merupakan nilai buku atas hibah keluar gedung kantor permanen sesuai SK HIBAH Nomor 1370/SEK/SK/PL1.2.3/X/2024
0.0	Jambi	005.01.632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	-919.179	Koreksi pencatatan rumah negara golongan I tipr A permanen NUP 1 dan bangunan olah raga semi permanen NUP 1
0.0	Jambi	005.01.652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	8.019.971	Koreksi pencatatan gedung dan bangunan yaitu penggabungan NUP gedung dan bangunan sehingga timbul selisih akumulasi penyusutan.
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	44.611.493	Merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan Atas Transaksi Hibah Masuk Berupa Pick Up Nup 1
0.0	Sumatera Selatan	005.01.401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	44.232.000	Merupakan double input transaksi koreksi nilai berkurang KDP Gedung NUP 1 atas tindak lanjut eliminasi akun penerimaan kembali belanja modal TAYL
0.0	Maluku	005.01.401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	-143.316	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen yang dikarenakan Pengembalian Belanja Modal Tahun Lalu yang menghasilkan Aset Tetap yang telah dilakukan jurnal manual.
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	-884.201.400	Merupakan Akumulasi Penyusutan atas transaksi koreksi nilai berkurang, di karenakan kesalahan penjumlahan KDP Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2022-2023
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	-2.625.391	Akumulasi penyusutan nilai Gedung Bangunan Kantor Permanen karena penggabungan nilai Bangunan Gedung Kantor NUP 5 ditambahkan ke NUP 4 dengan korkesi pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5 dan koreksi nilai bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 4
0.0	Jawa Timur	005.01.401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	13.500.010	akumulasi penyusutan pc unit pembelin tahun 2022,
0.0	Sumatera Selatan	005.01.401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	-33.403.168	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan Gedung dan Bangunan NUP 4 - 11 yang seharusnya menambah nilai Gedung NUP 3
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	84.619.317	Merupakkan transaksi penghapusan BMN berupa station wagon dan bangunan gedung kantor permanen serta akumulasi penyusutannya
0.0	Sumatera Selatan	005.01.401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	-1.636.757	Merupakan Nilai Akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi nilai dengan NUP 1 akibat pengembalian atas temuan BPK
0.0	Riau	005.01.631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	1.610.000	Merupakan nilai penyusutan Hibah Masuk Alat Pendingin Lainnya
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	702.000	Merupakan koreksi penggunaan kembali barang yg dihentikan penggunaan nya berupa A.C Split
0.0	Jawa Timur	005.01.401432	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	-2.047.950	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel chair

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Tengah	005.01.400967	PENGADILAN AGAMA PATI	7.457.400	Akumulasi Penyusutan atas Hibah Rehabilitasi Rumah Dinas yang sudah disahkan MPHL NO. 81744973919672616 tgl 11 Juni 224 sebesar Rp 149.148.
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	11.824.683	merupakan koreksi pencatatan bangunan gedung kantor permanen Nup 6 dan koreksi pencatatan nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen nup 2, dikarenakan pengadaan cor semen halaman yang membentuk nup baru berupa bangunan gedung kantor permanen
0.0	Kalimantan Timur	005.01.401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	355.594.288	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa Station Wagon dan Minibus 14 penumpang;
0.0	Kalimantan Barat	005.01.402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	29.900.000	Merupakan akumulasi penyusutan tahun berjalan atas Reklasifikasi Masuk Genset karena kesalahan kode barang yg sebelumnya tercatat dalam kelompok alat studio (306)
0.0	Sumatera Selatan	005.01.401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	895.439.757	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan pada gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin.
0.0	Jawa Timur	005.01.401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	-12.447.429	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk stationary generating set; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang genset
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	596.139.825	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan KDP yang seharusnya menambah nilai KDP
0.0	Sumatera Barat	005.01.401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	-222.460	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai berkurang atas pengembalian belanja modal TAYL
0.0	Jawa Tengah	005.01.401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	42.857	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Jawa Timur	005.01.401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	2.160.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk TAYL bangunan tempat ibadah.
0.0	Sumatera Utara	005.01.401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	-19.360.896	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen yang dikarenakan Pengembalian Belanja Modal Tahun Lalu yang menghasilkan Aset Tetap yang telah dilakukan jurnal manual.
0.0	Jawa Timur	005.01.401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	75.594.750	Merupakan akumulasi penyusutan atas Hibah masuk berupa kursi dan meja dengan tahun perolehan dibawah tahun 224
0.0	Jawa Timur	005.01.401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	6.793.163	Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas tindak lanjut koreksi kesalahan mendetailkan aset, yang seharusnya menambah nilai malah membentuk NUP baru yaitu berupa renovasi gedung kantor
0.0	Papua Barat	005.01.402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	1.523.810	Merupakan akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai penambahan aset disabilitas pada bangunan gedung kantor melalui transaksi koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah.
0.0	Jawa Barat	005.01.402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	7.685.079	Merupakan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
0.0	Lampung	005.01.401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	-218.878	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen karena pengembalian belanja modal TAYL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Barat	005.01.403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	-34.957.615	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas Bangunan Gedung Kantor Pemanen melalui Koreksi Pencatatan dan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah dari kegiatan penggantian granit dan batu alam dengan nilai Rp. 40.308.295,-
0.0	Jawa Barat	005.01.400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	760.200	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Uninterruptible Power Supply (UPS) karena masih memiliki sisa manfaat
0.0	Jawa Timur	005.01.401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	1.831.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk TAYL bangunan terbuka lainnya.
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	1.220.000	Akumulasi penyusutan atas Peralatan dan mesin berupa Hibah 2 Unit AC Split
0.0	Bengkulu	005.01.401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	-1.303.472	Merupakan akumulasi penyusutan dari transaksi Koreksi nilai berkurang gedung kantor
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.307470	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	101.952.692	Akumulasi penyusutan koreksi pencatatan atas bangunan gedung kantor permanen NUP 5 dan 6 yang seharusnya menambah nilai gedung bangunan kantor permanen NUP 3 dan tidak menambah NUP baru
0.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	-153.116.142	Pengadilan Agama Taliwang senilai (-153.116.142) - Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi, ini adalah Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Bangunan Gedung Kantor Permanen PA Taliwang
0.0	Sumatera Barat	005.01.402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	5.259.137	Merupakan penghapusan aset yang masih memiliki sisa masa manfaat sesuai SK nomor 964/SEK/SK.PL1.2.3/VII/224
0.0	Kepulauan Riau	005.01.402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	-713.400	Merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas reklasifikasi masuk kursi besi/metal
0.0	Kalimantan Utara	005.01.417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	6.579.240	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor Pemanen melalui Koreksi Pencatatan dan Koreksi Prubahan Nilai Bertambah
0.0	Kepulauan Riau	005.01.402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	-383.693.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan pada aset tanah bangunan kantor pemerintah nup 1 dengan nilai 256.132.000 menjadi nup 4 (546.155.000) dan nup 3 (93.670.000)
0.0	Riau	005.01.402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	9.377.000	Merupakan nilaipenyususstan hibah masuk berupa Hibah Masuk Alat Penghancur Kertas, Hibah Masuk P.C Unit, Hibah Masuk LCD Monitor, Hibah Masuk Intercom Unit
0.0	Maluku	005.01.307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	827.069	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas transaksi Koreksi Pencatatan Taman Semi Permanen dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Sulawesi Utara	005.01.401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	-75.122.844	Koreksi pencatatan nilai berkurang, karena ada aset peralatan dan mesin yang tergabung dengan Bangunan Gedung Kantor.
0.0	Yogyakata	005.01.401219	PENGADILAN AGAMA WATES	1.335.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas pemecahan NUP Alat Kantor Lainnya yang didalamnya terdapat 12 unit barang yang berbeda-beda melalui transaksi Koreksi Pencatatan dan Saldo Awal

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Yogyakata	005.01.401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	4.446.746	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai pembangunan toilet disabilitas yang tidak seharusnya membentuk NUP baru pada Bangunan Gedung Kantor Pemanen melalui Koreksi Pencatatan dan Koreksi Prubahan Nilai Bertambah
0.0	Aceh	005.01.663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	265.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk Alat Kesehatan Umum Lainnya karena kesalahan kode barang yang sebelumnya tercatat sebagai Walker Polding
0.0	Jawa Timur	005.01.663314	PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA	-1.019.250	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair 2 unit; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel cahir
0.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.663342	PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG	18.750.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas Koreksi Pencatatan Jaringan Telepon Lainnya
0.0	Sulawesi Utara	005.01.663360	PENGADILAN MILITER III - 17 DI MANADO	1.395.000	Koreksi pencatatan nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen. Karena ada kesalahan pencatatan merekam belanja modal jalur s disblitas menjadi nup baru seharusnya menambah nilai bangunan gedung kantor permanen
0.0	Jawa Timur	005.01.663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	-361.737.982	Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah serta void BAST pada jenis BAST Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai belanja
0.0	Jawa Barat	005.01.400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	145.792.593	Merupakan akumulasi penyusutan atas penggabungan dua NUP gedung kantor pada satu lokasi dan fungsi yang sama melalui koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Sumatera Utara	005.01.672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	44.441.654	Merupakan akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai penambahan aset disabilitas pada bangunan gedung kantor melalui transaksi koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah.
0.0	Kalimantan Timur	005.01.099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	-905.980.974	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap, Penyusutan Transaksional, Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif, Koreksi Perubahan Kondisi, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, Penghapusan, Reklasifikasi Keluar, Reklasifikasi Masuk)
0.0	Aceh	005.01.098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	36.640.001	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan nilai bertambah pada rumah negara golongan I tipe c dan nilai bertambah pada gedung kantor permanen
0.0	Jawa Timur	005.01.098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	-541.681	Merupakan akumlasi penyusutan dari transaksi koreksi nilai berkurang gedung atas pengembalian belanja modal TAYL
0.0	Riau	005.01.400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	-1.052.420.121	Merupakan nilai akumulasi penyusutan dari trnasaksi koreksi perubahan nilai berkurang terhadap bangunan gedung
0.0	Bali	005.01.099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	71.386.970	Merupakan akumulasi penyusutan atas Hibah TAYL berupa mebeulair dan gedung pos jaga
0.0	Yogyakata	005.01.400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	29.024.228	Merupakan akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai Bangunan Gedung Kantor Pemanen yang seharusnya tidak membentuk nup baru (merenovasi gedung yang sudah ada) melalui Koreksi Pencatatan dan Koreksi Prubahan Nilai Bertambah
0.0	Jawa Timur	005.01.098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	1.612.500	Merupakan hibah Masuk dengan tahun perolehan dibawah tahun 224

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Tengah	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	257.883.814	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen,Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen)
0.0	Sumatera Selatan	005.01.098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	760.000	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi input hibah masuk A.C Split dan Loudspeaker
0.0	Sumatera Barat	005.01.098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	-58.741.642	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas koreksi penggabungan NUP gedung kantor dimana dalam fungsi dan lokasi yang sama.
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	7.961.200	Merupakan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk A.C Split karena sebelumnya kesalahan kodefikasi barang
0.0	Jawa Barat	005.01.097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	145.269.903	Merupakan akumulasi penyusutan barang yang mau dihapuskan, hibah masuk dan akumulasi dari penyusutan atas koreksi nilai berkurang dan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen
0.0	Riau	005.01.098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	28.763.626	Hibah masuk be rupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai Rp. 49.947.000,- berupa renovasi ruang tunggu pengunjung Pengadilan Negeri Bengkalis, nilai tersebut adalah penyusutan dari koreksi nilai bertambah renovasi dari Bank BRI Berupa ruang tunggu yang sudah di lakukan koreksi nilai bertambah ke bangunan gedung kantor permanen.
0.0	Aceh	005.01.401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	90.700.676	Merupakan akumulasi penyusutan atas pemisahan aset yang semula tercatat sebagai pagar permanen menjadi bangunan rumah genset, pos jaga dan penambahan nilai pada Bangunan gedung kantor dan pagar permanen serta akumulasi penyusutan atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Pagar Permanen karena pengembalian belanja modal TAYL
0.0	Jawa Timur	005.01.098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	21.342.857	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk stationary generating set; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang genset
0.0	Maluku Utara	005.01.401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	64.738.295	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas pemisahan peralatan mesin dan sarana lingkungan dari nilai gedung kantor utama melalui transaksi koreksi nilai berkurang dan input saldo awal
0.0	Jawa Barat	005.01.097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	99.068.239	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa AC Split dan kursi besi/metal; serta selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai renovasi gedung yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor melalui transaksi koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Jawa Tengah	005.01.097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	38.541.602	Akumulasi penyusutan atas nilai Gedung dan Bangunan hasil tindak lanjut PIPK tanggal 1 November 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Barat	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	490.059.885	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa peralatan mesin dan rumah negara; akumulasi penyusutan atas pemisahan pencatatan tanah yang sebelumnya tergabung dalam nilai rumah negara melalui transaksi koreksi nilai berkurang dan saldo awal; serta akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai renovasi pagar dan rumah negara melalui transaksi koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah.
0.0	Jawa Barat	005.01.097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	16.046.460	Merupakan akumulasi penyusutan atas Hibah Masuk Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dan akumulasi penyusutan atas input Saldo Awal Bangunan Gedung Kantor Permanen karena kesalahan pencatatan tahun perolehan
0.0	Maluku	005.01.401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	11.965.242	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan irigasi dan jaringan yang selanjutnya ditindaklanjuti koreksi nilai bertambah ke gedungnya
0.0	Jawa Tengah	005.01.097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	-14	Koreksi perubahan nilai bertambah Tanah Bangunan Rumah Negara NUP 3,5,6,7 dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1
0.0	Jawa Barat	005.01.477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	-185.253.023	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi perubahan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor permanen karena kesalahan pencatatan nilai koreksi hibah sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Hibah No. 192/SEK.W11.U21/UM.01.10/I/2025
0.0	Maluku	005.01.401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	-2.300.050.019	Merupakan Akumulasi penyusutan atas Gedung dan Bangunan dari transaksi Koreksi Pencatatan dan transaksi koreksi nilai bertambah Gedung dan Bangunan
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	107.306.105	Merupakan Nilai akumulasi nilai penyusutan atas Koreksi Nilai berkurang Gedung dan Perolehan Lainnya Peraalatan dan Mesin
0.0	Jawa Barat	005.01.097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	1.097.142	Merupakan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk Microphone karena kesalahan kode barang yang sebelumnya tercatat sebagai Wall Microphone Voice Recorder dalam kelompok alat berat
0.0	Gorontalo	005.01.099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	5.803.983	atas koreksi pencatatan ATR dari penerimaan hibah BSI berupa pembangunan toilet penungujung, kemudian dilanjutkan transaksi perubahan nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Aceh	005.01.098523	PENGADILAN NEGERI IDI	256.584.979	Merupakan hasil akumulasi penyusutan dari penghentiaan penggunaan station wagon
0.0	Jakarta	005.01.097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	26.736.085	merupakan koreksi nilai bertambah bangunan gdung kantor permanen nup 5 digabung dengan bangunan gedung kantor permanen nup 2
0.0	Jakarta	005.01.097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	7.624.775	Merupakan koreksi pencatatan nilai bertambah ke bangunan gedung kantor permanen atas perolehan lainnya pembuatan rumah genset, koreksi atas pemasangan partisi dan backdrop, koreksi atas kesalahan pencatatan bast hibah
0.0	Jakarta	005.01.400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	107.160.314	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa hand metal detector, portal metal detector, perkakas kantor lainnya, Xray, Acces contorl, Rak besi dan koreksi pencacatan nilai berkurang lemari kayu

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Aceh	005.01.400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	1.386.700	Merupakan hasil akumulasi penyusutan atas hibah masuk pagar lainnya
0.0	Jawa Tengah	005.01.097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	23.971.791,	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk TV Monitor dan Mixer Sound System yang kemudian dilakukan koreksi lebih catat,
0.0	Jawa Timur	005.01.626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	47.408.999	Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas tindak lanjut Penggabungan 3 NUP Gedung Bangunan menjadi 1 NUP
0.0	Jawa Timur	005.01.098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	-1.794.195	Merupakan Akumulasi penyusutan dari transaksi koreksi nilai berkurang atas kesalahan penginputan pencatatan kuantitas pada modul komitmen seharusnya 3 unit namun terinput 1 unit dan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk Wheel Chair; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel cahir wheel chair
0.0	Bengkulu	005.01.673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	-226.157.035	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Pagar Permanen NUP 1
0.0	Kalimantan Barat	005.01.099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	-5.620.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk tangki air karena kesalahan kodefikasi barang
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	69.238.601	Merupakan akumulasi penyusutan Gedung Bangunan Kantor Permanen senilai 3.024.315 karena penggabungan nilai Bangunan Gedung Kantor NUP 5 ditambahkan ke NUP 4, Akumulasi Penyusutan Pick Up senilai 32.842.857 dan Mini Bus senilai 33.371.429 atas transaksi hibah masuk dengan tahun perolehan 2023, dan Perolehan Lainnya ekstrakomptabel berupa peralatan mesin senilai -2.970.000 dari koreksi pencatatan nilai berkurang Mess dikarenakan peralatan mesin tersebut termasuk dalam nilai perolehan Mess
0.0	Jawa Timur	005.01.098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	-562.500	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel cahir wheel chair
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	25.671.616	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan penambahan daya listrik yang seharusnya menambah nilai gedung tetapi tercatat sebagai nup tersendiri (sebagai bangunan gedung kantor permanen)
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	59.119.472	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi : - Input Saldo awal peralatan dan mesin berupa vertikal blind (13 buah), gedung pos jaga permanen, pagar permanen, dan bangunan rumah genset - Koreksi pencatatan bangunan gedung kantor permanen NUP 6 dan koreksi nilai bertambah bangunan gedung kantor permanene NUP 5
0.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	240.000	Akumulasi penyusutan akibat transaksi reklas peralatan mesin karena salah kode barang sehingga masuk kategori alat besar dan alat persenjataan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Kalimantan Timur	005.01.477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	10.545.016	Terjadi dikarenakan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk terhadap 8 unit Personal Computer menjadi P.C Unit berdasarkan hasil monitoring BMN Klasifikasi Kode Barang Dilarang pada Mahkamah Agung RI sesuai Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor 563/SEK.PN.W18-U8/PL1.2.5/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang sudah mengalami penyusutan Aset Tetap TA.2023
0.0	Aceh	005.01.098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	100.662.436	Merupakan akumulasi penyusutan atas penggabungan 2 NUP Gedung kantor pada satu lokasi dan fungsi yang sama melalui koreksi pencatatan dan koreksi pencatatan nilai bertambah
0.0	Aceh	005.01.098497	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	4.380.038.089	Merupakan koreksi pencatatan karena satker belum melakukan transfer keluar bangunan dari PN Lhokseumawe ke MS Lhokseumawe, namun MS Lhokseumawe telah melakukan pembangunan gedung dan mencatatnya melalui pembangunan dengan KDP sehingga perlu dilakukan koreksi pencatatan pada PN Lhokseumawe dan Koreksi Nilai Bertambah pada MS Lhokseumawe
0.0	Sumatera Utara	005.01.400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	-20.500.000	Merupakan rangkaian dari pembatalan transaksi hibah / void bast hibah. Untuk pembatalan/void MPHL BJS langkahnya 1. Satker mengajukan permohonan pembatalan MPHL BJS ke KPPN. Dengan dasar surat tsb KPPN akan melakukan void dengan menjurnal balik pengesahan hibah 2. Selanjutnya satker melakukan koreksi atas aset dari Hibah barang 3. Satker melakukan jurnal manual D: 391131 K: 391116/8 Setelah dilakukan tidak akan ada selisih pengesahan hibah antara data KPPN dan Satke
0.0	Jawa Timur	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	1.800.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk TAYL berupa portal dan kanopi
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	104.120.053	akumulasi penyusutan koreksi pencatatan biaya renovasi gedung kantor berupa pembangunan pagar yang seharusnya menambah nilai gedung & bangunan yang seharusnya tidak menambah nup baru
0.0	Jawa Timur	005.01.098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	86.347.464	Merupakan hibah masuk berupa Meubelair dan Gedung bangunan dengan perolehan aset tahun 223
0.0	Sumatera Utara	005.01.477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	33.907.143	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi hibah masuk Hibah Masuk Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
0.0	Aceh	005.01.401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	-708.584	Merupakan akumulasi penyusutan atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen karena pengembalian belanja modal TAYL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Maluku	005.01.401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	1.478.517.023	Merupakan Akumulasi penyusutan atas Peralatan dan Mesin ini berasal dari transaksi koreksi nilai yang berkurang akibat pencatatan peralatan dan mesin secara gabungan. Selain itu, transaksi Saldo Awal terjadi karena perolehan aset tersebut tidak didapat pada tahun anggaran berjalan
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	-14.569.974	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi : - reklasifikasi keluar genset dan reklasifikasi masuk ke stationary generating set - Koreksi Pencatatan nilai berkurang gedung kantor atas temuan BPK - Koreksi perubahan nilai bertambah gedung kantor atas perjalanan dinas untuk peresmian gedung
0.0	Kepulauan Riau	005.01.672948	PENGADILAN NEGERI NATUNA	58.739.694	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan dari hibah TAYL berupa renovasi tempat ibadah permanen dari pemerintah kabupaten Natuna senilai Rp199.547.716
0.0	Jawa Timur	005.01.098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	23.038.752	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi penggabungan dua NUP gedung kantor satu lokasi dan fungsi yang sama.
0.0	Jawa Timur	005.01.098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	108.882.282	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah koreksi pencatatan merupakan tindaklanjut atas kesalahan pencatatan renovasi gedung yang membetuk nup baru seharusnya menambah nilai gedung bangunan
0.0	Sumatera Selatan	005.01.098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	360.299.319	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah untuk penggabungan 2 NUP Gedung menjadi 1 NUP BMN berupa Gedung Bangunan Kantor Permanen
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	67.286.250	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
0.0	Sumatera Selatan	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	57.362.665	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi Hibah Masuk Peralatan dan Mesin berupa tempat sampah, kursi besi/metal, meja kerja kayu, kursi kayu, lemari kayu, meja rapat, dst. (sebanyak 22 transaksi hibah masuk)
0.0	Sumatera Barat	005.01.477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	-834.146	Merupakan akumulasi penyusutuan atas koreksi aset jalur disabilitas yang membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung kantor.
0.0	Jawa Tengah	005.01.097762	PENGADILAN NEGERI PATI	30.781.092	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan nilai bertambah aset meubelair

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Tengah	005.01.097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	221.098.385	Hibah masuk dari Pemerintah Kab. Pekalongan, Koreksi Pencatatan Gedung Kantor Permanen
0.0	Jawa Timur	005.01.098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	-3.230.334	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi penggabungan dua NUP gedung kantor satu lokasi dan fungsi yang sama.
0.0	Kalimantan Barat	005.01.099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	5.449.862.286	Koreksi Pencatatan Tanah Bangunan Kantor 5.408.048.000 dan Akumulasi Penyusutan Hibah atas Bangunan dan Kendaraan bermotor
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	-707.315	Merupakan Nilai Akumulasi Penyusutan atas transaksi koreksi nilai aset berkurang berupa Gedung dan Bangunan dengan NUP 1 akibat pengembalian atas temuan BPK
0.0	Jawa Tengah	005.01.098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	427.374.547	Akumulasi penyusutan koreksi pencatatan perubahan nilai berkurang atas bangunan gedung kantor serta input saldo awal atas perolehan peralatan dan mesin
0.0	Jawa Barat	005.01.097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	-9.127.393	Merupakan koreksi nilai berkurang atas kelebihan input koreksi nilai bertambah berupa penggabungan nilai bangunan gedung instalasi sebesar 2x19.7. pada bangunan gedung kantor permanen nup 12 pada periode 223; dan koreksi nilai bertambah atas Hibah renovasi sebesar 5.. yang tercatat sebagai nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan pada periode 223 tapi belum input koreksi nilai bertambah
0.0	Riau	005.01.098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	10.501.978	Merupakan nilaipenyususstan hibah masuk berupa peralatan mesin berupa
0.0	Riau	005.01.477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	106.161.481	disebabkan karena adanya transaksi koreksi hibah yang membentuk NUP baru pada akun yang sama (Gedung Kantor), dan dapat dirincikan sebagai berikut; 1. Transaksi Penerimaan Hibah Tahun Lalu sebesar Rp355.417.000 berupa hibah renovasi Gedung dan ruang arsip, yang menghasilkan NUP baru, sehingga dikoreksi agar masuk ke NUP Gedung kantor. Transaksi ini menghasilkan nilai aset tetap koreksi non revaluasi senilai Rp52.654.369,- 2. Transakti Penerimaan Hibah Tahun Lalu sebesar Rp180.567.000,- berupa hibah Parkir, yang menghasilkan NUP baru, sehingga dikoreksi agar masuk ke NUP Gedung Kantor. Transaksi ini menghasilkan nilai aset tetap koreksi non revaluasi senilai Rp26.750.666,-. 3. Transakti Penerimaan Hibah Tahun Lalu sebesar Rp180.606.000,- berupa Pagar kantor, yang menghasilkan NUP baru, sehingga dikoreksi agar masuk ke NUP Gedung Kantor. Transaksi ini menghasilkan nilai aset tetap koreksi non revaluasi senilai Rp26.756.446,-.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Tengah	005.01.097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	-1.724.666.148	Merupakan akumulasi penyusutan reklas dari aset lainnya ke aset tetap berupa Rumdin Golongan II Tipe C yang dilakukan koreksi pencatatan yang semula hanya 5 NUP (disamakan dengan jumlah tanah) menjadi 8 NUP (sesuai dengan kondisi sebenarnya) akibat dari renovasi.
0.0	Kalimantan Timur	005.01.099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	3.881.700	merupakan akumulasi penyusutan transaksi reklas masuk Televisi yang sebelumnya berupa TV Monitor sebanyak 6 Unit
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	199.587.081	Akumulasi penyusutan atas hibah masuk dengan tahun perolehan di bawah 2024
0.0	Sumatera Utara	005.01.401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	-22.742.452	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen yang dikarenakan Pengembalian Belanja Modal Tahun Lalu yang menghasilkan Aset Tetap yang telah dilakukan jurnal manual.
0.0	Jawa Timur	005.01.098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	-3.816.180	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair 2 unit; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel cahir wheel chair
0.0	Kalimantan Barat	005.01.099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	49.017.647	Merupakan selisih akumulasi penyusutan pada saat dilakukan koreksi pencatatatn dan koreksi nilai bertambah. pada saat koreksi pencatatan akm penyusutan cuma 2.6. tp pada saat dilakukan koreksi nilai bertambah akumulasi penyusutannya 51.617.647 jd terdapat selisih akumulasi penyusutan sebesar 49,17,647 kenapa bisa beda akumulasi penyusutannya, bisa dikarenakan masa manfaat dr nup yg dikoreksi catat dan koreksi nilai tambah berbeda.
0.0	Papua Barat	005.01.400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	38.322.013	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai pekerjaan pavling block senilai Rp19..,- dan guiding block senilai Rp4.222.13,- yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor melalui koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Jawa Barat	005.01.097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	185.834.934,	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa peralatan dan mesin; serta selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai renovasi gedung yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor melalui transaksi koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Aceh	005.01.401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	33.446	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan nilai bertambah stationery generating set
0.0	Jawa Barat	005.01.097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	1.255.380	Merupakan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi Masuk Camera Conference karena kesalahan kode barang yang sebelumnya tercatat sebagai Flexible Video Camera dalam kelompok alat berat
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	8.114.100	Akumulasi penyusutan atas hibah masuk dengan tahun perolehan di bawah 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Timur	005.01.098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	2.144.748.212	1. Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah merupakan tindaklanjut koreksi penggabungan dua NUP gedung kantor dalam satu lokasi dan fungsi yang sama. 2. Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair dan batteray Charges; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel cahir wheel chair dan batteray charges.
0.0	Jawa Tengah	005.01.097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	19.812.827	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan nilai bertambah gedung garasi/pool permanen
0.0	Bali	005.01.099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	110.031.643	Merupakan Akumulasi aset penyusutan atas Koreksi Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	-36.568.470	akumulasi penyusutan koreksi pencatatan nilai bertambah biaya renovasi bangunan gedung kantor permanen dan bangunan gedung perpustakaan permanen
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	5.995.371	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi hibah masuk bangunan gedung kantor lainnya NUP 1
0.0	Sumatera Utara	005.01.098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	3.273.771	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi hibah masuk Hibah Masuk Mini Bus
0.0	Sumatera Barat	005.01.400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	-172.408.728	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas koreksi penggabungan NUP gedung kantor dimana dalam fungsi dan lokasi yang sama.
0.0	Kepulauan Riau	005.01.098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	91.753.011	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan Bangunan Gedung Kantor NUP 5 dan 6, dan koreksi nilai bertambah ke Bangunan Gedung Kantor NUP 1
0.0	Kalimantan Utara	005.01.099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	190.885.836	Merupakan nilai yang muncul disebabkan adanya kesalahan transaksi 101 pembelian berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp199.834.521 yang kemudian dilakukan transaksi 305 koreksi pencatatan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai (Rp199.834.521) dan selanjutnya dilakukan transaksi 204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp199.834.521 yang akhirnya membuat munculnya Debet senilai Rp190.885.836

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jambi	005.01.477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	448.778.745	Merupakan nilai akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan Bangunan Olah raga terbuka semi permanen dan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen
0.0	Kalimantan Timur	005.01.099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	1.033.875	Akumulasi Penyusutan terhadap Aset yang dilakukan Reklas (Aid Hearing)
0.0	Sulawesi Utara	005.01.099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	1.037.996.703	Akumulasi penyusutan koreksi pencatatan nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen. Penggabungan 8 nup bangunan gedung kantor menjadi 1 nup 1.
0.0	Jawa Timur	005.01.098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	43.588.235	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah,transaksi harusnya menambah nilai gedung tetapi membentuk nup baru.
0.0	Jawa Tengah	005.01.097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	1.944.056	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang kemudian nilainya ditambah ke Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Yogyakata	005.01.098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	-8.750.000	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai Partisi yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor Pemanen melalui Koreksi Pencatatan dan Koreksi Prubahan Nilai Bertambah
0.0	Maluku	005.01.539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	139.981.195	Merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas transaksi Koreksi Pencatatan Selasar, Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	-5.193.150.000	merupakan transaksi saldo awal berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berasal hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
0.0	Bengkulu	005.01.578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	-33.497.975	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi Koreksi Pencatatan ATS Listrik Otomatis yang membentuk NUP baru yaitu Stationary Generating Set NUP 2 yang seharusnya menambah nilai aset berupa Stationary Generating Set NUP 1

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Gorontalo	005.01.401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	36.903.568	atas koreksi perubahan nilai berkurang atas nilai peralatan mesin ekstrakomptabel yang nilainya menyatu dengan kontrak Bangunan Gedung Permanen, sudah dilakukan penginputan perolehan lainnya atas peralatan dan mesin ekstrakomptabel tersebut
0.0	Sumatera Barat	005.01.531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	1.481.352	Merupakan selisih akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah atas koreksi kesalahan pencatatan dari pengadaan jalur disabilatas yg membentuk nup baru seharusnya menambah nilai gedung kantor.
0.0	Sumatera Selatan	005.01.526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	32.870.367	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah untuk penggabungan 2 NUP Gedung menjadi 1 NUP BMN berupa Gedung Bangunan Kantor Permanen
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	368.699.715	Koreksi Pencatatan nilai berkurang terhadap bangunan gedung kantor permanen berupa peralatan mesin
0.0	Bangka Belitung	005.01.401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	-401.037	merupakan akumulasi penyusutan dari transaksi koreksi nilai berkurang berupa gedung kantor permanen ke pagar permanen dan
0.0	Riau	005.01.578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	89.569.434	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Pagar Permanen nup 2 ke nup 1
0.0	Kalimantan Timur	005.01.559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	1.106.286	Terjadi karena PTUN Samarinda ada melakukan koreksi nilai belanja barang ke penambaha nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 32.896.285,- (koreksi dilakukan karena temuan bawas). Sudah terdapat akumulasi
0.0	Jawa Timur	005.01.526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	2.652.544	1. Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah koreksi pencatatan merupakan tindaklanjut atas kesalahan pencatatan jalur disabilitas yang membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung kantor. 2. Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk wheelchair 2 unit; Tindak lanjut atas ketidaksesuaian kode barang wheel cahir wheel chair
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	-10.141.600	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Camera Conference dan Televisi
0.0	Jawa Barat	005.01.308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	-100.484.138	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas penggabungan nilai renovasi gedung berupa renovasi PTSP dan toilet sebanyak 4 NUP sebesar 96.681. yang seharusnya tidak membentuk nup baru pada Bangunan Gedung Kantor dan penggabungan nilai renovasi pos jaga yang tidak seharusnya membentuk nup baru pada Gedung Pos Jaga Permanen sebesar 23.899.965 melalui koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
0.0	Bengkulu	005.01.576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	-88.800.000	Merupakan nilai atas transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah gedung kantor dikarenakan kesalahan pencatatan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1
0.0	Kalimantan Utara	005.01.526722	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	25.171.429	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa Station Wagon;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Timur	005.01.308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	85.702.534	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah merupakan tindaklanjut koreksi penggabungan dua NUP gedung kantor dalam satu lokasi dan fungsi yang sama.
0.0	Bengkulu	005.01.400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	-1.152.178.000	Koreksi Nilai Bertambah pada Aset berupa Tanah Kosong yang Sudah Ada Peruntukannya setelah mendapatkan penilaian nilai wajar dari KPKNL
0.0	Kalimantan Utara	005.01.526720	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	42.878.929	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berupa Reklas Masuk P.C Unit, A.C Split dengan total nilai Rp17.77.5 dan Hibah Masuk Station Wagon dengan nilai Rp25.171.429 sehingga total Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp42.878.929
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	40.795.269,	Merupakan koreksi atas kesalahan catat Rumah Negara Tanpa Golongan, yang kemudian nilainya ditambahkan pada rumah negara yang sesuai.
0.0	Maluku Utara	005.01.664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	-735.698.371	koreksi nilai terseut adalah dari koreksi nilai karena ada penghapusan dan koreksi pencatatan luasan pagar permanen
0.0	Sulawesi Utara	005.01.099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	172.857.144	Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Kendaraan Dinas berupa 1 sepeda motor dan 1 unit sedan dan Hibah Masuk Berupa 1 unit Mobil Pajero
0.0	Sumatera Utara	005.01.098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	95.950.000	Merupakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas transaksi Hibah Masuk Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) TAYL
0.0	Sulawesi Tengah	005.01.400534	PENGADILAN TINGGI PALU	865.532.997	Koreksi Pencatatan nilai berkurang terhadap bangunan gedung kantor permanen berupa peralatan mesin
0.0	Kalimantan Barat	005.01.400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	63.382.103.000	Merupakan koreksi pencatatan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II karena kesalahan pencatatan aset Tanah (131111) Pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dilakukan koreksi pencatatan dari Daftar Aset Pengadilan Tinggi Pontianak dan selanjutnya melakukan Input Perolehan Barang Pihak Ketiga atas tanah tersebut. Adapun data dukung nya dapat dilihat pada link berikut. Selain itu juga merupakan hasil dari reklasifikasi kode barang beberapa NUP di PT Pontianak yang memiliki perbedaan masa manfaat saat dilakukan reklas masuk ke kode barang yang baru https://drive.google.com/drive/folders/1eZ9wMppBoXqy7JBM_7omeJYLjl20SBuL?usp=sharing
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.526730	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	65.988.750	Transaks saldo awal atas kesalahan kode wilayah pada sistem Aplikasi Sakti yang awalnya 1800 kemudian diinput di kode wilayah 1500
0.0	Sulawesi Utara	005.01.526734	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	-35.749.722	Merupakan selisih akumulasi penyusutan atas pemisahan peralatan mesin dari bangunan gedung kantor melalui transaksi koreksi nilai berkurang bangunan gedung kantor dan perolehan lainnya peralatan mesin

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jakarta	005.01.526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	2.085.336.212,	selisih akumulasi penyusutan atas koreksi nilai berkurang gedung bangunan kantor permanen berupa lift, AC central 2 unit, pompa distribusi 1 unit nilainya, pompa boaster dan sudah dilakukan penginputan saldo awal terhadap aset2 tersebut di atas.
0.0	Jawa Tengah	005.01.097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	548.613.180,	Akumulasi penyusutan atas koreksi lebih catat NUP Gedung akibat hibah renovasi PTSP yang seharusnya menambah nilai gedung utama
0.0	Sumatera Barat	005.01.098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	232.272.633,	Kesalahan Lebih Catat Gedung Bangunan Kantor NUP 11 - 12 senilai Rp 232.272.633
0.0	Sulawesi Selatan	005.01.099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	8.015.135,	Akumulasi Penyusutan atas usulan koreksi audited terhadap kesalahan penambahan daya listrik sebesar 50.557.000 yang tercatat sebagai NUP baru Bangunan Gedung Kantor Permanen, sehingga dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor NUP 1
0.0	Jawa Tengah	005.01.400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	9.385.713,	Akumulasi Penyusutan atas lebih catat NUP Gedung akibat penambahan sarana disabilitas yang seharusnya menambah nilai gedung utama
0.0	Jambi	005.01.402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	7.228.917,	Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah pencatatan Bangunan Rumah Genset yang seharusnya menambah nilai gedung kantor permanen
0.0	Bali	005.01.559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	3.633.000,	Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah kesalahan belanja pemeliharaan yg seharusnya dikapitaliasasi menggunakan akun belanja 523111
0.0	Sulawesi Tenggara	005.01.578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	32.200.419,	Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah terhadap kesalahan belanja pemeliharaan yg seharusnya dikapitaliasasi menggunakan akun belanja 523111
0.0	Kalimantan Barat	005.01.632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	227.665.139,	Jurnal Koreksi Utang Pihak Ketiga Lainnya menyesuaikan saldo per 31 Des 2024
0.0	Kalimantan Selatan	005.01.663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	(27.240.406,)	Akumulasi Penyusutan atas koreksi nilai berkurang terhadap pengadaan peralatan dan mesin senilai 190.682.840 yang masuk dalam nilai bangunan gedung kantor, sehingga akan dilakukan koreksi nilai berkurang atas bangunan gedung kantor dan input perolehan lainnya atas aset-aset peralatan dan mesin yang belum tercatat.
TOTAL				**83.227.937.027**	

391118 KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391118 - KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Jawa Timur	005.01.098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	950.000	Koreksi pencatatan lisensi berupa lisensi canva pro senilai Rp1.000.000 yang tercatat sebagai aset dengan masa kurang dari satu tahun. Seharusnya tidak tercatat sebagai aset
0.0	Jawa Barat	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	24.637.500	Merupakan akumulasi penyusutan atas hibah masuk berupa Software Komputer Aplikasi Kepaniteraan perolehan tahun 2022
0.0	Aceh	005.01.401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	- 13.858.500	Merupakan akumulasi penyusutan pemisahan pencatatan Software Komputer (Antivirus) dari Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Aceh	005.01.401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	- 13.858.500	Merupakan akumulasi penyusutan pemisahan pencatatan Software Komputer (Antivirus) dari Bangunan Gedung Kantor Permanen
0.0	Jawa Barat	005.01.402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	- 51.125.000	Merupakan Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Software Komputer karena belum terbit SK Penghapusan
0.0	Jakarta	005.01.526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	- 83.840.000	Penghentian penggunaan aset tak berwujud lainnya yang sudah tidak digunakan
0.0	Jakarta	005.01.663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	11.550.000	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software
TOTAL				**- 125.544.500**	

391151 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391151 - KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN/ASET TETAP/ASET LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
0.0	Aceh	005.01.098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	- 5.395.500	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar bangunan gedung kantor lainnya menjadi aset tetap renovasi
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	- 12.181.829	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0		005.01.307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	- 3.850.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Kalimantan Tengah	005.01.400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	- 16.361.625	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Jawa Tengah	005.01.401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	- 2.500.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Jawa Tengah	005.01.401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	- 2.500.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Jawa Tengah	005.01.401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	- 2.500.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Aceh	005.01.401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	- 4.400.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0		005.01.477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	- 24.200.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Jakarta	005.01.663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	- 17.490.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Jakarta	005.01.663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	- 38.593.750	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0		005.01.672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	- 23.015.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0		005.01.672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	- 3.392.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Badilag	005.04.663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	- 23.250.000	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
0.0	Bawas	005.07.663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	- 386.907.995	Merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi keluar software menjadi aset tak berwujud lainnya
TOTAL				- 566.537.699	

491511 PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
491511 - PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Bengkulu	005.01.308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	(258.000,)	Adanya koreksi jumlah persediaan atas kesalahan input persediaan habis pakai
3.0	Lampung	005.01.402355	PENGADILAN AGAMA METRO	(382.800,)	Merupakan koreksi perubahan kuantitas jumlah barang berupa pena tanda tangan karena kesalahan pencatatan pada modul komitmen
TOTAL				(640.800,)	

593311 BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
593311 - BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Barat	005.01.400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	1.010.070	Merupakan koreksi kuantitas berkurang karena dilakukan void BAST
3.0	Papua Barat	005.01.401899	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	7.122.978	Terdapat Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dikarenakan transaksi Koreksi Kuantitas Kurang sebab kesalahan pencatatan jumlah pada opname fisik telah dilakukan perbaikan pada tanggal 31 Oktober 2024
3.0	Lampung	005.01.402355	PENGADILAN AGAMA METRO	350.900	Merupakan koreksi perubahan harga atas barang berupa pena tanda tangan karena kesalahan pencatatan pada modul komitmen
TOTAL				**8.483.948**	

595112 BEBAN EKSTRA PERALATAN DAN MESIN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	KETERANGAN
3.0	Jakarta	005.01.097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	4.523.250	Merupakan hibah masuk dari BTN dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa ekternal port HDMI 5unitable hardisk, alat kantor lainnya 2 unit, spliter HDMI 5 unit
3.0	Jawa Barat	005.01.097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	5.685.975	Merupakan hibah masuk berupa bingkai foto, jam mekanis, dan microphone dengan harga satuan per unit dibawah nilai kapitalisasi.
3.0	Jawa Barat	005.01.097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	119.880.000	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa 200 buah vertikal blind
3.0	Jawa Barat	005.01.097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	1.600.000	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa 2 buah Kipas Angin
3.0	Jawa Barat	005.01.097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	15.442.500	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa 1 buah kipas angin dan 50 buah vertikal blind
3.0	Jawa Barat	005.01.097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	5.309.066	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa Bunga Plastik/Pohon Artificial sebanyak 17 buah
3.0	Jawa Barat	005.01.097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	8.150.000	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa 9 buah kursi besi metal dan 1 buah tripod
3.0	Jawa Barat	005.01.097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	5.000.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 10 buah Kursi Besi/Metal
3.0	Jawa Tengah	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	15.200.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 20 buah Kursi Besi/Metal
3.0	Jawa Tengah	005.01.097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	1.700.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa2 buah lighting stand tripod dan 1 buah printer
3.0	Jawa Tengah	005.01.097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	700.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa exhause fan
3.0	Jawa Tengah	005.01.097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	2.500.000	merupakan hibah dari BTN 2024 dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 4 buah microfon @500.000 dan peralatan studio audio lainnya berupa adaptor Kit Ack-E12 1 buah @500.000
3.0	Yogyakata	005.01.098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	3.600.000	Merupakan Hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa 4 buah Microphone
3.0	Jawa Timur	005.01.098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	2.048.250	Merupakan Hibah dari Pemda dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa Microfon 5 unit
3.0	Jawa Timur	005.01.098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	7.215.000	merupakan Hibah dari bank BRI berupa 10 unit kursi kayu yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Jawa Timur	005.01.098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	7.458.000	Hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 8 unit microphone wireless dari PT Indonesia Comnets Plus
3.0	Jawa Timur	005.01.098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	1.200.000	Merupakan hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa tabung pemadam api 3 buah
3.0	Jawa Timur	005.01.098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24.100.000	Merupakan hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa tabung Michropone, kabel dan rak besi.
3.0	Jawa Timur	005.01.098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	7.381.500	Hibah masuk dengan nilai perolehan dibawah kapitalisasi berupa Proyektor, kursi besi dan bracket standing
3.0	Jawa Timur	005.01.098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	2.700.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 9 buah tabung pemadam api
3.0	Sumatera Utara	005.01.098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	56.000.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 80 unit Kursi Besi / Metal
3.0	Sumatera Barat	005.01.098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	1.283.600	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa tempat sampah 2 buah dan Exhause Fan 2 buah.
3.0	Riau	005.01.098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	3.200.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa ac split,scanner, kursi besi metal, meja kerja kayu

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	KETERANGAN
3.0	Sumatera Selatan	005.01.098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	8.891.100	hibah peralatan dan mesin dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 3 buag lambang garuda dan 6 buah tiang bendera
3.0	Sumatera Selatan	005.01.098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	2.125.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 5 buah karpet
3.0	Lampung	005.01.099045	PENGADILAN NEGERI METRO	2.400.000	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa Kipas Angin 4 unit
3.0	Kalimantan Timur	005.01.099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	999.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 1 buah meja resepsionis
3.0	Kalimantan Timur	005.01.099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	4.260.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 6 buah kursi besi/metal
3.0	Gorontalo	005.01.099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	4.680.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 1 Unit Vacum Cleaner, 2 Unit Kipas Angin, dan 2 Unit pembatas stainless
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	1.100.000	Merupakan Hibah masuk peralatan mesin dengan harga satuan dibawah kapitalisasi berupa kipas angin @Rp. 450000, jam elektronik @Rp 650000
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	1.600.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa Speaker Komputer 2 unit
3.0	Sulawesi Tenggara	005.01.099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	1.700.000	Merupakan Hibah Masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 2 Unit Printer (Peralatan Personal Komputer)
3.0	Maluku	005.01.099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	11.193.000	Merupakan Hibah Masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi beberapa meubelair
3.0	Bali	005.01.099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	500.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 1 buah gordyin
3.0	Bali	005.01.099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	3.032.000	Hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 4 buah kursi besi/metal dari KPN Bangli
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	800.000	Hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa mixer dari pegawai
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	2.835.200	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa 5 buah scanner
3.0	Sumatera Utara	005.01.108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	6.000.000	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah kapitalisasi berupa 5 buah printer dan 2 buah kipas angin
3.0	Maluku Utara	005.01.307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	18.300.000	Merupakan hibah masuk dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 27 buah kursi besi/metal
3.0	Bali	005.01.307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	5.000.000	Hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 9 unit Sice dan 2 unit lemari es
3.0	Kalimantan Barat	005.01.400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	6.500.000	Merupakan hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa berupa kursi rapat 20 buah dan karpet
3.0	Jakarta	005.01.400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	6.113.750	Hibah barang dari PT Bank BTN dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 4 unit bracket standing peralatan
3.0	Jambi	005.01.400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	7.700.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa rak kayu arsip @Rp. 350.000,- sebanyak 22 buah
3.0	Sumatera Barat	005.01.400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	8.500.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa kursi besi 10 buah
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	941.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa tripod
3.0	Jawa Tengah	005.01.400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	6.500.000	Hibah masuk di bawah nilai kapitalisasi berupa 1 buah terminal alat disabilitas @900,000, 4 buah alat penghancur kertas @700,000, 4 buah kursi hadap @700,000

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	KETERANGAN
3.0	Yogyakata	005.01.401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	500.000	Merupakan Hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa Kursi Besi/Metal
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	1.500.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa sound system 2 unit
3.0	Sumatera Selatan	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	19.340.400	Merupakan hibah peralatan dan mesin untuk keperluan kantor berupa meja kerja dan kursi besi dengan harga satuan di bawah nilai kapitalisasi
3.0	Jawa Barat	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	12.922.500	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 13 buah kursi besi/metal dan 9 buah asbak tinggi
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	1.600.000	Merupakan hibah masuk berupa router dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Aceh	005.01.401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	1.921.500	Hibah masuk berupa tripod Speaker (4 buah @400rb), dan Bracket TV 1 unit senilai 321.500 di bawah nilai kapitalisasi
3.0	Sumatera Barat	005.01.402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	20.900.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa kursi besi 22 buah
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	21.300.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 43 unit Kursi Besi/Metal
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	1.600.000	Perolehan Aset dari Hibah Masuk berupa 2 buah Loudspeaker dengan nilai perunit Rp. 800.000,- di bawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Timur	005.01.402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	981.500	Merupakan hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa layar lcd proyektor
3.0	Sumatera Selatan	005.01.402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	28.200.000	Perolehan Aset dari Hibah Masuk berupa Sice 1 buah senilai Rp.500.000, Lemari Kayu 2 buah dengan nilai perbuah Rp.500.000 dan 2 buah dengan nilai perbuah Rp.700.000, Printer 3 unit dengan nilai perunit Rp.600.000, Lemari besi 6 buah dengan nilai perbuah Rp.900.000, Rak besi 1 buah senilai Rp.500.000, Bangku Panjang Kayu 9 buah dengan nilai perbuah Rp.500.000, Kasur 1 buah senilai Rp.700.000, Kursi Kayu 12 buah dengan nilai perbuah Rp.700.000 dan CCTV 16 unit dengan nilai perunit Rp.250.000
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	4.100.000	Merupakan hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa 9 unit printer
3.0	Jawa Timur	005.01.450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	3.060.000	Hibah masuk dengan nilai perolehan dibawah kapitalisasi berupa Headset, Microphone dan Audio Mixer.
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	7.100.000	Hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 10 Unit Kursi Besi/Metal dan 4 Unit Loudspeaker
3.0	Sulawesi Tenggara	005.01.578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	12.630.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 1 buah printer, 5 buah meja rapat, 1 buah meja komputer, dan 10 buah kursi fiber plastik
3.0	Bengkulu	005.01.578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	350.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah kapitalisasi berupa dispenser
3.0	Jawa Timur	005.01.626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	16.500.000	merupakan hibah dari Bank BTN Berupa kursi besi metal yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Lampung	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	1.782.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 9 buah sepatu boot
3.0	Sumatera Selatan	005.01.672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	3.593.660	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 3 buah pintu elektrik dengan akses, 1 buah kursi besi/metal, dan 8 buah CCTV
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	2.980.000	Merupakan hibah masuk dengan harga satuan dibawah nilai kapitalisasi berupa 1 buah alat pemeliharaan tanaman dan 4 buah tabung pemadam api
TOTAL				**576.408.751**	

595113 BEBAN EKSTRA GEDUNG DAN BANGUNAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595113 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Timur	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	16.980.000	Merupakan Hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi berupa kanopi 1 unit
3.0	Kalimantan Barat	005.01.099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	5.182.000	Hibah masuk dari Pemprov Kalimantan Barat berupa Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen. Nilai tersebut merupakan nilai yang tercatat pada Pemprov, belum dilakukan penyesuaian nilai bangunan. Satuan kerja akan meminta KPKNL setempat untuk melakukan penilaian kembali
3.0	Kalimantan Barat	005.01.099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	5.620.000	Hibah dari Bank BTN berupa bangunan/fasum lainnya senilai Rp. 5.620.000,- berupa tangki air
3.0	Jawa Barat	005.01.400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	8.300.000	Merupakan hibah masuk berupa bangunan terbuka lainnyadengan harga perolehan dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Jawa Barat	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	37.042.000	Merupakan hibah masuk berupa Rumah Negara Golongan I Type C Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan harga perolehan dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	24.999.920	Hibah dari PTWP PTA Palangkaraya berupa mess NUP 3 dengan harga perolehan dibawah nilai kapitalisasi
TOTAL				**98.123.920**	

596111 BEBAN PELEPASAN ASET

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Barat	005.01.097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	3.372.807	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa monografi berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor 1786/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
3.0	Banten	005.01.097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	75.695.198	Akun Beban pelepasan aset muncul dikarenakan penghapusan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1 yang masih memiliki masa manfaat, sesuai dengan SK Penghapusan no 115/SEK/SK.PL1.2.3/I/2024
3.0	Jawa Tengah	005.01.097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	1.978.251.000	Sudah terbit SK Penghapusan 8 Mei 224, terekam di tgl 26 Juni 224 di Sakti berupa Hibah Keluar Tanah seluas 354m2 kepada Pemda Kab. Kudus
3.0	Jawa Tengah	005.01.097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	50.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor 961/SEK/SK.PL1.2.3/VII/224
3.0	Jawa Timur	005.01.098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	68.810.439	Merupakan nilai buku aset yang masih memiliki sisa masa manfaat atas penghapusan BMN memiliki masa berupa meubelair sesuai SK Penghapusan Nomor 513/SEK/SK.PL1.2.3/V/224
3.0	Aceh	005.01.098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	11.744.159	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor 1813/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
3.0	Sumatera Barat	005.01.098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	6.435.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa monografi berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor 1627/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
3.0	Sumatera Selatan	005.01.098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	425.905.469	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1066/SEK/SK.PL1.2.3/VIII/2024
3.0	Kalimantan Barat	005.01.099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	119.713.848	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan Rumah Negara berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1033/SEK/SK.PL1.2.3/VII/2024
3.0	Kalimantan Barat	005.01.099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	875.000	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan Software Komputer berdasarkan SK Penghapusan Nomor 218/SEK/SK.PL1.2.3/II/224.
3.0	Kalimantan Timur	005.01.099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	238.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Foto Dokumen berjumlah 14 buah dan senilai Rp.17.000, berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1316/SEK/SK.PL.1.2.3/IX/2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Timur	005.01.099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	8.464.052	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa buku perpustakaan, dan P.C Unit berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1571/SEK/SK.PL.1.2.3/XI/2024
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	231.384.107	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor 1765-1767/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
3.0	Kepulauan Riau	005.01.108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	77.974.636	Penghapusan Bangunan Kantin pada Pengadilan Negeri Batam sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1736/SEK.PL1.2.3/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024 Total Nilai Penghapusan Sebesar Rp. 84.755.036 dan penyusutan sebesar Rp. 6.780.400
3.0	Sulawesi Barat	005.01.307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	130.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa monografi yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1092/SEK/PL1.2.3/VIII/2024
3.0	Sulawesi Tenggara	005.01.307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	30.071.260	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa kendaraan bermotor berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor511/SEK/SK.PL1.2.3/V/2024
3.0	Sulawesi Tenggara	005.01.307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	2.925.000	Merupakan Penghapusan Meubelair yang masih memiliki sisa masa manfaat sesuai dengan SK Penghapusan 977/SEK/SK.PL1.2.3/VII/2024
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	567.968.587	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara untuk dihibahkan kepada Pemprov NTB berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1265/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	400.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 959/SEK/SK.PL1.2.3/VII/2024
3.0	Jawa Barat	005.01.308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	449.900	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Televisi yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 34/SEK/PL1.2.3/III/224
3.0	Papua Barat	005.01.400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	128.699.999	Merupakan transaksi hibah keluar Aset Tetap Renovasi berupa renovasi gedung pinjam pakai yang telah diserahkan kepada Pemda
3.0	Bengkulu	005.01.400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	55.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Automatic Message Switching Center (AMSC)sesuai SK No. 573/SEK/SK.PL1.2.3/V/224 tanggal 8 Mei 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Timur	005.01.400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	987.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghpusan Nomor 793/SEK/SK.PL1.2.3/VI/224
3.0	Riau	005.01.400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	177.294.248	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa 2 rumah dinas berdasarkan SK Penghapusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 855/SEK/SK.PL1.2.3/VII/2023 tanggal 12 Juli 2024
3.0	Sumatera Utara	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	682.000	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan meubelair berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1263/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Jawa Barat	005.01.400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	11.613.436	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen berdasarkan SK Penghapusan SEKMA Nomor 1705/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
3.0	Bangka Belitung	005.01.400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	367.890.259	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Lainnya, dan Bangunan Tempat Parkir sesuai sk penghapusan No: 1205/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
3.0	Jakarta	005.01.400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	2.515.134.000	Merupakan penghapusan barang milik negara berupa pengahpusan ATR dengan SK Penghapusan Nomor 1371/SEK/SK.PL1.2.3/X/2024
3.0	Jakarta	005.01.400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	132.559.220	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara meubelair dengan SK penghapusan Nomor 1227/SEK/SK.PL 1.2.3/IX/2024 dan penghapusan ATR dengan SK Penghapusan Nomor 1369/SEK/SK 1.2.3/X/2024
3.0	Jakarta	005.01.400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	8.801.336	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa UPS dan monografi yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1247/SEK/PL1.2.3/IX/2024
3.0	Jakarta	005.01.401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	2.025.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas barang milik negara berupa meubelair dengan SK Pengahpusan Nomor 1555/SEK/PL 1.2.3/XI/2024
3.0	Jawa Timur	005.01.401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	1.109.296.836	merupakan hibah keluar gedung kantor lama NUP 1 , yang akan dihibahkan kepada pemda karena tanahnya merupakan milik pemda. Nomor sk hibah sekma 1370/SEK/SK/PL1.2.3/X/2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Timur	005.01.401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	1.996.500	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1246/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Aceh	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	290.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan mesin TIK dan Meubelair dengan nomor SK 1778/SEK/SK.PL1.2.3/II/224 tanggal 12 Februari 224
3.0	Sulawesi Utara	005.01.401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	1.050.000	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan meubelair, peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1571/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
3.0	Maluku	005.01.401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	149.803.127	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Gedung Bangunan Kantor Permanen NUP 1 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1226/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Bengkulu	005.01.401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	41.031.217	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin sesuai SK 966/SEK/SK.PL1.2.3/VII/224 tanggal 25 juli 224
3.0	Sumatera Selatan	005.01.401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	198.000.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara untuk dihibahkan kepada kepada Pemkab Oku Timur berupa tanah berdasarkan SK No. 652/SEK/SK.PL1.2.3/VI/224
3.0	Sumatera Barat	005.01.402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	127.911.286	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara untuk dihibahkan kepada Kerapatan Adat Nagari Maninjau berupa Bangunan Gedung Kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1186/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Sumatera Selatan	005.01.402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	3.383.308	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1183/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	4.634.664	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan meubeulair dengan SK No.SK Penghapusan 571/SEK/SK.PL1.2.3/V/224
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2.353.050	Transaksi penghapusan BMN berupa Focusing Screen/Layar LCD Projector NUP 2 tahun perolehan 2021 dan Pesawat Telephone NUP 11-13 tahun perolehan 2021 dengan nilai buku Rp. 2.353.050
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	2.331.000	Transaksi penghapusan BMN berupa Sketse NUP 8l tahun perolehan 2022 dengan nilai buku Rp. 2.331.000 berdasarkan SK Penghapusan No 1573/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	7.238.600	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan berupa Monografi 4 buah sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 279/SEK/SK.PL1.2.3/III/224
3.0	Jawa Barat	005.01.402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	11.613.212	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 946/SEK/SK.PL1.2.3/VII/2024
3.0	Jawa Tengah	005.01.402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	50.040	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan berupa monografi berdasarkan SK Penghapusan Nomor 548/SEK/PL1.2.3/V/224
3.0	Sulawesi Utara	005.01.402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	62.440.000	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 96/SEK/SK.PL1.2.3/I/2024
3.0	Bali	005.01.402726	PENGADILAN AGAMA BANGLI	6.631.000	Merupakan nilai buku aset yang masih memiliki sisa masa manfaat atas penghapusan BMN memiliki masa berupa meubelair sesuai SK Penghapusan Nomor NOMOR 299/SEK/SK.PL1.2.3/III/224
3.0	Jawa Tengah	005.01.402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	665.000	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan berupa peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 547/SEK/SK.PL1.2.3/V/2024
3.0	Jawa Barat	005.01.403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	253.400	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 544/SEK/SK.PL1.2.3/V/224
3.0	Jawa Tengah	005.01.403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	3.751.074.237	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang berupa tanah dan bangunan gedung kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1126/SEK/SK.PL1.2.3/VIII/224 tanggal 29 Agustus 2024
3.0	Lampung	005.01.477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	437.898.000	Merupakan penghapusan KDP berdasarkan SK Penghapusan Nomor 131/SEK/SK.PL1.2.3/VII/224 karena tidak tersedia Anggaran untuk kelanjutan pembangunan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
3.0	Jambi	005.01.477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	625.000	Ini merupakan transaksi penghapusan BMN sesuai SK Sekretaris MARI Nomor 1771/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024 nilai 625.000

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Timur	005.01.477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	615.000	Merupakan Transaksi Penghapusan BMN berupa satu unit televisi tahun perolehan 2021 karena rusak Berat sesuai SK 1800/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang masih memiliki nilai buku
3.0	Sumatera Selatan	005.01.526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	3.650.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Meubeleir dan PM TIK berdasarkan SK No. 419/SEK/SK.PL1.2/IV/224
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	20.283.200	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin dengan SK Nomor 1572/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
3.0	Papua	005.01.539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	159.231.654	Akun Beban pelepasan aset muncul dikarenakan penghapusan beberapa aset yang masih memiliki masa manfaat, sesuai dengan SK Penghapusan no 413/SEK/SK.PL1.2.3/IV/2 dan 361/SEK/SK.PL1.2.3/III/2024
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	2.704.437	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin dengan SK Nomor : 125/SEK/SK.PL1.2.3/II/224
3.0	Yogyakata	005.01.578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	253.400	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 414/SEK/SK.PL1.2.3/IV/224
3.0	Jawa Barat	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	36.990.502	Merupakan selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas penghapusan peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1318/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Lampung	005.01.614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	253.400	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) yang masih memiliki sisa manfaat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 428/SEK/SK.PL1.2/IV/224 dan
3.0	Sumatera Utara	005.01.631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	40.500.000	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa Monografi berdasarkan SK Penghapusan Nomor 646/SEK/SK.PL1.2.3/V/224
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	1.013.600	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin berdasarkan SK SEKMA Nomor : 126/SEK/SK.PL1.2.3/II/224
3.0	Sulawesi Tengah	005.01.652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	253.400	Merupakan nilai buku aset yang masih memiliki masa sisa masa manfaat atas penghapusan BMN memiliki masa berupa meubelair sesuai SK Penghapusan Nomor NOMOR 299/SEK/SK.PL1.2.3/III/224

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Sulawesi Tengah	005.01.652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	353.400	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa meubeulair berdasarkan SK Penghapusan Nomor 644/SEK/SK.PL1.2.3/V/224
3.0	Jambi	005.01.663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	220.000	Ini merupakan transaksi penghapusan BMN sesuai SK Sekretaris MARI No. 1770/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024, penghapusan monografi, nilai 110.000 x 2 = 220.000.
3.0	Lampung	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	20.941.482	Merupakan kesalahan pencatatan penghapusan atas station wagon yang SK Penghapusannya belum terbit, satuan kerja telah melakukan pembatalan penghapusan pada periode Oktober 2024
3.0	Bangka Belitung	005.01.663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	7.175.750	Merupakan penghapusan berupa peralatan mesin dan meubelair dengan nomer sk penghapusan 57/SEK/SK.PL1.2.3/I/2025 dan penghapusan berupa Aset Tetap Lainnya berupa Monografi/Buku dengan nomer SK Penghapusan 88/SEK/SK.PL1.2.3/I/2025
3.0	Bengkulu	005.01.672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	6.249.996	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas penghapusan barang milik negara berupa peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan Nomor 471/SEK/SK.PL1.2.3/IV/2024
3.0	Sulawesi Utara	005.01.682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	4.254.642	Merupakan selisih nilai perolehan dan akumulasi penyusutan penghapusan BMN berupa station wagon yang masih memiliki nilai manfaat sudah ada SK Penghapusan No. 178/SEK/SK.PL1.2.3/VIII/224 tanggal 6 Agustus 224. Sudah diinput di SAKTI.
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.04.309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	7.805.523	Penghapusan persediaan rusak/usang sesuai SK Penghapusan Nomor 1768/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
TOTAL				**13.189.918.823**	

596121 BEBAN PERSEDIAAN RUSAK USANG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596121 - BEBAN PERSEDIAAN RUSAK/USANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Yogyakarta	005.01.401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	32.000	Satuan kerja sudah melakukan pemusnahan atas persediaan berupa pita mesin ketik dan isi bolpoin spiral, saat ini dalam proses permohonan SK Penghapusan
3.0	Bengkulu	005.01.576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	346.900	Satuan kerja masih dalam proses permohonan izin pemusnahan dan belum terbit SK Penghapusan
3.0	Badilag	005.04.309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	7.805.523	Penghapusan persediaan rusak/usang sesuai SK Penghapusan Nomor 1768/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
3.0	Badilag	005.04.400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	11.450.439	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1581/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
3.0	Badilag	005.04.400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	8.460.672	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1777/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024
3.0	Badilag	005.04.400921	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	6.818.207	Penghapusan persediaan yang sudah usang berupa buku register induk dll,berdasarkan SK Nomor 1310/SEK/SK.PL1.2.3/IX/2024
3.0	Badilag	005.04.401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	6.871.638	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1333/SEK/SK.PL1.2.3/X/2024
3.0	Badilag	005.04.401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	3.777.213	Penghapusan Buku Register Perkara, Sedang proses penghapusan dan sudah diajukan ke PTA melalui E-Sadewa
3.0	Badilag	005.04.401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	6.524.386	Penghapusan persediaan yg sudah usang sesuai SK penghapusan Nomor 282/SEK/SK.PL1.2.3/III/2024
3.0	Badilag	005.04.401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	5.661.203	Satuan kerja masih dalam proses permohonan izin pemusnahan dan belum terbit SK Penghapusan
3.0	Badilag	005.04.402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	7.826.533	Penghapusan persediaan rusak/usang berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1578/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
3.0	Bawas	005.07.663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	1.928.500	Penghapusan persediaan rusak/usang sesuai SK Penghapusan Nomor 1622/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024
TOTAL				**67.503.214**	

LAPORAN PENERIMAAN HIBAH TAHUN 2024

Mahkamah Agung
Republik Indonesia

2024

Laporan Penerimaan Hibah

SEMESTER 2

UNAUDITED

HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG / UANG /JASA

MAHKAMAH AGUNG

Daftar Isi

Daftar Isi i

Pendahuluan ii

Bagian I – Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI 1

Bagian II - Hibah Langsung Dalam Negeri 22

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang – Sudah Disahkan 22

B. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang – Sudah Disahkan 25

C. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa – Sudah Disahkan 25

D. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu – Sudah Disahkan 26

Bagian III - Hibah Langsung Luar Negeri 33

Lampiran 1 – Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Berjalan 44

Lampiran 2 – Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu 75

Lampiran 3 – Hibah Langsung Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu 81

Pendahuluan

Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan menggunakan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain sumber dana tersebut, Mahkamah Agung juga menerima sumber dana dari donor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, berupa hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Menurut jenisnya hibah terdiri atas hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan uang/barang/jasa yang diterima dari donor digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

Pedoman penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penerimaan hibah diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa Dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Laporan Penerimaan Hibah Langsung **Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)** di Mahkamah Agung RI ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berbentuk hibah uang/barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama periode **Januari** hingga **Desember** Tahun **2024**. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai nilai, sumber dan asal penerimaan hibah hingga klasifikasi hibah per jenis aset yang diterima.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi

Sahwan, S.H., M.H.
19680817 198903 1 007

Bagian

I

PENERIMAAN HIBAH MAHKAMAH AGUNG RI

Penerimaan hibah Mahkamah Agung RI adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan. Penerimaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan serta mendukung pelayanan peradilan.

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau periode Semester II mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri dan luar negeri, baik yang sudah disahkan pada tahun anggaran berjalan (TAB) sejumlah Rp122.176.025.953,00 ditambah dengan hibah yang sudah disahkan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp60.546.353.945,00 sehingga nilai perolehan hibah sebesar **Rp182.722.379.898,00** (*seratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Tabel 1.1
Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Tahun Anggaran Berjalan Dalam Negeri	270	551	Rp	122.176.025.953,00
Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Dalam Negeri	65	102	Rp	35.863.708.316,00
Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Luar Negeri	1	3	Rp	24.682.645.629,00
TOTAL	**336**	**656**	**Rp**	**182.722.379.898,00**

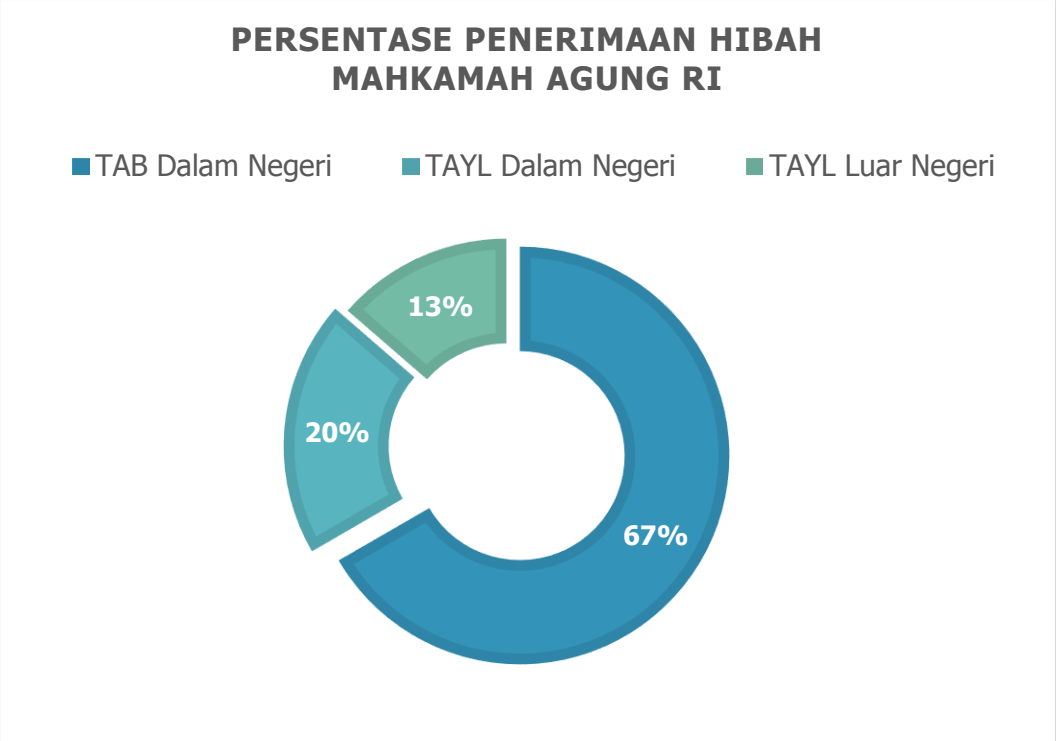

Jika dikelompokan menurut bentuknya, hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat dibagi menjadi hibah barang, hibah uang dan hibah jasa yang terdapat pada 336 satuan kerja dengan 656 dokumen hibah yang dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 1.2
Hibah Menurut Bentuknya Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Barang	305	607	Rp	140.521.969.493,00
Hibah Uang	9	9	Rp	6.212.524.000,00
Hibah Jasa	22	40	Rp	35.987.886.405,00
TOTAL	**336**	**656**	**Rp**	**182.722.379.898,00**

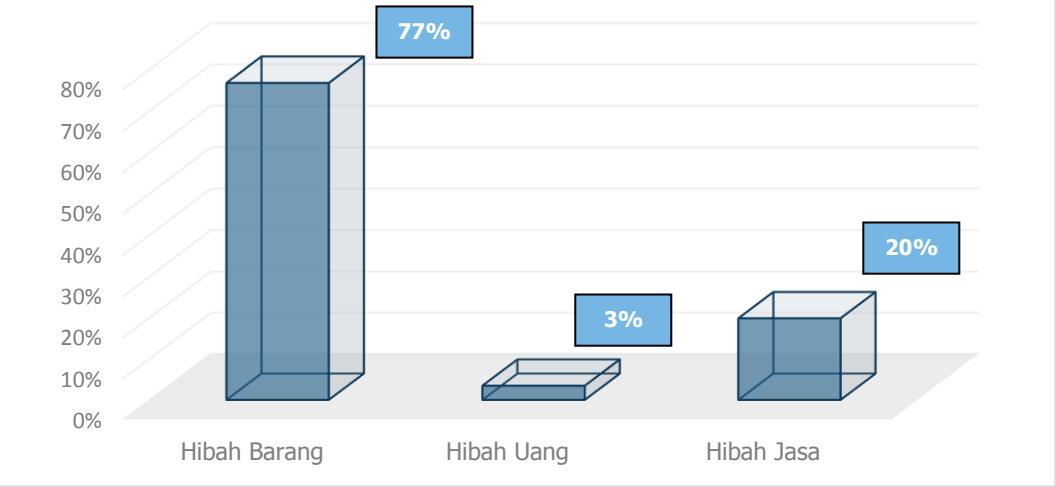

Lebih lanjut jika dikelompokan menurut sumber asal hibahnya, secara umum satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menerima hibah yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, baik berasal dari individu atau perseorangan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten), lembaga perbankan atau keuangan dan korporasi serta organisasi lainnya yang berasal dari dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hibah Menurut Sumber Asal Hibahnya Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

NO	ASAL HIBAH	DOKUMEN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH		PERSENTASE (%)
1	Individu / Perseorangan	149	Rp	4.968.814.437,00	2,72%
2	Pemerintah Daerah	157	Rp	90.314.328.278,00	49,43%
3	Organisasi Lainnya	21	Rp	4.139.764.622,00	2,27%
4	Korporasi	36	Rp	1.307.733.561,00	0,72%
5	Bank BTN	211	Rp	51.275.848.767,00	28,06%
6	Lembaga Perbankan Lainnya	79	Rp	6.033.244.604,00	3,30%
7	Organisasi Luar Negeri	3	Rp	24.682.645.629,00	13,51%
TOTAL		**656**	**Rp**	**182.722.379.898,00**	**100%**

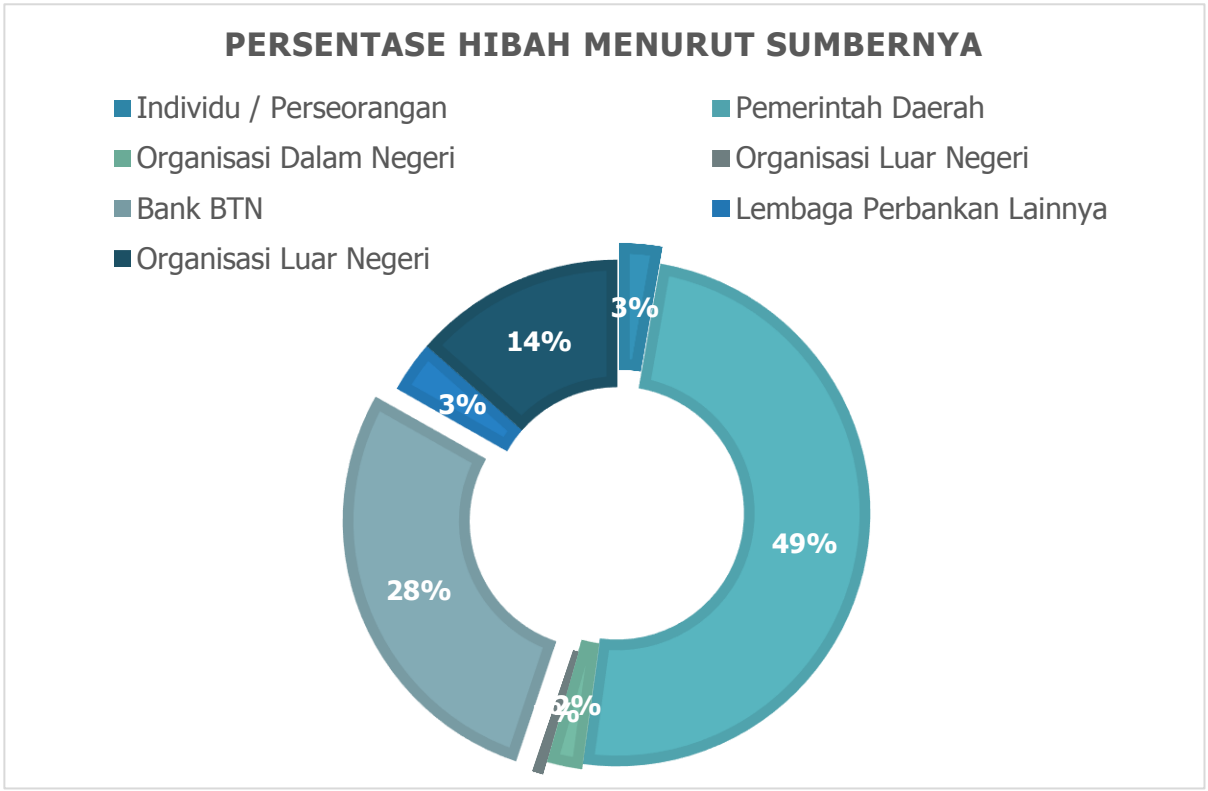

Lebih khusus jika dilihat dari persentase diatas, untuk periode Semester II Tahun 2024 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menerima hibah dari Bank BTN yang telah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat dicatatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan persentase perolehan hibah sebesar 28,06% dari total persentase keseluruhan dalam penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Selain itu, Badan Urusan Administrasi sebagai satuan kerja selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 juga mendapatkan hibah langsung barang dari Bank BTN berupa perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 70 unit dengan nilai perolehan sejumlah Rp1.875.000.000,00. Tujuan pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi layanan peradilan dalam meningkatkan kinerja layanan putusan oleh para Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Panitera dan Panitera Muda Perkara pada Mahkamah Agung RI.

Secara umum Bank BTN memberikan hibah langsung berupa barang dan jasa. Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Penerimaan Hibah dari Bank BTN Semester II Tahun 2024 (*Unaudited*)

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
1	PN SUBANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruangan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Subang	1	38.408.500	38.408.500	38.408.500	NPH.NO: 99/PKS/PWK.II/BFSU/XII/2023 Tanggal: 21 Desember 2023
2	PN SUBANG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	5	8.500.000	42.500.000	50.000.000	NPH.NO: 87/PWK.11/XI/2023 Tanggal: 30 Oktober 2023
			Televisi 55 Inch	1	7.500.000	7.500.000		
3	PN JAKARTA TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	53.974.305	53.974.305	326.998.235	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/XII/2023 & 12963/SEK.W10-U5/PL1.2.4/12/2023 Tanggal: 19 Desember 2023
		PERALATAN DAN MESIN	Printer	10	4.409.087	44.090.870		
			Scanner	5	6.382.500	31.912.500		
			PC AIO HP	2	12.806.625	25.613.250		
			TV Monitor	1	23.088.000	23.088.000		
			AC Split	12	10.048.497	120.581.964		
			AC Standing	1	27.737.346	27.737.346		
4	PN JAKARTA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Metal Detector Walkthrough	1	34.200.000	34.200.000	956.468.000	NPH.NO: 9269/SEK.PN/W10.U5/PL1.2.4/XII/2023 & 6998/NPH/KGS/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023
			Hand Metal Detector	13	1.025.000	13.325.000		
			Access Control	18	5.935.000	106.830.000		
			Swing Gate	2	89.530.000	179.060.000		
			Xray Pemindai Bagasi	1	324.000.000	324.000.000		
			Barrier Gate In & Out	2	62.280.000	124.560.000		
			Inpection Mirror Convex	4	875.000	3.500.000		
			Bardi Smart IP Camera CCTV Indoor	1	674.750	674.750		
			Rak Besi Custom Galvanis	6	13.986.000	83.916.000		
			PPN		86.402.250	86.402.250		
5	PT BANDUNG	PERALATAN DAN MESIN	AC Standing Floor	1	18.348.300	18.348.300	58.745.390	NPH.NO: 005/BAST/Krw.II/BFSU/IX/23 & W11.U/5183/PL.09/09/2023 Tanggal: 5 September 2023
			AC Split 0,5 PK	2	2.489.175	4.978.350		
			Televisi 55 Inch	1	10.240.250	10.240.250		
			Televisi 65 Inch	1	16.717.515	16.717.515		
			Jam Dinding Ruang VIP	1	649.350	649.350		
			Jam Dinding Loby	1	541.125	541.125		
			Panggung	1	5.272.500	5.272.500		
			Pigura	4	499.500	1.998.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
6	PT BANDUNG	JASA	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik Ruang Ketua	1	16.256.713	16.256.713	16.256.713	NPH.NO: 003/BAST/Krw.II/BFSU/IX/2023 & W11.U/5181/PL.09/09/2023 Tanggal: 5 September 2023
7	PN TANGERANG	JASA	Pembayaran Jasa Sewa Dedicated Cloud Server	9	33.300.000	299.700.000	299.700.000	NPH.NO: 13/TGR.I/PKS/FSU/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
8	PN TANGERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Tangerang	27 / 12	6.066.667	1.965.600.000	1.965.600.000	NPH.NO: 3/TGR.I/PKS/FSU/I/2024 Tanggal: 2 Januari 2024
9	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Lisensi	9	77.700.000	699.300.000	1.698.300.000	NPH.NO: 12/TGR.I/PKS/FSU/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
			Lisensi	9	77.700.000	699.300.000		
			Hub	9	2.220.000	19.980.000		
			Microphone	90	3.108.000	279.720.000		
10	PN YOGYAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Laptop	25	7.944.300	198.607.500	233.948.400	NPH.NO: 39/HIBAH/YYK.II/II/2024 & 65/SEK.PN.W13-U1/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024
			Scanner	3	6.480.300	19.440.900		
			AC Split 2 PK	2	7.950.000	15.900.000		
11	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang Cakra pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta	1	45.700.000	45.700.000	45.700.000	NPH.NO: 24/PWK.II/III/2024 Tanggal: 27 Desember 2023
12	PN MATARAM	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	3	8.000.000	24.000.000	29.950.000	NPH.NO: 519/SEK.PN.W25-U1/PL1.2.4/II/2024 & 0882/S/MTR.II/FSU/IV/2024 Tanggal: 15 Februari 2024
			Printer	2	2.975.000	5.950.000		
13	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	3	9.379.500	28.138.500	53.920.860	NPH.NO: 1020/SEK.PN.W13-U3/PL1.2.4/IV/2024 & 67/BAST/YYK/IV/2024 Tanggal: 16 April 2024
			AC Split 1 PK	2	5.821.950	11.643.900		
			Air Curtain	1	4.717.500	4.717.500		
			UPS	1	5.930.960	5.930.960		
			Mesin Absensi	1	3.490.000	3.490.000		
14	PT JAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Ruang PTSP Mandiri	1	182.540.016	182.540.016	599.983.266	NPH.NO: 947/NPH/KGS/II/2024 & 954/KPT.W10-U/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 19 Februari 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Televisi	1	120.990.000	120.990.000		
			Camera Digital	5	7.992.000	39.960.000		
			Televisi	4	6.549.000	26.196.000		
			Camera Digital	1	1.443.000	1.443.000		
			Mixer Sound System	1	27.750.000	27.750.000		
			Microphone/Wireless Mic	18	4.995.000	89.910.000		
			External Portable Harddisk	1	999.000	999.000		
			Monitor	2	1.887.000	3.774.000		
			PC Unit	2	16.650.000	33.300.000		
			Alat Kantor Lainnya	1	1.332.000	1.332.000		
			Splitter HDMI	5	416.250	2.081.250		
			Alat Kantor Lainnya	2	721.500	1.443.000		
			Mixer Sound System	1	8.880.000	8.880.000		
			Modulation Monitor Speaker Kaba	2	29.692.500	59.385.000		
15	PN BOGOR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	155.000.000	155.000.000	180.000.000	NPH.NO: 369/S/BGR.UT/FSU.BFS/X/2023 & 2651/SEK.PN.W11.U2/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 27 Oktober 2023
		PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	2	6.000.000	12.000.000		
			Kursi	5	500.000	2.500.000		
			Kursi	5	1.600.000	8.000.000		
			Kursi	5	500.000	2.500.000		
16	PN SERANG	PERALATAN DAN MESIN	Printer Brother T240W	1	20.000.000	20.000.000	140.294.000	NPH.NO: 165/Clg.II/IV/2024 & 1349/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/IV/2024
			Rak Besi	15	2.100.000	31.500.000		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000	30.000.000		
			Sound System JBL	1	16.650.000	16.650.000		
			Gordyn / Kray	8	4.620.000	36.960.000		
			Gordyn / Kray	2	2.592.000	5.184.000		
17	PN INDRAMAYU	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	1	9.976.000	9.976.000	66.000.000	NPH.NO: 75/CRB/FSU/III/2024 & W11.U12/621/PL.01/3/2024 Tanggal: 18 Maret 2024
			Printer	3	4.389.000	13.167.000		
			Mesin Parkir Otomatis	1	10.178.000	10.178.000		
			Rak Besi	1	5.850.000	5.850.000		
			Loudspeaker	2	2.600.000	5.200.000		
			Audio Mixing Console	1	2.600.000	2.600.000		
			Microphone / Wireless Mic	2	2.493.000	4.986.000		
			Televisi	1	6.543.000	6.543.000		
			Microphone Table Stand	2	3.750.000	7.500.000		
18	PN SLEMAN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	2	7.300.000	14.600.000	46.775.000	NPH.NO: 22/HIBAH/YYK.II/II/2024 & 509/SEK.PN.W13-U2/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 5 Februari 2024
			Access Gate Parking	1	32.175.000	32.175.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
19	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Polytron 2 PK	2	5.702.000	11.404.000	16.500.000	NPH.NO: 83/PKS/BWI.III/FSU/XII/2023 & 3321/SEK.W14-U16/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 28 Desember 2023
			Printer Epson L121	2	1.573.000	3.146.000		
			APAR Powder ABC 6 Kg	3	650.000	1.950.000		
20	PN CIBADAK	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	1	13.492.717	13.492.717	148.881.525	NPH.NO: 74/NPH/SMI.III/FSU.CF/IV/2024 & 1195/SEK.W11.U18/PL.01.IV/2024 Tanggal: 19 April 2024
			Televisi	2	16.737.609	33.475.218		
			Televisi	1	14.957.718	14.957.718		
			Televisi	1	7.257.718	7.257.718		
			AC Split 2 PK	6	7.613.786	45.682.716		
			Printer	5	3.821.544	19.107.720		
			Scanner	2	7.453.859	14.907.718		
21	PN KOTOBARU	PERALATAN DAN MESIN	Meja Rapat	1	19.500.000	19.500.000	35.000.000	NPH.NO: 64/PKS/PDG.II/V/2024 & 464/SEK.PN.W3-U13/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 7 Mei 2024
			Kursi Rapat	10	850.000	8.500.000		
			Televisi 43 Inch	1	3.000.000	3.000.000		
			AC Split 1 PK	1	4.000.000	4.000.000		
22	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	37	21.000.000	777.000.000	1.700.000.000	NPH.NO: 74/TGR.I/PKS/FSU/II/2024 Tanggal: 7 Februari 2024
			PC Unit	12	26.400.000	316.800.000		
			Printer	15	3.600.000	54.000.000		
			Printer	9	5.800.000	52.200.000		
			AC Split	10	50.000.000	500.000.000		
23	PN RANGKAS BITUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Rangkas Bitung	3 / 13	3.500.000	136.500.000	136.500.000	NPH.NO: 50/PKS/CLG.II/FSU/III/2024 & 328/W29.U3/SEK.03/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 1 Maret 2024
24	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pengaspalan Area Parkir Pengadilan Negeri Sumedang	1	113.408.202	113.408.202	113.408.202	NPH.NO: 2462/BDT/BFSU/XI/23 & 1872.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 10 November 2023
25	PN SUNGGUMINASA	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Fujitsu Fi-8150	2	20.202.000	40.404.000	40.404.000	NPH.NO: 420/PKS/PNK/FSU/XII/2023 & 2892/PAN.W22-U3/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 4 Desember 2023
26	PN TENGGARONG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 1 PK	9	4.204.500	37.840.500	37.840.500	NPH.NO: 14/BAST/SMR/FSU/IV/2024 & 1332/SEK.PN.W18-U3/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 22 April 2024
27	PN BANJARMASIN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Daikin 2 PK	2	8.450.000	16.900.000	16.900.000	NPH.NO: 711.b/SEK.PN.W15.U1/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 3 April 2024
28	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 0,5 PK	1	3.000.000	3.000.000	46.800.000	NPH.NO: 550/SEK/W11.U7/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 3 April 2024
			AC Split 0,5 PK	2	6.800.000	13.600.000		
			Layar Proyektor Otomatis	1	1.700.000	1.700.000		
			Filling Cabinet	2	2.600.000	5.200.000		
			Meja Kerja	1	1.500.000	1.500.000		
			Kursi Zeis Putar	6	1.300.000	7.800.000		
			Meja Rapat	1	6.500.000	6.500.000		
			Bangku Panjang Besi / Metal	3	2.500.000	7.500.000		
29	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Bangunan Berupa Backdrop Ruang Sidang Garuda dan Ruang Sidang Anak	1	47.311.000	47.311.000	47.311.000	NPH.NO: 549/SEK/W11.U7/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 22 April 2024
30	PN BOYOLALI	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Gree 2 PK	5	6.000.000	30.000.000	140.000.000	NPH.NO: 16.A/PKS/SLO.II/FSU/IV/2024 & 781/SEK.PN.W12U17/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 2 April 2024
			Printer Epson L3250	3	3.000.000	9.000.000		
			Scanner Fujitsu 1130	1	8.000.000	8.000.000		
			Paper Shrader	1	2.500.000	2.500.000		
			Rak Besi Informa	6	2.400.000	14.400.000		
			PC Lenovo AIO IC3 22IAP7	2	10.000.000	20.000.000		
			Meja Kayu Informa	4	2.000.000	8.000.000		
			Kursi Besi Informa	6	1.600.000	9.600.000		
			LED TV Samsung 50 Inch	1	6.000.000	6.000.000		
			Audio Mixing Console FirstClass	1	2.600.000	2.600.000		
			Loudspeaker Pasif FirstClass Pro	2	1.900.000	3.800.000		
			Microphone Mic Kondensor U87	4	500.000	2.000.000		
			Router Asus RT-AX53U	1	1.700.000	1.700.000		
			Router RB 1100 AHX-4	1	4.900.000	4.900.000		
			Camera Conference Logitech 950	1	7.000.000	7.000.000		
			Vertical Blind Jendela	26	200.000	5.200.000		
			Lensa Camera Canon	1	4.800.000	4.800.000		
			Peralatan Studio Lainnya Adapter DC Coupler	1	500.000	500.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
31	PN BALIKPAPAN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Manager	1	2.400.000	2.400.000	43.452.900	NPH.NO: 74/NPH-BTN/BLP.III/FSU/V/2024 & 207/SEK.PN/W18-U2/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 2 Mei 2024
			Kursi Staf	21	1.050.000	22.050.000		
			Kursi Staf	8	1.750.000	14.000.000		
			Printer Canon G2020	2	2.501.450	5.002.900		
32	PN MALANG	PERALATAN DAN MESIN	Brother Scanner ADS 1700W	2	6.060.000	12.120.000	60.693.000	NPH.NO: 57/PKS/MLG.II/FSU/IV/2024 & 1270/SEK.PN.W14-U2/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 5 April 2024
			Brother Desktop Docuiment Scanner ADS-3300W	1	8.950.000	8.950.000		
			Synology Diskstation DS423+	1	22.475.000	22.475.000		
			PC AIO Acer C22-1700 i3-1215U	1	8.150.000	8.150.000		
			Printer Canon Pizma G4010	2	4.499.000	8.998.000		
33	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sekretaris pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Depok	1	213.229.178	213.229.178	213.229.178	NPH.NO: W11.U21/1832a/NPH.BTN/III/2023 & 388, 769/M/JKK.1/FSU/III/2023 Tanggal: 29 Maret 2023
34	PN KARAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Karawang	1	1.718.000.000	1.718.000.000	2.043.000.000	NPH.NO: 2272/S/Krw.I/BFSU/VI/2024 & 1154/SEK.W11-U10/PL1.1.3/VI/2024 Tanggal: 5 Juni 2024
35		JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Karawang	10 / 13	2.500.000	325.000.000		
36	PN BANJARBARU	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pemasangan Atap Plavon PVC	1	60.213.745	60.213.745	60.213.745	NPH.NO: 516/PAN.W15.U12/PL1.2.4/II/2024 & 39/PKS/BJB/BFSU/II/2024 Tanggal: 29 Februari 2024
37	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PERALATAN DAN MESIN	Tablet PC Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 512 GB / 12 GB RAM	10	28.500.000	285.000.000	1.875.000.000	NPH.NO: 10/NPH/LIFD/IV/2024 & 591/BUA.3/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 23 April 2024
			Tablet PC Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 256 GB / 12 GB RAM	60	26.500.000	1.590.000.000		
38	PN SAMARINDA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split	1	6.305.000	6.305.000	33.378.100	NPH.NO: 187/BAST/SMR/FSU/VI/2024 & 194/SEK.PN.W18-U1/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 4 Juni 2024
			Visitor Chair	13	1.259.000	16.367.000		
			Director Chair	2	5.353.050	10.706.100		
39	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Box Arsip File Perkara pada Pengadilan Negeri Denpasar	500	55.000	27.500.000	27.500.000	NPH.NO: 05/NPH/DPS.II/FSU/III/2024 & 588a/KPN.W.24-U1/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 6 Maret 2024
40	PN PURWODADI	PERALATAN DAN MESIN	Televisi LED Samsung 32 Inch	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	NPH.NO: 010/NPH/KDS.III/FSU/II/2024 & 341/SEK.PN.W12-U16/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 26 Februari 2024
41	PN SEMARANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Semarang	18 / 12	1.887.731	407.750.000	407.750.000	NPH.NO: 09/NPH/SMG/BFSU/II/2024 & 82/SEK-W12.U1/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 28 Februari 2024
42	PN SEMARANG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	1	11.709.000	11.709.000	860.450.710	NPH.NO: 23/NPH/SMG/BFSU/VI/2024 & 275/SEK.W12-U1/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 3 Juni 2024
			AC Standing 5 PK	1	37.482.750	37.482.750		
			AC Standing 5 PK	1	37.905.750	37.905.750		
			AC Split 2 PK	2	11.533.830	23.067.660		
			AC Split 2 PK	1	11.398.500	11.398.500		
			AC Split 2 PK	1	12.564.000	12.564.000		
			AC Standing 5 PK	1	36.929.250	36.929.250		
			AC Split 2 PK	1	10.718.550	10.718.550		
			AC Split 2 PK	1	12.564.000	12.564.000		
			Server	1	350.125.000	350.125.000		
			Kamera Digital	1	22.145.000	22.145.000		
			Laptop	2	15.700.000	31.400.000		
			Printer	4	3.200.000	12.800.000		
			Layar LED 55 Inch	2	10.665.000	21.330.000		
			Videotron	1	102.108.750	102.108.750		
			Mic Table Stand	60	1.129.500	67.770.000		
			Layar LED 70 Inch	1	15.232.500	15.232.500		
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Tram Jalan Perbaikan AC dan Railing Ruang Tunggu	25	1.728.000	43.200.000		
43	PN KARANGANYAR	PERALATAN DAN MESIN	Printer Canon G3010	2	2.450.000	4.900.000	8.200.000	NPH.NO: 18B/PKS/SLO.II/FSU/IV/2024 & 100.A/SEK.PN.W12-U31/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 16 April 2024
			Exhaust Fan Panasonic	2	1.300.000	2.600.000		
			Exhaust Fan Imatsu	1	700.000	700.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
44	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Bagian Umum dan Kantin pada Pengadilan Tinggi Bandung	1	190.537.000	190.537.000	190.537.000	NPH.NO: 236/NPH/CKR/FSU/I/2024 & 1702/SEK.W11-U/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 4 Januari 2024
45	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	1	81.000.000	81.000.000	81.000.000	NPH.NO: 207/NPHD/CKR.I/FSU/III/2024 & 816/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 26 Maret 2024
46	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Lenovo AIO V530-22ICB	10	9.000.000	90.000.000	90.000.000	NPH.NO: 161/NPH/CKR/FSU/I/2024 & 286/SEK.W11-U23/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
47	PN CIKARANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cikarang	20 / 12	2.845.837	683.000.995	683.000.995	NPH.NO: 02/PKS/CKR/FSU/I/2024 & 169/SEK.PN.W11-U23/KS.OO/I/2024 Tanggal: 8 Januari 2024
48	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Panasonic 2 PK	1	11.721.600	11.721.600	30.060.220	NPH.NO: 1484/SEK.PN.W13-U3/PL1.2.4/VI/2024 & 113/BAST/YYK/VI/2024 Tanggal: 26 Juni 2024
			AC Split Panasonic 1 PK	1	8.260.620	8.260.620		
			Televisi LED Coocaa 50 Inch	2	5.039.000	10.078.000		
49	PN SINGARAJA	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi/Metal	10	1.300.000	13.000.000	20.000.000	NPH.NO: 01/NPH/SGR.III/FSU/VI/2024 & 1703/SEK.PN.W24-U2/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024
			AC Split 2 PK	1	7.000.000	7.000.000		
50	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	CCTV	1	18.000.000	18.000.000	397.800.000	NPH.NO: 483/W29.U3/SEK.03/PL1.2.4/V/2024 & 103/CLG.II/V/2024 Tanggal: 3 Mei 2024
			Vertical Blind	6	12.000.000	72.000.000		
			Acces Control System	4	2.000.000	8.000.000		
			Tempat Sampah	6	1.500.000	9.000.000		
			Dispenser	2	2.500.000	5.000.000		
			Mic Conference	1	2.000.000	2.000.000		
			Microphone/Wireless Mic	2	4.500.000	9.000.000		
			Amplifier	1	2.000.000	2.000.000		
			Loadspeaker	4	1.500.000	6.000.000		
			Audio Mixing Console	2	5.000.000	10.000.000		
			Gimbal Tripod	1	4.000.000	4.000.000		
			Camera Digital	1	28.000.000	28.000.000		
			Bracket Standing Peralatan	1	2.500.000	2.500.000		
			Camera Conference	1	10.000.000	10.000.000		
			Televisi 70 inch (SmartTV)	1	20.000.000	20.000.000		
			Televisi 50 inch (SmartTV)	8	7.000.000	56.000.000		
			AC SpIit1 PK	3	5.700.000	17.100.000		
			AC SpIit1.5 PK	4	7.500.000	30.000.000		
			Video Monitor (Videotron)	1	47.000.000	47.000.000		
			Kabel Extention USB 3.0 20Meter	2	1.100.000	2.200.000		
			Spliter HDMI 4 Port	3	1.500.000	4.500.000		
			Kabel HDMI 10 Meter	4	1.000.000	4.000.000		
			Kabel HDMI 20 Meter	4	1.200.000	4.800.000		
			Rak Server	1	5.000.000	5.000.000		
			Router Dual Mode	1	3.500.000	3.500.000		
			Switch Gigabit 16 Port 100 Mbps	2	1.500.000	3.000.000		
			Switch Gigabit 16 Port 100 Mbps	2	2.500.000	5.000.000		
			Kabel UTP LAN	2	3.500.000	7.000.000		
			External Portable Harddisk 4TB	1	3.200.000	3.200.000		
51	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	4	5.750.000	23.000.000	50.000.000	NPH.NO: 013/NPH/KDS.III/FSU/IV/2024 & 161/SEK/UM.06.1/4/2024 Tanggal: 5 April 2024
			PC Unit	2	9.500.000	19.000.000		
			Printer	2	4.000.000	8.000.000		
52	PN BATANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Batang	5 / 8	1.500.000	60.000.000	60.000.000	NPH.NO: 277/PKS/PKL.II/BFSU/XII/2023 & 2500/SEK.W.2.U33/UM.03/12/2023 Tanggal: 29 Desember 2023
53	PN CILACAP	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 1 PK	3	5.000.000	15.000.000	145.600.000	NPH.NO: 028/PKS/PWK/FSU/VII/2024 & 1112/SEK.PN.W12-U7/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024
			PC Unit	2	14.000.000	28.000.000		
			Laptop	2	11.725.000	23.450.000		
			Televisi	1	8.000.000	8.000.000		
			PC Unit Standing	1	7.500.000	7.500.000		
			Printer	12	2.400.000	28.800.000		
			Rak Besi	5	1.350.000	6.750.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
			Vacuum Cleaner	1	4.100.000	4.100.000		
			Scanner	2	7.500.000	15.000.000		
			Vertical Blind	3	3.000.000	9.000.000		
54	PN SERANG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Czur ET25	3	20.000.000	60.000.000	347.457.150	NPH.NO: 134/Clg.II/VII/2024 & 2406/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 17 Juli 2024
			PC Unit Asus	8	18.700.000	149.600.000		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000	30.000.000		
			Wallpaper Ruang Wakil Ketua	1	41.770.950	41.770.950		
			Backdrop Ruang Wakil Ketua	1	47.627.200	47.627.200		
			Focussing Screen/Layar Projector	1	12.687.000	12.687.000		
			Projector Spider Bracket	1	5.772.000	5.772.000		
55	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson DS-410	1	5.600.000	5.600.000	38.010.000	NPH.NO: 06/NPH/DPS.II/FSU/VII/2024 & 8946/KPN.W24-U1/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 15 Juli 2024
			AC Standing 4 PK	1	32.410.000	32.410.000		
56	PN MAGELANG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Gree 1 PK	7	4.552.600	31.868.200	68.564.900	NPH.NO: 015/PKS/Hibah/MGL.III/FSU/VII/2024 & 87/SEK.PN.W12.U6/HIBAH.01/VII/2024 Tanggal: 1 Juli 2024
			AC Split Gree 1,5 PK	1	6.826.500	6.826.500		
			AC Split Gree 2 PK	3	8.073.400	24.220.200		
			Projector Epson EBX 06	1	5.650.000	5.650.000		
57	PN SUNGGUMINASA	JASA	Jasa Rehabilitasi Ruang PTSP Pengadilan Negeri Sungguminasa	1	22.022.000	22.022.000	22.022.000	NPH.NO: 66/PKS/PNK/FSU/III/2024 & 764/PAN.W22-U3/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 6 Maret 2024
58	PN MEDAN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Hadap	10	1.500.000	15.000.000	92.000.000	NPH.NO: 07/MDN/HBH/FSU/III/2024 & 4650/SEK.PN.W2.U1/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 26 Maret 2024
			Kursi Susun	80	700.000	56.000.000		
			Kursi Direktur Hakim	10	1.500.000	15.000.000		
			Kursi Direktur	2	3.000.000	6.000.000		
59	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	1	11.500.000	11.500.000	17.750.000	NPH.NO: 83/PKS/PKL.II/FSU/V/2024 & 524.SEK.PN.W12-U21/PL1.2.5/V/2024 Tanggal: 27 Mei 2024
			Televisi	1	3.150.000	3.150.000		
			Portable Air Conditioner	1	3.100.000	3.100.000		
60	PN BATANG	PERALATAN DAN MESIN	Mesin Absensi	1	2.150.000	2.150.000	50.000.000	NPH.NO: 70/PKS/PKL.II/FSU/IV/2024 & 862/SEK.W12.U33/UM.03/5/2024 Tanggal: 22 April 2024
			Kursi Besi	20	760.000	15.200.000		
			Printer	4	4.750.000	19.000.000		
			AC Split 1 PK	3	4.550.000	13.650.000		
61	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Rak Arsip	10	6.500.000	65.000.000	65.000.000	NPH.NO: 583/NPH/CKR.I/FSU/VI/2024 & 1483/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024
62	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang VIP Pengadilan Tinggi Bandung	1	324.809.994	324.809.994	324.809.994	NPH.NO: 489/NPH/CKR.I/FSU/VI/2024 & 4090/SEK.W11-U/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 19 Juni 2024
63	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	1	19.402.000	19.402.000	19.402.000	NPH.NO: NPH.NO: 547/NPH/CKR.I/FSU/VI/2024 & 1422/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 12 Juni 2024
64	PN BALE BANDUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Bale Bandung	2 / 10	7.455.500	149.110.000	149.110.000	NPH.NO: 001.A/CMH/BFSU/V/2024 & 4438/SEK.PN.W11.U6/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024
65	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pengaspalan Area Parkir Pengadilan Tinggi Bandung	1	249.686.000	249.686.000	249.686.000	NPH.NO: 38/NPH/BKS.I/FSU/V/2023 & 3883/SEK.W11-U/PL1.2.4/V/2023 Tanggal: 22 Mei 2023
66	PN SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	PC HP M01-F2019d	7	9.500.000	66.500.000	143.190.000	NPH.NO: 10A/BAST/SDA/FSU/IV/2024 &W14.U8/995A/KU-05/IV/2024 Tanggal: 22 April 2024
			Televisi 50 inch (SmartTV)	2	6.000.000	12.000.000		
			Printer Epson L3251	5	4.500.000	22.500.000		
			Scanner Fujitsu IX1400 Duplex	2	9.500.000	19.000.000		
			AC Split Daikin 1 PK	1	9.000.000	9.000.000		
			PPN (Pajak Pertambanan Nilai)	11	14.190.000	14.190.000		
67	PN MENGGALA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	4	5.830.000	23.320.000	230.558.020	NPH.NO: 98/BAST/BDL/FSU/V/2024 & 1016/SEK.PN.W9-U6/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 15 Mei 2024
			Kursi Kerja Executive Chairman	4	4.950.000	19.800.000		
			PC AIO Asus A3202 i5-1235U	8	7.929.350	63.434.800		
			Samsung Galaxy Tab S9 FE	2	7.895.800	15.791.600		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
			Televisi LED Samsung 50 Inch	2	7.920.000	15.840.000		
			Kursi Tunggu Besi PTSP Frontliner	7	1.325.500	9.278.500		
			Printer Canon G1010	10	1.434.400	14.344.000		
			Televisi LED Samsung 43 Inch	3	3.960.000	11.880.000		
			AC Split Sharp 1 PK	9	3.960.000	35.640.000		
			Lemari Arsip Kaca Sliding	2	1.991.000	3.982.000		
			UPS APC Eay UPS BVX 1200VA 650	8	1.933.140	15.465.120		
			Sepatu Lapangan AP Boots	9	198.000	1.782.000		
68	PN BALE BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung	1	886.904.937	886.904.937	1.153.318.257	NPH.NO: 001/CMH/BFSU/V/2024 & 4437/SEK.PN.W11.U6/PL1.2.4/V/ 2024 Tanggal: 13 Mei 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Video Wall	1	216.561.000	216.561.000		
			Tripode Camera	1	5.174.820	5.174.820		
			Camera Digital	1	18.592.500	18.592.500		
			Drone	1	26.085.000	26.085.000		
69	PN PENAJAM	PERALATAN DAN MESIN	Televisi Samsung 50 Inch	4	7.550.000	30.200.000	96.638.000	NPH.NO: 128/NPH-BTN/BLP.III/FSU/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
			Televisi Samsung 43 Inch	1	5.550.000	5.550.000		
			Microfon Hardwell	1	8.050.000	8.050.000		
			Amplifier Ashley	1	2.700.000	2.700.000		
			Projector Epson EB-X500	1	8.199.000	8.199.000		
			Drone DJI Mini 2 SE	1	5.939.000	5.939.000		
			Speaker Standing Alpha Seven CS	1	6.350.000	6.350.000		
			Speaker Dinding ZS-1030B	4	1.750.000	7.000.000		
			Handy Talkie Baofeng	1	3.960.000	3.960.000		
			Harddisk CCTV	1	1.890.000	1.890.000		
			Lemari Besi Dry Box	1	3.150.000	3.150.000		
			Standing Microfon Betavo	2	1.200.000	2.400.000		
			USB Cabble 3.0 20 Meter	2	1.250.000	2.500.000		
			Ranjang Pasien	1	2.450.000	2.450.000		
			Layar Proyektor Otomatis	1	6.300.000	6.300.000		
70	PN BATANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Batang	5 / 1	1.500.000	7.500.000	7.500.000	NPH.NO: 116/PKS/PKL.III/BFSU/VI/2023 & W12-U33/1371/KU.01/7/2023 Tanggal: 27 Juni 2023
71	PN BANDUNG	PERALATAN DAN MESIN	Printer	14	3.075.148	43.052.072	577.877.225	NPH.NO: 331/SEK.W11-U1/PL1.2.4/I/2024 & 06/S/BDG/FSU/I/2024 Tanggal: 12 Januari 2024
			PC Unit	5	14.636.859	73.184.295		
			Scanner	6	6.122.148	36.732.888		
			AC Split	10	7.612.613	76.126.130		
			AC Split	4	9.459.460	37.837.840		
			Monitor	1	162.837.000	162.837.000		
			Lemari Kayu	6	4.000.000	24.000.000		
			UPS	1	39.006.000	39.006.000		
			Hard Disk	1	7.821.000	7.821.000		
			Camera Digital	1	15.000.000	15.000.000		
			Sice	1	28.000.000	28.000.000		
			Meja Kerja Kayu	2	2.250.000	4.500.000		
			Kursi Fiber	6	1.630.000	9.780.000		
			Lemari Besi / Metal	2	3.500.000	7.000.000		
			Televisi	1	13.000.000	13.000.000		
72	PN KAB. KEDIRI	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Ricoh Scansnap IX1600	3	10.200.000	30.600.000	39.800.000	NPH.NO: 773/BAST/KDI.II/BFSU/III/2024 & 164/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 27 Msret 2024
			Speaker JBL Partybox 310	1	9.200.000	9.200.000		
73	PN MAKASSAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP PN Makassar	1	250.109.000	250.109.000	250.109.000	NPH.NO: 010/BAST/MKS/FSU/VIII/2023 & W22.U1/5401/PL.01/8/2023 Tanggal: 22 Agustus 2023
74	PN SURAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	222.922.000	222.922.000	309.884.000	NPH.NO: 43C/PKS/SLO.II/FSU/VII/2024 & 335/SEK.PN/W12-U2/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 3 Juli 2024
			Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	86.962.000	86.962.000		
75	PN KALIANDA	PERALATAN DAN MESIN	SmartTV 4K 65 Inch	3	10.000.000	30.000.000	30.000.000	NPH.NO: 1109/BAST/BDL/FSU/VIII/2024 & 1413/SEK.PN.W9-U4/PL1.2.4/8/2024 Tanggal: 14 Agustus 2024
76	PN YOGYAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	2	9.999.000	19.998.000	28.047.000	NPH.NO: 154/HIBAH/YYK.II/VIII/2024 & 203/SEK.PN.W13-U1/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 1 Agustus 2024
			Televisi	1	4.309.000	4.309.000		
			UPS	2	1.065.000	2.130.000		
			Camera Conference	1	1.610.000	1.610.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
77	PN SUBANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	23.400.000	23.400.000	77.700.000	NPH.NO: 38/PWK.II/FSU/V2024 Tanggal: 27 Mei 2024
		PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	2	11.500.000	23.000.000		
			Printer	2	5.350.000	10.700.000		
			Lemari Besi / Metal	1	1.950.000	1.950.000		
			Lemari Besi / Metal	1	1.900.000	1.900.000		
			Filling Cabinet Besi	1	1.750.000	1.750.000		
			Lemari Besi / Metal	1	15.000.000	15.000.000		
78	PN SIMALUNGUN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi/Metal	8	1.700.000	13.600.000	132.720.000	NPH.NO: 466/SEK.PN.W2-U16/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 23 Juli 2024
			Kursi Besi/Metal	1	2.700.000	2.700.000		
			Kursi Besi/Metal	6	1.200.000	7.200.000		
			Kursi Besi/Metal	34	1.000.000	34.000.000		
			Bangku Panjang Besi / Metal	3	1.350.000	4.050.000		
			Sice	1	5.000.000	5.000.000		
			Sice	2	2.000.000	4.000.000		
			Meja Kerja Kayu	1	3.500.000	3.500.000		
			Meja Kerja Kayu	10	2.250.000	22.500.000		
			Meja Kerja Kayu	5	1.200.000	6.000.000		
			Meja Kerja Kayu	12	1.000.000	12.000.000		
			Meja Rapat	1	5.000.000	5.000.000		
			Lemari Besi / Metal	2	1.500.000	3.000.000		
			Printer	1	1.370.000	1.370.000		
			Printer	4	1.000.000	4.000.000		
			AC Split 1 PK	1	4.800.000	4.800.000		
79	PN WONOGIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung dan Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri (Kanopi & Backdrop Ruang PTSP)	2	17.496.500	34.993.000	34.993.000	NPH.NO: 51A/PKS/SLO.II/FSU/VIII/2024 & 83/SEK.PN.W12-U29/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024
80	PN PONTIANAK	PERALATAN DAN MESIN	Logitech MeetUp Video	2	13.000.000	26.000.000	136.700.000	NPH.NO: 262/PTK/VII/2024 & 2291/SEK.PN.W17-U1/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 23 Juli 2024
			Printer Canon G2010	4	2.200.000	8.800.000		
			Scanner Canon R40	3	5.700.000	17.100.000		
			PC Unit Lenovo AIO 3 24ALC6	4	11.000.000	44.000.000		
			Televisi Sasmung 65 Inch UHD 4K	1	9.800.000	9.800.000		
			Televisi Samsung 55 Inch UHD 4K	2	8.000.000	16.000.000		
			Microphone Wireless Soundbest	2	3.000.000	6.000.000		
			Mic Wireless Sounbest Victory 2	2	2.000.000	4.000.000		
			Power Mix Flash-8	2	2.500.000	5.000.000		
81	PN RANGKAS BITUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Rangkas Bitung	2 / 5	2.887.000	28.870.000	28.870.000	NPH.NO: 1060/SEK.03/W29.U3/PL1.2.4/VIII/2024 & 148/PKS/CLG.II/FSU/VIII/2024 Tanggal: 1 Agustus 2024
82	PN KETAPANG	PERALATAN DAN MESIN	Alat Kantor Lainnya	1	8.500.000	8.500.000	105.843.708	NPH.NO: 121B/PTK/III/2024 & 1416/SEK.W17-U4/PL.01/III/2024 Tanggal: 25 Maret 2024
			Meja Kerja	1	4.500.000	4.500.000		
			Meja Kerja Kayu	1	1.850.000	1.850.000		
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Ketapang	2	15.686.000	31.372.000		
			Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1	54.001.708	54.001.708		
			Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	2	2.810.000	5.620.000		
83	PT BANTEN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedunga dan Bangunan Pengadilan Tinggi Banten	1	1.124.564.000	1.124.564.000	1.124.564.000	NPH.NO: 131/TGR.I/PKS/FSU/V/2024 & 1440/SEK.PT.W29-U/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 27 Mei 2024
84	PT BANTEN	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi / Metal	24	4.551.000	109.224.000	231.768.000	NPH.NO: 132/TGR.I/PKS/FSU/VI/2024 & 1566/SEK.PT.W29-U/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 5 Juni 2024
			Meja Rapat	12	10.212.000	122.544.000		
85	PN PEMATANG SIANTAR	PERALATAN DAN MESIN	Portable Air Conditioner	3	24.534.000	73.602.000	73.602.000	NPH.NO: 2378/SEK.PN.W2-U2/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 27 Agustus 2024
86	PN KRAKSAAN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	2	9.700.000	19.400.000	410.783.250	NPH.NO: 137.1/SEK.PN.W14.U20/PL.04/I/2024 & 8A/PKS/SDA/FSU/I/2024 Tanggal: 19 Januari 2024
			AC Standing 5 PK	3	25.250.000	75.750.000		
			AC Standing 3 PK	3	22.500.000	67.500.000		
			Kursi Besi/Metal	10	550.000	5.500.000		
			Alat Kantor Lainnya	1	18.500.000	18.500.000		
			Camera Digital	1	8.500.000	8.500.000		
			Bracket Standing Peralatan	2	300.000	600.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
			Proyektor Spider Bracket	2	275.000	550.000		
			Lemari Kayu	4	2.725.000	10.900.000		
			Lemari Kayu	4	1.900.000	7.600.000		
			Lemari Besi/Metal	3	2.725.000	8.175.000		
			Camera Digital	1	13.600.000	13.600.000		
			Lemari Besi/Metal	6	1.650.000	9.900.000		
			Meja Kerja Kayu	2	6.500.000	13.000.000		
			Kursi Besi/Metal	10	2.100.000	21.000.000		
			Lap Top	3	7.050.000	21.150.000		
			Printer	8	2.600.000	20.800.000		
			Televisi	2	7.925.000	15.850.000		
			P.C Unit	3	10.600.000	31.800.000		
			PPN (Pajak Pertambanan Nilai)	11	40.708.250	40.708.250		
87	PN KAB. KEDIRI	PERALATAN DAN MESIN	Laptop HP 14-E0019TU i7	1	11.800.000	11.800.000	35.850.000	NPH.NO: 83/PKS/KDI.II/VII/2024 & 1570/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 17 Juli 2024
			Laptop HP 14-E0033AU AMD-R9	1	6.500.000	6.500.000		
			Televisi Aqua 43 Inch	4	3.500.000	14.000.000		
			Televisi Aqua 43 Inch	1	3.550.000	3.550.000		
88	PN SERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Serang	15 / 9	1.500.000	202.500.000	202.500.000	NPH.NO: 165/Clg.II/XII/2023 & 5620/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: **29 Desember 2023**
89	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Besi / Metal	10	3.500.000	35.000.000	41.300.000	NPH.NO: 608/NPH/FSU/CKR.I/VII/2024 & 1843/SEK.PN.W11-U23/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 24 Juli 2024
			Televisi 55 Inch	1	6.300.000	6.300.000		
90	PN LIMBOTO	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit Lenovo AIO Core i3	4	9.550.000	38.200.000	66.434.000	NPH.NO: 401/SEK/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024
			Printer Epson L3210	2	2.950.000	5.900.000		
			AC Split Daikin 2 PK	2	11.167.000	22.334.000		
91	PN PRABUMULIH	PERALATAN DAN MESIN	AC Standing Polytron 3 PK	3	12.016.667	36.050.000	58.986.000	NPH.NO: 14/PKS/PLB/IV/2024 & 361/KPN.W6-U8/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 18 April 2024
			AC Split Polytron 2 PK	2	5.830.000	11.660.000		
			Kulkas	1	1.650.000	1.650.000		
			Televisi Samsung 43 Inch	1	4.278.000	4.278.000		
			Televisi Samsung 50 Inch	1	5.348.000	5.348.000		
92	PN SAMARINDA	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Petugas PTSP	13	1.359.000	17.667.000	65.467.050	NPH.NO: 320/BAST/SMR/FSU/IX/2024 & 393/SEK.PN.W18-U/PL1.2.4/IX/2024 Tanggal: 2 September 2024
			Kursi Pimpinan Rapat	2	2.259.000	4.518.000		
			Kursi Rapat	16	1.359.000	21.744.000		
			Meja Pelayanan InformasiPTSP	1	999.000	999.000		
			Televisi	1	14.249.050	14.249.050		
			Televisi	1	4.190.000	4.190.000		
			Standing Bracket TV	1	2.100.000	2.100.000		
93	PN BALIKPAPAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit Core i3	3	8.290.000	24.870.000	90.168.000	NPH.NO: 428/SEK.PN.W18-U2/PL1.2.4/VIII/2024 & 147/NPH-BTN/BLP.III/FSU/VIII/2024 Tanggal: 15 Agustus 2024
			Printer Canon G2730	2	2.500.000	5.000.000		
			Printer Canon G3730	2	2.950.000	5.900.000		
			Scanner Fujitsu	1	8.000.000	8.000.000		
			Logitech WebCam	1	3.400.000	3.400.000		
			Handphone Realme C63	2	1.999.000	3.998.000		
			Rak Arsip	3	13.000.000	39.000.000		
94	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 0,5 PK	1	3.000.000	3.000.000	87.900.000	NPH.NO: 837/SEK/W11.U7/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 1 Juli 2024
			AC Split 1,5 PK	1	6.500.000	6.500.000		
			AC Split 1 PK	2	5.550.000	11.100.000		
			Printer Brother DCP-T420W	2	2.900.000	5.800.000		
			Laptop Lenovo Core i3	1	9.000.000	9.000.000		
			Televisi Samsuing 50 Inch	1	5.400.000	5.400.000		
			Kursi Besi	12	2.450.000	29.400.000		
			Bracket Standing	1	1.500.000	1.500.000		
			Jam Listrik	1	1.400.000	1.400.000		
			Camera Conference Jete	1	5.500.000	5.500.000		
			Kipas Angin	1	1.500.000	1.500.000		
			Camera Conference Logitech	1	6.500.000	6.500.000		
			Teko Listrik	1	1.300.000	1.300.000		
95	PN SANGGAU	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 1 PK	3	3.850.000	11.550.000	23.550.000	NPH.NO: 304/PTK/VIII/2024 & 491.a/SEK/HM2.1.2/VIII/2024 Tanggal: 19 Agustus 2024
			Televisi Polytron 43 Inch	2	3.600.000	7.200.000		
			Sofa Tamu	1	4.800.000	4.800.000		
96	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	1	4.350.000	4.350.000	7.500.000	NPH.NO: 62/PKS/BWI.III/FSU/VIII/2024 & 2283/SEK.PN.W14-U16/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 9 Agustus 2024
			Printer	2	1.575.000	3.150.000		
97	PN MEMPAWAH		Meja Kerja Kayu	1	13.690.000	13.690.000	203.210.000	
			Meja Kerja Kayu	3	4.440.000	13.320.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
		PERALATAN DAN MESIN	AC Split	5	9.000.000	45.000.000		NPH.NO: 207/PTK/VI/2024 & W17-U5/1788/PL1.2.4/III/2024 Tanggal: 4 Maret 2024
			Sice	1	25.000.000	25.000.000		
			Printer	7	2.600.000	18.200.000		
			Sound System	1	20.000.000	20.000.000		
			Televisi	2	9.000.000	18.000.000		
			Perlatan Komputer Lainnya	1	50.000.000	50.000.000		
98	PN BANDUNG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Bandung	1 / 10	4.199.685	41.996.850	41.996.850	NPH.NO: 2228/SEK.W11-U1/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 16 Mei 2024
99	PN SLEMAN	PERALATAN DAN MESIN	Printer	2	4.600.000	9.200.000	17.950.000	NPH.NO: 195/HIBAH/YYK.II/IX/2024 & 2606/SEK.PN.W13-U2/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 1 Oktober 2024
			Scanner	1	8.750.000	8.750.000		
100	PN JAKARTA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Portable Air Conditioner	2	36.699.000	73.398.000	129.523.000	NPH.NO: 3542/NPH/KGS/VII/2024 & 5955/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 5 Juli 2024
			AC Split	1	12.133.000	12.133.000		
			Kipas Angin	8	5.499.000	43.992.000		
101	PN BEKASI	PERALATAN DAN MESIN	Rak Arsip Siku	10	1.500.000	15.000.000	150.000.000	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/X/2023 & 5603/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **2 Oktober 2023**
			Lemari Arsip Besi	10	7.000.000	70.000.000		
			Vertical Blind Jendela	50	300.000	15.000.000		
			Partisi Ecourt Corner, Pos	1	10.000.000	10.000.000		
			Running Text/Signage, Papan Petunjuk PTSP	1	10.000.000	10.000.000		
			Neon Box 2m	1	10.000.000	10.000.000		
			Guiding Block Tactile	50	400.000	20.000.000		
102	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Fasad Ruang PTSP	1	20.000.000	20.000.000	230.000.000	NPH.NO: 32/NPH/BKS.I/FSU/IX/2023 & 4475/W11.U5/UM.00.1/IX/2023 Tanggal: **1 September 2023**
			Renovasi Ruang Tahanan menjadi Ruang Arsip	2	5.000.000	10.000.000		
			Pembuatan Sumur Dalam	1	150.000.000	150.000.000		
			Pemindahan Tiang Listrik	2	25.000.000	50.000.000		
103	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi	2	121.961.514	243.923.027	243.923.027	NPH.NO: 27/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 625/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: **26 Desember 2022**
104	PN JAKARTA BARAT	PERALATAN DAN MESIN	Server	1	138.755.800	138.755.800	138.755.800	NPH.NO: 5032/SEK.W10-U2/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 7 Agustus 2024
105	PN PEKANBARU	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson DS-770II	5	11.850.000	59.250.000	77.250.000	NPH.NO: 19/PKS/PKB/IX/2024 & 0579/SEK.PN.W4.U1/UM.01.10/IX/2024 Tanggal: 30 September 2024
			Scanner Epson DS-530	1	9.000.000	9.000.000		
			AC Split Daikin 1 PK	1	4.600.000	4.600.000		
			Meja Kerja	1	1.200.000	1.200.000		
			Kursi Hadap	4	800.000	3.200.000		
106	PN PURBALINGGA	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Besi / Metal	2	2.600.000	5.200.000	7.788.000	NPH.NO: 31/PKS/PWK/FSU/IX/2024 & 1348/SEK.PN.W12-U25/PL1.2.4/IX/2024 Tanggal: 17 September 2024
			Kipas Angin 20 Inch	1	1.499.000	1.499.000		
			Kipas Angin 16 Inch	1	1.089.000	1.089.000		
107	PN JAKARTA SELATAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	20	26.000.000	520.000.000	739.249.000	NPH.NO: 1456/M/JKK.I/FSU/X/2024 & 1075/SEK.W10-U3/PL1.2.3/X2024 Tanggal: 14 Oktober 2024
			Harddisk External	1	4.749.000	4.749.000		
			Hub	1	10.926.000	10.926.000		
			CCTV	1	100.000.000	100.000.000		
			Alat Studio Lainnya	6	2.679.000	16.074.000		
			AC Split 2 PK	7	12.500.000	87.500.000		
108	PN KAB. KEDIRI	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	1	5.000.000	5.000.000	49.900.000	NPH.NO: 85/PKS/KDI.II/VII/2024 & 1679/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 29 Juli 2024
			Meja Kerja Kayu	6	2.500.000	15.000.000		
			Kursi Besi / Metal	1	2.900.000	2.900.000		
			Kulkas Sharp	1	3.600.000	3.600.000		
			Lemari Besi	1	3.000.000	3.000.000		
			Scanner Ricoh Scansnap IX1600	2	10.200.000	20.400.000		
109	PN BEKASI	JASA	**Persiapan Alat dan Pekerja:** Forklift, Hand Lift, Takel, Control, Hand Staker	1	15.000.000	15.000.000	155.000.000	NPH.NO: 48/NPH/BKS.I/FSU/X/2023 & 5604/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **20 Oktober 2023**
			Pembongkaran dan Pemasangan: AC, Furnitur, Peralatan Elektronik, Gudang Arsip, Ruang Server, CCTV, dan Jaringan Kabel	1	120.000.000	120.000.000		
			Pengemasan: Peralatan Elektronik, Arsip, Barang Pecah Belah, dan Furnitur	1	14.000.000	14.000.000		
			Pengangkutan: Barang ke Gedung Baru	1	6.000.000	6.000.000		

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
110	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	1	10.000.000	10.000.000	43.100.000	NPH.NO: 156A/CRB/FSU/IX/2024 & 1209A/SEK.PN.W11-U14/PL1.2.3/IX/2024 Tanggal: 2 September 2024
			Kursi Besi / Metal	4	1.000.000	4.000.000		
			Kursi Kayu	3	3.000.000	9.000.000		
			AC Split 2 PK	3	6.700.000	20.100.000		
111	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Tamu Ketua Pengadilan	1	152.079.070	152.079.070	300.000.000	NPH.NO: 21A/NPH/BKS.I/FSU/VIII/2024 & 3881/SEK.W11-U/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 1 Agustus 2024
			Perbaikan Ruang Istirahat Ketua Pengadilan	1	26.639.290	26.639.290		
			Pengecetan Pagar Depan dan Pagar Belakang Kantor	1	60.322.350	60.322.350		
			Perbaikan dan Penambahan Instalasi Listrik	1	60.959.290	60.959.290		
112	PT JAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta	1	299.988.600	299.988.600	299.988.600	NPH.NO: 4378/NPH/KGS/VIII/2024 & 6334/KPT.W10-U/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 20 Agustus 2024
113	PN SERANG	PERALATAN DAN MESIN	Laptop MSI	3	32.300.000	96.900.000	331.350.000	NPH.NO: 203/Clg.II/X/2024 & 3860/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 29 Oktober 2024
			Mesin Potong Rumput	1	7.500.000	7.500.000		
			Tangga Bafen	1	7.800.000	7.800.000		
			Partisi	4	8.232.000	32.928.000		
			Partisi	1	6.431.250	6.431.250		
			Partisi	1	4.373.250	4.373.250		
			Partisi	1	3.601.500	3.601.500		
			Partisi	2	2.058.000	4.116.000		
			Meja Kerja Kayu	1	6.000.000	6.000.000		
			Meja Kerja Kayu	1	5.500.000	5.500.000		
			Meja Resepsionis	1	16.200.000	16.200.000		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000	30.000.000		
			Televisi LG dan Samsung	3	9.000.000	27.000.000		
			Kursi Besi / Metal	3	2.000.000	6.000.000		
			Lemari Besi / Metal	10	3.000.000	30.000.000		
			Dispenser	1	5.000.000	5.000.000		
			Printer Epson	12	3.500.000	42.000.000		
114	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit AIO	3	12.750.000	38.250.000	47.400.000	NPH.NO: 1457/Sek/W11.U7/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 1 Oktober 2024
			Printer	1	2.900.000	2.900.000		
			Bangku Panjang Besi / Metal	1	1.750.000	1.750.000		
			Lemari Besi	1	1.500.000	1.500.000		
			Kipas Angin	2	800.000	1.600.000		
			Jam Listrik	1	1.400.000	1.400.000		
115	PN BEKASI	PERALATAN DAN MESIN	Tempat Tidur King Size	1	10.050.000	10.050.000	129.492.500	NPH.NO: 40/NPH/BKS.I/FSU/VII/2023 & 4548/W11.U5/UM.00.1/VII/2023 Tanggal: **3 Juli 2023**
			Tempat Tidur King Size	1	5.850.000	5.850.000		
			Tempat Tidur Sorong	3	5.500.000	16.500.000		
			Lemari 3 Pintu	1	5.700.000	5.700.000		
			Lemari 2 Pintu Kayu	1	4.350.000	4.350.000		
			Lemari 2 Pintu	2	2.850.000	5.700.000		
			Lemari	1	3.200.000	3.200.000		
			Meja Makan 6 Seat Oval	1	8.500.000	8.500.000		
			Meja 2 Seat	2	2.850.000	5.700.000		
			Meja Makan 4 Seat	1	7.500.000	7.500.000		
			Meja Makan 4 Seat	1	5.700.000	5.700.000		
			Sofa	1	7.500.000	7.500.000		
			AC Split 1 PK	2	6.750.000	13.500.000		
			AC Split 1 PK	2	6.450.000	12.900.000		
			Kulkas 2 Pintu	2	4.125.000	8.250.000		
			Mesin Cuci	1	3.500.000	3.500.000		
			Printer	1	3.150.000	3.150.000		
			Exhaust Fan	1	1.500.000	1.500.000		
			Kipas Angin Standing	1	442.500	442.500		
116	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit AIO	7	19.075.000	133.525.000	133.525.000	NPH.NO: 1831/BDT/VII/2024 & 1072.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
117	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	6	6.900.000	41.400.000	41.400.000	NPH.NO: 1827/BDT/VII/2024 & 1070.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
118	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Besi / Metal	15	10.606.306	159.094.590	159.094.590	NPH.NO: 1839/BDT/VII/2024 & 1076.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
119	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Laptop	6	17.955.000	107.730.000	107.730.000	NPH.NO: 1829/BDT/VII/2024 & 1071.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
120	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Loudspeaker	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	NPH.NO: 1833/BDT/VII/2024 & 1073.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
121	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Vertikal Blind	200	599.400	119.880.000	119.880.000	NPH.NO: 1837/BDT/VII/2024 & 1075.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
122	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Printer	10	2.835.000	28.350.000	28.350.000	NPH.NO: 1835/BDT/VII/2024 & 1074.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
123	PN KOTA TIMIKA	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	3	13.320.000	39.960.000	84.582.000	NPH.NO: 567/SEK.W30.U7/PL1.2.4/VIII/2024 Tanggal: 5 Agustus 2024
			AC Standing	1	41.070.000	41.070.000		
			Rak Besi	2	1.776.000	3.552.000		
124	PN BANGIL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gapura Pintu Masuk Area Tunggu Sidang dan Kanopi Area Merokok	25	1.060.000	26.500.000	76.500.000	NPH.NO: 99/SDA/BAST/VII/2024 & 1940/SEK.PN.W14-U21/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
			Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Musholla PN Bangil)	40	1.250.000	50.000.000		
125	PN STABAT	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 2 PK	1	8.000.000	8.000.000	60.000.000	NPH.NO: 18/BAST/MDN/FSU/X/2024 & 5985/SEK.W2-U15/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 24 Oktober 2024
			AC Split 1 PK	5	4.000.000	20.000.000		
			Printer	5	900.000	4.500.000		
			Printer	1	4.500.000	4.500.000		
			Televisi 43 Inch	1	2.500.000	2.500.000		
			Televisi 50 Inch	1	5.000.000	5.000.000		
			UPS	1	4.500.000	4.500.000		
			PC Unit	1	11.000.000	11.000.000		
126	PN JAKARTA TIMUR	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Jakarta Timur	6 / 11	2.500.000	165.000.000	165.000.000	NPH.NO: 18A/NPH/BKS.I/FSU/IV/2024 & 4900A/SEK.W10-U5/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 25 April 2024
127	PN KUPANG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner iScan 900 DPI	1	2.835.200	2.835.200	17.858.200	NPH.NO: 4455/KPN.W26-U1/PL1.2.4/X/2024 & 977/KPG.III/FSU/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
			Layar Proyektor Otomatis	1	2.144.600	2.144.600		
			Televisi Coocaa 50 Inch	3	4.292.800	12.878.400		
128	PN TANGERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Tangerang (Satpam 8 Orang ; Pramubakti 10 Orang ; Supir 2 Orang)	20 / 12	4.187.000	1.004.880.000	1.004.880.000	NPH.NO: 261/TGR.I/PKS/FSU/IX/2024 Tanggal: 22 Juli 2024
129	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Lensa Kamera	1	13.000.000	13.000.000	1.016.150.000	NPH.NO: 263/TGR.I/PKS/FSU/IX/2024 Tanggal: 9 September 2024
			Laptop	1	30.000.000	30.000.000		
			PC Unit	1	21.000.000	21.000.000		
			Scanner	4	12.000.000	48.000.000		
			Scanner	1	79.000.000	79.000.000		
			NAS (Network Attached Storage)	1	100.000.000	100.000.000		
			Software Aplikasi Digital Arsip	1	250.000.000	250.000.000		
			Hub	3	25.000.000	75.000.000		
			Hub	1	6.000.000	6.000.000		
			Hub	1	3.000.000	3.000.000		
			Router	1	1.675.000	1.675.000		
			CCTV	35	4.585.000	160.475.000		
			Televisi	2	8.000.000	16.000.000		
			Mixer Sound System	5	10.600.000	53.000.000		
			Loudspeaker	10	12.500.000	125.000.000		
			VTR Recorder	1	35.000.000	35.000.000		
130	PN UNGARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Aula	100	707.030	70.703.000	80.000.000	NPH.NO: 068/NPH/SMG/BFSU/XI/2024 & 2698/SEK.PN.W12.U18/UM.01/XI/2024 Tanggal: 1 November 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	2	2.948.500	5.897.000		
			Focusing Screen/ Layar LCD Projector	1	3.400.000	3.400.000		
131	PN KARAWANG	JASA	Jasa Renovasi Ruang Tahanan	1	15.100.000	15.100.000	17.950.000	NPH.NO: 4844/KRW.I/BFSU/X/2024 & 2260/SEK.W11-U10/PL1.1.3/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
			Jasa Renovasi Ruang Kantin	1	2.850.000	2.850.000		
132	PN KARAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Karawang	1	1.667.585.655	1.667.585.655	2.707.050.000	NPH.NO: 4483/KRW.I/BFSU/X/2024 & 2258/SEK.W11-

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
			Renovasi Gedung Arsip Pengadilan Negeri Karawang	1	81.345.000	81.345.000		U10/PL1.1.3/X/2024 Tanggal: 18 Oktober 2024
			Renovasi Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Musholla PN Karawang	1	28.372.500	28.372.500		
		PERALATAN DAN MESIN	Video Wall	2	72.273.387	144.546.774		
			LCD Monitor	2	29.380.000	58.760.000		
			Komputer Alat Bantu Difabel	1	85.919.550	85.919.550		
			Server	1	54.675.585	54.675.585		
			Scanner	1	10.283.000	10.283.000		
			PC Unit	10	12.543.000	125.430.000		
			Printer	12	4.474.800	53.697.600		
			PC Unit	8	11.356.500	90.852.000		
			PC Unit	1	12.091.000	12.091.000		
			Printer	1	4.514.350	4.514.350		
			Kursi Besi / Metal	26	2.479.468	64.466.168		
			Kursi Besi / Metal	54	2.036.508	109.971.432		
			Bunga Plastik	17	312.298	5.309.066		
			Kursi Besi / Metal	16	4.518.870	72.301.920		
			Lampu	2	12.995.000	25.990.000		
			Sice	1	10.938.400	10.938.400		
133	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	AC Split Panasonic 1,5 PK	1	7.417.500	7.417.500	16.208.750	NPH.NO: 2628/SEK.PN.W13-U3/PL1.2.4/XI/2024 & 235/BAST/YYK/XI/2024 Tanggal: 5 November 2024
			AC Split Panasonic 2 PK	1	8.791.250	8.791.250		
134	PN PRABUMULIH	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	1	4.740.000	4.740.000	21.014.241	NPH.NO: 1186/SEK.PN.W6.U8/HM2.1/XI/2024 & 71/PKS/PLB/XI/2024 Tanggal: 1 November 2024
			Smart Lock	3	388.700	1.166.100		
			Digimedia CCTV Outdoor	7	256.866	1.798.062		
			Digimedia Smart Indoor	1	294.400	294.400		
			Printer Epson	2	2.415.391	4.830.782		
			Kursi Bar Hidrolik	1	335.100	335.100		
			Sofa	1	2.461.700	2.461.700		
			AC Split Polytron 0,5 PK	1	3.400.000	3.400.000		
			Lemari Loker 18 Pintu	1	1.988.100	1.988.100		
135	PN BEKASI	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	4	7.004.100	28.016.400	50.771.400	NPH.NO: 44A/NPH/BKS.I/FSU/X/2024 & 4380/SEK.PN.W11.U5/KU.01/XI/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
			Printer	3	2.775.000	8.325.000		
			Printer	2	2.775.000	5.550.000		
			RAM Server	2	4.440.000	8.880.000		
136	PN SERANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Serang	17 / 12	1.750.000	357.000.000	357.000.000	NPH.NO: 219/Clg.II/XII/2024 & 4373/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 3 Desember 2024
137	PN BEKASI	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Bekasi	14 / 8	3.907.165	437.602.480	957.926.208	NPH.NO: 16A/NPH/BKS.I/FSU/VI/2024 & 4382/SEK.W11.U5/KU.01/XI/2024 Tanggal: 14 Juni 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Outsourcing di PN Bekasi	14 / 8	3.999.574	447.952.288		
			Pembayaran Jasa Tenaga Pengemudi Outsourcing di PN Bekasi	2 / 8	4.523.215	72.371.440		
138	PT BANDUNG	PERALATAN DAN MESIN	AC Split	2	8.075.000	16.150.000	150.000.000	NPH.NO: 4460A/KRW.I/BFSU/IX/2024 & 6598/SEK.PT.W11-U/PL1.2.4/10/2024 Tanggal: 26 September 2024
			PC Unit	4	9.989.000	39.956.000		
			Printer	3	2.600.000	7.800.000		
			Laptop	1	9.000.000	9.000.000		
			Scanner	3	6.238.000	18.714.000		
			Filling Cabinet Besi	3	3.150.000	9.450.000		
			Meja Kerja Kayu	2	10.345.000	20.690.000		
			Meja Kerja Kayu	1	7.947.000	7.947.000		
			Kursi Besi / Metal	3	4.381.000	13.143.000		
			Rak Besi	2	1.400.000	2.800.000		
			Alat Penghancur Kertas	1	4.350.000	4.350.000		
139	PN SLEMAN	PERALATAN DAN MESIN	AC Split 0,5 PK	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	NPH.NO: 251/NPH/YYK/XII/2024 & 3196/SEK.PN.W13-U2/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 2 Desember 2024
140	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Majelis Hakim	8	2.032.125	16.257.000	16.257.000	NPH.NO: 2115/BDT/BFSU/VII/2024 & 1078.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
141	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Filling Cabinet	6	2.000.000	12.000.000	12.000.000	NPH.NO: 2117/BDT/BFSU/VII/2024 & 1080.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
142	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Ruang Kerja Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang	1	239.600.000	239.600.000	239.600.000	NPH.NO: 2114/BDT/BFSU/VII/24 & 1077.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
143	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang Anak pada Pengadilan Negeri Sumedang	1	97.730.500	97.730.500	97.730.500	NPH.NO: 2116/BDT/BFSU/VII/24 & 1079.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
144	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Pegawai	6	5.566.667	33.400.002	33.400.002	NPH.NO: 2118/BDT/BFSU/VII/2024 & 1081.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
145	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Videowall	1	342.957.482	342.957.482	342.957.482	NPH.NO: 2288/BDT/BFSU/VII/24 & 1082.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 19 Juli 2024
146	PN KENDAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP, Ruang Kerja Ketua dan Toilet	1	507.867.180	507.867.180	507.867.180	NPH.NO: 46/NPH/SMG/BFSU/X/2024 & 323/SEK.W12-U22/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 3 Oktober 2024
147	PN KENDAL	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja Kayu	2	8.880.000	17.760.000	160.506.000	NPH.NO: 45/NPH/SMG/BFSU/X/2024 & 322/SEK.W12-U22/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 3 Oktober 2024
			Kursi Kerja Kayu	2	4.440.000	8.880.000		
			PC Unit	6	16.650.000	99.900.000		
			Printer	6	2.053.500	12.321.000		
			Scanner	3	7.215.000	21.645.000		
148	PN KENDAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi PTSP pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kendal	1	66.035.400	66.035.400	66.035.400	NPH.NO: 069/NPH/SMG/BFSU/XI/2024 & 372/SEK.W12-U22/PL1.2.4/XI/2024 Tanggal: 4 November 2024
149	PN SANGGAU	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	1	5.499.000	5.499.000	7.799.000	NPH.NO: 470/PTK/XI/2024 & 732/SEK.W17-U6/PL1.2.4/XI/2024 Tanggal: 26 November 2024
			Printer	1	2.300.000	2.300.000		
150	PN KAB. MALANG (KEPANJEN)	PERALATAN DAN MESIN	Speaker Active	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000	NPH.NO: 11/PKS/M.L.G II/FSU/III/2024 & 3486/SEK.PN.W.14-U.35/PL1.2.4/VII/2024 Tanggal: 2 Juli 2024
			PC AIO	2	15.000.000	30.000.000		
			Kursi Besi/Metal	15	300.000	4.500.000		
			Kursi Besi/Metal	20	600.000	12.000.000		
			Microphone/Wireless Mic	1	1.000.000	1.000.000		
			Microphone/Wireless Mic	2	1.000.000	2.000.000		
			Televisi	1	5.500.000	5.500.000		
151	PN BALIGE	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Paving Blok Halaman Gedung Kantor PN Balige	1	322.202.000	322.202.000	322.202.000	NPH.NO: 52/PKS/STR/BFSU/VI/2024 & 1154/PKS/SEK.PN.W2.U18/PL.6/VI/2024 Tanggal: 3 Juni 2024
152	PN CIBINONG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	15 / 6	3.659.596	329.363.640	723.298.405	NPH.NO: 002/PKS/CBN.III/FSU/I/2024 & 5974/SEK.PN.W11-U20/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 15 Januari 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	16 / 1	3.511.955	56.191.285		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	18 / 5	3.752.705	337.743.480		
153	PN KARAWANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Pramubakti Outsourcing di PN Karawang	10 / 13	2.500.000	325.000.000	325.000.000	NPH.NO: 5678/KRW.I/BFSU/XII/2024 & 2668/SEK.W11-U10/PL1.1.3/XII/2024 Tanggal: 6 Desember 2024
154	PN BATANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Batang	5 / 12	1.600.000	96.000.000	96.000.000	NPH.NO: 262/PKS/PKL.II/FSU/X/2024 & 2047/SEK.W12-U33/UM.03/10/2024 Tanggal: 16 Oktober 2024

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
155	PN BEKASI	JASA	Pembayaran Kegiatan Character Building	1	456.842.700	456.842.700	456.842.700	NPH.NO: 25/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 192/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: **12 Desember 2022**
156	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penyambungan Kembali Listrik Kantor Baru PN Bekasi	1	186.158.454	186.158.454	186.158.454	NPH.NO: 42/NPH/BKS.I/FSU/VI/2023 & 5599/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **26 Juni 2023**
157	PN BEKASI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembongakaran dan Pemagaran Rumah Dinas Pengadilan Negeri Bekasi	1	55.268.920	55.268.920	55.268.920	NPH.NO: 36/NPH/BKS.I/FSU/I/2023 & 5595/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: **2 Januari 2023**
158	PN KENDAL	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan dan Satpam Outsourcing di PN Kendal	6 / 12	2.400.000	115.500.000	115.500.000	NPH.NO: 05/NPH/SMG/BFSU/I/2024 & 115/SEK.W12-U22/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 25 Januari 2024
159	PN SINGKAWANG	PERALATAN DAN MESIN	PC Unit	3	9.600.000	28.800.000	50.000.000	NPH.NO: 482/PTK/XII/2024 & W17-U2/2581/KU.06/12/2024 Tanggal: 2 Desember 2024
			Printer	4	2.800.000	11.200.000		
			Camera Digital	1	10.000.000	10.000.000		
160	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja PP	32	4.207.500	134.640.000	356.043.600	NPH.NO: 284/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/15/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 23 Februari 2024
			Lemari PP	10	5.940.000	59.400.000		
			Kursi Kerja PP	32	3.960.000	126.720.000		
			PPN (Pajak Pertambanan Nilai)	11	35.283.600	35.283.600		
161	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Pengadaan Perangkat Server	1	95.948.400	95.948.400	95.948.400	NPH.NO: 107/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/06/BTN.01.10/I/2024 Tanggal: 22 Januari 2024
162	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Rak Arsip Custom	11	14.208.000	156.288.000	226.795.200	NPH.NO: 82/M/JKK.I.2024 & W11.U21/04/BTN.01.10/I/2024 Tanggal: 16 Januari 2024
			Rak Arsip Custom	4	17.626.800	70.507.200		
163	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Meja Kerja	3	6.217.475	18.652.425	96.158.441	NPH.NO: 395/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/11/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 2 Februari 2024
			Meja Kerja	1	6.382.500	6.382.500		
			Kursi Kerja	4	3.127.425	12.509.700		
			Buffet	1	14.176.043	14.176.043		
			PC Unit	2	18.753.827	37.507.654		
			Monitor LED	1	4.038.846	4.038.846		
			Printer Epson L3210	1	2.891.273	2.891.273		
164	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gapura Kanopi Gerbang Utama Pengadilan Negeri Depok	1	186.480.000	186.480.000	186.480.000	NPH.NO: 482/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/24/BTN.01.10/IV/2024 Tanggal: 1 April 2024
165	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembuatan Ruang Serbaguna (Lounge) Pengadilan Negeri Depok	1	336.487.557	336.487.557	336.487.557	NPH.NO: 682/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/28/BTN.01.10/V/2024 Tanggal: 20 Mei 2024
166	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan PTSP Virtual & Drive Thru Pengadilan Negeri Depok	1	476.224.379	476.224.379	476.224.379	NPH.NO: 86/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/03/BTN.01.10/I/2024 Tanggal: 18 Januari 2024
167	PN JAKARTA SELATAN	PERALATAN DAN MESIN	Scanner	1	80.000.000	80.000.000	184.455.000	NPH.NO: 1627/M/JKK.I/FSU/XI/2024 & 1155/SEK.W10-U3/PL1.2.3/XI/2024 Tanggal: 8 November 2024
			Rak Besi	45	2.000.000	90.000.000		
			Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.000.000	1.000.000		
			Kursi Besi / Metal	9	1.495.000	13.455.000		
168	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Pos Jaga Permanen	1	84.750.000	84.750.000	84.750.000	NPH.NO: 2521/BDT/BFSU/X/2024 & 1515.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
169	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Motor	1	169.230.000	169.230.000	169.230.000	NPH.NO: 2516/BDT/BFSU/X/2024 & 1510.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
170	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Mobil	1	317.826.300	317.826.300	317.826.300	NPH.NO: 2519/BDT/BFSU/X/2024 & 1513.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
171	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pintu Pagar Area Muka Pengadilan Negeri Sumedang	1	311.256.625	311.256.625	311.256.625	NPH.NO: 2523/BDT/BFSU/X/2024 & 1517.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
172	PN CIBINONG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibinong	19 / 12	3.726.598	849.664.260	849.664.260	NPH.NO: 007/PKS/CBN.III/FSU/I/2024 & 310a/SEK.PN.W11-U20/PL1.2.4/I/2024 Tanggal: 15 Januari 2024
173	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehabilitasi Ruang PTSP Pengadilan Negeri Depok	1	177.584.377	177.584.377	177.584.377	NPH.NO: 109/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/08/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 23 Januari 2024
174	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Sofa	1	28.830.000	28.830.000	84.501.297	NPH.NO: 14/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/02/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 4 Januari 2024
			Tabung APAR	15	3.153.153	47.297.295		
			PPN (Pajak Pertambanan Nilai)	11	8.374.002	8.374.002		
175	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Coffe Table	1	16.400.000	16.400.000	87.201.600	NPH.NO: 447/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/20/BTN.01.10/III/2024 Tanggal: 27 Maret 2024
			Meja Café Kotak	3	693.333	2.080.000		
			Kursi Café	6	693.333	4.160.000		
			Kursi Standar	8	2.560.000	20.480.000		
			Meja Bulat	2	4.000.000	8.000.000		
			Meja Panjang	1	16.400.000	16.400.000		
			Kipas Angin	2	5.520.000	11.040.000		
			PPN (Pajak Pertambanan Nilai)	11	8.641.600	8.641.600		
176	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Kanopi Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Depok	1	177.955.200	177.955.200	177.955.200	NPH.NO: 1756/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/79/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **8 Desember 2023**
177	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Dak Belakang Gedung Kantor Pengadilan Negeri Depok	1	292.722.025	292.722.025	292.722.025	NPH.NO: 1873/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/85/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **21 Desember 2023**
178	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembayaran Pengerjaan Canopy	1	39.588.705	39.588.705	39.588.705	NPH.NO: 1673/M/JKK.I/FSU/XI/2023 & W11.U21/76/BTN.01.10/XI/2023 Tanggal: **30 November 2023**
179	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Pagar pada Pengadilan Negeri Depok	1	356.938.038	356.938.038	356.938.038	NPH.NO: 1836/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/83/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **21 Desember 2023**
180	PN DEPOK	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Pemasangan Atap Baja Ringan Pengadilan Negeri Depok	1	646.298.077	646.298.077	646.298.077	NPH.NO: 1824/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/81/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: **20 Desember 2023**
181	PN SUBANG	PERALATAN DAN MESIN	Televisi	4	6.000.000	24.000.000	114.600.000	NPH.NO: 79/PWK.II/FSU/X/2024 Tanggal: 28 Oktober 2024
			PC Unit	2	7.500.000	15.000.000		
			Printer	2	4.200.000	8.400.000		
			AC Split	1	4.000.000	4.000.000		
			Camera Digital	1	8.500.000	8.500.000		
			External/Portable Harddisk	1	1.850.000	1.850.000		
			Tripod Camera	1	950.000	950.000		
			Lemari Besi / Metal	2	1.600.000	3.200.000		
			Lemari Besi / Metal	2	1.500.000	3.000.000		
			Lemari Besi / Metal	1	8.000.000	8.000.000		
			Sice	1	10.000.000	10.000.000		
			Kursi Besi / Metal	9	800.000	7.200.000		
			Meja Kerja Kayu	9	1.500.000	13.500.000		
			Kursi Besi / Metal	2	3.500.000	7.000.000		
182	PN BEKASI	JASA	Jasa Lainnya berupa Sewa Dedicated Cloud Server	3	66.250.000	198.750.000	760.650.000	NPH.NO: 12/NPH/BKS.I/FSU/I/2024 & 1633/W11.U5/KU.1.13/V/2024 Tanggal: 8 Januari 2024
183		PERALATAN DAN MESIN	Software Komputer	3	77.000.000	231.000.000		
			Software Komputer	3	77.000.000	231.000.000		
			Hardware Conf Off-Line Computer	3	2.200.000	6.600.000		
			Microphone	30	3.110.000	93.300.000		
184	PN KLUNGKUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP Gedung Kantor Pengadilan Negeri Semarapura	1	721.802.991	721.802.991	721.802.991	NPH.NO: 07/NPH/FSU/DPS.II/2024 & 631/KPN.W24-U3/PL1.2.4/IV/2024 Tanggal: 1 Mei 2024
185	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Palang Pintu Otomatis	1	56.500.000	56.500.000	56.500.000	NPH.NO: 2520/BDT/BFSU/X/2024 & 1514.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
186	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pintu Gerbang Geser Otomatis	1	34.822.080	34.822.080	34.822.080	NPH.NO: 2522/BDT/BFSU/X/2024 & 1516.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
187	PN SUKADANA	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Pejabat Fungsional dan Struktural	12	4.500.000	54.000.000	90.000.000	NPH.NO: 419/BAST/BDL/FSU/II/2024 & 357/PAN.PN.W9.U8/HK.01/III/2024 Tanggal: 19 Februari 2024
			Kursi Staf Pejabat	8	3.000.000	24.000.000		
			AC Split 2 PK	1	9.000.000	9.000.000		
			Printer	1	3.000.000	3.000.000		
188	PN CIBADAK	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibadak	3 / 13	3.400.000	132.600.000	132.600.000	NPH.NO: 512/NPH/SMI.III/FSU.CF/XII/2024 & 3411/SEK.PN.W11-U18/PL1.1.4/XII/2024 Tanggal: 27 Desember 2024
189	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Mobil	1	246.707.500	246.707.500	246.707.500	NPH.NO: 2518/BDT/BFSU/X/2024 & 1512.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
190	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kanopi Parkir Motor	1	317.682.000	317.682.000	317.682.000	NPH.NO: 2517/BDT/BFSU/X/2024 & 1511.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 17 Oktober 2024
191	PN DEPOK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok	1	212.417.126	212.417.126	212.417.126	NPH.NO: 281/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/14/BTN.01.10/II/2024 Tanggal: 23 Februari 2024
192	PN CIKARANG	JASA	Sewa Rumah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	12	57.500.000	57.500.000	57.500.000	NPH.NO: 18/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/18/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **16 Agustus 2022**
193	PN CIKARANG	JASA	Sewa Rumah Panitera Pengadilan Negeri Cikarang	12	69.000.000	69.000.000	69.000.000	NPH.NO: 15/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/15/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **16 Agustus 2022**
194	PN CIKARANG	JASA	Jasa Lainnya berupa Pembersihan Kaca & ACP Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang	1	20.158.211	20.158.211	20.158.211	NPH.NO: 12/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/12/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
195	PN CIKARANG	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cikarang	15 / 12	4.718.691	849.364.434	849.364.434	NPH.NO: 27/NPH/CKR/FSU/XII/2022 & W11.U23/4664/UM.10.10/XII/2022 Tanggal: **5 Desember 2022**
196	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Interior Public Smoking Area	1	53.066.492	53.066.492	53.066.492	NPH.NO: 20/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/20/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **23 Agustus 2022**
197	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Meubelair Public Smoking Area	1	54.000.000	54.000.000	54.000.000	NPH.NO: 21/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/21/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **23 Agustus 2022**
198	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Kayu Panitera Muda Perdata	1	61.438.500	61.438.500	61.438.500	NPH.NO: 22/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/22/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
199	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Arsip (Selasar Ruang Kepaniteraan)	2	47.118.250	94.236.500	94.236.500	NPH.NO: 13/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/13/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
200	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Meubelair Ruang PTSP	1	199.643.906	199.643.906	199.643.906	NPH.NO: 7/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/2704/PL.10.10/IV/2022 Tanggal: **21 April 2022**
201	PN CIKARANG	PERALATAN DAN MESIN	Aplikasi Kepaniteraan	1	65.700.000	65.700.000	65.700.000	NPH.NO: 14/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/14/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**
202	PN CIKARANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehab Ruang Hakim pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang	1	68.849.000	68.849.000	68.849.000	NPH.NO: 17/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/17/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: **12 Agustus 2022**

NO	SATKER	ASET	TYPE	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
203	PN JAKARTA UTARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1	197.182.864	197.182.864	197.182.864	NPH.NO: 5498/NPH/KGS/XI/2024 & 6840/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/XI/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
204	PN JAKARTA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Bracket Standing Peralatan	4	388.500	1.554.000	9.102.000	NPH.NO: 5499/NPH/KGS/X/2024 & 6842/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
			Set Top Box Android TV	4	1.887.000	7.548.000		
205	PN JAKARTA UTARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1	285.961.086	285.961.086	285.961.086	NPH.NO: 5497/NPH/KGS/X/2024 & 6841/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/X/2024 Tanggal: 21 Oktober 2024
206	PN DENPASAR	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Cibadak	10 / 12	1.500.000	180.000.000	180.000.000	NPH.NO: 04/NPH/DPS.II/FSU/III/2024 & 587a/KPN.W24-U1/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 6 Maret 2024
207	PN JAKARTA BARAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Masjid Lantai 5 Gedung	1	97.775.660	97.775.660	895.254.494	NPH.NO: 515/PKS/JKJ.I/XII/2024 & 7310/SEK.PN.W10-U2/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 23 Desember 2024
		PERALATAN DAN MESIN	Videotron Indoor P2.5	1	228.112.104	228.112.104		
			Interactive Panel	1	83.250.000	83.250.000		
			Kursi Besi / Metal	2	4.884.000	9.768.000		
			Kursi Besi / Metal	8	3.908.310	31.266.480		
			AC Central	1	50.782.500	50.782.500		
			AC Split	28	11.433.000	320.124.000		
			AC Split	9	8.241.750	74.175.750		
208	PN JAKARTA BARAT	JASA	Jasa Tenaga Outsourcing Satpam (5 Orang x 4 Bulan) September s.d Desember 2024	5 / 4	2.500.000	50.000.000	489.188.300	NPH.NO: 516/PKS/JKJ.I/XII/2024 & 7311/SEK.PN.W10-U2/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 23 Desember 2024
			Jasa Tenaga Outsourcing Pramubakti (5 Orang x 4 Bulan) September s.d Desember 2024	5 / 4	2.500.000	50.000.000		
			Jasa Tenaga Outsourcing Tenaga Kebersihan (10 Orang x 4 Bulan) September s.d Desember 2024	10 / 4	2.500.000	100.000.000		
209		PERALATAN DAN MESIN	Rak Besi	4	6.637.800	26.551.200		
			Rak Besi	22	7.603.500	167.277.000		
			Rak Besi	2	5.178.150	10.356.300		
			Rak Besi	14	6.071.700	85.003.800		
210	PN JAKARTA UTARA	KENDARAAN RODA 4	Toyota Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS	1	618.500.000	618.500.000	618.500.000	NPH.NO: 7534/SEK.PN.W10-U4/PL1.2.4/XII/2024 & 6331/NPH/KGS/XII/2024 Tanggal: 6 Desember 2024
211	PN JAKARTA UTARA	JASA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing di PN Jakarta Utara	3 / 13	4.000.000	156.000.000	156.000.000	NPH.NO: 6708/NPH/KGS/XII/2024 & 7552/SEK.PN/W10-U4/PL1.2.4/XII/2024 Tanggal: 31 Desember 2024
JUMLAH							**51.275.848.767**	

Bagian

II

HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Mahkamah Agung RI telah menerima hibah langsung dari dalam negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya baik yang disahkan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II sejumlah **Rp158.039.734.269,00** (*seratus lima puluh delapan milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*). Lebih rinci untuk angka hibah langsung dalam negeri sudah disahkan tahun berjalan senilai Rp122.176.025.953,00; sedangkan hibah langsung dalam negeri sudah disahkan tahun anggaran yang lalu senilai Rp35.863.708.316,00. Angka perolehan tersebut didapatkan dari 335 satuan kerja dengan 653 dokumen hibah. Hbah langsung dari dalam negeri yang sudah disahkan terbagi atas bentuk hibah yang diterima, diantaranya:

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang – Sudah Disahkan

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri bentuk uang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II yang sudah melakukan pengesahan pendapatannya sejumlah **Rp6.212.524.000,00** (*enam milyar dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdapat pada 9 satuan kerja dengan 9 dokumen hibah yang sudah disahkan nilai pendapatan hibah uangnya. Berikut penjabaran satuan kerja yang telah menerima hibah uang.

Tabel 2.1
Hibah Dalam Negeri Berupa Uang Sudah Disahkan

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	RINCIAN		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
1	**PA PENAJAM**	PEMKAB. PENAJAM PASER UTARA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 1)	Kesatu	Pembayaran	101.600.000	440.000.000	421/02/Keu-MPHD/Pem/2024 & 110/KPA.W17-A8/HM.01/I/2024 Tanggal: 31 Januari 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 2)	Kedua	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 3)	Ketiga	Pembayaran	37.600.000		

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	RINCIAN		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 4)	Keempat	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 5)	Kelima	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 6)	Keenam	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 7)	Ketujuh	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 8)	Kedelapan	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 9)	Kesembilan	Pembayaran	37.600.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PA Penajam (Tahap 10)	Kesepuluh	Pembayaran	37.600.000		
2	**PN PENAJAM**	PEMKAB. PENAJAM PASER UTARA	Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Bulan Feb - April + THR)	Pertama	Pembayaran	140.400.000	440.000.000	421/02/Keu-MPHD/Pem/2024 & 91/KPN.W18-U9/II/2024 Tanggal: 31 Januari 2024
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 2)	Kedua	Pembayaran	37.450.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 3)	Ketiga	Pembayaran	37.450.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 4)	Keempat	Pembayaran	37.450.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 5)	Kelima	Pembayaran	37.450.000		
			Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing 15 Orang / 12 Bulan di PN Penajam (Tahap 6)	Keenam	Pembayaran	74.900.000		
3	**PN KUALA KAPUAS**	PEMKAB. KAPUAS	Pembelian Sarana Prasarana dalam Menunjang Layanan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Kesatu	Belanja	500.000.000	500.000.000	900.1.13.5/03/Kesbangpol Tahun 2024 1292/SEK.PN.W16-U4/PL1.2.4/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024
4	**PT PALEMBANG**	PEMPROV. SUMATERA SELATAN	Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Kesatu	Belanja	103.935.128	2.500.000.000	028/NPHD/I/2024 & 2028/SEK.PT.W6.U/PL1.2.4/VI/2024 Tanggal: 6 Juni 2024
			Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Kedua	Belanja	1.112.841.340		
			Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Ketiga	Belanja	1.220.497.710		
			Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang	Keempat	Pengembalian	62.725.822		
5	**PN CIBINONG**	PEMKAB. BOGOR	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Cibinong	Kesatu	Belanja	368.906.880	482.524.000	900.1/013-Bakesbangpol/II/2024 & 764/KPN.W11-

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	RINCIAN		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NPH / BAST
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Cibinong	Kedua	Belanja	112.826.500		U20/PL1.2.4/II/2024 Tanggal: 13 Februari 2024
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Cibinong	Ketiga	Pengembalian	790.620		
6	**PA GRESIK**	PEMKAB. GRESIK	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Gresik	Kesatu	Belanja	495.760.739	600.000.000	124/572/437.77/2024 & 2680/W13-A17/KPA/KU.01.1/VII/2024 Tanggal: 24 Juli 2024
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Gresik	Kedua	Belanja	99.624.852		
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Gresik	Ketiga	Pengembalian + Admin Bank	4.597.043 + 17.366		
7	**PA CIANJUR**	PEMKAB. CIANJUR	Pemberian Bansos yang akan digunakan untuk belanja peralatan dan mesin berupa AC	Kesatu	Belanja	50.000.000	50.000.000	000.4.3.2/KEP.352-SETDA/2024 Tanggal: 29 Oktober 2024
8	**PT PAPUA BARAT**	PEMPROV. PAPUA BARAT	Pengadaan Rumah Dinas Ketua PT Papua Barat sebanyak 1 Unit Rumah	Kesatu	Belanja	1.000.000.000	1.000.000.000	164/NPHD-KESBANGPOL-PB/XII/2024 Tanggal: 6 Desember 2024
9	**PN GUNUNG SUGIH**	PEMKAB. LAMPUNG TENGAH	Pembayaran Renovasi Ruang Sidang dan Ruang PTSP termasuk Meubelair	Kesatu	Belanja	200.000.000	200.000.000	914/NPHD/B.a.VII.06/2024 Tanggal: 13 Desember 2024
TOTAL PEROLEHAN HIBAH UANG							**6.212.524.000**	

Adapun terdapat pengembalian hibah uang atas sisa realisasi belanja pada satker PT Palembang, PN Cibinong dan PA Gresik yang sudah dilakukan pengesahan SP4HL-nya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sehingga menimbulkan angka pada pada akun (391132) sebagai Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sejumlah Rp.68.113.485,00. Angka tersebut sudah dilakukan pengembalian uangnya ke rekening pemberi hibah sesuai dengan klausul di dalam Naskah Perjanjian Hibah.

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

S.D 31 DESEMBER 2024

AKUN : **391132** Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	62.725.822
0.0	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	790.620
0.0	005.01.401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	4.597.043
TOTAL			**68.113.485**

B. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang – Sudah Disahkan

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri bentuk barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II baik penerimaan tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu, sudah disahkan sejumlah **Rp140.521.969.493,00** (*seratus empat puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdapat pada 305 satuan kerja dengan 607 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah langsung dalam negeri berupa barang.

Tabel 2.2
Hibah Dalam Negeri Berupa Barang Per Jenis Aset Sudah Disahkan

NO	ASET YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
1	Tanah	25	Rp	28.333.923.091,00
2	Gedung dan Bangunan	177	Rp	55.706.589.632,00
3	Kendaraan Roda 4	26	Rp	14.249.982.790,00
4	Kendaraan Roda 2	0	Rp	-
5	Peralatan dan Mesin	379	Rp	42.231.473.980,00
TOTAL		**607**	**Rp**	**140.521.969.493,00**

C. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa – Sudah Disahkan

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri bentuk jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II baik penerimaan tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu yang sudah disahkan sejumlah **Rp11.661.240.776,00** (*sebelas milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang terdapat pada 19 satuan kerja dengan 37 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai manfaat apa saja yang telah diterima pada hibah langsung dalam negeri berupa jasa.

Tabel 2.3
Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa Menurut Manfaat Yang Diterima

NO	JASA YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
1	Jasa Konsultan	0	Rp	-
2	Jasa Outsourcing	27	Rp	10.348.061.152,00
3	Jasa Lainnya	10	Rp	1.313.179.624,00
TOTAL		**37**	**Rp**	**11.661.240.776,00**

D. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) – Sudah Disahkan

Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) merupakan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima pada tahun 2023 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibahnya. Penyelesaian administrasi dan pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga atas hibah yang diterima tahun anggaran yang lalu sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam tata cara penyelesaian hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020. Pengajuan permohonan nomor register hibah TAYL sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 dengan melampirkan Surat Pernyataan Hibah TAYL oleh kuasa pengguna anggaran satker atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu melalui aplikasi SEHATI yang akan terkirim kepada Kanwil DJPB setempat.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan hibah langsung dan pertanggungjawaban hibah langsung yang akuntabel, maka masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II yang mencatatkan pengesahan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang dan jasa tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar **Rp35.863.708.316,00** (*tiga puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah)* yang terdapat pada 65 satuan kerja dengan 102 dokumen pengesahan hibah yang NPH dan/atau BAST-nya tercatat pada penerimaan hibah TAYL. Angka ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari total perolehan hibah langsung bentuk barang dan jasa yang telah diungkapkan sebelumnya. Berikut lebih detail satker yang menerima hibah langsung bentuk barang TAYL.

Tabel 2.4
Hibah Barang Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
1	PN SUBANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	38.408.500	NPH.NO: 99/PKS/PWK.II/BFSU/XII/2-23 Tanggal: 21 Desember 2023	286XBCXA
2	PN SUBANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	50.000.000	NPH.NO: 87/PWK.11/XI/2023 Tanggal: 30 Oktober 2023	2YS9Q2TA
3	PN MALANG	PEMKOT. MALANG	PERALATAN DAN MESIN	143.000.000	NPH.NO: W14-U2/7741/HM.01.1/II/2020 Tanggal: 2 November 2020	2ZJECSYA
4	PN JAKARTA TIMUR	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	326.998.235	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/XII/2023 & 12963/SEK.W10-U5/PL1.2.4/12/2023 Tanggal: 19 Desember 2023	2PDMK6NA
5	PN JAKARTA UTARA	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	956.468.000	NPH.NO: 9269/SEK.PN/W10.U5/PL1.2.4/XII/2023 & 6998/NPH/KGS/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	2TK1TQNA
6	PT MANADO	PT. BANK SULUT GO	KENDARAAN RODA 4	605.000.000	BAST.NO: W19.U/753/PL/IV/2022 Tanggal: 11 April 2022	2EBB3QEA
7	PN LAHAT	PEMKAB. LAHAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.000.000.000	NPH.NO: 600/03/PUPR/2023 & 326a/SEK01.W6.U3/PL1.2.4/III/2023 Tanggal: 20 Maret 2022	2ZHPPZZA
8	PN TANJUNG PATI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	12.000.000	NPH.NO: 1677a/SEK.W3-U12/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	222RUFHA
9	PN TANJUNG PATI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	1.000.000	NPH.NO: 1678a/SEK.W3-U12/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	2GPD85AA
10	PN TANJUNG PATI	PT. BANK BRI (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	6.000.000	NPH.NO: 1679a/SEK.W3-U12/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	2DWX2Y8A
11	PT MEDAN	PEMPROV. SUMATERA UTARA	KENDARAAN RODA 4	1.343.300.000	NPH.NO: 0001.7/13694/2023 & W2.U/7253/UM.01.10/12/2023 Tanggal: 23 Oktober 2023	2G7WKTZA
12	PN BATURAJA	PT. BANK BSI (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	9.725.000	NPH.NO: 03/890-3/18061 & 100/KPN.W6-U4/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 1 September 2023	27YR4RSA
13	PT SULAWESI BARAT	PEMPROV. SULAWESI BARAT	TANAH	3.766.872.367	NPH.NO: 6 TAHUN 2021 & W22-U12/2509/PL.09/12/2021 Tanggal: 14 Desember 2021	2GBKVZ5A
14	PN ROKAN HILIR	PEMKAB. ROKAN HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	355.417.000	NPH.NO: 29/NPHD/BMD-AS/2023 & W4.U9/79a/PL.01/1/2023 Tanggal: 5 Januari 2023	2H13A15A
15	PN IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	149.800.000	NPH.NO: 083/1468.1/2022 Tanggal: 26 Oktober 2022	27MMNC1A
16	PN IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	69.903.900	NPH.NO: 083/0507/2023 Tanggal: 17 Juli 2023	2FH25RQA
17	PN IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.800.000	NPH.NO: 083/0507a/2023 Tanggal: 17 Juli 2023	2AZCZFKA
18	PA MUARA TEWE	PEMKAB. BARITO UTARA	PERALATAN DAN MESIN	86.800.000	NPH.NO: 400/578/NPHD/KESRA & W16-A4/1714/PL.02/XII/2022 Tanggal: 26 Desember 2022	2QX25G4A

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
19	PN BOGOR	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	180.000.000	NPH.NO: 369/S/BGR.UT/FSU.BFS/X/2023 & 2651/SEK.PN.W11.U2/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 27 Oktober 2023	2WPTD99A
20	PN BANGKINANG	PEMKAB. KAMPAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.307.163.900	NPH.NO: 640/PUPR-CK-BG/XII/503 & 4923/KPN.W4.U6/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 19 Desember 2023	2N3K9AZA
21	PN TAMIANG LAYANG	PEMKAB. BARITO TIMUR	GEDUNG DAN BANGUNAN	399.530.650	NPH.NO: W16-U7/1539a/PL.01/12/2022 & 030/26/BUM/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2G7N6STA
22	PN BANYUWANGI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	16.500.000	NPH.NO: 83/PKS/BWI.III/FSU/XII/2023 & 3321/SEK.W14-U16/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 28 Desember 2023	24YYUG6A
23	PN SUMEDANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	113.408.202	NPH.NO: 2462/BDT/BFSU/XI/23 & 1872.a/SEK.PN.W11-U13/PL1.2.4/XI/2023 Tanggal: 10 November 2023	29X8T21A
24	PN SUNGGUMINASA	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	40.404.000	NPH.NO: 420/PKS/PNK/FSU/XII/2023 & 2892/PAN.W22-U3/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 4 Desember 2023	2QY9EWLA
25	PA SIDOARJO	PEMKAB. SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	107.992.500	NPH.NO: 900/1046/438.6.5/2020 & W13-A16/4627/KU.0.1/10/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020	289BHSHA
26	PT KALIMANTAN UTARA	PEMPROV. KALIMANTAN UTARA	KENDARAAN RODA 4	352.400.000	NPH.NO: 100.3.7/3419/BKAD/SETDA & 712/SEK.02.W34-U/PL.1.2.4/X/2023 Tanggal: 6 Oktober 2023	2EHZTQ6A
27	PN MALANG	PEMKOT. MALANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.742.759.300	NPH.NO: 640/2227.3/35.73.403/2023 & 6023/SEK.PN.W14-U2/HM1/IX/2023 Tanggal: 15 September 2023	2BAB4JHA
28	PA KENDARI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	14.650.000	NPH.NO: 20/SEK.W21-A1/PL1.2.4/IX/2023 Tanggal: 14 September 2023	2DHQJR6A
29	PN PEKALONGAN	PEMKAB. PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	63.519.750	NPH.NO: 100.3.7/2680.1/IX/2023 & 3052.1/SEK.PN.W12.U4/UM.01/XI/2023 Tanggal: 10 November 2023	24PKGAVA
30	PN PEKALONGAN	PEMKAB. PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	123.100.000	NPH.NO: 100.3.7/2523.1/X/2023 & 3052/SEK.PN.W12.U4/UM.01/X/2023 Tanggal: 23 Oktober 2023	2WWFFPAA
31	PN ROKAN HILIR	PEMKAB. ROKAN HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	180.567.000	NPH.NO: 31/NPHD/BMD-AS/2023 & 2405a/SEK.01.W4.U9/PL.1.2.4/12/2023 Tanggal: 1 Desember 2023	24S87GQA
32	PN MALANG	PEMKOT. BATU	PERALATAN DAN MESIN	568.740.000	NPH.NO: 979/0870/422.205/2023 & 5951/KPN.W14-U2/HJM1/XI/2023 Tanggal: 6 November 2023	27SR3CTA
33	PA MATARAM	PEMPROV. NUSA TENGGARA BARAT	KENDARAAN RODA 4	559.880.000	NPH.NO: 027/991.a/BKBPDN/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	2J2Q5W7A
34	PA MATARAM	PEMPROV. NUSA TENGGARA BARAT	PERALATAN DAN MESIN	185.500.000	NPH.NO: 23/957.a/XII/BKBPDN/2023 Tanggal: 18 Desember 2023	2FNHCY9A
35	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	213.229.178	NPH.NO: W11.U21/1832a/NPH.BTN/III/2023 & 388, 769/M/JKK.1/FSU/III/2023 Tanggal: 29 Maret 2023	27NTN3PA
36	PN JANTHOI	PEMKAB. ACEH BESAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	138.670.000	NPH.NO: 41/NPHD/2023 Tanggal: 18 Oktober 2023	2FEJM61A
37	PN KOTABARU	PEMKAB. KOTABARU	KENDARAAN RODA 4	927.000.000	NPH.NO: 032/380/NPHD/ASET.BPKAD Tanggal: 25 November 2023	27RP2EGA
38	PA SUMENEP	PEMKAB. SUMENEP	GEDUNG DAN BANGUNAN	183.100.000	NPH.NO: 600.1.15.2/1/NPHD/108.2023 & W13-A32/1555/PL1.2.4/12/2023 Tanggal: 27 Desember 2023	25LMCYPA

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
39	PA SAMPANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	72.000.000	NPH.NO: W13-A31/0742/PL.01/2022 & Al-Firdaus/01/08/2022 Tanggal: 3 Agustus 2022	2QF3ZXRA
40	PN LUMAJANG	PT. BANK BRI (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	34.980.000	NPH.NO: B.2931.KC-XVI/LYI/12/2023 Tanggal: 28 Desember 2023	2J49EQ6A
41	PN BATANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	60.000.000	NPH.NO: 277/PKS/PKL.II/BFSU/XII/2023 & 2500/SEK.W.2.U33/UM.03/12/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	28NLTHRA
42	PA MUARA TEWE	PEMKAB. BARITO UTARA	KENDARAAN RODA 4	349.460.901	NPH.NO: 400/9/NPHD/KESRA/2023 Tanggal: 4 Desember 2023	26QUZK7A
43	PTA KEPULAUAN RIAU	PEMPROV. KEPULAUAN RIAU	TANAH	24.000.000	NPH.NO: B/032/493.6/BKAD-SET/2023 & W32-A/534/PL.02/5/2023 Tanggal: 12 Maret 2023	2QF3U34A
44	PN CIREBON	PEMKOT. CIREBON	TANAH & GEDUNG DAN BANGUNAN	2.506.323.000	NPH.NO: 593.33/50-NPHD/BPKPD/2023 & W11.43/972/PL.02/5/2023 Tanggal: 11 Mei 2023	2HJTH7HA
45	PA PENAJAM	PEMKAB. PENAJAM PASER UTARA	KENDARAAN RODA 4	622.290.000	NPH.NO: 028/147/BK/II/2020 Tanggal: 18 Februari 2020	2GE5LNMA
46	PN BANTAENG	PEMKAB. BANTAENG	GEDUNG DAN BANGUNAN	148.891.000	NPH.NO: 600.1.15.2/117/DPUPR/IV/2023 & W22.U5/463/PL.01/04/2023 Tanggal: 10 April 2023	28VQS9TA
47	PT BANDUNG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	249.686.000	NPH.NO: 38/NPH/BKS.I/FSU/V/2023 & 3883/SEK.W11-U/PL1.2.4/V/2023 Tanggal: 22 Mei 2023	21QK6BGA
48	PA LABUHAN BACAN	PEMKAB. HALMAHERA SELATAN	PERALATAN DAN MESIN	156.000.000	NPH.NO: 027/40/BKBP/2023 Tanggal: 2 Juni 2023	25QAC9WA
49	MS SUKA MAKMUE	PEMKAB. NAGAN RAYA	PERALATAN DAN MESIN	60.541.500	NPH.NO: 030/632/NPHD/2023 Tanggal: 12 Desember 2023	23H626MA
50	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	PERALATAN DAN MESIN	199.966.000	NPH.NO: 1560 Tahun 2023 Tanggal: 5 Juli 2023	292643NA
51	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	PERALATAN DAN MESIN	198.900.000	NPH.NO: 1560 Tahun 2023 Tanggal: 5 Juli 2023	2VXDPAAA
52	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.610.000	NPH.NO: 2162 Tahun 2023 Tanggal: 4 Desember 2023	24E6VBKA
53	PN BATANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	7.500.000	NPH.NO: 116/PKS/PKL.III/BFSU/VI/2023 & W12-U33/1371/KU.01/7/2023 Tanggal: 27 Juni 2023	2FBFA16A
54	PN MANDAILING NATAL	PEMKAB. MANDAILING NATAL	KENDARAAN RODA 4	474.700.000	NPH.NO: 030/3487/BPKAD/2023 & 1846/KPN.W2-U17/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 6 Desember 2023	2GSVZLYA
55	PN MAKASSAR	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	250.109.000	NPH.NO: 010/BAST/MKS/FSU/VIII/2023 & W22.U1/5401/PL.01/8/2023 Tanggal: 22 Agustus 2023	22UM2UCA
56	PA GRESIK	PEMKAB. GRESIK	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.235.176.811	BAST.NO: 032/1168/437.77/2023 & 671/SEK.PA.W13.A17/PL.01/12/2023 Tanggal: 23 Oktober 2023	2VX31E3A
57	PA KOTA BANJAR	PT. BANK BRI (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	45.226.894	NPH.NO: B.4685.KC-VI/LYI/11/2023 Tanggal: 29 November 2023	25456PQA
58	PTA KALIMANTAN UTARA	PEMPROV. KALIMANTAN UTARA	KENDARAAN RODA 4	352.400.000	NPH.NO: 100.3.7/3418/BKAD/SETDA & 895.a/KPTA.W34-A/PL1.2.4/X/2023 Tanggal: 6 Oktober 2023	2UAQC9PA

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
59	PN BANGLI	PEMKAB. BANGLI	GEDUNG DAN BANGUNAN	298.679.375	NPH.NO: 640.6/297/NPHD/PKKP/2021 & W24.U8/1123/PL.09/12/2021 Tanggal: 31 Desember 2021	2EGCVLVA
60	PA SUNGGUMINASA	PT. BANK BSI (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	12.200.000	NPH.NO: 03/792-03/579 Tanggal: 21 Agustus 2023	21ZT7V1A
61	PN SERANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	202.500.000	NPH.NO: 165/Clg.II/XII/2023 & 5620/SEK.03-W29.U1/PL1.2.4/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	21Z3EW7A
62	PA PANGKALAN KERINCI	PEMKAB. PELALAWAN	PERALATAN DAN MESIN	16.100.000	NPH.NO: 032/BPKAD/NHPD/2023/01 Tanggal: 2 November 2023	2LNSZAZA
63	PN SENGKANG	PEMKAB. WAJO	GEDUNG DAN BANGUNAN	489.921.000	NPH.NO: 600/741.a/DPUPRP/2023 & 874/PN.W22-U9/PL1.2.4/IX/2023 Tanggal: 4 September 2023	2PX3QXLA
64	PN BLORA	PEMKAB. BLORA	GEDUNG DAN BANGUNAN	197.620.000	NPH.NO: 900/1596.A/2023 Tanggal: 12 Juli 2023	225WUJTA
65	PN SUNGGUMINASA	PEMKAB. GOWA	GEDUNG DAN BANGUNAN & PERALATAN DAN MESIN	269.174.000	NPH.NO: 600.1.15.2/2866.a/DPUPR & 2290/SEK.W22-U3/HK1.3.1/X/2023 Tanggal: 25 Oktober 2023	2WW11YSA
66	PA BONTANG	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	11.500.000	NPH.NO: 208/CMT-GOV/BAS/CMR/XII/2023 Tanggal: 29 Desember 2023	2MWQCDXA
67	PN PULANG PISAU	PEMKAB. PULANG PISAU	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.500.000	NPH.NO: 600/379/NPHD/DPUPR.CK/XII/2023 Tanggal: 18 Desember 2023	2473SFVA
68	PN PULANG PISAU	PEMKAB. PULANG PISAU	GEDUNG DAN BANGUNAN	349.200.000	NPH.NO: 600/74/NPHD/DPUPR-TR/I/2023 Tanggal: 30 Juni 2023	2D8WXE9A
69	PA GEDONGTATAAN	PEMKAB. PESAWARAN	TANAH	62.500.000	NPH.NO: 01/PKS/KS/1.04/2023 & W8-A10/39/HM.00/1/2023 Tanggal: 11 Januari 2023	2B6572YA
70	MS SINGKIL	PEMKAB. ACEH SINGKIL	GEDUNG DAN BANGUNAN	189.360.000	NPH.NO: 032/0.1.4/NPHD/DPUPR/2022 & W1-A18/833/HM.01/II/2022 Tanggal: 4 Juli 2022	2M13T3GA
71	PN PANGKAJENE	PT. BANK Mandiri (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	188.450.000	NPH.NO: R10.Br.PHS/401/2022 & W22.U11/388/UM/X/2022 Tanggal: 29 September 2022	2FK8K1EA
72	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	150.000.000	NPH.NO: 46/NPH/BKS.I/FSU/X/2023 & 5603/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: 2 Oktober 2023	28JQ5P7A
73	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	230.000.000	NPH.NO: 32/NPH/BKS.I/FSU/IX/2023 & 4475/W11.U5/UM.00.1/IX/2023 Tanggal: 1 September 2023	2HHQKKZA
74	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	243.923.027	NPH.NO: 27/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 625/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: 26 Desember 2022	28GWSY5A
75	MS SIGLI	PEMKAB. PIDIE	GEDUNG DAN BANGUNAN	388.942.000	NPH.NO: 640/218/NPHD/PRKP/TAHUN 2022 Tanggal: 1 Desember 2022	29DY132A
76	PA TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	PERALATAN DAN MESIN	86.270.000	NPH.NO: 000.3/BKBP/X/2023/25 Tanggal: 27 Oktober 2023	2Q8EXYXA
77	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	129.492.500	NPH.NO: 40/NPH/BKS.I/FSU/VII/2023 & 4548/W11.U5/UM.00.1/VII/2023 Tanggal: 3 Juli 2023	2NQHBG7A
78	PT PAPUA BARAT	PEMPROV. PAPUA BARAT	TANAH	2.022.750.000	NPH.NO: 590/2028/GUB-PROV/VIII/2022 & 742/DJU/PL.02/8/2022 Tanggal: 3 Agustus 2022	23V69BLA

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
79	PA PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.400.000	NPH.NO: 32/NPHD/DPUPR/2023 Tanggal: 25 Desember 2023	2B1CZL9A
80	PA PARIGI	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	7.020.000	BAST.NO: 022239219/SKU/06/MKS/2023 Tanggal: 25 September 2023	21PRJLFA
81	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	456.842.700	NPH.NO: 25/NPH/BKS.I/FSU/XII/2022 & 192/W11.U5/UM.00.1/XII/2022 Tanggal: 12 Desember 2022	2N2V57QA
82	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	186.158.454	NPH.NO: 42/NPH/BKS.I/FSU/VI/2023 & 5599/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: 26 Juni 2023	2KZQVVXA
83	PN BEKASI	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	55.268.920	NPH.NO: 36/NPH/BKS.I/FSU/I/2023 & 5595/W11.U5/UM.001/XII/2023 Tanggal: 2 Januari 2023	25Y1BY5A
84	MS BLANGPIDIE	PEMKAB. ACEH BARAT DAYA	TANAH	19.435.200	NPH.NO: 032/191 & W1-A21/260/PL.02/1/2023 Tanggal: 30 Januari 2023	257DTHNA
85	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	177.955.200	NPH.NO: 1756/M/JKK.I/FSU/I/2024 & W11.U21/79/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 8 Desember 2023	28K6RBTA
86	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	292.722.025	NPH.NO: 1873/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/85/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 21 Desember 2023	2LF4CPFA
87	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	39.588.705	NPH.NO: 1673/M/JKK.I/FSU/XI/2023 & W11.U21/76/BTN.01.10/XI/2023 Tanggal: 30 November 2023	2WKELHZA
88	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	356.938.038	NPH.NO: 1836/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/83/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 21 Desember 2023	2PNYP22A
89	PN DEPOK	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	646.298.077	NPH.NO: 1824/M/JKK.I/FSU/XII/2023 & W11.U21/81/BTN.01.10/XII/2023 Tanggal: 20 Desember 2023	2L2LUEHA
90	PN TANJUNG BALAI	PEMKOT. TANJUNGBALAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	109.125.748	NPH.NO: 050.A/5345/PUPR/2022 Tanggal: 28 November 2022	2MAPSXCA
91	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	57.500.000	NPH.NO: 18/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/18/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 16 Agustus 2022	2H6PFCAA
92	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	69.000.000	NPH.NO: 15/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/15/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 16 Agustus 2022	29TZNC7A
93	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	20.158.211	NPH.NO: 12/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/12/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	27JCRH1A
94	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	JASA	849.364.434	NPH.NO: 27/NPH/CKR/FSU/XII/2022 & W11.U23/4664/UM.10.10/XII/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2GJB19AA
95	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	53.066.492	NPH.NO: 20/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/20/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 23 Agustus 2022	2RL4JMGA
96	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	54.000.000	NPH.NO: 21/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/21/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 23 Agustus 2022	2QN57PJA
97	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	61.438.500	NPH.NO: 22/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/22/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	23ATGP1A
98	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	94.236.500	NPH.NO: 13/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/13/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	298Z5SJA
99	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	199.643.906	NPH.NO: 7/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/2704/PL.10.10/IV/2022 Tanggal: 21 April 2022	2XBB9Y8A

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
100	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	PERALATAN DAN MESIN	65.700.000	NPH.NO: 14/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/14/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	2B3Y5HEA
101	PN CIKARANG	PT. BANK BTN (Persero) Tbk	GEDUNG DAN BANGUNAN	68.849.000	NPH.NO: 17/BAST/CKR/FSU/VIII/2022 & W11.U23/17/PL.01.10/VIII/2022 Tanggal: 12 Agustus 2022	2F4JD2EA
102	PN NATUNA	PEMKAB. NATUNA	GEDUNG DAN BANGUNAN	199.547.716	NPH.NO: 645.8/283/NPHD/PKP-UP2/XII/2023 & 89/SEK.W32-U4/KU.1.1/XII/2023 Tanggal: 20 Desember 2023	2QDCPEQA
TOTAL PEROLEHAN HIBAH TAYL				**35.863.708.316**		

Bagian

III

HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Mahkamah Agung RI telah menerima hibah langsung dari luar negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya menjadi hibah jasa tahun anggaran yang lalu per tanggal 31 Desember 2024 atau Semester II sejumlah **Rp24.682.645.629,00,00** (*dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).

A. Hibah Langsung Luar Negeri Berupa Jasa

Penerimaan hibah langsung dari luar negeri berupa jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 yang sudah disahkan dan dicatatkan sebagai hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) senilai **IDR 24.682.645.629,00,00** atau setara **AUD 2.389.322,37** yang berasal dari *Government of the Commonwealth of Australia - Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dalam proyek *Australia Indonesia Partnership for Justice Phase II* (AIPJ2) yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Kemitraan berfokus untuk mendukung kegiatan: transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi; mengatasi kejahatan lintas batas dan memperkuat keamanan; mencegah ekstremisme kekerasan; reformasi pemasyarakatan; dan pengembangan kemitraan.

Sebagai salah satu Kementerian/Lembaga Penerima Manfaat (*Beneficiary*), Mahkamah Agung RI telah melakukan pengesahan BAST ke KPPN dengan nomor register hibah (29JPW1VA) yang terbit pada tahun 2018 dan telah dilakukan pemukhtahiran data pada tahun 2022 oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) selaku *Executing Agency* sebagaimana telah dimuat dalam Subsidary Arrangement (SA) antara pihak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia.

Adapun detail manfaat yang diterima Mahkamah Agung RI dari hibah jasa yang diberikan pihak DFAT melalui proyek AIPJ Phase II, diantaranya :

Daftar Perincian Manfaat Hibah Berupa Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan
Dari *Government of the Commonwealth of Australia* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. Periode April 2017 – September 2018

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Persiapan penandatangan MoU antara MA dengan Family Court and Federal Court of Australia. 2. Biaya perjalanan MA untuk penandatanganan MoU antara MA dengan Family Court and Federal Court of Australia.	203.376,39	2.147.451.302,01	Memperbarui kerjasama antara Pengadilan Indonesia dan Australia, guna meningkatkan mekanisme tata kelola untuk reformasi hukum dan peradilan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis kepada MA melalui Tim Asistensi Pembaruan. 2. Memberikan bantuan operasional kepada Tim Asistensi Pembaruan. 3. Bantuan teknis kepada MA dalam kegiatan terkait *Ease of Doing Business* dan penyusunan Perma No.3 Tahun 2018 tentang e-Court	28.080,44	296.501.365,96	Lembaga peradilan yang akuntabel serta mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Penyusunan Perma No.3 Tahun 2017. 2. Penyusunan Buku Pedoman PBDH. 3. Sosialisasi Perma No.3 Tahun 2017 di 4 Daerah (Jakarta, Makassar, Yogyakarta dan Aceh).	221.085,88	2.334.445.806,92	Peningkatan akses terhadap keadilan dan layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.
		Total	**AUD 452.542,71**	**IDR 4.778.398.474,89**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.559*

B. Periode Juli s.d. Desember 2019

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan untuk pembahasan terkait Perma Dispensasi Kawin.	7.013,32	67.117.472,40	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam *Ease of Doing Business.* 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court.	76.025,54	727.564.417,80	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Penelitian simplifikasi template putusan untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di 4 lingkungan peradilan	41.161,59	393.916.416,30	Peningkatan layanan pengadilan terkait hasil putusan.
		Total	**AUD 124.200,45**	**IDR1.188.598.306,50**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 9.570*

C. Periode Januari s.d. Desember 2020

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan untuk pembahasan terkait Perma Dispensasi Kawin.	28.290,74	283.642.959,24	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam *Ease of Doing Business.* 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court.	74.797,94	749.924.146,44	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Penelitian simplifikasi template putusan untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di 4 lingkungan peradilan.	129.565,65	1.299.025.206,90	Peningkatan layanan pengadilan terkait hasil putusan.
		Total	**AUD 232.654,33**	**IDR 2.332.592.312,58**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.025,90*

D. Periode Januari s.d. Juni 2021

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan untuk pembahasan terkait Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5/2019 bagi Hakim.	44.282,24	485.997.584,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam *Ease of Doing Business* . 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court	37.452,36	411.039.651,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
		Total	**AUD 81.734,60**	**IDR 897.037.235,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.974,99*

E. Periode Juli s.d. Desember 2021

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 2. Pertemuan berkala Pokja Perempuan.	105.395,64	1.137.745.934,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan. • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	1. Bantuan teknis untuk peningkatan indeks dalam Ease of Doing Business 2. Bantuan Teknis penyusunan rancangan Perma 3/2018 tentang e-Court. 3. Bantuan Teknis implementasi dan Evaluasi Perma 3/2018 tentang e-Court.	36.407,64	393.020.474,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business.*
		Total	**AUD 141.803,28**	**IDR 1.530.766.408,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.795*

F. Periode Januari s.d. Desember 2022

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Imdonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.	36.234,00	373.689.395,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan • Penguatan akses keadilan perempuan dan anak perempuan
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis tindak lanjut *Court Risk Assesment*	6.956,00	71.738.793,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business*
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Pelaksanaan event dan bantuan teknis penyusunan panduan implementasi keadilan restoratif (Konsorsium RJ-LeIP)	87.245,00	899.775.092,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan
4.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Pelaksanaan event dan bantuan teknis dalam pembaruan pengadilan niaga	154.080,00	1.589.061.708,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan • Penguatan mekanisme penanganan perkara komersil • Peningkatan indeks Indonesia dalam *Ease of Doing Business*
		Total	**AUD 284.515,00**	**IDR 2.934.264.988,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.313*

G. Periode Januari s.d. Desember 2023

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
1.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis pengelolaan kontribusi masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan .	44.010,00	452.510.820,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan.
2.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis pelaksanaan tindaklanjut *Court Risk Assesment* • Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan • Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI • Pelaksanaan program oleh *Transparency International Indonesia* (TII)	122.659,00	1.261.175.725,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan.
3.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Bantuan teknis penerapan prinsip keadilan restoratif: • Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penerapan Keadilan Restoratif. • Pelaksanaan program oleh Konsorsium Organisasi Masyarakat Sipil untuk penerapan keadilan restoratif (*Indonesian Judicial Research Society dan Institute for Criminal Justice Reform*). • Penyusunan rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung untuk penanganan perkara narkotika.	81.772,00	840.783.817,00	• Peningkatan tata kelola reformasi hukum dan peradilan. • Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan. • Peningkatan kepercayaan publik terhadap peradilan.

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
4.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Dukungan untuk Penguatan Kepemimpinan Perempuan di Peradilan • Konferensi Internasional Hakim Perempuan di Marocco • Diskusi Merumuskan Spesifikasi Fungsional & Pengembangan Aplikasi Lentera untuk promosi dan mutasi hakim • Diskusi Publik Pembaruan Proses Promosi Mutasi Hakim di Lingkungan Badilum • Seminar pembentukan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia	135.038,00	1.388.464.212,00	• Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Penguatan akses keadilan dan peradilan inklusif
5.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Dukungan untuk peradilan inklusif dan perempuan berhadapan dengan hukum • Kunjungan kerja ke Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) • Pertukaran pengetahuan dengan tentang nafkah/tunjangan keluarga paska perceraian • Sosialisasi Gugatan Mandiri • Lokakarya Perspektif Gender & Disabilitas Bawas MA RI • MoU pendampiangan penguatan layanan dan kapasitas aparatur pengadilan untuk mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas (6 pengadilan)	365.104,00	3.753.995.832,00	• Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Penguatan akses keadilan dan peradilan inklusif

No.	Nama Proyek	Rincian Kegiatan/Manfaat	Nilai		Tujuan Kegiatan
			Dalam Dollar Australia	Dalam Rupiah Indonesia	
		• Kegiatan Pokja Perempuan & Anak MA-RI • Bantuan teknis mitra organisasi masyarakat sipil (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak/SAPDA, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB, Legal Development Partner/LDP)			
6.	Australia Indonesia Partnership for Justice II	Dukungan untuk penguatan peradilan niaga dan peradilan elektronik (e-Court) • Bantuan Teknis Konsultan dan Pelaksanaan Program • *Seminar on Civil Procedural Law through Adoption of International Convention* • Sosialisasi B-Ready ke PN Surabaya • FGD Pembahasan Kertas Kerja Survey EODB (B-Ready) Bank Dunia Tahun 2023 • *International Seminar on Bankruptcy and Suspension of Payment* • *Support of Development of Indonesian Version of IP Bench Book*	323.289,00	3.324.057.498,00	• Penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas peradilan • Penguatan kepastian hukum dan iklim usaha nasional
		Total	**AUD 1.071.872,00**	**IDR 11.020.987.904,00**	

**Nilai Tukar 1 AUD setara IDR 10.282*

LAPORAN PHLN
TINGKAT MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR REGISTER 29JPW1VA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2024
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Hibah				
Penerimaan Hibah Luar Negeri (1)	xxx	xxx	xxx	Rp.24.682.645.629,00
Jumlah Pendapatan Hibah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**Rp24.682.645.629,00**
B. Belanja yang Bersumber dari PHLN				
1. Belanja Pegawai (2)	xxx	xxx	xxx	0
2. Belanja Barang (3)	xxx	xxx	xxx	0
3. Belanja Modal (4)	xxx	xxx	xxx	0
4. Belanja Bantuan Sosial (5)	xxx	xxx	xxx	0
5. Belanja Lain-lain (6)	xxx	xxx	xxx	Rp.24.682.645.629,00
Jumlah Belanja yang Bersumber dari PHLN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**Rp.24.682.645.629,00**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**0**
D. Pembiayaan				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (7)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D-C)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

Lampiran 1 :
Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Berjalan (TAB)
Semester II TA 2024

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	2H32MKNA	402540	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
2	2BSK4ZSA	402964	PTA SEMARANG	BARANG	DN	Rp	1.617.098.803,00
3	2NNFYFLA	401777	PTA MEDAN	BARANG	DN	Rp	70.000.000,00
4	2F48CS6A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	58.745.390,00
5	26N3FZ8A	097500	PT BANDUNG	JASA	DN	Rp	16.256.713,00
6	23JGFZ8A	097762	PN PATI	BARANG	DN	Rp	5.200.000,00
7	2V621WJA	308170	PTA SURABAYA	BARANG	DN	Rp	1.782.612.700,00
8	23BQ48HA	307424	PTA MAKASSAR	BARANG	DN	Rp	20.000.000,00
9	294M2W6A	402010	PA BUKITTINGGI	BARANG	DN	Rp	35.800.000,00
10	2CQXNBUA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	550.000,00
11	2B1AMY3A	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	950.000,00
12	2E23CQGA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	900.000,00
13	26CA344A	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	1.050.000,00
14	2YP6D1ZA	402989	PTA PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	1.514.617.872,00
15	2JB1HPKA	402989	PTA PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	106.814.675,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
16	217LKC9A	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	3.438.000,00
17	2KURC4KA	099003	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp	20.599.380,00
18	2WMM3WCA	400832	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp	34.931.000,00
19	2X5MZLDA	098434	PT BANDA ACEH	BARANG	DN	Rp	42.447.906,00
20	2EEXQADA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	455.065.900,00
21	2CHWWBMA	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	299.700.000,00
22	2RCSDFBA	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	1.965.600.000,00
23	2G7941UA	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.698.300.000,00
24	2CND8DQA	526736	PTTUN MATARAM	BARANG	DN	Rp	544.110.000,00
25	2F9S7ADA	097762	PN PATI	BARANG	DN	Rp	149.074.000,00
26	2C4933TA	402593	PA AMBARAWA	BARANG	DN	Rp	32.200.000,00
27	294GCNZA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	250.000.000,00
28	2FD1GP8A	307580	PA PINRANG	BARANG	DN	Rp	17.740.000,00
29	2ZYKZZCA	401271	PA JOMBANG	BARANG	DN	Rp	22.000.000,00
30	2D518UWA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	7.900.000,00
31	2QWSF8HA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
32	27R34SUA	098200	PN JEMBER	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
33	2PW1BAEA	098832	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp	3.650.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
34	22WZ65JA	097691	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp	91.461.000,00
35	21NWDECA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	233.948.400,00
36	2C375WPA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	45.700.000,00
37	2BVM3HAA	099180	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	2.500.000,00
38	24YWCQVA	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	1.800.000,00
39	2PRDR7FA	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	431.774.000,00
40	2XSFASCA	400559	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp	13.675.000,00
41	2DHVS3QA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
42	2UB5YURA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	226.500.032,00
43	2LYACQHA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	399.380.000,00
44	21AN2KQA	307445	PA MAROS	BARANG	DN	Rp	7.600.000,00
45	26VUZC6A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
46	27XUVQNA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.925.000,00
47	2VLNLTPA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
48	23CELGAA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.540.000,00
49	2KRW86UA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.465.000,00
50	29JVMK8A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.465.000,00
51	287E2HDA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.925.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
52	2X8FGBVA	099219	PN KOTABARU	BARANG	DN	Rp	2.878.887.000,00
53	2GTF5V7A	401879	PA BELOPA	BARANG	DN	Rp	48.360.000,00
54	2KD7VAJA	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	3.233.000,00
55	25B5R5MA	417850	PA PANDEGLANG	BARANG	DN	Rp	25.000.000,00
56	2LNQ7GPA	578839	PTUN JAMBI	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
57	2G6712VA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
58	2PDQPXBA	099862	PN MATARAM	BARANG	DN	Rp	29.950.000,00
59	2PMF5W3A	402519	PA MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	166.775.000,00
60	2XXGYR4A	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	53.920.860,00
61	2Q5HK1VA	097467	PT JAKARTA	BARANG	DN	Rp	599.983.266,00
62	2JBPFVHA	099905	PN DOMPU	BARANG	DN	Rp	299.909.517,00
63	22GDRNRA	526704	PTTUN JAKARTA	BARANG	DN	Rp	117.800.000,00
64	2JXVVNRA	307580	PA PINRANG	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
65	22REJ6XA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	51.850.320,00
66	297MP6SA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	140.294.000,00
67	2YU4UTZA	400194	PN PUTUSSIBAU	BARANG	DN	Rp	69.000.000,00
68	2HZAXM2A	400245	PT KUPANG	BARANG	DN	Rp	47.790.000,00
69	2DEMFCYA	097687	PN INDRAMAYU	BARANG	DN	Rp	66.000.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
70	2MTT62SA	402449	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	28.200.000,00
71	2KZ6LY2A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	2.725.000,00
72	2G6S3Q3A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	3.200.000,00
73	22TMHQDA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.840.000,00
74	25WQZ86A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.700.000,00
75	2D3MEBNA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.585.000,00
76	2LUQ73YA	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.750.000,00
77	2LAKD84A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
78	2KDEH39A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	2.800.000,00
79	2TWVAE9A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	273.731.000,00
80	2TWVAE9A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	2.780.000,00
81	2F1HCKTA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	46.775.000,00
82	2YKKVPGA	400409	PN CIBADAK	BARANG	DN	Rp	148.881.525,00
83	2L2ZRFVA	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	4.440.000,00
84	2NSA61MA	400446	PN KOTOBARU	BARANG	DN	Rp	35.000.000,00
85	2U46BY8A	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.700.000.000,00
86	2MBC1N9A	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	594.500.000,00
87	22GGH3JA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	18.370.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
88	2YXQXUUA	400075	PN SORONG	BARANG	DN	Rp	520.000.000,00
89	28JR9R6A	578864	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp	139.585.000,00
90	2C8493JA	099329	PN MANADO	JASA	DN	Rp	48.000.000,00
91	2GDUHXKA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	79.978.900,00
92	29WQSNNA	401375	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	349.999.930,00
93	2YGQG8PA	097577	PN RANGKAS BITUNG	JASA	DN	Rp	136.500.000,00
94	2B8W31PA	401463	PA KRAKSAAN	BARANG	DN	Rp	222.500.000,00
95	2H83DZ9A	402820	PA SOE	BARANG	DN	Rp	5.400.000,00
96	29MADRVA	401369	PA BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	492.155.136,00
97	2KRYUT3A	578822	PTUN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	15.250.000,00
98	2SPQ8PEA	568725	PN BITUNG	BARANG	DN	Rp	143.076.780,00
99	2RE59WQA	401919	PN NANGA BULIK	BARANG	DN	Rp	1.292.100,00
100	2UWE7H3A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	9.133.600,00
101	2EQ1YSAA	578839	PTUN JAMBI	BARANG	DN	Rp	9.000.000,00
102	2Y7KM39A	402480	PTA SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	10.411.500,00
103	2Y2BED4A	400967	PA PATI	BARANG	DN	Rp	149.148.000,00
104	2VNUDRNA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	37.840.500,00
105	2834ECCA	099197	PN BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	16.900.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
106	2T8JLHZA	401322	PA LAMONGAN	BARANG	DN	Rp	487.292.600,00
107	2W7GETMA	402010	PA BUKITTINGGI	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
108	26G3BZGA	401918	PN KUALA KURUN	BARANG	DN	Rp	1.600.000,00
109	2CMKGJCA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	46.800.000,00
110	2SKP8FNA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	47.311.000,00
111	2HR45NFA	098743	PT PADANG	BARANG	DN	Rp	412.790.250,00
112	23N7HE2A	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	42.860.000,00
113	2TB9ZF1A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	11.500.000,00
114	2TGQC95A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	41.578.000,00
115	2GECZS1A	097982	PN BOYOLALI	BARANG	DN	Rp	140.000.000,00
116	2XKHPBVA	097542	PN GARUT	BARANG	DN	Rp	299.000.000,00
117	2P8KPBJA	099308	PN BALIKPAPAN	BARANG	DN	Rp	43.452.900,00
118	2ZZWNJ1A	098959	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp	416.649.000,00
119	28181ABA	307712	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp	8.800.000,00
120	2R7LKF2A	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	8.325.000,00
121	23U8GHEA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	60.693.000,00
122	2A87AJ8A	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
123	24Z28HMA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
124	24YM6UTA	098260	PN TRENGGALEK	BARANG	DN	Rp	6.255.000,00
125	2Y3QVVYA	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	4.750.000,00
126	2BX4PC4A	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
127	2RYSWDSA	401199	PA YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	2.000.000,00
128	253V1JFA	400172	PN BANTUL	BARANG	DN	Rp	7.900.000,00
129	2VFBBJ4A	098959	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp	332.955.600,00
130	2EM6T72A	097624	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp	1.718.000.000,00
131	2EM6T72A	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	325.000.000,00
132	2UVLVZ6A	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	20.800.000,00
133	2JGU2TFA	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	60.213.745,00
134	2T87B54A	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp	1.875.000.000,00
135	2Q2HXPCA	401877	PA PENAJAM	BARANG	DN	Rp	594.500.000,00
136	26QCGX8A	099286	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	33.378.100,00
137	2V85BCRA	578822	PTUN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	564.976.373,00
138	2CD3EBZA	400750	PA CIREBON	BARANG	DN	Rp	9.248.900,00
139	2HJ84ZLA	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	2.032.400.000,00
140	2H65RJGA	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	27.500.000,00
141	2AJ7D8NA	097556	PN CIAMIS	BARANG	DN	Rp	9.600.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
142	235QTE3A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	499.077.851,00
143	27TZPGGA	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	15.225.000,00
144	2NRV69MA	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	2.250.000,00
145	2PRQEY8A	097776	PN BREBES	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
146	2BVULU4A	401322	PA LAMONGAN	BARANG	DN	Rp	38.250.000,00
147	25HCVQMA	097720	PN SEMARANG	JASA	DN	Rp	407.750.000,00
148	22GCVSEA	097720	PN SEMARANG	BARANG	DN	Rp	860.450.710,00
149	2BC8GWRA	097975	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp	8.200.000,00
150	27123BPA	450737	PA TUBAN	BARANG	DN	Rp	30.460.000,00
151	2VPZ6Z4A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	190.537.000,00
152	2Q4XZSLA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	81.000.000,00
153	2V4ZW9GA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	90.000.000,00
154	2YW9E71A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	683.000.995,00
155	2K7TQEQA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	22.400.000,00
156	27DRECJA	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	30.060.220,00
157	219PAF1A	308170	PTA SURABAYA	BARANG	DN	Rp	57.500.000,00
158	2VNQSXDA	401545	PA BANGKALAN	BARANG	DN	Rp	34.087.000,00
159	2P1PDBAA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	29.700.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
160	2E4BEUEA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	20.000.000,00
161	2NEVTHPA	097577	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp	397.800.000,00
162	2J3R8TWA	099401	PN POSO	BARANG	DN	Rp	77.400.000,00
163	21RSJ7TA	097802	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
164	238BKXNA	098015	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp	145.600.000,00
165	28MBDTYA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	347.457.150,00
166	2F6YF5PA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	11.876.000,00
167	2EDQMSQA	576260	PTA KUPANG	BARANG	DN	Rp	20.736.000,00
168	2T8PGP5A	097652	PN SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	20.400.000,00
169	2VASQUDA	098256	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	Rp	7.758.000,00
170	2P33X96A	099780	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp	38.010.000,00
171	21DJ2E6A	099773	PT DENPASAR	BARANG	DN	Rp	2.359.200.000,00
172	2WMVNJUA	403021	PA MUNGKID	BARANG	DN	Rp	404.166.000,00
173	2GN4Y64A	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	6.438.000,00
174	228ELTNA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	98.646.721,00
175	2JGNNHJA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	32.365.000,00
176	2YVJJSJA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	13.300.000,00
177	2V8C9PXA	097890	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp	68.564.900,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
178	2CHDDGVA	099439	PN SUNGGUMINASA	JASA	DN	Rp	22.022.000,00
179	2YKJE9MA	098629	PN MEDAN	BARANG	DN	Rp	92.000.000,00
180	2E78K92A	097780	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp	17.750.000,00
181	2U3Q8ZQA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	71.422.450,00
182	21U2Q8LA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	25.500.000,00
183	2EXS3HWA	400565	PN SLAWI	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
184	2HSNLQFA	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
185	2BSP8DAA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	65.000.000,00
186	2VK5E2TA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	324.809.994,00
187	2XNXG6PA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	19.402.000,00
188	2M8BHJMA	526771	PTUN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	12.600.000,00
189	2127X9EA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	18.600.000,00
190	2VYGDZ2A	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	7.550.000,00
191	2AZ2W49A	098590	PN TAPAK TUAN	BARANG	DN	Rp	808.576.000,00
192	2JFF6Q4A	098938	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp	6.750.000,00
193	2V1WHUZA	307445	PA MAROS	BARANG	DN	Rp	5.580.000,00
194	2LBSQ3PA	400483	PN BALE BANDUNG	JASA	DN	Rp	149.110.000,00
195	2SE5F7VA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	6.750.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
196	2AV6UDTA	402540	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp	10.036.000,00
197	2W7SX2JA	099621	PN MAJENE	BARANG	DN	Rp	113.141.960,00
198	28CPUX7A	099532	PN WATAMPONE	BARANG	DN	Rp	11.970.000,00
199	2CJWN98A	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
200	298BERCA	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
201	2SUHDBTA	402556	PA AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	24.800.000,00
202	2BLS861A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
203	21ZQKGDA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
204	2ZEAJVJA	098167	PN SIDOARJO	BARANG	DN	Rp	143.190.000,00
205	2MQNJGKA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
206	2HALQ98A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
207	2MKVXPUA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
208	29BT39ZA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
209	2BSUKB5A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
210	2E67EVTA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
211	2ARJMZJA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
212	2EFS3GWA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
213	2XY8ULKA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
214	23N2KDMA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	431.920.000,00
215	2V6QD4KA	099638	PN MAMUJU	BARANG	DN	Rp	21.143.200,00
216	2DGBC5ZA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	87.814.510,00
217	22RYTSNA	477306	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	Rp	64.000.000,00
218	2CZGRJSA	663026	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp	230.558.020,00
219	21CBWKTA	400483	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	Rp	1.153.318.257,00
220	24EBNLYA	682260	PA BATULICIN	BARANG	DN	Rp	310.000.000,00
221	2WK4QMKA	099180	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	75.500.000,00
222	2EXERNBA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	96.638.000,00
223	2Q7KST6A	097514	PN BANDUNG	BARANG	DN	Rp	577.877.225,00
224	2LZQKLYA	401960	PA SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp	5.500.000,00
225	2S9BZ76A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	39.800.000,00
226	2E6L1NSA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	295.210.041,00
227	2WY4BXCA	097933	PN SURAKARTA	BARANG	DN	Rp	309.884.000,00
228	28E6HYCA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
229	27QJ5RLA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	4.260.000,00
230	2L6BNYJA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	3.659.000,00
231	2NZ8W7SA	400245	PT KUPANG	BARANG	DN	Rp	18.500.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
232	2UDUBQVA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	15.350.000,00
233	2F49PJZA	402468	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp	306.420.000,00
234	2MDK1DXA	400452	PN KALIANDA	BARANG	DN	Rp	30.000.000,00
235	2NEPR99A	099401	PN POSO	BARANG	DN	Rp	5.025.000.000,00
236	2X9UPN1A	400817	PA RANGKASBITUNG	BARANG	DN	Rp	10.600.000,00
237	2VQXTSLA	400327	PN DUMAI	BARANG	DN	Rp	1.070.147.943,00
238	2R2B6R8A	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	28.047.000,00
239	2ZNMSZLA	402500	PA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	11.600.000,00
240	23KH114A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	36.225.000,00
241	2XZMLDBA	099176	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp	9.475.000,00
242	28PQCN1A	400291	PN TANJUNG REDEB	BARANG	DN	Rp	25.905.180,00
243	2BWM125A	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	13.140.000,00
244	2ABDB6MA	099290	PN TENGGARONG	BARANG	DN	Rp	23.697.000,00
245	2XY91C2A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	4.680.000,00
246	24PJ188A	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	77.700.000,00
247	2HD6MPZA	401879	PA BELOPA	BARANG	DN	Rp	37.660.000,00
248	29FQMB4A	097666	PN CIANJUR	BARANG	DN	Rp	409.297.044,00
249	238RNTTA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	3.580.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
250	2G8XVMYA	099418	PT UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
251	293JZXYA	099418	PT UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	13.900.000,00
252	2TK95CEA	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	11.000.000,00
253	2Z7PKLEA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	2.032.501.047,00
254	2X1USAXA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	168.100.000,00
255	2R52PFKA	477380	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp	933.220.600,00
256	2P486ENA	307491	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	273.220.000,00
257	2NA51YWA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	7.150.000,00
258	2WR6UJBA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	10.750.000,00
259	2CQC4KKA	099251	PN AMUNTAI	BARANG	DN	Rp	12.250.000,00
260	2ACRZ9SA	526704	PTTUN JAKARTA	BARANG	DN	Rp	135.000.000,00
261	2ZU8F5CA	400370	PN SIMALUNGUN	BARANG	DN	Rp	132.720.000,00
262	2V1PAX2A	099120	PN PALANGKARAYA	BARANG	DN	Rp	73.000.000,00
263	242R2WDA	098832	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp	3.800.000,00
264	2G2395BA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	81.000.000,00
265	2TY8R1DA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	36.450.000,00
266	2XRB4J3A	108025	PN STABAT	BARANG	DN	Rp	17.900.000,00
267	2JD173AA	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	159.840.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
268	279FQM8A	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	5.500.000,00
269	27HVM42A	097954	PN WONOGIRI	BARANG	DN	Rp	34.993.000,00
270	28296H8A	097954	PN WONOGIRI	BARANG	DN	Rp	10.000.000,00
271	22F5QGVA	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	199.825.000,00
272	2XNTJBRA	099581	PN BULUKUMBA	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
273	2P5L66VA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	136.700.000,00
274	2UX1ARXA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	5.928.000,00
275	282TZG1A	402525	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp	396.300.000,00
276	24G5G1SA	097577	PN RANGKAS BITUNG	JASA	DN	Rp	28.870.000,00
277	2MXL5KGA	099091	PN KETAPANG	BARANG	DN	Rp	105.843.708,00
278	26V6F5DA	663398	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp	1.124.564.000,00
279	226L6E9A	663398	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp	231.768.000,00
280	2JRXD68A	098701	PN PEMATANG SIANTAR	BARANG	DN	Rp	73.602.000,00
281	2UX9LREA	673013	PN MALILI	BARANG	DN	Rp	1.575.587.832,00
282	2QFDDL5A	098331	PN KRAKSAAN	BARANG	DN	Rp	410.783.250,00
283	2P6SA7XA	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	35.850.000,00
284	279F358A	097819	PN PURWODADI	BARANG	DN	Rp	54.179.714,00
285	2HD9LC7A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	41.300.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
286	2G27NG2A	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	28.310.550,00
287	2DHGW1PA	099794	PN SINGARAJA	BARANG	DN	Rp	9.500.000,00
288	2G7TZFQA	099802	PN NEGARA	BARANG	DN	Rp	2.300.000,00
289	2DEEJHBA	400208	PN LIMBOTO	BARANG	DN	Rp	66.434.000,00
290	2QDYA64A	098860	PN RENGAT	BARANG	DN	Rp	27.950.000,00
291	2RNLZY1A	604730	PA KAB. MALANG (KEPANJEN)	BARANG	DN	Rp	100.000.000,00
292	23TSB59A	526711	PTTUN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	2.100.000,00
293	2UKTUWVA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	58.986.000,00
294	2AKEJPSA	099286	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp	65.467.050,00
295	2UH5UHZA	099197	PN BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp	762.700.000,00
296	26EVCLPA	099308	PN BALIKPAPAN	BARANG	DN	Rp	90.168.000,00
297	2UWNAUBA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	87.900.000,00
298	2YF6EQFA	099230	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	10.036.000,00
299	2F33W7PA	099230	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp	23.849.800,00
300	2MTLSFZA	098324	PN BANGIL	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
301	2YKYCE5A	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	23.550.000,00
302	2H4X722A	098171	PN MOJOKERTO	BARANG	DN	Rp	95.807.000,00
303	2NCKCT5A	098171	PN MOJOKERTO	BARANG	DN	Rp	29.193.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
304	2VGYVNKA	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	7.500.000,00
305	2QZCAJMA	099109	PN MEMPAWAH	BARANG	DN	Rp	203.210.000,00
306	2SRZTRNA	400951	PA PURWODADI	BARANG	DN	Rp	93.999.925,00
307	26GABS6A	400735	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	8.300.000,00
308	2VGP1AQA	400735	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
309	2PCZPUYA	400477	PN SUMBER	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
310	23N4YK6A	402562	PA TANJUNG	BARANG	DN	Rp	7.200.000,00
311	2GHBS7LA	402669	PA MEMPAWAH	BARANG	DN	Rp	13.000.000,00
312	2UUR7GMA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	40.236.000,00
313	2SCLGPZA	097908	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp	366.746.000,00
314	2HERT1KA	099066	PN PONTIANAK	BARANG	DN	Rp	585.400.000,00
315	2KLBW1YA	097996	PN KLATEN	BARANG	DN	Rp	640.580.000,00
316	27Z5JT2A	400911	PA SEMARANG	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
317	2FBKC27A	663026	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp	547.000.000,00
318	23USSP8A	417844	PN PANDEGLANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
319	2EULT82A	097514	PN BANDUNG	JASA	DN	Rp	41.996.850,00
320	2TX8S33A	097872	PN BATANG	BARANG	DN	Rp	186.873.000,00
321	24NUUK5A	576274	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp	79.700.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
322	2HHZ11VA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	17.950.000,00
323	2QTUAS5A	097912	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	Rp	150.742.000,00
324	2VTEYJRA	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	199.691.000,00
325	2713Y78A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	8.600.000,00
326	2CAN3AWA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
327	26AHUCEA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
328	2LPQDNBA	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.600.000,00
329	2L5WRL3A	402097	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	161.950.000,00
330	2P63QCJA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	129.523.000,00
331	2GHXFTCA	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	180.606.000,00
332	27VW4R4A	402324	PA TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp	6.200.000,00
333	2A5BA1MA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	138.755.800,00
334	2R3SEG7A	401582	MS ACEH	BARANG	DN	Rp	1.535.404.380,00
335	2KKXE9TA	401924	PN PENAJAM	BARANG	DN	Rp	39.000.000,00
336	22DBVXKA	400885	PA TEGAL	BARANG	DN	Rp	17.550.000,00
337	26N9EGKA	099329	PN MANADO	BARANG	DN	Rp	43.537.300,00
338	272TAF8A	099492	PN PAREPARE	BARANG	DN	Rp	9.500.000,00
339	2BTUD1UA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	55.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
340	2BTUD1UA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	12.300.000,00
341	268ZZNQA	098849	PN PEKANBARU	BARANG	DN	Rp	77.250.000,00
342	264RCHWA	402117	PA BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	1.956.447.410,00
343	2QCZGT3A	098036	PN PURBALINGGA	BARANG	DN	Rp	7.788.000,00
344	25UDGLAA	400126	PN CURUP	BARANG	DN	Rp	35.685.000,00
345	27JZFQPA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	263.963.232,00
346	2XLSHWDA	400214	PN JAKARTA SELATAN	BARANG	DN	Rp	739.249.000,00
347	2LUQHQGA	099354	PA TONDANO	BARANG	DN	Rp	177.097.000,00
348	2MFNEYNA	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	49.900.000,00
349	2BGRNG2A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	7.699.000,00
350	2QE8B9CA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	155.000.000,00
351	2ML8S86A	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	7.000.000,00
352	2LV78S6A	099176	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp	6.597.000,00
353	2DW4K36A	098420	PN SAMPANG	BARANG	DN	Rp	32.116.000,00
354	2PSG3FCA	400194	PN PUTUSSIBAU	BARANG	DN	Rp	123.674.446,00
355	2EV8NFRA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
356	2FKVMR2A	401955	PA TULANG BAWANG TENGAH	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
357	23D2T2BA	097691	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp	43.100.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
358	2EQ792JA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	149.829.350,00
359	2XUNVQFA	098853	PN BENGKALIS	BARANG	DN	Rp	49.947.000,00
360	2GG4HX7A	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	6.500.000,00
361	21BGHSPA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	300.000.000,00
362	24VQG3GA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	12.124.000,00
363	2JV8F75A	400110	PN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	249.607.000,00
364	25M3VYXA	400110	PN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
365	2CGMA6HA	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	22.700.000,00
366	2152GPAA	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	2.500.000,00
367	26XTMZ2A	099663	PN BAU BAU	BARANG	DN	Rp	5.549.000,00
368	2QKECPQA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	26.000.000,00
369	2FLGUHHA	097467	PT JAKARTA	BARANG	DN	Rp	299.988.600,00
370	2SEEMTRA	099600	PN PALOPO	BARANG	DN	Rp	11.700.000,00
371	2J8QVNDA	098608	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp	7.250.000,00
372	2EB9YJUA	098608	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp	7.250.000,00
373	22WEZSZA	097560	PN SERANG	BARANG	DN	Rp	331.350.000,00
374	2H4XRU4A	099706	PN AMBON	BARANG	DN	Rp	305.993.000,00
375	2YMBZD9A	400678	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	41.900.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
376	2C3BKT8A	097734	PN TEGAL	BARANG	DN	Rp	38.595.020,00
377	2LPQGMKA	097603	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp	47.400.000,00
378	22XB7N1A	400580	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp	49.013.381,00
379	2EDE115A	098828	PN LUBUK SIKAPING	BARANG	DN	Rp	3.200.000,00
380	25FJ922A	402355	PA METRO	BARANG	DN	Rp	166.500.000,00
381	2HL6XLEA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	343.057.144,00
382	2LJRL4RA	403009	PA SUMBER	BARANG	DN	Rp	200.056.000,00
383	232782XA	098874	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	334.552.775,00
384	2Y9DWBEA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	133.525.000,00
385	2RKVW8YA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	41.400.000,00
386	2Q3LZYDA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	159.094.590,00
387	2NP63VKA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	107.730.000,00
388	26GLD7QA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
389	2FMBV1LA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	119.880.000,00
390	2ZEX221A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	28.350.000,00
391	27YPNJSA	578864	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp	25.520.000,00
392	2WD3NJXA	614890	PN KOTA TIMIKA	BARANG	DN	Rp	84.582.000,00
393	2F7PRFKA	098324	PN BANGIL	BARANG	DN	Rp	76.500.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
394	22KDCRJA	098881	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp	498.305.723,00
395	2VCY2KEA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	22.900.000,00
396	2SVMZR4A	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	1.900.000,00
397	2THAR8DA	400430	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp	5.000.000,00
398	239NUHCA	098750	PN PADANG	BARANG	DN	Rp	120.000.000,00
399	2QZ2DP5A	402179	PA TAREMPA	BARANG	DN	Rp	196.442.690,00
400	24ZPGXUA	108025	PN STABAT	BARANG	DN	Rp	60.000.000,00
401	2YWZ4ZXA	604723	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	Rp	735.680.000,00
402	2CD88DXA	403083	PA SIMALUNGUN	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
403	24M8ZV2A	099031	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp	12.500.000,00
404	2DGW1LNA	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	94.500.000,00
405	2MF17YHA	307932	PA DOMPU	BARANG	DN	Rp	99.988.000,00
406	2QMJARKA	097492	PN JAKARTA TIMUR	JASA	DN	Rp	165.000.000,00
407	2B3BSRGA	663403	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp	1.800.000,00
408	2RE9K5PA	099926	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp	17.858.200,00
409	2XLD47CA	670227	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp	7.100.000,00
410	2JNVBS7A	098675	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp	181.000.000,00
411	26X7GE3A	097598	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp	1.004.880.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
412	2TCLQU5A	097598	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp	1.016.150.000,00
413	2YYEGETA	099879	PN RABA BIMA	BARANG	DN	Rp	99.500.000,00
414	25MAHEUA	099134	PN PANGKALAN BUN	BARANG	DN	Rp	225.888.975,00
415	2BEQ4VRA	099581	PN BULUKUMBA	BARANG	DN	Rp	1.080.900.000,00
416	216FD2RA	004028	KEPANITERAAN	BARANG	DN	Rp	245.357.950,00
417	2V5RPQBA	400239	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp	2.000.000,00
418	27B22A9A	097830	PN UNGARAN	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
419	25PUVYMA	097666	PN CIANJUR	BARANG	DN	Rp	40.000.000,00
420	2K666ZUA	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	17.950.000,00
421	2F7CJV8A	097624	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp	2.707.050.000,00
422	2VADKC6A	099684	PN KOLAKA	BARANG	DN	Rp	35.600.000,00
423	2SSYE9MA	098061	PN WATES	BARANG	DN	Rp	16.208.750,00
424	2VVSJ6ZA	672952	PN PRABUMULIH	BARANG	DN	Rp	21.014.241,00
425	2RN9S8KA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	50.771.400,00
426	2Z36FSDA	098722	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp	296.267.110,00
427	2N37N85A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	278.100.000,00
428	2N37N85A	099361	PN GORONTALO	BARANG	DN	Rp	1.900.000,00
429	2QW4BFBA	097560	PN SERANG	JASA	DN	Rp	357.000.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
430	2QPBDHNA	401952	PA MESUJI	BARANG	DN	Rp	30.000.000,00
431	24UFR1AA	097776	PN BREBES	BARANG	DN	Rp	100.000.000,00
432	2AK87GZA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	3.000.000,00
433	2NSVNUZA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	131.314.000,00
434	21R3VNTA	477270	PN NUNUKAN	BARANG	DN	Rp	14.680.000,00
435	2KFLUTTA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	957.926.208,00
436	2D4LY88A	417722	PN TANJUNG SELOR	JASA	DN	Rp	180.000.000,00
437	2NQMR5KA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	6.500.000,00
438	222KVFQA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	40.000.000,00
439	2CVRL5ZA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
440	2B9MSJFA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	500.000,00
441	2U98ZNTA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	500.000,00
442	2387J8MA	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	1.500.000,00
443	2GRMK38A	307822	PA DENPASAR	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
444	2WHJKPKA	402330	PA KRUI	BARANG	DN	Rp	28.970.000,00
445	293V826A	097975	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp	267.176.160,00
446	25HJRA3A	682228	MS SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	Rp	195.886.000,00
447	2VU7H5PA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	4.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
448	2RUEMM2A	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
449	2QAT4Z4A	098192	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	Rp	55.646.850,00
450	21EHHWPA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	5.404.000,00
451	28DH1VYA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	5.250.000,00
452	2PUQEXMA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	2.400.000,00
453	27BVLRZA	099045	PN METRO	BARANG	DN	Rp	2.499.000,00
454	23J54F2A	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	144.000.000,00
455	2QS9V1LA	097514	PN BANDUNG	BARANG	DN	Rp	797.506.315,00
456	26VWHASA	098082	PN SLEMAN	BARANG	DN	Rp	4.000.000,00
457	2YDRKFZA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	16.257.000,00
458	2BB3CBMA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
459	2U52WDSA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	239.600.000,00
460	22GWUGQA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	97.730.500,00
461	26FUVCSA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	33.400.002,00
462	2RDLC4XA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	342.957.482,00
463	25TDMN8A	670210	PN AIRMADIDI	BARANG	DN	Rp	117.000.000,00
464	241WCCBA	098519	PN LANGSA	BARANG	DN	Rp	373.831.776,00
465	2CXSBFEA	400492	PT RIAU	BARANG	DN	Rp	43.150.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
466	2GMHT77A	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	507.867.180,00
467	2MVPZXLA	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	160.506.000,00
468	2WTBK4BA	097797	PN KENDAL	BARANG	DN	Rp	66.035.400,00
469	2LXSESJA	400710	PA GARUT	BARANG	DN	Rp	248.600.000,00
470	2MZBJFWA	099113	PN SANGGAU	BARANG	DN	Rp	7.799.000,00
471	2CA3MCLA	098104	PN KAB. MALANG (KEPANJEN)	BARANG	DN	Rp	60.000.000,00
472	2BQ4EHKA	401926	PN LASUSUA	BARANG	DN	Rp	199.700.000,00
473	2T8NFG1A	401642	MS LHOKSUKON	BARANG	DN	Rp	95.000.000,00
474	2EMPER4A	672910	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp	322.202.000,00
475	2CJMQ8PA	099890	PN SELONG	BARANG	DN	Rp	19.000.000,00
476	2RU73TVA	099890	PN SELONG	BARANG	DN	Rp	800.000,00
477	2FDSXHZA	613519	PN CIBINONG	JASA	DN	Rp	723.298.405,00
478	2P5NTVPA	401913	PN MENTOK	BARANG	DN	Rp	305.848.489,00
479	239K7D8A	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	10.532.000,00
480	2MRV96SA	097624	PN KARAWANG	JASA	DN	Rp	325.000.000,00
481	2L2Z3UCA	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	96.000.000,00
482	2MEBQ3SA	097797	PN KENDAL	JASA	DN	Rp	115.500.000,00
483	2WDD7SSA	099070	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
484	22A797BA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	80.000.000,00
485	28NJLLAA	098125	PN BOJONEGORO	BARANG	DN	Rp	272.556.890,00
486	2CLB3EGA	401137	PA BOYOLALI	BARANG	DN	Rp	200.000.000,00
487	2LQFNCUA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	356.043.600,00
488	25XCRRRA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	95.948.400,00
489	2F5C4DKA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	226.795.200,00
490	2W7SLNPA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	96.158.441,00
491	2LJQV7KA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	186.480.000,00
492	2D1UBDLA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	336.487.557,00
493	2E487HEA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	476.224.379,00
494	24KHNAGA	400214	PN JAKARTA SELATAN	BARANG	DN	Rp	184.455.000,00
495	2R3SVSDA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	84.750.000,00
496	2KT3JQMA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	169.230.000,00
497	2G24WQ1A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	317.826.300,00
498	24XACTZA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	311.256.625,00
499	2PM522ZA	400302	PN TANAH GROGOT	BARANG	DN	Rp	6.458.000,00
500	27YMQF6A	400075	PN SORONG	BARANG	DN	Rp	82.694.000,00
501	2VCKTQNA	308021	PA CURUP	BARANG	DN	Rp	4.150.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
502	2N2LRXLA	098057	PN YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	18.000.000,00
503	2ZA1HFVA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp	6.997.934.045,00
504	2CESZLMA	613519	PN CIBINONG	JASA	DN	Rp	849.664.260,00
505	2NKSHTHA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	177.584.377,00
506	2YK9S6RA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	84.501.297,00
507	25C7T35A	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	87.201.600,00
508	2AHT489A	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	114.600.000,00
509	2RKQM4BA	097851	PN BLORA	BARANG	DN	Rp	199.000.000,00
510	2218JJAA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	198.750.000,00
511	2218JJAA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	561.900.000,00
512	22PBN9JA	099816	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	Rp	721.802.991,00
513	23HRLCLA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	56.500.000,00
514	2QM984LA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	34.822.080,00
515	2TEQDSFA	663047	PN SUKADANA	BARANG	DN	Rp	90.000.000,00
516	2CEUGUYA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	663.621.000,00
517	2NTGDR5A	662972	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp	513.762.000,00
518	26E6KSVA	578885	PTUN BENGKULU	BARANG	DN	Rp	48.950.000,00
519	2CENAAQA	400409	PN CIBADAK	JASA	DN	Rp	132.600.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
520	2F6LHQ9A	663292	DILMIL II - 11 YOGYAKARTA	BARANG	DN	Rp	180.000.000,00
521	264GL1EA	672973	PN KASONGAN	BARANG	DN	Rp	38.480.000,00
522	2R1MEHQA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	285.961.086,00
523	2UQ34C7A	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	9.102.000,00
524	23HZ211A	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	197.182.864,00
525	27DGWRBA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	246.707.500,00
526	2DK1RMPA	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	317.682.000,00
527	27QM1XSA	098104	PN GRESIK	BARANG	DN	Rp	487.670.887,00
528	2WJ1PNJA	099780	PN DENPASAR	JASA	DN	Rp	180.000.000,00
529	2XEZNXKA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	212.417.126,00
530	2YDULG6A	098434	PT BANDA ACEH	BARANG	DN	Rp	1.499.744.000,00
531	2WKNRBZA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	895.254.494,00
532	2K7N4HGA	099443	PN PANGKAJENE	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
533	2A8JFGMA	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	719.040.200,00
534	22113U3A	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	448.646.000,00
535	2AKLGKBA	477224	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp	245.800.000,00
536	2YB5FFLA	401338	PA JEMBER	BARANG	DN	Rp	15.000.000,00
537	2CKLQT3A	653458	PN BANJARBARU	BARANG	DN	Rp	10.865.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
538	2PCHZQZA	400389	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp	197.370.350,00
539	29FTEKCA	097488	PN JAKARTA BARAT	JASA	DN	Rp	200.000.000,00
540	29FTEKCA	097488	PN JAKARTA BARAT	BARANG	DN	Rp	289.188.300,00
541	2MP57LGA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	618.500.000,00
542	2FL3A8NA	400220	PN JAKARTA UTARA	JASA	DN	Rp	156.000.000,00
543	2W6KLMXA	099155	PN KUALA KAPUAS	UANG	DN	Rp	500.000.000,00
544	2KAA633A	401877	PA PENAJAM	UANG	DN	Rp	440.000.000,00
545	26QKRDNA	401924	PN PENAJAM	UANG	DN	Rp	440.000.000,00
546	2264Y9WA	098938	PT PALEMBANG	UANG	DN	Rp	2.500.000.000,00
547	21ZRMZ6A	613519	PN CIBINONG	UANG	DN	Rp	482.524.000,00
548	22ZZUGHA	526716	PT PAPUA BARAT	UANG	DN	Rp	1.000.000.000,00
549	2B5ERZDA	663030	PN GUNUNG SUGIH	UANG	DN	Rp	200.000.000,00
550	2UNM5YPA	400741	PA CIANJUR	UANG	DN	Rp	50.000.000,00
551	275ESBKA	401293	PA GRESIK	UANG	DN	Rp	600.000.000,00
TOTAL						**Rp**	**122.176.025.953,00**

Lampiran 2 :
Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
Semester II TA 2024

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	286XBCXA	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	38.408.500,00
2	2YS9Q2TA	097631	PN SUBANG	BARANG	DN	Rp	50.000.000,00
3	2ZJECSYA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	143.000.000,00
4	2PDMK6NA	097492	PN JAKARTA TIMUR	BARANG	DN	Rp	326.998.235,00
5	2TK1TQNA	400220	PN JAKARTA UTARA	BARANG	DN	Rp	956.468.000,00
6	2EBB3QEA	099312	PT MANADO	BARANG	DN	Rp	605.000.000,00
7	2ZHPPZZA	098984	PN LAHAT	BARANG	DN	Rp	1.000.000.000,00
8	222RUFHA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	12.000.000,00
9	2GPD85AA	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	1.000.000,00
10	2DWX2Y8A	400421	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp	6.000.000,00
11	2G7WKTZA	098612	PT MEDAN	BARANG	DN	Rp	1.343.300.000,00
12	27YR4RSA	098963	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp	9.725.000,00
13	2GBKVZ5A	526710	PT SULAWESI BARAT	BARANG	DN	Rp	3.766.872.367,00
14	2H13A15A	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	355.417.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
15	27MMNC1A	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	149.800.000,00
16	2FH25RQA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	69.903.900,00
17	2AZCZFKA	098523	PN IDI	BARANG	DN	Rp	199.800.000,00
18	2QX25G4A	402443	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp	86.800.000,00
19	2WPTD99A	097645	PN BOGOR	BARANG	DN	Rp	180.000.000,00
20	2N3K9AZA	400141	PN BANGKINANG	BARANG	DN	Rp	1.307.163.900,00
21	2G7N6STA	670191	PN TAMIANG LAYANG	BARANG	DN	Rp	399.530.650,00
22	24YYUG6A	098214	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp	16.500.000,00
23	29X8T21A	097521	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp	113.408.202,00
24	2QY9EWLA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	40.404.000,00
25	289BHSHA	401262	PA SIDOARJO	BARANG	DN	Rp	107.992.500,00
26	2EHZTQ6A	526720	PT KALIMANTAN UTARA	BARANG	DN	Rp	352.400.000,00
27	2BAB4JHA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	1.742.759.300,00
28	2DHQJR6A	307712	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp	14.650.000,00
29	24PKGAVA	097741	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp	63.519.750,00
30	2WWFFPAA	097741	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp	123.100.000,00
31	24S87GQA	477261	PN ROKAN HILIR	BARANG	DN	Rp	180.567.000,00
32	27SR3CTA	098281	PN MALANG	BARANG	DN	Rp	568.740.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
33	2J2Q5W7A	307885	PA MATARAM	BARANG	DN	Rp	559.880.000,00
34	2FNHCY9A	307885	PA MATARAM	BARANG	DN	Rp	185.500.000,00
35	27NTN3PA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	213.229.178,00
36	2FEJM61A	400415	PN JANTHOI	BARANG	DN	Rp	138.670.000,00
37	27RP2EGA	099219	PN KOTABARU	BARANG	DN	Rp	927.000.000,00
38	25LMCYPA	098409	PA SUMENEP	BARANG	DN	Rp	183.100.000,00
39	2QF3ZXRA	401551	PA SAMPANG	BARANG	DN	Rp	72.000.000,00
40	2J49EQ6A	098310	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp	34.980.000,00
41	28NLTHRA	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	60.000.000,00
42	26QUZK7A	402443	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp	349.460.901,00
43	2QF3U34A	526708	PTA KEPULAUAN RIAU	BARANG	DN	Rp	24.000.000,00
44	2HJTH7HA	097670	PN CIREBON	BARANG	DN	Rp	2.506.323.000,00
45	2GE5LNMA	401877	PA PENAJAM	BARANG	DN	Rp	622.290.000,00
46	28VQS9TA	099560	PN BANTAENG	BARANG	DN	Rp	148.891.000,00
47	21QK6BGA	097500	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp	249.686.000,00
48	25QAC9WA	307818	PA LABUHAN BACAN	BARANG	DN	Rp	156.000.000,00
49	23H626MA	401966	MS SUKA MAKMUE	BARANG	DN	Rp	60.541.500,00
50	292643NA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.966.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
51	2VXDPAAA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	198.900.000,00
52	24E6VBKA	401909	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.610.000,00
53	2FBFA16A	097872	PN BATANG	JASA	DN	Rp	7.500.000,00
54	2GSVZLYA	099180	PN MANDAILING NATAL	BARANG	DN	Rp	474.700.000,00
55	22UM2UCA	099422	PN UJUNG PANDANG	BARANG	DN	Rp	250.109.000,00
56	2VX31E3A	401293	PA GRESIK	BARANG	DN	Rp	3.235.176.811,00
57	25456PQA	682164	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	Rp	45.226.894,00
58	2UAQC9PA	526722	PTA KALIMANTAN UTARA	BARANG	DN	Rp	352.400.000,00
59	2EGCVLVA	099858	PN BANGLI	BARANG	DN	Rp	298.679.375,00
60	21ZT7V1A	307491	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	12.200.000,00
61	21Z3EW7A	097560	PN SERANG	JASA	DN	Rp	202.500.000,00
62	2LNSZAZA	631999	PA PANGKALAN KERINCI	BARANG	DN	Rp	16.100.000,00
63	2PX3QXLA	099553	PN SENGKANG	BARANG	DN	Rp	489.921.000,00
64	225WUJTA	097851	PN BLORA	BARANG	DN	Rp	197.620.000,00
65	2WW11YSA	099439	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp	269.174.000,00
66	2MWQCDXA	652080	PA BONTANG	BARANG	DN	Rp	11.500.000,00
67	2473SFVA	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	199.500.000,00
68	2D8WXE9A	401920	PN PULANG PISAU	BARANG	DN	Rp	349.200.000,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
69	2B6572YA	401950	PA GEDONGTATAAN	BARANG	DN	Rp	62.500.000,00
70	2M13T3GA	401752	MS SINGKIL	BARANG	DN	Rp	189.360.000,00
71	2FK8K1EA	099443	PN PANGKAJENE	BARANG	DN	Rp	188.450.000,00
72	28JQ5P7A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	150.000.000,00
73	2HHQKKZA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	230.000.000,00
74	28GWSY5A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	243.923.027,00
75	29DY132A	401611	MS SIGLI	BARANG	DN	Rp	388.942.000,00
76	2Q8EXYXA	402097	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp	86.270.000,00
77	2NQHBG7A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	129.492.500,00
78	23V69BLA	526716	PT PAPUA BARAT	BARANG	DN	Rp	2.022.750.000,00
79	2B1CZL9A	401943	PA PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp	199.400.000,00
80	21PRJLFA	682192	PA PARIGI	BARANG	DN	Rp	7.020.000,00
81	2N2V57QA	097610	PN BEKASI	JASA	DN	Rp	456.842.700,00
82	2KZQVVXA	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	186.158.454,00
83	25Y1BY5A	097610	PN BEKASI	BARANG	DN	Rp	55.268.920,00
84	257DTHNA	401965	MS BLANGPIDIE	BARANG	DN	Rp	19.435.200,00
85	28K6RBTA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	177.955.200,00
86	2LF4CPFA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	292.722.025,00

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
87	2WKELHZA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	39.588.705,00
88	2PNYP22A	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	356.938.038,00
89	2L2LUEHA	477292	PN DEPOK	BARANG	DN	Rp	646.298.077,00
90	2MAPSXCA	098640	PN TANJUNG BALAI	BARANG	DN	Rp	109.125.748,00
91	2F4JD2EA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	68.849.000,00
92	298Z5SJA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	94.236.500,00
93	2RL4JMGA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	53.066.492,00
94	23ATGP1A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	61.438.500,00
95	2B3Y5HEA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	65.700.000,00
96	27JCRH1A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	20.158.211,00
97	29TZNC7A	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	69.000.000,00
98	2XBB9Y8A	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	199.643.906,00
99	2H6PFCAA	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	57.500.000,00
100	2QN57PJA	401915	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp	54.000.000,00
101	2GJB19AA	401915	PN CIKARANG	JASA	DN	Rp	849.364.434,00
102	2QDCPEQA	672948	PN NATUNA	BARANG	DN	Rp	199.547.716,00
TOTAL						**Rp**	**35.863.708.316,00**

Lampiran 3 :
Hibah Langsung Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
Semester II TA 2024

NO	NO REGISTER	KODE SATKER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	
1	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	13.955.252.892,00
2	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	4.778.398.475,00
3	29JPW1VA	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	JASA	LN	Rp	5.948.994.262,00
TOTAL						**Rp**	**24.682.645.629,00**

DATA PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TP (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Keterangan	Pembebasan
1	Dian Permadi	Eks Bendahara Rutin Ditjen Badilum	TP	1996	80.498.350	80.498.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	BPK telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 November 2014 untuk memulihkan kasus kerugian negara a.n	-
2	M. Safi Killow	PN Tabelo	TP	2000	33.798.600	33.798.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-	-
3	Suharta	Dilmil Bali	TP	2006	996.450.000	996.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penghapusan Bersyarat	SK Menteri Keuangan RI No. 400/KMK.06/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara C.Q. Mahkamah Agung Atas Nama Suharta (Alm.) sebesar Rp810.422.059	810.422.059
														-	-	-	-	Penghapusan Mutlak	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 116/KM.6/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara c.q. Mahkamah Agung Atas Nama Suharta (Alm)	
4	Rahmat Darmadi, SE	Bendahara PN Cianjur	TP	2010	3.500.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas	-
Total					**1.114.246.950**	**1.114.246.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**810.422.059**

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
1	Garib Hamid	Eks Staf PN Waingapu	TGR	1988	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
2	Martini Soegito, SH	PN Bogor	TGR	1997	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Macet	-
3	Raulina Sibuea	Pansek PT Jakarta	TGR	2000	36.500.000	-	36.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
4	Suheimi	Kasubag. Umum PTUN Pekanbaru	TGR	2001	8.700.000	-	8.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
5	Josep Beruat Warin, SE	PT Irian Jaya	TGR	2001	8.700.000	-	8.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
6	Syamsudin UP, SH	Wakil Ketua PN Pandeglang	TGR	2002	35.000.000	-	22.500.000	12.500.000	-	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000	-					Lunas	
7	Anak Agung Gde Kusuma Widjaja	Wakil Sekretaris PN Surabaya	TGR	2003	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
8	Djatnika Wiraatmadja	PN Sukabumi	TGR	2003	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
9	Tujiya	Staf Bag. Umum PN Jakarta Timur	TGR	2000	3.800.000		3.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
10	HM Yusuf Hasan	PN Lhokseumawe Banda Aceh	TGR	2001	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
11	Lattan Yunus	PN Kefamenanu	TGR	2000	975.000		975.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
12	Moh. Fajrul Umam	PA Cimahi (PA Pemalang)	TGR	2006	12.100.000		12.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
13	Romli	PT Bandung	TGR	2006	12.100.000		12.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
14	Suwarno	Wasek PN Jombang	TGR	2006	12.600.000		12.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
15	Ahmad Syahyuti, SH, MH	Wakil Ketua PN Calang NAD	TGR	2007	13.000.000		13.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
16	Neldawati	Panmud Hukum PT	TGR	2007	8.300.000		8.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
17	M. Soid, SH, MA	Wakil Panitera PN Nganjuk (PN Kab. Malang)	TGR	2007	12.600.000		12.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
18	Sarbini	PN Idi	TGR	2007	10.300.000		10.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lancar	-
19	A. Rahman	MS. Langsa	TGR	2007	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
20	Yusi Wuryaningati	Kabag Keuangan Balitbang Diklat Kumdil MA	TGR	2008	81.000.000		81.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
21	Lestijono Warsito, SH	Pansek PN Wates	TGR	2008	49.000.000		49.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
22	Gempa Andey Setyo	PT Banten	TGR	2008	112.000.000		112.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
23	Muhtaria, SH	PA Tulang Bawang	TGR	2008	1.900.000		1.900.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
24	Suwandi	PA Sidoarjo	TGR	2008	15.100.000		15.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
25	M. Khusnul Yakin, S.Ag.	Keur Kepegawaian PA Gresik	TGR	2008	15.100.000		15.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
26	Alfitri, S.Ag	PA Kotabumi (pindah PA Tanjung Pandan)	TGR	2008	12.800.000		12.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
27	M. Erfan Sulistianto	Jurusita PN Sampang	TGR	2008	9.000.000		9.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
28	Drs. M. Yusuf Usman, SH	PT Banda Aceh	TGR	2008	10.600.000		10.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
29	Minhad	PA Temanggung	TGR	2008	10.700.000		10.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
30	Moch. Mansyur, SH	Pensiunan Wasek PN Malang	TGR	2008	19.500.000		19.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
31	Sadat Prayudi, SH	Kaur Kepegawaian PN Baturaja	TGR	2008	8.900.000		8.900.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
32	Dalim Tata, SH	PHI Jawa Barat	TGR	2008	14.900.000		14.900.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
33	Retno Purwandari Y., SH.	Ketua PN Menggala/Hakim PN Timur (PN Semarang)	TGR	2008	13.800.000		13.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
34	Nana Rusmana, SH	PN Ilale Bandung	TGR	2008	14.300.000		14.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
35	Bambang Budi Setiawan	Wakil Panitera PN Gresik	TGR	2008	15.100.000		15.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
36	Maulana Sudharto, SH	PN Medan	TGR	2008	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
37	Mulyadi Syahputra	PN Medan	TGR	2008	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
38	Zainal Arifin	Jurusita Pengganti PA Tangerang	TGR	2009	13.100.000		13.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
39	Nur Alam	Kabag Keuangan Kepaniteraan MA	TGR	2009	81.000.000		81.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
40	Debbi Aguma	Kepaniteraan	TGR	2009	104.000.000		104.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
41	Endang Ridwan, S.Ag	Wakil Panitera PA Depok	TGR	2009	14.300.000		14.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
42	Suparno	Kabag, Umum PTUN Jakarta (meninggal dunia, Taspen belum turun)	TGR	2009	18.800.000		18.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
43	Ali Mustofa, SH	Panmud Gugatan PA Jaktim	TGR	2009	14.500.000		14.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
44	AK Bagus Indaryanto, SH	PN Curup	TGR	2009	8.800.000		8.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
45	Fikri Hi Ansawi Amiruddin, S.Ag	PTA Gorontalo	TGR	2009	3.950.000		3.950.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
46	Wagiah Astuti, SH	PT banda Aceh/PT Pekanbaru	TGR	2009	-		-	-	-	-	-	-	-	-					Sudah diganti barang sesuai BAST tgl 20 Nov 2012	-
47	Sri Widyastuti	Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi MA	TGR	2010	81.000.000		81.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
48	Amir Basuki	Ditjen Badilum	TGR	2010	13.500.000		13.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
49	Sumaryati, SH	Wasek PA Cibinong mutasi ke PA Bogor	TGR	2010	17.500.000		17.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
50	Dicky Mulyawan, A.Md	PA Cibinong	TGR	2010	17.500.000		17.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
51	Asep Soma Hidayat	PN Cibadak	TGR	2010	11.100.000		11.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
52	Ike Wijayanto,SH	PN Bandung	TGR	2010	13.400.000		13.400.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
53	Deny Setha Iskandar, S.Komp	Kasubag Pengembangan Sistem Aplikasi (Biro Hukum dan Humas BUA)	TGR	2010	9.500.000		9.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
54	Masrinedi, SH	PA Painan Panmud Hukum	TGR	2010	11.467.500		11.467.500	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
55	Drs. Abdul Fatah	Ketua PA Rangkasbitung	TGR	2010	37.000.000		37.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
56	Namawi, SH, MH		TGR	2010	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
57	Drs. Nawawi	PA Baturaja (mutasi PTA Palembang)	TGR	2010	14.500.000		14.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
58	Ishak Lanap, SH. (Ketua)	PTUN. Palangkaraya	TGR	2010	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
59	Harmi Jaya, SH	Panmud Pidana PN Solok	TGR	2010	14.555.000		14.555.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
60	Salpadin, SH	PN Palalawan	TGR	2010	8.800.000		8.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
61	Yan Bonari Simanjuntak, SH, MH	PN Depok	TGR	2010	11.000.000		11.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
62	M. Adir, SH	PN Tebo	TGR	2010	10.600.000		10.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
63	Moh. Muhyidin, SH		TGR	2010	-		-	-	-	-	-	-	-	-					Surat Panitera/Sekretaris PA Sidoarjo no. W13-A16/918/KS.01.5/IX/2011 tgl 15 Mar 2011 kepada PTA Surabaya tentang laporan kehilangan barang Surat pernyataan kesanggupan ybs mengganti kehilangan inventaris hingga akhir semester II 2011 Berita Acara serah terima barang Nomor:W13-A30/PL.07/681/VI/2012 tgl 28 Juni 2012 penggantian barang	-
64	Sima Sitepu	Pansek PTUN. Medan	TGR	2010	3.505.000		3.505.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
65	Erly Suhermanto	Hakim PTUN. Medan	TGR	2010	8.835.500		8.835.500	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
66	Damailiza, S.Ag.	PA. Baturaja (Wasek)	TGR	2011	9.800.000		9.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
67	Lasmiati, SH.	PTUN. Jambi	TGR	2011	11.600.000		11.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
68	Elvy Farida Saragih, SH	PN Simalungun	TGR	2011	11.100.000		11.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
69	Moh. Iqbal Yunus	PN Jakarta Pusat	TGR	2011	19.400.000		19.400.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
70	Syafrudin, SH	Panitera Pengganti PN Tanjungkarang	TGR	2011	13.500.000		13.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
71	Illiyan	Ditjen Badilag	TGR	2011	11.900.000		11.900.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
72	Syaiful Akhyar, SH	PT Medan	TGR	2011	11.100.000		11.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
73	Kamal Abdul Naser, SH	Wakil Panitera PN Bengkulu	TGR	2011	14.100.000		14.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
74	Azhar	PN Kisaran	TGR	2011	13.200.000		13.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
75	H.Zainuddin	PA.Malang	TGR	2011	8.003.526		8.003.526	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
76	Yunita Eka Widyasari	PA.Malang	TGR	2011	8.089.800		8.089.800	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
77	IGB Karyadi, SH	PTA Mataram	TGR	2012	12.200.000		12.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
78	Zahri,Sm.Hk	PT Banda Aceh	TGR	2012	-		-	-	-	-	-	-	-	-					SKTJM tgl 9 Agt 2012 Sudah diganti barang sesuai BAST tgl 4 Oktober 2012	-
79	Iin Agustinara Dariatmi, SE	PA Balikpapan	TGR	2012	11.400.000		11.400.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
80	Kusnadi, SH	PA Rembang	TGR	2012	10.800.000		10.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
81	Tri Diana Widowati, SH., M.Pd.	Kepala Biro Keselcretariatan Pimpinan	TGR	2012	27.419.340		27.419.340	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
82	Haryanti, SH.	Kepala Sub Bagian Umum	TGR	2012	12.800.000		12.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
83	Luktiono, SH	PN Palembang (JSP)	TGR	2012	12.600.000		12.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
84	Nurlaili, SH (Kasubbag Umum)	PTA Bengkulu	TGR	2012	11.400.000		11.400.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
85	Sopian Badruzaman, SH (Kaur Kepeg.)	PN Pandeglang	TGR	2012	9.500.000		9.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
86	Pamah, SH	PN Kabanjahe	TGR	2012	10.700.000		10.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
87	Firdaus, SH (Wapan)	Wapan MS Tapaktuan	TGR	2012	12.500.000		12.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
88	Yudo Ari Kasdaroyo/Sukarman	Staf Dilmil II-08 Jakarta	TGR	2012	14.200.000		14.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
89	Rahma Karo - Karo	PT. TUN Medan	TGR	2012	12.200.000		12.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
90	Moch Hari Siswanto, SH	PN Probolinggo	TGR	2013	15.300.000		15.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
91	Bambang Riswoyo, SH	PN Probolinggo	TGR	2013	13.500.000		13.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
92	M. Yamin, SH	Wakil Panitera PN Liwa	TGR	2013	14.000.000		14.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
93	Ismail	PN Jambi	TGR	2013	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
94	Muksin, S.Ag	PA Sambas	TGR	2013	12.600.000		12.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
95	Antin Rukmiyati, SH	PA Sambas	TGR	2013	11.700.000		11.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
96	Drs. Masduki	PA Kotabaru	TGR	2013	2.205.000		2.205.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
97	Roby Hidayat, ST	PN Rokan Hilir	TGR	2013	12.000.000		12.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
98	Achmad Sodikin	Wapan PA Cibinong	TGR	2013	13.800.000		13.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
99	Sunu Wilardi	Staf Pidana PN Cirebon	TGR	2013	14.200.000		14.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
100	Shodiqin	PP PA Bekasi pindah ke PA Cikarang	TGR	2013	13.800.000		13.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
101	Mohan Ayusta Wijaya, SH	PN Malang	TGR	2013	13.300.000		13.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
102	Tri Djoko Indarno	PN Pemalang	TGR	2013	6.235.400		6.235.400	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
103	Gatot Supriyanto	PTUN Pekan Baru	TGR	2013	10.094.000		10.094.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
104	H. Said Ali Gunadi, SH	PN Bangkalan	TGR	2013	11.900.000		11.900.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
105	Drs. Muh. Ashar, SH, MM	Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI	TGR	2013	138.000.000		138.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
106	Udin Ramdan	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim BUA MARI	TGR	2013	9.200.000		9.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
107	Titirtololobi Alfaris	PT Ambon	TGR	2013	15.774.000		15.774.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
108	Drs. Harun Al Rasyid	Pansek PA Cibinong (ex. Pansek PA Bogor)	TGR	2013	14.200.000		14.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
109	Drs. H. Arifin Muhammad, SH	Waka PA Bengkayang	TGR	2013	12.300.000		12.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
110	Muhdi Kolil	PA Kangean	TGR	2013	12.500.000		12.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
111	Tiomina Simanjuntak	PN Palangkaraya	TGR	2013	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
112	Demi Hadiantoro, SH.	Hakim PN. Raba Bima pindah ke PN. Madiun	TGR	2013	1.250.000		1.250.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
113	Rahmat Supli	Wakil Pansek PA Palembang	TGR	2014	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
114	Mashuri ,S.Ag	PA.Kab. Madiun	TGR	2014	3.100.000		3.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
115	Maria Nuraeni	PN. Surabaya	TGR	2014	11.000.000		11.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
116	Ismet Wairoy	PN Fak-fak	TGR	2014	1.700.000		1.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
117	Jacob Hindom	PN. Fak Fak	TGR	2014	4.700.000		4.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
118	Hj.Hanifah Abdul Karim	PA.Sorong	TGR	2014	800.000		800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
119	Hj.Hanifah Abdul Karim	PA.Sorong	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
120	Efendi Siregar	PT Aceh	TGR	2014	10.070.000		10.070.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
121	Edy Nasution	PN.Medan	TGR	2014	10.700.000		10.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
122	Masni Singgaling	PT Medan	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
123	Ma'munu Heriyanto	PA.Purwokerto	TGR	2014	10.400.000		10.400.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
124	Suwondo	PA. Sampit	TGR	2014	10.300.000		10.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
125	Junior Sam Rambe, SH	PN. Medan	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
126	Faesol Hasbi, SE, SH	PA.Bondowoso	TGR	2014	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
127	Robert Sihaan, SH,MH	PN Indramayu mutasi ke PN Jakarta Pusat	TGR	2014	12.800.000		12.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
128	Ari Widodo	PN Sumedang	TGR	2014	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
129	Denny Suherlan, SH	PN Cianjur	TGR	2014	15.000.000		15.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
130	Hasyim Utina	PA Sentani	TGR	2014	-		-	-	-	-	-	-	-	-					SKTJM tgl 20 Mei 2014 Diganti dengan barang yang sama (Laptop) sesuai BAST Penggantian Barang tgl 20 Mei 2014.	-
131	Nurdiana	PA Sentani	TGR	2014	-		-	-	-	-	-	-	-	-					SKTJM tgl 20 Mei 2014 Diganti dengan barang yang sama (Laptop) sesuai BAST Penggantian Barang tgl 20 Mei 2014.	-
132	Kokoh Mukaedi, SH	PN Kendal	TGR	2014	11.300.000		11.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
133	Syan'yansyah	PA Metro	TGR	2014	3.600.000		3.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
134	Fathul Mubin Nurmusa	PA Poso	TGR	2014	6.500.000		6.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
135	Drs. H. Ramzul Faiyad	PA Sekayu	TGR	2014	9.900.000		9.900.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
136	Nurhairani, SH	PN Medan	TGR	2014	10.700.000		10.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
137	Masni, SH	PT Palangkaraya	TGR	2014	6.500.000		6.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
138	Nur Alam	Badan Urusan Administras	TGR	2014	5.600.000		5.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
139	Bambang Sukriyanto	Badan Urusan Administras	TGR	2014	414.053.250		414.053.250	-	-	-	-	-	-	-					Status 4 telah diterima	241.500.000
140	Syafri	PA Curup	TGR	2014	8.200.000		8.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
141	Jasdar	Dimilti III Surabaya	TGR	2014	10.600.000		10.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
142	M Rasyid	PN Sigli pindah ke PT Banda Aceh	TGR	2014	9.700.000		9.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
143	Bakir Fuadi	PA Rengat	TGR	2014	4.600.000		4.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
144	Abd Hamid	PA Rengat	TGR	2014	3.750.000		3.750.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
145	Syahril J	PA Rengat	TGR	2014	3.250.000		3.250.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
146	Drs. H.Syamsuddin, SH, MH	PA Lumajang	TGR	2014	8.500.000		8.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
147	Sutadji	PA Bangil	TGR	2014	250.000		250.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
148	Drs. Muhamad Solikhan	PA Bangil	TGR	2014	2.100.000		2.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
149	Abdul Kodir, S.Ag	PA Bangil	TGR	2014	3.650.000		3.650.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
150	Andika Ricaldo,SE	PN Ranai-Kepulauan Riau	TGR	2014	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
151	Arifin Sani	PT Maluku Utara	TGR	2014	6.500.000		6.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
152	Wurhandoso	PA Depok pindah PA Bekasi	TGR	2014	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
153	Siti Aspiyah	PA Kediri	TGR	2014	9.750.000		9.750.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
154	Moch. Afif Afandi	PA Bangli	TGR	2014	450.000		450.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
155	Sutrisno Setio Utomo	Pengadilan Militer I-02 Medan	TGR	2014	8.000.000		8.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
156	Tje Tjep Hidayat	PN Sukabumi	TGR	2014	10.000.000		10.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
157	Ganda Mana,SH,MH	PT Tanjung Karang-Lampung	TGR	2014	14.200.000		14.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
158	Jumadi, SH	PN. Pangkalan Bun	TGR	2014	3.500.000		3.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
159	Uwes Amir Abubakar	PA Limboto-Gorontalo	TGR	2014	38.847.744		38.847.744	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
160	Dra. Mardhiyah M. Hasan, MH	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
161	Elis F. Jon	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
162	Listya Rahma, A.Md	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
163	Yuskal Efendi	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
164	Salman	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
165	Dra. Hj. Asmidar	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
166	Firdaus, SH	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	2.050.000		2.050.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
167	Drs. H.R.A Satibi, S.H., M.H	PA Cianjur-Jawa Barat	TGR	2014	4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
168	Asep Nurdiansyah, S.H.	PA Dumai-Riau	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
169	Zulfadli,S.HI	PA Dumai-Riau	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
170	Petrus Mitting, SH	PTUN Jayapura	TGR	2015	4.100.000		4.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
171	Aser Libong, SH	PN Balige	TGR	2015	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
172	Supriono, SH	PN Tanjung Balai-Sumatera Utara	TGR	2015	8.000.000		8.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
173	Ghufron, SH	PA Jepara	TGR	2015	8.000.000		8.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
174	Dicky Royano Sugianto	PTUN Pekanbaru	TGR	2015	5.700.000		5.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
175	M. Rofiq	PT Jayapura - Papua	TGR	2015	4.958.177		4.958.177	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
176	Ventje R. E. Sumual	PTUN Jayapura - Papua	TGR	2015	14.950.000		14.950.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
177	Besse Marwiyawati, SH	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
178	Syarifuddin Rauf, SH	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
179	Ambo Andi Manggaukang, SH	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
180	Irman Imran	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
181	Muchtar Made	PA Polewali - Sulawesi Barat	TGR	2015	800.000		800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
182	Fahruddin	PTA Jakarta - DKI Jakarta	TGR	2015	6.700.000		6.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
183	Ahmad Letondot Basarin, SH	PN Kayuagung Sumatera Selatan	TGR	2015	6.454.536		6.454.536	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
184	Jimmy Oktavianus, A. Md	PN Muara Enim - Sumatera Selatan	TGR	2015	3.500.000		3.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
185	M. Edy, SH	PN Tubei Bengkulu	TGR	2015	10.950.000		10.950.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
186	Chairul Sutrisno Sama'a, SH, CN, MM	PN Pontianak - Kalimantan Barat	TGR	2015	2.100.000		2.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
187	Hasahatan Sormin	PN Lubuk Linggau	TGR	2015	7.700.000		7.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
188	Zaenal Hasan	PTA Bandung	TGR	2015	7.250.000		7.250.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
189	Ramadhani, SH	PM II-09 Bandung	TGR	2015	7.800.000		7.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
190	Ahyan Azis	PN Metro	TGR	2015	12.000.000		12.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
191	Huzairin	PN Sekayu	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
192	Drs. M.G Zulzamar, SH,MHI	PA Sukabumi	TGR	2016	9.500.000		9.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
193	Sulaimansyah	PN. Pekanbaru	TGR	2016	6.504.000		6.504.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
194	Gusneti	PTUN Pekanbaru	TGR	2016	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
195	Aas Sadiah	PA Cianjur	TGR	2016	3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
196	Suparta	PT Banten	TGR	2016	4.800.000		4.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
197	Osdin Sidauruk, S.H.	PN Binjai	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
198	Muhammad Salahuddin, S.H	PN Bima	TGR	2016	7.250.000		7.250.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
199	Syahbuddin Saleh, S.H	PN Dompu	TGR	2016	7.250.000		7.250.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
200	Lalu Munir, S.H	PA Taliwang	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
201	Safiudin	PA Probolinggo	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	
202	Raden Asnawi,S.H	PN Tebo	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
203	Aswirman	PTUN Pekanbaru-Riau	TGR	2016	27.357.130		27.357.130	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
204	Lalu Ruslan	PA Gianyar	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
205	Yudistira Adi Pinto, SE	PTA JAMBI	TGR	2017	2.800.000		2.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
206	Upy Supriyatna, ST	PN Dompu	TGR	2017	2.800.000		2.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
207	Sapiudin, SH	PA Mataram	TGR	2017	2.200.000		2.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
208	Alimin Hafizi,SH	PA Mataram	TGR	2017	2.200.000		2.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
209	Drs. Ahmad, SH.MH	PA Giri Menang	TGR	2017	2.300.000		2.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
210	H. Suhaeli, S.Ag	PA Giri Menang	TGR	2017	2.100.000		2.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
211	Abdul Gafur, A.Md	PA Giri Menang	TGR	2017	5.500.000		5.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
212	M. Fauzi, SE	PA Giri Menang	TGR	2017	5.500.000		5.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
213	Drs. H. Djahidin	PA Sungai Penuh	TGR	2017	6.000.000		6.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
214	Adi	PA Tuban	TGR	2017	7.200.000		7.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
215	Dwie Irianto	PN Lamongan	TGR	2017	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
216	Muhammad Arif	PA Kotamobagu	TGR	2017	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
217	Irdiansyah	PN Blangkajeren	TGR	2017	2.700.000		2.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
218	Sukeni, S.H.	PA Kudus	TGR	2017	500.000		500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
219	Leli Suhendri, S.H.	PN. Binjai	TGR	2017	3.100.000		3.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
220	Hj. Erni Mutiara	PA. Batusangkar-PA. Bukittinggi	TGR	2017	3.200.000		3.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
221	Hj. Atmiyarti	PA. Batusangkar-PA. Bukittinggi	TGR	2017	3.200.000		3.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
222	Yan Mamary	PN Sorong	TGR	2017	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
223	Thomas P. Amena	PN Sorong	TGR	2017	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
224	Mawardi	Bawas-Instansi Pusat	TGR	2018	3.210.144		3.210.144	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
225	Asep Miftahudin	PN Ciamis	TGR	2018	3.800.000		3.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
226	Ageng Suyanto, S.H.	MILTI - I Medan	TGR	2018	3.650.000		3.650.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
227	Habiburrohman, S.H.	DILMIL III - 19-Papua	TGR	2018	8.100.000		8.100.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
228	H.M Ali Lutfi, SH.M.Hun	PA Ambarawa	TGR	2018	7.200.000		7.200.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
229	T Jansen ST, MT	PT Medan	TGR	2018	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
230	Steven Putuhuru, SE	PTUN Ambon	TGR	2018	2.600.000		2.600.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
231	M. Usman R	PN Lhok Sukon	TGR	2018	2.700.000		2.700.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
232	Reza Pahlipi	MILTI - 1 Medan	TGR	2018	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
233	H. Harmi Jaya, SH	PN Rokan Hilir	TGR	2019	6.500.000		6.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
234	Irwan Sibarani	PN Pematang Siantar	TGR	2019	4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
235	Debie Rusdiansyah, S.H.	PN Curup	TGR	2019	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
236	Sunita Br. Barus	PN Kabanjahe	TGR	2019	3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
237	Imanuel Mouw, SH	PTUN Jayapura	TGR	2019	3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
238	Megawati, S.H., M.H.	PTA. Bengkulu	TGR	2019	4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
239	Hasan, S.H.	PT Jayapura	TGR	2020	5.500.000		5.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
240	Muhammad Nur	PN Biereun	TGR	2020	2.800.000		2.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
241	Ardiansyah Rusdin	PA Andoolo	TGR	2020	1.800.000		1.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
242	Teuku Fachrurrazi, SH, MH	PN Lhokseumawe	TGR	2020	1.800.000		1.800.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
243	Widodo Arif Wicaksono, S.Kom, SH	PTA Semarang	TGR	2021	24.000.000		24.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
244	Ruben Harlen Panjaitan	PN Simalungun	TGR	2021	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
245	R. Aji Suryo	PN Stabat	TGR	2021	2.500.000		2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
246	Posma Tumangger	PN Sidikalang	TGR	2021	2.400.000		2.400.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
247	Muhammad Ihsan Fauzi	PA Bandung	TGR	2021	66.300.000		66.300.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
248	Sahruri	PN Sekayu	TGR	2021	350.000		350.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
249	Dudun Achmad Mauludin	PA Tasikmalaya	TGR 2022	2022	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Kategori	Pembebasan
250	Desideria Meivania Waruwu, S.H.	PN Muara Bulan	TGR 2022	2022	5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-					Lunas	-
251	Ni Wayan Dhika Rulia, S.E.,M.H.	PA Balikpapan	TGR 2022	1976, 1980, 1977	875.000		875.000	-		-	-	-	-	-					Lunas	
252	Tedy Markopolo, S.H.	Dilmilti I Medan	TGR 2022	2008	2.500.000		2.500.000	-		-	-	-	-	-					Lunas	-
253	Darahim, S.Ag	PA Palopo	TGR 2022	2013	200.000		200.000	-		-	-	-	-	-					Lunas	
254	Fakhrur Razi, S.H	PA Kisaran	TGR 2023	2020	5.000.000				5.000.000	-	-	-	-	-					Lunas	-
255	Padma Putra Solihan Dana, S.E	PA Lubuk Pakam	TGR 2023	2021	5.000.000				5.000.000	-	-	-	-	-					Lunas	-
256	Hasanuddin	PA Jakarta Selatan	TGR 2023	2015	4.650.000				4.650.000	-	-	-	-	-					Lunas	-
257	Hendri Arpianda	PTA Palembang	TGR 2023	2023	900.000				900.000	-	-	-	-	-					Lunas	-
258	Muh. Haris Rumodar	PN Kota Timika	TGR 2023	2023	5.000.000				5.000.000	-	-	-	-	-					Lunas	-
259	Ricko Oktavius	PN Bangkinang	TGR 2023	2023	6.000.000				6.000.000	-	-	-	-	-					Lunas	-
260	Abdul Muthalib, S.H.	PA Muara Tebo	TGR 2024	2016	2.500.000		-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	Lunas	-
261	Subhan Attamimi, S.H.	PTUN Ambon	TGR 2024	2023	2.200.000		-	-	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	Lunas	-
262	Achmad Lohy, S.Ag.	PTUN Ambon	TGR 2024	2023	29.980.000		-	-	-	-	-	-	3.747.498	26.232.502	3.747.498	22.485.004	3.747.498	18.737.506	Lancar	-
263	Amrih, S.H.	PA Dompu	TGR 2024	2024	4.000.000		-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-			Lunas	-
264	Usman, S.H.	PN Watampone	TGR 2024	2016	450.000		-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	-	Lunas	-
265	Muriyanto, S.H.	PN Indramayu	TGR 2024	2021	5.450.000		-	-	-	-	-	-	-	-	5.450.000	-	-	-	Lunas	-
266	Drs. H. Nurkholish, M.H.	PA Pangkalpinang	TGR 2024	2024	4.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	-	Lunas	-
267	Raulina Sibuea, S.H.	PT Jakarta	TGR 2024	2024	3.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-	Lunas	-
Total					**3.193.319.047**	**0**	**3.101.289.047**	**12.500.000**	**26.550.000**	**12.500.000**	**0**	**12.500.000**	**24.947.498**	**26.232.502**	**9.647.498**	**22.485.004**	**12.147.498**	**18.737.506**		

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

TP (PROSES PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori	Pembebasan
1	Rohmawati	PA Pekalongan	TP	2011	22.772.000	-	22.772.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasus telah selesai dengan mengganti uang persediaan yang dihilangkan (Status 4)	Lunas	22.772.000
Total					**22.772.000**	**0**	**22.772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI APIP

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori	Pembebasan
1	I Made Subagio Wiryo	PN Sumbawa Besar	TGR	2007	58.227.646,78		21.975.421	36.252.225,78	-	36.252.225,78	-	36.252.225,78	36.252.226,00	(0)	-	(0)	-	(0)	-	Lunas	
2	Putu Dalton, SH	PT Mataram	TGR	2009	37.017.000		37.017.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
3	Rahalim	PN Lubuk	TGR	2009	43.790.953,98		43.790.953,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
4	Aco Nur dkk	BUA	TGR	2016	31.651.392		31.651.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
5	Abdul Hamid dkk.	Ditjen. Badilag	TGR	2016	135.305.114		135.305.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
6	Aco Nur dkk	BUA	TGR	2016	853.400		853.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
7	Agus Santosa dkk	Ditjen. Badilag	TGR	2016	4.693.400		4.693.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
8	Auto dkk.	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	73.150.000		73.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Review Bawas diterima	Review Bawas diterima	
9	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2016	5.617.000		5.617.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
10	Ditjen. Badilag	Ditjen. Badilag	TGR	2016	6.346.900		6.346.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
11	PT BMG		TGR	2016	9.840.000		9.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
12	PT VI		TGR	2016	11.709.155		11.709.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
13	PT BBU		TGR	2016	34.062.000		34.062.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
14	PT LD		TGR	2016	6.410.000		6.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
15	PT La'M		TGR	2016	57.005.000		57.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
16	CV PEK		TGR	2016	2.865.000		2.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	-
Total					**518.543.961,76**	**0**	**482.291.735,98**	**36.252.225,78**	**0**	**36.252.225,78**	**0**	**36.252.225,78**	**36.252.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
1	Hakim ad hoc Tipikor MA Pusat	MA	TGR	2005	102.000.000		102.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
2	7 rekanan angkutan	MA	TGR	2005	148.460.652		148.460.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
3	PT Wahyu Warga Mandiri / Ditjen Badilum	Ditjen. Badilum	TGR	2009	15.846.880		15.846.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
4	PT Yasmina Pilar Utama / Biro Umum BUA	BUA	TGR	2010	45.474.402		45.474.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
5	PT SJ / BUA MA	PT SJ / BUA MA	TGR	2010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
6	Hakim Agung (MA)	Kepaniteraan	TGR	2010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
7	PT BDM	BUA	TGR	2010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
8	PT MCBP / BUA MA	BUA	TGR	2010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
9	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
10	PT Sadar Dinamis / PA Tasikmalaya	PA Tasikmalaya	TGR	2010	52.918.149		52.918.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
11	PT Nugraha Adi Taruna / PN Ciamis	PN Ciamis	TGR	2010	17.519.453		17.519.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
12	PT Gelora Intan Reksa / Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-09 Bandung	TGR	2010	38.332.022		38.332.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
13	PT Gelora Intan Reksa / Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-09 Bandung	TGR	2010	12.273.910		12.273.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
14	PT Ciptapola Kharisma / PTUN Surabaya	PTUN Surabaya	TGR	2010	25.827.471		25.827.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
15	PT Cipta Karsa Bumi Lestari / Dilmilti III Surabaya	Dilmilti III Surabaya	TGR	2010	35.440.294		35.440.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
16	PT Sidoarjo Sucses Sentosa / Dilmil III-12 Surabaya	Dilmil III-12 Surabaya	TGR	2010	50.737.605		50.737.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
17	PT Karya Terpadu / PA Pare-Pare	PA Pare-Pare	TGR	2010	19.693.861		19.693.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
18	CV Lestari Indah / PA Takalar	PA Takalar	TGR	2010	2.800.000		2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
19	PT Maribangun Nusantara / PA Takalar	PA Takalar	TGR	2010	59.525.468		59.525.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
20	CV Bumi Anugrah / PT TUN Makassar	PT TUN Makassar	TGR	2010	7.571.453		7.571.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
21	PT Sagita Utama Lestari / Dilmil III-16 Makassar	Dilmil III-16 Makassar	TGR	2010	17.664.088		17.664.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
22	CV MC / PA Binjai	PA Binjai	TGR	2010	3.740.545		3.740.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
23	PT PB / PA Binjai	PA Binjai	TGR	2010	15.245.175		15.245.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
24	PT PS / PT Medan	PT Medan	TGR	2010	56.468.272		56.468.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
25	CV RSA / PA Kisaran	PA Kisaran	TGR	2010	13.333.517		13.333.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
26	CV JMM & co / PA Kisaran	PA Kisaran	TGR	2010	26.940.818		26.940.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
27	PT Ikonexi Dharma / PN Jakarta Timur	PN Jakarta Timur	TGR	2010	82.543.408		82.543.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
28	PT Mutiara Murni Mandiri / Dilmiltama Jakarta	Dilmiltama Jakarta	TGR	2010	5.633.500		5.633.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
29	CV Reksa Utama / Dilmiltama Jakarta	Dilmiltama Jakarta	TGR	2010	50.982.286		50.982.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
30	CV Tenostarindo / Dilmil III-12 Surabaya	Dilmil III-12 Surabaya	TGR	2010	7.373.280		7.373.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
31	PT Amarta Karya / PN Jakarta Barat	PN Jakarta Barat	TGR	2010	87.659.100		87.659.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
32	PT PP Dirganeka / PN Jakarta Timur	PN Jakarta Timur	TGR	2010	355.393.220		355.393.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
33	CV Artindo / PTA Surabaya	PTA Surabaya	TGR	2010	6.593.304		6.593.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
34	Jak Tour / BUA MA	BUA	TGR	2010	32.921.600		32.921.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
35	PT DSH / BUA MA	BUA	TGR	2011	37.410.000		37.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
36	PT SBM / BUA MA	BUA	TGR	2011	49.555.584		49.555.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
37	PT SJ / BUA MA	BUA	TGR	2011	11.463.733		11.463.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
38	PT DSH / BUA MA	BUA	TGR	2011	13.806.000		13.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
39	CV KJA / BUA	BUA	TGR	2011	8.581.230		8.581.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
40	PT ABEP / BUA MA	BUA	TGR	2011	35.400.000		35.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
41	PT BDP / BUA MA	BUA	TGR	2011	21.289.942		21.289.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
42	PT MCBP / BUA MA	BUA	TGR	2011	32.241.564		32.241.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
43	PT GDSK / Badan Diklat Litbang Kumdil	Badan Diklat Litbang Kumdil	TGR	2011	21.937.520		21.937.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
44	PT LIP / Badan Diklat Litbang Kumdil	Badan Diklat Litbang Kumdil	TGR	2011	35.989.250		35.989.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
45	PT DI / Badan Diklat Litbang Kumdil	Badan Diklat Litbang Kumdil	TGR	2011	10.177.000		10.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
46	CV PSP / PN Tais	PN Tais	TGR	2011	7.960.034		7.960.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
47	CV B / PT Samarinda	PT Samarinda	TGR	2011	6.607.800		6.607.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
48	CV PK (PT Banten)	PT Banten	TGR	2011	3.746.900		3.746.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
49	PT RC / PN Balikpapan	PN Balikpapan	TGR	2011	21.186.713		21.186.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
50	CV KR / PN Pandeglang	PN Pandeglang	TGR	2011	35.345.300		35.345.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
51	CV BA (PT Banten)	PT Banten	TGR	2011	8.507.700		8.507.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
52	PT AHP / PA Tigaraksa	PA Tigaraksa	TGR	2011	25.134.700		25.134.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
53	CV RDU / PT Gorontalo	PT Gorontalo	TGR	2011	1.365.000		1.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
54	CV EB / PT Aceh	PT Aceh	TGR	2011	4.017.600		4.017.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
55	CV A / MS Sabang	MS Sabang	TGR	2011	32.628.000		32.628.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
56	PT SW / PTUN Samarinda	PTUN Samarinda	TGR	2011	7.314.800		7.314.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
57	CV CA / PN Kendari	PN Kendari	TGR	2011	1.450.000		1.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
58	CV CAP / PT Kendari	PT Kendari	TGR	2011	32.500.000		32.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
59	CV PMR / PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru	TGR	2011	6.821.484		6.821.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
60	CV APM / PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru	TGR	2011	10.034.072		10.034.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
61	CV CBI / PN Pekanbaru	PN Pekanbaru	TGR	2011	15.610.700		15.610.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
62	CV AA / PT Jambi	PT Jambi	TGR	2011	17.425.000		17.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
63	BUA	BUA	TGR	2011	81.507.275		81.507.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
64	PT Banten	PT Banten	TGR	2011	3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
65	PA Tigaraksa	PA Tigaraksa	TGR	2011	11.000.000		11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
66	PA Tigaraksa	PA Tigaraksa	TGR	2011	4.030.200		4.030.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
67	PN Balikpapan	PN Balikpapan	TGR	2011	18.000.000		18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
68	PN Balikpapan	PN Balikpapan	TGR	2011	31.200.000		31.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
69	PN Pandeglang	PN Pandeglang	TGR	2011	1.629.000		1.629.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
70	PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru	TGR	2011	6.500.000		6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
71	CV PL / PT Samarinda	PT Samarinda	TGR	2011	954.545		954.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
72	PA Kendari (PT Hadji Kalla)	PA Kendari	TGR	2011	2.310.000		2.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
73	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	216.182		216.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
74	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	1.549.113		1.549.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
75	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	663.905		663.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
76	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	354.365		354.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
77	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	674.700		674.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
78	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	433.595		433.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
79	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	954.409		954.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
80	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2012	3.463.830		3.463.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
81	PN Depok	PN Depok	TGR	2012	10.548.661		10.548.661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
82	PN Depok	PN Depok	TGR	2012	6.126.250		6.126.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
83	PA Palembang	PA Palembang	TGR	2012	19.187.887		19.187.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
84	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	1.760.000		1.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
85	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	1.567.906		1.567.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
86	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	255.000		255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
87	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	690.000		690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
88	PT Padang	PT Padang	TGR	2012	3.318.837		3.318.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
89	PA Pariaman	PA Pariaman	TGR	2012	560.121		560.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
90	PN Padang	PN Padang	TGR	2012	2.495.830		2.495.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
91	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	821.765		821.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
92	PA Banjarbaru	PA Banjarbaru	TGR	2012	7.288.624		7.288.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
93	PN Pangkal Pinang	PN Pangkal Pinang	TGR	2012	33.112.974		33.112.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
94	PN Padang Panjang	PN Padang Panjang	TGR	2012	1.900.000		1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
95	PA Sungai Liat	PA Sungai Liat	TGR	2012	3.205.980		3.205.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
96	PA Sungai Liat	PA Sungai Liat	TGR	2012	40.847.620		40.847.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
97	PA Banjarbaru	PA Banjarbaru	TGR	2012	3.900.000		3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
98	BUA	BUA	TGR	2012	67.757.250		67.757.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
99	PN Banjarmasin	PN Banjarmasin	TGR	2012	11.505.700		11.505.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
100	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	1.867.500		1.867.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
101	PT Bandung	PT Bandung	TGR	2012	12.100.000		12.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
102	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	7.350.000		7.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
103	PN Padang Panjang	PN Padang Panjang	TGR	2012	49.500		49.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
104	PA Sungai Liat	PA Sungai Liat	TGR	2012	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
105	PA Pangkal Pinang - Notebook	PA Pangkal Pinang - Notebook	TGR	2012	21.455.000		21.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
106	PA Pangkal Pinang - Camera DSLR	PA Pangkal Pinang - Camera DSLR	TGR	2012	6.700.000		6.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
107	PT Bandung	PT Bandung	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
108	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
109	PA Pariaman	PA Pariaman	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui
110	PA Samarinda	PA Samarinda	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui
111	PN Samarinda	PN Samarinda	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui
112	PA Banjarbaru	PA Banjarbaru	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui
113	PA Pangkal Pinang	PA Pangkal Pinang	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui
114	BUA	BUA	TGR	2012	31.123.462		31.123.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
115	CV P/ PT Palu	PT Palu	TGR	2012	5.107.484		5.107.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
116	CV LKI/ PTUN Palu	PTUN Palu	TGR	2012	8.149.229		8.149.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
117	CV GC/ PN Palu	PN Palu	TGR	2012	71.329.610		71.329.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
118	CV JA/ PT Pontianak	PT Pontianak	TGR	2012	1.934.700		1.934.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
119	CV PMJ/ PT Pontianak	PT Pontianak	TGR	2012	437.904		437.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
120	CV CTM/ PN Pontianak	PN Pontianak	TGR	2012	5.500.000		5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
121	CV RAI/ PN Pontianak	PN Pontianak	TGR	2012	5.333.580		5.333.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
122	PT APIK/ PN Jakarta Utara	PN Jakarta Utara	TGR	2012	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
123	PT JIMA/ PA Jakarta Pusat	PA Jakarta Pusat	TGR	2012	2.028.698		2.028.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
124	CV Y/ PTA Yogyakarta	PTA Yogyakarta	TGR	2012	2.332.952		2.332.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
125	CV AB/ PA Batam	PA Batam	TGR	2012	7.486.000		7.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
126	PT KJ/ PN Batam	PN Batam	TGR	2012	48.739.000		48.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
127	CV TB/ PN Tanjung Pinang	PN Tanjung Pinang	TGR	2012	1.530.000		1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
128	PT BDM/ BUA	BUA	TGR	2012	53.359.592		53.359.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
129	PT SGU/ BUA	BUA	TGR	2012	47.401.818		47.401.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
130	PT IL/ BUA	BUA	TGR	2012	59.636.637		59.636.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
131	PTUN Kupang	PTUN Kupang	TGR	2012	3.845.800		3.845.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
132	PT Jakarta	PT Jakarta	TGR	2012	1.560.800		1.560.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
133	CV ISU/BUA	BUA	TGR	2012	16.734.385		16.734.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
134	PT RAM/BUA	BUA	TGR	2012	7.670.133		7.670.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
135	CV CN/BUA	BUA	TGR	2012	3.942.731		3.942.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
136	PT TDP/BUA	BUA	TGR	2012	74.629.088		74.629.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
137	PT ET/BUA	BUA	TGR	2012	77.503.242		77.503.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
138	BUA	BUA	TGR	2013	260.060.494		260.060.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
139	PT DBI	BUA	TGR	2013	6.057.000		6.057.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
140	PT SPJ	BUA	TGR	2013	57.976.800		57.976.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
141	PT YPU	BUA	TGR	2013	99.889.280		99.889.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
142	PT RAM	BUA	TGR	2013	3.631.314		3.631.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
143	CV ISU	BUA	TGR	2013	12.629.760		12.629.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
144	CV KJA	BUA	TGR	2013	858.000		858.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
145	PT DAU	BUA	TGR	2013	6.112.260		6.112.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
146	PT ET	BUA	TGR	2013	6.528.000		6.528.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
147	PT TDP	BUA	TGR	2013	93.780.480		93.780.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
148	BUA	BUA	TGR	2013	178.022.250		178.022.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
149	PN Fak-fak	PN Fak-fak	TGR	2013	4.945.218		4.945.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
150	PA Sorong	PA Sorong	TGR	2013	4.748.874		4.748.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
151	PTA Malut	PTA Malut	TGR	2013	216.905.860		216.905.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
152	PN Ternate	PN Ternate	TGR	2013	46.336.500		46.336.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
153	CV ISU (BUA)	BUA	TGR	2013	55.000.000		55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
154	PT BDM (BUA)	BUA	TGR	2013	20.119.554		20.119.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
155	PT KAL (BUA)	BUA	TGR	2013	27.404.720		27.404.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
156	PT IL (BUA)	BUA	TGR	2013	316.407.272		316.407.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
157	PT TD (BUA)	BUA	TGR	2013	66.430.852		66.430.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
158	CV KM (PT Manado)	PT Manado	TGR	2013	57.005.393		57.005.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
159	CV NS (PTA Manado)	PTA Manado	TGR	2013	15.781.148		15.781.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
160	CV MS (PTUN Manado)	PTUN Manado	TGR	2013	8.260.950		8.260.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
161	PT PBP (PA Amurang)	PA Amurang	TGR	2013	223.635.972		223.635.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
162	CV AG (PA Amurang)	PA Amurang	TGR	2013	4.500.000		4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
163	PT PBP (PA Amurang)	PA Amurang	TGR	2013	20.000.000		20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
164	CV MA (PTUN Denpasar)	PTUN Denpasar	TGR	2013	9.053.930		9.053.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
165	CV MS (PTA Ambon)	PTA Ambon	TGR	2013	32.754.439		32.754.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
166	CV AJP (Dilmil Ambon)	Dilmil Ambon	TGR	2013	27.681.875		27.681.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
167	CV DES (PTUN Ambon)	PTUN Ambon	TGR	2013	119.573.907		119.573.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
168	CV RS (PT Bengkulu)	PT Bengkulu	TGR	2013	6.312.008		6.312.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
169	CV OP (PT Bengkulu)	PT Bengkulu	TGR	2013	14.577.948		14.577.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
170	CV Rian (PA Lebong)	PA Lebong	TGR	2013	2.804.641		2.804.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
171	CV ST (PTA Malut)	PTA Malut	TGR	2013	27.722.877		27.722.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
172	PT AA (PN Ternate)	PN Ternate	TGR	2013	84.394.097		84.394.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
173	CV ST (PA Ternate)	PA Ternate	TGR	2013	35.981.882		35.981.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
174	PT MBS (PA Fakfak)	PA Fakfak	TGR	2013	78.153.032		78.153.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
175	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2014	192.197.000		192.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
176	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2014	682.190.000		682.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
177	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag	TGR	2014	1.300.164.641		1.300.164.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
178	BUA MA (AK)	BUA MA	TGR	2014	500.000		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
179	BUA MA (WS)	BUA MA	TGR	2014	500.000		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
180	BUA MA (NA)	BUA MA	TGR	2014	380.000		380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
181	BUA MA (I. G. AS)	BUA MA	TGR	2014	2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
182	BUA MA (RM)	BUA MA	TGR	2014	1.040.000		1.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
183	PT Banten	PT Banten	TGR	2014	32.025.000		32.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
184	PT Banten	PT Banten	TGR	2014	22.890.000		22.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
185	PT RAM (BUA)	BUA MA	TGR	2014	70.041.530		70.041.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
186	CV KJA (BUA)	BUA MA	TGR	2014	12.502.270		12.502.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
187	PT MJE (BUA)	BUA MA	TGR	2014	4.500.000		4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
188	CV PU (BUA)	BUA MA	TGR	2014	63.527.184		63.527.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
189	PT PCM (BUA)	BUA MA	TGR	2014	21.552.000		21.552.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
190	PT DAU (BUA)	BUA MA	TGR	2014	5.868.796		5.868.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
191	PT SA (BUA)	BUA MA	TGR	2014	359.517.919		359.517.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
192	CV LA (BUA)	BUA MA	TGR	2014	34.794.588		34.794.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
193	PT SSS (BUA)	BUA MA	TGR	2014	11.519.950		11.519.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
194	CV SJ (PN Pati)	PN Pati	TGR	2014	3.326.683		3.326.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
195	CV N (PA Jepara)	PA Jepara	TGR	2014	476.375		476.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
196	Biro Umum (BUA)	BUA MA	TGR	2014	56.014.182		56.014.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
197	Biro Hukum dan Humas BUA	BUA MA	TGR	2014	29.250.000		29.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
198	Kepaniteraan MA	Kepaniteraan MA	TGR	2014	264.588.000		264.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
199	CV GS		TGR	2014	12.074.424		12.074.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
200	PT IMP		TGR	2014	17.925.510		17.925.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
201	PT TUN Jakarta (PT SA)	PT TUN Jakarta	TGR	2014	996.446.292		996.446.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
202	PT Banten (PT KR)	PT Banten	TGR	2014	34.583.145		34.583.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
203	PN Tangerang (PT IMP)	PN Tangerang	TGR	2014	23.000.000		23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
204	PTUN Serang (PT VP)	PTUN Serang	TGR	2014	250.203.705		250.203.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
205	PA Mimika (PT PNP)	PA Mimika	TGR	2014	21.738.371		21.738.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
206	PA Mimika (CV DA)	PA Mimika	TGR	2014	43.476.998		43.476.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
207	PN Jayapura (PT API)	PN Jayapura	TGR	2014	44.318.923		44.318.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
208	PT Tipikor Banda Aceh (CV KJM)	PT Tipikor Banda Aceh	TGR	2014	2.250.000		2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
209	MS Idi (PT PA)	MS Idi	TGR	2014	10.921.773		10.921.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
210	MS Lhoksukon (PT KB)	MS Lhoksukon	TGR	2014	24.014.798		24.014.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
211	PN Polewali (PT LPG)	PN Polewali	TGR	2014	24.982.449		24.982.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
212	PN Mamuju (PT PJ)	PN Mamuju	TGR	2014	19.104.401		19.104.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
213	PA Jepara (PT MB)	PA Jepara	TGR	2014	122.039.126		122.039.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
214	PA Koto Baru (PT PJP)	PA Koto Baru	TGR	2014	67.127.424		67.127.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
215	PA Koto Baru (PT NSC)	PA Koto Baru	TGR	2014	28.575.000		28.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
216	PA Sawahlunto (PT TP)	PA Sawahlunto	TGR	2014	55.777.829		55.777.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
217	PN Sawahlunto (PT SMK)	PN Sawahlunto	TGR	2014	11.490.739		11.490.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
218	PTUN Semarang (CV AJ)	PTUN Semarang	TGR	2014	184.844.093	184.844.093	184.844.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Status 4 telah diterima	Status 4 telah diterima
219	BUA (PT IL)	BUA MA	TGR	2014	50.915.539		50.915.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
220	PA Jakarta Barat (PT WP)	PA Jakarta Barat	TGR	2014	86.823.638		86.823.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
221	PT IK (PT Maluku Utara)	PT Maluku Utara	TGR	2014	1.404.537		1.404.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
222	CV AA (PN Ternate)	PN Ternate	TGR	2014	29.708.853		29.708.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
223	PT NA (PTUN Palu)	PTUN Palu	TGR	2014	42.312.612		42.312.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
224	CV ST (PA Ternate)	PA Ternate	TGR	2014	30.576.244		30.576.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
225	PN Poso	PN Poso	TGR	2014	677.040		677.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
226	PA Poso	PA Poso	TGR	2014	1.761.168		1.761.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
227	PA Poso	PA Poso	TGR	2014	7.000.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
228	PT SJM (PA Garut)	PA Garut	TGR	2014	61.898.023		61.898.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
229	PT WDM (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2014	138.990.162		138.990.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
230	CV TSK (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2014	9.306.018		9.306.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
231	CV HD (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2014	10.831.178		10.831.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
232	PT MKI (PT Jawa Barat)	PT Jawa Barat	TGR	2014	93.625.764		93.625.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
233	PT HK (PN Jakarta Pusat)	PN Jakarta Pusat	TGR	2014	145.276.948		145.276.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
234	PT VTM (PA Poso)	PA Poso	TGR	2014	154.732.489		154.732.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
235	PN Poso (PT JBM)	PN Poso	TGR	2014	32.231.996		32.231.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
236	CV ST (PA Ternate)	PA Ternate	TGR	2014	44.479.853		44.479.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
237	PT IK (PT Maluku Utara)	PT Maluku Utara	TGR	2014	251.101.769		251.101.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
238	CV PG (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2015	2.700.000		2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
239	BUA	BUA MA	TGR	2015	71.400.000		71.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
240	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag	TGR	2015	9.900.000		9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
241	Kepaniteraan	Kepaniteraan	TGR	2015	15.900.000		15.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
242	Suwardi	BUA MA	TGR	2015	9.761.912		9.761.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
243	Takdir Rahmadi	BUA MA	TGR	2015	3.603.839		3.603.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
244	I Gusti Agung Sumabatha	BUA MA	TGR	2015	9.761.912		9.761.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
245	M. Hatta Ali	BUA MA	TGR	2015	11.269.286		11.269.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
246	H. Imam Soebechi	BUA MA	TGR	2015	11.269.286		11.269.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
247	Soeroso Ono	BUA MA	TGR	2015	8.097.419		8.097.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
248	Prim Haryadi	BUA MA	TGR	2015	3.372.278		3.372.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
249	Wenceslaus Tarenten	BUA MA	TGR	2015	3.372.278		3.372.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
250	John Dekson Gunlik	BUA MA	TGR	2015	3.372.278		3.372.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
251	M. Syarifuddin	BUA MA	TGR	2015	5.111.213		5.111.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
252	Nurhadi Abdurahman	BUA MA	TGR	2015	4.220.113		4.220.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
253	Herri Swantoro	BUA MA	TGR	2015	4.220.113		4.220.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
254	Bahrin Lubis	BUA MA	TGR	2015	4.220.113		4.220.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
255	Joko Upoyo Pribadi	BUA MA	TGR	2015	3.396.266		3.396.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
256	John Dekson Guntik	BUA MA	TGR	2015	3.396.266		3.396.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
257	Ropi'i	BUA MA	TGR	2015	3.379.453		3.379.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
258	PT MBS (PTA Banjarmasin)	PTA Banjarmasin	TGR	2015	29.516.066		29.516.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
259	CV Les (PTA Banjarmasin)	PTA Banjarmasin	TGR	2015	1.723.019		1.723.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
260	PT BKS (PT Banjarmasin)	PT Banjarmasin	TGR	2015	7.507.383		7.507.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
261	PT KS (PTUN Jayapura)	PTUN Jayapura	TGR	2015	66.378.761		66.378.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
262	CV KA (PT Jayapura)	PT Jayapura	TGR	2015	38.360.717		38.360.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
263	PT Sy (PN Jayapura)	PN Jayapura	TGR	2015	49.551.698		49.551.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
264	CV PC (PN Merauke)	PN Merauke	TGR	2015	123.904.297		123.904.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
265	PT DMP (Badan Litbang Diklat Kumdil)	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2015	34.716.657		34.716.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
266	PT SA (BUA)	BUA MA	TGR	2015	344.063.547		344.063.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
267	PT SA (Ditjen Badilum)	Ditjen Badilum	TGR	2015	36.971.003		36.971.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
268	PT SA (Ditjen Badilag)	Ditjen Badilag	TGR	2015	6.698.153		6.698.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
269	PT SA (Kepaniteraan)	Kepaniteraan	TGR	2015	53.557.467		53.557.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
270	PT SA (Ditjen Badimiltun)	Ditjen Badimiltun	TGR	2015	7.644.411		7.644.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
271	PT DAU gedung MMU)	BUA MA	TGR	2015	2.895.647		2.895.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
272	PT DAU (gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	2.787.247		2.787.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
273	PT DAU (gedung Pulomas)	BUA MA	TGR	2015	2.238.743		2.238.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
274	PT RAM (gedung MMU)	BUA MA	TGR	2015	3.788.607		3.788.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
275	PT RAM (gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	2.845.371		2.845.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
276	PT RAM (gedung Pulomas)	BUA MA	TGR	2015	1.902.135		1.902.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
277	PT RAM (genset gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	943.236		943.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
278	PT RAM (genset gedung Pulomas)	BUA MA	TGR	2015	943.236		943.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
279	PT RAM (sistem pelindung kebakaran gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	943.236		943.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
280	PT TDP		TGR	2015	37.791.964		37.791.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
281	PT IP		TGR	2015	10.048.680		10.048.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
282	Biro Umum (BUA)	BUA MA	TGR	2015	28.258.500		28.258.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
283	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2015	435.811.785		435.811.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
284	BUA	BUA MA	TGR	2015	14.403.654		14.403.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
285	BUA	BUA MA	TGR	2015	32.609.797		32.609.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
286	PT WK (BUA)	BUA MA	TGR	2015	3.227.369.568		3.227.369.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
287	PT MPK (BUA)	BUA MA	TGR	2015	5.700.000		5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
288	Biro Hukum dan Humas (59 orang) -BUA	BUA MA	TGR	2016	19.358.800	4.753.270	19.358.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
289	Biro Kepegawaian (87 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	38.304.536	20.794.186	38.304.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
290	Biro Sekretariat Pimpinan (246 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	135.418.260	99.910.700	135.418.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
291	Biro Keuangan (184 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	23.475.530	22.243.080	23.475.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
292	Biro Perencanaan dan Organisasi (328 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	148.061.748		148.061.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
293	Biro Perlengkapan (65 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	23.534.580	11.045.520	23.534.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
294	Biro Umum (603 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	504.486.242	118.361.456	504.486.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
295	WA dkk. (Badimiltun) 3 orang	BUA MA	TGR	2016	531.310		531.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
296	Badilag (467 orang)	BUA MA	TGR	2016	107.791.378	73.555.876	107.791.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
297	Biro Umum (116 orang)	BUA MA	TGR	2016	3.831.600	3.587.200	3.831.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
298	Biro Kepegawaian (111 orang)	BUA MA	TGR	2016	6.817.000		6.817.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
299	DN dkk. (Biro Perencanaan) 6 orang	BUA MA	TGR	2016	342.600		342.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
300	Biro Hukum dan Humas (16 orang)	BUA MA	TGR	2016	577.800		577.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
301	HS dkk. (Biro Keuangan) 6 orang	BUA MA	TGR	2016	243.800		243.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
302	Biro Sekretariat Pimpinan (25 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	881.600		881.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
303	Ditjen Badilmiltun (22 orang)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	982.600		982.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
304	Ditjen Badilag (52 Orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	2.439.000		2.439.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
305	Kepaniteraan (12 orang)	Kepaniteraan	TGR	2016	977.200		977.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
306	SN dkk. (Badan Litbang Diklat Kumdil) 4 orang	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2016	459.000		459.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
307	Ditjen Badilum (12 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	580.600		580.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
308	PT Ambon (12 orang)	PT Ambon	TGR	2016	970.400		970.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
309	PTA Banjarmasin (33 orang)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	1.332.000		1.332.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
310	PA Bandung (92 orang)	PA Bandung	TGR	2016	5.120.000		5.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
311	PA Kota Tasikmalaya (48 orang)	PA Kota Tasikmalaya	TGR	2016	2.144.000		2.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
312	Biro Umum (394 orang)	BUA MA	TGR	2016	79.668.600	12.360.200	79.668.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
313	Biro Kepegawaian (259 orang)	BUA MA	TGR	2016	40.075.000	20.449.600	40.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
314	Biro Perencanaan dan Organisasi(153 orang)	BUA MA	TGR	2016	11.066.000		11.066.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
315	Biro Perlengkapan (31 orang)	BUA MA	TGR	2016	2.497.000	1.551.400	2.497.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
316	Biro Hukum dan Humas (101 orang)	BUA MA	TGR	2016	6.848.800	5.572.200	6.848.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
317	Biro Keuangan (54 orang)	BUA MA	TGR	2016	4.421.400		4.421.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
318	Biro Sekretariat Pimpinan (146 orang)	BUA MA	TGR	2016	15.150.600	7.740.600	15.150.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
319	Ditjen Badilag (85 Orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	3.522.000		3.522.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
320	Kepaniteraan (45 orang)	Kepaniteraan	TGR	2016	1.671.200		1.671.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
321	PT Ambon (44 orang)	PT Ambon	TGR	2016	7.990.800		7.990.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
322	BUA (21 orang)	BUA MA	TGR	2016	8.219.000		8.219.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
323	Ditjen Badilmiltun (14 orang)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	3.500.000		3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
324	Ditjen Badilmiltun (17 orang)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	16.600.000		16.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
325	MAB dkk. (PA Ambon) 4 orang	PA Ambon	TGR	2016	4.235.000		4.235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
326	Irw dkk. (PN Padang) 5 orang	PN Padang	TGR	2016	1.092.500		1.092.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
327	PN Jombang	PN Jombang	TGR	2016	1.228.040		1.228.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
328	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2016	47.676.726		47.676.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
329	BUA	BUA	TGR	2016	18.569.600		18.569.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
330	BUA	BUA	TGR	2016	17.856.000		17.856.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
331	BUA	BUA	TGR	2016	12.109.722		12.109.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
332	BUA	BUA	TGR	2016	873.326		873.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
333	Kepaniteraan	Kepaniteraan	TGR	2016	28.003.700		28.003.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
334	CV GS (BUA)	BUA	TGR	2016	15.110.130		15.110.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
335	CV GS (BUA)	BUA	TGR	2016	6.423.750		6.423.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
336	CV RL (Balitbangkumdil)	Balitbangkumdil	TGR	2016	30.583.125		30.583.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
337	CV MP (PN Jambi)	PN Jambi	TGR	2016	4.404.000		4.404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
338	CV MP (PN Jambi)	PN Jambi	TGR	2016	2.002.000		2.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
339	PT AJA (PN Jambi)	PN Jambi	TGR	2016	3.234.700		3.234.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
340	CV ESU (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	1.112.940		1.112.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
341	CV MAS (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	75.000		75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
342	CV LSP (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	355.650		355.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
343	BUA	BUA	TGR	2016	5.629.000		5.629.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
344	WS dan JS (PTUN Jambi)	PTUN Jambi	TGR	2016	1.101.276		1.101.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
345	Puslitbang (38 orang)	Puslitbang	TGR	2016	14.810.000		14.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
346	DH dkk. (Badilag) 4 orang	Ditjen. Badilag	TGR	2016	3.730.000		3.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
347	RN & SR (PT Banjarmasin)	PT Banjarmasin	TGR	2016	760.000		760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
348	Balitbang Diklat Kumdil (139 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	119.880.000		119.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
349	Balitbang Diklat Kumdil (210 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	70.550.000		70.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
350	Balitbang Diklat Kumdil (247 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	24.920.000		24.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
351	Balitbang Diklat Kumdil (64 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	6.400.000		6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
352	Kepaniteraan (941 orang)	Kepaniteraan	TGR	2016	694.180.000		694.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
353	MS dkk. (Kepaniteraan) 3 orang	Kepaniteraan	TGR	2016	1.200.000		1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
354	Ditjen Badilum (17 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	19.840.000		19.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
355	JU (Biro Perencanaan dan Organisasi)	BUA	TGR	2016	840.000		840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
356	YS dkk. (Biro Perencanaan dan Organisasi) 7 orang	BUA	TGR	2016	5.880.000		5.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
357	DA dkk. (Ditjen Badilag) 3 orang	Ditjen Badilag	TGR	2016	650.000		650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
358	NS & DH (Ditjen Badilag)	Ditjen Badilag	TGR	2016	500.000		500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
359	MI & Wh (Ditjen Badilmiltun)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	640.000		640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
360	Balitbang Diklat Kumdil (60 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	33.952.000		33.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
361	Balitbang Diklat Kumdil (52 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	25.438.000		25.438.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
362	Balitbang Diklat Kumdil (28 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	68.428.460		68.428.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
363	IR dkk.(Balitbang Diklat Kumdil) 7 orang	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	11.588.000		11.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
364	Ditjen Badilum (14 Orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	11.924.495		11.924.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
365	US dkk. (Ditjen Badilum) 5 orang	Ditjen Badilum	TGR	2016	3.364.000		3.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
366	Ditjen Badilum (25 Orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	32.729.920		32.729.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
367	HS dkk. (Ditjen Badilag) 4 orang	Ditjen Badilag	TGR	2016	1.872.000		1.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
368	Ditjen Badilag (39 orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	6.157.600		6.157.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
369	PTA Banjarmasin (13 orang)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	8.343.400		8.343.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
370	PTA Banjarmasin (36 orang)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	5.474.000		5.474.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
371	JM dkk. (BUA) 3 orang	BUA	TGR	2016	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
372	PTUN Jambi (19 orang)	PTUN Jambi	TGR	2016	2.096.000		2.096.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
373	FH dkk (PTUN Jambi) 3 orang	PTUN Jambi	TGR	2016	1.700.000		1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
374	ZI dkk (PN Jambi) 4 orang	PN Jambi	TGR	2016	600.000		600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
375	SW & BRW (Puslitbang)	Puslitbang	TGR	2016	4.968.000		4.968.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
376	UI dkk. (Ditjen Badilag) 3 orang	Ditjen Badilag	TGR	2016	10.293.427		10.293.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
377	ARRA dkk. (Biro Keuangan) 7 orang	BUA	TGR	2016	33.695.676		33.695.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
378	DW dkk. (Ditjen Badilmiltun) 3 orang	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	855.000		855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
379	AKS dkk. (Ditjen Badilum) 9 orang	Ditjen Badilum	TGR	2016	3.000.000		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
380	SR & HH (Ditjen Badilag)	Ditjen Badilag	TGR	2016	600.000		600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
381	An dkk. (Biro Keuangan BUA) 7 orang	BUA	TGR	2016	4.865.000		4.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
382	EY dkk (Biro Perencanaan dan Organisasi) 3 orang	BUA	TGR	2016	1.500.000		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
383	Rk. Dkk (Ditjen Badilmiltun) 14 orang	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	4.575.000		4.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
384	Ditjen Badilag (26 orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	7.245.000		7.245.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
385	Ditjen Badilum (17 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	6.300.000		6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
386	Biro Keuangan (58 orang)	BUA	TGR	2016	28.800.000		28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
387	Biro Kepegawaian (16 orang)	BUA	TGR	2016	6.600.000		6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
388	LS (Biro Umum)	BUA	TGR	2016	300.000		300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
389	AN (Biro Setpim)	BUA	TGR	2016	2.400.000		2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
390	Sr (Biro Hukum dan Humas)	BUA	TGR	2016	1.200.000		1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
391	Biro Perencanaan dan Organisasi (48 orang) - BUA	BUA	TGR	2016	18.960.000		18.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
392	PT BMG (BUA)	BUA	TGR	2016	13.993.000		13.993.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
393	PT HIN (BUA)	BUA	TGR	2016	129.633.200		129.633.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
394	PT PRM (BUA)	BUA	TGR	2016	104.130.000		104.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
395	PT KB (BUA)	BUA	TGR	2016	183.114.548		183.114.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
396	PT AUK (BUA)	BUA	TGR	2016	212.693.622	-	212.693.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
397	PT BJM(BUA)	BUA	TGR	2016	66.140.064		66.140.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
398	PT JP (BUA)	BUA	TGR	2016	171.473.540		171.473.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
399	PT BT (PA Padang)	PA Padang	TGR	2016	6.929.388		6.929.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
400	CV YK (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	1.918.324		1.918.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
401	CV KS (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	1.240.800		1.240.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
402	PT BBU (PA Jakarta Timur)	PA Jakarta Timur	TGR	2016	118.112.186		118.112.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
403	PT JPK (PN Bulukumba)	PN Bulukumba	TGR	2016	49.679.900		49.679.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
404	PT BLJP (PN Jeneponto)	PN Jeneponto	TGR	2016	14.823.500		14.823.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
405	PT DUS (PN Medan)	PN Medan	TGR	2016	58.892.680		58.892.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
406	CV TR (PTA Medan)	PTA Medan	TGR	2016	6.789.327		6.789.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
407	CV PH (PN Lubuk Pakam)	PN Lubuk Pakam	TGR	2016	11.036.500		11.036.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
408	PT DB (PT Banjarmasin)	PT Banjarmasin	TGR	2016	133.312.395		133.312.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
409	PT Dam (PA Kota Tasikmalaya)	PA Kota Tasikmalaya	TGR	2016	36.625.825		36.625.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
410	PT ETB (PTUN Bandung)	PTUN Bandung	TGR	2016	89.108.900		89.108.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
411	CV AA (PA Bandung)	PA Bandung	TGR	2016	71.496.650		71.496.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
412	PT DM (PA Ambon)	PA Ambon	TGR	2016	48.919.912		48.919.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
413	PT KR (PT Ambon)	PT Ambon	TGR	2016	18.442.496		18.442.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
414	PT ECM (PN Kediri)	PN Kediri	TGR	2016	287.362.640		287.362.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
415	PT DKN (PN Surabaya)	PN Surabaya	TGR	2016	204.945.501		204.945.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
416	PT SAP (BUA)	BUA	TGR	2016	678.842.710	678.842.710	678.842.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Status 4 telah diterima	Status 4 telah diterima
417	PT BMS (PTA Banjarmasin)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	285.628.400		285.628.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
418	PT MS (BUA)	BUA	TGR	2016	91.610.000		91.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
419	CV CE (BUA)	BUA	TGR	2016	29.400.000		29.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
420	CV CHK (BUA)	BUA	TGR	2016	24.000.000		24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
421	PT ADC (BUA)	BUA	TGR	2016	3.836.688		3.836.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
422	PT SUNC (BUA)	BUA	TGR	2016	15.232.042		15.232.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
423	CV GP (BUA)	BUA	TGR	2016	12.625.000		12.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
424	PT La'M (BUA)	BUA	TGR	2016	5.150.000		5.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
425	CV NMK (BUA)	BUA	TGR	2016	54.300.000		54.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
426	Balitbang Diklat Kumdil - BUA	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2017	1.177.370.300		1.177.370.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan LHP BPK Tahun 2017 (Kepatuhan), temuan pada Balitband Diklat Kumdil adalah sebesar Rp1.164.085.300,00 dan telah disetorkan sebesar RP1.178.993.300,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp14.908.000,00	Berdasarkan LHP BPK Tahun 2017 (Kepatuhan), temuan pada Balitband Diklat Kumdil adalah sebesar Rp1.164.085.300,00 dan telah disetorkan sebesar RP1.178.993.300,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp14.908.000,00
427	BUA	BUA	TGR	2017	448.716.436		448.716.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
428	PT Banda Aceh dan PN Tangerang	PT Banda Aceh dan PN Tangerang	TGR	2017	6.098.400		6.098.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
429	BUA	BUA	TGR	2017	93.159.202		93.159.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
430	BUA	BUA	TGR	2017	73.244.768		73.244.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
431	Balitbang Diklat Kumdil	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2017	14.264.609		14.264.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2022	Sisa Per Semester II Tahun 2022	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2023	Sisa per Triwulan III Tahun 2023	Angsuran sd Semester II Tahun 2023	Sisa per Semester II Tahun 2023	Angsuran sd Semester I Tahun 2024	Sisa per Semester I Tahun 2024	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2024	Sisa per Triwulan III Tahun 2024	Angsuran sd Semester II Tahun 2024	Sisa per Semester II Tahun 2024	Keterangan	Kategori
432	PT Banten	PT Banten	TGR	2017	6.649.500		6.649.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
433	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2017	1.620.000		1.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
434	PN Amlapura	PN Amlapura	TGR	2017	4.987.500		4.987.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
435	Ditjen Badilag (2 orang)	Ditjen Badilag	TGR	2017	672.500		672.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
436	Ditjen Badilum (4 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2017	1.345.000		1.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
437	Ditjen badilmiltun dan Ditjen Badilag	Ditjen badilmiltun dan Ditjen Badilag	TGR	2017	4.352.500		4.352.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
438	PT SSS (BUA)	BUA	TGR	2017	15.799.993		15.799.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
439	CV KJA (BUA)	BUA	TGR	2017	1.338.767		1.338.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
440	Hal 95 LHP 2018	Biro Umum PN. Lhoksukon	TGR	2017	862.734.070		862.734.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
441	Balitbang Diklat Kumdil	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2017	101.960.000		101.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas
Total					**25.105.030.304,98**		**25.105.030.304,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK : Auditorat Utama Keuangan Negara III / Auditorat III.A
ENTITAS : Mahkamah Agung
TAHUN PEMERIKSAAN : S.d Semester II Tahun 2024

Tahun	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-
2006	7	156.821.300,00	10	102.000.000,00	10	102.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156.821.300,00
2007	30	1.987.903.852,50	30	545.051.826,98	22	285.298.757,35	0	0,00	0	0,00	8	259.753.069,63	285.298.757,35
2008	25	1.179.088.506,33	43	770.918.650,10	43	770.918.650,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	785.825.239,65
2009	40	3.038.087.057,41	72	679.878.497,41	71	679.878.497,41	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1.014.852.808,81
2010	27	262.900.617,00	54	223.212.117,00	53	223.212.117,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	227.622.117,00
2011	54	3.653.976.655,88	93	2.403.651.829,36	93	2.174.781.829,36	0	0,00	0	0,00	0	228.870.000,00	2.293.770.801,36
2012	43	2.167.061.048,04	78	1.517.393.798,04	78	1.496.837.297,44	0	0,00	0	0,00	0	20.556.500,60	1.496.485.500,44
2013	67	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.047.510.082,58
2014	71	3.416.145.288,06	142	2.441.023.459,62	141	1.936.047.709,62	0	0,00	0	0,00	1	504.975.750,00	2.534.200.083,06
2015	25	8.214.492.976,92	72	7.357.200.084,30	72	7.172.355.990,99	0	0,00	0	0,00	0	184.844.093,31	7.897.315.183,76
2016	27	5.262.286.278,77	97	4.838.353.457,77	97	4.838.353.457,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.262.286.279,54
2017	33	8.006.124.606,67	91	7.148.221.693,19	91	5.703.382.278,07	0	0,00	0	0,00	0	1.444.839.415,12	6.975.586.920,25
2018	59	3.909.863.007,00	158	3.480.250.657,00	158	3.480.250.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.085.684.163,00
2019	35	2.120.302.977,86	110	1.588.924.414,86	110	1.588.924.414,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.007.644.786,86
2020	27	1.610.670.108,00	72	1.013.502.250,00	72	1.013.502.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.610.670.108,00
2021	86	5.231.864.796,00	298	2.772.005.596,00	298	2.772.005.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.307.816.869,00
2022	69	3.904.851.871,57	177	1.927.296.587,01	177	1.927.296.587,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.904.851.871,57
2023	64	15.460.590.829,61	197	14.928.168.748,33	144	5.101.201.123,33	53	9.826.967.625,00	0	0,00	0	0,00	4.195.235.400,61
2024	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Jumlah	**795**	**71.396.122.801,05**	**1909**	**55.550.144.690,40**	**1845**	**43.079.338.236,74**	**53**	**9.826.967.625,00**	**0**	**0,00**	**11**	**2.643.838.828,66**	**52.089.478.272,84**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gatot Subroto 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon (021) 25549000 Ekstensi 3562 Faksimile (021) 5700501

Nomor : 207/S/V/07/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Mahkamah Agung

Jakarta, 30 Juli 2024

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab MA dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BPK memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada MA meliputi 47 laporan terdiri dari 795 temuan sebesar Rp71.396.122.801,05 memuat 1.909 rekomendasi sebesar Rp55.550.144.690,40, dengan status sebagai berikut:

1. telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.845 rekomendasi sebesar Rp43.079.338.236,74;
2. belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 53 rekomendasi sebesar Rp9.826.967.625,00;
3. tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
4. tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,66.

Hasil pemantauan yang lebih rinci kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemantauan yang kami lampirkan bersama surat ini.

Kami mengharapkan Sekretaris MA segera menindaklanjuti dan menyampaikan laporan tindak lanjut atas 53 rekomendasi yang belum sesuai dengan rekomendasi.

Atas perhatian dan kerja sama Sekretaris MA, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Anggota III,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Tembusan:
1. Ketua MA;
2. Ketua BPK;
3. Wakil Ketua BPK;
4. Auditor Utama KN III BPK;
5. Inspektur Utama BPK;
6. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
7. Kepala Badan Pengawasan MA.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
ATAS
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024
PADA
MAHKAMAH AGUNG
DI
JAKARTA

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

Nomor : 117/LHPt/XVI/07/2024
Tanggal : 30 Juli 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR LAMPIRAN ii

RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT 1

I. PENDAHULUAN 2

1. Dasar Hukum Pemantauan 2
2. Instansi Pemantauan 2
3. Tujuan Pemantauan 2
4. Sasaran Pemantauan 2
5. Metode Pemantauan 2
6. Jangka Waktu Pemantauan 2

II. HASIL PEMANTAUAN 2

1. Organisasi dan Uraian Tugas 2
2. Penatausahaan dan Pelaporan 3
3. Jumlah Kasus Tindak Lanjut 3
4. Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut dan Permasalahannya 6

III. SARAN 6

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Matriks Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022
Lampiran 1.2	Matriks Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Lampiran 1.3	Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
Lampiran 2	Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Lampiran 3	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Lampiran 4	Perkembangan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024 PADA MAHKAMAH AGUNG DI JAKARTA

SEMESTER I **TAHUN 2024**

RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab MA dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BPK memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada MA meliputi 47 laporan terdiri atas 795 temuan memuat 1.909 rekomendasi sebesar Rp55.550.144.690,40, dengan status sebagai berikut:

1. telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.845 rekomendasi sebesar Rp43.079.338.236,74;
2. belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 53 rekomendasi sebesar Rp9.826.967.625,00;
3. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,66.

Jakarta, 30 Juli 2024
Penanggung Jawab,

Rio Andalas Soekotjo S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 198101202006041002

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pemantauan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan

c. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Instansi Pemantauan

Instansi yang dipantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh BPK adalah MA.

3. Tujuan Pemantauan

BPK melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK bertujuan untuk mengetahui:

a. Ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

b. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti oleh instansi; dan

c. Kendala atau alasan instansi tidak dapat melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

4. Sasaran Pemantauan

Sasaran pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh MA adalah realisasi tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2024.

5. Metode Pemantauan

BPK melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan menginventarisasi dan menelaah tindak lanjut yang telah dilakukan MA, serta melakukan konfirmasi perkembangan penyelesaian tindak lanjut.

6. Jangka Waktu Pemantauan

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan selama lima hari kerja mulai tanggal 24 s.d 28 Juni 2024, berdasarkan Surat Tugas Nomor 121/ST/V/06/2024 tanggal 12 Juni 2024.

II. HASIL PEMANTAUAN

1. Organisasi dan Uraian Tugas

Unit kerja yang bertindak sebagai koordinator untuk menangani tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada MA adalah Badan Pengawasan (Bawas) MA yang melakukan pemantauan terkait dengan temuan hasil pemeriksaan yang ada pada masing-masing unit kerja.

2. Penatausahaan dan Pelaporan

Masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian rencana tindak lanjut, menatausahakan dan menyimpan berkas tindak lanjut disertai bukti pendukung. Setelah itu, unit kerja bersangkutan menyampaikan berkas/dokumen tindak lanjut kepada Bawas MA yang bertindak sebagai koordinator monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk disampaikan kepada BPK.

3. Jumlah Kasus Tindak Lanjut

BPK melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada MA sampai dengan Semester I Tahun 2024 yang terdiri atas 795 temuan memuat 1.909 rekomendasi sebesar Rp55.550.144.690,40, dengan uraian sebagai berikut.

a. LHP yang seluruh rekomendasinya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36 LHP dengan 576 temuan sebesar Rp33.363.372.726,00 memuat 1.402 rekomendasi sebesar Rp21.716.992.334,54.

b. LHP yang rekomendasinya telah selesai status pemantauannya karena selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak delapan LHP dengan 155 temuan sebesar Rp22.572.159.245,44 memuat 310 rekomendasi sebesar Rp18.904.983.607,53, terdiri atas:

1) LHP BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2005-2006 Nomor __/HP/XVI/xx/2007 tanggal 7 Juni 2007 dengan 18 temuan sebesar Rp991.503.852,50 memuat 18 rekomendasi sebesar Rp545.051.826,98, dengan status pemantauan berikut ini:
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak sepuluh rekomendasi sebesar Rp285.298.757,35.
   - rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak delapan rekomendasi sebesar Rp259.753.069,63.

2) LHP BPK atas Kegiatan APIP Tahun 2008 s.d 2009 Nomor 41/LHP/XV/10/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dengan sepuluh temuan sebesar Rp0,00 memuat 12 rekomendasi sebesar Rp0,00, dengan status pemantauan berikut ini:
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp0,00.
   - rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi sebesar Rp0,00.

3) LHP BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBP Serta Penerimaan Penanganan Perkara Tahun 2009 dan Semester I 2010 14/HP/XVI/01/2011 dengan 12 temuan sebesar Rp208.337.117,00 memuat 19 rekomendasi sebesar Rp208.337.117,00 dengan status pemantauan berikut ini:

- tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 18 rekomendasi sebesar Rp208.337.117,00.
- rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi sebesar Rp0,00.

4) LHP BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 199/HP/XVI/11/2011 tanggal 9 November 2011 dengan 26 temuan sebesar Rp2.037.381.363,03 memuat 41 rekomendasi sebesar Rp1.514.836.125,03, dengan status pemantauan berikut ini:
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 41 rekomendasi sebesar Rp1.285.966.125,03.
   - nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp228.870.000,00.
5) LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2011 Nomor 22/HP/XVI/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan 19 temuan sebesar Rp1.912.752.063,43 memuat 39 rekomendasi sebesar Rp1.195.327.563,43, dengan status pemantauan berikut ini:
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 39 rekomendasi sebesar Rp1.174.771.062,83.
   - nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp20.556.500,60.
6) LHP BPK atas Laporan Keuangan 2013 Nomor 7/XVI/05/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan 22 temuan sebesar Rp3.217.234.106,57 memuat 47 rekomendasi sebesar Rp2.206.134.319,13, dengan status pemantauan berikut ini:
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 46 rekomendasi sebesar Rp1.701.158.569,13.
   - rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi sebesar Rp504.975.750,00.
7) LHP BPK atas Laporan Keuangan TA 2014 Nomor 122/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dengan 20 temuan sebesar Rp6.918.432.967,24 memuat 57 rekomendasi sebesar Rp6.486.898.739,77, dengan status pemantauan berikut ini:
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 57 rekomendasi sebesar Rp6.302.054.646,46.
   - nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp184.844.093,31.
8) LHP BPK atas Laporan Keuangan TA 2016 Nomor 45/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan 28 temuan sebesar Rp7.286.517.775,67 memuat 77 rekomendasi sebesar Rp6.748.397.916,19, dengan status pemantauan berikut ini.
   - tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 77 rekomendasi sebesar Rp5.303.558.501,07.
   - nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp1.444.839.415,12.

c. LHP yang masih ada status rekomendasi belum sesuai dengan rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak tiga LHP dengan 64 temuan sebesar Rp15.460.590.829,61 memuat 197 rekomendasi sebesar Rp14.928.168.748,33 terdiri atas:

1) LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Nomor 87/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan 25 temuan sebesar Rp3.755.276.399,61 memuat 74 rekomendasi sebesar Rp3.228.275.627,33 dengan status pemantauan sebagai berikut:

- Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 73 rekomendasi sebesar Rp3.071.234.219,33.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak satu rekomendasi sebesar Rp157.041.408,00.
- Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1.1**.

2) LHP BPK atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Nomor 25/LHP/XVI/02/2024 tanggal 24 Mei 2023 dengan 25 temuan sebesar Rp0,00 memuat 80 rekomendasi sebesar Rp0,00 dengan status pemantauan sebagai berikut:

- Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 37 rekomendasi sebesar Rp0,00.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 43 rekomendasi sebesar Rp0,00.
- Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya secara rinci dapat dilihat pada **lampiran 1.2**.

3) LHP BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya Nomor 28/LHP/XVI/02/2024 dengan 14 temuan sebesar Rp11.705.314.430,00 memuat 43 rekomendasi sebesar Rp11.699.893.121,00 dengan status pemantauan sebagai berikut:

- Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 34 rekomendasi sebesar Rp2.029.966.904,00.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak sembilan rekomendasi sebesar Rp9.669.926.217,00.
- Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023

(S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya secara rinci dapat dilihat pada **lampiran 1.3**.

4. Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut dan Permasalahannya

Perkembangan status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada periode Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

a. Telah sesuai dengan rekomendasi meningkat sebanyak 71 rekomendasi sebesar Rp2.029.966.904,00 sehingga total tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.845 rekomendasi sebesar Rp43.079.338.236,74;
b. Belum sesuai dengan rekomendasi meningkat sebanyak 53 rekomendasi sebesar Rp9.669.926.217,00 sehingga total tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 53 rekomendasi sebesar Rp9.826.967.625,00;
c. Tidak terdapat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti;
d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah tetap sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,66.

Dengan demikian pemantauan TLRHP BPK s.d. Semester I Tahun 2024 menunjukkan masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 53 rekomendasi sebesar Rp9.826.967.625,00 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**, **Lampiran 3, dan Lampiran 4.** Permasalahan masing-masing rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dapat dilihat dalam **Lampiran 1.1, Lampiran 1.2,** dan **Lampiran 1.3**.

III. SARAN

Sehubungan dengan hasil pemantauan tersebut, BPK menyarankan Sekretaris MA segera menindaklanjuti dan menyampaikan laporan tindak lanjut atas 53 rekomendasi dengan status belum sesuai rekomendasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1.1

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LHP BPK NOMOR 87/LHP/XVI/05/2023 TANGGAL 24 MEI 2023 ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
1	Penatausahaan Penyetoran PNBP pada Empat Satker Belum Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA PN Kuala Kurun, PA Tulang Bawang Tengah, PA Pringsewu, dan PN Kasongan untuk: a. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1473/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Penyetoran PNBP pada Empat Satker Belum Tertib - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1342/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat SEKMA Nomor 1474/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Penyetoran PNBP pada Empat Satker Belum Tertib '- Surat KPA PA Tulang Bawang Tengah Nomor 886/SEK.PAW8-A13/KU1.4/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat SEKMA Nomor 1475/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Penyetoran PNBP pada Empat Satker Belum Tertib '- Surat KPA PA Pringsewu Nomor 990/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat SEKMA Nomor 1476/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Penyetoran PNBP pada Empat Satker Belum Tertib '- Surat KPA PN Kasongan Nomor 887/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00							Selesai	
				b. Memerintahkan Bendahara Penerimaan lebih cermat dalam menatausahakan PNBP dan melakukan tugasnya menyetor PNBP ke Kas Negara secara tepat waktu dengan memedomani ketentuan mengenai tata cara penyetoran PNBP.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1340/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat Bendahara Penerimaan PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1341/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Tulang Bawang Tengah Nomor 887/SEK.PAW8-A13/KU1.4/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang perintah '- Surat Bendahara Penerimaan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 886/SEK.PAW8-A13/KU1.4/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Pringsewu Nomor 992/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah '- Surat Bendahara Penerimaan PA Pringsewu Nomor 993/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 887-a/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah '- Surat Bendahara Penerimaan PN Kasongan Nomor 887-b/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00							Selesai	
2	Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib	1	34.600.000,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa tanah, gedung dan bangunan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1477/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang tindak lanjut atas LHP BPK Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 277/BUA.4/PL1.2.7/X/2023 tgl 18 Oktober 2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b.Menetapkan kebijakan dan pedoman terkait: 1) Mekanisme pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi, pengawasan dan pengendalian sewa tanah, gedung, dan bangunan di lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya; 2) Pengendalian dan mitigasi risiko terjadinya pembatalan sewa setelah diterbitkannya SK Penetapan Pelaksanaan Sewa dan risiko penggunaan BMN yang belum dihentikan setelah jangka waktu berakhirnya sewa; 3)Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran sewa; 4) Pengenaan beban listrik dan biaya operasional lainnya bagi Penyewa dalam nilai perjanjian sewa; 5) Koordinasi dan rekonsiliasi data terkait PNBP yang berasal dari pemanfaatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebagai sumber data penyajian saldo Piutang PNBP sewa dan Pendapatan Diterima Dimuka pada laporan keuangan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1477/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang tindak lanjut atas LHP BPK Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 277/BUA.4/PL1.2.7/X/2023 tgl 18 Oktober 2023 tentang tindak lanjut - Keputusan Sekma Nomor 1681/SEK/SK.PL.1.2/XII/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa BMN (non Rumah Negara) kepada Pejabat KPB di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tanggal 21 Desember 2023. - SE Sekma Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa BMN non Rumah Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tanggal 21 Desember 2023.	1	0,00							Selesai	
				c.Memerintahkan Bawas melakukan reviu sebagai dasar menentukan besaran nilai sewa yang belum mendapatkan Persetujuan dari KPKNL terutama atas sewa ATM pada Balitbang Diklat Kumdil dan PN Pariaman, kemudian memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menagih pembayaran atas nilai sewa yang telah ditetapkan oleh Bawas dan/atau yang sudah mendapatkan persetujuan dari KPKNL;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1478/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Berita acara pemeriksaan Badan Pengawasan pada PN Pariaman tanggal 31/07/2023 - Berita acara pemeriksaan Badan Pengawasan pada balitbang diklat tanggal 18/07/2023 - Penyetoran atas tarif sewa yang telah ditetapkan Bawas sebesar Rp14.571.945 dengan NTPN DE7AE8U8ELJ1KVFV tanggal 20 September 2023	1	0,00							Selesai	
				d.Menertibkan pelaksanaan sewa yang tidak ada SK penetapan pelaksanaan sewa;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1479/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 278/BUA.4/PL1.2.7/X/2023 tgl 18 Oktober 2023 tentang tindak lanjut -SK Sewa TA 2023 pada beberapa Satker terlampir	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				e.Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan BUA agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sewa tanah, gedung, dan bangunan; 2) Lebih optimal melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Sadewa dalam pengajuan penetapan pelaksanaan sewa di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya; 3) Melakukan inventarisasi dan monitoring perjanjian sewa yang belum mempunyai dasar persetujuan sewa dari KPKNL dan belum mempunyai SK Penetapan pelaksanaan sewa dari Sekretaris MA, dan isi perjanjian sewa yang tidak sesuai Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 2347/SEK/KU.00/10/2021; 4) Berkoordinasi dengan DJKN terkait keseragaman cara penghitungan tarif sewa untuk periodesitas tahunan.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1479/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 278/BUA.4/PL1.2.7/X/2023 tgl 18 Oktober 2023 tentang tindak tanjut '- Bukti sosialisasi penggunaan e-Sadewa, inventarisasi dan monitoring penjanjian sewa serta koordinasi dengan DJKN terlampir	1	0,00							Selesai	
				f. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan BUA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka dan PNBP atas pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan pada laporan keuangan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1480/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat SEKMA Nomor 1481/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib '- Surat Kepala Bagian PNBP Nomor 99/BUA.3.05/PW1.4/XI/2023 tgl 14/11/23 tentang Tindak Lanjut '- Surat SEKMA Nomor 1482/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib '- Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 279/BUA.4/PL1.2.7/X/2023 tanggal 18 oktober 2023 tentang tindak lanjut '- Surat SEKMA Nomor 1493/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib '- Surat Kepala Biro Keuangan Nomor 1431/BUA.3/PW1.4?XI/2023 tgl 14/11/23 tentang Tindak Lanjut	1	0,00							Selesai	
				g.Memerintahkan Sekretaris satker terkait: 1)Selaku: a) KPB MS Aceh, KPB PN Jakarta Pusat, KPB Jakarta Barat, KPB PA Jakarta Pusat, KPB PN Malang, KPB Kasongan segera mengajukan usulan persetujuan sewa BMN kepada KPKNL melalui Pengadilan Tingkat Banding dan/atau penilaian penetapan besaran nilai sewa kepada Sekretaris MA; b) KPB MS Aceh untuk memerintahkan melakukan penyetoran sewa kantin Maqshaf Syar'I yang sudah dipungut dari Penyewa sejak Tahun 2022 ke Kas Negara; c) KPB Bafitbang Diklat Kumdil dan KPB PN Pariaman segera menghentikan pelaksanaan sewa setelah jangka waktu sewa berakhir dan segera memperoleh persetujuan perpanjangan sewa dari KPKNL; d) KPB PN Jakarta Pusat dan PN Malang lebih cermat dalam menyusun Perjanjian Sewa sesuai jangka waktu sewa dan nilai sewa yang disetujui Pengelola Barang; e) KPB PN Jakarta Barat lebih aktif berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Biro Perlengkapan BUA terkait tindak lanjut atas Permohonan Penetapan Pelaksanaan Sewa kepada Sekretaris MA; 2)Lebih cermat: a) Melaksanakan penatausahaan sewa tanah, gedung, dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku; b) Menyusun Perjanjian Sewa dengan memperhatikan kewajiban Penyewa atas biaya operasional sewa dan denda keterlambatan sewa; c) Melakukan pengawasan secara berjenjang atas penginputan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dalam Aplikasi SIMPONI serta penyajian Pendapatan Diterima Dimuka dalam laporan keuangan; 3) Memedomani SE Sekretaris MA Nomor 2347/SEK/KU.00/10/2021 tentang Penatausahaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa tanah, gedung, dan bangunan; 4)Memerintahkan Bendahara Penerimaan lebih cermat: a) Menatausahakan PNBP dan melakukan penginputan informasi yang berasal dari setoran Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dalam Aplikasi SIMPONI sesuai pedoman dan ketentuan; b) Melakukan penagihan atas pembayaran sewa yang telah jatuh tempo dan menerbitkan surat tagihan sebagai dasar pencatatan Piutang Sewa;	1	34.600.000,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1484/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Pariaman Nomor: 1566/SEK.PN.W3.U8/KU1.4/VIII/2023 tgl 29 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Pariaman Nomor: 1573/SEK.PN.W3.U8/KU1.4/VIII/2023 tgl 29 Agustus 2023 tentang Perintah Kepada Bendahara Penerimaan. - Surat Bendahara Penerimaan Nomor: 1574/W3.U8/KU1.4/VIII/2023 tgl 29 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut Kepada KPB. '- Surat SEKMA Nomor 1485/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Malang Nomor: 4541/SEK.KPN.W14-U2/RT1/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK. '- Surat Kuasa Pengguna Barang PN Malang Nomor: 4542/SEK.KPN.W14-U2/RT1/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Perintah Kepada Bendahara Penerimaan. - Surat Bendahara Penerimaan PN Malang Nomor: 4602/SEK.03.W14-U2/RT1/VIII/2023 tgl 29 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut Kepada KPB. ' - Surat SEKMA Nomor 1486/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Kasongan Nomor: 687/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Kasongan Nomor: 689/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Kasongan Nomor: 689-a/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Perintah Kepada Bendahara Penerimaan. - Surat Bendahara Penerimaan PN Kasongan Nomor: 689-b/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut Kepada KPB. - Surat SEKMA Nomor 1487/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib. - Surat Kuasa Pengguna Barang PN Jakarta Pusat Nomor: 331/SEK.PN.W10-U1/K.U.1/8/2023 tgl 29 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK.	1	34.600.000,00		0,00					Selesai	34.600.000,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				c) Melakukan penagihan atas denda keterlambatan pembayaran sewa dan biaya listrik Penyewa yang belum ditanggung oleh Penyewa; d) Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Penyewa Rumah Dinas, Pengelola Bagian Gaji, dan Biro Umum terkait administrasi dan status penggajian, kepegawaian, dan pemotongan sewa rumah dinasnya; e) Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Penyewa Rumah Dinas dan Biro Umum terkait administrasi dan status penggajian, kepegawaian, dan pemotongan sewa rumah dinasnya; f) Menagih kekurangan penerimaan PNBP sebesar Rp34.600.000 dan menyetorkan ke Kas Negara;			- Surat SEKMA Nomor 1488/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat SEKMA Nomor 1489/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat KPB Nomor 5157/SEK.PA.W3-A1/KU1.2/VIII/2023 tgl 30/VIII/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPB Nomor 5158/SEK.PA.W3-A1/KU1.2/VIII/2023 tgl 30/VIII/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPB Nomor 5159/SEK.PA.W3-A1/KU1.2/VIII/2023 tgl 30/VIII/2023 ttg tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1490/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat KPB kepada Sekma ttg tindak lanjut - Surat KPB kepada Bendahara Penerimaan ttg perintah - Surat Bendaha Penerimaan kepada KPB ttg tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1491/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat KPA Nomor 322/Bkl.1/S/9/2023 tgl 12/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPB Nomor 328/Bkl.1/S/9/2023 tgl 12/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPB Nomor 01/Bkl.1/B.Per/S/9/2023 tgl 12/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1492/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat KPA Nomor W1-A/2180/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPA Nomor W1-A/2181/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPA Nomor W1-A/2185/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 ttg tindak lanjut - Surat KPA Nomor W1-A/1995/PL.01/VIII/2023 tgl 04/08/2023 ttg tindak lanjut - Bukti setor kekurangan PNBP sebesar Rp24.700.000 dengan NTPN 7B5076U6ELOIKC6D dan sebesar Rp12.234.000 dengan NTPN F699961QUR3H0DB0									
				h.Memerintahkan Sekretaris PT terkait lebih optimal: 1) Berperan aktif melakukan pengawasan dan pembinaan ke unit kerja di bawahnya dan berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan BUA MA; 2) Melakukan pengawasan secara berjenjang atas penginputan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dalam Aplikasi SIMPONI serta penyajian Pendapatan Diterima Dimuka dalam laporan keuangan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1483/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib. - Surat Sekretaris PT DKI Jakarta Nomor: 4803/SEK.PT.W10-U/KU1.2.1/8/2023 tgl 29 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut Laporan BPK. - Surat Sekretaris PT Padang Nomor: 2641/SEKPT.W3-U/KU1.2/VIII/2023 tgl 28 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK. - Surat Kuasa Pengguna Anggaran PT Palangkaraya Nomo 1624/SEKPT.W16/KU1.3/VIII/2023 tgl 30 Agustus 2023 tentang Tindak Lanjut LHP BPK. - Surat Plt. Kuasa Pengguna Anggaran PT Surabaya Nomor: W14-U/7167/KU.01/08/2023 tgl 31 Agustus 2023 tentang Tanggapan LHP BPK.	1	0,00							Selesai	
				i. Memerintahkan Kepala Bagian Administrasi Penghapusan lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan sewa tanah, gedung, dan bangunan dan berkoordinasi dengan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1482/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 279/BUA.4/PL1.2.7/X/2023 tanggal 18 oktober 2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				j.Memerintahkan Kepala Bagian PNBP agar lebih cermat: 1) Melakukan pemantauan dan penelaahan PNBP berupa verifikasi atas kebenaran penerimaan dan penginputan informasi yang berasal dari setoran-setoran pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dalam Aplikasi SIMPONI; 2) Melakukan penatausahaan PNBP khususnya terkait PNBP yang berasal dari sewa Rumah Dinas maupun Non Rumah Dinas;	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1481/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib - Surat Kepala Bagian PNBP Nomor 98/BUA.3.05/PW1.4/XI/2023 tgl 14/11/23 tentang Tindak Lanjut	1	0,00							Selesai	
				k. Meningkatkan forum rekonsiliasi data Pendapatan Diterima Dimuka secara berkala antara Penyusun Laporan Keuangan Satker dengan Kerwil dan antara Bagian Administrasi Penghapusan, Bagian PNBP, dan Bagian Akuntansi.	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1480/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Sewa, PNBP, dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Belum Tertib	1	0,00							Selesai	
BELANJA																	
1	Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan	1	1.443.888.020,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menyusun dan menetapkan pedoman terkait dengan ketentuan teknis terkait pelaksanaan verifikasi pembayaran dan pemotongan pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai;	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1436/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang tindak lanjut Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat Plt Sekma Nomor 3944/SEK/KU1.1/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi pembayaran dan pemotongan pembayaran gaji dan tunjangan hakim dan pegawai - ND Kabiro Keuangan BUA MARI kepada Kabiro Hukum dan Humas BUA MARI Nomor 1832/BUA.3/KU.1/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Harmonisasi Pedoman dan Juknis terkait rekomendasi.	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b.Menginstruksikan KPA terkait untuk: 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai dan Pemotongan PPh Pasal 21; 2) Memerintahkan PPK terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai; 3) Memerintahkan Bendahara pengeluaran terkait lebih cermat dalam menyusun daftar gaji dan tunjangan Hakim serta pegawai sesuai ketentuan; 4)Memerintahkan PPABP terkait: a) Lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan data kepegawaian; b) Lebih cermat dalam menyusun daftar gaji dan tunjangan Hakim serta pegawai sesuai ketentuan; c) Mengikuti diklat/sosialisasi terkait tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Hakim dan pegawai; 5) Menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp1.269.870.595 (Rp838.917.383 + Rp430.953.212) yang terdiri dari: a) Tunjangan Hakim sebesar Rp838.917.383 (Rp935.463.708 - Rp96.546.325); b) Tunjangan Kinerja, Gaji dan/atau Tunjangan Struktural Pegawai sebesar Rp430.953.212 (Rp26.952.000 + Rp481.472.312 - Rp77.471.100);	1	1.269.870.595,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1440/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat Sekretaris PT Palangkaraya Nomor 1584/SEK.PT.W16/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Palangkaraya Nomor 1709/SEK.02/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/23 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Palangkaraya Nomor 1710/SEK.02/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/23 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PT Palangkaraya Nomor 1711/SEK.02/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/23 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1512.a/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat Sekretaris PA Pinrang Nomor 1583/SEK.W20-A8/KU.01/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Pinrang Nomor 11/SEK.W20-A8/KU.01/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PA Pinrang Nomor 12/SEK.W20-A8/KU.01/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PA Pinrang Nomor 13/SEK.W20-A8/KU.01/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang tindak lanjut - Bukti setor sesuai pada lampiran - Surat SEKMA Nomor 1512.b/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PTA Makassar Nomor 2447/SEK.PTA/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PTA Makassar Nomor 2444/SEK.PTA/KU1.3/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PTA Makassar Nomor 2424/SEK.PTA/KU1.3/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang perintah - Surat KPA PTA Makassar Nomor 2445/SEK.PTA/KU1.3/IX/2023 tgl 07/09/2023 tentang perintah - Surat SEKMA Nomor 1442a/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA Kepaniteraan Nomor 1051a/PAN.1/EXT/KU.01.02/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang Tindak lanjut - Surat KPA Kepaniteraan Nomor 1052a/PAN.1/INT/KU.01.02/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang Perintah - Surat KPA Kepaniteraan Nomor 1053a/PAN.1/INT/KU.01.02/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang Tindak lanjut - Surat KPA Kepaniteraan Nomor 1054a/PAN.1/INT/KU.01.02/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang Tindak lanjut - Bukti setor sesuai pada lampiran - Surat SEKMA Nomor 1442b/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Bukti setor sesuai pada lampiran - Surat SEKMA Nomor 1443/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Surabaya Nomor 13098/SEK.PN.W14-U1/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/2023 tentang Tindak lanjut - Surat KPA PN Surabaya Nomor 13099/SEK.PN.W14-U1/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Surabaya Nomor 13100/SEK.PN.W14-U1/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/2023 tentang perintah - Surat PPABP PN Surabaya Nomor 13101/SEK.PN.W14-U1/KU1.3/IX/2023 tgl 12/09/2023 tentang perintah - Bukti setor sesuai pada lampiran - Surat SEKMA Nomor 1444/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Tembilahan Nomor 4/SEK.PN.W4.U4/KU1.3/X/2023 tgl 27/10/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Tembilahan Nomor 1/SEK.PN.W4.U4/KU1.3/X/2023 tgl 04/10/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Tembilahan Nomor 2/SEK.03.PN.W4.U4/KU1.3/X/2023 tgl 23/10/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Tembilahan Nomor 3/SEK.03.PN.W4.U4/KU1.3/X/2023 tgl 23/10/2023 tentang tindak lanjut - Bukti setor sesuai pada lampiran - Surat SEKMA Nomor 1445/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PT Riau Nomor W4.U/4019/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut		1.112.829.167,00	1	157.041.408,00					Terdapat penyetoran sebelum LHP terbit sebesar Rp174.017.425. Nilai setoran yang tidak bisa disetor: - Rp126.981.408 (an. Itong Isnaini PN Surabaya, tidak mempunyai kemampuan membayar karena dipenjara) --> table kronologis #4 --> masuk usulan status 4 - Rp30.060.000 (PN Kupang an JB dibebaskan dari Hukdis dan ybs telah dilakukan BAP terhadap ybs oleh Bawas) --> masuk usulan status 4 Simpulan : BELUM SELESAI	966.141.838,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat KPA PT Riau Nomor W4.U/4029/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PT Riau Nomor W4.U/4029/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat PPABP PT Riau Nomor W4.U/4030/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Bojonegoro Nomor 1640/SEK.W13-A5/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Bojonegoro Nomor 1641/SEK.W13-A5/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PA Bojonegoro Nomor 1642/SEK.W13-A5/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PA Bojonegoro Nomor 1643/SEK.W13-A5/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Fak-Fak Nomor 728/SEK.PA.W13-A3/KU1.3/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Fak-Fak Nomor 729/SEK.PA.W13-A3/KU1.3/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PA Fak-Fak Nomor 730/SEK.PA.W13-A3/KU1.3/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PA Fak-Fak Nomor 731/SEK.PA.W13-A3/KU1.3/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bobong Nomor 545/SEK.PN.W28-U6/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bobong Nomor W28-U6/542/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Bobong Nomor W28-U6/543/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PN Bobong Nomor W28-U6/543/KU.01/8/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Tahuna Nomor W19-U3/269/KU.01.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Tahuna Nomor W19-U3/266.a/KU.01.3/VIII/2023 tgl 24/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Tahuna Nomor W19-U3/266.b/KU.01.3/VIII/2023 tgl 25/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PN Tahuna Nomor W19-U3/266.c/KU.01.3/VIII/2023 tgl 25/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bulukumba Nomor 1849/SEK/W22-U11/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bulukumba Nomor 1862/SEK/W22-U11/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bulukumba Nomor 1863/SEK/W22-U11/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Bulukumba Nomor 1864/SEK/W22-U11/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PN Bulukumba Nomor 1864/SEK/W22-U11/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Bengkulu Nomor 1911/SEK.PA.W7-A 1/KU. 1.3/IX/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Bengkulu Nomor 1874/SEK.PA.W7-A 1/KU. 1.3/IX/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat PPABP PA Bengkulu Nomor W7-A1/1869/KU1.3/VII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PA Bengkulu Nomor W7-A1/1868/KU1.3/VII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Metro Nomor 1388/SEK.W8-A2/KU1.3/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Metro Nomor 1381/SEK.W8-A2/KU1.3/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PA Metro Nomor 4/PPK.W8-A2/KU1.3/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PA Metro Nomor 1/PPABP.W8-A2/KU1.3/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Tanggamus Nomor 1258/SEK.W8-A6/UND.KU.1.2/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Tanggamus Nomor 1258.a/SEK.PA.W8-A6/KU.1.2/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PA Tanggamus Nomor 1260/W8-A6/KU.1.2/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PA Tanggamus Nomor 1261/W8-A6/KU.1.2/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Ternate Nomor 1058/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Ternate Nomor 1066/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PA Ternate Nomor 1067/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PA Ternate Nomor 1068/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Yogyakarta Nomor 2133/SEKPA.W12-A1/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Yogyakarta Nomor 2134/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PA Yogyakarta Nomor -/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat PPABP PA Yogyakarta Nomor -/SEK/KU.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Enrekang Nomor W22.U12/795/KU.05/9/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Enrekang Nomor W22.U12/05/KU.05/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat PPABP PN Enrekang Nomor W22.U12/06/KU.05/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat PPK PN Enrekang Nomor W22.U12/07/KU.05/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Kupang Nomor 2336/SEK.W26-U1/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kupang Nomor 2337/SEK.W26-U1/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Kupang Nomor 2338/SEK.W26-U1/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPABP PN Kupang Nomor 2339/SEK.W26-U1/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kutacane Nomor W1.U16/1044/KU.01/08/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Kutacane Nomor W1.U16/1045/KU.01/08/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat PPABP PN Kutacane Nomor W1.U16/1047/KU.01/08/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat PPK PN Kutacane Nomor W1.U16/1045/KU.01/08/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Kutacane Nomor 671 /SEK/W24-A5/KU.1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Dataran Hunimoa Nomor 671 /SEK/W24-A5/KU.1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Dataran Hunimoa Nomor 672 /SEK/W24-A5/KU.1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Dataran Hunimoa Nomor 673 /SEK/W24-A5/KU.1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindaklanjut - Surat setoran dan bukti potong sesuai bukti terlampir •Setoran NTPN 413040N9VRHTV8Q4 tgl 07/09/2023 sebesar Rp280.800.000 •Setoran NTPN 015FE7NAMJLH4MFS tgl 06/12/2023 sebesar Rp189.400.000 •Setoran NTPN C1D1E2CPNK7PPI8E tgl 08/12/2023 sebesar Rp125.000.000 •Setoran NTPN 0O6F26U8ELGCH2S5 tanggal 31/08/2023 sebesar Rp5.562.700 •Setoran NTPN 128300N9RFLM1VQ tanggal 31/08/2023 sebesar Rp24.101.400 •Setoran NTPN 891947N8Q1C2RAHS tanggal 31/08/2023 sebesar Rp23.250.000 •Setoran NTPN AE7C88JM9RUF6QHV tgl 31/08/2023 sebesar Rp26.700.000 •Setoran NTPN FB0152G4VGKEG3RI tanggal 31/08/2023 sebesar Rp349.491 •Setoran NTPN OB1CD3CIFB6QT4FJ tanggal 31/08/2023 sebesar Rp354.134 •Setoran NTPN C29D68N3EAL5B51T tanggal 31/08/2023 sebesar Rp365.247 •Setoran NTPN 781981JNFM2235IR tanggal 31/08/2023 sebesar Rp370.576 •Setoran NTPN 75A3561QUR6LFK90 tanggal 22/11/2023 sebesar Rp13.962.100 •Setoran NTPN 04820451QN2EF270 tanggal 28/08/2023 sebesar Rp2.740.080 •Setoran NTPN FD8F648VV5UJSGR2 tanggal 12/10/2023 sebesar Rp4.849.284 •Setoran NTPN 8557745I0N7U5P2N tanggal 12/10/2023 sebesar Rp322.500 •Setoran NTPN ADD5A3CIFB9APK8L tanggal 15/09/2023 sebesar Rp6.305.250 •Setoran ke BPG tanggal 22/05/2023 sebesar Rp13.713.300 •Setoran ke BPG tanggal 22/05/2023 sebesar Rp18.284.400 •Setoran ke BPG tanggal 17/10/2023 sebesar Rp39.411.000 •Setoran ke BPG tanggal 29/05/2023 sebesar Rp19.000.000 •Setoran ke BPG tanggal 28/11/2023 sebesar Rp31.526.250 •Setoran ke BPG tanggal 27/11/2023 sebesar Rp20.664.000 •Setoran ke BPG tanggal 27/11/2023 sebesar Rp6.236.000 •Setoran ke BPG tanggal 15/11/2023 sebesar Rp6.457.500 •Setoran ke BPG tanggal 01/11/2023 sebesar Rp13.452.750 •Pemotongan via PT Taspen tanggal 01/07/2023 sebesar Rp26.952.000 •Pemotongan ke tunjangan/gaji pada periode bulanan sebesar total Rp212.899.225										
				c. Memerintahkan Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Badilum dan Badilag lebih cermat dalam membuat surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin/sanksi;	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1446/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan - Surat Kasub Direktorat Mutasi Hakim Nomor 3092/DJA.2.1/KU1.3/X/2023	1	0,00							Selesai	
				d. Memerintahkan Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Badilum lebih cermat dalam membuat Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang tidak menyatakan adanya ketentuan mengenai komponen penghasilan jabatan terakhir yang menjadi hak untuk dibayarkan kepada Hakim dan pegawai yang ditetapkan dengan status pemberhentian sementara yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum apabila ada;	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1447/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan	1	0,00							Selesai	
				e. Mengoptimalkan penatakelolaan distribusi dokumen dan informasi keputusan penjatuhan hukuman disiplin di MA agar satuan kerja dan pihak-pihak terkait dapat segera memperoleh dokumen dan informasi tersebut.	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1439/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang tindak lanjut Pengelolaan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp495.798.100 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a.Menginstruksikan KPA satker terkait untuk: 1) Lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 2)Memerintahkan: a) PPSPM satker terkait lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; b) PPK satker terkait lebih cermat dalam memverifikasi pertanggungjawaban belanja barang dan menyiapkan SPP; dan c) Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan dan tidak menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1448/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp495.898.100 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Malang Nomor 4607/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Malang Nomor 4608/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPSPM PN Malang Nomor 4609/SEK.03.W14-U.2/KU1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Malang Nomor 4610/SEK.03.W14-U.2/KU1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Malang Nomor 4611/SEK.03.W14-U.2/KU1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA Dilmil III-12 Surabaya Nomor 58/SEK.W3-Mi01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA Dilmil III-12 Surabaya Nomor 50/SEK.W3-Mi01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah '- Surat PPK Dilmil III-12 Surabaya Nomor 51/SEK.03.W3-Mi01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut '- Surat PPSPM Dilmil III-12 Surabaya Nomor 52/SEK.03.W3-Mi01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut '- Surat Bendahara Pengeluaran Dilmil III-12 Surabaya Nomor 53/SEK.03.W3-Mi01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut '- Surat KPA MS Aceh Nomor W1-A/2167/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut '- Surat PPK MS Aceh Nomor W1-A/2168/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM MS Aceh Nomor W1-A/2169/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut '- Surat Bendahara Pengeluaran MS Aceh Nomor W1-A/2169/KU.02/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut '- Surat KPA PN Kasongan Nomor 688/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 688a/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 688b/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 688c/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Kasongan Nomor 688c/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Kasongan Nomor 688c/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Kasongan Nomor 688c/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2239/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2222/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2228/SEK.03.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM MS Banda Aceh Nomor 2231/SEK.03.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran MS Banda Aceh Nomor 2234/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Gedong Tataan Nomor 947/SEK.PA.W8-A10/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Gedong Tataan Nomor 943/SEK.PA.W8-A10/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PA Gedong Tataan Nomor 948/SEK.PA.W8-A10/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PA Gedong Tataan Nomor 949/SEK.PA.W8-A10/KU1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PA Gedong Tataan Nomor 949/SEK.PA.W8-A10/KU1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran BLDK Nomor 10/Bld.1/BP/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK BLDK Nomor 002/Bld.1/PPK/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK BLDK Nomor 05/Bld.1/PPK/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM BLDK Nomor 01/Bld.1/PPSPM/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA BLDK Nomor 318/Bld.1/PPSPM/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA BLDK Nomor 317/Bld.1/PPSPM/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b. Menginstruksikan Kepala Bawas untuk melakukan reviu atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp495.595.500 yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Jika terdapat kelebihan pembayaran agar segera disetorkan ke Kas Negara.	1	0,00	PTL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1449/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp495.898.100 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan '- Surat Sekretaris MS Aceh Nomor 98/SEK.MS.W1-A/KU.1.3/IX/2023 tgl 19/09/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00							Selesai	2.510.000,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	*Nilai* Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada PN Malang tanggal 20 Oktober 2023 - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada Dilmil III-12 Surabaya tanggal 27 Oktober 2023 - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada MS Banda Aceh tanggal 20 Oktober 2023 - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada PN Malang tanggal 20 Oktober 2023 (menjelaskan bahwa Bukti Pertanggungjawaban pada PN Malang dinyatakan telah memadai) - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada Dilmil III-12 Surabaya tanggal 27 Oktober 2023 (menjelaskan bahwa Bukti Pertanggungjawaban pada Dilmil III-12 dinyatakan telah lengkap dan informatif) - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada MS Banda Aceh tanggal 20 Oktober 2023 (menjelaskan bahwa Bukti Pertanggungjawaban pada MS Banda Aceh telah lengkap dan memadai)									
3	Realisasi Belanja Konsumsi Rapat dalam Kantor Pada Enam Satker Sebesar Rp108.919.000 Tidak Sesuai Ketentuan	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk: a. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1450/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Konsumsi Rapat dalam Kantor Pada Enam Satker Sebesar Rp108.919.000 Tidak Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2560/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor 2586/SEK.PN.W16-U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2587/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2588/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2589/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1347/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1343/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1344/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1346/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1345/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686a/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Kasongan Nomor 686d/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686b/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Kasongan Nomor 686a/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686c/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Kasongan Nomor 686f/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2240/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2223/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK MS Banda Aceh Nomor 2229/SEK.03.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM MS Banda Aceh Nomor 2232/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendhara Pengeluaran MS Banda Aceh Nomor 2235/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PTA Palangkaraya Nomor 4/SEK.PTA.W16-A/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PTA Palangkaraya Nomor 14/SEK.PTA.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PTA Palangkaraya Nomor 1286/SEK.02.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PTA Palangkaraya Nomor 1286.a/SEK.02.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PTA Palangkaraya Nomor 1286.b/SEK.02.B.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b.Memerintahkan: 1) PPSPM satker terkait lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; 2) PPK satker terkait lebih cermat dalam memverifikasi pertanggungjawaban belanja barang dan menyiapkan SPP; 3) Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam melaksanan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan dan tidak menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1450/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Konsumsi Rapat dalam Kantor Pada Enam Satker Sebesar Rp108.919.000 Tidak Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2560/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor 2586/SEK.PN.W16-U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2587/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2586/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Palangkaraya Nomor W16-U1/2586/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1347/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1343/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1344/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1346/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1345/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686a/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Kasongan Nomor 686d/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686b/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Kasongan Nomor 686e/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kasongan Nomor 686c/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Kasongan Nomor 686/SEK.W16-U8/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2240/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2223/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK MS Banda Aceh Nomor 2229/SEK.03.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM MS Banda Aceh Nomor 2232/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendhara Pengeluaran MS Banda Aceh Nomor 2235/SEK.MS.W1-A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PTA Palangkaraya Nomor 4/SEK.PTA.W16-A/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PTA Palangkaraya Nomor 14/SEK.PTA.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PTA Palangkaraya Nomor 1286/SEK.02.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PTA Palangkaraya Nomor 1286.a/SEK.02.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PTA Palangkaraya Nomor 1286.b/SEK.02.B.W16-A/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut											
4	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta Pemberian Biaya Bahan Bakar Kendaraan Tidak Sesuai Ketentuan	1	95.085.111,76	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a.Menginstruksikan Kepala Biro Umum: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penyusunan rencana kebutuhan sewa kendaraan untuk masing-masing satuan kerja dan pelaksanaan kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas; dan 2) Memerintahkan Kasubbag Pengadaan dan Penghapusan Biro Umum menyusun perencanaan kebutuhan sewa kendaraan untuk masing-masing satuan kerja dan menetapkan pengguna kendaraan dinas sesuai ketentuan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1451/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta Pemberian Biaya Bahan Bakar Kendaraan Tidak Sesuai Ketentuan, - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 558/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat PPK Nomor 552/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Kepala sub bagian pengadaan dan penghapusan biro umum Nomor 563/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat PPK Nomor 570b/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - SK Sekma Nomor 1461/SEK/SK/XI/2022 tentang Penetapan Satker Penerima Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dengan Sistem Sewa di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya - SK Sekma Nomor 1462/SEK/SK/XI/2022 tentang Jenis dan Peruntukan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dengan Sistem Sewa di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya	1	0,00							Selesai	
				b.Memerintahkan PPK satker terkait: 1) Memedomani PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan PMK tentang SBM dalam melaksanakan pengadaan sewa kendaraan; 2) Lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas; dan 3) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp95.085.111,76 dan menyetorkan ke Kas Negara.	1	95.085.111,76	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1452/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta Pemberian Biaya Bahan Bakar Kendaraan Tidak Sesuai Ketentuan, - Surat Kepala Biro Umum Nomor 647.f/BUA.7/PW1.2.1/X/2023 tgl 18/10/2023 tentang tindak lanjut - Surat Kepala Biro Umum Nomor 647.g/BUA.7/PW1.2.1/X/2023 tgl 18/10/2023 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1454/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta Pemberian Biaya Bahan Bakar Kendaraan Tidak Sesuai Ketentuan, - Surat SEKMA Nomor 1455/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta Pemberian Biaya Bahan Bakar Kendaraan Tidak Sesuai Ketentuan, - Surat Kepala Biro Umum Nomor 647.i/BUA.7/PW1.2.1/X/2023 tgl 18/10/2023 tentang tindak lanjut - Surat Kepala Biro Umum Nomor 647.h/BUA.7/PW1.2.1/X/2023 tgl 18/10/2023 tentang tindak lanjut - Bukti Setoran NTPN 9CF1555DF0H0759T tgl 16/10/2023 sebesar Rp45.434.531 - Bukti Setoran NTPN D73572G4VGN2G2N6 tgl 19/9/2023 sebesar Rp7.158.680	1	95.085.111,76							Selesai	95.085.111,76

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Bukti Setoran NTPN FB00555DF0GV85QJ tgl 11/10/2023 sebesar Rp16.203.600 - Bukti Setor NTPN C32041JNFM7CD09G tgl 10/10/2023 sebesar Rp17.991.631 - Bukti Setoran NTPN 7E64655DF0MOQ1ET tgl 06/12/2023 sebesar Rp4.972.000 - Bukti Setoran NTPN 1A6FF48VV5UD7BLJ tgl 05/10/2023 sebesar Rp3.324.672										
5	Realisasi Belanja dalam Kegiatan Court Excellence Training dan Pelatihan Champion Meeting Tidak Sesuai Ketentuan	1	81.587.300,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menginstruksikan Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil selaku KPA untuk: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;	1		TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1456/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja dalam Kegiatan Court Excellence Training dan Pelatihan Champion Meeting Tidak Sesuai Ketentuan	1	0,00							Selesai	
				b. Memerintahkan PPK Pusdiklat Menpim: a) Lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak; b) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp81.587.300 dan menyetorkannya ke Kas Negara;	1	81.587.300,00	TL SEM II/2023 '- Surat PPK BLDK tentang Tindak Lanjut tanggal 13/09/2023 Nomor 002, 316, 327 /Bld.4/PPK.22/S/9/2023 '- bukti setoran seebear Rp81.587.300 dengan NTPN 6FA370N9VREOK36S tanggal 1 Agustus 2023	1	81.587.300,00							Selesai	81.587.300,00
				c. Menginstruksikan Kepala Biwas untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban tiket pesawat dan penginapan sebesar Rp88.360.500 yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Jika terdapat kelebihan pembayaran agar segera disetorkan ke Kas Negara.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1457/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja dalam Kegiatan Court Excellence Training dan Pelatihan Champion Meeting Tidak Sesuai Ketentuan - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan pada Balitbang Kumdil MA RI tanggal 20 November 2023 (menjelaskan bahwa Bukti Pertanggungjawaban pada Balitbang Kumdil MA RI dinyatakan telah sesuai ketentuan dan dapat diyakini kebenarannya).	1	0,00							Selesai	
6	Realisasi Belanja Jasa Event Organizer Peresmian Kantor Pengadilan Belum Sesuai Ketentuan	1	31.250.000,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1458/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Jasa Event Organizer Peresmian Kantor Pengadilan Belum Sesuai Ketentuan - Surat PPK Nomor 553/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 586.b/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b.Memerintahkan PPK: 1) Lebih cermat dalam merencanakan pengadaan, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan serta belum cermat dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp31.250.000 dan menyetorkan ke kas negara;	1	31.250.000,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1458/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Jasa Event Organizer Peresmian Kantor Pengadilan Belum Sesuai Ketentuan - Surat PPK Nomor 553/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 586.b/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat setoran dengan nomor NTPN BA0171JNFM4FKV2H tanggal 13/09/2023 sebesar Rp31.250.000	1	31.250.000,00							Selesai	31.250.000,00
				c. Pokja/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga sesuai ketentuan untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis atas Pengadaan Barang dan Jasa.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1458/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Jasa Event Organizer Peresmian Kantor Pengadilan Belum Sesuai Ketentuan - Surat PPK Nomor 553/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 586.b/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
7	Realisasi Belanja Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Belum Sesuai Ketentuan	1	491.537.922,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Memerintahkan PPK: 1) Lebih cermat dalam menetapkan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta belum cermat melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp313.928.538 (Rp491.537.922 - Rp177.609.384) dan menyetorkan ke kas negara.	1	313.928.538,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA No. 1459/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Belum Sesuai Ketentuan - Surat PPK No. 554/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat SEKMA No. 1459/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Belum Sesuai Ketentuan '- Surat PPK Nomor 554/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut '- Surat Plt Kabiro Umum tentang Tindak Lanjut tanggal 21/09/2023 Nomor (586.b, 586.c, 586.d) /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023-21/09/2023 - Bukti SetorNTPN 003BC61QOR0FV5ME tgl 15/09/2023 sebesar Rp16.543.313 - Bukti SetorNTPN A98867QLUG5BRALO tgl 18/09/2023 sebesar Rp265.000.000 - Bukti SetorNTPN 38EA48N3J04P tgl 13/09/2023 sebesar Rp8.961.225 - Bukti SetorNTPN 182837QLUG56J3OA tgl 13/09/2023 sebesar Rp23.424.000	1	313.928.538,00							Selesai terdapat penyetoran sebelum LHP terbit sebesar Rp177.609.384	491.537.922,00
				b. Menginstuksikan Kepala Bawas untuk melakukan reviu atas realisasi belanja keperluan kantor tidak dapat diyakini kebenarannya atas biaya pelaksanaan Swab Antigen personil keamanan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp152.192.000. Jika terdapat kelebihan pembayaran agar segera disetorkan ke kas negara;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1460/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Realisasi Belanja Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Belum Sesuai Ketentuan - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan tanggal 20 Oktober 2023 - Surat Berita Acara Review Badan Pengawasan tanggal 20 Oktober 2023 menjelaskan bahwa Rp152.192.000 dinyatakan telah dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan selesai	1	0,00							Selesai	
8	Pembayaran Honorarium Penanganan Perkara Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjelas ketentuan mengenai Hak Keuangan atas pemberian HPP kepada Hakim Ad Hoc yang telah melakukan penyelesaian perkara;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1461/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang tindak lanjut Pembayaran Honorarium Penanganan Perkara Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	1	0,00							Selesai	
				b. Memerintahkan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan lebih cermat dalam melakukan penghitungan perkara yang dapat dibayarkan HPP.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1462/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pembayaran Honorarium Penanganan Perkara Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan - Surat Koordinator data dan informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No. 1690A/PAN/KU.1.3/VIII/2023 tgl 20/08/2023	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Pengendalian Belanja Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan belanja pengadaan BBM;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1463/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengendalian Belanja Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional Belum Memadai - Surat PPK Nomor 555/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b. Memerintahkan pemegang RFID untuk melaksanakan Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengisian BBM untuk kendaraan dinas/operasional pada BUA secara tertib;m pelaksanaan belanja pengadaan BBM;	1	0,00	- Surat Kepala Sub Bagian Pengangkatan dan perjalanan dinas Biro Umum Nomor 562/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut" - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 586.a/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				c. Mengevaluasi risiko RFID disalahgunakan kepada selain kendaraan dinas/operasional MA atas penggunaan RFID yang tidak melekat pada nomor polisi kendaraan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat Plt. Kabiro Umum Nomor 809.A/BUA.7/PW1.4/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Perintah dan Hasil Evaluasi Resiko RFID	1	0,00							Selesai	
				d. PPK dan Kepala Subbag Pengangkutan dan Perjalanan Dinas Biro Umum pada BUA lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pengadaan BBM untuk kendaraan dinas operasional jabatan terutama terkait penggunaan RFID sehingga terdapat permasalahan diatas dan permasalahan berulang berupa: 1) Penggunaan BBM tidak sesuai dengan spesifikasi jenis BBM kendaraan dinas/operasional; 2) Pengisian BBM tidak sesuai dengan kapasitas maksimal tangki kendaraan dinas/operasional dalam satu hari; 3) Pengisian minimal BBM untuk mengantisipasi pengisian pada kendaraan roda dua; 4) Pengembalian sisa deposit pengadaan BBM dari PT PR pada akhir tahun.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1463/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengendalian Belanja Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional Belum Memadai - Surat PPK Nomor 555/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Kepala Sub Bagian Pengangkatan dan perjalanan dinas Biro Umum Nomor 562/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut" - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 586.a/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
10	Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan	1	19.862.000,00	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1464/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 926/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 926-a/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 926-b/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Pulang Pisau Nomor 926-c/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Plt kasub umum keuangan PN Pulang Pisau Nomor 926-d/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1465/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1267/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1273/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PT TUN Surabaya Nomor 1274/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b.Memerintahkan PPK satker terkait: 1) Lebih cermat dalam memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa dan kebijakan pengadaan di lingkungan MA; 2) Lebih optimal dalam melakukan negosiasi harga dengan provider jasa layanan internet; 3) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan; 4) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp19.862.000 dan menyetorkannya ke Kas Negara.	1	19.862.000,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1466/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat PPK Nomor 558/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Plt Kepala Biro Umum Nomor 586.f/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Kepala Biro Umum Nomor 647.j/BUA.7/PW1.2.1/X/2023 tgl 18/10/2023 tentang tindal lanjut - bukti setoran sebesar total Rp19.862.000 terlampir (Surat setoran dengan nomor NTPN 1CE676U8EL7CUM8T tanggal 30/05/2023 sebesar Rp3.066.000 dan Surat setoran dengan nomor NTPN 0D2B161QUR3CK8FA tanggal 12/10/2023 sebesar Rp16.796.000)	1	19.862.000,00		0,00					Selesai	19.862.000,00
11	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	12.978.225,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; b. Menginstruksikan Kepala Bawas untuk reviu atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.183.000 yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Jika terdapat kelebihan pembayaran agar segera disetorkan ke Kas Negara;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1467/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PA Malang Nomor 4953/SEK.PA.W13/KU1/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Malang Nomor 4955/SEK.PA.W13/KU1/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Malang Nomor 4956/SEK.PA.W13/KU1/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1468/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PN Malang Nomor 4604/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Malang Nomor 4605/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat PPK PN Malang Nomor 4606/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1469/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 26/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 25/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 27.a/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah - Surat SEKMA Nomor 1470/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat Koordinator Tim Badan Pengawasan 1470-1073/BP/LHP/X/2023 tgl 24 November 2023 - Berita acara Badan Pengawasan tgl 20 oktober 2023 - BA Verifikasi dan Pemeriksaan Fisik Lapangan Bawas pada PT Palangkaraya tanggal 20 Oktober 2023 menjelaskan bahwa Rp8.183.000 telah dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan selesai.										
				c.Memerintahkan PPK pada Satker terkait: 1) Lebih cermat dan teliti dalam melakukan persetujuan pembebanan dan pembayaran atas belanja dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp11.728.825 dan menagih denda keterlambatan sebesar Rp1.249.500, serta menyetorkan ke Kas Negara.	1	12.978.325,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1467/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PA Malang Nomor 4953/SEK.PA.W13/KU1/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Malang Nomor 4955/SEK.PA.W13/KU1/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Malang Nomor 4956/SEK.PA.W13/KU1/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1468/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PN Malang Nomor 4604/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Malang Nomor 4605/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Malang Nomor 4606/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat SEKMA Nomor 1469/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data, Langganan Jasa Layanan Internet dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Belum Sesuai dengan Ketentuan - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 26/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 25/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah '- Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 27.a/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah - Setoran dari PA Malang Sebesar Rp6.010.000 dengan NTPN 6A0423CIFB6PR9AV tanggal 30 Agustus 2023 - Setoran dari PN Malang Sebesar Rp2.239.704 dengan NTPN 7233D3C1FB8TP175 tanggal 1 September 2023 - Setoran dari PT Banda Aceh Sebesar Rp3.479.121 dengan NTPN 8623961QUQNAQOV8 tanggal 8 Juni 2023 - Setoran dari PT Palangkara Sebesar Rp1.249.500 dengan NTPN EA02D61QUR8JII1G tanggal 21 Desember 2023	1	12.978.325,00		0,00					Selesai	12.978.325,00
12	Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belum Sesuai Ketentuan	1	1.544.487.720,85	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1471/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 927/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 927-a/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Pulang Pisau Nomor 927-c/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor W16-U11/862/KU.01/VIII/2023 tgl 03/08/2023 tentang perbaikan transaksi penerimaan negara - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3496/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3506/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3507/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPHP PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3508/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3509/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut '- Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1268/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut '- Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1275/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang Perintah '- Surat PPK PT TUN Surabaya Nomor 1276/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat PPK PT TUN Surabaya Nomor 1277/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Ketua Pokja PT TUN Surabaya Nomor 1278/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPHP PT TUN Surabaya Nomor 1279/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Jakarta Utara Nomor 6508/SEK/W10-U4/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Jakarta Utara Nomor 6349a dan 6349b /SEK/W10-U4/KU1.3/VIII/2023 tgl 21/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Jakarta Utara Nomor 6402.a dan 6402.b /SEK/W10-U4/KU1.3/VIII/2023 tgl 21/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Surabaya Nomor J196173/KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Surabaya Nomor W14-U/7174/KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PT Surabaya Nomor W14-U/7176/KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PT Surabaya Nomor W14-U/7175/KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK Biro Umum Nomor 557/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Pokja PBJ Biro Umum tentang Tindak Lanjut Nomor 560 dan 561 /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 - Surat PPHP Biro Umum Nomor 564, 565, 566, 567, 568, 569 dan 570 /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat plt Kabiro Umum Nomor 586.g dan 586.h /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut									
				b.Memerintahkan PPK sartker terkait, untuk: 1) Lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta lebih cermat melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan; 2) Meminta Pokja Pengadaan Barang/Jasa lebih cermat dalam memahami peraturan yang berlaku; 3) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara atas kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, realisasi AHSP dan harga satuan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.389.113.757,57 yang terdiri dari: a)PT APM pada PN Pulang Pisau sebesar Rp51.788.349; b)PT RCF pada PA Pringsewu sebesar Rp76.653.199; c) PT IMU pada PA Tulang Bawang Tengah sebesar Rp370.044.225,75; d)CV Mh pada PT TUN Surabaya sebesar Rp10.386.072,03; e) CV GLA pada PT Surabaya sebesar Rp145.092.417,72 (Rp129.112.417,72 + Rp15.980.000); f)CV La pada PN Sidoarjo sebesar Rp17.884.928,63; g) CV TA pada PN Jakarta Utara sebesar Rp235.635.860,36 (Rp194.279.760,36 + Rp41.356.100); h) CV SAM pada BUA sebesar Rp368.740.738,13 (Rp238.993.747 + Rp129.746.991,13); i)CV CKM pada BUA sebesar Rp93.107.986,95.	1	1.389.113.757,57	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1471/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 927/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 927-a/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Pulang Pisau Nomor 927-c/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor W16-U11/862/KU.01/VIII/2023 tgl 03/08/2023 tentang perbaikan transaksi penerimaan negara - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3496/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3508/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3507/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPHP PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3508/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3509/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1268/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1275/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang Perintah - Surat PPK PT TUN Surabaya Nomor 1276 dan 1277 /SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Ketua Pokja PT TUN Surabaya Nomor 1278/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPHP PT TUN Surabaya Nomor 1279/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Jakarta Utara Nomor 6508/SEK/W10-U4/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Jakarta Utara Nomor 6349.a, 6349.b, 6402.a dan 6402.b /SEK/W10-U4/KU1.3/VIII/2023 tgl 21/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Surabaya Nomor 7173, 7174, 7175 dan 7176 W14-U/ /KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK Biro Umum Nomor 557/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Pokja PBJ Biro Umum Nomor 560 dan 561 /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat PPHP Biro Umum Nomor 564, 565, 566, 567, 568, 569 dan 570 /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat plt Kepala Biro Umum Nomor 586.g dan 586.h/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut - Setoran NTPN 7DB7F1JNFM76T4C1 pada 04/10/2023 sebesar Rp160.000.000 - Setoran NTPN 0026855DF0K8121B pada 29/11/2023 sebesar Rp210.044.226 - Setoran NTPN A840C0N9VREV59OQ pada 08/08/2023 sebesar Rp93.107.967 - Setoran NTPN 5D8802G4VGH88UJE pada 27/07/2023 sebesar Rp368.740.738 - Setoran NTPN 51E7548VV5RQ6VVO pada 19/09/2023 sebesar Rp76.653.199 - Setoran NTPN A38DD1JNFLRBL0VG pada 10/06/2023 sebesar Rp51.789.354 - Setoran NTPN 36A033CIFAQG711V pada 17/04/2023 sebesar Rp17.884.937 - Setoran NTPN DA0A71JNFM480LH9 pada 04/09/2023 sebesar Rp10.386.073 - Setoran NTPN 4FBC255DF0GSSS8F pada 09/10/2023 sebesar Rp185.635.861 - Setoran NTPN E6A4F61QUR0QM48M pada 27/09/2023 sebesar Rp50.000.000 - Setoran NTPN D8B970N9VRHQLTHQ pada 04/09/2023 sebesar Rp145.092.418	1	1.389.113.757,57		0,00					Selesai terdapat penyetoran sebelum LHP terbit sebesar Rp175.373.963,28	1.544.487.720,85

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				c. Memerintahkan PPHP satker terkait lebih cermat dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1471/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belum Sesuai Ketentuan - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 927/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 927-a/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Pulang Pisau Nomor 927-c/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor W16-U11/862/KU.01/VIII/2023 tgl 03/08/2023 tentang perbaikan transaksi penerimaan negara - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3496/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3506/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3507/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPHP PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3508/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Sidoarjo Nomor W14-U8/3509/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1288/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1275/SEK.PTTUN.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang Perintah - Surat PPK PT TUN Surabaya Nomor 1276 dan 1277 /SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Ketua Pokja PT TUN Surabaya Nomor 1278/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPHP PT TUN Surabaya Nomor 1279/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Jakarta Utara Nomor 6349a, 6349b, 6402.a, 64022.b, 6508/SEK/W10-U4/KU1.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Surabaya Nomor 7173, 7174, 7175 dan 7176, W14-U /KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK Biro Umum Nomor 557/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Pokja PBJ Biro Umum Nomor 560 dan 561 /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat pit Kepala Biro Umum Nomor 586.g dan 586.h/BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 21/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat PPHP Biro Umum Nomor 564, 565, 566, 567, 568, 569 dan 570 /BUA.7/PW1.2.1/IX/2023 tgl 15/09/2023 ttg tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
13	Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Sebesar Rp1.222.426.929 Tidak Sesuai Klasifikasi	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menginstruksikan KPA dan tim penyusun anggaran satker terkait lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya terkait kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA dan Standar Akuntansi Pemerintahan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1472/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Sebesar Rp1.222.426.929 Tidak Sesuai Klasifikasi	1	0,00							Selesai	
				b.Menginstruksikan KPA terkait memerintahkan: 1)PPK satker terkait: a) Mematuhi klasifikasi dan alokasi anggaran pada DIPA pada saat pelaksanaan dan pencairan belanja; b) Lebih cermat dalam memverifikasi pertanggungjawaban belanja barang dan belanja Modal serta menyiapkan SPP; 2) PPSPM satker terkait lebih optimal dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya secara lengkap dan benar; 3) Bendahara Pengeluaran satker terkait lebih optimal dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1472/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Sebesar Rp1.222.426.929 Tidak Sesuai Klasifikasi - Surat KPA PN Malang Nomor 4612/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Malang Nomor 4613/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Malang Nomor 4614/SEK.KPN.W14-U2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Malang Nomor 4615/SEK.03.W14-U.2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran BLDK Nomor 9 dan 10/Bld.1/BP/S/9/2023 tgl 15/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK BLDK No. 003/Bld.4/PPK/S/9/2023 tgl 15/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK BLDK No. 001/Bld.2/S/PPK/9/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK BLDK No. 06/Bld.3/PPK/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM BLDK No. 02/Bld.1/PPSPM/S/9/2023 tgl 13/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA BLDK Nomor 319/Bld.1/S/9/2023 tgl 11/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA BLDK Nomor 321/Bld.1/S/9/2023 tgl 11/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Malang Nomor 4616/SEK.03.W14-U.2/KU1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 928/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Pulang Pisau Nomor 928-a, 928-b, 928-c, 928-d /SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang perintah - Surat PPK PN Pulang Pisau Nomor 928-e/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Pulang Pisau Nomor 928-f/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Pulang Pisau Nomor 928-g/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat plt. Kasub Umum keuangan PN Pulang Pisau Nomor 926-h/SEK.W16-U11/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1279/SEK.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT TUN Surabaya Nomor 1280/SEK.W3-TUN/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang perintah - Surat Kasub Renprog PT TUN Surabaya Nomor 1281/SEK.01/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PT TUN Surabaya Nomor 1282/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PT TUN Surabaya Nomor 1283/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PT TUN Surabaya Nomor 1284/SEK.02/PW1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA Dilmil III-12 Surabaya Nomor 58/SEK.W3-Mil01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA Dilmil III-12 Surabaya Nomor 54/SEK.W3-Mil01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang perintah - Surat PPK Dilmil III-12 Surabaya Nomor 55/SEK.W3-Mil01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM Dilmil III-12 Surabaya Nomor 56/SEK.W3-Mil01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran Dilmil III-12 Surabaya Nomor 57/SEK.W3-Mil01/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Palangkaraya Nomor 1641/SEK.PT.W16/KU1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Palangkaraya Nomor 1635/SEK.02/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Palangkaraya Nomor 1636/SEK.02/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Palangkaraya Nomor 1637/SEK.02/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PT Palangkaraya Nomor 1638/SEK.02/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PT Palangkaraya Nomor 1639/SEK.02/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PT Palangkaraya Nomor 1640/SEK.02/PW1.1.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2241/SEK.MS.W1.A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA MS Banda Aceh Nomor 2224/SEK.MS.W1.A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK MS Banda Aceh Nomor 2230/SEK.MS.W1.A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM MS Banda Aceh Nomor 2233/SEK.MS.W1.A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran MS Banda Aceh Nomor 2236/SEK.MS.W1.A1/KU1.1.2/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Banda Aceh Nomor 3363/SEK.W1.U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Banda Aceh Nomor 3364/SEK.W1.U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Banda Aceh Nomor 3365/SEK.W1.U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Banda Aceh Nomor 3367/SEK.W1.U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Banda Aceh Nomor 3366/SEK.W1.U1/KU1.1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1339/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1335/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1336/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1337/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Kuala Kurun Nomor W16-U9/1338/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Surabaya Nomor 13310/SEK.PN.W14-U1/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Surabaya Nomor 13311/SEK.PN.W14-U1/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPK PN Surabaya Nomor 13312/SEK.01/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat PPSPM PN Surabaya Nomor 13313/SEK.01/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran PN Surabaya Nomor 13313/SEK.01/KU1.3/IX/2023 tgl 14/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 21/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 20/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 19/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PT Banda Aceh Nomor 18/SEK.PT.W1.U/KU1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Kurang Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA terkait untuk: a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kas pada satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1494/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Kurang Tertib - Surat Bendahara Pengeluaran BUA Nomor 788/BUA.3/KU.1.1/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang Tindak Lanjut - Surat Sekretaris PA Dumai Nomor 1056/SEK.PA.W4-A8/KU1.3/VIII/2023 tgl 22/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat wakil ketua PA Dumai Nomor 1055/KPA.W4-A8/KU1.3/VIII/2023 tgl 22/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat keterangan KPA PA Dumai Nomor W4-A8/467/KU.01/3/2023 tgl 29/03/2023 - Surat KPA PA Sijunjung Nomor 1362/SEK.W3-A10/KU.01.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Lolak Nomor 1/SEK.PA.W18-A7/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Jeneponto Nomor W22.U17-1394/KU.01.1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Jeneponto Nomor W22.U17/135/KU.03/I/2023 tgl 09/01/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Pati Nomor 2698/SEK.PA.W11-A14/KU1.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Bintuhan Nomor 8/SEK.W8.U5/PL1.2.4/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran BUA Nomor 788/BUA.3/KU.1.1/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
				b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran memedomani ketentuan tentang pengelolaan kas.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1494/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Kurang Tertib - Surat Bendahara Pengeluaran BUA Nomor 788/BUA.3/KU.1.1/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang Tindak Lanjut - Surat Sekretaris PA Dumai Nomor 1056/SEK.PA.W4-A8/KU1.3/VIII/2023 tgl 22/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat wakil ketua PA Dumai Nomor 1055/KPA.W4-A8/KU1.3/VIII/2023 tgl 22/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat keterangan KPA PA Dumai Nomor W4-A8/467/KU.01/3/2023 tgl 29/03/2023 - Surat KPA PA Sijunjung Nomor 1362/SEK.W3-A10/KU.01.3/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Lolak Nomor 1/SEK.PA.W18-A7/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Jeneponto Nomor W22.U17-1394/KU.01.1/IX/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Jeneponto Nomor W22.U17/135/KU.03/I/2023 tgl 09/01/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Pati Nomor 2698/SEK.PA.W11-A14/KU1.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Bintuhan Nomor 8/SEK.W8.U5/PL1.2.4/IX/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Pengeluaran BUA Nomor 788/BUA.3/KU.1.1/8/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
2	Penatausahaan Piutang Bukan Pajak Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menyusun dan menetapkan pedoman, juknis dan SOP terkait Penatausahaan Piutang PNBP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1495/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang tindak lanjut Penatausahaan Piutang Bukan Pajak Belum Memadai - Surat SEKMA Nomor 1496/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang - Surat Kepala Bagian PNBP Nomor 98/BUA.3.05/PW1.4/XI/2023 tgl 14/11/23 tentang Tindak Lanjut - ND Permohonan Harmonisasi Pedoman Pengelolaan Piutang PNBP dari Kabiro Keuangan kepada Kabiro Hukum dan Humas BUA MARI nomor 1634/BUA.3/KU1.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023	1	0,00							Selesai	
				b. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan agar memerintahkan Kepala Bagian PNBP supaya lebih optimal dalam: 1) Melakukan monitoring, pemantauan, penatausahaan atas potensi Piutang yang timbul dari pemanfaatan BMN (Piutang Bukan Pajak) maupun Piutang Lainnya; 2)Melakukan penatausahaan Piutang sesuai ketentuan; 3) Mengupayakan penagihan dan penyelesaian Piutang yang telah jatuh tempo; 4) Berkoordinasi dengan Bagian Akuntansi Biro Keuangan dalam rangka penyajian saldo Piutang. 5) Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penyajian saldo Piutang PNBP;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1497/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Piutang Bukan Pajak Belum Memadai - Surat Sekretaris PA Surabaya Nomor 6805/SEK.PA.W3-A1/KU1.4/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Tulungagung Nomor 4968/SEK.PA.W3-A11/KU1.1.2/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Tulungagung Nomor W13-A11/3422/PL.01/6/2023 tgl 14/06/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bantul Nomor W13-U5/2463/KU.04.2/VIII/2023 tgl 14/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Binjai Nomor W2.U3/1648/PL.01/08/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPB PN Binjai Nomor W2.U3/1133/PL.01/6/2023 tgl 12/06/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Ciamis Nomor 2170/SEK.03/KU1.3/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Gresik Nomor 1523.1/SEK.PN.W14-U31/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Penerimaan PN Gresik Nomor 1523.2/SEK.PN.W14-U31/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat KPA PN Tanjungkarang Nomor W9.U1/2960/KU.01/VIII/2023 tgl 31/VIII/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Pariaman Nomor 1577/SEK.PN.W3-U8/KU1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Magelang Nomor 850/SEK.PN.W12-U6/UM.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Ciamis Nomor 2170/SEK.03/KU1.3/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Bantul Nomor W13.U5/2483/KU.04.2/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Karawang Nomor 2856/SEK.03.W11-U10/KU.03/VIII/2023 tgl 06/09/2023 tentang tindak lanjut - Lampiran jawaban PN Surabaya - Surat Sekretaris PA Jakarta Barat Nomor W9.A2/3848/KU.03/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Depok Nomor 3484/SEK.W10-A22/KU1.1.2/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Purwakarta Nomor 1029/SEK/KU1.3/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Penerimaan BLDK Nomor 02/Bld.1/B.Per/S/9/2023 tgl 12/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris BLDK No. 329/Bld.1/S/9/2023 tgl 12/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Sekretaris BLDK No. 320/Bld.1/S/9/2023 tgl 11/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Kuala Kapuas Nomor 1463/SEK.PA.W16-A6/KU.00.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Bekasi Nomor 421/SEK.PA.W10-A19/PL1.2.5/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut									
				c.Menginstruksikan Sekretaris satker terkait: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pelaksanaan pemanfaatan BMN dan hak dan kewajiban yang timbul atas pemanfaatan BMN tersebut; 2) Memerintahkan Bendahara Penerimaan membuat penagihan atas keterlambatan pembayaran sewa yang sudah jatuh tempo dan denda keterlambatan yang timbul.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1497/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Piutang Bukan Pajak Belum Merradal - Surat Sekretaris PA Surabaya Nomor 6805/SEK.PA.W3-A1/KU1.4/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Tulungagung Nomor 4968/SEK.PA.W3-A11/KU1.1.2/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PA Tulungagung Nomor W13-A11/3422/PL.01/6/2023 tgl 14/06/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Bantul Nomor W13-U5/2463/KU.04.2/VIII/2023 tgl 14/06/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Binjai Nomor W2.U3/1648/PL.01/08/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPB PN Binjai Nomor W2.U3/1133/PL.01/6/2023 tgl 12/06/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Ciamis Nomor 2170/SEK.03/KU1.3/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Gresik Nomor 1523.1/SEK.PN.W14-U31/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Penerimaan PN Gresik Nomor 1523.2/SEK.PN.W14-U31/KU.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat KPA PN Tanjungkarang Nomor W9.U1/2960/KU.01/VIII/2023 tgl 31/VIII/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Pariaman Nomor 1577/SEK.PN.W3-U8/KU1.4/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Magelang Nomor 850/SEK.PN.W12-U6/UM.01/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Ciamis Nomor 2170/SEK.03/KU1.3/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Bantul Nomor W13.U5/2483/KU.04.2/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Karawang Nomor 2856/SEK.03.W11-U10/KU.03/VIII/2023 tgl 06/09/2023 tentang tindak lanjut - Lampiran jawaban PN Surabaya - Surat Sekretaris PA Jakarta Barat Nomor W9.A2/3848/KU.03/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Depok Nomor 3484/SEK.W10-A22/KU1.1.2/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Purwakarta Nomor 1029/SEK/KU1.3/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Bendahara Penerimaan BLDK Nomor 02/Bld.1/B.Per/S/9/2023 tgl 12/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris BLDK No. 329/Bld.1/S/9/2023 tgl 12/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Sekretaris BLDK No. 320/Bld.1/S/9/2023 tgl 11/09/2023 ttg tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Kuala Kapuas Nomor 1463/SEK.PA.W16-A6/KU.00.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Bekasi Nomor 421/SEK.PA.W10-A19/PL1.2.5/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	
3	Penatausahaan Persediaan Belum Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan Sekretaris satker terkait selaku KPB : a. Menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur penatausahaan persediaan obat-obatan di satker BUA.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1498/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Persediaan Belum Tertib, - Surat Sekretaris PA Kediri Nomor 1384/SEK.PA.W13-A20/PL1.1.1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PT Kupang Nomor 2237/SEK.PT.W26-U/PL.03/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Merauke Nomor W.25-A3/684/KU 1.3/IX/2023 tgl 06/09/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat Sekretaris PA Ende Nomor 795/SEK.W23-A2/PL1.2/9/2023 tgl 05/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Bajawa Nomor W23-A8/633.a/PL.09/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Larantuka Nomor 876/SEK.PN.W26-U3/PL1.1.2/8/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PTUN Kupang Nomor W7-TUN2/838/PL.03/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Kupang Nomor 2366/SEK.PN.W26-U1/KU1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Merauke Nomor W.25-A3/684/KU.1.3/IX/2023 tgl 06/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Maumere Nomor W26-U6/2153/PL.03/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Lembata Nomor 1186/SEK.PN.W26-U13/KU.01/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Atambua Nomor 855.a/SEK.PA.W23-A5/PL1.1.1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Jember Nomor 4257/SEK.W13-A4/PL1.1.1/8/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - SOP Pendistribusian Persediaan Obat-obatan No. 677.7/BUA.7/OT.1.2/X/2023 - SOP Penyimpanan Persediaan Obat-obatan No. 677.8/BUA.7/OT.1.2/X/2023 - SOP Stock Opname Persediaan Obat-obatan No. 677.9/BUA.7/OT.1.2/X/2023									
				b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1496/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Persediaan Belum Tertib, - Surat Sekretaris PA Kediri Nomor 1384/SEK.PA.W13-A20/PL1.1.1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PT Kupang Nomor 2237/SEK.PT.W26-U/PL.03/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Merauke Nomor W.25-A3/684/KU.1.3/IX/2023 tgl 06/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Ende Nomor 795/SEK.W23-A2/PL1.2/9/2023 tgl 05/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Bajawa Nomor W23-A8/633.a/PL.09/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Larantuka Nomor 876/SEK.PN.W26-U3/PL1.1.2/8/2023 tgl 01/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PTUN Kupang Nomor W7-TUN2/838/PL.03/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Kupang Nomor 2366/SEK.PN.W26-U1/KU1.3/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Merauke Nomor W.25-A3/684/KU.1.3/IX/2023 tgl 06/09/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Maumere Nomor W26-U6/2153/PL.03/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PN Lembata Nomor 1186/SEK.PN.W26-U13/KU.01/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Atambua Nomor 855.a/SEK.PA.W23-A5/PL1.1.1/VIII/2023 tgl 29/08/2023 tentang tindak lanjut - Surat Sekretaris PA Jember Nomor 4257/SEK.W13-A4/PL1.1.1/8/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindak lanjut	1	0,00					Selesai	
				c.Memerintahkan: 1) PPK satker terkait selaku penanggung jawab Modul Komitmen SAKTI lebih cermat dalam memahami kodefikasi persediaan; 2) Memerintahkan pengelola persediaan satker terkait lebih cermat dalam melakukan penatausahaan dan pemutakhiran transaksi Persediaan dalam Modul Persediaan SAKTI.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1499/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Persediaan Belum Tertib, - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00					Selesai	
4	Pengelolaan dan Penatausahaan Tanah Belum Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan: a.KPB satker terkait : 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pencatatan, penatausahaan, dan pengamanan tanah di satkernya; 2) Melakukan pengajuan perubahan nama sertifikat tanah yang belum atas nama Pemerintah RI atau Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan; 3) Melaksanakan pensertipikatan tanah sesuai ketentuan atas bidang tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat; 4) Melakukan verifikasi dan inventarisasi atas bidang tanah yang belum terdaftar bukti kepemilikannya;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1500/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Tanah Belum Tertib - Surat Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor W16-A9/0863/PL1.2.7/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat Sekretaris Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 1097/SEK.W4-A4/PL.07/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/15295/KU.01/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 908/SEK.W33-A/KU.00/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 611/SEK/W24-A5/KU.1.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Banjarmasin Nomor W15.U1/2169/SEK.03/KKA/9/2023 tgl 04/09/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Tanjung Selor Nomor 1130/SEK.W34-A1/PL1/OT.01.1/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Pati Nomor 2698/SEK.PA.W11-A14/KU1.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Pasangkayu Nomor 820/SEK.PA./W33-A4/KU.00/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00					Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Surat KPA PA Giri Menang Nomor W22-A7/2496/PL.01/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Bawean Nomor 729/SEK.PA.W13-A35/PL1.2.7VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Banggai Nomor 780/SEK.PA.W19-A8/PL1.2.4/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Nomor S-106/KN/KN.2/2023 tanggal 7 September 2023 tentang penyelesaian program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2023 pada MA - Surat Pernyataan Komitmen KPB terhadap penyelesaian sertifikat pada beberapa Pengadilan yang masih dalam proses pembuatan sertifikat									
				b. Menginstruksikan KPA PA Tamiang Layang untuk memerintahkan PPK PA Tamiang Layang untuk membuat akta jual beli tanah dengan pemilik tanah dan melakukan pengajuan perubahan nama sertifikat tanah sesuai ketentuan.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1501/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Tanah Belum Tertib - Surat Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 683/KPA/KU1.3/VIII/2023 tgl 25/08/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00							Selesai	
5	Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menginstruksikan KPA satker terkait memerintahkan PPK lebih cermat dalam melaksanakan pembelian printer sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1502/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib - Surat KPA Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14-U/7199/KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Tanjung Karang Nomor W9-U1/2956/PL.01/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14.U8/3497/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Jakarta Selatan Nomor W10.U3/15782/KU.01/8/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Banda Aceh Nomor 3346/SEK.W1-U1/KU.1.1.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Malang Nomor 4857/SEK.PA.W13/KU.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PTUN Banda Aceh Nomor 527/SEK/W1-TUN3/PL1.2/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00							Selesai	
				b.Menginstruksikan KPB satker terkait agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN khususnya dalam hal penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan BMN; 2) Memerintahkan Operator Pengelola Modul Aset Aplikasi SAKTI satker terkait lebih cermat dalam melaksanakan pencatatan dan pengamanan BMN.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1502/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib - Surat KPA PT Surabaya Nomor W14-U/7199/KU.01/08/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Tanjung Karang Nomor W9-U1/2956/PL.01/VIII/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Sidoarjo Nomor W14.U8/3497/KU1.1/8/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Jakarta Selatan Nomor W10.U3/15782/KU.01/8/2023 tgl 31/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PN Banda Aceh Nomor 3346/SEK.W1-U1/KU.1.1.3/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PA Malang Nomor 4857/SEK.PA.W13/KU.1/VIII/2023 tgl 30/08/2023 tentang tindaklanjut - Surat KPA PTUN Banda Aceh Nomor 527/SEK/W1-TUN3/PL1.2/VIII/2023 tgl 28/08/2023 tentang tindaklanjut	1	0,00								
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA																	
1	Terdapat Prasyarat Bagi Para Pengelola Perbendaharaan Negara dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Satuan Kerja di Lingkungan MA yang Belum Sepenuhnya Terpenuhi	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk: a. Menunjuk dan menetapkan para pengelola perbendaharaan negara maupun pengadaan barang/jasa pemerintah di satker lembaga peradilan yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi sesuai ketentuan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1503/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Prasyarat Bagi Para Pengelola Perbendaharaan Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Yang Belum Sepenuhnya Terpenuhi, - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00							Selesai	
				b. Memerintahkan bagian kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi atas kebutuhan dan pemenuhan sertifikasi kompetensi pengelola perbendaharaan maupun pengadaan pada satker lembaga peradilan terutama di wilayah Provinsi Aceh, wilayah Provinsi Lampung, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah maupun wilayah Surabaya	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1503/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Prasyarat Bagi Para Pengelola Perbendaharaan Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Yang Belum Sepenuhnya Terpenuhi, - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Surat Sekretaris MS Aceh nomor 2243/SEK.MS.W1-A1/KU.1.1.1/IX/2023 tanggal 1 September 2023 - Surat KPA Dilmiti III Surabaya nomor 24/SEK.PMT.W3-MIL/KU1/I/2024 tanggal 17 September 2023 - Surat Sekretaris PT Palangkaraya nomor 135/SEK.PT.W16-U/KU1.1/I/2024 tanggal 15 September 2023 - Surat KPA PT Tanjung Karang nomor 169/SEK.PT.W9-U/KU1.1.1/I/2024 tanggal 16 September 2023	1	0,00							Selesai	
2	Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Belum Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penggunaan Aplikasi Komdanas terkait cara penginputan, data yang diinput, dokumen pendukung yang harus diunggah guna keseragaman pelaporan keuangan perkara;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1504/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang PengungkapanPenting Lainnya berupa Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan PihakKetiga Lainnya Belum Tertib - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Surat SEKMA Nomor 1505/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang PengungkapanPenting Lainnya berupa Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan PihakKetiga Lainnya Belum Tertib	1	0,00							Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							- Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Surat Plt. Sekma Nomor 3913/SEK/KU1.1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Perkara - ND Kabiro Keuangan BUA MARI kepada Kabiro Hukum dan Humas BUA MARI Nomor 1832/BUA.3/KU.1/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Harmonisasi Pedoman dan Juknis terkait rekomendasi - Surat Plt Sekma Nomor 43/SEK/PW1.1.2/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Juknis Keuangan Perkara									
				b. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan petunjuk teknis tata cara penginputan Aplikasi Komdanas terkait keuangan perkara;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1504/SEK/KU1.3/VII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang PengungkapanPenting Lainnya berupa Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan PihakKetiga Lainnya Belum Tertib - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Surat SEKMA Nomor 1505/SEK/KU1.3/VII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang PengungkapanPenting Lainnya berupa Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan PihakKetiga Lainnya Belum Tertib - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Surat Kabiro Keuangan Nomor 1726a/BUA.3/KU1.1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Undangan Sosialisasi Nomenklatur JF dan JP - Surat Undangan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 60/WKMA.Y/UND/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Undangan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023	1	0,00						Selesai	
				c.Menginstruksikan Ketua Pengadilan satker terkait: 1) Lebih optimal melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi Komdanas; 2)Memerintahkan Panitera, dan Panitera Muda Perdata satker lebih cermat dalam mempertanggungjwabkan pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam: a) Melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada aplikasi Komdanas; b) Melakukan verifikasi atas akurasi saldo biaya proses dan uang titipan pihak ketiga yang diinput oleh kasir/inputer Komdanas; c) Menyelesaikan saldo kas kurang atas uang perkara yang dikelolanya. 3) Memerintahkan Kasir/Inputer Komdanas Biaya Proses terkait lebih cermat dalam: a) Melakukan penginputan data biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam Aplikasi Komdanas sesuai dengan ketentuan; b)Melaksanakan penatausahaan uang perkara.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1504/SEK/KU1.3/VII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang PengungkapanPenting Lainnya berupa Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan PihakKetiga Lainnya Belum Tertib - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Surat SEKMA Nomor 1505/SEK/KU1.3/VII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang PengungkapanPenting Lainnya berupa Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan PihakKetiga Lainnya Belum Tertib - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00						Selesai	
3	Pengelolaan Hibah pada Satker MA Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menetapkan SOP dan Prosedur Kerja sebagai pedoman pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, antara lain: 1) SOP terkait mekanisme penyampaian usulan hibah yang terstandardisasi dan baku mutu waktu penyelesaian persetujuannya; 2)SOP terkait mekanisme verifikasi usulan hibah; 3) SOP terkait monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan hibah; 4) SOP terkait penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan hibah;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1506, 1507 dan 1508 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan Hibah pada Satker Mahkamah Agung Belum Memadai, - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00						Selesai	
				b. Menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi lebih optimal dalam: 1) Melakukan pengendalian pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan hibah; 2)Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah; 3)Melakukan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan hibah;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1506, 1507 dan 1508 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan Hibah pada Satker Mahkamah Agung Belum Memadai, - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00						Selesai	
				c. Menginstruksikan Sekretaris satker Penerima Hibah melaksanakan administrasi hibah sesuai ketentuan, yaitu segera mengajukan pengesahan atas hibah yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1506, 1507 dan 1508 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan Hibah pada Satker Mahkamah Agung Belum Memadai, - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00						Selesai	
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a.Menyusun dan menetapkan: 1) Pedoman dan SOP dalam rangka pelaksanaan SK Sekretaris MA Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1509, 1510, dan 1511 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00						Selesai	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2) Pedoman terkait tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah di Lingkungan MA; 3) Kebijakan penerimaan hibah dari Mitra Kerja (BTN) secara terpusat sehingga termonitoring dan terkendali;			- telah diterbitkan SOP Persetujuan Izin Hibah oleh Plt. SekMA nomor 1 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 - telah diterbitkan SOP Administrasi Hibah Barang/Jasa oleh Plt. SekMA nomor 2 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 - telah diterbitkan SOP Administrasi Hibah Uang oleh Plt. SekMA nomor 3 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 - telah diterbitkan SOP Monev Hibah oleh Plt. SekMA nomor 4/SEK/OTI.2/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023									
				b. Melaksanakan evaluasi terkait kelemahan dalam pelaksanaan SK Sekretaris MA Nomor 920/SEK/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1508, 1510, dan 1511 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Laporan Rekapitulasi Hasil monitoring dan evaluasi Hibah barang/jasa/uang di lingkungan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2023	1	0,00							Selesai	
				c. Menginstruksikan Sekretaris satker penerima Sponsorship dari Mitra Kerja lebih tertib melaksanakan administrasi pengelolaan penerimaan barang/jasa sesuai ketentuan;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1508, 1510, dan 1511 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00							Selesai	
				d. Memerintahkan Tim Kerja Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra Kerja lebih optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan mitra kerja dalam pengelolaan penerimaan barang dan/atau jasa dari Mitra Kerja.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1508, 1510, dan 1511 /SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Pengungkapan Penting Lainnya berupa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00							Selesai	
5	Penerapan Aplikasi SAKTI Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan Aplikasi SAKTI di satkernya.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1512/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penerapan Aplikasi SAKTI Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00							Selesai	
				b. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait Menu SAKTI yang belum mengakomodir pencatatan transaksi renovasi hibah Gedung;	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1512/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penerapan Aplikasi SAKTI Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan - Menu SAKTI yang dimaksud telah diakomodir oleh Kemenkeu dan telah terupdate pada aplikasi SAKTI terbaru, bukti screenshoot terlampir	1	0,00							Selesai	
				c.Memerintahkan: 1) Operator Modul Komitmen pada masing-masing satker lebih cermat dalam melakukan penginputan jenis dan kode barang BMN, Persediaan serta pencatatan BAST Final dalam Aplikasi SAKTI; 2) Bendahara Pengeluaran, Operator Modul Persediaan, Operator Modul Aset, Operator Modul GLP pada masing-masing satker lebih cermat melakukan rekonsiliasi dan verifikasi berjenjang dalam penginputan SAKTI.	1	0,00	TL SEM II/2023 - Surat SEKMA Nomor 1512/SEK/KU1.3/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 tentang Penerapan Aplikasi SAKTI Belum Memadai - Para KPA Satuan Kerja sudah menindaklanjuti dengan surat tanggapan	1	0,00							Selesai	
	Jumlah	25	3.755.276.399,61	Jumlah	74	3.228.275.627,33	Jumlah	73	3.071.234.219,33	1	157.041.408,00	-	0,00	-	0,00		3.280.040.218,61

Kepala Auditorat III. A

Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE, CA, CSFA
NIP. 197705152003121003

Menyetujui,
Jakarta, 30 Juli 2024
Auditor Utama Keuangan Negara III

Dr. Edward G. Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
NIP. 196807161989031002

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LHP BPK NOMOR 25/LHP/XVI/02/2024 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PELAYANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2022 DAN 2023 (S.D SEMESTER I)
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA DI DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA, JAWA TIMUR, DAN SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pelayanan Pendaftaran dan Registrasi Perkara Tata Usaha Negara pada PTUN Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Sekretaris MA untuk menyiapkan dukungan sistem informasi pengadilan (SIP) yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik;	1	0	Pada Semesteri I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2804/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Sekretaris Mahkamah Agung akan menyiapkan dukungan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. 002. Surat SEKMA Nomor 2805/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk menyiapkan dukungan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. 003. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 786C/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: 1. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK halaman 51 menyebutkan bahwa Sekretaris MA belum menyiapkan dukungan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik; 2. Bahwa Ditjen Badilmiltun sebagai salah satu unit Eselon I pada Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, praneta dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Bahwa kewenangan dalam penyiapan dukungan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana temuan dalam LHP BPK halaman 51 tersebut, berada di bawah naungan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung R.I. (dalam hal ini yakni Tim Development/Tim Pengembangan Mahkamah Agung). Namun Ditjen Badilmiltun telah mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilmiltun, antara lain dengan mengirimkan Memorandum Nomor: 632/Djmt.3/B/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung R.I. yang pada pokoknya disampaikan mengenai bahan pertimbangan dalam pengembangan aplikasi e-Court sesuai dengan kekhususan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (terlampir memorandum Nomor: 632/Djmt 3/B/5/2021 tanggal 3 Mei 2021); 4. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang ditindaklajuti dengan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik (terlampir screenshoot upaya hukum kasasi dan PK pada Aplikasi SIPP).			1						TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Sekretaris MA belum menyiapkan dukungan sistem informasi pengadilan (SIP) yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, sedangkan bukti tindak lanjut yang ditampilrkan hanya aplikasi SIPP tingkat pertama yang belum mengakomodir upaya hukum persidangan kasasi dan PK.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b.Dirjen Badilmiltun agar: 1) Mengusulkan kepada MA untuk memutakhirkan menu pada e-Court agar tidak dapat mengakomodir permohonan fiktif positif; 2) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai regulasi dan kebijakan terbaru; 3) Menyelaraskan regulasi dan kebijakan terkait: a) Administrasi Perkara yang dilaksanakan secara Elektronik dan Konvensional. b) Penetapan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: (1) Pendaftaran gugatan secara elektronik yang tidak dapat dilanjutkan; (2) Pendaftaran upaya hukum secara elektronik yang dimohonkan lebih dari satu pihak; 4) Melakukan inventarisasi kelemahan fitur dalam e-Court dan SIPP, serta melakukan koordinasi dengan Tim Development Sistem Informasi Pengadilan MA untuk mengatasi kelemahan sistem, diantaranya:	1	0	Pada Semesteri I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2806/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk: 1) Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memutakhirkan menu pada e-Court agar tidak dapat mengakomodir permohonan fiktif positif; 2) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai regulasi dan kebijakan terbaru; 3) Menyelaraskan regulasi dan kebijakan terkait: a) Administrasi Perkara yang dilaksanakan secara Eletronik dan Konvensional; b) Penetapan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: (1) Pendaftaran gugatan secara elektronik yang tidak dapat dilanjutkan; (2) Pendaftaran upaya hukum secara elektronik yang dimohonkan lebih dari satu pihak. 4) Melakukan inventarisasi kelemahan fitur dalam e-Court dan SIPP, serta melakukan koordinasi dengan Tim Development Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung untuk mengatasi kelemahan sistem, diantaranya: a) Tidak ada notifikasi unggah dokumen dari para pihak, notifikasi permintaan perbaikan dokumen oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, notifikasi adanya perbaikan surat kuasa oleh para pihak; b) Sistem e-Court tidak mengunci waktu unggah Kontra Memori Banding untuk meminimalisir unggah dokumen melewati batas waktu 7 hari; c) Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara belum terakomodir dalam SIPP. 5) Melakukan sosialisasi SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan atas PERMA Nomor 6 Tahun 2022; 6) Melakukan sosialisasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kepada seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan revisi pada SOP terkait permohonan fiklif positif.			1						TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Dirjen Badilmiltun belum menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai regulasi dan kebijakan terbaru.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				a) Tidak ada notifikasi unggah dokumen dari para pihak, notifikasi permintaan perbaikan dokumen oleh PTTUN, notifikasi adanya perbaikan surat kuasa oleh para pihak; b) Sistem e-Court tidak mengunci waktu unggah Kontra Memori Banding untuk meminimalisir unggah dokumen melewati batas waktu 7 hari; c) Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara belum terakomodir dalam SIPP; 5) Melakukan sosialisasi SK Ketua MA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan atas PERMA Nomor 6 Tahun 2022; 6) Melakukan sosialisasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kepada seluruh PTUN agar dilakukan revisi pada SOP terkait permohonan fiktif positif;			002. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 911B/DjMT/PW1.4/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan: 1. Bahwa Ditjen Badilmiltun telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memutakhirkan menu pada e-Court agar e-court tidak dapat mengakomodir permohonan fiktif positif (terlampir Surat perbaikan e-court dan SIPP ke Biro Hukum dan Humas); 2. Bahwa mengenai perintah untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai regulasi dan kebijakan terbaru, telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menentukan bahwa "Sekretaris Mahkamah dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikankeberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini." Peraturan maupun kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut (terutama peraturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan) telah mengatur secara jelas dan rinci. Selain itu, Ditjen Badilmiltun termasuk di dalam Pokja dalam perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan telah mengusulkan perubahannya dalam Pokja aturan secara detail regulasi tersebut agar dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, maka Ditjen Badilmiltun beranggapan tidak perlu lagi menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. "Dalam hal terjadi kendala dalam sistem pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tersebut, maka Ditjen Badilmiltun akan melakukan pendampingan dan dimungkinkan untuk menerbitkan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut; 3. Bahwa mengenai perintah untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan terkait: Administrasi Perkara yang dilaksanakan secara Elektronik dan Konvensional serta Penetapan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berupa Pendaftaran gugatan secara elektronik yang tidak dapat dilanjutkan dan Pendaftaran upaya hukum secara elektronik yang dimohonkan lebih dari satu pihak, Ditjen Badilmiltun telah membentuk tim kelompok kerja yang bertugas untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan terkait dengan temuan BPK (terlampir draft surat keputusan pembentukan kelompok kerja reviu SOP); 4. Bahwa mengenai perintah untuk melakukan Inventarisasi kelemahan fitur dalam e-Court dan SIPP, serta melakukan koordinasi dengan Tim Development Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung untuk mengatasi kelemahan sistem, Ditjen Badilmiltun telah melakukan inventarisasi kelemahan fitur dalam e-Court dan SIPP, serta melakukan koordinasi dengan Tim Development Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung melalui (terlampir surat Direktorat tentang inventarisasi permasalahan dalam e-court dan SIPP ke Biro Hukum Humas serta tindak lanjut secara langsung melalui Group WA) 5. Bahwa mengenai perintah untuk melakukan sosialisasi SK KMA Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan atas PERMA Nomor 6 Tahun 2022 merupakan kewenangan Kepaniteraan MA dikarenakan mencakup mengenai Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di MA. Lebih lanjut MA telah menyelenggarakan Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang digelar pada tanggal 26 April 2024, di Gedung MA, Jakarta, yang diikuti oleh seluruh pimpinan MA, para Pejabat Eselon I dan II MA dan para Panitera Muda Perkara, sedangkan seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan beserta jajarannya mengikuti secara virtual. Ditjen Badilmiltun sesuai dengan kewenangannya telah menyelenggarakan Bimtek terhadap Tenaga Teknis Kepaniteraan mengenai Upaya Hukum Secara Elektronik pada tanggal 20 – 22 Mei 2024 (terlampir dokumen [illegible] 6. Bahwa mengenai perintah untuk melakukan sosialisasi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kepada seluruh PTUN agar dilakukan revisi pada SOP terkait permohonan fiktif positif, Ditjen Badilmiltun berpendapat bahwa Surat Edaran merupakan kebijakan (beleidregel) yang dikeluarkan oleh MA yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karena addressat dalam kebijakan tersebut sudah jelas, maka Ditjen Badilmiltun beranggapan tidak perlu lagi melakukan sosialisasi terhadap SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kepada seluruh PTUN. Selain itu, Ditjen Badilmiltun telah membuat buku Himpunan Rumusan Kelompok Kerja Dan Bimtek Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Periode Tahun 2012 S.D. 2021 yang diterbitkan pada tahun 2022.								
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTUN dan Panitera PTUN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: 1) Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; 2) Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan PK pada buku register induk perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 3) Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, kasasi, dan PK yang belum sepenuhnya tepat waktu yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan	1		Pada Semesteri I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2807/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua dan Panitera PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, PTUN Makassar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: 1) Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; 2) Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 3) Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang belum sepenuhnya tepat waktu yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 001. Wakil Ketua PTUN Jakarta, Ketua PTUN Medan, Wakil Ketua PTUN Surabaya, Wakil Ketua PTUN Makassar (melalui surat terpisah) menyatakan bahwa telah memerintahkan Panitera PTUN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. *Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan* Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP);	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan kasasi, penerimaan memori kasasi dan pemberitahuan memori kasasi, pengiriman berkas kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori PK, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori PK dan pengiriman berkas PK kepada MA;			002. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1661/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan wakil ketua PTUN Jakarta telah memerintahkan Panitera PTUN Jakarta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 003. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1385/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang menyatakan wakil ketua PTUN Jakarta memerintahkan Panitera PTUN Jakarta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 004. Surat Panitera PTUN Jakarta Nomor 1660/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan bahwa: 1. Checklist merupakan instrumen atau alat bantu guna membantu Ketua dalam melaksanakan proses dismissal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan elektronik sudah tidak diperlukan lagi checklist tersebut, karena sudah terakomodir dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 2. Pada administrasi perkara dalam persidangan secara elektronik register perkara telah diakomodir dalam SIP, sehingga Buku Register Induk Perkara hanya sebagai backup data; 3. Hal yang berkaitan dengan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang belum sepenuhnya tepat waktu merupakan tahapan dalam pemeriksaan perkara upaya hukum sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan atas temuan tersebut karena termasuk dalam ranah teknis yudisial yang sudah dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara pada tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali; 4. Bahwa atas temuan tersebut telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara (terlampir foto pengisian checklist manual dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP dalam perkara yang sama); b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) (terlampir foto Buku Register Induk Perkara dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP); c. Perbaikan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (terlampir screenshoot proses upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dalam aplikasi SIP). 005. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 358/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTUN Medan telah memerintahkan Panitera PTUN Medan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 006. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 359/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan ketua PTUN Medan memerintahkan Panitera PTUN Medan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;									c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; **Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							007. Surat Panitera PTUN Medan Nomor 72/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan bahwa: 1. Checklist merupakan instrumen atau alat bantu guna membantu Ketua dalam melaksanakan proses dismissal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan elektronik sudah tidak diperlukan lagi checklist tersebut, karena sudah terakomodir dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 2. Pada administrasi perkara dalam persidangan secara elektronik register perkara telah diakomodir dalam SIP, sehingga Buku Register Induk Perkara hanya sebagai backup data; 3. Hal yang berkaitan dengan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang belum sepenuhnya tepat waktu merupakan tahapan dalam pemeriksaan perkara upaya hukum sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan atas temuan tersebut karena termasuk dalam ranah teknis yudisial yang sudah dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara pada tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali; 4. Bahwa atas temuan tersebut telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara (terlampir foto pengisian checklist manual dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP dalam perkara yang sama); b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) (terlampir foto Buku Register Induk Perkara dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP); c. Perbaikan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (terlampir screenshoot proses upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dalam aplikasi SIP). 008. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1036/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Surabaya telah memerintahkan Panitera PTUN Surabaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 009. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1036 A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Surabaya memerintahkan Panitera PTUN Surabaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 'c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 010. Surat Panitera PTUN Surabaya Nomor 1036B/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa: 1. Checklist merupakan instrumen atau alat bantu guna membantu Ketua dalam melaksanakan proses dismissal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan elektronik sudah tidak diperlukan lagi checklist tersebut, karena sudah terakomodir dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 2. Pada administrasi perkara dalam persidangan secara elektronik register perkara telah diakomodir dalam SIP, sehingga Buku Register Induk Perkara hanya sebagai backup data; 3. Hal yang berkaitan dengan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang belum sepenuhnya tepat waktu merupakan tahapan dalam pemeriksaan perkara upaya hukum sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan atas temuan tersebut karena termasuk dalam ranah teknis yudisial yang sudah dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara pada tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali; 4. Bahwa atas temuan tersebut telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara (terlampir foto pengisian checklist manual dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP dalam perkara yang sama); b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) (terlampir foto Buku Register Induk Perkara dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP); c. Perbaikan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (terlampir screenshoot proses upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dalam aplikasi SIP).										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							011. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.a/KPTUN.WA-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Makassar telah memerintahkan Panitera PTUN Makassar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 012. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.a/KPTUN.WA-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Makassar memerintahkan Panitera PTUN Makassar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara; b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP); c. Proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; 013. Surat Panitera PTUN Makassar Nomor 518.a/PAN.PTUN.WA-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa: 1. Checklist merupakan instrumen atau alat bantu guna membantu Ketua dalam melaksanakan proses dismissal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan elektronik sudah tidak diperlukan lagi checklist tersebut, karena sudah terakomodir dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP); 2. Pada administrasi perkara dalam persidangan secara elektronik register perkara telah diakomodir dalam SIP, sehingga Buku Register Induk Perkara hanya sebagai backup data; 3. Hal yang berkaitan dengan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang belum sepenuhnya tepat waktu merupakan tahapan dalam pemeriksaan perkara upaya hukum sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan atas temuan tersebut karena termasuk dalam ranah teknis yudisial yang sudah dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara pada tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali; 4. Bahwa atas temuan tersebut telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas: a. Pengisian checklist kelengkapan berkas perkara pada saat verifikasi pendaftaran perkara (terlampir foto pengisian checklist manual dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP dalam perkara yang sama); b. Pencatatan data perkara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Register Induk Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) (terlampir foto Buku Register Induk Perkara dan screenshoot/tangkapan layar data umum aplikasi SIP); c. Perbaikan proses administrasi pendaftaran perkara upaya hukum banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu dalam hal pemberitahuan memori banding, penerimaan kontra memori banding, pemberitahuan inzage, pengiriman berkas banding secara elektronik, pemberitahuan permohonan Kasasi, penerimaan memori Kasasi dan pemberitahuan memori Kasasi, pengiriman berkas Kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali, pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (terlampir screenshoot proses upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dalam aplikasi SIP).										
				BPK merekomendasikan kepada: d. Ketua PTUN Jakarta untuk menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta agar: 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perbankan (CMS) untuk memantau biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan aplikasi e-Court; 2) Mencatat 13 perkara permohonan banding yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara; 3) Melakukan penginputan informasi 11 perkara permohonan PK pada SIPP dengan lengkap dan mencatat 10 perkara permohonan PK ke dalam Buku Register Induk Perkara;	1	0	Pada Semesteri I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2608/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTUN Jakarta agar menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk: 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perbankan (CMS) untuk memantau biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan aplikasi e-Court; 2) Mencatat 13 perkara permohonan banding yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara; 3) Melakukan penginputan informasi 11 perkara permohonan Peninjauan Kembali pada SIPP dengan lengkap dan mencatat 10 perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara. 002. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1659/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Jakarta telah menginstruksikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk: 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perbankan (CMS) untuk memantau biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan aplikasi e-Court; 2) Mencatat 13 perkara permohonan banding yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara; 3) Melakukan penginputan informasi 11 perkara permohonan Peninjauan Kembali pada SIPP dengan lengkap dan mencatat 10 perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara. 003. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1386/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk: 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perbankan (CMS) untuk memantau biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan aplikasi e-Court; 2) Mencatat 13 perkara permohonan banding yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara; 3) Melakukan penginputan informasi 11 perkara permohonan Peninjauan Kembali pada SIPP dengan lengkap dan mencatat 10 perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara.			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Panitera PTUN Jakarta belum melampirkan bukti penginputan informasi 11 perkara permohonan Peninjauan Kembali pada SIPP dengan lengkap.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							004. Surat Panitera PTUN Jakarta Nomor 1658/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan Panitera PTUN Jakarta telah: 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perbankan (CMS) untuk memantau biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan aplikasi e-Court (terlampir screenshoot aplikasi perbankan (CMS), screenshoot biaya perkara dalam aplikasi e-Court); 2) Mencatat 13 perkara permohonan banding yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara (terlampir foto Buku Register Induk Perkara); 3) Melakukan penginputan informasi 11 perkara permohonan Peninjauan Kembali pada SIPP dengan lengkap dan mencatat 10 perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara (terlampir foto Buku Register Induk Perkara).							
				BPK merekomendasikan kepada: e. Ketua PTUN Medan untuk menginstruksikan Panitera PTUN Medan agar mencatat tiga perkara permohonan PK ke dalam Buku Register Induk Perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2609/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTUN Medan agar menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencatat tiga perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara. 002. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 358a/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTUN Medan telah menginstruksikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencatat tiga perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara. 003. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 359a/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menginstruksikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencatat tiga perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara. 004. Surat Panitera PTUN Medan Nomor 72a/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan Panitera PTUN Medan telah mencatat tiga perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara (terlampir foto Buku Register Induk Perkara).	1							TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Ketua PTUN Medan telah menginstruksikan Panitera PTUN Medan agar mencatat tiga perkara permohonan PK ke dalam Buku Register Induk Perkara 2. Panitera PTUN Medan menyatakan telah mencatat tiga perkara permohonan Peninjauan Kembali ke dalam Buku Register Induk Perkara. 3. Bukti TL telah dilampiri bukti foto Buku Register Induk Perkara. **Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: f. Ketua PTUN Surabaya untuk menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya agar melengkapi informasi enam perkara permohonan kasasi dan lima perkara permohonan PK yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara; dan	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2810/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTUN Surabaya agar menginstruksikan kepada Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi informasi enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara 002. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1037/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Surabaya telah menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi informasi enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara. 003. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1037A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi informasi enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara. 004. Surat Panitera PTUN Surabaya Nomor 1037B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan telah melengkapi informasi enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara (terlampir screenshoot enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan scan Buku Register Induk Perkara).	1							TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Wakil Ketua PTUN Surabaya telah menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya agar melengkapi informasi enam perkara permohonan kasasi dan lima perkara permohonan PK yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara 2. Panitera PTUN Surabaya menyatakan telah melengkapi informasi enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan Buku Register Induk Perkara 3. Bukti TL telah dilampiri tangkapan layar enam perkara permohonan Kasasi dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang tidak diinput secara tertib pada SIPP dan scan Buku Register Induk Perkara. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti;** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: g. Ketua PTUN Makassar untuk menginstruksikan Panitera PTUN Makassar agar mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan kasasi, dan lima perkara permohonan PK yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2811/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTUN Makassar agar menginstruksikan kepada Panitera PTUN Makassar untuk mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara. 002. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.b/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Mekassar telah menginstruksikan Panitera PTUN Makassar untuk mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara. 003. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.b/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Makassar menginstruksikan Panitera PTUN Makassar untuk mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara. 004. Surat Panitera PTUN Makassar Nomor 518.b/ PAN.TUN.W4-TUN.1/AT.01.06/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Panitera PTUN Makassar telah mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara (terlampir foto dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara)	1							TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Wakil Ketua PTUN Makassar telah menginstruksikan Panitera PTUN Makassar agar mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan kasasi, dan lima perkara permohonan PK yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register 2. Panitera PTUN Makassar menyatakan telah mencatat dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara Induk Perkara Surat tersebut telah dilampiri foto dua perkara permohonan banding, dua perkara permohonan Kasasi, dan lima perkara permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan secara konvensional ke dalam Buku Register Induk Perkara. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti;** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penetapan dan Penentuan Besaran Panjar Biaya Perkara pada PTUN Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a.Dirjen Badilmiltun agar: 1) Menetapkan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: a) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) Pelaksanaan verifikasi dan validasi atas penginputan konfigurasi panjar biaya perkara; c) Pelaksanaan pendaftaran domisili elektronik pihak tergugat yang terverifikasi; d) Pelaksanaan pick up service pada Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; e) Pemungutan PNBP Surat Kuasa pada Komponen Panjar Biaya Perkara Melalui e-Court; 2) Memantau pelaksanaan e-Court yang mendukung pelaksanaan pendaftaran gugatan dan upaya hukum di Lingkungan Peradilan PTUN; 3) Berkoordinasi dengan Panitera MA dalam menyusun petunjuk teknis tata cara penyetoran biaya permohonan kasasi dan PK, termasuk pengembalian biaya apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil namun biaya sudah dibayarkan kepada Kepaniteraan MA.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2812/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk: 1) Menetapkan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: a) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) Pelaksanaan verifikasi dan validasi atas penginputan konfigurasi panjar biaya perkara; c) Pelaksanaan pendaftaran domisili elektronik pihak tergugat yang terverifikasi; d) Pelaksanaan pick up service pada Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; e) Pemungutan PNBP Surat Kuasa pada Komponen Panjar Biaya Perkara melalui e-Court. 2) Memantau pelaksanaan e-Court yang mendukung pelaksanaan pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 3) Berkoordinasi dengan Panitera Mahkamah Agung dalam menyusun petunjuk teknis tata cara penyetoran biaya permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, termasuk pengembalian biaya apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil namun biaya sudah dibayarkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. 002. Surat Dirjen Badilmiltun No. 911C/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan: 1. Bahwa mengenai perintah untuk menetapkan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Ditjen Badilmiltun telah menginventarisir Standar Operational Prosedur (SOP) yang ada pada satuan kerja untuk dilakukan perubahan dan penyeragaman termasuk pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terlampir surat nomor 903/Djmt/B/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang SOP Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.) serta telah membentuk tim kelompok kerja/satuan tugas penyusunan SOP satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terlampir draft surat keputusan pembentukan kelompok kerja reviu SOP); 2. Bahwa mengenai perintah untuk memantau pelaksanaan e-Court yang mendukung pelaksanaan pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Ditjen Badilmiltun telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Satuan Kerja (terlampir Laporan Hasil Monev tahun 2022, SK Monev 2023); 3. Bahwa mengenai perintah untuk berkoordinasi dengan Panitera Mahkamah Agung dalam menyusun petunjuk teknis tata cara penyetoran biaya permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, termasuk pengembalian biaya apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil namun biaya sudah dibayarkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun telah berkoordinasi dengan Panitera Mahkamah Agung melalui tembusan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1002/PAN/OT.01/5/2023. Bahwa Mahkamah Agung telah membuat Pedoman terkait dengan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi dan PK yaitu Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1002/PAN/OT.01/5/2023, Perihal: Prosedur Baru Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali, tertanggal 22 Mei 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, sehingga Ditjen Badilmiltun tidak perlu lagi menyusun Petunjuk Teknis mengenai Pengembalian Biaya Perkara Kasasi dan PK serta Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/HUM (dokumen terlampir).			1						TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Dirjen Badilmiltun belum Menetapkan pedoman terkait pelaksanaan administrasi pendaftaran gugatan dan upaya hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: a) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) Pelaksanaan verifikasi dan validasi atas penginputan konfigurasi panjar biaya perkara; c) Pelaksanaan pendaftaran domisili elektronik pihak tergugat yang terverifikasi; d) Pelaksanaan pick up service pada Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; e) Pemungutan PNBP Surat Kuasa pada Komponen Panjar Biaya Perkara melalui e-Court.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar agar: 1) Lebih cermat dalam melakukan penetapan biaya perkara sesuai regulasi, pedoman dan reviu biaya panjar perkara tahun sebelumnya; 2) Segera menindaklanjuti Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan melakukan penyesuaian SK Penetapan Panjar Biaya Perkara dan konfigurasi panjar dengan adanya kerjasama tersebut; 3) Menetapkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara; 4) Menetapkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara; 5) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2813/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, PTUN Makassar untuk: 1) Lebih cermat dalam melakukan penetapan biaya perkara sesuai regulasi, pedoman dan reviu biaya panjar perkara tahun sebelumnya; 2) Segera menindaklanjuti Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan melakukan penyesuaian SK Penetapan Panjar Biaya Perkara dan konfigurasi panjar dengan adanya kerjasama tersebut; 3) Menetapkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara; 4) Menetapkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara; 5) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya banjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara. 6) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar lebih optimal berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding, serta kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menghentikan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan biaya perkara; 7) Menginstruksikan kepada admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara.			1						TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Masih terdapat dokumen yang belum dilampirkan seperti: -PTUN Jakarta, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar: 1. belum melampirkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara 2. belum melampirkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara 3. belum melampirkan hasil koordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta dan PTUN Medan agar lebih optimal berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding, serta kepada Panitera PTUN Surabaya agar menghentikan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan biaya perkara; 7) Menginstruksikan kepada admin e-Court PTUN Jakarta, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara.			002. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1664/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan bahwa wakil ketua PTUN Jakarta: 1. Telah melakukan penetapan biaya perkara sesuai regulasi, pedoman, dan reviu biaya panjar perkara tahun sebelumnya (terlampir scan Keputusan Ketua tentang Biaya Panjar Perkara sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022); 2. Tindak lanjut Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan melakukan penyesuaian SK Penetapan Panjar Biaya Perkara dan konfigurasi panjar dengan adanya kerjasama tersebut. Satuan kerja tidak diperlukan lagi membuat kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pelayanan pengiriman surat atau dokumen karena dalam kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia telah mencakup kerjasama pengiriman surat atau dokumen bagi Pengadilan di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, atas dasar kerjasama tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pengiriman surat atau dokumen telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (terlampir bukti dukung berupa scan MOU Mahkamah Agung dengan PT Pos/ MOU Satuan kerja dengan PT Pos Indonesia); 3. Telah menetapkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung scan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara); 4. Telah menetapkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung berupa scan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara); 5. Telah menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 6. Telah menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih optimal berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding; 7. Telah menginstruksikan kepada admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara. 003. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1387/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan wakil ketua PTUN Jakarta menginstruksikan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih optimal berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding; 3. Admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara. 004. Surat Panitera PTUN Jakarta Nomor 1662/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan: a) Telah optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara (terlampir Berita Acara Pemeriksaan); b) Telah optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara (terlampir scan buku jurnal keuangan pada semua tingkat); 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding (terlampir screenshoot pengembalian sisa panjar biaya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dilakukan secara CMS). 005. Surat Admin e-Court PTUN Jakarta Nomor 1663/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara (terlampir screenshoot komponen biaya perkara dalam aplikasi e-Court). 006. Lampiran Eviden PTUN Jakarta berupa BAP oleh Hakim Pengawas dan Screenshot Konfigurasi e-Court 007. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 358b/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan bahwa ketua PTUN Medan: 1. Telah melakukan penetapan biaya perkara sesuai regulasi, pedoman, dan reviu biaya panjar perkara tahun sebelumnya (terlampir scan Keputusan Ketua tentang Biaya Panjar Perkara sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022); 2. Tindak lanjut Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan melakukan penyesuaian SK Penetapan Panjar Biaya Perkara dan konfigurasi panjar dengan adanya kerjasama tersebut. Satuan kerja tidak diperlukan lagi membuat kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pelayanan pengiriman surat atau dokumen karena dalam kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia telah mencakup kerjasama pengiriman surat atau dokumen bagi Pengadilan di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, atas dasar kerjasama tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pengiriman surat atau dokumen telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (terlampir bukti dukung berupa scan MOU Mahkamah Agung dengan PT Pos/ MOU Satuan kerja dengan PT Pos Indonesia); 3. Telah menetapkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung scan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara); 4. Telah menetapkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung berupa scan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara); 5. Telah menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 6. Telah menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar lebih optimal berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding; 008. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 359b/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan ketua PTUN Medan menginstruksikan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar lebih optimal berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding;										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							009. Surat Panitera PTUN Medan Nomor 72b/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan: a) Telah optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara (terlampir Berita Acara Pemeriksaan); b) Telah optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara (terlampir scan buku jurnal keuangan pada semua tingkat); 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berkoordinasi dengan Pihak Bank agar CMS dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya tambahan dalam pengiriman biaya banding (terlampir screenshoot pengembalian sisa panjar biaya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dilakukan secara CMS). 010. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1038/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Wakil Ketua PTUN Surabaya: 1. Telah melakukan penetapan biaya perkara sesuai regulasi, pedoman, dan reviu biaya panjar perkara tahun sebelumnya (terlampir scan Keputusan Ketua tentang Biaya Panjar Perkara sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022); 2. Tindak lanjut Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan melakukan penyesuaian SK Penetapan Panjar Biaya Perkara dan konfigurasi panjar dengan adanya kerjasama tersebut. Satuan kerja tidak diperlukan lagi membuat kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pelayanan pengiriman surat atau dokumen karena dalam kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia telah mencakup kerjasama pengiriman surat atau dokumen bagi Pengadilan di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, atas dasar kerjasama tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam pengiriman surat atau dokumen telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (terlampir bukti dukung berupa scan MOU Mahkamah Agung dengan PT Pos/ MOU Satuan kerja dengan PT Pos Indonesia); 3. Telah menetapkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung scan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara); 4. Telah menetapkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung berupa scan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara); 5. Telah menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 6. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menghentikan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan biaya perkara; 7. Telah menginstruksikan kepada admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara. 011. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1038A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 2. kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menghentikan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan biaya perkara; 3. Admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara. 012. Surat Panitera PTUN Surabaya Nomor 1038B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan: a) Telah optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara (terlampir Berita Acara Pemeriksaan); b) Telah optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara (terlampir scan buku jurnal keuangan pada semua tingkat); 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menghentikan peneggunaan rekening pribadi dengan melampirkan rekening koran yang baru untuk pengelolaan biaya perkara. 013. Surat Admin e-Court PTUN Surabaya Nomor 1038C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara (terlamplr screenshoot komponen biaya perkara dalam aplikasi e-Court). 014. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.d/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Wakil PTUN Makassar: 1. Telah melakukan penetapan biaya perkara sesuai regulasi, pedoman, dan reviu biaya panjar perkara tahun sebelumnya (terlampir scan Keputusan Ketua tentang Biaya Panjar Perkara sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022); 2. Tindak lanjut Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan melakukan penyesuaian SK Penetapan Panjar Biaya Perkara dan konfigurasi panjar dengan adanya kerjasama tersebut. Satuan kerja tidak diperlukan lagi membuat kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pelayanan pengiriman surat atau dokumen karena dalam kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia telah mencakup kerjasama pengiriman surat atau dokumen bagi Pengadilan di empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, atas dasar kerjasama tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pengiriman surat atau dokumen telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (terlampir bukti dukung berupa scan MOU Mahkamah Agung dengan PT Pos/ MOU Satuan kerja dengan PT Pos Indonesia); 3. Telah menetapkan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung scan SOP terkait penyusunan dan penetapan panjar biaya perkara); 4. Telah menetapkan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara (terlampir bukti dukung berupa scan SOP terkait verifikasi dan validasi penginputan konfigurasi panjar biaya perkara); 5. Telah menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 6. Telah menginstruksikan kepada admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara.										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							015. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.d/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Wakil Ketua PTUN Makassar menginstruksikan: 1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk: a) Lebih optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara; b) Lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara; 2. Admin e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara. 016. Surat Panitera PTUN Makassar Nomor 518.d/PAN.PTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Panitera PTUN Makassar: a) Telah optimal melakukan pengawasan atas administrasi biaya panjar perkara (terlampir Berita Acara Pemeriksaan); b) Telah optimal melakukan pengawasan atas penginputan konfigurasi biaya panjar perkara (terlampir scan buku jurnal keuangan pada semua tingkat); 017. Surat Admin e-Court PTUN Makassar Nomor 518.d/PAN.PTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput konfigurasi panjar biaya perkara (terlampir screenshoot komponen biaya perkara dalam aplikasi e-Court).									
3	Pelaksanaan Pendaftaran dan Registrasi Perkara pada PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Belum Menggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Proses Administrasi Registrasi Berkas Perkara Banding Belum Sepenuhnya Tepat Waktu	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun agar menetapkan petunjuk teknis yang mengatur administrasi pendaftaran perkara pada PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama yang menjadi dasar penerapan SIPP dan e-Court pada PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2814/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk menetapkan petunjuk teknis yang mengatur administrasi pendaftaran perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang menjadi dasar penerapan SIPP dan e-Court pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. 002. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 786D/DJMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: 1. Bahwa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court telah diberlakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk memperlancar prosedur implementasi SIPP yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, Mahkamah Agung maupun Ditjen Badilmiltun telah menerbitkan beberapa peraturan kebijakan, antara lain: - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (terlampir); - Surat Edaran Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Tata Usaha Negara (terlampir); - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 782/DJMT/Kep/XII/2018 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 267/Djmt/Kep/04/2019 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara (terlampir); - Memorandum Dir. Binganismin Diltun kepada Ka. Biro Hukum dan Humas MA RI Nomor: 102/Djmt.3/B/1/2021, tanggal 28 Januari 2021, Perihal: Permohonan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court Pada Pengadilan Tingkat Banding (terlampir); - Surat Edaran Ditjen Badilmiltun bahwa SIPP dan e-court telah diberlakukan di PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir). 2. Bahwa Petunjuk teknis yang mengatur administrasi pendaftaran perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama secara elektronik telah diatur secara tegas dan jelas berdasarkan: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (terlampir); - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (terlampir). Dengan berlakunya kedua peraturan tersebut Ditjen Badilmiltun berpendapat belum diperlukan petunjuk teknis lebih lanjut terkait pendaftaran perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Belum terdapat Petunjuk Teknis terkait pendaftaran perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Dirjen Badilmiltun.**	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait lama waktu register perkara banding sejak berkas dikirim oleh pengadilan pengaju; 2) Menginstruksikan kepada Panitera PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2815/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar untuk: a. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait lama waktu register perkara banding sejak berkas dikirim oleh pengadilan pengaju; 2) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju. 002. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539.W2/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN Jakarta akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait lama waktu register perkara banding sejak berkas dikirim oleh pengadilan pengaju (terlampir screenshoot menu audittrail pada aplikasi SIPP dan SOP tentang penunjukan Majelis Hakim); 2) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju (terlampir SOP yang mengakomodir ketiadaan notifikasi kekurangan berkas dalam penerimaan berkas perkara).			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju pada Satker PTTUN Surabaya dan PTTUN Jakarta belum dilampirkan pada dokumen tindak lanjut.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							003. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526A.W2/HK.06/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju; 004. Surat Panitera PTTUN Jakarta Nomor 516A.W2/HK.06/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menyatakan menyatakan telah menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju (terlampir SOP yang mengakomodir ketiadaan notifikasi kekurangan berkas dalam penerimaan berkas perkara). 005. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 341c/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Ketua KPTTUN Medan akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait lama waktu register perkara banding sejak berkas dikirim oleh pengadilan pengaju ; 2) Menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju; 006. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 342b/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju; 007. Surat Panitera PTTUN Medan Nomor 341d/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan telah menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju (terlampir SOP yang mengakomodir ketiadaan notifikasi kekurangan berkas dalam penerimaan berkas perkara). 008. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1070/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN Surabaya akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait lama waktu register perkara banding sejak berkas dikirim oleh pengadilan pengaju (terlampir screenshoot menu audittrail pada aplikasi SIPP dan SOP tentang penunjukan Majelis Hakim); 2) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju (terlampir SOP yang mengakomodir ketiadaan notifikasi kekurangan berkas dalam penerimaan berkas perkara). 009. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1071/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju; 010. Surat Panitera PTTUN Surabaya Nomor 1072/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan telah menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju (terlampir SOP yang mengakomodir ketiadaan notifikasi kekurangan berkas dalam penerimaan berkas perkara). 011. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 724/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan Ketua KPTTUN Makassar akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait lama waktu register perkara banding sejak berkas dikirim oleh pengadilan pengaju ; 2) Menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju; 012. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 687a/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar supaya menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju; 013. Surat Panitera PTTUN Makassar Nomor 694a/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan telah menyusun aturan terkait koordinasi untuk kelengkapan kekurangan berkas dari pengadilan pengaju untuk mengatasi ketiadaan notifikasi kekurangan berkas banding pada SIPP pengadilan pengaju (terlampir SOP yang mengakomodir ketiadaan notifikasi kekurangan berkas dalam penerimaan berkas perkara).										
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTTUN Medan, dan PTTUN Makassar agar: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas tim monitoring dan evaluasi SOP sehingga masih terdapat SOP yang belum lengkap; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Medan dan PTTUN Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2815/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Medan, PTTUN Makassar untuk: b. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP sehingga masih terdapat SOP yang belum lengkap; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap. 002. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 341c/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Ketua KPTTUN Medan akan: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP sehingga masih terdapat SOP yang belum lengkap; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap.	1								TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Ketua PTTUN Medan, dan PTTUN Makassar (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas tim monitoring dan evaluasi SOP sehingga masih terdapat SOP yang belum lengkap dan telah menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Medan dan PTTUN Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap;	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							003. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 342b/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap. 004. Surat Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Medan Nomor 341.a/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada ketua) 005. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 724/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan Ketua KPTTUN Makassar akan: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP sehingga masih terdapat SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada Ketua); 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada Ketua). 006. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 687b/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap. 007. Surat Tim Monev SOP PTTUN Makassar Nomor 694b/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada ketua)									2. Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Medan dan PTTUN Makassar telah menyatakan akan lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada ketua). Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: d. Ketua PTTUN Jakarta dan PTTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan terkait Penerimaan Memori/Kontra Memori Banding dan SOP Pencabutan Permohonan Banding karena mengatur proses bisnis di luar kewenangan PTTUN; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Jakarta dan PTTUN Surabaya agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan PTTUN.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2815/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya untuk: c. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan terkait penerimaan Memori/Kontra Memori Banding dan SOP Pencabutan Permohonan Banding karena mengatur proses bisnis di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 002. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539.W2/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN Jakarta akan: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan terkait penerimaan Memori/Kontra Memori Banding dan SOP Pencabutan Permohonan Banding karena mengatur proses bisnis di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bahwa pada pelaksanaannya penerimaan memori/kontra memori banding dimungkinkan dikirimkan oleh para pihak langsung kepada PTTUN Jakarta tanpa melalui pengadilan pengaju, sehingga tidak perlu diajukan revisi SOP; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa dalam pelaksanaannya tidak diperlukan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Jakarta menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang diluar kewenangan PTTUN Jakarta sebagaimana poin 1. 003. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526A.W2/HK.06/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menginstruksikan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 004. Surat Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Jakarta Nomor 526A.W2/HK.06/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menyatakan akan: a. Lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada Ketua); b. Lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa dalam pelaksanaannya tidak diperlukan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana poin 1. 005. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1070/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN Surabaya akan: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan terkait penerimaan Memori/Kontra Memori Banding dan 'SOP Pencabutan Permohonan Banding karena mengatur proses bisnis di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bahwa pada pelaksanaannya penerimaan memori/kontra memori banding dimungkinkan dikirimkan oleh para pihak langsung kepada PTTUN Surabaya tanpa melalui pengadilan pengaju, sehingga tidak perlu diajukan revisi SOP; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa dalam pelaksanaannya tidak diperlukan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Surabaya menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang diluar kewenangan PTTUN Surabaya sebagaimana poin 1.	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Ketua PTTUN Jakarta dan PTTUN Surabaya (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan: 1) Lebih optimal melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan terkait Penerimaan Memori/Kontra Memori Banding dan SOP Pencabutan Permohonan Banding karena mengatur proses bisnis di luar kewenangan PTTUN; 2) Menginstruksikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Jakarta dan PTTUN Surabaya agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan PTTUN. 2. Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Jakarta dan PTTUN Surabaya (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan: a. Lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada Ketua); b. Lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.\	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							006. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1073/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: a. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menginstruksikan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap. b. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menginstruksikan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 007. Surat Tim Monitoring dan Evaluasi SOP PTTUN Surabaya Nomor 1161/Pan.PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: a. Lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang belum lengkap (terlampir Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dilaporkan kepada Ketua); b. Lebih optimal dalam menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa dalam pelaksanaannya tidak diperlukan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menginventarisasi SOP yang seharusnya tidak diperlukan karena mengatur proses bisnis yang di luar kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana poin 1.									
4	Penetapan Panjar Biaya Perkara pada PTTUN Belum Sepenuhnya Memadai dan Penentuan Biaya Panjar Gugatan Tingkat Pertama Belum Dilaksanakan secara Elektronik	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun agar menetapkan petunjuk teknis untuk pengoperasian e-Court dan SIPP PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama;	1	0	*Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2816/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara agar menetapkan petunjuk teknis untuk pengoperasian e-Court dan SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. 002. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 787C/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: - Bahwa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court telah diberlakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. - Bahwa untuk memperlancar prosedur implementasi SIPP yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, Ditjen Badilmiltun telah menerbitkan kebijakan berupa: Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir).			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Pada kebijakan yang telah diterbitkan belum mengatur teknis pengoperasian e court dan belum mengatur teknis pengoperasian SIPP berdasarkan tahapan-tahapan proses bisnis pada pengadilan tingkat pertama.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar: 1) Memedomani hasil Rakornis Ditjen Badilmiltun dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara; 2) Menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara MA dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat;	1	0	*Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2817/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar untuk: a. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk: 1) Memedomani hasil Rakornis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara; 2) Menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat. 002. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN Jakarta: 1) Telah memedomani hasil Rakornis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara (terlampir SK terbaru 2024); 2) Telah menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat (terlampir scan SK perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dan PT Pos/pengadilan setempat). 003. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 347/KPTTUN.W1-TUN/PW1.1/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN Medan: 1) Telah memedomani hasil Rakornis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara (terlampir SK terbaru 2024); 2) Telah menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat (terlampir scan SK perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dan PT Pos/pengadilan setempat). 004. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1074/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: a. Ketua PTTUN Surabaya: 1) Telah memedomani hasil Rakornis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara (terlampir SK terbaru 2024); 2) Telah menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat (terlampir scan SK perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dan PT Pos/pengadilan setempat). b. Ketua PTTUN Surabaya telah melaksanakan pengawasan atas biaya perkara yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 dengan menagihkan kepada PTUN Surabaya apabila terdapat kekurangan biaya perkara dari yang seharusnya (terlampir scan surat PTTUN Surabaya kepada PTUN Surabaya terkait permintaan kekurangan biaya perkara). 005. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 725/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan Ketua PTTUN: 1) Telah memedomani hasil Rakornis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam menyusun SK Penetapan Panjar Biaya Perkara (terlampir SK terbaru 2024); 2) Telah menindaklanjuti layanan pick up service sebagaimana pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyusun perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos kantor cabang terdekat (terlampir scan SK perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dan PT Pos/pengadilan setempat).			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **1. PTTUN Medan belum melampirkan Perjanjian Kerjasama Pick Up Service dengan PT POS terdekat** **2. PTTUN Surabaya belum melampirkan Perjanjian Kerjasama Pick Up Service dengan PT POS terdekat** **3. PTTUN Makassar belum melampirkan Perjanjian Kerjasama Pick Up Service dengan PT POS terdekat.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTTUN Makassar agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas biaya perkara yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 dengan menagihkan kepada PTUN Makassar apabila terdapat kekurangan biaya perkara dari yang seharusnya.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2817/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar untuk: b. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas biaya perkara yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 dengan menagihkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar apabila terdapat kekurangan biaya perkara dari yang seharusnya. 002. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 725/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melaksanakan pengawasan atas biaya perkara yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 dengan menagihkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar apabila terdapat kekurangan biaya perkara dari yang seharusnya (terlampir scan surat PTTUN Makassar kepada PTUN Makassar terkait permintaan kekurangan biaya perkara).			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum dilampiri dengan hasil scan surat PTTUN Makassar kepada PTUN Makassar terkait permintaan kekurangan biaya perkara.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
5	Pelayanan Pendaftaran dan Registrasi Perkara Tata Usaha Negara pada Kepaniteraan MA	1		BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar menginstruksikan kepada Panitera Muda TUN supaya: a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi perkara kasasi/PK dan ketepatan waktu atas setiap tahapan proses penerimaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2818/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Panitera Mahkamah Agung agar menginstruksikan kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali dan ketepatan waktu atas setiap tahapan proses penerimaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya; 002. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1033/PAN/PW1.4/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi perkara kasasi/peninjauan kembali dan ketepatan waktu atas setiap tahapan proses penerimaan perkara yang menjadi tanggung jawab Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara; 003. Surat Panitera Muda Perkara TUN Nomor 135/PAN.7/PW1.4/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang memerintahkan para pranata peradilan ahli madya pada Kepaniteraan Mda TUN untuk: 1. Melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan 3 (tiga) perkara peninjauan kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas 6 (enam) perkara kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara 2. Melakukan Inventarisasi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; 004. Eviden Panitera Muda Perkara TUN	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Panitera Mahkamah Agung telah menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi perkara kasasi/peninjauan kembali dan ketepatan waktu atas setiap tahapan proses penerimaan perkara yang menjadi tanggung jawab Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara; 2. Panitera Muda Perkara TUN telah memerintahkan para pranata peradilan ahli madya pada Kepaniteraan Muda TUN untuk: a. Melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan 3 (tiga) perkara peninjauan kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas 6 (enam) perkara kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara. b. Melakukan inventarisasi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar menginstruksikan kepada Panitera Muda TUN supaya: b. Melakukan koordinasi kepada pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK dapat tercatat dalam sistem informasi; dan	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2818/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Panitera Mahkamah Agung agar menginstruksikan kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara untuk: b. Melakukan koordinasi kepada pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; dan 002. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1033/PAN/PW1.4/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk: b. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang diklrim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; 003. Surat Panitera Muda Perkara TUN Nomor 135/PAN.7/PW1.4/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang menyatakan melakukan inventarisasi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; 004. Eviden Panitera Muda Perkara TUN.	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1 Panitera MA telah menginstruksikan kepada Panitera Muda TUN supaya: melakukan koordinasi kepada pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK dapat tercatat dalam sistem informasi; 2. Panitera Muda Perkara TUN menyatakan telah melakukan inventarisasi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; (dilampiri bukti) Dengen demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar menginstruksikan kepada Panitera Muda TUN supaya: c. Memerintahkan kepada Pranata Peradilan Ahli Madya untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan tiga perkara PK kepada Penelaah Berkas Perkara TUN; serta memorandum pengiriman berkas atas enam perkara kasasi kepada Panitera Muda TUN.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2818/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Panitera Mahkamah Agung agar menginstruksikan kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara untuk: c. Memerintahkan kepada Pranata Peradilan Ahli Madya untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara Kasasi dan tiga perkara Peninjauan Kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas enam perkara Kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara.	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa:	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	*Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah*
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							002. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1088/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang menyatakan akan menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara, untuk : c. Memerintahkan kepada Pranata Peradilan Ahli Madya untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara Kasasi dan tiga perkara Peninjauan Kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas enam perkara Kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara. 003. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1033/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk: c. Memerintahkan para pejabat fungsional Pranata Peradilan Ahli Madya yang berada di Kepaniteraan Muda Pidana Tata Usaha Negara untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan 3 (tiga) perkara peninjauan kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas 6 (enam) perkara kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara Agar saudara menindaklanjuti instruksi di atas sebelum tanggal 5 Juli 2024 dan melaporkannya kepada Panitera Mahkamah Agung. 004. Surat Panitera Muda Perkara Nomor 144/Pan.8/PW1.4/ VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang menyatakan akan Memerintahkan kepada Pranata Ahli Madya untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara Kasasi dan 3 Perkara Peninjauan Kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas 6 perkara kasasi kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara. 005. Surat Panitera Muda Perkara TUN Nomor 135/PAN.7/PW1.4/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang memerintahkan para pranata peradilan ahli madya pada Kepaniteraan Mda TUN untuk: 1. Melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan 3 (tiga) perkara peninjauan kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas 6 (enam) perkara kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara 2. Melakukan inventarisasi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dapat tercatat dalam sistem informasi; 006. Surat Pranata Peradilan Ahli Madya Nomor /Pan.8/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang menyatakan Pranata Peradilan Ahli Madya telah melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara Kasasi dan tiga perkara Peninjauan Kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas enam perkara Kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara. (Bukti Terlampir)								Hasil Telaah PTL SMI 2024: -Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Panitera Muda TUN telah memerintahkan Pranata Peradilan Ahli Madya untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan tiga perkara PK kepada Penelaah Berkas Perkara TUN, serta memorandum pengiriman berkas atas enam perkara kasasi kepada Panitera Muda TUN. 2. Pranata Peradilan Ahli Madya menyatakan telah melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara Kasasi dan tiga perkara Peninjauan Kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas enam perkara Kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara. telah sesuai dengan rekomendasi (Lampiran 13 dan Lampiran 14 LHP Nomor 25/LHP/XVI/02/2024 memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi dan tiga perkara PK kepada Penelaah Berkas Perkara TUN telah ditindaklanjuti bukti terlampir) Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
6	Pelaksanaan Proses Dismissal	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian resume gugatan, pengisian Berita Acara Sidang Proses dismissal, penetapan dismissal dan mutu baku waktu proses dismissal, serta mensosialisasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2819/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian resume gugatan, pengisian Berita Acara Sidang Proses dismissal, penetapan dismissal dan mutu baku waktu proses dismissal, serta mensosialisasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN; - 002. Surat Dirjen Badilmiltun kepada SEKMA Nomor 911D/DjMT/PW1.4/VI/2024 tgl 06 Juni 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang Dirjen Badilmiltun akan menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian resume gugatan, pengisian Berita Acara Sidang Proses dismissal, penetapan dismissal dan mutu baku waktu proses dismissal, serta mensosialisasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **1. Penetapan petunjuk teknis terkait pengisian resume gugatan, pengisian Berita Acara Sidang Proses dismissal, penetapan dismissal dan mutu baku waktu proses dismissal .** **2. Bukti sosialisasi atas juknis tersebut kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi peraturan/regulasi terkait pelaksanaan dismissal secara lengkap untuk selanjutnya menetapkan SOP terkait pelaksanaan dismissal tersebut serta mensosialisasikannya kepada pelaksana peradilan; 2) Lebih tertib dalam menerbitkan penetapan dismissal sebagai dasar penetapan majelis hakim den penunjukan Panitera pengganti serta melakukan penetapan Majelis Hakim secara tepat waktu; 3) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait: a) Kesesuaian format resume gugatan dengan Buku II MA dan kelengkapan pengisiannya; b) Pemanggilan para pihak untuk proses dismissal; c) Ketertiban penyusunan Berita Acara Proses Dismissal; d)Ketepatan waktu pengajuan perlawanan. 4) Menginstruksikan kepada Panitera PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan Panitera PTUN di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar supaya:	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2820/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang b. Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi peraturan/regulasi terkait pelaksanaan dismissal secara lengkap untuk selanjutnya menetapkan SOP terkait pelaksanaan dismissal tersebut serta mensosialisasikannya kepada pelaksana peradilan; 2) Lebih tertib dalam menerbitkan penetapan dismissal sebagai dasar penetapan majelis hakim dan penunjukan Panitera pengganti serta melakukan penetapan Majelis Hakim secara tepat waktu; 3) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait: a) Kesesuaian format resume gugatan dengan Buku II MA dan kelengkapan pengisiannya; b) Pemanggilan para pihak untuk proses dismissal; c) Ketertiban penyusunan Berita Acara Proses Dismissal; d) Ketepatan waktu pengajuan perlawanan. 4) Menginstruksikan kepada Panitera PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan Panitera PTUN di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penetapan dan penggantian Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Buku Register Perkara dan SIPP; b) Lebih tertib dalam melaksanakan penunjukkan Panitera Pengganti secara tepat waktu. 5) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 11 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara pada SIPP; 6) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencatat penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti atas satu perkara dan penetapan penggantian Majelis Hakim atas 10 perkara pada Buku Register induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas empat perkara pada SIPP; 7) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Makassar untuk mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 16 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas satu perkara pada SIPP; 8) Menginstruksikan kepada Tim monitoring dan evaluasi SOP pada PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi peraturan/regulasi terkait pelaksanaan dismissal secara lengkap untuk selanjutnya mengusulkan konsep SOP terkait			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Panitera PTUN Jakarta belum melampirkan bukti bahwa : a. telah mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 11 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara pada SIPP b. telah mencatat penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti atas satu perkara dan penetapan penggantian Majelis Hakim atas 10 perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas empat perkara pada SIPP.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							002. Surat Tanggapan Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat tanggapan Ketua PTTUN Medan Nomor 343/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024 , Surat tanggapan Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1075/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat tanggapan Ketua PTTUN Makassar Nomor 726/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024, Surat tanggapan Ketua PTUN Jakarta Nomor 1657/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Juni 2024, Surat tanggapan Ketua PTUN Medan Nomor 358c/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat tanggapan Ketua PTUN Surabaya Nomor 1039/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, dan Surat tanggapan Ketua PTUN Makassar Nomor 518.c/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tgl 13 mei 2024 kepada SEKMA tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi SOP dalam menginventarisasi peraturan/regulasi terkait pelaksanaan dismissal secara lengkap untuk selanjutnya menetapkan SOP terkait pelaksanaan dismissal tersebut serta mensosialisasikannya kepada pelaksana peradilan; 2) Lebih tertib dalam menerbitkan penetapan dismissal sebagai dasar penetapan majelis hakim dan penunjukan Panitera pengganti serta melakukan penetapan Majelis Hakim secara tepat waktu; 3) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait: a) Kesesuaian format resume gugatan dengan Buku II MA dan kelengkapan pengisiannya; b) Pemanggilan para pihak untuk proses dismissal; c) Ketertiban penyusunan Berita Acara Proses Dismissal; d) Ketepatan waktu pengajuan perlawanan. 4) Menginstruksikan kepada Panitera PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan Panitera PTUN di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penetapan dan penggantian Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Buku Register Perkara dan SIPP; b) Lebih tertib dalam melaksanakan penunjukkan Panitera Pengganti secara tepat waktu. 5) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 11 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara pada SIPP; 6) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencatat penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti atas satu perkara dan penetapan penggantian Majelis Hakim atas 10 perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas empat 003. Surat Perintah Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526B/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat Perintah Ketua PTTUN Medan Nomor 343a/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024 , Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1076/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Makassar Nomor 687c/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat Perintah Ketua PTUN Jakarta Nomor 1388/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 16 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTUN Medan Nomor 359c/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTUN Surabaya Nomor 1039A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, dan Surat perintah Ketua PTUN Makassar Nomor 518.c/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tgl 13 mei 2024 tentang Pelaksanaan Proses Dismissal yang berisi Ketua akan 4) Menginstruksikan kepada Panitera PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan Panitera PTUN di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penetapan dan penggantian Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Buku Register Perkara dan SIPP; b) Lebih tertib dalam melaksanakan penunjukkan Panitera Pengganti secara tepat waktu. 5) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 11 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara pada SIPP; 6) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencatat penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti atas satu perkara dan penetapan penggantian Majelis Hakim atas 10 perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas empat perkara pada SIPP; 7) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Makassar untuk mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 16 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas satu perkara pada SIPP; 8) Menginstruksikan kepada Tim monitoring dan evaluasi SOP pada PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar lebih optimal dalam menginventarisasi peraturan/regulasi terkait pelaksanaan dismissal secara lengkap untuk selanjutnya mengusulkan konsep SOP terkait pelaksanaan dismissal tersebut kepada Ketua PTUN Makassar untuk ditetapkan; - 004. Surat Tanggapan Panitera PTTUN Jakarta kepada Ketua Nomor 526B/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat Tanggapan Panitera PTTUN Medan kepada ketua Nomor 343c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024 , Surat Tanggapan Panitera PTTUN Surabaya kepada ketua Nomor 1077/Pan.PTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat Tanggapan Panitera PTTUN Makassar kepada ketua Nomor 894c/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat tanggapan Panitera PTUN Jakarta kepada ketua Nomor 1656/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Juni 2024, Surat Tanggapan Panitera PTUN Medan kepada ketua Nomor 72c/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Tanggapan Panitera PTUN Surabaya kepada ketua Nomor 1039B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, dan Surat Tanggapan Panitera PTUN Makassar kepada ketua Nomor 518.c/PAN.PTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tgl 13 mei 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi Panitera PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan Panitera PTUN di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							yang menyatakan Panitera akan a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penetapan dan penggantian Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Buku Register Perkara dan SIPP; b) Lebih tertib dalam melaksanakan penunjukkan Panitera Pengganti secara tepat waktu - 005. Surat tanggapan Panitera PTUN Jakarta kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1656/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Juni 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang 5) Panitera PTUN Jakarta akan mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 11 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara pada SIPP; - 006. Surat tanggapan Panitera PTUN Jakarta kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1656/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Juni 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang 6) Panitera PTUN Jakarta akan mencatat penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti atas satu perkara dan penetapan penggantian Majelis Hakim atas 10 perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas empat perkara pada SIPP; - 007. Surat Tanggapan Panitera PTUN Makassar kepada ketua Nomor 518.c/PAN.PTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tgl 13 mei 2024 tentang pelaksanaan proses dismissal yang berisi tentang 7) Panitera PTUN Makassar akan mencatat penetapan penggantian Majelis Hakim atas 16 perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas dua perkara pada Buku Register Induk Perkara, serta penginputan penggantian Majelis Hakim atas satu perkara dan penggantian Panitera Pengganti atas satu perkara pada SIPP; - 008. Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTTUN Jakarta kepada Ketua Nomor 526B/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTTUN Medan kepada ketua Nomor 343F/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024 , Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTTUN Surabaya kepada ketua Nomor 1062/Pan.PTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTTUN Makassar kepada ketua Nomor 694d/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTUN Jakarta kepada ketua Nomor 1655/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Juni 2024, Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTUN Medan kepada ketua Nomor 72d/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTUN Surabaya kepada ketua Nomor 1039C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, dan Surat Tanggapan Tim monitoring dan evaluasi SOP PTUN Makassar kepada ketua Nomor 518.c/PAN.PTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tgl 13 mei 2024 yang berisi tentang 8) Tim monitoring dan evaluasi SOP pada PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Makassar, PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar akan lebih optimal dalam menginventarisasi peraturan/regulasi terkait pelaksanaan dismissal secara lengkap untuk selanjutnya mengusulkan konsep SOP terkait pelaksanaan dismissal tersebut kepada Ketua PTUN Makassar untuk ditetapkan.												
7	Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua PTUN Medan agar memerintahkan: a. Hakim di PTUN Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2821/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Medan agar memerintahkan: a. Hakim di PTUN Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP - 2. Surat Ketua kepada SEKMA Nomor 358d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan memerintahkan a. Hakim di PTUN Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP - 3. Surat Ketua kepada Hakim 359d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan a. Hakim di PTUN Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP - 4. Surat Hakim kepada Ketua PTUN Medan 72e/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Hakim di PTUN Medan akan lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP	1								Pada Semester I Tahun 2024, rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 3. Surat Ketua kepada Hakim 359d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan a. Hakim di PTUN Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP 4. Surat Hakim kepada Ketua PTUN Medan 72e/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Hakim di PTUN Medan akan lebih cermat dalam melaksanakan penginputan penetapan tanggal pelaksanaan pemeriksaan persiapan pada SIPP. Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada Ketua PTUN Medan agar memerintahkan: b. Panitera PTUN Medan agar: 1) Menyusun SOP persiapan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua PTUN Medan; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penyampaian surat pemanggilan atas pemeriksaan persiapan, pemanggilan atas sidang pertama, serta penginputan informasi terkait pemeriksaan persiapan di SIPP;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Ketua kepada Panitera 359d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan b. Panitera PTUN Medan agar: 1) Menyusun SOP persiapan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua PTUN Medan; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penyampaian surat pemanggilan atas pemeriksaan persiapan, pemanggilan atas sidang pertama, serta penginputan informasi terkait pemeriksaan persiapan di SIPP; 3) Menelusur perbedaan data antara SIPP, Berita Acara pemeriksaan persiapan e-Court, Buku Register Induk perkara dan surat panggilan atas 25 perkara serta memperbaiki catatan dan penginputan pada SIPP berdasarkan hasil penelusuran	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa:	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3) Menelusur perbedaan data antara SIPP, Berita Acara pemeriksaan persiapan e-Court, Buku Register Induk perkara dan surat panggilan atas 25 perkara serta memperbaiki catatan dan penginputan pada SIPP berdasarkan hasil penelusuran;			002. Surat Panitera kepada Ketua PTUN Medan 72e/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Panitera PTUN Medan akan: 1) Menyusun SOP persiapan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua PTUN Medan; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penyampaian surat pemanggilan atas pemeriksaan persiapan, pemanggilan atas sidang pertama, serta penginputan informasi terkait pemeriksaan persiapan di SIPP; 3) Menelusur perbedaan data antara SIPP, Berita Acara pemeriksaan persiapan e-Court, Buku Register Induk perkara dan surat panggilan atas 25 perkara serta memperbaiki catatan dan penginputan pada SIPP berdasarkan hasil penelusuran 003. SOP PTUN Medan Nomor SOP/001/HKM/2024 tanggal Mei 2024 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan 4. Perbaikan catatan informasi perkara pada buku induk perkara dan SIPP atas 25 Nomor Perkara								1. Ketua PTUN Medan telah memerintahkan Panitera PTUN Medan agar: 1) Menyusun SOP persiapan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua PTUN Medan; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penyampaian surat pemanggilan atas pemeriksaan persiapan, pemanggilan atas sidang pertama, serta penginputan informasi terkait pemeriksaan persiapan di SIPP; 3) Menelusur perbedaan data antara SIPP, Berita Acara pemeriksaan persiapan e-Court, Buku Register Induk perkara dan surat panggilan atas 25 perkara serta memperbaiki catatan dan penginputan pada SIPP berdasarkan hasil penelusuran (Surat 359d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V2024 tgl 15 Mei 2024) 2. Panitera PTUN Medan menyatakan akan: 1) Menyusun SOP persiapan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua PTUN Medan; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penyampaian surat pemanggilan atas pemeriksaan persiapan, pemanggilan atas sidang pertama, serta penginputan informasi terkait pemeriksaan persiapan di SIPP; 3) Menelusur perbedaan data antara SIPP, Berita Acara pemeriksaan persiapan e-Court, Buku Register Induk perkara dan surat panggilan atas 25 perkara serta memperbaiki catatan dan penginputan pada SIPP berdasarkan hasil penelusuran (Surat 72e/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024) 3. Bukti SOP PTUN Medan Nomor SOP/001/HKM/2024 tanggal Mei 2024 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan 4. Perbaikan catatan informasi perkara pada buku induk perkara dan SIPP atas 25 Nomor Perkara Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada Ketua PTUN Medan agar memerintahkan: Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP) untuk lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadministrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2821/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Sekma memerintahkan Ketua PTUN Medan agar memerintahkan: Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP) untuk lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadministrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib; 002. Surat Ketua kepada SEKMA Nomor 358d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V2024 tgl 15 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Administrasi Persidangan Sebelum Persidangan Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan memerintahkan: Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP) untuk lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadminlstrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib; 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada PP dan JSP PTUN Medan Nomor 359d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V2024 tgl 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan PP dan JSP untuk lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadministrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib; 004. Surat dari PP dan JSP kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72t/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 yang berisi tentang PP akan lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadmlnistrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib;	1							Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Ketua PTUN Medan kepada PP dan JSP PTUN Medan Nomor 359d/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V2024 tgl 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan PP dan JSP untuk lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadministrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib; 2. Surat dari PP dan JSP kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72t/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tgl 15 Mei 2024 yang berisi tentang PP akan lebih cermat dalam membuat dan melaksanakan panggilan kepada penggugat/tergugat untuk menghadiri persiapan pemeriksaan dan mengadministrasikan bukti penyampaian surat pemanggilan dengan tertib; Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
8	Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun agar menetapkan mutu baku waktu Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti, dan menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian court calendar, serta mensosialisasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat Sekma Nomor 2822/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Dirjen Badlimiltun agar menetapkan mutu baku waktu Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti, dan menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian court calendar, serta mensosiallsasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN -			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu:	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							002. Surat Dirjen Badilmiltun kepada SEKMA Nomor 911E/DjMT/PW1.4/VI/2024 tgl 06 Juni 2024 yang berisi tentang Dirjen Badilmiltun akan menetapkan mutu baku waktu Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti, dan menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian court calendar, serta mensosialisasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN - 003. Dokumentasi sosialisasi berupa foto kegiatan terlampir - 4. Telah dilakukan sosialisasi dengan bukti berupa Notulen Kegiatan, Materi Sosialisasi, Daftar Hadir dan Undangan terlampir								**1. Dirjen Badilmiltun belum ada penetapan mutu baku waktu Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti, dan menetapkan petunjuk teknis terkait pengisian court calendar, serta mensosialisasikan kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN;** **2. Sosialisasi yang dilampirkan tidak berhubungan dengan rekomendasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar menginstruksikan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP untuk menginventarisasi peraturan/regulasi pelaksanaan persiapan persidangan terkait pelaksanaan persiapan persidangan terutama pada proses pencatatan penetapan dan penggantian majelis hakim dan panitera pengganti pada buku register perkara serta penginputan court calendar pada SIP. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan persiapan persidangan;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar memerintahkan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP untuk menginventarisasi peraturan/regulasi pelaksanaan persiapan persidangan terkait pelaksanaan persiapan persidangan terutama pada proses pencatatan penetapan dan penggantian majelis hakim dan panitera pengganti pada buku register perkara serta penginputan court calendar pada SIP. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan persiapan persidangan; - 002. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1094/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat Ketua PTTUN Makassar kepada SEKMA Nomor 727/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar akan memerintahkan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP untuk menginventarisasi peraturan/regulasi pelaksanaan persiapan persidangan terkait pelaksanaan persiapan persidangan terutama pada proses pencatatan penetapan dan penggantian majelis hakim dan panitera pengganti pada buku register perkara serta penginputan court calendar pada SIP. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan persiapan persidangan; -			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum terdapat penetapan SOP pelaksanaan persiapan persidangan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
							003. Surat perintah Ketua PTTUN Medan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Nomor 339b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Nomor 1095/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat perintah Ketua PTTUN Makassar kepada Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Nomor 687D/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar memerintahkan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP untuk menginventarisasi peraturan/regulasi pelaksanaan persiapan persidangan terkait pelaksanaan persiapan persidangan terutama pada proses pencatatan penetapan dan penggantian majelis hakim dan panitera pengganti pada buku register perkara serta penginputan court calendar pada SIP. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan persiapan persidangan; - 004. Surat tanggapan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 339a/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat tanggapan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1098/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat tanggapan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP kepada Ketua PTTUN Makassar Nomor 727/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Tim Monitoring dan Evaluasi SOP akan menginventarisasi peraturan/regulasi pelaksanaan persiapan persidangan terkait pelaksanaan persiapan persidangan terutama pada proses pencatatan penetapan dan penggantian majelis hakim dan panitera pengganti pada buku register perkara serta penginputan court calendar pada SIP. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan persiapan persidangan.									
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta agar lebih tertib menetapkan Majelis Hakim sesuai jangka waktu yang ditentukan;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta agar lebih tertib menetapkan Majelis Hakim sesuai jangka waktu yang ditentukan; - 002. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 539/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024, tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta akan lebih tertib menetapkan Majelis Hakim sesuai jangka waktu yang ditentukan.	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta agar lebih tertib menetapkan Majelis Hakim sesuai jangka waktu yang ditentukan; 2. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 539/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024, tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta akan lebih tertib menetapkan Majelis Hakim sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada: d. Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya agar lebih tertib menginput penetapan dan penggantian Majelis Hakim pada SIPP, serta melengkapi pencatatan pada Buku Register Induk Perkara dan penginputan pada SIPP atas satu perkara di PTTUN Medan dan empat perkara pada PTTUN Surabaya;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya agar lebih tertib menginput penetapan dan penggantian Majelis Hakim pada SIPP, serta melengkapi pencatatan pada Buku Register Induk Perkara dan penginputan pada SIPP atas satu perkara di PTTUN Medan dan empat perkara pada PTTUN Surabaya; - 2. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1094/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya akan lebih tertib menginput penetapan dan penggantian Majelis Hakim pada SIPP, serta melengkapi pencatatan pada Buku Register Induk Perkara dan penginputan pada SIPP atas satu perkara di PTTUN Medan dan empat perkara pada PTTUN Surabaya.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Bukti screenshoot atas pencatatan pada Buku Register Induk Perkara dan penginputan pada SIPP atas satu perkara di PTTUN Medan dan empat perkara pada PTTUN Surabaya belum ada.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: e. Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian court calendar pada SIPP oleh Majelis Hakim, serta menginstruksikan kepada Majelis Hakim untuk mengisi dan melengkapi court calendar atas 18 perkara di PTTUN Medan, 47 perkara di PTTUN Jakarta, 12 perkara di PTTUN Surabaya, dan 14 perkara di PTTUN Makassar;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian court calendar pada SIPP oleh Majelis Hakim, serta menginstruksikan kepada Majelis Hakim untuk mengisi dan melengkapi court calendar atas 18 perkara di PTTUN Medan, 47 perkara di PTTUN Jakarta, 12 perkara di PTTUN Surabaya, dan 14 perkara di PTTUN Makassar; - 2. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 539/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1094/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat Ketua PTTUN Makassar kepada SEKMA Nomor 727/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian court calendar pada SIPP oleh Majelis Hakim, serta menginstruksikan kepada Majelis Hakim untuk mengisi dan melengkapi court calendar atas 18 perkara di PTTUN Medan, 47 perkara di PTTUN Jakarta, 12 perkara di PTTUN Surabaya, dan 14 perkara di PTTUN Makassar; - 3. Surat perintah Ketua PTTUN Medan kepada Majelis Hakim Nomor 339b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Jakarta kepada Majelis Hakim Nomor 526C/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Majelis Hakim Nomor 1095/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat perintah Ketua PTTUN Makassar kepada Majelis Hakim Nomor 687D/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk mengisi dan melengkapi court calendar atas 18 perkara di PTTUN Medan, 47 perkara di PTTUN Jakarta, 12 perkara di PTTUN Surabaya, dan 14 perkara di PTTUN Makassar; - 4. Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 339c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526c/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1104/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Makassar Nomor			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Bukti bahwa Majelis Hakim telah mengisi court calendar belum seluruhnya dilampirkan misalnya:** **1. PTTUN Jakarta 2 sudah dilampirkan dari 47, sehingga masih kurang bukti 45** **2. PTTUN Medan 18 seluruhnya belum dilampirkan;** **3. PTTUN Surabaya seluruhnya belum dilampirkan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: f. Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar menginstruksikan Majelis Hakim pada PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar lebih optimal menjalankan tugasnya menginput court calendar;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar agar menginstruksikan Majelis Hakim pada PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar lebih optimal menjalankan tugasnya menginput court calendar; - 2. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 539/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1094/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat Ketua PTTUN Makassar kepada SEKMA Nomor 727/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar akan memerintahkan Majelis Hakim pada PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar lebih optimal menjalankan tugasnya menginput court calendar; - 3. Surat perintah Ketua PTTUN Medan kepada Majelis Hakim Nomor 339b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Jakarta kepada Majelis Hakim Nomor 526C/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Majelis Hakim Nomor 1095/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat perintah Ketua PTTUN Makassar kepada Majelis Hakim Nomor 687D/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar memerintahkan Majelis Hakim pada PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar lebih optimal menjalankan tugasnya menginput court calendar; - 4. Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 339c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526c/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1104/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Makassar Nomor 727/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Majelis Hakim pada PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar akan lebih optimal menjalankan tugasnya menginput court calendar.	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat perintah Ketua PTTUN Medan kepada Majelis Hakim Nomor 339b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Jakarta kepada Majelis Hakim Nomor 526C/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Majelis Hakim Nomor 1095/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat perintah Ketua PTTUN Makassar kepada Majelis Hakim Nomor 687D/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar memerintahkan Majelis Hakim pada PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar lebih optimal menjalankan tugasnya menginput court calendar; 2. Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 339c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526c/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1104/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 dan Surat tanggapan Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Makassar Nomor 727/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tgl 17 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada: g. Ketua PTTUN Medan dan Ketua PTTUN Jakarta agar menginstruksikan Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta supaya lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan dan Ketua PTTUN Jakarta agar menginstruksikan Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta supaya lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan; - 2. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 339/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat Ketua PTTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 539/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan dan Ketua PTTUN Jakarta akan memerintahkan Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta supaya lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan; - 3. Surat perintah Ketua PTTUN Medan kepada Panitera Nomor 339b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Jakarta kepada Panitera Nomor 526C/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan dan Ketua PTTUN Jakarta memerintahkan Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta supaya lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan; - 4. Surat tanggapan Panitera kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 339d/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat tanggapan Panitera kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526c/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta akan lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan.	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat perintah Ketua PTTUN Medan kepada Panitera Nomor 339b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTTUN Jakarta kepada Panitera Nomor 526C/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan dan Ketua PTTUN Jakarta memerintahkan Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta supaya lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan; 2. Surat tanggapan Panitera kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 339d/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tgl 14 Mei 2024, Surat tanggapan Panitera kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526c/W2.TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Panitera PTTUN Medan dan PTTUN Jakarta akan lebih tertib menunjuk Panitera Pengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: h. Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara; - 2. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1094/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara; 3. Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Panitera Nomor 1095/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya memerintahkan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara; - 4. Surat tanggapan Panitera kepada Ketua PTTUN Surabaya kepada Panitera Nomor 1098/PAN.TUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Panitera PTTUN Surabaya akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara.	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2823/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara; 002. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1094/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara; 003. Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Panitera Nomor 1095/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Banding yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya memerintahkan Panitera PTTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketertiban pengisian penggantian majelis hakim pada buku register perkara; 004. Surat tanggapan Panitera kepada Ketua PTTUN Surabaya kepada Panitera Nomor 1098/PAN.TUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei	
9	Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Kamar TUN agar: a. Tepat waktu dalam menyampaikan disposisi kepada Panitera Muda TUN untuk membuat Penetapan Majelis Hakim dan mendistribusikan perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2824/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua Kamar TUN agar: a. Tepat waktu dalam menyampaikan disposisi kepada Panitera Muda TUN untuk membuat Penetapan Majelis Hakim dan mendistribusikan perkara - 2. Surat Ketua Kamar TUN kepada SEKMA Nomor 7/KM.TUN/HK.2.7.5/VI/2024 tgl 20 Juni 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Ketua Kamar TUN akan tepat waktu dalam menyampaikan disposisi kepada Panitera Muda TUN untuk membuat Penetapan Majelis Hakim dan mendistribusikan perkara	1								Pada Semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Ketua Kamar TUN kepada SEKMA Nomor 7/KM.TUN/HK.2.7.5/VI/2024 tgl 20 Juni 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Ketua Kamar TUN akan tepat waktu dalam menyampaikan disposisi kepada Panitera Muda TUN untuk membuat Penetapan Majelis Hakim dan mendistribusikan perkara Dengan demikian, rekomendasi telah ditindaklanjuti; *Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.*	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Kamar TUN agar: b. Menginstruksikan Panitera Muda TUN supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat Sekma Nomor 2824/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua Kamar TUN agar menginstruksikan Panitera Muda TUN supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim; - 2. Surat Ketua Kamar TUN kepada SEKMA Nomor 7/KM.TUN/HK.2.7.5/VI/2024 tgl 20 Juni 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Ketua Kamar TUN akan menginstruksikan Panitera Muda TUN supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim - 3. Surat Perintah Ketua Kamar TUN kepada Panitera Muda TUN Nomor 8/KM.TUN/HK.2.7.5/VI/2024 tgl 20 Juni 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Ketua Kamar TUN menginstruksikan Panitera Muda TUN supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim; - 4. Surat jawaban Panitera Muda TUN kepada Ketua Kamar TUN Nomor 142/Pan.8/PW.1.4/VII/2024 tgl 1 Juli 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Panitera Muda TUN akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Perintah Ketua Kamar TUN kepada Panitera Muda TUN Nomor 8/KM.TUN/HK.2.7.5/VI/2024 tgl 20 Juni 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Ketua Kamar TUN menginstruksikan Panitera Muda TUN supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim; 2. Surat jawaban Panitera Muda TUN kepada Ketua Kamar TUN Nomor 142/Pan.8/PW.1.4/VII/2024 tgl 1 Juli 2024 tentang Persiapan Persidangan pada Kepaniteraan MA yang berisi tentang Panitera Muda TUN akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait ketertiban administrasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim. Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ;	
10	Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi	1		BPK merekomendasikan kepada a.Dirjen Badilmiltun agar: 1) Menetapkan pedoman teknis terkait penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada PTUN untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada satker; 2) Melakukan harmonisasi regulasi produk hukum. MA terkait dengan jangka waktu penyelesaian minutasi; 3) Melakukan evaluasi atas format Buku Induk Register Perkara PTUN;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat SEKMA Nomor 2825/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Dirjen Badilmiltun agar: 1) Menetapkan pedoman teknis terkait penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada PTUN untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada satker; 2) Melakukan harmonisasi regulasi produk hukum MA terkait dengan jangka waktu penyelesaian minutasi; 3) Melakukan evaluasi atas format Buku Induk Register Perkara PTUN; - 2. Surat Dirjen Badilmiltun kepada SEKMA Nomor 912C/DjMT/PW1.4/VI/2024 tgl 06 Juni 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Dirjen Badilmiltun akan: 1) Menetapkan pedoman teknis terkait penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada PTUN untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada satker; 2) Melakukan harmonisasi regulasi produk hukum MA terkait dengan jangka waktu penyelesaian minutasi; 3) Melakukan evaluasi atas format Buku Induk Register Perkara PTUN.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Berdasarkan bukti tindak lanjut tersebut, rekomendasi ini belum dapat dinyatakan sesuai dengan alasan:** **01. Pedoman teknis terkait penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada PTUN belum disusun dan ditetapkan serta disosialikasikan kepada satker.** **02. Belum terdapat bukti MA melakukan harmonisasi regulasi produk hukum MA terkait dengan jangka waktu penyelesaian minutasi** **03. Belum terdapat bukti MA melakukan evaluasi atas format Buku Induk Register Perkara PTUN.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada b.Ketua PTTUN Jakarta agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 19 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penyusunan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat SEKMA Nomor 2826/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Jakarta agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 19 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penyusunan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; - 2. Surat Ketua PTTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 539/W2-TUN/HK.06/V/2024 tgl 14 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Jakarta akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 19 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penyusunan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; - 3. Surat perintah Ketua PTTUN Jakarta kepada Majelis Hakim dan Panitera Nomor 526D/W2-TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Jakarta 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 19 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penyusunan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; - 4. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526D/W2-TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539/W2-TUN/HK.06/V/2024 tgl 10 Mei 2024			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum terdapat bukti Panitera telah melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada c.Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 1. Surat SEKMA Nomor 2827/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara; - 2. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1113/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara; - 3. Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Majelis Nomor 1114/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara; - 4. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1124/Pan.PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara.	1							Pada Semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 3. Surat perintah Ketua PTTUN Surabaya kepada Majelis Nomor 1114/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara; 4. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1124/Pan.PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya agar menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas satu perkara. Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada d.Ketua PTUN Jakarta agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim agar mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 53 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 22 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara, serta melengkapi pencatatan tanggal putusan atas 11 perkara di Buku Induk Register Perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2828/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Jakarta agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim agar mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 53 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 22 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara, serta melengkapi pencatatan tanggal putusan atas 11 perkara di Buku Induk Register Perkara; - 002. Surat Ketua PTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 1654/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Jakarta akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim agar mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 53 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 22 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara, serta melengkapi pencatatan tanggal putusan atas 11 perkara di Buku Induk Register Perkara; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Jakarta kepada Majelis, Panitera, Panitera Muda Perkara Nomor 1389/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Jakarta: 2) Menginstruksikan Majelis Hakim agar mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 53 perkara; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 22 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara, serta melengkapi pencatatan tanggal putusan atas 11 perkara di Buku Induk Register Perkara;			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum dilampirkan 1) Panitera telah melengkapi dokumen perkara atas 22 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; dan 2) Bukti bahwa Panitera Muda telah melengkapi pencatatan tanggal putusan atas 11 perkara di Buku Induk Register Perkara.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							004. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1653a/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1653b/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1653c/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tgl 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang 2) Majelis Hakim akan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 53 perkara; 3) Panitera akan optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 22 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Panitera Muda Perkara akan tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara, serta melengkapi pencatatan tanggal putusan atas 11 perkara di Buku Induk Register Perkara.											
				BPK merekomendasikan kepada e.Ketua PTUN Medan agar: 1) Menyusun SOP minutasi perkara yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian minutasi perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara; 6) Melakukan evaluasi atas keberadaan petugas minutasi dengan memedomani strukur organisasi dan uralan tugas Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2829/SEK/PW1.4/V/2024/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Medan agar: 1) Menyusun SOP minutasi perkara yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian minutasi perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara; 6) Melakukan evaluasi atas keberadaan petugas minutasi dengan memedomani strukur organisasi dan uraian tugas Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama; - 002. Surat Ketua PTUN Medan kepada SEKMA Nomor 358.e/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 15 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan: 1) Menyusun SOP minutasi perkara yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian minutasi perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara; 6) Melakukan evaluasi atas keberadaan petugas minutasi dengan memedomani strukur organisasi dan uraian tugas Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Medan kepada Majelis, Panitera, Panitera Muda Perkara Nomor 359.e/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 15 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan: 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara; - 004. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.f/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.f/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.f/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi 2) Menginstruksikan Majelis Hakim akan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara;	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: BPK merekomendasikan kepada e.Ketua PTUN Medan agar: 1) Menyusun SOP minutasi perkara yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian minutasi perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara; 6) Melakukan evaluasi atas keberadaan petugas minutasi dengan memedomani strukur organisasi dan uraian tugas Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Atas bukti tersebut telah dilengkapi bukti Surat Majelis Hakim , Surat Panitera , Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Medan tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi 2) Menginstruksikan Majelis Hakim akan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 55 perkara; 4) Panitera akan optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Panitera Muda Perkara akan tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							4) Panitera akan optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 17 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Panitera Muda Perkara akan tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan terkait pengisian buku register induk perkara.									Dengan demikian seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada f. Ketua PTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 109 perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan cermat serta teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian miutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2830/SEK/PW1.4/V/2024/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 109 perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan cermat serta teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian miutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara; - 002. Surat Ketua PTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1040/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 109 perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan cermat serta teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian miutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Surabaya kepada Majelis, Panitera, Panitera Muda Perkara Nomor 1040A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 109 perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan cermat serta teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian miutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara; - 004. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1040C/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1040B/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1040C/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi Ketua PTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan, serta melengkapi penginputan putusan di Direktori Putusan atas 109 perkara; 2) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan cermat serta teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 3) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian miutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini **belum sesuai dengan rekomendasi;** **Belum melampirkan bukti melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada g.Ketua PTUN Makassar agar: 1) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 2) Menginstruksikan Panitera supaya supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2831/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Makassar agar: 1) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 2) Menginstruksikan Panitera supaya supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; - 002. Surat Ketua PTUN Makassar kepada SEKMA Nomor 518.e/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Makassar akan: 1) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 2) Menginstruksikan Panitera supaya supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Makassar kepada Majelis, Panitera, Panitera Muda Perkara Nomor 518.e/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi tentang Ketua PTUN Makassar agar: 1) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 2) Menginstruksikan Panitera supaya supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; - 004. Surat Majelis Hakim kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.e/PAN.TUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.e/PAN.TUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.e/PAN.TUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi yang berisi Ketua PTUN Makassar agar: 1) Menginstruksikan Majelis Hakim supaya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 2) Menginstruksikan Panitera supaya supaya optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi, penginputan putusan, dan kelengkapan berkas perkara, serta melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum ada bukti melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
11	Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a.Dirjen Badilmiltun agar: 1) Melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang Aplikasi MA untuk menyediakan fitur sinkronisasi SIPP secara otomatis; 2) Menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan PTUN terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi peradilan tata usaha negara; 3) Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2832/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Dirjen Badilmiltun agar: 1) Melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang Aplikasi MA untuk menyediakan fitur sinkronisasi SIPP secara otomatis; 2) Menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan PTUN terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi peradilan tata usaha negara; 3) Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang; - 002. Surat Dirjen Badilmiltun kepada SEKMA Nomor 912D/DjMT/PW1.4/VI/2024 tgl 06 Juni 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang Dirjen Badilmiltun agar: 1) Melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang Aplikasi MA untuk menyediakan fitur sinkronisasi SIPP secara otomatis; 2) Menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan PTUN terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi peradilan tata usaha negara; 3) Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang.			1						**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: MA belum mengeluarkan peraturan 2024 terkait mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan PTUN dan Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang. Dengan demikian tindaklanjut belum sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada b.Ketua PTUN Jakarta agar: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c)Tertib dalam pemusnahan berkas perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2833/SEK/PW1.4/V/2024/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Jakarta agar: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara; - 002. Surat Ketua PTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 1652/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 13 Juni 2024 tentang tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Jakarta akan: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Jakarta kepada Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum Nomor 1390/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 16 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Ketua PTUN Jakarta agar: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara: 004. Surat Sekretaris kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1390C/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 16 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1390A/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 16 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1390D/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 16 Mei 2024, Surat Panitera Muda Hukum kepada Ketua PTUN Jakarta Nomor 1390E/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 16 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi 2) Sekretaris akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Panitera akan optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Panitera Muda Perkara akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Panitera Muda Hukum akan: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Masih terdapat rekomdenasi yang belum ditindaklanjuti yaitu membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023 (SK Tim belum dilampirkan).** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada c.Ketua PTUN Medan dan PTUN Makassar agar: 1) Membentuk dan menetapkan Satgas TIK pada tahun 2022 dan 2023; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 3) Menginstruksikan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2834/SEK/PW1.4/V/2024/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Medan dan PTUN Makassar agar: 1) Membentuk dan menetapkan Satgas TIK pada tahun 2022 dan 2023; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 3) Menginstruksikan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara - 002. Surat Ketua PTUN Medan kepada SEKMA Nomor 358.f/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Ketua PTUN Makassar kepada SEKMA Nomor 518.f/KPTUN.W4-TUN1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Ketua PTUN Medan dan PTUN Makassar akan:			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **PTUN Medan belum melampirkan bukti bahwa telah membentuk dan menetapkan Satgas TIK pada tahun 2022 dan 2023 dan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c)Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.			1) Membentuk dan menetapkan Satgas TIK pada tahun 2022 dan 2023; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 3) Menginstruksikan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Medan kepada Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum Nomor 359.f/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat perintah Ketua PTUN Makassar kepada Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum Nomor 518.f/KPTUN.W4-TUN1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Ketua PTUN Medan dan PTUN Makassar 3) Menginstruksikan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara; 004. Surat Sekretaris kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.g/SEK.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Sekretaris kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.f/KPTUN.W4-TUN1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.E/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.f/KPTUN.W4-TUN1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.F/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.f/KPTUN.W4-TUN1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024, Surat Panitera Muda Hukum kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.F/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 15 Mei 2024, Surat Panitera Muda Hukum kepada Ketua PTUN Makassar Nomor 518.f/KPTUN.W4-TUN1/HK2.7/V/2024 13 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Sekretaris akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Panitera akan optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 5) Panitera Muda Perkara akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum akan: (a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; (b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; (c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.				
				BPK merekomendasikan kepada d.Ketua PTUN Surabaya agar; 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; c)Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2835/SEK/PW1.4/V/2024/SEK/PW1.4/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Surabaya egar: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara; - 002. Surat Ketua PTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1041/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Ketua PTUN Surabaya akan: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023; 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Memerintahkan Panitera supaya optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Memerintahkan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum supaya: a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara; - 003. Surat perintah Ketua PTUN Surabaya kepada Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum Nomor 1041/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Ketua PTUN Surabaya untuk 2) Memerintahkan Sekretaris supaya memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa PTUN Surabaya telah membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi pada tahun 2022 dan 2023.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							004. Surat Sekretaris kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1041B/SEK.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024, Surat Panitera kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1041C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024, Surat Panitera Muda Perkara kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1041D/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024, Surat Panitera Muda Hukum kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1041E/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 14 Mei 2024 tentang Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi 2) Sekretaris akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Panitera akan optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Panitera Muda Perkara akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Memerintahkan Panitera Muda Hukum akan: a) Cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara; b) Tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP dan pencatatan atas peminjaman berkas perkara inaktif; c) Tertib dalam pemusnahan berkas perkara.										
12	Penyelesaian Minutasi Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Banding Belum Sepenuhnya Tepat Waktu dan Tertib Administrasi	1		BPK merekomendasikan kepada: a.Dirjen Badilmiltun agar: 1) Menetapkan pedoman teknis terkait dengan penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada PTTUN untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada satker; 2) Melakukan evaluasi atas format Buku Induk Register Perkara PTTUN;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2836/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk: 1) Menetapkan pedoman teknis terkait penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada Pengadilan; 2) Melakukan evaluasi atas format Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 002. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 787C/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: 1. Ditjen Badilmiltun telah membentuk tim kelompok kerja/satuan tugas penyusunan SOP satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terlampir draft surat keputusan pembentukan kelompok kerja reviu SOP) 2. Ditjen Badilmiltun membentuk tim kelompok kerja untuk merevisi Draf Keputusan Nomor .... /DjMT/KEP/HK/00.6/..../2025 Tentang penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Revisi Buku Pedoman Kerja Standar Operating Procedure (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) Dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025			1				Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **1) Belum terdapat dokumen pedoman teknis terkait dengan penyelesaian minutasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik pada PTTUN yang telah resmi disahkan dan belum terdapat bukti sosialisasi kepada satker;** **2) Belum terdapat bukti evaluasi atas format Buku Induk Register Perkara PTTUN.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada b.Ketua PTTUN Jakarta agar: 1) Mengatur jangka waktu penyelesaian minutasi perkara banding; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4)Menginstruksikan Majelis Hakim supaya: (a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; (b) Cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh PP; (c) Melengkapi informasi putusan atas 43 perkara yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan; 5)Menginstruksikan Panitera supaya: (a) Lebih optimal dalam dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; (b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 11 perkara dan memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; (c) Melengkapi dokumen perkara atas 25 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2837/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Jakarta untuk: 1) Mengatur jangka waktu penyelesaian minutasi perkara banding; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan kepada Majelis Hakim supaya: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 43 perkara yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 5) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 11 perkara dan memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 25 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 6) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian Buku Register Induk Perkara. '002. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539 W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan: 1) Mengatur jangka waktu penyelesaian minutasi perkara banding; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan kepada Majelis Hakim supaya: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 43 perkara yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 5) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 11 perkara dan memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 25 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 6) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian Buku Register Induk Perkara. 003. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526D W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menginstruksikan Majelis Hakim, Panitera, dan Panitera Muda Perkara PTTUN Jakarta supaya:			1				Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **1. Bukti Majelis Hakim telah melengkapi informasi putusan atas 43 perkara yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan** **2. Panitera telah melengkapi dokumen perkara atas 25 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							1) Majelis hakim supaya: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 43 perkara yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 2) Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 11 perkara dan memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 25 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 3) Panitera Muda Perkara supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian Buku Register Induk Perkara: 004. Surat Majelis Hakim Nomor 526D W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menyatakan Majelis Hakim akan: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 005. Surat Panitera PTTUN Jakarta Nomor 526D W2.TUN/HK.06/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menyatakan panitera akan: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan (terlampir screenshot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 11 perkara dan memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran (terlampir foto buku register induk perkara; c) Melengkapi dokumen perkara atas 25 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan (terhadap perkara yang sudah diputus pada pengadilan tingkat banding tidak dapat dilakukan perbaikan atau penambahan dokumen oleh para pihak). 006. Surat Panitera Muda Perkara PTTUN Jakarta Nomor 529 W2.TUN/HK.06/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan panitera muda perkara akan: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian Buku Register Induk Perkara (terlampir screenshot monitoring implementasi SIPP).												
				BPK merekomendasikan kepada c.Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya agar: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 2) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 3)Menginstruksikan Majelis Hakim supaya: a) Mematuhi ketentuan yang Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh PP; c) Melengkapi informasi putusan atas 53 perkara di PTTUN Medan dan 39 perkara di PTTUN Surabaya yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan; 4)Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas dua perkara di PTTUN Medan dan 12 perkara di PTTUN Surabaya, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara di PTTUN Medan dan 30 berkas perkara di PTTUN Surabaya yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengisian buku register induk perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2838/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya untuk: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 2) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 3) Menginstruksikan kepada Majelis Hakim Pengadilan terkait supaya: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 53 perkara di PTTUN Medan dan 39 perkara di PTTUN Surabaya yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 4) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan terkait supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas dua perkara di PTTUN Medan dan 12 perkara di PTTUN Surabaya, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara di PTTUN Medan dan 30 berkas perkara di PTTUN Surabaya yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 5) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Pengadilan terkait supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. 002. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 348/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi (terlampir scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); 2) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan (terlampir screenshoot menu e-doc & publikasi SIPP tingkat banding); 3) Menginstruksikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan supaya: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 53 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas dua perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. Demikian, kami sampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **1. Bukti Majelis Hakim telah melengkapi informasi putusan atas 53 perkara di PTTUN Medan dan 39 perkara di PTTUN Surabaya yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan** **2. Bukti Panitera telah Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas dua perkara di PTTUN Medan dan 12 perkara di PTTUN Surabaya, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran** **3. Bukti Panitera telah Melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan 30 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							003. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 248.b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menginstruksikan Majelis Hakim, Panitera, dan Panitera Muda Perkara PTTUN Medan: 1) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 53 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 2) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas dua perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. 004. Surat Majelis Hakim PTTUN Medan Nomor 348b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 yang menyatakan akan: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 53 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 005. Surat Panitera PTTUN Medan Nomor 348c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 yang menyatakan akan: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan (terlampir scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas dua perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran (terlampir foto Buku Register Induk Perkara); c) Melengkapi dokumen perkara atas 18 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan (terhadap perkara yang sudah diputus pada pengadilan tingkat banding tidak dapat dilakukan perbaikan atau penambahan dokumen oleh para pihak). 006. Surat Panitera Muda Perkara PTTUN Medan Nomor 348d/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 yang menyatakan akan: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. 007. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1125/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi (terlampir scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); 2) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan (terlampir screenshoot menu e-doc & publikasi SIPP tingkat banding); 3) Menginstruksikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 39 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 4) Menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 12 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. Demikian, kami sampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 008. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1126/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menginstruksikan: 1) Majelis Hakim PTTUN Surabaya akan: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 39 perkara di PTTUN Surabaya yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. 2) Panitera PTTUN Surabaya akan: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 12 perkara di PTTUN Surabaya, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran; c) Melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara di PTTUN Surabaya yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 3) Panitera Muda Perkara PTTUN Surabaya akan: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. Demikian, kami sampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.												

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							009. Surat Majelis Hakim PTTUN Surabaya Nomor 1127/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: a) Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang penginputan putusan pada SIPP dan Direktori Putusan; b) Belum sepenuhnya cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; c) Melengkapi informasi putusan atas 39 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang belum diunggah secara tertib di Direktori Putusan. (terlampir screenshoot e-doc dan publikasi terhadap 39 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya). 010. Surat Panitera PTTUN Surabaya Nomor 1127/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan (terlampir scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); b) Menelusur perbedaan data minutasi antara SIPP dan Buku Register Induk Perkara atas 12 perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kemudian memperbaiki pencatatan berdasarkan hasil penelusuran (terlampir foto Buku Register Induk Perkara); c) Melengkapi dokumen perkara atas 30 berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan (terhadap perkara yang sudah diputus pada pengadilan tingkat banding tidak dapat dilakukan perbaikan atau penambahan dokumen oleh para pihak). 011. Surat Panitera Muda Perkara PTTUN Surabaya Nomor 1128/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: a) Tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunaan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; b) Mematuhi ketentuan yang mengatur pengisian Buku Register Induk Perkara. (terlampir scan Buku Register Induk Perkara).									
				BPK merekomendasikan kepada d.Ketua PTTUN Makassar agar: 1) Mengatur jangka waktu penyelesaian miutasi banding; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan Majelis Hakim agar cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 5)Menginstruksikan Panitera supaya: (a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; (b) Melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2839/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua PTTUN Makassar agar: 1) Mengatur jangka waktu penyelesaian minutasi banding; 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi; 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan; 4) Menginstruksikan kepada Majelis Hakim agar cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 5) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: (a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; (b) Melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 6) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara. 002. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 726/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Mengatur jangka waktu penyelesaian minutasi banding (terlampir scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait kelengkapan dan ketepatan jangka waktu minutasi (terlampir scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); 3) Lebih optimal dalam melakukan monitoring kepatuhan penginputan putusan oleh Hakim pada SIPP dan Direktori Putusan (terlampir screenshoot menu e-doc & publikasi SIPP tingkat banding); 4) Menginstruksikan Majelis Hakim agar cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 5) Menginstruksikan Panitera supaya: (a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan; (b) Melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; 003. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 687e//KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: 1) Menginstruksikan Majelis Hakim agar cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 2) Menginstruksikan Panitera supaya: (a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan (Scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); (b) Melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara; 004. Surat Majelis Hakim Nomor 694o//KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Majelis Hakim akan cermat dan teliti dalam melaksanakan proses koreksi putusan yang diketik oleh Panitera Pengganti; 005. Surat Panitera Nomor 694n//KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Panitera akan: (a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ketepatan jangka waktu minutasi dan penginputan putusan (Scan SOP minutasi, screenshoot tanggal pengucapan putusan dan tanggal minutasi); (b) Melengkapi dokumen perkara atas 19 berkas perkara yang belum seluruhnya lengkap/sesuai syarat kelengkapan. 006. Surat Panitera Muda Perkara PTTUN Makassar Nomor 694l/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Panitera Muda Perkara PTTUN Makassar akan tertib dalam mendokumentasikan tahapan penyelesaian minutasi perkara yang dapat dipergunakan sebagai monitoring proses penyelesaian perkara (terlampir screenshoot e-doc dan publikasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar); 007. Eviden PTTUN Makassar			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Pada kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PTTUN Makasar belum terdapat bukti bahwa Panitera telah menindaklanjuti rekomendasi untuk melengkapi dokumen 19 berkas perkara yang belum sesuai syarat kelengkapan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Pengelolaan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Banding Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a.Dirjen Badilmiltun agar: 1) Menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan PTTUN terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi peradilan tata usaha negara; 2) Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang;	1	0	Pada Semester I Tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2840/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2023 yang memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk: 1) Menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang. 002. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 727D/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: 1. Bahwa terkait dengan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ditjen Badilmiltun telah mempunyai kebijakan yakni: - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terlampir); - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 29/DjMT/KEP/HM.02.3/I/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terlampir). Kedua kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang salah satu tujuannya adalah untuk keseragaman mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang pada satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa terkait dengan keamanan sistem informasi di Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan TUN telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi ASN Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023, dimana di dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai keamanan cyber (terlampir). 3. Ditjen Badilmiltun telah melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi manajemen administrasi dan pelayanan termasuk sarana dan prasarana serta pemanfaatan TIK pada satuan kerja, dalam hal penanganan terhadap permasalahan TIK saat ini khususnya permasalahan terkait dengan aplikasi pada satuan kerja dapat segera terselesaikan melalui grup helpdesk pada aplikasi Whats App (terlampir Laporan Hasil Monev tahun 2023 Screenshot Whats App Helpdesk dan Ecourt).	1								TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 001. Sekma telah memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk: 1) Menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan Pengadilan TInggi Tata Usaha Negara terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang. 002. Dirjen Badilmiltun telah menyusun mekanisme penanganan yang baku untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada sistem/aplikasi yang digunakan PTTUN terutama yang terkait dengan keamanan sistem informasi peradilan tata usaha negara; dan Menyusun mekanisme evaluasi TIK secara berjenjang; Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada b.PTTUN Jakarta agar: 1) Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) TIK; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi 3) Melakukan langkah-langkah untuk memindahkan berkas perkara inaktif yang menjadi milik PTTUN baru; 4) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2841/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk: 1) Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) TIK; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola aplikasi; 3) Melakukan langkah-langkah untuk memindahkan berkas perkara inaktif yang menjadi milik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru; 4) Menginstruksikan kepada Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 5) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara 6) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 7) Memerintahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **1. Keputusan Ketua terkait dengan pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT;** **2. Dokumen perencanaan Tahun 2025 sebagai bukti prioritas anggaran** **3. Dokumen penatan pengelolaan berkas perkara dari aplikasi MIS menu BHT.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5)Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 7) Memerintahkan Panitera Muda Hukum untuk cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP;			002. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 539.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) TIK (terlampir scan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Satgas TIK); 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola aplikasi (terlampir Keputusan Ketua terkait dengan pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT); 3) Melakukan langkah-langkah untuk memindahkan berkas perkara inaktif yang menjadi milik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru (terlampir scan surat Ketua Pengadilan Tinggi TUN induk mengirim surat kepada Pengadilan Tinggi TUN baru atau sebaliknya, PTTUN induk menginventarisir berkas perkara yang akan diserahkan kepada PTTUN baru, PTTUN induk mengirimkan berkas perkara kepada PTTUN baru dengan menggunakan berita acara serah terima berkas berkara pada saat berkas perkara itu ada pada PTTUN baru); 4) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 5) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 7) Memerintahkan Panitera Muda Hukum untuk cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 003. Surat Ketua PTTUN Jakarta Nomor 526F.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menginstruksikan: 1) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 2) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 4) Memerintahkan Panitera Muda Hukum untuk cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 004. Surat Sekretaris PTTUN Jakarta Nomor 526F.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Sekretaris akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 (Terlampir scan dokumen perencanaan Tahun 2025); 005. Surat Panitera PTTUN Jakarta Nomor 526F.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Panitera akan: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. (terlampir scan dokumen penataan pengelolaan berkas perkara). 006. Surat Panitera Muda Perkara Nomor 539.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum (terlampir scan dokumen penyerahan/penerimaan berkas perkara dalam buku ekspedisi inaktif); 007. Surat Panitera Muda Hukum Nomor 539.W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP (terlampir scan dokumen penataan pengelolaan berkas perkara dari aplikasi MIS menu BHT).									
				BPK merekomendasikan kepada c.PTTUN Surabaya agar: 1)Membentuk dan menetapkan Satgas TIK; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi; 3) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4)Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2842/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk: 1) Membentuk dan menetapkan Satgas TIK; 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola aplikasi; 3) MengInstruksikan kepada Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 5) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP.			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Ketua PTUN Surabaya belum melampirkan SK Tim Satgas TIK dan SK Tim Pengelola Aplikasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP;			002. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1139/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan telah: 1) Membentuk dan menetapkan Satgas TIK; (terlampir scan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Satgas TIK) 2) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola aplikasi; (terlampir Keputusan Ketua terkait dengan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT) 3) Menginstruksikan kepada Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 4) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 5) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 6) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 003. Surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1140/KPTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menginstruksikan: 1) Menginstruksikan Sekretaris untuk memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 2) Menginstruksikan Panitera untuk: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara untuk tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum untuk cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 004. Surat Sekretaris PTTUN Surabaya Nomor 1144/Sek.PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Sekretaris akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 (terlampir scan dokumen perencanaan Tahun 2025); 005. Surat Panitera PTTUN Surabaya Nomor 1141/Pan. PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan panitera akan: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. (terlampir scan dokumen penataan pengelolaan berkas perkara). 006. Surat Panitera Muda Perkara Nomor 1143/Pan.PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum (terlampir scan dokumen penyerahan/penerimaan berkas perkara dalam buku ekspedisi inaktif); 007. Surat Panitera Muda Hukum Nomor 1142/Pan.PTTUN.W3-TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP (terlampir scan dokumen penataan pengelolaan berkas perkara dari aplikasi MIS menu BHT).									

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada d.Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Makassar agar: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi; 2) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Dirjen Badilmiltun Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3)Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2843/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola aplikasi; 2) Menginstruksikan kepada Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; 4) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 002. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 331/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi (terlampir keputusan Ketua terkait dengan pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT); 2) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 003. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 331-1/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 2) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 004. Surat Sekretaris PTTUN Medan Nomor 331b/KPTTUN.W1-TUN/PW1.1/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 005. Surat Panitera PTTUN Medan Nomor 331c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei yang menyatakan panitera akan: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 006. Surat Panitera Muda Perkara PTTUN Medan Nomor 331d/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei yang menyatakan Panitera Muda Perkara akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 007. Surat Panitera Muda Hukum PTTUN Medan Nomor 331e/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei yang menyatakan Panitera Muda Hukum akan cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 008. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 729/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi (terlampir keputusan Ketua terkait dengan pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT); 2) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP	1								Pada semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 002. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 331/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi (terlampir keputusan Ketua terkait dengan pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT); 2) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 003. Surat Ketua PTTUN Medan Nomor 331-1/ KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 2) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 004. Surat Sekretaris PTTUN Medan Nomor 331b/KPTTUN.W1-TUN/PW1.1/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 005. Surat Panitera PTTUN Medan Nomor 331c/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei yang menyatakan panitera akan: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							009. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 687/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 2) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 010. Surat Sekretaris PTTUN Makassar Nomor 694g/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 (terlampir scan dokumen perencanaan Tahun 2025); 011. Surat Panitera PTTUN Makassar Nomor 694i/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. (Terlampir scan dokumen penataan pengelolaan berkas perkara) 012. Surat Panitera Muda Perkara Nomor 694j/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 013. Surat Panitera Muda Hukum Nomor 694k/ KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP.								006. Surat Panitera Muda Perkara PTTUN Medan Nomor 331d/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei yang menyatakan Panitera Muda Perkara akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 007. Surat Panitera Muda Hukum PTTUN Medan Nomor 331e/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei yang menyatakan Panitera Muda Hukum akan cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 008. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 729/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi (terlampir keputusan Ketua terkait dengan pembentukan Tim Pengelola Aplikasi/IT); 2) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 3) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 4) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 009. Surat Ketua PTTUN Makassar Nomor 687/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan: 1) Menginstruksikan Sekretaris agar memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021; 2) Menginstruksikan Panitera supaya: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara; c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara supaya tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 4) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum supaya cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. 010. Surat Sekretaris PTTUN Makassar Nomor 694g/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menyediakan standar minimal pendukung pelayanan peradilan sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 (terlampir scan dokumen perencanaan Tahun 2025); 011. Surat Panitera PTTUN Makassar Nomor 694i/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan: a) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara; b) Lebih maksimal dalam melakukan koordinasi terkait pemindahan arsip berkas perkara	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																c) Lebih optimal dalam melaksanakan monitoring pencatatan, pengelolaan, penyimpanan arsip, dan peminjaman arsip berkas perkara. (Terlampir scan dokumen penataan pengelolaan berkas perkara) 012. Surat Panitera Muda Perkara Nomor 684j/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan tepat waktu dalam menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 013. Surat Panitera Muda Hukum Nomor 684k/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan akan cermat dalam penyimpanan arsip berkas perkara dan tertib dalam pencatatan peminjaman berkas inaktif serta tertib dalam pencatatan pengelolaan berkas pada SIPP. Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
14	Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan MA	1		BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar: a. Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua MA dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir;	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2844/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Sekma memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk : a) Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; b) Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali; c) Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; d) Menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; dan e) Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 2. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; 3. Bukti SK Tim Penyusun Naskah Urgensi Rancangan Perubahan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2844/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Sekma memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk : a) Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; b) Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali; c) Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; d) Menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; dan e) Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 2. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang	
				BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar: b. Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat kasasi dan PK;	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2844/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Sekma memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk : a) Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; b) Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali; c) Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke DirektoriPutusan; d) Menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; dan e) Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 002. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. 003. Bukti SK Tim Penyusun Naskah Urgensi Rancangan Perubahan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum terdapat dokumen yang regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat kasasi dan PK yang telah disusun oleh Panitera MA.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar: c. Menginstruksikan Panitera Muda TUN supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan;	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2844/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Sekma memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk : a) Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; b) Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali; c) Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke DirektoriPutusan; d) Menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; dan e) Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 002. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1). Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; 003. Surat Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Muda Perkara TUN Nomor 1086/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam : 1). Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; 004. Surat Panitera Muda Perkara TUNke Sekma tanggal 3 Juli 2024 yang berisi tentang akan lebih optimal dalam : 1). Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan;	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1). Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; 2. Surat Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Muda Perkara TUN Nomor 1086/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam : 1). Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; 3. Surat Panitera Muda Perkara TUNke Sekma tanggal 3 Juli 2024 yang berisi tentang akan lebih optimal dalam : a). Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; b). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar: d. Menginstruksikan Panitera Kamar TUN agar melengkapi berkas Bundel B PK yang belum lengkap atas enam perkara PK; dan	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2844/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Sekma memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk : a) Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; b) Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali; c) Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke Direktori Putusan; d) Menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; dan e) Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 002. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali. 003. Surat Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Muda Kamar TUN Nomor 1086/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; 004. Surat Panitera Muda Kamar TUN kepada Panitera Mahkamah Agung Nomor 03/PMK.TUN/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang berisi tentang telah melengkapi berkas bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; 5. Bukti Melengkapi Berkas Bundel B PK atas enam perkara PK	1								Pada Semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Muda Kamar TUN Nomor 1086/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; 2. Surat Panitera Muda Kamar TUN kepada Panitera Mahkamah Agung Nomor 03/PMK.TUN/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang berisi tentang telah melengkapi berkas bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; 3. Bukti Melengkapi Berkas Bundel B PK atas enam perkara PK Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada Panitera MA agar: e. Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas perkara bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi.	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2844/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Sekma memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk : a) Mengusulkan kajian peraturan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam hal evaluasi atas tahapan penyelesaian penanganan perkara pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 sesuai kondisi termutakhir; b) Menyusun regulasi teknis pengelolaan berkas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali; c) Menginstruksikan Panitera Muda Tata Usaha Negara supaya lebih optimal dalam: 1) Menjalankan tahapan atau proses pembuatan salinan putusan dan pemeriksaan final salinan putusan; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses renvoi putusan yang sudah direvisi untuk segera diunggah atau upload putusan ke DirektoriPutusan; d) Menginstruksikan Panitera Kamar Tata Usaha Negara agar melengkapi berkas Bundel B Peninjauan Kembali yang belum lengkap atas enam perkara Peninjauan Kembali; dan e) Menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 2. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 3. Surat Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Pengganti TUN Nomor 1086/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 4. Surat Panitera Pengganti TUN Kepada Panitera Mahkamah Agung Nomor 04/PMK.TUN/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang berisi tentang Panitera Pengganti akan lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk diminutasi.	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung Nomor 1087/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penyelesaian Minutasi dan Pengelolaan Berkas di Kepaniteraan Mahkamah Agung, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung telah menginstruksikan Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 2. Surat Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Pengganti TUN Nomor 1086/PAN/PW1.4/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang berisi tentang Panitera Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Panitera Pengganti agar lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara untuk diminutasi. 3. Surat Panitera Pengganti TUN Kepada Panitera Mahkamah Agung Nomor 04/PMK.TUN/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang berisi tentang Panitera Pengganti akan lebih tertib dan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 dalam tahapan ekspedisi atau pengiriman salinan putusan, putusan dan berkas bundel B ke Direktorat Tata Usaha Negara untuk	
15	Penyusunan Putusan Pengadilan pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua PTUN Medan dan PTUN Surabaya agar menginstruksikan kepada para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua MA Nomor 359/SK/XII/2022	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2845/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penyusunan Putusan Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai Sekma memerintahkan Ketua PTUN Medan dan PTUN Surabaya agar menginstruksikan kepada para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua MA Nomor 359/SK/X11/2022. 2. Surat Ketua PTUN Medan Kepada Sekma Nomor 358g/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Pertama yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan memerintahkan: para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 3. Surat Ketua PTUN Medan kepada Hakim PTUN Medan Nomor 359g/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan para hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 4. Surat Hakim PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.h/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 5. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Sekma Nomor 1042/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan telah memerintahkan: para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 6. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Hakim PTUN Surabaya Nomor 1042 A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang memerintahkan para hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 7. Surat Hakim PTUN Surabaya kepada Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1042 B/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 8. Evident Scan Putusan dan Template Putusan PTUN Medan 9. Evident Scan Putusan dan Template Putusan PTUN Surabaya	1								Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Ketua PTUN Medan kepada Hakim PTUN Medan Nomor 359g/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan memerintahkan para hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 2. Surat Hakim PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.h/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 3. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Sekma Nomor 1042/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan telah memerintahkan: para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 4. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Hakim PTUN Surabaya Nomor 1042 A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang memerintahkan para hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/X11/2022. 5. Surat Hakim PTUN Surabaya kepada Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1042 B/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai	
16	Pencantuman Biaya Perkara pada Putusan Tata Usaha Negara Belum Menggambarkan Seluruh Biaya Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk menyusun usulan panduan atau kebijakan yang mengatur terkait mekanisme pencantuman seluruh biaya perkara yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara pada putusan termasuk biaya yang dikeluarkan di pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada Ketua Kamar TUN agar dapat menjadi acuan bagi seluruh satker pengadilan	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2846/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pencantuman Biaya Perkara pada Putusan Tata Usaha Negara Belum Menggambarkan Seluruh Biaya Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara, Sekma memerintahkan Dirjen Badilmiltun untuk menyusun usulan panduan atau kebijakan yang mengatur terkait mekanisme pencantuman seluruh biaya perkara yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara pada putusan termasuk biaya yang dikeluarkan di pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada Ketua Kamar TUN agar dapat menjadi acuan bagi seluruh satker pengadilan; 2. Surat Direktur Jenderal Badilmiltun Kepada Sekma Nomor 788B/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang penyusunan usulan panduan atau kebijakan yang mengatur terkait mekanisme pencantuman seluruh biaya perkara yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara pada putusan termasuk biaya yang dikeluarkan di pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada Ketua Kamar TUN agar dapat menjadi acuan bagi seluruh satker pengadilan;			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **belum terdapat bukti bahwa Ditjen Badilmiltun telah menyusun usulan panduan atau kebijakan yang mengatur terkait mekanisme pencantuman seluruh biaya perkara yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara pada putusan termasuk biaya yang dikeluarkan di pengadilan pengaju, serta disampaikan kepada Ketua Kamar TUN agar dapat menjadi acuan bagi seluruh satker pengadilan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta dan PTUN Medan agar menginstruksikan kepada Panitera untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara kasasi dan PK pada SIPP.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2847/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pencantuman Biaya Perkara pada Putusan Tata Usaha Negara Belum Menggambarkan Seluruh Biaya Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara, Sekma memerintahkan kepada Ketua PTUN Jakarta dan PTUN Medan agar menginstruksikan kepada Panitera untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara kasasi dan PK pada SIPP. 002. Surat Ketua PTUN Medan kepada Sekma Nomor 358.h/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang akan menginstruksikan Panitera PTUN Medan untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera PTUN Medan Nomor 359.h/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang menginstruksikan Panitera PTUN Medan untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 00 4. Surat Panitera PTUN Medan Nomor 72.i/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 kepada Ketua PTUN Medan yang berisi tentang akan lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 005. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 1650/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta akan menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 006. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Panitera PTUN Jakarta Nomor 1391/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 007. Surat Panitera PTUN Jakarta kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1649/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang berisi tentang Panitera akan lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 008. Screenshoot Rincian Biaya Perkara pada Aplikasi SIPP PTUN Medan 009. Screenshoot Rincian Biaya Perkara pada Aplikasi SIPP PTUN Jakarta 10. Kertas Kerja Hakim Pengawas PTUN Jakarta	1							Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2847/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pencantuman Biaya Perkara pada Putusan Tata Usaha Negara Belum Menggambarkan Seluruh Biaya Dikeluarkan dalam Penyelesaian Perkara, Sekma memerintahkan kepada Ketua PTUN Jakarta dan PTUN Medan agar menginstruksikan kepada Panitera untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara kasasi dan PK pada SIPP. 2. Surat Ketua PTUN Medan kepada Sekma Nomor 358.h/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang akan menginstruksikan Panitera PTUN Medan untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 3. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera PTUN Medan Nomor 359.h/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang menginstruksikan Panitera PTUN Medan untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 4. Surat Panitera PTUN Medan Nomor 72.i/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 kepada Ketua PTUN Medan yang berisi tentang akan lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 5. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada SEKMA Nomor 1650/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta akan menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 6. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Panitera PTUN Jakarta Nomor 1391/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 7. Surat Panitera PTUN Jakarta kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1649/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang berisi tentang Panitera akan lebih optimal melakukan pengawasan atas penginputan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP. 8. Screenshoot Rincian Biaya Perkara pada Aplikasi SIPP PTUN Medan 9. Screenshoot Rincian Biaya Perkara pada Aplikasi SIPP PTUN Jakarta 10. Kertas Kerja Hakim Pengawas PTUN Jakarta Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti; Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
17	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Pada PTUN Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran atas Buku Pedoman Kerja SOP Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan PTUN di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya yang mengatur jangka waktu pemberitahuan sisa panjar biaya perkara dan menetapkan petunjuk teknis pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik untuk disosialisasikan kepada satker pengadilan	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2848/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Sepenuhnya Memadai, yang berisi tentang Sekma memerintahkan kepada Dirjen Badilmiltun untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran atas Buku Pedoman Kerja SOP Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya yang mengatur jangka waktu pemberitahuan sisa panjar biaya perkara dan menetapkan petunjuk teknis pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik untuk disosialisasikan kepada pengadilan. 002. Surat Direktur Jenderal Badilmiltun kepada Sekma Nomor 912E/DjMT/PW1.4/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang berisi tentang Ditjen Badilmiltun telah menginventarisir SOP yang ada pada satuan kerja untuk dilakukan perubahan dan penyeragaman SOP termasuk SOP Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya yang mengatur jangka			1						Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak lanjut MA ini belum sesuai dengan rekomendasi; **Belum terdapat penetapan petunjuk teknis pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik untuk disosialisasikan kepada satker pengadilan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							waktu pemberitahuan sisa panjar biaya perkara dan menetapkan petunjuk teknis pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik untuk disosialisasikan kepada pengadilan. 003. Eviden Draft SK Pokja Revisi SOP dan penyelarasan kebijakan.pdf 004. Eviden Permintaan SOP kepada Satuan Kerja										
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta agar menginstruksikan kepada Panitera untuk: 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara	1	0	Telah ditindak lanjuti dengan : 1. Surat Sekma Nomor 2849/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Sepenuhnya Memadai, yang berisi tentang Sekma memerintahkan kepada Ketua PTUN Jakarta agar menginstruksikan Panitera untuk : 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara; 2. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Kepada Sekma Nomor 1392/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta akan menginstruksikan Panitera untuk 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara; 3. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Panitera Nomor 1392/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Panitera untuk 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara; 4. Surat Panitera PTUN Jakarta kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1392A/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera akan 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara; 5. Eviden Tindak Lanjut Panitera	1							Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Sekma Nomor 2849/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Sepenuhnya Memadai, yang berisi tentang Sekma memerintahkan kepada Ketua PTUN Jakarta agar menginstruksikan Panitera untuk : 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara; 2. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Kepada Sekma Nomor 1392/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta akan menginstruksikan Panitera untuk 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan membuat keterangan apabila kekurangan biaya panjar belum dibayarkan sebagai dasar Majelis Hakim menetapkan pembatalan pendaftaran perkara; 3. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Panitera Nomor 1392/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Panitera untuk 1) Segera memproses sisa panjar yang belum dikembalikan secara elektronik, 2) Lebih optimal dalam memberitahukan kekurangan panjar biaya perkara dan	
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar menginstruksikan kepada Kasir untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	0	Telah ditindak lanjuti dengan : 1. Surat Sekma Nomor 2849/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Sepenuhnya Memadai, yang berisi tentang Sekma memerintahkan kepada Ketua PTUN Jakarta agar menginstruksikan kepada Kasir untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Kepada Sekma Nomor 1392C/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta akan menginstruksikan Kasir untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Kasir Nomor 1392/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Kasir untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Surat Kasir kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1392B/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Kasir akan melakukan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Surat Sekma Nomor 2850/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Sepenuhnya Memadai, yang berisi tentang Sekma memerintahkan kepada Ketua PTUN Medan, PTUN Surabaya, PTUN Makassar agar menginstruksikan kepada Kasir untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Surat Ketua PTUN Medan Kepada Sekma Nomor 358.i/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan menginstruksikan Kasir agar melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Surat Ketua PTUN Medan Kepada Kasir Nomor 359.i/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan menginstruksikan Kasir agar melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Surat Kasir PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.j/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang kasir akan melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Sekma Nomor 1044/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi Wakil Ketua PTUN Surabaya telah menginstruksikan Kasir agar melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Surat 13. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar kepada Kasir Nomor 518.g/KPTUN/W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Makassar menginstruksikan Kasir agar melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14. Surat Kasir PTUN Makassar Nomor 518.g/PAN.PTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Kasir akan melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 15. Eviden Screenshoot Apilkasi Perbankan CMS PTUN Medan 16. Eviden Screenshoot Apilkasi Perbankan CMS PTUN Surabaya 17. Eviden Screenshoot Apilkasi Perbankan CMS PTUN Makassar 18. Eviden Tindak Lanjut Kasir PTUN Jakarta	1							Pada semester I Tahun 2024 telah ditindak lanjuti dengan : 1. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Kasir Nomor 1392/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta menginstruksikan Kasir untuk melaksanakan pengambalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Surat Kasir kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1392B/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Kasir akan melakukan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Surat Ketua PTUN Medan Kepada Kasir Nomor 359.i/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan menginstruksikan Kasir agar melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Surat Kasir PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.j/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang kasir akan melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Kasir Nomor 1044 A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Kasir agar melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Penyusunan Putusan Pengadilan pada PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya agar menginstruksikan kepada para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua MA Nomor 359/SK/XII/2022	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2851/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Penyusunan Putusan Pengadilan Pada PTTUN Meden dan PTTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya agar menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 002. Surat Ketua PTTUN Medan kepada SEKMA Nomor 344/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penyusunan Putusan Pengadilan Pada PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan akan menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 003. Surat Ketua PTTUN Medan kepada para Hakim Nomor 344b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 004. Surat Hakim PTTUN Medan kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 344a/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 005. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1145/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyusunan Putusan Pengadilan Pada PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 006. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada para Hakim Nomor 1146/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 007. Hakim PTTUN Surabaya kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1147/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024, Nomor 1148/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024, Nomor 1151/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024, Nomor 1153/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024, Nomor 1154/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024, dan 1156/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 008. Scan putusan (PTTUN Medan); 009. Scan template putusan (PTTUN Medan); 010. Scan putusan (PTTUN Surabaya); 011. Scan template putusan (PTTUN Surabaya).	1							Pada semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 003. Surat Ketua PTTUN Medan kepada para Hakim Nomor 344b/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTTUN Medan menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 004. Surat Hakim PTTUN Medan kepada Ketua PTTUN Medan Nomor 344a/KPTTUN.W1-TUN/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang para Hakim akan menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 005. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada SEKMA Nomor 1145/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyusunan Putusan Pengadilan Pada PTTUN Medan dan PTTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya akan menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 006. Surat Ketua PTTUN Surabaya kepada para Hakim Nomor 1146/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTTUN Surabaya menginstruksikan para Hakim untuk menyusun putusan sesuai format dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/SK/XII/2022; 007. Hakim PTTUN Surabaya kepada Ketua PTTUN Surabaya Nomor 1147/Pan.PTTUN.W3-TUN/HKI.2/V/2024, Nomor 1148/Pan.PTTUN.W3-	
19	Pemberitahuan Putusan Banding dan PK Kepada Para Pihak Pada PTUN Medan Dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua PTUN Medan dan PTUN Surabaya agar menginstruksikan kepada: a. Panitera supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, kasasi dan PK kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan kasasi dan PK pada SIPP	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2852/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dan PK kepada Para Pihak pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu yang berisi tentang Sekma memerintahkan Ketua PTUN Medan dan PTUN Surabaya agar menginstruksikan Panitera PTUN Medan dan PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 002. Surat Ketua PTUN Medan kepada Sekma Nomor 358.j/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dan PK kepada Para Pihak pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan menginstruksikan Panitera PTUN Medan supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera PTUN Medan Nomor 359.j/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan menginstruksikan Panitera PTUN Medan supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 004. Surat Panitera PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.k/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Medan akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP (terlampir screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP); 005. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Sekma Nomor 1045/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dan PK kepada Para Pihak pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya akan menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 006. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Panitera PTUN Surabaya Nomor 1045A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 007. Surat Panitera PTUN Surabaya kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1045B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Surabaya akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP (terlampir screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP);	1							Pada Semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera PTUN Medan Nomor 359.j/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan menginstruksikan Panitera PTUN Medan supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 004. Surat Panitera PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.k/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Medan akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP (terlampir screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP); Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Panitera PTUN Surabaya Nomor 1045A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP; 007. Surat Panitera PTUN Surabaya kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1045B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Surabaya akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak serta penginputan data pemberitahuan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada SIPP	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							008. Screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP (PTUN Medan); 009. Screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP (PTUN Surabaya).									(terlampir screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP); 008. Screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP (PTUN Medan); 009. Screenshoot tanggal pemberitahuan putusan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali kepada para pihak pada aplikasi SIPP (PTUN Surabaya). Dengan demikian rekomendasi telah ditindaklanjuti. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada Ketua PTUN Medan dan PTUN Surabaya agar menginstruksikan kepada: b. Panitera Muda Perkara supaya lebih optimal dalam: 1) memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, kasasi dan PK kepada para pihak; dan 2) melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara PK pada SIPP	1	0	Pada semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2852/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dan PK kepada Para Pihak pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu yang berisi tentang Sekma memerintahkan Ketua PTUN Medan dan PTUN Surabaya agar menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Medan dan PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 002. Surat Ketua PTUN Medan kepada Sekma Nomor 358.j/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dan PK kepada Para Pihak pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Medan supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera Muda Perkara PTUN Medan Nomor 359.j/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Medan supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 004. Surat Panitera Muda Perkara PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.w/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera Muda Perkara PTUN Medan akan lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; Bahwa 10 perkara Kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali dimaksud tidak terdapat data dari PTUN Medan; 005. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Sekma Nomor 1045/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Putusan Banding dan PK kepada Para Pihak pada PTUN Medan dan PTUN Surabaya Belum Sepenuhnya Tepat Waktu yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya akan menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 006. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya Nomor 1045A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 007. Surat Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1043C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya akan lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; (terlampir screenshoot tanggal pengucapan putusan, tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara Kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP); 008. Screenshoot tanggal pengucapan putusan, tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara Kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP (PTUN Surabaya).	1								Pada semester I Tahun 2024 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan: 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera Muda Perkara PTUN Medan Nomor 359.j/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Medan supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 004. Surat Panitera Muda Perkara PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.w/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera Muda Perkara PTUN Medan akan lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; Bahwa 10 perkara Kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali dimaksud tidak terdapat data dari PTUN Medan; 006. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya Nomor 1045A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya supaya lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; 007. Surat Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1043C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya akan lebih optimal dalam: 1) Memedomani ketentuan terkait jangka waktu pemberitahuan putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak; dan 2) Melakukan penginputan tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP; (terlampir screenshoot tanggal pengucapan putusan, tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara Kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP); 008. Screenshoot tanggal pengucapan putusan, tanggal pemberitahuan putusan atas 10 perkara Kasasi dan dua perkara Peninjauan Kembali pada SIPP (PTUN Surabaya). Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang Telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar Belum Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk melakukan sosialisasi atas Hasil Rumusan Pokja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023 kepada satker dan mengatur mekanisme penginputan tanggal BHT pada SIPP	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2853/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar Belum Memadai yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melakukan sosialisasi atas Hasil Rumusan Pokja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023 kepada Pengadilan dan mengatur mekanisme penginputan tanggal BHT pada SIPP; 002. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada SEKMA Nomor 768C/DjMT/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melakukan sosialisasi atas Hasil Rumusan Pokja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023 kepada Pengadilan dan mengatur mekanisme penginputan tanggal BHT pada SIPP; 003. Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi (Surat Undangan, Materi Kegiatan, dan Notulensi Monev Monekstun.			1						Dengan demikian tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. **Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat mekanisme yang mengatur penginputan tanggal BHT pada SIPP.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar: 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; dan 3) Menginstruksikan kepada Staf Kepaniteraan Perkara agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan: 001.Surat SEKMA Nomor 2854/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar Belum Memadai yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar: 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 3) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 002. Surat Ketua PTUN Medan kepada Sekma Nomor 358.k/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar Belum Memadai yang berisi tentang Ketua PTUN Medan akan: 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan Panitera PTUN Medan supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 3) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Medan agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 003. Surat Ketua PTUN Medan kepada Panitera dan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Medan Nomor 359.k/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Ketua PTUN Medan: 1) Menginstruksikan Panitera PTUN Medan supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 2) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Medan agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 004. Surat Panitera PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.I/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Medan akan: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP dan scan surat keterangan putusan BHT); 005. Surat Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Medan kepada Ketua PTUN Medan Nomor 72.m/PAN.PTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang berisi tentang Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Medan akan menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP); 006. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Sekma Nomor 1045/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar Belum Memadai yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya akan: 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 3) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Surabaya agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid;	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar telah 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan kepada Panitera supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; dan 3) Menginstruksikan kepada Staf Kepaniteraan Perkara agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid 2. Panitera PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar telah menyatakan a) akan Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) telah membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) akan Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; dan 3) 3. Staf Kepaniteraan Perkara pada masing masing satker telah menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid 4. Telah dilampiri bukti tangkapan layar informasi BHT pada aplikasi SIPP dan Surat Keterangan Putusan BHT Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							007. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya kepada Panitera dan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Surabaya Nomor 1045 A/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Surabaya: 1) Menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 2) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Surabaya agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 008. Surat Panitera PTUN Surabaya kepada Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1045 B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Surabaya akan: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP dan scan surat keterangan putusan BHT); 009. Surat Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Surabaya kepada Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1045 C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berisi tentang Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Surabaya akan menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP); 010. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar kepada Sekma Nomor 518.h/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Makassar, dan PTUN Makassar Belum Memadai yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Makassar akan: 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan Panitera PTUN Makassar supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 3) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Makassar agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 011. Surat Wakil Ketua PTUN Makassar kepada Panitera dan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Makassar Nomor 518.h/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Makassar: 1) Menginstruksikan Panitera PTUN Makassar supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 2) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Makassar agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 012. Surat Panitera PTUN Makassar kepada Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.h/PAN.TUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Makassar telah: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP dan scan surat keterangan putusan BHT); 013. Surat Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Makassar kepada Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518.h/PAN.TUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang berisi tentang Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Makassar telah menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP); 014. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Sekma Nomor 1393B/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Administrasi Putusan Tata Usaha Negara yang telah BHT pada PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Jakarta, dan PTUN Jakarta Belum Memadai yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta akan: 1) Menerbitkan Penetapan Putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati; 2) Menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 3) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Jakarta agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 015. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta kepada Panitera dan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Jakarta Nomor 1393/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Wakil Ketua PTUN Jakarta: 1) Menginstruksikan Panitera PTUN Jakarta supaya: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid;										

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP; 2) Menginstruksikan Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Jakarta agar menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid; 016. Surat Panitera PTUN Jakarta kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1393A/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Panitera PTUN Jakarta akan: a) Lebih tertib dalam melakukan administrasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; b) Segera membuat Surat Keterangan Putusan BHT setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan memastikan akurasi data dan ketepatan penginputan putusan BHT pada SIPP sesuai dengan dokumen sumber yang valid; c) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam memastikan akurasi data dan ketepatan waktu penginputan data pada aplikasi SIPP (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP dan scan surat keterangan putusan BHT); 017. Surat Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Jakarta kepada Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1393C/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang berisi tentang Staf Kepaniteraan Perkara PTUN Jakarta akan menginput tanggal putusan BHT pada SIPP berdasarkan dokumen sumber yang valid (terlampir screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP); 018. Screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP (PTUN Medan); 019. Surat Keterangan Putusan BHT (PTUN Medan); 020. Screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP (PTUN Surabaya); 021. Surat Keterangan Putusan BHT (PTUN Surabaya); 022. Screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP (PTUN Makassar); 023. Surat Keterangan Putusan BHT (PTUN Makassar); 024. Screenshoot tanggal BHT di aplikasi SIPP (PTUN Jakarta); 025. Surat Keterangan Putusan BHT (PTUN Jakarta).										
21	Pelaksanaan Pengiriman Kembali Berkas Perkara dan Salinan Putusan yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Banding oleh PTTUN ke Pengadilan Pengaju Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan petunjuk teknis terkait pengiriman kembali berkas banding dan salinan putusan banding serta batas waktu proses unggah salinan putusan secara e-Court oleh PTTUN, serta melakukan sosialisasi kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Plt. Sekretaris MA Kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 2855/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang berisi Sekma memerintahkan kepada Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan petunjuk teknis pengiriman Kembali berkas banding dan Salinan putusan banding serta batas waktu proses unggah Salinan putusan secara e-court oleh PTTUN, serta melalukan sosialisasi kepada PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan PTUN; 002- Surat Dirjen Badimiltun Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 912F/DjMT/PW1.4/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang berisi Dirjen Badilmiltun telah menginventarisir SOP yang ada pada satuan kerja untuk dilakukan perubahan dan penyeragaman SOP termasuk SOP pengiriman Kembali berkas banding dan Salinan putusan banding serta batas waktu proses unggah Salinan putusan secara e-Court oleh PTTUN (terlampir surat Nomor 903/Djmt/B/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang SOP Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan di lingkungan peradilan TUN.) serta telah membentuk tim kelompok kerja/satuan tugas penyusunan SOP satuan kerja di lingkungan peradilan TUN (terlampir draft surat Keputusan pembentukan kelompok kerja reviu SOP); 003-Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 903/Djmt/B/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang isinya meminta setiap satuan kerja agar mengirikan SOP (tenaga teknis hakim, panitera, jurusita pengganti) dan administrasi kepaniteraan di lingkungan peradilan TUN paling lambat tanggal 10 Juni 2024 kepada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN; 004. Draf Surat Keputusan Direktur JenderalnBadan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Penyelenggaraan Keglatan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Buku Pedoman Kerja Standar Operating Procedure (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;				1					Dengan demikian tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. **Belum terdapat bukti tindak lanjut bahwa Dirjen Badilmiltun telah menetapkan petunjuk teknis terkait pengiriman kembali berkas banding dan salinan putusan banding serta batas waktu proses unggah salinan putusan secara e-Court oleh PTTUN, serta melakukan sosialisasi kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar agar: 1) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke PTUN pengaju dan proses unggah salinan putusan banding bertanda tangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar agar dalam pengiriman berkas perkara banding ke PTUN pengaju mempedomani SOP yang berlaku	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2856/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Pengiriman Kembali Berkas Perkara dan Salinan Putusan yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Banding oleh PTTUN ke Pengadilan Pengaju Belum Sepenuhnya Memadai memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk: 1) Menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan terkait untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah salinan putusan banding bertanda tangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar dalam pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju mempedomani SOP yang berlaku. 002. - Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 539 W2.TUN/HK.06/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024, dengan ini 1. Menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; terlampir;	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Ketua PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar telah 1) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke PTUN pengaju dan proses unggah salinan putusan banding bertanda tangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Menginstruksikan Panitera Muda Perkara PTTUN Jakarta, PTTUN Medan, PTTUN Surabaya dan PTTUN Makassar agar dalam pengiriman berkas perkara banding ke PTUN pengaju mempedomani SOP yang berlaku 2. Panitera Muda Perkara dan staf pada Kepaniteraan Perkara pada PTUN Jakarta, PTUN Surabaya dan PTUN Makassartelah menyatakan akan menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							003. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5266/W2.TUN/HK.06/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang dengan ini 1. Menginstruksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; 004- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 342/KPTTUN W1-TUN/HK.2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan ini 1. Menginsrtuksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; terlampir; 005- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 342a/KPTTUN W1-TUN/HK.2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Perintah - Surat Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Kepada Ketua Nomor 342c/KPTTUN W1-TUN/HK.2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang dengan ini 1. Menginsrtuksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; 006 - Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 342b/KPTTUN.W.1.TUN/HK-2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang menyatakan bahwa dalam Upaya hukum banding yang dilakukan secara elektronik maka pengiriman berkas fisik perkara banding kepada pengadilan pengaju tidak diperlukan lagi karena berkas sudah tersimpan pada system aplikasi e-court; 007. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 983/KPTTUN.W3.TUN/HK1.2/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, dengan ini 1. Menginsrtuksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; terlampir; 008- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 730KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini 1. Menginsrtuksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; terlampir; 009- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 687g/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang dengan ini 1. Menginsrtuksikan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju dan proses unggah Salinan putusan banding bertandatangan elektronik di aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2 . Menginstruksikan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar dalam pengiriman berkas perkara bandingbke Pengadilan Tata Uasaha Negara pengaju memedomani SOP yang berlaku; 010 - Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 694h/KPTTUN.W4/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang menyatakan bahwa dalam Upaya hukum banding yang dilakukan secara elektronik maka pengiriman berkas fisik perkara banding kepada pengadilan pengaju tidak diperlukan lagi karena berkas sudah tersimpan pada system aplikasi e-court;									3. Telah dilengkapi bukti tangkapan layar atas penginputan informasi perkara pada SIPP masing masing satker Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan dan PTUN Makassar menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara dan staf pada Kepaniteraan Perkara untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP	1	0	Telah ditindaklanjuti dengan 001. Surat Plt. Sekma Nomor 2857/SEK/PW1.4/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024- Surat SEKMA Nomor 2857/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 Pelaksanaan Pengiriman Kembali Berkas Perkara dan Salinan Putusan yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Banding oleh PTTUN ke Pengadilan Pengaju Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi Sekma memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara dan staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan terkait untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP;- 002 Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 358l/KPTUN.W1-TUN.1/PW 1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan PTUN Medan untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP; 003-Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan Kepada Panitera Muda Perkara dan Staf Kepaniretaan Perkara Nomor 359l/KPTUN.W1-TUN.1/PW 1.1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Medan untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP;	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan dan PTUN Makassar telah menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara dan staf pada Kepaniteraan Perkara untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP 2. Telah dilengkapi bukti tangkapan layar atas penginputan informasi perkara pada SIPP masing masing satker ***Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi.*** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							005. Surat Staf Perkara Pengadilan Tata Usaha Medan Kepada Ketua Nomor 72o/PAN.PTUN.W1.TUN.1/PW 1.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Panitera Muda Perkara/Staf pada KepaniteraanPerkara Pengadilan PTUN Medan akan menginput data dan informasi perkara secaralengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 006- Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 518i/KPTUN.W4-TUN.1/HK,2,7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Makassar untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 007-Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar Kepada Panitera Muda Perkara dan Staf Kepaniretaan Perkara Nomor 518i/KPTUN.W4-TUN.1/HK,2,7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Makassar untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 008-Surat Panmud Perkara Pengadilan Tata Usaha Makassar Kepada Ketua Nomor 518i/KPTUN.W4-TUN.1/HK,2,7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Medan untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 009-Surat Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Makassar Kepada Ketua Nomor 518i/KPTUN.W4-TUN.1/HK,2,7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Medan untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 010. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta Kepada Plt. Sekretaris MA Nomor 1644/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Jakarta untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 011-Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta Kepada Panitera Muda Perkara dan Staf Kepaniretaan Perkara Nomor 1394/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Jakarta untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 012-Surat Panmud Perkara Pengadilan Tata Usaha Jakarta Kepada Ketua Nomor 1643/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan TUN Jakarta untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP; 013-Lampiran Bukti Perbedaan tanggal penerimaan Kembali berkas Banding di SIPP									
22	Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan PK oleh MA ke PTUN Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Panitera MA agar: 1) Menetapkan ketentuan pelaksanaan atau SOP yang mengatur batas waktu pengarsipan berkas Bundel B oleh Kepaniteraan MA; 2) Menginstruksikan Panitera Muda TUN MA agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara Kasasi/PK ke PTUN pengaju; 3) Menginstruksikan Koordinator Pengiriman Berkas pada Kepaniteraan Muda TUN agar melaksanakan pengiriman berkas perkara kasasi/PK ke PTUN pengaju sesuai SOP yang berlaku	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan 001. Surat Sekma Nomor 2858/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang perintah kepada Panitera Mahkamah Agung untuk : 1. Menetapkan ketentuan pelaksanaan atau SOP yang mengatur batas waktu pengarsipan berkas Bundel B oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung; 2. Menginstruksikan kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara Kasasi/Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju; 3. Menginstruksikan kepada Koordinator Pengiriman Berkas pada Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara agar melaksanakan pengiriman berkas perkara Kasasi/Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju sesuai SOP yang berlaku. 002. Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1033/PAN/PW1.4.6/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 menginstruksikan Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Untuk: a. Lebih optimal dalam melakukan mengawasan terkait ketertiban administrasi perkara kasasi/peninjauan Kembali dan ketepatan waktu atas setiap tahapan proses penerimaan perkara yang menjadi tanggungjawab Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara; b. Melakukan Koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pengaju yang tidak menyertakan barcode dalam berkas yang dikirim untuk melengkapinya agar berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan Kembali dapat tercatat dalam system informasi; c. Memerintahkan para pejabat fungsional Pranata Peradilan Ahli Madya yang berada di Kepaniteraan Muda Pidana Tata Usaha Negara untuk melengkapi memorandum distribusi perkara atas 22 perkara kasasi da 3 (tiga) perkara peninjauan kembali kepada Penelaah Berkas Perkara Tata Usaha Negara, serta memorandum pengiriman berkas atas 6 (enam) perkara kasasi kepada Panitera Muda Tata Usaha Negara. 003. Instruksi Panitera Mahkamah Agung Kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1035/PAN/PW1.4.6/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 menginstruksikan agar 1. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman berkas perkara kasasi/peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju; 1. Memerintahkan Koordinator Pengriman Berkas pada Kepaniteraa Muda Tata Usaha Negara agar melaksanakanpengiriman berkas perkara kasasi.peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju sesuai SOP yang berlaku. 004. Nota dinas Panitera Mahkamah Agung kepada Sekrataris MA Nomor 1038/PAN/PW1.4/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 beserta LAMPIRAN.			1					Dengan demikian tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. **Panitera MA belum menetapkan ketentuan pelaksanaan atau SOP yang mengatur batas waktu pengarsipan berkas Bundel B oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara dan staf pada Kepaniteraan Perkara untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP	1	0	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2859/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara Yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu dengan ini memerintahkan a. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, Makassar agar menginstruksikan kepada Panitera Muda Perkara dan Staf pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan terkait untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP; b. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menginstruksikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas Sembilan perkara kasasi pada SIPP;	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Wakil Ketua PTUN Jakarta, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar *(melalui surat terpisah)* telah menginstruksikan kepada *Panitera Muda Perkara dan* staf pada Kepaniteraan Perkara untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar, dan tepat waktu ke dalam SIPP	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							002. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1045/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan ini : a. Menginstruksikan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menginstruksikan Panitera Muda Perkara/ Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); b. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menginstruksikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas Sembilan perkara Kasasi pada SIPP (Screenshoot SIPP menu Upaya hukum Kasasi atas Sembilan perkara Kasasi). 003. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1046/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan ini : a. menginstruksikan Panitera Muda Perkara/ Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); b. menginstruksikan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas Sembilan perkara Kasasi pada SIPP (Screenshoot SIPP menu Upaya hukum Kasasi atas Sembilan perkara Kasasi). 004. Surat Psnitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1046B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya akan melengkapi pengimputan informasi perkara atas Sembilan perkara Kasasi pada SIPP (terlampir screeshoot SIPP menu Upaya hukum Sembilan perkara Kasasi.; 005. Surat Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1046C/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya akan melengkapi pengimputan informasi perkara atas Sembilan perkara Kasasi pada SIPP (terlampir screeshoot SIPP menu Upaya hukum Sembilan perkara Kasasi.; 006. Surat Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1046D/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya akan melengkapi pengimputan informasi perkara atas Sembilan perkara Kasasi pada SIPP (terlampir screeshoot SIPP menu Upaya hukum Sembilan perkara Kasasi.; 007. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1642/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, dengan ini : a. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 008. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1395/KPV/2024 tanggal 16 Mei 2024, dengan ini memerintahkan : a. Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 009. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 518j/KPTTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Juni2024 , dengan ini memerintahkan : a. Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 010. Lampiran Perbedaan tanggal Penerimaan Kembali Berkas Kasasi... 011. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1642/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, dengan Ini Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 012. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 518.j/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 013. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 518.j/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 , dengan ini Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP); 014. Surat Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 518.j/KPTUN.W4-TUN.1/HK2.7/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 , dengan ini Panitera Muda Perkara/Staf Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan menginput data dan informasi perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu ke dalam SIPP (terlampir screenshoot data umum pada aplikasi SIPP);									2. Telah dilengkapi bukti tangkapan layar atas penginputan informasi perkara pada SIPP masing masing satker **Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				BPK merekomendasikan kepada: c. Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, MA telah menyampaikan tindak lanjut: - 001. Surat SEKMA 2859/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara Yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu yang berisi tentang SEKMA memerintahkan Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP; -	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: *001. Ketua PTUN Surabaya telah menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP*	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							002. Surat Ketua kepada SEKMA Nomor 1046/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara Yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu yang berisi tentang Ketua PTUN Surabaya akan menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP; - 003. Surat Perintah Ketua PTUN Surabaya kepada Panitera PTUN Surabaya Nomor 1046/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara Yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu yang berisi tentang Ketua PTUN Surabaya menginstruksikan Panitera PTUN Surabaya untuk melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP; - 004. Surat tanggapan Panitera PTUN Surabaya kepada Ketua PTUN Surabaya Nomor 1046B/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengiriman dan Pengarsipan Berkas Perkara Yang Telah Diputus dalam Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju Belum Sepenuhnya Tertib dan Tepat Waktu yang berisi tentang Panitera PTUN Surabaya akan melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP.								002. Panitera PTUN Surabaya menyatakan akan melengkapi penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP. 003. Telah dilengkapi bukti tangkapan layar atas penginputan informasi perkara atas sembilan perkara kasasi pada SIPP. **Dengan demikian, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
23	Ketidakseragaman Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi sampai dengan Dinyatakan Selesai	1		BPK merekomendasikan kepada Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan pedoman teknis yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksekusi setelah Penetapan Eksekusi hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesai, serta melakukan sosialisasi kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan:- 001. Surat Sekma Nomor 2860/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Ketidakseragaman Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Sampai Dinyatakan Selesai. BPK merekomendasikan kepada Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan pedoman teknis yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksekusi setelah Penetapan Eksekusi diterbitkan hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesai, serta melakukan sosialisasi kepada satker PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTUN. ;- 002 Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 788D/DjMT/PW1.4/V/2024 tentang Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Ditjen Badilmiltun sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan/eksekusi terhadap Putusan Pengadilan TUN, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN telah menghasilan Rumusan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2023, dan selanjutnya Rumusan tersebut telah dibahas dalam Pokja Kamar Tata Usaha Negara MA RI untuk dilakukan penyempurnaan. Meskipun Hasil Pokja Eksekusi tersebut belum dituangkan dalam bentuk peraturan/ kebijakan (terlampir draft Hasil Rumusan Pokja Eksekusi); 2. Ditjen Badilmiltun bersama dengan Kamar Tata Usaha Negara MA RI telah menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diikuti oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada bulan April 2024 (terlampir dokumen pelaksanaan Sosialisasi Eksekusi)			1						Dengan demikian tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. **1. Bukti dokumen pedoman teknis yang telah ditetapkan yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksekusi setelah Penetapan Eksekusi hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesai** **2. Bukti dokumen pelaksanaan Sosialisasi Eksekusi misalnya undangan, daftar hadir, dan notulen sosialisasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
24	Pendaftaran dan Administrasi Permohonan Pengawasan Eksekusi Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk: 1) Melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang Aplikasi MA untuk: a) Mendorong penerapan aplikasi e-Court untuk pendaftaran permohonan eksekusi dan penerapan SIPP untuk permohonan eksekusi atas perkara yang putusan hukumnya tidak diselenggarakan di PTUN; b) Menindaklanjuti hasil inventarisasi atas permasalahan dalam penyajian informasi permohonan eksekusi di SIPP; 2) Menginstruksikan Direktur Binganistun Ditjen Badilmiltun untuk melaksanakan: a) Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun indikator penilaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi dan mengusulkan penetapan IKU pada Peradilan Tata Usaha Negara kepada Sekretaris MA; b) Monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan:- 001. Surat Sekma Nomor 2861/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk: I) Melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang Aplikasi MA untuk: a) Mendorong penerapan aplikasi e-Court untuk pendaftaran permohonan eksekusi dan penerapan SIPP untuk permohonan eksekusi atas perkara yang putusan hukumnya tidak diselenggarakan di PTUN; b) Menindaklanjuti hasil inventarisasi atas permasalahan dalam penyajian Informasi permohonan eksekusi di SIPP; 2) Menginstruksikan Direktur Binganistun Ditjen Badilmiltun untuk melaksanakan: a) Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun indikator penilaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi dan mengusulkan penetapan IKU pada Peradilan Tata Usaha Negara kepada Sekretaris MA; b) Monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi. ;- 002 Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 789B/DjMT/PW1.4/V/2024 tentang tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan pada Dirjen Badilmiltun. Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2861/SEK/PW1.4/V/2024 hal Surat Perintah tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk: 1) Melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang aplikasi Mahkamah Agung agar: a) Mendorong penerapan aplikasi e-Court untuk pendaftaran permohonan eksekusi dan penerapan SIPP untuk permohonan eksekusi atas perkara yang putusan hukumnya tidak diselenggarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara; b) Menindaklanjuti hasil inventarisasi atas permasalahan dalam penyajian informasi permohonan eksekusi di SIPP; 2) Menginstruksikan kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan: a) Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun indikator penilaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi dan mengusulkan penetapan IKU pada Peradilan Tata Usaha Negara kepada Sekretaris Mahkamah Agung; b) Monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi. Maka bersama ini disampaikan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Ditjen Badilmiltun sebagai berikut: 1. Ditjen Badilmiltun telah berkoordinasi dengan tim Development MA untuk memasukkan/membuat fitur pendaftaran permohonan eksekusi dalam aplikasi SIPP dan e-court untuk permohonan eksekusi terhadap 003. Direktorat pembinaan tenaga teknis dan administrasi Peradilan TUN telah mengusulkan penetapan IKU termasuk kriteria penilaian indikator pelaksanaan putusan perkara TUN di dalam Pokja penyusunan Renstra 2025-2029, anggota di dalam Pokja tersebut terdapat keterwakilan dari Ditjen Badilmiltun (terlampir SK Penyusunan Renstra 2025-2029 serta draft renstra terbaru termasuk perubahan rumusan indicator eksekusi TUN); 004. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja termasuk pengawasan putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi (terlampir Laporan Hasil Monev).			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **1. Bukti Ditjen Badilmiltun telah berkoordinasi dengan tim Development MA untuk Dirjen Badilmiltun untuk melakukan koordinasi dengan Tim Development Pengembang Aplikasi MA untuk: a) Mendorong penerapan aplikasi e-Court untuk pendaftaran permohonan eksekusi dan penerapan SIPP untuk permohonan eksekusi atas perkara yang putusan hukumnya tidak diselenggarakan di PTUN dan 2) menindaklanjuti hasil inventarisasi atas permasalahan dalam penyajian informasi permohonan eksekusi di SIPP** **2. Bukti bahwa Direktorat pembinaan tenaga teknis dan administrasi Peradilan TUN telah Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun indikator penilaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi dan mengusulkan penetapan IKU pada Peradilan Tata Usaha Negara kepada Sekretaris MA; b) Monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Eksekusi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar: 1) Agar lebih optimal dalam melakukan monitoring pengawasan pelaksanaan eksekusi; 2) Menginstruksikan kepada Panitera PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar agar lebih optimal dalam: a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak. 3) Menginstruksikan Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta, PTUN Medan, dan PTUN Surabaya agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan; dan 4) Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP PTUN Jakarta, PTUN Medan, dan PTUN Surabaya dan penyusun Laporan Caturwulan agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan.	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan:- 001. Surat Sekma Nomor 2862/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tindak lanjut yang memerintahkan Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar untuk: 1) Lebih optimal dalam melakukan monitoring pengawasan pelaksanaan eksekusi; 2) Menginstrusikan kepada Panitera agar lebih optimal dalam: a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak. 3) Menginstrusikan kepada Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan; dan 4) Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan penyusun Laporan Caturwulan Pengadilan terkait agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan. ;- 002. Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1640/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang tanggapan ; 1) Agar lebih optimal dalam melakukan monitoring pengawasan pelaksanaan eksekusi ; 2) Menginstrusikan kepada Panitera agar lebih optimal dalam: a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak ; 3) Menginstrusikan kepada Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan; 4) Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan penyusun Laporan Caturwulan Pengadilan terkait agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan.;- 003. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 360/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang tanggapan ; 1) Agar lebih optimal dalam melakukan monitoring pengawasan pelaksanaan eksekusi ; 2) Menginstrusikan kepada Panitera agar lebih optimal dalam: a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak ; 3) Menginstrusikan kepada Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan; 4) Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan penyusun Laporan Caturwulan Pengadilan terkait agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan. ; 004. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1047/K.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang tanggapan ; 1) Agar lebih optimal dalam melakukan monitoring pengawasan pelaksanaan eksekusi ; 2) Menginstrusikan kepada Panitera agar lebih optimal dalam: a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak ; 3) Menginstrusikan kepada Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan; 4) Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan penyusun Laporan Caturwulan Pengadilan terkait agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan.;- 005.Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518/KPTUN/W4-TUN.1/AT.01.06/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang tanggapan ; 1) Agar lebih optimal dalam melakukan monitoring pengawasan pelaksanaan eksekusi ; 2) Menginstrusikan kepada Panitera agar lebih optimal dalam: a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak ;			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **1. Surat Instruksi dari Ketua , PTUN Medan, dan PTUN Makasar kepada Panitera PTUN Medan dan PTUN Makasar untuk a) Melakukan administrasi permohonan eksekusi dalam hal penggunaan Buku Register Pengawasan Eksekusi; b) Melakukan pengawasan atas penginputan informasi pelaksanaan pengawasan eksekusi pada SIPP; dan c) Melakukan rekonsiliasi data antara data SIPP dan Laporan Caturwulan, sehingga data SIPP dapat menggambarkan keseluruhan pengawasan eksekusi yang dimohonkan para pihak.** **2. Surat Instruksi dari Ketua PTUN Medan kepada Panitera Muda Hukum PTUN PTUN Medanagar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan;** **3. Surat Instruksi dari Ketua PTUN Medan kepada Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP PTUN Medan dan penyusun Laporan Caturwulan agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							3) Menginstrusikan kepada Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas keakuratan penyajian data pada Laporan Caturwulan; 4) Staf Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum selaku petugas inputer permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan penyusun Laporan Caturwulan Pengadilan terkait agar lebih tertib dan teliti dalam melakukan penginputan tanggal terkait permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dan Laporan Caturwulan.									
25	Penatausahaan Panjar Biaya Eksekusi Belum Sepenuhnya Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan pedoman teknis yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pengawasan eksekusi dan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001.Surat Sekma Nomor 2863/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penatausahaan Panjar Biaya Eksekusi Belum Sepenuhnya Memadai.BPK merekomendasikan kepada: a. Dirjen Badilmiltun untuk menetapkan pedoman teknis yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pengawasan eksekusi dan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi; - 002. Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 789C/DjMT/PW1.4/V/2024 tentang tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan pada Dirjen Badilmiltun. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Ditjen Badilmiltun sebagai berikut : 1). bahwa hasil Rumusan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023 telah mengatur batas waktu pelaksanaan pengawasan eksekusi dan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi (terlampir hasil rumusan); 2). bahwa Ditjen Badilmiltun telah membentuk tim kelompok kerja/satuan tugas penyusunan SOP satuan kerja di lingkungan peradilan tata usaha negara (terlampir draft surat keputusan pembentukan kelompok kerja riview SOP) termasuk SOP tentang batas waktu pelaksanaan pengawasan eksekusi dan SOP tentang pengembalian sisa panjar biaya eksekusi (terlampir SOP terkait).			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Belum terdapat bukti pedoman teknis yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pengawasan eksekusi dan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi yang ditetapkan oleh Dirjen Badilmiltun.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	
				BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar untuk: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengenaan biaya panjar eksekusi dan pengembalian sisa panjar eksekusi; dan 2) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT	1	0	Pada Semester I Tahun 2024, telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2864/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penatausahaan Panjar Biaya Eksekusi Belum Sepenuhnya Memadai. BPK merekomendasikan kepada: b. Ketua PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Surabaya, dan PTUN Makassar untuk: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengenaan biaya panjar eksekusi dan pengembalian sisa panjar eksekusi; dan 2) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT. ;- 002. Surat Surat Wakil Ketua PTUN Jakarta Nomor 1666/KPTUN.W2.TUN1/PW1.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang tanggapan agar 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengenaan biaya panjar eksekusi dan pengembalian sisa panjar eksekusi; dan 2) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT. ;- 003. Surat Ketua PTUN Medan Nomor 360/KPTUN.W1-TUN1/PW1.1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang tanggapan agar 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengenaan biaya panjar eksekusi dan pengembalian sisa panjar eksekusi; dan 2) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT. ;- 004. Surat Wakil Ketua PTUN Surabaya Nomor 1048/KPTUN.W3-TUN1/HK2.7/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang tanggapan agar 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengenaan biaya panjar eksekusi dan pengembalian sisa panjar eksekusi, dan 2) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT. ;- 005 Surat Wakil Ketua PTUN Makassar Nomor 518/KPTUN/W4-TUN.1/AT.01.06/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang tanggapan agar agar 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengenaan biaya panjar eksekusi dan pengembalian sisa panjar eksekusi; dan 2) Menginstruksikan kepada Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT.			1						**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Belum dilampirkan surat dari Ketua PTUN Medan dan Ketua PTUN Makasar kepada masing-masing Panitera untuk melaksanakan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan, dan memedomani ketentuan terkait pengenaan biaya panjar untuk penerbitan Penetapan Putusan BHT.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
	Jumlah	25		Jumlah	80		Jumlah	37		43		0		0			

Kepala Auditorat III. A

Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE, CA, CSFA
NIP. 197705152003121003

Menyetujui,
Jakarta 30 Juli 2024
Auditor Utama Keuangan Negara III

Dr. Edward G. Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
IP. 19680716198903100

Lampiran 1.3

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LHP BPK NOMOR 28/LHP/XVI/02/2024 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023 (S.D. TRIWULAN III)
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA DI DKI JAKARTA, ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN KALIMANTAN TENGAH
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengelolaan Presensi Untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Belum Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Sebesar Rp50.260.704	1	50.260.704,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA mengintegrasikan data presensi pada SIKEP dengan KOMDANAS	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Plt. Sekma Nomor 2682/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Lanjut yang menyatakan bahwa Sekma akan mengintegrasikan data presensi pada SIKEP dengan KOMDANAS.; 2. Surat Plt. Sekma Nomor 2683/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Lanjut yang Memerintahkan Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Keuangan untuk mengintegrasikan data Presensi pada SIKEP dengan KOMDANAS; 3. Surat Kabiro Keuangan Kepada Plt. Sekma Nomor 668/BUA.3/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Keuangan akan melakukan integrasi data presensi pada aplikasi SIKEP dengan KOMDANAS; 4. Surat Kabiro Kepegawaian Kepada Plt. Sekma Nomor 272/BUA.2/KP 7/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro kepegawaian akan mengintegrasikan data presensi pada aplikasi SIKEP dengan KOMDANAS; 5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kabag Umum Kepegawaian, Kasubbag Pembayaran dan Gaji BUA MA RI, Kasubbag Data Pegawai BUA MA RI dan Tim Pengembang Aplikasi Sikep yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2024 di Ruang Rapat Biro Keuangan Lantai III sesuai dokumen undangan Nomor 890/BUA.3/UND.KU1.1/VI/2024 dan dokumentasi gambar kegiatan terlampir			1						Tindak Lanjut belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi, yaitu: **Belum terdapat bukti integrasi data presensi pada SIKEP dan KOMDANAS.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Pimpinan Satker terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Plt. Sekma Nomor 2684/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan pejabat satker terkait untuk: a). Lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS; 2. Surat Sekretaris Kepaniteraan Kepada Plt. Sekma Nomor 1294/PAN.1/EXT/KU.01.02/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Sekretaris Kepaniteraan: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 3. Surat Sesditjen Badilum Kepada Plt. Sekma Nomor 483/DJU.1/PW 1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Sesditjen Badilum: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 4. Surat Sesditjen Badilag Kepada Plt. Sekma Nomor 968/DjA.1/KU1.1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang anggapan yang menyatakan bahwa Sesditjen Badilag: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS 5. Surat Kabiro Keuangan Kepada Plt. Sekma Nomor 671/BUA.3/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Keuangan: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Akan memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 6. Surat Kabiro Kepegawaian Kepada Plt. Sekma Nomor 273/BUA.2/KP 7/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro kepegawaian: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 7. Surat Kabiro Perencanaan dan Organisasi Kepada Plt. Sekma Nomor 136/Bua.1/PW.1.4/5/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Renog: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 8. Surat Kabiro Umum Kepada Plt Sekma Nomor 236/BUA.7/KU.1.2/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Umum: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 9. Surat Surat Kabiro Hukum dan Humas Kepada Plt. Sekma Nomor 121.a/BUA.6/KP 7.2/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Hukum dan Humas: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 10. Surat Kabiro Perlengkapan Kepada Plt. Sekma Nomor 57/BUA.4/PW 1.1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Perlengkapan: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. 11. Surat Kabiro Sespim Kepada Plt. Sekma Nomor 176/BUA.5/KU 1.2/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Sespim: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan Pimpinan Satker terkait (Sekretaris Kepaniteraan, Sesditjen Badilum, Sesditjen Badilag, Kabiro Keuangan, Kabiro Kepegawaian, Kabiro Perencanaan dan Organisasi, Surat Kabiro Umum , Kabiro Hukum dan Humas , Kabiro Perlengkapan serta Kabiro Setpim) supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; 2. Sekretaris MA (melalui masing masing pimpinan satker) telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS; 3. Sekretaris Kepaniteraan, Sesditjen Badilum, Sesditjen Badilag, Kabiro Keuangan, Kabiro Kepegawaian, Kabiro Perencanaan dan Organisasi, Surat Kabiro Umum , Kabiro Hukum dan Humas , Kabiro Perlengkapan serta Kabiro Setpim telah menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS dan telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA secara berjenjang memerintahkan operator presensi pada masing-masing satker supaya lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Plt. Sekma Nomor 2684/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan pejabat satker terkait untuk: a). Lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS; 2. Surat Sekretaris Kepaniteraan Kepada Plt. Sekma Nomor 1294/PAN.1/EXT/KU.01.02/V/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Sekretaris Kepaniteraan: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat sekretaris kepaniteraan tersebut telah dilengkapi dengan perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 1296/PAN/1/EXT/KU.01/02/V/2024 kepada Sekretaris Kepaniteraan yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA secara berjenjang (melalui pimpinan satker terkait) telah memerintahkan operator presensi pada masing-masing satker supaya lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							3. Surat Sesditjen Badilum Kepada Plt. Sekma Nomor 483/DJU.1/PW 1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Sesditjen Badilum: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Sesditjen Badilum tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 484/DJU.1/PW 1.4/V/2024 kepada Sesditjen Badilum yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS; 4. Surat Sesditjen Badilag Kepada Plt. Sekma Nomor 986/DjA.1/KU1.1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang anggapan yang menyatakan bahwa Sesditjen Badilag: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Sesditjen Badilag tersebut telah dilengkapi dengan ND Sesditjen Badilag Nomor N-042/DjA.1/KU1.1.4/V/2024 kepada Kabag Kepegawaian Ditjen Badilag yang memerintahkan Kabag kepegawaian supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas ND tersebut, Kabag kepegawaian membalas dengan ND Nomor N-044/DjA.1/KU1.1.4/V/2024 yang menyatakan menyampaikan telah memerintahkan petugas terkait agar lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS dan akan lebih cermat dalam mengkoordinir hasil input tersebut. ND Jawaban Kabag kepegawaian telah dilampiri bukti ND Nomor N-044/DjA.1/KU1.1.4/V/2024 berupa perintah kepada Koordinator Operator Presensi Ditjen Badilag dan Operator Presensi Ditjen Badilag agar lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS 5. Surat Kabiro Keuangan Kepada Plt. Sekma Nomor 671/BUA.3/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Keuangan: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Akan memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Keuangan tersebut belum dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS; 6. Surat Kabiro Kepegawaian Kepada Plt. Sekma Nomor 273/BUA.2/KP 7/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro kepegawaian: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Kepegawaian tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 275/BUA.2/KP 7/V/2024 kepada Kabiro Kepegawaian yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS 7. Surat Kabiro Perencanaan dan Organisasi Kepada Plt. Sekma Nomor 136/Bua.1/PW.1.4/5/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Renog: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Renog tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 138/Bua.1/PW.1.4/5/2024 kepada Kabiro Renog yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS; 8. Surat Kabiro Umum Kepada Plt Sekma Nomor 236/BUA.7/KU.1.2/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Umum: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitae input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Umum tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi kepada Kabiro Renog yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS; 9. Surat Surat Kabiro Hukum dan Humas Kepada Plt. Sekma Nomor 121.a/BUA.6/KP 7.2/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Hukum dan Humas: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Hukum dan Humas tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 121.a/BUA.6/KP 7.2/V/2024 kepada Kabiro Hukum dan Humas yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS; 10. Surat Kabiro Perlengkapan Kepada Plt. Sekma Nomor 57/BUA.4/PW 1.1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Perlengkapan: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Perlengkapan tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 57a/BUA.4/PW 1.1.1/V/2024 kepada Kabiro Perlengkapan yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS 11. Surat Kabiro Sespim Kepada Plt. Sekma Nomor 176/BUA.5/KU 1.2/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kabiro Sespim: a). Akan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas validitas input presensi pada KOMDANAS; b). Telah memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS. Atas surat Kabiro Sespim tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi Nomor 194/BUA.5/KU 1.2/V/2024 kepada Kabiro Sespim yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS-							2. Berdasarkan bukti tindak lanjut berupa surat tanggapan dari masing masing satker diketahui bahwa telah memerintahkan operator presensi pada masing-masing satker supaya lebih cermat dalam menginput presensi pegawai ke KOMDANAS. Surat tanggapan tersebut dari Sekretaris Kesmiltersan, Sesditjen Badilum, Sesditjen Badilag, Kabiro Keuangan, Kabiro Kepegawaian, Kabiro Perencanaan dan Organisasi, Surat Kabiro Umum , Kabiro Hukum dan Humas , Kabiro Perlengkapan serta Kabiro Setpim. 3. Atas surat tanggapan masing masing satker tersebut telah dilampiri dengan surat perintah masing masing satker kepada Operator Presensi yang memerintahkan operator presensi supaya lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS dan Surat Jawaban dari Operator Presensi masing masing satker yang menyatakan akan lebih cermat dalam menginput presensi ke KOMDANAS **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu IKT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				d. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan PPK Biro Keuangan supaya menagih sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp44.839.395 kepada pegawai yang kehadirannya tidak sesuai dengan pembayaran tunjangan kinerja, serta menyetorkannya ke Kas Negara.	1	44.839.395,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Plt Sekma Nomor 2685/SEK/PW1.4/V/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Lanjut yang memerintahkan para PPK untuk menagih sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp44.839.395,00 kepada pegawai yang kehadirannya tidak sesuai dengan pembayaran tunjangan kinerja, serta menyetorkannya ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) ;-	1	44.839.395,00		0,00		0,00		0,00	**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyetoran total sebesar Rp44.960.147,00 yaitu:	44.960.147,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							2. Surat PPK Nomor 89/BUA.3.04/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan akan melaksanakan penegihan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp44.839.305,00 kepada pegawai yang kehadirannya tidak sesuai dengan pembayaran tunjangan kinerja ; 3. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n Badilag bulan April 2023 sebesar Rp195.848,- dengan NTPN Nomor 357210NA04JE2BRK Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia; 4. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n. Badilag Bulan Mei 2023 sebesar Rp205.365,- dengan NTPN Nomor121CE6U8EUK4TBT1 Tanggal24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia- 5. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n. Badilag Bulan Juni 2024 sebesar Rp280.831,- dengan NTPN Nomor F66E82GAVP06SBT0 Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia.;– 6. Telah ditindaklanjuti dengapenyetoran a.n Badilum Bulan April 2023 sebesar Rp11.498.679 dengan NTPN Nomor 910651JNFV50FCOH Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia;– 7. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n Badilum Bulan Mei 2024 sebesar Rp20.469.082 dengan NTPN Nomor FC5DC6U8EUK4TCPH Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia.;– 8. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n Badilum Bulan Juni 2024 sebesar Rp8.770.703,- dengan NTPN Nomor 9122F55DFC3CGJ Tanggal 224 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia;– 9. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n. Kepaniteraan Bulan April 2024 sebesar Rp1.237.089,- dengan NTPN Nomor 3D0D57QLUP6HAD0V Tanggal 24 Juni 2024 Bang Rakyat Indonesia;=– 10. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.a. Kepaniteraan Bulan Mei 2024 sebesar 829.752,- dengan NTPN Nomor 5652D2G4VPO6SCJU Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia,- 11. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran a.n. Kepaniteraan Bulan Juni 2023 sebesar Rp1.472.798, dengan NTPN Nomor 608082G4VPO6SCKD Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia-								1. NTPN Nomor 357210NA04JE2BRK Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp195.848; 2. NTPN Nomor121CE6U8EUK4TBT1 Tanggal24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp205.365; 3. NTPN Nomor F66E82GAVP06SBT0 Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp280.831; 4. NTPN Nomor 910651JNFV50FCOH Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp11.498.679; 5. NTPN Nomor FC5DC6U8EUK4TCPH Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp20.469.082; 6. NTPN Nomor 9122F55DFC3CGJ Tanggal 224 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp8.770.703; 7. NTPN Nomor 3D0D57QLUP6HAD0V Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp1.237.089; 8. NTPN Nomor 5652D2G4VPO6SCJU Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar 829.752; 9. NTPN Nomor 608082G4VPO6SCKD Tanggal 24 Juni 2024 Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp1.472.798. Atas bukti bukti setoran setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
2	Pelaksanaan Belanja Jasa Asuransi BMN Belum Sesuai Ketentuan	1		a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan supaya lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2686/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi supaya lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan. 002. Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 55/BUA.4/PW1.1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan. 003. Surat Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA Nomor 5/BIMON/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan menyatakan akan lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA supaya lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan; 2. Kabiro Perlengkapan menyatakan akan lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan; 3. Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA menyatakan akan lebih cermat dalam menyusun daftar BMN yang diasuransikan. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan PPK Biro Keuangan supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara; dan	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2687/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara. 002. Surat PPK Biro Keuangan BUA Nomor 84/BUA.3.04/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPK Biro Keuangan BUA supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara; 2.PPK Biro Keuangan BUA telah menyatakan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.**	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA menyusun dan menetapkan SOP pengajuan klaim asuransi BMN	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2688/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang menyatakan Sekretaris Mahkamah Agung akan menyusun dan menetapkan SOP pengajuan klaim asuransi BMN. 002. Surat SEKMA Nomor 2689/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi untuk menyusun dan menetapkan SOP pengajuan klaim asuransi BMN. 003. Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 56/BUA.4/PW1.1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 menyatakan akan menyusun dan menetapkan SOP pengajuan klaim asuransi BMN.			1					**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **SOP pengajuan klaim asuransi BMN yang telah ditetapkan oleh SekMA.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
3	Belanja Jasa Internet Tidak Sesuai Ketentuan	1	5.698.841,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Hukum dan Humas BUA agar lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2690/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan: a. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi agar lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja; 002. Surat PPK Biro Hukum dan Humas BUA Nomor 05/S.Kel/PPK/BUA.6/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja;	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPK Biro Hukum dan Humas BUA agar lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja;	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																2. PPK Biro Hukum dan Humas BUA melalui surat Nomor 05/S.Kel/PPK/BUA.6/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 telah menyatakan akan lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPSPM Biro Hukum dan Humas BUA agar lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2690/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan: b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Badan Urusan Administrasi agar lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; 002. Surat PPSPM BUA Nomor 85/BUA.3.04/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA dengan Surat Nomor 2690/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 telah memerintahkan PPSPM BUA agar lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; 2. PPSPM BUA dengan surat nomor 85/BUA.3.04/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 telah menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Hukum dan Humas BUA untuk menagih restitusi kepada PT FNI dan PT ICP sebesar Rp17.752.534	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2690/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan: c. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi untuk menagih restitusi kepada PT FNI dan PT ICP sebesar Rp17.752.534,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN). 002. Surat PPK Biro Hukum dan Humas BUA Nomor 05/S.Kel/PPK/BUA.6/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan: b. Telah menagih restitusi kepada PT FNI dan PT ICP sebesar Rp17.752.534,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN): -Telah ditindaklanjuti dengan: 003. Penyetoran sebesar Rp261.084,00 dengan NTPN Nomor 252368J06EC34NMV Tanggal 21 Desember 2023 melalui Bank BSI (PPK Biro Hukum dan Humas BUA) 004. Penyetoran sebesar Rp459.974,00 dengan NTPN Nomor EB9538J06EC34NGN Tanggal 21 Desember 2023 melalui Bank BSI (PPK Biro Hukum dan Humas BUA) 005. Penyetoran sebesar Rp8.565.542,00 dengan NTPN Nomor EB6268J06EC34NPF Tanggal 21 Desember 2023 melalui Bank BSI (PPK Biro Hukum dan Humas BUA) 006. Penyetoran sebesar Rp8.465.936,00 dengan NTPN Nomor A2BD70JUNV6JFNQE Tanggal 27 Desember 2023 melalui Bank Mandiri (PPK Biro Hukum dan Humas BUA)	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyetoran total sebesar Rp17.752.536,00 yaitu: 1. NTPN BSI Nomor 252368J06EC34NMV Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp261.084,00; 2. NTPN BSI Nomor EB9538J06EC34NGN Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp459.974,00; 3. NTPN BSI Nomor EB6268J06EC34NPF Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp8.565.542,00; 4.NTPN Bank Mandiri Nomor A2BD70JUNV6JFNQE Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp8.465.936,00. Atas bukti setoran setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	17.752.536,00
				d. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan Pejabat Pengadaan MS Blangpidie agar memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa Internet	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2691/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Pengadaan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa Internet; 002. Surat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa MS Blangpidie Nomor 233/SEK.MS.W1-A21/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan telah memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa Internet;	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1.Sekretaris MA dengan Surat Nomor 2691/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 telah memerintahkan Pejabat Pengadaan MS Blangpidie agar memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa Internet; 2. Pejabat PBJ MS Blangpidie dengan surat Nomor 233/SEK.MS.W1-A21/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 telah menyatakan akan memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa Internet. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				e. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK MS Blangpidie dalam melaksanakan pekerjaan langganan internet melalui perjanjian langsung dengan Operator Jasa Internet tanpa melalui Pihak Ketiga	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2691/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam melaksanakan pekerjaan langganan internet melalui perjanjian langsung dengan Operator Jasa Internet tanpa melalui Pihak Ketiga. 002. Surat PPK MS Blangpidie Nomor 229/SEK.MS.W1-A21/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Pejabat Komitmen Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. c. Pada Tahun 2024, Pejabat Pembuat Komitmen Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam melaksanakan pekerjaan langganan internet telah dilaksanakan melalui perjanjian langsung dengan Operator Jasa (dalam hal ini Aceh Link) tanpa melalui Pihak Ketiga.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekma telah memerintahkan PPK MS Blangpidie dalam melaksanakan pekerjaan langganan internet melalui perjanjian langsung dengan Operator Jasa Internet tanpa melalui Pihak Ketiga; 2. PPK MS Blangpidie menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Jodul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																b. PPK MS Blangpidie telah memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. c. Pada Tahun 2024, PPK MS Blangpidie dalam melaksanakan pekerjaan langganan internet telah dilaksanakan melalui perjanjian langsung dengan Operator Jasa (dalam hal ini Aceh Link) tanpa melalui Pihak Ketiga.	
				f. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Kasongan dan PA Pangkalan Bun agar lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2692/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK PA Kasongan dan PPK PA Pangkalan Bun agar lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja; 002. Surat PPK PA Kasongan Nomor 361/SEK.PA.W16-A10/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja; 003. Surat PPK PA Pangkalan Bun Nomor 461.a/SEK.PA.W16-A2/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja;	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. SEKMA telah memerintahkan PPK PA Kasongan dan PPK PA Pangkalan Bun agar lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja; 2. PPK PA Kasongan menyatakan akan lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja; 3. PPK PA Pangkalan Bun menyatakan akan lebih cermat dalam menguji pertanggungjawaban belanja. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				g. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Kasongan dan PA Pangkalan Bun supaya memperhitungkan kelebihan pembayaran dengan tagihan bulan berikutnya atau menyetorkan ke Kas Negara dengan nilai sebesar Rp5.698.841, yang terdiri dari: 1) PT Tel pada PA Kasongan sebesar Rp3.535.200; 2) PT ICP pada PA Pangkalan Bun sebesar Rp2.163.641;	1	5.698.841,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2692/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK PA Kasongan dan PPK PA Pangkalan Bun supaya memperhitungkan kelebihan pembayaran dengan tagihan bulan berikutnya atau menyetorkan ke Kas Negara dengan nilai sebesar Rp5.698.841,00 dan menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN), yang terdiri dari: 1) PT Tel pada Pengadilan Agama Kasongan Sebesar Rp3.535.200,00; 2) PT ICP pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp2.163.641,00. 002. Surat PPK PA Kasongan Nomor 361/SEK.PA.W16-A10/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Bahwa untuk Kelebihan Pembayaran Belanja Internet sebesar Rp. 3.535 200,00,- terhitung Bulan Januari Tahun 2022 s.d. September Tahun 2023, dan tagihan internet Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 505.027,00,- yang belum disetorkan ke kas negara karena pihak PT. Telkom Palangka Raya meminta perpanjangan waktu pengembalian dana refund, dan kami sudah mengirimkan surat permintaan pembayaran kepada pihak PT. Telkom Palangka Raya sejak Bulan Desember 2023 sampai terakhir tanggal 03 Mei 2024 sebagaimana surat terlampir. 003. Surat PPK PA Kasongan Nomor 371/SEK.PA.W16-A10/PW1.4/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan bahwa untuk Kelebihan Pembayaran Belanja Internet sebesar Rp. 3.535.200,00,- terhitung Bulan Januari Tahun 2022 s.d. September Tahun 2023, dan tagihan internet Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 505.027,00,- telah disetorkan ke kas negara dengan Nomor Billing 82024052021933, Nomor NTPN ED9A761QV3UNU6SD, Nomor Transaksi Bank (NTB) 946070113935 tertanggal 20 Mei 2024 sebagaimana bukti terlampir. 004. Surat PPK PA Pangkalan Bun Nomor 461.a/SEK.PA.W16-A2/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menyatakan telah memperhitungan kelebihan pembayaran langganan internet dengan nilai sebesar Rp. 2.163.641,00 dan sudah dilakukan kompensasi atau pengurangan pada tagihan bulan November Tahun 2023 dengan bukti : - Berita Acara Kesepakatan Bersama (BAKB) atau Adendum Kontrak dengan Nomor 3567/BAKBB/PJL/ICON+/2022 Tanggal 26 Oktober 2023; - Invoice Tagihan Periode 01 November 2023 s/d 30 November 2023 Nomor Invoice 2311001743 Tanggal 20 November 2023 dengan Nilai Tagihan Rp. 11.709.085; - Berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00124A Tanggal 22 November 2023 dengan Nomor SP2D 23102130200403 Tanggal 22 November 2023. 005. Penjelasan Kelebihan Setoran PA Kasongan Nilai temuan pada PA Kasongan atas Belanja Jasa Internet Tidak Sesuai Ketentuan adalah sebesar Rp3.535.200,00, namun Nilai yang disetorkan oleh PPK PA Kasongan sebesar Rp4.040.227,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp505.027,00. Nilai selisih tersebut merupakan tagihan internet Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 505.027,00 (168.342x3), sehingga nilai yang disetorkan PPK PA Kasongan adalah Rp3.535.200 + Rp505.027,00 = Rp4.040.227,00 006. Penjelasan Kelebihan Setoran PA Pangkalan Bun Dikarenakan atas temuan tersebut dilakukan tindak lanjut dengan Mekanisme pambayaran dilakukan dengan pemotongan tagihan bulan berikutnya (November 2023) Maka nilai pembayaran pada bulan November 2023 adalah sebesar (Rp14.000.000 (Nilai Sewa/DPP termasuk PPN) – Rp2.290.914 (Pemotongan Kelebihan Bayar) – Rp252.252 (Pemotongan PPh 23)) = Rp.11.456.833 -Telah ditindaklanjuti dengan: 006. Penyetoran sebesar Rp4.040.227,00 dengan NTPN Nomor ED9A761QV3UNU6SD Tanggal 20 Mei 2024 melalui Pos Indonesia (PA Kasongan) 007. Penyetoran sebesar Rp11.456.833 dengan Nomor SPM 00124A Tanggal 22 November 2023 dengan Nomor SP2D 23102130200403 Tanggal 22 November 2023 (PA Pangkalan Bun)	1	5.698.841,00		0,00		0,00		0,00	**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyetoran total sebesar Rp5.698.841,00 yaitu: 1. NTPN POS INDONESIA Nomor ED9A761QV3UNU6SD Tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp4.040.227,00; 2 Pemotongan tagihan bulan November 2023 dengan potongan sebesar Rp2.290.914 dengan Nomor SPM 00124A Tanggal 22 November 2023 (PA Pangkalan Bun). Atas bukti setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	4.040.227,00
				h. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPSPM PA Kasongan dan PA Pangkalan Bun agar lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2692/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPSPM PA Kasongan dan PPSPM PA Pangkalan Bun agar lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 002. Surat PPSPM PA Kasongan Nomor 362/SEK.PA.W16-A10/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 003. Surat PPSPM PA Pangkalan Bun Nomor 461.b/SEK.PA.W16-A2/PW1.4/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekma telah memerintahkan PPSPM PA Kasongan dan PPSPM PA Pangkalan Bun agar lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 2. PPSPM PA Kasongan dan PA Pangkalan Bun menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penyelenggaraan Kegiatan Laporan Tahunan MA Tahun 2022 Tidak Sesuai Ketentuan	1	300.000.000,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Laporan Tahunan pada Biro Sekretariat Pimpinan supaya lebih cermat dalam menetapkan metode pemilihan penyedia	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2693/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pokja Pemilihan Biro Sespim untuk: a. Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Laporan Tahunan Biro Sekretariat Pimpinan Badan Urusan Administrasi supaya lebih cermat dalam menetapkan metode pemilihan penyedia; 002. Surat Pokja Pemilihan Biro Sekretariat Pimpinan BUA Nomor 01/PJ-LAPTAH/IV/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menetapkan metode pemilihan penyedia	1								TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. SEKMA telah memerintahkan Pokja Pemilihan Biro Sespim supaya lebih cermat dalam menetapkan metode pemilihan penyedia; 2. Pokja Pemilihan Biro Setpim BUA telah menyatakan akan lebih cermat dalam menetapkan metode pemilihan penyedia. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Sekretariat Pimpinan supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran kepada PT IKI sebesar Rp300.000.000 dan menyetorkannya ke Kas Negara.	1	300.000.000,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2693/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK Biro Sespim untuk: b. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Sekretariat Pimpinan Badan Urusan Administrasi supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran kepada PT IKI sebesar Rp300.000.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN). 002. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Biro Sekretariat Pimpinan Nomor 1/Bua.5/PPK/IV/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Terkait dengan perintah Bapak Plt. Sekretaris Mahkamah Agung pada huruf b angka 2 surat dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan RAB pada SPK Nomor 6/BUA.5/SP/2/2023, salah satu komponen yang diperjanjikan antara Pejabat Penandatangan Kontrak Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan PT Imageri Kreatif Indonesia selaku Penyedia/Event Organizer (EO) adalah sewa 22 unit kendaraan selam 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perhari perkendaraan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah); 2. Bahwa pihak Penyedia selanjutnya melakukan kerjasama dengan PT Rentcar 28 selaku vendor penyedia kendaraan. Oleh karena sifatnya tidak bisa mendadak dan harus dipesan sesuai order dalam RAB, maka pihak Penyedia (PT Imageri Kreatif Indonesia) melakukan pembayaran secara utuh (gelondongan) kepada vendor untuk 22 unit kendaraan sesuai RAB; 3. Bahwa pihak vendor telah menyediakan 22 unit kendaraan sesuai pesanan Penyedia, dimana 22 unit kendaraan tersebut telah dipakai sebagai alat transportasi tamu negara sahabat selama 3 hari (daftar terlampir); 4. Bahwa PT Imageri Kreatif Indonesia selaku Penyedia telah melakukan pembayaran sewa atas 22 unit kendaraan kepada vendor sebesar Rp. 481.030.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) (kuitansi terlampir); 5. Bahwa selisih harga antara RAB dengan nominal kuitansi pembayaran yaitu sebesar Rp.13.970.000 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), adalah merupakan hak margin untuk PT Imageri Kreatif Indonesia selaku Penyedia yang bertindak sebagai Event Organizer (EO). Berdasarkan alasan		0,00	1	300.000.000,00		0,00		0,00	TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: PT IKI belum belum menyetorkan kelebihan pembayaran dengan menyampaikan bukti setoran ke Kas Negara sebesar Rp300.000.00. Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	
5	Transaksi Belanja Barang Sebesar Rp161.320.130 Tidak Sesuai Kondisi yang Senyatanya dan Kurang Dipertanggungjawabkan	1	36.488.496,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK MS Kota Subulussalam, MS Sabang, MS Blangpidie, PA Muaradua, PN Nanga Bulik, PN Meureudu, dan PA Pulang Pisau supaya lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2694/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK MS Kota Subulussalam, PPK MS Sabang, PPK MS Blangpidie, PPK PA Muaradua, PPK PN Nanga Bulik, PPK PN Meureudu, PPK PA Pulang Pisau untuk: a. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Meureudu, dan Pengadilan Agama Pulang Pisau supaya lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 002. Surat PPK MS Kota Subulussalam Nomor 541/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 003. Surat PPK MS Sabang Nomor 315/SEK.MS/W1-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 004. Surat PPK MS Blangpidie Nomor 230/SEK.MS.W1-A21/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 005. Surat PPK PA Muaradua Nomor 596/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 006. Surat PPK PN Nanga Bulik Nomor 830/SEK.PN.W16-U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 007. Surat PPK PN Meureudu Nomor 601/SEK.PN.W1-U21/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 008. Surat PPK PA Pulang Pisau Nomor 144/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: a. Akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;	1								TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPK MS Kota Subulussalam, MS Sabang, MS Blangpidie, PA Muaradua, PN Nanga Bulik, PN Meureudu, dan PA Pulang Pisau supaya lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara 2. PPK MS Kota Subulussalam, MS Sabang, MS Blangpidie, PA Muaradua, PN Nanga Bulik, PN Meureudu, dan PA Pulang Pisau telah menyatakan akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT Telah direviu PT Telah direviu PJ	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK MS Kota Subulussalam, MS Sabang, MS Blangpidie, PA Muaradua, PN Nanga Bulik, dan PA Pulang Pisau supaya mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp36.488.496	1	36.488.496,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2694/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK MS Kota Subulussalam, PPK MS Sabang, PPK MS Blangpidie, PPK PA Muaradua, PPK PN Nanga Bulik, PPK PN Meureudu, PPK PA Pulang Pisau untuk: b. Pejabat Pembuat Komitmen Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Pengadilan Agama Pulang Pisau supaya mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp36.488.496,00 dan menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan rincian: 1) Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sebesar Rp7.648.000,00; 2) Mahkamah Syar'iyah Sabang sebesar Rp1.730.000,00; 3) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebesar Rp18.047.396,00; 4) Pengadilan Agama Muaradua sebesar Rp4.010.000,00; 5) Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebesar Rp1.670.000,00; 6) Pengadilan Agama Pulang Pisau sebesar Rp3.383.100,00. 002. Surat PPK MS Kota Subulussalam Nomor 541/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 4 Juni	1	36.488.496,00		0,00		0,00	0,00	TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Penyetoran sebesar Rp7.648.000,00 dengan NTPN Nomor 0333B48VVESVKJPI Tanggal 21 Juni 2024 melalui PT Pos Indonesia (MS Kota Subulussalam) 2. Penyetoran sebesar Rp1.730.000,00 dengan NTPN Nomor E785948VVEPI1K9F Tanggal 06 Mei 2024 melalui PT Pos Indonesia (MS Sabang) 3. Penyetoran sebesar Rp15.047.396,00 dengan NTPN Nomor 342107QLUP3A5161 Tanggal 13 Mei 2024 melalui Bank	36.488.496,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	*Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah*
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							b. Telah mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja pengadaan pakaian dinas sebesar Rp7.648.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN 0333B48VVESVKJPI Tanggal 21 Juni 2024 003. Surat PPK MS Sabang Nomor 315/SEK.MS/W1-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang menyatakan: b. Telah mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja pengadaan pakaian dinas sebesar Rp1.730.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN E78S948VVEPI1K9F Tanggal 06 Mei 2024. 004. Surat PPK MS Blangpidie Nomor 230/SEK.MS.W1-A21/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan: b. Telah menyetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp15.047.398,00 atas pengeluaran Belanja Barang TA 2023 berupa Pengadaan Pakaian Dinas dan Pengadaan Pasir (Billing Terlampir). Selain itu telah disusulkan setoran ke Kas Negara atas pengeluaran Belanja Barang berupa pembelian Pasir sebesar Rp3.000.000,00 NTPN Nomor 3F0231JNFVBJ3CAH Tanggal 15 Agustus 2024 (Billing Terlampir) 005. Surat PPK PA Muaradua Nomor 595/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: b. Telah mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja pengadaan pakaian dinas pegawai sebesar Rp4.010.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN Bulik Nomor 830/SEK.PN.W16-U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: b. Telah mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja 523121 sebesar Rp1.670.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN 5C2D361QV3UC782L Tanggal 8 Mei 2024 007. Surat PPK PN Meureudu Nomor 601/SEK.PN.W1-U21/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak lagih kepada negara; 008. Surat PPK PA Pulang Pisau Nomor 144/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan: b. Telah mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp3.383.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan NTPN 2C9863CIFK75OFUQ Tanggal 8 Mei 2024; Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Penyetoran sebesar Rp7.648.000,00 dengan NTPN Nomor 0333B48VVESVKJPI Tanggal 21 Juni 2024 melalui PT Pos Indonesia (MS Kota Subulussalam) 2. Penyetoran sebesar Rp1.730.000,00 dengan NTPN Nomor E78S948VVEPI1K9F Tanggal 06 Mei 2024 melalui PT Pos Indonesia (MS Sabang) 3. Penyetoran sebesar Rp15.047.398,00 dengan NTPN Nomor 342107QLUP3A5161 Tanggal 13 Mei 2024 melalui Bank BSI (MS Blangpidie) dan sebesar Rp3.000.000,00 dengan NTPN Nomor 3F0231JNFVBJ3CAH Tanggal 15 Agustus 2024 4. Penyetoran sebesar Rp4.010.000,00 dengan NTPN Nomor E64862G4VPKQJRRP Tanggal 8 Mei 2024 melalui Bank BRI (PA Muaradua) 5. Penyetoran sebesar Rp1.670.000,00 dengan NTPN Nomor 5C2D361QV3UC782L Tanggal 8 Mei 2024 melalui PT. BUKALAPAK (PN Nanga Bulik) 6. Penyetoran sebesar Rp3.383.000,00 dengan NTPN Nomor 2C9863CIFK75OFUQ Tanggal 8 Mei 2024 melalui Bank Mandiri (PA Pulang Pisau).									BSI (MS Blangpidie) yang terdiri dari kelebihan pembayaran belanja pengadaan pakaian dinas sebesar Rp12.047.398,00 dan kelebihan pembayaran pembelian pasir sebesar Rp3.000.000,00. Selain itu telah disusulkan bukti setor ke Kas Negara atas kelebihan pembelian pasir sebesar Rp3.000.000,00 dengan NTPN Nomor 3F0231JNFVBJ3CAH Tanggal 15 Agustus 2024 4. Penyetoran sebesar Rp4.010.000,00 dengan NTPN Nomor E64862G4VPKQJRRP Tanggal 8 Mei 2024 melalui Bank BRI (PA Muaradua) 5. Penyetoran sebesar Rp1.670.000,00 dengan NTPN Nomor 5C2D361QV3UC782L Tanggal 8 Mei 2024 melalui PT. BUKALAPAK (PN Nanga Bulik) 6. Penyetoran sebesar Rp3.383.100,00 dengan NTPN Nomor 2C9863CIFK75OFUQ Tanggal 8 Mei 2024 melalui Bank Mandiri (PA Pulang Pisau), Berdasarkan bukti setoran ke Kas Negara yang telah disampaikan, diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp36.488.498,00 (Rp7.648.000,00+Rp1.730.000,00+Rp12.047.398,00+Rp3.000.000,00+Rp3.000.000,00+Rp4.010.000,00+Rp1.670.000,00+Rp3.383.100). Atas seluruh bukti NTPN setoran ke kas negara tersebut di atas telah dilakukan validasi pada SIMPONI dan OMSPAN serta dinyatakan valid. **Dengan demikian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPSPM MS Kota Subulussalam, MS Sabang, MS Blangpidie, PA Muaradua, PN Nanga Bulik, PN Meureudu, dan PA Pulang Pisau supaya lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2695/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPSPM MS Kota Subulussalam, PPSPM MS Sabang, PPSPM MS Blangpidie, PPSPM PA Muaradua, PPSPM PN Nanga Bulik, PPSPM PN Meureudu, PPSPM PA Pulang Pisau supaya lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 002. Surat PPSPM MS Kota Subulussalam Nomor 455 a/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 003. Surat PPSPM MS Sabang Nomor 316/SEK.MS/W1-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 004. Surat PPSPM MS Blangpidie Nomor 231/SEK.MS.W1-A21/PW1.4/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 005. Surat PPSPM PA Muaradua Nomor 613/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 006. Surat PPSPM PN Nanga Bulik Nomor 831/SEK.PN.W16-U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 007. Surat PPSPM PN Meureudu Nomor 602/SEK.03/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. 008. Surat PPSPM PA Pulang Pisau Nomor 145/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPSPM MS Kota Subulussalam, PPSPM MS Sabang, PPSPM MS Blangpidie, PPSPM PA Muaradua, PPSPM PN Nanga Bulik, PPSPM PN Meureudu, PPSPM PA Pulang Pisau supaya lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; 2. PPSPM MS Kota Subulussalam, PPSPM MS Sabang, PPSPM MS Blangpidie, PPSPM PA Muaradua, PPSPM PN Nanga Bulik, PPSPM PN Meureudu, PPSPM PA Pulang Pisau menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
6	Pembayaran Sewa Rumah Dinas pada PN Sibuhuan dan PN Pulang Pisau Tidak Sesuai Ketentuan	1	35.071.299,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA Memerintahkan PPK PN Sibuhuan dan PN Pulang Pisau supaya: 1) Lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp35.071.299 dan menyetorkannya ke Kas Negara.	1	35.071.299,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2696/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang tindak lanjut yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk: 1) Lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.301.299,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN);-- 002. Surat Tanggapan PPK PN Sibuhuan Nomor 819/W2-U20/SEK.03/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan PPK : 1) akan lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.301.299,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara;-- 003. Surat SEKMA Nomor 2697/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang tindak lanjut yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk: 1) Lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar RpRp31.770.000 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN);--	1	35.071.299,00		0,00		0,00		0,00	**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1.Sekretaris MA telah memerintahkan PPK PN Sibuhuan dan PPN Pulang Pisau untuk: 1) Lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya; 2) Menarik kelebihan pembayaran total sebesar Rp35.071.299,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN); 2. PPK PN Sibuhuan dan PPK PN Pulang Pisau menyatakan akan lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya serta telah menarik kelebihan pembayaran dari rekanan	35.071.299,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							004. Surat Tanggapan PPK PN Pulang Pisau Nomor 529/SEK.PN.W16-U11/KU1.4/V/2024 tgl 13 Mei 2024 yang menyatakan PPK : 1) Akan lebih cermat dalam pengujian kebenaran tagihan beserta kelengkapannya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp31.770.000 dan menyetorkannya ke Kas Negara;-- 005. Telah dilakukan penyetoran sebesar Rp31.770.000 dengan NTPN Nomor 470DB48VVEPF1KI7 Tanggal 6/05/2024 melalui Platform Tokopedia (PN Pulang Pisau);-- 006. Telah dilakukan dengan penyetoran sebesar Rp3.301.299 dengan NTPN Nomor 36C420NA04G1JULI Tanggal 6/05/2024 melalui Bank Mandiri (PN Sibuhuan)								3. Telah dilakukan penyetoran total sebesar Rp35.071.299,00 dengan bukti yaitu: a. NTPN Tokopedia Nomor 470DB48VVEPF1KI7 Tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp31.770.000,00 (PN Pulang Pisau); b. NTPN Bank Mandiri Nomor 36C420NA04G1JUU Tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp3.301.299,00 (PN Sibuhuan). Atas bukti setoran setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA Menyosialisasikan pertanggungjawaban penggunaan biaya bantuan sewa rumah dinas Hakim kepada penerima fasilitas.	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2699/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang tindak lanjut yang menyatakan bahwa Sekretaris Mahkamah Agung akan menyosialisasikan pertanggungjawaban penggunaan biaya bantuan sewa rumah dinas Hakim kepada penerima fasilitas.; 002. Surat SEKMA Nomor 2699/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang tindak lanjut, yang memerintahkan Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi untuk menyosialisasikan pertanggungjawaban penggunaan biaya bantuan sewa rumah dinas Hakim kepada penerima fasilitas; 003. Surat Kepala Biro Keuangan Nomor 669/BUA.3/PW1.4/V/2024 tentang tanggapan yang menyatakan bahwa Kepala Biro Keuangan akan melakukan sosialisasi dalam pertanggungjawaban penggunaan biaya bantuan sewa rumah dinas hakim kepada penerima fasilitas; 004. telah dilakukan sosialisasi dengan bukti dokumentasi kegiatan sosialisasi terlampir; 005. Sosialisasi telah dilakukan dengan bukti berupa Notulen, Daftar Hadir, dan Undangan terlampir.			1				**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Bukti dokumen notulensi dan daftar hadir terkait sosialisasi pertanggungjawaban penggunaan biaya bantuan sewa rumah dinas Hakim kepada penerima fasilitas.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
7	Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan	1		a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PT Medan, PTA Medan, PA Medan, PN Lubuk Pakam, Ditjen Badilum, PN Pangkalan Bun, PN Kasongan, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe supaya dalam melakukan belanja pakaian dinas memedomani SBM	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2700/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang tindak lanjut yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen PT Medan, PTA Medan, PA Medan, PN Lubuk Pakam, Ditjen Badilum, PN Pangkalan Bun, PN Kasongan, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe supaya dalam melakukan belanja pakaian dinas memedomani SBM; - 002. Surat tanggapan PPK Ditjen Badilum Nomor 688/DJU.1.04/KU1.1.1/V/2024 tgl 13 Mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 003. Surat tanggapan PPK PTA Medan 377/SEK. PTA.W2-N KU1 . 1 /v / 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 004. Surat tanggapan PPK PT Medan Nomor 2444/PPK.W2.U/Um.01.10/V/2024 tgl 08/05/2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 005. Surat tanggapan PPK Pengadilan Agama Medan Nomor 255/SEK.PA.W2-A1/KU.01.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 006. Surat tanggapan PPK PN Pangkalan BUN Nomor 626/KPN.W16-U3/PW1.4/V/2024 tgl 07 Mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 007. Surat tanggapan PPK PN Kasongan 435/SEK.PN.01.W16-U8/PW1.4/V/20 tgl 07 Mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 008. Surat tanggapan PPK PN Sibuhuan 818/W2.U20/PPK/V/20 tgl 07 Mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 009. Surat PPK tanggapan PA Sibuhuan Nomor 109/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tgl 07 Mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 010. Surat PPK tanggapan PN Kabanjahe Nomor 844/SEK.03/KU.1/V/2024 tgl 07 mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; - 011. Surat PPK tanggapan PN Lubuk Pakam Nomor W2.U4/5947/KU01.10/V/2024 tgl 07 mei 2024 yang menyatakan PPK dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA memerintahkan PPK PT Medan, PTA Medan, PA Medan, PN Lubuk Pakam, Ditjen Badilum, PN Pangkalan Bun, PN Kasongan, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe supaya dalam melakukan belanja pakaian dinas memedomani SBM 2. PPK PT Medan, PTA Medan, PA Medan, PN Lubuk Pakam, Ditjen Badilum, PN Pangkalan Bun, PN Kasongan, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe (melalui surat terpisah) telah menyatakan dalam melakukan belanja pakaian dinas akan memedomani SBM; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				2. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan KPA PTA Medan, PA Medan, PN Pangkalan Bun, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe supaya lebih cermat dalam menyusun penganggaran pakaian dinas sesuai dengan SBM	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2701/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang SEKMA memerintahkan KPA PTA Medan, PA Medan, PN Pangkalan Bun, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe supaya lebih cermat dalam menyusun penganggaran pakaian dinas sesuai dengan SBM; - 002. Surat KPA PTA Medan kepada SEKMA Nomor 377/SEK. PTA.W2-A/KU 1 .1/V/2024 tgl 8 mei 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Medan akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM; - 003. Surat KPA PA Medan Nomor 256/SEK.PA.W2-A1/KU.01.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang Kuasa Pengguna Anggaran PA Medan akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM; - 004. Surat KPA PN Pangkalan BUN Nomor: 627/KPN.W16-U3/PW1.4/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang Kuasa Pengguna Anggaran PN Pangkalan BUN akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM; - 005. Surat KPA PA Sibuhuan Nomor 109/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tgl 07 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang Kuasa Pengguna Anggaran PA Sibuhuan akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM; - 006. Surat KPA PN Kabanjahe Nomor 843/SEK.03/KU.1/V/2024 tgl 07 mei 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang Kuasa Pengguna Anggaran PN Kabanjahe akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM; - 007. Surat KPA PN Sibuhuan Nomor 23/W2-U20/PPK/V/2024 tgl 08 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang berisi tentang Kuasa Pengguna Anggaran PN Sibuhuan akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan KPA PTA Medan, PA Medan, PN Pangkalan Bun, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe supaya lebih cermat dalam menyusun penganggaran pakaian dinas seeuai dengan SBM 2. KPA PTA Medan, PA Medan, PN Pangkalan Bun, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, dan PN Kabanjahe (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan belanja pakaian dinas serta memedomi SBM; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan	1	7.480.000,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan PPK PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2702/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang SEKMA memerintahkan PPK PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 002. Surat PPK PTA Medan kepada SEKMA Nomor 381/SEK.PTA.W2-A/KU1.1/V/2024 tgl 8 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PTA Medan akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 003. Surat PPK PT Medan kepada SEKMA Nomor 2447/PPK.W2.U/Um.01.10/V/2025 tgl 06 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PT Medan akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 004. Surat PPK PN Sibuhuan kepada SEKMA Nomor 825/W2-U20/SEK.03/V/2024 tgl 08 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PN Sibuhuan akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 005. Surat PPK PN Lubuk Pakam kepada SEKMA Nomor W2.U4/4228/UM.01.10/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PN Lubuk Pakam akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 006. Surat PPK PN Kabanjahe kepada SEKMA Nomor 853/SEK.03/KU1/V/2024 tgll 8 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PN Kabanjahe akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 007. Surat PPK PA Pulang Pisau kepada SEKMA Nomor 132/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/IV/2024 tgll 6 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PA Pulang Pisau akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas - 008. Surat PPK PA Muaradua kepada SEKMA Nomor 597/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tgll 13 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPK PA Muaradua akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPK PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas; 2. PPK PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan perjalanan dinas dan dalam memberikan persetujuan pembayaran perjalanan dinas. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan PPSPM PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: - 001. Surat SEKMA Nomor 2702/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang SEKMA memerintahkan PPSPM PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 002. Surat PPSPM PTA Medan kepada SEKMA Nomor 381/SEK.PTA.W2-A/KU1.1/V/2024 tgl 8 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PTA Medan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 003. Surat PPSPM PT Medan kepada SEKMA Nomor 2440/PPSPM.W2.U/Um.01.10/V/2025 tgl 06 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PT Medan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 004. Surat PPSPM PN Sibuhuan kepada SEKMA Nomor 820/W2.U20/SEK.03/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PN Sibuhuan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 005. Surat PPSPM PN Lubuk Pakam kepada SEKMA Nomor W2.U4/4229/UM.01.10/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PN Lubuk Pakam akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 006. Surat PPSPM PN Kabanjahe kepada SEKMA Nomor 854/SEK.03/KU1/V/2024 tgll 8 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PN Kabanjahe akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 007. Surat PPSPM PA Pulang Pisau kepada SEKMA Nomor 133/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/IV/2024 tgll 6 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PA Pulang Pisau akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; - 008. Surat PPSPM PA Muaradua kepada SEKMA Nomor 619/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tgll 13 mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang berisi tentang PPSPM PA Muaradua akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar.	1								**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPSPM PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar 2. PPSPM PTA Medan, PT Medan, PN Sibuhuan, PN Lubuk Pakam, PN Kabanjahe, PA Pulang Pisau, dan PA Muaradua (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung pertanggungjawaban uang perjalanan dinas secara lengkap dan benar; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan PPK PTA Medan untuk menarik kelebihan pembayaran kepada pelaku perjalanan dinas sesuai Lampiran 16 dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.480.000	1	7.480.000,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan:- 001. Surat Plt SEKMA Nomor 2703/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Lanjut yang memerintahkan PPK PTA Medan untuk menarik kelebihan pembayaran kepada pelaku perjalanan dinas sesuai lampiran 16 dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.480.000,00, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN);– 002. Surat PPK PTA Medan Nomor 381/SEK.PTA.W2-A/KU1.1/V/2024 tgl 10 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan : 1). Akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materill atas bukti hak tagih kepada negara, 2). Telah menarik kelebihan pembayaran kepada pelaku perjalanan dinas sebesar Rp.7.480.000 serta menyetorkan ke kas negara, berdasarkan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) ;– atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan NTPN Nomor , Tanggal 10 Mei 2023 3. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp.7.480.000 dengan NTPN Nomor 234B36U8EUGQJNHF Tanggal 10/05/2024 melalui Bank BRI	1	7.480.000,00		0,00		0,00		0,00	**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyetoran total sebesar Rp7.480.000,00 yaitu penyetoran dengan bukti NTPN BRI Nomor 234B36UBEUGQJNHF Tanggal 10 Mei 2024 sebesar Rp.7.480.000. Atas bukti setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti;** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ	7.480.000,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				d. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA menyosialisasikan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada seluruh satker	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2704/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan, yang menyatakan bahwa Sekretaris Mahkamah Agung akan menyosialisasikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada seluruh Satuan Kerja; 002. Surat SEKMA Nomor 2705/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Pakaian Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan yang memerintahkan Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi untuk menyosialisasikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada seluruh Satuan Kerja ; 003. Surat tanggapan Kepala Biro Keuangan Nomor 670/BUA.3/PW1.4/V/2024 tgl 7 mei 2024 tentang tanggapan rekomendasi temuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas belum sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa Kabiro Keuangan akan melakukan sosialisasi dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada seluruh satuan kerja, 004. Bukti Sosialisasi mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas, 005. Sosialisasi telah dilakukan dengan bukti berupa Notulen, Daftar Hadir, dan Undangan terlampir.					1				TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Bukti Tindak Lanjut belum dilengkapi dengan dokumen daftar hadir dan notulensi terkait sosialisasi mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
9	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 pada Tiga Satuan Kerja Sebesar Rp20.810.742	1	20.810.742,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Palembang, PN Medan, dan PA Palembang supaya Lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekejaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2706/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK PN Palembang, PN Medan, dan PA Palembang untuk lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 002. Surat PPK PN Palembang Nomor 1193/SEK.W6-U1/KU2.1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan PPK PN Palembang akan lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan; 003. Surat PPK PN Medan Nomor W2.U1/6508/KU.01.10/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan PPK PN Medan akan lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan; 004. Surat PPK PA Palembang Nomor 1044/PPK.W6-A1/PW1.4/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan PPK PA Palembang akan lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.	1								TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPK PN Palembang, PN Medan, dan PA Palembang supaya lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. PPK PN Palembang, PN Medan, dan PA Palembang (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Palembang, PN Medan, dan PA Palembang supaya Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp20.810.742, dengan rincian: 1) CV CBP pada PN Palembang sebesar Rp367.500; 2) Ms pada PN Palembang sebesar Rp2.403.520; 3) CV KH pada PN Medan sebesar Rp5.607.345; 4) PT ASA pada PA Palembang sebesar Rp12.432.377	1	20.810.742,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2706/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan PPK PN Palembang, PN Medan, dan PA Palembang untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp20.810.742, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian: 1) CV CBP pada PN Palembang sebesar Rp367.500; 2) MS pada PN Palembang sebesar Rp2.403.520; 3) CV KH pada PN Medan sebesar Rp5.607.345; 4) PT ASA pada PA Palembang sebesar Rp12.432.377; 002. Surat PPK PN Palembang Nomor 1193/SEK.W6-U1/KU2.1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan PPK PN Palembang telah menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2.771.020, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian: 1) CV CBP pada PN Palembang sebesar Rp367.500; 2) MS pada PN Palembang sebesar Rp2.403.520; 003. Surat PPK PN Medan Nomor W2.U1/6508/KU.01.10/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan PPK PN Medan telah menarik kelebihan pembayaran CV KH pada PN Medan dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar sebesar Rp5.607.345, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN); 004. Surat PPK PA Palembang Nomor 1044/PPK.W6-A1/PW1.4/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan PPK PA Palembang telah menarik kelebihan pembayaran PT ASA pada PA Palembang dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp12.432.377, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN); 005. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp367.500 dengan bukti NTPN Nomor C69F27QLUP34PDL2 tanggal 07/05/2024 melalui Bank Central Asia (PN Palembang); 006. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.403.520 dengan bukti NTPN Nomor 219BF2G4VPKQBG4E tanggal 07/05/2024 melalui Bank Central Asia (PN Palembang); 007. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp5.607.345 dengan bukti NTPN Nomor A652755DF9C4UM1P tanggal 13/05/2024 melalui Kantor Pos Indonesia (PN Medan); 008. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp12.432.377 dengan bukti NTPN Nomor A417C6U8EUGNB10K tanggal 06/05/2024 melalui BOP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (PA Palembang).	1	20.810.742,00		0,00		0,00		0,00	TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyetoran total sebesar Rp20.810.742,00 dengan bukti: 1. NTPN BCA Nomor C69F27QLUP34PDL2 tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp367.500 (PN Palembang); 2. NTPN BCA Nomor 219BF2G4VPKQBG4E tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp2.403.520 (PN Palembang); 3. NTPN Pos Indonesia Nomor A652755DF9C4UM1P tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp5.607.345 (PN Medan); 4. NTPN BPD Sumsel Babel Nomor A417C6U8EUGNB10K tanggal 06/05/2024 sebesar Rp12.432.377 (PA Palembang). Atas bukti setoran setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	20.810.742,00
10	Kekurangan Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar Rp329.572.497	1		a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA Kasongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2707/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA Kasongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara; 002. Surat PPK Biro Keuangan BUA Nomor 87/BUA.3.04/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara; 003. Surat PPK MS Sabang Nomor 312/SEK.MS/W1-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pe mbuat Komitmen MS Sabang akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara; 004. Surat PPK PN Meulaboh Nomor 334/SEK.PN-W1-U6/PW1.1.1/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PN Meulaboh akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara; 005. Surat PPK MS Meureudu Nomor 254/SEK.MS.W1-A13/PW1.1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen MS Meureudu akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara;	1								TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPK Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA Kasongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas bukti hak tagih kepada negara;	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							007. Surat PPK MS Kota Subulussalam Nomor 452/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen MS Kota Subulussalam akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 008. Surat PPK PTA Medan Nomor 378/SEK.PTA.W2-A/KU1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PTA Medan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 009. Surat PPK PT Medan Nomor 2445/PPK.W2.U/Um.01.10/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PT Medan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 010. Surat PPK PA Medan Nomor 252/SEK.PA.W2-A1/KU.01.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PA Medan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 011. Surat PPK PA Sibuhuan Nomor 110/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PA Sibuhuan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 012. Surat PPK PN Kabanjahe Nomor 820/SEK.03/KU1/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PN Kabanjahe akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 013. Surat PPK PN Nangabulik Nomor 827/SEK.PN.W16-U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PN Nangabulik akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 014. Surat PPK PA Nangabulik Nomor 364/SEK.PA.W16-A7/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PA Nangabulik akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 015. Surat PPK PA Pulang Pisau Nomor 136/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PA Pulang Pisau akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 016. Surat PPK PA Kasongan Nomor 353/SEK.PA.W16-A10/PW1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PA Kasongan, akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 017. Surat PPK PN Pangkalan Bun Nomor 623/KPN.W16-U3/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PN Pangkalan Bun BUA akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara; 018. Surat PPK PA Pangkalan Bun Nomor 458a/SEK.PA.W16-A2/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen PA Pangkalan Bun akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara.							2. PPK Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA Kasongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun (melalui surat terpisah) telah menyatakan akan lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas bukti hak tagih kepada negara. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA KAsongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya: 1) Memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPH Pasal 4 ayat (2), dan PPN; 2) Menagih kekurangan pungut PPN sebesar Rp6.343.821; 3) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh sebesar Rp323.228.676;	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2707/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA Kasongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya: 1) Memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN; 2) Menagih kekurangan pungut PPN sebesar Rp6.343.821,00 sesuai rincian terlampir; 3) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh sebesar Rp323.228.676,00 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 002. Surat Bendahara Pengeluaran BUA Nomor 123/BUA.3.04/KU1.1/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran BUA: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp222.246.742; Surat Kuasa Pengguna Anggaran BUA Nomor 812/BUA.3/KU.1.1.2/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran BUA untuk: 1) Memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp222.246.742; Dan Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Nomor S-212/KPP.0601/2024 bulan Juni 2024 yang menyampaikan atas Pengadaan Asuransi Barang Milik Negara sesuai dengan PMK-97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan Jaminan Kesehatan Hakim Ad Hoc sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, terutang PPh Pasal 23 sebagaimana dijelaskan menurut peraturan perundangan. 003. Surat Bendahara Pengeluaran MS Sabang Nomor 313/SEK.MS/W1-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran MS Sabang: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.033.903 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.018.016 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 004. Surat Bendahara Pengeluaran PN Meulaboh Nomor 335/SEK.PN-W1-U8/PW1.1.1/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PN Meulaboh: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak 006. Surat Bendahara Pengeluaran PN Blangpidie Nomor 455/SEK.03.PN.W1-U20/PW1.4/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.072.914 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.043.964 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 007, Surat Bendahara Pengeluaran MS Kota Subulussalam Nomor 453/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran MS Kota Subulussalam: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp2.817.199 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.873.874 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 008. Surat Bendahara Pengeluaran PTA Medan Nomor 379/SEK.PTA.W2-A/KU1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PTA. Medan: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.151.830 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.497.293 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak;			1					**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa: 1. MA telah menyampaikan bukti tindaklanjut penyetoran pajak sebesar Rp107.968.767. Atas setoran tersebut tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Omspan 2. MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Bukti setor temuan atas PPh Pasal 23 pada Satker BUA sebesar Rp222.246.742.** Telah direviu KT. Telah direviu PT. Telah direviu PJ.	107.968.767,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							009. Surat Bendahara Pengeluaran PT Medan Nomor 2449/PPK.W2.U/Um.01.10/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PT. Medan: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp4.730.000 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 010. Surat Bendahara Pengeluaran PA Medan Nomor 253/SEK.PA.W2-A1/KU.01.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Bendahara Pengeluaran PA Medan Nomor 345/SEK.03.PA.W2-A1/KU.1.1.1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PA Medan: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 21 Tahun 2022 sebesar Rp450.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp632.100, PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp2.945.460 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.432.430 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 011. Surat Bendahara Pengeluaran PA Sibuhuan Nomor 111/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PA Sibuhuan: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2022 sebesar Rp12.014.634 dan Tahun 2023 sebesar Rp6.008.023, PPN Tahun 2022 sebesar Rp4.516.501 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 012. Surat Bendahara Pengeluaran PN Kabanjahe Nomor 821/SEK.03/KU1/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PN Kabanjahe: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp2.708.844 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.027.025 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 013. Surat Bendahara Pengeluaran PN Nangabulik Nomor 828/SEK.PN.W16-U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PN Nangabulik: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 22 Tahun 2023 sebesar Rp221.770, PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.033.021, PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.286.573, dan PPN Tahun 2023 sebesar Rp1.827.320 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 014. Surat Bendahara Pengeluaran PA Nangabulik Nomor 364/SEK.PA.W16-A7/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PA Nangabulik: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.810.811 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 015. Surat Bendahara Pengeluaran PA Pulang Pisau Nomor 138/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PA Pulang Pisau: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.036.200 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.027.027 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 016. Surat Bendahara Pengeluaran PA Kasongan Nomor 370/SEK.PA.W16-A10/PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PA Kasongan: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.864.100 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.891.773 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 017. Surat Bendahara Pengeluaran PN Pangkalan Bun Nomor 624/KPN.W16-U3/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PN Pangkalan: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.054.545 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.027.027 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 018. Surat Bendahara Pengeluaran PA Pangkalan Bun Nomor 458c/SEK.PA.W16-A2/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran PA Pangkalan Bun: 1) Akan memedomani ketentuan pemungutan atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23; 2) Telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait kekurangan pungut PPh Pasal 21 Tahun 2022 sebesar Rp1.635.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.952.000 dan PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.018.178 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.290.905 dan menyetorkan pajak ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak; 019. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.033.903 dengan bukti NTPN Nomor 70C296707CDS7AVT tanggal 05/12/2023, PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.008.016 dengan bukti NTPN Nomor 70C296707CDS7AVT tanggal 05/12/2023, dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp10.000 dengan bukti NTPN Nomor BA99E2M2NBGNL6UF tanggal 06/05/2024 melalui Kantor Pos Indonesia (MS Sabang); 020. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.075.061 dengan bukti NTPN Nomor 37E391FKSEVDFLC tanggal 21/11/2023 dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.046.847 dengan bukti NTPN Nomor 1AC173FKSEVJH5K tanggal 21/11/2023 melalui Kantor Pos Indonesia (PN Meulaboh); 021. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.003.567 dengan bukti NTPN Nomor 2836D6704D18AGKH tanggal 05/12/2023 dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.250.000 dengan bukti NTPN Nomor 2836D6704D18AGKH tanggal 05/12/2023 melalui Kantor Pos Indonesia (MS Meureudu); 022. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.072.914 dengan bukti NTPN Nomor DB6F8745K6RHQ2MC tanggal 21/11/2023 dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.043.964 dengan bukti NTPN Nomor A4FF41PKL7DF9PRU tanggal 21/11/2023 melalui Kantor Pos Indonesia (PN Blangpidie);											

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							023. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp2.617.199 dengan rincian sebagai berikut: a. Rp236.364 dengan bukti NTPN Nomor 908CD745K90JP9GS tanggal 21/11/2023; b. Rp236.364 dengan bukti NTPN Nomor 7027000PLI5GEKFC tanggal 21/11/2023; c. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 5F9D72M251SLVSJ5 tanggal 21/11/2023; d. Rp236.364 dengan bukti NTPN Nomor 06C041PKL7A9DPFE tanggal 21/11/2023; e. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 33E858QJ41B0GQCJ tanggal 21/11/2023; f. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor F2A9F00PLI5GQ9IO tanggal 21/11/2023; g. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor E16S300PLI5H73KK tanggal 21/11/2023; h. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor FD7AD4ET4N1F0DJV tanggal 21/11/2023; i. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 1E4DE4ET4N1FBD5B tanggal 21/11/2023; j. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor C1CE44ET4N1F9T87 tanggal 21/11/2023; k. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor AC07B1PKL7AA7IL2 tanggal 21/11/2023; l. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 724445BAKHJRQ0TA tanggal 21/11/2023; Dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp1.873.874 dengan rincian sebagai berikut: a. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 1E98280J41B1BPKV tanggal 21/11/2023, b. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor B13263IFKSF39FK4 tanggal 21/11/2023; c. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor A6DD280J41B1EKGF tanggal 21/11/2023; d. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 2A2983IFKSF3CDEK tanggal 21/11/2023; e. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 8G29F0T75CNU987 tanggal 21/11/2023; f. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 7A0995BAKHJS8LMI tanggal 21/11/2023; g. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor 52D373IFKSF3MANO tanggal 21/11/2023; h. Rp234.234 dengan bukti NTPN Nomor B47B16704C68S3ND tanggal 21/11/2023; Melalui Kantor Pos Indonesia (MS Kota Subulussalam); 024. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.151.830 dengan bukti NTPN Nomor BGF643IG774A1HPS tanggal 10/05/2024 dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.497.293 dengan bukti NTPN Nomor 4438100Q7SQPN3U7 tanggal 10/05/2024 melalui Bank Rakyat Indonesia (PTA Medan); 025. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp4.730.000 dengan bukti NTPN Nomor BDOCA4ETN1FBIA8J tanggal 08/05/2024 melalui [illegible]; 026. Telah ditindaklanjuti dengaan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 21 sebesar Rp1.082.500 yang terdiri dari penyetoran Tahun 2022 sebesar Rp450.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp632.100 dengan bukti NTPN Nomor F84F0745NBP7NMV8 tanggal 20/12/2023, PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp2.945.460 dengan rincian sebesar Rp1.352.305 dengan bukti NTPN Nomor 9D91D0001RK3PCE8 tanggal 21/03/2024 dan Rp1.593.155 dengan bukti NTPN Nomor 55B350T700063V30 tanggal 25/06/2024 melalui Kantor Pos Indonesia, dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.432.430 dengan bukti SPM Nomor 00086T/401803/2023 dan SP2D Nomor 2312313040043911 tanggal 20/10/2023 (PA Medan); 027. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2022 sebesar Rp12.014.634 dengan rincian sebesar Rp1.251.108 dengan bukti NTPN Nomor 011262M2NC8J9UJO tanggal 08/05/2024 dan Rp10.763.526 dengan bukti NTPN Nomor 189D20T7NN245HKL tanggal 08/05/2024, PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2023 sebesar Rp6.008.023 dengan rincian sebesar Rp5.243.788 dengan bukti NTPN Nomor 011262M2NC8J9UJO tanggal 08/05/2024 dan Rp764.235 dengan bukti NTPN Nomor 189D20T7NN245HKL tanggal 08/05/2024, dan PPN Tahun 2022 sebesar Rp4.516.501 dengan bukti NTPN Nomor A284D5BB6RVKFMR5 tanggal 08/05/2024 melalui Bank Sumatera Utara (PA Sibuhuan); 028. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp2.708.844 dengan bukti NTPN Nomor FDED7745K799BL9C tanggal 24/11/2023 melalui Bank Mandiri dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.027.025 dengan bukti NTPN Nomor D9A008GJ41RTVT63 tanggal 30/11/2023 melalui Bank Central Asia (PN Kabanjahe); 029. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 22 Tahun 2023 sebesar Rp221.770 dengan bukti NTPN Nomor D09GA1PL7I3THLC8 tanggal 13/05/2024, PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.033.021 dengan bukti NTPN Nomor 20C894ETN1S6QBA6 tanggal 13/05/2024, PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.286.573 dengan bukti NTPN Nomor 2725D0T7NNIMTKS5 tanggal 13/05/2024, dan PPN Tahun 2023 sebesar Rp1.827.320 dengan bukti NTPN Nomor 4329D00Q7SV4RCHN tanggal 13/05/2024 melalui Bukalapak (PN Nangabulik); 030. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.810.811 dengan bukti NTPN Nomor 0054731077DRA4C0 tanggal 13/05/2024 melalui Bank Rakyat Indonesia (PA Nangabulik); 031. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.036.200 dengan bukti NTPN Nomor BBD2700Q7SGDQU6K tanggal 08/05/2024 dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp3.027.027 dengan bukti NTPN Nomor BBD2700Q7SGDQU6K tanggal 08/05/2024 melalui Bank Mandiri (PA Pulang Pisau); 032. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.864.100 dengan bukti NTPN Nomor 1D90100Q7U0FTP0V tanggal 20/05/2024 melalui Kantor Pos Indonesia dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.891.773 dengan bukti SPM Nomor 00165A, SP2D Nomor 230441302001631 tanggal 14/11/2023 sebesar Rp360.000 dan SPM Nomor 00198A, SP2D Nomor 230441302001928 sebesar Rp3.174.388 tanggal 14/12/2023 (PA Kasongan); 033. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.054.545 dengan bukti NTPN Nomor 418EF6704C0G563E tanggal 23/11/2023 dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp3.027.027 dengan bukti NTPN Nomor C91E11PKLZUIUIRI tanggal 23/11/2023 melalui Bank Rakyat Indonesia (PN Pangkalan Bun); 034. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pajak ke Kas Negara atas PPh Pasal 21 Tahun 2022 sebesar Rp1.635.000 dengan bukti NTPN Nomor 007683IFNSLP4888 tanggal 05/12/2023, PPh Pasal 21 Tahun 2023 sebesar Rp1.952.000 dengan bukti NTPN Nomor BBB3280J71HLCTKV tanggal 05/12/2023, PPh Pasal 23 Tahun 2022 sebesar Rp3.018.178 dengan bukti NTPN Nomor 7C4364ETN3GL7AOS tanggal 27/05/2024, dan PPh Pasal 23 Tahun 2023 sebesar Rp2.290.905 dengan bukti NTPN Nomor BB70E3IG78U9L19U tanggal 27/05/2024 melalui Bank Rakyat Indonesia (PA Pangkalan Bun); 035. Penjelasan setoran yang telah dilaksanakan oleh Satker.										
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPSPM Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA KAsongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2707/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA Kasongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun supaya lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 002. Surat PPSPM BUA Nomor 86/BUA.3.04/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUA akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP;	1							TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan PPSPM Satker terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							003. Surat PPSPM MS Sabang Nomor 314/SEK.MS/W1-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar MS Sabang akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 004. Surat PPSPM PN Meulaboh Nomor 336/SEK.PN-W1-U8/PW1.1.1/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PN Meulaboh akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 005. Surat PPSPM MS Meureudu Nomor 256/SEK.MS.W1-A13/PW1.1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar MS Meureudu akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 006. Surat PPSPM PN Blangpidie. Nomor 454/SEK.03.PN.W1-U20/PW1.4/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PN Blangpidie akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 007. Surat PPSPM MS Kota Subulussalam Nomor 454/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar MS Kota Subulussalam akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 008. Surat PPSPM PTA Medan Nomor 380/SEK.PTA.W2-A/KU1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PTA Medan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 009. Surat PPSPM PT Medan Nomor 2440/PPK.W2.U/Um.01.10/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PT Medan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 010. Surat PPSPM PA Medan Nomor 254/SEK.PA.W2-A1/KU.01.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PA Medan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 011. Surat PPSPM PA Sibuhuan Nomor 112/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PA Sibuhuan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 012. Surat PPSPM PN Kabanjahe Nomor 822/SEK.03/KU1/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PN Kabanjahe akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 013. Surat PPSPM PN Nangabulik 829/SEK.PN.W16-U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PN Nangabulik akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 014. Surat PPSPM PA Nangabulik Nomor 364/SEK.PA.W16-A7/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PA Nangabulik akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 015. Surat PPSPM PA Pulang Pisau Nomor 137/SEK.PA.W16-A12/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PA Pulang Pisau akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 016. Surat PPSPM PA Kasongan Nomor 355/SEK.PA.W16-A10/PW1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PA Kasongan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 017. Surat PPSPM PN Pangkalan Bun Nomor 625/KPN.W16-U3/PW1.4/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PN Pangkalan Bun akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP; 018. Surat PPSPM PA Pangkalan Bun Nomor 458b/SEK.PA.W16-A2/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PA Pangkalan Bun akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP.								2. PPSPM Biro Keuangan BUA, MS Sabang, PN Meulaboh, MS Meureudu, PN Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PTA Medan, PT Medan, PA Medan, PA Sibuhuan, PN Kabanjahe, PN Nangabulik, PA Nangabulik, PA Pulang Pisau, PA KAsongan, PN Pangkalan Bun, dan PA Pangkalan Bun menyatakan akan lebih cermat dalam melakukan pengujian atas SPP Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. **Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.**	
11	Pelaksanaan Tender Konstruksi Pada 14 Paket Tender Tidak Sesuai Ketentuan	1		a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA Merevisi Keputusan Sekretaris MA Nomor 153/SEK/SK/II/2021 tentang Penetapan UKPBJ MA dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: Surat SekMA Nomor 2709/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang tindak lanjut yang berisi tentang SekMA telah merevisi Keputusan SekMA Nomor 153/SEK/SK/II/2021 tentang Penetapan UKPBJ MA menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan Keputusan SekMA Nomor 272/SEK/SK.PL1.x1/111/2024 tanggal 8 Maret 2024; 002.Surat Tanggapan Pokja Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 3/Bua.UKPBJ/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Keputusan SekMA Nomor 153/SEK/SK/II/2021 telah direvisi dengan Keputusan SekMA Nomor 272/SEK/SK.PL1.x1/111/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Mahkamah Agung R.I; 003.Bukti Keputusan SekMA Nomor 272/SEK/SK.PL1.x1/111/2024 tanggal 8 Maret 2024 terlampir	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA dengan surat nomor 2709/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 menerangkan bahwa Sekma telah merevisi Keputusan Sekma Nomor 153/SEK/SK/II/2021 tentang Penetapan UKPBJ MA dengan Keputusan SekMA Nomor 272/SEK/SK.PL1.x1/111/2024 tanggal 8 Maret 2024; 2. Pokja Ketua UKPBJ melalui Surat Nomor 3/Bua.UKPBJ/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyatakan bahwa Keputusan SekMA Nomor 153/SEK/SK/II/2021 telah direvisi dengan Keputusan SekMA Nomor 272/SEK/SK.PL1.x1/111/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Mahkamah Agung R.I; **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT. Telah direviu PT. Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Kepala UKPBJ supaya meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa UKPBJ	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan; 001. Surat SEKMA Nomor 2706/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pelaksanaan Tender Konstruksi Pada 14 Paket Tender Tidak Sesuai Ketentuan yang berisi tentang Sekretaris MA memerintahkan Kepala UKPBJ supaya meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa UKPBJ; 002.Surat Tanggapan Pokja Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 3/Bua.UKPBJ/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa diingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Undangan Koordinasi Nomor 1/Bua.UKPBJ/4/2024 tanggal 17 April 2024 dan untuk tidak memberikan kesempatan untuk penambahan persyaratan yang dapat mengurangi keberpihakan terhadap salah satu penyedia dengan cara memperkuat pengawasan yang langsung dan berkala.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan Kepala UKPBJ supaya meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa UKPBJ;	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	*Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah*
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																2. Ketua Unit Pokja PBJ melalui surat Nomor 3/Bua.UKPBJ/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan MA sesuai Undangan Koordinasi Nomor 1/Bua.UKPBJ/4/2024 tanggal 17 April 2024 menyatakan untuk tidak memberikan kesempatan untuk penambahan persyaratan yang dapat mengurangi keberpihakan terhadap salah satu penyedia dengan cara memperkuat pengawasan yang langsung dan berkala. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Pokja Pemilihan supaya lebih cermat dalam menetapkan persyaratan kualifikasi	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2710/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April tentang Pelaksanaan Tender Konstruksi Pada 14 Paket Tender Tidak Sesuai Ketentuan yang berisi tentang Sekma memerintahkan Pokja Pemilihan supaya lebih cermat dalam menetapkan persyaratan kualifikasi; 002.Surat Tanggapan Pokja Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 3/Bua.UKPBJ/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 untuk tidak memberikan kesempatan untuk penambahan persyaratan yang dapat mengurangi keberpihakan terhadap salah satu penyedia dengan cara memperkuat pengawasan yang langsung dan berkala.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan Pokja Pemilihan supaya lebih cermat dalam menetapkan persyaratan kualifikasi; 2. Ketua Unit Pokja PBJ Nomor 3/Bua.UKPBJ/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyatakan untuk tidak memberikan kesempatan untuk penambahan persyaratan yang dapat mengurangi keberpihakan terhadap salah satu penyedia dengan cara memperkuat pengawasan yang langsung dan berkala. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
12	Pelaksanaan Pembangunan 18 Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor di Lingkungan MA Tidak Sesuai Ketentuan	1	11.190.778.700,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Meureudu, PN Blangpidie, MS Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, PA Pangkalan Balai, PA Martapura, PA Muaradua, PA Pagar Alam, PA Kasongan, PA Nanga Bulik, PA Pulang Pisau, PN Nanga Bulik, PN Pulang Pisau dan PPK BUA supaya: 1) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9.766.485.034 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut: a) PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp70.858.406; b) PT PNA KSO CV K pada PN Blangpidie sebesar Rp43.579.462; c) CV AL pada PN Blangpidie sebesar Rp30.261.230; d) PT MEGA KSO CV MK pada MS Blangpidie sebesar Rp141.918.885; e) PT PB pada MS Kota Subulussalam sebesar Rp651.699.904; f) PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp109.599.709; g) PT CD pada PA Sibuhuan sebesar Rp958.574.003; h) PT IDK pada PA Pangkalan Balai sebesar Rp577.475.524; i) PT DITS pada PA Martapura sebesar	1	9.766.485.034,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2711/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen PN Meureudu, PN Blangpidie, MS Blangpidie, MS Kota Subulussalam, PN Sibuhuan, PA Sibuhuan, PA Pangkalan Balai, PA Martapura, PA Muaradua, PA Pagar Alam, PA Kasongan, PA Nanga Bulik, PA Pulang Pisau, PN Nanga Bulik, PN Pulang Pisau, BUA : 1). Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN): a). PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp 70.858.406,00; b). PT PNA KSO CV K pada PN Blangpidie sebesar Rp 43,579.462,00; c). CV AL pada PN Blangpidie sebesar Rp 30.261.230,00; d). PT MEGA KSO CV K pada MS Blangpidie sebesar Rp 141.918.885,00; e). PT PB pada MS Kota Subulussalam sebesar Rp 651.699.904,00; f). PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp 109.599.709,00; g). PT CD pada PA Sibuhuan sebesar Rp 958.574.003,00; h). PT IDK pada PA Pangkalan Balai Rp 577.475.524,00; i). PT DITS pada PA Martapura Rp 348.071.709,00; j). PT IEU pada PA Muaradua Rp 139.121.866,00; k). PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam Rp 53.800.327,00; l). PT HIU pada PA Kasongan Rp 645.390.189,00; m). PT BER pada PA Nanga Bulik Rp 786.583.164,00 n). PT BUK pada PA Pulang Pisau Rp 2.298.471.872,00; o). PT RSS pada PN Nanga Bulik Rp 148.844.466,00; p). CV SN pada PN Pulang Pisau Rp 67.902.266,00; q). PT BA pada Badan Urusan Administrasi Rp 2.670.226.459,00; r). CV AJM pada Badan Urusan Administrasi Rp 24.105.593,00. 002. Surat PPK PN Meureudu Nomor 604/SEK.W1-U21/KP3.4.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Meureudu : 1) akan Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 70.858.406,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara; 003. Surat PPK PN Blangpidie Nomor 470/SEK.PN.W1-U20/PW1.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Blangpidie : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 43.579.462,00, Rp 30.261.230,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 004. Surat Direktur PT Mitra Eclat Gunung Arta KSO CV. Mayang Karya Nomor 20/Mega-MK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas 005. Surat PPK MS Kota Subulussalam Nomor 456.a/SEK.MS.W1-A23/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK MS Kota Subulussalam : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 651.699.904,00dan menyetorkannya ke kas negara; 006. Surat Direktur PT Peduli Bangsa (PB) Nomor 02/PT.PB/MS-SBL/TGP-2/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang penyampaian permohonan pengurangan nilai temuan dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 007. Surat PPK PN Sibuhuan Nomor 838/W2-U20/SEK.03/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Sibuhuan: 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 109.599.709,00 dan menyetorkannya ke kas negara;		581.897.320,00	1	9.184.587.714,00		0,00		0,00	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa: 1. MA telah menyampaikan bukti penyetoran sebesar Rp581.897.320. Atas bukti bukti setoran tersebut, telah dilakukan pengecekan pada SIMPONI dan OMSPAN 2. MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Bukti setoran untuk sisa rekomendasi sebesar Rp9.184.587.714.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	581.897.320,00

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							008. Surat PPK PA Sibuhuan Nomor 114/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Sibuhuan: 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 958.574.003,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 009. Surat PPK PA Pangkalan Balai Nomor 734/SEK.PA.W6-A8/PW1.4/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Pangkalan Balai: 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 577.475.524,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 010. Surat Direktur PT Indi Daya Karya (PT IDK) Nomor 629/IDK-PABalai/PPNT/V/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 011. Surat PPK PA Martapura Nomor 347/SEK.PA.W6-A9/KU1.3/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Martapura : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 348.071.709,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 012. Surat Direktur PT Detiga Inti Teknik Sinergi tanggal 20 Juni 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 013. Surat Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pengawasan Nomor LHP-487/BP/ST/PW1.1.1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang berisi tentang hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh APIP atas temuan di PA Martapura, PA Pangkalan Balai, MS Subulussalam dan MS Blangpidie. 014. Surat PPK PA Muaradua Nomor 642/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Muaradua: 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 139.121.866,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 015. Surat PPK PA Pagar Alam Nomor 525/SEK.PA.W6-A11/KU.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Pagar Alam : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 53.800.327,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 016. Surat PPK PA Kasongan Nomor 356/SEK.PA.W16-A10/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Kasongan : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 645.390.189,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 017. Surat Direktur PT Haryadi Indo Utama (PT HIU) Nomor 032-033/HINTA-003-001/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 018. Surat PPK PA Nanga Bulik No 365/SEK.PA.W16-A7/PW1.4/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Nanga Bulik : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 786.583.164,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 019. Surat Direktur PT Bahtera Emas Raya (PT BER) Nomor 10/PT.BER/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 020. Surat PPK PA Pulang Pisau Nomor 141/SEK.PA.W16-12/PW1.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Pulang Pisau : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.298.471.872,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 021. Surat Direktur PT Buana Utama Karya (PT BUK) Nomor 043-007/BUK-01-03/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 022. Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Nomor LHP-405/BP/ST/PW1.1.1/V/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang berisi tentang hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh APIP atas temuan di PA Kasongan, PA Nanga Bulik, PA Pulang Pisau. 023. Surat PPK PN Nanga Bulik Nomor 867/SEK.PN.W16.U10/KU1.1.2/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Nanga Bulik : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 148.844.466,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 024. Surat PPK PN Pulang Pisau Nomor W16-U11/604/OT.01/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Pulang Pisau : 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 67.902.266,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 025. Surat PPK Biro Umum Nomor 14/BUA.7/PW.1.4/5/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK Biro Umum: 1) akan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.670.226.459,00, Rp 24.105.593,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 026. Surat Direktur PT Brahmakerta Adiwira Nomor 001/BA/MAA/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang permohonan pengurangan nilai temuan BPK dan Berita Acara Hasil Validasi Bawas. 027. Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Nomor LHP-370/BP/ST/PW1.1.1/V/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang berisi tentang hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh APIP atas temuan di Biro Umum Badan Urusan Administrasi (BUA). 028. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 70.858.406,00 dengan NTPN Nomor C2BBA48VVESVJSR0 Tanggal 6/06/2024 melalui Platform Bukalapak (PN Meureudu)													

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							029. 1). Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 43.579.462,00 dengan NTPN Nomor 9768E1JNFV2AR1EF Tanggal 7/05/2024 melalui Bank Syariah Indonesia (PN Blangpidie); 2). Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 30.261.230,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Rp 10.000.000,00 dengan NTPN Nomor TAF5307QLUP34QG6U tanggal 7/05/2024 melalui Bank Aceh Syariah (PN Blangpidie); b. Rp 5.000.000,00 dengan NTPN Nomor 8AA252G4VPL1RG9C tanggal 16/05/2024 melalui Bank Aceh Syariah (PN Blangpidie); c. Rp 15.261.230 dengan NTPN 7DE946U8EUHBR8GK tanggal 28 Mei 2024 melalui PT POS Indonesia (PN Blangpidie) 030. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 109.599.709,00 dengan NTPN Nomor 412123CIFKANJ02O Tanggal 27/06/2024 melalui Bank Mandiri (PN Sibuhuan); 031. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran Tahap 1 sebesar Rp 50.000.000,00 dengan NTPN Nomor 7AF8C7QLUP6326OJ Tanggal 7 Juni 2024 melalui Bank Mandiri (PA Sibuhuan); 032. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran Tahap 1 sebesar Rp 40.000.000 dengan NTPN Nomor 320D03CIFKAOPD7L Tanggal 27/06/2024 melalui PT Bukalapak (PN Nanga Bulik); 033. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 24.105.593,00 dengan NTPN Nomor E92OD55DFOMPVBOB Tanggal 7/12/2023 melalui Bank Mandiri (Biro Umum BUA); 034 Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 67.902.266,00 dengan NTPN Nomor FD7F31JNFVB6VRT9 Tanggal 1 Juli 2024 melalui PT Tokopedia (PN Pulang Pisau); 035 Penjelasan setoran yang dilaksanakan oleh Satker 037 Bukti Setor PA Pulang Pisau 038 Update Penjelasan setoran yang telah dilaksanakan oleh Satker									
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PN Meureudu, PN Sibuhuan, PA Muaradua dan PA Pagar Alam supaya menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.424.293.666 dan menyetorkannya ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut : a) PT GSP pada PN Meureudu sebesar Rp226.842.023; b) PT BPS pada PN Sibuhuan sebesar Rp692.686.560; c) PT IEU pada PA Muaradua sebesar Rp319.426.580; d) PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp185.338.503	1	1.424.293.666,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2711/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen PN Meureudu, PN Sibuhuan, PA Muaradua, PA Pagar Alam. 1). Menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.424.293.666,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor : a). PT GSP pada PN Meureudu Rp 226.842.023,00 b). PT BPS pada PN Sibuhuan Rp 692.686.560,00 c). PT IEU pada PA Muaradua Rp 319.426.580,00 d). PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam Rp 185.338.503,00 002. Surat PPK PN Meureudu Nomor 604/SEK.W1-U21/KP3.4.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Meureudu : 1). Telah menagih denda keterlambatan sebesar Rp Rp 226.842.023,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara; 003. Surat PPK PN Sibuhuan Nomor 838/W2-U20/SEK.03/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PN Sibuhuan: 1) Telah menagih denda keterlambatan sebesar Rp 692.686.560,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 004. Surat PPK PA Muaradua Nomor 642/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Muaradua: 1) Telah menagih denda keterlambatan sebesar Rp 319.426.580,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 005. Surat PPK PA Pagar Alam Nomor 525/SEK.PA.W6-A11/KU.1.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang tanggapan yang menyatakan PPK PA Pagar Alam : 1) Telah menagih denda keterlambatan sebesar Rp 185.338.503,00 dan menyetorkannya ke kas negara; 006. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 231.649.483,00 dengan SP2D Nomor 230011305040711 Tanggal 1/12/2023 melalui Bank Syariah Indonesia (PN Meureudu) untuk membayar antara lain denda keterlambatan sebesar Rp226.842.023,00 sesuai rekomendasi; 007. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 692.686.560,00 dengan SP2D Nomor 230061304001184 Tanggal 17/10/2023 melalui BPD Jabar Banten (PN Sibuhuan); 008. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp 1.597.132.903,00 dengan SP2D Nomor 249991303004914 Tanggal 22 Februari 2024 melalui Bank Mandiri (PA Muaradua) untuk membayar antara lain denda keterlambatan sebesar Rp 319.426.580,00 sesuai rekomendasi;		1.238.955.163,00	1	185.338.503,00		0,00		0,00	**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa: **1. MA telah menyampaikan bukti tindaklanjut setoran ke kas negara sebesar Rp1.238.955.163. Atas bukti bukti setoran tersebut telah dilakukan pengecekan di aplikasi SIMPONI dan OMSPAN (atas pemotongan langsung melalui SP2D)** 2. MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **Bukti setor PT AMM KSO PT IDK pada PA Pagar Alam sebesar Rp185.338.503.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
13	Penatausahaan Pembangunan Konstruksi Gedung Baru Kantor Pengadilan Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai	1		a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA Menyusun SOP terkait perencanaan sampai dengan monitoring pekerjaan jasa konstruksi	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat Sekma Nomor 2712/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penatausahaan Pembangunan Konstruksi Gedung Baru Kantor Pengadilan Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang Sekretaris MA akan menyusun SOP terkait perencanaan sampai dengan monitoring pekerjaan jasa konstruksi; 002.Surat Perintah Sekma kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 2713/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 untuk: 1)Menyusun SOP terkait perencanaan sampai dengan monitoring pekerjaan jasa konstruksi; 2)Lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan Satker Daerah; 3.Draft SOP Perencanaan dan Monitoring Pekerjaan Jasa Kontruksi.			1					**TINDAK LANJUT BELUM SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan penelaaahan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu: **SOP Perencanaan dan Monitoring Pekerjaan Jasa Kontruksi yang telah ditetapkan oleh SekMA.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi supaya lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh satker daerah	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2713/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penatausahaan Pembangunan Konstruksi Gedung Baru Kantor Pengadilan Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi supaya lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh satker daerah. 002. Surat Kepala Biro Perencanaan kepada Sekma Nomor Nomor 217/BUA.1/OT.1.1/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 bahwa kedepan akan lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh Satker	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi supaya lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh satker daerah; 2. Kepala Biro Perencanaan menyatakan bahwa kedepan akan lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh Satker. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				c. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan supaya lebih optimal dalam melakukan: 1) Analisa kebutuhan atas pengajuan anggaran yang diajukan oleh satker-satker di daerah; dan 2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh satker daerah.	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2714/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penatausahaan Pembangunan Konstruksi Gedung Baru Kantor Pengadilan Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan supaya lebih optimal dalam melakukan: 1) Analisa kebutuhan atas pengajuan anggaran yang diajukan oleh satker-satker di daerah; dan 2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh satker daerah.	1							**TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI** Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA telah memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan supaya lebih optimal dalam melakukan analisa kebutuhan atas pengajuan anggaran yang diajukan oleh satker-satker di daerah; dan Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh satker daerah.	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2714/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penatausahaan Pembangunan Konstruksi Gedung Baru Kantor Pengadilan Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai yang berisi tentang BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan supaya lebih optimal dalam melakukan: 1) Analisa kebutuhan atas pengajuan anggaran yang diajukan oleh satker-satker di daerah; dan 2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh satker daerah. 002. Surat Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekma Nomor 56/BUA.4/PW1.1.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan telah melakukan 1) Analisa kebutuhan atas pengajuan anggaran yang diajukan oleh satker-satker di daerah melalui mekanisme Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), dan mekanisme Anggaran Biaya Tambahan, dan 2)Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh satker daerah: a.pada saat pelaksanaan kontrak kontruksi dan pengawasan dilakukan melalui e-SADEWA di fitur Evaluasi Pengadaan sebagai media control bagi pimpinan Satker, pengadilan tingkat banding, dan pimpinan di MA terkait dengan belanja modal khususnya belanja kontruksi untuk Pembangunan gedung dengan progress per-minggu; b.pendampingan secara daring dan luring; c.pembinaan yang ditayangkan pada Kompas TV.								2. Kepala Biro Perlengkapan menyatakan telah melakukan: 1) Analisa kebutuhan atas pengajuan anggaran yang diajukan oleh satker-satker di daerah melalui mekanisme Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), dan mekanisme Anggaran Biaya Tambahan, dan 2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh satker daerah: a.pada saat pelaksanaan kontrak kontruksi dan pengawasan dilakukan melalui e-SADEWA di fitur Evaluasi Pengadaan sebagai media control bagi pimpinan Satker, pengadilan tingkat banding, dan pimpinan di MA terkait dengan belanja modal khususnya belanja kontruksi untuk Pembangunan gedung dengan progress per-minggu; b.pendampingan secara daring dan luring; c.pembinaan yang ditayangkan pada Kompas TV. **Dengan demikian, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
14	Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung PA Sibuhuan dan PA Muaradua Tidak Sesuai Ketentuan	1	58.725.646,00	a. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Sibuhuan dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara	1	0,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001. Surat SEKMA Nomor 2715/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung PA Sibuhuan dan PA Muaradua Tidak Sesuai Ketentuan yang berisi tentang BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Sibuhuan dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materiil atas tagihan kepada negara; 002.Surat PPK PA Sibuhuan Nomor 114/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung PA Sibuhuan dan PA Muaradua Tidak Sesuai Ketentuan menyatakan akan lebih cermat daan teliti dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara. 003.Surat PPK PA Muaradua Nomor 598/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung PA Sibuhuan dan PA Muaradua Tidak Sesuai Ketentuan menyatakan bahwa akan lebih cermat daan teliti dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.	1							TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan bahan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa: 1. Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Sibuhuan dan PA Muaradua supaya lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan kepada negara 2. PPK PA Sibuhuan dan PA Muaradua menyatakan akan lebih cermat daan teliti dalam menguji kebenaran materiil atas tagihan kepada negara; **Dengan demiklan, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	
				b. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Sibuhuan dan PA Muaradua supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp58.725.646 dan menyetorkannya ke kas negara, yang terdiri dari: 1) CV PB pada PA Sibuhuan sebesar Rp5.207.810 (Rp1.023.160 + Rp4.184.650); 2) CV AU pada PA Sibuhuan sebesar Rp4.263.000; 3) PT DA pada PA Muaradua sebesar Rp44.232.000 (Rp17.772.000 + Rp5.022.836 +Rp26.460.000).	1	58.725.646,00	Pada Semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: 001.Surat SEKMA Nomor 2715/SEK/PW1.4/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Perancana dan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Muaradua Tidak Sesuai Ketentuan yang berisi tentang BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar memerintahkan PPK PA Sibuhuan dan PA Muaradua menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp58.725.646,00 dan menyetorkan ke Kas Negara, serta menyampaikan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN); 002.Surat PPK PA Sibuhuan Nomor 114/SEK.W2-A22/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2023 yang menyatakan telah menarik kelebihan pembayaran kepada CV PB sebesar Rp5.207.810,00 dan menyetorkan ke Kas Negara dengan NTPN D8AB055DF9BVLRNR tanggal 08 Mei 2024, serta telah menarik kelebihan pembayaran kepada CV AU sebesar Rp4.263.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 48A9961QV3UC33N4 tanggal 08 Mei 2024; 003.Surat PPK PA Muaradua Nomor 598/SEK.PA.W6-A10/KU1.3/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyatakan telah menarik kelebihan pembayaran kepada PT DA sebesar Rp44.232.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 86FCA7QLUP33P7L6 tanggal 07 Mei 2024, dan Rp5.023.836,00 dengan NTPN 9A1592G4VPQJGRNB tanggal 2 Juli 2024.	1	58.725.646,00		0,00		0,00		0,00	TINDAK LANJUT TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI Berdasarkan tindaklanjut yang disampaikan diketahui bahwa MA telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyetoran total sebesar Rp58.725.646,00 yaitu: 1. NTPN D8AB055DF9BVLRNR tanggal 08 Mei 2024 sebesar Rp5.207.810,00 (PA Sibuhuan /CV PB); 2. NTPN 48A9961QV3UC33N4 tanggal 08 Mei 2024 sebesar Rp4.263.000,00 (PA Sibuhuan /CV AU); 3. NTPN 86FCA7QLUP33P7L6 tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp44.232.000,00 (PA Muaradua /PT DA; 4. NTPN 9A1592G4VPQJGRNB tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp5.023.836,00 (PA Muaradua /PT DA). Atas bukti setoran setoran tersebut, tim telah melakukan pengecekan NTPN di Simponi dan Ormspan **Dengan demiklan, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.** Telah direviu KT; Telah direviu PT; Telah direviu PJ.	58.725.646,00
	Jumlah	14	11.705.314.430,00		43	11.699.893.121,00		34	2.029.966.904,00	9	9.669.926.217,00	0	0,00	0	0,00		915.195.182,00

Kepala Auditorat III. A

Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.SI, CFE, CA, CSFA
NIP. 197705152003121003

Menyetujui,
Jakarta, 30 Juli 2024
Auditor Utama Keuangan Negara III

Dr. Edward G. Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
NIP. 196807161989031002

Lampiran 2

REKAPITULASI TAHUNAN MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

AUDITAMA : Auditorat Utama Keuangan Negara III / Auditorat III.A
ENTITAS : Mahkamah Agung
TAHUN IHPS : 2005 s.d. Semester II 2023

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tahun 2005													
1.	Laporan Keuangan Tahun 2004	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2006													
1.	Laporan Keuangan Tahun 2005	7	156.821.300,00	10	102.000.000,00	10	102.000.000,00	0	-	0	-	0	-	156.821.300,00
	Tahun 2007													
1.	Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2005-2006	18	991.503.852,50	18	545.051.826,98	10	285.298.757,35	0	-	0	-	8	259.753.069,63	285.298.757,35
2.	Laporan Keuangan Tahun 2006	8	996.400.000,00	8	-	8	-	0	-	0	-	0	-	-
3	PNBP Tahun 2006	4	-	4	-	4	-	0	-	0	-	0	-	-
	Tahun 2008													
1.	Manajemen Aset Tahun 2007	9	393.263.267,00	10	-	10	-	0	-	0	-	0	-	-
2.	Laporan Keuangan Tahun 2007	12	245.825.239,33	25	230.918.650,10	25	230.918.650,10	0	-	0	-	0	-	245.825.239,65
3.	Manajemen Kas Tahun 2007	4	540.000.000,00	8	540.000.000,00	8	540.000.000,00	0	-	0	-	0	-	540.000.000,00
	Tahun 2009													
1.	Laporan Keuangan Tahun 2008	11	96.756.818,19	28	96.756.818,19	28	96.756.818,19	0	-	0	-	0	-	96.756.818,19
2.	Kegiatan APIP Tahun 2008 - 2009	10	-	12	-	11	-	0	-	0	-	1	-	-
3	Pengelolaan Belanja Barang, Belanja Modal dan PNBP TA 2008 dan TA 2009	19	2.941.330.239,22	32	583.121.679,22	32	583.121.679,22	0	-	0	-	0	-	918.095.990,62

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tahun 2010													
1	Laporan Keuangan 2009	13	39.688.500,00	28	-	28	-	0	-	0	-	0	-	-
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBP Serta Penerimaan Penanganan Perkara Tahun 2009 Dan Semester I 2010	12	208.337.117,00	19	208.337.117,00	18	208.337.117,00	0	-	0	-	1	-	212.747.117,00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010 (SM I)	2	14.875.000,00	7	14.875.000,00	7	14.875.000,00	0	-	0	-	0	-	14.875.000,00
	Tahun 2011													
1.	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Pada Badan Peradilan Di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara Dan Sulawesi Selatan TA 2010 Dan Semester I TA 2011	12	1.532.499.478,85	22	804.719.890,33	22	804.719.890,33	0	-	0	-	0	-	804.719.890,33
2.	Laporan Keuangan 2010	16	84.095.814,00	30	84.095.814,00	30	84.095.814,00	0	-	0	-	0	-	194.424.786,00
3	Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2010 Dan Semester I Tahun Anggaran 2011	26	2.037.381.363,03	41	1.514.836.125,03	41	1.285.966.125,03		-	0	-	0	228.870.000,00	1.294.626.125,03
	Tahun 2012													
1.	Laporan Keuangan Tahun 2011	19	1.912.752.063,43	39	1.195.327.563,43	39	1.174.771.062,83	0	-	0	-	0	20.556.500,60	1.174.979.386,83
2.	Pengelolaan Aset dan Hibah Tahun Anggaran 2011 dan Semester I 2012	24	254.308.984,61	39	322.066.234,61	39	322.066.234,61	0	-	0	-	0	-	321.506.113,61
	Tahun 2013													
1.	Laporan Keuangan 2012	25	1.813.091.023,43	42	1.813.091.023,43	42	1.813.091.023,43	0	-	0	-	0	-	2.015.386.233,58
2.	Kinerja Pelayanan Peradilan PA Jakarta Selatan	19	-	31	-	31	-	0	-	0	-	0	-	7.355.000,00
3.	Kinerja Pelayanan Peradilan PN Jakarta Barat	23	-	36	-	36	-	0	-	0	-	0	-	24.768.849,00

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tahun 2014													
1.	Laporan Keuangan 2013	22	3.217.234.106,57	47	2.206.134.319,13	46	1.701.158.569,13	0	-	0	-	1	504.975.750,00	2.300.610.942,57
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Perkara, Tahun 2013 dan Triwulan III Tahun 2014 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia	25	198.911.181,49	50	234.889.140,49	50	234.889.140,49	0	-	0	-	0	-	233.589.140,49
3.	Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Tahun 2013 S.d 2014 (Semester I) Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dan Pengadilan Negeri Bandung	24	-	45	-	45	-	0	-	0	-	0	-	-
	Tahun 2015													
1.	Laporan Keuangan TA 2014	20	6.918.432.967,24	57	6.486.898.739,77	57	6.302.054.646,46	0	-	0	-	0	184.844.093,31	6.728.630.696,93
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun Anggaran 2015	5	1.296.060.009,68	15	870.301.344,53	15	870.301.344,53	0	-	0	-	0	-	1.168.684.486,83
	Tahun 2016													
1	Laporan Keuangan TA 2015	19	5.262.286.278,77	72	4.838.353.457,77	72	4.838.353.457,77	0	-	0	-	0	-	5.262.286.279,54
2	Pemeriksaan Atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (s.d.Triwulan III)	8	-	25	-	25	-	0	-	0	-	0	-	-
	Tahun 2017													
1	Laporan Keuangan TA 2016	28	7.286.517.775,67	77	6.748.397.916,19	77	5.303.558.501,07	0	-	0	-	0	1.444.839.415,12	6.263.508.596,25
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau	5	719.606.831,00	14	399.823.777,00	14	399.823.777,00	0	-	0	-	0	-	712.078.324,00

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tahun 2018													
1	Laporan Keuangan TA 2017	34	3.515.506.916,00	90	3.169.250.966,00	90	3.169.250.966,00	0	-	0	-	0	-	3.533.868.045,00
2.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBP, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya dan Belanja TA 2017 S.D Smt I Tahun 2018	20	394.356.091,00	55	310.999.691,00	55	310.999.691,00	0	-	0	-	0	-	551.816.118,00
3.	Pelayanan Upaya Hukum Perdata Tahun 2017 dan 2018 (S.D Smt I) Pada Kepaniteraan MA, PT Jakarta, PT Surabaya, PT Bandung, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya dan PN Bandung	5	-	13	-	13	-	0	-	0	-	0	-	-
	Tahun 2019													
1.	Laporan Keuangan TA 2018	22	1.004.629.519,00	68	677.196.408,00	68	677.196.408,00	0	-	0	-	0	-	1.090.862.680,00
2.	PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan pihak ketiga, dan Belanja TA 2018 dan TA 2019 (s.d TW III)	13	1.115.673.458,86	42	911.728.006,86	42	911.728.006,86	0	-	0	-	0	-	916.782.106,86
	Tahun 2020													
1.	Laporan Keuangan TA 2019	20	1.610.670.108,00	57	1.013.502.250,00	57	1.013.502.250,00	0	-	0	-	0	-	1.610.670.108,00
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Pelayanan Peradilan Umum Atas Penyelesaiaan Minutasi Perkara Dan Penyampaian Putusan Kepada Pihak Berperkara Serta Pelaksanaan Ekesekusi Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum Di Bawahnya Tahun 2019 Dan 2020 (S.D Semester I) Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur	7	-	15	-	15	-	0	-	0	-	0	-	-

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tahun 2021													
1	Laporan Keuangan TA 2020	20	1.949.555.852,00	74	618.078.126,00	74	618.078.126,00	0	-	0	-	0	-	**2.224.896.167,00**
2	Laporan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2020 dan 2021 (s.d Semester 1)	15	3.073.894.382,00	50	1.959.004.908,00	50	1.959.004.908,00	0	-	0	-	0	-	**2.887.998.140,00**
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Badan Peradilan Umum Terkait di Bawah Mahkamah Agung Tahun 2020 Dan 2021 (s.d. Semester I) di Jakarta, Surabaya dan Sidoarjo	51	208.414.562,00	174	194.922.562,00	174	194.922.562,00	0	-	0	-	0	-	**194.922.562,00**
	Tahun 2022													
1	Laporan Keuangan TA 2021	21	3.904.851.871,57	70	1.927.296.587,01	70	1.927.296.587,01	0	-	0	-	0	-	**3.904.851.871,57**
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan dan Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Praya, dan Satuan Kerja Terkait di Bawah Mahkamah Agung di Jakarta, Mataram, dan Lombok Tengah	24	-	54	-	54	-	0	-	0	-	0	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Penyelenggaraan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Tabanan dan Satuan Kerja Terkait di Bawah Mahkamah Agung di Jakarta, Denpasar dan Tabanan	24	-	53	-	53	-	0	-	0	-	0	-	-

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tahun 2023													
1	Laporan Keuangan TA 2022	25	3.755.276.399,61	74	3.228.275.627,33	73	3.071.234.219,33	1	157.041.408,00	0	-	0	-	3.280.040.219
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan	25	-	80	-	37	-	43	-	0	-	0	-	0
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya Di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah	14	11.705.314.430,00	43	11.699.893.121,00	34	2.029.966.904,00	9	9.669.926.217,00	0	-	0	-	915.195.182
	Total	**795**	**71.396.122.801,05**	**1.909**	**55.550.144.690,40**	**1.845**	**43.079.338.236,74**	**53**	**9.826.967.625,00**	**0**	-	**11**	**2.643.838.828,66**	**52.089.478.272,84**

Kepala Auditorat III. A

Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE, CA, CSFA
NIP. 197705152003121003

Menyetujui.
Jakarta,30 Juli 2024
Auditor Utama Keuangan Negara III

Dr. Edward G. Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
NIP. 196807161989031002

Lampiran 3

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : Auditorat Utama Keuangan Negara III / Auditorat III.A
ENTITAS : Mahkamah Agung

No	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-
2	2006	7	156.821.300,00	10	102.000.000,00	10	102.000.000,00	0	-	0	-	0	-	156.821.300,00
3	2007	30	1.987.903.852,50	30	545.051.826,98	22	285.298.757,35	0	-	0	-	8	259.753.069,63	285.298.757,35
4	2008	25	1.179.088.506,33	43	770.918.650,10	43	770.918.650,10	0	-	0	-	0	-	785.825.239,65
5	2009	40	3.038.087.057,41	72	679.878.497,41	71	679.878.497,41	0	-	0	-	1	-	1.014.852.808,81
6	2010	27	262.900.617,00	54	223.212.117,00	53	223.212.117,00	0	-	0	-	1	-	227.622.117,00
7	2011	54	3.653.976.655,88	93	2.403.651.829,36	93	2.174.781.829,36	0	-	0	-	0	228.870.000,00	2.293.770.801,36
8	2012	43	2.167.061.048,04	78	1.517.393.798,04	78	1.496.837.297,44	0	-	0	-	0	20.556.500,60	1.496.485.500,44
9	2013	67	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	0	-	0	-	0	-	2.047.510.082,58
10	2014	71	3.416.145.288,06	142	2.441.023.459,62	141	1.936.047.709,62	0	-	0	-	1	504.975.750,00	2.534.200.083,06
11	2015	25	8.214.492.976,92	72	7.357.200.084,30	72	7.172.355.990,99	0	-	0	-	0	184.844.093,31	7.897.315.183,76
12	2016	27	5.262.286.278,77	97	4.838.353.457,77	97	4.838.353.457,77	0	-	0	-	0	-	5.262.286.279,54
13	2017	33	8.006.124.606,67	91	7.148.221.693,19	91	5.703.382.278,07	0	-	0	-	0	1.444.839.415,12	6.975.586.920,25
14	2018	59	3.909.863.007,00	158	3.480.250.657,00	158	3.480.250.657,00	0	-	0	-	0	-	4.085.684.163,00
15	2019	35	2.120.302.977,86	110	1.588.924.414,86	110	1.588.924.414,86	0	-	0	-	0	-	2.007.644.786,86
16	2020	27	1.610.670.108,00	72	1.013.502.250,00	72	1.013.502.250,00	0	-	0	-	0	-	1.610.670.108,00
17	2021	86	5.231.864.796,00	298	2.772.005.596,00	298	2.772.005.596,00	0	-	0	-	0	-	5.307.816.869,00
18	2022	69	3.904.851.871,57	177	1.927.296.587,01	177	1.927.296.587,01	0	-	0	-	0	-	3.904.851.871,57
19	2023	64	15.460.590.829,61	197	14.928.168.748,33	144	5.101.201.123,33	53	9.826.967.625,00	0	-	0	-	4.195.235.400,61
Jumlah		**795**	**71.396.122.801,05**	**1.909**	**55.550.144.690,40**	**1.845**	**43.079.338.236,74**	**53**	**9.826.967.625,00**	**0**	**-**	**11**	**2.643.838.828,66**	**52.089.478.272,84**

Menyetujui,
Jakarta, 30 Juli 2024
Auditor Utama Keuangan Negara III

Dr. Edward G. Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
NIP. 196807161989031002

Kepala Auditorat III. A

Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE, CA, CSFA
NIP. 197705152003121003

PERKEMBANGAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Lampiran 4

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK : Auditorat Utama Keuangan Negara III / Auditorat III.A
ENTITAS : Mahkamah Agung
TAHUN IHPS : 2005 s.d Semester I 2024

No	Uraian	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi (Status 1)		Tindak lanjut belum sesuai Rekomendasi (Status 2)		Belum Ditindaklanjuti (Status 3)		Tidak Dapat Ditindak Lanjuti (Status 4)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah
			Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	**TLRHP Semester II Tahun 2023** (periode sebelumnya)	45	756	59.690.808.371,05	1.786	43.850.251.569,40	1.774	41.049.371.332,74	1	157.041.408,00	0	-	11	2.643.838.828,66	51.174.283.090,84
B	**LHP Semester I 2024**	2	39	11.705.314.430,00	123	11.699.893.121,00									
C	**Perkembangan status TLRHP Per Semester I 2024** (periode berjalan)						71	2.029.966.904,00	52	9.669.926.217,00	0	-	0	-	915.195.182,00
D	**TLRHP Semester I Tahun 2024**	47	795	71.396.122.801,05	1.909	55.550.144.690,40	1.845	43.079.338.236,74	53	9.826.967.625,00	-	-	11	2.643.838.828,66	52.089.478.272,84

Kepala Auditorat III. A

Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE, CA, CSFA
NIP. 197705152003121003

Menyetujui,
Jakarta, 30 Juli 2024
Auditor Utama Keuangan Negara III

Dr. Edward G. Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
NIP. 196807161989031002

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : 01/Bua.3.03/KU1.2/II/2025

Pada Hari Selasa tanggal 18 bulan Februari 2025 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Satuan Kerja	Bagian Verifikasi dan TGR				Bagian Akuntansi				Selisih			
			Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (115421)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (116421)	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (152111)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (156311)	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (115421)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (116421)	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (152111)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (156311)	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (115421)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (116421)	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (152111)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (156311)
1	Achmad Lohy, S.Ag.	PTUN Ambon	14.989.992,00	(74.950,00)	3.747.514,00	(18.738,00)	14.989.992,00	(74.950,00)	3.747.514,00	(18.738,00)	-	-	-	-
Jumlah			**14.989.992,00**	**(74.950,00)**	**3.747.514,00**	**(18.738,00)**	**14.989.992,00**	**(74.950,00)**	**3.747.514,00**	**(18.738,00)**	**-**	**-**	**-**	**-**

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sesmter II Tahun 2024 pada akun Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Piutang Jangka Panjang).
Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kepala Sub Bagian Akuntansi IA

Fita Rusfandari, SE., MM.
NIP. 198412192009042004

Kepala Sub Bagian Verifikasi & TGR IB

Anita Novianti, SE., M. Ak.
NIP. 198408112009042006

Mengetahui,

Kepala Bagian Akuntansi

Rama Rahim, SE., MM., MBA.
NIP. 198105202009121002

Kepala Bagian Verifikasi & TGR

Azkia Kusumastuti, SE., MM.
NIP. 197709232002122003

DAFTAR REKENING PEMERINTAH DAN MONITORING PENUTUPAN REKENING

Rekening Pemerintah dan Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama Rekening	Jumlah	Uraian	Saldo
A	**Total Rekening dalam bentuk Rupiah**			
1	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01	923	Rekening	6.075.050,00
2	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 03	416	Rekening	1.000,00
3	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 04	445	Rekening	0,00
4	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 05	61	Rekening	0,00
5	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran Pada Unit Eselon 1 Pusat	29	Rekening	0,00
6	Daftar Rekening Bendahara Penerimaan	5	Rekening	1,00
7	Rekening Lainnya	920	Rekening	6.020.218.542.515,89
8	Rekening Tidak Aktif	17	Rekening	49.974.562,00
8	Penutupan Rekening	85	Rekening	0,00
Total		**2.901**		**6.020.274.593.128,89**
B	**Total Rekening dalam bentuk Dollar**			
1	Rekening Lainnya dalam bentuk Dollar	1	Rekening	4.359.02
Total		**1**	**Rekening**	**4.359.02**

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
1	097467	Pengadilan Tinggi Jakarta	005	01	VA	653240974671000	Bpg 175 Pengadilan Tinggi Jakarta	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
2	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	005	01	VA	8100120974711000	Bpg 175 Pn Jakpus 097471	Mandiri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
3	097488	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	005	01	VA	653240974881000	Bpg175 Pengadilan Negeri Jakbar	Bri Cabang S. Parman	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
4	097492	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	005	01	VA	653240974921000	Bp175Pengadilan Negeri Jaktim Dipa 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
5	400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	005	01	VA	653244002141000	Bpg 175 Pn Jaksel (400214)	Bank Bri	S-661/Wpb.11/Kp.01/2008 28 January 2008	TNP	0,00
6	400220	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	005	01	VA	653244002201000	Bpg175Pengadilan Negeri Jakut 400220	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
7	400616	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	005	01	VA	653244006161000	Bpg175PengadilanAgamaJakpus	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
8	400622	Pengadilan Agama Jakarta Utara	005	01	VA	653244006221000	Bpg175Pengadilan Agama Jakut 400622	Bri	S-1654/Wpb.12/Kp.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
9	400631	Pengadilan Agama Jakarta Barat	005	01	VA	653244006311000	Bpg 175 Pengadilan Agama Jakbar	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
10	400647	Pengadilan Agama Jakarta Timur	005	01	VA	653244006471000	Bpg175 Pengadilan Agama Jaktim 400648	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
11	400653	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	005	01	VA	653244006531000	Bpg175Pengadilan Agama Jaksel	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
12	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	005	01	VA	653244011121000	Bpg175Pta Jakarta 401112	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
13	526704	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	005	01	VA	653245267041000	Bpg175.Pt Tata Usaha Negara	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
14	526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	005	01	VA	653255267321000	Bpg175Pengadilan Tun 526732	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
15	663161	Pengadilan Militer Utama	005	01	VA	653246631611000	Bpg175Pengadilan Militer Utama 663161	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
16	663250	Pengadilan Militer Tinggi Ii Jakarta	005	01	VA	653246632501000	Bpg175.Pmt Ii Jakarta (663250)	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
17	663267	Pengadilan Militer Ii - 08 Jakarta	005	01	VA	653246632671000	Bpg175Pengadilan Militer Ii08 663267	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
18	097500	Pengadilan Tinggi Bandung	005	01	VA	653240975001000	Bpg 095 Pengadilan Tinggi Bandung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
19	097514	Pengadilan Negeri Bandung	005	01	VA	653240975141000	Bpg 095 Pn Bandung01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
20	097521	Pengadilan Negeri Sumedang	005	01	VA	8100120975211000	Bpg 087 Pn Sumedang 097521	Mandiri	S-2754/Wpb.12/Kp.06/2020 20 October 2020	TNP	0,00
21	097535	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	005	01	VA	653240975351000	Bpg 025 Pengadilan Negeri	Bri	S-985/ Wpb.12/ Kp.06/ 2021 7 June 2021	TNP	0,00
22	097542	Pengadilan Negeri Garut	005	01	VA	653240975421000	Bpg 096 Pn Garut 00501	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
23	097556	Pengadilan Negeri Ciamis	005	01	VA	653240975561000	Bpg 025 Pengadilan Negeri Ciamis	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
24	097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	005	01	VA	653240976031000	Bpg 021 Pn Purwakarta 01	Pt. Bri (Persero) Kc. Purwakarta	00046 2 June 2021	TNP	0,00
25	097610	Pengadilan Negeri Bekasi	005	01	VA	653240976101000	Bpg 171 Pengadilan Negeri Bekasi	Bank Bri	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
26	097624	Pengadilan Negeri Karawang	005	01	VA	653250976241000	Bpg 086 Pn Karawang 097624	Bri	S-1979/Kpn.1206/2022 22 September 2022	TNP	0,00
27	097631	Pengadilan Negeri Subang	005	01	VA	653240976311000	Bpg 021 Pn Subang 01	Bri Cabang Subang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
28	097645	Pengadilan Negeri Bogor	005	01	VA	653240976451000	Bpg023 Pengadilan Negeri Bogor	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
29	097652	Pengadilan Negeri Sukabumi	005	01	VA	653240976521000	Bpg 128 Pn Sukabumi 097652	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
30	097666	Pengadilan Negeri Cianjur	005	01	VA	653240976661000	Bpg 128 Pn Cianjur 097666	Bri	B-26/Bua.3/Ku.03/5/2021 19 May 2021	TNP	0,00
31	097670	Pengadilan Negeri Cirebon	005	01	VA	653250976701000	Bpg 024 Pengadilan Negeri Cirebon	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
32	097687	Pengadilan Negeri Indramayu	005	01	VA	653240976871000	Bpg 024 Pengadilan Negeri Indramayu	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
33	097691	Pengadilan Negeri Majalengka	005	01	VA	653240976911000	Bpg 147 Pn Majalengka 097691	Bri	S-1125/Wpb.12/Kp.06/2021 21 June 2019	TNP	0,00
34	097709	Pengadilan Negeri Kuningan	005	01	VA	653250977091000	Bpg 147 Pn Kuningan 097709	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
35	308166	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	005	01	VA	653243081661000	Bpg 095 Pta Bandung 01	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
36	400409	Pengadilan Negeri Cibadak	005	01	VA	653244004091000	Bpg 128 Pengadilan Negeri Cibadak	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
37	400477	Pengadilan Negeri Sumber	005	01	VA	653244004771000	Bpg 024 Pengadilan Negeri Sumber	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
38	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	005	01	VA	653244004831000	Bpg 095 Pn Bale Bandung (01)	Bri Dayeuhkolot	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/095 16 October 2020	TNP	0,00
39	400662	Pengadilan Agama Bandung	005	01	VA	653244006621000	Bpg 095 Pengadilan Agama Bandung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
40	400765	Pengadilan Agama Indramayu	005	01	VA	653244007661000	Bpg 024 Pengadilan Agama Indramayu	Bank Bri	1103/Dja.1/Ku.01/04/2021 1 April 2021	TNP	0,00
41	400678	Pengadilan Agama Sumedang	005	01	VA	653244006781000	Bpg 087 Pa 400678 Smd	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06.2020 16 October 2020	TNP	0,00
42	400690	Pengadilan Agama Ciamis	005	01	VA	653244006901000	Bpg 025 Pa Ciamis	Bri Cabang Ciamis	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
43	400704	Pengadilan Agama Tasikmalaya	005	01	VA	653254007041000	Bpg 025 Pengadilan Agama	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
44	400710	Pengadilan Agama Garut	005	01	VA	653244007101000	Bpg 096 Pa Garut 400710	Bri	B-21/Bua.3/Ku.03/4/2021 3 April 2021	TNP	0,00
45	400729	Pengadilan Agama Bogor	005	01	VA	653244007291000	Bpg 023 Pengadilan Agama Bogor	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/023 16 October 2020	TNP	0,00
46	400735	Pengadilan Agama Sukabumi	005	01	VA	653244007351000	Bpg 128 Pa Sukabumi 400735	Bri Kc Sukabumi	Pmk No. 183/Pmk.05/2019 5 December 2019	TNP	0,00
47	400741	Pengadilan Agama Cianjur	005	01	VA	653244007411000	Bpg 128 Pa Cianjur 400741	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
48	400750	Pengadilan Agama Cirebon	005	01	VA	653254007501000	Bpg 024 Pengadilan Agama Cirebon	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
49	400772	Pengadilan Agama Majalengka	005	01	VA	653244007721000	Bpg 147 Pa Majalengka (400772)	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
50	400781	Pengadilan Agama Kuningan	005	01	VA	653244007811000	Bpg 147 Pa Kuningan	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
51	400832	Pengadilan Agama Bekasi	005	01	VA	653244008321000	Bpg 171 Pengadilan Agama Bekasi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
52	400848	Pengadilan Agama Karawang	005	01	VA	653244008481000	Bpg. 086 Pengadilan Agama Karawang	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
53	400854	Pengadilan Agama Purwakarta	005	01	VA	653244008541000	Bpg 021 Pa Purwakarta 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
54	401914	Pengadilan Negeri Banjar	005	01	VA	653244019141000	Bpg 025 Pn Banjar 401914	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
55	401915	Pengadilan Negeri Cikarang	005	01	VA	653244019151000	Bpg 171 Pengadilan Negeri Cikarang 01	Bri	S-2732/Wpb..12/Kp.06/2020/171 16 October 2020	TNP	0,00
56	401957	Pengadilan Agama Soreang	005	01	VA	653244019571000	Bpg 095 Pengadilan Agama Soreang 01	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
57	401958	Pengadilan Agama Kota Cimahi	005	01	VA	653244019581000	Bpg 095 Pengadilan Agama Kota Cimahi 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
58	401959	Pengadilan Agama Ngamprah	005	01	VA	653244019591000	Bpg 095 Pengadilan Agama Ngamprah 01	Bri	S709/Pb.3/4/2021 14 April 2021	TNP	0,00
59	402587	Pengadilan Agama Subang	005	01	VA	653244025871000	Bpg 021 Pa Subang 01	Bri Cabang Subang	000038/021 28 April 2021	TNP	0,00
60	402995	Pengadilan Agama Cibadak	005	01	VA	653244029951000	Bpg 128 Pengadilan Agama Cibadak	Bri Cabang Cibadak	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
61	403009	Pengadilan Agama Sumber	005	01	VA	653244030091000	Bpg 024 Pa Sumber	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
62	477292	Pengadilan Negeri Depok	005	01	VA	653244772921000	Bpg 023 Pengadilan Negeri Depok	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
63	531823	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	005	01	VA	653245318231000	Bpg 095 Ptun Bandung	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
64	604719	Pengadilan Agama Cibinong	005	01	VA	653246047191000	Bpg 023 Pengadilan Agama Cibinong	Bank Rakyat Indonesia	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
65	613519	Pengadilan Negeri Cibinong	005	01	VA	653246135191000	Bpg 023 Pn Cibinong	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
66	614706	Pengadilan Agama Cikarang	005	01	VA	653246147061000	Bpg 171 Pengadilan Agama Cikarang	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
67	652062	Pengadilan Agama Depok	005	01	VA	653246520621000	Bpg 023 Pa Depok	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
68	682150	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	005	01	VA	653246821501000	Bpg 025 Pa Kota Tsm	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
69	682164	Pengadilan Agama Kota Banjar	005	01	VA	653256821641000	Bpg 025 Pa Banjar	Bri Cabang Banjar	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
70	097713	Pengadilan Tinggi Semarang	005	01	VA	653240977131000	Bpg 134 Pengadilan Tinggi Semarang	Bri Cabang Semarang Pandanaran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
71	097720	Pengadilan Negeri Semarang	005	01	VA	653240977201000	Bpg 134 Pengadilan Negeri Semarang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
72	097734	Pengadilan Negeri Tegal	005	01	VA	653240977341000	Bpg 118 Pn Tegal-097734	Bri	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
73	097741	Pengadilan Negeri Pekalongan	005	01	VA	653240977411000	Bpg 072 Pn Pekalongan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
74	097755	Pengadilan Negeri Kudus	005	01	VA	653250977551000	Bpg129 Pengadilan Negeri Kudus	Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
75	097762	Pengadilan Negeri Pati	005	01	VA	653240977621000	Bpg 097 Pn Pati Bua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
76	097776	Pengadilan Negeri Brebes	005	01	VA	653240977761000	Bpg 118 Pn Brebes 097776	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
77	097780	Pengadilan Negeri Pemalang	005	01	VA	653240977801000	Bpg 118 Pn Pemalang 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
78	097797	Pengadilan Negeri Kendal	005	01	VA	653240977971000	Bpg 134 Pengadilan Negeri Kendal	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
79	097802	Pengadilan Negeri Demak	005	01	VA	653240978021000	Bpg 129 Pn Demak 097802	Bri Cabang Demak	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
80	097819	Pengadilan Negeri Purwodadi	005	01	VA	653240978191000	Bpg 163 Pn Purwodadi 01	Bank Bri Cabang Purwodadi	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
81	097823	Pengadilan Negeri Salatiga	005	01	VA	653240978231000	Bpg 134 Pengadilan Negeri Salatiga	Bri Cabang Salatiga	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
82	097830	Pengadilan Negeri Ungaran	005	01	VA	653250978301000	Bpg 134 Pn Kab. Semarang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
83	097844	Pengadilan Negeri Jepara	005	01	VA	653240978441000	Bpg 129 Pengadilan Negeri Jepara	Bri Cabang Jepara	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
84	097851	Pengadilan Negeri Blora	005	01	VA	653240978511000	Bpg 163 Pn Blora 01	Bri Cabang Blora	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
85	097865	Pengadilan Negeri Rembang	005	01	VA	653240978651000	Bpg 097 Pn Rembang Bua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
86	097872	Pengadilan Negeri Batang	005	01	VA	653240978721000	Bpg 072 Pn Batang 097872	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
87	097886	Pengadilan Negeri Purworejo	005	01	VA	653250978861000	Bpg 027 Pengadilan Negeri Kab Pwr	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
88	097890	Pengadilan Negeri Magelang	005	01	VA	653240978901000	Bpg 115 Pengadilan Negeri Magelang	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06.2020 16 October 2020	TNP	0,00
89	097908	Pengadilan Negeri Kebumen	005	01	VA	653240979081000	Bpg 027 Pengadilan Negeri Kebumen	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
90	097912	Pengadilan Negeri Temanggung	005	01	VA	653240979121000	Bpg 115 Pengadilan Negeri Temanggung	Bri Kc Temanggung	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
91	097929	Pengadilan Negeri Wonosobo	005	01	VA	653240979291000	Bpg 164 Pn Wonosobo 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
92	097933	Pengadilan Negeri Surakarta	005	01	VA	653240979331000	Bpg 028 Pengadilan Negeri Surakarta 01	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
93	097940	Pengadilan Negeri Sragen	005	01	VA	653240979401000	Bpg 162 Pn Sragen Bua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
94	097954	Pengadilan Negeri Wonogiri	005	01	VA	653240979541000	Bpg 028 Pengadilan Negeri Wonogiri	Bri	000061/028 20 April 2021	TNP	0,00
95	097961	Pengadilan Negeri Sukoharjo	005	01	VA	653250979611000	Bpg 028 Pengadilan Negeri Sukoharjo 01	Bri	000068/028 23 April 2021	TNP	0,00
96	097975	Pengadilan Negeri Karanganyar	005	01	VA	653240979751000	Bpg 162 Pengadilan Negeri Kra Bua	Bri Cabang Karanganyar	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
97	097982	Pengadilan Negeri Boyolali	005	01	VA	653240979821000	Bpg 148 Pn Boyolali	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
98	097996	Pengadilan Negeri Klaten	005	01	VA	653240979961000	Bpg 148 Pengadilan Negeri Klaten	Bri Cabang Klaten	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
99	098001	Pengadilan Negeri Purwokerto	005	01	VA	653240980011000	Bpg 029 Pengadilan Negeri Purwokerto	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
100	098015	Pengadilan Negeri Cilacap	005	01	VA	653240980151000	Bpg 130 Pn Cilacap 01	Bri Cilacap	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
101	098022	Pengadilan Negeri Banyumas	005	01	VA	653250980221000	Bpg 029 Pengadilan Negeri Banyumas	Bri	B.1513.E-Ins/Iss/05/2021 27 May 2021	TNP	0,00
102	098036	Pengadilan Negeri Purbalingga	005	01	VA	653240980361000	Bpg 029 Pengadilan Negeri Purbalingga	Bri	S- 811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
103	098040	Pengadilan Negeri Banjarnegara	005	01	VA	653240980401000	Bpg 164 Pn Banjarnegara 01	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
104	400565	Pengadilan Negeri Slawi	005	01	VA	653244005651000	Bpg 118 Pn Slawi-400565	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
105	400571	Pengadilan Negeri Mungkid	005	01	VA	653244005711000	Bpg 115 Pengadilan Negeri Kab. Magelang Di Mungkid	Bri Cabang Muntilan	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 10 May 2021	TNP	0,00
106	400860	Pengadilan Agama Pekalongan	005	01	VA	653244008601000	Bpg 072 Pa Pekalongan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
107	400879	Pengadilan Agama Pemalang	005	01	VA	653244008791000	Bpg 118 Pa Pemalang 400879	Bri Cabang Pemalang	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
108	400885	Pengadilan Agama Tegal	005	01	VA	653254008851000	Bpg 118 Pa Tegal 005	Bri	B-22/Bua.3/Ku.03/4/2021 27 April 2021	TNP	0,00
109	400891	Pengadilan Agama Brebes	005	01	VA	653244008911000	Bpg 118 Pa Brebes 400891	Bri Cabang Brebes	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
110	400905	Pengadilan Agama Batang	005	01	VA	653244009051000	Bpg 072 Pa Batang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
111	400911	Pengadilan Agama Semarang	005	01	VA	653244009111000	Bpg 134 Pengadilan Agama Semarang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
112	400920	Pengadilan Agama Salatiga	005	01	VA	653244009201000	Bpg 134 Pengadilan Agama Salatiga	Bri Cabang Salatiga	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
113	400936	Pengadilan Agama Kendal	005	01	VA	653244009361000	Bpg 134 Pa Kendal (400936)	Bank Rakyat Indonesia Cab.Kendal	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
114	400942	Pengadilan Agama Demak	005	01	VA	653244009421000	Bpg 129 Pengadilan Agama Demak	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
115	400951	Pengadilan Agama Purwodadi	005	01	VA	653244009511000	Bpg 163 Pa Purwodadi 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
116	400967	Pengadilan Agama Pati	005	01	VA	653244009671000	Bpg 097 Pa Pati	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
117	400973	Pengadilan Agama Kudus	005	01	VA	653244009731000	Bpg 129 Pengadilan Agama Kudus 400973	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
118	400982	Pengadilan Agama Jepara	005	01	VA	653244009821000	Bpg 129 Pa Jepara 400982	Bri	S-1308/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
119	400998	Pengadilan Agama Rembang	005	01	VA	653244009981000	Bpg 097 Pa Rembang Bua	Bri Cab. Rembang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
120	401002	Pengadilan Agama Blora	005	01	VA	653244010021000	Bpg 163 Pengadilan Agama Blora 01	Bank Rakyat Indonesia Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
121	401018	Pengadilan Agama Magelang	005	01	VA	653244010181000	Pengadilan Agama Kota Magelang	Bri Cabang Magelang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
122	401024	Pengadilan Agama Temanggung	005	01	VA	653244010241000	Bpg 115 Pa Temanggung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
123	401030	Pengadilan Agama Wonosobo	005	01	VA	653244010301000	Bpg 164 Pa Wonosobo 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
124	401049	Pengadilan Agama Purworejo	005	01	VA	653244010491000	Bpg 027 Pengadilan Agama Purworejo	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
125	401055	Pengadilan Agama Kebumen	005	01	VA	653244010551000	Bpg 027 Pa Kebumen	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
126	403015	Pengadilan Agama Slawi	005	01	VA	653244030151000	Bpg 118 Pa Slawi_403015	Bank Rakyat Indonesia	S-503/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2015	TNP	0,00
127	401061	Pengadilan Agama Purwokerto	005	01	VA	653244010611000	Bpg 029 Pengadilan Agama Purwokerto	Bri Cabang Purwokerto	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
128	401070	Pengadilan Agama Banyumas	005	01	VA	653244010701000	Bpg 029 Pengadilan Agama Banyumas	Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
129	401086	Pengadilan Agama Cilacap	005	01	VA	653244010861000	Bpg 130 Pengadilan Agama Cilacap 01	Bri	S-2754/Wpb.12/Kp.06/2020 20 October 2020	TNP	0,00
130	401092	Pengadilan Agama Purbalingga	005	01	VA	653244010921000	Bpg 029 Pengadilan Agama Purbalingga	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
131	401106	Pengadilan Agama Banjarnegara	005	01	VA	653254011061000	Bpg 164 Pa Banjarnegara 01	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
132	401121	Pengadilan Agama Klaten	005	01	VA	653244011211000	Bpg 148 Pengadilan Agama Klaten	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
133	401137	Pengadilan Agama Boyolali	005	01	VA	653244011371000	Bpg 148 Pengadilan Agama Boyolali	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
134	401143	Pengadilan Agama Sragen	005	01	VA	653244011431000	Bpg 162 Pengadilan Agama Sragen Bua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
135	401152	Pengadilan Agama Wonogiri	005	01	VA	653254011521000	Bpg 028 Pengadilan Agama Wonogiri	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
136	401168	Pengadilan Agama Sukoharjo	005	01	VA	653244011681000	Bpg 028 Pengadilan Agama Sukoharjo	Bri	000072 28 April 2021	TNP	0,00
137	401174	Pengadilan Agama Karanganyar	005	01	VA	653244011741000	Bpg 162 Pengadilan Agama Kab Karanganyar Bua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
138	401180	Pengadilan Agama Surakarta	005	01	VA	653244011801000	Bpg 028 Pengadilan Agama Surakarta	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
139	402593	Pengadilan Agama Ambarawa	005	01	VA	653244025931000	Bpg 134 Kantor Pengadilan Agama Ambarawa	Bank Rakyat Indonesia	871/Sek.Ku.01/V/2020 20 May 2021	TNP	0,00
140	402964	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	005	01	VA	653244029641000	Bpg 134 Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
141	403021	Pengadilan Agama Mungkid	005	01	VA	653244030211000	Bpg 115 Pengadilan Agama Mungkid	Bri Cabang Muntilan	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 6 October 2020	TNP	0,00
142	531830	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	005	01	VA	653255318301000	Bpg 134 Ptun Semarang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
143	614710	Pengadilan Agama Kajen	005	01	VA	653246147101000	Bpg 072 Pengadilan Agama Kajen	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
144	663289	Pengadilan Militer Ii - 10 Semarang	005	01	VA	653246632881000	Bpg 134 Kantor Pengadilan Militer Ii 10 Semarang	Bri Cab. Pandanaran Semarang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
145	098057	Pengadilan Negeri Yogyakarta	005	01	VA	653240980571000	Bpg 030 Pengadilan Negeri Yogyakarta Qq 01	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
146	098061	Pengadilan Negeri Wates	005	01	VA	653240980611000	Bpg 176 Pengadilan Negeri Wates	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
147	098078	Pengadilan Negeri Wonosari	005	01	VA	653250980781000	Bpg 149 Pengadilan Negeri Wonosari	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
148	098082	Pengadilan Negeri Sleman	005	01	VA	653240980821000	Bpg 030 Pengadilan Negeri Sleman Qq 01	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
149	400172	Pengadilan Negeri Bantul	005	01	VA	653254001721000	Bpg 030 Pengadilan Negeri Bantul 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
150	400342	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	005	01	VA	9899684003421000	Bpg 030 Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Bni	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
151	401199	Pengadilan Agama Yogyakarta	005	01	VA	653244011991000	Bpg 030 Satker Pengadilan Agama Yogyakarta Qq 01	Bri Cabang Yogyakarta Katamso	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
152	401200	Pengadilan Agama Sleman	005	01	VA	653244012001000	Bpg 030 Satker Pengadilan Agama Sleman Qq 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
153	401219	Pengadilan Agama Wates	005	01	VA	653244012191000	Bpg 176 Pengadilan Agama Wates	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
154	401225	Pengadilan Agama Bantul	005	01	VA	653244012251000	Bpg 030 Satker Pa Bantul	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
155	401231	Pengadilan Agama Wonosari	005	01	VA	653254012311000	Bpg 149 Pengadilan Agama Wonosari 01	Bri	S-2732/Wpb.23/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
156	547657	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	005	01	VA	653245476571000	Bpg 030 Pta Yogyakarta Qq 01	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
157	578801	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	005	01	VA	653245788011000	Bpg 030 Ptun Yogyakarta 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
158	663292	Pengadilan Militer Ii - 11 Yogyakarta	005	01	VA	653246632921000	Bpg Dilmil Ii 11 Yogyakarta 01	Bank Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
159	098104	Pengadilan Tinggi Surabaya	005	01	VA	653240981041000	Bpg 135 Pt Sby 098104	Bri Cabang Surabaya Kaliasin	S-2732/Wpb.12/Kp.05/2020 16 October 2020	TNP	0,00
160	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	005	01	VA	653240981111000	Bpg 135 Pn Surabaya	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
161	098125	Pengadilan Negeri Bojonegoro	005	01	VA	653240981251000	Bpg 073 Pn Bojonegoro	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
162	098132	Pengadilan Negeri Tuban	005	01	VA	9899680981321000	Bpg 166 Pengadilan Negeri Tuban	Bni	S-287/Wpb.12/Kp.06/2022 21 January 2022	TNP	0,00
163	098146	Pengadilan Negeri Lamongan	005	01	VA	653240981461000	Bpg 073 Pengadilan Negeri Lamongan	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
164	098150	Pengadilan Negeri Gresik	005	01	VA	653240981501000	Bpg 135 Pengadilan Negeri Gresik 01	Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Gresik	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
165	098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	005	01	VA	8100120981671000	Bpg 165 Pn Sidoarjo	Kc Jkt Plaza Mandiri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 9 June 2021	TNP	0,00
166	098171	Pengadilan Negeri Mojokerto	005	01	VA	653240981711000	Bpg 098 Pn Mojokerto 098171	Bri Cabang Mojokerto	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/098 16 October 2020	TNP	0,00
167	098188	Pengadilan Negeri Jombang	005	01	VA	653240981881000	Bpg 098 Pn Jombang 098188	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
168	098192	Pengadilan Negeri Bondowoso	005	01	VA	653240981921000	Bpg 035 Pengadilan Negeri Bondowoso	Bri Cabang Bondowoso	000614/035 29 April 2021	TNP	0,00
169	098200	Pengadilan Negeri Jember	005	01	VA	653240982001000	Bpg 131 Pengadilan Negeri Jember	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
170	098214	Pengadilan Negeri Banyuwangi	005	01	VA	653240982141000	Bpg 100 Pn Banyuwangi	Pt. Bank Rakyat Indonesia	No : S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
171	098221	Pengadilan Negeri Situbondo	005	01	VA	653240982211000	Bpg 035 Pn Situbondo 098221	Bri	000638/035 1 June 2021	TNP	0,00
172	098235	Pengadilan Negeri Kediri	005	01	VA	653240982351000	Bpg 034 Pengadilan Negeri Kediri	Bank Rakyat Indonesia	S-762/Pb.3/4/2021 21 April 2021	TNP	0,00
173	098242	Pengadilan Negeri Nganjuk	005	01	VA	653240982421000	Bpg 034 Pengadilan Negeri Nganjuk	Bank Rakyat Indonesia	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
174	098256	Pengadilan Negeri Tulungagung	005	01	VA	653240982561000	Bpg 150 Pengadilan Negeri Tulungagung Qq 098256	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.02/2020 16 October 2020	TNP	0,00
175	098260	Pengadilan Negeri Trenggalek	005	01	VA	653240982601000	Bpg 034 Pengadilan Negeri Trenggalek	Bri	S-2732/ Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
176	098277	Pengadilan Negeri Blitar	005	01	VA	653240982771000	Bpg 150 Pn Blitar Qq 098277	Bri Cabang Blitar	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
177	098281	Pengadilan Negeri Malang	005	01	VA	653240982811000	Bpg 032 Pn Malang	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
178	098298	Pengadilan Negeri Pasuruan	005	01	VA	653240982981000	Bpg 032 Pengadilan Negeri Pas (098298)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
179	098303	Pengadilan Negeri Probolinggo	005	01	VA	653240983031000	Bpg 035 Pengadilan Negeri Probolinggo	Bri	000643/035 23 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
180	098310	Pengadilan Negeri Lumajang	005	01	VA	653240983101000	Bpg 131 Pengadilan Negeri Lumajang	Bri Kc Jakarta Veteran	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
181	098324	Pengadilan Negeri Bangil	005	01	VA	653240983241000	Bpg 032 Pengadilan Negeri Bangil	Bank Rakyat Indonesia Kcp Bangil	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
182	098331	Pengadilan Negeri Kraksaan	005	01	VA	653240983311000	Bpg 035 Pengadilan Negeri Kraksaan (098331)	Bank Rakyat Indonesia	000669/035 14 December 2021	TNP	0,00
183	098345	Pengadilan Negeri Madiun	005	01	VA	653240983451000	Bpg :033 Pn Madiun (01)	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
184	098352	Pengadilan Negeri Ponorogo	005	01	VA	653240983521000	Bpg 033 Pn Ponorogo 01	Pt. Bri (Persero) Cabang Ponorogo	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
185	098366	Pengadilan Negeri Pacitan	005	01	VA	653240983661000	Bpg 099 Pengadilan Negeri Pacitan	Bank Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
186	098370	Pengadilan Negeri Ngawi	005	01	VA	653240983701000	Bpg 033 Pn Ngawi Dipa 05 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
187	098387	Pengadilan Negeri Magetan	005	01	VA	653240983871000	Bpg 033 Pn Magetan 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
188	098391	Pengadilan Negeri Pamekasan	005	01	VA	653240983911000	Bpg 036 Pn Pamekasan	Bri Cabang Pamekasan	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
189	098409	Pengadilan Negeri Sumenep	005	01	VA	653240984091000	Bpg 036 Pn Sumenep	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021/036 28 June 2021	TNP	0,00
190	098413	Pengadilan Negeri Bangkalan	005	01	VA	653240984131000	Bpg 036 Kantor Pn Bangkalan	Bri Cabang Bangkalan	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
191	098420	Pengadilan Negeri Sampang	005	01	VA	653250984201000	Bpg036Pengadilannegerisampang	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
192	308170	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	005	01	VA	653243081701000	Bpg 135 Pta Surabaya Qq 01	Bri	S811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
193	400580	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	005	01	VA	653244005801000	Bpg 034 Pn Kab Kediri 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/034 16 October 2020	TNP	0,00
194	400596	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	005	01	VA	653254005961000	Bpg 033 Pn Kab Madiun 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
195	401240	Pengadilan Agama Surabaya	005	01	VA	653244012401000	Bpg 135 Pa Surabaya Qq 01	Bri Unit Karah Agung Surabaya	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
196	401256	Pengadilan Agama Mojokerto	005	01	VA	653244012561000	Bpg 098 Pa Mojokerto	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
197	401262	Pengadilan Agama Sidoarjo	005	01	VA	653244012621000	165 Pengadilan Agama Sidoarjo 401262	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
198	401271	Pengadilan Agama Jombang	005	01	VA	653244012711000	Bpg 098 Pa Jombang 401271	Pt. Bri Tbk Cabang Jombang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
199	401287	Pengadilan Agama Bawean	005	01	VA	653254012871000	Bpg 135 Pengadilan Agama Bawean 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
200	401293	Pengadilan Agama Gresik	005	01	VA	653244012931000	Bpg 135 Pengadilan Agama Gresik	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
201	401307	Pengadilan Agama Bojonegoro	005	01	VA	653244013071000	Bpg 073 Bojonegoro Bua	Bri Cabang Bojonegoro	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
202	401322	Pengadilan Agama Lamongan	005	01	VA	653244013221000	Bpg 073 Pa Lamongan	Bri	000033 13 July 2021	TNP	0,00
203	401338	Pengadilan Agama Jember	005	01	VA	653244013381000	Bpg 131 Pengadilan Agama Jember	Bri	S-316/Wpb.16/Kp.131/2015 24 March 2015	TNP	0,00
204	401344	Pengadilan Agama Bondowoso	005	01	VA	653244013441000	Bpg 035 Pengadilan Agama Bondowoso 401344	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
205	401350	Pengadilan Agama Situbondo	005	01	VA	653244013501000	Bpg 035 Pengadilan Agama Situbondo 401350	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
206	401369	Pengadilan Agama Banyuwangi	005	01	VA	653244013691000	Bpg 100 Pengadilan Agama Banyuwangi (401369)	Bri Cab. Banyuwangi	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
207	401375	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	005	01	VA	653244013751000	Bpg 034 Pengadilan Agama Kediri	Bri	S-1308/Wpb.12/Kp.6/2021 12 July 2021	TNP	0,00
208	401381	Pengadilan Agama Tulungagung	005	01	VA	653244013811000	Bpg 150 Pengadilan Agama	Bri	000092/150 2 June 2021	TNP	0,00
209	401390	Pengadilan Agama Trenggalek	005	01	VA	653244013901000	Bpg 034 Pengadilan Agama Trenggalek	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
210	401401	Pengadilan Agama Blitar	005	01	VA	653244014011000	Bpg 150 Pengadilan Agama Blitar	Bri Cab. Blitar	000095 16 June 2021	TNP	0,00
211	401410	Pengadilan Agama Nganjuk	005	01	VA	653244014101000	Bpg 034 Pengadilan Agama Nganjuk	Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Nganjuk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
212	401426	Pengadilan Agama Malang	005	01	VA	653244014261000	Bpg 032 Pa Malang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
213	401432	Pengadilan Agama Pasuruan	005	01	VA	653244014321000	Bpg 032 Pengadilan Agama Pasuruan 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
214	401441	Pengadilan Agama Bangil	005	01	VA	653254014411000	Bpg 032 Pengadilan Agama Bangil 401441	Bri	110534/032 22 April 2021	TNP	0,00
215	401457	Pengadilan Agama Probolinggo	005	01	VA	653244014571000	Bpg 035 Pengadilan Agama Probolinggo 401457	Bri	000630/035 5 May 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
216	401463	Pengadilan Agama Kraksaan	005	01	VA	653244014631000	Bpg 035 Pengadilan Agama Kraksaan (401463)	Bri	S-357/Wpb.16/Kp.09.20/2015 24 March 2015	TNP	0,00
217	401472	Pengadilan Agama Lumajang	005	01	VA	653244014721000	Bpg 131 Pengadilan Agama Lumajang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
218	401488	Pengadilan Agama Madiun	005	01	VA	8100774014881000	Bpg 033 Pa Kota Madiun 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
219	401494	Pengadilan Agama Magetan	005	01	VA	653244014941000	Bpg 033 Pengadilan Agama Magetan	Bri	S-000174/Wpb.16/Kp.07/2021 3 August 2021	TNP	0,00
220	401508	Pengadilan Agama Ngawi	005	01	VA	653244015081000	Bpg 033 Pa Ngawi	Bri Cabang Ngawi	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
221	401514	Pengadilan Agama Ponorogo	005	01	VA	653244015141000	Bpg 033 Pa Ponorogo 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
222	401520	Pengadilan Agama Pacitan	005	01	VA	653254015201000	Bpg 099 Pengadilan Agama Pacitan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
223	401539	Pengadilan Agama Pamekasan	005	01	VA	653244015391000	Bpg 036 Kantor Pa Pamekasan	Bri Pamekasan	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
224	401545	Pengadilan Agama Bangkalan	005	01	VA	653244015451000	Bpg 036 Pa Bangkalan	Bri Cabang Bangkalan	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
225	401551	Pengadilan Agama Sampang	005	01	VA	653244015511000	Bpg 036 Pengadilan Agama Sampang	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
226	401560	Pengadilan Agama Sumenep	005	01	VA	653244015601000	Bpg 036 Pa Sumenep	Bri	S-483/Wpb.16/Kp.0530/2015 26 March 2015	TNP	0,00
227	401576	Pengadilan Agama Kangean	005	01	VA	653254015761000	Bpg 036 Pa Kangean Sumenep	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
228	403030	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	005	01	VA	653244030301000	Bpg: 033 Pa Kab. Madiun (01)	Bri Cab. Madiun	S-1186/Wpb.16/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
229	403046	Pengadilan Agama Kediri	005	01	VA	653244030461000	Bpg 034 Pengadilan Agama Kediri	Bri	S-2732/Wb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
230	450737	Pengadilan Agama Tuban	005	01	VA	653244507371000	Bpg 166 Pengadilan Agama Tuban	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
231	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	005	01	VA	653245267671000	Bpg 165 Ptun Surabaya Qq 526767	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
232	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	005	01	VA	653255489401000	Bpg 135 Pt Tun Sby 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
233	604730	Pengadilan Agama Malang Kab. Malang	005	01	VA	653246047301000	Bpg 032 Pa Kab Malang	Bri	110680/032 8 December 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
234	626156	Pengadilan Negeri Kepanjen	005	01	VA	653246261561000	Bpg 032 Pn Kab Malang	Bri	S-709/Pb.3/2021 12 April 2021	TNP	0,00
235	663300	Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya	005	01	VA	653246633001000	Bpg 135 Pm Tinggi Iii Sby	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
236	663314	Pengadilan Militer Iii - 12 Surabaya	005	01	VA	653256633141000	Bpg 135 Dilmil Iii-12 Sby	Bri Kc Waru Sidoarjo	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
237	663321	Pengadilan Militer Iii - 13 Madiun	005	01	VA	653246633211000	Bpg 033 Dilmil Iii-13 Madiun (01)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
238	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	005	01	VA	8100770984341000	Bpg 001 Pengadilan Tinggi Bna 434	Bank Syariah Indonesia	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
239	098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	005	01	VA	8100770984411000	Bpg 001 Pn Banda Aceh	Bank Syariah Indonesia	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021/001 12 July 2021	TNP	0,00
240	098455	Pengadilan Negeri Sabang	005	01	VA	8100770984551000	Bpg 001 Pengadilan Negeri Sabang	Bsi	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
241	098462	Pengadilan Negeri Sigli	005	01	VA	8100770984621000	Bpg 001 Pengadilan Negeri Sigli 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
242	098476	Pengadilan Negeri Bireuen	005	01	VA	8100770984761000	Bpg 089 Pn Bireuen 098476	Bank Syariah Indonesia	S-2771/Wpb.12/Kp.06/2021 5 November 2021	TNP	0,00
243	098480	Pengadilan Negeri Lhok Sukon	005	01	VA	8100770984801000	Bpg 089 Pn Lhoksukon	Bank Syariah Indonesia	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
244	098497	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	005	01	VA	8100770984971000	Bpg 089 Pengadilan Negeri Lsw	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
245	098502	Pengadilan Negeri Takengon	005	01	VA	8100770985021000	Bpg 122 Pengadilan Negeri Takengon	Bank Syariah Indonesia	S-677/Wpb.12/Kp.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
246	098519	Pengadilan Negeri Langsa	005	01	VA	8100770985191000	Bpg 002 Pn Langsa 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
247	098523	Pengadilan Negeri Idi	005	01	VA	8100770985231000	Bpg 002 Pn Idi 098523	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
248	098530	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	005	01	VA	8100770985301000	Bpg 002 Pn Kualasimpang 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
249	098544	Pengadilan Negeri Blangkajeren	005	01	VA	8100770985441000	Bpg 105 Pn Bkj 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
250	098551	Pengadilan Negeri Kutacane	005	01	VA	8100770985511000	Bpg 105 Pn Kutacane 01	Bsi	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
251	098565	Pengadilan Negeri Meulaboh	005	01	VA	8100770985651000	Bpg 003 Pn Meulaboh 1	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
252	098572	Pengadilan Negeri Calang	005	01	VA	8100770985721000	Bpg 003 Pn Calang	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
253	098586	Pengadilan Negeri Sinabang	005	01	VA	8100770985861000	Bpg 003 Pn Sinabang 01	Bsi	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
254	098590	Pengadilan Negeri Tapak Tuan	005	01	VA	8100770985901000	Bpg 074 Pn Tapaktuan 098590	Bank Syariah Indonesia (Bsi)	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
255	098608	Pengadilan Negeri Singkel	005	01	VA	8100770986081000	Bpg 074 Pengadilan Negeri Singkil 01	Bank Syariah Indonesia	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
256	400415	Pengadilan Negeri Jantho	005	01	VA	8100774004151000	Bpg 001 Pengadilan Negeri Jantho	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
257	401582	Mahkamah Syar'Iyah Aceh	005	01	VA	8100774015821000	Bpg 001 Mahkamah Syariah Aceh	Bsi	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021/001 22 September 2021	TNP	0,00
258	401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	005	01	VA	8100774015911000	Bpg 001 Ms Banda Aceh	Bsi	S-1310/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
259	401602	Mahkamah Syar'Iyah Sabang	005	01	VA	8100774016021000	Bpg 001 Mahkamah Syariyah Sabang 02	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
260	401611	Mahkamah Syar'Iyah Sigli	005	01	VA	8100774016111000	Bpg001 Mahkamah Syariyah Sigli	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
261	401627	Mahkamah Syar'Iyah Meureudu	005	01	VA	8100774016271000	Bpg 001 Mahkamah Syariah Meureudu	Bsi Kantor Cabang Sigli	S-2771/Wpb.12/Kp.06/2021 5 November 2021	TNP	0,00
262	401752	Mahkamah Syar'Iyah Singkil	005	01	VA	8100774017521000	Bpg 074 Ms Singkil 401752	Bank Syariah Indonesia	S-50/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2021	TNP	0,00
263	401633	Mahkamah Syar'Iyah Bireuen	005	01	VA	8100774016331000	Bpg 089 Ms Bireuen 401633	Bsi Kc Bireuen	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
264	401642	Mahkamah Syar'Iyah Lhok Sukon	005	01	VA	8100774016421000	Bpg 089 Ms Lhoksukon	Bsi	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
265	401658	Mahkamah Syar'Iyah Takengon	005	01	VA	8100774016581000	Bpg 122 Mahkamah Syariyah Takengon	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
266	401664	Mahkamah Syar'Iyah Lhokseumawe	005	01	VA	8100774016641000	Bpg 089 Ms Lhokseumawe 401664	Mandiri Syariah	S-1310/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
267	401670	Mahkamah Syar'Iyah Idi	005	01	VA	8100774016701000	Bpg 002 Mahkamah Syariah Idi	Bsi Kcp Idi Rayeuk 3	S-2771/Wpb.12/Kp.06/2021 5 November 2021	TNP	0,00
268	401689	Mahkamah Syar'Iyah Langsa	005	01	VA	8100774016891000	Bpg 002 Mahkamah Syariah Langsa	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2022	TNP	0,00
269	401695	Mahkamah Syar'Iyah Kuala Simpang	005	01	VA	8100774016951000	Bpg 002 Mahkamah Syariah Ksp	Bank Syariah Indonesia	S-3173/Wpb.12/Kp.06/2021 6 December 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
270	401709	Mahkamah Syar'Iyah Blangkajeren	005	01	VA	8100774017091000	Bpg 105 Ms Blangkejeren 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
271	401715	Mahkamah Syar'Iyah Kutacane	005	01	VA	8100774017151000	Bpg 105 Mahkamah Syariyah Kutacane	Bsi	S-1309/Wbp.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
272	401721	Mahkamah Syar'Iyah Meulaboh	005	01	VA	8100774017211000	Bpg 003 Mahkamah Syariyah Meulaboh	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
273	401730	Mahkamah Syar'Iyah Sinabang	005	01	VA	8100774017301000	Bpg 003 Ms Sinabang 01	Bsi	S-2755/Wpb.12/Kp.06/2020 1 June 2020	TNP	0,00
274	401746	Mahkamah Syar'Iyah Calang	005	01	VA	8100774017461000	Bpg 003 Ms Calang 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
275	401761	Mahkamah Syar'Iyah Tapak Tuan	005	01	VA	8100774017611000	Bpg Ms Tapaktuan	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
276	401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	005	01	VA	8100774019021000	Bpg 074 Pn Blangpidie 401902	Bank Syariah Indonesia Kc Blangpidie	000133 14 March 2022	TNP	0,00
277	401903	Pengadilan Negeri Meureudu	005	01	VA	8100774019031000	Bpg 001 Pengadilan Negeri Meureudu	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
278	401904	Pengadilan Negeri Suka Makmue	005	01	VA	8100774019041000	Bpg 003 Pn Sukamakmue 401904	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
279	401965	Mahkamah Syar'Iyah Blangpidie	005	01	VA	8100774019651000	Bpg 074 Ms Blangpidie 401965	Bsi Cabang Blangpidie	000126/074 3 February 2022	TNP	0,00
280	401966	Mahkamah Syar'Iyah Suka Makmue	005	01	VA	8100774019661000	Bpg 003 Ms Suka Makmue 01	Bsi	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
281	401967	Mahkamah Syar'Iyah Kota Subulussalam	005	01	VA	8100774019671000	Bpg 074 Ms Ssalam 401967	Bank Syariah Indonesia	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021/074 12 July 2021	TNP	0,00
282	402607	Mahkamah Syar'Iyah Jantho	005	01	VA	8100774026071000	Bpg 001 Mahkamah Syariyah Jantho 01	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
283	578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	005	01	VA	8100775788181000	Bpg 001 Ptun Banda Aceh 578818	Bsi	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
284	663182	Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh	005	01	VA	8100776631821000	Bpg 001 Dilmil I 01 Di Bna 663182	Bank Syariah Indonesia	S-2208/Wpb.12.Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
285	673062	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	005	01	VA	8100776730621000	Bpg 122 Pengadilan Negeri Str	Bsi Kcp Bener Meriah	S-1309/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
286	682228	Ms Simpang Tiga Redelong	005	01	VA	8100776822281000	Bpg 122 Mahkamah Syariah Str	Bsi	S-290/Wpb.12/Kp.06/2022 24 January 2022	TNP	0,00
287	098612	Pengadilan Tinggi Medan	005	01	VA	653240986121000	Bpg 123 Pengadilan Tinggi Medan	Bri Cab Iskandar Muda	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
288	098629	Pengadilan Negeri Medan	005	01	Giro	005301001246301	Bpg 123 Pn Medan	Bri	S-881/Wpb.02/Kp.123/2015 29 June 2015	TNP	0,00
289	098633	Pengadilan Negeri Binjai	005	01	VA	653240986331000	Bpg 123 Pn Klas I-B Binjai 01	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
290	400389	Pengadilan Negeri Kisaran	005	01	VA	653244003891000	Bpg 076 Pengadilan Negeri Kisaran	Bank Rakyat Indonesia	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020/119 16 October 2020	TNP	0,00
291	098640	Pengadilan Negeri Tanjung Balai	005	01	VA	653240986401000	Bpg 076 Pn Tanjung Balai 01	Bri	000033/076 28 April 2021	TNP	0,00
292	098654	Pengadilan Negeri Sidikalang	005	01	VA	653250986541000	Bpg 119 Pn Sidikalang 01	Bri	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
293	098661	Pengadilan Negeri Kabanjahe	005	01	VA	653240986611000	Bpg 119 Pn Kabanjahe	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020/119 16 October 2020	TNP	0,00
294	098675	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	005	01	VA	653240986751000	Bpg 075 Pn Rantauprapat	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kc Rantauprapat	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
295	098682	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	005	01	VA	653240986821000	Bpg 124 Pn Tebing Tinggi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
296	098696	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	005	01	VA	653240986961000	Bpg 007 Pn Gunungsitoli Qq 098696	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
297	098701	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	005	01	VA	653240987011000	Bpg 005 Pn Pematangsiantar	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
298	098718	Pengadilan Negeri Tarutung	005	01	VA	653240987181000	Bpg 125 Pn Tarutung 098718	Pt Bri (Persero) Cabang Tarutung	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
299	098722	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	005	01	VA	653240987221000	Bpg 006 Pn Padangsidimpuan 01	Pt. Bri Cabang Padangsidimpuan	000047 22 April 2021	TNP	0,00
300	098739	Pengadilan Negeri Sibolga	005	01	VA	653250987391000	Bpg 106 Pn Sibolga Badan Urusan Adm	Bri Cab. Sibolga	S2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
301	108025	Pengadilan Negeri Stabat	005	01	VA	653241080251000	Bpg 123 Pn Stabat 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
302	400370	Pengadilan Negeri Simalungun	005	01	VA	653244003701000	Bpg 005 Pn Simalungun	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
303	400395	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	005	01	VA	653244003951000	Bpg 124 Pn Lubuk Pakam	Bri Cabang Lubuk Pakam	S-522/Wpb.02/Kp.02.10/2007 28 August 2007	TNP	595.050,00
304	401777	Pengadilan Tinggi Agama Medan	005	01	VA	653244017771000	Bpg 123 Pt Agama Medan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
305	401783	Pengadilan Agama Binjai	005	01	VA	653244017831000	Bpg 123 Pa Binjai 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
306	401792	Pengadilan Agama Kabanjahe	005	01	VA	653244017921000	Bpg 119 Pa Kabanjahe 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
307	401803	Pengadilan Agama Medan	005	01	VA	653244018031000	Bgp 123 Pamedan 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
308	401834	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	005	01	VA	653244018341000	Pa Tebing Tinggi	Bri	S-50/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2022	TNP	0,00
309	401812	Pengadilan Agama Rantau Prapat	005	01	VA	653244018121000	Bpg 075 Pa Rantauprapat	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
310	403077	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	005	01	VA	653244030771000	Bpg 124 Pa Lubuk Pakam Bua	Bank Rakyat Indonesia	S-5/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2022	TNP	0,00
311	401828	Pengadilan Agama Tanjung Balai	005	01	VA	653244018281000	Bpg 076 Pa Tanjung Balai	Bri Kc. Jakarta Jl. Veteran No.8 Jakarta	000035/076 29 April 2021	TNP	0,00
312	401840	Pengadilan Agama Sidikalang	005	01	VA	653244018401000	Bpg 119 Pa Sidikalang 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
313	401859	Pengadilan Agama Pematang Siantar	005	01	VA	653244018591000	Bpg 005 01 Pa P. Siantar	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
314	401865	Pengadilan Agama Balige	005	01	VA	653254018651000	Bpg 125 Pa Balige 401865	Bri	S.2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
315	401871	Pengadilan Agama Sibolga	005	01	VA	8100774018711000	Bpg 106 Pa Sibolga Bua	Bsi	S-2755/Wpb.12/Kp.06/2020 20 October 2020	TNP	0,00
316	401880	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	005	01	VA	653244018801000	Bpg 006 Pa Padangsidempuan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
317	401896	Pengadilan Agama Gunung Sitoli	005	01	VA	653244018961000	Bpg 007 Pengadilan Agama Gunungsitoli Qq 401896	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
318	401905	Pengadilan Negeri Sei Rampah	005	01	VA	653244019051000	Bpg 124 Pengadilan Negeri Sei Rampah 01	Bri Kcp. Sei Rampah	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
319	401906	Pengadilan Negeri Sibuhuan	005	01	VA	653244019061000	Bpg 006 Sbh 401906	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
320	401934	Pengadilan Agama Sibuhuan	005	01	VA	653244019341000	Bpg 006 Pa Sbh 401934	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
321	401935	Pengadilan Agama Sei Rampah	005	01	VA	653244019351000	Bpg 124 Pengadilan Agama Sei Rampah 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
322	403061	Pengadilan Agama Kisaran	005	01	VA	653244030611000	Bpg 076 Pengadilaan Agama Kisaran	Pt Bank Rakyat Indonesia	000038/076 5 May 2021	TNP	0,00
323	403083	Pengadilan Agama Simalungun	005	01	VA	653254030831000	Bpg 005 Pa Simalungun Kode Satker 403083	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
324	477399	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	005	01	VA	653244773991000	Bpg 006 Pn Mandailing Natal 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
325	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	005	01	VA	653245267251000	Bpg 123 Pttun Medan	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
326	526746	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	005	01	VA	653245267461000	Bpg 123 Ptun Medan	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
327	547682	Pengadilan Agama Stabat	005	01	VA	653245476821000	Bpg 123 Pa Stabat 01	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/123 16 October 2020	TNP	0,00
328	604744	Pengadilan Agama Pandan	005	01	VA	653256047441000	Bpg 106 Pengadilan Agama Pandan 1	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
329	631978	Pengadilan Agama Tarutung	005	01	VA	653246319781000	Bpg 125 Pa Tarutung 631978	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
330	631982	Pengadilan Agama Panyabungan	005	01	VA	653246319821000	Bpg 006 Pa Panyabungan 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
331	663178	Pengadilan Militer Tinggi - I Medan	005	01	VA	653246631781000	Bpg 123 P Milti I Medan 01	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
332	663199	Pengadilan Militer I - 02 Medan	005	01	VA	653246631991000	Bpg 123 P Militer I-02 Medan 01	Bank Bri Cabang Iskandar	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
333	672910	Pengadilan Negeri Balige	005	01	Giro	31401000525300	Bpg 125 Pn Balige 672910	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balige	S-0317/Wpb.02/Kp.125/2015 10 March 2015	TNP	0,00
334	682232	Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan	005	01	VA	653246822321000	Bpg 006 Pa Kota Padangsidimpuan 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
335	098743	Pengadilan Tinggi Padang	005	01	VA	653240987431000	Bpg 010 Pengadilan Tinggi Padang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
336	098750	Pengadilan Negeri Padang	005	01	VA	653240987501000	Bpg 010 Pengadilan Negeri Padang	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
337	098764	Pengadilan Negeri Sawahlunto	005	01	VA	653240987641000	Bpg 077 Pengadilan Negeri Sawahlunto	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
338	098771	Pengadilan Negeri Batusangkar	005	01	VA	653240987711000	Bpg 011 Pn Batusangkar	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
339	098785	Pengadilan Negeri Solok	005	01	VA	653250987851000	Bpg 090 Pengadilan Negeri Solok	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
340	098792	Pengadilan Negeri Pariaman	005	01	VA	653240987921000	Bpg 010 Pn Pariaman 098792	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-811/Pb3 /2021 29 April 2020	TNP	0,00
341	098807	Pengadilan Negeri Painan	005	01	VA	653240988071000	Bpg 142 Pengadilan Negeri Painan	Bri Cab. Painan	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
342	098811	Pengadilan Negeri Bukittinggi	005	01	VA	653240988111000	Bpg 011 Pn Bukittinggi	Bri Kantor Pusat Jakarta	S-347/Wpb.03/Kp.0330/2015 25 March 2015	TNP	0,00
343	098828	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	005	01	VA	653240988281000	Bpg 091 Pn Lubuk Sikaping	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
344	098832	Pengadilan Negeri Payakumbuh	005	01	VA	653240988321000	Bpg 011 Pn Payakumbuh	Bri Cab. Payakumbuh	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
345	400188	Pengadilan Negeri Padang Panjang	005	01	VA	653244001881000	Bpg 011 Pn Padang Panjang 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
346	400333	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	005	01	VA	653244003331000	Bpg 011 Pn Lubuk Basung	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/011 16 October 2020	TNP	0,00
347	400421	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	005	01	VA	653244004211000	Bpg 011 Pn Tanjung Pati	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
348	400446	Pengadilan Negeri Kotobaru	005	01	VA	653244004461000	Bpg 090 Pn Kotobaru	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
349	400461	Pengadilan Negeri Muaro	005	01	VA	653254004611000	Bpg 077 Pengadilan Negeri Muaro	Bri Cab. Sijunjung	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
350	401900	Pengadilan Tinggi Agama Padang	005	01	VA	653244019001000	Bpg 010 Pengadilan Tinggi Agama Padang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
351	401907	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	005	01	VA	653244019071000	Bpg 077 Pn Pulau Punjung 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
352	401916	Pengadilan Agama Pariaman	005	01	VA	653244019161000	Bpg 010 Pengadilan Agama Pariaman 401916	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
353	401922	Pengadilan Agama Solok	005	01	VA	653244019221000	Bpg 090 Pengadilan Agama Solok (01)	Bri Cabang Solok	S-2732/Wpb.12/Kp.06.2020 16 October 2020	TNP	0,00
354	401931	Pengadilan Agama Sawahlunto	005	01	VA	653244019311000	Bpg 077 Pengadilan Agama Sawahlunto	Bri Unit Sawahlunto Sijunjung	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
355	401936	Pengadilan Agama Pulau Punjung	005	01	VA	653244019361000	Bpg 077 Pa Pulau Punjung 01	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
356	401947	Pengadilan Agama Batusangkar	005	01	VA	653244019471000	Bpg 011 Pengadilan Agama 01 Batusangkar	Bri	S-989/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
357	401953	Pengadilan Agama Padang	005	01	VA	653244019531000	Bpg 010 Pengadilan Agama Padang	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
358	401962	Pengadilan Agama Padang Panjang	005	01	VA	653244019621000	Bpg 011 Pengadilan Agama 01 Pdg Panjang	Bri Cabang Padang Panjang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
359	401978	Pengadilan Agama Sijunjung	005	01	VA	653244019781000	Bpg 077 Pengadilan Agama Sijunjung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
360	401984	Pengadilan Agama Koto Baru	005	01	VA	653244019841000	Bpg 090 Pengadilan Agama Koto Baru (Bua Mari)	Bri Cabang Solok	S-623/Pb.3/2021 30 March 2021	TNP	0,00
361	401990	Pengadilan Agama Muara Labuh	005	01	VA	653254019901000	Bpg 090 Pengadilan Agama Muara Labuh (01)	Bri Cab. Solok Unit Muara Labuh	B.21/Bua.3/Ku.03/4/2021 12 April 2021	TNP	0,00
362	402004	Pengadilan Agama Painan	005	01	VA	653244020041000	Bpg 142 Pengadilan Agama Painan	Bri Cab. Painan	S-2732/Wpb.12/Kp.02/2020 16 October 2020	TNP	0,00
363	402010	Pengadilan Agama Bukittinggi	005	01	VA	653244020101000	Bpg 011 Pengadilan Agama 01 Bukittinggi	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
364	402029	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	005	01	VA	653244020291000	Bpg 091 Pa Lubuk Sikaping Bua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
365	402035	Pengadilan Agama Talu	005	01	VA	653244020351000	Bpg 091 Pa Talu (Bua)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
366	402041	Pengadilan Agama Maninjau	005	01	VA	653244020411000	Bpg 011 Pa 01 Maninjau	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
367	402050	Pengadilan Agama Payakumbuh	005	01	VA	653244020501000	Bpg 011 Pa Payakumbuh 01	Bri Cab. Payakumbuh	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
368	402066	Pengadilan Agama Tanjung Pati	005	01	VA	653244020661000	Bpg 011 Pa Tanjung Pati 01	Bri Cabang Payakumbuh	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
369	402613	Pengadilan Agama Lubuk Basung	005	01	VA	653244026131000	Bpg 011 Pa Lubuk Basung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
370	477352	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	005	01	VA	653244773521000	Bpg 091 Pn Pasbar (477352)	Bri Cabang Simpang Empat	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
371	531844	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	005	01	VA	653245318441000	Bpg 010 Ptun Padang	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
372	663204	Pengadilan Militer I - 03 Padang	005	01	VA	653246632041000	Bpg 010 Dilmil I-03 Padang 663204	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
373	098853	Pengadilan Negeri Bengkalis	005	01	VA	653240988531000	Bpg 120 Pn Bengkalis	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
374	098860	Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu	005	01	VA	653250988601000	Bpg 092 Pn Rengat Indragiri	Bri Cabang Rengat	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
375	098874	Pengadilan Negeri Tembilahan	005	01	VA	653240988741000	Bpg 092 Pengadilan Negeri Tembilahan	Bri	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2021	TNP	0,00
376	400141	Pengadilan Negeri Bangkinang	005	01	VA	653244001411000	Bpg 008 Pengadilan Negeri Bangkinang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
377	400327	Pengadilan Negeri Dumai	005	01	VA	653244003271000	Bpg 120 Pengadilan Negeri Dumai	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
378	400492	Pengadilan Tinggi Riau	005	01	VA	653244004921000	Bpg 008 Pt Pekanbaru	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kc Cabang Pekanbaru	001412/008 31 May 2021	TNP	0,00
379	098849	Pengadilan Negeri Pekanbaru	005	01	VA	653240988491000	Bpg 008 Pn Pekanbaru	Bank Rakyat Indonesia	001475/008 16 July 2021	TNP	0,00
380	401908	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	005	01	VA	653244019081000	Bpg 092 Pn Teluk Kuantan 08	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
381	401937	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	005	01	VA	653244019371000	Bpg 008 Pa Siak 401937	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
382	401938	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	005	01	VA	653244019381000	Bpg 092 Pa Teluk Kuantan 38	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
383	402072	Pengadilan Agama Pekanbaru	005	01	Giro	9899684020721000	Bpg 008 Pa Pekanbaru 402072	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kc. Pekanbaru	S-082/Wpb.04/Kp.008/2018 8 January 2018	TNP	0,00
384	402081	Pengadilan Agama Rengat	005	01	VA	653244020811000	Bpg 092 Pengadilan Agama Rengat	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
385	402097	Pengadilan Agama Tembilahan	005	01	Giro	653244020971000	Bpg 092 Pengadilan Agama Tembilahan	Bri Cab Tembilahan	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
386	402101	Pengadilan Agama Bangkinang	005	01	VA	653244021011000	Bpg 008 Pengadilan Agama Bkn	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
387	402117	Pengadilan Agama Bengkalis	005	01	VA	653244021171000	Bpg 120 Pengadilan Agama Bengkalis	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
388	402123	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan	005	01	VA	653244021231000	Bpg 008 Pa Pasir Pengaraian	Bri	001380/008 28 April 2021	TNP	0,00
389	402132	Pengadilan Agama Selat Panjang	005	01	VA	653254021321000	Bpg 120 Pengadilan Agama Selatpanjang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
390	402622	Pengadilan Agama Dumai	005	01	VA	653244026221000	Bpg 120 Pengadilan Agama Dumai	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
391	402970	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	005	01	VA	653254029701000	Bpg 008 Pta Pekanbaru	Bri Cabang Pekanbaru	001506 1 September 2021	TNP	0,00
392	477255	Pengadilan Negeri Pelalawan	005	01	VA	653244772551000	Bpg 008 Pn Pelalawan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
393	477261	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	005	01	VA	653244772611000	Bpg 120 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
394	477343	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	005	01	VA	653244773431000	Bpg 008 Pengadilan Negeri Siak	Bri	001546/008 4 November 2021	TNP	0,00
395	578822	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	005	01	VA	8100775788221000	Bpg 008 Ptun Pekanbaru	Bank Syariah Indonesia	001573/008 6 December 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
396	631999	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	005	01	VA	653246319991000	Bpg 008 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
397	632001	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	005	01	VA	8100776320011000	Bpg 120 Pengadilan Agama Ujung Tanjung	Bank Syariah Indonesia	S-2755/Wpb.12/Kp.06/2021 20 October 2021	TNP	0,00
398	662990	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	005	01	VA	653246629901000	Bpg 008 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
399	098895	Pengadilan Negeri Jambi	005	01	VA	653240988951000	Bpg 012 Pengadilan Negeri Jambi	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
400	098900	Pengadilan Negeri Muara Bungo	005	01	VA	653240989001000	Bpg 078 Pn Ma Bungo	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
401	098917	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	005	01	VA	653240989171000	Bpg 143 Pengadilan Negeri Klt 01	Pt. Bri (Persero) Cabang Kuala Tungkal	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
402	098921	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	005	01	VA	653240989211000	Bpg (013) Pengadilan Negeri Spn (098921)	Bri Cabang Sungai Penuh	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
403	400311	Pengadilan Negeri Bangko	005	01	VA	653244003111000	Bpg 159 Pengadilan Negeri Bangko	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
404	400430	Pengadilan Negeri Muara Bulian	005	01	VA	653244004301000	Bpg 012 Pengadilan Negeri Muara Bulian	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
405	400503	Pengadilan Tinggi Jambi	005	01	VA	653244005031000	Bpg 012 Pengadilan Tinggi Jambi	Bri	S-27732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
406	402185	Pengadilan Agama Jambi	005	01	VA	653244021851000	Bpg 012 Pengadilan Agama Jambi	Pt. Bank Rakyat Indonesia Cab. Jambi	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	5.480.000,00
407	402191	Pengadilan Agama Muara Bungo	005	01	VA	653244021911000	Bpg 078 Pa Ma Bungo01	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
408	402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	005	01	VA	653244022051000	Bpg 143 Pa Kuala Tungkal	Pt. Bri (Persero) Cabang Kuala Tungkal	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
409	402211	Pengadilan Agama Bangko	005	01	VA	653254022111000	Bpg 159 Pengadilan Agama Bangko	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
410	402220	Pengadilan Agama Sungai Penuh	005	01	VA	653244022201000	Bpg (013) Pengadilan Agama Spn (402220)	Bri. Cabang Sungai Penuh	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
411	403052	Pengadilan Agama Muara Bulian	005	01	VA	653244030521000	Bpg 012 Pengadilan Agama Muara Bulian	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Muara Bulian	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
412	477368	Pengadilan Negeri Tebo	005	01	VA	653244773681000	Bpg078 Pn Tebo	Bri Cabang Muara Bungo	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
413	477374	Pengadilan Negeri Sarolangun	005	01	VA	653244773741000	Bpg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
414	477400	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	005	01	VA	653244774001000	Bpg 143 Pn Tjt 477400	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
415	547661	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	005	01	VA	653245476611000	Bpg 012 Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
416	578839	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	005	01	VA	653245788391000	Bpg 012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
417	632018	Pengadilan Agama Sarolangun	005	01	VA	653246320181000	Bpg 159 Pa Sarolangun	Bank Rakyat Indonesia.Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
418	632022	Pengadilan Agama Muara Sabak	005	01	VA	653246320221000	Bpg 143 Pa Muara Sabak	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
419	652020	Pengadilan Agama Muara Tebo	005	01	VA	653256520201000	Bpg 078 Pa Ma Tebo 01	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
420	652034	Pengadilan Agama Sengeti	005	01	VA	653246520341000	Bpg 012 Pa Sengeti	Bri Unit Sengeti	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
421	663012	Pengadilan Negeri Sengeti	005	01	VA	653246630121000	Bpg 012 Pengadilan Negeri Sengeti	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
422	098938	Pengadilan Tinggi Palembang	005	01	VA	653240989381000	Bpg 014 Pengadilan Tinggi Palembang 01	Bri	S-811/Pb.03/2021 29 April 2021	TNP	0,00
423	098942	Pengadilan Negeri Palembang	005	01	VA	653240989421000	Bpg 014 Pengadilan Negeri Palembang 01	Pt. Bri Cabang Kapten A. Rivai Palembang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
424	098959	Pengadilan Negeri Kayuagung	005	01	VA	653240989591000	Bpg 014 Pengadilan Negeri Kayuagung 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
425	098963	Pengadilan Negeri Baturaja	005	01	VA	653240989631000	Bpg 109 Pn Baturaja	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
426	098970	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	005	01	VA	653240989701000	Bpg 070 Pn Lubuklinggau 01	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
427	098984	Pengadilan Negeri Lahat	005	01	VA	653240989841000	Bpg 144 Pn Lahat 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
428	098991	Pengadilan Negeri Muara Enim	005	01	VA	653250989911000	Bpg 144 Pn Muara Enim 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Bri Cabang Muara Enim	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
429	099003	Pengadilan Negeri Sekayu	005	01	VA	653240990031000	Bpg 160 Pengadilan Negeri Sekayu 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
430	401909	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	005	01	VA	653244019091000	Bpg 160 Pn Pangkalan Balai 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
431	401943	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	005	01	VA	653244019431000	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
432	401944	Pengadilan Agama Martapura Plg	005	01	VA	653254019441000	Bpg 109 Pa Martapura 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
433	401945	Pengadilan Agama Muaradua	005	01	VA	653244019451000	Bpg 109 Pa Muaradua 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
434	401946	Pengadilan Agama Pagaralam	005	01	VA	653254019461000	Bpg 144 Pengadilan Agama (01) Pagar Alam	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
435	401949	Pengadilan Agama Prabumulih	005	01	VA	653244019491000	Bpg 014 Pa Prabu Kls Ii 401949	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp/2020 16 October 2020	TNP	0,00
436	402236	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	005	01	VA	653244022361000	Bpg 014 Pengadilan Tinggi Agama Plg 01	Bri Cab. Kapt. A. Rivai Palembang	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
437	402242	Pengadilan Agama Palembang	005	01	VA	653244022421000	Bpg 014 Pengadilan Agama Palembang Kd 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
438	402251	Pengadilan Agama Lahat	005	01	VA	653244022511000	Bpg 144 Pengadilan Agama Lahat 01	Bri Cabang Lahat	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
439	402267	Pengadilan Agama Baturaja	005	01	VA	653254022671000	Bpg 109 Pa Baturaja	Bri Cabang Baturaja	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 April 2020	TNP	0,00
440	402273	Pengadilan Agama Kayuagung	005	01	VA	653244022731000	Bpg 014 Pengadilan Agama Kayuagung 01	Bri	S-2732/Wpb12/Kp.06/2020 6 October 2020	TNP	0,00
441	402282	Pengadilan Agama Muara Enim	005	01	VA	653244022821000	Bpg 144 Pa Muara Enim (01)	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
442	402298	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	005	01	VA	653244022981000	Bpg 070 Pengadilan Agama Lubuk Linggau 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
443	402638	Pengadilan Agama Sekayu	005	01	VA	653244026381000	160 Pengadilan Agama Sekayu 01	Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cb Veteran Jkt	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
444	526728	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	005	01	VA	653255267281000	Bpg.014 Pttun Palembang	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
445	526750	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	005	01	VA	653245267501000	Bpg 014 Ptun Palembang 01	Bri Cab.Kapt.A.Rivai Palembang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
446	663211	Pengadilan Militer I - 04 Palembang	005	01	VA	653246632111000	Bpg 014 Dilmil I-04 Palembang	Bri Cabang A'Rivai Palembang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
447	672952	Pengadilan Negeri Prabumulih	005	01	VA	653246729521000	Bpg 014 Pengadilan Negeri Prabumulih 01	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
448	672969	Pengadilan Negeri Pagar Alam	005	01	VA	653246729691000	Bpg 144 Pn Pagar Alam	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
449	099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	005	01	VA	653240990311000	Bpg 017 Pn Tanjungkarang 01	Bri Cabang Tanjung Karang	S-372/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
450	099045	Pengadilan Negeri Metro	005	01	VA	653240990451000	Bpg 126 Pn Metro (01)	Bri Kanca Metro	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
451	099052	Pengadilan Negeri Kotabumi	005	01	VA	653250990521000	Bpg Stkr099052 Pengadilan Negeri Kotabumi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
452	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	005	01	VA	653244003641000	Bpg 017 Pengadilan Tinggi Tkg 01	Bri Cabang Tanjungkarang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
453	400452	Pengadilan Negeri Kalianda	005	01	VA	653244004521000	Bpg 017 Pn Kalianda 01	Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
454	401911	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	005	01	VA	653244019111000	Bpg 017 Pn Gedong Tataan	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
455	401950	Pengadilan Agama Gedong Tataan	005	01	VA	653244019501000	Bpg 017 Pa Gedong Tataan	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
456	401951	Pengadilan Agama Pringsewu	005	01	VA	8100774019511000	Bpg 017 Pengadilan Agama Pringsewu	Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
457	401952	Pengadilan Agama Mesuji	005	01	VA	653244019521000	Bpg 116 Pa Mesuji 01	Bri Kantor Cabang Tulang Bawang	S-1308/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
458	401955	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	005	01	Giro	653244019551000	Bpg 116 Pengadilan Agama Tuba Tengah 01	Bri Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat	S-010/Wbp.08/Kp.0304/2019 4 January 2019	TNP	0,00
459	401956	Pengadilan Agama Sukadana	005	01	VA	653244019561000	Bpg 126 Pa Sukadana 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
460	402324	Pengadilan Agama Tanjung Karang	005	01	VA	653244023241000	Bpg 017 Pengadilan Agama Tanjungkarang 01	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
461	402330	Pengadilan Agama Krui	005	01	VA	653244023301000	Bpg 145 Pengadilan Agama Krui 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
462	402349	Pengadilan Agama Kotabumi	005	01	VA	653244023491000	Bpg 116 Kotabumi	Bank Rakyat Indonesia	S-1888/Wpb.12/Kp.06/2021 26 August 2021	TNP	0,00
463	402355	Pengadilan Agama Metro	005	01	VA	653244023551000	Bpg 126 Pa Metro 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
464	402644	Pengadilan Agama Kalianda	005	01	VA	653244026441000	Bpg 017 Pa Kalianda 01	Bri Kcp Kalianda	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
465	477306	Pengadilan Negeri Kota Agung	005	01	VA	653244773061000	Bpg 017 Pn Kota Agung 01	Bri Cabang Pringsewu	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
466	547678	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	005	01	VA	653245476781000	Bpg 017 Pengadilan Tinggi Agama 01	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
467	559840	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	005	01	VA	653245598401000	Bpg 017 Ptun Bandar Lampung 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
468	614684	Pengadilan Agama Tulang Bawang	005	01	VA	653256146841000	Bpg 116 Pa Tulang Bawang 01	Bri Cab. Bandar Jaya	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
469	614691	Pengadilan Agama Tanggamus	005	01	VA	653246146911000	Bpg 017 Pengadilan Agama Tanggamus 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
470	614883	Pengadilan Negeri Liwa	005	01	VA	653246148831000	Bpg 145 Pengadilan Negeri Liwa 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
471	652041	Pengadilan Agama Gunung Sugih	005	01	VA	653246520411000	Bpg 126 Pa Gunung Sugih	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
472	652055	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	005	01	VA	653246520551000	Bpg 116 Pa Blambangan Umpu 01	Bri	S-1888/Wpb.12/Kp.06/2021 26 August 2021	TNP	0,00
473	663026	Pengadilan Negeri Menggala	005	01	VA	60501000082307	Bpg 116 Pengadilan Negeri Menggala 01	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
474	663030	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	005	01	VA	653246630301000	Bpg126 Pn Gunung Sugih	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
475	663047	Pengadilan Negeri Sukadana	005	01	VA	653246630471000	Bpg 126 Pn Sukadana 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
476	663051	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	005	01	VA	653246630511000	Bpg 116 Pengadilan Negeri Bl Umpu 01	Bri	S-1392/Wpb.12/Kp.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
477	099066	Pengadilan Negeri Pontianak	005	01	VA	653240990661000	Bpg 042 Pengadilan Negeri Pontianak	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
478	099070	Pengadilan Negeri Singkawang	005	01	VA	653240990701000	Bpg 093 Pengadilan Negeri Singkawang	Bank Rakyat Indonesia, Cabang Singkawang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
479	099087	Pengadilan Negeri Sintang	005	01	VA	653240990871000	Bpg 079 Pengadilan Negeri Sintang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
480	099091	Pengadilan Negeri Ketapang	005	01	VA	653240990911000	Bpg 094 Pengadilan Negeri Ketapang	Bri	S-1888/Wpb.12/Kp.06/2021 26 August 2021	TNP	0,00
481	099109	Pengadilan Negeri Mempawah	005	01	VA	653240991091000	Bpg 042 Pn Mempawah 099109	Bri	S-153/Wpb.12/Kp.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
482	099113	Pengadilan Negeri Sanggau	005	01	VA	653240991131000	Bpg 167 Pn Sanggau	Bri Kc Sanggau	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
483	400194	Pengadilan Negeri Putussibau	005	01	VA	653244001941000	Bpg 117 Pengadilan Negeri Putussibau	Bri Cab. Putussibau	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
484	400251	Pengadilan Tinggi Pontianak	005	01	VA	653254002511000	Bpg 042 Pengadilan Tinggi Pontianak	Bank Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/042 16 October 2020	TNP	0,00
485	401960	Pengadilan Agama Singkawang	005	01	VA	653244019601000	Bpg 093 Pa Singkawang	Bri	S-2372/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
486	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	005	01	VA	653244019611000	Bpg 079 Pengadilan Agama Nanga Pinoh 401961	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kc. Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
487	401964	Pengadilan Agama Sungai Raya	005	01	VA	653244019641000	Bpg 042 Pa Sungai Raya 401964	Bri Kc. Veteran	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
488	402361	Pengadilan Agama Pontianak	005	01	VA	653244023611000	Bpg 042 Pa Pontianak 402361	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
489	402370	Pengadilan Agama Sambas	005	01	VA	653244023701000	Bpg 093 Pengadilan Agama Sambas	Bri	S-2372/Wpb.12/Kp.06/2020/093 16 October 2020	TNP	0,00
490	402386	Pengadilan Agama Ketapang	005	01	VA	653244023861000	Bpg 094 Pa Ketapang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
491	402392	Pengadilan Agama Sanggau	005	01	VA	653254023921000	Bpg 167 Pa Sanggau	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
492	402406	Pengadilan Agama Sintang	005	01	VA	653244024061000	Bpg 079 Pengadilan Agama Sintang	Bri Cabang Sintang	S-177/Wpb.17/Kp.0530/2015 18 March 2015	TNP	0,00
493	402412	Pengadilan Agama Putussibau	005	01	VA	653244024121000	Bpg 117 Pengadilan Agama Putusssibau	Bri Cabang Putussibau	S-2732/Wpb/12.Kp.06/2020 Tanggal 16 October 2020	TNP	0,00
494	402650	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	005	01	VA	653244026501000	Bpg 042 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/042 16 October 2020	TNP	0,00
495	402669	Pengadilan Agama Mempawah	005	01	VA	653244026691000	Bpg 042 Pengadilan Agama Mempawah	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
496	531851	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	005	01	VA	653245318511000	Bpg 042 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
497	632039	Pengadilan Agama Bengkayang	005	01	VA	653246320391000	Bpg 093 Pengadilan Agama Bengkayang	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/ Wpb/ 12.Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
498	663225	Pengadilan Militer I - 05 Pontianak	005	01	VA	6532 4663 2251 000	Bpg 042 Pengadilan Militer I-05 Pontianak	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
499	670227	Pengadilan Negeri Sambas	005	01	VA	653246702271000	Bpg 093 Pengadilan Negeri Sambas 670227	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
500	670231	Pengadilan Negeri Bengkayang	005	01	VA	653246702311000	Bpg 093 Pengadilan Negeri Bengkayang 670231	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kcp. Bengkayang	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
501	681450	Pengadilan Negeri Ngabang	005	01	VA	653246814501000	Bpg: 167 Pn Ngabang 01	Bri Kcp Landak	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
502	099120	Pengadilan Negeri Palangkaraya	005	01	VA	653240991201000	Bpg 043 Pengadilan Negeri Palangka Raya	Pt. Bri Cab. Palangka Raya	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
503	099134	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	005	01	VA	653240991341000	Bpg 102 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
504	099141	Pengadilan Negeri Muara Teweh	005	01	VA	653240991411000	Bpg 080 Pn Muara Teweh Administrasi	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	2732/Wpb.12/Kp.06/2020/080 16 October 2020	TNP	0,00
505	099155	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	005	01	VA	653240991551000	Bpg 043 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas 099155	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
506	099162	Pengadilan Negeri Buntok	005	01	VA	653240991621000	Bpg 080 Pn Buntok Administrasi	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
507	099176	Pengadilan Negeri Sampit	005	01	VA	653240991761000	Bpg 044 Pengadilan Negeri Sampit 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 30 April 2021	TNP	0,00
508	400358	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	005	01	VA	653244003581000	Bpg 043 Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Bri Cabang Palangkaraya	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
509	401868	Pengadilan Agama Nanga Bulik	005	01	VA	653244018681000	Bpg 102 Pa Nanga Bulik 01	Bri Unit Nanga Bulik	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
510	401869	Pengadilan Agama Sukamara	005	01	VA	653254018691000	Bpg 102 Pa Sukamara 401869	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/1026 October 2020	TNP	0,00
511	401870	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	005	01	VA	653244018701000	Bpg Pengadilan Agama Kuala Pembuang 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/044 29 June 2021	TNP	0,00
512	401873	Pengadilan Agama Kasongan	005	01	VA	653244018731000	Bpg 044 Pengadilan Agama Kasongan 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 23 April 2021	TNP	0,00
513	401874	Pengadilan Agama Tamiang Layang	005	01	VA	653244018741000	Bpg 080 Pa T. Layang Administrasi	Bri Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
514	401875	Pengadilan Agama Pulang Pisau	005	01	VA	653244018751000	Bpg 043 Pa Pulang Pisau 401875	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
515	401876	Pengadilan Agama Kuala Kurun	005	01	VA	653244018761000	Bpg 043 Pa Kuala Kurun 401876	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
516	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	005	01	VA	653244019181000	Bpg 043 Pn Kuala Kurun 401918	Bri	S-153/Wpb.12/Kp.06/2021 12 January 2021	TNP	0,00
517	401919	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	005	01	VA	653244019191000	Bpg 102 Pn Nanga Bulik 401919	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
518	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	005	01	VA	653244019201000	Bpg 043 Pn Pulang Pisau 401920	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
519	402421	Pengadilan Agama Palangkaraya	005	01	VA	653254024211000	Bpg 043 Pengadilan Agama Palangka Raya 402421	Bri Cabang Palangka Raya	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
520	402437	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	005	01	VA	653244024371000	Bpg 102 Pa Pangkalan Bun 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Pangkalan Bun	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
521	402443	Pengadilan Agama Muara Teweh	005	01	VA	653244024431000	Bpg 080 Pa Muara Teweh Administrasi	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
522	402452	Pengadilan Agama Buntok	005	01	VA	653244024521000	Bpg 080 Pa Buntok Administrasi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
523	402468	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	005	01	VA	653244024681000	Bpg 043 Pengadilan Agama Kuala Kapuas 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas	S-709/Pb.3/2021/043 14 April 2021	TNP	0,00
524	402474	Pengadilan Agama Sampit	005	01	VA	653244024741000	Bpg 044 Pengadilan Agama Sampit 01	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
525	402989	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	005	01	VA	653244029891000	Bpg 043 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Bri	S2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
526	578843	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	005	01	VA	653245788431000	Bpg 043 Ptun Palangka Raya 578843	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
527	670191	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	005	01	VA	653246701911000	Bpg 080 Pntamianglayang Administrasi	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
528	672973	Pengadilan Negeri Kasongan	005	01	VA	653246729731000	Bpg 044 Pengadilan Negeri Kasongan 01	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
529	099180	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	005	01	VA	653240991801000	Bpg 045 Pengadilan Tinggi Bjm	Bri Kantor Cabang Martapura	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
530	099197	Pengadilan Negeri Banjarmasin	005	01	VA	9899680991971000	Bpg 045 Pengadilan Negeri Banjarmasin	Bni	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
531	099202	Pengadilan Negeri Kandangan	005	01	VA	653240992021000	Bpg 110 Pn Kandangan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
532	099219	Pengadilan Negeri Kotabaru	005	01	VA	653240992191000	Bpg 081 Pn Kotabaru 01	Bri Cabang Kotabaru	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
533	099223	Pengadilan Negeri Barabai	005	01	VA	653240992231000	Bpg 110 Pn Barabai	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Barabai	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
534	099230	Pengadilan Negeri Martapura	005	01	VA	653240992301000	Bpg 045 Pengadilan Negeri Martapura	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
535	099244	Pengadilan Negeri Tanjung	005	01	VA	653240992441000	Bpg 151 Pengadilan Negeri Tanjung	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
536	099251	Pengadilan Negeri Amuntai	005	01	VA	653240992511000	Bpg 151 Pengadilan Negeri Amuntai Kab.Hsu	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
537	099265	Pengadilan Negeri Rantau	005	01	VA	653240992651000	Bpg 110 Pn Bua Rantau	Bri	S-2732/Wpb.12/Hp.06/2020/110 16 October 2020	TNP	0,00
538	307101	Pengadilan Agama Marabahan	005	01	VA	653253071011000	Bpg 045 Pengadilan Agama Marabahan	Bri Cabang Marabahan	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
539	307115	Pengadilan Agama Pelaihari	005	01	VA	653243071151000	Bpg 168 Pengadilan Agama Pelaihari	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
540	307122	Pengadilan Agama Kotabaru	005	01	VA	653253071221000	Bpg 081 Pa Kotabaru Qq 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
541	400260	Pengadilan Negeri Marabahan	005	01	VA	653244002601000	Bpg 045 Pengadilan Negeri Marabahan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
542	400282	Pengadilan Negeri Pelaihari	005	01	VA	653244002821000	Bpg 168 Pengadilan Negeri Pelaihari 01	Bri	S-2732/Wpb.19/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
543	401921	Pengadilan Negeri Paringin	005	01	VA	653244019211000	Bpg 151 Pn Paringin 01	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
544	402449	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	005	01	VA	653254024491000	Bpg 045 Pta Banjarmasin 402449	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
545	402500	Pengadilan Agama Banjarmasin	005	01	VA	653254025001000	Bpg 045 Pengadilan Agama Bjm	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
546	402519	Pengadilan Agama Martapura	005	01	VA	653244025191000	Bpg 045 Pengadilan Agama Martapura	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Martapura	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
547	402525	Pengadilan Agama Rantau	005	01	VA	653244025251000	Bpg 110 Pa Rantau	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
548	402531	Pengadilan Agama Kandangan	005	01	VA	653244025311000	Bpg 110 Pa Bua Kandangan	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
549	402540	Pengadilan Agama Barabai	005	01	VA	653244025401000	Bpg 110 Pa Barabai Bua	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
550	402556	Pengadilan Agama Amuntai	005	01	VA	653254025561000	Bpg 151 Pengadilan Agama Kelas 1B Amuntai	Bank Bri Cabang Amuntai	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
551	402562	Pengadilan Agama Tanjung	005	01	VA	653244025621000	Bpg 151 Pengadilan Agama Tanjung	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
552	402571	Pengadilan Agama Negara	005	01	VA	653244025711000	Bpg 110 Pa (01) Negara	Bri	S-1888/Wpb.12/Kp.06/2021 26 August 2021	TNP	0,00
553	526730	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin	005	01	VA	653255267301000	Bpg 045 Pttun Banjarmasin	Bri Cabang Martapura	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
554	531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	005	01	VA	653245318651000	Bpg 045 Ptun Banjarmasin	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
555	632043	Pengadilan Agama Banjarbaru	005	01	VA	653246320431000	Bpg 045 Kantor Pa Banjarbaru	Bri Cab. Martapura	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
556	653458	Pengadilan Negeri Banjarbaru	005	01	VA	653246534581000	Bpg 045 Pn.Banjarbaru	Bri Cabang Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
557	663232	Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin	005	01	VA	653246632321000	Bpg 045 Pengadilan Militer I06 Bjm	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
558	670206	Pengadilan Negeri Batulicin	005	01	VA	653246702061000	Bpg 081 Pn Batulicin 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
559	682260	Pengadilan Agama Batulicin	005	01	VA	653246822601000	Bpg 081 Pa Batulicin	Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk Persero	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
560	099286	Pengadilan Negeri Samarinda	005	01	VA	653240992861000	Bpg 046 Pengadilan Negeri Samarinda	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
561	099290	Pengadilan Negeri Tenggarong	005	01	VA	653240992901000	Bpg 046 Pengadilan Negri Tenggarong	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
562	099308	Pengadilan Negeri Balikpapan	005	01	VA	653240993081000	Bpg 047 Kantor Pn Balikpapan	Bri Cabang Balikpapan	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
563	307161	Pengadilan Agama Tenggarong	005	01	VA	653243071611000	Bpg 046 Pengadilan Agama Tenggarong 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
564	307178	Pengadilan Agama Samarinda	005	01	VA	653253071781000	Bpg 046 Pengadilan Agama Samarinda	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
565	307182	Pengadilan Agama Tanah Grogot	005	01	VA	653243071821000	Bpg 047 Pengadilan Agama Tanah Grogot	Bri, Kc. Tanah Grogot	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
566	307199	Pengadilan Agama Balikpapan	005	01	VA	653243071991000	Bpg 047 Pengadilan Agama Balikpapan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
567	307204	Pengadilan Agama Tanjung Redep	005	01	VA	653243072041000	Bpg 153 Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
568	400291	Pengadilan Negeri Tanjung Redep	005	01	VA	653244002911000	Bpg 153 Pengadilan Negeri Tanjung Redeb (291)	Bri Cabang Tanjung Redeb	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
569	400302	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	005	01	VA	653244003021000	Bpg 047 Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
570	400528	Pengadilan Tinggi Samarinda	005	01	VA	653244005281000	Bpg 046 Pengadilan Tinggi Samarinda	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
571	401877	Pengadilan Agama Penajam	005	01	VA	8100774018771000	Bpg 047 Pengadilan Agama Penajam	Mandiri Syariah	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
572	401878	Pengadilan Agama Sendawar	005	01	VA	653244018781000	Bpg 046 Pengadilan Agama Sendawar 01	Pt.Bri (Persero) Tbk, Kc. Sendawar	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
573	401924	Pengadilan Negeri Penajam	005	01	VA	653244019241000	Bpg 047 Pn Penajam Kelas Ii	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
574	402480	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	005	01	VA	653244024801000	Bpg 046 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/046 16 October 2020	TNP	0,00
575	477380	Pengadilan Negeri Kutai Barat	005	01	VA	653244773801000	Bpg 046 Pengadilan Negeri Kutai Barat 01	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
576	559857	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	005	01	VA	653245598571000	Bpg 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
577	652080	Pengadilan Agama Bontang	005	01	VA	653246520801000	Bpg 046 Pengadilan Agama Bontang	Bank Republik Indinesia /Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
578	652097	Pengadilan Agama Sangatta	005	01	VA	653246520971000	Bpg 046 Pa Sangatta	Bri	S-2752/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
579	662972	Pengadilan Negeri Bontang	005	01	VA	653246629721000	Bpg 046 Pengadilan Negeri Bontang	Bank Rakyat Indonesia Kc Bontang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
580	662986	Pengadilan Negeri Sangatta	005	01	VA	653256629861000	Bpg 046 Pengadilan Negeri Sangatta 01	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
581	663246	Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan	005	01	VA	653246632461000	Bpg 047 Pengadilan Militer I 07 Balikpapan	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
582	099312	Pengadilan Tinggi Manado	005	01	VA	653240993121000	Bpg 049 Pengadilan Tinggi Manado 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
583	099329	Pengadilan Negeri Manado	005	01	VA	653240993291000	Bpg 049 Pengadilan Negeri Manado 01	Bank Rakyat Indonesia	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
584	099333	Pengadilan Negeri Kotamubago	005	01	VA	653240993331000	Bpg 158 Pengadilan Negeri Kotamobagu 01	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
585	099340	Pengadilan Negeri Tahuna	005	01	VA	653240993401000	Bpg 083 Pengadilan Negeri Tahuna	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
586	568725	Pengadilan Negeri Bitung	005	01	VA	653245687251000	Bpg 179 Pn Bitung	Bri Cabang Bitung	S-122/Wpb.29/Kp.179/2015 19 May 2015	TNP	0,00
587	099354	Pengadilan Negeri Tondano	005	01	VA	653240993541000	Bpg 049 Pengadilan Negeri Tondano 01	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
588	307225	Pengadilan Agama Manado	005	01	VA	653243072251000	Bpg Pengadilan Agama Manado 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
589	307232	Pengadilan Agama Kotamobagu	005	01	VA	653243072321000	Bpg 158 Pengadilan Agama Kotamobagu 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
590	307246	Pengadilan Agama Tahuna	005	01	VA	653243072461000	Bpg 083 Pengadilan Agama Tahuna	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
591	401888	Pengadilan Agama Lolak	005	01	VA	653244018881000	Bpg 158 Pengadilan Agama Lolak 01	Bri	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
592	401889	Pengadilan Agama Bolaang Uki	005	01	VA	653244018891000	Bpg 158 Pengadilan Agama Bolaang Uki 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
593	401890	Pengadilan Agama Boroko	005	01	VA	653244018901000	Bpg 158 Pengadilan Agama Boroko 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
594	401891	Pengadilan Agama Tutuyan	005	01	VA	653244018911000	Bpg 158 Pengadilan Agama Tutuyan	Bri	S-1916/Wpb.12/Kp.06/2021 30 August 2021	TNP	0,00
595	401925	Pengadilan Negeri Melonguane	005	01	VA	653244019251000	Bpg 179 Pn Melonguane	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
596	402681	Pengadilan Tinggi Agama Manado	005	01	VA	653254026811000	Bpg 049 Pta Manado	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
597	402701	Pengadilan Agama Tondano	005	01	VA	653244027011000	Bpg 049 Pengadilan Agama Tondano 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
598	526734	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	005	01	VA	653255267341000	Bpg 049 Pttun Manado	Bri	: S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
599	531872	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	005	01	VA	653245318721000	Bpg 049 Ptun Manado 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
600	604751	Pengadilan Agama Bitung	005	01	VA	8100776047511000	Bpg 179 Pa Bitung	Bsi Cabang Bitung	S-2384/Kpn.1206/2022 21 November 2022	TNP	0,00
601	663360	Pengadilan Militer Iii - 17 Manado	005	01	VA	653256633601000	Bpg 049 Dilmil Iii-17 Manado	Bri	S-2730/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
602	670210	Pengadilan Negeri Airmadidi	005	01	VA	653256702101000	Bpg 179 Pn Airmadidi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
603	673034	Pengadilan Negeri Amurang	005	01	VA	653246730341000	Bpg 049 Pn Amurang	Bri Kcp Amurang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 21 April 2021	TNP	0,00
604	682171	Pengadilan Agama Amurang	005	01	VA	653246821711000	Bpg 049 Pengadilan Agama Amurang	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
605	099375	Pengadilan Negeri Palu	005	01	VA	653240993751000	Bpg 051 Pengadilan Negeri Palu	Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kc Palu	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
606	099382	Pengadilan Negeri Toli-Toli	005	01	VA	653240993821000	Bpg 082 Pn Toli Toli	Bri Cabang Tolitoli	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
607	099396	Pengadilan Negeri Luwuk	005	01	VA	653240993961000	Bpg 053 Pn Luwuk 01	Pt. Bri Kc. Luwuk	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
608	099401	Pengadilan Negeri Poso	005	01	VA	653240994011000	Bpg 052 Pengadilan Negeri Poso	Bri	1674/Sek.Ku.01/9/2020 25 September 2020	TNP	0,00
609	307271	Pengadilan Agama Kodya Palu	005	01	VA	653243072711000	Bpg 051 Pa Kodya Palu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
610	307288	Pengadilan Agama Toli Toli	005	01	VA	653243072881000	Bpg 082 Pa Tolitoli Qq 307288	Pt. Bri Cabang Tolitoli	S-384/Wpb.26/Kp.0430/2015 23 April 2015	TNP	0,00
611	307292	Pengadilan Agama Poso	005	01	VA	8100773072921000	Bpg 052 Pa Poso 307292	Pt Bank Mandiri Syariah Kc Poso	S-2208/Wpb.12/Kp.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
612	307300	Pengadilan Agama Luwuk	005	01	VA	653243073001000	Bpg 053 Pengadilan Agama Luwuk	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
613	400534	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	005	01	VA	653244005341000	Bpg 051 Pengadilan Tinggi	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
614	401884	Pengadilan Agama Ampana	005	01	VA	8100774018841000	Bpg 052 Pa. Ampana 401884	Bank Syariah Indonesia Kc Ampana	S-2075/Wpb.12/Kp.06/2021 9 September 2021	TNP	0,00
615	477202	Pengadilan Negeri Donggala	005	01	VA	653254772021000	Bpg 051 Pengadilan Negeri Donggala	Bri Unit Donggala	S-2732/Wpb.12/Kp.06/20201 16 October 2020	TNP	0,00
616	576249	Pengadilan Tinggi Agama Palu	005	01	VA	653245762491000	Bpg 051 Pta Palu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
617	578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	005	01	VA	653245788501000	Bpg 051 Ptun Palu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
618	604765	Pengadilan Agama Donggala	005	01	VA	653246047651000	Bpg 051 Pengadilan Agama Donggala	Bri Kc Jakarta Veteran	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
619	652102	Pengadilan Agama Buol	005	01	VA	653246521021000	Bpg: 082 Pa Buol 652102	Bri	000040/082 28 June 2021	TNP	0,00
620	652119	Pengadilan Agama Bungku	005	01	VA	653246521191000	Bpg 052 Pa Bungku 652119	Bri Cabang Poso	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
621	652123	Pengadilan Agama Banggai	005	01	VA	653246521231000	Bpg 053 Pa.Banggai	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
622	670248	Pengadilan Negeri Buol	005	01	VA	653246702481000	Bpg : 082 Pn Buol 670248	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kc Toli-Toli	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
623	672980	Pengadilan Negeri Parigi	005	01	VA	8100776729801000	Bpg 051 Pengadilan Negeri Parigi	Bank Syariah Indonesia	S-2061/Kpn.1206/2022 5 October 2022	TNP	0,00
624	682192	Pengadilan Agama Parigi	005	01	VA	8100776821921000	Bpg 051 Pengadilan Agama Parigi	Bank Syariah Indonesia	S-497/Kpn.1206/2023/51 28 February 2023	TNP	0,00
625	099418	Pengadilan Tinggi Makassar	005	01	VA	653240994181000	Bpg 136 Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 099418	Bank Rakyat Indonesia	S-1448/Wpb.25/Kp.02/2021 29 April 2021	TNP	0,00
626	099422	Pengadilan Negeri Makassar	005	01	VA	8100120994221000	Bpg 136 Pn Ujung Pandang	Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
627	099439	Pengadilan Negeri Sungguminasa	005	01	VA	653240994391000	Bpg 136 Pn Sungguminasa 099439	Bri	S-1766/Wpb.25/Kp/02/2021 27 May 2021	TNP	0,00
628	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	005	01	VA	653240994431000	Bpg 136 Pengadilan Negeri Pangkajene (099443)	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-902/Wpb.24/Kp.0250/2015 2 April 2015	TNP	0,00
629	099450	Pengadilan Negeri Barru	005	01	VA	653240994501000	Bpg 057 Pn Barru (01)	Bri Cabang Barru	000077 27 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
630	099464	Pengadilan Negeri Takalar	005	01	VA	653240994641000	Bpg 136 Pengadilan Negeri Takalar 099464	Bri Cabang Takalar	S-1364/Wpb.25/Kp.02/2021 22 April 2021	TNP	0,00
631	099471	Pengadilan Negeri Maros	005	01	VA	653240994711000	Bpg 136 Pengadilan Negeri Maros 099471	Bri	Pmk183/Pmk.05/2019 5 December 2019	TNP	0,00
632	099485	Pengadilan Negeri Jeneponto	005	01	VA	653240994851000	Bpg Pengadilan Negeri Jeneponto	Bri Cabang Jeneponto	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
633	099492	Pengadilan Negeri Pare-Pare	005	01	VA	653240994921000	Bpg 057 Pengadilan Negeri Parepare	Pt. Bri Cabang Parepare	000061 16 April 2021	TNP	0,00
634	099507	Pengadilan Negeri Enrekang	005	01	VA	653250995071000	Bpg 057 Pengadilan Negeri Enrekang	Bri Cabang Enrekang	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 9 June 2021	TNP	0,00
635	099511	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	005	01	VA	653240995111000	Bpg 057 Pengadilan Negeri Sidrap	Bri Cabang.Sidrap	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
636	099528	Pengadilan Negeri Pinrang	005	01	VA	653240995281000	Bpg 057 Pengadilan Negeri Pinrang 01	Bri	000062 16 April 2021	TNP	0,00
637	099532	Pengadilan Negeri Watampone	005	01	VA	653240995321000	Bpg 055 Pengadilan Negeri	Bri	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/Pmk/.05/2019 5 December 2019	TNP	0,00
638	099549	Pengadilan Negeri Watansopeng	005	01	VA	653240995491000	Bpg 055 Pengadilan Negeri Watansoppeng	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
639	099553	Pengadilan Negeri Sengkang	005	01	VA	653250995531000	Bpg 055 Pengadilan	Bri Cab. Sengkang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
640	099560	Pengadilan Negeri Bantaeng	005	01	VA	653240995601000	Bpg 056 Pengadilan Negeri Bantaeng 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
641	099574	Pengadilan Negeri Sinjai	005	01	VA	653240995741000	Bpg 177 Pengadilan Negeri	Bri	S-1197/Wpb.12/Kp.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
642	099581	Pengadilan Negeri Bulukumba	005	01	VA	653240995811000	Bpg 056 Pengadilan Negeri Bulukumba	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
643	099595	Pengadilan Negeri Selayar	005	01	VA	653240995951000	Bpg:155 Pn Selayar (099595)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
644	099600	Pengadilan Negeri Palopo	005	01	VA	653240996001000	Bpg 058 Pengadilan Negeri Palopo	Bri Cabang Palopo	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
645	099617	Pengadilan Negeri Makale	005	01	VA	653240996171000	Bpg 170 Pengadilan Negeri Makale099617	Bri Cabang Makale Di Rantepao	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
646	307424	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	005	01	VA	653243074241000	Bpg 136 Pengadilan Tinggi Agama Makassar 307424	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
647	307431	Pengadilan Agama Pangkajene	005	01	VA	653243074311000	Bpg 136 Pa Pangkajene (307431)	Bri Cab.Pangkep	S-3701-Wpb.25/Kp.02/2021 4 November 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
648	307445	Pengadilan Agama Maros	005	01	VA	653243074451000	Bpg 136 Pengadilan Agama Maros 307445	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
649	307452	Pengadilan Agama Makassar	005	01	VA	653243074521000	Bpg 136 Pengadilan Agama Ujung Pandang 307452	Bri	S-1385/Wpb.25/Kp.02/2021 26 April 2021	TNP	0,00
650	307466	Pengadilan Agama Jeneponto	005	01	VA	653243074661000	Bpg 056 Pengadilan Agama Jeneponto 01	Bri Cabang Jeneponto	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
651	307470	Pengadilan Agama Takalar	005	01	VA	653243074701000	Bpg 136 Pa Takalar 307470	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
652	307487	Pengadilan Agama Barru	005	01	VA	653243074871000	Bpg 057 Pengadilan Agama Barru	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
653	307491	Pengadilan Agama Sungguminasa	005	01	VA	653243074911000	Bpg 136 Pa Sungguminasa 307491	B R I	S-1510/Wpb.25/Kp.02/2021 3 May 2021	TNP	0,00
654	307509	Pengadilan Agama Watampone	005	01	VA	653243075091000	Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
655	307513	Pengadilan Agama Sengkang	005	01	VA	653243075131000	Bpg 055 Pengadilan Agama Sengkang	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
656	307520	Pengadilan Agama Watan Soppeng	005	01	VA	653243075201000	Bpg 055 Pa Watansoppeng	Bri	S-146/Wpb.24/Kp.0830/2015 Tanggal 03 Februari 2015 3 February 2015	TNP	0,00
657	307534	Pengadilan Agama Bantaeng	005	01	VA	653243075341000	Bpg 056 Pengadilan Agama Bantaeng	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
658	307541	Pengadilan Agama Bulukumba	005	01	VA	653243075411000	Bpg 056 Pengadilan Agama Bulukumba	Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Persero	S-709/Pb.3/2021 12 April 2021	TNP	0,00
659	307555	Pengadilan Agama Sinjai	005	01	VA	653243075551000	Bpg 177 Pengadilan Agama Sinjai 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
660	307562	Pengadilan Agama Selayar	005	01	VA	653243075621000	Bpg 155 Pengadilan Agama Selayar	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
661	307576	Pengadilan Agama Pare Pare	005	01	VA	653243075761000	Bpg 057 Pengadilan Agama Parepare	Bri Cab.Parepare	000051 13 April 2021	TNP	0,00
662	307580	Pengadilan Agama Pinrang	005	01	VA	653243075801000	Bpg 057 Pengeluaran Pengadilan Agama Pinrang	Bank Rakyat Indonesia	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
663	307597	Pengadilan Agama Enrekang	005	01	VA	653243075971000	Bpg 057 Pengadilan Agama Enrekang	Bri Cabang Enrekang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
664	307602	Pengadilan Agama Sidenreng	005	01	VA	653243076021000	Bpg 057 Pa Sidrap Qq 01	Bri	000076 27 April 2021	TNP	0,00
665	307619	Pengadilan Agama Palopo	005	01	VA	653243076191000	Bpg 058 Kantor Pengadilan Agama Palopo	Bri Cabang Palopo	No. S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 September 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
666	307623	Pengadilan Agama Makale	005	01	VA	653253076231000	Bpg 170 Pengadilan Agama Makale 307623	Bri	S-1654/Wpb.12/Kp.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
667	401879	Pengadilan Agama Belopa	005	01	VA	653244018791000	Bpg 058 Pa Belopa	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
668	401883	Pengadilan Agama Malili	005	01	VA	653244018831000	Bpg 058 Pengadilan Agama Malili	Bri	S-1308/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
669	401928	Pengadilan Negeri Belopa	005	01	VA	653244019281000	Bpg 058 Pengadilan Negeri Belopa 401928	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
670	526711	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	005	01	VA	653245267111000	Bpg 136 Pengadilan Tinggi Tun Ujungpandang (526711)	Bri Cab. Ahmad Yani Makassar	S-1429/Wpb.25/Kp.02/2021 28 April 2021	TNP	0,00
671	526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	005	01	VA	653245267711000	Bpg 136 Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	Bri	000139/136 17 July 2021	TNP	0,00
672	632050	Pengadilan Agama Masamba	005	01	VA	653246320501000	Bpg 058 Pengadilan Agama Masamba	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
673	663356	Pengadilan Militer Iii - 16 Makassar	005	01	VA	653246633561000	Bpg 136 Pengadilan Militer Iii-16 Di Makassar	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
674	672927	Pengadilan Negeri Masamba	005	01	VA	653246729271000	Bpg 058 Pengadilan Negeri Masamba	Bri Cab. Masamba	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
675	673013	Pengadilan Negeri Malili	005	01	VA	653246730131000	Bpg 058 P N Malili	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
676	099659	Pengadilan Negeri Kendari	005	01	VA	653240996591000	Bpg 060 Pn Kendari 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
677	099663	Pengadilan Negeri Bau-Bau	005	01	VA	653240996631000	Bpg 103 Pengadilan Negeri Baubau	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
678	099670	Pengadilan Negeri Raha	005	01	VA	653240996701000	Bpg 157 Pengadilan Negeri Raha	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 20 October 2020	TNP	0,00
679	099684	Pengadilan Negeri Kolaka	005	01	VA	653250996841000	Bpg 156 Pengadilan Negeri Kolaka	Bank Rakyat Ndonesia Cab. Kolaka	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
680	307690	Pengadilan Agama Kolaka	005	01	VA	653243076901000	Bpg 156 Pengadilan Agama Kolaka	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Kc Kolaka	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
681	307708	Pengadilan Agama Raha	005	01	VA	653253077081000	Bpg 157 Pengadilan Agama Raha	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
682	307712	Pengadilan Agama Kendari	005	01	VA	653243077121000	Bpg 060 Pa Kendari 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
683	307729	Pengadilan Agama Bau-Bau	005	01	VA	653243077291000	Bpg 103 Pengadilan Agama Baubau	Bri Kantor Cabang Baubau	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
684	400540	Pengadilan Tinggi Kendari	005	01	VA	653254005401000	Bpg 060 Pt Kendari 01	Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendari	S-0416/Wpb.27/Kp.060/2015 30 March 2015	TNP	0,00
685	401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	005	01	VA	653244018851000	Bpg 103 Pa Wangi Wangi 401885	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
686	401886	Pengadilan Agama Lasusua	005	01	VA	653244018861000	Bpg 156 Pengadilan Agama Lasusua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
687	401887	Pengadilan Agama Rumbia	005	01	VA	653244018871000	Bpg 060 Pengadilan Agama Rumbia 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
688	401926	Pengadilan Negeri Lasusua	005	01	VA	653244019261000	Bpg 156 Pengadilan Negeri Lasusua 01	Bri Kcp Lasusua	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
689	401927	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	005	01	VA	653244019271000	Bpg 103 Pn Wangi Wangi 401927	Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wangi-Wangi	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
690	477224	Pengadilan Negeri Una Aha	005	01	VA	653244772241000	Bpg 060 Pn Unaaha 01	Bank Rakyat Indonesia	S-273/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
691	576253	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	005	01	VA	653245762531000	Bpg 060 Pta Kendari 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
692	578864	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari	005	01	VA	653245788641000	Bpg 060 Ptun Kendari	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
693	604772	Pengadilan Agama Unaaha	005	01	VA	653246047721000	Bpg 060 Pa Unaaha (01)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
694	681439	Pengadilan Negeri Andoolo	005	01	Giro	653246814391000	Bpg 060 Pn Andoolo (01)	Bri Cabang By Pass Kendari	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
695	681443	Pengadilan Negeri Pasarwajo	005	01	VA	653246814431000	Bpg 103 Pn Pasarwajo	Bri Cabang Baubau	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
696	682207	Pengadilan Agama Andoolo	005	01	VA	653246822071000	Bpg 060 Pa Andoolo 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
697	682211	Pengadilan Agama Pasarwajo	005	01	VA	653246822111000	Bpg 103 Pa Pasarwajo	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
698	099691	Pengadilan Tinggi Ambon	005	01	VA	653240996911000	Bpg 061 Pengadilan Tinggi Ambon	Bri	S-2732/ Wpb.12/ Kp.06/ 2020/ 061 16 October 2020	TNP	0,00
699	099706	Pengadilan Negeri Ambon	005	01	VA	653240997061000	Bpg (061) Pengadilan Negeri Ambon	Bri Cabang Ambon	S-718/Wpb.31/Kp.061.3/2015 11 May 2015	TNP	0,00
700	099710	Pengadilan Negeri Masohi	005	01	VA	653240997101000	Pengadilan Negeri Masohi	Bri	S-709/Pb.3/2021 19 April 2021	TNP	0,00
701	099727	Pengadilan Negeri Tual	005	01	VA	653240997271000	Bpg 084 Pn Tual	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
702	307754	Pengadilan Agama Ambon	005	01	VA	653253077541000	Bpg 061 Pengadilan Agama Ambon	Bri Cabang Ambon	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
703	307761	Pengadilan Agama Tual	005	01	Giro	28101000052308	Bpg 084 Pengadilan Agama Tual	Pt. Bri (Persero) Tbk. Cabang Tual	S-288/Wbp.31/Kp.0330/2015 4 February 2015	TNP	0,00
704	307775	Pengadilan Agama Masohi	005	01	VA	653243077751000	Bpg 173 Pengadilan Agama Masohi	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
705	401894	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	005	01	VA	653244018941000	Bpg 173 Pa Dataran Hunipopu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
706	401895	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	005	01	VA	653244018951000	Bpg 173 Pa Dataran Hunimoa 401895	Bank Bri	Kppn S-2732/ Wpb.12/ Kp.06/ 2020 16 October 2020	TNP	0,00
707	401898	Pengadilan Agama Namlea	005	01	VA	653244018981000	Bpg 061 Pengadilan Agama Namlea	Bri Cab. Ambon	S-721/Pb.3/2021/061 21 April 2021	TNP	0,00
708	401929	Pengadilan Negeri Dobo	005	01	VA	653244019291000	Bpg 084 Pengadilan Negeri Dobo	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
709	401930	Pengadilan Negeri Namlea	005	01	VA	653244019301000	Bpg 061 Pengadilan Negeri Namlea	Bri	S-2732/Wpb.12.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
710	401970	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	005	01	VA	653244019701000	Bpg 173 Pn Dataran Hunipopu	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kc Jakarta Jl. Veteran No 8 Jakarta	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
711	401971	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	005	01	VA	653244019711000	Bpg 173 Pn Dataran Hunimoa 401971	Bri	S-1335/ Wpb.32/ Kp.0402/ 2018 31 December 2018	TNP	0,00
712	402710	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	005	01	VA	653254027101000	Bpg 061 Pengadilan Tinggi Agama Ambon	Bri Kcp Waihaong	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
713	539117	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	005	01	VA	653255391171000	Bpg 061 Ptun Ambon 1	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
714	663377	Pengadilan Militer Iii - 18 Ambon	005	01	VA	653246633771000	Bpg (061) Pengadilan Militer Iii-18 Ambon	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
715	672931	Pengadilan Negeri Saumlaki	005	01	VA	653256729311000	Bpg 104 Pengadilan Negeri Saumlaki Untuk Ba 01	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 25 May 2021	TNP	0,00
716	099773	Pengadilan Tinggi Denpasar	005	01	VA	653240997731000	Bpg 037 Pengadilan Tinggi Denpasar	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
717	099780	Pengadilan Negeri Denpasar	005	02	VA	653240997801000	Bpg 037 Pengadilan Negeri Denpasar 01	Bank Rakyat Indonesia	S-1197/Wpb.12/Kp.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
718	099794	Pengadilan Negeri Singaraja	005	01	VA	653240997941000	Bpg 132 Pn Singaraja	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
719	099802	Pengadilan Negeri Negara	005	01	VA	653240998021000	Bpg 132 Pengadilan Negeri Negara	Pt. Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
720	099816	Pengadilan Negeri Semarapura	005	01	VA	653240998161000	Bpg 154 Pn Semarapura	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
721	099820	Pengadilan Negeri Tabanan	005	01	VA	653240998201000	Bpg 037 Pengadilan Negeri Tabanan	Bri	001687/037 23 April 2021	TNP	0,00
722	099837	Pengadilan Negeri Amlapura	005	01	VA	653240998371000	Bpg 154 Pn Amlapura(01)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
723	099841	Pengadilan Negeri Gianyar	005	01	VA	653240998411000	Bpg 037 Pengadilan Negeri Gianyar 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
724	099858	Pengadilan Negeri Bangli	005	01	VA	653240998581000	Bpg 154 Pn Bangli 01	Pt. Bank Bri Cabang Bangli	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
725	307839	Pengadilan Agama Singaraja	005	01	VA	653253078391000	Bpg 132 Pengadilan Agama Singaraja	Bri Cabang Singaraja	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
726	402726	Pengadilan Agama Bangli	005	01	VA	653244027261000	Bpg 154 Pa Bangli	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
727	402732	Pengadilan Agama Negara	005	01	VA	653244027321000	Bpg 132 Pengadilan Agama Negara 402732	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kc Negara	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
728	402741	Pengadilan Agama Karangasem	005	01	VA	653244027411000	Bpg 154 Pa Karangasem (01)	Bri Cabang Amlapura	S-2372/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
729	402757	Pengadilan Agama Tabanan	005	01	VA	653244027571000	Bpg 037 Pengadilan Agama Tabanan 01	Bri	001763/037 31 May 2021	TNP	0,00
730	402763	Pengadilan Agama Klungkung	005	01	VA	653244027631000	Bpg 154 Pa Klungkung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/20220 16 October 2020	TNP	0,00
731	402772	Pengadilan Agama Gianyar	005	01	VA	653244027721000	Bpg 037 Pengadilan Agama Gianyar 01	Bri Cabang Gianyar	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
732	526724	Pengadilan Tinggi Agama Bali	005	01	VA	653255267241000	Bpg 037 Pta Bali	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
733	307822	Pengadilan Agama Denpasar	005	01	VA	653243078221000	Bpg 037 Pengadilan Agama Denpasar 01	Bri Cabang Gajah Mada Denpasar	S-50/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2022	TNP	0,00
734	559861	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	005	01	VA	653245598611000	Bpg 037 Ptun Denpasar	Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	001704 30 April 2021	TNP	0,00
735	614731	Pengadilan Agama Badung	005	01	VA	653246147311000	Bpg 037 Pengadilan Agama Badung	Bank Rakyat Indonesia	001824 9 August 2021	TNP	0,00
736	663335	Pengadilan Militer Iii - 14 Denpasar	005	01	VA	653246633351000	Bpg 037 Dilmil Iii-14 Denpasar	Bri	001679/037 22 April 2021	TNP	0,00
737	099862	Pengadilan Negeri Mataram	005	01	VA	653240998621000	Bpg 038 Pengadilan Negeri Mataram	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
738	099879	Pengadilan Negeri Bima	005	01	VA	653240998791000	Rpl 071 Pn Raba Bima	Bank Rakyat Indonesia Cabang Bima	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
739	099883	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	005	01	VA	653240998831000	Bpg 101 Pn Sumbawa 01	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
740	099890	Pengadilan Negeri Selong	005	01	VA	653250998901000	Bpg 169 Pengadilan Negeri Selong	Pt. Bri Cabang Selong	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
741	099905	Pengadilan Negeri Dompu	005	01	VA	653240999051000	Bpg 071 Pn Dompu 01	Pt. Bri (Persero) Cabang Dompu	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
742	099912	Pengadilan Negeri Praya	005	01	VA	653240999121000	Bpg 038 Pengadilan Negeri Praya	Bank Rakyat Indonesia (Cabang Praya) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
743	307885	Pengadilan Agama Mataram	005	01	VA	653253078851000	Bpg 038 Pengadilan Agama Mataram	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
744	307892	Pengadilan Agama Sumbawa	005	01	VA	653243078921000	Bpg101 Pengadilan Agama Sumbawa 01	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
745	307907	Pengadilan Agama Praya	005	01	VA	653243079071000	Bpg 038 Pengadilan Agama Praya	Bri Praya	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
746	307911	Pengadilan Agama Selong	005	01	VA	653243079111000	Bpg 169 Pengadilan Agama Selong	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
747	307928	Pengadilan Agama Bima	005	01	VA	653243079281000	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bima	Pt. Bank Rakyat Indonesia Cab. Bima	000195/071 5/27/2021 27 May 2021	TNP	0,00
748	307932	Pengadilan Agama Dompu	005	01	VA	653243079321000	Bpg 071 Pa Dompu	Bri	S-259/Wpb.12/Kp.06/2021 5 February 2021	TNP	0,00
749	400559	Pengadilan Tinggi Mataram	005	01	VA	653244005591000	Bpg 038 Pengadilan Tinggi Mataram	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.- Bank Bri Cab. Mataram	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
750	402788	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	005	01	VA	653244027881000	Bpg 038 Pengadilan Tinggi Agama Mataram	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
751	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	005	01	VA	8100125267361000	Bpg 038 Pttun Mataram	Mandiri	S-4/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
752	578871	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	005	01	VA	653245788711000	Bpg 038 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
753	614727	Pengadilan Agama Giri Menang	005	01	VA	653246147271000	Bpg 175 038 614727 0	Pt. Bri (Persero). Tbk	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
754	682274	Pengadilan Agama Taliwang	005	01	VA	653246822741000	Bpg 01 Pengadilan Agama Taliwang 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kcp Taliwang	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
755	099926	Pengadilan Negeri Kupang	005	01	VA	9899680999261000	Bpg 039 Pn Kupang (099926)	Bni	S-2736/Wbp.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
756	099930	Pengadilan Negeri Atambua	005	01	VA	653240999301000	Bpg 172 Pengadilan Negeri 01 Atambua	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 20 October 2020	TNP	0,00
757	099947	Pengadilan Negeri Soe	005	01	VA	653240999471000	Bpg 039 Pn Soe (099947)	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
758	099951	Pengadilan Negeri Kefamenanu	005	01	VA	653240999511000	Bpg 172 Pengadilan Negeri Kefamenanu	Bri Cabang Kefamenanu	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
759	099968	Pengadilan Negeri Waingapu	005	01	VA	653240999681000	Bpg 041 Pengadilan Negeri	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
760	099972	Pengadilan Negeri Waikabubak	005	01	VA	9899680999721000	Bpg 041 Pengadilan Negeri Waikabubak 01	Bni	S-896/Wpb.12/Kp.06.2021 24 May 2021	TNP	0,00
761	099989	Pengadilan Negeri Ende	005	01	VA	653240999891000	Bpk 040 Pengadilan Negeri Ende.01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
762	099993	Pengadilan Negeri Maumere	005	01	VA	653240999931000	Bpg 040 Pengadilan Negeri Maumere 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	S-2732/Wpb-12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
763	307949	Pengadilan Agama Waikabubak	005	01	VA	653243079491000	Bpg 041 Pengadilan Agama Waikabubak 01	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
764	307953	Pengadilan Agama Kupang	005	01	VA	653243079531000	Bpg 039 Pa Kupang (307953)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
765	307960	Pengadilan Agama Kalabahi	005	01	VA	653253079601000	Bpg 039 Pa Kalabahi 307960	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
766	307974	Pengadilan Agama Ende	005	01	VA	653243079741000	Bpg 040 Pengadilan Agama Ende 01	Bri Cabang Ede	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
767	307981	Pengadilan Agama Waingapu	005	01	VA	653243079811000	Bpg 041 Pengadilan Agama Waingapu 01	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
768	400007	Pengadilan Negeri Larantuka	005	01	VA	653244000071000	Bpg174 Pengadilan Negeri Larantuka 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
769	400013	Pengadilan Negeri Ruteng	005	01	VA	653244000131000	Bpg 111 Pengadilan Negeri Ruteng 01	Bri Cabang Ruteng	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
770	400157	Pengadilan Negeri Bajawa	005	01	VA	653244001571000	Bpg 111 Pengadilan Negeri Bajawa 01	Bri	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
771	400163	Pengadilan Negeri Kalabahi	005	01	VA	653244001631000	Bpg 039 Pn Kalabahi	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
772	400245	Pengadilan Tinggi Kupang	005	01	VA	9899684002451000	Bpg 039 Pengadilan Tinggi Kupang (400245)	Bank Negara Indonesia Cabang Kupang	S-896/Wpb.12/Kp.06.2021 24 May 2021	TNP	0,00
773	402794	Pengadilan Agama Larantuka	005	01	VA	653244027941000	Bpg 174 Pengadilan Agama Larantuka	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Larantuka	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
774	402808	Pengadilan Agama Ruteng	005	01	VA	9899684028081000	Bpg175111402808	Bni	S-2732/Wbp.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
775	402814	Pengadilan Agama Atambua	005	01	VA	653244028141000	Bpg 172 Pengadilan Agama 01 Atambua	Bri Cabang Atambua	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
776	402820	Pengadilan Agama Soe	005	01	VA	653244028201000	Bpg 039 Pa Soe 402820	Bri Cabang Soe	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
777	402839	Pengadilan Agama Kefamenanu	005	01	VA	653244028391000	Bpg 172 Pa 01 Kefamenanu	Bri Cabang Kefamenanu	- 4 May 2021	TNP	0,00
778	402845	Pengadilan Agama Bajawa	005	01	VA	653254028451000	Bpg 111 Pengadilan Agama Bajawa 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
779	402851	Pengadilan Agama Maumere	005	01	VA	653244028511000	Bpg 040 Pa Maumere 01	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
780	477230	Pengadilan Negeri Lembata	005	01	Giro	9899684772301000	Bpg174 Pengadilan Negeri Lembata 01	Bni Kln Lewoleba	S-276/Wpb.23/Kp.174/2015 8 May 2015	TNP	0,00
781	477249	Pengadilan Negeri Rote Ndao	005	01	VA	653244772491000	Bpg.049 Pn Rote Ndao	Bri	B-22/Bua.3/Ku.03/4/2021 27 April 2021	TNP	0,00
782	539121	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	005	01	VA	653245391211000	Bpg 039 Ptun Kpg 539121	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
783	576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	005	01	VA	653245762601000	Bpg 039 Pta Kupang 576260	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
784	632064	Pengadilan Agama Lewoleba	005	01	VA	653246320641000	Bpg174 Pengadilan Agama Lewoleba 01	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
785	663342	Pengadilan Militer Iii - 15 Kupang	005	01	VA	653246633421000	Bpg 039 Pengadilan Militer Iii-15	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
786	673020	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	005	01	VA	653246730201000	Bpg111 Pengadilan Negeri Labuan Bajo 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/111 16 October 2020	TNP	0,00
787	681418	Pengadilan Negeri Oelamasi	005	01	VA	653246814181000	Bpg 039 Pengadilan Negeri Oelamasi (681418)	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021/039 24 May 2021	TNP	0,00
788	682281	Pengadilan Agama Labuan Bajo	005	01	VA	653246822811000	Bpg 111 Pengadilan Agama Labuan Bajo 01	Bri Kcp Labuan Bajo	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
789	400022	Pengadilan Tinggi Jayapura	005	01	VA	653244000221000	Bpg 063 Pengadilan Tinggi Jayapura	Bri Cabang Jayapura	S-2732Wtb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
790	400038	Pengadilan Negeri Jayapura	005	01	VA	653244000381000	Bpg 063 Pengadilan Negeri Jayapura	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
791	400044	Pengadilan Negeri Wamena	005	01	VA	653244000441000	Bpg 113 Pengadilan Negeri Wamena 400044	Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena	000065 23 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
792	400050	Pengadilan Negeri Merauke	005	01	VA	653244000501000	Bpg 068 Pengadilan Negeri Merauke	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
793	400090	Pengadilan Negeri Biak	005	01	VA	653244000901000	Bpg:064 Pengadilan Negeri Biak	Bri	S-1186?Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
794	400101	Pengadilan Negeri Nabire	005	01	VA	653244001011000	Bpg 085 Pengadilan Negeri Nabire	Bank Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
795	400276	Pengadilan Negeri Serui	005	01	VA	653244002761000	Bpg 138 Pengadilan Negeri Serui	Bri Cabang Serui	S-2724/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
796	402860	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	005	01	VA	653244028601000	Bpg 063 Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
797	402876	Pengadilan Agama Jayapura	005	01	VA	653244028761000	Bpg 063 Pengadilan Agama Jayapura	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
798	402891	Pengadilan Agama Biak	005	01	VA	653254028911000	Bpg 064 Pengadilan Agama Biak	Bri	S-2723/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
799	402927	Pengadilan Agama Nabire	005	01	VA	653244029271000	Bpg 085 Pengadilan Agama Nabire	Bri Cabang Nabire	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
800	402933	Pengadilan Agama Wamena	005	01	VA	653244029331000	Bpg 113 Pengadilan Agama Wamena	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
801	402942	Pengadilan Agama Serui	005	01	VA	653244029421000	Bpg 138 Pengadilan Agama Serui	Bri Cabang Serui	S-99/Wpb.34/Kp.04/2021 25 February 2021	TNP	0,00
802	402958	Pengadilan Agama Merauke	005	01	VA	653244029581000	Bpg 068 Pengadilan Agama Merauke Qq 402958	Bri	S-288/Wpb.33/Kp.0430/2015 11 March 2015	TNP	0,00
803	539138	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	005	01	VA	653245391381000	Bpg 063 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
804	614769	Pengadilan Agama Sentani	005	01	VA	653256147691000	Bpg 063 Pengadilan Agama Sentani	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
805	614773	Pengadilan Agama Mimika	005	01	VA	653246147731000	Bpg 141 Pengadilan Agama Mimika	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
806	614780	Pengadilan Agama Paniai	005	01	VA	653246147801000	Bpg 085 Pengadilan Agama Paniai	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
807	614890	Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika	005	01	VA	653256148901000	Bpg 141 P N Kota Timika Kabupaten Mimika	Bri Cabang Timika	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
808	663381	Pengadilan Militer Iii - 19 Jayapura	005	01	VA	653246633811000	Bpg 063 Pengadilan Militer Iii 19 Jayapura	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/220 16 October 2020	TNP	0,00
809	682300	Pengadilan Agama Arso	005	01	VA	653246823001000	Bpg 063 Pengadilan Agama Arso	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
810	308014	Pengadilan Agama Manna	005	01	VA	653243080141000	Bpg 121 Pengadilan Agama Manna	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
811	308021	Pengadilan Agama Curup	005	01	VA	653253080211000	Bpg 146 Pengadilan Agama Curup	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
812	308035	Pengadilan Agama Argamakmur	005	01	VA	653243080351000	Bpg 016 Pengadilan Agama Arga Makmur	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
813	308152	Pengadilan Agama Bengkulu	005	01	VA	653253081521000	Bpg 016 Pengadilan Agama Bengkulu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
814	400110	Pengadilan Negeri Bengkulu	005	01	VA	653244001101000	Bpg 016 Pengadilan Negeri Bengkulu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
815	400126	Pengadilan Negeri Curup	005	01	VA	653254001261000	Bpg 146 Pengadilan Negeri Curup 01	Bri Cabang Curup	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
816	400132	Pengadilan Negeri Manna	005	01	VA	653244001321000	Bpg 121 Pengadilan Negeri Manna	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
817	400239	Pengadilan Negeri Arga Makmur	005	01	VA	653244002391000	Bpg 016 Pengadilan Negeri Arga Makmur	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
818	400512	Pengadilan Tinggi Bengkulu	005	01	VA	653244005121000	Bpg 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
819	401910	Pengadilan Negeri Mukomuko	005	01	VA	653244019101000	Bpg 181 Pengadilan Negeri Mukomuko 401910	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Mukomuko	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
820	401939	Pengadilan Agama Mukomuko	005	01	VA	653244019391000	Bpg 181 Pengadilan Agama Mukomuko 401939	Bri Cabang Mukomuko	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
821	401940	Pengadilan Agama Bintuhan	005	01	VA	653254019401000	Bpg 121 Pa Bintuhan	Bri Cabang Manna	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
822	401941	Pengadilan Agama Tais	005	01	VA	653244019411000	Bpg 121 Pa Tais	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
823	401942	Pengadilan Agama Kepahiang	005	01	VA	653254019421000	Bpg 146 Pa Kepahiang 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kcp Kepahiang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
824	576274	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	005	01	VA	80052005762741000	Bpg 016 Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bengkulu	S-1925/Wpb.12/Kp.06/2021 30 August 2021	TNP	0,00
825	578885	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	005	01	VA	653245788851000	Bpg 016 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
826	672994	Pengadilan Negeri Bintuhan	005	01	VA	653246729941000	Bpg 121 Pengadilan Negeri Bintuhan	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
827	673009	Pengadilan Negeri Tais	005	01	VA	653246730091000	Bpg 121 Pengadilan Negeri Tais	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
828	673041	Pengadilan Negeri Kepahiang	005	01	VA	653246730411000	Bpg 146 Pengadilan Negeri Kepahiang 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
829	673055	Pengadilan Negeri Tubei	005	01	VA	653246730551000	Bpg 146 Pn Tubei 01	Bri Unit Muara Aman	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
830	682253	Pengadilan Agama Lebong	005	01	VA	653246822531000	Bpg 146 Pengadilan Agama Lebong 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
831	099731	Pengadilan Negeri Ternate	005	01	VA	653240997311000	Bpg 062 Pengadilan Negeri Ternate 01	Bri Cabang Ternate	B. 81/Kc-Xii/Ops/04/2021 30 April 2021	TNP	0,00
832	099748	Pengadilan Negeri Tobelo	005	01	VA	653240997481000	Bpg 112 Pn Tobelo Qq Setma	Bri Cabang Tobelo	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
833	099752	Pengadilan Negeri Labuha	005	01	VA	653240997521000	Bpg 062 Pengadilan Negeri Labuha	Bri Unit Bacan Di Labuha	W28-U3/120/Ku.01/V/2021 3 May 2021	TNP	0,00
834	099769	Pengadilan Negeri Soasiu	005	01	VA	653250997691000	Bpg062 Pengadilan Negeri Soasio 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
835	307782	Pengadilan Agama Ternate	005	01	VA	653243077821000	Bpg 062 Pengadilan Agama Ternate 01	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
836	307796	Pengadilan Agama Morotai	005	01	VA	653243077961000	Bpg 112 Pengadilan Agama Morotai	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
837	307801	Pengadilan Agama Soa Sio	005	01	VA	653243078011000	Bpg 062 Pengadilan Agama Soasio 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
838	307818	Pengadilan Agama Labuhan Bacan	005	01	VA	653243078181000	Bpg 062 Pengadilan Agama Labuha 01	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 6 July 2021	TNP	0,00
839	401972	Pengadilan Negeri Sanana	005	01	VA	653244019721000	Bpg 062 Pn Sanana 01	Bri	S-153/Wpb.12/Kp.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
840	401973	Pengadilan Negeri Bobong	005	01	VA	653244019731000	Bpg 062 Pn. Bobong 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2021	TNP	0,00
841	440740	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	005	01	VA	653244407401000	Bpg 062 Pengadilan Tinggi Agama Malut 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 November 2020	TNP	0,00
842	664522	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	005	01	VA	653246645221000	Bpg 062 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
843	097560	Pengadilan Negeri Serang	005	01	VA	653240975601000	Bpg 020 Pn Serang	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
844	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	005	01	VA	653240975771000	Bpg161 Pn Rkbt 097577	Bri	S-1102/Wpb.12/Kp.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
845	097598	Pengadilan Negeri Tangerang	005	01	VA	653240975981000	Bpg 127 Pengadilan Negeri Tangerang	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Bri Cab Tangerang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
846	400817	Pengadilan Agama Rangkasbitung	005	01	VA	653244008171000	Bpg : 161 Pengadilan Agama Rkbt	Bri Kanca Rangkasbitung	000397/161 15 December 2021	TNP	0,00
847	400823	Pengadilan Agama Tangerang	005	01	VA	653244008231000	Bpg 127 Pa Tangerang	Bri Cabang Tangerang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
848	417844	Pengadilan Negeri Pandeglang	005	01	VA	653244178441000	Bpg 161 Pengadilan Negeri Pdg 417844	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
849	417850	Pengadilan Agama Pandeglang	005	01	VA	653244178501000	Bpg 161 Pengadilan Agama Pandeglang Pdg 417850	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
850	440712	Pengadilan Tinggi Agama Banten	005	01	VA	653244407121000	Bpg 020 Pta Banten	Bri Kc. Serang	S-1308/Wpb.12/Kp.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
851	400797	Pengadilan Agama Serang	005	01	VA	653244007971000	Bpg 020 Pengadilan Agama Serang 400797	Bri	S-50/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2022	TNP	0,00
852	604723	Pengadilan Agama Tigaraksa	005	01	VA	653246047231000	Bpg 127 Pengadilan Agama Tigaraksa	Bri Kc Tangerang	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
853	652076	Pengadilan Agama Cilegon	005	01	VA	653256520761000	Bpg 020 Pa Cilegon Bua	Pt. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk	S2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
854	663398	Pengadilan Tinggi Banten	005	01	VA	653246633981000	Bpg Pengadilan Tinggi Banten	Bri Cabang Serang	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
855	689313	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	005	01	VA	653246893131000	Bpg 020 Ptun Srg 689313	Bri Cab. Serang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
856	099010	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	005	01	VA	653240990101000	Bpg 015 Pn Pangkalpinang-01	Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
857	099024	Pengadilan Negeri Sungailiat	005	01	VA	653240990241000	Bpg 015 Pn Sungailiat	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
858	400600	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	005	01	VA	653244006001000	Bpg 107 Pn Tanjung Pandan (01)	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
859	401912	Pengadilan Negeri Koba	005	01	VA	653244019121000	Bpg 015 Pn Koba 401912	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
860	401913	Pengadilan Negeri Mentok	005	01	VA	653244019131000	Bpg 015 Pn Mentok 401913	Bri Kcp Mentok	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
861	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	005	01	VA	653244019681000	Bpg 015 Ptun Pkp	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
862	402302	Pengadilan Agama Pangkal Pinang	005	01	VA	653244023021000	Bpg 015 Pa Pangkalpinang 01	Bri Kc Jakarta Veteran	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
863	402318	Pengadilan Agama Tanjung Pandan	005	01	VA	653244023181000	Bpg 107 Pa Tanjung Pandan (01)	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
864	403092	Pengadilan Agama Sungailiat	005	01	VA	653244030921000	Bpg 015 Pa Sungailiat	Bri Cabang Sungailiat	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
865	440728	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	005	01	VA	653244407281000	Bpg 015 Pta Babel-01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
866	663403	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	005	01	VA	653246634031000	Bpg 015 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
867	682249	Pengadilan Agama Mentok	005	01	VA	653256822491000	Bpg 015 Pengadilan Agama Mentok 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
868	099361	Pengadilan Negeri Gorontalo	005	01	VA	653240993611000	Bpg 050 Pengadilan Negeri Gorontalo	Bri	S-709/Pb.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
869	307250	Pengadilan Agama Gorontalo	005	01	VA	653243072501000	Bpg 050 Pengadilan Agama Gorontalo	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
870	400208	Pengadilan Negeri Limboto	005	01	VA	653244002081000	Bpg 050 Pengadilan Negeri Limboto	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
871	401892	Pengadilan Agama Suwawa	005	01	VA	653244018921000	Bpg 050 Pengadilan Agama Suwawa 401892	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
872	401893	Pengadilan Agama Kwandang	005	01	VA	653244018931000	Bpg 050 Pengadilan Agama Kwandang	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
873	401969	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	005	01	VA	653244019691000	Bpg 050 Pengadilan Tata Usaha Gorontalo	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
874	402690	Pengadilan Agama Limboto	005	01	VA	653244026901000	Bpg 050 Pengadilan Agama Limboto	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
875	440734	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	005	01	VA	653254407341000	Bpg 050 Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	Bri	S-762/Pb.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
876	477218	Pengadilan Negeri Tilamuta	005	01	VA	653244772181000	Bpg.180.Pn Tilamuta 477218	Bri	S-153/Wpb.12/Kp.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
877	652130	Pengadilan Agama Tilamuta	005	01	VA	653246521301000	Bpg 180 Pa Tilamuta	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
878	664539	Pengadilan Tinggi Gorontalo	005	01	VA	653246645391000	Bpg 050 Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo	Bri	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
879	670184	Pengadilan Negeri Marisa	005	01	VA	653246701841000	Bpg.180.Pn Marisa	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
880	682185	Pengadilan Agama Marisa	005	01	VA	653246821851000	Bpg180Pa Marisa 682185	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
881	098881	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	005	01	VA	653240988811000	Bpg 009 Pengadilan Negeri Tanjungpinang Es01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020/009 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
882	108309	Pengadilan Negeri Batam	005	01	VA	9899681083091000	Bpg 137 Pn Batam 108309	Bni Cabang Utama Batam	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
883	402148	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	005	01	VA	653244021481000	Bpg 009 Pengadilan Agama Tanjungpinang Es 01	Bri Cabang Tanjungpinang	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
884	402154	Pengadilan Agama Dabo Singkep	005	01	VA	653244021541000	Bpg 009 Pengadilan Agama Dabo Singkep Es01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
885	402160	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	005	01	VA	653244021601000	Bpg 137 Pa Tbk 402160	Bri Cab. Tanjung Balai Karimun	S-724/Wpb.31/Kp.0230/2015 17 June 2015	TNP	0,00
886	402179	Pengadilan Agama Tarempa	005	01	VA	653244021791000	Bpg 009 Pengadilan Agama Tarempa Es01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
887	526706	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	005	01	VA	653255267061000	Bpg 009 Pt Kepulauan Riau	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
888	526708	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	005	01	VA	653255267081000	Bpg 009 Pta Kepulauan Riau	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
889	547699	Pengadilan Agama Batam	005	01	VA	9899685476991000	Bpg 137 Pa Batam 547699	Pt. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk. Kc P Jl. Pecenongan	000142 26 October 2021	TNP	0,00
890	614670	Pengadilan Agama Natuna	005	01	VA	653246146701000	Bpg 009 Pa Natuna Es01	Bri	S-2732/Wbp.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
891	663005	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	005	01	VA	653246630051000	Bpg 137 Pn Tbk 663005	Bank Bri Cabang Tanjung Balai Karimun	S-543/Wpb.31/Kp.0230/2015 21 May 2015	TNP	0,00
892	672948	Pengadilan Negeri Natuna	005	01	VA	653246729481000	Bpg 009 Pengadilan Negeri Natuna Es01	Bri Unit Ranai	S-810/Kpn.1206/2023 5 May 2023	TNP	0,00
893	689309	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	005	01	VA	8100776893091000	Bpg 137 Ptun Tanjung Pinang 689309	Pt. Bank Syariah Indonesia (Bsi),Tbk. Kc Batam Bisnis Center	S-1980/Kpn.1206/2022 22 September 2022	TNP	0,00
894	400069	Pengadilan Negeri Manokwari	005	01	VA	653244000691000	Bpg 065 Pn Manokwari	Bank Rakyat Indonesia Cabang Manokwari	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 4 March 2020	TNP	0,00
895	400075	Pengadilan Negeri Sorong	005	01	VA	653244000751000	Bpg 066 Pengadilan Negeri Sorong (01))	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kc. Sorong	S-1407/Wpb.12/Kp.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
896	400081	Pengadilan Negeri Fak Fak	005	01	VA	653244000811000	Bpg 067 Pengadilan Negeri Fakfak	Bri Cabang Fakfak	000039 21 June 2021	TNP	0,00
897	401899	Pengadilan Agama Kaimana	005	01	VA	653244018991000	Bpg 067 Pa Kaimana 401899	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
898	401933	Pengadilan Negeri Kaimana	005	01	VA	653244019331000	Bpg 067 Pn Kaimana 401933	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
899	402882	Pengadilan Agama Sorong	005	01	VA	9899684028821000	Bpg 066 Pengadilan Agama Sorong 01	Bni	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
900	402902	Pengadilan Agama Fak Fak	005	01	VA	653244029021000	Bpg 067 Pengadilan Agama Fakfak 402902	Bri Cab Fakfak	000022 19 April 2021	TNP	0,00
901	402911	Pengadilan Agama Manokwari	005	01	VA	653244029111000	Bpg 065 Pa Manokwari 402911	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
902	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	005	01	VA	653255267161000	Bpg 065 Pt Papua Barat	Bri Cabang Manokwari	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
903	526718	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	005	01	VA	653255267181000	Bpg 065 Pta Papua Barat	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
904	099621	Pengadilan Negeri Majene	005	01	VA	653240996211000	Bpg 059 099621 Pn Mjn	Bri Cabang Majene	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
905	099638	Pengadilan Negeri Mamuju	005	01	VA	653250996381000	Bpg 178 Pengadilan Negeri Mamuju	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
906	099642	Pengadilan Negeri Polewali	005	01	VA	653240996421000	Bpg 059 099642 Pn Plw	Bri	S-896/Wpb.12/Kp.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
907	307630	Pengadilan Agama Polewali	005	01	VA	653243076301000	Bpg 059 307630 Pengadilan Agama Plw	Bri	S-811/Pb.3/2021 29 April 2021	TNP	0,00
908	307644	Pengadilan Agama Majene	005	01	VA	653243076441000	Bpg 059 307644 Pa Mj	Bri	S-1186/Wpb.12/Kp.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
909	307651	Pengadilan Agama Mamuju	005	01	VA	653243076511000	Bpg 178 Pengadilan Agama Mamuju	Bank Rakyat Indonesia Cab. Mamuju	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2021	TNP	0,00
910	401882	Pengadilan Agama Pasangkayu	005	01	VA	653244018821000	Bpg 178 Pengadilan Agama Pasangkayu	Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
911	526710	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	005	01	VA	653255267101000	Bpg 178 Pt Sulawesi Barat	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
912	526714	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat	005	01	VA	653255267141000	Bpg 178 Pta Sulawesi Barat	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
913	681422	Pengadilan Negeri Pasangkayu	005	01	VA	9899686814221000	Bpg 178 Pengadilan Negeri Pasangkayu	Bni	S-2736/Wpb.12/Kp.06/2020 16 September 2020	TNP	0,00
914	099272	Pengadilan Negeri Tarakan	005	01	VA	653240992721000	Bpg 175 048 099272 0	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
915	402675	Pengadilan Agama Tarakan	005	01	VA	653244026751000	Bpg 048 Pengadilan Agama Tarakan 01	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2021 16 October 2020	TNP	0,00
916	417657	Pengadilan Agama Tanjung Selor	005	01	Giro	653244176571000	Bpg 185 Pa Tj Selor 01 417657	Pt. Bri (Persero) Cabang Tanjung Selor	S-1997/Wpb.20/Kp.048/2017 27 December 2017	TNP	0,00
917	417704	Pengadilan Negeri Malinau	005	01	VA	653244177041000	Bpg 185 Pn Mln 01 417704	Bri	S-985/Wpb.12/Kp.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
918	417722	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	005	01	VA	653244177221000	Bpg 185 Pn Tj Selor 01417722	Bri Cabang Tanjung Selor	S-1888/Wpb.12/Kp.06/2021 21 September 2021	TNP	0,00
919	477270	Pengadilan Negeri Nunukan	005	01	VA	653244772701000	Bpg 152 Pengadilan Negeri Nunukan 477270	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
920	526720	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	005	01	VA	653255267201000	Bpg 185 Pt Kalimantan Utara	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
921	526722	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	005	01	VA	653255267221000	Bpg 185 Pta Kalimantan Utara	Bri	S-3/Kpn.1206/2023 2 January 2023	TNP	0,00
922	682295	Pengadilan Agama Nunukan	005	01	VA	653256822951000	Bpg 152 Pa Nunukan 682295	Bri	S-2732/Wpb.12/Kp.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
923	663271	Pengadilan Militer Ii-09 Bandung	005	01	VA	653246632711000	Bpg 095 Dilmil Ii 09 Bandung	Bri	S-50/Wpb.14/Kp.1030/2015 12 May 2022	TNP	0,00
Total											**6.075.050,00**

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 03 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
1	099062	Pengadilan Tinggi Jakarta	005	03	Rekening Virtual	9896640990621000	BPG175.PENGADILAN TINGGI JKT (099062)	BNI Cabang Menteng	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
2	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	005	03	Rekening Virtual	8100120990631000	BPG175.PN JAKPUS (099063)	Mandiri	S-985/ WPB.12/ KP.06/ 2021 7 June 2021	TNP	0,00
3	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	005	03	Rekening Virtual	654440990641000	BPG 175 PN JAKBAR 099064	BRI CABANG S. PARMAN	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
4	099065	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	005	03	Rekening Virtual	654450990651000	BPG175 PN JAKTIM DIPA 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
5	400215	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	005	03	Rekening Virtual	654444002151000	BPG175 PENGADILAN NEGERI JAKSEL	BANK BRI	S-709/PB.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
6	400221	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	005	03	Rekening Virtual	654444002211000	BPg175 PN Jakut 400221	BRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUNTER	S-0921/WPB.12/KP.175/2015 22 February 2015	TNP	0,00
7	099067	Pengadilan Tinggi Bandung	005	03	Rekening Virtual	654450990671000	BPG 095 PT BANDUNG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
8	099068	Pengadilan Negeri Bandung	005	03	Rekening Virtual	9896640990681000	BPG 095 PN BANDUNG_03	BNI	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
9	099069	Pengadilan Negeri Sumedang	005	03	Rekening Virtual	8100120990691000	BPG 087 PN SUMEDANG 099069	MANDIRI	S-152/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
10	099071	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	005	03	Rekening Virtual	654440990711000	BPG 025 PN TASIKMALAYA	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
11	099072	Pengadilan Negeri Garut	005	03	Rekening Virtual	654440990721000	BPG 096 PN GARUT 00503	BRI	39/DJU.1/KU.01/1/2021 18 January 2021	TNP	0,00
12	099073	Pengadilan Negeri Ciamis	005	03	Rekening Virtual	654440990731000	BPG 025 PN CIAMIS	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
13	099078	Pengadilan Negeri Purwakarta	005	03	Rekening Virtual	654440990781000	BPG 021 PN PURWAKARTA 03	PT. BRI (Persero) Tbk. KC Purwakarta	S,930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
14	099079	Pengadilan Negeri Bekasi	005	03	Rekening Virtual	654440990791000	BPG 171 PN BEKASI	BANK BRI	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
15	099080	Pengadilan Negeri Karawang	005	03	Rekening Virtual	654450990801000	BPG 086 PENGADILAN NEGERI KARAWANG	BRI	S-2175/KPN.1206/2022 19 October 2022	TNP	0,00
16	099081	Pengadilan Negeri Subang	005	03	Rekening Virtual	654440990811000	BPg 021 PN Subang 03	BRI CABANG SUBANG	000061/021 1 July 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
17	099082	Pengadilan Negeri Bogor	005	03	Rekening Virtual	654440990821000	BPG 023 Pengailan Negeri Bogor	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
18	099083	Pengadilan Negeri Sukabumi	005	03	Rekening Virtual	654440990831000	BPG 128 PN SUKABUMI 099083	PT. BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
19	099084	Pengadilan Negeri Cianjur	005	03	Rekening Virtual	654440990841000	BPG 128 PN CIANJUR 099084	BRI	418/DJU.1/KU.01/5/2021 19 May 2021	TNP	0,00
20	099085	Pengadilan Negeri Cirebon	005	03	Rekening Virtual	654440990851000	BPG 024 PN CIREBON	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
21	099086	Pengadilan Negeri Indramayu	005	03	Rekening Virtual	654440990861000	BPG 024 PN INDRAMAYU 099086	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
22	099088	Pengadilan Negeri Majalengka	005	03	Rekening Virtual	654440990881000	BPG 147 PN MAJALENGKA 099088	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
23	099089	Pengadilan Negeri Kuningan	005	03	Rekening Virtual	654440990891000	BPG 147 PN KUNINGAN	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
24	400410	Pengadilan Negeri Cibadak	005	03	Rekening Virtual	654444004101000	BPG 128 PN CIBADAK	BRI	S-986/WPB.12/KP.6/2021 7 June 2021	TNP	0,00
25	400478	Pengadilan Negeri Sumber	005	03	Rekening Virtual	654454004781000	BPG 024 PN SUMBER	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2-21 21 June 2021	TNP	0,00
26	400484	Pengadilan Negeri Bale Bandung	005	03	Rekening Virtual	6,54444E+14	BPG 095 PN BALE BANDUNG 03	BRI Dayeuh Kolot	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
27	402022	Pengadilan Negeri Banjar	005	03	Rekening Virtual	654444020221000	BPG 025 PN Banjar 402022	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
28	402023	Pengadilan Negeri Cikarang	005	03	Rekening Virtual	654444020231000	BPG 171 PN CIKARANG 03	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021/171 27 May 2021	TNP	0,00
29	477293	Pengadilan Negeri Depok	005	03	Rekening Virtual	654444772931000	BPG 023 PN DEPOK	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
30	613520	Pengadilan Negeri Cibinong	005	03	Rekening Virtual	654446135201000	BPG 023 Pengadilan Negeri Cibinong	BRI KCP CIBINONG MAYOR OKING	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
31	099090	Pengadilan Tinggi Semarang	005	03	Rekening Virtual	654440990901000	BPG 134 PENGADILAN TINGGI SEMARANG	BRI Cabang Semarang Pandanaran	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
32	099092	Pengadilan Negeri Semarang	005	03	Rekening Virtual	654440990921000	BPG 134 PN SEMARANG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
33	099093	Pengadilan Negeri Tegal	005	03	Rekening Virtual	654440990931000	BPG 118 PN TEGAL 099093	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
34	099094	Pengadilan Negeri Pekalongan	005	03	Rekening Virtual	654440990941000	BPG 072 PN PEKALONGAN	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
35	099095	Pengadilan Negeri Kudus	005	03	Rekening Virtual	654440990951000	BPG 129 PN Kudus	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
36	099096	Pengadilan Negeri Pati	005	03	Rekening Virtual	654440990961000	BPG 097 PN PATI BADILUM	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
37	099097	Pengadilan Negeri Brebes	005	03	Rekening Virtual	654440990971000	BPG 118 PN BREBES 099097	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
38	099098	Pengadilan Negeri Pemalang	005	03	Rekening Virtual	654440990981000	BPG 118 PN PEMALANG099098	BRI	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 October 2020	TNP	0,00
39	099099	Pengadilan Negeri Kendal	005	03	Rekening Virtual	654440990991000	BPG 134 PN KENDAL	BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG KENDAL	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
40	099100	Pengadilan Negeri Demak	005	03	Rekening Virtual	654440991001000	BPg 129 PN Demak 099100 BRI Cabang Demak	BRI Cabang Demak	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
41	099101	Pengadilan Negeri Purwodadi	005	03	Rekening Virtual	654440991011000	BPG 163 PN Purwodadi 03	BANK BRI CABANG PURWODADI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
42	099102	Pengadilan Negeri Salatiga	005	03	Rekening Virtual	654440991021000	BPG 134 PN SALATIGA	BRI Cabang Salatiga	153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
43	099103	Pengadilan Negeri Ungaran	005	03	Rekening Virtual	654440991031000	BPG. 134 PN KAB.SEMARANG	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
44	099104	Pengadilan Negeri Jepara	005	03	Rekening Virtual	654440991041000	BPg 129 Pengadilan Negeri Jepara 099104	BRI Cabang Jepara	W12-U19/1522/KU.01/8/2021 31 August 2021	TNP	0,00
45	099105	Pengadilan Negeri Blora	005	03	Rekening Virtual	654440991051000	BPG 163PN BLORA 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
46	099106	Pengadilan Negeri Rembang	005	03	Rekening Virtual	654440991061000	BPG 097 PN REMBANG BADILUM	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
47	099107	Pengadilan Negeri Batang	005	03	Rekening Virtual	654440991071000	BPG 072 PN BATANG 099107	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
48	099108	Pengadilan Negeri Purworejo	005	03	Rekening Virtual	654440991081000	BPG 027 PN KAB PURWOREJO 03	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
49	099110	Pengadilan Negeri Magelang	005	03	Rekening Virtual	654440991101000	BPG 115 PN MAGELANG	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
50	099111	Pengadilan Negeri Kebumen	005	03	Rekening Virtual	654440991111000	BPG 027 PN KEBUMEN 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
51	099112	Pengadilan Negeri Temanggung	005	03	Rekening Virtual	654440991121000	BPG 115 PN Temanggung	BRI Kantor Cabang Temanggung	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
52	099114	Pengadilan Negeri Wonosobo	005	03	Rekening Virtual	654440991141000	BPG 164 PN WONOSOBO 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
53	099115	Pengadilan Negeri Surakarta	005	03	Rekening Virtual	654440991151000	BPG 028 PN SURAKARTA 03	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
54	099116	Pengadilan Negeri Sragen	005	03	Rekening Virtual	654440991161000	Bpg 162 Pengadilan Negeri Sragen BADILUM	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
55	099117	Pengadilan Negeri Wonogiri	005	03	Rekening Virtual	654440991171000	BPG 028 PENGADILAN NEGERI WONOGIRI 03	BRI	000084/028 3 June 2021	TNP	0,00
56	099118	Pengadilan Negeri Sukoharjo	005	03	Rekening Virtual	654440991181000	BPG 028 PN SUKOHARJO 03	BRI	000112 30 June 2021	TNP	0,00
57	099119	Pengadilan Negeri Karanganyar	005	03	Rekening Virtual	654440991191000	BPG 162 PN KRA BADILUM	BRI CABANG KARANGANYAR	S-153/ WPB.12/ KP.06/ 2021 21 January 2021	TNP	0,00
58	099121	Pengadilan Negeri Boyolali	005	03	Rekening Virtual	654440991211000	BPG 148 PN BOYOLALI	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
59	099122	Pengadilan Negeri Klaten	005	03	Rekening Virtual	654440991221000	BPG 148 PN KLATEN	BRI CABANG KLATEN	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
60	099123	Pengadilan Negeri Purwokerto	005	03	Rekening Virtual	654440991231000	BPG 029 PN PURWOKERTO	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
61	099124	Pengadilan Negeri Cilacap	005	03	Rekening Virtual	654440991241000	BPG 130 PN CILACAP 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
62	099125	Pengadilan Negeri Banyumas	005	03	Rekening Virtual	654440991251000	BPG 029 PN BANYUMAS	BRI	B.1186.e-INS/ISS/04/2021 26 April 2021	TNP	0,00
63	099126	Pengadilan Negeri Purbalingga	005	03	Rekening Virtual	654440991261000	BPG 029 PN PURBALINGGA	BRI	S- 820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
64	099127	Pengadilan Negeri Banjarnegara	005	03	Rekening Virtual	654440991271000	BPG 164 PN BANJARNEGARA 03	BRI	S-986/WPG.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
65	400566	Pengadilan Negeri Slawi	005	03	Rekening Virtual	654444005661000	BPG 118 PN SLAWI-400566	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
66	400572	Pengadilan Negeri Mungkid	005	03	Rekening Virtual	654444005721000	BPG 115 PN KAB MAGELANG DI MUNGKID	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
67	099128	Pengadilan Negeri Yogyakarta	005	03	Rekening Virtual	654440991281000	BPG 030 PN YOGYAKARTA QQ 03	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
68	099129	Pengadilan Negeri Wates	005	03	Rekening Virtual	654440991291000	BPG 176 PN WATES	BRI	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
69	099130	Pengadilan Negeri Wonosari	005	03	Rekening Virtual	654440991301000	BPG 149 PN WONOSARI QQ 03	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
70	099131	Pengadilan Negeri Sleman	005	03	Rekening Virtual	654440991311000	BPG 030 PN SLEMAN QQ 03	BRI KC JAKARTA CUT MUTIAH	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
71	400173	Pengadilan Negeri Bantul	005	03	Rekening Virtual	654444001731000	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
72	400343	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	005	03	Rekening Virtual	9896644003431000	BPG 030 PT YOGYAKARTA	BNI	S-931/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
73	099132	Pengadilan Tinggi Surabaya	005	03	Rekening Virtual	654440991321000	BPg 135 PT Sby 099132	BRI Cab. Surabaya kaliasin	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
74	099133	Pengadilan Negeri Surabaya	005	03	Rekening Virtual	654440991331000	BPG 135 PN SURABAYA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
75	099135	Pengadilan Negeri Bojonegoro	005	03	Rekening Virtual	654440991351000	BPG 073 PN BOJONEGORO	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
76	099136	Pengadilan Negeri Tuban	005	03	Rekening Virtual	9896640991361000	BPG 166 PN TUBAN 03	BNI	S-281/WPB.12/KP.06/2022 21 January 2022	TNP	0,00
77	099137	Pengadilan Negeri Lamongan	005	03	Rekening Virtual	654440991371000	BPG 073 PN LAMONGAN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
78	099138	Pengadilan Negeri Gresik	005	03	Rekening Virtual	654440991381000	BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 03	BRI Cabang Gresik	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
79	209913	Pengadilan Negeri Sidoarjo	005	03	Rekening Virtual	810012099139100	BPG 165 PENGADILAN NEGERI SDA 098167	Mandiri jakarta	S-1579/WPB.12/KP.06/2021 3 August 2021	TNP	0,00
80	099140	Pengadilan Negeri Mojokerto	005	03	Rekening Virtual	654450991401000	BPG 098 PN MOJOKERTO 099140	BRI CABANG MOJOKERTO	S-153/WPB.12/KP.06/2021/098 21 January 2021	TNP	0,00
81	099142	Pengadilan Negeri Jombang	005	03	Rekening Virtual	654450991421000	BPG 098 PN JOMBANG 099142	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
82	099143	Pengadilan Negeri Bondowoso	005	03	Rekening Virtual	654440991431000	BPG 035 PN BONDOWOSO	BRI CABANG BONDOWOSO	000647 1 September 2021	TNP	0,00
83	099144	Pengadilan Negeri Jember	005	03	Rekening Virtual	654450991441000	BPG 131 PN JEMBER	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
84	099145	Pengadilan Negeri Banyuwangi	005	03	Rekening Virtual	654440991451000	BPG 100 PN BANYUWANGI	BRI Cab Banyuwangi	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
85	099146	Pengadilan Negeri Situbondo	005	03	Rekening Virtual	654450991461000	BPG 035 PN SITUBONDO 099146	BRI	000642/035 14 June 2021	TNP	0,00
86	099147	Pengadilan Negeri Kediri	005	03	Rekening Virtual	654440991471000	BPG 034 PENGADILAN NEGERI KEDIRI	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
87	100206	Pengadilan Negeri Nganjuk	005	03	Giro	654450991481000	BPG 034 PENGADILAN NEGERI NGANJUK	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1640/WPB.16/KP.0804/208 27 December 2018	TNP	0,00
88	099149	Pengadilan Negeri Tulungagung	005	03	Rekening Virtual	654440991491000	BPG 150 PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
89	099150	Pengadilan Negeri Trenggalek	005	03	Rekening Virtual	654440991501000	BPG 034 PN TRENGGALEK	BRI	S-930/WPB.12/KP.02/2021 27 May 2021	TNP	0,00
90	099151	Pengadilan Negeri Blitar	005	03	Rekening Virtual	654440991511000	BPG 150 PENGADILAN NEGERI BLITAR QQ 099151	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
91	099152	Pengadilan Negeri Malang	005	03	Rekening Virtual	654440991521000	BPG 032 PN MALANG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
92	099153	Pengadilan Negeri Pasuruan	005	03	Rekening Virtual	654440991531000	BPG 032 PN PAS (099153)	BRI CABANG PASURUAN	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
93	099154	Pengadilan Negeri Probolinggo	005	03	Rekening Virtual	654440991541000	BPG. 035 PERADILAN UMUM	BRI	000664/035 23 June 2021	TNP	0,00
94	099156	Pengadilan Negeri Lumajang	005	03	Rekening Virtual	654440991561000	BPG 131 PN LUMAJANG	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
95	099157	Pengadilan Negeri Bangil	005	03	Rekening Virtual	654440991571000	BPG 032 PENGADILAN NEGERI BANGIL	BANK RAKYAT INDONESIA KCP BANGIL	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
96	099158	Pengadilan Negeri Kraksaan	005	03	Rekening Virtual	8100120991581000	BPG 035 PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	Mandiri	000648 1 September 2021	TNP	0,00
97	099159	Pengadilan Negeri Madiun	005	03	Rekening Virtual	654440991591000	BPG 033 PENGADILAN NEGERI MADIUN	PT. Bank Rakyat Indonesia TBK.KC Madiun	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
98	099160	Pengadilan Negeri Ponorogo	005	03	Rekening Virtual	654440991601000	BPG 033 PN PONOROGO 03	PT. BRI (Persero) Cabang Ponorogo	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
99	099161	Pengadilan Negeri Pacitan	005	03	Rekening Virtual	654440991611000	BPG 099 PN PACITAN	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
100	099163	Pengadilan Negeri Ngawi	005	03	Rekening Virtual	654440991631000	BPG 033 PN NGAWI DIPA 0503	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
101	099164	Pengadilan Negeri Magetan	005	03	Rekening Virtual	654440991641000	BPG 033 PN MAGETAN 03	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
102	099165	Pengadilan Negeri Pamekasan	005	03	Rekening Virtual	654440991651000	BPg 036 PN Pamekasan	BRI Cabang Pamekasan	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
103	099166	Pengadilan Negeri Sumenep	005	03	Rekening Virtual	654440991661000	BPG 036 KANTOR PN SUMENEP	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
104	000503	Pengadilan Negeri Bangkalan	005	03	Giro	00060100050330.9	BPg 036 Kantor PN Bangkalan	BRI Cabang Bangkalan	s-666/WPB.16/KP.05.093/2015 27 April 2015	TNP	0,00
105	099168	Pengadilan Negeri Sampang	005	03	Rekening Virtual	654440991681000	BPg036PN1Sampang	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
106	400581	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	005	03	Rekening Virtual	654444005811000	BPG 034 PN KAB. KEDIRI 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021/034 21 January 2021	TNP	0,00
107	400597	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	005	03	Rekening Virtual	654444005971000	BPG 033 PN KABMADIUN 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2020	TNP	0,00
108	626157	Pengadilan Negeri Kepanjen	005	03	Rekening Virtual	654446261571000	BPG 032 PN KAB MALANG	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
109	099169	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	005	03	Rekening Virtual	8101250991691000	BPG 001 PENGADILAN TINGGI BNA 169	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
110	099170	Pengadilan Negeri Banda Aceh	005	03	Rekening Virtual	8100770991701000	BPG 001 PN BANDA ACEH 099170	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1309/WPB.12/KP.06/2021/001 12 July 2021	TNP	0,00
111	099171	Pengadilan Negeri Sabang	005	03	Rekening Virtual	8101250991711000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI SABANG	BSI	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
112	099173	Pengadilan Negeri Bireuen	005	03	Rekening Virtual	8101250991731000	BPG 089 PN BIREUEN 099173	Bank Syariah Indonesia Cabang Bireuen	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
113	099174	Pengadilan Negeri Lhok Sukon	005	03	Rekening Virtual	8101250991741000	BPG 089 PN LHOKSUKON 099174	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
114	099175	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	005	03	Rekening Virtual	8101250991751000	BPG 089 PENGADILAN NEGERI LSW	Bank Syariah Indonesia KC Lhokseumawe Merdeka 3	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
115	099177	Pengadilan Negeri Takengon	005	03	Rekening Virtual	8101250991771000	BPG 122 PENGADILAN NEGERI TAKENGON	BANK SYARIAH INDONESIA KC TAKENGON	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 June 2021	TNP	0,00
116	099179	Pengadilan Negeri Idi	005	03	Rekening Virtual	8101250991791000	BPG 002 PN IDI 099179	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
117	098530	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	005	03	Giro	1057281304	BPG 002 PN KUALASIMPANG 03	Bank Syariah Indonesia KC Kuala Simpang	S-305/WPB.01/KP.04/2021 29 July 2021	TNP	0,00
118	099182	Pengadilan Negeri Blangkajeren	005	03	Rekening Virtual	8101250991821000	BPG 105 PN BKJ 03	Bank Syariah Indonesia	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
119	099183	Pengadilan Negeri Kutacane	005	03	Rekening Virtual	8101250991831000	BPG 105 PN KUTACANE 03	BSI	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
120	099184	Pengadilan Negeri Meulaboh	005	03	Rekening Virtual	8101250991841000	BPG 003 PN Meulaboh	BSI	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
121	099185	Pengadilan Negeri Calang	005	03	Rekening Virtual	8101250991851000	BPG 003 PN CALANG 03	BANK SYARIAH INDONESIA	Nomor : S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
122	099186	Pengadilan Negeri Sinabang	005	03	Rekening Virtual	8101250991861000	BPG 003 PN SINABANG 03	BSI	S-1019/WPB.12/KP.6/2021 9 June 2021	TNP	0,00
123	099187	Pengadilan Negeri Tapak Tuan	005	03	Rekening Virtual	8101250991871000	BPG 074 PN TAPAKTUAN 099187	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
124	099188	Pengadilan Negeri Singkel	005	03	Rekening Virtual	8101250991881000	BPG 074 PENGADILAN NEGERI SINGKIL 03	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
125	400416	Pengadilan Negeri Jantho	005	03	Rekening Virtual	8101254004161000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI JANTHO	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
126	402008	Pengadilan Negeri Blangpidie	005	03	Rekening Virtual	8101254020081000	BPG 07 PN BLANGPIDIE 402008	BANK SYARIAH INDONESIA	000132 24 February 2022	TNP	0,00
127	402009	Pengadilan Negeri Meureudu	005	03	Rekening Virtual	8101254020091000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	BSI	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
128	402012	Pengadilan Negeri Suka Makmue	005	03	Rekening Virtual	8101254020121000	BPG 003 PN SUKA MAKMUE 402012	Bank Syariah Indonesia	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 July 2021	TNP	0,00
129	689969	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	005	03	Rekening Virtual	8101256899691000	BPG 122 PENGADILAN NEGERI STR	BSI KCP Bener Meriah	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 July 2021	TNP	0,00
130	099189	Pengadilan Tinggi Medan	005	03	Rekening Virtual	654440991891000	BPG 123 PENGADILAN TINGGI MEDAN	BRI Cab. Medan Iskandar Muda	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
131	100270	Pengadilan Negeri Medan	005	03	Giro	005301002708306	BPg 123 PN MEDAN	BRI	S-882/WPB.02/KP.123/2015 29 June 2015	TNP	0,00
132	099191	Pengadilan Negeri Binjai	005	03	Rekening Virtual	654440991911000	BPG 123 PN KLAS I-B BINJAI 03	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
133	099192	Pengadilan Negeri Tanjung Balai	005	03	Rekening Virtual	654450991921000	BPG 076 PN TANJUNG BALAI 01	BRI	000043/076 1 July 2021	TNP	0,00
134	099193	Pengadilan Negeri Sidikalang	005	03	Rekening Virtual	654440991931000	BPG 119 PN SIDIKALANG 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
135	099194	Pengadilan Negeri Kabanjahe	005	03	Rekening Virtual	654450991941000	BPG 119 PN KABANJAHE	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	s-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
136	099195	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	005	03	Rekening Virtual	654440991951000	BPG 075 RANTAUPRAPAT	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Rantauprapat	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
137	099196	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	005	03	Rekening Virtual	654450991961000	BPG 124 PN TEBING TINGGI BADILUM	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
138	099198	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	005	03	Rekening Virtual	654450991981000	BPG 007 PN GUNUNGSITOLI QQ 099198	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
139	099199	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	005	03	Rekening Virtual	654440991991000	BPG 005 PN PEMATANG SIANTAR	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
140	099200	Pengadilan Negeri Tarutung	005	03	Rekening Virtual	654440992001000	BPG 125 PN TARUTUNG 099200	PT BRI (PERSERO)CABANG TARUTUNG	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
141	099201	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	005	03	Rekening Virtual	654440992011000	BPG 006 PN PADANGSIDIMPUAN	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
142	099203	Pengadilan Negeri Sibolga	005	03	Rekening Virtual	654440992031000	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM	BRI Cab. Sibolga	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
143	109063	Pengadilan Negeri Stabat	005	03	Rekening Virtual	654441090631000	BPG 123 PN STABAT 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
144	400371	Pengadilan Negeri Simalungun	005	03	Rekening Virtual	654444003711000	BPG 005 PN SIMALUNGUN	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
145	400396	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	005	03	Rekening Virtual	654444003961000	BPG 124 PN Lubuk Pakam	BRI Cabang lubuk pakam	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
146	402013	Pengadilan Negeri Sei Rampah	005	03	Rekening Virtual	654444020131000	BPG 124 PN SEI RAMPAH 03	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
147	402014	Pengadilan Negeri Sibuhuan	005	03	Rekening Virtual	654454020141000	BPG 006 PN SBH 402014	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
148	477401	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	005	03	Rekening Virtual	654444774011000	BPG 006 PN MANDAILING NATAL 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
149	672910	Pengadilan Negeri Balige	005	03	Giro	31401000604308	BPG 125 PN BALIGE 672911	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balige	S-0317/WPB.02/KP.125/2015 10 March 2015	TNP	0,00
150	099204	Pengadilan Tinggi Padang	005	03	Rekening Virtual	654440992041000	BPG 010 PT DIPA BADILUM	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
151	099205	Pengadilan Negeri Padang	005	03	Rekening Virtual	654440992051000	BPG 010 PN PADANG	BRI KC JAKARTA CUT MUTIAH	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
152	099206	Pengadilan Negeri Sawahlunto	005	03	Rekening Virtual	654440992061000	BPG 077 PN SAWAHLUNTO	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
153	099207	Pengadilan Negeri Batusangkar	005	03	Rekening Virtual	654440992071000	BPG 011 PN BATUSANGKAR 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
154	099208	Pengadilan Negeri Solok	005	03	Rekening Virtual	654440992081000	BPG 090 PN SOLOK BADILUM	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
155	099209	Pengadilan Negeri Pariaman	005	03	Rekening Virtual	654440992091000	BPG 010 PN PARIAMAN 099209	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
156	099210	Pengadilan Negeri Painan	005	03	Rekening Virtual	654440992101000	BPG 142 PN PAINAN DIPA 03	BRI Cab. Painan	S-153.WPB.12/KP.06/201 21 January 2021	TNP	0,00
157	099211	Pengadilan Negeri Bukittinggi	005	03	Rekening Virtual	654440992111000	BPG 011 PN BUKITTINGGI 03	BRI KANTOR PUSAT JAKARTA	S-347/WPB.03/KP.0330/2015 25 March 2015	TNP	0,00
158	099212	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	005	03	Rekening Virtual	654440992121000	BPG 091 PN LUBUK SIKAPING 099212	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
159	099213	Pengadilan Negeri Payakumbuh	005	03	Rekening Virtual	654440992131000	BPG 011 PN PAYAKUMBUH	BRI Cab. PAYAKUMBUH	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
160	400189	Pengadilan Negeri Padang Panjang	005	03	Rekening Virtual	654454001891000	BPG 011 PN PADANG PANJANG 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
161	400334	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	005	03	Rekening Virtual	654444003341000	BPG 011 PN LUBUK BASUNG	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jakarta Cut Mutiah	S-153/WPB.12/KP.06/2021/011 21 January 2021	TNP	0,00
162	400422	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	005	03	Rekening Virtual	654454004221000	BPG 011 PN TANJUNG PATI	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
163	400447	Pengadilan Negeri Kotobaru	005	03	Rekening Virtual	654444004471000	BPG : 090 : PN KOTO BARU	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
164	400462	Pengadilan Negeri Muaro	005	03	Rekening Virtual	654444004621000	BPG 077 PN MUARO	BRI Cab. Sijunjung	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
165	402015	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	005	03	Rekening Virtual	654444020151000	BPG 077 PN PULAU PUNJUNG 03	BANK RAKYAT INDONESIA	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
166	477353	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	005	03	Rekening Virtual	654444773531000	BPG 091 PN PASBAR (477353)	BRI CABANG SIMPANG EMPAT	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
167	099214	Pengadilan Negeri Pekanbaru	005	03	Rekening Virtual	654440992141000	BPG 008 PN PEKANBARU	BRI	001475/008 16 July 2021	TNP	0,00
168	099215	Pengadilan Negeri Bengkalis	005	03	Rekening Virtual	654440992151000	BPG 120 PN BENGKALIS	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
169	099217	Pengadilan Negeri Tembilahan	005	03	Rekening Virtual	654440992171000	BPG 092 PN TEMBILAHAN	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
170	400142	Pengadilan Negeri Bangkinang	005	03	Rekening Virtual	654444001421000	BPG 008 PN BANGKINANG	BRI KC BANGKINANG	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
171	400328	Pengadilan Negeri Dumai	005	03	Rekening Virtual	654444003281000	BPG 120 PN DUMAI 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
172	400493	Pengadilan Tinggi Riau	005	03	Rekening Virtual	654444004931000	BPG 008 PT PEKANBARU	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC	001537/008 27 October 2021	TNP	0,00
173	402016	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	005	03	Rekening Virtual	654454020161000	BPG 092 PN TELUK KUANTAN 16	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
174	477256	Pengadilan Negeri Pelalawan	005	03	Rekening Virtual	654444772561000	BPG 008 PN PELALAWAN	Bank Rakyat Indonesia KC Pangkalan Kerinci	001491/008 16 August 2021	TNP	0,00
175	477262	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	005	03	Rekening Virtual	654444772621000	BPG 120 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
176	477344	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	005	03	Rekening Virtual	654454773441000	BPg 008 PN SIAK	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
177	099220	Pengadilan Negeri Jambi	005	03	Rekening Virtual	654440992201000	BPG 012 PENGADILAN NEGERI JAMBI	BRI	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
178	099221	Pengadilan Negeri Muara Bungo	005	03	Rekening Virtual	654450992211000	BPg078 PN Negeri Ma Bungo 03	BRI	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
179	099222	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	005	03	Rekening Virtual	654440992221000	BPG 143 PN KLT 03	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
180	099224	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	005	03	Rekening Virtual	654440992241000	BPG (013) PN SPN (099224)	BRI CABANG SUNGAI PENUH	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
181	400312	Pengadilan Negeri Bangko	005	03	Rekening Virtual	654444003121000	BPG 159 PN BANGKO	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
182	400431	Pengadilan Negeri Muara Bulian	005	03	Rekening Virtual	654444004311000	BPG 012 PN MUARA BULIAN	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
183	400504	Pengadilan Tinggi Jambi	005	03	Rekening Virtual	654444005041000	BPg012 PT JAMBI	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
184	477369	Pengadilan Negeri Tebo	005	03	Rekening Virtual	654444773691000	BPG078 PN TEBO 01	BRI Cabang Muara Bungo	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
185	477375	Pengadilan Negeri Sarolangun	005	03	Rekening Virtual	654444773751000	BPG 159 Pengadilan Negeri Sarolangun	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
186	477402	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	005	03	Rekening Virtual	654444774021000	BPG 143 PN TJT 477400	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
187	663013	Pengadilan Negeri Sengeti	005	03	Rekening Virtual	654446630131000	BPG 012 PN SENGETI	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
188	099225	Pengadilan Tinggi Palembang	005	03	Rekening Virtual	8101250992251000	BPG 014 PT PALEMBANG 099225	BSI	S-2437/KPN.1206/2023 18 December 2023	TNP	0,00
189	099227	Pengadilan Negeri Kayuagung	005	03	Rekening Virtual	654450992271000	BPG 014 PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG 02	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
190	099228	Pengadilan Negeri Baturaja	005	03	Rekening Virtual	654440992281000	BPG 109 PENGADILAN NEGERI 03	BRI Cabang Baturaja	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
191	099229	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	005	03	Rekening Virtual	654450992291000	BPG 070 PN LUBUKLINGGAU 03	BRI	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
192	099232	Pengadilan Negeri Muara Enim	005	03	Rekening Virtual	654440992321000	BPg 144 PN MUARA ENIM	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - BRI CABANG MUARA	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
193	099233	Pengadilan Negeri Sekayu	005	03	Rekening Virtual	654440992331000	BPG 160 PN SEKAYU 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
194	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	005	03	Rekening Virtual	654444020171000	BPG 160 PN PANGKALAN BALAI 03	BRI	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
195	672953	Pengadilan Negeri Prabumulih	005	03	Rekening Virtual	654446729531000	BPG 014 PN PRABUMULIH 02	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
196	672968	Pengadilan Negeri Pagar Alam	005	03	Rekening Virtual	654446729681000	BPG 144 PN PAGAR ALAM	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
197	099236	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	005	03	Rekening Virtual	654440992361000	BPG 017 PN TANJUNGKARANG 04	BRI CABANG TANJUNG KARANG	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
198	099236	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	005	03	Rekening Virtual	654444003651000	BPG 017 PT TKG	BRI CABANG TANJUNG KARANG	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
199	099237	Pengadilan Negeri Metro	005	03	Rekening Virtual	654440992371000	BPG 126 PN Metro 03	BRI KC METRO	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
200	400453	Pengadilan Negeri Kalianda	005	03	Rekening Virtual	654444004531000	BPG 017 PN KALIADA	PT. BRI (PERSERO) Tbk	S-2404/KPN.1206/2022 24 November 2022	TNP	0,00
201	402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	005	03	Rekening Virtual	654444020191000	BPG 017 PN GEDONG TATAAN	BRI	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
202	477307	Pengadilan Negeri Kota Agung	005	03	Rekening Virtual	654444773071000	BPG 017 PN KOTA AGUNG 03	BRI CABANG PRINGSEWU	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
203	614884	Pengadilan Negeri Liwa	005	03	Rekening Virtual	654446148841000	BPg 145 PN LIWA 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
204	663027	Pengadilan Negeri Menggala	005	03	Rekening Virtual	654446630271000	BPG 116 PN MENGGALA 03	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2022	TNP	0,00
205	663031	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	005	03	Rekening Virtual	654446630311000	BPG 126 PN GUNUNG SUGIH	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
206	663048	Pengadilan Negeri Sukadana	005	03	Rekening Virtual	654446630481000	BPG 126PN SUKADANA 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
207	663052	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	005	03	Rekening Virtual	654446630521000	BPG 116 PN BLAMBANGANUMPU	BRI	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
208	099239	Pengadilan Negeri Pontianak	005	03	Rekening Virtual	654440992391000	BPG 042 PN Pontianak	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
209	099240	Pengadilan Negeri Singkawang	005	03	Rekening Virtual	654440992401000	BPG 093 PN SINGKAWANG 099240	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
210	099241	Pengadilan Negeri Sintang	005	03	Rekening Virtual	654440992411000	BPG 079 PENGADILAN NEGERI SINTANG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
211	099242	Pengadilan Negeri Ketapang	005	03	Rekening Virtual	654440992421000	BPG 094 PN KETAPANG	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
212	099243	Pengadilan Negeri Mempawah	005	03	Rekening Virtual	654440992431000	BPG 042 PN MEMPAWAH 099243	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
213	099245	Pengadilan Negeri Sanggau	005	03	Rekening Virtual	654440992451000	BPG 167 PN SANGGAU	BRI KC SANGGAU	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
214	400195	Pengadilan Negeri Putussibau	005	03	Rekening Virtual	654444001951000	BPG 117 PN PUTUSSIBAU	BRI Cab. PUTUSSIBAU	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
215	400252	Pengadilan Tinggi Pontianak	005	03	Rekening Virtual	654444002521000	BPG 042 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	BRI CABANG PONTIANAK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
216	670228	Pengadilan Negeri Sambas	005	03	Rekening Virtual	654446702281000	BPG 093 PN SAMBAS 670228	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
217	670232	Pengadilan Negeri Bengkayang	005	03	Rekening Virtual	654446702321000	BPG 093 PN BENGKAYANG 670232	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KCP. BENGKAYANG	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
218	689994	Pengadilan Negeri Ngabang	005	03	Rekening Virtual	654446899941000	BPG: 167 PN NGABANG 03	BRI KCP LANDAK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
219	099246	Pengadilan Negeri Palangkaraya	005	03	Rekening Virtual	654440992461000	BPG 043 PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	PT. BRI KC PALANGKA RAYA	S-1197/WPB.12/KP.06/2021/043 29 June 2021	TNP	0,00
220	099247	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	005	03	Rekening Virtual	654440992471000	BPG 102 PN PANGKALAN BUN 03	Bank Rakyat Indonesia	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
221	099248	Pengadilan Negeri Muara Teweh	005	03	Rekening Virtual	654440992481000	BPG 080 PN MUARA TEWEH PERADILAN UMUM	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-153/WPB.12/KP.06/2021/080 21 January 2021	TNP	0,00
222	099249	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	005	03	Rekening Virtual	654440992491000	BPG 043 PN KUALA KAPUAS 099249	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
223	099252	Pengadilan Negeri Sampit	005	03	Rekening Virtual	654440992521000	BPG 044 PN SAMPIT 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 22 April 2021	TNP	0,00
224	400359	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	005	03	Rekening Virtual	654444003591000	BPG 043 PT PALANGKARAYA 400359	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
225	402024	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	005	03	Rekening Virtual	654444020241000	BPG 043 PN KUALA KURUN 402024	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
226	402025	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	005	03	Rekening Virtual	654444020251000	BPG 102 PN Nanga Bulik 402025	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
227	402026	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	005	03	Rekening Virtual	654444020261000	BPG 043 PN PULANG PISAU 402026	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
228	670192	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	005	03	Rekening Virtual	654456701921000	BPG 080 PN TAMIANG LAYANG PERADILAN UMUM	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
229	679426	Pengadilan Negeri Kasongan	005	03	Rekening Virtual	654446794261000	BPG 044 PN KASONGAN 03	BRI	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
230	099253	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	005	03	Rekening Virtual	654440992531000	BPG 045 PT BJM	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
231	099254	Pengadilan Negeri Banjarmasin	005	03	Rekening Virtual	654440992541000	BPG 045 PN Banjarmasin	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
232	099255	Pengadilan Negeri Kandangan	005	03	Rekening Virtual	654440992551000	BPG 110 PN KANDANGAN QQ 03	BRI	000171 14 December 2021	TNP	0,00
233	099256	Pengadilan Negeri Kotabaru	005	03	Rekening Virtual	654440992561000	BPG 081 PN KOTABARU 03	BRI CABANG KOTABARU	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
234	099257	Pengadilan Negeri Barabai	005	03	Rekening Virtual	654440992571000	BPG 110 PN BARABAI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - BARABAI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
235	099258	Pengadilan Negeri Martapura	005	03	Rekening Virtual	654440992581000	BPG 045 PN MARTAPURA	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
236	099259	Pengadilan Negeri Tanjung	005	03	Rekening Virtual	654440992591000	BPG 151 PN TANJUNG	BRI	S-1125/WPB12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
237	099260	Pengadilan Negeri Amuntai	005	03	Rekening Virtual	654440992601000	BPG 151 PN AMUNTAI KAB HSU	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
238	099266	Pengadilan Negeri Rantau	005	03	Rekening Virtual	654440992661000	BPG 110 PN BADILUM RANTAU	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
239	400261	Pengadilan Negeri Marabahan	005	03	Rekening Virtual	654444002611000	BPG 045 PN Marabahan	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
240	400283	Pengadilan Negeri Pelaihari	005	03	Rekening Virtual	654444002831000	BPG 168 PN PELAIHARI 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
241	402027	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	005	03	Rekening Virtual	654444020271000	BPG 151 PN PARINGIN03	BRI	S-119/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
242	653459	Pengadilan Negeri Banjarbaru	005	03	Rekening Virtual	654446534591000	BPG 045PN BANJARBARU	BANK BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
243	690019	Pengadilan Negeri Batulicin	005	03	Rekening Virtual	654446900191000	BPG 081 PN BATULICIN 03	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	1.000,00
244	099287	Pengadilan Negeri Samarinda	005	03	Rekening Virtual	654440992871000	Bpg 046 PN Samarinda	PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia)	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
245	099291	Pengadilan Negeri Tenggarong	005	03	Rekening Virtual	654440992911000	BPG 046 PN TENGGARONG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
246	099309	Pengadilan Negeri Balikpapan	005	03	Rekening Virtual	654440993091000	BPG 047 KANTOR PN BALIKPAPAN	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
247	400292	Pengadilan Negeri Tanjung Redep	005	03	Rekening Virtual	654444002921000	BPG 153 PN TANJUNG REDEB 292	BRI Cabang Tanjung Redeb	Menteri Keuangan S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 November 2020	TNP	0,00
248	400303	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	005	03	Rekening Virtual	654444003031000	BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
249	400529	Pengadilan Tinggi Samarinda	005	03	Rekening Virtual	654444005291000	Bpg 046 PT SAMARINDA	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
250	402028	Pengadilan Negeri Penajam	005	03	Rekening Virtual	654444020281000	BPG 047 PN PENAJAM DIPA 03	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
251	477381	Pengadilan Negeri Kutai Barat	005	03	Rekening Virtual	654444773811000	BPG 046 PN KUTAI BARAT 03	BANK RAKYAT INDONESIA	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
252	662973	Pengadilan Negeri Bontang	005	03	Rekening Virtual	654456629731000	BPG 046 PN BONTANG	BRI KC BONTANG	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
253	662987	Pengadilan Negeri Sangatta	005	03	Rekening Virtual	654446629871000	BPG 046 PN SANGATTA 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021/0467 June 2021	TNP	0,00
254	099313	Pengadilan Tinggi Manado	005	03	Rekening Virtual	654440993131000	BPG 049 PT MANADO 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
255	099330	Pengadilan Negeri Manado	005	03	Rekening Virtual	654440993301000	BPG 049 PN MANADO	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
256	099334	Pengadilan Negeri Kotamubago	005	03	Rekening Virtual	654440993341000	BPG 158 PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU 03	BRI	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
257	099341	Pengadilan Negeri Tahuna	005	03	Rekening Virtual	654440993411000	BPG 083 PN TAHUNA	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
258	099355	Pengadilan Negeri Tondano	005	03	Rekening Virtual	654440993551000	BPG 049 PN TONDANO 03	BRI KC JAKARTA CUT MUTIAH	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
259	402031	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	005	03	Rekening Virtual	654444020311000	BPG 179 PN MELONGUANE	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
260	670211	Pengadilan Negeri Airmadidi	005	03	Rekening Virtual	654446702111000	BPG 179 PN AIRMADIDI	BRI	S -1197 / WPB.12 /KP.06/ 2021 29 June 2021	TNP	0,00
261	673035	Pengadilan Negeri Amurang	005	03	Rekening Virtual	654446730351000	BPG 049 PN AMURANG	BRI KCP AMURANG	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 21 April 2021	TNP	0,00
262	099376	Pengadilan Negeri Palu	005	03	Rekening Virtual	654440993761000	BPG 051 PN PALU 03	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK KC PALU	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
263	099383	Pengadilan Negeri Toli-toli	005	03	Rekening Virtual	8100120993831000	BPG 082 PN TOLITOLI	MANDIRI CABANG TOLITOLI	S-1579/WPB.12/KP.06/2021 3 August 2015	TNP	0,00
264	099397	Pengadilan Negeri Luwuk	005	03	Rekening Virtual	654440993971000	BPG 053 PN LUWUK 03	PT. BRI KC. LUWUK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
265	099402	Pengadilan Negeri Poso	005	03	Rekening Virtual	654440994021000	BPG052PNPOSO	BRI	000111/052 14 July 2021	TNP	0,00
266	400535	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	005	03	Rekening Virtual	654444005351000	BPG 051 PT PALU	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
267	477203	Pengadilan Negeri Donggala	005	03	Rekening Virtual	654444772031000	BPG051 PNDONGGALA	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
268	670249	Pengadilan Negeri Buol	005	03	Rekening Virtual	654446702491000	BPG:082 PN BUOL 670249	Bank Rakyat Indonesia	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
269	672981	Pengadilan Negeri Parigi	005	03	Rekening Virtual	654446729811000	BPG 051 PENGADILAN NEGERI PARIGI	BRI CABANG PARIGI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
270	099419	Pengadilan Tinggi Makassar	005	03	Rekening Virtual	654440994191000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG (099419)	Bank Rakyat Indonesia	S-3115/WPB.25 /KP.02/2021 16 September 2021	TNP	0,00
271	099423	Pengadilan Negeri Makassar	005	03	Rekening Virtual	654440994231000	BPg 136 Pengadilan Negeri Ujung Pandang (099423)	BRI	S-3388/WPB.25/ KP.02/2021 12 October 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
272	099440	Pengadilan Negeri Sungguminasa	005	03	Rekening Virtual	654440994401000	BPG 136 PN SUNGGUMINASA 099440	BRI	S-4220/WPB.25/KP.02/2021 8 December 2021	TNP	0,00
273	099444	Pengadilan Negeri Pangkajene	005	03	Rekening Virtual	654440994441000	BPG 136 PN PANGKAJENE (099444)	BRI CABANG PANGKEP	S-752/WPB.24/PB.0230/2011 18 March 2011	TNP	0,00
274	099451	Pengadilan Negeri Barru	005	03	Rekening Virtual	654440994511000	BPG 057 PN BARRU (03)	Bank Rakyat Indonesia	000096 27 May 2021	TNP	0,00
275	099465	Pengadilan Negeri Takalar	005	03	Rekening Virtual	654440994651000	BPG 136 PN TAKALAR 099465 TAKALAR	PT. BRI (Persero) Cab. Takalar	S-2345/WPB.25/KP.02/2021 9 July 2021	TNP	0,00
276	099472	Pengadilan Negeri Maros	005	03	Rekening Virtual	654440994721000	BPG 136 PN MAROS 099472	BRI	S - 761/PB./2021 21 April 2021	TNP	0,00
277	099486	Pengadilan Negeri Jeneponto	005	03	Rekening Virtual	654440994861000	BPG 056 PN JENEPONTO 03	BRI Cabang Jeneponto	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
278	099493	Pengadilan Negeri Pare-pare	005	03	Rekening Virtual	654440994931000	BPG 057 PN PAREPARE	PT BRI Cabang Parepare	000105 28 June 2021	TNP	0,00
279	099508	Pengadilan Negeri Enrekang	005	03	Rekening Virtual	654440995081000	BPG 057 PN ENREKANG	BRI Cabang Enrekang	S-39/DJU.I/KU.01/I/2021 18 January 2021	TNP	0,00
280	099512	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	005	03	Rekening Virtual	654450995121000	BPG 057 Pengadilan Negeri Sidrap	BRI Cabang Sidrap	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
281	099529	Pengadilan Negeri Pinrang	005	03	Rekening Virtual	654440995291000	BPG 057 PN PINRANG (03)	BRI	000073 26 April 2021	TNP	0,00
282	099533	Pengadilan Negeri Watampone	005	03	Rekening Virtual	654440995331000	BPG 055 PN	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
283	099550	Pengadilan Negeri Watansopeng	005	03	Rekening Virtual	654440995501000	BPG 055 Pengadilan Negeri Watansoppeng	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
284	099554	Pengadilan Negeri Sengkang	005	03	Rekening Virtual	654440995541000	BPG 055 PENGADILAN NEGERI SENGKANG	BRI Cab. Sengkang	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
285	099561	Pengadilan Negeri Bantaeng	005	03	Rekening Virtual	654440995611000	BPG 056 PN BANTAENG	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
286	099575	Pengadilan Negeri Sinjai	005	03	Rekening Virtual	654440995751000	BPG 177 PN SINJAI 03	BRI	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 June 2021	TNP	0,00
287	099582	Pengadilan Negeri Bulukumba	005	03	Rekening Virtual	654440995821000	BPG 056 PN BULUKUMBA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
288	099596	Pengadilan Negeri Selayar	005	03	Rekening Virtual	654440995961000	BPG:155 PN Selayar (099596)	BRI	S-1493/WPB.12/KP.06/2020 8 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
289	099601	Pengadilan Negeri Palopo	005	03	Rekening Virtual	654440996011000	BPG 058 PN PALOPO	BRI CABANG PALOPO	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
290	402034	Pengadilan Negeri Belopa	005	03	Rekening Virtual	654444020341000	BPG 058 PN BELOPA 402034	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
291	672928	Pengadilan Negeri Masamba	005	03	Rekening Virtual	654446729281000	BPG 058 PN MASAMBA	BRI Cabang Masamba	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
292	673014	Pengadilan Negeri Malili	005	03	Rekening Virtual	654446730141000	BPG 058 PN MALILI	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
293	099660	Pengadilan Negeri Kendari	005	03	Rekening Virtual	654440996601000	BPG 060 PN KENDARI 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/1/2021 21 January 2021	TNP	0,00
294	099664	Pengadilan Negeri Bau-bau	005	03	Rekening Virtual	654440996641000	BPG 103 PN BAUBAU	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
295	099671	Pengadilan Negeri Raha	005	03	Rekening Virtual	654440996711000	BPG 157 Pengadilan Negeri Raha	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
296	099684	Pengadilan Negeri Kolaka	005	03	Giro	21601000836303	BPg 156 Pengadilan Negeri Kolaka	Bang Rakyat Indonesia Cab. Kolaka	S-194/WPB.27/KP.0430/2015 9 March 2015	TNP	0,00
297	400541	Pengadilan Tinggi Kendari	005	03	Rekening Virtual	654444005411000	BPG 060 PT KENDARI 03	PT. BRI (persero) Tbk. Cabang Kendari	S-0416/WPB.27/KP.060/2015 30 March 2015	TNP	0,00
298	402033	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	005	03	Rekening Virtual	654444020331000	BPG 103 PN WANGI-WANGI 402033	PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Wangi-Wangi	S-153/WPB.12/ KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
299	477225	Pengadilan Negeri Una Aha	005	03	Rekening Virtual	654444772251000	BPG 060 PN UNAAHA 03	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
300	093884	Pengadilan Negeri Andoolo	005	03	Giro	654440938841000	BPG 060 PN ANDOOLO 03	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
301	681444	Pengadilan Negeri Pasarwajo	005	03	Rekening Virtual	9896646814441000	BPG103 PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	BNI KANTOR KAS PASARWAJO	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
302	099692	Pengadilan Tinggi Ambon	005	03	Rekening Virtual	654440996921000	BPG 061 PT AMBON	BRI	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020/ 061 16 October 2020	TNP	0,00
303	099707	Pengadilan Negeri Ambon	005	03	Rekening Virtual	654440997071000	BPg (061) PN Ambon	BRI Cabang Ambon	S-718/WPB.31/KP.061.3/2015 11 May 2015	TNP	0,00
304	099711	Pengadilan Negeri Masohi	005	03	Rekening Virtual	654440997111000	BPG 173 Pengadilan Negeri Masohi	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
305	099728	Pengadilan Negeri Tual	005	03	Rekening Virtual	654450997281000	BPG 084 PN TUAL 099728	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
306	402037	Pengadilan Negeri Dobo	005	03	Rekening Virtual	654444020371000	BPG 084 PN DOBO	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
307	402038	Pengadilan Negeri Namlea	005	03	Rekening Virtual	654444020381000	BPG 061 PN NAMLEA (03)	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
308	403431	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	005	03	Rekening Virtual	654444034311000	BPG 173 PN DATARAN HUNIPOPU	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JAKARTA JL. CUT MUTIAH NO. 23	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
309	403433	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	005	03	Rekening Virtual	654444034331000	BPG 173 PN DATARAN HUNMOA 403433	BRI	S-1335/ WPB.32/ KP.0402/ 2018 31 December 2018	TNP	0,00
310	672932	Pengadilan Negeri Saumlaki	005	03	Rekening Virtual	654446729321000	BPG 104 PN SAUMLAKI 03	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
311	099774	Pengadilan Tinggi Denpasar	005	03	Rekening Virtual	654450997741000	BPG 037 PT DENPASAR	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
312	099781	Pengadilan Negeri Denpasar	005	03	Rekening Virtual	654440997811000	BPG 037 PN DENPASAR 01	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
313	099795	Pengadilan Negeri Singaraja	005	03	Rekening Virtual	654440997951000	BPG132PENGADILANNEGERISINGARAJA	BRI cabang Singaraja	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
314	099803	Pengadilan Negeri Negara	005	03	Rekening Virtual	654450998031000	BPG 132 PN NEGARA 03	PT. Bank Rakyat Indonesia	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
315	099817	Pengadilan Negeri Semarapura	005	03	Rekening Virtual	654440998171000	BPG PN SEMARAPURA 03	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
316	099821	Pengadilan Negeri Tabanan	005	03	Rekening Virtual	654440998211000	BPG 037 PN TABANAN 03	BRI	001712/037 3 May 2021	TNP	0,00
317	099838	Pengadilan Negeri Amlapura	005	03	Rekening Virtual	654440998381000	BPG 154 PN AMLAPURA 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.0/6/2021 21 January 2021	TNP	0,00
318	099842	Pengadilan Negeri Gianyar	005	03	Rekening Virtual	654440998421000	BPG 037 PN GIANYAR 03	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
319	099859	Pengadilan Negeri Bangli	005	03	Rekening Virtual	654450998591000	BPG 154 PN BANGLI 03	PT. Bank BRI Cabang Bangli	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
320	099863	Pengadilan Negeri Mataram	005	03	Rekening Virtual	654440998631000	BPG 038 PN MATARAM	BRI CABANG MATARAM	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
321	099880	Pengadilan Negeri Bima	005	03	Rekening Virtual	654440998801000	BPG 071 PN RABA BIMA	BANK RAKYAT INDONESIA CAB. BIMA	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
322	099884	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	005	03	Rekening Virtual	654440998841000	BPG 101 PN SUMBAWA 03	BRI	S-153/WPB.12/06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
323	099891	Pengadilan Negeri Selong	005	03	Rekening Virtual	654440998911000	BPG 169 PN SELONG	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang selong	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
324	099906	Pengadilan Negeri Dompu	005	03	Rekening Virtual	654440999061000	BPG 071 PN DOMPU 03	PT. BANK BRI (PERSERO) CABANG DOMPU	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
325	099913	Pengadilan Negeri Praya	005	03	Rekening Virtual	654440999131000	BPg 038 PN Praya	PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO CAB. PRAYA	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
326	400560	Pengadilan Tinggi Mataram	005	03	Rekening Virtual	654444005601000	BPG 038 PENGADILAN TINGGI MATARAM	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
327	099927	Pengadilan Negeri Kupang	005	03	Rekening Virtual	9896640999271000	BPG 039 PN KUPANG-99927	BNI	S-931/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
328	099931	Pengadilan Negeri Atambua	005	03	Rekening Virtual	654440999311000	BPg 172 PN 03 Atambua	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
329	099948	Pengadilan Negeri Soe	005	03	Rekening Virtual	654440999481000	BPG 039 PN SOE	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
330	099952	Pengadilan Negeri Kefamenanu	005	03	Rekening Virtual	654440999521000	BPG 172 Pengadilan Negeri Kefamenanu	BRI Cabang Kefamenanu	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
331	099969	Pengadilan Negeri Waingapu	005	03	Rekening Virtual	9896640999691000	BPG 041 PENGADILAN NEGERI WAINGAPU/03	BNI	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
332	099973	Pengadilan Negeri Waikabubak	005	03	Rekening Virtual	9896640999731000	BPG 041 PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK 03	BNI	S-1193/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
333	099990	Pengadilan Negeri Ende	005	03	Rekening Virtual	654440999901000	BPG 040 PN END.03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
334	099994	Pengadilan Negeri Maumere	005	03	Rekening Virtual	654440999941000	BPG 040 PN MAUMERE	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
335	400008	Pengadilan Negeri Larantuka	005	03	Rekening Virtual	9896644000081000	BPG 174 PENGADILAN NEGERI LARANTUKA03	BNI	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
336	400014	Pengadilan Negeri Ruteng	005	03	Rekening Virtual	654444000141000	BPG 111 Pengadilan Negeri Ruteng 03	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
337	400158	Pengadilan Negeri Bajawa	005	03	Rekening Virtual	654444001581000	BPG 111 PN BAJAWA 03	BANK RAKYAT INDONESIA	S-207/WPB.23/KP.0530/2015 12 February 2015	TNP	0,00
338	400164	Pengadilan Negeri Kalabahi	005	03	Rekening Virtual	654444001641000	BPG 039 BENDAHARA PN KALABAHI 400164	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
339	400246	Pengadilan Tinggi Kupang	005	03	Rekening Virtual	9896644002461000	BPG 039 PT KUPANG (400246)	Bank Negara Indonesia Cabang Kupang	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
340	477231	Pengadilan Negeri Lembata	005	03	Giro	9896644772311000	BPG 174 Pengadilan Negeri Lembata 03	BNI KLN Lewoleba	S-1193/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
341	477250	Pengadilan Negeri Rote Ndao	005	03	Rekening Virtual	654444772501000	BPg. 039 PN Rote Ndao	BRI	375/DJU.1/KU.01/4/2021 29 April 2021	TNP	0,00
342	673021	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	005	03	Rekening Virtual	654446730211000	BPG 111 PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021/111 21 January 2021	TNP	0,00
343	240166	Pengadilan Negeri Oelamasi	005	03	Rekening Virtual	654442401661000	BPG 039 PENGADILAN NEGERI OELAMASI	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
344	400023	Pengadilan Tinggi Jayapura	005	03	Rekening Virtual	654444000231000	BPG 063 PT JAYAPURA	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
345	400039	Pengadilan Negeri Jayapura	005	03	Rekening Virtual	654444000391000	BPg 063 PN JAYAPURA	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
346	400045	Pengadilan Negeri Wamena	005	03	Rekening Virtual	654444000451000	BPG 113 PN WAMENA 400045	BANK RAKYAT INDONESIA CAB. WAMENA	00123 6 September 2022	Non TNP	0,00
347	400051	Pengadilan Negeri Merauke	005	03	Rekening Virtual	654444000511000	BPG 068 PN MERAUKE QQ 400051	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
348	400091	Pengadilan Negeri Biak	005	03	Rekening Virtual	654444000911000	BPG:064 PN BIAK	BRI CABANG BIAK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
349	400102	Pengadilan Negeri Nabire	005	03	Rekening Virtual	654444001021000	BPG 085 PN NABIRE	BANK BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
350	400277	Pengadilan Negeri Serui	005	03	Rekening Virtual	8100124002771000	BPG 138 PENGADILAN NEGERI SERUI	BANK MANDIRI CABANG SERUI	S-1579/WPB.12/KP.06/2021 3 August 2021	TNP	0,00
351	614891	Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika	005	03	Rekening Virtual	654446148911000	BPg 141 Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika	BRI Cabang Timika	00 1 February 2022	TNP	0,00
352	400111	Pengadilan Negeri Bengkulu	005	03	Rekening Virtual	654444001111000	BPG 016 PN BENGKULU	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
353	400127	Pengadilan Negeri Curup	005	03	Rekening Virtual	654444001271000	BPG 146 PN CURUP 03	BRI CABANG CURUP	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
354	400133	Pengadilan Negeri Manna	005	03	Rekening Virtual	654454001331000	BPG 121 PN MANNA DJBPU	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
355	400240	Pengadilan Negeri Arga Makmur	005	03	Giro	654444002401000	BPG 016 PN ARGA MAKMUR	BRI CABANG ARGA MAKMUR	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 26 June 2021	TNP	0,00
356	400513	Pengadilan Tinggi Bengkulu	005	03	Rekening Virtual	654444005131000	BPG 016 PT BENGKULU	BRI	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
357	402018	Pengadilan Negeri Mukomuko	005	03	Rekening Virtual	654454020181000	BPG 181 PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 402018	PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC. MUKOMUKO	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
358	672995	Pengadilan Negeri Bintuhan	005	03	Rekening Virtual	654446729951000	BPg 121 PN Bintuhan	BRI UNIT BANDAR BINTUHAN	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
359	673010	Pengadilan Negeri Tais	005	03	Rekening Virtual	654446730101000	BPG 121 PN TAIS DJBPU	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
360	673042	Pengadilan Negeri Kepahiang	005	03	Rekening Virtual	654446730421000	BPG 146 PN KEPAHIANG 03	BRI	S-153.WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
361	673056	Pengadilan Negeri Tubei	005	03	Rekening Virtual	654446730561000	BPG 146 PN TUBEI 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
362	099732	Pengadilan Negeri Ternate	005	03	Rekening Virtual	654440997321000	BPG 062 PN TERNATE 03	BRI Cabang Ternate	B. 74/KC-XII/OPS/04/2021 28 April 2021	TNP	0,00
363	099749	Pengadilan Negeri Tobelo	005	03	Rekening Virtual	654440997491000	BPG 112 PN TOBELO QQ DJBPU	BRI CABANG TOBELO	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
364	099753	Pengadilan Negeri Labuha	005	03	Rekening Virtual	654440997531000	BPg 062 Pengadilan Negeri Labuha 03	BRI Unit Bacan di Labuha	S-252/WPB.30/KP.0130/2015 5 February 2015	TNP	0,00
365	099770	Pengadilan Negeri Soasiu	005	03	Rekening Virtual	654450997701000	BPG 062 PN SOASIO 03	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
366	403434	PENGADILAN NEGERI SANANA	005	03	Rekening Virtual	654444034341000	BPG 062 PN SANANA 03	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
367	403435	Pengadilan Negeri Bobong	005	03	Rekening Virtual	654444034351000	BPG 062 PN BOBONG 03	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
368	664523	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	005	03	Rekening Virtual	654446645231000	BPG 062 PT MALUT 03	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 21 January 2021	TNP	0,00
369	099074	Pengadilan Negeri Serang	005	03	Rekening Virtual	654440990741000	BPG 020 PN SERANG 099074	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
370	099075	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	005	03	Rekening Virtual	654440990751000	BPG161 PN RKBT 099075	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
371	099077	Pengadilan Negeri Tangerang	005	03	Rekening Virtual	654440990771000	BPG 127 PN TANGERANG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - TANGERANG	S-153/WPB.12/KP.06/202 21 January 2021	TNP	0,00
372	417845	Pengadilan Negeri Pandeglang	005	03	Rekening Virtual	654444178451000	BPG 161 PENGADILAN NEGERI PDG 417845	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 April 2021	TNP	0,00
373	663399	Pengadilan Tinggi Banten	005	03	Rekening Virtual	654446633991000	BPG 020 PT BANTEN 663399	BRI Cab. Serang	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
374	099234	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	005	03	Rekening Virtual	654440992341000	BPG 015 PN PANGKALPINANG-03	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
375	099235	Pengadilan Negeri Sungailiat	005	03	Rekening Virtual	654440992351000	BPG015 PN SUNGAILIAT 03	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
376	400601	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	005	03	Rekening Virtual	654444006011000	BPG 107 PN TANJUNG PANDAN	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
377	402020	Pengadilan Negeri Koba	005	03	Rekening Virtual	654444020201000	BPG 015 PN KOBA 402020	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
378	402021	Pengadilan Negeri Mentok	005	03	Rekening Virtual	654444020211000	BPG 015 PN MENTOK 402021	BRI KCP MENTOK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
379	663404	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	005	03	Rekening Virtual	654456634041000	BPG 015 PT BABEL 03	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
380	099362	Pengadilan Negeri Gorontalo	005	03	Rekening Virtual	654440993621000	BPG 050 PN GORONTALO	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
381	400209	Pengadilan Negeri Limboto	005	03	Rekening Virtual	654444002091000	BPg 050 PN LIMBOTO	BRI	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00
382	477219	Pengadilan Negeri Tilamuta	005	03	Rekening Virtual	654454772191000	BPG 180 PN TILAMUTA	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
383	664540	Pengadilan Tinggi Gorontalo	005	03	Rekening Virtual	654446645401000	BPG 050 PT GORONTALO	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
384	670185	Pengadilan Negeri Marisa	005	03	Rekening Virtual	654446701851000	BPG.180.PN MARISA	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
385	099218	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	005	03	Rekening Virtual	654440992181000	BPG 009 PN TANJUNGPINANG ES03	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
386	109064	Pengadilan Negeri Batam	005	03	Rekening Virtual	9896641090641000	BPG 137 PN BATAM 109064	BNI Cabang Utama Batam	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
387	526707	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	005	03	Rekening Virtual	654445267071000	BPG 009 PT KEPULAUAN RIAU	BRI	S-226/KPN.1206/2023 19 January 2023	TNP	0,00
388	663006	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	005	03	Rekening Virtual	654446630061000	BPg 137 PN TBK 663006	BRI	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
389	672949	Pengadilan Negeri Natuna	005	03	Rekening Virtual	654446729491000	BPG 009 PENGADILAN NEGERI NATUNA ES03	BRI UNIT RANAI	S-839/KPN.1206/2023 10 May 2023	TNP	0,00
390	400070	Pengadilan Negeri Manokwari	005	03	Rekening Virtual	654444000701000	BPg 065 PN Manokwari 400070	Bank Rakyat Indonesia Cabang Manokwari	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 May 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
391	400076	Pengadilan Negeri Sorong	005	03	Rekening Virtual	654444000761000	BPG 066 PN 3	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. KC. Sorong	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
392	402039	Pengadilan Negeri Kaimana	005	03	Rekening Virtual	654444020391000	BPG 067 PN KAIMANA 402039	BRI	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
393	526717	Pengadilan Tinggi Papua Barat	005	03	Rekening Virtual	654445267171000	BPG 065 PT PAPUA BARAT	BRI	S-154/KPN.1206/2023 13 January 2023	TNP	0,00
394	099622	Pengadilan Negeri Majene	005	03	Rekening Virtual	654440996221000	BPG 059 099622 MJN	BRI Cabang Majene	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
395	099639	Pengadilan Negeri Mamuju	005	03	Rekening Virtual	654440996391000	BPG 178 PN MAMUJU	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
396	099643	Pengadilan Negeri Polewali	005	03	Rekening Virtual	654450996431000	BPG 059 099643 PN PLW	BRI	S-761/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
397	526713	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	005	03	Rekening Virtual	654445267131000	BPG 178 PT SULAWESI BARAT	BRI	S-266/KPN.1206/2023 19 January 2023	TNP	0,00
398	689980	Pengadilan Negeri Pasangkayu	005	03	Rekening Virtual	9896646899801000	BPG 178 PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	BNI	S-1193/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
399	099273	Pengadilan Negeri Tarakan	005	03	Rekening Virtual	8100120992731000	BPG 048 PN TARAKAN 03	BANK MANDIRI	S-1391/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
400	417705	Pengadilan Negeri Malinau	005	03	Rekening Virtual	6,54444E+14	BPG 185 PN MLN 03 417705	BRI	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 June 2021	TNP	0,00
401	417723	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	005	03	Rekening Virtual	654444177231000	BPG 185 PN TJ SELOR 03 417723	BRI Cabang Tanjung Selor	S-986/WPB.112/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
402	477271	Pengadilan Negeri Nunukan	005	03	Rekening Virtual	654444772711000	BPG 152 PN NUNUKAN 477271	BRI	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 January 2021	TNP	0,00
403	526721	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	005	03	Rekening Virtual	654455267211000	BPG 185 PT KALTARA	BRI	S-154/KPN.1206/2023 13 January 2023	TNP	0,00
404	098519	Pengadilan Negeri Langsa	005	03	VA	8101250991781000	BANK SYARIAH INDONESIA	S-331/WPB.01/KP.04/2021 4 AUGUST 2021	TNP	TNP	0,00
405	098462	Pengadilan Negeri Sigli	005	03	VA	8101250991721000	BANK SYARIAH INDONESIA	000558/001 31 JANUARY 2022	TNP	TNP	0,00
406	400389	Pengadilan Negeri Kisaran	005	03	VA	654444003901000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-149/WPB.02/KP.0604/2019 18 JULY 2019	TNP	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
407	662990	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	005	03	VA	654446629911000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	TNP	0,00
408	098860	Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu	005	03	VA	654440992161000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	TNP	0,00
409	099226	Pengadilan Negeri Palembang	005	03	VA	654440992261000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 Oktober 2020	TNP	TNP	0,00
410	098984	Pengadilan Negeri Lahat	005	03	VA	654440992311000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	TNP	0,00
411	099052	Pengadilan Negeri Kotabumi	005	03	VA	654440992381000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WBP.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	TNP	0,00
412	099162	Pengadilan Negeri Buntok	005	03	VA	9896640992501000	BANK NEGARA INDONESIA	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	TNP	0,00
413	568725	Pengadilan Negeri Bitung	005	03	VA	654445687261000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-123/WPB.29/KP.179/2015 19 MAY 2015	TNP	TNP	0,00
414	099617	Pengadilan Negeri Makale	005	03	VA	654440996181000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	TNP	0,00
415	401926	Pengadilan Negeri Lasusua	005	03	VA	654444020321000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	TNP	0,00
416	400081	Pengadilan Negeri Fak Fak	005	03	VA	654444000821000	BANK RAKYAT INDONESIA	000040 21 JUNE 2021	TNP	TNP	0,00
Total											**1.000,00**

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
1	400617	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	005	04	VA	651544006171000	BPG.175.PENGADILAN AGAMA JAKPUS (400617)	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
2	400623	Pengadilan Agama Jakarta Utara	005	04	VA	651544006231000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKUT 400623	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
3	400632	Pengadilan Agama Jakarta Barat	005	04	VA	651544006321000	BPG 175 PA JAKBAR (400632)	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
4	400654	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	005	04	VA	651544006541000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKSEL 400654	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
5	401113	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	005	04	VA	651544011131000	BPG175PTA JAKARTA 401113	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
6	400663	Pengadilan Agama Bandung	005	04	VA	651544006631000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA BANDUNG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
7	400679	Pengadilan Agama Sumedang	005	04	VA	651544006791000	BPG 087 PA 400679 SMD	BRI	S-665/PB.3/2021 5 May 2021	TNP	0,00
8	400691	Pengadilan Agama Ciamis	005	04	VA	651544006911000	BPG 025 PA CIAMIS	BRI	S-665/PB.3/2021 6 April 2021	TNP	0,00
9	400711	Pengadilan Agama Garut	005	04	VA	651544007111000	BPG 096 PA GARUT 400711	BRI	S-665/PB.3/2021 26 April 2021	TNP	0,00
10	400730	Pengadilan Agama Bogor	005	04	VA	651544007301000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA BOGOR	BRI	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 April 2021	TNP	0,00
11	400736	Pengadilan Agama Sukabumi	005	04	VA	651544007361000	BPG 128 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI 400736	BRI KC Sukabumi	183/PMK.05/2019 5 December 2019	TNP	0,00
12	400742	Pengadilan Agama Cianjur	005	04	VA	651544007421000	BPG 128 PA CIANJUR 400742	BRI Cabang Cianjur	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
13	400751	Pengadilan Agama Cirebon	005	04	VA	651544007511000	BPG 024 PENGADILAN AGAMA CIREBON	BRI	s-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
14	400767	Pengadilan Agama Indramayu	005	04	VA	651544007671001	BPG 024 PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	BANK BRI	1103/DjA.1/KU.01/04/2021 1 April 2021	TNP	0,00
15	400773	Pengadilan Agama Majalengka	005	04	VA	651544007671000	BPG 147 PA MAJALENGKA (400773)	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. BRI CABANG MAJALENGKA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
16	400782	Pengadilan Agama Kuningan	005	04	VA	651544007821000	BPG 147 PA KUNINGAN (400782)	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
17	400833	Pengadilan Agama Bekasi	005	04	VA	651544008331000	BPG 171 PENGADILAN AGAMA BEKASI	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
18	400849	Pengadilan Agama Karawang	005	04	VA	653194008491000	Bpg. 086 Pengadilan Agama Karawang	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
19	403419	Pengadilan Agama Soreang	005	04	VA	653194034191000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA SOREANG 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
20	403420	Pengadilan Agama Kota Cimahi	005	04	VA	651544034201000	BPG 095 Pengadilan Agama Kota Cimahi 04	BRI	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 April 2021	TNP	0,00
21	402588	Pengadilan Agama Subang	005	04	VA	653244025881000	BPG 021 PA SUBANG 04	BRI Cabang Subang	000037/021 28 April 2021	TNP	0,00
22	402996	Pengadilan Agama Cibadak	005	04	VA	651544029961000	BPG 128 PENGADILAN AGAMA CIBADAK	BRI Cabang Cibadak	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
23	403010	Pengadilan Agama Sumber	005	04	VA	651544030101000	BPG 024 PENGADILAN AGAMA SUMBER	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
24	604720	Pengadilan Agama Cibinong	005	04	VA	651546047201000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA CIBINONG	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
25	614707	Pengadilan Agama Cikarang	005	04	VA	651546147071000	BPG 171 PENGADILAN AGAMA CIKARANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
26	652063	Pengadilan Agama Depok	005	04	VA	651546520631000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA DEPOK	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
27	690023	Pengadilan Agama Tasikmalaya	005	04	VA	651544007051000	BPG 025 PENGADILAN AGAMA	BRI	S-709/PB.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00
28	400861	Pengadilan Agama Pekalongan	005	04	VA	651544008611000	BPG 072 MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA PKL	BRI	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 May 2020	TNP	0,00
29	400880	Pengadilan Agama Pemalang	005	04	VA	651544008801000	BPG 118 PA PEMALANG04	BRI CABANG PEMALANG	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
30	400886	Pengadilan Agama Tegal	005	04	VA	651544008861000	BPG 118 PA TEGAL 005.04	BRI	2117/DJA/KU.03/6/2020 12 June 2020	TNP	0,00
31	400892	Pengadilan Agama Brebes	005	04	VA	651544008921000	BPG 118 PA BREBES400892	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
32	400906	Pengadilan Agama Batang	005	04	VA	651544009061000	BPG 072 MANAJEMEN PA BATANG	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
33	400912	Pengadilan Agama Semarang	005	04	VA	651544009121000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SEMARANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
34	400921	Pengadilan Agama Salatiga	005	04	VA	651544009211000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA	BRI Cabang Salatiga	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
35	400937	Pengadilan Agama Kendal	005	04	VA	651544009371000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN AGAMA KENDAL	Bank Rakyat Indonesia Cab.Kendal	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
36	400943	Pengadilan Agama Demak	005	04	VA	651544009431000	BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
37	400952	Pengadilan Agama Purwodadi	005	04	VA	651544009521000	BPG 163 PA PURWODADI 04	BRI	S-1654WPB.12/KP.06.2020 23 June 2020	TNP	0,00
38	400968	Pengadilan Agama Pati	005	04	VA	651544009681000	BPG 097 PA PATI BADILAG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
39	400974	Pengadilan Agama Kudus	005	04	VA	653194009741000	BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400974	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
40	400983	Pengadilan Agama Jepara	005	04	VA	5000804009831000	BPG 129 PA JEPARA 400983	BRI	S-1986/WPB.12/KP.06/2021 3 September 2021	TNP	0,00
41	400999	Pengadilan Agama Rembang	005	04	VA	651544009991000	BPG 097 PA REMBANG BADILAG	BRI Cab. Rembang	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
42	401003	Pengadilan Agama Blora	005	04	VA	651544010031000	BPG 163 PENGADILAN AGAMA BLORA 04	BANK RAKYAT INDONESIA KC JAKARTA VETERAN	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
43	401019	Pengadilan Agama Magelang	005	04	VA	651544010191000	BPG 115 MANAJEMEN PA MGL	BRI Cabang Magelang	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
44	401025	Pengadilan Agama Temanggung	005	04	VA	651544010251000	BPG 115 MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
45	401031	Pengadilan Agama Wonosobo	005	04	VA	653194010311000	BPG 164 PA WONOSOBO 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
46	401050	Pengadilan Agama Purworejo	005	04	VA	651544010501000	BPG 027 PENGADILAN AGAMA KAB PURWOREJO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
47	401056	Pengadilan Agama Kebumen	005	04	VA	651544010561000	BPG 027 PA KEBUMEN	BRI CAB JAKARTA VETERAN	S-665/PB.3/2021 5 April 2020	TNP	0,00
48	401071	Pengadilan Agama Banyumas	005	04	VA	651544010711000	BPG 029 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
49	401087	Pengadilan Agama Cilacap	005	04	VA	653194010871000	BPG 130 PENGADILAN AGAMA CILACAP 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 26 June 2020	TNP	0,00
50	401093	Pengadilan Agama Purbalingga	005	04	VA	651544010931000	BPG 029 MANAJEMEN PERADILAN AGAMA PA PURBALINGGA	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
51	401107	Pengadilan Agama Banjarnegara	005	04	VA	651544011071000	BPG 164 PA Banjarnegara 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2021 23 June 2020	TNP	0,00
52	401122	Pengadilan Agama Klaten	005	04	VA	651544011221000	BPG 148 PENGADILAN AGAMA KLATEN	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
53	401138	Pengadilan Agama Boyolali	005	04	VA	651544011381000	BPG 148 PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA - BRI CABANG BOYOLALI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
54	401144	Pengadilan Agama Sragen	005	04	VA	651544011441000	BPG 162 PENGADILAN AGAMA SRAGEN BADILAG	BRI CABANG SRAGEN	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
55	401153	Pengadilan Agama Wonogiri	005	04	VA	651544011531000	BPG 028 PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
56	401169	Pengadilan Agama Sukoharjo	005	04	VA	651544011691000	BPG 028 MANAGEMEN PENGADILAN AGAMA SKH	BRI	000070/028 27 April 2021	TNP	0,00
57	401175	Pengadilan Agama Karanganyar	005	04	VA	651544011751000	BPG 162 PENG AGAMA KARANGANYAR BADILAG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
58	401181	Pengadilan Agama Surakarta	005	04	VA	651544011811000	BPG 028 MANAJEMEN PA SURAKARTA	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
59	402594	Pengadilan Agama Ambarawa	005	04	VA	651544025941000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
60	402965	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	005	04	VA	651544029651000	BPG 134 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
61	403022	Pengadilan Agama Mungkid	005	04	VA	651544030221000	BPG 115 MANAJEMEN PA MUNGKID	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 20 June 2020	TNP	0,00
62	614711	Pengadilan Agama Kajen	005	04	VA	651546147111000	BPG 072 MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA KAJEN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
63	401201	Pengadilan Agama Yogyakarta	005	04	VA	651544012011000	BPG 030 Satker Pengadilan Agama Yogyakarta QQ 04	BRI Cabang Katamso	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
64	401202	Pengadilan Agama Sleman	005	04	VA	651544012021000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA SLEMAN QQ 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
65	401220	Pengadilan Agama Wates	005	04	VA	651544012201000	BPG 176 PENGADILAN AGAMA WATES	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
66	401226	Pengadilan Agama Bantul	005	04	VA	651544012261000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA BANTUL	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
67	401232	Pengadilan Agama Wonosari	005	04	VA	651544012321000	BPG 149 PENGADILAN AGAMA WONOSARI 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
68	547658	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	005	04	VA	651545476581000	BPG 030 PTA YOGYAKARTA QQ 04	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
69	309125	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	005	04	VA	651543091251000	BPg 135 PTA SURABAYA QQ 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
70	401241	Pengadilan Agama Surabaya	005	04	VA	653194012411000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA SURABAYA QQ 04	BRI UNIT KARAH AGUNG SURABAYA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
71	401257	Pengadilan Agama Mojokerto	005	04	VA	651544012571000	BPG 098 PA MOJOKERTO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
72	401263	Pengadilan Agama Sidoarjo	005	04	VA	651544012631000	BPG 165 PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 401263	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
73	401272	Pengadilan Agama Jombang	005	04	VA	651544012721000	BPG 098 PA JOMBANG 401272	PT. BRI Tbk Cabang Jombang	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
74	401288	Pengadilan Agama Bawean	005	04	VA	651544012881000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA BAWEAN 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/135 23 June 2020	TNP	0,00
75	401294	Pengadilan Agama Gresik	005	04	VA	651544012941000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA GRESIK 04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. BRI CABANG GRESIK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
76	401308	Pengadilan Agama Bojonegoro	005	04	VA	651544013081000	BPG 073 PA BOJONEGORO BPA	BRI Cabang Bojonegoro	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
77	401323	Pengadilan Agama Lamongan	005	04	VA	651544013231000	BPG 073 PA LAMONGAN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/073 23 June 2020	TNP	0,00
78	401339	Pengadilan Agama Jember	005	04	VA	651544013391000	BPG 131 PENGADILAN AGAMA JEMBER	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER	S-315/ WPB.16/ KP.131/ 2015 25 March 2015	TNP	0,00
79	401345	Pengadilan Agama Bondowoso	005	04	VA	651544013451000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 401345	BRI Cab. Bondowoso	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
80	401351	Pengadilan Agama Situbondo	005	04	VA	651544013511000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 401351	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
81	401370	Pengadilan Agama Banyuwangi	005	04	VA	653194013701000	BPG 100 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (401370)	BRI Cab Banyuwangi	900044 5 August 2021	TNP	0,00
82	401376	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	005	04	VA	653194013761000	BPG 034 Pengadilan Agama Kediri	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
83	401382	Pengadilan Agama Tulungagung	005	04	VA	651544013821000	BPG 150 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG QQ 401382	BRI	000099/150 29 July 2021	TNP	0,00
84	401391	Pengadilan Agama Trenggalek	005	04	VA	651544013911000	BPG 034 PA TRENGGALEK 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
85	401403	Pengadilan Agama Blitar	005	04	VA	653194014031000	BPG 150 PENGADILAN AGAMA BLITAR 401403	BRI CAB. BLITAR	S-1654MPB .12lKP.OGl2020 24 June 2021	TNP	0,00
86	401411	Pengadilan Agama Nganjuk	005	04	VA	651544014111000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA NGANJUK	RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG NGANJUK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
87	401427	Pengadilan Agama Malang	005	04	VA	651544014271000	BPG 032 PA MALANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
88	401433	Pengadilan Agama Pasuruan	005	04	VA	651544014331000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA PASURUAN 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
89	401442	Pengadilan Agama Bangil	005	04	VA	651544014421000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA BANGIL 401442	BRI	110528/032 19 April 2021	TNP	0,00
90	401458	Pengadilan Agama Probolinggo	005	04	VA	651544014581000	BPG 035 PA PROBOLINGGO (401458)	BRI	000636/035 20 May 2021	TNP	0,00
91	401464	Pengadilan Agama Kraksaan	005	04	VA	651544014641000	BPG 035 PA KRAKSAAN (401464	BRI	000640 9 June 2021	TNP	0,00
92	401473	Pengadilan Agama Lumajang	005	04	VA	651544014731000	BPG 131 PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	BRI	S-665/PB.3/ 2021 5 April 2021	TNP	0,00
93	401489	Pengadilan Agama Madiun	005	04	VA	651544014891000	BPG. 033 PA Kota Madiun	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
94	401495	Pengadilan Agama Magetan	005	04	VA	651544014951000	BPG 033 PA MAGETAN 04	BRI	000175/033 3 August 2021	TNP	0,00
95	401509	Pengadilan Agama Ngawi	005	04	VA	651544015091000	BPG 033 PA NGAWI 04	BRI	S-989/WPB. 12/KP .06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
96	401515	Pengadilan Agama Ponorogo	005	04	VA	651544015151000	BPG 033 PA PONOROGO 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
97	401521	Pengadilan Agama Pacitan	005	04	VA	651544015211000	BPG 099 PENGADILAN AGAMA PACITAN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
98	401540	Pengadilan Agama Pamekasan	005	04	VA	651544015401000	BPG 036 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	BRI Pamekasan	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
99	401546	Pengadilan Agama Bangkalan	005	04	VA	651544015461000	BPg 036 PA Bangkalan	BRI Cabang Bangkalan	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
100	401552	Pengadilan Agama Sampang	005	04	VA	651544015521000	Bpg 036 PENGADILAN AGAMA SAMPANG	BRI	S1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2021	TNP	0,00
101	401561	Pengadilan Agama Sumenep	005	04	VA	651544015611000	BPg PA 1 Sumenep	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP)	S.965/WPB.16.KP.05.093/2015 26 June 2015	Non TNP	0,00
102	401577	Pengadilan Agama Kangean	005	04	VA	651544015771000	BPG 036 PA KANGEAN SUMENEP	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk - SUMENEP	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
103	403031	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	005	04	VA	651544030311000	BPg:033 PA KAB MADIUN (04)	BRI CABANG MADIUN	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
104	403047	Pengadilan Agama Kediri	005	04	VA	653194030471000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA KEDIRI 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/034 23 June 2020	TNP	0,00
105	450738	Pengadilan Agama Tuban	005	04	VA	651544507381000	BPG 166 PENGADILAN AGAMA TUBAN 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
106	604731	Pengadilan Agama Malang Kab. Malang	005	04	VA	651546047311000	BPG 032 PA KAB MALANG	BRI	110681/032 9 December 2021	TNP	0,00
107	401583	Mahkamah Syar'iyah Aceh	005	04	VA	8100124015831000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH ACEH	BSI	S-853/WPB.12/KP.06/2021 20 May 2021	TNP	0,00
108	401592	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	005	04	VA	8100124015921000	BPG 001 MAHKMAH SYARIAH BANDA ACEH 04	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
109	401603	Mahkamah Syar'iyah Sabang	005	04	VA	8100124016031000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH SABANG	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2837/WPB.12/KP06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
110	401612	Mahkamah Syar'iyah Sigli	005	04	VA	8100124016121000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI 04	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
111	401628	Mahkamah Syar'iyah Meureudu	005	04	VA	8100124016281000	BPG 001 Mahkamah Syariyah Meureudu 04	BSI Kantor Cabang Sigli	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
112	401634	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	005	04	VA	8100124016341000	BPG 089 MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	BSI KC BIREUEN	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
113	401643	Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon	005	04	VA	8100124016431000	BPG 089 MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSUKON	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
114	401659	Mahkamah Syar'iyah Takengon	005	04	VA	8100124016591000	BPG 122 MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
115	401665	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	005	04	VA	8100124016651000	BPG 089 MAHKAMAH SYARIAH LHOKSEUMAWE	Mandiri Syariah	S- 2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
116	401671	Mahkamah Syar'iyah Idi	005	04	VA	8100124016711000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH IDI	BSI KCP IDI RAYEUK 3	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 November 2021	TNP	0,00
117	401690	Mahkamah Syar'iyah Langsa	005	04	VA	8100124016901000	BPG 002 MS LANGSA 401690	Bank Syariah Indonesia	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
118	401696	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	005	04	VA	8100124016961000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH KSP DIPA 04	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
119	401710	Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren	005	04	VA	8100124017101000	BPG 105 MAHKAMAH SYARIYAH BLANGKEJEREN 04	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
120	401716	Mahkamah Syar'iyah Kutacane	005	04	VA	8100124017161000	BPG 105 MAHKAMAH SYARIAH KUTACANE 04	BSI	S-191/WPB.01/KP.06/2021 19 July 2021	TNP	0,00
121	401722	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	005	04	VA	8100124017221000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH MEULABOH	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
122	401731	Mahkamah Syar'iyah Sinabang	005	04	VA	8100124017311000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH SINABANG 04	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
123	401747	Mahkamah Syar'iyah Calang	005	04	VA	8100124017471000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH CALANG 04	Bank Syariah Indonesia	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
124	401753	Mahkamah Syar'iyah Singkil	005	04	VA	8100124017531000	BPG 074 MAHKAMAH SYARIYAH SINGKIL 04	BSI	000131/074 15 February 2022	TNP	0,00
125	401762	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	005	04	VA	8100124017621000	BPG 074 MAHKAMAH SYARIYAH TAPAKTUAN 04	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
126	403426	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	005	04	VA	8100124034261000	BPG 074 MS BLANGPIDIE 403426	BSI Cabang Blangpidie	000127/074 3 February 2022	TNP	0,00
127	403427	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	005	04	VA	8100124034271000	BPG 003 MS SUKA MAKMUE 04	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
128	403428	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	005	04	VA	8100124034281000	BPG 074 MS SSALAM 403428	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021/074 11 November 2021	TNP	0,00
129	402608	Mahkamah Syar'iyah Jantho	005	04	VA	8100124026081000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH JANTHO 04	Bank Syariah Indonesia	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
130	690108	MS Simpang Tiga Redelong	005	04	VA	8100126901081000	BPG 122 Mahkamah Syariah	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
131	401778	Pengadilan Tinggi Agama Medan	005	04	VA	651544017781000	BPG 123 PT AGAMA MEDAN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
132	401784	Pengadilan Agama Binjai	005	04	VA	651544017841000	BPG 123 PA BINJAI 04	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
133	401793	Pengadilan Agama Kabanjahe	005	04	VA	651544017931000	BPG 119 PA KABANJAHE 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
134	401804	Pengadilan Agama Medan	005	04	VA	651544018041000	BPG 123 PA MEDAN KELAS IA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
135	401813	Pengadilan Agama Rantau Prapat	005	04	VA	651544018131000	BPG 075 PA RANTAUPRAPAT	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
136	401829	Pengadilan Agama Tanjung Balai	005	04	VA	9893004018291000	BPG 076 PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI	BNI PECENONGAN	000039/076 4 June 2021	TNP	0,00
137	401841	Pengadilan Agama Sidikalang	005	04	VA	651544018411000	BPG 119 PA SIDIKALANG 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
138	401860	Pengadilan Agama Pematang Siantar	005	04	VA	651544018601000	BPG 005 04 PA P.SIANTAR	BRI CABANG PEMATANGSIANTAR	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
139	401872	Pengadilan Agama Sibolga	005	04	VA	651544018721000	BPG 106 PENGADILAN AGAMA SIBOLGA BADILAG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
140	401881	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	005	04	VA	651544018811000	BPG 006 PA PADANGSIDEMPUAN 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
141	401897	Pengadilan Agama Gunung Sitoli	005	04	VA	651544018971000	BPG 007 PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI QQ 401897	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
142	402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	005	04	VA	651544020401000	BPG 006 PA SBH 402040	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
143	403399	Pengadilan Agama Sei Rampah	005	04	VA	651544033991000	BPG 124 PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH 04	BRI	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 May 2020	TNP	0,00
144	403062	Pengadilan Agama Kisaran	005	04	VA	651544030621000	BPG 076 PENGADILAN AGAMA KISARAN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
145	403084	Pengadilan Agama Simalungun	005	04	VA	651544030841000	BPG 005 PA SIMALUNGUN KODE SATKER 403084	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
146	547683	Pengadilan Agama Stabat	005	04	VA	653195476831000	BPG 123 PA STABAT 04	BRI	S-1338/WPB.12/KP.06/2020/123 18 May 2020	TNP	0,00
147	604745	Pengadilan Agama Pandan	005	04	VA	651546047451000	BPG 106 PENGADILAN AGAMA PANDAN 2	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
148	631980	Pengadilan Agama Tarutung	005	04	VA	651546319801000	BPG 125 PA TARUTUNG 631980	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
149	631983	Pengadilan Agama Panyabungan	005	04	VA	653196319831000	BPG 006 PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
150	690112	Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan	005	04	VA	651546901121000	BPG 006 PA KOTA PADANGSIDIMPUAN 04	BRI	s-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
151	401901	Pengadilan Tinggi Agama Padang	005	04	VA	651544019011000	BPG 010 PTA PADANG 401901	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
152	401917	Pengadilan Agama Pariaman	005	04	VA	651544019171000	BPG 010 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN 401917	BRI Cab.Pariaman	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
153	401923	Pengadilan Agama Solok	005	04	VA	651544019231000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA SOLOK 04	BRI CABANG SOLOK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
154	401932	Pengadilan Agama Sawahlunto	005	04	VA	651544019321000	BPG 077 PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	BRI UNIT SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
155	403400	Pengadilan Agama Pulau Punjung	005	04	VA	651544034001000	BPG 077 PA PULAU PUNJUNG 04	Bank Rakyat Indonesia	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
156	401948	Pengadilan Agama Batusangkar	005	04	VA	651544019481000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 BATUSANGKAR	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
157	401954	Pengadilan Agama Padang	005	04	VA	653194019541000	BPG 010 PENGADILAN AGAMA PADANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
158	401963	Pengadilan Agama Padang Panjang	005	04	VA	651544019631000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 PDG PANJANG	BRI Cabang Padang Panjang	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
159	401979	Pengadilan Agama Sijunjung	005	04	VA	651544019791000	BPG PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
160	401985	Pengadilan Agama Koto Baru	005	04	VA	651544019851000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU BADILAG	BRI	1715/DJA.1/KU.01/5/2021 31 May 2021	TNP	0,00
161	401991	Pengadilan Agama Muara Labuh	005	04	VA	651544019911000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 04	BRI Unit Muara Labuh Cab.Solok	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 July 2021	TNP	0,00
162	402005	Pengadilan Agama Painan	005	04	VA	651544020051000	BPG 142 PENGADILAN AGAMA PAINAN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.02/2020 23 June 2020	TNP	0,00
163	402011	Pengadilan Agama Bukittinggi	005	04	VA	653194020111000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 BUKITTINGGI	BRI CABANG BUKITTINGGI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
164	402030	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	005	04	VA	6,51544E+14	BPG 091 PA LUBUK SIKAPING BPA	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
165	402036	Pengadilan Agama Talu	005	04	VA	651544020361000	BPG 091 PA TALU (BPA)	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
166	402042	Pengadilan Agama Maninjau	005	04	VA	651544020421000	BPG 011 PA 04 MANINJAU	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
167	402051	Pengadilan Agama Payakumbuh	005	04	VA	651544020511000	BPG 011 PA PAYAKUMBUH 04	BRI CAB. PAYAKUMBUH	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
168	402067	Pengadilan Agama Tanjung Pati	005	04	VA	653194020671000	BPG 011 PA TANJUNG PATI 04	BRI Cab. Payakumbuh	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/011 23 June 2020	TNP	0,00
169	402614	Pengadilan Agama Lubuk Basung	005	04	VA	651544026141000	BPG 011 PA LUBUK BASUNG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
170	403402	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	005	04	VA	651544034021000	BPG 008 PA SIAK 403402	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
171	403403	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	005	04	VA	8100124034031000	BPG 092PA TELUK KUANTAN03	BSI	S-2162-WPB.12/KP.06/2021/092 7 September 2021	TNP	0,00
172	402073	Pengadilan Agama Pekanbaru	005	04	VA	9893004020731000	BPG 008 PA PEKANBARU	BNI	S-1632/WPB.12/KP.06/2020 19 June 2020	TNP	0,00
173	402082	Pengadilan Agama Rengat	005	04	VA	651544020821000	BPG 092 PENGADILAN AGAMA RENGAT	BRI CABANG RENGAT	S-1654/WPB.12/KP.0/2020 23 June 2020	TNP	0,00
174	402098	Pengadilan Agama Tembilahan	005	04	Giro	651544020981000	BPg PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	BRI Cab Tembilahan	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
175	402102	Pengadilan Agama Bangkinang	005	04	VA	651544021021000	BPG 008 PENGADILAN AGAMA BKN	BRI	1674/SEK.KU.01/9/2020 25 September 2020	TNP	0,00
176	402118	Pengadilan Agama Bengkalis	005	04	VA	651544021181000	BPG 120 PENGADIALAN AGAMA BENGKALIS	BRI	s-1654/wpb.12/kp.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
177	402124	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan	005	04	VA	651544021241000	008 PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN	Bank Rakyat Indonesia	001449/008 22 June 2021	TNP	0,00
178	402133	Pengadilan Agama Selat Panjang	005	04	VA	651544021331000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
179	402623	Pengadilan Agama Dumai	005	04	VA	651544026231000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA DUMAI	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
180	402971	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	005	04	VA	651544029711000	BPG 008 PTA PEKANBARU 04	BRI Cabang Pekanbaru	No. 001507/008 1 September 2021	TNP	0,00
181	632000	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	005	04	VA	651546320001000	BPg 008 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	BRI	001441 17 June 2021	TNP	0,00
182	632002	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	005	04	VA	8100126320021000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (04)	BANK MANDIRI SYARIAH	S-2683/WPB.12/KP.06/2021 29 October 2020	TNP	0,00
183	402186	Pengadilan Agama Jambi	005	04	VA	651544021861000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA JAMBI	Bank Rakyat Indonesia cab. jambi	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
184	402192	Pengadilan Agama Muara Bungo	005	04	VA	653194021921000	BPG 078 PA MABUNGO 04	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
185	402206	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	005	04	VA	651544022061000	BPG 143 PA KUALA TUNGKAL 04	PT. BRI (Persero) Cabang Kuala Tungkal	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
186	402212	Pengadilan Agama Bangko	005	04	VA	651544022121000	BPG 159 PENGADILAN AGAMA BANGKO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
187	402221	Pengadilan Agama Sungai Penuh	005	04	VA	653194022211000	BPG (013) PENGADILAN AGAMA SPN (402221)	BRI. CABANG SUNGAI PENUH	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
188	403053	Pengadilan Agama Muara Bulian	005	04	VA	651544030531000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
189	547662	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	005	04	VA	651545476621000	BPG 012 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
190	632019	Pengadilan Agama Sarolangun	005	04	VA	651546320191000	BPG 159 PA SAROLANGUN	BANK BRI CABANG SAROLANGUN	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 October 2020	TNP	0,00
191	632023	Pengadilan Agama Muara Sabak	005	04	VA	651546320231000	BPG 143 PA MUARA SABAK 04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
192	652021	Pengadilan Agama Muara Tebo	005	04	VA	651546520211000	BPG078 PA. MUARA TEBO 04	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
193	652035	Pengadilan Agama Sengeti	005	04	VA	651546520351000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA SENGETI	BRI	S-762/PB.3/2021 23 March 2021	TNP	0,00
194	403408	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	005	04	VA	651544034081000	BPG 160 PA PANGKALAN BALAI 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
195	403409	Pengadilan Agama Martapura Plg	005	04	VA	8100124034091000	BPG 109 PA MARTAPURA 04	BSI	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 November 2021	TNP	0,00
196	403410	Pengadilan Agama Muaradua	005	04	VA	651544034101000	BPG 109 PA MUARADUA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
197	403411	Pengadilan Agama Pagaralam	005	04	VA	653194034111000	BPG 144 PA (04) PAGAR ALAM	BRI	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 11 May 2020	TNP	0,00
198	403412	Pengadilan Agama Prabumulih	005	04	VA	651544034121000	BPG 014 PA PRABU KLS II 403412	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
199	402237	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	005	04	VA	651544022371000	BPg 014 Pengadilan Tinggi Agama Palembang 04	Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang A. Rivai	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
200	402243	Pengadilan Agama Palembang	005	04	VA	651544022431000	BPG 014 PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KD 02	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
201	402252	Pengadilan Agama Lahat	005	04	VA	651544034111000	BPg 144 Pengadilan Agama Lahat (04)	BRI Cabang Lahat	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 16 May 2020	TNP	0,00
202	402268	Pengadilan Agama Baturaja	005	04	VA	8100124022681000	BPG 109 PA_BATURAJA_BPU	MANDIRI	S-1621WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
203	402274	Pengadilan Agama Kayuagung	005	04	VA	651544022741000	BPG 014 PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG 02	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
204	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	005	04	VA	8100124022831000	BPG 144 PA MUARA ENIM (04)	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	S-1622/WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
205	402299	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	005	04	VA	651544022991000	BPG 070 PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
206	402639	Pengadilan Agama Sekayu	005	04	VA	651544026391000	BPG 160 PENGADILAN AGAMA SEKAYU	Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cb Veteran Jkt	S-1654/WBP.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
207	403413	Pengadilan Agama Gedong Tataan	005	04	VA	653194034131000	BPG 017 Pengadilan Agama Gedong Tataan	BRI KCP Gedong Tataan	S-1645/wpb.12/kp.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
208	403414	Pengadilan Agama Pringsewu	005	04	VA	8100124034141000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	BANK SYARIAH MANDIRI	S-2634/ WPB.08/KP.01/2020 20 October 2020	TNP	0,00
209	100107	Pengadilan Agama Mesuji	005	04	Giro	060501001076309	BPG 116 PA MESUJI 04	BRI KANCA TULANG BAWANG	S-88/WPB.08/KP.03/2021 21 January 2021	TNP	0,00
210	100056	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	005	04	Giro	651544034161000	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	BRI	S-011/WBP.08/KP.0304/2019 4 January 2019	TNP	0,00
211	403418	Pengadilan Agama Sukadana	005	04	VA	651544034181000	BPG 126 PA SUKADANA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
212	402325	Pengadilan Agama Tanjung Karang	005	04	VA	651544023251000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
213	402331	Pengadilan Agama Krui	005	04	VA	651544023311000	BPG 145 PENGADILAN AGAMA KRUI 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
214	402350	Pengadilan Agama Kotabumi	005	04	VA	653194023501000	BPG 116 PA KOTABUMI 04	BRI	B-57/Bua.3/KU.03/8/2021 26 August 2021	TNP	0,00
215	402356	Pengadilan Agama Metro	005	04	VA	653194023561000	BPG 126 PA METRO 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
216	402645	Pengadilan Agama Kalianda	005	04	VA	653194026451000	BPG 017 PA Kalianda 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
217	547679	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	005	04	Giro	651545476791000	BPG 017 Pengadilan Tinggi Agama 04	BRI CABANG TANJUNG KARANG	S-3124/WPB.08/KP.017/2015 23 June 2015	TNP	0,00
218	614685	Pengadilan Agama Tulang Bawang	005	04	VA	651546146851000	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG 04	BRI	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 July 2021	TNP	0,00
219	614692	Pengadilan Agama Tanggamus	005	04	VA	653196146921000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
220	652042	Pengadilan Agama Gunung Sugih	005	04	VA	651546520421000	BPG 126 PA GUNUNG SUGIH	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
221	652056	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	005	04	VA	651546520561000	BPG 116 PA BLAMBANGAN UMPU 04	BRI	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 July 2021	TNP	0,00
222	403422	Pengadilan Agama Singkawang	005	04	VA	651544034221000	BPG 093 PA Singkawang 04	PT. BRI Cabang Singkawang	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
223	403424	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	005	04	VA	651544034241000	BPG 079 PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH 403424	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KC. JAKARTA VETERAN	S-1654/WPB .12/KP.O6/2020 23 June 2020	TNP	0,00
224	403425	Pengadilan Agama Sungai Raya	005	04	VA	651544034251000	BPG 042 PA SUNGAI RAYA 403425	BRI KC. VETERAN	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
225	402362	Pengadilan Agama Pontianak	005	04	VA	651544023621000	BPG 042 PENGADILAN AGAMA PONTIANAK 402362	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
226	402371	Pengadilan Agama Sambas	005	04	VA	651544023711000	BPG 093 PENGADILAN AGAMA SAMBAS	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/093 23 June 2020	TNP	0,00
227	402387	Pengadilan Agama Ketapang	005	04	VA	651544023871000	BPG 094 PA KETAPANG 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
228	402393	Pengadilan Agama Sanggau	005	04	VA	651544023931000	BPG 167 PA SANGGAU	BRI	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 May 2020	TNP	0,00
229	402407	Pengadilan Agama Sintang	005	04	VA	651544024071000	BPG 079 PENGADILAN AGAMA SINTANG	BRI CABANG SINTANG	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	Non TNP	0,00
230	402413	Pengadilan Agama Putussibau	005	04	VA	651544024131000	BPg 117 Pengadilan Agama Putussibau	Bank BRI Cabang Putussibau	S-1564/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
231	402651	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	005	04	VA	651544026511000	BPG 042 PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	BRI Cabang Pontianak	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/042 23 June 2020	TNP	0,00
232	402670	Pengadilan Agama Mempawah	005	04	VA	651544026701000	BPG 042 PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
233	632040	Pengadilan Agama Bengkayang	005	04	VA	653196320401000	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 16 December 2020	TNP	0,00
234	401974	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	005	04	VA	651544019741000	BPG 102 PA NANGA BULIK 04	BRI UNIT NANGA BULIK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
235	401975	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	005	04	VA	651544019751000	BPG 102 PA SUKAMARA 401975	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
236	401976	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	005	04	VA	651544019761000	BPG 044 Pengadilan Agama Kuala Pembuang 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/044 7 April 2021	TNP	0,00
237	401977	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	005	04	VA	651544019771000	BPG 044 Pengadilan Agama Kasongan 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 7 April 2021	TNP	0,00
238	401980	PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG	005	04	VA	651544019801000	BPG 080 PA T LAYANG PERADILAN AGAMA	BRI JAKARTA VETERAN	S-1026/WPB.18/KP.0204/2018 26 December 2018	TNP	0,00
239	401981	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	005	04	VA	651544019811000	BPG 043 PA PULANG PISAU 401981	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
240	401982	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	005	04	VA	651544019821000	BPG 043 PA KUALA KURUN 401982	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
241	402422	Pengadilan Agama Palangkaraya	005	04	VA	651544024221000	BPG 043 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA 402422	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2021	TNP	0,00
242	402438	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	005	04	VA	651544024381000	BPG 102 PA PANGKALAN BUN 04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
243	402444	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	005	04	VA	651544024441000	BPG 080 PA MUARA TEWEH PERADILAN AGAMA	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/080 23 June 2020	TNP	0,00
244	402453	Pengadilan Agama Buntok	005	04	VA	651544024531000	BPG 080 PA BUNTOK PERADILAN AGAMA	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
245	402469	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	005	04	VA	651544024691000	BPG 043 PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS 402469	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cab.Kuala Kapuas	S-665/PB.3/2021/043 5 April 2021	TNP	0,00
246	402475	Pengadilan Agama Sampit	005	04	VA	651544024751000	BPG 044 PENGADILAN AGAMA SAMPIT 402475	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
247	402990	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	005	04	VA	651544029901000	BPG 043 PENGADILAN TINGGI AGAMA 402990	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
248	309048	Pengadilan Agama Marabahan	005	04	VA	651543090481000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	BRI Cabang Marabahan	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
249	309049	Pengadilan Agama Pelaihari	005	04	VA	651543090491000	BPG 168 PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
250	309050	Pengadilan Agama Kotabaru	005	04	VA	651543090501000	BPG 081 PA KOTABARU 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
251	402450	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	005	04	VA	651544024501000	BPG 045 PTA BJM 402450	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
252	402501	Pengadilan Agama Banjarmasin	005	04	VA	651544025011000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA BJM	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
253	402520	Pengadilan Agama Martapura	005	04	VA	651544025201000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk.CABANG MARTAPURA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
254	402526	Pengadilan Agama Rantau	005	04	VA	6,51544E+14	BPG 110 PA 04 RANTAU	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
255	402532	Pengadilan Agama Kandangan	005	04	VA	651544025321000	BPG 110 PA BADILAG KANDANGAN	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
256	402541	Pengadilan Agama Barabai	005	04	VA	8100124025411000	BPG 110 PA BARABAI (BADILAG)	MANDIRI	S-1622/WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
257	402557	Pengadilan Agama Amuntai	005	04	VA	651544025571000	BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI	BANK BRI CABANG AMUNTAI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
258	402563	Pengadilan Agama Tanjung	005	04	VA	651544025631000	BPG 151 PENGADILAN AGAMA TANJUNG	BRI	NOMOR S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
259	402572	Pengadilan Agama Negara	005	04	VA	651544025721000	BPG 110 PA (04) NEGARA	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
260	632044	Pengadilan Agama Banjarbaru	005	04	VA	653196320441000	BPG 045 PA BANJARBARU	BRI CAB. MARTAPURA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
261	690140	Pengadilan Agama Batulicin	005	04	VA	651546901401000	BPG 081 PA BATULICIN 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
262	309052	Pengadilan Agama Tenggarong	005	04	VA	651543090521000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA TENGGARONG 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
263	309053	Pengadilan Agama Samarinda	005	04	VA	651543090531000	BPG046 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
264	309054	Pengadilan Agama Tanah Grogot	005	04	VA	651543090541000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT 04	BRI, KC. TANAH GROGOT	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
265	309055	Pengadilan Agama Balikpapan	005	04	VA	651543090551000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2021	TNP	0,00
266	309056	Pengadilan Agama Tanjung Redep	005	04	VA	651543090561000	BPG 153 KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 14 April 2020	TNP	0,00
267	401983	Pengadilan Agama Penajam	005	04	VA	8100124019831000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA PENAJAM 04	BANK MANDIRI SYARIAH	S-1659/WPB.20/KP.0204/2018 27 December 2018	TNP	0,00
268	401986	Pengadilan Agama Sendawar	005	04	VA	651544019861000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA SENDAWAR 04	PT.BRI (Persero) Tbk, KC.Sendawar	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
269	402481	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	005	04	VA	653194024811000	BPG 046 PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/046 23 June 2020	TNP	0,00
270	652081	Pengadilan Agama Bontang	005	04	VA	651546520811000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA BONTANG 04	Bank Rakyat Indonesia	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
271	652098	Pengadilan Agama Sangatta	005	04	VA	651546520981000	BPG 046 PA SANGATTA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
272	309060	Pengadilan Agama Tahuna	005	04	VA	651543090601000	BPg 083 Pengadilan Agama Tahuna	BRI	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
273	401996	Pengadilan Agama Lolak	005	04	VA	651544019961000	BPG 158 Pengadilan Agama Lolak 04	BRI	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 May 2020	TNP	0,00
274	401997	Pengadilan Agama Bolaang Uki	005	04	VA	651544019971000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI 04	BRI	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 April 2021	TNP	0,00
275	401998	Pengadilan Agama Boroko	005	04	VA	651544019981000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA BOROKO 04	BRI	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 April 2021	TNP	0,00
276	401999	Pengadilan Agama Tutuyan	005	04	VA	651544019991000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA TUTUYAN 04	BRI	S-1916/WPB.12/KP.06/2021 30 August 2021	TNP	0,00
277	402682	Pengadilan Tinggi Agama Manado	005	04	VA	651544026821000	BPG 049 PTA MANADO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
278	402702	Pengadilan Agama Tondano	005	04	VA	651544027021000	BPG 049 PENGADILAN AGAMA TONDANO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
279	682172	Pengadilan Agama Amurang	005	04	VA	653196821721000	BPG 049 PENGADILAN AGAMA AMURANG	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-1654/WPB .12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
280	309062	Pengadilan Agama Kodya Palu	005	04	VA	651543090621000	BPG 051 PA KODYA PALU	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
281	309063	Pengadilan Agama Toli Toli	005	04	VA	653193090631000	BPG 082 PA TOLITOLI QQ 309063	PT. BRI (Tbk) Cabang Tolitoli	S-384/WPB.26/KP.0430/2015 23 April 2015	TNP	0,00
282	309064	Pengadilan Agama Poso	005	04	Lainnya	8100123090641000	BPG 052 PA POSO 309064	Bank Mandiri Syariah KC Poso	S-1621/WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
283	309066	Pengadilan Agama Luwuk	005	04	VA	651543090661000	BPG 053 PENGADILAN AGAMA LUWUK	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
284	401992	PENGADILAN AGAMA AMPANA	005	04	VA	8100124019921000	BPG 052 PA AMPNA 401992	BANK SYARIAH INDONESIA	1621/WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
285	576250	Pengadilan Tinggi Agama Palu	005	04	VA	8100125762501000	BPG 051 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	MANDIRI	S-1622/WPB.12/KP.06/2020 18 June 2020	TNP	0,00
286	604766	Pengadilan Agama Donggala	005	04	VA	651546047661000	BPG 051 PENGADILAN AGAMA DONGGALA	BRI KC JAKARTA VETERAN	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
287	652103	Pengadilan Agama Buol	005	04	VA	651546521031000	BPG: 082 PA BUOL 652103	BRI KCP POGOGUL	000041/082 28 June 2021	TNP	0,00
288	652120	Pengadilan Agama Bungku	005	04	VA	651546521201000	BPG 052 PA Bungku 652120	BRI KCP MOROWALI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 7 April 2021	TNP	0,00
289	652124	Pengadilan Agama Banggai	005	04	VA	651546521241000	BPG 053 PA BANGGAI	BRI	000690/053 9 July 2021	TNP	0,00
290	690072	Pengadilan Agama Parigi	005	04	VA	651546900721000	BPG 051 PENGADILAN AGAMA PARIGI	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/051 23 June 2020	TNP	0,00
291	309067	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	005	04	VA	653193090671000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR 309067	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
292	309068	Pengadilan Agama Pangkajene	005	04	VA	651543090681000	BPG 136 PA PANGKAJENE (309068)	BRI	S-3541/WPB.25/KP.02/2021 28 October 2021	Non TNP	0,00
293	309069	Pengadilan Agama Maros	005	04	VA	653193090691000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA MAROS 309069	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
294	309070	Pengadilan Agama Makassar	005	04	VA	651543090701000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	BRI	S-1384/WPB.25/KP.02/2021 26 April 2021	TNP	0,00
295	309071	Pengadilan Agama Jeneponto	005	04	VA	651543090711000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO 04	BRI CABANG JENEPONTO	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
296	309073	Pengadilan Agama Takalar	005	04	VA	651543090731000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA TAKALAR 309073	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2021	TNP	0,00
297	309074	Pengadilan Agama Barru	005	04	VA	651543090741000	BPG 057PENGADILAN AGAMA BARRU	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
298	309075	Pengadilan Agama Sungguminasa	005	04	VA	651543090751000	BPG 136 PA SUNGGUMINASA 309075	B R I	000261 9 December 2021	TNP	0,00
299	309076	Pengadilan Agama Watampone	005	04	VA	651543090761000	BPG 055 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
300	309077	Pengadilan Agama Sengkang	005	04	VA	651543090771000	BPG 55 PENGADILAN AGAMA SENGKANG	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
301	309078	Pengadilan Agama Watan Soppeng	005	04	VA	651543090781000	BPG 055 PA WATANSOPPENG	BRI Cabang Watansoppeng	S-146/WPB.24/KP.0830/2015 Tanggal 03 Februari 2015 3 February 2015	TNP	0,00
302	309079	Pengadilan Agama Bantaeng	005	04	VA	651543090791000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA BANTAENG 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
303	309080	Pengadilan Agama Bulukumba	005	04	VA	651543090801000	BPG 056 Pengdilan Agama Bulukumba	BRI Cabang Bulukumba	s-709/PB.3/2021 12 April 2021	TNP	0,00
304	309081	Pengadilan Agama Sinjai	005	04	VA	651543090811000	BPG 177 PENGADILAN AGAMA SINJAI 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2021	TNP	0,00
305	309082	Pengadilan Agama Selayar	005	04	VA	651543090821000	BPG 155 PENGADILAN AGAMA SELAYAR	BRI	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 May 2020	TNP	0,00
306	309083	Pengadilan Agama Pare Pare	005	04	VA	651543090831000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA PAREPARE 04	BRI CAB.PAREPARE	000074 26 April 2021	TNP	0,00
307	309084	Pengadilan Agama Pinrang	005	04	VA	651543090841000	BPG 057 Pengadilan Agama Pinrang	BRI Cabang Pinrang	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
308	309085	Pengadilan Agama Enrekang	005	04	VA	651543090851000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA ENREKANG	BRI CABANG ENREKANG	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
309	309087	Pengadilan Agama Sidenreng	005	04	VA	651543090871000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA SIDRAP QQ 04	BRI	000104 28 June 2021	TNP	0,00
310	309088	Pengadilan Agama Palopo	005	04	VA	651543090881000	BPG 058 Pengadilan Agama Palopo	BRI Cab. Palopo	S-2732/WP.B12/KP.06/2020 16 April 2020	TNP	0,00
311	309089	Pengadilan Agama Makale	005	04	VA	651543090891000	BPG 170 PENGADILAN AGAMA MAKALE 309089	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
312	401987	Pengadilan Agama Belopa	005	04	VA	651544019871000	BPG 058 PA Belopa 401987	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
313	401989	Pengadilan Agama Malili	005	04	VA	651544019891000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MALILI	BRI	s-2494/WPB.12/KP.06/2021 12 October 2021	TNP	0,00
314	632052	Pengadilan Agama Masamba	005	04	VA	651546320521000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MASAMBA	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
315	309094	Pengadilan Agama Kolaka	005	04	VA	651543090941000	BPG 156 PENGADILAN AGAMA KOLAKA 04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - KC KOLAKA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
316	309095	Pengadilan Agama Raha	005	04	VA	651543090951000	BPG 157 PENGADILAN AGAMA RAHA	BRI CABANG RAHA	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
317	309096	Pengadilan Agama Kendari	005	04	VA	651543090961000	BPG 060 PA KENDARI 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2021	TNP	0,00
318	401993	Pengadilan Agama Wangi Wangi	005	04	VA	651544019931000	BPG 103 PA WANGIWANGI 401993	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
319	401994	Pengadilan Agama Lasusua	005	04	VA	651544019941000	BPG 156 PENGADILAN AGAMA LASUSUA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
320	401995	Pengadilan Agama Rumbia	005	04	VA	651544019951000	BPG 060 PENGADILAN AGAMA RUMBIA 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
321	576254	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	005	04	VA	651545762541000	BPG 060 PTA KENDARI 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
322	604773	Pengadilan Agama Unaaha	005	04	VA	651546047731000	BPG 060 PA UNAAHA (04)	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
323	690086	Pengadilan Agama Andoolo	005	04	VA	651546900861000	BPG060PAANDOOLO04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
324	690090	Pengadilan Agama Pasarwajo	005	04	VA	651546900901000	BPG 103 PA PASARWAJO	BRI	S-1654/WPB.12/KP,06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
325	309098	Pengadilan Agama Ambon	005	04	VA	651543090981000	BPG 061 PENGADILAN AGAMA AMBON	BRI CABANG AMBON	S-762/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
326	307761	Pengadilan Agama Tual	005	04	Giro	28101001083302	BPG 084 04 PENGADILAN AGAMA TUAL	PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Tual	S-288/WPB.31/KP.0330/2015 4 February 2015	TNP	0,00
327	309100	Pengadilan Agama Masohi	005	04	VA	651543091001000	BPG 173 PENGADILAN AGAMA MASOHI	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
328	402002	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	005	04	VA	651544020021000	BPG 173 PA Dataran Hunipopu	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
329	402006	Pengadilan Agama Namlea	005	04	VA	651544020061000	BPG 061 PENGADILAN AGAMA NAMLEA 04	BRI Cab. Namlea	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
330	402711	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	005	04	VA	651544027111000	BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
331	309105	Pengadilan Agama Denpasar	005	04	VA	651543091051000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA DENPASAR 04	BRI CABANG GAJAH MADA DENPASAR	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
332	309106	Pengadilan Agama Singaraja	005	04	VA	651543091061000	BPg 132 PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	BRI cab Singaraja	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 May 2020	TNP	0,00
333	402727	Pengadilan Agama Bangli	005	04	VA	651544027271000	BPG 154 PENGADILAN AGAMA BANGLI (04)	PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	S-1654/WPB.12/ KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
334	402733	Pengadilan Agama Negara di Bali	005	04	VA	651544027331000	BPG 132 PENGADILAN AGAMA NEGARA 04	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Negara	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 May 2020	TNP	0,00
335	402742	Pengadilan Agama Karangasem	005	04	VA	651544027421000	BPG 154 PA KARANGASEM (04)	BRI Cabang Amlapura	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
336	402764	Pengadilan Agama Klungkung	005	04	VA	651544027641000	BPG 154 PA KLUNGKUNG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
337	402773	Pengadilan Agama Gianyar	005	04	VA	651544027731000	BPg 037 Pengadilan Agama Gianyar 04	BRI Cabang Gianyar	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
338	526727	Pengadilan Tinggi Agama Bali	005	04	VA	651545267271000	BPG 037 PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	BRI	S-682/KPN.1206/2023 3 April 2023	Non TNP	0,00
339	614732	Pengadilan Agama Badung	005	04	VA	651546147321000	BPg 037 Pengadilan Agama Badung	Bank BRI	S-443/KPN.1206/2024 23 February 2024	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
340	309107	Pengadilan Agama Mataram	005	04	VA	9893003091071000	BPG 038 PENGADILAN AGAMA MATARAM	BNI	S-1632/WPB.12/KP.06/2021 19 June 2021	TNP	0,00
341	309109	Pengadilan Agama Sumbawa	005	04	VA	651543091091000	BPG 101 PENGADILAN AGAMA SUMBAWA 04	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
342	309110	Pengadilan Agama Praya	005	04	VA	651543091101000	BPg 038 Pengadilan Agama Praya	BRI Praya	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
343	309111	Pengadilan Agama Selong	005	04	VA	651543091111000	BPG 169 PENGADILAN AGAMA SELONG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
344	309113	Pengadilan Agama Bima	005	04	VA	651543091131000	BPG 071 PA BIMA 04	BRI Cabang Bima	000218/0717/9/2021 9 July 2021	TNP	0,00
345	614728	Pengadilan Agama Giri Menang	005	04	VA	651546147281000	BPG 038 PA GIRI MENANG	PT. BRI (Persero) Tbk	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 29 June 2021	TNP	0,00
346	690154	Pengadilan Agama Taliwang	005	04	VA	651546901541000	BPG 101 PENGADILAN AGAMA TALIWANG 04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KCP TALIWANG	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
347	309115	Pengadilan Agama Waikabubak	005	04	VA	651543091151000	BPG 041 PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK 04	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
348	309116	Pengadilan Agama Kupang	005	04	VA	651543091161000	BPG 039 PENGADILAN AGAMA KUPANG (309116)	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
349	309117	Pengadilan Agama Kalabahi	005	04	VA	651543091171000	BPG 039 PA KALABAHI 309117	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
350	309118	Pengadilan Agama Ende	005	04	VA	651543091181000	BPG 040 PENGADILAN AGAMA ENDE 04	BRI CABANG ENDE	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
351	309119	Pengadilan Agama Waingapu	005	04	VA	651543091191000	BPG 041 PA WAINGAPU 04	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
352	402795	Pengadilan Agama Larantuka	005	04	VA	651544027951000	BPG 174 PENGADILAN AGAMA LARANTUKA 04	BRI	S-762/PB.3/2021 21 April 2021	TNP	0,00
353	402809	Pengadilan Agama Ruteng	005	04	VA	653194028091000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA RUTENG 04	BRI	S-2732/WBP.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
354	402815	Pengadilan Agama Atambua	005	04	VA	9893004028151000	BPG 172 PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	BNI	S-907/WPB.12/KP.06/2021 24 May 2021	TNP	0,00
355	402821	Pengadilan Agama Soe	005	04	VA	651544028211000	BPG 039 PA SOE 402821	BRI CABANG SOE	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
356	402840	Pengadilan Agama Kefamenanu	005	04	VA	651544028401000	BPG 172 PA 04KEFAMENANU	BRI CABANG KEFAMENANU	- 4 May 2021	TNP	0,00
357	402852	Pengadilan Agama Maumere	005	04	VA	9893004028521000	BPG RE 04	BNI	S-1632/WPB.12/KP.06/2020 19 June 2020	TNP	0,00
358	576261	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	005	04	VA	651545762611000	BPg 039 PTA KUPANG 576261	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
359	632065	Pengadilan Agama Lewoleba	005	04	VA	651546320651000	BPG 174 PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA 04	BRI	S-709/PB.3/2021 14 April 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
360	682282	Pengadilan Agama Labuan Bajo	005	04	VA	651546822821000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 04	BRI KCP LABUAN BAJO	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
361	402861	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	005	04	VA	651544028611000	BPG 063 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
362	402877	Pengadilan Agama Jayapura	005	04	VA	651544028771000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
363	402892	Pengadilan Agama Biak	005	04	VA	651544028921000	BPG 064 PENGADILAN AGAMA BIAK	BRI	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 July 2021	TNP	0,00
364	402928	Pengadilan Agama Nabire	005	04	VA	651544029281000	BPG 085 PENGADILAN AGAMA NABIRE (04)	BRI CABANG NABIRE	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
365	402934	Pengadilan Agama Wamena	005	04	VA	653194029341000	BPG 113 PENGADILAN AGAMA WAMENA 402934	BRI CABANG WAMENA	000104 30 December 2021	TNP	0,00
366	402943	Pengadilan Agama Serui	005	04	VA	651544029431000	BPG 138 PENGADILAN AGAMA SERUI	BRI Cabang Serui	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
367	100164	Pengadilan Agama Merauke	005	04	Giro	651544029591000	BPg 068 PENGADILAN AGAMA MERAUKE QQ 402959	BRI CABANG MERAUKE	S-288/WPB.33/KP.0430/2015 11 March 2015	TNP	0,00
368	614770	Pengadilan Agama Sentani	005	04	VA	651546147701000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA SENTANI	BRI	S-665/pb.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
369	614774	Pengadilan Agama Mimika	005	04	VA	651546147741000	BPG 141 PENGADILAN AGAMA MIMIKA	BRI	S-665-PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
370	614781	Pengadilan Agama Paniai	005	04	VA	651546147811000	BPG 085 PENGADILAN AGAMA PANIAI	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
371	690182	Pengadilan Agama Arso	005	04	VA	651546901821000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA ARSO	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
372	309120	Pengadilan Agama Manna	005	04	VA	651543091201000	BPG 121 PENGADILAN AGAMA MANNA DJBPA	BRI	S-1654/WPB .12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
373	309121	Pengadilan Agama Curup	005	04	VA	651543091211000	BPG 146 PENGADILAN AGAMA CURUP 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
374	309122	Pengadilan Agama Argamakmur	005	04	VA	651543091221000	BPG 016 Pengadilan Agama Arga Makmur	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
375	309123	Pengadilan Agama Bengkulu	005	04	VA	651543091231000	BPG 016 PENGADILAN AGAMA BENGKULU	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
376	403404	Pengadilan Agama Mukomuko	005	04	VA	651544034041000	BPG 181 PENGADILAN AGAMA 403404	BRI CABANG MUKOMUKO	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
377	403405	Pengadilan Agama Bintuhan	005	04	VA	651544034051000	BPG 121 PA BINTUHAN 04	BRI CABANG MANNA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
378	403406	Pengadilan Agama Tais	005	04	VA	651544034061000	BPG 121 PENGADILAN AGAMA TAIS	BRI	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 April 2021	TNP	0,00
379	403407	Pengadilan Agama Kepahiang	005	04	VA	651544034071000	BPG 146 PA KEPAHIANG 04	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KCP KEPAHIANG	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
380	576275	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	005	04	VA	651545762751000	BPG 016 PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
381	690133	Pengadilan Agama Lebong	005	04	VA	653196901331000	BPG 146 PENGADILAN AGAMA LEBONG 04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
382	309101	Pengadilan Agama Ternate	005	04	VA	651543091011000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA TERNATE	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
383	309102	Pengadilan Agama Morotai	005	04	VA	651543091021000	BPG 112 PENGADILAN AGAMA MOROTAI	BRI	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 June 2021	TNP	0,00
384	309103	Pengadilan Agama Soa Sio	005	04	VA	651543091031000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA SOASIO 02	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
385	440741	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	005	04	VA	8100124407411000	BPG 062 PTA MALUT 04	MANDIRI	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 April 2021	TNP	0,00
386	400818	Pengadilan Agama Rangkasbitung	005	04	VA	651544008181000	BPG :161 PENGADILAN AGAMA RKBT (400818)	BRI KANCA RANGKASBITUNG	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
387	400824	Pengadilan Agama Tangerang	005	04	VA	651544008241000	BPG 127 PENGADILAN AGAMA TANGERANG	BRI Cabang Tangerang	S-1654/WPB.12/KP/2020 23 June 2020	TNP	0,00
388	417851	Pengadilan Agama Pandeglang	005	04	VA	651544178511000	BPG 161 PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG PDG 417851	BRI	S2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
389	440713	Pengadilan Tinggi Agama Banten	005	04	VA	651544407131000	BPG 020 PTA 440713	BRI Cab. Serang	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
390	604724	Pengadilan Agama Tigaraksa	005	04	VA	651546047241000	BPG 127 Pengadilan Agama Tigaraksa	BRI	0S-2732/WPB.12/KP.05/202- 16 October 2020	TNP	0,00
391	652077	Pengadilan Agama Cilegon	005	04	VA	651546520771000	BPG 020 PA CILEGON BADILAG	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
392	402303	Pengadilan Agama Pangkal Pinang	005	04	VA	651544023031000	BPg 015 PA Pangkalpinang-04	BRI CABANG PANGKALPINANG	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
393	402319	Pengadilan Agama Tanjung Pandan	005	04	VA	651544023191000	BPG 107 PA TANJUNG PANDAN (04)	BRI	S.665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
394	403093	Pengadilan Agama Sungailiat	005	04	VA	653194030931000	BPG 015 PA SUNGAILIAT-04	BRI cabang Sungailiat	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
395	440729	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	005	04	VA	651544407291000	BPG 015 PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
396	690129	Pengadilan Agama Mentok	005	04	VA	651546901291000	BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK04	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
397	309061	Pengadilan Agama Gorontalo	005	04	VA	653193090611000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA GORONTALO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
398	402000	Pengadilan Agama Suwawa	005	04	VA	651544020001000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA SUWAWA 402000	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
399	402001	Pengadilan Agama Kwandang	005	04	VA	651544020011000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA KWANDANG	BRI	S-1654/WPB. 12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
400	402691	Pengadilan Agama Limboto	005	04	VA	653194026911000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
401	440735	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	005	04	VA	651544407351000	BPG 050 PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
402	652131	Pengadilan Agama Tilamuta	005	04	VA	651546521311000	BPG 180 PA TILAMUTA	BRI	1715/DjA.1/KU.01/5/2021 31 May 2021	TNP	0,00
403	682186	Pengadilan Agama Marisa	005	04	VA	651546821861000	BPG180 PA MARISA 682186	BRI	S-1654/MPB .12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
404	402149	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	005	04	VA	651544021491000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG ES 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
405	402155	Pengadilan Agama Dabo Singkep	005	04	VA	651544021551000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA DBSES04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
406	402161	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	005	04	VA	651544021611000	BPG 137 PA TBK 402161	BRI	W4-A10/590/KU.05/8/2022 15 August 2022	TNP	0,00
407	402180	Pengadilan Agama Tarempa	005	04	VA	651544021801000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA TAREMPAES 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
408	526709	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	005	04	VA	8100125267091000	BPG 009 PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPRI	BSI	S-523/KPN.1206/2023 3 March 2023	TNP	0,00
409	547700	Pengadilan Agama Batam	005	04	VA	9893005477001000	BPG 137 PA BATAM 547700	BNI	000145 29 November 2021	TNP	0,00
410	614671	Pengadilan Agama Natuna	005	04	VA	651546146711000	BPG 009 PA NATUNA_ES04	BRI	S-1654/WBP.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
411	402007	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	005	04	VA	651544020071000	BPG 067 PA KAIMANA 402007	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
412	402883	Pengadilan Agama Sorong	005	04	VA	9893004028831000	BPG 066 PENGADILAN AGAMA SORONG (04)	BNI	S-1318/WPB.12/KP.06/2021 13 July 2021	TNP	0,00
413	402903	Pengadilan Agama Fak Fak	005	04	VA	651544029031000	BPG 067 PENGADILAN AGAMA FAKFAK 402903 FAKFAK	BRI Cabang Fakfak	000044/067 7 July 2021	TNP	0,00
414	402912	Pengadilan Agama Manokwari	005	04	VA	651544029121000	BPG 065 PA MANOKWARI 402912	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
415	100298	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	005	04	Giro	035301002980300	BPG 065 PT AGAMA PABAR 526719	BRI	000090 21 March 2023	TNP	0,00
416	309091	Pengadilan Agama Polewali	005	04	VA	651543090911000	BPG 059 309091 PENGADILAN AGAMA PLW	BRI	S-665/PB.3/2021 5 April 2021	TNP	0,00
417	309092	Pengadilan Agama Majene	005	04	VA	651543090921000	BPG 059 309092 PA MJN	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
418	309093	Pengadilan Agama Mamuju	005	04	VA	651543090931000	BPG 178 Pengadilan Agama Mamuju	Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)Tbk	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
419	401988	Pengadilan Agama Pasangkayu	005	04	VA	651544019881000	BPG 178 PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
420	402676	Pengadilan Agama Tarakan	005	04	VA	651544026761000	BPG 048 PENGADILAN AGAMA TARAKAN 04	BRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
421	417658	Pengadilan Agama Tanjung Selor	005	04	VA	651544176581000	BPG 185 PA TJ SELOR 04 417658	BRI	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 July 2021	TNP	0,00
422	526723	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	005	04	VA	651545267231000	BPG 185 PENGADILAN TINGGI AGAMA KALTARA	BRI	S-524/KPN.1206.2023 3 March 2023	TNP	0,00
423	690175	Pengadilan Agama Nunukan	005	04	VA	651546901751000	BPG152 PA NUNUKAN 690175	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
424	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	005	04	VA	651544006481000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
425	308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	005	04	VA	651543091241000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
426	400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	005	04	VA	651544008551000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-573/WPB.13/KP.09/2019 5 NOVEMBER 2019	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
427	682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	005	04	VA	651546900301000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
428	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	005	04	VA	651544034211000	BANK RAKYAT INDONESIA	S709/PB.3/4/2021 14 APRIL 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
429	401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	005	04	VA	651544010621000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
430	403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	005	04	VA	651544030161000	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - SLAWI	S-503/WPB.14/KP.1030/2015 12 MAY 2015	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
431	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	005	04	VA	651544030781000	PT. BRI (PERSERO) TBK. KC LUBUK PAKAM	S-178/WPB.02/KP.124/2015 25 FEBRUARY 2015	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
432	401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	005	04	VA	651544018661000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
433	401835	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	005	04	VA	651544018351000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
434	307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	005	04	VA	651543090581000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
435	309059	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	005	04	VA	651543090591000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-/654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
436	604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	005	04	VA	653196047521000	BANK RAKYAT INDONESIA	W18-A5/ 839/ KU.03/ 12/ 2021 22 DECEMBER 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
437	307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	005	04	VA	651543090971000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
438	401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	005	04	VA	100774018951000	BANK SYARIAH MANDIRI	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
439	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	005	04	VA	651544027891000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
440	402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	005	04	VA	651544027581000	BANK RAKYAT INDONESIA	001775 3 JUNE 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
441	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	005	04	VA	651543091141000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-259/ WPB.12/ KP.06/ 2021 05-02-2021 5 FEBRUARY 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
442	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	005	04	VA	651544028461000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
443	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	005	04	VA	651543091041000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-985/WPB.12/KP.06/2021 6 JULY 2021	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
444	400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	005	04	VA	651544007981000	PT. BANK RAKYAT NDONESIA (PERSERO) TBK KC. SERANG	S-282/WPB.11/KP020/2015 3 MARCH 2015	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
445	526715	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	005	04	VA	651545267151000	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3/KPN.1206/2023 2 JANUARY 2023	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 June 2020	TNP	0,00
Total											**0,00**

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 05 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
1	526704	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	005	05	VA	651555267051000	BPG175 PENGADILAN TINGGI TUN (526705))	BRI	S-1194/WPB.12/KP.0430/2012 29 February 2012	TNP	0,00
2	526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	005	05	VA	651555267331000	BPG175PENGADILAN TUN 526733	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
3	663161	Pengadilan Militer Utama	005	05	VA	651556631621000	BPG175PENGADILAN MILITER UTAMA 663162	BRI	S-549/PB.3/2021 26 March 2021	TNP	0,00
4	663250	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	005	05	VA	651556632511000	BPG175.PMT II JAKARTA (663251)	BRI	S-1034/WPB.12/KP.06/2021 10 June 2021	TNP	0,00
5	663267	Pengadilan Militer II - 08 Jakarta	005	05	VA	651556632681000	BPG175PENGADILAN MILITER II08 663268	BRI	S-549/PB.3/2021 26 March 2021	TNP	0,00
6	531823	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	005	05	VA	651555318241000	BPG 095 PTUN BANDUNG_(05)	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KC JAKARTA JL. VETERAN NO.8 JAKARTA	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
7	663271	Pengadilan Militer II-09 Bandung	005	05	VA	018016632721000	BPG 095 PENGADILAN MILITER BANDUNG	Bank Jabar Banten	S-1037/KPN.1206/2022 27 April 2022	TNP	0,00
8	531830	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	005	05	VA	651555318311000	BPG 134 PTUN SEMARANG	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
9	663288	Pengadilan Militer II - 10 Semarang	005	05	VA	651556632891000	Bpg 134 Kantor Pengadilan Militer II10 Semarang	BRI Cab. Pandanaran Semarang	KPPN S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 October 2020	TNP	0,00
10	578801	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	005	05	VA	651555788021000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
11	663292	Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta	005	05	VA	651556632931000	BPG DILMIL II11 YOGYAKARTA 05	Bank BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 18 July 2020	TNP	0,00
12	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	005	05	VA	651555267681000	BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526768	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
13	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	005	05	VA	651555489411000	BPG 135 PT TUN SBY 05	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
14	663300	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	005	05	VA	651556633011000	BPg 135 PM Tinggi III Sby	BRI Cabang Gateway Sidoarjo	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
15	663314	Pengadilan Militer III - 12 Surabaya	005	05	VA	651556633151000	BPG 135 DILMIL III-12 SBY	BRI KC WARU SIDOARJO	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
16	663321	Pengadilan Militer III - 13 Madiun	005	05	VA	651556633221000	BPG 033 DILMIL III-13 MADIUN (05)	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
17	578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	005	05	VA	8100825788191000	BPG 001 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	BSI	S-2077/WPB.12/KP.06/2021 9 September 2021	TNP	0,00
18	663182	Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh	005	05	VA	8100826631831000	BPG001 PNGDLAN MILITER I	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2077/WPB.12.KP.06/2021 22 September 2021	TNP	0,00
19	526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	005	05	VA	651555267261000	BPG 123 PTTUN MEDAN	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
20	663178	Pengadilan Militer Tinggi - I Medan	005	05	VA	651556631791000	BPG 123 P MILTI I MEDAN 05	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
21	531844	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	005	05	VA	652355318451000	BPG 010 PTUN PADANG	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 June 2020	TNP	0,00
22	663204	Pengadilan Militer I - 03 Padang	005	05	VA	651556632051000	BPG 010 DILMIL I-03 PADANG 663205	BRI CABANG PADANG	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
23	578822	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	005	05	VA	8100825788231000	BPG 008 PTUN PEKANBARU 05	BANK SYARIAH INDONESIA	001574/008 6 December 2021	TNP	0,00
24	578839	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	005	05	VA	651555788401000	BPG 012 PTUN JAMBI	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
25	526728	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	005	05	VA	651555267291000	BPG 014 PTTUN PALEMBANG	BRI	S-220/KPN.1206/2023 18 January 2023	TNP	0,00
26	526750	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	005	05	VA	651555267511000	BPG 014 PTUN PALEMBANG 05	BRI Cab.Kapt.A.Rivai Palembang	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
27	663211	Pengadilan Militer I - 04 Palembang	005	05	VA	651556632121000	BPG 014 DILMIL I-04 PALEMBANG 01	BRI CABANG A'RIVAI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
28	559840	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	005	05	VA	651555598411000	BPG 017 PTUN BANDAR LAMPUNG 05	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
29	663225	Pengadilan Militer I - 05 Pontianak	005	05	VA	6515 5663 2261 000	BPG 042 Pengadilan Militer I-05 Pontianak	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 December 2020	TNP	0,00
30	578843	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	005	05	VA	651555788441000	BPG 043 PTUN PALANGKA RAYA 578844	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	S-1034/WPB.12/KP.06/2021 10 June 2021	TNP	0,00
31	531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	005	05	VA	651555318661000	BPG 045 PTUN BANJARMASIN	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Jakarta Veteran	1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
32	559857	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	005	05	VA	651555598581000	BPG 046 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
33	663246	Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan	005	05	VA	651556632471000	BPG 047 PENGADILAN MILITER I07 BALIKPAPAN 05	BRI	S-549/PB.3/2021 26 March 2021	TNP	0,00
34	526734	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	005	05	VA	651555267351000	BPG 049 PTTUN MANADO	BRI	S-298/KPN.1206/2023 25 January 2023	TNP	0,00
35	531872	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	005	05	VA	8100125318731000	BPG 049 PTUN MANADO 05	MANDIRI	S-2731/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
36	663360	Pengadilan Militer III - 17 Manado	005	05	VA	651556633611000	BPG 049 DILMIL III17 MANADO	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
37	578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	005	05	VA	651555788511000	BPG 051 PTUN PALU 05	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
38	526711	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	005	05	VA	651555267121000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI TUN UJUNGPANDANG (526712)	PT. BRI (Persero) Cab. A. Yani Makassar	S-1110/WPB.25/KP.02/2021 1 April 2021	TNP	0,00
39	526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	005	05	VA	651555267721000	BPG136 PENGADILAN TAT USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BRI	000140/136 17 July 2021	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
40	663356	Pengadilan Militer III - 16 Makassar	005	05	VA	9891906633571000	BPG 136 PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR 663357	BNI	S-1830/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
41	578864	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari	005	05	VA	651555788651000	BPG 060PTUN KENDARI 05	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
42	539117	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	005	05	VA	651555391181000	BPG 061 PTUN AMBON 2	BRI	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 June 2021	TNP	0,00
43	663377	Pengadilan Militer III - 18 Ambon	005	05	VA	651556633781000	BPg (061) Pengadilan Militer III-18 Ambon	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
44	559861	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	005	05	VA	651555598621000	BPg 037 PTUN Denpasar (05)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	001706 2 May 2021	TNP	0,00
45	663335	Pengadilan Militer III - 14 Denpasar	005	05	VA	651556633361000	BPG 037 PENGADILAN MILITER III-14 DI DENPASAR	BRI	001644/037 8 April 2021	TNP	0,00
46	526736	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	005	05	VA	8100125267371000	BPG 038 PTTUN MATARAM	MANDIRI	S-156/KPN.1206/2023 18 January 2023	TNP	0,00
47	578871	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	005	05	VA	651555788721000	BPg 038 Pengadilan Tata USaha Negara Mataram	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
48	539121	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	005	05	VA	652355391221000	BPG 039 PTUN KUPANG 539122	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
49	663342	Pengadilan Militer III - 15 Kupang	005	05	VA	651556633431000	BPG P. MILITER KUPANG	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
50	539138	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	005	05	VA	651555391391000	BPG 063 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	BRI	S-549/PB.3/2021 26 March 2021	TNP	0,00
51	663381	Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	005	05	VA	651556633821000	BPG 063 PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
52	578885	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	005	05	VA	651555788861000	BPG 016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	BRI Cab Bengkulu	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 October 2020	TNP	0,00
53	689313	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	005	05	VA	651556902021000	BPG 020 PTUN SRG 690202	BRI Cab. Serang	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
54	401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	005	05	VA	651554034301000	BPG 050 PTUN GTO 403430	BRI	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 July 2020	TNP	0,00
55	689309	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	005	05	VA	8100826901971000	BPG 137 PTUN TANJUNG PINANG 690197	PT. Bank Syariah Indonesia (BSI),Tbk. KC Batam Bisnis Center	S-2058/KPN.1206/2022 5 October 2022	TNP	0,00
56	531851	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	005	05	VA	651555318521000	BPG 042 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	BANK RAKYAT INDONESIA	S-549/PB.3/2021 26 MARCH 2021	TNP	0,00
57	663361	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	005	05	VA	652355267471000	BPG 123 PTUN MEDAN 05	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	0,00
58	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	005	05	VA	651554034291000	BPG 015 PTUN PKP 403429	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	0,00
59	663199	Pengadilan Militer I - 02 Medan	005	05	VA	651556632001000	BPG 123 P MILITER I-02 MEDAN 05	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2024 (Rp.)
60	663232	Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin	005	05	VA	651556632331000	BPG 045 PENGADILAN MILITER I06 BJM	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	0,00
61	526730	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin	005	05	GIRO	651555267311000	BPG 045 PTTUN BANJARMASIN	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG A. YANI BANJARMASIN	S-457/KPN.1206/2023 21 FEBRUARI 2023	TNP	0,00
TOTAL											**0,00**

DAFTAR REKENING PADA UNIT ESELON 1 MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo 31 DES 2024 (Rp.)
1	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	VA	653246631571000	BPG175.BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
2	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	329110772	BPP175 BUA BIRO HUKUM DAN HUMAS	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
3	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	329788011	BPP175 BUA BIRO KEPEGAWAIAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
4	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	336108888	BPP175 BUA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
5	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	330791642	BPP175 BUA BIRO KEUANGAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
6	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	333495438	BPP175 BUA BIRO PERENCANAAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
7	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	359861326	BPP175 BUA BIRO PERLENGKAPAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
8	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	329089409	BPP175 BUA BIRO UMUM	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
9	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	GIRO	329080994	BPP175 BUA PERJADIN PIMPINAN PEMERINTAH	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
10	004028	KEPANITERAAN MA RI	5	1	VA	651520040281000	BPG 175 KEPANITERAAN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-1493/WPB.12/KP.06/2020 8 JUNE 2020	TNP	0,00
11	97450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	5	3	VA	654440974501000	BPG175DITJEN BADILUM MA	PT. BANK BRI CABANG CUT MUTIAH JAKARTA	S1856/WPB.11/KP.01/2007 1 JANUARY 2021	TNP	0,00
12	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	5	4	VA	9893006637121000	BPG175.DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	PT. BANK BNI CABANG PECENONGAN	0101010101 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
13	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	5	5	VA	651556631221000	BPG175DITJEN BADILMIL TUN	BRI CABANG VETERAN JAKARTA-PUSAT	S-0917/WPB.12/KP.175/2015 10 MARCH 2015	TNP	0,00
14	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5	1	VA	9891426103781000	BPG 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-720/WPB.13/KP.04/2020	TNP	0,00
15	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5	1	VA	9891426103781001	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 01	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-720/WPB.13/KP.04/2020	TNP	0,00
16	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5	1	VA	9891426103781002	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 02	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-720/WPB.13/KP.04/2020	TNP	0,00
17	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5	1	VA	9891426103781003	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 03	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-720/WPB.13/KP.04/2020	TNP	0,00
18	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5	1	VA	9891426103781004	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 04	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-720/WPB.13/KP.04/2020	TNP	0,00
19	663712	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	5	7	VA	650586631361000	BPG 175 BADAN PENGAWAS MA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo 31 DES 2024 (Rp.)
20	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	5	4	VA	8138144449	RKK DITJEN BADILAG OPS	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
21	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	5	4	VA	7811122275	RKK DITJEN BADILAG OPS	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
22	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	VA	9917517530	RKK BUA MA OPS	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
23	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	VA	8909000007	RKK BUA MA OPS	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
24	97450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	5	3	VA	1190000974509	RKK DITJEN BADILUM O	BANK MANDIRI	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
25	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	5	5	VA	1190055520207	RKK DITJEN BADILMILT	BANK MANDIRI	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
26	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5	1	VA	1190066315704	RKK BUA MA OPS	BANK MANDIRI	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
27	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	5	4	VA	1190066371202	RKK DITJEN BADILAG O	BANK MANDIRI	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
28	97450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	5	3	VA	1061041423	DITJEN SADAN PERADI LAN UMUM	BSI	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
28	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	5	5	VA	7773009998	RKK DITJEN BADILMILTUN OPS	BSI	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
	Total										**0,00**

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA

PERIODE 31 DESEMBER 2024

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	Saldo 31 Des 2024
1	526732	Ditjen Badilum	005	05	Giro	23001003047303	BPN175.DITJEN BADILUM	Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Jatinegara	S-1029/WPB.12/KP.175/2015 16 March 2015	TNP	0,00
2	400936	Pengadilan Agama Kendal	005	04	Giro	7155400937	BPN 134 PA KELAS IA KENDAL	Bank Syariah Mandiri Cabang Kendal	S-1515/WPB.14/KP.0204/2018 20 July 2018	TNP	0,00
3	401715	Mahkamah Syar'iyah Kutacane	005	04	Giro	1053539315	BPN 105 MS KUTACANE	BSI	S-198/WPB.01/KP.06/2021 21 July 2021	TNP	0,00
4	098696	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	005	03	Giro	17601001684301	BPN 007 PN GUNUNGSITOLI	BRI	00020 19 November 2021	TNP	1,00
5	402942	Pengadilan Agama Serui	005	04	Giro	30901000587309	BPN 138 PENGADILAN AGAMA SERUI	BRI CABANG SERUI	S-249/WPB.133/KP.138/2015 19 May 2015	TNP	0,00
Total											1,00

DAFTAR REKENING PEMERINTAH LAINNYA (RPL) MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2024

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
1	40280	KEPANITERAAN	005	02	GIRO	1791791750	RPL 175 KEPANITERAAN MARI UTK PDT	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2482/MK,5/2009 30 APRIL 2009	TNP	29.237.240.702,00
2	40280	KEPANITERAAN	005	02	GIRO	7223333370	RPL.175 PDT UTK PERKARA PERDATA LN-RM	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2482/MK,5/2009 30 APRIL 2009	TNP	2.329.084.379,95
3	99062	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	03	GIRO	0150085426	RPL 175 PT JAKARTA UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK NEGARA INDONESIA	S-4616/ MK.5/ 2013 tgl 04-07-2013	TNP	0,00
4	99063	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	005	03	GIRO	101305555556	RPL 175 PN JAKPUS PDT	BANK TABUNGAN NEGARA	S-4476/ MK.5/ 2016 TGL 31-05-2016	TNP	86.004.674.636,00
5	99064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	005	03	GIRO	0000012101300011771	RPL 175 PS PN JAKBAR UTK PJR PK	BANK TABUNGAN NEGARA	S-1232/KPN.1206/2024 Tgl. 03-07-2024	TNP	48.152.159.059,00
6	97492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	005	03	VA	1601300099998	RPL 175 PN JAKTIM UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-6202/ MK.5/ 2016	TNP	245.200.554.240,00
7	400215	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	005	03	GIRO	101300001146	RPL 175 PN JAKSEL UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-1155/ WPB.12/2015 Tgl 24-03-2015	TNP	322.936.591.905,00
8	400221	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	005	03	GIRO	21101300007191	RPL PN JAKARTA UTARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-6869/MK.5/2017	TNP	433.139.250.833,94
9	099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	005	03	GIRO	0000601300013282	RPL 095 PDT PT BANDUNG UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-2201/WPB.13/KP.0204/2019	TNP	9.548.600,00
10	099068	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	005	03	GIRO	601301212122	RPL 095 PDT PN BDG BP PERDATA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-2565/WPB.13/KP.0204/2018	TNP	18.365.096.973,88
11	099068	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	005	03	GIRO	33701001451308	RPL 095 PN BANDUNG U	BRI	S-2565/WPB.13/KP.0204/2018	TNP	0,00
12	099069	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	005	03	GIRO	38101300000986	RPL 087 PDT PN SMD UTK ONGKOS PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-641/WPB.13/KP.1203/2018	TNP	332.423.332.860,79
13	099071	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	005	03	GIRO	10001000564309	RPL 025 PN TASIKMALAYA UTK PDT	BANK BRI	S-7282/MK.5/2015	TNP	547.910.879,55
14	099072	PENGADILAN NEGERI GARUT	005	03	GIRO	0008901300002326	RPL 096 PDT PN GRT UTK PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-990/WPB.13/KP.1003/2018	TNP	352.540.286,00
15	099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	005	03	GIRO	010401001882308	RPL 025 PDT PN CIAMIS UTK PERKARA	BRI	S-2777/MK.5/2017	TNP	127.620.050,00
16	099078	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	005	03	GIRO	0003601300005474	RPL 021 PDT PN PURWAKARTA UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-421/ WPB.13/ KP.021/ 2018	TNP	21.478.049.988,00
17	400410	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	005	03	GIRO	0012801300002908	RPL 128 PDT PN CIBADAK DANA TITIPAN DAN BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-162/ WPB.13/ KP.05/ 2020	TNP	13.038.245.555,00
18	400478	PENGADILAN NEGERI SUMBER	005	03	GIRO	8888778005	RPL 024 PDT PN SMBR UTK BY PERKARA	BSI	S-162/ WPB.13/ KP.05/ 2021	TNP	3.735.373.327,00
19	400484	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	005	03	GIRO	0009101300003323	RPL 095 PN BALE BANDUNG UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-7520/MK.5/2017	TNP	58.745.214.107,00
20	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	005	03	GIRO	0000101300008295	RPL 023 PN DEPOK	BANK TABUNGAN NEGARA	S-4239/MK.5/2015	TNP	415.305.469.529,00
21	613520	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	005	03	GIRO	0013001300002373	RPL 023 PDT PN CIBINONG UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	000056/023	TNP	43.331.059.677,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
22	613520	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	005	03	GIRO	13001300004692	RPL 023 PDHL PN CIBINONG 21ZRMZ6A	BANK TABUNGAN NEGARA	000056/023	TNP	0,00
23	099079	PENGADILAN NEGERI BEKASI	005	03	GIRO	1601300022519	RPL 171 PN BEKASI UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-4627/MK.5/2015	TNP	253.254.463.097,81
24	099080	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	005	03	GIRO	2024122312	RPL 086 PDT PN KRW BY PERKARA	BANK BSI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	188.260.419.745,00
25	099081	PENGADILAN NEGERI SUBANG	005	03	GIRO	7290570616	RPL 021 PDT PN SUBANG UNTUK PERKARA	BSI	S-354/KPN.1309/2024	TNP	8.125.415.195,00
26	99082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	005	03	GIRO	1501300006331	RPL 023 PDT PN BOGOR UNTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-3113/MK.5/2015	TNP	21.600.945.430,67
27	099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	005	03	GIRO	009201001109303	RPL 128 PDT PN SUKABUMI UNTUK BIAYA PERKARA	BANK BRI	S-4500/MK.5/2015	TNP	46.746.000,00
28	097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	005	03	GIRO	10501003873309	RPL 128 PDT PN CIANJUR	BRI	S-408/KPN.1305/ 2023	TNP	181.408.941,00
29	099085	PENGADILAN NEGERI CIREBON	005	03	GIRO	0000010701004708301	RPL 024 PDT PN CIREBON	BRI	000313	TNP	1.079.609.712,00
30	099086	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	005	03	GIRO	0015601300001076	RPL 024 PDT PN INDRAMAYU UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-1562/SPB.13/KP.0604/2019	TNP	5.555.088.650,00
31	099088	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	005	03	GIRO	109201300000122	RPL 147 PDT PN MJL	BTN	S-155/WPB.13.KP/08.04/2019	TNP	4.166.217.746,00
32	099089	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	005	03	GIRO	15501300001569	RPL 147 PDT PN KUNINGAN	BANK TABUNGAN NEGARA	S-150/ WPB.13/ KP.0804/ 2020	TNP	47.614.000,00
33	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	005	03	GIRO	13301300004563	RPL 171PDT UNTUK BIAYA PERKARA PN CIKARANG	BTN	S-141/WPB.13/KP.0330/2018	TNP	102.806.223.731,00
34	402022	PENGADILAN NEGERI BANJAR	005	03	GIRO	0003401300006139	RPL 025 PENGADILAN NEGERI BANJAR	BTN	S-00319/ WPB.13/ KP.0701/ 2019	TNP	101.831.000,00
35	099090	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	005	03	Giro	32501000296306	RPL 134 PT SEMARANG UTK PDT	BRI Cab.Pandanaran Semarang	S-7755/MK.5/2015 10 September 2015	TNP	22.387.500,00
36	099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	005	03	Giro	0001301300005345	RPL 134 PDT PN SMG UTK PERKARA	BTN Cab. Semarang	S-7290/MK.5/2015 27 August 2015	TNP	301.157.159.430,80
37	099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	005	03	Giro	7270150197	RPL 118 PDT PN TEGAL UTK BY PERKARA	BSI KCP TEGAL KS TUBUN	000194/S-315/KPN.1407/2024 29-04-2024/118 30 April 2024	TNP	177.540.351,00
38	099094	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	005	03	Giro	0003201300005868	RPL 072 PDT PN PEKALONGAN UNTUK PERKARA	BTN	S.381/WKB.14/KP.06/2021 10 May 2021	TNP	388.909.324,00
39	099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	005	03	Giro	18201300001118	RPL 129 PN KUDUS UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN Cabang Kudus	S-51.2/WPB.14/KP.0504/2019 5 September 2019	TNP	873.705.082,00
40	099096	PENGADILAN NEGERI PATI	005	03	Giro	25201300000462	RPL 097 PDT PN PATI UTK BY PERKARA	PT Bank tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pati	S-1010/WPB.14/KP.097/2018 24 September 2018	TNP	627.206.924,00
41	099097	PENGADILAN NEGERI BREBES	005	03	Giro	0062701300000279	RPL 118 PDT PN BREBES UTK BIAYA PERKARA	BTN Cabang Pembantu Brebes	S-720/WPb.14/KP.0704/2019 10 October 2019	TNP	38.781.120,00
42	099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	005	03	Giro	0051201300000692	RPL 118 PDT PN PEMALANG UNTUK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG PEMBANTU PEMALANG	S- 760/WPb.14/KP.0704/2018 25 July 2018	TNP	3.957.572.283,00
43	099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	005	03	Giro	0001301300009789	RPL 134 PENGADILAN NEGERI KENDAL UTK BIAYA PERKARA	BTN CABANG PEMBANTU KENDAL	S-10598/MK.5/2017 29 November 2017	TNP	29.633.404.688,78
44	099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	005	03	Giro	69701300000115	RPL 129 PDT PN DEMAK UTK BIAYA PERKARA	BTN Cabang Kudus	S-543/WPB.14/KP.0504/2019 30 September 2019	TNP	7.408.223.102,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
45	099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	005	03	Giro	0068201300000308	RPL 163 PDT PN PURWODADI	BTN	S-464/KPN.1413/2022 15 December 2022	TNP	270.684.524,00
46	099102	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	005	03	Giro	19001300001066	RPL 134 PN SLTG PDT PERKARA	Bank Rakyat Indonesia	S-322/ WPB.14/ KP.0230/ 2015 12 March 2015	TNP	184.032.746,50
47	099103	PENGADILAN NEGERI UNGARAN	005	03	Giro	21501300000551	RPL 134 PN UNGARAN	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	S-5827/MK.5/2015 8 July 2015	TNP	23.048.963.917,59
48	099104	PENGADILAN NEGERI JEPARA	005	03	Giro	110601300000072	RPL 129 PDT PN JEPARA	Bank BTN Cabang Jepara	S-742/WPB.14/KP.0504/2018 15 October 2018	TNP	1.047.689.698,00
49	099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	005	03	Giro	001001000077307	RPL 163 PN BLORA	BRI Cabang Blora	S-2347/MK.5/2015 25 March 2015	TNP	30.389.250,00
50	099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	005	03	Giro	107601300000198	RPL 097 PDT PN REMBANG UTK BY PERKARA	BTN	000075 21 March 2023	TNP	83.934.336,00
51	099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	005	03	Giro	3201300005240	RPL 072 PDT PN BATANG UNTUK BIAYA PERKARA	BTN Cabang Pekalongan	S-995/WPB.14/KP.0604/2018 31 August 2018	TNP	13.375.125.057,00
52	099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	005	03	Giro	000120001300000050	RPL 027 PDT PN PURWOREJO UTK MENAMPUNG PANJAR BIAYA PERKARA	BTN	000652/027 10 January 2023	TNP	10.059.844.844,00
53	099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	005	03	Giro	8101300001849	RPL 115 PDT PN MAGELANG UTK MENAMPUNG PANJAR BIAYA PERKARA	BTN Cabang Magelang	000892/115 20 July 2022	TNP	35.271.856.600,00
54	099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	006	03	Giro	69601300000381	RPL 027 PN KBM UTK BY PERKARA	PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KEBUMEN	S-524/WPB.14/KP.1203/2019 3 May 2019	TNP	77.937.107,00
55	099112	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	005	03	Giro	7900500577	RPL 115 PDT PN TMG	BSI	000940/115 30 July 2024	TNP	10.566.022.500,00
56	099114	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	005	03	Giro	0749335639	RPL 164 PDT PN WONOSOBO UTK BIAYA PERKARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	S-717/WPB.14/KP.1403/2018 12 September 2018	TNP	225.482.948,00
57	099115	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	005	03	Giro	3101300003870	RPL 028 PN SURAKARTA UTK PDT	BTN-SOLO	S-7301/MK.5/2015 27 August 2015	TNP	15.932.536.887,00
58	099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	005	03	Giro	108301300000107	RPL 162 PDT PN. SRAGEN UNTUK BIAYA PERKARA	BTN Cabang Sragen	No. S-361/WPB.14/KP.1101/2018 7 August 2018	TNP	182.267.030,00
59	099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	005	03	Giro	109901300000073	RPL 028 PN WONOGIRI KELAS IB UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN KCP Wonogiri	S-8961/MK.5/2017 12 October 2017	TNP	762.960.872,00
60	099118	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	005	03	Giro	21601300000042	RPL 028 PN SUKOHARJO UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN Cabang Sukoharjo	S-4413/MK.5/2015 28 May 2015	TNP	401.988.529,00
61	099119	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	005	03	Giro	113501300000043	RPL 162 PDT PN KARANGANYAR UNTUK UANG PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KCP KARANGANYAR	S-368/WPB.14/KP.1101/2018 10 August 2018	TNP	3.115.508.232,00
62	099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	005	03	Giro	110901300000032	RPL 148 PDT PN BOYOLALI UTK PERKARA	BTN KCP BOYOLALI	S-251/WPB.14/KP.1004/2018 7 June 2018	TNP	2.860.075.170,00
63	099122	PENGADILAN NEGERI KLATEN	005	03	Giro	003501003641305	RPL 148 PDT PN KLATEN UNTUK PERKARA 1	BRI CABANG KLATEN	000387/148 30 October 2023	TNP	9.814.471.924,00
64	099123	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	005	03	Giro	6000007771	RPL 029 PDT PN PWT UNTUK PB PERKARA	BSI	000219/029 18 July 2024	TNP	3.136.666.947,00
65	099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	005	03	Giro	0018301300000823	RPL 130 PDT PN CILACAP UNTUK BIAYA PERKARA	Bank BTN KCP Cilacap	S-1088/WPB.14/KP.1503/2018 13 August 2018	TNP	9.201.899.361,00
66	099125	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	005	03	Giro	0003301300005367	RPL 029 PN BANYUMAS	BTN	S-0832/WPB.14/KP.08.04/2018 15 August 2018	TNP	41.801.512,00
67	099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	005	03	Giro	3301300005163	RPL 029 PDT PN PURBALINGGA KELAS IB UTK BIAYA PERKARA	PT. Bank BTN Cabang Purwokerto	S-8462/MK.5/2017 28 September 2017	TNP	638.163.452,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
68	099127	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	005	03	Giro	000401002644307	RPL164 PN BANJARNEGARA PDT BIAYA PERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cab. Banjarnegara	000100/164 19 June 2024	TNP	5.917.500,00
69	4400566	PENGADILAN NEGERI SLAWI	005	03	Giro	1110089895	RPL 118 PDT PN KAB TEGAL UTK PERDATA	BSI	S-333/KPN.1407/2023 17 April 2023	TNP	742.071.455,00
70	4400572	PENGADILAN NEGERI MUNGKID	005	03	Giro	25101000012309	RPL 115 PDT PN MUNGKID UTK BIAYA PERKARA	Bank BRI cabang Muntilan	S-4244/MK.5/2015 20 May 2015	TNP	1.176.732.422,00
71	099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	005	03	GIRO	015301002231307	RPL 149 PDT PN WONOSARI UT BYR PKR	BRI	000824/149	TNP	257.804.565,00
72	099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	005	03	GIRO	0049701300000127	RPL 030 PN YOGYAKARTA UNTUK PDT	BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)	S-6829/MK.5/2015	TNP	7.990.996.562,84
73	099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	005	03	GIRO	0000501300006639	RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA	PT.BANK TABUNGAN NEGARA	S-1095/ WPB.15/ KP.01.04/ 2018	TNP	3.862.876.324,00
74	400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	005	03	GIRO	023601001792304	RPL 030 PDT PN BANTUL UTK BY PERKARA	BRI	100395/030 8 December 2021	TNP	811.958.784,00
75	099129	PENGADILAN NEGERI WATES	005	03	GIRO	0000501300006320	RPL 176 PDT PN WATES UTK BIAYA PERKARA	BTN CABANG YOGYAKARTA	S-7839/ MK.5/ 2017 08-09-2017	TNP	2.169.869.850,00
76	400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	005	03	GIRO	1059978075	RPL 030 PDT PT YOGYAKARTA UTK BIAYA PERKARA	BNI	KPPN 100011/ 030 04-09-2020	TNP	750.000,00
77	99143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	005	03	GIRO	1301000035307	RPL 035 PDT PN BONDOWOSO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-6885/ MK.5/ 2015	TNP	19.547.600,00
78	99139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	005	03	GIRO	006201300007592	RPL 165 PN SIDOARJO KELAS 1A UTK POT BIAYA PERKARA	BTN	S-8461/MK.5/2017	TNP	14.968.756.490,00
79	99133	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	005	03	GIRO	0039301300002044	RPL 135 PN TIPIKOR SURABAYA KLAS 1 A KHUSUS	BTN	S-5478 MK.5/ 2017	TNP	115.879.656.223,78
80	99140	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	005	03	GIRO	005501002168300	RPL 098 PN MOJOKERTO	BRI	S-64/WPB.16/KP.10/2019	TNP	1.798.687.470,00
81	99138	PENGADILAN NEGERI GRESIK	005	03	GIRO	6101300003748	RPL 135 PN GRESIK KELAS I A UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN	S-8150/ MK.5/ 2017 19-09-2017 19-09-2017	TNP	178.170.578.709,00
82	99135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	005	03	GIRO	1101000877303	RPL 073 PDT PN BOJONEGORO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-25678/ MK.5/ 2015 / 03-07-2015	TNP	157.083.359,00
83	99151	PENGADILAN NEGERI BLITAR	005	03	GIRO	901002527301	RPL 150 PDT PN BLITAR UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-10091/MK.5/2015	TNP	440.863.565,00
84	99158	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	005	03	GIRO	25001300000731	RPL 035 PDT KRAKSAAN UTK PERKARA	BTN	KPPNS-1127/ WPB.16/ KP.0604/ 2018	TNP	23.411.246.675,00
85	99147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	005	03	GIRO	8801888888	RPL 034 PN KEDIRI UTK PDT BIAYA PERKARA	BSI	KPPN 000276 30-10-2023	TNP	3.995.814.134,00
86	99132	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	005	03	GIRO	9601000038301	RPL 135 PT SURABAYA UTK PDT	BRI	S-5656/MK.5/2015	TNP	12.014.000,00
87	99163	PENGADILAN NEGERI NGAWI	005	03	GIRO	5701002520306	RPL 033 PDT PN NGW UTK PERKARA	BRI	S-1716/ WPB.16/ KP.0704/ 2019	TNP	79.465.895,00
88	99157	PENGADILAN NEGERI BANGIL	005	03	GIRO	6201300007990	RPL 032 PDT PN BANGIL UTK PERKARA	BTN	S-1579/ WPB.16/ KP 0404/ 2018	TNP	3.527.938.324,00
89	99144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	005	03	GIRO	3001300004335	RPL 131 PN KLAS 1A JEMBER UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN	S-10136/MK.5/2017	TNP	1.205.468.053,00
90	99136	PENGADILAN NEGERI TUBAN	005	03	GIRO	22301300000564	RPL 166 PN TUBAN UTK PDT PERKARA	BTN	S-184/WPB.16/KP.1430/2015	TNP	3.645.829.991,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
91	99149	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	005	03	GIRO	11001000326306	RPL 150 PN TULUNGAGUNG UTK PERKARA	BRI	S.2482/MK.5/2009 30-04-2009	TNP	603.800.669,00
92	400597	PENGADILAN NEGERI KAB.MADIUN	005	03	GIRO	4501001296301	RPL 033 PN KAB MADIUN UTK PERKARA	BRI	S-7216/ MK.5/ 2015 26-08-2015	TNP	54.476.500,00
93	99156	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	005	03	GIRO	4401003415305	RPL 131 PDT PN LUMAJANG UNTUK DANA PIHAK KETIGA	BRI	S-213/KPN.1611/2024	TNP	55.464.582,58
94	99160	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	005	03	GIRO	24701300000281	RPL 033 PN PONOROGO UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN	S-1817/WPB.16/KP.0704/2018	TNP	173.637.350,00
95	99153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	005	03	GIRO	9992824449	RPL 032 PDT PN PASURUAN	BSI	S-893/ KPN.1604/ 2022	TNP	276.719.254,00
96	99152	PENGADILAN NEGERI MALANG	005	03	GIRO	0001201300007880	RPL 032 PN MALANG KELAS I A UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN	S-/1501/MK-S/2017 22-12-2017	TNP	5.602.432.316,00
97	99142	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	005	03	VA	1326281938	RPL 098 PDT PN JOMBANG	BNI	000685/098	TNP	5.913.757.850,00
98	99145	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	005	03	GIRO	22401300002617	RPL 100 PDT PN BANYUWANGI UNTUK BIAYA PERKARA	BTN	S-10890/MK.5/2017 Tanggal 7 Desember 2017	TNP	4.832.722.722,65
99	99167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	005	03	VA	0002801300005966	RPL 036 PDT PN BANGKALAN	BTN	S-311/WPB.16/KP.05/2020	TNP	42.154.677.011,00
100	99146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	005	03	GIRO	6011111112	RPL 035 PDT PN STB UTK PERKARA	BSI	000707/035	TNP	1.494.455.922,00
101	99148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	005	03	GIRO	43301300000270	RPL 034 DT PN NGK	BTN	S-0342/WPB.16/KP.034/2018	TNP	56.631.336,00
102	99154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	005	03	GIRO	0025001300000642	RPL 035 PDT PN PROBOLINGGO	BTN	KPPNS-470/ WPB.16/ KP.0604/ 2018	TNP	123.958.600,00
103	99161	PENGADILAN NEGERI PACITAN	005	03	GIRO	6701000570308	RPL 099 PN PACITAN UNTUK PDT	BRI	S-6928/ MK.5/ 2015 tanggal 18-08-2015	TNP	25.938.500,00
104	400581	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	005	03	GIRO	0000004601300004154	RPL 034 PN KAB KEDIRI KELAS IB UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN	S-8848/MK.5/2017 tanggal 10 September 2017	TNP	12.502.929.709,84
105	98387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	005	03	GIRO	004901000670304	RPL 033 PDT PN MAGETAN UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-6053/MK.5/2015 Tanggal 15/07/2015	TNP	44.719.700,00
106	99150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	005	03	VA	17701003439308	RPL 034 PDT PN TRENGGALEK UTK PERKARA	BRI	000393/034	TNP	22.963.313,00
107	99137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	005	03	GIRO	7996543212	RPL 073 PDT PN LAMONGAN UTK UANG PERKARA	BSI	KPPN 000064/ 073 11-08-2022	TNP	1.399.983.611,00
108	99165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	005	03	VA	47001300000856	RPL 036 PN PAMEKASAN	BTN	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	1.612.471.600,00
109	98345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	005	03	VA	6767000063	RPL 033 UTK BIAYA PERKARA	BSI	RPL 033 UTK BIAYA PERKARA	TNP	97.917.275,00
110	626157	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	005	03	VA	1945081909	RPL 032 PDT PN KAB MLG UTK B PERKARA	BSI	110914/ 032, 21-11-2024	TNP	5.798.067.626,00
111	99168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	005	03	VA	2801300006085	RPL 036 PDT PN SPG UTK BIAYA PERKARA	BTN	S-612/ WPB.16/ KP.05/ 2020	TNP	43.816.000,00
112	99166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	005	03	GIRO	14901300000883	RPL 035 PDT PN SUMENEP	BTN	S-489/ WPB.16/ KP.05/ 2020	TNP	3.939.780.800,00
113	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	005	03	GIRO	1055943792	RPL 001 PDT PT BNA UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	000416 5 July 2021	TNP	1.200.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
114	098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	005	03	GIRO	7521212121	RPL 001 PS PN BANDA ACEH UNTUK BIAYA PERKARA	BTN Unit Usaha Syariah Cabang Banda Aceh	S-3077/WPB.01/KP.01/2019 19 December 2019	TNP	9.796.629.167,00
115	098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	005	03	GIRO	7224443336	RPL 001 PDT PN SBG UTK TITIPAN	BSI	000570 18 August 2022	TNP	674.286.200,00
116	098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	005	03	GIRO	7521313137	RPL 001 PS PN SIGLI UTK BIAYA PERKARA	BTN Syariah	000558/001 31 January 2022	TNP	2.145.935.874,00
117	098476	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	005	03	GIRO	1058879947	RPL 089 PDT PN BRN UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BIREUEN	S-1119/WPB.01/KP.02/2021 26 July 2021	TNP	1.328.032.460,00
118	098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	005	03	GIRO	1058735236	RPL 089 PDT PN LSK UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA KCP LHOKSUKON	S-1092/WPB.01/KP.02/2021 21 July 2021	TNP	1.050.761.992,00
119	098497	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	005	03	GIRO	1059229636	RPL 089 PDT PN LSW UTK PERKARA	BRI SYARIAH KC LHOKSEUMAWE MERDEKA	S-1825/WPB.01/KP.02/2020 25 November 2020	TNP	82.851.600,00
120	098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	005	03	GIRO	1059961442	RPL 122 PDT PENGADILAN NEGERI TKN	BANK SYARIAH INDONESIA KC TAKENGON	S-18/WPB.01/KP.07/2021 11 January 2021	TNP	23.046.715,00
121	098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	005	03	GIRO	1058696222	RPL 002 PDT PN LANGSA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-330/WPB.01/KP.04/2021 4 August 2021	TNP	120.879.673,00
122	098523	PENGADILAN NEGERI IDI	005	03	GIRO	1056978468	RPL 002 PDT PN IDI	Bank Syariah Indonesia	S-294/WPB.01/KP.04/2021 27 July 2021	TNP	2.545.684.500,00
123	098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	005	03	GIRO	8021999990	RPL 002 PDT PN KSP 03 UNTUK BIAYA PERKARA	BTN SYARIAH	S-451/KPN.0104/2023 9 May 2023	TNP	5.989.662.460,00
124	098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	005	03	GIRO	1056513236	RPL 105 PDT PN BKJ UTK PERKARA	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Blangkejeren	S-158/WPB.01/KP.06/2021 5 July 2021	TNP	33.550.000,00
125	098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	005	03	GIRO	1056200963	RPL 105 PDT PENGADILAN NEGERI KUTACANE	BANK SYARIAH INDONESIA CABANG KUTACANE	S-171/WPB.01/KP.06/2021 9 July 2021	TNP	14.260.675,00
126	098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	005	03	GIRO	1055563361	RPL 003 PDT PN MEULABOH	BRI SYARIAH	S-493/WPB.01/KP.03/2020 13 July 2020	TNP	659.298.349,00
127	098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	005	03	GIRO	7193451602	RPL 003 PDT PN CALANG UTK PERDATA	BANK SYARIAH INDONESIA	000181/003 4 April 2022	TNP	3.840.000,00
128	098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	005	03	GIRO	7150420867	RPL 003 PDT PN SINABANG	BANK SYARIAH MANDIRI	000045 1 March 2021	TNP	3.115.570,00
129	098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	005	03	GIRO	1055320744	RPL 074 PDT PN 099187 BIAYA PERKARA	BANK MANDIRI SYARIAH (BSM)	000080/074 21 July 2021	TNP	3.964.000,00
130	098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	005	03	GIRO	1050278488	RPL 074 PN SNGKL UTK PDT BY PERKARA	BRI SYARIAH KCP SINGKIL	S-297/WPB.01/KP.05/2020 23 June 2020	TNP	5.030.156.339,00
131	400415	PENGADILAN NEGERI JANTHO	005	03	GIRO	7521919191	RPL 001 PS PN JANTHO UTK BIAYA PERKARA	BTN SYARIAH CABANG BANDA ACEH	000553 23 December 2021	TNP	5.444.261.173,00
132	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	005	03	GIRO	1054828035	RPL 074 PDT PN 402008 UTK PERKARA	BRI Syariah KC Blangpidie	000123 22 November 2021	TNP	49.930.000,00
133	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	005	03	GIRO	1057230386	RPL 001 PDT PN MEUREUDU UTK PERKARA	BSI	000362/001 21 June 2021	TNP	552.500,00
134	401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	005	03	GIRO	1054091768	RPL 003 PDT PN SUKAMAKMUE	Bank Syariah Indonesia	000148 10 August 2021	TNP	24.376.000,00
135	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	005	03	GIRO	1059836354	RPL 122 PDT PENGADILAN NEGERI STR	BSI KCP BENER MERIAH	S-718/WPB.01/KP.07/2020 17 December 2020	TNP	7.387.003,00
136	098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	005	03	GIRO	59201300000280	RPL 123 PDT PT MEDAN UTK BIAYA PERKARA	BANK BTN	S-1052/KPN.0202/2024 25 September 2024	TNP	3.453.581,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
137	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	005	03	GIRO	301300008633	RPL 123 PN MEDAN	BTN	182/S/MDN/CCU/IX/2015 7 September 2015	TNP	157.777.550.127,81
138	098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	005	03	GIRO	023801001820309	RPL 123 PDT PN BINJAI UNTUK BIAYA PERKARA	BRI CABANG BINJAI	S-3048/WPB.02/KP.02/2018 31 October 2018	TNP	615.396.285,58
139	098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI	005	03	GIRO	7216146257	RPL 076 PDT PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI UNTUK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	000100 10 November 2022	TNP	822.428.690,00
140	098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	005	03	GIRO	19401000124306	RPL 119 PN.SIDIKALANG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Sidikalang	S-2673/MK.5/2015 2 April 2015	TNP	98.995.557,00
141	099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	005	03	GIRO	014401000004307	RPL 119 PN KABANJAHE	Bank Rakyat Indonesia Cab. Kabanjahe	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	680.102.131,00
142	098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	005	03	GIRO	108501300000553	RPL 075 PDJ PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT	BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	S-274/KPN.0208/2023 27 May 2023	TNP	461.774.837,54
143	098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	005	03	GIRO	0018601300000906	RPL 124 PDT PN TEBING TINGGI	Bank Tabungan Negara Cabang Pematang Siantar	S-246/KPN.0203/ 2024 16 May 2024	TNP	69.879.981,00
144	098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	005	03	GIRO	17601000420306	RPL 007 PN GSITOLI UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia	S-6284/MK.5/2015 / 28 Juli 2015 28 July 2015	TNP	428.573.685,00
145	098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	005	03	GIRO	6901300001748	RPL 005 PDT PN PS UNTUK UANG PERKARA	Bank Tabungan Negara	000060 6 June 2024	TNP	20.490.134.220,00
146	098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	005	03	GIRO	9901000011301	RPL 125 PN TARUTUNG UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Tarutung	S-4416/MK.5/2015 28 May 2015	TNP	463.476.550,00
147	098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	005	03	GIRO	13501000225302	RPL 006 PN PADANGSIDIMPUAN UTK PDT	BRI Padang Sidempuan	S-6286/MK.5/2015 28 July 2015	TNP	780.318.004,00
148	098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	005	03	GIRO	38301300000528	RPL 106 PN SIBOLGA UTK PDT	BTN Kantor Cabang Pembantu Sibolga	S-475/KPN.0209/2023 6 September 2023	TNP	208.141.438,00
149	108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	005	03	GIRO	301300013670	RPL 123 PN STABAT UTK BIAYA PERKARA	BTN	001973/123 23 January 2024	TNP	19.967.495.648,00
150	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	005	03	GIRO	0006901300001756	RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	BTN	S-295/KPN.0204/2024 13 May 2024	TNP	2.750.150.884,00
151	400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	005	03	GIRO	0111701300000176	RPL 076 PN KISARAN UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN	S-149/WPB.02/KP.0604/2019 18 July 2019	TNP	26.824.291.096,86
152	400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	005	03	GIRO	44501300000221	RPL 124 PN LUBUK PAKAM UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Tabungan Negara Cabang Lubuk Pakam	S-8784/MK.5/2016 2 November 2016	TNP	114.782.332.386,00
153	401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	005	03	GIRO	0018601300000778	RPL 124 PN SEI RAMPAH	BTN KANCAPEM TEBING TINGGI	S-755/WBP.02/KP.03/2020 13 November 2020	TNP	16.896.896.005,00
154	401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	005	03	GIRO	109701000638306	RPL 006 PDT PN SBH 402014	BANK RAKYAT INDONESIA	S-00099/WPB.02/KP.0504/2019 14 January 2019	TNP	44.620.600,00
155	477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	005	03	GIRO	63701000364308	RPL 006 PN MANDAILING NATAL UTK BIAYA PERKARA	BRI KC PANYABUNGAN	S-3094/MK.5/2015 16 April 2015	TNP	165.188.450,00
156	672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	005	03	GIRO	116001300000018	RPL125 PDT PN BALIGE UNTUK BIAYA PERKARA	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balige	S-411/WPB.02/KP.11/2019 14 May 2019	TNP	14.479.478.233,00
157	099204	PENGADILAN TINGGI PADANG	005	03	GIRO	5801002615309	RPL 010 PT PADANG UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-3427/MK.5/2015	TNP	12.762.378,00
158	099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	005	03	GIRO	0000901300009031	RPL 010 PN PADANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-443/WPB.03/KP.010/2018 15 March 2018	TNP	5.992.234.643,66
159	099206	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	005	03	GIRO	553401000091308	RPL 077 PDT PN SAWAHLUNTO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-6889/MK.5/2015	TNP	113.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
160	099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	005	03	GIRO	016901001073305	RPL 011 PDT PN BTS UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-1282/WPB.03/KP.0204/2018 30 October 2018	TNP	265.947.860,00
161	099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	005	03	GIRO	009101001498300	RPL 090 PDT PN SOLOK UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-3435/MK.05/2015	TNP	36.096.775,00
162	099209	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	005	03	GIRO	119301300000174	RPL 010 PDT PN PARIAMAN UNTUK BIAYA PERKARA	BTN	KPPN S-000137/ WPB.03/ KP.01/ 2023	TNP	46.472.118.783,00
163	099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	005	03	GIRO	27001001142303	RPL 142 PDT PN. PAINAN UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-3436/MK.5/2015 27 April 2015	TNP	163.738.950,00
164	099211	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	005	03	GIRO	18701300002114	RPL 011 PDT PN BKT UTK BIAYA PERKARA	BTN	S-219/KPN.0302/2024	TNP	154.676.334,00
165	099212	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	005	03	GIRO	26901001176305	RPL 091 PN LUBUK SIKAPING UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4559/ MK.5/ 2015 29-05-2015	TNP	13.319.100,00
166	099213	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	005	03	VA	1208073432	RPL 011 PDT PN PYK UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-402/ WPB.03/ KP.02/ 2021	TNP	74.997.212,00
167	400189	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	005	03	GIRO	1181313349	RPL 011 PDT PN PD PJG UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-284/WPB.03/KP.02/2021	TNP	7.396.560,00
168	400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	005	03	GIRO	7271050334	RPL 011 PDT PN LUBAS UTK BY PERKARA	Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk Basung	S-479/KPN.0302/2024	TNP	83.778.100,00
169	400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	005	03	GIRO	1301202103	RPL 011 PN TJ PATI PDT UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-728/KPN.0302/2024	TNP	146.822.450,00
170	400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	005	03	GIRO	116201300000252	RPL 090 PDT PN KOTO BARU UTK PERKARA PERDATA	Bank BTN Solok	S-369/KPN.0303/2023	TNP	465.448.300,00
171	400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	005	03	GIRO	1178787983	RPL 077 PS PN MUARO UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-170/SPB.03/KP.05/2	TNP	169.447.959,00
172	402015	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	005	03	GIRO	1110022138297	RPL 077 PN PULAU PUNJUNG UTK PDT	MANDIRI KCP DHARMASRAYA	S-469/ KPN.0305/ 2023 21-11-2023	TNP	29.274.800,00
173	477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	005	03	GIRO	61501000469308	RPL 091 PDT PN PASAMAN BARAT UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-6318/MK.5/2015	TNP	54.325.000,00
174	400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	005	03	GIRO	017001002498301	RPL 008 PT PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Pekanbaru	S-3366/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	2.400.000,00
175	400492	PENGADILAN NEGERI DUMAI	005	03	GIRO	68801300000483	RPL 120 PDT PN DUMAI UTK BIAYA PERKARA	BTN	S-1079/KPN.0402/2022 5 September 2022	TNP	7.736.375.369,00
176	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	005	03	GIRO	3901300015421	RPL 008 PDT PN PKU UTK BIAYA PERKARA	BTN Kantor Cabang Pekanbaru	S-3366/MK.5/2015 23 April 2016	TNP	34.406.004.310,17
177	400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	005	03	GIRO	9119919999	RPL 008 PDT PN BNGKINANG UTK PRKRA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-3366/MK.5/2015 23 April 2017	TNP	11.120.232.614,00
178	098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	005	03	GIRO	1720044464446	RPL 120 PDT PN BENGKALIS UTK BIAYA PERKARA	Mandiri	S-621/KPN.0402/2024 24 September 2024	TNP	30.890.396.879,00
179	477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	005	03	GIRO	9000100107	RPL 008 PDT PN PLLW UNTUK B PERKARA	BSI	001673 31 August 2023	TNP	223.708.179,00
180	477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	005	03	GIRO	1130740619	RPL 120 PDT PN ROKAN HILIR UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-1441/WPB.04/KP.02/200 26 October 2020	TNP	141.537.170,00
181	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	005	03	GIRO	8888008126	RPL 008 PDT PN P PENGARAIAN UTK B PERKARA	BNI	001207/008 19 October 2020	TNP	92.383.197,00
182	098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT INDRAGIRI HULU	005	03	VA	7266352845	RPL 092 PDT PN RENGAT UNTUK DPK	BSI CABANG RENGAT	S-217/KPN.0403/2024 13 March 2024	TNP	1.473.556.752,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
183	477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	005	03	GIRO	0000003901300014912	RPL 008 PDT PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA UNTUK BIAYA PERKARA	BTN	001663 26 June 2023	TNP	28.867.920.854,00
184	098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	005	03	GIRO	017501000497309	RPL 092 PN TEMBILAHAN UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cab.Tembilahan	3809/MK.05/2015 11 May 2015	TNP	7.016.710,00
185	401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	005	03	GIRO	1980100525	RPL092 PDT PNTLK MNMPG BY PRKR	BSI	S-186/KPN.0403/2024 22 February 2024	TNP	137.156.606,00
186	098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	005	03	GIRO	0000003801300009222	RPL 012 PDT PN JAMBI	BTN	000118/012 1 April 2024	TNP	3.706.673.102,00
187	098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	005	03	GIRO	16001003236301	RPL 078 PN MUARA BUNGO UTK PDT	BRI	S-8167/MK.5/2015 25 September 2015	TNP	45.502.000,00
188	098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	005	03	GIRO	017901000581308	RPL 143 PN KUALA TUNGKAL UTK PDT	BRI	S-7277/MK.5/2015 27 August 2015	TNP	354.124.093,00
189	098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	005	03	GIRO	011701004910309	RPL 013 PN SPN UTK BY PERKARA	BRI	S-329/KPN.0603/2024 21 November 2024	TNP	170.316.976,00
190	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	005	03	GIRO	27501001087309	RPL 159 PN BANGKO	BRI Cabang Bangko	S-4563/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	38.992.500,00
191	400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	005	03	GIRO	31501000430305	RPL 012 PN MUARA BULIAN UTK PDT	PT. BRI (Persero) Cab. Muara Bulian	S-8484/MK.5/2015 8 October 2015	TNP	86.504.025,00
192	400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	005	03	GIRO	2001002258300	RPL 012 PT JAMBI UTK PDT	BRI	S-7275.MK.5/2015 27 August 2015	TNP	0,00
193	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	005	03	GIRO	060701001672307	RPL078 PN TEBO UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Rimbo Bujang	S-8885/MK.5/2015 20 October 2015	TNP	48.091.251,00
194	477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	005	03	GIRO	60401000756300	RPL 159 PN SAROLANGUN UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun	S-4797/MK.5/2015 8 June 2015	TNP	23.245.113,00
195	477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	005	03	GIRO	220701000493304	RPL PDT PN TJT	PT. BRI (Persero) KCP RANTAU RASAU	S-488/WPB.06/KP.0503/2018 19 November 2018	TNP	34.973.880,00
196	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	005	03	GIRO	1100007534529	RPL 012 PDT PN SENGETI UTK PERKARA	BANK MANDIRI KCP SENGETI	S-9046/MK.5/2015 27 October 2015	TNP	1.215.063.168,00
197	578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	5	5	GIRO	2001003288308	RPL 012 PTUN JAMBI	BANK RAKYAT INDONESIA	S-4404/MK.5/2015 28 MAY 2015	TNP	13.872.308,00
198	099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	005	03	GIRO	7291572817	RPL 144 PDT PN ME UTK BY PERKARA	BSI	KPPN S-565/ KPN.0703/ 2024 12-11-2024	tnp	885.661.629,00
199	099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	005	03	GIRO	0112001300000618	RPL 109 PN BATURAJA UNTUK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-269/KPN.0702/2024	TNP	3.070.644.878,00
200	099229	PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU	005	03	GIRO	12901002731302	RPL 070 PS UNTUK PERKARA PN LUBUKLINGGAU	BANK RAKYAT INDONESIA	W6-U5/431/KU.00/III/2023	TNP	297.164.246,00
201	099231	PENGADILAN NEGERI LAHAT	005	03	GIRO	4001001050307	RPL 144 PN LAHAT UNTUK BIAYA PERKARA	BANK BRI	KPPN S-4968/ MK.S/ 2015 12-06-2015	TNP	85.773.300,00
202	099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	005	03	VA	1482828288	RPL 160 PDT PN SEKAYU UNTUK BIAYA PERKARA	BNI	KPPN S-136/ KPN.0704/ 2022 18-04-2022	TNP	457.063.490,00
203	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	005	03	VA	7765554448	RPL 160 PDT PNPKB UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	KPPN 000077 29-05-2024	TNP	2.917.235.450,00
204	099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	005	03	GIRO	034201000521307	RPL 014 PT PALEMBANG	BRI CABANG SRIWIJAYA	S-0426/WPB.07/KP.014/2015 17-02-2015	TNP	0,00
205	672953	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	005	03	GIRO	1000488753	RPL 014 PDT PN PBM UTK PKR BTNS	BTN SYARIAH	S-502/KPN.0701/2024	TNP	1.524.418.592,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
206	099227	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	005	03	GIRO	0000801300010004	RPL 014 PDT KAYUAGUNG UTK PKR BTN	BTN	S-1497/KPN.0701/2024	TNP	30.048.205.473,00
207	099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	005	03	GIRO	801300006665	RPL 014 PDT PN PLG UTK PRKR	BTN	S-6301/ MK.5/ 2017	TNP	5.652.218.452,00
208	672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	005	03	GIRO	013801000560306	RPL 144 PDT PN PAGAR ALAM	BANK BRI	S-1768/MK.5/2015 TGL 18 FEB 2015	TNP	242.137.009,00
209	526728	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	5	5	Giro	5901004871303	RPL 014 PDT PT TUN PLG UTK DANA PKR	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3/KPN.1206/2023 2 JANUARY 2023	TNP	0,00
210	526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	5	5	GIRO	34201000767301	RPL 014 PTUN PALEMBANG	BANK RAKYAT INDONESIA	S-10301/MK.5/2015 7 DECEMBER 2015	TNP	17.004.200,00
211	099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	005	03	GIRO	7272725677	RPL 017 PDT PN TJK UNT TITIPAN PRK	BSI CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON 2	S-823/WPB.0801/2023	TNP	4.607.364.915,00
212	099236	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	005	03	GIRO	9801002454307	RPL 017 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-823/WPB.0801/2023	TNP	0,00
213	099237	PPENGADILAN NEGERI METRO	005	03	GIRO	7249927238	RPL 126 PDT PN METRO UT BY PKR	BSI KC METRO A YANI	S-7/MK.5/KPN.0802/2023	TNP	65.526.000,00
214	400452	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	005	03	GIRO	001801300006040	RPL 017 PN KALIA	BTN Cabang B.Lampung	KPPN S-4040/WPB.08/KP.0104/2018	TNP	5.629.972.987,09
215	663031	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	005	03	GIRO	7772228842	RPL 126 PDT PN GN SUGIH UTK PERKARA	BSI KC Bandar Jaya	S-648/KPN.0802/2024	TNP	147.337.000,00
216	663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	005	03	VIRTUAL	7296047238	RPL 126 PDHL PN GUNUNG SUGIH UNTUK 2B5ERZDA	BSI Bandarjaya	S-657/KPN.0802/2024	TNP	0,00
217	614884	PENGADILAN NEGERI LIWA	005	03	GIRO	1140024018213	RPL 145 PDT PN LIWA	Mandiri KCP Liwa	000307	TNP	15.911.500,00
218	663027	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	005	03	GIRO	7271814334	RPL 116 PDT PN MENGGALA UTK PERKARA	BSI KCP TULANG BAWANG UNIT 2	S-464/ KPN.0803/ 2024	TNP	63.024.204.456,00
219	477307	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	005	03	GIRO	7277722218	RPL 017 PDT PN KOTA AGUNG U PERKARA	BSI KCP TANGGAMUS	S-570/KPN.0801/2024	TNP	1.750.429.858,00
220	402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	005	03	GIRO	1801300006066	RPL017 PDT PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	BTN Cabang B.Lampung	S-005/WPB.08/KP.0104/2019	TNP	531.542.274,00
221	99238	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	005	03	GIRO	15501000212305	RPL 116 PN KOTABUMI UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Kotabumi	S-3815/MK.5/2015	TNP	23.494.281,00
222	663052	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	005	03	GIRO	219101000552307	RPL 116 PDT PN BLAMBANGAN UMPU UNTUK BIAYA PERKARA	BRI CAB.PEM BLAMBANGAN UMPU	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	14.299.000,00
223	663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	005	03	GIRO	7998999809	RPL.126 PDT PN SUKADANA UT BY PERKARA	BSI KC METRO A YANI	S-379/KPN.0802/2024 15 July 2024	TNP	36.025.059.961,00
224	559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	5	5	GIRO	9801001250302	RPL 017 PTUN BANDAR LAMPUNG UTK PENAMPUNGAN DANA TITIPAN	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2482/MK.5/2009 30 APRIL 2009	TNP	8.025.600,00
225	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	005	03	GIRO	7101002382302	RPL 042 PDT PENGADILAN TINGGI UTK BIAYA PERKARA	BRI KC Pontianak	S-6185/MK.S/2015 Tanggal 24 Juli 2015	TNP	150.000,00
226	99239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	005	03	VA	4201300007059	RPL 042 PDT PN PONTIANAK UTK BIAYA PERKARA	Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Pontianak	S-3529/WPB.17/KP.0104/2018 Tanggal 23 Oktober 2018	TNP	5.401.578.235,00
227	99243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	005	03	GIRO	4201300007009	RPL 042 PDT PN MEMPAWAH UTK BIAYA PERKARA	Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Pontianak	S-2384/ WPB.17/ KP.0104/ 2018 23-08-2018	TNP	8.905.465.303,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
228	670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	005	03	GIRO	56701000203309	RPL 093 PDT PNBKY UTK BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia. Cab Bengkayang	S-0729/WPB.17/KP.02/2018 2 November 2018	TNP	17.984.700,00
229	99240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	005	03	GIRO	112201300000218	RPL 093 PDT PN SINGKAWANG UNTUK BIAYA PERKARA	BTN Cabang Singkawang	S-0729/WPB.17/KP.02/2018 2 November 2018	TNP	7.334.955.988,00
230	670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	005	03	GIRO	116801000403306	RPL 093 PNSBS UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia	S-124/ WPB.17/ KP.02/ 2020 Tanggal 02 Maret 2020	TNP	42.357.000,00
231	99245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	03	GIRO	4201300007067	RPL 167 PDT PN SANGGAU UNTUK BIAYA PERKARA	Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Pontianak	S-923/ WPB.17/ KP.03/ 2018 31-10-2018	TNP	1.491.138.396,00
232	99241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	005	03	GIRO	109801300000215	RPL 079 PDT PN SINTANG UTK BIAYA PERKARA	Bank Tabungan Negara	S-61/WPB.17/KP.05/2021 Tanggal 04 Maret 2021	TNP	40.442.087,00
233	99242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	005	03	GIRO	108801300000288	RPL 094 PN KTG UTK B PERKARA	BTN	KPPN S-56/WPB.17/KP.04/2020	TNP	4.617.146.923,98
234	400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	005	03	GIRO	1212777718	RPL 117 PN PUTUSSIBAU UTK PDT	BSI KCP Putussibau	KPPN S-392/ KPN.1706/ 2023 13-12-2023	TNP	4.636.622.552,00
235	689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	005	03	GIRO	117801000282305	RPL 167 PDT PN NGABANG UNTUK DAFTAR PERKARA	Bank Rakyat Indonesia	S-122/WPB.17/KP.03/2018 30-01-2018	TNP	55.672.721,00
236	099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	005	03	GIRO	2601300004043	RPL 043 PN PALANGKA RAYA UTK PDT	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)Tbk CABANG PALANGKARAYA	S-664/MK.5/2014 3 February 2014	TNP	813.681.410,00
237	099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	005	03	GIRO	28201001295301	RPL 102 PN PANGKALAN BUN UTK PDT	BRI CABANG PANGKALAN BUN	S-9416/MK.5/2015 6 November 2015	TNP	391.696.850,00
238	099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	005	03	GIRO	020901000461301	RPL 080 PDT PN MUARA TEWEH UTK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MUARA TEWEH	SK.5/2015-6800/M 13 August 2015	TNP	62.428.500,00
239	099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	005	03	GIRO	1590011030334	RPL 080 PDT PN MUARA TEWEH UNTUK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	BANK MANDIRI Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	000104/080 29 April 2024	TNP	154.215.376,00
240	099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	005	03	VA	112101300000191	RPL 043 PS PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II UTK UANG PERKARA	BTN	000087/043 29 September 2022	TNP	208.353.083,00
241	099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	005	03	GIRO	6000102011993	RPL 043 PDHL PN KAPUAS UNTUK 2W6KLMXA	BANK KALTENG	000276 16 May 2024	TNP	0,00
242	099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	005	03	GIRO	30301001099305	RPL 080 PDT PN BUNTOK UNTUK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	S-527/WPB.18/KP.0204/2018 10 July 2018	TNP	50.224.000,00
243	099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	005	03	GIRO	2000020241	L 044 PDT PN SAMPIT BIAYA PERKA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-274/ KPN.1804/ 2024	TNP	1.214.427.262,00
244	400359	PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	005	03	GIRO	24301001708306	RPL 043 PDT PT PALANGKARAYA UNTUK DANA TITIPAN BIAYA PERKARA	Bank BRI Cabang Palangkaraya	S-6061/MK.5/2015 15 July 2015	TNP	0,00
245	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	005	03	GIRO	105301000427309	RPL 043 PDTN PN KUALA KURUN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk KUALA KURUN	S-2716/WPB.18/KP.0104/2018 2 November 2018	TNP	13.961.000,00
246	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	005	03	GIRO	0000223201000248300	RPL 102 PDT PN NANGA BULIK UNTUK BEA PERKARA	BRI	S-016/WPB.18/KP.03/2018 3 January 2019	Non TNP	28.750.000,00
247	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	005	03	GIRO	018001001533305	RPL 043 PDT PN PULANG PISAU	BRI CABANG KUALA KAPUAS	S-364/WPB.18/KP.0104/2019 28 February 2019	TNP	5.296.000,00
248	670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	005	03	GIRO	451001000106308	RPL 080 PDT PN TAMIANG LAYANG UNTUK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-5640/MK.5/2015 3 July 2015	TNP	4.598.000,00
249	672973	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	005	03	GIRO	360801000105302	RPL 044 PN KASONGAN UTK BIAYA PERKARA	BRI UNIT KASONGAN	S-2659/MK.5/2015 1 April 2015	TNP	9.926.000,00
250	099253	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	005	03	GIRO	000301001171307	RPL 045 PDT PT BJM UTK BIAYA PERKARA	BANK BRI CABANG BANJARMASIN	S-4507/MK.5/2015	TNP	600.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
251	099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	005	03	GIRO	014301000622305	RPL 110 PDT PN BARABAI UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG BARABAI	S-5835/MK.5/2015	TNP	21.620.000,00
252	099255	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	005	03	GIRO	003101000172301	RPL 110 PN KANDANGAN UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Kandangan	S-4411/MK.5/2015	TNP	1.475.363.194,00
253	690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	005	03	GIRO	012601001910309	RPL 081 PN BATULICIN	BANK BRI CABANG BATULICIN	S-75/WPB.19/KP.05/2021	TNP	90.176.572,40
254	400283	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	005	03	GIRO	023901001657302	RPL 168 PDT PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	BRI Cabang Pelaihari	S-117/ KPN.1904/ 2024	TNP	78.417.909,80
255	690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	005	03	GIRO	012601002363301	RPL 081 UTK BIAYA PERKARA	BANK BRI CABANG BATULICIN	S-264/KPN.1905/2022	TNP	121.044.000,00
256	099258	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	005	03	GIRO	0000010801300004899	RPL 045 PN. MARTAPURA UNTUK PDT	BTN BANJARBARU	S-607/KPN.1901/2023	TNP	1.505.123.550,00
257	099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	005	03	GIRO	021001000619309	RPL 110 PDT PN RANTAU UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG RANTAU	S-6283/MK.5/2015	TNP	872.725.719,00
258	099256	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	005	03	GIRO	5555500318	RPL 081 PDT PNKTB UTK BIAYA PERKARA	BSI KOTABARU	KPPN KPPN S-406/ KPN.1905/ 2024	TNP	885.985.721,00
259	400261	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	005	03	GIRO	1001300077772	RPL 045 PDT PN	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. KC. Banjarmasin	S-250/WPB.19/KP.045/2019	TNP	827.300,00
260	099254	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	005	03	GIRO	1001300099994	RPL 045 PDT PN BANJARMASIN UNTUK BIAYA PERKARA	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. KC. Banjarmasin	S-2798/WPB.19/KP.045/2018	TNP	2.640.618.061,00
261	099259	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	005	03	GIRO	5555510151	RPL 151 PDT PN TANJUNG UTK BIAYA PERKARA	BNI CABANG TABALONG	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	366.754.101,00
262	099259	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	005	03	GIRO	6666604151	RPL 151 PNBP PN TANJUNG	BNI CABANG TABALONG	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	102.651,00
263	099260	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	005	03	GIRO	014701000466307	RPL 151 PN AMUNTAI	PT.BANK RAKYAT INDONESIA	S-4564/MK.S/2015	TNP	178.265.250,00
264	653459	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	005	03	GIRO	10801301111110	RPL 045 PDT PN BANJARBARU UNTUK BIAYA PERKARA	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. KC. Banjarbaru	S-2877/WPB.19/KP.045/2018	TNP	4.562.812.828,36
265	402027	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	005	03	GIRO	1650873524	RPL 151 PDT PN PARINGIN	BANK BNI CABANG BARABAI	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	9.652.000,00
266	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	005	03	GIRO	008201003051309	RPL 046 PDT PT SMD UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2654/MK.5/2015	TNP	2.850.000,00
267	662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	005	03	GIRO	056301000742307	RPL 046 PDT PN SGT UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-813/WPB.20/KP.046/2015	TNP	1.837.435.235,00
268	099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	005	03	GIRO	0002001300005639	RPL 046 PDT PN SMD UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-7519/MK.5/2017	TNP	21.767.425.158,56
269	099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	005	03	GIRO	0004501300006225	RPL 047 PN BPN PDT UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-2770/MK.5/2017	TNP	299.030.477.710,90
270	400292	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	005	03	GIRO	8899445555	RPL 153 PDT PN TJ REDEB BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-397/KPN.2003/2023	TNP	1.050.946.028,00
271	662973	PENGADILAN NEGERI BONTANG	005	03	GIRO	033301001779302	RPL 046 PN BONTANG PDT UNTUK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-498/WPB.20/KP.01/2020	TNP	9.620.700,00
272	099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	005	03	GIRO	3330333226	RPL 046 PDT PN TGR UTK PERDATA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-572/KPN.2001/2024	TNP	43.565.700.067,97
273	400303	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	005	03	GIRO	021401000735305	RPL 047 PN TGT PDT UTK BIAYAPERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-7224/ MK.5/ 2015	TNP	56.968.592,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
274	402028	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	005	03	GIRO	119801300000019	RPL 047 PDT PN PENAJAM UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-1025/ KPN.2002/ 2022	TNP	180.162.428.992,00
275	477381	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	005	03	GIRO	62601000177306	RPL 046 PDT PN KUBAR UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-4235/MK.5/2015	TNP	50.593.100,00
276	099313	PENGADILAN TINGGI MANADO	005	03	GIRO	005401001416308	RPL 049 PS PT MANADO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-8493/MK.5/2015	TNP	6.657.267,00
277	099330	PENGADILAN NEGERI MANADO	005	03	GIRO	7264872377	RPL 049 PN MANADO UTK PDT PERKARA	BSI	KPPN 000544/049	TNP	20.570.042.769,00
278	099334	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	005	03	GIRO	7285385697	RPL 158 PDT PN KOTAMOBAGU UNTUK PERKARA PERDATA	BSI	S-502/ KPN.3002/ 2024	TNP	536.558.069,00
279	099341	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	005	03	GIRO	022601000757308	RPL 083 PN TAHUNA UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-9054/MK.5/2015	TNP	1.772.166.879,00
280	099355	PENGADILAN NEGERI TONDANO	005	03	GIRO	8800660050	RPL 049 PDT PN TONDANO UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-4417/MK.5/2015	TNP	139.778.690,00
281	402031	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	005	03	GIRO	702601000104304	RPL 179 PN MELONGUANE UTK PDT BIAYA PRK	BRI	S-048/ WPB.30/ KP.03/ 2019	TNP	5.696.000,00
282	568726	PENGADILAN NEGERI BITUNG	005	03	GIRO	7558558886	RPL 179 PN BITUNG UNTUK PDT	BSI	S-215/KPN.3003/2023	TNP	3.212.600.593,00
283	670211	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	005	03	GIRO	7233383079	RPL 179 PDT PN AIRMADIDI UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-223/KPN.3003/2023	TNP	12.593.259.416,53
284	673035	PENGADILAN NEGERI AMURANG	005	03	GIRO	7284365997	RPL 049 PN AMURANG UTK PDT	BSI	KPPN 000622	TNP	26.136.960,00
285	400535	PENGADILAN TINGGI PALU	005	03	GIRO	0000082049676	RPL 051 PDT PT SULTENG UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-6812/MK.5/2015	TNP	1.901.000,00
286	477203	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	005	03	GIRO	1510007160275	RPL 051 PN DONGGALA PDT UTK BY PERKARA	Mandiri	S-9739/MK.5/2015 17 November 2015	TNP	36.982.733,00
287	672981	PENGADILAN NEGERI PARIGI	005	03	GIRO	7611166607	RPL PN PARIGI KLS II UTK BY PKR	BANK SYARIAH INDONESIA	S-9739/MK.5/2015 17 November 2016	TNP	67.923.296,00
288	099383	PENGADILAN NEGERI TOLITOLI	005	03	GIRO	022701001329306	RPL 082 PDT PN TOLITOLI UTK BIAYA	BRI	S-8159/ MK.5/ 2015 25-09-2015	TNP	193.999.577,00
289	099376	PENGADILAN NEGERI PALU	005	03	GIRO	7766660511	RPL 051 PDT PN PALU UTK BY PERKARA	BSI KC PALU GAJAH MADA	S-244/KPN.2701/2022	TNP	6.914.896.200,00
290	670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	005	03	GIRO	022701000362301	RPL 082 PDT PN BUOL UTK BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia	S-325/ WPB.26/ KP.0430/ 2015	TNP	18.482.750,00
291	099397	PENGADILAN NEGERI LUWUK	005	03	GIRO	7770530533	RPL 053PDT PN LUWUK BIAYA PERKARA	BSI CABANG LUWUK	S-325/ WPB.26/ KP.0430/ 2016	TNP	1.397.791.793,00
292	099402	PENGADILAN NEGERI POSO	005	03	GIRO	007201001151304	RPL 052 PN POSO UNTUK BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso	S-2482/ MK.5/ 2009	TNP	341.540.500,00
293	099419	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	005	03	GIRO	5001002597305	RPL 136 PT MAKASSAR UNT PDT BIAYA PERKARA	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.-	S-8180/ MK.5/2015 24 June 2015	TNP	22.997.000,00
294	099423	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	005	03	GIRO	0037201300000424	RPL 136 PN MAKASSAR UTK PDT	Bank Tabungan Negara	S-6287/MK.5/2015 28 July 2015	TNP	7.202.279.177,00
295	099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	005	03	GIRO	2722727722	RPL 136 PDT PN SUNGGUMINASA PERKARA	BSI	S-872/KPN.2502/2024 4 July 2024	TNP	5.294.425.944,00
296	099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	005	03	GIRO	1520088892019	RPL 136 PDT PN. PANGKEP UNTUK PERKARA (099444)	BANK MANDIRI CABANG PANGKAJENE	S-1277/WPB.25/KP.02/2019 19 September 2019	TNP	17.557.035.512,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
297	099451	PENGADILAN NEGERI BARRU	005	03	GIRO	022201000669305	RPL 057 PDT PN BARRU UTK BIAYA PERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC. Barru	S-4407/MK.5/2015	TNP	24.062.399.051,00
298	099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	005	03	GIRO	25001000348308	RPL 136 PN TAKALAR UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank BRI Cabang Takalar	S-7187/MK.5/2015 26 August 2015	TNP	975.426.816,00
299	099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	005	03	GIRO	0007601300000997	RPL 136 PN MAROS UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	S-10134/MK.5/2017 16 November 2017	TNP	12.429.195.808,00
300	099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	005	03	GIRO	25201000281300	RPL 056 PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	BRI CABANG JENEPONTO	S08879/MK.5/2015 20 October 2015	TNP	89.084.300,00
301	099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	005	03	GIRO	8009009121	RPL 057 PDT PN PAREPARE UTK BIAYA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK CABANG PAREPARE	S-953/KPN.2503/2024 28 October 2024	TNP	400.187.644,00
302	099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	005	03	GIRO	22001000390306	RPL 057 PN ENREKANG	BRI Cabang Enrekang	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	68.778.103,00
303	099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	005	03	GIRO	22101001062308	RPL 057 PN SIDRAP UNT PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG SIDRAP	S-7767/MK.5/2015 10 September 2015	TNP	115.137.897,00
304	099529	PENGADILAN NEGERI PINRANG	005	03	GIRO	021901001750308	RPL 057 PDT PN PINRANG	BRI	000003/057 14 January 2021	TNP	82.722.586,00
305	099533	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	005	03	GIRO	11101002431305	RPL 055 PN. WTP UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG WATAMPONE	S-8163/MK.5/2015	TNP	437.597.250,00
306	099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	005	03	GIRO	11801000905306	RPL 055 PDT PN SOPPENG UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Watansoppeng	KPPN S-/099/MK.5/2015 30-11-2025	TNP	14.343.280,00
307	099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	005	03	GIRO	19501000416309	RPL 055 PDT PN WAJO	BRI Cab. Sengkang	S-4510/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	1.880.866.825,00
308	099561	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	005	03	GIRO	0417848164	RPL 056 PN BANTAENG UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI	S-9414/MK.5/2015 31 October 2015	TNP	41.125.084,00
309	099575	PENGADILAN NEGERI SINJAI	005	03	GIRO	25801000243306	RPL 177 PN SINJAI UTK PDT BIAYA	BANK BRI CAB.SINJAI	S.6010/MK.5/2015 4 November 2015	TNP	72.001.750,48
310	099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	005	03	GIRO	025301000120304	BPG 056 PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	Bank BRI Cab. Bulukumba	S-4532/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	124.824.500,00
311	099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	005	03	GIRO	25701000952309	RPL 155 PN SELAYAR UTK PDT BIAYAPERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Benteng Selayar	S-8491/MK.5/2015 8 October 2015	TNP	1.113.000,00
312	099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	005	03	GIRO	0007401300002137	RPL 058 PDT PN PALOPO UTK BIAYA PERKARA	Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pembantu Palopo	S-694/WPB.25/KP.0404/2018 18 September 2018	TNP	97.720.460,00
313	099618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	005	03	GIRO	23201000723306	RPL 170 PN MAKALE UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Makale di Rantepao	s-10242/MK.5/2015 3 December 2015	TNP	808.558.881,00
314	402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	005	03	GIRO	214801000469303	RPL 058 PDT PENGADILAN NEGERI BLP 402034	BRI KCP LUWU	S-043/WPB.25/KP.0404/2019 8 January 2019	TNP	60.600.200,00
315	672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	005	03	GIRO	4563334563	RPL 058 PN MASAMBA UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-371/KPN.2504/2022 22 September 2022	TNP	2.816.911.647,00
316	673014	PENGADILAN NEGERI MALILI	005	03	GIRO	116301300000028	RPL 058 PDT PN MALILI UNTUK BIAYA PERKARA	BTN Cabang Pembantu Malili	S-194/WPB.25/KP.04/2020 10 March 2020	TNP	20.559.400,17
317	400541	PENGADILAN TINGGI KENDARI	005	03	GIRO	064601000528309	RPL 060 PT KENDARI PDT BIAYA PERKARA	Bank BRI Cabang Kendari Bypass	S-9721/mk.5/2015	TNP	150.000,00
318	681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	005	03	GIRO	19201002844302	RPL 060 PDT PN ANDOOLO UTK BIAYA PERKARA	BRI KANTOR CABANG KENDARI SAM RATULANGI	S-4536/MK.5/2015	TNP	46.087.273,00
319	099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	005	03	GIRO	021601000699303	RPL 156 PDT PENGADILAN NEGERI KOLAKA	Bank Rakyat Indonesia Cab. Kolaka	S-194/ WPB.27/ KP.0430/ 2015	TNP	38.516.100,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
320	099664	PENGADILAN NEGERI BAUBAU	005	03	GIRO	32601002712302	RPL 103 PDT PN BAUBAU UTK PERKARA	Bank Rakyat Indonesia Cab. Baubau	S-476/ KPN.2802/ 2024	TNP	203.037.464,73
321	401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	005	03	GIRO	214301000620307	RPL 156 PDT PN LASUSUA UTK BIAYA PERKARA	BRI KCP LASUSUA	S-16/WPB.28/KP.04/2019	TNP	0,00
322	099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	005	03	GIRO	7770060607	RPL060 PDT PN KDI UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	No.000434	TNP	6.090.327.961,00
323	681444	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	005	03	GIRO	032601001234301	RPL 103 PDT PN PASARWAJO UTK PERKARA	BRI CABANG BAUBAU	S-3003/MK.5/2015	TNP	49.749.500,00
324	477225	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	005	03	GIRO	1620005778588	RPL 060 PN UNAAHA	BANK MANDIRI KCP UNAAHA	000288/060	TNP	1.038.646.246,00
325	402033	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	005	03	GIRO	488801000142301	RPL 103 PDT PN WANGI WANGI UTK PERKARA	BRI UNIT WANGI WANGI	S-500/ WPB.28/ KP.0203/ 2019 07-08-2019	TNP	2.951.000,00
326	099671	PENGADILAN NEGERI RAHA	005	03	GIRO	021701001035302	RPL 157 PDT PN RAHA UNTUK B PERKARA	BRI CABANG RAHA	S-7445/MK.S/2015	TNP	29.946.826,00
327	099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	005	03	GIRO	000101000058304	RPL 061 PT AMBON UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG AMBON	S-5680/MK.5/2015 3 July 2015	TNP	450.000,00
328	099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	005	03	GIRO	7267113992	RPL 061 PDT PN AMBON UTK BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	000197/061 25 March 2024	TNP	13.137.386.768,00
329	099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	005	03	GIRO	026001000811304	RPL 173 PN MASOHI UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Masohi	S-4624/MK.5/2015 1 June 2015	TNP	37.085.710,00
330	099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	005	03	GIRO	028101002462305	RPL 084 PS PN TUAL U DANA PERKARA	BRI	S-182/KPN.3203/2023 7 March 2023	TNP	3.898.621,00
331	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	005	03	GIRO	105901000532302	RPL 084 PENGADILAN NEGERI DOBO	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.	S-1065/WPB.32/KP.0330/2018 30 November 2018	TNP	3.500.600,00
332	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	005	03	GIRO	7294351331	RPL 061 PDT PN NAMLEA UNTUK PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	1.163.319.279,00
333	401970	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	005	03	GIRO	497401000202304	RPL 173 PDT PN DATARAN HUNIPOPU	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).Tbk Unit Piru	S-027/WPB.32/KP.0402/2019 14 January 2019	TNP	132.533.243,00
334	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	005	03	GIRO	497301000337309	RPL 173 PDT PN DATARAN HUNIMOA UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-023/WPB.32/KP.0402/2019 10 January 2019	TNP	2.220.500,00
335	672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	005	03	GIRO	64301000678306	RPL 104 PDT PN SAUMLAKI UTK PERKARA	BRI KC SAUMLAKI	S-7451/MK.5/2015 31 August 2015	TNP	5.030.178.181,00
336	099774	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	005	03	GIRO	036801001321302	RPL 037 PT DENPASAR UNT PDT BRI KC. RENON DENPASAR	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3594/ MK.5/ 2014 05-06-2014	TNP	600.000,00
337	099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	005	03	GIRO	0000701300007439	RPL 037 PN DENPASAR KELAS IA UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG DENPASAR	S-10593/MK.5/2017	TNP	16.333.197.989,73
338	099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	005	03	GIRO	0000702310000017	RPL 037 PN DENPASAR KELAS IA UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG DENPASAR	S-10593/MK.5/2017	TNP	435.902,00
339	099795	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	005	03	GIRO	0025801300001404	RPL 132 PDT PN SINGARAJA UTK BIAYA PERKARA	PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Singaraja	KPPN S-035/ WPB.22/ KP.02.03/ 2019	TNP	1.696.213.602,65
340	099803	PENGADILAN NEGERI NEGARA	005	03	GIRO	012501000260309	RPL 132 PN NEGARA UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.	S-4531/MK.5/2015	TNP	716.604.443,00
341	099817	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	005	03	GIRO	49901300000303	RPL 154 PDT PN SEMARAPURA UNTUK PERKARA	BTN	S-677/WPB.22/KP.03/2021	TNP	112.233.177.799,34
342	099821	PENGADILAN NEGERI TABANAN	005	03	GIRO	49801300001070	RPL 037 PDT PN TABANAN UNTK BY PERKARA	Bank BTN - KCP TABANAN	001890	TNP	373.652.682,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
343	099838	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	005	03	GIRO	0115801300000025	RPL 154 PDT PN. AMLAPURA UNTUK BIAYA PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA CAB. AMLAPURA	KPPN No. S-31/ WPB.22/ KP.03/ 2019	TNP	449.416.768,00
344	099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	005	03	GIRO	024801002029307	RPL 037 PDT PN GIANYAR UNTUK BY PERKARA	BRI	001553	TNP	6.834.895.902,00
345	099859	PENGADILAN NEGERI BANGLI	005	03	GIRO	0000023301000839305	RPL 154 PDT PN BANGLI UTK PANJAR PERKARA	BRI	S-3011/MK.5/2015	TNP	1.558.278.021,00
346	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	005	03	GIRO	2101300004271	RPL 038 PN MATARAM UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MATARAM	S-6153/MK.5/2017 12 July 2017	TNP	5.442.182.926,00
347	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	005	03	GIRO	2101300005900	RPL 038 PS PNMTR U SISA PJR PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-262/KPN.2301/2023 30 January 2023	TNP	0,00
348	099879	PENGADILAN NEGERI BIMA	005	03	GIRO	007901000443308	RPL 071 PDT PN RABA BIMA UNTUK PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA CAB. BIMA	S-8149/MK.5/2015 18 May 2015	TNP	1.792.392.336,00
349	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	005	03	GIRO	9301000435307	RPL 101 PDT PN SUMBAWA UTK PERKARA	BRI CABANG SUMBAWA BESAR	S-6671/MK.5/2015 10 August 2015	TNP	762.554.106,00
350	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	005	03	GIRO	015701000426300	RPL 169 PN SELONG UTK PDT	PT. Bank BRI Cabang Selong	S-6661/MK.5/2015 10 August 2015	TNP	790.983.379,00
351	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	005	03	GIRO	27201000815309	RPL 071 PN DOMPU UNTUK PDT BIAYA PERKARA	PT. BRI CAB. DOMPU	S-7222/MK.5/2015 26 August 2015	TNP	99.589.759,00
352	099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	005	03	GIRO	19101000372305	RPL 038 PN PRAYA UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BRI (PERSERO) CABANG PRAYA	S-6655/MK.5/2015 10 August 2015	TNP	412.175.705,00
353	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	005	03	GIRO	5201001872302	RPL 038 PT MATARAM UTK PDT	BRI Cabang Mataram	S-7302/MK.5/2015 27 August 2015	TNP	0,00
354	400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	03	GIRO	467101000009302	RPL 039 PDT PT KUPANG UNTUK PERKARA	BANK BTN	S-2027/KPN.2401/2024	TNP	0,00
355	400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	03	GIRO	3901003005301	RPL 039 PENGADILAN TINGGI KUPA	BANK BTN	S-2027/KPN.2401/2024	TNP	0,00
356	099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	005	03	GIRO	0000002201300003538	RPL 039 PN KUPANG UNTUK PDT	BANK BTN	S-391/ WPB.24/ KP.01/ 2020	TNP	1.816.321.701,00
357	099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	005	03	GIRO	026701001467300	RPL 172 PDT PN ATAMBUA UTK BIAYA PERKARA	BANK BRI	S-6178/MK.5/2015	TNP	120.114.700,00
358	099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	005	03	GIRO	27701000859303	RPL 039 PDT PN SOE UNTUK PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-8765/MK.5/2015	TNP	14.582.300,00
359	099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	005	03	GIRO	027601001017308	RPL 039 UNTUK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KEFAMENANU	S-3369/MK.5/2015	TNP	4.239.000,00
360	099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	005	03	GIRO	014101000995302	RPL 041 PDT PN WAINGAPU	BANK RAKYAT INDONESIA	S-8162/MK.5/2015	TNP	34.175.086,00
361	099973	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	005	03	GIRO	23501001057302	RPL 041 PDT PN WAIKABUBAK UTK BIAYA QQ	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1082/ WPB.24/ KP.0204/ 2018	TNP	31.819.050,00
362	099990	PENGADILAN NEGERI ENDE	005	03	GIRO	2401001472305	RPL.040 PN ENDE UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-6293/MK.5/2015	TNP	22.734.830,00
363	099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	005	03	GIRO	011901001160301	RPL 040 PDT PN MAUMERE	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1176/WPB.24/KP.0603/2018	TNP	64.567.964,00
364	400008	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	005	03	GIRO	24601000900305	RPL 174 PN LARANTUKA UTK PDT	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LARANTUKA	S-6649/MK.5/2015 10 August 2015	TNP	18.299.500,00
365	400014	PENGADILAN NEGERI RUTENG	005	03	GIRO	027301001681309	RPL 111 PN RUTENG UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG RUTENG	S-5166/MK.5/2015 19 Juni 2015	TNP	221.632.480,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
366	400158	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	005	03	GIRO	27401000964300	RPL 111 PN BAJAWA UTK PDT	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BAJAWA	S-6851/MK.5/2015	TNP	63.584.100,00
367	400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	005	03	GIRO	27801000872305	RPL 039 PN KALABAHI UTK PDT BIAYA PKR	BRI CABANG KALABAHI	252/ PMK.05/ 2014	TNP	8.748.500,00
368	477231	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	005	03	GIRO	068501000079308	RPL 174 PN LEMBATA UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI KCP Lewoleba	S-7281/ MK.5/ 2015	TNP	68.424.000,00
369	477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	005	03	GIRO	361801000366309	RPL 039 PDT PN ROTE UNTUK PERDATA	BANK RAKYAT INDONESIA (UNIT Ba'a)	S-5663/MK.5/2015 3 Juli 2015	TNP	61.845.500,00
370	673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	005	03	GIRO	111201000281307	RPL 111 PN LABUAN BAJO UNT PDT	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LABUAN BAJO	S-5685/MK.5/2015	TNP	4.818.117.928,00
371	240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	005	03	GIRO	003901003251300	RPL 039 PN OELAMASI UNTUK PERKARA	BRI CABANG KUPANG	S-4003/ WPB.24/ KP.0104/ 2018	TNP	378.674.050,00
372	400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	005	03	GIRO	30701002200303	RPL 063 PDT PT JAYAPURA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-5609/ MK.5/2015	TNP	0,00
373	400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	005	03	GIRO	7254796438	RPL 063 PDT PN JYP UTK BIAYAPERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-5609/ MK.5/2015	TNP	535.653.955,00
374	400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	005	03	GIRO	31101001028309	RPL 113 PN WAMENA UTK PDT	BRI CABANG WAMENA	S-5609/ MK.5/2015	TNP	286.500,00
375	400051	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	005	03	GIRO	35201001762307	RPL 068 PN MERAUKE UTK PDT	BRI CABANG MERAUKE	S-5609/ MK.5/2015	TNP	161.920.200,00
376	400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	005	03	GIRO	030801000205301	RPL 064 PN BIAK UNTUK PDT BIAYA PERKARA	PT Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Biak	S-5609/ MK.5/2015	TNP	25.915.349,00
377	400102	PENGADILAN NEGERI NABIRE	005	03	GIRO	068701000299304	RPL 085 PDT PN NABIRE UNTUKBIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3017/MK.5/2015	TNP	180.943.100,00
378	400277	PENGADILAN NEGERI SERUI	005	03	GIRO	30901000591308	RPL 138 PN SERUI UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-4513/ MK.5/ 2015	TNP	33.515.500,00
379	614891	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	005	03	GIRO	0120101300000127	RPL 141 PDT PN KOTA TIMIKA UNTUK TITIPAN BIAYA PERKARA	BTN KCP Timika	S-664/ KPN.3407/ 2023	TNP	12.066.714.700,00
380	400513	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	005	03	GIRO	11501001696306	RPL 016 PDT PT BENGKULU UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG BENGKULU	S-3825/MK.5/2015 11 May 2015	TNP	0,00
381	400111	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	005	03	GIRO	3701300006068	RPL 016 PDT PN BKL UTK PERKARA	BTN	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	293.590.296,89
382	400127	PENGADILAN NEGERI CURUP	005	03	GIRO	0285485625	RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI CABANG CURUP	S-3807/MK.5/2015 11 May 2015	TNP	12.177.350,00
383	400133	PENGADILAN NEGERI MANNA	005	03	GIRO	7695169630	RPL 121 PN MANNA UTK BIAYA PERKARA	Bank Syari'ah Indonesia KCP Bengkulu Ampera Manna	S-338/WPB.09/KP.04/2021 25 August 2021	TNP	405.500,00
384	400240	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	005	03	GIRO	31801000774303	RPL 016 PN ARGA MAKMUR UTK PERKARA	BRI Cabang Arga Makmur	S-7625/MK.5/2015 7 September 2015	TNP	338.583.347,00
385	672995	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	005	03	GIRO	568401000089304	RPL 121 PDT PN BINTUHAN UTK BIAYA PERKARA	BRI UNIT BANDAR BINTUHAN	S-4880/MK.5/2015 10 July 2015	TNP	154.500,00
386	673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	005	03	GIRO	355101000085307	RPL 121 PDT PN TAIS UTK BIAYA PERKARA	BRI UNIT PASAR TAIS	S-3899/MK.5/2015 12 May 2015	TNP	4.662.000,00
387	673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	005	03	GIRO	7298211097	RPL 121 PDT PN TAIS UTK PERKAR	BSI	S-56/ KPN.0904/ 2025	TNP	0,00
388	673042	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	005	03	GIRO	214601000544309	RPL 146 PDT PN KEPAHIANG UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-526/WPB.09/KP.02/2021 16 September 2021	TNP	910.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
389	673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	005	03	GIRO	562301001021307	RPL 146 PN TUBEI UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-4622/MK.5/2015 1 June 2015	TNP	0,00
390	401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	005	03	GIRO	110101000750309	RPL 181 PDT PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 402018	BRI	S-202/WPB.09/KP.03/2020 8 July 2020	TNP	11.971.494,00
391	578886	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	5	5	GIRO	11501003069301	RPL 016 PTUN BENGKULU UTK PDT UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-5911/MK.5/2015 10 JULI 2015	TNP	2.392.000,00
392	664523	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	005	03	GIRO	010301001777305	RPL 062 PT MALUKU UTARA BIAYA PERKARA	BRI	W28-U/ 1258/ HK.02/ XI/ 2016 14-11-2016	TNP	0,00
393	099732	PENGADILAN NEGERI TERNATE	005	03	GIRO	7239991232	RPL 062 PN TERNATE UTK PDT	BSI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	1.043.162.094,00
394	099749	PENGADILAN NEGERI TOBELO	005	03	GIRO	111401000181301	RPL 112 PDT PN TOBELO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-10303/MK.5/2015	TNP	24.572.000,00
395	099753	PENGADILAN NEGERI LABUHA	005	03	GIRO	221201000440304	RPL 062 PS PN LABUHA UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-2489/WPB.31KP.01 16-11-2018	TNP	45.807.000,00
396	099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	005	03	GIRO	028001000349303	RPL 062 PDT PN SOASIO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-10300/MK.5/2015	TNP	19.759.000,00
397	401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	005	03	GIRO	10301002224305	RPL 062 PDT PN SANANA UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-711/WPB.31/KP.01/2019	TNP	538.500,00
398	401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	005	03	GIRO	010301002135302	RPL 062 PS PN BOBONG UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-1095/ WPB.15/ KP.01.04/ 2018	TNP	0,00
399	097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	005	03	GIRO	4701300007067	RPL 020 PDT PN UTK PANJAR PERKARA DAN TITIPAN	BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG CILEGON	S-325/WPB.11/KP.0104/2018 23 February 2018	TNP	92.263.295.300,00
400	097577	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	005	03	GIRO	0004701300007813	RPL 161 PDT PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG UNTUK BIAYA PERKARA 099075	BTN CABANG CILEGON	S-525/WPB.10/KP.0303/2019 1 October 2019	TNP	41.835.843.215,00
401	097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	005	03	GIRO	4301300008601	RPL 127 PENGADILAN NEGERI TANGERANG	BTN Cab. Tangerang	S-4111/MK.5/2015 18 May 2015	TNP	489.600.120.703,00
402	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	005	03	GIRO	006201006688303	RPL 161 PDT PN PDGL UNTUK PERKARA LAHAN TOL	BRI	S-295/KPN.1103/2023 15 August 2023	TNP	2.298.080.265,00
403	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	005	03	GIRO	151427938	RPL 020 PT BANTEN PDT BIAYA PERKARA	BNI	S-3804/MK.5.2015 11 May 2015	TNP	4.238.000,00
404	663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	005	03	GIRO	006301001681300	RPL 015 PT BABEL UTK BIAYA PERKARA BRI CABANG PANGKALPINANG	BRI CAB. PANGKALPINANG	S-3097/ MK.5/ 2015 16-04-2015	TNP	0,00
405	099234	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	005	03	GIRO	006301001686300	RPL 015 PN PANGKALPINANG UTK BIAYA PERKARA	BRI CAB. PANGKALPINANG	DJPBN S-3566/ MK.5/ 2015 29-04-2015	TNP	503.383.300,00
406	099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	005	03	GIRO	032401000299300	RPL 015 PN SUNGAILIAT UTK BIAYA PERKARA BRI CABANG SUNGAILIAT	BRI CABANG SUNGAILIAT	S-3111/ MK.5/ 2015 16-04-2015	TNP	95.557.400,00
407	400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	005	03	GIRO	013101000470309	RPL 107 PN TANJUNGPANDAN UTK BIAYA PERKARA BRI CABANG TANJUNGPANDAN	BRI CABANG TANJUNGPANDAN	S-3110/ MK.5/ 2015 16-04-2015	TNP	98.846.478,00
408	402020	PENGADILAN NEGERI KOBA	005	03	GIRO	219401000190301	RPL 015 PDT PN KOBA	BRI KCP. KOBA	KPPN S-246/ WPB.10/ KP.01/ 2020 17-01-2020	TNP	7.707.200,00
409	402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	005	03	GIRO	209001000230301	RPL 015 PDT PN MENTOK BIAYA PERKARA	BRI KCP MENTOK	KPPN S-107/ WPB.10/ KP.0104/ 2019 15-01-2019	TNP	178.638.220,00
410	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	5	5	GIRO	6301002185307	RPL 015 PDT PTUN PKP UNTUK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-063/WPB.10/KP.0104/2019 9 JANUARY 2019	TNP	5.675.920,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
411	099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	005	03	GIRO	7266769061	RPL 050 PDT PN GTO UTK PERKARA	BSI	S-635/KPN.2901/2024 18 March 2024	TNP	38.772.734.554,00
412	400209	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	005	03	VA	7280827864	RPL 050 PDT PN LIMBOTO UTK PERKARA	Bank BSI KC Gorontalo	S-1435/KPN.2901/2024 15 August 2024	TNP	1.988.881.236,00
413	477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	005	03	GIRO	515101000043307	RPL 180 PN TILAMUTA UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Unit Tilamuta	S-4822-MK.5/2015 8 June 2015	TNP	4.500.000,00
414	664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	005	03	GIRO	2701002856300	RPL 050 PDT PT GTO UNTUK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk	S-3039/WPB.29/KP.0104/2018	TNP	0,00
415	670185	PENGADILAN NEGERI MARISA	005	03	GIRO	1500067018505	RPL 180 PN MARISA UNTUK PDT BIAYA PERKARA	MANDIRI	S-498/WPB.29/KP.02/2019 25 September 2019	TNP	1.498.645.471,00
416	526706	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	005	03	GIRO	0014801300005677	RPL 009 PDT PTPROV UTK PERKARA	BTN	S-46/KPN.0501/2023 9 January 2023	TNP	50.000,00
417	098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	005	03	GIRO	2024003003	RPL 009 PN TPI UTK PDT BY PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-458/KPN.0501/2024 13 March 2024	TNP	3.952.377.720,00
418	108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	005	03	GIRO	0002701300010933	RPL 137 PN BATAM UTK PDT BIAYA PERKARA	BTN CAB. BATAM	S-9740/MK.5/2015 17 November 2015	TNP	3.962.069.571,00
419	663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	005	03	GIRO	8888008024	RPL 137 PDT PN TANJUNG BALAI KARIMUN UNTUK PANJAR	BNI PERSERO Tbk	S-40/WPB.05/KP/02/2021 14 January 2021	TNP	335.742.100,00
420	672948	PENGADILAN NEGERI NATUNA	005	03	GIRO	328201000217301	RPL 009 PN RANAI UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI UNIT RANAI	S-5634/MK.5/2015 3 July 2015	TNP	204.467.409,00
421	526717	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	005	03	GIRO	035301002958303	RPL 065 PS PT PABAR UNTUK TITIPAN PIHAK KETIGA	BRI KANCA MANOKWARI	KPPN S-4/MK.5/KPN.3301/2023 TANGGAL 20-01-2023	NON TNP	2.780.000,00
422	400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	005	03	GIRO	58601300000364	RPL 065 PDT PN MANOKWARI UTK	BTN	KPPN S-329/ WPB.33/ KP.01/ 2020 05-03-2020	TNP	12.887.983.189,00
423	400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	005	03	GIRO	58701300000596	RPT 066 PDT PN SORONG UTK BIAYA PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SORONG	S-1497/WPB.33/KP.0204/2019 11 October 2019	TNP	304.129.806,00
424	400081	PENGADILAN NEGERI FAKFAK	005	03	GIRO	108101000009306	RPL 067 PN FAKFAK	BRI.Cabang Fakfak	S-6080/Mk.5/2015	TNP	8.901.752,00
425	402039	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	005	03	GIRO	214001000305303	RPL 067 PDT PN KAIMANA	BANG RAKYAT INDONESIA	KPPN S-108/ WPB/ KP.03/ 2020	TNP	3.573.000,00
426	526713	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	005	03	GIRO	021801004226304	RPL 178 PDT 526713 UTK BIAYA PERKARA	BRI	KPPN S-1935/KPN.2601/2022 22-12-2022	TNP	3.965.000,00
427	099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	005	03	GIRO	21801001934306	RPL 178 PDT PN MAMUJU UTK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.	Meteri Keuangan S-0321/WPB.32/KP.1030/2015 16-03-2015	TNP	580.367.619,00
428	099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	005	03	GIRO	4701000917300	RPL 059 PN MAJENE UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene	S-9053/MK.5/2015	TNP	6.156.903,00
429	099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	005	03	GIRO	025901001589301	RPL 059 PN POL UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-913/WPB.26/KP.02/2019	TNP	165.918.748,00
430	689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	005	03	GIRO	211101000038309	RPL 178 PDT PN PASANGKAYU UTK BIAYA (REKENING LAINNYA)	BANK BRI	S-8485/MK.5/2015	TNP	7.712.000,00
431	099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	005	03	GIRO	24501300000550	RPL048 PDT PN TRK 03 099273 U PHK KETIGA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA KCP TARAKAN	S-823/WPB.21/KP.02/2018 8 August 2018	TNP	405.268.929,71
432	417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	005	03	GIRO	224601000122309	RPL 048 PN MALINAU UTK BIAYA PERKARA	PT BRI Cabang Pembantu Malinau, Cabang Tarakan	S-3099/MK.5/2015 17 April 2015	TNP	5.370.500,00
433	417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	005	03	GIRO	116401300000072	RPL 185 PDT PN T SELOR UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA	S-708/WPB.21/KP.01/2019 11 November 2019	TNP	35.608.570.215,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
434	477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	005	03	GIRO	8131313005	RPL 152 PN NUNUKAN	BSI	S-99/KPN.2103/2024 8 March 2024	TNP	6.096.352.043,00
435	526720	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	005	03	GIRO	030601001889304	RPL 185 PDT PT KLTR U B PERKARA	BRI	S- 6/KPN.2101/2023 3 January 2023	TNP	0,00
436	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	005	04	GIRO	93001000017305	RPL 175 PTA JAKARTA UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Unit Pulogadung Jakarta	S-4529/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	0,00
437	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	005	04	GIRO	04280428090	RPL 175 PA JAKARTA PUSAT	Bank Syariah Indonesia	S-3437/MK.5/2015 27 April 2015	TNP	1.944.623.710,00
438	400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	005	04	GIRO	7023931537	RPL 175 PAJAKUT UTK PDT BY PERKARA	BANK MANDIRI SYARIAH	S-5912/MK.5/2015 10 July 2015	TNP	0,00
439	400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	005	04	GIRO	2024061418	RPL 175 PAJAKUT UTK PDT BY PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-959/KPN.1206/2024 28 Mei 2024	TNP	305.223.718,60
440	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	005	04	GIRO	041701888888304	RPL 175 PDT PA JAKBAR UTK TITIPAN	BRI	S-413/KPN.1206/2024 13 February 2024	TNP	1.726.994.077,00
441	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	005	04	GIRO	2021122222	RPL 175 PDT PA JAKTIM BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-3213/WPB.12/KP.06/2021 3 January 2022	TNP	529.722.525,00
442	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	005	04	GIRO	7647640006	RPL 175 PA JAKSEL UTK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Mandiri	S-2784/MK.5/2015 7 April 2015	TNP	2.287.054.845,57
443	309124	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	005	04	GIRO	028601001025304	RPL 095 PTA BANDUNG UTK PDT	BRI KC Dewi Sartika Bandung	S-6063/MK.5/2015 15 July 2015	TNP	150.000,00
444	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	005	04	GIRO	028601001561300	RPL 095 PA BANDUNG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S.2321/WPB.13/KP0204/2018 Tanggal 15-10-2018	TNP	1.028.000.512,00
445	400679	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	005	04	GIRO	009401002005306	RPL 087 PDT PA SUMEDANG UNTUK PERKARA	BRI	S-457/KPN.1312/2024	TNP	64.105.000,00
446	400691	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	005	04	GIRO	010401001282304	RPL 025 PDT PA CIAMIS UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-10768/MK.5/2015	TNP	90.685.000,00
447	400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	005	04	GIRO	016101000940303	RPL 025 PA TASIKMALAYA UTK PDT	BRI	S-1433/ WPB.13/ KP.07/ 2018 Tanggal 08-10-2018	TNP	93.379.500,00
448	400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	005	04	GIRO	002501001041302	RPL 096 PDT PA GRT UTK PERKARA	BRI	S-5659/MK.5/2015	TNP	175.604.500,00
449	400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	005	04	GIRO	7143214413	RPL 023 PDT PA BGR UTK BIAYA PERKARA BANK SYARIAH MANDIRI	BSI	KPPN S-630/ WPB.13/ KP.04/ 2020 27-07-2020	TNP	314.891.750,00
450	400736	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	005	04	GIRO	7274810011	RPL 128 PDT PA SMI UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	S-369/KPN.1305/2024 Tanggal 29/05/2024	TNP	2.741.500,00
451	400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	005	04	GIRO	7164207522	RPL 128 PA CJR PDT BIAYA PERKARA	BSI	S-311/ WPB.13/ KP.05/ 2021 8 Juni 2021	TNP	68.346.600,00
452	400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	005	04	GIRO	40601000693300	RPL 024 PA CIREBON U/PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4511/ MK.5/ 2017	TNP	16.008.100,00
453	400767	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	005	04	GIRO	002801001219305	RPL 024 PDT PA IMY UTK BY PERKARA	BRI	S-7220/MK.5/2015 26 Agustus 2015	TNP	186.537.075,00
454	400773	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	005	04	GIRO	6986986985	RPL 147 PDT PA KAB. MJL UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	S-904/ WPB.13/ KP.0804/ 2018 03-10-2018	TNP	63.813.000,00
455	400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	005	04	GIRO	013301002280300	RPL 147 PDT PA KUNINGAN	BRI	S-639/WPB.13/KP.0804/2019 17 Juli 2019	TNP	9.908.000,00
456	400833	PENGADILAN AGAMA BEKASI	005	04	GIRO	013901003296308	RPL 171 PA BEKASI UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	000003/171 Tanggal 03 Agustus 2020	TNP	2.612.152.364,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
457	400849	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	005	04	GIRO	7262468393	RPL086 PDT PA KRW UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-000092/KPN.1311/2023	TNP	78.419.800,00
458	400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	005	04	GIRO	7501001496308	RPL 021 PA PURWAKARTA UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-573/WPB.13/KP.09/2019 Tanggal 05-11-2019	TNP	17.000.100,00
459	403419	PENGADILAN AGAMA SOREANG	005	04	GIRO	54401001123300	RPL 095 PDT PA SOREANG UTK PERKARA	BRI	S-191/ WPB.13/ KP.0204/2019 tanggal 28 Januari 2019	TNP	582.485.800,00
460	403420	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	005	04	GIRO	13701001745303	RPL 095 PDT PA KOTA CIMAHI UNTUK BP	BRI	S-571/WPB.13/KP.02/2020	TNP	10.994.600,00
461	403421	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	005	04	GIRO	013701001646305	RPL 095 PDT PA NGAMPRAH UTK PERKARA	BRI	S-1168/WPB.13/KP.0204/2019 Tgl 07-02-2019	TNP	278.492.750,00
462	402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	005	04	GIRO	9900090096	RPL 021 PA SUBANG UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	S-601/WPB.13/KP.09/2018	TNP	65.163.400,00
463	402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	005	04	GIRO	7765432213	RPL 128 PDT PENGADILAN AGAMA CIBADAK UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	000106/128 4 January 2023	TNP	143.561.500,00
464	403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	005	04	GIRO	107801000824303	RPL 024 PA SUMBER UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	000062/024 26 March 2021	TNP	379.197.000,00
465	604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	005	04	GIRO	7106589687	RPL 023 PA CIBINONG UTK PDT	BSI	W10-A20 /1499/KU.00/III/2017	TNP	444.660.600,00
466	614707	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	005	04	GIRO	7700011188	RPL 171 PDT PA CIKARANG UTK BIAYA PERKARA	BSI	000002	TNP	221.702.250,00
467	652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	005	04	GIRO	7777704243	RPL 023 PDT PA DEPOK UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-1405/WPB.13/K.P.04/2021	TNP	163.468.355,00
468	690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	005	04	GIRO	010001001202308	RPL 025 PA KOTA TASIKMALAYA UTK PDT	BRI	S-2217/ WPB.13/ KP.11/ 2011	TNP	31.943.000,00
469	690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	005	04	GIRO	10001003514303	RPL 025 PDT PA KOTA TASIKMALAYA UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-2217/ WPB.13/ KP.11/ 2011	TNP	39.000,00
470	682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	005	04	GIRO	16201001444304	RPL 025 PDT PA KOTA BANJAR UNTUK PERKARA	BRI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	2.012.000,00
471	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	005	04	GIRO	4424425554	RPL 134 PTA SMG UTK PERKARA	BRI SYARIAH	S-652/KPN.1402/2022 18 May 2022	TNP	200.000,00
472	402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	005	04	GIRO	032701000418304	RPL 134 PDT PA AMBARAWA UTK PERKARA	BRI CABANG UNGARAN	S-3100/MK.5/2015 16 April 2015	TNP	155.816.500,00
473	401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	005	04	GIRO	1800000048	RPL 164 PA BANJARNEGARA UTK PDT	Bank Syari'ah Indonesia Cabang Banjarnegara	S-6725/MK.5/2015 11 August 2015	TNP	51.726.000,00
474	401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	005	04	GIRO	007701002656307	RPL 029 PDT PA BANYUMAS UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	000110 28 December 2022	TNP	52.523.000,00
475	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	005	04	GIRO	7187523448	RPL 072 PA BATANG UTK BY PRKARA	BSI	S-26/WPB.14/KP.06/2022 12 January 2022	TNP	101.774.000,00
476	401002	PENGADILAN AGAMA BLORA	005	04	GIRO	001001001279300	RPL 163 PDT PA BLORA UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Blora	S-591/WPB.14/KP.1303/2018 30 August 2018	TNP	361.750.500,00
477	401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	005	04	GIRO	17301001420307	RPL 148 PDT PA BOYOLALI UTK PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.	S-370/WPB.14/KP.1004/2018 31 July 2018	TNP	111.338.350,00
478	400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	005	04	GIRO	1401001087301	RPL 118 PA BREBES UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG BREBES	S-5163/MK.5/2016 23 June 2016	TNP	493.288.500,00
479	401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	005	04	GIRO	4040111404	RPL130 PDT PA CLP UTK BY PERKARA	BSI	S-560/KPN.1415/2023 21 December 2023	TNP	276.932.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
480	400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	005	04	GIRO	001601001992300	RPL 129 PDT PA DEMAK BIAYA PERKARA	BRI	S-189/WPB.14/KP.05/2021 26 April 2021	TNP	19.818.072,00
481	400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	005	04	GIRO	7140003004	RPL 129 PDT PA JPR UTK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Mandiri	S-9/WPB.14/KP.05/2019 28 October 2019	TNP	177.315.960,00
482	614710	PENGADILAN AGAMA KAJEN	005	04	GIRO	7577788876	RPL 072 PS PENGADILAN AGAMA KAJEN	Bank Syariah Mandiri	S-1452/WPB.14/KP.0604/2018 6 December 2018	TNP	31.934.000,00
483	401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	005	04	GIRO	1111111638	RPL 162 PA KRA UT PDT BIAYA PERKARA	BSI	000103/162 23 May 2022	TNP	125.410.700,00
484	401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	005	04	GIRO	003201001718308	RPL 027 PA KBM UTK BY PERKARA	BRI Cabang Kebumen	S-1032/WPB.14/KP.1203/2018 29 August 2018	TNP	36.103.500,00
485	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	005	04	GIRO	7222833347	RPL 134 PDT PA KENDAL UNT BIAYA PERKARA	Bank Syariah Mandiri	S-800/WPB.14/KP/0204/2018 12 April 2018	TNP	373.968.250,00
486	401121	PENGADILAN AGAMA KLATEN	005	04	GIRO	3501002399303	RPL 148 PA KLATEN UTK PDT	BANK BRI CABANG KLATEN	S-226/WPB.14/KP.1004/2019 13 June 2019	TNP	59.912.200,00
487	400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	005	04	GIRO	003801001839302	RPL 129 PDT PA KUDUS UNTUK BIAYA PERKARA	BANK BRI CABANG KUDUS	S-522/WPB.14/KP.0504/2018 29 August 2018	TNP	47.812.500,00
488	401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	005	04	GIRO	2022232331	RPL 115 PDT PA MAGELANG UT BY PKR	BANK SYARIAH INDONESIA	000895 6 October 2022	TNP	10.507.300,00
489	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	005	04	GIRO	1366920222	RPL 115 PDT PA MUNGKID UTK DANA TITIPAN PIHAK KE-3	BANK SYARIAH INDONESIA	000893/115 23 August 2022	TNP	74.724.000,00
490	400967	PENGADILAN AGAMA PATI	005	04	GIRO	7174747479	RPL 097 PA PATI KELAS IB UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Syariah Mandiri Cabang Pati	S-9083/MK.5/2016 10 November 2016	TNP	149.191.000,00
491	400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	005	04	GIRO	136501000009300	RPL 072 PA PEKALONGAN UTK PDT	BRI KK PASAR GROSIR BATIK SETONO PEKALONGAN	S.6824/MK.5/2015 13 August 2015	TNP	4.325.000,00
492	400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	005	04	GIRO	7089071407	RPL 118 PA PEMALANG UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Mandiri Syariah	S-6179/MK.5/2015 24 July 2015	TNP	76.156.859,00
493	401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	005	04	GIRO	7652299991	RPL 029 PA PBG UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-3537/MK.5/2015 29 April 2015	TNP	35.971.900,00
494	400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	005	04	GIRO	007601002909308	RPL 163 PA PURWODADI UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI. Cabang Purwodadi	S-327/WPB.14/KP.13/2020 9 October 2020	TNP	20.240.650,00
495	401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	005	04	GIRO	007701002055307	RPL 029 PA PWT UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-280/WPB.14/KP.08/2021 9 July 2021	TNP	123.749.500,00
496	401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	005	04	GIRO	007801001291302	RPL 027 PDT PA PWR UTK BY PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1535/WPB.14/KP.1203/2018 5 December 2018	TNP	31.677.050,00
497	400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	005	04	GIRO	014201001203304	RPL 097 PA REMBANG UTK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Rembang	S-3358/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	57.627.700,00
498	400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	005	04	GIRO	008101000699308	RPL 134 PDT PA SALATIGA UTK PERKARA	BRI Cabang Salatiga	S-3424/MK.5/2015 27 April 2015	TNP	3.456.500,00
499	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	005	04	GIRO	7178033403	RPL 134 PDT PA SEMARANG UTK BP	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1173/WPB.14/KP.02/2021 23 September 2021	TNP	447.803.200,00
500	401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	005	04	VA	6655123456	RPL 162 PA SRAGEN BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-19/WPB.14/KP.11/2022 14 January 2022	TNP	130.930.000,00
501	403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	005	04	GIRO	1181118888	RPL 118 PDT PA SLAWI UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-1095/ WPB.15/ KP.01.04/ 2018	TNP	95.727.000,00
502	401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	005	04	GIRO	3300550044	RPL 028 PS PA SKH UTK BIAYA PERKARA	BSI	0058/028 16 June 2022	TNP	74.277.800,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
503	401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	005	04	GIRO	1039464965	RPL 028 PA SKA UT BIAYAPERKARA	BSI	S-1095/ WPB.15/ KP.01.04/ 2018	TNP	47.002.500,00
504	400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	005	04	GIRO	10101001283308	RPL 118 PA TEGAL UTK PDT	BRI CABANG WONOGIRI	S-6822/MK.5/2015 13 August 2015	TNP	1.166.200,00
505	401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	005	04	GIRO	7810501078	RPL 115 PDT PA TEMANGGUNG	BSI	S-6822/MK.5/2015 13 August 2016	TNP	13.052.800,00
506	401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	005	04	GIRO	015801000290305	RPL 028 PA WONOGIRI UTK PDT	BRI Unit Mendolo Wonosobo	S-6822/MK.5/2015 13 August 2017	TNP	11.208.000,00
507	401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	005	04	GIRO	781001000011304	RPL 164 PDT PA WSB UTK BIAYA PERKARA	BRI Unit Mendolo Wonosobo	S-6822/MK.5/2015 13 August 2018	TNP	103.789.900,00
508	401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	005	04	GIRO	024501002048309	RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA	BRI Cabang Katamso Yogyakarta	S-4406/WPB.15/KP.01.04/2018 6 December 2018	TNP	413.106.050,00
509	401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	005	04	GIRO	3333999907	RPL 030 PDT PA SLM UTK BY PERKARA	BSI	100547/030 4 April 2023	TNP	300.378.500,00
510	401220	PENGADILAN AGAMA WATES	005	04	GIRO	1761760005	RPL 176 PDT PA WATES UTK BY PERKARA	BSI KCP KULON PROGO	000037/176 1 February 2023	TNP	39.005.800,00
511	401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	005	04	GIRO	23601000611301	RPL 030 PDT PA BANTUL UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Bantul	S-5610/MK.5/2015 2 July 2015	TNP	67.679.000,00
512	401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	005	04	GIRO	9300930007	RPL 149 PDT PA WONOSARI UT BY PKR	BANK SYARIAH INDONESIA	000821/149 22 December 2022	TNP	104.555.230,00
513	547658	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	005	04	GIRO	24501000751304	RPL 030 PDT PTA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA	Bank BRI Cab. Katamso	S-6060/MK.5/2015 17 July 2015	TNP	900.000,00
514	309125	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	005	04	GIRO	058401000437300	RPL 135 PDT PTA SBY UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-4866/ MK.5/ 2015	TNP	0,00
515	401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	005	04	GIRO	0005801303333333	RPL 135 PA SURABAYA UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BTN	KPPN S-921/ KPN.1602/ 2022 01-09-2022	TNP	2.424.361.756,00
516	401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	005	04	GIRO	005501002431305	RPL 098 PDT PA MOJOKERTO UTK PIHAK KETIGA	BRI	000562/ 098/	TNP	116.046.300,00
517	401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	005	04	GIRO	1051321649	RPL 165 PDT PA SDA UNTUK PERKARA	BSI	S-312/WPB.16/KP.0304/2020	TNP	1.090.187.550,00
518	401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	005	04	GIRO	4012727777	RPL 098 PDT PA JOMBANG UTK BIAYA PERKARA	BSI	000682/ 098	TNP	100.811.600,00
519	401288	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	005	04	GIRO	741501000006307	RPL 135 PA BWN UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-472/ WPB.16/ KP.02/ 2018	TNP	195.000,00
520	401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	005	04	GIRO	7136107668	RPL 135 PDT PA GRESIK UTK B PERKARA	BSI	S-1990/ WPB.16/ KP.02/ 2019	TNP	517.356.989,00
521	401308	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	005	04	GIRO	7011218061	RPL 073 PA BOJONEGORO	BSI	S-6897/MK.5/2015	TNP	179.940.300,00
522	401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	005	04	GIRO	4101000505303	RPL 073 PA LAMONGAN	BRI	S-6900/ MK.5/ 2015	TNP	107.632.500,00
523	401339	PENGADILAN AGAMA JEMBER	005	04	GIRO	2101001364306	RPL 131 PA JEMBER UTKPDT BIAYA PERKARA	BRI	S/ 7758/ MK.5/ 2015	TNP	574.454.100,00
524	401345	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	005	04	GIRO	001301001602301	RPL 035 PA BONDOWOSO UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4906/MK.5/2017	TNP	139.698.000,00
525	401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	005	04	GIRO	009001000531305	RPL 035 PDT PA SITUBONDO UTK BIAYA PKR	BRI	S-6656/ MK.5/ 2015	TNP	146.235.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
526	401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	005	04	GIRO	000701001692309	RPL 100 PA BANYUWANGI UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4821/MK.5/2015	TNP	368.106.500,00
527	401376	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	005	04	GIRO	003301002689302	RPL 034 PDT PA KEDIRI UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-4815/MK.5/2015	TNP	273.734.200,00
528	401382	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	005	04	GIRO	7150771506	RPL 150 PS PA TA UTK PERKARA	BSI	000015/150	TNP	286.518.000,00
529	401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	005	04	GIRO	017701000761308	RPL 034 PDT PA TRENGGALEK UTK PERKARA	BRI	S-7752/MK.5/2015	TNP	18.859.700,00
530	401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	005	04	GIRO	000901003090307	RPL 150 PDT PA BLT U	BRI	S-887/WPB.16/KP.09.04/2018	TNP	200.736.500,00
531	401411	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	005	04	GIRO	005601000549300	RPL 034 PA NGANJUK UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-6657/ MK.5/ 2015	TNP	102.234.000,00
532	401427	PENGADILAN AGAMA MALANG	005	04	GIRO	3338733387	RPL 032 PDT PA MLG	BSI	S-689/ KPN.1604/ 2023	TNP	180.752.996,00
533	401433	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	005	04	GIRO	006501001685302	RPL 032 PDT PA PSR UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-1363/WPB.16/KP.04/2020	TNP	65.622.300,00
534	401442	PENGADILAN AGAMA BANGIL	005	04	GIRO	055001000298303	RPL 032 PA BANGIL UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-5270/ MK.5/ 2017 13-06-2017	TNP	100.180.500,00
535	401458	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	005	04	GIRO	007301000633307	RPL 035 PDT PA PROBOLINGGO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-4814/MK.5/2015	TNP	5.135.700,00
536	401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	005	04	GIRO	058201000547301	RPL 035 PDT PA KRAKSAAN UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	000596/035	TNP	39.002.500,00
537	401473	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	005	04	GIRO	4401002055306	RPL 131 PDT PA LUMAJANG	BRI	S-1128/WPB16/KP.11/2018	TNP	214.752.500,00
538	401489	PENGADILAN AGAMA MADIUN	005	04	GIRO	7189861097	RPL PDT PA KOTA MADIUN UTK PERKARA	BSI	KPPN S-377/ KPN.1607/ 2022 15-02-2022	TNP	26.160.300,00
539	401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	005	04	GIRO	7124552995	RPL 033 PDT PA MGT UTK PERKARA	BSI	KPPN S- 2338/ WPB.16/ KP.0704/ 2018	TNP	7.546.500,00
540	401509	PENGADILAN AGAMA NGAWI	005	04	GIRO	5701000954305	RPL 033 PA NGAWI UTK PDT	BRI	S-4621/MK.5/2015	TNP	41.360.911,00
541	401515	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	005	04	GIRO	007001002227304	RPL 033 PA PONOROGO UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4820/MK.5/2015	TNP	38.878.400,00
542	401521	PENGADILAN AGAMA PACITAN	005	04	GIRO	7131000008	RPL 099 PA PACITAN UNTUK PDT	BSI	S-665/ WPB.16/ KP,1503/ 2018	TNP	62.836.201,00
543	401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	005	04	GIRO	1122112248	RPL 036 PDT PA PAMEKASAN UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-476/WPB.16/KP.05/2019	TNP	23.767.456,00
544	401546	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	005	04	GIRO	0002801300005021	RPL 036 PDT PA BANGKALAN UTK BIAYA PERKARA	BTN	S-2006/MK.5/2017	TNP	21.519.000,00
545	401552	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	005	04	GIRO	2323239994	RPL 036 PDT PA SAMPANG BIAYA PKR	BSI	S-431/ KPN.1605/ 2023	TNP	15.836.500,00
546	401561	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	005	04	GIRO	009501001243303	RPL 036 PDT PA SUMENEP UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-9740/MK.5/2015	TNP	31.086.000,00
547	401577	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	005	04	GIRO	009501002186300	RPL 036 PDT PA KANGEAN UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-1538/WPB.16/KP.036/2018	TNP	1.920.000,00
548	403031	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	005	04	GIRO	7403031555	RPL 033 PA KAB. MADIUN UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BSM	S-750/WPB.16/KP.07/2020	TNP	30.529.100,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
549	403047	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	005	04	GIRO	149701000001307	RPL 034 PA KEDIRI UNT PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4975/MK.5/2015	TNP	14.059.400,00
550	450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	005	04	GIRO	10901002032304	RPL 166 PDT PA TUBAN UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-75/WPB.16/KP.14/2020	TNP	69.839.500,00
551	604731	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG	005	04	GIRO	51601000775307	RPL 032 PDT PA KAB MALANG UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-1441/ WPB.16/ KP/ 04/ 2019	TNP	589.725.500,00
552	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	005	04	GIRO	1055711627	RPL 001 MAHKAMAH SYARIAH ACEH	BANK SYARIAH INDONESIA	KPPN 000550/ 001	TNP	150.000,00
553	401592	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	005	04	GIRO	6000009918	RPL 001 PS MS BNA UTK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	000424/001 9 Juli 2021	TNP	102.366.500,00
554	401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	005	04	GIRO	1055619693	RPL 001 MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG UNTUK BIAYA PERKARA	BSI KCP SABANG	S-1632/WPB.01/KP.01/2020/001 23 July 2020	TNP	0,00
555	401612	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	005	04	GIRO	1055383029	RPL 001 PDT MS SIGLI UTK PERKARA	Bank Syariah Indonesia	000407	TNP	170.546.500,00
556	401628	MAHKAMAH SYARIYAH MEUREUDU	005	04	GIRO	1057418733	RPL 001 PDT MS MEUREUDU UTK PERKARA BANK SYARIYAH INDONESIA	BSI KC SIGLI	KPPN 000426 14-07-2021	TNP	2.685.200,00
557	401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	005	04	GIRO	1059240281	RPL 089 PDT MS BIREUEN UTK PERKARA	BSI KC BIREUEN	S-1851/WPB.01/KP.02/2020	TNP	11.402.002,00
558	401643	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON	005	04	GIRO	7778820202	RPL 089 PDT MS LHOKSUKON UTK PERKAR	BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU LHOKSUKON	S-1241/WPB.01/KP.02/2021 TANGGAL. 18 AGUSTUS 2021	TNP	43.491.400,00
559	401659	MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	005	04	GIRO	1059030287	RPL 122 PS MS TAKENGON UNTK PERKARA	BSI KC Takengon	S-356/WPB.01/KP.07/2021	TNP	17.377.055,00
560	401665	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE	005	04	GIRO	8778788713	RPL 001 PDT MS ACEH UNTUK PERKARA	BSI Cabang Lhokseumawe	S-1191/WBP.01 /KP.02/ 2021	TNP	18.423.000,00
561	401671	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	005	04	GIRO	1057600892	RPL MASYA IDI	BANK MANDIRI SYARIAH	KPPN S-381/ WPB.01/ KP.04/ 2021	TNP	3.037.000,00
562	401690	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	005	04	GIRO	1058133619	RPL 002 PDT MS LANGSA	BSI	DJPBN S-289/ WPB.01/ 2021 26-07-2021	TNP	14.205.000,00
563	401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	005	04	GIRO	1058691646	RPL 002 MS KUALASIMPANG UTK PDT	BSI Cabang Kuala Simpang	S-245/ WPB.01/ KP.04/ 2021	TNP	3.133.400,00
564	401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	005	04	GIRO	1055498508	RPL 105 PDT MS BKJ UNTUK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA KCP BLANGKEJEREN	S-172/WPB.01/KP.06/2021 9 July 2021	TNP	134.500,00
565	401716	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE	005	04	GIRO	1053539374	RPL 105 MS KUTACANE UTK PDT BIAYA PKR	BSI	Nomor : S-199/ WPB.01/ KP.06/ 2021	TNP	730.500,00
566	401722	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	005	04	GIRO	1055069332	RPL 003 MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUILABOH BANK SYARIAH INDONESIA	BSI CAB MEULABOH	000085/ 03 05-07-2021	TNP	16.289.000,00
567	401731	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	005	04	GIRO	7147109371	RPL 003 PDT MS SINABANG	BANK SYARIAH INDONESIA	000020/003	TNP	997.600,00
568	401747	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	005	04	GIRO	7190819455	RPL 003 PDT MS CALANG UNTUK BP	BANK SYARIAH INDONESIA	S-436/WPB.01/KP.003/2019	TNP	678.800,00
569	401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	005	04	GIRO	7124819169	RPL 074 PDT MS SINGKIL BY PERKARA	BANK SYAR'IYAH INDONESIA	S-680/ WPB.01/ KP.074/2018	TNP	567.500,00
570	401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	005	04	GIRO	1058797428	RPL 074 MS TAPTU 401762 PRKR	BANK SYARIAH INDONESIA	000074/074 8 July 2021	TNP	2.356.500,00
571	402608	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	005	04	GIRO	1055996101	RPL 001 PDT MS JANTHO UTK PERKARA	Bank Syariah Indonesia	000452/ 001	TNP	6.945.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
572	403427	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	005	04	GIRO	7272751708	RPL003PDT MS SK MAKMUE UTK PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	5.059.500,00
573	403426	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	005	04	GIRO	9741531200	RPL 074 PDT MS BLANGPIDIE UTK BIAYA PERKARA	BSI Cabang Blangpidie	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	3.038.000,00
574	403428	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	005	04	GIRO	7126049832	RPL 074 PDT MS SSLAM UTK BY PRKARA	BSI KCP KOTA SUBULUSSALAM	S-29/WBP.01/KP.05/2019	TNP	1.906.500,00
575	690108	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG	005	04	GIRO	7777791928	RPL 122 PDT MS STR UNTUK PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-577/WPB.01/KP.07/	TNP	2.687.000,00
576	401778	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	005	04	GIRO	63501000210307	RPL 123 PTA MEDAN UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3004/ MK.5/ 2015	TNP	105.000,00
577	401784	PENGADILAN AGAMA BINJAI	005	04	GIRO	8777777743	RPL 123 PDT PA BNJ UTK BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-304/ KPN.0202/2024	TNP	15.098.500,00
578	401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	005	04	GIRO	14401001201300	RPL 119 PDT PA KABANJAHE UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3361/ MK.5/ 2015	TNP	2.000.000,00
579	401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	005	04	GIRO	7779977123	RPL 123 PA MDN UTK PDT BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-136/ WPB.02/ KP.02/ 2019	TNP	14.327.428.847,00
580	401813	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	005	04	GIRO	7124815848	RPL 075 PDT PA RAP UTK BIAYA PERKARA	Bank Syari'ah Mandiri Cabang Rantauprapat	S-1007/WPB.02/KP.0803/2018	TNP	119.041.000,00
581	401829	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	005	04	GIRO	7212425871	RPL 076 PDT PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI UNTUK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1007/WPB.02/KP.0803/2019	TNP	11.045.320,00
582	401829	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	005	04	GIRO	7212405781	RPL 076 PS PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI UNTUK PNBP	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1007/WPB.02/KP.0803/2020	TNP	0,00
583	401835	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	005	04	GIRO	7757557748	RPL 124 PDT PA TEBING TINGGI UNTUK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-527/WPB.02/KP.03/2021	TNP	752.526,00
584	401841	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	005	04	GIRO	019401000575303	RPL 119 PDT PA SIDIKALANG UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2009/MK.5/2015	TNP	616.650,00
585	401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	005	04	GIRO	7267479776	RPL 005 PDT PA P SIANTAR	BANK SYARIAH INDONESIA	S-205/KPN.0204/2024	TNP	6.048.800,00
586	401866	PENGADILAN AGAMA BALIGE	005	04	GIRO	031401000641300	RPL 125 PDT PA BALIGE UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG BALIGE	S-6294/ MK.5/ 2015	TNP	15.696.500,00
587	401872	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	005	04	GIRO	1054018726	RPL 106 PDT PA SIBOLGA UNTUK BIAYA	BSI KC SIBOLGA	S-6294/ MK.5/ 2016	TNP	0,00
588	401881	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	005	04	GIRO	013501001984307	RPL 006 PDT PA PSP UNTUK PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3171/ MK.5/ 2015	TNP	7.902.500,00
589	401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	005	04	GIRO	017601002493305	RPL 007 PDT PA GSITOLI UTK BIAYA PERKARA QQ	BANK RAKYAT INDONESIA	S-780/ KPN.0207/ 2024	TNP	0,00
590	402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	005	04	GIRO	7233554337	RPL 006 PDT PA SBH 402040 UNTUK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-418/KPN.0205/2023	TNP	4.994.000,00
591	403399	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	005	04	GIRO	66501000907301	RPL 124 PDT PA SEI RAMPAH UNTUK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-044/ WPB.02/ KP.03/ 2019	TNP	2.765.500,00
592	403062	PENGADILAN AGAMA KISARAN	005	04	GIRO	7777464676	RPL 076 PDT PA KISARAN UNTUK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-044/ WPB.02/ KP.03/ 2020	TNP	45.280.300,00
593	403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	005	04	GIRO	7412741271	RPL 124 PDT PA LUBUK PAKAM U BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-360 / WPB.02/ KP.03/ 2019	TNP	18.502.500,00
594	403084	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	005	04	GIRO	4403084048	RPL 005 PDT PA SIMALUNGUN	BANK SYARIAH INDONESIA	KPPN S-190/KPN.0204/2023	TNP	21.515.900,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
595	547683	PENGADILAN AGAMA STABAT	005	04	GIRO	8887887781	RPL 123 PS PA STABAT UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S - 379/ KPN.0202/ 2024	TNP	8.118.500,00
596	604745	PENGADILAN AGAMA PANDAN	005	04	GIRO	008501000565301	RPL 106 PA PANDAN UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-2350/ MK.5/ 2015	TNP	805.500,00
597	631980	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	005	04	GIRO	009901001688305	RPL 125 PDT PA TARUTUNG	BANK RAKYAT INDONESIA	S-644/ KPN.0211/ 2022	TNP	0,00
598	631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	005	04	GIRO	063701000372301	RPL 006 PDT PA PANYABUNGAN UNTUK PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-705/KPN.0205/2024	TNP	2.588.000,00
599	690112	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	005	04	GIRO	2001232323	RPL 006 PDT PA KOTA PSP UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-139/KPN.02.05/2023	TNP	1.442.213.943,00
600	401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	005	04	GIRO	5801001206301	RPL 010 PDT PTA PDG UTK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Padang	S-3674/MK.5/2015 6 May 2015	TNP	0,00
601	401917	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	005	04	GIRO	032101001856307	RPL 010 PDT PA PARIAMAN UTK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk Cabang Pariaman	2346/WPB.03/KP.010/2018 4 December 2018	TNP	9.670.000,00
602	401923	PENGADILAN AGAMA SOLOK	005	04	GIRO	7058500024	RPL 090 PDT PA SOLOK UTK BIAYA PERKARA	Bank Syari'ah Mandiri Cab. Solok	S-4208/MK.5/2015 20 May 2015	TNP	17.233.900,00
603	401932	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	005	04	GIRO	553401000141307	RPL 077 PDT PA SAWAHLUNTO UTK BIAYA PERKARA	BRI Unit Sawahlunto	S-3364/MK.5/2015 tanggal 23 April 2015 23 April 2015	TNP	1.013.500,00
604	403400	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	005	04	GIRO	061601001340307	RPL 077 PA PULAU PUNJUNG UTK BY PERKARA	BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PULAU PUNJUNG	S-17/WPB.03/KP.0503/2019 8 January 2019	TNP	18.891.500,00
605	401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	005	04	GIRO	7090382537	RPL 011 PDT PA BTS UTK B PERKARA	BSM Cab. Batusangkar	S-7213/MK.5/2015 26 August 2015	TNP	1.039.500,00
606	401954	PENGADILAN AGAMA PADANG	005	04	GIRO	7124315136	RPL 010 PDT PA PADANG UTK BIAYA PERKARA	BSM Cabang Ulak Karang	S-2052/WPB.03/KP.010/2018 1 November 2018	TNP	130.703.000,00
607	401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	005	04	GIRO	23101000776305	RPL 011 PDT PA PDG PJG UTK B PERKARA	BRI Cab. Padang Panjang	S-9722/MK.5/2015 17 November 2015	TNP	10.004.000,00
608	401979	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	005	04	GIRO	027101001038304	RPL 077 PDT PA SIJUNJUNG UNTUK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-264/WPB.03/KP.05/2020 4 June 2020	TNP	8.247.000,00
609	401985	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	005	04	GIRO	554301000114309	RPL 090 PDT PA KOTOBARU UTK BIAYA PERKARA	BRI Unit Koto Baru	S.5677/MK.5/2015 3 July 2015	TNP	903.600,00
610	401991	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	005	04	GIRO	554501000170303	RPL 090 PDT PA MUARA LABUH UTK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Solok Unit Muara Labuh	S.3338/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	7.600.000,00
611	402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	005	04	GIRO	1421421427	RPL 142 PDT PA PAINAN UTK BIAYA PERKARA	BSM Cab. Painan	S-3349/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	24.136.400,00
612	402011	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	005	04	GIRO	1501000528308	RPL 011 PDT PA BKT UTK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Bukittinggi	S-3710/MK.5/2015 6 May 2015	TNP	43.191.458,00
613	402030	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	005	04	GIRO	26901000635306	RPL 091 PDT PA LUBUK SIKAPING UNTUK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Lubuk Sikaping	S-4537/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	5.396.500,00
614	402036	PENGADILAN AGAMA TALU	005	04	GIRO	061501000947306	RPL 091 PDT PA TALU UNTUK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Simpang Empat	S-816/WPB.03/KP.091/2018 16 November 2018	TNP	67.000.000,00
615	402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	005	04	GIRO	001501001692304	RPL 011 PDT PA MANINJAU UNTUK B PERKARA	BRI Cabang Bukittinggi	S-282/WPB.03/KP.0204/2018 19 February 2018	TNP	571.000,00
616	402051	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	005	04	GIRO	025601001499300	RPL 011 PDT PA PYK UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Payakumbuh	S-631/WPB.03/KP.0204/2020 25 June 2020	TNP	50.543.845,00
617	402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	005	04	GIRO	25601001095300	RPL 011 PDT PATANJUNG PATI UTK BIAYA PERKARA	BRI Cab. Payakumbuh	S-3347/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	3.084.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
618	402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	005	04	GIRO	066701000526307	RPL 011 PDT PA LB UTK BIAYA PERKARA	BRI KCP LUBUK BASUNG	S-1225/WPB.03/KP.0204/2018 16 October 2018	TNP	2.299.000,00
619	403402	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	005	04	GIRO	7291020188	RPL 008 PDT PA SIAK UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2781/MK.5/2015	TNP	29.835.000,00
620	402623	PENGADILAN AGAMA DUMAI	005	04	GIRO	7009037734	RPL 120 PDT PA DUMAI UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2781/MK.5/2015	TNP	18.167.157,00
621	402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	005	04	GIRO	2018120869	RPL 008 PDT PA BKN UTK BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2781/MK.5/2015	TNP	95.527.500,00
622	402082	PENGADILAN AGAMA RENGAT	005	04	GIRO	7139649359	RPL 092 PDT PA RENGAT	BANK SYARIAH INDONESIA	S-148/WPB.04/KP.03/2020	TNP	5.620.515,00
623	402971	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	005	04	GIRO	017001002531303	RPL 008 PTA PEKANBARU	BANK RAKYAT INDONESIA	S-5021/MK.5/2015	TNP	300.000,00
624	402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	005	04	GIRO	7085622999	RPL 120 PABENGKALIS UTKBIAYAPERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2637/MK.5/2015	TNP	20.850.500,00
625	402124	PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN	005	04	GIRO	7085830095	RPL 008 PA P. PENGARAIAN BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-2653/ MK.5/ 2015	TNP	15.206.000,00
626	402133	PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG	005	04	GIRO	7232291111	RPL 120 PA SLP UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-445/KPN.0402/2023	TNP	0,00
627	403403	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	005	04	GIRO	1042099313	RPL 092 PDT PATLK UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-04/ WPB.04/ KP.03.03/ 2019	TNP	10.069.000,00
628	402098	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	005	04	GIRO	7778006008	RPL 092 PDT PA.TEMBILAHAN UNTUK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-679/WPB.04/KP.0303/2018	TNP	33.735.540,00
629	402073	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	005	04	GIRO	1037321261	RPL 008 PDT PA PKU UNTUK BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-679/WPB.04/KP.0303/2019	TNP	179.454.929,94
630	632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	005	04	GIRO	7148394274	RPL 120 PA UJUNG TANJUNG UTK	BANK SYARIAH INDONESIA	S-679/WPB.04/KP.0303/2020	TNP	177.144.250,00
631	632000	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	005	04	VA	6417066410	RPL 008 PDT PA PANGKER UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-679/WPB.04/KP.0303/2021	TNP	45.518.500,00
632	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	005	04	GIRO	002001004630304	RPL 012 PENGADILAN AGAMA JAMBI	PT. BRI CABANG Jambi	S-135/WPB.06/KP.012/2018 19 January 2018	TNP	227.070.470,00
633	402191	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	005	04	GIRO	016001003116307	RPL 078 PA MUARA BUNGO UTK BIAYA PERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Muara Bungo	S-3343/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	9.408.500,00
634	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	005	04	GIRO	17901000954307	RPL 143 PDT PA KT UTK DANA TITIPAN	PT. BRI (Persero) Cabang Kuala Tungkal	S-3344/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	11.414.970,00
635	402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	005	04	GIRO	7153314874	RPL 159 PA BANGKO UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	S-194/WPB.06/KP.02/2021 4 May 2021	TNP	5.390.500,00
636	402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	005	04	GIRO	2023013013	RPL 013 PA SUNGAI PENUH BY PERKARA	BSI	S-196/KPN.0603/2023 10 August 2023	TNP	20.097.500,00
637	403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	005	04	GIRO	031501001827301	RPL 012 PA MA BULIAN UNTUK BIAYA PERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Muara Bulian	S-141/WPB.06/KP.0104/2018 22 January 2018	TNP	91.500,00
638	547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	005	04	GIRO	0000102601300000127	RPL 012 PTA JAMBI	Bank Tabungan Negara	S-4805/MK.05/2015 8 June 2015	TNP	600.000,00
639	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	005	04	GIRO	60401000738302	RPL 159 PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BANK BRI CAB SAROLANGUN	W5-A7/377/KU.00/V/2015 8 May 2015	TNP	10.935.500,00
640	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	005	04	GIRO	220701000121305	RPL 143 PA MS UNTUK BIAYA PERKARA	BRI KCP RANTAU RASAU	S-3353/MK.5/2015 23 April 2015	TNP	10.446.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
641	652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	005	04	GIRO	229201000484302	RPL 078 PDT PA TEBO UTK BY PERKARA	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.	S-467/KPN.0604/2024 31 Oktober 2024	TNP	15.690.500,00
642	652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	005	04	GIRO	227701000057303	RPL 012 PENGADILAN AGAMA SENGETI UNTUK BIAYA PERKRA	BRI Unit Sengeti	S-2378/WPB.06/KP.0104/2018 29 November 2018	TNP	17.849.500,00
643	652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	005	04	GIRO	9100500977	RPL 012 PDT PA SENGETI UTK PERKARA	BSI	S-2378/WPB.06/KP.0104/2018 29 November 2018	TNP	0,00
644	402237	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	005	04	GIRO	5901005137304	RPL 014 PTA PALEMBANG UTK PDT BY PERKARA	PT BRI Cabang A. Rivai Palembang	S-5019/ MK.5/ 2015 12-06-2015	TNP	0,00
645	402243	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	005	04	GIRO	5901004252305	RPL 014 PDT PA PLG UTK DANA PERKARA	PT BRI Cabang A. Rivai Palembang	KPPN S-1906/WPB.07/KP.01/2021	TNP	44.102.876,95
646	402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	005	04	GIRO	1211294415	RPL 109 PA BTA UNTUK PDT BIAYA PERK	BSI KC Baturaja Rahman Hamidi	S-353/WPB.07/KP.02/2021	TNP	1.095.500,00
647	402237	PENGADILAN AGAMA LAHAT	005	04	GIRO	7125002026	RPL 144 PA LAHAT	BSI	1177/WPB.07/KP.06/2020	TNP	10.781.500,00
648	402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	005	04	GIRO	7762688070	RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK BSI CAB. MUARA ENIM	S-558/ WPB.07/ KP.03/ 2021	TNP	38.566.700,00
649	402274	PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG	005	04	GIRO	3001001855306	RPL 014 PDT PANJAR PERKARA PA KAYUAGUNG	BRI CABANG KAYUAGUNG	KPPN S-158/ WPB.07/ KP.01/ 2019 30-01-2019	TNP	37.659.700,00
650	402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	005	04	GIRO	7169610112	RPL 070 PDT BIAYA PERKARA PA LUBUK	PT BSI Cabang Lubuk Linggau	S-5019/ MK.5/ 2015 12-06-2015	TNP	17.322.500,00
651	402639	PENGADILAN AGAMA SEKAYU KELAS IB	005	04	GIRO	7701212236	RPL 160 PDT PA SEKAYU UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	KPPN S-446/KPN.0704/2023, TGL 15-12-2023	TNP	55.080.500,00
652	403408	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	005	04	GIRO	7219747505	RPL 160 PDT PA PB UNTUK BY PERKARA	451-BANK SYARIAH INDONESIA	S-414/KPN.0704/2022	TNP	9.869.000,00
653	403409	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	005	04	GIRO	7932152640	RPL 109 PDT PA MARTAPURA UTK BIAYA PERKARA	BSI Cabang Pembantu Martapura	S-24/WPB.07/KP.0204/2019	TNP	2.880.500,00
654	403410	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	005	04	GIRO	561201000177302	RPL 109 PDT PA MUARADUA UTK PDT BIYA PERKARA	BRI	S-34/WPB.07/KP.0204/2019	TNP	7.944.500,00
655	403411	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	005	04	GIRO	13801000781300	RPL 114 PA PAGAR ALAM UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Pagar Alam	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	785.000,00
656	403412	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	005	04	GIRO	7132171321	RPL 014 PDT PERKARA PA PRABU	Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih	S-0014/WPB.07/KP.01/2019	TNP	2.972.500,00
657	401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	005	04	GIRO	7220557574	RPL 017 PDT PA GEDONG TATAAN UNTUK TITIPAN PERKARA	BSI	S-136/KPN.0801/2023/017 12 January 2023	TNP	27.609.500,00
658	401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	005	04	GIRO	6444440005	RPL 017 PDT PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	BANK SYARIAH MANDIRI	S-400/WPB.08/KP.0104/2019 28 January 2019	TNP	17.219.000,00
659	401952	PENGADILAN AGAMA MESUJI	005	04	VA	7235279996	RPL 116 PSPA MESUJI UTKBIAYAPE	BSI Cabang Unit 2	S-430/KPN.0803/2023 9 May 2023	TNP	3.667.500,00
660	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	005	04	GIRO	1042113316	RPL 116 PDT PKR PA TUBA TENGAH	BRISyari'ah	S-021/WPB.08/KP.0304/2019 9 January 2019	Non TNP	13.853.000,00
661	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	005	04	GIRO	7295717647	RPL 126 PDT PA SUKADANA UNTUK PANJA	Bank Syariah Indonesia	S-643/ KPN.0802 /2024 16 December 2024	TNP	112.801.394,00
662	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	005	04	GIRO	4040565658	RPL 017 PDT PA TJ KRG BIAYAPKR	Bank Syariah Indonesia	S-1632/WPB.08/KP.01/2020 21 July 2020	TNP	52.187.500,00
663	402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	005	04	GIRO	1140024938295	RPL 145 PA KRUI UNTUK PENAMPUNGAN DANA TITIPAN	MANDIRI	S-152/KPN.0804/2022 22 June 2022	Non TNP	10.839.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
664	402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	005	04	GIRO	1404196002	RPL 116 PA KOTABUMI	SYARI'AH MANDIRI CABANG KOTABUMI	S-6087/MK/2016 1 August 2016	TNP	44.708.000,00
665	402355	PENGADILAN AGAMA METRO	005	04	GIRO	7227282066	RPL 126 PDT PA METRO UT BY PKR	BSI	S-93/KPN.0802/2023 1 February 2023	TNP	19.585.500,00
666	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	005	04	GIRO	050301000690308	RPL 017 PA KALIANDA UNTUK PENAMPUNGAN DANA PIHAK KE TIGA	PT. BRI CABANG KALIANDA	S-5816/MK.5/2015 8 July 2015	TNP	46.365.000,00
667	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	005	04	GIRO	009801002445308	RPL 017 PTA BANDAR LAMPUNG UTK PDT	BRI Cabang T. Karang	S-6183/MK.5/2015 24 July 2015	TNP	0,00
668	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	005	04	GIRO	7240880096	RPL 11 PDT PA TUBA UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-80/WPB.08/KP.03/2020 17 January 2020	TNP	0,00
669	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	005	04	GIRO	211901000691303	RPL 017 PDT PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	BRI KCP KOTAAGUNG	S-790a/WPB.08/KP.0104/2020 12 March 2020	TNP	13.295.000,00
670	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	005	04	GIRO	7142693407	RPL 126 PDT PA GUNUNG SUGIH UNTUK PANJAR BIAYA PERKARA	Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Jaya	S-406/WPB.08/KP.02/2020 2 July 2020	TNP	147.377.000,00
671	652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	005	04	GIRO	219101001083301	RPL 116 PDT PA BLAMBANGAN UMPU	BRI	000082 25 May 2023	TNP	16.864.000,00
672	652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	005	04	GIRO	7295743117	RPL 116 PDT PA BLAM UMPU	BSI	S-833/ KPN.0803/ 2024	TNP	0,00
673	402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	005	04	GIRO	007101001831308	RPL 042 PDT PTA PONTIANAK UTK PERKARA	BRI	S-2661/MK.5/2015	TNP	0,00
674	403422	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	005	04	GIRO	7125876581	RPL 093 PDT PA SINGKAWANG UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-023/ WPB.17/ KP.02/ 2019	TNP	6.685.500,00
675	403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	005	04	GIRO	7910020034	RPL 079 PDT PA NANGA PINOH	BSI	S-670/WPB.17/KP.05/2018	TNP	109.500,00
676	403425	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	005	04	GIRO	2024020242	RPL 042 PDT PA SEI.RAYA UTK PERKARA	BSI	S-1912/KPN.1701 /2023 Tanggal 19 Desember 2023	TNP	39.732.500,00
677	402362	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	005	04	GIRO	3456565653	RPL 042 PDT PA PTK UTK PERKARA	BSI	S-4518/WPB.17/ KP.C104/2018	TNP	201.348.400,00
678	402471	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	005	04	GIRO	2828000007	RPL 093 PA SAMBAS UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-3540/MK.5/2015 29 April 2015	TNP	35.431.000,00
679	402387	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	005	04	GIRO	7711002221	RPL 094 PDT PA KTP UTK PERKARA	BSI	S-155/ KPN.1704/ 2023	TN P	0,00
680	402383	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	005	04	GIRO	032201000699308	RPL 167 PDT PA SANGGAU UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-489/KPN.1703/2024	TNP	1.073.500,00
681	402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	005	04	GIRO	7125039876	RPL 079 PDT PA SINTANG BY PERKARA	BSI	20/ 1586-3/ 244	TNP	4.768.500,00
682	402413	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	005	04	GIRO	30501001398309	RPL 117 PDT PA PUTUSSIBAU UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-4974/MK.5/2015	TNP	0,00
683	402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	005	04	GIRO	8880000056	RPL 042 PDT PA MPW UTK PERKARA	BSI	S-1242/KPN.1701/2022	TNP	1.724.700,00
684	632040	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	005	04	GIRO	383245682	RPL 093 PA BENGKAYANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI	S-4312/MK.5/2015	TNP	142.500,00
685	402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	005	04	GIRO	018001000418308	RPL 043 PDT PA KUALA KAPUAS	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	4.104.000,00
686	402475	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	005	04	GIRO	7210006618	RPL 044 PENGADILAN AGAMA SAMPIT	BANK SYARIAH INDONESIA	S-448/KPN.1804/2022	TNP	14.924.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
687	401982	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	005	04	GIRO	105301000426303	RPL 043 PDT PA KUALA KURUN UTK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-2633/ WPB.18/ KP.0104/ 2018	TNP	0,00
688	402422	PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA	005	04	GIRO	24301002766307	RPL 043 PS PA PKY UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-2533/WPB.18/KP.0104/2029	TNP	13.832.000,00
689	402444	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	005	04	GIRO	7231914425	RPL 080 PDT PA MUARA TEWEH	BANK SYARIAH INDONESIA	S-251/ KPN.1902/ 2023	TNP	2.314.000,00
690	402438	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	005	04	GIRO	454601000001307	RPL 102 PA PANGKALAN BUN UTK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-3006/MK.5/2015	TNP	36.248.000,00
691	402453	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	005	04	GIRO	30301000457306	RPL 080 PA BUNTOK UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-5011/ MK.5/ 2015	TNP	165.841.944,00
692	401981	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	005	04	GIRO	1590004659693	RPL 043 PDT PA PULANG PISAU UTK BIAYA PERKARA	BANK MANDIRI	S-1064/WPB.18/KP.01/2020	TNP	0,00
693	401976	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	005	04	GIRO	1590003377933	RPL 044 PDT PA KUALA PEMBUANG UNTUK BIAYA PERKARA	Bank Mandiri	S-075/ WPB.18/ KP.044/ 2019	TNP	0,00
694	401874	PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG	005	04	GIRO	30301001144304	RPL 080 PDT PA TAMIANG LAYANG UNTUK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-077/ WPB.18/ KP.0204/ 2019	TNP	0,00
695	401977	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	005	04	GIRO	206001000371302	RPL 044 PDT PA KASONGAN UNTUK BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-074/ WPB.18/ KP.044/ 2019	TNP	875.000,00
696	401974	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	005	04	GIRO	223201000268300	RPL 102 PDT PA NANGA BULIK UNTUK BEA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-168/WPB.18/KP.03/2019	TNP	1.025.000,00
697	401975	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	005	04	GIRO	204701000640305	RPL 102 PDT PA SUKAMARA UTK BEA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-463/KPN.1803/2022	TNP	0,00
698	402990	PTA PALANGKA RAYA	005	04	GIRO	216801000253300	RPL 043 PDT PTA PKY	PT BANK RAKYAT INDONESIA	S-2701/WPB.18/KP.0104/2018	TNP	0,00
699	402450	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	005	04	GIRO	000301001232307	RPL 045 PDT PTA BANJARMASIN	BRI Cab. Banjarmasin	s-6667/MK.05/2015	TNP	0,00
700	632044	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	005	04	GIRO	024201001620300	RPL 045 PDT PA BANJARBARU	BRI KC. Martapura	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	72.613.500,00
701	402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	005	04	GIRO	003101000790303	RPL 110 PDT BIAYA PERKARA PA KANDANGAN	BRI	S-1362/WPB.19/KP.11	TNP	0,00
702	402541	PENGADILAN AGAMA BARABAI	005	04	GIRO	014301000723305	RPL 110 PDT BIAYA PERKARA PA BARABAI KELAS IB	BRI BARABAI	S-1357/WPB.19/KP.110/2018	TNP	3.995.000,00
703	309048	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	005	04	GIRO	024401000506307	RPL 045 PDT PA MARABAHAN UTK	BRI CABANG MARABAHAN	S-5013/MK.05/2013	TNP	2.239.000,00
704	309050	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	005	04	GIRO	451901000044308	RPL 081 PA KOTABARU UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-8493/ MK.5/ 2015	TNP	68.802.500,00
705	690140	PENGADILAN AGAMA BATULICIN	005	04	GIRO	7738888882	RPL 081 PA BLCN UTK PDT BIAYA PERKARA	BSI	S-356/WPB.19/KP.05/2021	TNP	5.461.500,00
706	402557	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	005	04	GIRO	014701000892304	RPL 151 PA AMUNTAI UTK BIAYA PERKARA	BANK BRI CABANG AMUNTAI	S-3354/ MK.5/ 2015	TNP	490.500,00
707	402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	005	04	GIRO	451601000134305	RPL 110 PDT BIAYA PERKARA	BRI UNIT NEGARA	S-1343/WPB.19/KP.110/2018	TNP	0,00
708	402501	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	005	04	GIRO	5545004500	RPL 045 PDT PA BJM UNTUK BY PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-1639/WPB.19/ KP.01/2021	TNP	50.615.600,00
709	307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	005	04	GIRO	23901000635307	RPL 168 PDT PA PLH UNTUK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Pelaihari	S-2669/MK.5/2015	TNP	575.000,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
710	402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	005	04	GIRO	21001001051300	RPL 110 PDT BIAYA PERKARA PA RANTAU	BRI Cabang Rantau	S-1356WPB.19/KP.110/2018	TNP	2.995.300,00
711	402563	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	005	04	GIRO	024901001185308	RPL 151 PDT PENGADILAN AGAMA TANJUNG UNTUK BIAYA PANJAR PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - BRI CABANG TANJUNG	S-1010/WPB.19/KP.0204/2018	TNP	893.000,00
712	402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	005	04	GIRO	024201001677307	RPL 045 PDT PA MARTAPURA UNTUK BIAYA PERKARA	BRI CABANG MARTAPURA	S-1742/WPB.19/KP.01/2021	TNP	369.102.200,00
713	307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	005	04	GIRO	6452886970	RPL046 PDT PA SMD UTK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Juanda	S-1183/WPB.20/KP.01/2021 2 August 2021	TNP	82.872.000,00
714	307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	005	04	GIRO	21401001337304	RPL 047 PA TGT PDT UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Tanah Grogot	S-9719/MK.5/2015 17 November 2015	TNP	794.000,00
715	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	005	04	GIRO	5555550474	RPL 047 PA BPN PDT UTK BIAYAPERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S.4522/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	127.792.100,00
716	307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	005	04	GIRO	21301000871301	RPL 153 PA TANJUNG REDEB UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	S-4819/MK.5/2015 8 June 2015	TNP	15.739.300,00
717	401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	005	04	GIRO	2210201877	RPL 047 PDT PENGADILAN AGAMA PENAJAM UK DANA TITIPAN	MANDIRI SYARIAH	S-023/WPB.20/KP.0204/2019 8 January 2019	TNP	706.500,00
718	401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	005	04	GIRO	7755566653	RPL 045 PS PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	MANDRI SYARIAH	S-2631/WPB.20/KP.0104/2019 9 November 2018	TNP	503.000,00
719	402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	005	04	GIRO	8201003170307	RPL 046 PDT PTA SAMARINDA UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Samarinda	S-7217/MK.5/2015 26 August 2015	TNP	0,00
720	652097	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	005	04	GIRO	7293841677	RPL 046 PDT PA SANGGATA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC SANGATTA	S-6816/MK.5/2015 13 August 2004	TNP	12.258.500,00
721	652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	005	04	GIRO	33301001828305	RPL 046 PA PDT BONTANG UTK BY PERKARA	BRI	S-6816/MK.5/2015 13 August 2005	TNP	824.700,00
722	307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	005	04	GIRO	2233090525	RPL 046 PDT PA TGR UNTUK BY PERKARA	BSI	S-6816/MK.5/2015 13 August 2006	TNP	939.652.042,00
723	307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	005	04	GIRO	005401002556305	RPL 049 PA MANADO UTK PDT BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado	S-6893/MK.5/2016 30 August 2016	TNP	1.146.000,00
724	307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	005	04	GIRO	003601001518306	RPL 158 PDT PA KTG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-657/WPB.29/KP.158/2018 5 December 2018	TNP	0,00
725	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	005	04	GIRO	22601000326301	RPL 083 PA TAHUNA UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG TAHUNA	S-4113/MK.5/2015 18 May 2015	TNP	0,00
726	401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	005	04	GIRO	003601003120303	RPL 158 PA LOLAK UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-3/KPN.3002/2004 4 January 2024	TNP	23.124.750,00
727	401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	005	04	GIRO	514301000150303	RPL 158 PDT PA BOLAANG UKI	BRI	S-200/WPB.30/KP.158/2019 11 April 2019	TNP	26.223.500,00
728	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	005	04	GIRO	773401000067309	158 PDT PA BOROKO UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-231/WPB.30/KP.1582020 8 July 2020	TNP	69.500,00
729	401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	005	04	GIRO	003601001519302	RPL 158 PDT PA TUTUYAN	BRI	S-697/WPB.29/KP.158/2018 10 December 2018	TNP	1.130.000,00
730	402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	005	04	GIRO	005401002383304	RPL 049 PTA MANADO	BRI Cab. MANADO	S-4515/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	0,00
731	402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	005	04	GIRO	23701000423304	RPL 049 PS PA TONDANO UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-4243/MK.5/2015 20 May 2015	TNP	0,00
732	604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	005	04	GIRO	016801000231304	RPL 179 PA BITUNG UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Bitung	s-4232/MK.5/2015 30 May 2015	TNP	0,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
733	682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	005	04	GIRO	105401000117306	RPL O49 PA AMURANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4200/MK.5/2015 20 May 2015	TNP	0,00
734	307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	005	04	GIRO	7193357606	RPL 051 PALU UTK PDT BIAYA PERKARA (1014)	BANK SYARIAH INDONESIA	S-770/KPN.2701/2022 18 March 2022	TNP	21.024.700,00
735	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	005	04	GIRO	022701000569301	RPL : 082 PA TOLITOLI	BRI TOLITOLI	KPPN No. S-8412/MK.5/2015 21 October 2015	TNP	3.756.000,00
736	307292	PENGADILAN AGAMA POSO	005	04	GIRO	7124814361	RPL 052 PDT PA POSO UTK PERKARA	PT. BANK MANDIRI SYARIAH KC. POSO	S-1365/WPB.27/KP.02/2018 3 December 2018	TNP	0,00
737	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	005	04	GIRO	16701000749303	RPL 053 PA LUWUK UTK PDT	PT. BRI Persero Cab. Luwuk	S-6308/MK.5/2015 28 July 2015	TNP	166.100.189,00
738	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	005	04	GIRO	7788994405	RPL 052 PDT PA AMPANA UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S_039/WPB.27/KP.02/2019 7 January 2019	TNP	8.602.000,00
739	576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	005	04	GIRO	6001001368308	RPL 051 PTA PALU UTK PDT PERKARA	BRI Cab. Palu	S-5010/MK.5/2015 12 June 2015	TNP	0,00
740	604765	PENGADILAN AGAMA DONGGALA	005	04	GIRO	518201000066308	RPL 051 PDT PA DONGGALA UNTUK BIAYA PERKARA	BRI UNIT DONGGALA	S-405/WPB.27/KP.0104/2018 19 February 2018	TNP	2.455.400,00
741	652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	005	04	GIRO	105701000008305	RPL 082 PA BUOL UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4238/MK.5/2015 20 May 2015	TNP	0,00
742	652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	005	04	GIRO	4000112238	RPL 052 PA BUNGKU UTK PDT	BSI KCP MOROWALI	S-743/WPB.27/KP.02/2021 14 December 2021	TNP	0,00
743	652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	005	04	GIRO	064701000406307	RPL 053 PDT PA BANGGAI UTK BIAYA PERKARA	PT. BRI (Persero) KCP Banggai Laut	S-4408/MK.5/2015 28 May 2015	TNP	0,00
744	682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	005	04	GIRO	7199991005	RPL 051 PDT PA PARIGI BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1206/KPN.2701/2022 17 May 2022	TNP	1.135.000,00
745	309078	PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG	005	04	GIRO	11801000351303	RPL 055 PA WATANSOPPENG UTK PDT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	BRI	DJPBN S-5828/ MK.5/2015 / 8 Juli 2015	TNP	21.683.500,00
746	309083	PENGADILAN AGAMA PARE-PARE	005	04	GIRO	6401000894302	RPL 057 PDT PA PAREPARE UTK BIAYA PERKARA	BRI	Menkeu S-6073/MK.5/2015/15 Juli 2015	TNP	2.332.500,00
747	309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	005	04	GIRO	11101002396301	RPL 055 PDT PA BONE UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-5823/MK.5/2015 8 July 2015	TNP	113.044.500,00
748	309079	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	005	04	VA	024001000352304	RPL 056 PENGADILAN AGAMA BANTAENG	BRI	S-6887/MK.5/2015	TNP	10.702.000,00
749	632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	005	04	GIRO	064101001057301	RPL 058 PDT PA MASAMBA UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-266/ WPB.25/ KP.04/ 2021 31-05-2021	TNP	1.211.000,00
750	309069	PENGADILAN AGAMA MAROS	005	04	GIRO	1520032111847	RPL 136 PDT PA MAROS	BRI	KPPN 000317/ 136	TNP	24.298.000,00
751	309080	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	005	04	GIRO	25301223344305	RPL 056 PDT PA BLK UTK BIAYA PERKARA	BRI	000010/056	TNP	29.321.500,00
752	401987	PENGADILAN AGAMA BELOPA	005	04	GIRO	5555887778	RPL 058 PDT PENGADILAN AGAMA BELOPA UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	22.236.000,00
753	309089	PENGADILAN AGAMA MAKALE	005	04	GIRO	219001000118303	RPL 170 PDT PA MAKALE UTK BIAYA PERKARA BRI KCP TANA TORAJA	BRI	DJPBN S-5022/ MK.5/ 2015 12-06-2015	TNP	490.000,00
754	309084	PENGADILAN AGAMA PINRANG	005	04	GIRO	7186205396	RPL 057 PDT PA PINRANG UTK PERKARA	BSI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	3.270.739,00
755	309085	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	005	04	GIRO	7292783568	RPL 057 PDT PA ENREKANG UTK PERKARA	BSI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	3.376.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
756	309074	PENGADILAN AGAMA BARRU	005	04	GIRO	22201000668309	RPL 057 PA BARRU UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-4316/MK.5/2015	TNP	19.600.000,00
757	309075	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	005	04	GIRO	7777000785	RPL 136 PDT PA SUNGGUMINASA UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	S-1773/ WPB.25/ KP.0204/ 2018	TNP	71.996.000,00
758	309081	PENGADILAN AGAMA SINJAI	005	04	GIRO	025801001460309	RPL 177 PA SINJAI UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-8/WPB.25/KP.06/2019	TNP	2.596.000,00
759	309070	PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	005	04	GIRO	7777041147	RPL 136 PDT PENGADILAN AGAMA MKS	BSI	S-066/WPB.24/KP.0230/2018	TNP	363.971.801,78
760	309087	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG	005	04	GIRO	7229831997	RPL 057 PDT PA SIDRAP UNTUK PERKARA	BSI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	59.412.500,00
761	309068	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	005	04	GIRO	22301001455305	RPL 136 PDT PA PANGKAJENE BRI	BRI	KPPN S-20-WPB.25/ KP.02/ 2020	TNP	12.443.700,00
762	309073	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	005	04	GIRO	25001001066307	RPL 136 PA TAKALAR UTK PDT	BRI	S-5834/MK.5/2015	TNP	10.645.500,00
763	401989	PENGADILAN AGAMA MALILI	005	04	GIRO	1700015411634	RPL 058 PDT PA MALILI	MANDIRI	S-526/ KPN.2504/ 2024 17-10-2024	TNP	9.171.906,00
764	309067	PTA MAKASSAR	005	04	GIRO	064201001016309	RPL 136 PTA MKS	BRI	S-4511/MK.5.2015 tanggal 29 Mei 2023	TNP	900.000,00
765	309088	PENGADILAN AGAMA PALOPO	005	04	VA	1771771230	RPL 058 PDT PA PALOPO BANK SYARIAH INDONESIA	BSI	S-390/ WPB.25/ KP.04/ 2021	TNP	1.755.100,00
766	309082	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	005	04	GIRO	25701000938305	RPL 155 PA SELAYAR UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI/92812	S-6177/MK.5/2015	TNP	4.482.000,00
767	309071	PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	005	04	GIRO	7231719851	RPL 056 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	BSI/92311	S-157/KPN.2505/2023	TNP	33.260.000,00
768	307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	005	04	GIRO	19501001323305	RPL 055 PDT PENGADILAN AGAMA SENGKANG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI/906915	S-760/ WPB.25/ KP.0803/ 2018 26-11-2018	TNP	2.839.000,00
769	307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	005	04	GIRO	21601002161306	RPL 156 PDT PA KOLAKA UTK BIAYA PERKARA	BRI KC Kolaka	S-681/WPB.27/KP.04/2018 30 November 2018	TNP	5.697.000,00
770	307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	005	04	GIRO	021701001393302	RPL 157 PENGADILAN AGAMA RAHA	BANK RAKYAT INDONESIA	WPB.28/KP000041 26 July 2021	TNP	1.168.500,00
771	307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	005	04	GIRO	1033019153	RPL060 PA KENDARI PDT BIAYA PERKARA	BRI SYARIAH KC. KENDARI	S-6530/MK.5/2017 25 July 2017	TNP	21.496.000,00
772	307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	005	04	GIRO	7124753408	RPL 103 PDT PERKARA PA BAUBAU	Bank Syariah Indonesia	S-1038/WPB.028/KP.0203/2018 3 December 2018	TNP	5.017.500,00
773	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	005	04	GIRO	777157130	RPL 103 PDT PA WANGI WANGI	BNI CAPEM WAKATOBI	S-1010/WPB.28/KP.0203/2019 23 November 2018	TNP	196.000,00
774	401886	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	005	04	GIRO	214301000617304	RPL 156 PDT PA LASUSUA UTK BIAYA PERKARA	BRI KCP LASUSUA	S-8/WPB.28/KP.04/2019 2 January 2019	TNP	499.500,00
775	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	005	04	GIRO	183801000127305	RPL 060 PS PA RUMBIA UNTUK PANJAR PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA KCP RUMBIA	S-018/WPB.28/KP.0104/2019 7 January 2019	TNP	425.000,00
776	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	005	04	GIRO	341201000096302	RPL 060 PDT PTA KENDARI UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Unit Mandonga	S-3910/MK.5/2015 12 May 2015	TNP	0,00
777	604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	005	04	GIRO	064401000806301	RPL 060 PA UNAAHA UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA KCP KONAWE	S-197/WPB.28/KP.0104/2018 19 February 2018	TNP	1.038.646.246,00
778	682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	005	04	GIRO	183901000010308	RPL 060 PS PA ANDOOLO UTK PJR BIAYA PERKARA	BRI KANTOR KAS ANDOOLO	S-1155/WPB.28/KP.0104/2018 26 November 2018	TNP	0,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
779	682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	005	04	GIRO	32601001396307	RPL 103 PA PASARWAJO	BRI	S-072/WPB.27/KP.0230/2015 22 January 2015	TNP	20.884.500,00
780	402711	PTA AMBON	005	04	GIRO	1520014628107	RPL 061 PTA AMBON PDT	BANK MANDIRI	S-7307/ MK.5/ 2015	TNP	0,00
781	402003	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	005	04	GIRO	7126219867	RPL 173 UTK BY PERKARA PA HUNIMOA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1336/WPB.32/KP.0402/2018	TNP	433.500,60
782	402002	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	005	04	GIRO	497501000086304	RPL 173 PDT PA DATARAN HUNIPOPU	BANK RAKYAT INDONESIA	S-026/WPB.32/KP.0402/2019	TNP	0,00
783	309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	005	04	GIRO	28101001711303	RPL 084 PDT PA TUAL UNTUK PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	DJPBN s-338/MK.5/2017, Tanggal 05- 04-2017	TNP	0,00
784	309098	PENGADILAN AGAMA AMBON	005	04	VA	1815446475	RPL 061 PS PA AMBON UNTUK BIAYA PERKARA	BANK NEGARA INDONESIA	000188 tanggal 03 januari 2024	TNP	82.512.500,00
785	402006	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	005	04	GIRO	214401000433306	RPL 061 PS PENGADILAN AGAMA NAMLEA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-1939/WPB.32/KP.01/2018	TNP	1.276.000,00
786	309100	PENGADILAN AGAMA MASOHI	005	04	VA	497201000014305	RPL 173 PA MASOHI UTK PDT BIAYAPERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-7233/ MK.5/ 2015	TNP	107.000,00
787	526727	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	005	04	GIRO	7222683747	RPL 037 PDT PT AGAMA BALI UTK BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	001881	TNP	150.000,00
788	614732	PENGADILAN AGAMA BADUNG	005	04	GIRO	36801002059306	RPL 037 PA BADUNG UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-10860/MK.5/2015	TNP	38.632.000,00
789	402773	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	005	04	GIRO	024801001954305	RPL 037 PENGADILAN AGAMA GIANYAR UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-424/WPB.22/KP.01/2020	TNP	1.200.000,00
790	309105	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	005	04	GIRO	1038504734	RPL 037 PDT PA DENPASAR UNTUK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	21.334.700,00
791	402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	005	04	GIRO	12501001017301	RPL 132 PA NEGARA UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-6276/MK.5/2015	TNP	7.299.500,00
792	402727	PENGADILAN AGAMA BANGLI	005	04	GIRO	23301000260302	RPL 154 PA BANGLI UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-7289/MK.5/2015	TNP	0,00
793	402764	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	005	04	GIRO	011401000883304	RPL 154 PDT PA KLUNGKUNG UTK BY	BANK RAKYAT INDONESIA	S-6310/MK.5/2015	TNP	0,00
794	402758	PENGADILAN AGAMA TABANAN	005	04	GIRO	012401001218301	RPL 037 PA TABANAN UTK BIAYA PERKARA BRI	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3426/ MK.5/ 2015 27-04-2015	TNP	0,00
795	402742	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	005	04	GIRO	24101000469309	RPL 154 PDT PA KARANGASEM UNTUK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	S-3553/ MK.5/ 2015 Tanggal 29 April 2015 (29-04-2015)	TNP	0,00
796	309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	005	04	GIRO	8801001013309	RPL 132 PA SINGARAJA UTK PDT	BANK RAKYAT INDONESIA	S-6274/ MK.5/ 2015 tanggal 28-07-2015	TNP	119.500,00
797	402789	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	005	04	GIRO	9997444430	RPL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	BSI	S-1170/WPB.23/KP.01/2021	TNP	2.263.529,00
798	309107	PENGADILAN AGAMA MATARAM	005	04	GIRO	5550385556	RPL 038 PDT PA MATARAM UTK PERKARA	BSI	S-2055/WPB.23/KP.01/2021	TNP	65.069.000,00
799	309109	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	005	04	GIRO	8881017777	RPL101 PDT PA SBW UNTUK PERKARA	BSI	S-588/ KPN.2304/ 2023	TNP	43.395.100,00
800	309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	005	04	GIRO	019101000682302	RPL 038 PDT PA PRAYA UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-10298/MK.5/2015	TNP	331.928.600,65
801	309111	PENGADILAN AGAMA SELONG	005	04	GIRO	015701001274308	RPL 169 PA SELONG UTK PDT	BRI	S-6817/MK.5/2015	TNP	231.389.400,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
802	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	005	04	GIRO	7261759467	RPL 071 PS PA BIMA BIAYA PERKARA	BSI	000291/071	TNP	153.481.416,00
803	309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	005	04	GIRO	7711450300	RPL 071 PA DOMPU UNTUK BIAYA PERKARA	BSI	000236/071	TNP	8.008.100,00
804	614728	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	005	04	GIRO	776560367	RPL 038 PA GIRI MENANG UTK PDT	BNI	S-1906/WPB.23/KP.01/2018	TNP	97.692.711,00
805	690154	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	005	04	GIRO	390831212	RPL 101 PDT PA TALIWANG UTK PERKARA	BNI	S-6200/MK.5/2015	TNP	7.762.000,00
806	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	005	04	GIRO	0389496312	RPL 039 PTA KUPANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI CABANG KUPANG	S/5604/MK.5/2015	TNP	0,00
807	307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA	005	04	GIRO	003901002400304	RPL 039 PDT PA KUPANG UTK PERKARA	BRI CABANG KUPANG	S-7226/MK.5/2015	TNP	0,00
808	402820	PENGADILAN AGAMA SOE	005	04	GIRO	027701001231304	RPL 039 PA SOE UTK PDT	BRI CABANG SOE	S.8486/MK.5/2015	TNP	0,00
809	402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	005	04	GIRO	027601001043309	RPL 172 PA KEFAMENANU UTK PDT	BRI CABANG KEFAMENANU	NO. S-6266/MK.5/2015	TNP	0,00
810	402814	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	005	04	GIRO	395506946	RPL 172 PA ATAMBUA	BNI CABANG ATAMBUA	S-6809/MK.5/2025	TNP	0,00
811	307960	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	005	04	GIRO	027801000902304	RPL 039 PA KALABAHI UTK PDT	BRI CABANG KALABAHI	: S-7218/MK.5/2015	TNP	0,00
812	307981	PENGADILAN WAINGAPU	005	04	GIRO	014101001002306	RPL 041 PA WAINGAPU	BRI CABANG WAINGAPU	S-8769/MK.S/2015	TNP	0,00
813	307981	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	005	04	GIRO	023501001094304	RPL 041 WAIKABUBAK UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG WAIKABUBAK	S-4003/MK.5/2015	TNP	0,00
814	632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	005	04	GIRO	068501000365301	RPL 174 PA LEWOLEBA UTK PDT	BRI CABANG LEWOLEBA	S-6203/MK.5/2015	TNP	0,00
815	402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	005	04	GIRO	024601000916306	RPL 174 PA. LARANTUKA UTK PDT	BRI CABANG LARANTUKA	S-8496/MK.5/2015	TNP	0,00
816	402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	005	04	GIRO	11901001233308	RPL 040 PA MAUMERE UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG MAUMERE	S-6659/MK.5/2015	TNP	0,00
817	307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	005	04	GIRO	0385006548	RPL 040 PA ENDE UNTUK BIAYA PERKARA	BNI CABANG ENDE	S-4524/MK.5/2011	TNP	0,00
818	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	005	04	GIRO	027401001304309	RPL 111 PA BAJAWA UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG BAJAWA	S-2668/MK.5/2015	TNP	0,00
819	402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	005	04	GIRO	0190431084	RPL 111 PA RUTENG UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI	S-6204/MK.5/2015 24 July 2015	TNP	0,00
820	682282	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	005	04	GIRO	111201000253304	RPL 111 PA LABUAN BAJO UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG LABUAN BAJO	S-1975/MK.5/2015	TNP	238.000,00
821	400023	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	005	04	GIRO	762401000003304	RPL 063 PTA JAYAPURA UTK PDT	BRI Cabang Jayapura	S-6184/MK.5/2015	TNP	0,00
822	402877	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	005	04	GIRO	7253831795	RPL 063 PS PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1369/ KPN.3401/ 2023	TNP	15.276.327,00
823	402892	PENGADILAN AGAMA BIAK	005	04	GIRO	1540009807987	RPL 064 PA BIAK UTK BIAYA PERKARA	008-BANK MANDIRI	S-1505/MK.5/2015	TNP	0,00
824	402959	PENGADILAN AGAMA NABIRE	005	04	GIRO	068701000302301	RPL 085 PA NABIRE UTK PDT BIAYA PERKARA	002-BANK BRI	S-4309/ MK.5/ 2015 25-05-2015	TNP	0,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
825	402934	PENGADILAN AGAMA WAMENA	005	04	GIRO	031101001021307	RPL 113 PA WAMENA UTK PDT	002-BANK BRI	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	0,00
826	402943	PENGADILAN AGAMA SERUI	005	04	GIRO	30901000215300	RPL 138 PA SERUI UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Serui	S-4547/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	52.000,00
827	402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	005	04	GIRO	35201002172301	RPL 068 PS PA MERAUKE UNTUK PENAMPUNGAN	BRI KC MERAUKE	S-7673/MK.5/2014 11 November 2014	TNP	0,00
828	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	005	04	GIRO	7216355867	RPL 063 PS PA SENTANI BIAYA PERKARA	BSI	S-1239/ KPN.3401/ 2022	TNP	247.000,00
829	614774	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	005	04	GIRO	056101000191304	RPL 141 PA MMK UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. Bank BRI (Persero) Cabang Timika	S-6176/MK.5/2015 24 July 2015	TNP	13.144.000,00
830	614781	PENGADILAN AGAMA PANIAI	005	04	GIRO	068701000301305	RPL 085 PDT PA PANIAI UNTUK BIAYAPERKARA	002-BANK BRI	S-4204/MK.5/2015	TNP	0,00
831	690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	005	04	GIRO	1540010904740	RPL 063 PA ARSO UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK MANDIRI CABANG ABEPURA	S-4412/MK.5/2015	TNP	58.000,00
832	576275	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	005	04	GIRO	11501002992307	RPL 016 PTA BENGKULU UNT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Bengkulu	S-3012/MK.5/2015	TNP	0,00
833	309123	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	005	04	GIRO	7218295937	RPL 016 PDT PA BKL UTK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-1095/ WPB.15/ KP.01.04/ 2018	TNP	11.580.500,00
834	308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	005	04	GIRO	7262557701	RPL 146 PDT PA CURUP BIAYA PERKARA	BSI KCP Curup	S-22/KPN.0902/2024	TNP	108.694.050,00
835	309122	PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	005	04	GIRO	7279627061	RPL 016 PDT PA ARMA U BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia Cab. Arga Makmur	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	2.273.000,00
836	309120	PENGADILAN AGAMA MANNA	005	04	GIRO	7762076830	RPL 121 PA MANNA UTK BIAYA PERKARA	BSI	S-334/ WPB.09/ KP.04/ 2021	NON TNP	855.500,00
837	690133	PENGADILAN AGAMA LEBONG	005	04	GIRO	562301001479306	RPL 146 PA LEBONG UTK PDT	BRI Unit Muara Aman	S-5662/MK.5/2015	TNP	100.000,00
838	403404	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	005	04	GIRO	7228986733	RPL 181 PDT PA UTK PENAMPUNGAN BIAYA PERKARA	BSI CABANG MUKOMUKO	S-031/WPB.07/KP.0504/2019 09-01-2019	TNP	3.946.500,00
839	403407	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	005	04	GIRO	214601000457308	RPL 146 PDT PA KEPAHIANG UNT BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Kepahiang	S-1531/WPB.09/KP.02/2018	TNP	2.224.500,00
840	403406	PENGADILAN AGAMA TAIS	005	04	GIRO	2402400024	RPL 121 PA TAIS	BSI KCP Seluma	S-148/KPN.0904/2024	TNP	3.315.000,00
841	403405	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	005	04	GIRO	568401000252305	RPL 121 PA BINTUHAN	BANK RAKYAT INDONESIA	S-17/WPB.09/KP.04/2019	TNP	632.500,00
842	440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTAA	005	04	GIRO	10301001699303	RPL 082 PTA MALUT UNT PDT	BRI Cabang Ternate	S.6181/ MK.5/ 2015	TNP	150.000,00
843	307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	005	04	GIRO	7234579422	RPL 062 PDT PA TERNATE UTK BIAYA PERKARA	BSI CAB. TERNATE	S-579/ KPN.3101/ 2023	TNP	258.748.414,00
844	307801	PENGADILAN AGAMA SOASIO	005	04	GIRO	28001000340309	RPL 062 PDT PA SOASIO UTK BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOASIO	S-7305/ MK.5/ 2015	TNP	6.412.500,00
845	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHA	005	04	GIRO	7209284717	RPL 062 PDT PA LABUHA BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	S-1131/ KPN.3101/ 2022	TNP	4.931.000,00
846	307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	005	04	GIRO	7657644990	RPL 112 PDT PA MOROTAI UTK BIAYA PERKARA	BNI SYARIAH	S-1063/ WPB.31/ KP.0230/ 2018 14-11-2018	TNP	9.652.500,00
847	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	005	04	GIRO	1050027135	RPL 161 PS PA RKBT UTK BY PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	000255/161 4 August 2021	TNP	61.617.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
848	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	005	04	GIRO	012001002933306	RPL 127 PDT PA TANGERANG	BRI cab. Tangerang	S-899/WPB.11/KP.0402/2018 28 August 2018	TNP	482.474.600,00
849	417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	005	04	GIRO	7261818234	RPL 161 PDT PA PDGL BY PKR	BSI	S-000391/KPN.1103/2023 5 February 2024	TNP	80.623.000,00
850	440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	005	04	GIRO	8401002191308	RPL 020 PTA BANTEN UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG SERANG	S-5366/MK.5/2013 12 August 2013	TNP	0,00
851	604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	005	04	GIRO	0016401300000902	RPL 127 PDT PA TIGARAKSA UTK BIAYA PERKARA	BTN	S-000188/KPN.11.02/2023 30 January 2023	TNP	1.159.135.792,00
852	604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	005	04	GIRO	6047240407	RPL 127 PDT PA TIGARAKSA BY PERKARA	BSI	S-000188/KPN.11.02/2023	TNP	0,00
853	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	005	04	GIRO	7999201819	PERKARA	BANK MANDIRI SYARIAH KCP CILEGON	S2518/WPB.11/KP.01.04/2018 11 December 2018	TNP	9.949.000,00
854	400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	005	04	GIRO	008401005127308	RPL 020 PDT PA SERANG UTK BIAYA PERKARA	BRI KC SERANG	S-704/ WPB.08/ KP.0304/ 2018	TNP	124.234.950,00
855	440729	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	005	04	GIRO	6301001709302	RPL 015 PTA KEP BABEL	BRI Cabang Pangkalpinang	S-5607/MK.5/2015	TNP	0,00
856	402303	PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG	005	04	GIRO	6301002165307	RPL 015 PA PANGKALPINANG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Pangkalpinang	S-2102/WPB.10/KP.015/2018	TNP	11.523.000,00
857	403093	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	005	04	GIRO	032401000925309	RPL 015 PA SUNGAILIAT	BRI KCP Sungailiat	S-1915/WPB.10/KP.015/2018	TNP	30.313.500,00
858	402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN	005	04	GIRO	7042183681	RPL 107 PDT PATDN UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH MANDIRI	S-309/WPB.10/KP.02/2018	TNP	16.786.000,00
859	690129	PENGADILAN AGAMA MENTOK	005	04	GIRO	209001000209300	RPL 015 PDT PA MUNTOK	BRI KCP MUNTOK	S-498/WPB.10/KP.0104/2018	TNP	626.800,00
860	440735	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	005	04	GIRO	002701002074306	RPL 050 PDT PTA GTLO UNTUK PERKARA	BRI CABANG GORONTALO	S-3368/MK.5/2015	TNP	0,00
861	309061	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	005	04	GIRO	7290909297	RPL 050 PA GORONTALO KELAS IA	BSI	S-8287/ MK.5/ 2017	TNP	54.807.000,00
862	402001	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	005	04	GIRO	515601000211308	RPL 050 PDT PA KWD UNTUK BIAYA PERKARA	BRI CABANG KWANDANG	S-032/WPB.29/KP.010	TNP	7.430.100,00
863	402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	005	04	GIRO	027901001421305	RPL 050 PDT PA LIMBOTO UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG LIMBOTO	s-1579/ wpb.29/ kp.0104/ 2019	TNP	21.735.000,00
864	652131	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	005	04	GIRO	227601000059301	RPL 180 PDT PA TILAMUTA UNTUK BY PERKARA	BRI CABANG PEMBANTU TILAMUTA	S-707/WPB-29/KP.0203/2018	TNP	0,00
865	401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	005	04	GIRO	7256652255	RPL 050 PDT PA SUWAWA UNTUK PERKARA	BSI CABANG GORONTALO	S-707/WPB-29/KP.0203/2019	TNP	1.688.740,00
866	682186	PENGADILAN AGAMA MARISA	005	04	GIRO	064801000665303	RPL 180 PDT PA MARISA UNTUK BY PERKARA	BRI CABANG MARISA	S-8097/MK.5/2016	TNP	5.069.500,00
867	526708	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	005	04	RPL	2023000237	RPL 009 PTA UTK DANA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-12/KPN.0501/2023	TNP	0,00
868	402149	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	005	04	RPL	2023000205	RPL 009 PA TANJUNGPINANG UTK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-172/KPN.05.01/2023	TNP	20.845.292,94
869	547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	005	04	RPL	1056925558	RPL 137 PDT PA BATAM	Bank Syariah Indonesia	000146/KPN/2021	TNP	173.299.170,00
870	402161	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	005	04	RPL	061801000657301	RPL 137 PA TB KARIMUN 402161 UTK BIAYA PERKARA	BRI CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN	S-119/WPB.05/KP.02/02/2022	TNP	7.130.300,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
871	614671	PENGADILAN AGAMA NATUNA	005	04	RPL	7177766668	RPL 009 PDT PA NTN UTK DANA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	S-2231/WPB.05/KP.01/2020	TNP	876.000,00
872	402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	005	04	RPL	393528500	RPL 009 PENGADILAN AGAMA TAREMPA UTK PDT	BNI KCP TAREMPA	S-6174/MK.5/2015	TNP	1.451.000,00
873	402155	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	005	04	RPL	777892053	RPL 009 PA DBS UTK BIAYA PERKARA	BNI KCP DABO SINGKEP	S-2404/WPB.05/KP.01/2018	TNP	1.707.800,00
874	526719	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	005	04	GIRO	035301002981306	RPL 065 PS PTA PABAR UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	KPPN '000091 tanggal 21 Maret 2023	TNP	0,00
875	402883	PENGADILAN AGAMA SORONG	005	04	GIRO	2266442216	RPL 066 PA SORONG UTK BIAYA PERKARA	BNI	S-000122/WPB.33/KP.02/2021	TNP	2.746.540,00
876	402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	005	04	GIRO	35301002218305	RPL 065 PDT PA MANOKWARI UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	S-2428/WPB.33/KP.065/2018 Tanggal 4 Desember 2018 4 December 2018	TNP	3.290.500,00
877	402903	PENGADILAN AGAMA FAK-FAK	005	04	GIRO	341601000076308	RPL 067 PA FAKFAK UNTUK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-6150/ MK.05/ 2015 , 23-07-2015	TNP	0,00
878	402007	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	005	04	GIRO	214001000280309	RPL 067 PDT PA KAIMANA BIAYA PERKARA	BRI	KPPN S-8/ WPB.33/ KP.03/ 2019 09-01-2019	TNP	0,00
879	307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	005	04	GIRO	7187891013	RPL 059 PDT PA PLW UTK DANA PERKARA	BSI	KPPN S-66/ WPB.26/ KP.02/ 2022 17/01/2022	TNP	76.727.800,00
880	307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	005	04	GIRO	4701000430308	RPL 059 PA MAJENE UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-7219/ MK.5/ 2015 26/08/2015	TNP	305.845,00
881	307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	005	04	GIRO	21801003391300	RPL 178 PA MAMUJU UNTUK PDT BIAYA PERKAR	BRI	KPPN W20-A23/ 285/ HK.05/ III/ 2022 09/03/2022	TNP	3.372.000,00
882	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	005	04	GIRO	1510011159909	RPL 178 PDT PA PASANGKAYU UTK BIAYA PERKARA	Mandiri	KPPN S-0105/ WPB.26/ PK.0104/ 2019 24/01/2019	TNP	637.000,00
883	526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULBAR	005	04	GIRO	021801004698307	RPL 178 PS BP 526715 PTA SULBAR	BRI	KPPN S-1075/ KPN.2601/ 2023 27/09/2023	TNP	150.000,00
884	402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	005	04	GIRO	7722722706	RPL 048 PDT PA TRK U BIAYA PERKARA	BSI	S-171/KPN/2102/2023 12 April 2023	TNP	14.413.501,00
885	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	005	04	GIRO	30601000598308	RPL 185 PDT PA TJ SELOR U BIAYA PERKARA	PT. BRI (Persero) Cabang Tanjung Selor	S-1997/WPB.20/KP.048/2017 27 December 2017	TNP	6.905.000,00
886	526722	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	005	04	GIRO	0306 01 001887 30 2	RPL 185 PDT KLTR U PERKARA	BRI	S-4/KPN.2101/2023 3 January 2023	TNP	0,00
887	682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	005	04	GIRO	8228888991	RPL 152 PA NNK PDT PKR	BSI	S-152/KPN.2103/2024 14 May 2024	TNP	3.502.500,00
888	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	05	GIRO	33501002069300	RPL175 PTTUN JKT UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI KRAMAT	S-9799/MK.5/2015 19 November 2015	TNP	52.041.967,00
889	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	05	GIRO	12201000912302	RPL 175 PTUN JAKARTA UTK BIAYA PERKARA	Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Jatinegara	S-2778/MK.5/2015 7 April 2015	TNP	1.906.187.201,00
890	531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	005	05	GIRO	38901000570306	RPL 095 PTUN BANDUNG UTK BIAYA PERKARA	PT. BRI CABANG BANDUNG MARTADINATA	S-2055/MK.5/KP.095/2015 16 March 2015	TNP	138.329.655,00
891	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	005	05	GIRO	8401002657304	RPL 020 PTUN SERANG UNTUK BIAYA PERKARA	Bank BRI Cabang Serang	S-2102/MK.5/2015 17 March 2015	TNP	11.413.520,00
892	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	005	05	GIRO	772774770	RPL 135 PTTUN SURABAYA UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI CABANG GRAHA PANGERAN SURABAYA	S-6811/ MK.5/ 2015 13-08-2015	TNP	5.333.400,00
893	578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	005	05	GIRO	24501001579307	RPL 030 PTUN YOGYAKARTA PDT BI PKR	Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso Yogyakarta	S-1684/KPN.1501/2024	TNP	2.671.249,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
894	526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	005	05	GIRO	068401000206309	RPL 165 PDT PTUN SURABAYA UTK BIAYA PERK	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Waru	S-10766/MK.5/2015 (22-12-2015)	TNP	53.629.000,00
895	531831	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	005	05	GIRO	061001000021304	RPL 134 PTUN SEMARANG UTK PDT	Bank BRI KCP Karangayu Semarang	S-5811 /MK.5/2015 TANGGAL 8-07-2015	TNP	77.208.521,00
896	526726	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	005	05	RPL	005301005266303	RPL 123 PTTUN MEDAN	BANK RAKYAT INDONESIA	KPPN 000002/123	TNP	2.000.000,00
897	526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	005	05	RPL	005301001370304	RPL 123 PTUN MEDAN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	S-7449/MK.5/2015	TNP	115.935.113,00
898	578819	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	005	05	RPL	1056780307	RPL 001 PDT PTUN BNA UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	000521/001.24-08-2021	TPN	20.196.510,00
899	531845	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	005	05	RPL	005801001854308	RPL 010 PTUN PADANG UTK PDT	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)	S-4100/ MK.5/ 2015	TNP	26.441.695,00
900	578819	PENGADILAN TATA USAHA BANDA ACEH	005	05	RPL	1056780307	RPL 001 PDT PTUN BNA UTK PERKARA	BANK SYARIAH INDONESIA	000521/001.24-08-2021	TNP	20.196.510,00
901	578823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU	005	05	RPL	017001001782309	RPL 008 PTUN PEKANBARU UTK PDT	BRI Cabang Pekanbaru	S-5363/ MK.5/ 2013	TNP	69.874.490,00
902	690197	PENGADILAN TATA USAHA TANJUNG PINANG	005	05	RPL	`033101001147303	RPL 137 PDT PTUN TANJUNG PINANG	BANK RAKYAT INDONESIA	S-4806/MK.5/2015	TNP	12.453.600,00
903	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	005	05	GIRO	0407614679	RPL 042 PTUN PONTIANAK UTK PDT	BANK BNI	S-8308/MK.5/2015 1 February 2016	TNP	26.661.100,00
904	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	005	05	GIRO	24301002022305	RPL 043 PTUN PALANGKA RAYA UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Cabang Palangka Raya	S-4310/MK.5/2015 25 May 2015	TNP	5.539.700,00
905	526730	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	005	05	VA	24201002133306	RPL 045 PS PT TUN BANJARMASIN UTK TUKIN	BRI	S-20/ KPN.1901/ 2023 4 Januari 2023	TNP	0,00
906	526730	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	005	05	VA	24201002134302	RPL 045 PDT PT TUN BJM UTK BIAYA PERKARA	BRI	S-18/ KPN.1901/ 2023 4 januari 2023	TNP	322.500,00
907	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	005	05	GIRO	66301000216304	RPL 045 PTUN BANJARMASIN UTK PDT	BRI KCP. KAYU TANGI	S-8413/MK.5/2015 6 October 2015	TNP	38.592.948,00
908	559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	005	05	GIRO	206901000153302	RPL 046 PTUN SAMARINDA UTK BIAYA PERKARA	BRI Unit Samarinda Seberang	S-2783/MK.5/2015 7 April 2015	TNP	16.025.346,00
909	531873	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO	005	05	GIRO	005401005027305	RPL 049 PTTUN MANADO	BRI	000363 4 January 2023	TNP	2.200.000,00
910	531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	005	05	GIRO	005401001124309	RPL 049 PTUN MANADO UTK PDT	BRI Cabang Manado	S-6269/MK.5/2015 27 July 2015	TNP	77.680.343,00
911	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	005	05	GIRO	101000570306	RPL 061 PTUN AMBON	Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon	S-6128/MK.5/2015 23 July 2015	TNP	8.612.735,00
912	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	005	05	GIRO	214201000003307	RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA PERKARA	BRI CABANG WAENA	S-4207/MK.5/2015 20 May 2015	TNP	29.082.900,00
913	401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	005	05	GIRO	2701002859308	RPL 050 PDT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GTO	BRI	S-007/WPB.29/KP.0104/2019 2 January 2019	TNP	1.703.500,00
914	526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	005	05	GIRO	005001002628300	RPL 136 PTTUN MAKASSAR UTK PDT	BRI Ahmad Yani	S-6933/MK.5/2015 18 August 2015	TNP	7.598.300,00
915	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	005	05	GIRO	1514352800	RPL 136 PTUN MAKASSAR PDT	BANK BNI SYARIAH MAKASSAR	S-2803/WPB.25/KP.02/2021 24 Agustus 2021	TNP	72.022.125,00
916	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	005	05	GIRO	006001002702301	RPL 051 PTUN PALU	BRI Cabang Palu	S-4544/MK.5/2015 29 May 2015	TNP	35.440.500,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO 31 DESEMBER 2024
917	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	005	05	GIRO	019201003761303	RPL 060 PTUN KENDARI	BRI	S-6304/MK.5/2015 28 July 2015	TNP	42.836.069,00
918	526737	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	005	05	GIRO	5201004139305	RPL 038 PDT PTTUN MTR UTK PERKARA	BRI	S-1580/ KPN.2301/ 2022 30 DES 2022	TNP	1.003.500,00
919	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	005	05	GIRO	5201001349309	RPL 038 PTUN MATARAM UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	s-10297/ MK.5/ 2015 7 DES 2015	TNP	20.181.000,00
920	539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	005	05	GIRO	3901002445304	RPL 039 PTUN KUPANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	S-9724/ MK.5/ 2015 17-11-2015	TNP	36.429.503,00
921	559862	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	005	05	GIRO	36801000642307	RPL 037 PTUN DENPASAR UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI	s-7673/MK.5/2015 11 Nopember 2015	TNP	14.131.000,00
TOTAL SALDO DALAM BENTUK MATA UANG DOLLAR PADA PN DENPASAR											4.359.02
TOTAL SALDO DALAM BENTUK MATA UANG RUPIAH											**6.020.218.542.515,89**

DAFTAR REKENING TIDAK AKTIF MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA

PERIODE 31 DESEMBER 2024

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	Saldo 31 Des 2024
1	'099732	PENGADILAN NEGERI TERNATE	005	03	GIRO	1500004517833	KANTOR PENGADILAN NE	BANK MANDIRI	48.270.000,00
2	099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	005	03	GIRO	1450004225336	TITIPAN PENGADILAN N	BANK MANDIRI	1.364.530,00
3	99147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	005	03	GIRO	1440001227997	PANITERA PENGADILAN	BANK MANDIRI	247.698,00
4	099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	005	03	GIRO	1450004395691	TITIPAN PENGADILAN N	BANK MANDIRI	91.644,00
5	400492	PENGADILAN NEGERI DUMAI	005	03	GIRO	1080090003907	BEND. GAJI PENGADILA	BANK MANDIRI	690
6	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	005	04	GIRO	948878760	RPL 126 PDT PA SUKADANA UNTUK PANJAR PERKARA	BSI	0,00
7	663122	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	005	05	GIRO	3600380020	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	BSI	0,00
8	663122	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	005	05	GIRO	1058056867	BADAN PERADILAN MILITER TUN	BSI	0,00
9	531845	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	005	05	GIRO	1110099010064	BAGPRO PEMBINAAN PTU	BANK MANDIRI	0,00
10	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	005	04	GIRO	1540020000034	BPG 063 PENGADILAN A	BANK MANDIRI	0,00
11	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	005	04	GIRO	1540020000083	BPG 063 PENGADILAN A	BANK MANDIRI	0,00
12	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	005	03	GIRO	1860001827928	PENGADILAN NEGERI NA	BANK MANDIRI	0,00

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	Saldo 31 Des 2024
13	400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	03	GIRO	115710240	OTNIEL S. LAITERA, AGUSTHINA MAILANI	BNI	0,00
14	099313	PENGADILAN TINGGI MANADO	005	03	GIRO	66422369	SINTJE T SAMPELAN,SH, DETJE D.WIOR	BNI	0,00
15	400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	03	GIRO	44987197	SAHABUDOIN DAMAS, SH, JULIANUS TANEO	BNI	0,00
16	400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	03	GIRO	44987798	DANIEL NEKA, SH, ELLYNORA TUALAKA	BNI	0,00
17	099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	005	03	GIRO	1810001926923	RPL 172 PDT TMP B AT	BANK MANDIRI	0,00
Total									**49.974.562,00**

MONITORING PENUTUPAN REKENING MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DIBAWAHNYA
TAHUN 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor Surat Penutupan	Status TNP	Penggunaan Rekening
1	97488	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	005	03	Giro	00000044-01-30-000577-0	RPL 175 PN JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS	BTN	3506/PAN.PN.W10-U2/KU1.1/VII/2024 9 July 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
2	400631	Pengadilan Agama Jakarta Barat	005	04	Giro	8286060601	RPL 175 PDT PA JAKBAR UTK BIAYA PERKARA (IDR)	BNI Syariah Cabang Jakarta Barat	1311/SEKPA.W9-A2/KU1.1.5/IV/2024 1 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
3	526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	005	05	Giro	7663662443	Kepaniteraan PTUN JKT	BSI	4272503 12 August 2024	Non TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
4	097624	Pengadilan Negeri Karawang	005	03	Giro	00181.01.30.000455.2	RPL 086 PDT PN KARAWANG	BTN CABANG KARAWANG	3054/KPN.W11.U10/HK2.4/XII/2024 30 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
5	400477	Pengadilan Negeri Sumber	005	03	Giro	0003501300007977	RPL 024 PDT PN SUMBER Utk Biaya Perkara	BANK TABUNGAN NEGARA CABANG CIREBON	427/KPN.W11.U19/KU.05/V/2024 15 May 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
6	400735	Pengadilan Agama Sukabumi	005	04	Giro	009201002132309	RPL 128 PDT PA SUKABUMI UTK DANA TITIPAN DAN BIAYA PERKARA	BRI KC SUKABUMI	109/SEK.PA.W10-A12/KU1.1.2/VII/2024 3 July 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
7	400741	Pengadilan Agama Cianjur	005	04	Giro	7292522694	RPL 128 PDHL PA CJR UNTUK 2UNM5YPA	BSI	722/SEK.W10-A13/PL1.1.5/XII/2024 31 December 2024	TNP	Penampung DIPA BUA
8	400848	Pengadilan Agama Karawang	005	04	Giro	0116-01-000917-30-5	RPL 086 PA Karawang Utk PDT	BRI CAB KARAWANG	122/SEK.PA.W10-A7/KU1.1.5/II/2024 22 February 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
9	613519	Pengadilan Negeri Cibinong	005	01	Giro	0000013001300003272	RPL 023 PDHL PN CIBINONG UTK 2L57HC9A	BTN	484/S/CBN.III/FSU/III/2024 21 March 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
10	097734	Pengadilan Negeri Tegal	005	03	Giro	00153-01-30-000205-4	RPL 118 PDT PN TEGAL UTK BIAYA PERKARA	BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KOTA TEGAL	144/PAN.PN.W12-U3/KU.00.1/V/2024 17 May 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
11	098001	Pengadilan Negeri Purwokerto	005	03	Giro	00033-01-30-000539-1	RPL 029 PN PURWOKERTO UTK PDT BIAYA PEKARA	BTN	662/S/PWK/FSU/VII/2024 29 July 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
12	098040	Pengadilan Negeri Banjarnegara	005	03	Giro	00001125-01-30-000006-6	RPL 164 PDT PN BANJARNEGARA UTK BIAYA PERKARA	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cab. Purwokerto	S-193/KPN.1414/2024 14 June 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
13	098221	Pengadilan Negeri Situbondo	005	03	Giro	00000451-01-30-000043-0	RPL 035 PDT PN SITUBONDO	BTN	1875 /SEK.PN.W14/U18/KU.4.05/VIII/2024 30 August 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
14	098260	Pengadilan Negeri Trenggalek	005	03	Giro	00001113.01.30.000003.1	RPL 034 PDT PN TRENGGALEK	Bank BTN Cabang Pembantu Trenggalek	1610/SEK.PN.W14-U28/KU1.1.5/X/S024 11 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
15	401520	Pengadilan Agama Pacitan	005	04	Giro	7267630016	RPL 099 PDT PA PACITAN UTK PERKARA	Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan	1052/KPA.W13-A28/KU1.1.5/VII/2024 25 July 2024	TNP	Penampung DIPA BADILAG
16	626156	Pengadilan Negeri Kepanjen	005	03	Giro	00000012-01-30-000785-6	RPL 032 PN KEPANJEN UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Malang	3924/PAN.PN.W14.U35/HK.2.4/XII/2024 6 December 2024	TNP	Penampung DIPA BUA
17	401670	Mahkamah Syar'iyah Idi	005	04	Giro	1057521615	BPG 002 Mahkamah Syar'iyah Idi 401671	BANK MANDIRI SYARIAH	1561/SEK.MS/W1-A14/KU1.1/XII/2024 16 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
18	401670	Mahkamah Syar'iyah Idi	005	01	Giro	1057521747	Bpg 002 Mahkamah Syar'iyah Idi	BANK MANDIRI SYARIAH KCP IDI RAYEUK 3	1560/SEK.MS.WI -A14/KU1.1/XII/2024 16 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
19	401966	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	005	04	Giro	7149989263	RPL 003 PS MS SUKA MAKMUE	BANK SYARIAH INDONESIA	509/SEK.MS/W1-A22/KU1.1.5/VII/2024 18 July 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
20	098612	Pengadilan Tinggi Medan	005	03	Giro	033601004048304	RPL 123 PT MEDAN Untuk PDT Biaya Perkara	BRI	NO.B 318-II/KC/PEL/10/2024 14 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
21	108025	Pengadilan Negeri Stabat	005	03	Giro	3276-01-000002-30.1	RPL 123 PN STABAT	BRI	B.07/3276/03/2024 20 March 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
22	400370	Pengadilan Negeri Simalungun	005	03	Giro	011301002826304	RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	B.1369.e-KC/OPS/05/2024 27 May 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
23	401783	Pengadilan Agama Binjai	005	04	Rekening Virtual	1503685510	RPL 123 PA BINJAI UNTUK BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia	04/293-3/9087 25 March 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

MONITORING PENUTUPAN REKENING MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DIBAWAHNYA
TAHUN 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor Surat Penutupan	Status TNP	Penggunaan Rekening
24	401859	Pengadilan Agama Pematang Siantar	005	04	Giro	1070055117719	RPL 005 PDT PA P.SIANTAR UTK BIAYA PERKARA	BANK MANDIRI KCP PEMATANGSIANTAR SUTOMO	212/SEK.PA.W2-A7/KU1.1/IV/2024 4 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
25	401896	Pengadilan Agama Gunung Sitoli	005	04	Giro	0176-01-001006-30-9	RPL 007 PA GUNUNGSITOLI UTK PDT	PT. BRI KC. Gunungsitoli	334/SEK.W2-A15/KU1.1.5/XI/2024 28 November 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
26	098811	Pengadilan Negeri Bukittinggi	005	03	Giro	1212261444	PANITERA KEPALA PENGADILAN BUKITTINGGI	BRI CABANG BUKITTINGGI	590/SEK.PN.W3-U2/KU.1.1.5/IV/2024 22 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
27	098811	Pengadilan Negeri Bukittinggi	005	03	Giro	1212261444	RPL 011 PDT PN BKT UTK BIAYA PERKARA	BNI Cabang Bukittinggi	590/SEK.PN.W3-U2/KU1.1.5/IV/2024 22 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
28	400333	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	005	03	Giro	1174172134	RPL 011 PDT PN LUBAS UTK BIAYA PERKARA	BNI CABANG BUKITTINGGI	568/SEK.PN.W3-U2/KU1.1.5/VI/2023 3 June 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
29	400421	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	005	03	Rekening Virtual	1301202103	RPL 011 PDT PN TJ PATI UTK B PERKARA	BNI	Pyk/4/280 26 February 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
30	401984	Pengadilan Agama Koto Baru	005	04	Giro	5543.01.000114.30.9	RPL 090 PDT PA KOTOBARU UTK BIAYA PERKARA	BRI Unit Koto Baru	404/PAN.PA.W3-A11/KU.2/III/2025 7 March 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
31	098849	Pengadilan Negeri Pekanbaru	005	03	Giro	2228007005	RPL 008 PDT PN PEKANBARU UTK BIAYA PERKARA	BNI	2723/PAN.PN/W4.U1/HK2.4/XII/2024 5 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
32	098853	Pengadilan Negeri Bengkalis	005	03	Giro	018901001239305	RPL 120 PDT PN BENGKALIS UTK BIAYA PERKARA	BRI	602/SEK.PN.W4.U2/KU1.1.5/10/2024 9 October 2024	TNP	Penampung DIPA BADILUM
33	098860	Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu	005	03	Giro	1133430810	RPL 092 PDT PN RENGAT	BNI CABANG RENGAT	000010 2 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
34	401908	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	005	03	Giro	0805713756	RPL 092 PDT PN TELUK KUANTAN UTK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	BNI Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan	612/KPA/W4.U11/KU1.1.5/III/2024 8 March 2024	TNP	Penampung DIPA BUA
35	098921	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	005	03	Giro	0117-01-000675-30-5	RPL 013 PN SUNGAIPENUH UTK PDT	BRI	B-2862-KC.III/DJS/11/2024 25 November 2024	TNP	Penampung DIPA BADILAG
36	547661	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	005	04	Giro	0000102601300000127	RPL 012 PTA Jambi	Bank Tabungan	374/SEK.PTA.W5-A/KU.00/II/2025 10 February 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
37	652020	Pengadilan Agama Muara Tebo	005	04	Giro	016001003117303	RPL 078 PA MUARA TEBO	BRI	S-470/KPN.0604/2024 31 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
38	098938	Pengadilan Tinggi Palembang	005	03	Rekening Virtual	654450992251000	BPG 014 PT PALEMBANG 03	BRI	S-262/KPN.1206/2023 23 January 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
39	098938	Pengadilan Tinggi Palembang	005	01	Rekening Virtual	653240989381000	BPG 014 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 01	BRI	4589/SEK.PT.W6-U/KU.01/I/2024 23 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
40	099003	Pengadilan Negeri Sekayu	005	03	Giro	016401000927307	RPL 160 PN Sekayu Utk PDT Biaya Perkara	BRI Cabang Sekayu	B.236/KC-IV/OPS/02/2025 5 February 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
41	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	005	03	Giro	110001000489302	RPL 160 PDT PN P BALAI UTK BIAYA PERKARA	BRI	419/PAN.PN.W6-U10/HK2.4/V/2024 7 May 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
42	401952	Pengadilan Agama Mesuji	005	04	Giro	060501001073301	PENGADILAN AGAMA MESUJI	BRI CABANG TULANG BAWANG	1135/KPA.W8-A12/HM1/XII/2024 9 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
43	401955	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	005	01	Giro	219201000562306	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TUBA TENGAH 01	BRI CABANG PEMBANTU TULANG BAWANG BARAT	1179/SEK.W8-A13/KU1.1.1/X/2024 28 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
44	401955	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	005	04	Giro	219201000563302	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	BRI	1178/SEK.W8-A13/KU1.1.1/X/2024 28 October 2024	TNP	Penampung DIPA BUA
45	401956	Pengadilan Agama Sukadana	005	04	Giro	013001002462308	RPL126 PDT PA SUKADANA	BRI KC METRO	10783KC/XIX/OPS/12/2024 30 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
46	402324	Pengadilan Agama Tanjung Karang	005	04	Giro	009801003969305	RPL 017 PDT TANJUNG KARANG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI	2343/SEK.PA.W8-A1/OT1.1.1/X/2024 25 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

MONITORING PENUTUPAN REKENING MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DIBAWAHNYA
TAHUN 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor Surat Penutupan	Status TNP	Penggunaan Rekening
47	614684	Pengadilan Agama Tulang Bawang	005	04	Lainnya	060501001032305	RPL 116 PDT PA TUBA UNTUK BIAYA PERKARA	BRI CABANG UNIT II	131/SEK.W8-A7/KU2/I/2025 6 January 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
48	652055	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	005	04	Giro	2191 01 001083 30 1	RPL 116 PDT PA BLAMBANGAN UMPU	BRI	1540/SEK.PA.W8-A9/KU.05.1/XII/2024 31 January 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
49	663026	Pengadilan Negeri Menggala	005	03	Giro	0000038701300000663	RPL 116 PDT PN MENGGALA UTK BIAYA PERKARA	BTN	1069/SEK.PN.W9-U6/KU1/VI/2024 5 June 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
50	663047	Pengadilan Negeri Sukadana	005	03	Giro	00667.01.30.000014.0	RPL 126 PN Sukadana	Bank Tabungan Negara (BTN) Cab Metro	1077/S/BDL/FSU/VIII/2024 5 August 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
51	099113	Pengadilan Negeri Sanggau	005	03	Giro	0004201300007067	RPL 167 PDT PN SANGGAU UNTUK BIAYA PERKARA	Bank BTN Cabang Pontianak	037/PTK/FSU/I/2025 7 January 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
52	402361	Pengadilan Agama Pontianak	005	04	Giro	1001003336	RPL 042 PA PTK UTK KONSINYASI	BPD Kal-Bar	1726/PAN.PA.W14-A1/KU1.4/VI/2024 6 June 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
53	099176	Pengadilan Negeri Sampit	005	03	Giro	0024201300001017	RPL 044 PDT PN SAMPIT UTK BIAYA PERKARA DAN TITIPAN UANG/ KONSINYASI	BANK TABUNGAN NEGARA KCP SAMPIT	116/PKR.III/KCP-SPT/IV/2024 22 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
54	099219	Pengadilan Negeri Kotabaru	005	03	Giro	5555500313	RPL PDT PN KOTABARU UTK BIAYA PERKARA	BNI	249/PAN.W15-U4/Pdt/IX/2024 4 September 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
55	099290	Pengadilan Negeri Tenggarong	005	03	Giro	00654-01-30-000004-8	RPL 046 PN TENGGARONG UNTUK PERDATA	Bank BTN Cabang Tenggarong Seberang	1084/SEK.PN.W18-U3/KU1.1.5/IV/2024 4 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
56	400291	Pengadilan Negeri Tanjung Redep	005	03	Giro	0213-01-000898-30-3	RPL 153 PN Tanjung Redeb Utk PDT	BRI Cabang Tanjung Redeb	36/KPA.W18-U5/KU.04/I/2024 22 January 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
57	401924	Pengadilan Negeri Penajam	005	01	Giro	111301000960303	RPL 047 PDHL PENGADILAN NEGERI PENAJAM	BRI	B.162.e-KCP-X/OPS/12/2024 24 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
58	099329	Pengadilan Negeri Manado	005	03	Giro	0001101300006571	RPL 049 PN Manado Utk PDT Biaya Perkara	Bank Tabungan Negara Cabang Manado	263/SEK.PN.W19-U1/HK.2.4/II/2024 23 February 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
59	099333	Pengadilan Negeri Kotamubago	005	03	Lainnya	01124-01-30-000015-1	RPL 158 PDT PN KOTAMOBAGU Untuk Perkara Perdata	Bank Tabungan Negara Cabang Kotamobagu	318/S/KCP.KTG/X/2024 1 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
60	568725	Pengadilan Negeri Bitung	005	03	Giro	1500029833488	RPL 179 PN BITUNG TITIPAN PRK PDT	MANDIRI	415/SEK.PN.W19-U5/KU1.1/IV/2024 29 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
61	673034	Pengadilan Negeri Amurang	005	03	Giro	1054-01-000410-30-6	RPL 049 PN AMURANG UTK PDT	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KCP Amurang	W19-U7/1363/SEK/UK1.1/IX/2024 12 September 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
62	099396	Pengadilan Negeri Luwuk	005	03	Giro	5555000467	RPL 053 PN Luwuk Utk Pdt Biaya Perkara	PT. BNI KC. LUWUK (Persero)	1045/PAN.PN.W21.U3/HK.02/III/2024 22 March 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
63	401883	Pengadilan Agama Malili	005	04	Giro	7203451107	RPL 058 PA Malili Untuk Biaya Perkara	BSI	510/PAN.PA.W20-A23/KU1.1/X/2024 30 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
64	099659	Pengadilan Negeri Kendari	005	03	Giro	0192.01.001605.30.7	RPL 060 PN Kendari Utk PDT Biaya Perkara	Bank Rakyat Indonesia	1674/PAN-PN.W23-U1/HK.2.4/VIII/2024 20 August 2024	TNP	Penampung Dana Lainnya
65	099663	Pengadilan Negeri Bau-bau	005	03	Giro	01132-01-30-000014-8	RPL 103 PERKARA PENGADILAN NEGERI BAUBAU	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Baubau	480/KDR/KCP.BAUBAU/XI/2024 30 October 2024	TNP	Penampung DIPA BUA
66	099684	Pengadilan Negeri Kolaka	005	03	Giro	0216.01.000836.30.3	BPg 156 Pengadilan Negeri Kolaka	Bang Rakyat Indonesia Cab. Kolaka	404/SEK.PN.W23-U4/KU1.1/II/2025 6 February 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
67	307690	Pengadilan Agama Kolaka	005	04	Giro	1155533532	RPL 156 PS PA KOLAKA	BSI	198/SEK.PA.W21-A3/KU.1.1/XI/2024 11 November 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
68	307754	Pengadilan Agama Ambon	005	04	Giro	000101001762304	RPL 061 PS PA AMBON	Bank Rakyat Indonesia	419/SEK.PA.W24-A1/KU.1.1.5/II/2024 7 February 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

MONITORING PENUTUPAN REKENING MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DIBAWAHNYA
TAHUN 2024

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor Surat Penutupan	Status TNP	Penggunaan Rekening
69	402726	Pengadilan Agama Bangli	005	04	Giro	023301000260302	RPL 154 PDT PA BANGLI UTK BIAYA PERKARA	BRI Cabang Bangli	S-496/KPN.2203/2024 28 October 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
70	307928	Pengadilan Agama Bima	005	04	Giro	007901001727307	RPL 071 PS PA BIMA UNTUK PANJAR BP	BRI	294/SEK.PA.W22-A4/KU.01/II/2024 22 February 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
71	308021	Pengadilan Agama Curup	005	04	Giro	010801001987308	RPL 146 PA Curup Utk Biaya Perkara	BRI Cabang Curup	331/SEK.PA.W7-A4/KU1.1.1/II/2024 5 February 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
72	308035	Pengadilan Agama Argamakmur	005	04	Giro	0318-01-002188-30-4	RPL 016 PDT PA Arga Makmur Utk Biaya Perkara	BRI Cabang Arga Makmur	900/SEK.W7-A3/KU1.1.1/VII/2024 7 August 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
73	401941	Pengadilan Agama Tais	005	04	Giro	015001002241300	RPL 121 PA TAIS	BRI	635/SEK.PA.W7-A8/III/2024 27 March 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
74	400797	Pengadilan Agama Serang	005	04	Giro	1041771646	RPL020 PENGADILAN AGAMA SERANG UTK PDT BY PERKARA	BSI	4/011-3/8197 8 January 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
75	417850	Pengadilan Agama Pandeglang	005	04	Giro	1050056356	RPL 161 PA PANDEGLANG UNTUK BIAYA PERKARA	BRI SYARIAH	04/046-3/147 1 February 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
76	604723	Pengadilan Agama Tigaraksa	005	04	Giro	0016401300000902	RPL 127 PDT PA TIGARAKSA UTK BIAYA PERKARA	BTN	214/SEK.W27-A5/KU.00/2/2025 21 February 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
77	099361	Pengadilan Negeri Gorontalo	005	03	Giro	150-00-2985728-9	RPL 050 PDT PENGADILAN NEGERI GTO	MANDIRI CABANG GORONTALO	157/SEK.PN.W20-U1/KU1.1.3/IV/2024 2 April 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
78	400208	Pengadilan Negeri Limboto	005	03	Giro	110.01.30.000471.9	RPL 050 PN LIMBOTO PDT UNTUK PERKARA	BTN	806/S/GTO.III/FSU/VIII/2024 21 August 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
79	098881	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	005	03	Giro	0000148-01-30-000277-6	RPL 009 PN TANJUNGPINANG UTK PDT BIAYA PERKARA	BANK BTN CABANG TANJUNGPINANG	418/SEK.PN.W32-U1/KU1.1.5/V/2024 14 May 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
80	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	005	03	Giro	035301003048305	RPL 065 PDHL PT PABAR UNTUK 28UQIGNA	BRI KANCA MANOKWARI	B.664/OPS/03/2024 6 March 2024	Non TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
81	526716	Pengadilan Tinggi Papua Barat	005	03	Giro	035301003245305	RPL 065 PDHL PT PABAR UNTUK 22ZZUGHA	BRI KANCA MANOKWARI	B.312-KC-XVIII/OPS/01/2025 30 January 2025	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
82	417657	Pengadilan Agama Tanjung Selor	005	01	Giro	0306-01-000320-30-7	BPG 185 PA TJ SELOR 01 417657	PT. BRI (Persero) Cabang Tanjung Selor	1524/SEK.PA.W34-A1/KU1.1.5/XII/2024 3 December 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
83	477270	Pengadilan Negeri Nunukan	005	03	Giro	1520015225	RPL 152 PN NUNUKAN UTK PDT BIAYA PERKARA	BNI	273/PAN.PN.W34-U3/HK.02/3/2024 19 March 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
84	682295	Pengadilan Agama Nunukan	005	04	Giro	062701000216308	RPL 152 PA Nunukan Utk PDT Biaya Perkara	BRI Kantor Cabang Nunukan	607-KC-X/OPS/06/2024 28 June 2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
85	098682	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	005	03	Giro	7710707717	RPL 124 PDT PN TEBING TINGGI	BSI	1413 /SEK/W2-U10/KU1.1.5/VI/2024	TNP	Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Biro Keuangan

EDI YUNIADI
NIP.197306011994021001

DOKUMEN RPATA

DAFTAR BAST REALISASI RPATA 2024 AUDITED DENGAN DOKUMEN PEMBAYARAN 2025

No	Kode BA	Kode BAES1	Kode KPPN	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	No BAST	Tanggal BAST	No SPP	Tanggal SPP	No SP2D	Tanggal SP2D	Dana di Rek Penampungan (163139) per 31 Desember 2024	Jumlah Pengeluaran per 31 Desember 2024	Pembayaran s.d 31 Maret 2025		Total Pembayaran	Kurang Bayar	Progres Pekerjaan Per 31 Desember 2024 (Persentase %)	(Progress pekerjaan terkini sd 31 Maret 2025)	(Progress Pembayaran Terkini 31 Maret 2025)	Upload Dokumen RPATA mulai BAST sd Pembayaran (copas link google drive)
															2024	2025						
1	005	00501	134	300	97720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	391/PPKPN-W12I1/PL113/XII2024	31-Des-24	00003T	03-JAN-25	259991303000728	07-JAN-25	46.666.000	46.666.000	0	46.666.000	46.666.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1oXZV4E4q8oQYrNEvR1K4VtFEFwUqw62y/view?usp=sharing
2	005	00501	134	300	97797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	25/PPKW12-U22/PL112/XII/2024	31-Des-24	00004T	06-JAN-25	259991301001489	08-JAN-25	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1pCBjrIMP3m-61CUdanaIy_JAdehRjvj9
3	005	00501	164	300	97929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	77/SEKW12-U28/KU112/XII/2024	31-Des-24	00003T	03-JAN-25	259991303000702	06-JAN-25	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	RPATA PN Wonosobo
4	005	00501	148	300	97982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	2164/SEKPNW12U17/PL114/XII/2024	31-Des-24	00004T	02-JAN-25	259991301000256	03-JAN-25	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1x1RUly1CuPLj2CvcHGGrE6ZDzARenKnh?usp=sharing
5	005	00501	148	300	97996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	2865/PPKW12U9/KU112/XII/2024	31-Des-24	00004T	07-JAN-25	259991302002090	08-JAN-25	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	16.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1aKQ0AkIT2baOlTWeAYWqmI-Pqq6ClxJ7?usp=sharing
6	005	00501	030	400	98082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	3429/SEK03W13U2/KU112/XII/2024	31-Des-24	00005T	07-JAN-25	259991302004251	09-JAN-25	28.350.000	10.850.000	0	10.850.000	10.850.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1GUuuBivlOM63JolaYSTHf7FfZhEWHP-yg
7	005	00501	030	400	98082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	3428/SEK03W13U2/KU112/XII/2024	31-Des-24	00006T	07-JAN-25	259991303001972	09-JAN-25	-	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1okaUGazFeNeUVf2ScUp6ZY3GqkkC47Xd
8	005	00501	098	500	98171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	4695/SEKW14-U12/PL115/XII/2024	27-Des-24	00002T	02-JAN-25	259991301000015	02-JAN-25	134.445.260	122.222.964	0	122.222.964	122.222.964	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1NZc89yp-QlFZ06RYyVnCoi6MvoIdCNN?usp=sharing
9	005	00501	098	500	98171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	4695/SEKW14-U12/PL115/XII/2024	27-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991301000016	02-JAN-25	-	12.222.296	0	12.222.296	12.222.296	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1dRy9Nbcf5l2UVccvGHcHoJKCsNBoz0rwv?usp=sharing
10	005	00501	032	500	98298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	1763/SEK01/WI14U9/KU111/XII/2024	31-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991301000573	03-JAN-25	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/11AOKI3bMARHW1YsUzO_M7Z1_PdbFF7usp=drive_link
11	005	00501	136	1900	99443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	34/PPK-PNPKJ/PL07/XII/2024	31-Des-24	00020T	30-Jan-25	259991302006306	03-FEB-25	745.784.225	665.000.000	0	665.000.000	665.000.000	-	65	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/15mtj3ru2z0KrxyzoBwQ0yZyq1pyU4VJO?usp=sharing
12	005	00501	136	1900	99443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	002	31-Des-24	00018T	30-Jan-25	259991302006312	03-FEB-25	-	66.558.375	0	66.558.375	66.558.375	-	0	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/15mtj3ru2z0KrxyzoBwQ0yZyq1pyU4VJO?usp=sharing
13	005	00501	136	1900	99443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	003	31-Des-24	00021T	31-Jan-25	259991302006311	03-FEB-25	-	14.225.850	0	14.225.850	14.225.850	-	85	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/15mtj3ru2z0KrxyzoBwQ0yZyq1pyU4VJO?usp=sharing
14	005	00501	107	3000	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	84/PPKW7-U3/BAST/PI01/XII/2024	31-Des-24	00005T	07-JAN-25	259991301001074	08-JAN-25	5.571.265.581	225.798.170	0	225.798.170	225.798.170	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1-B2-CeImpVMaN7NzrK6CtUZqHeoHtsNB4?usp=drive_link
15	005	00501	107	3000	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	82/PPKW7-U3/BAST/PI01/XII/2024	31-Des-24	00006T	07-JAN-25	259991301001562	08-JAN-25	-	5.345.467.411	0	5.345.467.411	5.345.467.411	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1hdSKTqmow9ZnZy7WvSYfYLmwicfG3Hu?usp=drive_link
16	005	00501	030	400	401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	667/SEKPAW12-A1/PL116/XII/2024	31-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991302001032	03-JAN-25	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/file/d/11fpuORmwtqODHsLxo7-zkEWeDFrfdOSg/view?usp=sharing
17	005	00501	102	1400	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	958/SEKPAW16-A7/PL113/XII/2024	21-Des-24	00008T	02-JAN-25	259991303000296	03-JAN-25	1.449.785.626	497.500.000	0	497.500.000	497.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/11cEeI7i0RNpNlyojM3cP1YVrUhQgiYb5?usp=drive_link
18	005	00501	102	1400	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	975/SEKPAW16-A7/PL115/XII/2024	30-Des-24	00004T	02-JAN-25	259991303000349	03-JAN-25	-	76.700.000	0	76.700.000	76.700.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1MpRh1wV9WzFWjaIBoBo6qycSPufNtzaD?usp=drive_link
19	005	00501	102	1400	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	972/SEKPAW16-A7/PL117/XII/2024	30-Des-24	00005T	02-JAN-25	259991301000400	03-JAN-25	-	725.505.607	0	725.505.607	725.505.607	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1cLIzoaT92ft0bdX4Jzv87_dOQgeV_S7usp=drive_link
20	005	00501	102	1400	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	976/SEKPAW16-A7/PL115/XII/2024	30-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991303000348	03-JAN-25	-	4.978.900	0	4.978.900	4.978.900	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1oP-KNtAoX01PfZYGNzks6ksB2Lg3-ez8?usp=drive_link
21	005	00501	102	1400	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	980/SEKPAW16-A7/PL117/XII/2024	31-Des-24	00006T	02-JAN-25	259991301000401	03-JAN-25	-	145.101.119	0	145.101.119	145.101.119	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1DiknIUOkiE3WJ-1aN5xqgKWSTX7rcQj5?usp=drive_link
22	005	00501	044	1400	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1168/PAW16-A9/KU111/XII/2024	31-DEC-24	'00055T	21-MAR-25	'259991302006681	24-MAR-25	3.010.632.400	29.853.836	0	32.397.000	32.397.000	-	92,15	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1svvDhDFTzy1R2OJW8hisFm6hpJLqqERI?usp=sharing
23	005	00501	044	1400	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1177/PAW16-A9/KU112/XII/2024	31-DEC-24	'00065T	24-MAR-25	'259991301003835	25-MAR-25	-	1.333.743.807	0	1.447.361.700	1.447.361.700	-	92,15	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1svvDhDFTzy1R2OJW8hisFm6hpJLqqERI?usp=sharing
24	005	00501	044	1400	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1177a/PAW16-A9/KU111/XII/2024	31-DEC-24	'00061T	24-MAR-25	'259991301003836	25-MAR-25	-	1.333.743.807	0	1.447.361.700	1.447.361.700	-	92,15	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1svvDhDFTzy1R2OJW8hisFm6hpJLqqERI?usp=sharing
25	005	00501	044	1400	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1175/PAW16-A9/KU111/XII/2024	31-DEC-24	'00064T	25-MAR-25	'259991302006697	26-MAR-25	-	38.478.154	0	41.756.000	41.756.000	-	92,15	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1svvDhDFTzy1R2OJW8hisFm6hpJLqqERI?usp=sharing
26	005	00501	044	1400	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1175a/PAW16-A9/KU111/XII/2024	31-DEC-24	'00065T	25-MAR-25	'259991302006696	26-MAR-25	-	38.478.154	0	41.756.000	41.756.000	-	92,15	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1svvDhDFTzy1R2OJW8hisFm6hpJLqqERI?usp=sharing
27	005	00501	044	1400	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	17/CVUDC/PAKsn/XII/2024	31-Des-24	00014T	08-JAN-25	259991303001905	09-JAN-25	790.935.000	99.950.000	0	99.950.000	99.950.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1DnQq99pemkimOs9hySrCxZDiKAwMDsmI-/view?usp=sharing
28	005	00501	044	1400	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	32/BAST/Fisik-SL/PAKsn/12/2024	31-Des-24	00013T	08-JAN-25	259991302004247	09-JAN-25	-	591.500.000	0	591.500.000	591.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1An4qId32wqDNvnRecvx_V1nkmqMQDPwq/view?usp=sharing
29	005	00501	044	1400	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	321/BAST/Fisik-SL/PAKsn/12/2024	31-Des-24	00012T	08-JAN-25	259991302004246	09-JAN-25	-	84.500.000	0	84.500.000	84.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/file/d/1cn_KDt8_RpzJYa_I4aIJDQfIC7ze5-Ec/view?usp=sharing
30	005	00501	044	1400	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	28/CVBE/PLK/XII/2024	31-Des-24	00003T	08-JAN-25	259991303001239	08-JAN-25	-	14.985.000	0	14.985.000	14.985.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uyneG7FvIUGFthBUlLSNP473Paz-o2oAd/view?usp=sharing
31	005	00501	043	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	706/SEKPAW16-A12/PL11/XII/2024	31-DEC-24	'00018T	13-FEB-25	'259991302006420	14-FEB-25	1.012.470.967	16.684.293	0	208.553.670	208.553.670	-	78	Progress Telah 100%	Sudah SP2D	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uR44AcRqxAvFNG2o355jc-6Ufcfm8_of5?usp=sharing
32	005	00501	043	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	07/PTTID /PLK/XII/2024	31-DEC-24	'00026T	18-FEB-25	'259991303003006	20-FEB-25	-	925.000	0	2.925.000	2.925.000	-	85	Progress Telah 100%	Sudah SP2D	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uR44AcRqxAvFNG2o355jc-6Ufcfm8_of5?usp=sharing
33	005	00501	043	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	12/CVPHD/BAPP/XII/2024	31-DEC-24	'00033T	13-MAR-25	'259991303003069	14-MAR-25	-	433.000	0	11.433.000	11.433.000	-	71	Progress Telah 100%	Sudah SP2D	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uR44AcRqxAvFNG2o355jc-6Ufcfm8_of5?usp=sharing
34	005	00501	043	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	707/SEKPAW16-A12/PL11/XII/2024	31-DEC-24	'00051T	18-MAR-25	'259991303003078	20-MAR-25	-	244.750	0	5.244.750	5.244.750	-	71	Progress Telah 100%	Sudah SP2D	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uR44AcRqxAvFNG2o355jc-6Ufcfm8_of5?usp=sharing
35	005	00501	043	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	705/SEKPAW16-A12/PL11/XII/2024	31-DEC-24	'00049T	19-MAR-25	'259991303003079	20-MAR-25	-	7.093.445	0	709.364.547	709.364.547	-	85	Progress Telah 100%	Sudah SP2D	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uR44AcRqxAvFNG2o355jc-6Ufcfm8_of5?usp=sharing
36	005	00501	043	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	708/SEKPAW16-A12/PL11/XII/2024	31-DEC-24	'00050T	24-MAR-25	'259991303003099	25-MAR-25	-	950.000	0	74.950.000	74.950.000	-	78	Progress Telah 100%	Sudah SP2D	https://drivegoogleco m/drive/folders/1uR44AcRqxAvFNG2o355jc-6Ufcfm8_of5?usp=sharing
37	005	00501	178	3400	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	994/SEKMSW1-A21/PL115/XII/2024	30-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991302000291	03-JAN-25	1.158.962.295	14.955.254	0	14.955.254	14.955.254	-	100	Progress Telah 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1dr7bVd2XDmI7WOBIFhYGhSe2cSJvM0C8I/view?usp=sharing
38	005	00501	178	3400	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	29930155921224	30-Des-24	00007T	06-JAN-25	259991302002081	08-JAN-25	-	157.342.811	0	157.342.811	157.342.811	-	100	Progress telah 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1y0d2nGDLKXyPQZzvt1sFxoiAiUmgbpK7/view?usp=sharing
39	005	00501	178	3400	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	995/PPKPAW33-A4/PL115/XII/2024	30-Des-24	00006T	06-JAN-25	259991302002106	08-JAN-25	-	14.980.005	0	14.980.005	14.980.005	-	100	Progress Telah 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1E8mb0wBwwKQaJESv4oZsRrik1IDXMAK?usp=sharing
40	005	00501	178	3400	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	1001/PPKPAW33-A4/PL117/XII/2024	30-Des-24	00008T	07-JAN-25	259991302002082	08-JAN-25	-	961.714.055	0	961.714.055	961.714.055	-	100	Progress Telah 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/1E8mb0wBwwKQaJESv4oZsRrik1IDXMAK?usp=sharing
41	005	00501	178	3400	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	999/PPKPAW33-A4/PL115/XII/2024	31-Des-24	00004T	07-JAN-25	259991302000129	08-JAN-25	-	9.970.170	0	9.970.170	9.970.170	-	100	Progress Telah 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/drive/folders/file/d/11luOLXYapunB6mZ6MhvBrSRQaKYUdDr/view?usp=sharing
42	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	943/SEKW19-A10/PL115/XII/2024	31-Des-24	00011T	06-JAN-25	259991301001632	08-JAN-25	426.795.000	3.745.000	0	3.745.000	3.745.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 3 Pengawas Pagar
43	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	928/SEKW19-A10/PL115/XII/2024	31-Des-24	00014T	06-JAN-25	259991301001638	08-JAN-25	-	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 1 Pengawas Halaman
44	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	934/SEKW19-A10/PL115/XII/2024	31-Des-24	00015T	06-JAN-25	259991301001637	08-JAN-25	-	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 2 Pengawas Halaman
45	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	937/SEKW19-A10/PL114/XII/2024	31-Des-24	00013T	06-JAN-25	259991301001634	08-JAN-25	-	9.060.000	0	9.060.000	9.060.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 3 Fisik Halaman
46	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	931/SEKW19-A10/PL114/XII/2024	31-Des-24	00012T	06-JAN-25	259991301001633	08-JAN-25	-	81.540.000	0	81.540.000	81.540.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 2 Fisik Halaman
47	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	940/SEKW19-A10/PL115/XII/2024	31-Des-24	00010T	06-JAN-25	259991301001639	08-JAN-25	-	37.450.000	0	37.450.000	37.450.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 2 Pengawas Halaman
48	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	122/SEKPAW19-A10/PL117//I/2025	31-Des-24	00024T	15-Jan-25	259991302006037	16-Jan-25	-	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	-	95,027	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 5 Fisik Pagar
49	005	00501	052	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	120/SEKPAW19-A10/PL117//I/2025	31-Des-24	00023T	15-Jan-25	259991302006038	16-Jan-25	-	240.000.000	0	240.000.000	240.000.000	-	95,027	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin 4 Fisik Pagar
50	005	00501	103	2000	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	W21-A8/150/BAST-1PWSSMK/PPK/XII/2024	30-Des-24	00010T	08-JAN-25	259991301003176	10-Jan-25	1.627.052.200	219.138.750	0	219.138.750	219.138.750	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin Pengawasan Pemb Lanjutan Gedung
51	005	00501	103	2000	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	W21-A8/155/BAST-2/PPK/XII/2024	30-Des-24	00011T	08-JAN-25	259991301003169	10-Jan-25	-	24.348.750	0	24.348.750	24.348.750	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin Retensi Pengawasan Pemb Lanjutan Gedung
52	005	00501	103	2000	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	W21-A8/152/BAST/PPK/XII/2024	30-Des-24	00009T	08-JAN-25	259991302003800	09-JAN-25	-	345.891.175	0	345.891.175	345.891.175	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin Retensi Pekerjaan Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung
53	005	00501	103	2000	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	W21-A8/147/BAST/PPK/XII/2024	30-Des-24	00008T	08-JAN-25	259991302003799	09-JAN-25	-	1.037.673.525	0	1.037.673.525	1.037.673.525	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	Termin Pekerjaan Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung
54	005	00501	060	2000	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	63/PPKPAW21-A10/BAST IFisik/PL1/XII//2024	30-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991302000697	03-JAN-25	3.788.982.625	3.243.050.000	0	3.243.050.000	3.243.050.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	TERMIN IV / TERAKHIR PELAKSANA
55	005	00501	060	2000	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	65/PPKPAW21-A10/BASTIIFrc/PL1/XII/2024	30-Des-24	00006T	07-JAN-25	259991302002502	08-JAN-25	-	16.767.660	0	16.767.660	16.767.660	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	TERMIN KE II/TERAKHIR PERENCANAAN
56	005	00501	060	2000	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	67/PPKPAW21-A10/BASTPengwsn/PL1/XII/2024	30-Des-24	00005T	08-JAN-25	259991302004095	09-JAN-25	-	69.964.965	0	69.964.965	69.964.965	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	TERMIN KE II/TERAKHIR PENGAWASAN
57	005	00501	060	2000	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	STB2024121194013623280	31-Des-24	00004T	03-JAN-25	259991302000698	03-JAN-25	-	459.200.000	0	459.200.000	459.200.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	TERMIN RETENSI PELAKSANA
58	005	00501	158	1700	401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	1342a/SEKPAW18-A8/PL116/XII/2024	31-Des-24	00003T	07-JAN-25	259991302002120	08-JAN-25	1.397.924.028	89.066.400	0	89.066.400	89.066.400	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	pengawasan
59	005	00501	158	1700	401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	1342/SEKPAW18-A8/PL116/XII/2024	31-Des-24	00008T	16-Jan-25	259991301003500	17-Jan-25	-	1.308.857.628	0	1.308.857.628	1.308.857.628	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	TERMIN KE IV
60	005	00501	158	1700	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	6/BA/SARLING-PABRK/XII/2024	30-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991302000141	02-JAN-25	1.334.845.499	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	PENGAWASAN
61	005	00501	158	1700	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	3/BA/SARLING-PABRK/XII/2024	30-Des-24	00002T	02-JAN-25	259991301000115	02-JAN-25	-	1.274.845.499	0	1.274.845.499	1.274.845.499	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	TERMIN KE III/RPATA PELAKSANA
62	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	1508/SEK03W26-A6/PL117/XII/2024	24-Des-24	00005T	02-JAN-25	259991302000748	03-JAN-25	1.137.671.150	790.603.500	0	790.603.500	790.603.500	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1bGKXh6mOv_kSQlOo5nAxcc8X3ZBZdOEu/view?usp=sharing
63	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	1513/SEK03W26-A6/PL117/XII/2024	27-Des-24	00004T	02-JAN-25	259991302000059	03-JAN-25	-	39.200.000	0	39.200.000	39.200.000	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1kXMP8WNjZ6P1g3vgZb1tB8uPHTVBuv_R/view?usp=sharing
64	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	1515/SEK03W26-A6/PL117/XII/2024	27-Des-24	00003T	02-JAN-25	259991302000058	03-JAN-25	-	14.805.150	0	14.805.150	14.805.150	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1gz-IJQ627MayNdm79_cCHWkBcVbYRgW/view?usp=sharing
65	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	1519/SEK03W26-A6/PL117/XII/2024	31-Des-24	00006T	02-JAN-25	259991302000738	03-JAN-25	-	163.400.000	0	163.400.000	163.400.000	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1kFCEojEDTXDUT4LdWvvu6bFa8on_TVn-/view?usp=sharing
66	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	11614040125000103	31-Des-24	00009T	08-JAN-25	259991302005140	10-Jan-25	-	8.600.000	0	8.600.000	8.600.000	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1-SkLE8kDVl81qTO9IdfmS6CIDJ_PJhg/view?usp=sharing
67	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	11614041224001413	31-Des-24	00007T	08-JAN-25	259991302005168	10-Jan-25	-	111.262.500	0	111.262.500	111.262.500	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/18QOSW7ZK0ixpw8fIlVN2poNbVLp0CY5u/view?usp=sharing
68	005	00501	050	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	11614040125000077	31-Des-24	00008T	08-JAN-25	259991304000579	10-Jan-25	-	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000	-	100	Dibayarkan 100 %	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleco m/file/d/1v3JRCoGPv5MJ-SFJvZ2fRNAJN05SCCfn/view?usp=sharing
69	005	00501	074	600	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	1388/SEKPNW1-U20/PL115/XII/2024	31-DEC-24	'00051T	25-MAR-25	'259991301003841	26-MAR-25	1.100.095.041	39.960.000	0	39.960.000	39.960.000	-	67,45%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan 100%	https://drivegoogleco m/drive/folders/1fm4yG7gq6IrQqWOlTbTTS44m9Qmhs5Pf?usp=sharing
70	005	00501	074	600	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	1387/SEKPNW1-U20/PL117/XII/2024(RETENSI)	31-DEC-24	'00050T	25-MAR-25

120	005	00501	063	2500	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	2094/SEK02W25-A/PL11/XII/2024	31-Des-24	000005T	10-Jan-25	259991304000675	14-Jan-25	19.542.813	19.542.813	0	19.542.813	19.542.813	-	100%	progress Telah 100%	Telah dibayarkan Keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1wRZrkoVpxyT9mdDhUzTztdR06IiUJ3SeA?usp=sharing
121	005	00501	118	300	403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	0519/SEKPA/KU111/XII/2024	31-Des-24	000006T	08-JAN-25	259991302001708	09-JAN-25	89.145.600	89.145.600	0	89.145.600	89.145.600	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan Keseluruhan	RPATA_2024_2025
122	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1908/SEK02PTW33-U/PL113/XII/2024	30-Des-24	000007T	06-JAN-25	259991301001260	08-JAN-25	2.633.884.500	73.200.000	0	73.200.000	73.200.000	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1DGQC9PgBRekKgUJwngKf9_q14VcPkHZg/view?usp=drive_link
123	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1895/SEK02PTW33-U/PL113/XII/2024	30-Des-24	000008T	06-JAN-25	259991301001261	08-JAN-25	-	598.400.000	0	598.400.000	598.400.000	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1_fw3tPKkHnsU2MXs4mtvWeAr4x_6Sh4b/view?usp=drive_link
124	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1897/SEK02W33-U/PL117/XII/2024 tanggal 31 Des	31-Des-24	000006T	06-JAN-25	259991302002074	08-JAN-25	-	14.755.500	0	14.755.500	14.755.500	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1eCq88MwBoq0yq0zi5XWTi4wJUsRt7X8f/view?usp=drive_link
125	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1898/SEK02W33-U/PL117/XII/2024	31-Des-24	000009T	07-JAN-25	259991301002244	09-JAN-25	-	21.840.600	0	21.840.600	21.840.600	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1Eug-VMF4DWGoo_mCpwVnKVrCStpBy9zu/view?usp=drive_link
126	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1914/SEK02W33-U/PL117/XII/2024	31-Des-24	000010T	08-JAN-25	259991303001600	09-JAN-25	-	1.534.382.800	0	1.534.382.800	1.534.382.800	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1WEVXUgMickgd3jzojX--GnihdIuQyzYU/view?usp=drive_link
127	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	16042504600003-0/00	31-Des-24	000012T	08-JAN-25	259991303001601	09-JAN-25	-	383.595.700	0	383.595.700	383.595.700	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1QIrKeg6WqPD426IUTSUJeX_ZXfsLD7UxC/view?usp=drive_link
128	005	00501	178	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	1917/SEK02W33-U/PL117/XII/2024	31-Des-24	000011T	08-JAN-25	259991301002245	09-JAN-25	-	7.709.900	0	7.709.900	7.709.900	-	100%	100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1oaImi5qqpvY7G1JBroHTiTdTi_tCdXu_cR/view?usp=drive_link
129	005	00501	178	3400	526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	1264/PPKPTAW33-A/PL115/XII/2024	27-Des-24	000005T	02-JAN-25	259991302000292	03-JAN-25	5.076.141.265	9.852.582	0	9.852.582	9.852.582	-	100%	progress 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1BkVlUn3n1TagkKiTAlMIP3A_i0u7IDxU/view?usp=sharing
130	005	00501	178	3400	526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	1258/PPKPTAW33-A/PL117/XII/2024	27-Des-24	000003T	02-JAN-25	259991303000093	03-JAN-25	-	4.101.942.136	0	4.101.942.136	4.101.942.136	-	100%	progres 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1o6EdJRbvqnUeUaFlz77s0LYRAlalyxt0/view?usp=sharing
131	005	00501	178	3400	526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	160424002100696-2/00	30-Des-24	000004T	02-JAN-25	259991303000094	03-JAN-25	-	820.388.427	0	820.388.427	820.388.427	-	100%	progres 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1RdSU1U14AWBSS4NsEPSh_AuobAVChLdC6/view?usp=sharing
132	005	00501	178	3400	526714	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	1223/PPKPTAW33-A/PL115/XII/2024	31-Des-24	000006T	02-JAN-25	259991302000289	03-JAN-25	-	143.958.120	0	143.958.120	143.958.120	-	100%	progres 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1N63vIFvW8hPIA5X--Ma_1uVgiw6W_oUA/view?usp=sharing
133	005	00501	042	1300	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	20/PPKPTUNW6-TUN2/PL115/XII/2024	27-Des-24	000003T	02-JAN-25	259991304000017	02-JAN-25	1.352.738.875	19.863.400	0	19.863.400	19.863.400	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	DAKUNG RPATA 2024 FIX
134	005	00501	042	1300	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	1126/PPKPTUN/W6-TUN2/PL117/XII/2024	27-Des-24	000002T	02-JAN-25	259991304000120	03-JAN-25	-	1.238.625.375	0	1.238.625.375	1.238.625.375	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	DAKUNG RPATA 2024 FIX
135	005	00501	042	1300	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	37/PPKPTUNW6-TUN2/PL115/XII/2024	27-Des-24	000005T	02-JAN-25	259991304000115	03-JAN-25	-	94.250.100	0	94.250.100	94.250.100	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	DAKUNG RPATA 2024 FIX
136	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	2053/SEK03W14-A8/PL117/XII/2024	31-Des-24	000015T	05-FEB-25	259991302006345	05-FEB-25	4.456.819.878	692.235.889	0	1.342.538.350	1.342.538.350	-	96,84%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	RPATA GEDUNG FISIK BAST-1
137	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	2055/SEK03W14-A8/PL115/XII/2024	31-Des-24	000018T	05-FEB-25	259991302006344	05-FEB-25	-	32.840.000	0	66.553.750	66.553.750	-	96,84%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	RPATA GEDUNG PENGAWAS BAST-1
138	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	2056/SEK03W14-A8/PL117/XII/2024	31-DEC-24	'000038T	14-MAR-25	'259991302006623	17-MAR-25	-	493.782.380	0	1.410.806.800	1.410.806.800	-	85%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	RPATA SARLING FISIK BAST-1
139	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	2045/SEK03W14-A8/PL115/XII/2024	31-DEC-24	'000040T	14-MAR-25	'259991304000814	17-MAR-25	-	14.798.858	0	42.282.450	42.282.450	-	85%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	RPATA SARLING PENGAWAS BAST-1
140	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	2057/SEK03W14-A8/PL115/XII/2024	31-DEC-24	'000042T	14-MAR-25	'259991301003801	14-MAR-25	-	4.698.000	0	14.094.000	14.094.000	-	85%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	RPATA SARLING PERENCANA BAST-1
	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	341/SEK03W14-A8/PL117/I/2025	31-Jan-2025	00025T	20-02-2025	259991302006621	17-03-2025				1.230.860.400	1.230.860.400	-	96,84%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan Retensi dengan Jaminan	RPATA RETENSI GEDUNG FISIK
	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	344/SEK03W14-A8/PL115/I/2025	31-Jan-2025	00027T	21-02-2025	2,59991E+14	17-03-2025				123.240.828	123.240.828	-	96,84%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan Retensi dengan Jaminan	RPATA RETENSI GEDUNG PENGAWAS
	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	484/SEK03W14-A8/PL115/III/2025	10-Mar-25	00041T	14-03-2025	259991304000813	17-03-2025				9.396.100	9.396.100	-	85%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan Retensi dengan Jaminan	RPATA RETENSI SARLING PENGAWAS
	005	00501	093	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	482/SEK03W14-A8/PL117/III/2025	10-Mar-25	00039T	14-03-2025	2,59991E+14	17-03-2025				217.047.200	217.047.200	-	85%	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan Retensi dengan Jaminan	RPATA RETENSI SARLING FISIK
141	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	485/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000067T	02-JAN-25	259991301001295	08-JAN-25	8.959.366.598	77.217.950	0	77.217.950	77.217.950	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
142	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	484/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000068T	02-JAN-25	259991301001292	08-JAN-25	-	116.142.741	0	116.142.741	116.142.741	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
143	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	482/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000065T	02-JAN-25	259991301001290	08-JAN-25	-	155.155.880	0	155.155.880	155.155.880	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
144	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	486/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000066T	02-JAN-25	259991301001284	08-JAN-25	-	28.179.015	0	28.179.015	28.179.015	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
145	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	488/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000064T	02-JAN-25	259991301001286	08-JAN-25	-	273.949.900	0	273.949.900	273.949.900	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
146	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	492/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000076T	03-JAN-25	259991302003414	09-JAN-25	-	10.725.000	0	10.725.000	10.725.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
147	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	491/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000074T	03-JAN-25	259991301002157	09-JAN-25	-	1.270.586.982	0	1.270.586.982	1.270.586.982	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
148	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	436/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000094T	03-JAN-25	259991301002125	09-JAN-25	-	41.132.160	0	41.132.160	41.132.160	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
149	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	422/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000086T	03-JAN-25	259991302003440	09-JAN-25	-	15.573.300	0	15.573.300	15.573.300	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
150	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	481/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000077T	03-JAN-25	259991301002216	09-JAN-25	-	1.411.946.878	0	1.411.946.878	1.411.946.878	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
151	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	490/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000073T	03-JAN-25	259991302003410	09-JAN-25	-	288.846.500	0	288.846.500	288.846.500	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
152	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	432/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000083T	03-JAN-25	259991302003529	09-JAN-25	-	47.085.700	0	47.085.700	47.085.700	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
153	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	426/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000080T	03-JAN-25	259991301002153	09-JAN-25	-	32.853.100	0	32.853.100	32.853.100	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
154	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	435/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000082T	03-JAN-25	259991301002209	09-JAN-25	-	10.989.000	0	10.989.000	10.989.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
155	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	489/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000072T	03-JAN-25	259991302003409	09-JAN-25	-	110.002.900	0	110.002.900	110.002.900	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
156	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	425/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000092T	03-JAN-25	259991301002212	09-JAN-25	-	21.078.900	0	21.078.900	21.078.900	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
157	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	439/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000085T	03-JAN-25	259991302003531	09-JAN-25	-	28.860.000	0	28.860.000	28.860.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
158	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	483/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000075T	03-JAN-25	259991301002208	09-JAN-25	-	52.935.207	0	52.935.207	52.935.207	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
159	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	428/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000079T	03-JAN-25	259991301002132	09-JAN-25	-	48.543.750	0	48.543.750	48.543.750	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
160	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	423/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000097T	03-JAN-25	259991302003467	09-JAN-25	-	33.055.500	0	33.055.500	33.055.500	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
161	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	424/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000090T	03-JAN-25	259991301002211	09-JAN-25	-	26.424.500	0	26.424.500	26.424.500	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
162	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	430/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	000089T	03-JAN-25	259991302003476	09-JAN-25	-	15.401.250	0	15.401.250	15.401.250	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
163	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	433/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00101T	03-JAN-25	259991301002225	09-JAN-25	-	45.787.500	0	45.787.500	45.787.500	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
164	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	437/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00096T	03-JAN-25	259991301002252	09-JAN-25	-	24.377.500	0	24.377.500	24.377.500	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
165	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	440/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00091T	03-JAN-25	259991301002131	09-JAN-25	-	26.640.000	0	26.640.000	26.640.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
166	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	442/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00098T	03-JAN-25	259991302003494	09-JAN-25	-	26.240.400	0	26.240.400	26.240.400	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
167	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	429/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00081T	03-JAN-25	259991301002137	09-JAN-25	-	25.419.000	0	25.419.000	25.419.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
168	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	441/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00093T	03-JAN-25	259991301002199	09-JAN-25	-	159.706.800	0	159.706.800	159.706.800	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
169	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	434/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00095T	03-JAN-25	259991301002205	09-JAN-25	-	26.973.000	0	26.973.000	26.973.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
170	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	431/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00084T	03-JAN-25	259991302003530	09-JAN-25	-	49.716.900	0	49.716.900	49.716.900	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
171	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	438/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00100T	03-JAN-25	259991301002192	09-JAN-25	-	46.939.300	0	46.939.300	46.939.300	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
172	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	221/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00108T	06-JAN-25	259991301002178	09-JAN-25	-	47.175.000	0	47.175.000	47.175.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
173	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	220/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00109T	06-JAN-25	259991303001614	09-JAN-25	-	31.172.500	0	31.172.500	31.172.500	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
174	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	216/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00103T	06-JAN-25	259991302003425	09-JAN-25	-	241.000.000	0	241.000.000	241.000.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
175	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	228/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00113T	06-JAN-25	259991301002238	09-JAN-25	-	119.080.800	0	119.080.800	119.080.800	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
176	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	223/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00112T	06-JAN-25	259991301002184	09-JAN-25	-	2.845.152.000	0	2.845.152.000	2.845.152.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
177	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	215/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00102T	06-JAN-25	259991301002224	09-JAN-25	-	241.000.000	0	241.000.000	241.000.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
178	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	218/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00106T	06-JAN-25	259991302003403	09-JAN-25	-	79.000.000	0	79.000.000	79.000.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
179	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	217/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00104T	06-JAN-25	259991301002160	09-JAN-25	-	241.000.000	0	241.000.000	241.000.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
180	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	226/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00111T	06-JAN-25	259991301002169	09-JAN-25	-	79.165.200	0	79.165.200	79.165.200	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
181	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	224/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00110T	06-JAN-25	259991301002147	09-JAN-25	-	84.854.000	0	84.854.000	84.854.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
182	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	225/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00087T	06-JAN-25	259991302003434	09-JAN-25	-	98.750.000	0	98.750.000	98.750.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
183	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	219/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00105T	06-JAN-25	259991301002229	09-JAN-25	-	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
184	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	222/BAST/PPK/BUA6/12/2024	31-Des-24	00107T	06-JAN-25	259991302003415	09-JAN-25	-	103.380.340	0	103.380.340	103.380.340	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
185	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	427/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00099T	08-JAN-25	259991302003541	09-JAN-25	-	47.775.077	0	47.775.077	47.775.077	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
186	005	00501	175	199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	487/BUA7/BAST/12/2024	31-Des-24	00078T	08-JAN-25	259991302003400	09-JAN-25	-	126.375.168	0	126.375.168	126.375.168	-	100%	Progress Telah 100%	telah dibayarkan keseluruhan	
187	005	00502	175	199	4028	KEPANITERAAN	3527/PAN1/KBU/BAST-SMF/XII/2024	31-Des-24	00011T	20-Jan-25	259991302006189	21-Jan-25	232.094.340	232.094.340	0	232.094.340	232.094.340	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1KoVHbtGkeqaAH6ovSZr9gbyfoNrKOxvV?usp=drive_link
188	005	00503	134	300	99099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	24/PPKW12-U22/PL112/XII/2024	31-Des-24	00001T	06-JAN-25	259991301001486	08-JAN-25	-	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1pC8jrIMP3m-61CUdanaly_JAdehRjvJ9
189	005	00503	148	300	99121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	2169/SEKPNW12U17/PL114/XII/2024	31-Des-24	00004T	03-JAN-25	259991301002284	09-JAN-25	-	6.993.000	0	6.993.000	6.993.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1WmzJrVo3SNkSjtEKD94b_92Eb5YfwpV2G?usp=sharing
190	005	00504	020	2900	400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	W27-A1/4318/BAST/XII/2024	31-Des-24	00001T	06-JAN-25	259991305000107	08-JAN-25	-	6.874.950	0	6.874.950	6.874.950	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	DOK RPATA PA SERANG
191	005	00504	098	500	401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	BAST-13	31-Des-24	00001T	02-JAN-25	259991301000039	02-JAN-25	-	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/18hDmBN487HqmayUkGGOX1Iz-h7CutD/view?usp=share_link
192	005	00504	098	500	401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	3856/SEKPAW13-A13/KU112/XII/2024	31-Des-24	00001T	02-JAN-25	259991304000038	03-JAN-25	-	6.726.568	0	6.726.568	6.726.568	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	DOK RAPATA PA JOMBANG 401272
193	005	00504	094	1300	402387	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	1757/SEKPAW14-A6/KU11/XII/2024	31-Des-24	00001T	06-JAN-25	259991301002438	09-JAN-25	-	5.833.370	0	5.833.370	5.833.370	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/file/d/1s0ekdIhzfkafffzcovWxoE6YbKfO_mLP/view?usp=sharing
194	005	00506	023	199	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	003/Bidi1/PPK/PJ/BAST/12/2024	31-Des-24	00009T	08-JAN-25	259991303001965	09-JAN-25	548.366.275	33.527.550	0	33.527.550	33.527.550	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1aHI6lqsa3iEJBe-_H9HGXwCDJjvIqE2K?usp=drive_link
195	005	00506	023	199	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	011/Bidi1/PPK/PJ/BAST/12/2024	31-Des-24	00016T	08-JAN-25	259991302004342	09-JAN-25	-	17.409.240	0	17.409.240	17.409.240	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1RfrI3eq_JMZUyIakkTgeBsvKHARREAbi?usp=drive_link
196	005	00506	023	199	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	010/Bidi1/PPK/PJ/BAST/12/2024	31-Des-24	00012T	08-JAN-25	259991302004341	09-JAN-25	-	35.564.400	0	35.564.400	35.564.400	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1Uzlb_OuJIyAnTo523PrfiXlI7X_JSeBzb?usp=drive_link
197	005	00506	023	199	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	012/Bidi1/PPK/PJ/BAST/12/2024	31-Des-24	00004T	08-JAN-25	259991301002708	09-JAN-25	-	31.990.254	0	31.990.254	31.990.254	-	100	Progress Telah 100%	Telah dibayarkan keseluruhan	https://drivegoogleom/drive/folders/1ozrpuYJhPEsAlWf2fHgfzp_4tDayIH6ba?usp=drive_link
198	005	00506	023	199	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	050/Bidi1/PPK/PJ/BAST/12/2024	31-Des-24	00010T	08-JAN-25	259991302004293	09-JAN-25	-	73.593.000	0	73.593.000	73.593.000	-	100	Prog

BERITA ACARA REKONSILIASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Bagian Administrasi Penghapusan
Rekap Monitoring Surat Keputusan Sewa BMN
Periode 1 Januari - 31 Desember 2024

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya Listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
1	005010500401472000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Lumajang	5760/SEK.PTA.W13-A/PL1.2.1/XII/2024	S-102//MK.6/KNL.1004/2024	3 Desember 2024	1	Bulanan	315.000	315.000	0	Lisnawati Nu Wachidah/Kantin	Kantin	1885/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	0379/SEK/ST.HKI.3/I/2025	21-Jan-2025	21-Jan-2025	20-Jan-2026	-	-	0	-315.000	0	0	0
2	005012600401910000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mukomuko	3000/SEK.PT.W8.U/PL1.2/XII/2024	S-112/MK.6/KNL.0501/2024	21-Nov-2024	1	Sekaligus	1.101.000	1.101.000	0	Haniefa Effendi	DYK	1888/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	187/SEK.PN.W8-U9/PL1.2/I/2025	10-Jan-2025	10-Jan-2025	9-Jan-2026	-	-	0	-1.101.000	0	0	0
3	005012600401910000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mukomuko	3001/SEK.PT.W8.U/PL1.2/XII/2024	S-113/MK.6/KNL.0501/2024	21-Nov-2024	1	Sekaligus	1.000.000	1.000.000	0	Hairul	Kantin	1887/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	186/SEK.PN.W8-U9/PL1.2/I/2025	9-Jan-2025	9-Jan-2025	8-Jan-2026	-	-	0	-1.000.000	0	0	0
4	005010900098860000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Rengat	1098/SEK.PT.W4-U/PL1.2/XII/2024	S-124/MK.6/KNL.0303/2024	14-Nov-2024	3	Tahunan	900.000	900.000	0	Sdr. Al Ansori	Kantin	1863/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	14/SEK.PN.W4-U3/PL1.2.1/I/2025	6-Jan-2025	6-Jan-2025	5-Jan-2028	-	-	0	-900.000	0	0	0
5	005010900098860000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Rengat	1097/SEK.PT.W4-U/PL1.2/XII/2024	S-123/MK.6/KNL.0303/2024	14-Nov-2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	141.000	141.000	0	dyk	DYK	1864/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	13/SEK.PN.W4-U3/PL1.2.1/I/2025	6-Jan-2025	6-Jan-2025	5-Jan-2028	-	-	0	-141.000	0	0	0
6	005010900477261000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	1104/SEK.PT.W4-U/PL1.2/XII/2024	S-43/MK.6/KNL.0305/2024	26-Nov-2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	156.625	156.625	0	dyk	DYK	1869/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	29/SEK.PT.W4-U9/PL1.2.1/I/2025	3-Jan-2025	3-Jan-2025	2-Jan-2028	-	-	0	-156.625	0	0	0
7	005010500098310000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lumajang	8792/SEK.W14.U/PL.1.2.5/XII/2024	S-93/MK.6/KNL.1004/2024	20-Nov-2024	1	Sekaligus	3.302.000	3.302.000	0	Fairuz Al Izhhar/Pertanian	Pertanian	1886/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	-	-	-	-	-	-	0	-3.302.000	0	0	0
8	005011000400503000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Jambi	3343/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/XII/2024	S-145/MK.6/KNL.0401/2024	6-Dec-2024	1	Sekaligus	15.531.000	15.531.000	0	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi	ATM	1895/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	-	-	-	-	-	-	0	-15.531.000	0	0	0
9	005012300099912000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Praya	2576/SEK.PT.W25-U/PL1.2.1/XII/2024	S-106/MK.6/KNL.1403/2024	6-Dec-2024	5	Sekaligus	3.122.000	3.122.000	0	Husin Syarifudin	Kantin	1890/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	136/SEK.PN.W25-U6/PL1.2/1/2025	8-Jan-2025	8 Januari 2025	7-Jan-2030	-	-	0	-3.122.000	0	0	0
10	005011000400430000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Muara Bulian	3338/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/XII/2024	S-136/MK.6/KNL.0401/2024	28-Nov-2024	1	Sekaligus	1.200.000	1.200.000	0	Dian	Kantin	1865/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	107 /SEK.PN/W5-U6/PL1.2.1/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	12-Jan-2026	-	-	0	-1.200.000	0	0	0
11	005010100097471000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	7526/SEK.PT.W10-U/PL1.2/XII/2024	S-318/MK.6/KNL.0701/2024	19-Nov-2024	3	Tahunan	141.000.000	141.000.000	0	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	ATM dan Kantor Kas	1894/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	29/SEK.PN/W10.U1/PL1.2/2025	20-Jan-2025	20-Jan-2025	19-Jan-2028	-	-	0	-141.000.000	0	0	0
12	005010800098785000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Solok	4138/SEK.PT.W3-U/PL1.2/XII/2024	S-114/MK.6/KNL.0301/2024	3 Desember 2024	1	Sekaligus	2.949.000	2.949.000	0	Vivi Valona/Kantin	Kantin	1889/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	158/SEK.PN.W3-U7/PL1.2/II/2025	14-Feb-2025	14-Feb-2025	13-Feb-2026	-	-	0	-2.949.000	0	0	0
13	005010800400333000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	4137/SEK.PT.W3-U/PL1.2/XII/2024	S-63/MK.6/KNL.0302/2024	2 Desember 2024	3	Sekaligus	3.600.000	3.600.000	0	Samsi/Kantin	Kantin	1891/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	W3.U11/87/UK/I/2025	17-Jan-2025	14-Feb-2025	16-Jan-2028	-	-	0	-3.600.000	0	0	0
14	005010300098022000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Banyumas	1966/KPT.W12-U/PL1.2.5/XII/2024	S-111/MK.6/KNL.0906/2024	29-Nov-2024	1	Sekaligus	932.000	932.000	0	Lasmi	Kantin	1867/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	24/SEK.PN.W12-U24/PL1.2.1/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	6-Jan-2026	-	-	0	-932.000	0	0	0
15	005011300402650000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	2729/SEK.PTA.W14-A/PL1.2/XII/2024	S-162/MK.6/KNL.1101/2024	6 Desember 2024	1	Sekaligus	240.000	240.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Kalimantan Barat	DYK	1893/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	153/SEK.PTA.W14-A/PL1.2/I/2025	7-Jan-2025	7-Jan-2025	6-Jan-2026	-	-	0	-240.000	0	0	0
16	005011700099312000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Manado	615/SEK.PT.W19-U/PL1.2/XII/2024	S-117/MK.6/KNL.1601/2024	25-Nov-2024	1	Sekaligus	250.290.000	250.290.000	0	PT. Bank Syariah Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Manado Megamas	Kacab Bank BSI	1866/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024			-	-	-	-	0	-250.290.000	0	0	0
17	005013500402675000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tarakan	1232/SEK.PTA.W34-A/PL1.2.1/XI/2024	S-44/MK.6/KNL.1303/2024	13-Nov-2024	2	Sekaligus	27.200.000	27.200.000	0	PT Bank Syariah Indonesia KC Tarakan	ATM	1862/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	-	-	-	-	-	-	0	-27.200.000	0	0	0
18	005011200099045000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Metro	3125/SEK.PT.W9-U/PL.1.2.5/XII/2024	S-60/MK.6/KNL.0503/2024	9 Desember 2024	1	Sekaligus	720.000	720.000	0	Jumiarsih	Kantin	1892/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	23-Dec-2024	52/SEK.W9.U2/PL.02/I/2024	9-Jan-2025	9-Jan-2025	8-Jan-2025	-	-	0	-720.000	0	0	0
19	005010500663314000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	681/KPMT.W3.MIL/PL.1.2.1/XI/2024	S-121/MK.6/KNL.1002/2024	28 Oktober 2024	2	Sekaligus	5.000.000	5.000.000	0	Sdr. Hendro Praptono/Kantin	Kantin	1846/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	20-Dec-2024	30/SEK/PL1/XII/2024	31-Dec-2024	31-Dec-2024	30-Dec-2026	31 Desember 2024	4D4910NA055JCGSD□	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
20	005011800099375000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Palu	628/SEK.PT.W21-U/PL1.2/XII/2024	S-107/MK.6/KNL.1603/2024	13-Nov-2024	1	Bulanan	365.700	365.700	0	Nuriyah Damayanti	Kantin	1850/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	20-Dec-2024	4729/SEK.PN.W-21/KU.1.4/XI/2024	18-Nov-2024	18-Nov-2024	17-Nov-2025	29-Nov-2024	3C35F55DF9UDNMQU	365.700	0	0	0	0
21	005011100401944000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Martapura	2864/SEK.PTA.W6-A/PL.01/XII/2024	S-245/MK.6/KNL.0402/2024	15-Nov-2024	2	Tahunan	1.500.000	2.100.000	600.000	Halimatusakdia	Kantin	1847/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	20-Dec-2024	30/SEK.PA.W6-A9/PL1.2/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025	13 Januari 2027	14-Jan-2025	DC5A661QVCSKR48A	2.100.000	0	0	0	0
22	005011100098991000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Muara Enim	4108/SEK.PT.W6.U/PL.01/XI/2024	S-14/MK.6/KNL.0403/2024	2 Oktober 2024	1	Sekaligus	300.000	300.000	0	Verra Wellyana Ari Qurniawan selaku Ketua Dharmayukti Karini Cabang Muara Enim	DYK	1850/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	20-Dec-2024	W6.U6/01/PKS/10/2024	4 Oktober 2024	4 Oktober 2024	3 Oktober 2025	4-Oct-2024	5EB7F2G4VQ3KG61D	300.000	0	225.000	225.000	0
23	005012800099752000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Labuha	2230/KPT.W28-U/RT1/12/2024	S-57/MK.6/KNL.1604/2024	31 Oktober 2024	1	Sekaligus	500.000	500.000	0	Habiba Hanum. S.H., M.Hum selaku Ketua Dharmayukti Karini Cabang Labuha	DYK	1848/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	20-Dec-2024	14/SEK.PN.W28-U3/RT1/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025	13 Januari 2026	-	-	0	-500.000	0	0	0
24	005010200097624000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karawang	7938/W11-U/PL.1.2./XII/2024	S-55/MK.6/KNL.0804/2024	5 Desember 2024	1	Sekaligus	258.950	258.950	0	Dharmayukti Karini Cabang PN Karawang	DYK	1809/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	3049/SEK.03.W11-U10/PL1.2.5/XII/2024	24-Dec-2024	24-Dec-2024	23-Dec-2025	24-Dec-2024	0012B2G4VQA5QIBT	258.950	0	258.950	258.950	0
25	005012900097598000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tangerang	3456/SEK.PT.W29-U/PL1.2/XI/2024	S-94/MK.6/KNL.0603/2024	26-Nov-2024	3	Sekaligus	57.807.000	57.807.000	0	Bank Tabungan Negara	ATM	1761/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	12-Dec-2024	770/SEK.PN.W29.U4/PL.1.2/XII/2024	16-Dec-2024	16 Desember 24	15 Desember 27	9 Desember 2024	0C1FE55DFA0SIFP7	57.807.000	0	57.807.000	57.807.000	0
26	005010300097734000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tegal	1909/KPT.W12-U/PL1.2.5/XI/2024	S-41/MK.6/KNL.0904/2024	5-Nov-2024	1	Sekaligus	3.000.000	3.000.000	0	Petriyanto	Kantin	1759/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	11-Dec-2024	469/SEK.PN.W12-U3/PL1.2/XII/2024	9-Dec-2024	9-Dec-2024	8-Dec-2025	26-Nov-2024	68D4048VVFBRJUPN	3.000.000	0	2.750.000	2.750.000	0
27	005010300097720000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Semarang	1920/KPT.W12-U/PL1.2.5/XI/2024	S-309/MK.6/KNL.0901/2024	25-Nov-2024	2	Tahunan (dibayar per tahun)	250.000	250.000	0	dyk	DYK	1760/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	10-Dec-2024	618/SEK.PN.W12-U1/PL1.2.7/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2026	17-Dec-2024	93CAE6U8EV5T4JII	250.000	0	250.000	250.000	0
28	005012200099820000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tabanan	582/SEK.W24-U/PL1.2.7/XII/2024	S-163/MK.6/KNL.1401/2024	5-Nov-2024	3	Tahunan	400.000	400.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Tabanan	DYK	1784/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	10-Dec-2024	2465/SEK.KPN.W24-U6/PL1.2.7/XII/2024	12-Dec-2024	12-Dec-2024	11-Dec-2027	12 Desember 2024	2135861QV4JB9MKT	400.000	0	366.667	366.667	0
29	005010200403009000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sumber	130/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2/XII/2024	S-86/MK.6/KNL.0806/2024	26-Nov-2024	5	Tahunan	500.000	500.000	0	Abdul Basit	UMKM Fotocopy	1783/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	10-Dec-2024	0427/SEK.PA.W10-A4/PL1.2/XII/2024	11-Dec-2024	11-Dec-2024	10-Dec-2029	11-Dec-2024	E310B7QLUPO41F00	500.000	0	458.333	458.333	0

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
30	005010200400477000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sumber	7648/W11-U/PL.1.2./XI/2024	S-81/MK.6/KNL.0806/2024	18-Nov-2024	1	Sekaligus	1.210.000	1.210.000	0	MASRIAH	Kantin	1780/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	9-Dec-2024	73/SEK.PN.W11.U19/PL1.2/I/2025	10-Jan-2025	10-Jan-2025	9-Jan-2025	10 Januari 2025	FB54648VVNNOR4SK	1.210.000	0	0	0	0
31	005011900099439000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sungguminasa	6047/SEK.W22.U/PL1.2.3/XI/2024	S-310/MK.6/KNL.1502/2024	27-Oct-2024	1	Sekaligus	1.800.000	1.800.000	0	Tanringai Aslinda	Kantin	1755/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	9-Dec-2024	3170/SEK.W22.U3/PL1.2.4/IX/2024	12-Dec-2024	12-Dec-2024	11-Dec-2025	12-Dec-2024	D0C7E48VVFEJFQHA	1.800.000	0	1.650.000	1.650.000	0
32	005012300402788000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	352/SEK.PTA.W22-A/PL1.2/XI/2024	S-97/MK.6/KNL.1403/2024	6-Nov-2024	3	Tahunan	1.369.688	2.569.688	1.200.000	Asep Sudarmadi	Kantin	1756/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	8-Dec-2024	01/SEK.PTA.W22-A/PL1.2/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	14-Jan-2028	-	-	0	-2.569.688	0	0	0
33	005011300099109000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mempawah	3183/SEK.PT.W17 U/PL1.2.1/XI/2024	S-50/MK.6/KNL.1102/2024	8-Nov-2024	3	Sekaligus	26.937.000	26.937.000	0	Emi Furwanti	Kafe	1757/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	7-Dec-2024	W17-U5/86/PL1.2/I/2025	3-Jan-2025	3-Jan-2025	2-Jan-2025	3-Jan-2025	C20AE48VVNNI8RRJ	26.937.000	0	0	0	0
34	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	4.737.110	4.737.110	0	maman rustaman	Kantin	1651/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	6-Dec-2024	5073/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	86EF02G4VQ9V4C49	4.737.110	0	4.737.110	4.737.110	0
35	005010200400477000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sumber	7648/W11-U/PL.1.2./XI/2024	S-82/MK.6/KNL.0806/2024	18-Nov-2024	1	Sekaligus	1.210.000	1.210.000	0	KASIRI WIYANTI	Kantin	1758/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	6-Dec-2024	74/SEK.PN.W11.U19/PL1.2/I/2025	9-Jan-2025	9-Jan-2025	8-Jan-2025	9 Januari 2025	7F3E50NA0DE64F0V	1.210.000	0	0	0	0
36	005012100099706000KD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Ambon	1453/WKPT.W27-U/PL1/X/2024	S-60/MK.6/KNL.1701/2024	7 Oktober 2024	1	Sekaligus	1.200.000	1.200.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Ambon	DYK	1746/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	5-Dec-2024	4255/SEK.PN.W27-U1/HM2.1.2/12/2024	10 Desember 2024	10 Desember 2024	9 Desember 2025	10-Dec-2024	A383561QV4JA4HJL	1.200.000	0	1.100.000	1.100.000	0
37	005010300097819000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purwodadi	1827/KPT.W12-U/PL1.2.5/XI/2024	S-279/MK.6/KNL.0901/2024	29 Oktober 2024	2	Tahunan (dibayar per tahun)	1.500.000	2.202.000	702.000	Ardhi Setiawan	Kantin	1691/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	3-Dec-2024	1499/SEK.W12-U16/PL1..2/XII/2024	4-Dec-2024	4-Dec-2024	3-Dec-2026	4-Dec-2024	2FB713CIFKRV8TS6	2.202.000	0	2.018.500	2.018.500	0
38	005010800098828000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	3916/SEK.PT.W3-U/PL1.2/XI/2024	S-52/MK.6/KNL.0302/2024	30 Oktober 2024	3	Sekaligus	2.025.000	2.025.000	0	Gia Anggraini/Kantin	Kantin	1692/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	3-Dec-2024	1162/SEK.PN.W3-U5/PL1.2.5/XII/2024	11-Dec-2024	11-Dec-2024	10-Dec-2027	11 Desember 2024	3706F55DFA0UQ62K	2.025.000	0	1.968.750	1.968.750	0
39	005010500098104000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Surabaya	8159/SEK.W14.U/PL.1.2.3/XI/2024	S-353/MK.6/KNL.1001/2024	18-Nov-2024	1	Tahunan	250.000	250.000	0	Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur	DYK	1694/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	3-Dec-2024	874/SEK/W14.U/PL1.2/XII/2024	16-Dec-2024	16-Dec-2024	15-Dec-2025	16 Desember 2024	7DF4348VVFEMQLJN	250.000	0	250.000	250.000	0
40	005011700099312000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Manado	597/SEK.PT.W19-U/PL.1.2/XI/2024	S-106/MK.6/KNL.1601/2024	7-Nov-2024	1	Sekaligus	553.500	553.500	0	Fendy Mantiri	Kantin	1695/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	3-Dec-2024	77/SEK.PT.W19-U/PL1.2.5/I/2025	23 Januari 2025	23 Januari 2025	22 Januari 2026	23 Januari 2025	C82C761QVCSTQAAK	553.500	0	0	0	0
41	005010100400647000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Timur	2407/KPTA.W9-A/PL1.2.1/XI/2024	S-299/MK.6/KNL.0701/2024	7-Nov-2024	2	per tahun	20.748.000	20.748.000	0	PT. BSI	ATM	1693/SEK/SK.PL1.2/XII/2024	3-Dec-2024					-	-	0	-20.748.000	0	0	0
42	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	3.667.533	3.667.533	0	Edward Firmansyah Harahap	Kantin	1647/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5071/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	426901JNFVNIMQL3	3.667.533	0	3.667.533	3.667.533	0
43	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	3.871.125	3.871.125	0	Suwondo	Kantin	1652/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5070/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	72BB66U8EV5T50R1	3.871.125	0	3.871.125	3.871.125	0
44	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	3.297.625	3.297.625	0	CV Tiga Princess By Hafshah	Kantin	1650/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5076/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	E854A7QLUPO9JLF2	3.297.625	0	3.297.625	3.297.625	0
45	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	4.596.600	4.596.600	0	maryani	Kantin	1649/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5072/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	6481C7QLUPO9I9E0	4.596.600	0	4.596.600	4.596.600	0
46	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	6.784.500	6.784.500	0	mdh armanda syahputra harahap	Kantin	1655/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	460/W11.U5/PL1.2/I/2025	28-Jan-2025	28-Jan-2025	27-Jan-2028	28-Jan-2025	FF8C41JNG8150CDB	6.784.500	0	0	0	0
47	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-48/MK.6/KNL.0802/2024	28 Oktober 2024	3	Tahunan	6.733.750	6.733.750	0	koperasi PN bekasi	Kantin	1653/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5074/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	D285B6U8EV5T6OTI	6.733.750	0	6.733.750	6.733.750	0
48	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-49/MK.6/KNL.0802/2024	5-Nov-2024	3	Tahunan	1.372.500	1.372.500	0	Nastassia Novita	Vending Machine	1660/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5030/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	D698055DFA14CM1L	1.372.500	0	1.372.500	1.372.500	0
49	005010200097610000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bekasi	7396/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-50/MK.6/KNL.0802/2024	11-Nov-2024	3	Tahunan	3.441.000	3.441.000	0	Mangatur Sirait	Kantin	1654/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	5075/W11.U5/PL1.2/XII/2024	17-Dec-2024	17-Dec-2024	16-Dec-2027	17-Dec-2024	C82BB2G4VQ9V5NGO	3.441.000	0	3.441.000	3.441.000	0
50	005010500098221000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Situbondo	8034/SEK.W14.U/PL.1.2.5/XI/2024	S-81/MK.6/KNL.1004/2024	25 Oktober 2024	5	Tahunan	1.445.000	1.445.000	0	Aswat/Kantin	Kantin	1656/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	39/SEK.PN.W14.U18/PL.09/I/2025	3-Jan-2025	3-Jan-2025	2-Jan-1930	3 Januari 2025	A73FE55DPI9UNVML	1.445.000	0	0	0	0
51	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	2782/SEK.PT.W8.U/PL1.2/XI/2024	S-107/MK.6/KNL.0501/2024	15-Nov-2024	1	Sekaligus	2.196.000	2.196.000	0	Chairudin	Kantin	1658/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	46/SEK.PN.W8-U1/PL1.2/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	30-Dec-2025	31-Dec-2024	79E617QLUPOMIB6V	2.196.000	0	2.196.000	2.196.000	0
52	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	2797/SEK.PT.W8.U/PL1.2/XI/2024	S-108/MK.6/KNL.0501/2024	15-Nov-2024	1	Sekaligus	2.074.750	2.074.750	0	Zainal Arifin	Kantin	1659/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	45/SEK.PN.W8-U1/PL1.2/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	30-Dec-2025	31-Dec-2024	1DB596U8EV6A5BEB	2.074.750	0	2.074.750	2.074.750	0
53	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	2798/SEK.PT.W8.U/PL1.2/XI/2024	S-106/MK.6/KNL.0501/2024	15-Nov-2024	1	Sekaligus	2.167.000	2.167.000	0	Sri Lestari	Kantin	1657/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	45/SEK.PN.W8-U1/PL1.2/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	30-Dec-2025	31-Dec-2024	DC6C00NA055JABJL	2.167.000	0	2.167.000	2.167.000	0
54	005010300097802000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Demak	1828/KPT.W12-U/PL1.2.5/XI/2024	S-292/MK.6/KNL.0901/2024	12-Nov-2024	2	Sekaligus	400.000	400.000	0	Sahesti Ningtyas (selaku Sekretaris Dharmayukti Karini Cabang Demak)	DYK	1648/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	80/SEK/W12-U23.PL.06.1/XII/2024	10-Dec-2024	10-Dec-2024	9-Dec-2026	10-Dec-2024	12F4355DFA0TLM63	400.000	0	383.333	383.333	0
55	005010200097542000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Garut	7483/W11-U/PL.1.2./XI/2024	S-69/MK.6/KNL.0805/2024	15-Nov-2024	1	Sekaligus	5.000.000	5.000.000	0	Euis Siti Sopiah	Kantin	1661/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	30/SEK.PN.W11-U8/PL1.2/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	31-Dec-2025	2 Januari 2025	1E32961QVCS9VQR2	5.000.000	0	0	0	0
56	005011000098917000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	2950/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/XI/2024	S-127/MK.6/KNL.0401/2024	6-Nov-2024	1	Sekaligus	2.160.000	2.160.000	0	Masitah	Kantin	1645/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	26-Nov-2024	2546/SEK.PN.W5-U3/PL1.2/XI/2024	29-Nov-2024	29-Nov-2024	28-Nov-2024	29-Nov-2024	939A11JNFVKUCT0S	2.160.000	0	1.980.000	1.980.000	0
57	005010300098036000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purbalingga	1832/KPT.W12.U/PL.1.2.5/XI/2024	S-90/MK.6/KNL.0906/2024	31 Oktober 2024	5	Sekaligus	1.000.000	1.000.000	0	Selviana Purba S.H., LL.M., (selaku Ketua Dharmayukti Karini Cabang Purbalingga)	DYK	1632/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024	25-Nov-2024	2029/SEK.PN.W12-U25/PL.1.2.5/XII/2024	2-Dec-2024	2-Dec-2024	1-Dec-2029	2-Dec-2024	3D25348VVFE9I68G	1.000.000	0	983.333	983.333	0
58	005012300614727000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Giri Menang	300/SEK.PTA.W22-A/PL1.2/X/2024	S-74/MK.6/KNL.1403/2024	1-Oct-2024	3	Per Tahun	662.200	662.200	0	Sakdiah	Kantin	1634/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	25-Nov-2024	1473/SEK.PA/W22-A7/PL.1.1/XII/2024	10-Dec-2024	10-Dec-2024	9-Dec-2027	10-Dec-2024	2B2220NA054VMMBF	0	-662.200	1.931.417	1.931.417	0
59	005010500098420000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sampang	7483/SEK.W14.U/PL.1.2.5/XI/2024	S-51/MK.6/KNL.1005/2024	5-Nov-2024	3	Tahunan	908.000	908.000	0	Djauzah	Kantin	1609/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	22-Nov-2024	2100/SEK.W14.U33/UM.01./XII/2024	2-Dec-2024	2-Dec-2024	1-Dec-2027	4 Desember 2024	86B423CIFKRU6GS7	908.000	0	832.333	832.333	0
60	005010500098366000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pacitan	7691/SEK.W14.U/PL.1.2.5/XI/2024	S-89/MK.6/KNL.1006/2024	31 Oktober 2024	3	Sekaligus	378.000	378.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Pacitan	DYK	1610/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	22-Nov-2024	821/SEK.W14.U23/PL1.2/XII/2024	29-Nov-2024	2 Desember 2024	1 Desember 2027	29-Nov-2024	6F5916U8EV38RLNF	378.000	0	367.500	367.500	0
61	005011000477368000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tebo	2725/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/X/2024	S-118/MK.6/KNL.0401/2024	17 Oktober 2024	1	Sekaligus	300.000	300.000	0	Sri Peni Yudawati	DYK	1596/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	18-Nov-2024	1138/SEK.PN.W5-U10/PL.02/XI/2024	19-Nov-2024	19-Nov-2024	18-Nov-2025	19-Nov-2024	FFCF37QLUPLC437D	300.000	0	275.000	275.000	0
62	005012300099890000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Selong	2296/SEK.PT.W25-U/PL1.2.7/XI/2024	S-91/MK.6/KNL.1403/2024	30 Oktober 2024	2	Tahunan	266.580	266.580	0	Rohaeni, S.H.	DYK	1598/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	18-Nov-2024	2028/SEK.PN.W25-U4/PL.1.2.7/XII/2024	3-Dec-2024	3-Dec-2024	2-Dec-2026	3 Desember 2024	FE6AB48VVFEAM9NV	266.580	0	244.365	244.365	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
63	005011200663030000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	2703/SEK.PT.W9.U/PL.1.2.5/XI/2024	S-37/MK.6/KNL.0503/2024	18 Oktober 2024	1	Sekaligus	1.213.000	1.213.000	0	Meri Sapita Nova	Kantin	1597/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	18-Nov-2024	1335/ SEK.PN.W9.U7/PL1.2.3/ XII /2024	27-Dec-2024	27-Dec-2024	26-Dec-2025	24-Dec-2024	701EB55DFA1B2QAN	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	0
64	005010200097535000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	7249/W11-U/PL.1.2/XI/2024	S-57/MK.6/KNL.0805/2024	31-Oct-2024	3	Sekaligus	1.500.000	1.500.000	0	dyk	ruang sekreatriat dyk	1599/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	18-Nov-2024	81/SEK/PL.1.1.2/XII/2024	4-Dec-2024	4-Dec-2024	3-Dec-2027	4 Desember 2024	A7E3F3CIFKRVD9AA	1.500.000	0	1.458.333	1.458.333	0
65	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	6720/SEK.PT.W10-U/PL1.2/X/2024	S-257/MK.6/KNL.0701/2024	14-Oct-2024	1	Sekaligus	10.553.000	10.553.000	0	Alwiyah Ahmad	Kantin	1558/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	7124/SEK.PN.W10-U2/PL.1.2/XI/2024	28-Nov-2024	26-Nov-2024	25-Nov-2025	26-Nov-2024	0B4942G4VQ72QQVF	10.553.000	0	9.673.583	9.673.583	0
66	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	6676/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/X/2024	S-254/MK.6/KNL.0701/2024	14-Oct-2024	1	Sekaligus	10.704.000	10.704.000	0	Arifianto	Kantin	1560/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	6846/SEK.PN.W10-U2/PL.1.2/XI/2024	25-Nov-2024	22-Nov-2024	21-Nov-2025	22-Nov-2024	E9CB048VVFBRKOCH	10.704.000	0	9.812.000	9.812.000	0
67	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	6721/SEK.PT.W10-U/PL1.2/X/2024	S-255/MK.6/KNL.0701/2024	14-Oct-2024	1	Sekaligus	10.618.000	10.618.000	0	Sunar	Kantin	1557/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	7123/SEK.PN.W10-U2/PL.1.2/XI/2024	28-Nov-2024	26-Nov-2024	25-Nov-2025	26-Nov-2024	1C7D348VVFBRKRG1	10.618.000	0	9.733.167	9.733.167	0
68	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	6722/SEK.PT.W10-U/PL1.2/X/2024	S-256/MK.6/KNL.0701/2024	14-Oct-2024	1	Sekaligus	10.567.000	10.567.000	0	Megayani Pristika	Kantin	1559/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	7382/SEK.PN.W10-U2/PL.1.2/XI/2024	28-Nov-2024	26-Nov-2024	25-Nov-2025	26-Nov-2024	C686761QV4GKEPTN	10.567.000	0	9.686.417	9.686.417	0
69	005011900099422000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Makassar	5782/SEK.W22.U/PL1.2.3/X/2024	S-281/MK.6/KNL.1502/2024	18-Oct-2024	1	Sekaligus	1.692.000	2.532.000	840.000	Cynthia Rini	DYK	1563/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	1/SEK.PN.W22-U1/PL1.2/I/2025	3-Jan-2025	3-Jan-2025	2-Jan-2026	3-Jan-2025	B72F461QV4JTPSBC	2.532.000	0	0	0	0
70	005010200604719000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Cibinong	1025.A/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2/X/2024	S-125/MK.6/KNL.0803/2024	24 Oktober 2024	3	Sekaligus	23.373.000	23.373.000	0	BSI KC CIBINONG	Loket Pembayaran	1564/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	049/SEK.PA.W10-A20/PL.1.2/I/2025	9-Jan-2025	9-Jan-2025	8-Jan-2025	8-Jan-2025	989821JNG80HEKUS	23.373.000	0	0	0	0
71	005012900400817000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Rangkasbitung	645/SEK.PTA.W27-A/PL1.2.3/XI/2024	S-59/MK.6/KNL.0601/2024	29 Oktober 2024	3	Tahunan	1.253.750	1.253.750	0	Gita Nungky Natalie	Kantin	1568/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	656/SEK.PA.W27-A4/PL1.2.5/XII/2024	3-Dec-2024	3-Dec-2024	2-Dec-2027	3 Desember 2024	421D70NA054P1MTC	1.253.750	0	1.149.271	1.149.271	0
72	005012900663398000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Banten	3128/SEK.PT.W29-U/PL1.2/XI/2024	S-54/MK.6/KNL.0601/2024	18 Oktober 2024	3	Tahunan	1.918.959	1.918.959	0	Koperasi Cakra Sejahtera	Koperasi	1569/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	3372/SEK.PT.W29-U/PL1.2/XI/2024	22-Nov-2024	22-Nov-2024	21-Nov-2027	22-Nov-2024	9A35C7QLUPLENDNB	5.756.877	3.837.918	5.596.964	5.596.964	0
73	005010300097890000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Magelang	1751/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-229/MK.6/KNL.0901/2024	11-Sep-2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	52.000	52.000	0	Dharmayukti Karini Cabang PN Magelang	DYK	1561/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	128/SEK.PN.W12-U6/UM.01.01/XI/2024	19-Nov-2024	19-Nov-2024	18-Nov-2027	19-Nov-2024	D4A6461QV4GJBRGO	52.000	0	47.667	47.667	0
74	005010900402101000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Bangkinang	1332/KPTA.W4-A/PL1.2/XI/2024	S-112/MK.6/KNL.0303/2024	30 Oktober 2024	5	Tahunan (dibayar per tahun)	684.788	684.788	0	Sdri. Elianis	Kantin	1566/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	381/SEK.W4-A3/PL1.2/XI/2024	20-Nov-2024	20-Nov-2024	19-Nov-2029	20-Nov-2024	4B1E97QLUPLD9ST8	684.788	0	627.722	627.722	0
75	005013000663403000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	2090/SEK.PT.W7-U/PL1.2.1/XI/2024	S-65/MK.6/KNL.0404/2024	1-Nov-2024	1	Sekaligus	250.000	250.000	0	Kurnia Hutami Aisyara selaku Sekretaris Dharmayukti Karini Cabang Bangka Belitung	DYK	1567/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	2221/SEK.PT.W7-U/PL1.2/XI/2024	20-Nov-2024	20-Nov-2024	19-Nov-2025	20-Nov-2024	FD4C061QV4GKDSN8	250.000	0	229.167	229.167	0
76	005012800664522000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	1800/SEK.PT.W28-U/RT1/10/2024	S-52/MK.6/KNL.1604/2024	17 Oktober 2024	1	Sekaligus	500.000	500.000	0	Ferry Nita, SH selaku Ketua Dharmayukti Karini cabang Maluku Utara	DYK	1562/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	2363/SEK.PT.W28-U/RT1/12/2024	2-Dec-2024	2-Dec-2024	1-Dec-2025	2-Dec-2024	50F9F55DFA0LUU1L	500.000	0	458.333	458.333	0
77	005011200400452000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kalianda	2554/SEK.PT.W9-U/PL1.2.5/10/2024	S-92/MK.6/KNL.0502/2004	10-Oct-2024	1	Sekaligus	2.159.000	2.159.000	0	Risdianto	Kantin	1538/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	1917/SEK.PN.W9.U4/PL1.2.3/XI/2024	14-Nov-2024	14-Nov-2024	12-Nov-2025	13-Nov-2024	2386148VVFBKUES8	2.159.000	0	1.799.167	1.799.167	0
78	005010700098682000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	6035/KPT.W2.U/KU.10.01/X/2024	S-36/MK.6/KNL.0202/2024	10 oktober 2024	2	Sekaligus	5.085.000	5.385.000	300.000	Nurdiana	Kantin	1540/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	2686/W2.U10/SEK.PL.1.2/XI/2024	14-Nov-2024	14-Nov-2024	13-Nov-2026	14-Nov-2024	C84C46U8EV2R8NVK	5.385.000	0	4.936.250	4.936.250	0
79	005011500653458000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Banjarbaru	1391/KPT.W15-U/PL1.2.1/X/2024	S-164/MK.6/KNL.1203/2024	10 Oktober 2024	1	Sekaligus	5.034.000	5.034.000	0	Yenni	Kantin	1539/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	429/SEK.03-W15.U12/PL.1.2/XII/2024	4-Dec-2024	4-Dec-2024	4-Dec-2025	5 Desember 2024	9BEFF2G4VQ9K1DDT	5.034.000	0	4.614.500	4.614.500	0
80	005012600673055000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tubei	2601/SEK.PT.W8.U/PL1.2/X/2024	S-87/MK.6/KNL.0501/2024	22 Oktober 2024	1	Sekaligus	1.000.000	1.000.000	0	Putri Susanti	Kantin	1552/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	1336/SEK.W8.U8/PI1.2/XI/2024	20-Nov-2024	20-Nov-2024	19-Nov-2025	20-Nov-2024	C4C4C55DF9U81MIG	1.000.000	0	916.667	916.667	0
81	005012600673055000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tubei	2603/SEK.PT.W8.U/PL1.2/X/2024	S-88/MK.6/KNL.0501/2024	22 Oktober 2024	1	Sekaligus	240.000	240.000	0	Puteri Octaria	DYK	1551/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	1325/SEK.W8.U8/PL1.2/XI/2024	19-Nov-2024	19-Nov-2024	18-Nov-2025	19-Nov-2024	5DD3C55DF9U5PSOG	240.000	0	220.000	220.000	0
82	005012600673009000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tais	2602/SEK.PT.W8.U/PL1.2/X/2024	S-79MK.6/KNL.0501/2024	9 Oktober 2024	1	Sekaligus	300.000	300.000	0	Triana Nurmayati	DYK	1553/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	1633/SEK.PN.W8-U6/PL1.2/XI/2024	21-Nov-2024	21-Nov-2024	20-Nov-2025	21-Nov-2024	A52A155DP9U99CEN	300.000	0	275.000	275.000	0
83	005012600400239000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Arga Makmur	2612/SEK.PT.W8.U/PL1.2/XI/2024	S-86/MK.6/KNL.0501/2024	17 Oktober 2024	5	Sekaligus	1.045.200	1.045.200	0	Diny Selvia	DYK	1554/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	1774/SEK.PN.W8-U4/PL1.2/XI/2024	21-Nov-2024	21-Nov-2024	20-Nov-2029	21-Nov-2024	95FE17QLUPL7VN2Q	1.045.200	0	1.027.780	1.027.780	0
84	005012200663335000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	653/KPMT.W3.MIL/PL.1.2.1/X/2024	S-142/MK.6/KNL.1401/2024	8 Oktober 2024	1	Tahunan	1.500.000	1.500.000	0	I Made Yadnya	Kantin	1537/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	47/SEK.PM.W3-Mil03/PL/XII/2024	10-Dec-2024	10-Dec-2024	9-Dec-2025	10 Desember 2024	26C7855DFA0TM38N	1.500.000	0	1.375.000	1.375.000	0
85	005010500098281000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Malang	7584/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-151/MK.6/KNL.1003/2024	25 Oktober 2024	5	Sekaligus	13.705.000	13.705.000	0	KPRI Yustisia/Toko	Toko	1550/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	4002/SEK.PN.W14-U.2/RT1/XII/2024	9-Dec-2024	9 Desember 2024	8 Desember 2029	9-Dec-2024	0E4F948VVFEG4IA2	13.705.000	0	13.476.583	13.476.583	0
86	005010500098281000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Malang	7582/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-150/MK.6/KNL.1003/2024	24 Oktober 2024	2	Sekaligus	6.608.000	9.008.000	2.400.000	PT Bank Tabungan Negara, Tbk Cabang Malang/Payment Point	Payment Point	1547/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	504/SEK.PN.W14-U.2/RT1/I/2024	14-Jan-2025	14-Jan-2025	13-Jan-2027	-	-	0	-9.008.000	0	0	0
87	005010500098214000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Banyuwangi	7585/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-71/MK.6/KNL.1004/2024	11-Oct-2024	1	Sekaligus	505.500	505.500	0	Dharmayukti Karini Cabang Banyuwangi	DYK	1541/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	2979/SEK.PN.W14-U16/PL1.2/XI/2024	15-Nov-2024	15-Nov-2024	14-Nov-2025	15-Nov-2024	BA6C92G4VQ6TEOP6	505.500	0	421.250	421.250	0
88	005010300097886000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purworejo	1712/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-87/MK.6/KNL.0906/2024	14-Oct-2024	1	Sekaligus	750.000	750.000	0	Rina	Kantin	1548/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	506/SEK.PN.W12.U14/PL.01/XI/2024	26-Nov-2024	1-Dec-2024	30-Nov-2025	26-Nov-2024	6D15E3CIFKPKSOV1	750.000	0	687.500	687.500	0
89	005010300097886000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purworejo	1711/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-88/MK.6/KNL.0906/2024	14-Oct-2024	1	Sekaligus	750.000	750.000	0	Umy Budiarti	Kantin	1549/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	507/SEK.PN.W12.U14/PL.01/XI/2024	26-Nov-2024	1-Dec-2024	30-Nov-2025	26-Nov-2024	A58621JNFVKS2QB9	750.000	0	687.500	687.500	0
90	005010200097514000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bandung	6763/W11.U/PL.1.2/X/2024	S-273/MK.6/KNL.0801/2024	17 Oktober 2024	3	Sekaligus	900.000	900.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1503/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	1-Nov-2024	5356/W11.U1/PL1.2.1/XI/2024	12-Nov-2024	12-Nov-2024	11-Nov-2027	12-Nov-2024	0EC2C48VVFBJNOVB	900.000	0	850.000	850.000	0
91	005010200097624000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karawang	6764/W11.U/PL.1.2/X/2024	S-44/MK.6/KNL.0804/2024	15 Oktober 2024	1	Sekaligus	13.080.000	13.080.000	0	BSI	ATM	1502/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	1-Nov-2024	2422/SEK.03.WII-U10/PL.1.2.5/XI/2024	6-Nov-2024	6-Nov-2024	5-Nov-2025	6-Nov-2024	4584A2G4VQ6L8NLV	13.080.000	0	10.900.000	10.900.000	0
92	005010500098125000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bojonegoro	7190/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-85/MK.6/KNL.1006/2024	14 Oktober 2024	2	Sekaligus	11.000.000	11.000.000	0	Dwi Handayani (Kantin)	Kantin	1501/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	1-Nov-2024	2115/SEK.W14-U10/PL.1.2/XI/2024	8-Nov-2024	8-Nov-2024	7-Nov-2026	8-Nov-2024	3346E1JNFVKB47SF	11.000.000	0	10.083.333	10.083.333	0
93	005010500098214000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Banyuwangi	7192/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-75/MK.6/KNL.1004/2024	15 Oktober 2024	3	Sekaligus	6.295.000	6.295.000	0	PT Bank BTN (Persero)/Payment Point Bank BTN	Payment Point	1498/SEK/SK.PL.1.2/XI/2024	1-Nov-2024	2915/SEK.PN.W14-U16/PL1.2/XI/2024	8-Nov-2024	8-Nov-2024	7-Nov-2027	8-Nov-2024	64A3F7QLUPL1V146	6.295.000	0	5.945.278	5.945.278	0

	Bagian Administrasi Penghapusan																		Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
94	005012400099930000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Atambua	2544/SEK.PT.W26-U/PL1.2.5/X/2024	S-141/MK.6/KNL.1405/2024	16 Oktober 2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	26.538.333	26.538.333	0	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Atambua	ATM	1495/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	1217/SEK.PN.W26-U10/HK1.3.1/XI/2024	14-Nov-2024	14-Nov-2024	13-Nov-2027	14-Nov-2024	DAF670NA0523CB2J	26.538.333	0	22.115.278	22.115.278	0
95	005010900400492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Riau	979/SEK.PT.W4-U/PL1.2/X/2024	S-110/MK.6/KNL.0303/2024	16 Oktober 2024	1	Sekaligus	300.000	300.000	0	Katarina Hutapea	DYK	1505/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	1103/SEK.PT.W4.U/PL1.2.1/XII/2024	2-Dec-2024	2-Dec-2024	1-Dec-2025	2-Dec-2024	AD6D27QLUPNR5KFO	300.000	0	275.000	275.000	0
96	005010300097741000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pekalongan	1718/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-40/MK.6/KNL.0903/2024	21 Oktober 2024	1	Sekaligus	200.000	200.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1508/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	3878/SEK.PN.W12-U4/PL1.2/XI/2024	21-Nov-2024	21-Nov-2024	20-Nov-2025	21-Nov-2024	188CE1JNFVKNJLA4	200.000	0	183.333	183.333	0
97	005011500099219000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kotabaru	1433/KPT.W15-U/PL1.2.1/X/2024	S-172/MK.6/KNL.1203/2024	17 Oktober 2024	1	Bulanan	200.000	200.000	0	Ainun Jariah	Kantin	1504/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	387/SEK.W15.U4/RT1.1.1/11/2024	6-Nov-2024	6-Nov-2024	5-Nov-2025	6-Nov-2024	8CB1855DP9TQJHFF	200.000	0	0	0	0
98	005010200097691000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Majalengka	6767/W11-U/PL.1.2/X/2024	S-86/MK.6/KNL.0806/2024	22 Oktober 2024	3	Sekaligus	6.960.000	6.960.000	0	Mamat Rahmat	Kantin	1507/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	06/SEK.PN.W11-U14/PL2.1/I/2025	2-Jan-2025	2-Jan-2025	31-Dec-2027	2 Januari 2025	86EDE6U8F7EMF5V7	6.960.000	0	0	0	0
99	005010200097666000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Cianjur	6768/W11-U/PL.1.2/X/2024	S-117/MK.6/KNL.0803/2024	14 Oktober 2024	1	Sekaligus	755.000	755.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1509/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	1230/SEK.W11.U11/PL1.2/XI/2024	8-Nov-2024	8-Nov-2024	7-Nov-2025	8-Nov-2024	1624848VVFBGBM8O	755.000	0	629.167	629.167	0
100	005010100400214000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	6649/SEK.PT.W10-U/PL1.2/X/2024	S-258/MK.6/KNL.0701/2024	14-Oct-2024	1	Tahunan	24.700.000	24.700.000	0	PT. The Locus Kopi	Kafe	1500/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	1237/SEK.W10-U3/PL.1.2.1/XII/2024	10 Desember 2024	10 Desember 2024	9 Desember 2025	10-Dec-2024	9DF1B0NA054VKJIH	24.700.000	0	22.641.667	22.641.667	0
101	005013100307250000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Gorontalo	1396/SEK.PTA.W26-A/PL1.2/X/2024	S-53/MK.6/KNL.1602/2024	14 Agustus 2024	1	Sekaligus	3.900.000	3.900.000	0	Erawati Liputo	Kantin	1506/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	1910/SEK.PA.W26-A1/PL1.2/XI/2024	5-Nov-2024	5-Nov-2024	4-Nov-2025	5-Nov-2024	C43391JNFVK70M6T	3.900.000	0	3.250.000	3.250.000	0
102	005011000400503000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Jambi	2614/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/X/2024	S-112/MK.6/KNL.0401/2024	27-Sep-2024	1	Sekaligus	446.100	446.100	0	Dharmayukti Karini Provinsi Jambi	DYK	1499/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	2971/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/XI/2024	6-Nov-2024	6-Nov-2024	6-Nov-2025	6-Nov-2024	DB0BB48VVFBE3KDS	446.100	0	371.750	371.750	0
103	005011000477400000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	2612/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/X/2024	S-115/MK.6/KNL.0401/2024	10-Oct-2024	1	Sekaligus	1.050.000	1.050.000	0	Eni Susiana	Kantin	1497/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	1359/SEK.PN.W5-U9/PL.1.2.5/XI/2024	8-Nov-2024	8-Nov-2024	8-Nov-2025	8-Nov-2024	9C2DB55DF9TSP38C	1.050.000	0	875.000	875.000	0
104	005010100400647000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Timur	2113/KPTA.W9-A/PL1.2.1/X/2024	S-222/MK.6/KNL.0701/2024	9-Sep-2024	4 bulan	sekaligus	1.983.000	1.983.000	0	Koperasi Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Timur	Ruang Usaha Koperasi	1496/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	1-Nov-2024	689/SEK.W9-A3/PL1.2./XI/2024	25-Nov-2024	1-Sep-2024	31 Desember 2024	19-Dec-2024	442DD61QV4JJ162L	1.983.000	0	0	0	0
105	005012900400797000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Serang	601/SEK.PTA.W27-A/PL1.2.3/X/2024	S-47/MK.6/KNL.0601/2024	1 Oktober 2024	1	Sekaligus	1.533.000	1.533.000	0	Sdr. Wardi Doank/Kantin	Kantin	1478/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	31-Oct-2024	3927/SEK.W27-A1/PL.07/XI/2024	11-Nov-2024	11-Nov-2024	10-Nov-2025	11-Nov-2024	9CCFD7QLUPL4BH08	1.533.000	0	1.277.500	1.277.500	0
106	005010300098001000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purwokerto	1703/KPT.W12.U/PL.1.2.5/X/2024	S-77/MK.6/KNL.0906/2024	30-Sep-2024	5	Sekaligus	1.274.000	1.274.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1477/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	31-Oct-2024	2260/SEK.PN.W12-U5/PL1.2.5/XI/2024	7-Nov-2024	7-Nov-2024	6-Nov-2029	7-Nov-2024	A49112G4VQ6J32OI	1.274.000	0	1.231.533	1.231.533	0
107	005011100098963000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Baturaja	3643/SEK.PT.W6.U/PL.01/VIII/2024	S-190/MK.6/KNL.0402/2024	23 Agustus 2024	1	Sekaligus	1.070.500	1.190.500	120.000	Aftina Elvin Adrian, S.E sebagai Ketua Dharmayukti Karini Cabang Baturaja	DYK	1476/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	31-Oct-2024	165/SEK.PN.W6-U4/PL1/XI/2024	11-Nov-2024	11-Nov-2024	10-Nov-2025	11-Nov-2024	944B061QV4GBDL85	1.190.500	0	992.083	992.083	0
108	005011100098959000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kayu Agung	3642/SEK.PT.W6.U/PL.01/VIII/2024	S-184/MK.6/KNL.0402/2024	16 Agustus 2024	1	Sekaligus	2.439.000	2.439.000	0	Dewi Listiyorini sebagai Ketua Cabang Dharmayukti Karini Kayu Agung	DYK	1475/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	31-Oct-2024	1087/SEK.W6-U2/PL.1.2.1/12/2024	20-Dec-2024	20-Dec-2024	19-Dec-2025	20-Dec-2024	E59013CIFKSES5C0	2.439.000	0	2.439.000	2.439.000	0
109	005011100401909000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	3644/SEK.PT.W6.U/PL.01/X/2024	S-180/MK.6/KNL.0402/2024	13 Agustus 2024	2	Sekaligus	15.263.000	15.263.000	0	PT. BRI Tbk	ATM	1474/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	31-Oct-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	Sewa Batal krn sudah lewat 90hari sejak KPKNL terbit	0	-15.263.000	0	0	0
110	005012200099773000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Denpasar	493/SEK.PT.W24-U/PL1.2.1/X/2024	S-150/MK.6/KNL.1401/2024	11 Oktober 2024	3	Tahunan	300.000	300.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1455/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	517/SEK.PT.W24-U/PL1.2.7/X/2024	29-Oct-2024	29-Oct-2024	28-Oct-2027	28 Oktober 2024	8446C55DP9RFOLGH	300.000	0	250.000	250.000	0
111	005010700477399000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	5786/KPT.W2.U/KU.01.10/KU.01.10/X/2024	S-63/MK.6/KNL.0204/2024	24-Sep-2024	3	Sekaligus	3.504.750	3.504.750	0	Maisyaroh	Kantin	1449/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	153/SEK.PN.W2-U17/PL1.2.7/XI/2024	12-Nov-2024	12-Nov-2024	11-Nov-2027	12-Nov-2024	A23900NA05224VG8	3.504.750	0	3.310.042	3.310.042	0
112	005011400402468000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	953/SEK.PTA.W16-A/PL1.2/X/2024	S-71/MK.6/KNL.1201/2024	24-Sep-2024	3	Sekaligus	3.597.000	3.597.000	0	Sri Rahmawaty	Kantin	1447/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	480/SEK.PA.W16-A6/PL1.2/X/2024	30-Oct-2024	30-Oct-2024	27-Oct-2027	28-Oct-2024	B9F617QLUPIL0K8I	3.597.000	0	3.397.167	3.397.167	0
113	005011900099418000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Makassar	5213/SEK.W22.U/PL1.2.3/X/2024	S-262/MK.6/KNL.1502/2024	26-Sep-2024	1	Bulanan	200.000	220.000	20.000	La Hajji	Kantin	1451/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	5837/SEK.W22.U/PL1.2/X/2024	31-Oct-2024	31-Oct-2024	4-Nov-2025	5-Nov-2024	4EC2A1JNFVK7P344	220.000	0	0	0	0
114	005010300097780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pemalang	1680/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-29/MK.6/KNL.0904/2024	9 Oktober 2024	3	Sekaligus	11.482.500	11.482.500	0	Koperasi PN Pemalang	Koperasi	1457/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	1230/SEK.PN.W12.U21/PL1.2.5/X/2024	29-Oct-2024	29-Oct-2024	28-Oct-2027	29-Oct-2024	DC9AQE55DF9RFQ8OL	11.482.500	0	10.844.583	10.844.583	0
115	005010300097982000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Boyolali	1622/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-96/MK.6/KNL.0902/2024	3 Oktober 2024	2	Tahunan (dibayar per tahun)	200.000	200.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1450/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	1826/SEK.PN.W12.U17/PL1.2/XI/2024	4-Nov-2024	4-Nov-2024	3-Nov-2026	4-Nov-2024	E114861QV4G4KVI6	200.000	0	166.667	166.667	0
116	005010300097734000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tegal	1634/KPT.W12-U/PL1.2.5/X/2024	S-2166/KNL.0904/2024	7 Oktober 2024	1	Sekaligus	126.000	126.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1452/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	404.A/SEK.PN.W12-U3/PL1.2/X/2024	14-Oct-2024	14-Oct-2024	13-Oct-2025	14-Oct-2024	007007QLUPI7KD7I	126.000	0	94.500	94.500	0
117	005013500099272000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tarakan	501/KPT.W34-U/PL1/X/2024	S-30/MK.6/KNL.1303/2024	19-Sep-2024	1	Sekaligus	2.404.500	2.404.500	0	Hermannsyah, S.E.	Kantin	1446/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	2654/SEK.PN.W34-U2/PL.1.1/X/2024	1-Nov-2024	1-Nov-2024	10-Nov-2025	11-Nov-2024	26A0E7QLUPL47GRK	2.404.500	0	2.003.750	2.003.750	0
118	005013500099272000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tarakan	501/KPT.W34-U/PL1/X/2024	S-30/MK.6/KNL.1303/2024	19-Sep-2024	1	Sekaligus	2.569.000	2.569.000	0	Djasmin	Kantin	1445/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	2654/SEK.PN.W34-U2/PL.1.1/X/2024	1-Nov-2024	1-Nov-2024	10-Nov-2025	11-Nov-2024	AD2280NA0520USL6	2.569.000	0	2.140.833	2.140.833	0
119	005010200097514000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bandung	6583/SEK.PT.W11-U/PL.1.2/X/2024	S-266/MK.6/KNL.0801/2024	2 Oktober 2024	3	Sekaligus	102.792.000	102.792.000	0	BRI	ATM dan Kantor Kas	1458/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	6047/W11.U1/PL1.2.1/XII/2024	24-Dec-2024	24-Dec-2024	23-Dec-2027	24-Dec-2024	0A1675SDFA1B1120	102.792.000	0	102.792.000	102.792.000	0
120	005010200097514000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bandung	6582/SEK.PT.W11-U/PL.1.2/X/2024	S-267/MK.6/KNL.0801/2024	2 Oktober 2024	3	Sekaligus	30.000.000	30.000.000	0	kOPERASI	Koperasi	1459/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	5113/W11.U1/PL1.2.1/X/2024	25-Oct-2024	25-Oct-2024	24-Oct-2027	25-Oct-2024	539C71JNFVHRTG6C	30.000.000	0	28.333.333	28.333.333	0
121	005010200097500000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Bandung	6686/W11-U/PL.1.2./X/2024	S-270/MK.6/KNL.0801/2024	14 Oktober 2024	1	Sekaligus	500.000	500.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1461/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	6682/W11-U/PL.1.2/X/2024	28-Oct-2024	28-Oct-2024	27-Oct-2025	28-Oct-2024	12AF97QLUPIL0UFU	500.000	0	416.667	416.667	0
122	005010200097631000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Subang	6662/SEK.PT.W11-U/PL.1.2/X/2024	S-42/MK.6/KNL.0804/2024	7 Oktober 2024	1	Sekaligus	1.691.000	1.691.000	0	Diky Andrian, dkk	Koperasi	1460/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	3878c/SEK/W11.U17/PL1.2/XII/2024	28-Nov-2024	28-Nov-2024	27-Nov-2025	28-Nov-2024	0D5FA0NA052HPQUF	1.691.000	0	1.550.083	1.550.083	0
123	005061996103780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Strajak Diklat Hukum Peradilan	530/Bld.1/PL1.2/X/2024	S-111/MK.6/KNL.0803/2024	3 Oktober 2024	3	Sekaligus	57.486.000	57.486.000	0	BSI	ATM	1454/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	1002A/BSDK.1/PL.1.2/XII/2024	6-Dec-2024	6-Dec-2024	5-Dec-2027	6 Desember 2024	22BA255DFA0QC0U7	57.486.000	0	55.889.167	55.889.167	0
124	005010500098214000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Banyuwangi	7083.2/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-2296/KNL.1004/2024	10 Oktober 2024	1	Sekaligus	2.692.000	2.692.000	0	Suminah	Kantin	1456/SEK/SK.PL1.2/XI/2024	24-Oct-2024	2824/SEK.PN.W14-U16/PL1.2/X/2024	29-Oct-2024	29-Oct-2024	28-Oct-2025	29-Oct-2024	BDBCD3CIFKMO4D8R	2.692.000	0	2.243.333	2.243.333	0

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
125	005010900098849000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pekanbaru	976/SEK.PT.W4-U/PL1.2/X/2024	S-108/MK.6/KNL.0303/2024	4 Oktober 2024	3	Sekaligus	452.250	452.250	0	Dharmayukti Karini	DYK	1453/SEK/SK.PL1.2/X/2024	24-Oct-2024	0564/SEK.PN.W4-U1/PL1.2/XI/2024	10-Oct-2024	10-Oct-2024	9-Oct-2027	14-Oct-2024	6065B61QV4DEQLT0	452.250	0	414.563	414.563	0
126	005010100097467000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Jakarta	6084/SEK.PT.W10-U/PL1/IX/2024	S-207/MK.6/KNL.0701/2024	23 Agustus 2024	1	Sekaligus	5.748.000	5.748.000	0	Ezlia Septriyanti	Kantin	1448/SEK/SK.PL1.2/X/2024	24-Oct-2024	6757/SEK.W10.U/PL.1.2/X/2024	30 Oktober 2024	30 Oktober 2024	29 Oktober 2025	30 Oktober 2024	8DF6C7QLUPINA4V7	5.748.000	0	4.790.000	4.790.000	0
127	005010500401240000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Surabaya	4453/KPTA.W13-A/PL1.2.5/X/2024	S-304/MK.6/KNL.1001/2024	25-Sep-2024	1	Sekaligus	3.669.000	3.669.000	0	PT BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mulyosari Surabaya (Loket Bank)	Loket Bank	1125/SEK/SK.PL1.2/X/2024	18-Oct-2024	5619/SEK.PA.W13-A1/HM2.1/X/2024	31-Oct-2024	31-Oct-2024	30-Oct-2025	29-Oct-2024	4FF3548VVFP94HMQ2	3.669.000	0	3.057.500	3.057.500	0
128	005010500098310000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lumajang	6890/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-65/MK.6/KNL.1004/2024	7 Oktober 2024	1	Sekaligus	3.432.750	3.432.750	0	Nia Oktaria (Kantin)	Kantin	1126/SEK/SK.PL1.2/X/2024	18-Oct-2024	1806/SEK.PN.W14-U14/PL1.2/XI/2024	6-Nov-2024	6-Nov-2024	5-Nov-2025	5-Nov-2024	F677E48VVFBD3BD2	3.432.750	0	2.860.625	2.860.625	0
129	005010500098387000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Magetan	6792/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-81/MK.6/KNL.1006/2024	26-Sep-2024	3	Sekaligus	1.295.000	1.295.000	0	Vara Septhalia Dheawidyawati (Kantin)	Kantin	1123/SEK/SK.PL1.2/X/2024	18-Oct-2024	1040 /SEK.W14.U25/PL1.2/X/2024	23-Oct-2024	23-Oct-2024	22-Oct-2027	23-Oct-2024	2E5E07QLUPIGH7HU	1.295.000	0	1.223.056	1.223.056	0
130	005010500098387000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Magetan	6790/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-79/MK.6/KNL.1006/2024	26-Sep-2024	3	Sekaligus	1.500.000	1.500.000	0	Hamidah (Kantin)	Kantin	1124/SEK/SK.PL1.2/X/2024	18-Oct-2024	1044/SEK.W14.U25/PL1.2/X/2024	23-Oct-2024	23-Oct-2024	22-Oct-2027	23-Oct-2024	5A97255DF9RBA6KP	1.500.000	0	1.416.667	1.416.667	0
131	005012800099731000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Ternate	1614/SEK.PT.W28-U/RT1/09/2024	S-39/MK.6/KNL.1604/2024	17-Sep-2024	1	Sekaligus	456.000	456.000	0	Verra Lokollo sebagai Sekretaris Dharmayukti Karini Cabang Ternate	DYK	1403/SEK/SK.PL1.2/X/2024	16-Oct-2024	2267/SEK.PN.W28-U2/RT1.1.1/X/2024	21-Oct-2024	21-Oct-2024	20-Oct-2025	21-Oct-2024	B4D3O1JNFVHNGM0F	456.000	0	380.000	380.000	0
132	005010900400141000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangkinang	910/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/IX/2024	S-97/MK.6/KNL.0303/2024	12-Sep-2024	1	Sekaligus	300.000	300.000	0	Anike	DYK	1402/SEK/SK.PL1.2/X/2024	15-Oct-2024	2899/SEK.PN.W4-U6/PL1.2.5/XI/2024	1-Nov-2024	1-Nov-2024	31-Oct-2025	1-Nov-2024	AFP962G4VQ6GS84U	300.000	0	250.000	250.000	0
133	005012200099858000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangli	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-27/MK.6/KNL.1402/2022	31 Mei 2022	3	Sekaligus	5.611.875	5.611.875	0	I Nengah Karyasa, S.H.	Kantin	1400/SEK/SK.PL1.2/X/2024	10-Oct-2024	W24-U8/850/KP.01.2/08/2022	31 Mei 2022	31 Mei 2022	31 Mei 2025	2-Sep-2022	D8041JG4V7CH599M	5.611.875	0	779.427	779.427	0
134	005012600400132000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Manna	2354/SEK.PT.W8.U/PL1.2/X/2024	S-76MK.6/KNL.0501/2024	30-Sep-2024	1	Sekaligus	428.400	428.400	0	MERI MARLIANTI	DYK	1399/SEK/SK.PL1.2/X/2024	10-Oct-2024	1050/SEK.W8.U3/PL1.2/X/2024	11-Oct-2024	11-Oct-2024	10-Oct-2025	11-Oct-2024	CC11A48VVFFSJU1TU	428.400	0	321.300	321.300	0
135	005010500098387000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Magetan	6791/SEK.W14.U/PL.1.2.5/X/2024	S-80/MK.6/KNL.1006/2024	26-Sep-2024	3	Sekaligus	300.000	300.000	0	Dharmayukti Karini Pengadilan Negeri Magetan	DYK	1397/SEK/SK.PL1.2/X/2024	10-Oct-2024	1005/SEK.W14.U25/PL1.2/X/2024	16-Oct-2024	16-Oct-2024	15-Oct-2027	16-Oct-2024	95BE22G4VQ3T7A57	300.000	0	283.333	283.333	0
136	005010500401338000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jember	4228/SEK.PTA.W13-A/RT1/IX/2024	S-57/MK.6/KNL.1004/2024	29 Agustus 2024	3	Sekaligus	13.170.000	13.170.000	0	Cholifah (Kantin)	Kantin	1396/SEK/SK.PL1.2/X/2024	10-Oct-2024	3475/SEK.W13-A4/RT1/XI/2024	21-Nov-2024	21-Nov-2024	20-Nov-2027	21-Nov-2024	D4FC37QLUPLEFDKM	13.170.000	0	12.804.167	12.804.167	0
137	005010500401338000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jember	4202/SEK.PTA.W13-A/RT1/IX/2024	S-59/MK.6/KNL.1004/2024	5-Sep-2024	3	Sekaligus	6.997.000	6.997.000	0	BRI Cabang Jember (Loket BRI)	Loket BRI	1395/SEK/SK.PL1.2/X/2024	10-Oct-2024	3490/SEK.W13-A4/RT1/XI/2024	23-Nov-2024	23-Nov-2024	22-Nov-2027	23-Nov-2024	9118455DF9U98A78	6.997.000	0	6.802.639	6.802.639	0
138	005013100670184000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Marisa	1795/SEK.PT.W20-U/PL1.2/VIII/2024	S-58/MK.6/KNL.1602/2024	24-Sep-2024	3	Sekaligus	1.200.000	3.600.000	0	Ismail Buloto	Kantin	1398/SEK/SK.PL1.2/X/2024	10-Oct-2024	1498/SEK.PN.W20-U4/SEK.03.PL1.2.1/XII/2024	20-Dec-2024	20-Dec-2024	19-Dec-2027	20 Desember 2024	F8DCA0NA058KJHVA	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0
139	005010700672910000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Balige	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-5/MK.6/KNL.0202/2024	28 Februari 2024	2	Tahunan	4.206.000	4.206.000	0	Nurasyah Simajuntak	Kantin	358/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	601b/SEK.03.W2.U18/PL1/III/2024	15 Maret 2024	15 Maret 2024	14 Maret 2026	15-Mar-2024	335AP1JNFUSM92UC	4.206.000	0	2.453.500	2.453.500	0
140	005012400099972000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Penghapusan Negeri Waikabubak	2403/SEK.PT.W26-U/KP7.1/X/2024	S-57/MK.6/KNL.1405/2023	17 Mei 2023	3	Tahunan	10.122.000	10.122.000	0	Muhammad	KANTIN	1365/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	W26-U9/2124/PL.01.2/VI/2023	21 Juni 2023	21 Juni 2023	20 Juni 2026	21-Jun-2023	DB72F8N3EAET03L5	10.122.000	0	5.061.000	5.061.000	0
141	005010900400327000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Dumai	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-48/MK.6/KNL.0305/2023	6 Desember 2023	2	Tahunan	2.025.750	2.025.750	0	Yuliati	Kantin	1364/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	318/SEK.PN.W4-U5/RT1/XII/2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2025	14-Dec-2023	8239848VV64K5Q1K	2.025.750	0	1.020.135	928.469	91.666
142	005010900400327000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Dumai	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-48/MK.6/KNL.0305/2023	6 Desember 2023	2	Tahunan	2.025.750	2.025.750	200.000	Yuliati	Kantin	1364/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	318/SEK.PN.W4-U5/RT1/XII/2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2025	18-Oct-2024	05BF648VVF8QHG53	200.000		0	0	0
143	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	2260/SEK.PT.W8.U/PL1.2.1/IX/2024	S-67/MK.6/KNL.0501/2024	4-Sep-2024	1	Sekaligus	1.105.650	1.105.650	0	Mudriyanti, S.E., M.M.	DYK	1360/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	5392/SEK.PN.W8-U1/PL1.2/X/2024	9-Oct-2024	9-Oct-2024	8-Oct-2025	18-Sep-2024	63F1948VVF5QUF15	1.105.650	0	829.238	829.238	0
144	005010300097780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pemalang	1571/KPT.W12/U/PL 1.2.5/IX/2024	S-26/MK.6/KNL.0904/2024	23-Sep-2024	1	Sekaligus	600.000	600.000	0	Dharmayukti karini	DYK	1362/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	1172/SK.PN.W12.U21/PL1.2.5/X/2024	17-Oct-2024	17-Oct-2024	16-Oct-2025	17-Oct-2024	95AP9S5DF9R5PE4P	600.000	0	500.000	500.000	0
145	005011800099401000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Poso	473/SEK.PT.W21-U/PL1.2/IX/2024	S-70/MK.6/KNL.1603/2024	30 Agustus 2024	1	Sekaligus	1.000.000	1.000.000	0	Dharmayukti Karini	DYK	1359/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	2966/SEK.PN.W21-U2/PL1.2.5/X/2024	11-Oct-2024	11-Oct-2024	10-Oct-2024	11-Oct-2024	ACFC82G4VQ3R29HB	1.000.000	0	750.000	750.000	0
146	005011300099109000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mempawah	2482/KPT.W17-U/PL1.2.1/IX/2024	S-7/KN/KNL.1102/2024	23-Sep-2024	3	Sekaligus	2.160.000	2.160.000	0	yeni astuti	Kantin	1361/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	W17-U5/4146/PL1.2/XII/2024	2-Dec-2024	2-Dec-2024	1-Dec-2027	2-Dec-2024	96DA41JNFVN38JG	2.160.000	0	2.100.000	2.100.000	0
147	005011500099202000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kandangan	1296/KPT.W15-U/PL1.2.1/IX/2024	S-146/MK.6/KNL.1203/2024	11-Sep-2024	1	Bulanan	150.000	150.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Kandangan	DYK	1363/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	-	0	-150.000	0	0	0
148	005011700099340000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tahuna	452/SEK.PT.W19-U/PL1.2/IX/2024	S-84/MK.6/KNL.1601/2024	17-Sep-2024	2	Tahunan	1.639.200	1.639.200	0	Silfani Pialambung	Kantin	1366/SEK/SK.PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	W19-U3/27/PL1.2/10/2024	9-Oct-2024	20-Sep-2024	19-Sep-2026	20 Sept 2024	D1D8148VVF5T6AMR	3.278.400	1.639.200	2.868.600	2.868.600	0
149	005010500098132000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tuban	6126/SEK.W14.U/PL.1.2.5/IX/2024	S-267/MK.6/KNL.1001/2024	27-Aug-2024	3	Tahunan	2.500.000	2.500.000	0	Ika Marta Kristianita	Kantin	1320/SEK/SK.PL1.2/X/2024	3-Oct-2024	1389/SEK.PN.W14-U29/PL1.2/X/2024	15-Oct-2024	15-Oct-2024	14-Oct-2027	15-Oct-2024	8D2187QLUPI8ONOB	2.500.000	0	1.875.000	1.875.000	0
150	005012300099912000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Praya	1899/SEK.PT.W25-U/PL1.2/IX/2024	S-63/MK.6/KNL.1403/2024	3-Sep-2024	5	Sekaligus	11.678.750	11.678.750	0	Hani Ulya	Tempat Usaha Cuci Mobil	1321/SEK/SK.PL1.2/X/2024	3-Oct-2024	1417/SEK.PN.W25-U6/PL1.2/X/2024	8-Oct-2024	8-Oct-2024	8-Oct-2025	7-Oct-2024	4D96B0NA04UTQV6O	11.678.750	0	11.094.813	11.094.813	0
151	005010200308166000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	0946/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2.5/IX/2024	S-235/MK.6/KNL.0801/2024	28 Agustus 2024	per 6 jam	per 6 jam			0	gedung pertemuan / aula	gedung pertemuan / aula	1301/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	30-Sep-2024	6301/W11-U/PL.1.2/X/2024	3-Oct-2024	3-Oct-2024	2-Oct-2025	-	-	0	0	0	0
152	005012200099841000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gianyar	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-44/MK.6/KNL.1401/2022	30 Maret 2022	3	Sekaligus	3.651.500	3.651.500	0	I NYOMAN RIDI	KANTIN	1293/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	W24.U7/1046/KU.04/4/2022	21-Apr-2022	21-Apr-2022	20-Apr-2025	21-Apr-2022	3CE038N3E0UTORAR	3.651.500	0	405.722	405.722	0
153	005010500401381000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tulungagung	4059/KPTA.W13-A/PL1.2.5/IX/2024	S-114/MK.6/KNL.1003/2024	22 Agustus 2024	5	per tahun	1.372.275	1.372.275	0	Miftakul Rohmah (Kantin)	Kantin	1292/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	4194/SEK.PA.W13-A11/KU1.4/XI/2024	18-Nov-2024	3-Dec-2024	2-Dec-2029	18-Nov-2024	F16086U8EV2UL1H9	1.372.275	0	1.257.919	1.257.919	0
154	005010500098146000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lamongan	5342/SEK.W14.U/PL.1.2.5/VI/2024	S-236/MK.6/KNL.1001/2024	31 Juli 2024	1	per tahun	2.526.000	2.766.000	240.000	Kasinu Prasetyo Wahyudi (Kantin)	Kantin	1289/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	274/SEK.W14-U30/PL.08/10/2024	11-Oct-2024	11-Oct-2024	10-Oct-2025	11-Oct-2024	058232G4VQ3R2N4D	2.766.000	0	2.074.500	2.074.500	0
155	005010500401494000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Magetan	4046/KPTA.W13-A/PL1.2.5/IX/2024	S-70/MK.6/KNL.1006/2024	4-Sep-2024	3	sekaligus	1.421.000	1.421.000	0	Siti Asiyah (Kantin)	Kantin	1291/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	1449/SEK.PA.W13-A26/PL1.2./VII/2024	3-Oct-2024	3-Oct-2024	2-Oct-2027	3-Oct-2024	477127QLUPHTO4M0	1.421.000	0	1.302.583	1.302.583	0
156	005011900099574000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sinjai	4797/SEK.W22.U/PL1.2.3/IX/2024	S-188/MK.6/KNL.1502/2024	8 Agustus 2024	1	Tahunan	1.100.000	1.100.000	0	Andi Nurdjannah	Kantin	1288/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	611/SEK.PN.W22-U18/PL1.2.7/X/2024	2 Oktober 2024	2 Oktober 2024	2 Oktober 2025	2-Oct-2024	BD9362G4VQ3I9DB4	1.100.000	0	825.000	825.000	0

	Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
157	005010100400653000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	1880/KPTA.W9-A/PL1.2.5/IX/2024	S-216/MK.6/KNL.0701/2024	30-Aug-2024	5	Sekaligus	100.195.000	100.195.000	0	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.	ATM	1290/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	8972/SEK.PA.W9-A4/PL1.2/XI/2024	15-Nov-2024	15-Nov-2024	15-Nov-2029	15-Nov-2024	A72681JNFVKDC6K3	100.195.000	0	96.855.167	96.855.167	0
158	005010200097500000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Bandung	5952/SEK.PT.W11-U/PL.1.2/IX/2024	S-215/MK.6/KNL.0801/2024	12 Agustus 2024	1	Tahunan	1.621.250	1.621.250	0	Iin Komalasari	kantin	1299/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	6301/W11-U/PL.1.2/X/2024	3-Oct-2024	3-Oct-2024	2-Oct-2025	11-Oct-2024	179F01JNFVH6T6OO	1.621.250	0	1.215.938	1.215.938	0
159	005010200652062000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Depok	0947/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2.5/IX/2024	S-104/MK.6/KNL.0803/2024	11-Sep-2024	2	Sekaligus	29.108.000	29.108.000	0	BSI KCP Depok Nusantara	ATM	1296/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	5103/SEK.PA.W10-A22/HM2.1.2/XI/2024	12-Nov-2024	12-Nov-2024	11-Nov-2026	12-Nov-2024	C5A8171QLUPL5D905	29.108.000	0	26.682.333	26.682.333	0
160	005010900098849000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pekanbaru	919/SEK.PT.W4-U/PL1.2/IX/2024	S-92/MK.6/KNL.0303/2024	11-Sep-2024	1	Tahunan	3.500.000	3.500.000	0	Bunga Melia	kantin	1297/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	0603/SEK.PN.W4.U1/SK.PL.1.2/X/2024	8-Oct-2024	8-Oct-2024	7-Oct-2025	8-Oct-2024	5E2977QLUPI25H05	3.500.000	0	2.625.000	2.625.000	0
161	005010900098849000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pekanbaru	919/SEK.PT.W4-U/PL1.2/IX/2024	S-91/MK.6/KNL.0303/2024	11-Sep-2024	1	Tahunan	2.500.000	2.500.000	0	Asbinyah Pasaribu	kantin	1294/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	0592/SEK.PN.W4.U1/SK.PL.1.2/X/2024	3-Oct-2024	3-Oct-2024	2-Oct-2025	3-Oct-2024	78CCA7QLUPHRI263	2.500.000	0	1.875.000	1.875.000	0
162	005010300097741000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pekalongan	1543/KPT.W12.U/PL 1.2.5/IX/2024	S-34/MK.6/KNL.0903/2024	13-Sep-2024	2	Tahunan (bayar sekaligus)	3.500.000	3.500.000	0	Supeno Achirudin	kantin	1298/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	3417/SEK.PN.W12-U4/PL1.2/X/2024	11-Oct-2024	1-Jan-2025	31-Dec-2026	11-Oct-2024	C8F8B1JNFVHEKLM5	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
163	005013300400075000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sorong	896/PLH.SEK.PT.W31-U/PL1.2/IX/2024	S-55/MK.6/KNL.1703/2024	4-Sep-2024	1	Tahunan	5.623.250	5.623.250	0	Djanis Manan	Kantin	1287/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	1993/SEK.PN/W31-U2/PL.01/X/2024	21-Oct-2024	21-Oct-2024	20-Oct-2025	21-Oct-2024	292000NA04V5GGHF	5.623.250	0	4.686.042	4.686.042	0
164	005011200400452000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kalianda	2096/SEK.PT.W9-U/PL1.2.5/8/2024	S-81/MK.6/KNL.0502/2024	26 Agustus 2024	1	Tahunan	318.700	318.700	0	Dharmayukti karini	DYK	1225/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	1620/SEKPN.W9.U4/PL1.1/IX/2024	25-Sep-2024	25-Sep-2024	25-Sep-2025	24-Sep-2024	EB21A1JNFVER92BT	318.700	0	239.025	239.025	0
165	005010900662990000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	909/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/IX/2024	S-89/MK.6/KNL.0303/2024	4-Sep-2024	1	Sekaligus	1.800.000	1.800.000	0	Ihdina Syafitri	Kantin	1295/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	27-Sep-2024	3378/SEK.PN.W4-U7/PL.1.1/XI/2024	1-Nov-2024	1-Nov-2024	31-Oct-2025	1-Nov-2024	3AF0D2G4VQ6GR5GG	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	0
166	005012200099841000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gianyar	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-69/MK.6/KNL.1401/2024	13 Mei 2024	3	Sekaligus	1.800.000	1.800.000	0	DHARMAYUKTI KARINI	RUANG SEKRETARIAT DYK	1251/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	167/SEK.PN.W24-U7/PL1.2.7/V/2024	17 MEI 2024	17 MEI 2024	16 MEI 2027	27-May-2024	E657C2G4VPLCM799	1.800.000	0	1.450.000	1.450.000	0
167	005012800099769000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Soasio	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-9/MK.6/KNL.1604/2024	8 Maret 2024	1	Tahunan	1.322.750	1.322.750	0	Siti Dunawati Gafurudin	KANTIN	1259/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	258/SEKPN.W28-U1/PL1.2.1/II/2024	3 Januari 2024	3 Januari 2024	31 Desember 2024	17-Apr-2024	FCAB261QV3RLMCCC	1.322.750	0	0	0	0
168	005011200099045000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Metro	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-51/MK.6/KNL.0503/2023	15-Nov-2023	1	Tahunan	700.000	700.000	0	Jumiarsih	Kantin	1250/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	52/SEK.W9.U2/PL.02/I/2024	9 Januari 2024	9 Januari 2024	8 Januari 2025	9-Jul-2024	99A0A1JNFUMHO24R	700.000	0	0	0	0
169	005013500417722000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-27/MK.6/KNL.1303/2023	29 Agustus 2023	3	Tahunan	3.640.000	3.640.000	0	Sulistyo	KANTIN	1252/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	1094/SEK.PN.W34-U1/PL1.2.5/X/2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	9 Oktober 2026	10-Oct-2023	3035061QUR39BPSC	3.640.000	0	2.123.333	2.123.333	0
170	005010200097603000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purwakarta	5681/SEK.PT.W11-U/PL.1.2./IX/2024	S-39/MK.6/KNL.0804/2024	30 Agustus 2024	1	Tahunan	353.150	353.150	0	Dharmayukti Karini	DYK	1258/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	1440/Sek.PN/W11,U7/PL1.2/IX/2024	26-Sep-2024	26-Sep-2024	25-Sep-2025	26-Sep-2024	D84A36U8EUT7UGN8	353.150	0	264.863	264.863	0
171	005010700098654000KD	Tanah Kosong yang diperuntukan	Pengadilan Negeri Sidikalang	5186/KPT.PT.W2.U/KU.04/IX/2024	S-23/MK.6/KNL.0202/2024	18 Juli 2024	2	2 tahun sekaligus	2.409.000	3.129.000	720.000	Victor Hasmonangan Simanjuntak	KANTIN	1253/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	1510/W2.U14/PL.01/IX/2024	30-Sep-2024	30-Sep-2024	30-Sep-2026	30-Sep-2024	25E4F6U8EUTB8SNE	3.129.000	0	2.737.875	2.737.875	0
172	005012600400512000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Bengkulu	2178/SEK.PT.W8.U/PL1.2.1/IX/2024	S-69/MK.6/KNL.0501/2024	10-Sep-2024	1	Tahunan	259.650	259.650	0	Dharmayukti Karini	DYK	1260/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	2271/SEK.PT.W8.U/PL1.2/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	30-Sep-2025	01 Okt 2024	D47AA0NA04UO98QG	259.650	0	194.738	194.738	0
173	005012600673041000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kepahiang	2189/SEK.PT.W8.U/PL1.2.1/IX/2024	S-66/MK.6/KNL.0501/2024	4-Sep-2024	1	Tahunan	258.150	258.150	0	Kesekretariatan Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Kepahiang	DYK	1262/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	1419a/SEK.W8-U7/HM2.1.2/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	30-Sep-2025	01 Okt 2024	4D4EA61QV4D2OM56	258.150	0	193.613	193.613	0
174	005011900099471000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Maros	4505/SEK.W22.U/PL1.2.3/IX/2024	S-211/MK.6/KNL.1502/2024	23 Agustus 2024	3	Sekaligus	6.146.000	6.146.000	0	PT. BTN KC Makassar	Payment Point	1256/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	1526/SEK.W22.U4/RT1.1/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	1-Oct-2027	1-Oct-2024	AC6942G4VQ3H2EHE	6.146.000	0	5.633.833	5.633.833	0
175	005011900099560000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bantaeng	4799/SEK.W22.U/PL1.2.3/IX/2024	S-195/MK.6/KNL.1502/2024	12 Agustus 2024	3	Sekaligus	1.779.000	1.779.000	0	Rosdiana	Kantin	1254/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	868/SEK.PN.W22-U5/PL1.2.7/X/2024	21-Oct-2024	21-Oct-2024	21-Oct-2027	21-Oct-2024	6EFCD48VVF8SMJ3Q	1.779.000	0	1.680.167	1.680.167	0
176	005011900099560000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bantaeng	4798/SEK.W22.U/PL1.2.3/IX/2024	S-196/MK.6/KNL.1502/2024	12 Agustus 2024	1	Tahunan	982.200	982.200	0	TK Yustikarini	Sekolah Taman Kanak - kanak	1255/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	869/SEK.PN.W22-U5/PL1.2.7/X/2024	21-Oct-2024	21-Oct-2024	21-Oct-2025	21-Oct-2024	FECD148VVF8SMJ0C	982.200	0	818.500	818.500	0
177	005011600099290000KD	Tanah Kosong yang diperuntukan	Pengadilan Negeri Tenggarong	655/SEK.PT.W18-U/PL1.2/IX/2024	S-71/MK.6/KNL.1302/2024	9-Sep-2024	1	Tahunan	558.750	558.750	0	Arbain	Kantin	1261/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	3495/SEK.PN.W18-U3/PL1.2/XII/2024	10-Dec-2024	10-Dec-2024	9-Dec-2025	10-Dec-2024	0A6B30NA054VMG1R	558.750	0	512.188	512.188	0
178	005011200402644000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kalianda	1541/SEK.PTA/PL.1.2/VII/2024	S-67/MK.6/KNL.0502/2024	1 Agustus 2024	3	Sekaligus	1.115.000	1.115.000	0	Zubaidiah	Kantin	1257/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	1520/SEK.PA.W8-A3/PL.12/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	30-Nov-2027	1-Oct-2024	6F70A61QV4D2O7QA	1.115.000	0	1.022.083	1.022.083	0
179	005010500098298000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pasuruan	5652/SEK.W14.U/PL.1.2.5/VIII/2024	S-98/MK.6/KNL.1002/2024	21 Agustus 2024	5	per tahun	1.357.000	1.357.000	0	Kantin dan Koperasi	Kantin	1218/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	1362/SEK/W14.U9/KU1.1.1/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	30-Sep-2029	1-Oct-2024	9E0432G4VQ3H2I84	1.357.000	0	1.289.150	1.289.150	0
180	005012900097560000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Serang	2428/SEK.PT.W29-U/PL1.2.1/VIII/2024	S-40/MK.6/KNL.0601/2024	22 Agustus 2024	1	per tahun	8.023.000	8.023.000	0	Amal Jamaludin (Kantin)	Kantin	1217/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	3333/SEK.PN.W29-U1/PL1.2/IX/2024	24-Sep-2024	24-Sep-2024	23-Sep-2025	24-Sep-2024	3AF867QLUPFI54PN	8.023.000	0	6.017.250	6.017.250	0
181	005010500401551000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sampang	4020/KPTA.W13-A/PL1.2.5/IX/2024	S-34/MK.6/KNL.1005/2024	11 Juli 2024	1	tahunan	1.033.000	1.033.000	0	Mohammad Hazin (Kantin)	Kantin	1216/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	2176/SEK.PA.W13-A31/PL1.2.5/IX/2024	27-Sep-2024	27-Sep-2024	26-Sep-2024	27-Sep-2024	CD88248VVF63Q776	1.033.000	0	774.750	774.750	0
182	005011100663211000KD	Tanah Kosong yang diperuntukan	Pengadilan Militer Palembang	1460/KPMT.W1.Mil/PL.07/VIII/2024	S-181/MK.6/KNL.0402/2024	14 Agustus 2024	1	Tahunan	11.479.000	11.479.000	0	Gigih Prestasi	Kantin	1219/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	02/SEK.PM.W1-Mil.04/PL.07/X/2024	31-Oct-2024	31-Oct-2024	30-Oct-2025	31-Oct-2024	9C9C16U8EV0AR73R	11.479.000	0	9.565.833	9.565.833	0
183	005010400098078000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Wonosari	1090/BP/PW1.1.1/IX/2024	S-21/MK.6/KNL.0905/2024	5 Maret 2024	1	Tahunan	1.285.750	1.285.750	0	Sri Subiyandini	Kantin	1215/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	107/SEK.PN.W13.U4.1/PL.1.2.5/X/2024	6 Maret 2024	6 Maret 2024	6 Maret 2025	9 Oktober 2023 dan 14 Maret 2024	211042G4VGPNOC9K dan BA2D93CIFK1ESBO1	1.285.750	0	214.292	214.292	0
184	005010400400342000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	815/KPT.W13-U/PL1.2/IX/2024	S-82/MK.6/KNL.0905/2024	2-Sep-2024	1	Tahunan	1.275.300	1.275.300	0	Ir. Siti Sukhaeni Setyawan Hartono	DYK	1222/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	318/SEK.PN.W4-U5/RT1/XII/2023	2-Oct-2024	2-Oct-2024	2-Oct-2025	2-Oct-2024	5CBD83CIFKLUKB5G	1.275.300	0	956.475	956.475	0
185	005010400400342000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	816/KPT.W13-U/PL1.2/IX/2024	S-83/MK.6/KNL.0905/2024	4-Sep-2024	2	Tahunan	2.630.000	2.630.000	0	Sunyono	KANTIN	1221/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	415/SEK.PT.W13.U/PL1.2/X/2024	2-Oct-2024	2-Oct-2024	2-Oct-2026	2-Oct-2024	590A21JNFVH5QG4Q	2.630.000	0	2.301.250	2.301.250	0
186	005010200097687000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Indramayu	5608/SEK.PT.W11-U/PL.1.2./IX/2024	S-48/MK.6/KNL.0806/2024	2-Sep-2024	1	Tahunan	8.000.000	8.000.000	0	Ice Citra Kharisma	KANTIN	1220/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	2002/SEK.W11.U12/PL1.2.7/X/2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	30-Sep-2025	1-Oct-2024	6F55C3CIFKLTGNNJ	8.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
187	005011400099134000KD	Tanah Kosong yang diperuntukan	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	1684/SEK.PT.W16/PL1.2/IX/2024	S-26/MK.6/KNL.1202/2024	3-Sep-2024	1	Tahunan	1.324.000	1.324.000	0	Chanro Simamora	Kantin	1223/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	1277/SEK.W16-U3/HK1.3.1/X/2024	17-Oct-2024	17-Oct-2024	16-Oct-2024	17-Oct-2024	B61E961QV4DI66OO	1.324.000	0	1.103.333	1.103.333	0
188	005011400099134000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	1685/SEK.PT.W16/PL1.2/IX/2024	S-27/MK.6/KNL.1202/2024	3-Sep-2024	1	Tahunan	609.000	609.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Pangkalan Bun	DYK	1224/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	1182/SEK.W16-U3/HK1.3.1/IX/2024	25-Sep-2024	25-Sep-2024	24-Sep-2024	25-Sep-2024	A69CD7QLUPFJ7G6H	609.000	0	456.750	456.750	0
189	005010900402970000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	612/SEK.PTA.W4-A/PL.1.2/IX/2024	S-93/MK.6/KNL.0303/2024	11-Sep-2024	1	Tahunan	480.000	480.000	0	Rini Fitri	DYK	1211/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	19-Sep-2024	650/SEK.W4-A/PL1.2/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	1-Oct-2025	1-Oct-2024	1CC272G4VQ3H2LJP	480.000	0	360.000	360.000	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya Listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
190	005010900477343000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	900/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/IX/2024	S-29/MK.6/KNL.0305/2024	10-Sep-2024	3	tahunan (dibayar per tahun)	145.375	145.375	0	Sri Anggriani	DYK	1210/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	19-Sep-2024	249/SEK.PN.W4-U10/PL1.2/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	30-Sep-2027	1-Oct-2024	BADBB6U8EUVFSIKC	145.375	0	109.031	109.031	0
191	005010500526767000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	1516/SEK.PTTUN.W3-TUN/PL1.2.1/VIII/2024	S-85/MK.6/KNL.1002/2024	29-Jul-2024	1	Tahunan	1.233.500	1.593.500	360.000	KPRI Pengayoman PTUN Surabaya	Kantin	1171/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	2119/SEK.PTUN.W3-TUN1/PL1.2/X/2024	1-Oct-2024	1-Oct-2024	30-Sep-2025	1-Oct-2024	793D52G4VQ3H29QC	1.593.500	0	1.195.125	1.195.125	0
192	005012400099926000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kupang	2123/SEK.PT.W26-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-109/MK.6/KNL.1405/2024	6 Agustus 2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	5.328.333	5.328.333	0	NURLINA GADI	Kantin	1174/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	4043/SEK.PN.W26-U1/PL1.2.5/IX/2024	25-Sep-2024	25-Sep-2024	24-Sep-2027	25-Sep-2024	0E145C6U8ELT6Q7D2	5.328.333	0	3.996.250	3.996.250	0
193	005012400099926000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kupang	2124/SEK.PT.W26-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-110/MK.6/KNL.1405/2024	28 Agustus 2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	579.167	579.167	0	Roy Fulbertus	Kantin	1172/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	4044/SEK.PN.W26-U1/PL1.2.5/IX/2024	25-Sep-2024	25-Sep-2024	24-Sep-2027	25-Sep-2024	804E32G4VQ18P719	579.167	0	434.375	434.375	0
194	005012400099926000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kupang	2124/SEK.PT.W26-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-110/MK.6/KNL.1405/2024	28 Agustus 2024	5	Tahunan (dibayar per tahun)	92.441	92.441	0	Yosrida Hakim	DYK	1173/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	4045/SEK.PN.W26-U1/PL1.2.5/IX/2024	25-Sep-2024	25-Sep-2024	24-Sep-2029	25-Sep-2024	4AC9248VVF61J7GK	92.441	0	69.331	69.331	0
195	005011200663047000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sukadana	1893/SEK.PT.W9-U/PL.1.2.5/8/2024	S-22/MK.6/KNL.0503/2024	26 Juni 2024	3	Tahunan	907.725	907.725	0	Dharmayukti Karini	DYK	1177/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	906 /W9.U8/SEK.PN/IX/2024	20-Sep-2024	20-Sep-2024	19-Sep-2027	20-Sep-2024	B0DEC3CIFKJGPLO3	907.725	0	832.081	832.081	0
196	005010300097720000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Semarang	1432/KPT.W12-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-215/MK.6/KNL.0901/2024	26 Agustus 2024	2	Tahunan (DIBAYAR PER TAHUN)	4.500.000	5.000.000	500.000	Sdr. M. Arif Haryono	Kantin	1176/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	456/SEK.PN.W12-U1/PL1.2.7/IX/2024	25-Sep-2024	3 Agustus 2024	2 Agustus 2026	25-Sep-2024	6759F3CIFKJJ0263	5.000.000	0	2.916.667	2.916.667	0
197	005010300097720000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Semarang	1414/KPT.W12-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-214/MK.6/KNL.0901/2024	26 Agustus 2024	3	Tahunan (DIBAYAR PER TAHUN)	1.500.000	1.500.000	0	Sdri. Diah Ayu Aviana Pratiwi	Kantin	1175/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	455/SEK.PN.W12-U1/PL1.2.7/IX/2024	25-Sep-2024	22-Oct-2024	21-Oct-2027	25-Sep-2024	E41707QLUPFH13S2	1.500.000	0	1.250.000	1.250.000	0
198	005012200099794000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Singaraja	767/KPT.W24-U/PL1.2.1/VIII/2024	S-37/MK.6/KNL.1402/2024	30 Juli 2024	3	Tahunan (DIBAYAR PER TAHUN)	600.000	600.000	0	Ni Nyoman Parwati	DYK	1169/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	2365/SEK.PN.W24-U2/PL1.2/IX/2024	30-Sep-2024	30-Sep-2024	29-Sep-2027	30-Sep-2024	B16A261QV4AUQ2MG	600.000	0	450.000	450.000	0
199	005010700098739000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sibolga	5027/KPT.PT.W2.U/KU.04/IX/2024	S-44/MK.6/KNL.0204/2024	8 Agustus 2024	1	Tahunan	1.000.000	1.000.000	0	Dharmayukti Karini Cabang Sibolga	DYK	1170/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	47/SEK.PN.W2-U9/PL1.2/X/2024	15-Oct-2024	15-Oct-2024	14-Oct-2025	15-Oct-2024	523382G4VQ3UC5J1	1.000.000	0	750.000	750.000	0
200	005012500400050000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Merauke	823/SEK.PT.W30-U/PL1.2.3/VIII/2024	S-36/MK.6/KNL.1702/2024	9 Juli 2024	1	Tahunan	6.298.000	6.298.000	0	Rachmawati	Kantin	1168/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	185/SEK.PN.W30-U2/PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	23-Sep-2024	22-Sep-2025	23-Sep-2024	2F3582G4VQ13H68P	6.298.000	0	4.723.500	4.723.500	0
201	005011900099553000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sengkang	4276/SEK.W22.U/PL1.2.3/VIII/2024	S-25/MK.6/KNL.1503/2024	1-Aug-2024	3	Sekaligus	1.972.950	3.772.950	1.800.000	Rukman	Kantin	1148/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	4-Sep-2024	234/SEK.PN.W22-U9/PL1.2/X/2024	8 Oktober 2024	12 Oktober 2024	11 Oktober 2027	8-Oct-2024	495D90NA04UUTODD	3.772.950	0	3.458.538	3.458.538	0
202	005011000477368000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tebo	1897/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-81/MK.6/KNL.0401/2024	24-Jul-2024	1	Tahunan	905.250	905.250	0	Tumini	Kantin	1150/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	4-Sep-2024	898/SE.PN.W5-U10/PL.02/IX/2024	13-Sep-2024	13-Sep-2024	13-Sep-2024	12-Sep-2024	A0A966U8EUSPSE78	905.250	0	603.500	603.500	0
203	005012900097598000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tangerang	2305/SEK.PT.W29-U/PL1.2.1/VIII/2024	S-66/MK.6/KNL.0603/2024	6-Aug-2024	1	Tahunan	425.000	425.000	0	Dharmayukti Karini	Dharmayukti Karini Cabang Tangerang	1149/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	4-Sep-2024	486/SEK.PN.W29.U4/PL1.2/IX/2024	12-Sep-2024	12-Sep-2024	11-Sep-2025	12-Sep-2024	D38240NA04S2SE3N	425.000	0	283.333	283.333	0
204	005011500099230000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Martapura	1155/KPT.W15-U/PL1.2.1/VIII/2024	S-94/MK.6/KNL.1203/2024	25-Jun-2024	2	Sekaligus	1.449.000	1.449.000	0	Organisasi Dharmayukti Karini Cabang Martapura	DYK	1147/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	4-Sep-2024	338/SEK.PN.W15.U3/PL1.2/IX/2024	12-Sep-2024	12-Sep-2024	11-Sep-2026	12-Sep-2024	C1F5548VVF5LGAVA	1.449.000	0	1.207.500	1.207.500	0
205	005011500099230000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Martapura	59/KPT.W15-U/PL1.2.1/VII/2024	S-87/MK.6/KNL.1203/2024	24-Jun-2024	1	Tahunan	3.134.000	3.374.000	240.000	Maelah	Kantin	1146/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	4-Sep-2024	337/SEK.PN.W15.U3/PL1.2/IX/2024	12-Sep-2024	12-Sep-2024	11-Sep-2025	12-Sep-2024	77F4C3CIFKJ93AO1	3.374.000	0	2.249.333	2.249.333	0
206	005011600401924000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Penajam	595/SEK.PT.W18-U/PL1.2/VIII/2024	S-68/MK.6/KNL.1301/2024	1 Agustus 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	626.400	626.400	0	Nurhayati, S.H selaku pengurus Dharmayukti Karini Cab. Penajam	DYK	1102/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	3-Sep-2024	545/SEK.PN.W18-U9/PL1.2/08/2024	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024	22 Agustus 2025	23-Aug-2024	EF02C2G4VPU626J7	626.400	0	417.600	417.600	0
207	005010200604719000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Cibinong	0831/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2/VIII/2024	S-85/MK.6/KNL.0803/2024	11 Juli 2024	5	Tahunan	15.000.000	15.000.000	0	Bahrun Kustiawan, S.H.	Kantin	1142/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	3-Sep-2024	240/SEK.PA.W10-A20/PL1.1.2/IX/2024	13-Sep-2024	13-Sep-2024	13-Sep-2029	13-Sep-2024	9570455DP9O20K4C	15.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0
208	005010200400832000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Bekasi	0793/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2/VIII/2024	S-38/MK.6/KNL.0802/2024	20-Aug-2024	16	Bulanan (dibayar sekaligus)	9.600.000	9.600.000	0	PT. Bank Rakyat Indonesia	Outlet Jasa Pelayanan Transaksi Bank	1143/SEK/SK.PL1.2/IX/2024	3-Sep-2024	4153/SEK.W10-A19/PL1.2.3/ IX/2024	6-Sep-2024	6-Sep-2024	5-Dec-2025	6-Sep-2024	E95FD48VVF5DOOH4	9.600.000	0	7.200.000	7.200.000	0
209	005010800098807000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Painan	2895/SEK.PT.W3-U/PL1.2/VIII/2024	S-72/MK.6/KNL.0301/2024	24-Jul-2024	1	Tahunan	867.000	867.000	0	Fariyanti	Kantin	1122/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	29-Aug-2024	1106/SEK.PN/W3.U9/PL.01/09/2024	3-Sep-2024	3-Sep-2024	2-Sep-2025	3-Sep-2024	1D98D48VVF5CLQ73	867.000	0	578.000	578.000	0
210	005010300098015000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Cilacap	1377/KPT.W12.U/PL.1.2.5/VIII/2024	S-64/MK.6/KNL.0906/2024	24 Juli 2024	2	Tahunan (dibayar sekaligus)	623.475	623.475	0	Siti Latifah, A.Md.	DYK	1119/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	29-Aug-2024	1185/ SEK.PN.W12-U7/PL1.2/VIII/2024	1 agus 2024	1 agus 2024	31-Jul-2026	1-Aug-2024	BE8383CIFKFUM1PU	623.475	0	493.584	493.584	0
211	005010300097982000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Boyolali	1379/KPT.W12-U/PL1.2.5/VIII/2024	S-74/MK.6/KNL.0902/2024	14 Agustus 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	1.000.000	1.000.000	0	Asih Handayani	Kantin	1123/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	29-Aug-2024	1534/SEK.PN.W12.U17/PL1.2/IX/2024	17-Sep-2024	17-Sep-2024	16-Sep-2025	17-Sep-2024	C919A3CIFKJDDC34	1.000.000	0	750.000	750.000	0
212	005012600400126000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Curup	1993/SEK.PT.W8.U/PL1.2.1/VIII/2024	S-57/MK.6/KNL.0501/2024	29 Juli 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	619.050	619.050	0	Kesekretariatan Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Curup	DYK	1124/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	29-Aug-2024	1751/SEK.W8.U2/HK.1.3/IX/2024	10-Sep-2024	10-Sep-2024	9-Sep-2025	10-Sep-2024	4CDAA1JNFVE2EOO0	619.050	0	412.700	412.700	0
213	005011900401928000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Belopa	4331/SEK.W22.U/PL1.2.3/VIII/2024	S-12/MK.6/KNL.1504/2024	15-Jul-2024	1	Tahunan	283.800	283.800	0	Perhimpunan Dharmayukti Karini	Kantor	1121/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	29-Aug-2024	849/SEK.PN.W22.U24/RT1.1.2/X/2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	30-Sep-2025	1-Oct-2024	A1C427QLUPHRG8UB	283.800	0	212.850	212.850	0
214	005011900401928000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Belopa	4330/SEK.W22.U/PL1.2.3/VIII/2024	S-12/MK.6/KNL.1504/2024	15-Jul-2024	1	Tahunan	730.000	730.000	0	Nasrullah	Kantin	1120/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	29-Aug-2024	850/SEK.PN.W22.U24/RT1.1.2/X/2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	30-Sep-2025	1-Sep-2024	7AA440NA04UO88IT	730.000	0	547.500	547.500	0
215	005010300400936000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kendal	435/WKPTA.W11-A/PL1.2/VIII/2024	S-29/MK.6/KNL.0903/2024	1 Agustus 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	3.606.000	3.606.000	0	Sdr. Sumarsono	kantin	1105/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	22-Aug-2024	0695/SEK.PA.W11-A7/PL1.2/VIII/2024	26-Aug-2024	26-Aug-2024	25-Aug-2025	26-Aug-2024	93C857QLUPCKNG80	3.606.000	0	2.404.000	2.404.000	0
216	005010300400942000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Demak	439/WKPTA.W11-A/PL1.2/VIII/2024	S-190/MK.6/KNL.0901/2024	26 Juli 2024	3	Tahunan (dibayar per tahun)	1.651.000	1.651.000	0	Sdr. Unardi	kantin	1106/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	22-Aug-2024	1362/SEK.PA.W11-A15/HM.2.1.2/IX/2024	3-Sep-2024	3-Sep-2024	2-Sep-2027	3-Sep-2024	798FA55DP9NP2BKF	1.651.000	0	1.100.667	1.100.667	0
217	005010500401488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kota Madiun	3564/WKPTA.W13-A/PL1.2.5/VIII/2024	S-65/MK.6/KNL.1006/2024	31-Jul-2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	7.693.000	7.693.000	0	PT BSI (ATM)	ATM	1096/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	1853/SEK.PA.W13-A34/PL1.2/X/2024	28 Oktober 2024	28-Oct-2024	27-Oct-2025	28-Oct-2024	3EF0255DP9RBB9H2	7.693.000	0	6.410.833	6.410.833	0
218	005060199610378000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Strajak Diklat Hukum Peradilan	257/Bld.1/PL1.2/VIII/2024	S-95/MK.6/KNL.0803/2024	6 Agustus 2024	3	Tahunan (dibayar sekaligus)	75.054.000	75.054.000	0	PT Bank BNI Persero	ATM Center	1101/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	578C/BSDK.1/PL1.2/X/2024	4 Oktober 2024	4 Oktober 2024	3 Oktober 2027	04 Oktober 2024	F52AC1JNFVH80NM	75.054.000	0	68.799.500	68.799.500	0
219	005012400673020000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	1868/SEK.PT.W26-U/KP7.1/VIII/2024	S-92/MK.6/KNL.1405/2024	19 Juli 2024	3	Tahunan (dibayar sekaligus)	1.494.000	1.794.000	300.000	Ruben Lawa	kantin	1095/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	W26-U15/1246/PL.02/PN.LBJ/9/2024	9-Sep-2024	9-Sep-2024	8-Sep-2027	10-Sep-2024	F373B0NA04S0KLO8	1.794.000	0	1.594.667	1.594.667	0
220	005010200400832000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Bekasi	0793/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2/VIII/2024	S-31/MK.6/KNL.0802/2024	17 Juli 2024	17	Bulan (dibayar sekaligus)	1.700.000	1.700.000	0	PT. POS Indonesia	Outlet Jasa Pelayanan Pos	1094/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	4153/SEK.W10-A19/PL1.2.3/ IX/2024	6-Sep-2024	6-Sep-2024	5-Dec-2025	24 Oktober 2024	6B31061QV4DOSEV3	1.700.000	0	1.300.000	1.300.000	0
221	005011600099308000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Balikpapan	594/SEK.PT.W18-U/PL1.2/VIII/2024	S-67/MK.6/KNL.1301/2024	1 Agustus 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	686.550	686.550	0	Agustina Riantipraba selaku Sekretaris Dharmayukti Karini Cab. Balikpapan	DYK	1099/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	370/SEK.PN.W18-U2/PL1.2/VIII/2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	29 Agustus 2025	30-Aug-2024	7C0D36U8EUQBPM7O	686.550	0	457.700	457.700	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
222	005013100099361000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gorontalo	1429/SEK.PT.W20-U/PL.1.2/VIII/2024	S-51/MK.6/KNL.1602/2024	29 Juli 2024	5	Tahunan	2.000.000	2.000.000	0	Novita M. DG. Rapi	Kantin	1097/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	383/SEK.W20-U1/PL1.2/IX/2024	30-Sep-2024	30-Sep-2024	29-Sep-2029	30-Sep-2024	8952F55DF9OIC2IL	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
223	005013100099361000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gorontalo	1437/SEK.PT.W20-U/PL1.2/VIII/2024	S-51/MK.6/KNL.1602/2024	29 Juli 2024	5	Tahunan	1.000.000	1.000.000	0	Novita M. DG. Rapi	Kantin	1098/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	384/SEK.W20-U1/PL1.2/IX/2024	30-Sep-2024	30-Sep-2024	29-Sep-2029	30-Sep-2024	8952F55DF9OIC2IL	1.000.000	0	750.000	750.000	0
224	005012000400540000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Kendari	170/SEK.PT.W23-U/KU2.1/VIII/2024	S-75/MK.6/KNL.1505/2024	19 Juli 2024	1	Tahunan	300.000	300.000	0	Mery Hirasrita	DYK	1100/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	16-Aug-2024	211 /SEK.PT.W23-U/KU2.1/X/2024	21-Oct-2024	21-Oct-2024	20-Oct-2025	21-Oct-2024	351D47QLUPIEAVVR	300.000	0	250.000	250.000	0
225	005010300400565000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Siwi	1050/KPT.W12-U/PL1.2.5/VII/2024	S-19/MK.6/KNL.0904/2024	20 Juni 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	531.000	531.000	0	Dr. Mulianti S, S.I.P., M.Si.	DYK	1086/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	14-Aug-2024	1490/SEK.PN.W12-U34/PL1.2./VIII/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2024	20 Agustus 2025	21-Aug-2024	B6DA52G4VPU5T2M4	531.000	0	354.000	354.000	0
226	005010900402081000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Rengat	476/SEK.PTA.W4-A/PL1.2/VII/2024	S-68/MK.6/KNL.0303/2024	8 Juli 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	1.000.000	1.000.000	0	Hanafiah	KAntin	1087/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	14-Aug-2024	1197/SEK.W4-A2/PL1.2/IX/2024	2-Sep-2024	2-Sep-2024	1-Sep-2025	2-Sep-2024	E636B0NA04RPSEGL	1.000.000	0	666.667	666.667	0
227	005010300097940000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sragen	1117/KPT.W12-U/PL1.2.5/VII/2024	S-70/MK.6/KNL.0902/2024	15 Juli 2024	2,5	TAHUNAN (dibayar sekaligus UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN 6 BULAN)	2.700.000	3.000.000	300.000	SUYONO	Kantin	1088/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	14-Aug-2024	618/SEK.W12-U20/PL.07/08/2024	20 Agustus 2024	20 Agustus 2024	19 februari 2027	20-Aug-2024	97AE20NA04PBVOQ5	3.000.000	0	2.600.000	2.600.000	0
228	005010300097713000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Semarang	1150/KPT.W12.U/PL.1.2.5/VII/2024	S-181/MK.6/KNL.0901/2024	22 Juli 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	310.000	310.000	0	Sdri. Andriani Tri Wismintarti selaku Sekretaris Dharmayukti Karini Cabang Jawa Tengah	DYK	1090/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	14-Aug-2024	781/SEK.PT.W12-U/RT.1/VIII/2024	28 agustus 2024	28 agustus 2024	27 agustus 2025	28-Aug-2024	9AE2A7QLUPCMUFAA	310.000	0	206.667	206.667	0
229	005010300400571000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Magelang di Mungkid	1211/KPT.W12.U/PL.1.2.5/VII/2024	S-189/MK.6/KNL.0901/2024	8 Juli 2024	1	Tahunan (dibayar sekaligus)	128.000	128.000	0	Ny. Delvina F. Tambunan selaku Ketua Dharmayukti Karini Cabang Mungkid	DYK	1089/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	14-Aug-2024	263/SEK.PN/W12-U35/PL.03/VIII/2024	21-Aug-2024	21-Aug-2024	20-Aug-2025	21-Aug-2024	93BB32G4VPU5TJCD	128.000	0	85.333	85.333	0
230	005011300402370000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sambas	1600/KPTA.W14-A/PL.1.2.5/VII/2024	S-19/MK.6/KNL.1002/2024	12 Juni 2024	2	Tahunan	669.750	849.750	180.000	Norma	Kantin	1060/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	5-Aug-2024	2367/SEK.PA.W14-A2/PL1.2.5/VIII/2024	27-Aug-2024	27-Aug-2024	27-Aug-2026	27-Aug-2024	100DA3CIFKGNR1AS	849.750	0	566.500	566.500	0
231	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	3861/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/VII/2024	S-126/MK.6/KNL.0701/2024	21 Juni 2024	1	Tahunan	60.823.000	60.823.000	0	PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk	Kantor Kas	1058/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	5-Aug-2024	5331/SEK.PN.W10-U2/PL1.2/VIII/2024	26 Agustus 2024	26 Agustus 2024	25 Agustus 2025	23-Aug-2024	94CB261QV47MGE2K	60.823.000	0	40.548.667	40.548.667	0
232	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	3860/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/VII/2024	S-142/MK.6/KNL.0701/2024	8 Juli 2024	3	Sekaligus	60.681.000	60.681.000	0	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	ATM	1059/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	5-Aug-2024	4555/SEK.PN.W10-U2/PL1.2/VIII/2024	7 Agustus 2024	7 Agustus 2024	6 Agustus 2027	6-Aug-2024	FD1206U8EUPLJHIR	60.681.000	0	52.253.083	52.253.083	0
233	005011300400251000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Pontianak	1824/KPT.W17-U/PL1.2.1/VII/2024	S-87/MK.6/KNL.1101/2024	16 Juli 2024	1	Tahunan	27.194.000	27.194.000	0	PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pontianak	ATM	1047/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	2-Aug-2024	2502/SEK.PT.W17-U/PL1.2/X/2024	1-Oct-2024	2-Oct-2024	1-Oct-2025	1-Oct-2024	0C9C22G4VQ1AVTI9	27.194.000	0	20.395.500	20.395.500	0
234	005010300097929000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Wonosobo	1096/KPT.W12-U/PL1.2.5/VII/2024	S-57/MK.6/KNL.0906/2024	24 Juni 2024	3	sekaligus	648.975	648.975	0	Theresia Gesti Margihastuti selaku Ketua Dharmayukti Karini Cabang Wonosobo	Dharmayukti Karini Cabang Wonosobo	1046/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	2-Aug-2024	001/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	8-Aug-2024	8-Aug-2024	7 Agustus 2027	8-Aug-2024	1425548VVF2GK22R	648.975	0	558.840	558.840	0
235	005012000307729000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Baubau	44/WKPTA.W21-A/PL.1.2.3/VII/2024	S-62/MK.6/KNL.1505/2024	26 Juni 2024	3	Tahunan	1.519.375	1.519.375	0	La nuru	Kantin	1045/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	2-Aug-2024	489/SEK.PA .W21-A2/PL1.2/IX/2024	10-Sep-2024	10-Sep-2024	9-Sep-2027	10-Sep-2024	0DD407QLUPF4TMP4	1.519.375	0	1.012.917	1.012.917	0
236	005012000099663000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Baubau	133/SEK.PT.W23-U/KU2.1/VII/2024	S-63/MK.6/KNL.1505/2024	26 Juni 2024	5	Tahunan	240.000	290.000	50.000	Hanila sebagai Ses DYK	DYK	1044/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024	2-Aug-2024	1694/SEK.PN.W23-U2/RT1/VIII/2024	7-Aug-2024	7-Aug-2024	6-Aug-2025	7-Aug-2024	FA15E48VVF2HF31V	290.000	0	169.167	169.167	0
237	005011500670206000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Batulicin	883/KPT.W15-U/PL.1.2.1/VII/2024	S-109/MK.6/KNL.1203/2024	9-Jul-2024	1	Tahunan	346.300	346.300	0	Dharmayukti Karini PN Batulicin	DYK	2027/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	30-Jul-2024	1729/SEK.PN.W15.U5/PL1.2/VIII/2024	1 Agustus 2024	1 Agustus 2024	31 Juli 2025	1-Aug-2024	769682G4VPTI5QCE	346.300	0	202.008	202.008	0
238	005011500670206000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Batulicin	899/KPT.W15-U/PL1.2.1/VII/2024	S-109/MK.6/KNL.1203/2024	9-Jul-2024	1	Tahunan	3.751.000	3.751.000	0	Sutiana Herlyanti	Kantin	1028/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	30-Jul-2024	1730/SEK.PN.W15.U5/PL1.2/VIII/2024	1 Agustus 2024	1 Agustus 2024	31 Juli 2025	1-Aug-2024	3E87B2G4VPTI5SSL	3.751.000	0	2.188.083	2.188.083	0
239	005011500099180000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	900/KPT.W15-U/PL1.2.1/VII/2024	S-117/MK.6/KNL.1203/2024	17-Jul-2024	2	Sekaligus	2.323.000	2.323.000	0	Lestari	Kantin	1029/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	30-Jul-2024	673.A/SEK.W15.U/RT1/08/2024	13 Agustus 2024	13 Agustus 2024	12 Agustus 2026	13-Aug-2024	42E266U8EUPS87RC	4.646.000	2.323.000	3.678.083	3.678.083	0
240	005011500402449000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	1455/SEK.PTA.W15-A/PL.1.2.1/VII/2024	S-85/MK.6/KNL.1203/2024	20-Jun-2024	1	Tahunan	587.000	587.000	0	Dharmayukti Karini PTA Banjarmasin	DYK	1030/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	30-Jul-2024	1536/SEK.PTA.W15-A/PL1.2.1/VIII/2024	1-Aug-2024	1-Aug-2024	31-Jul-2025	1-Aug-2024	A578D7QLUPBSMCUK	587.000	0	342.417	342.417	0
241	005011900099422000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Makassar	3047/SEK.W22.U/PL1.2.3/VI/2024	S-127/MK.6/KNL.1502/2024	4 Juni 2024	1	Tahunan	1.350.500	1.350.500	0	Muhtar	Kantin	939/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	4155/SEK.PN.W22-U1/PL1.2/VIII/2024	20-Aug-2024	20-Aug-2024	20-Aug-2025	20-Aug-2024	26E0961QV47LA6UF	1.350.500	0	1.012.875	1.012.875	0
242	005012300099879000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Raba Bima	1329/SEK.PT.W25-U/PL1.2/VII/2024	S-41/MK.6/KNL.1404/2024	26 Juni 2024	1	Tahunan	1.513.000	1.513.000	0	Megawati	Kantin	942/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	2203/SEK.W25-U3/RT1/VIII/2024	20 Agustus 2024	20 Agustus 2024	19 Agustus 2025	12-Aug-2024	22A770NA04P48L1N	1.513.000	0	882.583	882.583	0
243	005012400400245000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Kupang	1601/SEK.PT.W26-U/KP7.1/VI/2024	S-80/MK.6/KNL.1405/2024	20 Juni 2024	5	Sekaligus	6.993.000	6.993.000	0	Nengsi Wijaya	Kantin	941/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	1950/SEK.PT.W26-U/PL1.2/VIII/2024	12 Agustus 2024	12 Agustus 2024	11 Agustus 2029	12 Agustus 2024	3A49F3CIFKG9F6J1	6.993.000	0	6.410.250	6.410.250	0
244	005012400400245000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Kupang	1600/SEK.PT.W26-U/KP7.1/VI/2024	S-79/MK.6/KNL.1405/2024	20 Juni 2024	5	Sekaligus	2.500.000	2.500.000	0	DYK PT Kupang	DYK	940/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	1879/SEK.PT.W26-U/PL1.2/VII/2024	30 JULI 2024	30 JULI 2024	29 JULI 2029	30 Juli 2024	BD7CD1JNFV92LGVV	2.500.000	0	2.291.667	2.291.667	0
245	005010300097961000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sukoharjo	1049/KPT.W12-U/PL1.2.5/VII/2024	S-67/MK.6/KNL.0902/2024	1-Jul-2024	1	tahunan (dibayar sekaligus)	158.000	158.000	0	DYK Cab Sukoharjo	DYK	943/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	1213/SEK.PN.W12-U32/PL1.2/VIII/2024	1 Agustus 2024	1 Agustus 2024	31 juli 2025	1-Aug-2024	E3FEA48VVF2B1DCS	158.000	0	92.167	92.167	0
246	005011600402480000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	1324/SEK.PTA.W17-A/PL1.2/VII/2024	S-57/MK.6/KNL.1302/2024	9-Jul-2024	1	tahunan	500.000	500.000	0	Irma Septianingsih, A.Md.A.	DYK	944/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	1469/SEK.PTA.W17-A/PL1.2/VIII/2024	2 Agustus 2024	2 Agustus 2024	1 Agustus 2025	2-Aug-2024	F80283CIFKFVM4MA	500.000	0	291.667	291.667	0
247	005011500400260000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Marabahan	882/KPT.W15-U/PL1.2.1/VII/2024	S-97/MK.6/KNL.1203/2024	28-Jun-2024	1	Bulanan	300.000	300.000	0	Kasno	Kantin	951/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	1266/SEK.W15.U10/RT1/IX/2024	27-Sep-2024	27-Sep-2024	26-Sep-2026	27-Sep-2024	AB36A1JNFVEUK73K	300.000	0	0	0	0
248	005010700098739000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sibolga	3211/KPT.W2.U/KU.01.10/VI/2024	S-32/MK.6/KNL.0204/2024	20 Mei 2024	2	sekaligus	6.680.000	6.680.000	0	Petmi Juniarpa	KANTIN	870/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	31/SEK.PN.W2-U9/PL1.2/VIII/2024	1-Aug-2024	1-Aug-2024	31-Jul-2026	1-Aug-2024	33F046U8EUPG79HK	6.680.000	0	5.288.333	5.288.333	0
249	005011500400282000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pelaihari	759/KPT.W15-U/PL1.2.1/VI/2024	S-72/MK.6/KNL.1203/2024	6 Juni 2024	1	Tahunan	1.274.000	1.394.000	120.000	Malawik	KANTIN	873/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	120/SEK.W15.U11/RT1/VII/2024	16-Jul-2024	16-Jul-2024	15-Jul-2025	16-Jul-2024	8,20241E+14	1.394.000	0	813.167	813.167	0
250	005012000401927000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	118/SEK.PT.W23-U/PL1.2/VI/2024	S-55/MK.6/KNL.1505/2024	10 Juni 2024	3	tahunan	3.600.000	3.600.000	0	Umi Roiyatul Wahyuni	Kantin	874/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	500/SEK.PN/W23.U9/PL1.2/VII/2024	17 Juli 2024	17 Juli 2024	16 Juli 2027	17-Jul-2024	2243255DF9I79SLA	3.600.000	0	2.100.000	2.100.000	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
251	005012200099802000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Negara	588/KPT.W24-U/PL1.2.1/V/2024	S-25/MK.6/KNL.1402/2024	30-Apr-2024	2	Sekaligus	200.000	200.000	0	Dharmayukti Karini PN Negara	DYK	869/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	1108/SEK.PN.W24-U4/RT1/VII/2024	22-Jul-2024	22-Jul-2024	21-Jul-2026	22-Jul-2024	B149D6U8EUN5C6VQ	200.000	0	158.333	158.333	0
252	005012200099802000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Negara	587/KPT.W24-U/PL1.2.1/V/2024	S-24/MK.6/KNL.1402/2024	30-Apr-2024	2	Sekaligus	2.186.250	2.186.250	0	Ni Ketut Nolinawati	KANTIN	868/SEK/SK.PL1.2.3/VII/2024	12-Jul-2024	1107/SEK.PN.W24-U4/RT1/VII/2024	22-Jul-2024	22-Jul-2024	21-Jul-2026	22-Jul-2024	5131D61QV44OV73I	2.186.250	0	1.730.781	1.730.781	0
253	005011900099471000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Maros	3185/SEK.W22.U/PL1.2.3/VI/2024	S-134/MK.6/KNL.1502/2024	11 Juni 2024	1	Tahunan	1.572.250	1.572.250	0	Retno Sari	Kantin	867/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	1150/SEK.W22.U4/RT1.1/VII/2024	15 Juli 2024	15 Juli 2024	14 Juli 2025	15-Jul-2024	89F8B0NA04M7TR7A	1.572.250	0	786.125	786.125	0
254	005010800400421000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	2105/SEK.PT.W3-U/PL1.2/VI/2024	S-16/MK.6/KNL.0302/2024	28-May-2024	1	Tahunan	785.000	785.000	0	Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman PN Tanjung Pati	Koperasi	871/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	1231/KPN.W3-U12/RT1/VIII/2024	8 Agustus 24	8 Agustus 24	8 Agustus 25	8-Aug-2024	3E8E261QV47AFT7R	785.000	0	457.917	457.917	0
255	005011200401911000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	1552/SEK.PT.W9-U/PL1.2.1/VII/2024	S-50/MK.6/KNL.0502/2024	12 Juni 2024	1	Tahunan	140.000	140.000	0	Dyk PN Gedong Tataan	DYK	875/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	803/SEK.03.W9.U11/PL1.2.1/VII/2024	15 Juli 2024	15 Juli 2024	14 Juli 2025	15-Jul-2024	23D0061QV44IBH8J	140.000	0	70.000	70.000	0
256	005011100402242000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Palembang	1662/SEK.PTA.W6-A/PL.01/VI/2024	S-129/MK.6/KNL.0402/2024	3 Juni 2024	3	tahunan	1.801.000	1.801.000	0	Hadi Wijaya	Kantin	872/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	1608/SEK.W6-A1/PL.1.2.4/VII/2024	16-Jul-2024	16-Jul-2024	15-Jul-2027	15-Jul-2024	0E47248VVEVFJ256	1.801.000	0	1.050.583	1.050.583	0
257	005011700099312000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Manado	309/SEK.PT.W19-U/PL1.2/VII/2024	S-66/MK.6/KNL.1601/2024	28 Juni 2024	1	tahunan	506.250	506.250	0	Jeisica Brenda Suwatalbessy	Kantin	876/SEK/SK.PL1.2/VII/2024	12-Jul-2024	353/SEK.PT.W19-U/PL1.2/VII/2024	24-Jul-2024	24-Jul-2024	23-Jul-2025	24 Juli 2024	40D220NA04MFR89K	506.250	0	295.313	295.313	0
258	005010500604730000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	2725/KPTA.W13-A/PL1.2.5/VI/2024	S-58/MK.6/KNL.1003/2024	20-May-2024	3	tahunan (dibayar sekaligus)	2.316.000	2.316.000	0	Rumsiyah	Kantin	835/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	4-Jul-2024	3116/SEK.PA.W13-A35/PL1.2.1/VII/2024	8-Jul-2024	8-Jul-2024	7-Jul-2027	8-Jul-2024	B76796U8EUM069AQ	2.316.000	0	1.930.000	1.930.000	0
259	005010200097521000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sumedang	3908/SEK.PT.W11-U/PL.1.2.7/VI/2024	S-137/MK.6/KNL.0801/2024	21 Mei 2024	2	Sekaligus	2.681.500	2.681.500	0	Nety Iskandar	Kantin	836/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	4-Jul-2024	870.a/SEK.PN.W11-U13 / PL1.2/VI/2024	5 Juni 2024	5 Juni 2024	4 Juni 2026	5 Juni 2024	AFC491JNFV5A1ABB	2.681.500	0	1.899.396	1.899.396	0
260	005010300097886000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purworejo	908/KPT.W12-U/PL1.2.5/VI/2024	S-46/MK.6/KNL.0906/2024	16 Mei 2024	1	tahunan (dibayar sekaligus)	446.850	446.850	0	Hesti Srieyanti (Sekretaris Dharmayukti Karini Cabang Purworejo)	Dharmayukti Karini Cabang Purworejo	818/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	283/SEK.PN.W12.U14/PL.01/VII/2024	8-Jul-2024	8-Jul-2024	7-Jul-2025	8-Jul-2024	7A2FC48VVEVITUJG	446.850	0	223.425	223.425	0
261	005010300401018000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Magelang	327/WKPTA.W11-A/PL1.2.1/VI/2024	S-112/MK.6/KNL.0901/2024	16 Mei 2024	3	dibayar sekaligus	15.208.000	15.208.000	0	Rakhmat Raafi (Ketua Yayasan Ihsanul Fikri)	(Jalan untuk Yayasan Ihsanul Fikri)	815/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	0495/SEK/W11-A35/PL.02/VII/2024	9 Juli 2024	9 Juli 2024	8 Juli 2027	9-Jul-2024	7A96F5SDF9HVGCAJ	15.208.000	0	12.673.333	12.673.333	0
262	005010900400141000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangkinang	621/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/VI/2024	S-47/MK.6/KNL.0303/2024	4 Juni 2024	5	tahunan (dibayar per tahun)	1.411.425	1.411.425	0	Asmarni	kantin	823/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	2088/SEK.PN.W4-U6/PL1.2.5/VII/2024	1-Jul-2024	1-Jul-2024	30 Juni 2029	1 Juli 2024	DB28255DF9HOLJPT	1.411.425	0	705.713	705.713	0
263	005010300097713000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Semarang	934/KPT.W12.U/PL.1.2.5/VI/2024	S-116/MK.6/KNL.0901/2024	21 Mei 2024	1	tahunan (dibayar sekaligus)	3.500.000	3.500.000	0	Ny. Susana	kantin	824/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	568/SEK.PT.W12-U/RT.1/VII/2024	1 Juli 2024	1 Juli 2024	30 Juni 2025	1-Jul-2024	95BF76U8EUMHJ0U3	3.500.000	0	1.750.000	1.750.000	0
264	005011500099251000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Amuntai	758/KPT.W15-U/PL1.2.1/VI/2024	S-74/MK.6/KNL.1203/2024	10 Juni 2024	1	Tahunan	1.500.000	1.500.000	0	Farida Ulfah	kantin	822/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	721/SEK.PN.W15.U7/SD.PL.1.2.1/VII/2024	9-Jul-2024	9-Jul-2024	9-Jul-2025	9-Jul-2024	F1F0961QV44BUUDJ	1.500.000	0	750.000	750.000	0
265	005010500604730000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	2519/WKPTA.W13-A/PL1.2.5/VI/2024	S-58/MK.6/KNL.1003/2024	20-May-2024	3	tahunan (dibayar sekaligus)	3.219.000	3.219.000	0	Annashr Satria Gamais	Kantin	819/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	3109/SEK.PA.W13-A35/PL1.2.1/VII/2024	8-Jul-2024	8-Jul-2024	7-Jul-2027	8-Jul-2024	9CB186U8EUMO66II	3.219.000	0	2.682.500	2.682.500	0
266	005010500604730000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	2724/KPTA.W13-A/PL1.2.5/VI/2024	S-58/MK.6/KNL.1003/2024	20-May-2024	3	tahunan (dibayar sekaligus)	1.635.000	1.635.000	0	Sapto Ranyono	Kantin	820/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	3110/SEK.PA.W13-A35/PL1.2.1/VII/2024	8-Jul-2024	8-Jul-2024	7-Jul-2027	8-Jul-2024	4EAFA3CIFKD6I863	1.635.000	0	1.362.500	1.362.500	0
267	005010500400596000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	3598/SEK.W14.U/PL.1.2.5/VI/2024	S-47/MK.6/KNL.1006/2024	3-Jun-2024	3	tahunan (dibayar sekaligus)	3.600.000	3.600.000	0	Ety Purwandari	Kantin	821/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	20/SEK.PN.W14.U34/SP.PL1.1.2/VII/2024	10-Jul-2024	10-Jul-2024	9-Jul-2027	10-Jul-2024	6485155DF9IOL3TV	3.600.000	0	3.000.000	3.000.000	0
268	005010900400141000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangkinang	623/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/VI/2024	S-57/MK.6/KNL.0303/2024	14-Jun-2024	5	5 (lima) tahun (dibayar per tahun)	1.263.263	1.263.263	0	Kasmini	KANTIN	826/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	2128/SEK.PN.W4-U6/PL1.2.5/VII/2024	5-Jul-2024	5-Jul-2024	4-Jul-2029	5 Juli 2024	EDDB32G4VPQN10C3	1.263.263	0	631.632	631.632	0
269	005010900098853000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkalis	622/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/VI/2024	S-18/MK.6/KNL.0305/2024	13 Juni 2024	1	1 (satu) tahun (dibayar sekaligus)	2.014.500	2.014.500	0	Sasmita	KANTIN	825/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	430/SEK.PN.W4-U2/PL1.2.1/7/2024	19 Juli 2024	19 Juli 2024	18 Juli 2025	19 Juli 2024	34E8D7QLUP9EM6JG	2.014.500	0	1.175.125	1.175.125	0
270	005011100098963000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Baturaja	1717 / SEK.PT.W6.U /PL.01/V/2024	S-102/MK.6/KNL.0402/2024	25-Apr-2024	3	tahunan	2.323.000	3.223.000	900.000	Mardalena	Kantin	814/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	110/SEK.PN.W6-U4//PL1.2/VII/2024	8 Juli 2024	4 Juli 2024	3 Juli 2027	8-Jul-2024	1BEF27QLUP94I1QO	3.223.000	0	1.611.500	1.611.500	0
271	005011100526750000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	389/KPTTUN.W5-TUN/PL1.2/VI/2024	S-121/MK.6/KNL.0402/2024	17 Mei 2024	2	Sekaligus	4.104.000	4.104.000	0	Deli Afrialdi M	Kantin	816/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	244/SEKPTUN.W5-TUN1/KU1.4/VII/2024	11 Juli 2024	11 Juli 2024	10 Juli 2026	11-Jul-2024	14EE70NA04M3N75R	4.104.000	0	3.078.000	3.078.000	0
272	005011000400503000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Jambi	1280/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/VI/2024	S-44/MK.6/KNL.0401/2024	16-Apr-2024	1	Sekaligus	2.145.000	2.545.000	400.000	Olza Akrianti	Kantin	817/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	28-Jun-2024	1842/SEK.PT.W5-U/PL1.2/VII/2024	31-Jul-2024	31-Jul-2024	31-Jul-2025	31-Jul-2024	AF90C1JNFV92SOR6	2.545.000	0	1.484.583	1.484.583	0
273	005012300099883000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	1101/SEK.PT.W25-U/PL1.2.5/V/2024	S-32/MK.6/KNL.1404/2024	17-May-2024	1	per bulan	68.250	68.250	0	Sjane Behuku P. (DYK PN Sumbawa Besar)	DYK	759/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	21-Jun-2024	1522/SEK.PN.W25-U2/PL1.2.5/VI/2024	tidak ada	21 Juni 2024	20 Mei 2025	22-Jul-2024	7D4153CIFKDJRG11	136.500	-68.250	0	0	0
274	005011600099286000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Samarinda	428/SEK.PT.W18-U/PL1.2/VI/2024	S-38/MK.6/KNL.1302/2024	6 Mei 2024	1	Tahunan	600.000	600.000	0	Novaria Lindyaseni Khalida Irawan, S.H	Dharmayukti Karini Cab. Samarinda	762/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	21-Jun-2024	261/SEK.PN.W18-U1/PL.02/VII/2024	1 Juli 2024	1 Juli 2024	30 Juni 2025	1 Juli 2024	1B8106U8EUMHGFJF	600.000	0	300.000	300.000	0
275	005010500401375000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	2486/KPTA.W13-A/PL1.2.5/V/2024	S-51/MK.6/KNL.1003/2024	24-Apr-2024	3	Per Tahun	587.500	587.500	0	Mochammad Hasbian Sidiq/Kantin	Kantin	760/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	21-Jun-2024	2523/SEK.PA.W13-A9/PL1.2/VII/2024	1-Jul-2024	1-Jul-2024	30-Jun-2027	1-Jul-2024	71E1E2G4VPQJEKVF	587.500	0	293.750	293.750	0
276	005010300098001000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purwokerto	897/KPT.W12-U/PL1.2.3/VI/2024	S-45/MK.6/KNL.0906/2024	15 Mei 2024	1	tahunan (dibayar sekaligus)	2.100.000	2.100.000	0	Munfatiah	kantin	758/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	21-Jun-2024	1502/SEK.PN.W12-U5/PL1.2/VII/2024	1-Jul-2024	1-Jul-2024	30 Juni 2025	1-Jul-2024	2F17855DF9HOL56Q	2.100.000	0	1.050.000	1.050.000	0
277	005013100664539000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Gorontalo	1034/SEK.W20-U/PL.02/VI/2024	S-34/MK.6/KNL.1602/2024	03 Juni 2024	2	tahunan	2.571.000	4.284.000	0	Zuhriati Usman	Kantin	761/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	21-Jun-2024	1318/SEK.PT.W20-U/PL1.2/VII/2024	3 Juli 2024	3 Juli 2024	2 Juli 2026	3-Jul-2024	327C83CIFKD1694H	2.571.000	1.713.000	1.285.500	1.285.500	0
278	005011000098921000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	1281/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/VI/2024	S-39/MK.6/KNL.0401/2024	22-Mar-2024	1	per bulan	150.000	200.000	50000	Suhendra	Kantin	763/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	21-Jun-2024					-	-	0	-200.000	0	0	0
279	005011600099286000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Samarinda	378/SEK.PT.W18-U/PL1.2/ V/2024	S-39/MK.6/KNL.1302/2024	6-May-2024	1	Bulanan	2.037.750	2.037.750	0	Ari Mulyanto	Kantin	757/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	20-Jun-2024	305/SEK.PN.W18-U1/PL.02/VIII/2024	1-Aug-2024	1-Aug-2024	31-Jul-2025	1 Agustus 2024	B44F56U8EUPG7K3B	2.037.750	0	1.188.688	1.188.688	0
280	005012200099780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Denpasar	465/KPT.W24-U/PL1.2.1/V/2024	S-65/MK.6/KNL.1401/2024	29-Apr-2024	3	tahunan (dibayar sekaligus)	6.029.000	6.029.000	0	Ni Ketut Mahyuni	Kantin	756/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	20-Jun-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	-	0	6.029.000	0	0	0
281	005012200099780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Denpasar	466/KPT.W24-U/PL1.2.1/V/2024	S-65/MK.6/KNL.1401/2024	29-Apr-2024	3	tahunan (dibayar sekaligus)	90.315.000	90.315.000	0	PT. BTN (Persero)	ATM	755/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	20-Jun-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	-	0	90.315.000	0	0	0

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya Listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
282	005010700400395000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	2422/SEK.PT.W2.U/KU.01.10/V/2024	S-83/MK.6/KNL.0201/2024	24-Apr-2024	5	tahunan (dibayar sekaligus)	20.380.000	21.130.000	750.000	Surya Dharma Tarigan	Kantin	754/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	20-Jun-2024	W2.U4/6758/UK.1.10/VII/2024/PN-Lbp	5 Juli 2024	5 Juli 2024	4 Juli 2029	5 Juli 2024	FAE633CIFKD2C176	21.130.600	-600	19.017.000	19.017.000	0
283	005010700098682000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	2300/KPT.W2.U/KU.10.01/4/2024	S-9/MK.6/KNL.0202/2024	3-Apr-2024	2	tahunan (dibayar sekaligus)	6.152.000	6.152.000	0	BUHA SIBURIAN	Menanam Ubi	753/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	20-Jun-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	-	0	6.152.000	0	0	0
284	005012200099780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Denpasar	488/SEK.W24-U/PL1.2.7/IX/2024	S-135/MK.6/KNL.1401/2024	23-Sep-2024	3	sekaligus	90.315.000	90.315.000	0	PT. BTN (Persero) Tbk	ATM	755/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	20-Jun-2024	299/SEK.PN.W24-U1/PL1.2/IX/2024	30-Sep-2024	30-Sep-2024	29-Sep-2027	30-Sep-2024	A30C16U8EUTB6BOD	90.315.000	0	82.788.750	82.788.750	0
285	005010300097975000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karanganyar	762/KPT.W12-U/PL1.2.5/V/2024	S-43/MK.6/KNL.0902/2024	18-Apr-2024	5	sekaligus	79.322.100	79.322.100	0	STIKES Tujuhbelas Karanganyar	sekolah (pendidikan)	711/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	13-Jun-2024	141/SEK.PN.W12-U31/PL1.2.5/VII/2024	5-Jul-2024	1 oktober 2024	30-Sep-2029	5-Jul-2024	87D211LJNFV8AJFLQ	79.322.100	0	75.355.995	75.355.995	0
286	005012900097560000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Serang	1333/SEK.PT.W29-U/PL1.2.1/V/2024	S-17/MK.6/KNL.0601/2024 dan S-20/MK.6/KNL.0601/2024	23-Apr-2024	1	tahunan	7.459.000	7.459.000	0	Lina (Kantin)	Kantin	721/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	13-Jun-2024	2030/SEK.PN.W29-U1/PL1.2.1/VI/2024	14 Juni 24	14 Juni 24	13 Juni 25	14-Jun-2024	D22C81JNFV5JUH2C	7.459.000	0	3.107.917	3.107.917	0
287	005011300099070000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Singkawang	1234/KPT.W17-U/PL1.2.1/V/2024	S-7/MK.6/KNL.1102/2024	7-Mar-2024	1	Bulanan	340.952	340.952	0	Rakhmad Yamardi	Kantin	639/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	29-May-2024	1242/SEK.W17-U2/PL.01/VI/2024	4 Juni 2024	4 Juni 2024	3 Juni 2025	4 Juni 2024	EC8D30NA04ITJULL	340.952	0	0	0	0
288	005010700401783000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Binjai	103/WKPTA.W2-A/PL1.1.2/V/2024	S-81/MK.6/KNL.0201/2024	19-Apr-2024	5	tahunan (dibayar sekaligus)	78.435.000	78.435.000	0	PT. Para Raja utama	Arena Bermain Olahraga dan rekreasi semi permanen	610/SEK/SK.PL1.2/VI/2024	15-May-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	-	0	78.435.000	0	0	0
289	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2005/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	3.939.000	3.939.000	0	Masngudin	Kantin	603/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	6390/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	316F02G4VPL2VUN0	3.939.000	0	1.641.250	1.641.250	0
290	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2000/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	18.385.000	18.385.000	0	PT Bank Mandiri Tbk	ATM	604/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	62994/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	9247855DF9CCJQ1Q	55.155.000	-36.770.000	44.430.417	44.430.417	0
291	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2001/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	18.385.000	18.385.000	0	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	ATM	605/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	6521/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	978BB2G4VPL2VGO8	18.385.000	0	7.660.417	7.660.417	0
292	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2002/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	18.861.000	18.861.000	0	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Payment Point	606/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	6299.B/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	C371D48VVEPRPT1L	18.861.000	0	7.858.750	7.858.750	0
293	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2003/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	4.125.000	4.125.000	0	Hartini	Kantin	607/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	6389/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	0D5762G4VPL2VTRV	4.125.000	0	1.718.750	1.718.750	0
294	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2004/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	4.125.000	4.125.000	0	Trisno Widodo	Kantin	608/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	6390/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	164080NA04GA5T92	4.125.000	0	1.718.750	1.718.750	0
295	005010100097492000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2004/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/IV/2024	S-50/MK.6/KNL.0701/2024	18-Mar-2024	3	Tahunan	3.939.000	3.939.000	0	Nadir	Kantin	609/SEK/SK.PL1.2/V/2024	15-May-2024	6390/SEK.W10-U5/PL.1.2/5/2024	19 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2027	16 Mei 2024	2D20355DF9C86OOS	3.939.000	0	1.641.250	1.641.250	0
296	005011700099354000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tondano	197/SEK.PT.W19-U/PL.1.2/V/2024	S-47/MK.6/KNL.1601/2024	26-Apr-2024	1	tahunan	2.194.000	2.194.000	0	Ferdy Waani	Kantin	593/SEK/SK.PL1.2/V/2024	14-May-2024	191/SEK.PN.W19-U2/PL1.2/V/2024	22 Mei 2024	22 Mei 2024	21 Mei 2025	22 Mei 2024	8B1056U8EUH6LID	2.194.000	0	914.167	914.167	0
297	005011900099528000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pinrang	2145/SEK.W22.U/PL1.2.3/IV/2024	S-16/MK.6/KNL.1302/2024	2-Apr-2024	2	sekaligus	17.571.000	17.571.000	0	ATM	ATM	566/SEK/SK.PL1.2/V/2024	8-May-2024	1264/-KC/LOG/05/2024	13 Mei 2024	1 Juni 2024	31 Mei 2026	19-Jun-2024	E1C431JNFV5O4EIT	17.571.000	0	12.446.125	12.446.125	0
298	005010300401106000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Banjarnegara	181/WKPTA.W11-A/PL1.2/IV/2024	S-36/MK.6/KNL.0906/2024	3-Apr-2024	2	sekaligus	1.200.000	1.200.000	0	Sdri. Sulastri	Kantin	568/SEK/SK.PL1.2/V/2024	8-May-2024	225/SEK.PA.W11-A5/PL1.2/VI/2024	13 Juni 2024	13-Jun-2024	12-Jun-2026	13-Jun-2024	5C0130NA04J5BUSF	1.200.000	0	850.000	850.000	0
299	005012200099794000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Singaraja	440/KPT.W24-U/PL1.2.1/IV/2024	S-21/MK.6/KNL.1402/2024	5-Apr-2024	3	Tahunan	5.000.400	5.000.400	0	Luh Sriani	Kantin	567/SEK/SK.PL1.2/V/2024	8-May-2024	1521/SEK.PN.W24-U2/PL1.2/VI/2024	10-Jun-2024	10-Jun-2024	9-Jun-2027	10-Jun-2024	CD5FE3CIFKA96ERA	5.000.400	0	2.083.500	2.083.500	0
300	005013000099024000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sungailiat	696/SEK.PT.W7-U/PL.1.2.5/IV/2024	S-9/MK.6/KNL.0404/2024	6-Mar-2024	1	tahunan	1.000.000	1.000.000	0	Susilawaty	Kantin	494/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	1812/SEK.W7-U2/PL1.2/V/2024	8-May-2024	8-May-2024	7-May-2025	8 Mei 2024	04A4F0NA04G2L6H4	1.000.000	0	333.333	333.333	0
301	005010300097996000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Klaten	638/KPT.W12-U/PL1.2.5/IV/2024	S-26/MK.6/KNL.0902/2024	29-Feb-2024	1	tahunan (sekaligus)	4.500.000	4.500.000	0	Sri Sudarti	kantin	496/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	938/SEK.PN.W12-U9/RT1/V/2024	7 Mei 2024	7 Mei 2024	6 Mei 2025	7-May-2024	6D0110NA04G1HFS2	4.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
302	005011500099230000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Martapura	527n/KPT.W15-U/PL1.2.1/IV/2024	S-47/MK.6/KNL.1203/2024	28-Mar-2024	2	Tahunan	203.000	683.000	480.000	Nyoman Ayu Wulandari	Dharmayukti	507/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	223/SEK.PN.W15.U3/PL1.2/V/2024	8-May-2024	8-May-2024	8-May-2026	8-May-2024	9E90E3CIFK76VASS	683.000	0	455.333	455.333	0
303	005011400099162000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Buntok	641/SEK.PT.W16/PL1.2/IV/2024	S-15/MK.6/KNL.1201/2024	26-Mar-2024	1	tahunan	1.500.000	1.500.000	0	Yeni Susanti	Kantin	502/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	608/SEK.PN.W16-U6/HK1.3/V/2024	15 Mei 2024	15 Mei 2024	14 Mei 2025	15 Mei 2024	3EFE76U8EUGVTL1T	1.500.000	0	625.000	625.000	0
304	005011100099003000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sekayu	1444/SEK.PT.W6-U/PL.1.2.1/IV/2024	S-90/MK.6/KNL.0402/2024	26-Mar-2024	3	tahunan	4.500.000	8.100.000	3.600.000	Eva Yanti	Kantin	508/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	883/SEK.PN.W6-U7/PL1.2/V/2024	29 Mei 2024	29 Mei 2024	28 Mei 2027	29-May-2024	015E361QV3UVGDUS	8.100.000	0	6.525.000	6.525.000	0
305	005011100401909000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	1608/SEK.PT.W6-U/PL.1.2.1/IV/2024	S-86/MK.6/KNL.0402/2024	25-Mar-2024	2	tahunan	1.573.500	2.773.500	1.200.000	Eva Yuliani	Kantin	509/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	637/W6-U10/PL.01/VI/2024	25 Juni 2024	25 Juni 2024	24 Juni 2026	25-Jun-2024	6E16F1JNFV5TOGPO	2.773.500	0	2.080.125	2.080.125	0
306	005011000477374000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sarolangun	911/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/IV/2024	S-32/MK.6/KNL.0401/2024	1-Mar-2024	1	tahunan	1.200.000	1.380.000	180.000	Kamsi	Kantin	505/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	218/SEK.PN.W5-U8/PL1.2/V/2024	14 Mei 2024	14 Mei 2024	13 Mei 2025	14-May-2024	945E17QLUP3B8F5E	1.380.000	0	460.000	460.000	0
307	005012900689313000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	386/KPTTUN.W2/PL.1.2.3/III/2024	S-10/MK.6/KNL.0601/2024	7-Mar-2024	2	tahunan	1.180.950	1.180.950	0	Sdr. Oom Romansa	Kantin	503/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	1305/SEK.03.W2-TUN3/PL.01/V/2024	2-May-2024	2-May-2024	2-May-2026	6 Mei 2024	03A8D48VVEPI20RO	2.361.900	-1.180.950	1.574.600	1.574.600	0
308	005010900401908000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	454/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/IV/2024	S-34/MK.6/KNL.0303/2024	1-Apr-2024	3	sekaligus	3.054.000	3.054.000	0	Syarly Yulian S	Kantin	495/SEK/SK.PL1.2/V/2024	2-May-2024	1153/SEK.PN.W4.U11/KU.01.10/V/2024	6 Mei 2024	30-May-2024	29-May-2027	30 Mei 2024	1054E6U8EUHE5GJM	3.054.000	0	2.460.167	2.460.167	0
309	005010100097471000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1999/SEK.PT.W10-U/PL1.2/IV/2024	S-71/MK.6/KNL.0701/2024	1-Apr-2024	2	Tahunan	6.117.000	6.117.000	0	Sari Sahsiana	Kantin The Locus Coffe	493/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	26-Apr-2024	389/SEK.PN/W10-U1/PL1.2/X/2023	27 Oktober 2023	27 Oktober 2023	26 Oktober 2025	17-Oct-2023	F699961QUR3H0D80	12.234.000	-6.117.000	5.097.500	5.097.500	0
310	005013200402148000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tanjungpinang	162/SEK.PTA.W32-A/PL1.2.3/III/2024	S-14/MK.6/KNL.0304/2024	6-Feb-2024	3	Tahunan	9.054.000	9.054.000	0	Koperasi Al Ishlah	kantin	491/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	26-Apr-2024	221/SEK.PA.W32-A1/PL1.2/IV/2024	29-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2027	29-Apr-2024	DDE9B6U8EUEDVNDK	9.054.000	0	7.042.000	7.042.000	0
311	005010500401560000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sumenep	1602/KPTA.W13-A/PL1.2.5/III/2024	S-15/MK.6/KNL.1005/2024	19 Maret 2024	1	tahunan	1.200.000	1.800.000	600.000	Siti Aisyah/Kantin	Kantin	487/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	25-Apr-2024	1180/SEK.PA.W13-A32/SK.HM2.1.3/V/2024	6-May-2024	6-May-2024	5-May-2025	6-May-2024	CAC4B7QLUP0QCGTL	1.800.000	0	600.000	600.000	0
312	005010700098696000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gunungsitoli	1872/KPT.PT.W2.U/KU.04/4/2024	S-19/MK.6/KNL.0204/2024	5-Mar-2024	2	tahunan	3.600.000	3.600.000	0	Destrina Gori Warasi	Kantin	489/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	25-Apr-2024	1448/SEK.W2-U12/PL.1.2.7/VII/2024	9 Juli 2024	9 Juli 2024	9 Juli 2026	10-Jul-2024	CBE5648VVEVK7AAD	3.600.000	0	2.700.000	2.700.000	0
313	005010600401966000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	314/SEK.MS.W1-A/PL1/III/2024	S-21/MK.6/KNL.0101/2024	16-Feb-2024	2	Sekaligus	1.070.500	1.070.500	0	Sariaton	Kantin	490/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	25-Apr-2024	301/SEK.MS.W1-A22/RT1/IV/2024	30-Apr-2024	30-Apr-2024	30-Apr-2026	30-Apr-2024	207683CIFK4SJ45C	1.322.500	-252.000	881.667	881.667	0
314	005011600401924000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Penajam	307/SEK.PT.W18-U/PL1.2/III/2024	S-19/MK.6/KNL.1301/2024	20-Mar-2024	5	sekaligus	12.197.250	12.197.250	0	Chofiyah	Kantin	488/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	25-Apr-2024	334/SEK.PN.W18-U9/PL1.2/05/2024	2 Mei 2024	29-May-2024	28-May-2029	2 Mei 2024	DE2E561QV3U6KPCQ	12.197.250	0	10.774.238	10.774.238	0
315	005010500098235000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kediri	2217/SEK.W14.U/PL.1.2.5/IV/2024	S-32/MK.6/KNL.1003/2024	15-Mar-2024	1	tahunan	2.292.000	2.292.000	0	Yuliati Kahiningsih/Kantin	Kantin	476/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	24-Apr-2024	579/.SEK.W14-U4/PL1.2.7/V/2024	2-May-2024	2-May-2024	1-May-2025	2-May-2024	0542D7QLUP2VHSL0	2.292.000	0	764.000	764.000	0

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
316	00501160047738000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kutai Barat	289/SEK.PT.W18-U/PL1.2/III/2024	S-26/MK.6/KNL.1302/2024	18-Mar-2024	2	Sekaligus	4.616.000	6.816.000	2.200.000	Ananiati	Kantin	473/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	24-Apr-2024	197/SEK.PN.W18-U8/PL1.2.1/IV/2024	29-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2026	29-Apr-2024	1E3FD7QLUP0QE553	6.816.000	0	4.544.000	4.544.000	0
317	00501160047738000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kutai Barat	291/SEK.PT.W18-U/PL1.2/III/2024	S-26/MK.6/KNL.1302/2024	18-Mar-2024	2	sekaligus	749.400	989.400	240.000	Dharmayukti Karini Ca. Kutai Barat	Dharmayukti	474/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	24-Apr-2024	199/SEK.PN.W18-U8/PL1.2.1/IV/2024	29-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2026	29-Apr-2024	766C261QV3S1K4VE	989.400	0	659.600	659.600	0
318	00501020009765200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sukabumi	2108/SEK.PT.W11-U/PL.1.2.7/III/2024	S-33/MK.6/KNL.0803/2024	19-Mar-2024	3	sekaligus	6.583.000	6.583.000	0	Anis Sumiati	Kantin	475/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	24-Apr-2024	1041/SEK.PN.W11-U4/PL1.2.1/VI2024	2 Mei 2024	2 Mei 2024	1 Mei 2027	2-May-2024	B4D940NA04FS9HS2	6.583.000	0	5.120.111	5.120.111	0
319	00501050009834500OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kota Madiun	2218/SEK.W14.U/PL.1.2.5/IV/2024	S-12/MK.6/KNL.1006/2024	13-Feb-2024	2	sekaligus	6.013.000	6.013.000	0	Suhartanto/Kantin (Bisnis)	Kantin	437/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	23-Apr-2024	816/SEK.03/W14.U5/PL.1.2/V/2024	7-May-2024	8 Mei 2024	7 Mei 2026	7-May-2024	FD0402G4VPKQCTNM	6.013.000	0	4.008.667	4.008.667	0
320	00501080009875000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Padang	1098/WKPT.W3-U/PL1.2/III/2024	S-29/MK.6/KNL.0301/2024	8-Mar-2024	2	sekaligus	18.774.000	18.774.000	4.320.000	Rika Julita/Kantin	Kantin	451/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	23-Apr-2024	1096/SEK.PN.W3-U1/RT1/V/2024	2-May-2024	2-May-2024	1-May-2026	2-May-2024	487E61JNFV28N148	18.774.000	0	15.396.000	15.396.000	0
321	00501070040038900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kisaran	1635/KPT.PT.W2.U/KU.04/3/2024	S-5/MK.6/KNL.0203/2024	26-Feb-2024	2	tahunan	5.162.000	5.162.000	0	Supriani	Kantin	436/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	23-Apr-2024	3408/SEK.03.W2.U11/PL1.2.5/V/2024	13 mei 2024	26-Feb-2024	26-Feb-2026	26-Feb-2024	CC4646U8EUGUQ77G	5.162.000	0	3.011.167	3.011.167	0
322	00501160066297200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bontang	279/SEK.PT.W18-U/PL1.2/III/2024	S-5/MK.6/KNL.1304/2024	13-Mar-2024	1	sekaligus	1.540.000	3.340.000	1.800.000	Koperasi Pegawai PN Bontang	Koperasi/Kios	438/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	23-Apr-2024	212/SEK.PN.W18-U7/PL1.2/IV/2024	25-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2025	25-Apr-2024	A98EE6U8EUE9PEHD	3.340.000	0	1.113.333	1.113.333	0
323	00501020009762400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karawang	1922/SEK.PT.W.W11-U/PL.1.2.7/III/2024	S-15/MK.6/KNL.0804/2024	7-Mar-2024	1	tahunan	6.000.000	6.000.000	0	A. Haerudin	Kantin	452/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	23-Apr-2024	861/SEK.03.W11-U10/PL1.2.7/IV/2024	29-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2025	26-Apr-2024	C91107QLUP0NCSV6	6.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
324	00501030009772000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Semarang	214/BP/PW1.1.1/1/2024	S-255/MK.6/KNL0901/2022	10-Nov-2022	3	Sekaligus	31.785.000	31.785.000	0	PT. BRI	ATM	434/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	22-Apr-2024	W12.U1/1279/PL.02/3 /2023	17 Maret 2023	21 Februari 2023	20 Februari 2026	13-Mar-2023	283B58N3EA5JNHHB	31.785.000	0	12.360.833	12.360.833	0
325	00501170067021000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Airmadidi	158/SEK.PT.W19-U/PL.1.2/III/2024	S-5/MK.6/KNL.1601/2024	19-Jan-2024	2	tahunan	2.512.650	2.512.650	0	Prativi Dinanti Ahmad	Kantin	430/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	5-Apr-2024	659/SEK.PN.W19-U6/PL1.2.5/IV/2024	17-Apr-2024	17-Apr-2024	16-Apr-2026	17-Apr-2024	152CB1JNFUVNM35O	2.512.650	0	837.550	837.550	0
326	00501050040132200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Pemanen	Pengadilan Agama Lamongan	1442/KPTA.W13-A/PL1.2.5/III/2024	S-77/MK.6/KNL.1001/2024	13-Mar-2024	1	tahunan	1.850.000	1.850.000	0	Lis Saudah	Kantin	411/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	788/KPA.W13-A7/ PL1.2.1/4/2024	17-Apr-2024	17-Apr-2024	16-Apr-2025	17-Apr-2024	53E012G4VPI42AAV	1.850.000	0	616.667	616.667	0
327	00501200009968400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kolaka	67/SEK.PT.W23-U/KU1.4/III/2024	S-25/MK.6/KNL.1505/2024	19-Feb-2024	3	Bulanan	250.000	300.000	50.000	Saenuddin Kallu	Kantin	410/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	1044/SEK.PN.W23-U4/PL1.2/IV/2024	30-Apr-2024	30-Apr-2024	29-Apr-2027	30-Apr-2024	96EE955DP99MAOLS	250.000	50.000	0	0	0
328	00501310030725000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Gorontalo	414/SEK.PTA.W26-A/PL1.2/III/2024	S-15/MK.6/KNL.1602/2024	21-Feb-2024	2	Sekaligus	5.676.000	5.676.000	0	Susanti Mohamad	Kantin	418/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	431/SEK.PA.W26-A1/PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	4-Apr-2024	3-Apr-2026	22-Apr-2024	2D0BF2G4VPI9CC2N	5.676.000	0	3.547.500	3.547.500	0
329	00501030061471000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kajen	589/KPTA.W11-A/PL1.2/III/2024	S-8/MK.6/KNL.0903/2024	20-Feb-2024	1	tahunan	1.722.000	1.722.000	0	Hasan Syarif Ismail	kantin	417/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	0162/SEK.PA.W11-A36/PL1.2/IV/2024	5-Apr-2024	5-Apr-2024	4-Apr-2025	5-Apr-2024	8022055DP98U81AB	1.722.000	0	430.500	430.500	0
330	00501030401092000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Purbalingga	643/KPTA.W11-A/PL1.2/III/2024	S-15/MK.6/KNL.0906/2024	27-Feb-2024	3	sekaligus	3.170.000	3.286.179	116.179	Mohammad Ghozali	kantin	416/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	769/SEK.PA.W11-A23/PL.06/IV/2024	29-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2027	29-Apr-2024	5437355DP99L6Q8O	3.286.179	0	2.555.917	2.555.917	0
331	00501050040152000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Pacitan	214/BP/PW1.1.1/1/2024	S-74/MK.6/KNL.1006/2023	15-Nov-2023	3	Sekaligus	705.000	705.000	0	KADIYEM	Kantin	395/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	1838/SEK.PA.W13-A28/RT1/XI/2023	27-Nov-2023	1 Desember 2023	30-Nov-2026	27-Nov-2023	5882C0N9VROD8N3G	705.000	0	450.417	450.417	0
332	00501050062615600OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Malang, Jawa Timur	214/BP/PW1.1.1/1/2024	S-36/MK.6/KNL.1003/2023	31-May-2023	3	Tahunan	1.000.000	1.000.000	0	H.M. Sholeh	Kantin	401/SEK/PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	W.14.U.35/3278/UM.01/6/2023	13 Juni 2023	13 Juni 2023	12 Juni 2026	6-Jun-2024	97E5061QV41A7TN4	1.000.000	0	416.667	416.667	0
333	00501050062615600KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Malang, Jawa Timur	214/BP/PW1.1.1/1/2024	S-36/MK.6/KNL.1003/2023	31-May-2023	3	Tahunan	1.000.000	1.000.000	0	Runadin	Kantin	400/SEK/PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	W.14.U.35/3279/UM.01/6/2023	13 Juni 2023	13 Juni 2023	12 Juni 2026	6-Jun-2024	709717QLUP631TCS	1.000.000	0	416.667	416.667	0
334	00501110009895900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kayu Agung	214/BP/PW1.1.1/1/202	S-216/MK.6/KNL.0402/2023	6-Oct-2023	2	Sekaligus	17.373.000	17.373.000	0	PT. BRI (Persero)	ATM	403/SEK/PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	1166/SEK.W6-U2/PL.1.2.1/10/2023	12 Oktober 2023	22 Oktober 2023	21 Oktober 2025	12 Oktober 2023	F7CD10N9VRL156VK	17.373.000	0	7.238.750	7.238.750	0
335	00501050040129300OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Gresik	4036/KPTA.W13-A/PL.01/VIII/2023	S-243/MK.6/KNL.1001/2023	4-Aug-2023	3	Tahunan	4.602.000	4.602.000	0	Harno	Kantin	408/SEK/PL1.2/IV/2024	4-Apr-2024	W13-A17/ 326 /PL.02/6/2023	19-Jun-2023	10 Agustus 2023	10 Agustus 2026	9-Aug-2023	05F6B0N9VRF06PIK	4.602.000	0	2.428.833	2.428.833	0
336	00501050062615600KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Malang, Jawa Timur	214/BP/PW1.1.1/1/2024	S-36/MK.6/KNL.1003/2023	31-May-2023	3	Tahunan	1.000.000	1.000.000	0	Sulianto	Kantin	399/SEK/PL1.2/IV/2024	3-Apr-2024	W.14.U.35/3280/UM.01/6/2023	13 Juni 2023	13 Juni 2023	12 Juni 2026	6-Jun-2024	5047B7QLUP631SUN	1.000.000	0	416.667	416.667	0
337	00501090040049200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Tinggi Riau	393/SEK.PT.W4-U/PL1.2.1/III/2024	S-22/MK.6/KNL.0303/2024	6-Mar-2024	2	Sekaligus	3.600.000	3.600.000	0	Melly Mulyanti	kantin	387/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	453/SEK.PT.W4.U/PL.1.2.1/IV/2024	22-Apr-2024	22-Apr-2024	21-Apr-2026	22-Apr-2024	2B3767QLUP0JSEOR	3.600.000	0	2.400.000	2.400.000	0
338	00501100047736800OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Tebo	641/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/III/2024	S-19/MK.6/KNL.0401/2024	15-Feb-2024	2	Sekaligus	7.977.000	7.977.000	0	BRI Cabang Rimbo Bujang	Kantor	390/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	386/SEK.PN.W5-U10/PL.02/IV/2024	3-Apr-2024	1 Maret 2024	1 Maret 2026	3-Apr-2024	BEF372G4VPHLNO3E	7.977.000	0	4.653.250	4.653.250	0
339	00501210009970600KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Ambon	401/KPT.W27-U/PL1/III/2024	S-14/MK.6/KNL.1701/2024	7 Maret 2024	1	Tahunan	6.337.500	6.337.500	0	Nur Baitillah Syukur	kantin	386/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	1811/SEK.PN.W27-U1/HM2.1.2/V/2024	27-May-2024	27-May-2024	26-May-2025	27 Mei 2024	0B4ED1JNFV30ANGP	6.337.500	0	2.640.625	2.640.625	0
340	00501080040044600OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Koto Baru	890/KPT.W3-U/PL1.2/III/2024	S-22/MK.6/KNL.0301/2024	26-Feb-2024	1	tahunan	2.441.000	2.441.000	0	Sdri. Lidia Okta Osweri	Kantin	378/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	409/SEK.PN.W3.U13/PL1.2.5/IV/2024	3-Apr-2024	5-Apr-2024	4-Apr-2025	2-Apr-2024	DA3100NA04CSU9D4	2.441.000	0	610.250	610.250	0
341	00501010009748800OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	1589/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/III/2024	S-26/MK.6/KNL.0701/2024	12-Feb-2024	1	tahunan	60.823.000	60.823.000	0	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kantor	391/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	-	0	60.823.000	0	0	0
342	00501030009776200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Pati	561/KPT.W12.U/PL.1.2.5/III/2024	S-63/MK.6/KNL.0901/2024	5-Mar-2024	5	sekaligus	3.850.000	3.850.000	0	Qurratulaini Wara Hastuti (Ketua Dharmayukti Karini Cabang Pati)	Dharmayukti Karini	389/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	247/SEK.PN.W12-U10/RT1/IV/2024	3-Apr-2024	3-Apr-2024	2-Apr-2029	1-Apr-2024	B1F5D7QLUOVV3T2G	3.850.000	0	3.272.500	3.272.500	0

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
343	005010300400911000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Semarang	620/KPTA.W11-A/PL1.2/III/2024	S-64/MK.6/KNL.0901/2024	5-Mar-2024	1	tahunan	1.750.000	1.750.000	0	Koperasi Pegawai Pengadilan Agama Semarang (KOPPAS)	Koperasi	388/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	296/SEK.PA.W11-A1/PL1.2/IV/2024	29-Apr-2024	29-Apr-2024	28-Apr-2025	29-Apr-2024	D6CDA2G4VPFPV1B1	1.750.000	0	583.333	583.333	0
344	005012800099731000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Ternate	429/SEK.PT.W28-U/RT1/02/2024	S-2/MK.6/KNL.1604/2024	12 Februari 2024	2	tahunan	3.744.000	4.344.000	600.000	Nur Hidayah Nama	Kantin	377/SEK/SK.PL1.2/IV/2024	1-Apr-2024	1106/SEK.PN.W28-U2/RT1/V/2024	8 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Mei 2026	8 Mei 2024	A78EC61QV3UC6OC4	4.344.000	0	1.448.000	1.448.000	0
345	005010200400772000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Agama Majalengka	0460/SEK.PTA.W10-A/PL.1.2/III/2024	S-12/MK.6/KNL.0806/2024	28-Feb-2024	5	Tahunan	2.903.850	2.903.850	0	Irpan Suprayana	Kantin	353/SEK/SK.PL1.2/III/2024	21-Mar-2024	1265/SEK.PN.W16-U4/KU1/V/2024	1-Apr-2024	1-Apr-2024	31 Maret 2029	1-Apr-2024	621E12G4VPHKJ5VB	2.903.850	0	725.963	725.963	0
346	005011400099155000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	439/SEK.PT.W16/PL1.2/III/2024	S-3/MK.6/KNL.1201/2024	2-Feb-2024	1	Tahunan	3.173.000	3.623.000	450.000	Asti Theresia Liani	Kantin	352/SEK/SK.PL1.2/III/2024	21-Mar-2024	1265/SEK.PN.W16-U4/KU1/V/2024	8 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Mei 2024	8 Mei 2024	8D49055DP9BVP8CK	3.623.000	0	1.207.667	1.207.667	0
347	005010500401488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Agama Kota Madiun	986/KPTA.W13-A/PL1.2.5/II/2024	S-10/MK.6/KNL.1006/2024	13-Feb-2024	3	Sekaligus	2.462.000	2.822.000	360.000	Gunarto/Kantin	Kantin	351/SEK/SK.PL1.2/III/2024	21-Mar-2024	944/SEK.PA.W13-A34/KU/V/2024	6-May-2024	6-May-2024	5-May-2027	6-May-2024	381973CIFK75LF08	2.822.000	0	2.194.889	2.194.889	0
348	005010200097535000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	1216/SEK.PT.W11 U/PL.1.2.5/II/2024	S-10/MK.6/KNL.0805/2024	5-Feb-2024	1	tahunan	1.800.000	1.800.000	0	Entin Sumartini / Kantin	Kantin	335/SEK/SK.PL1.2/III/2024	20-Mar-2024	W11.U9/18/PL.06.10/III/2024	20 Maret 2024	20 Maret 2024	19 Maret 2025	20-Mar-2024	6667A1JNFUSRGKFG	1.800.000	0	450.000	450.000	0
349	005011100098942000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Palembang	1048/Plh.SEK.PT.W6-U/PL.1.2.1/III/2024	S-58/MK.6/KNL.0402/2024	5-Mar-2024	3	tahunan	18.739.000	18.739.000	0	Rahmayati	Kantin	319/SEK/SK.PL1.2/III/2024	19-Mar-2024	923/SEK.W6-U1/PL.1.2/III/2024	21 Maret 2024	22 Maret 2024	21 Maret 2027	21-Mar-2024	8548E2G4VPF91TS7	18.739.000	0	14.054.250	14.054.250	0
350	005011700099312000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Manado	115/SEK.PT.W19-U/PL.1.2/III/2024	S-25/MK.6/KNL.1601/2024	1-Mar-2024	1	tahunan	14.762.000	14.762.000	0	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	ATM	321/SEK/SK.PL1.2/III/2024	19-Mar-2024	153/SEK.PT.W19-U/PL.1.2/III/2024	21 Maret 2024	21 Maret 2024	20 Maret 2025	21 Maret 2024	C332848VVEK1R1MK	14.762.000	0	3.690.500	3.690.500	0
351	005010500401381000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Agama Tulungagung	1217/KPTA.W13-A/PL1.2.5/III/2024	S-17/MK.6/KNL.1003/2024	20-Feb-2024	5	Tahunan	9.170.000	9.170.000	0	BRI Kantor Cabang Tulungagung	Bank	294/SEK/SK.PL1.2/III/2024	14-Mar-2024	1330/SEK.PA.W13-A11/KU1.4/III/2024	20-Mar-2024	20-Mar-2024	19-Mar-2029	20-Mar-2024	420B46U8EUB3O3MQ	9.170.000	0	2.292.500	2.292.500	0
352	005010500098352000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Ponorogo	1915/SEK.W14.U/PL.1.2.5/III/2024	S-11/MK.6/KNL.1006/2024	13-Feb-2024	2	2 Tahun	4.800.000	4.800.000	0	Yayuk Yuliani/Kantin	Kantin	292/SEK/SK.PL1.2/III/2024	14-Mar-2024	457/SEK.PN.W14-U17/PL.1.2/V/2024	2-May-2024	2-May-2024	30-Apr-2026	2-May-2024	6FF8A61QV3U6LLSL	4.800.000	0	3.200.000	3.200.000	0
353	005011400099141000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Negeri Muara Teweh	438/SEK.PT.W16/PL1.2/III/2024	S-148/MK.6/KNL.1201/2023	21-Dec-2023	1	Tahunan	2.670.000	2.670.000	0	Farida Lestari Pujiastuti	Kantin	293/SEK/SK.PL1.2/III/2024	14-Mar-2024	1317/SEK.PA.W16-A5/PL.1.2/XI/2013	15 Maret 2024	15 Maret 2024	14 Maret 2025	15-Mar-2024	B6A4F55DP967T99K	2.670.000	0	445.000	445.000	0
354	005012300099862000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mataram	507/SEK.PT.W25-U/PL1.2/II/2024	S-16/MK.6/KNL.1403/2024	20-Feb-2024	1	Tahunan	1.709.750	1.709.750	0	Bambang Irfandi	Kantin	277/SEK/SK.PL1.2/III/2024	13-Mar-2024	950/SEK.PN.W25-U1/PL1.2/III/2024	19 Maret 2024	19 Maret 2024	18 Maret 2025	19-Mar-2024	C49A02G4VPF6QGVH	1.709.750	0	427.438	427.438	0
355	005011300670227000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sambas	572/KPT.W17-U/PL1.2.1/II/2024	S-3/MK.6/KNL.1102/2024	5-Feb-2024	1	Tahunan	1.502.250	1.622.250	120.000	Endang Sri Muningsih	Kantin	273/SEK/SK.PL1.2/III/2024	13-Mar-2024	W17-U8/530/SEK/SK.PL1.2/III/2024	26-Mar-2024	26-Mar-2024	25-Mar-2026	26 Maret 2024	6E5F40NA04AJBS4C	1.622.250	0	405.563	405.563	0
356	005010300400998000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah & Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengadilan Agama Rembang	105/WKPTA.W11-A/PL1.2.2/III/2024	S-372/MK.6/KNL.0901/2023	18-Dec-2023	5	sekaligus	6.762.500	7.438.750	676.250	Sumartin	kantin	274/SEK/SK.PL1.2/III/2024	13-Mar-2024	0244/SEK.W11-A16/PL1.2/III/2024	15 Maret 2024	15 Maret 2024	14 Maret 2029	15 Maret 2024	EF6D90NA04A8P6D2	7.438.750	0	6.198.958	6.198.958	0
357	005011100098959000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kayu Agung	862/SEK.PT.W6-U/PL.1.2.1/II/2024	S-49/MK.6/KNL..0402/2024	22-Feb-2024	2	tahunan	6.000.000	6.000.000	0	Suwondo	Kantin	278/SEK/SK.PL1.2/III/2024	13-Mar-2024	296/SEK.W6-U2/PL.1.2.1/III/2024	25 Maret 2024	25 Maret 2024	25 Februari 2026	25-Mar-2024	69AAE2G4VPFC9HOB	6.000.000	0	3.750.000	3.750.000	0
358	005011000400430000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Muara Bulian	496/SEK.PT.W5-U/PL1.2.5/II/2024	S-13/MK.6/KNL.0401/2024	12-Feb-2024	1	Tahunan	1.200.000	1.200.000	0	Dian	Kantin	257/SEK/SK.PL1.2/III/2024	1-Mar-2024	767/SEK.PN/W5-U6/PL.02/1/2024	2-Jan-2024	2-Jan-2024	1-Jan-2025	26-Mar-2024	85AAA1JNFUT108VM	1.200.000	0	0	0	0
359	005011600400528000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Samarinda	173/SEK.PT.W18-U/PL1.2/II/2024	S-16/MK.6/KNL.1302/2024	12-Feb-2024	1	Tahunan	1.191.300	1.191.300	0	Emy Pebriyanti	DYK	236/SEK/SK.PL1.2/II/2024	27-Feb-2024	250/SEK.PT.W18-U/PL1.2/III/2024	14 Maret 2024	14 Maret 2024	13 Maret 2025	14-Mar-2024	7C0277QLUOTCSMP7	1.191.300	0	198.550	198.550	0
360	005011600099290000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tenggarong	139/SEK.PT.W18-U/PL1.2/I/2024	S-1/MK.6/KNL.1302/2024	8-Jan-2024	1	Tahunan	655.650	655.650	0	Susi Wandari, A.Md	DYK	235/SEK/SK.PL1.2/II/2024	27-Feb-2024	913/SEK.PN/W18-U3/PL.1.2/III/2024	14 Maret 2024	14 Maret 2024	13 Maret 2025	14-Mar-2024	AAP9455DP967MB5A	655.650	0	109.275	109.275	0
361	005011000400311000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangko	293/SEK.PT.W16/PL1.2.3/II/2024	S-18/MK.6/KNL.0401/2024	12-Feb-2024	2	Tahunan	1.500.000	2.099.275	599.275	Wigi Suryanti	Kantin	219/SEK/SK.PL1.2/II/2024	23-Feb-2024	042/SEK.W5-U5/PL.1.2/III/2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024	26 Februari 2024	1-Mar-2024	569B848VVEJEJEM5	2.099.275	0	349.879	349.879	0
362	005010300400973000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kudus	43/WKPTA.W11-A/PL1.2.7/II/2024	S-28/MK.6/KNL.0901/2024	5-Feb-2024	3	Tahunan	1.200.000	1.320.000	120.000	Tubri	kantin	205/SEK/SK.PL1.2/II/2024	19-Feb-2024	538/SEK.PA.W11-A16/PL1.2/III/2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024	7 Maret 2027	8-Mar-2024	539D33CIFK18NFDN	1.320.000	0	220.000	220.000	0
363	005010400098082000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sleman	108/KPT.W13-U/PL1.2.3/I/2024	S-7/MK.6/KNL.0905/2024	23 Januari 2024	1	sekaligus	12.608.000	12.608.000	0	PT BRI	ATM	196/SK/SEK.PL1.2/II/2024	15-Feb-2024	987/SEK.PN.W13-U2/PL.1.2.5/III/2024	19-Mar-2024	19-Mar-2024	18-Mar-2025	19-Mar-2024	5D8B897QLUOTBRGRU	12.608.000	0	3.152.000	3.152.000	0
364	005010300097961000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sukoharjo	238/KPT.W12-U/PL1.2.5/II/2024	S-7/MK.6/KNL.0902/2024	24-Jan-2024	2	Sekaligus	2.620.000	2.620.000	0	Giyono	kantin	188/SEK/SK.PL1.2/II/2024	13-Feb-2024	369/SEK.PN.W12-U32/PL1.2/III/2024	1-Mar-2024	1 maret 2024	28-Feb-2026	29-Feb-2024	A50942G4VPCH0QKL	2.620.000	0	1.528.333	1.528.333	0
365	005010400098061000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Wates	112/KPT.W13-U/PL1.2.3/I/2024	S-9/MK.6/KNL.0905/2024	23 Januari 2024	2	Tahunan	1.200.000	1.200.000	0	Yayasan Cakra Keadilan	kantin	191/SK/SEK.PL1.2/II/2024	13-Feb-2024	767/SEK.PN.W13-U3/HM2.1.3/III/2024	1-Apr-2024	1-Apr-2024	31-Mar-2026	6-Mar-2024	3707F1JNFUSCLEQ3	1.200.000	0	750.000	750.000	0
366	005011200402324000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tanjung Karang	313/SEK.PTA.W8-A/PL1.2.3/II/2024	S-8/MK.6/KNL.0502/2024	31-Jan-2024	1	Tahunan	1.352.000	1.352.000	0	Ani Yunalian	Kantin	174/SEK/SK.PL1.2/II/2024	12-Feb-2024	0769/SEK.PA.W8-A1/PL1.2/III/2024	14 Maret 2024	14 Maret 2024	13 Maret 2025	14 Maret 2024	CBCCA7QLUOTCT1IR	1.352.000	0	225.333	225.333	0
367	005012300099905000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Dompu	364/SEK.PT.W25-U/PL.1.2.7/II/2024	S-15/MK.6/KNL.1404/2024	29-Jan-2024	1	Tahunan	1.688.000	1.688.000	0	Suhartati	Kantin	171/SEK/SK.PL1.2/II/2024	12-Feb-2024	381/ SEK.W25.U5/KU.01/11/2024	27 Februari 2024	29 Februari 2024	28 Februari 2025	29 Februari 2024	30AA57QLUOQRFLK0	1.688.000	0	281.333	281.333	0
368	005012300099890000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Selong	321/SEK.PT.W25-U/PL.1.2.7/I/2024	S-9/MK.6/KNL.1403/2024	26-Jan-2024	2	tahunan	79.426.000	79.426.000	0	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)-UP3 Mataram	Kantor	180/SEK/SK.PL1.2/II/2024	12-Feb-2024	813/SEK.PN.W25-U4/PL.1.2.7/III/2024	26 Maret 2024	26 Maret 2024	26 Maret 2026	26-Mar-2024	819167QLUOTNRTKE	79.426.000	0	49.641.250	49.641.250	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
369	005010800098764000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sawahlunto	433/KPT.W3-U/PL.1.2.4/I/2024	S-10/MK.6/KNL.0301/2024	16-Jan-2024	1	Tahunan	1.235.000	1.235.000	0	Niken Armi Pista	Kantin	168/SEK/SK.PL1.2/II/2024	7-Feb-2024	14/SEK.PN.W3-U3/PL.07/II/2024	23 Februari 2024	23 Februari 2023	22 Februari 2025	1-Jan-2024	4A0927QLUOQLVBO9	1.235.000	0	205.833	205.833	0
370	005010100097488000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	607/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/I/2024	S-322/MK.6/KNL.0701/2023	12-Dec-2023	1	Tahunan	10.775.000	10.775.000	0	Sari Sahsiana	Kedai Kopi	166/SEK/SK.PL1.2/II/2024	7-Feb-2024	1558/SEK.PN.W10-U2/PL1.2/II/2024	22 Februari 2024	21 Februari 2024	20 Februari 2025	21-Feb-2024	2514E6U8EU855BLO	10.775.000	0	1.795.833	1.795.833	0
371	005011300099066000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pontianak	486/SEK.W17-U1/PL.1.2.5/I/2024	S-12/MK.6/KNL.1101/2024	23-Jan-2024	1	Tahunan	4.961.000	4.961.000	0	Indah Azhari Putri	Kantin	142/SEK/SK.PL1.2/II/2024	6-Feb-2024	762/SEK.W17-U1/PL1.2.5/2/2024	16 Februari 2024	16 Februari 2024	16 Februari 2025	16 Februari 2024	C49FB3CIFJUD69PE	4.961.000	0	826.833	826.833	0
372	005010200097556000KD	Sebagian Tanah dan/atau Bangunan	Pengadilan Negeri Ciamis	807/SEK.PT.W11-U/PL.1.2.5/I/2024	S-3/MK.6/KNL.0805/2024	19-Jan-2024	1	Tahunan	2.100.000	2.100.000	0	Euis Hayati	Kantin	143/SK/SEK.PL1.2/II/2024	6-Feb-2024	585/SEK.03.W11-U15/PL1.2/II/2024	15 Februari 2024	15 Februari 2024	14 Februari 2025	15 Februari 2024	DB1FF264VPC384U3	2.100.000	0	175.000	175.000	0
373	005010500401472000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Lumajang	678/KPTA.W13-A/PL1.2.5/I/2024	S-6/MK.6/KNL.1004/2024	23-Jan-2024	12	Bulanan	315.000	315.000	0	Lisnawati Nur Wachidah (Kantin)	Kantin	133/SEK/SK.PL1.2/II/2024	5-Feb-2024	0746/SEK/ST.HKL3/II/2024	20-Feb-2024	20-Feb-2024	20-Feb-2025	19-Feb-2024	071197QLUOQHH84B	315.000	0	0	0	0
374	005010500098331000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kraksaan	635/SEK.W14.U/PL.1.2.5/I/2024	S-105/MK.6/KNL.1004/2023	19-Dec-2023	1	tahunan	809.000	809.000	0	Moh. Afifi (Kantin)	Kantin	117/SEK/SK.PL1.2/II/2024	29-Jan-2024	310/SEK.W14-U20/KU1.1.1/II/2024	20-Feb-2024	20-Feb-2024	19-Feb-2025	20-Feb-2024	375BE0NA047FPIL4	809.000	0	134.833	134.833	0
375	005011400099176000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sampit	183/SEK.PT.W16/PL1.2/I/2024	S-44/MK.6/KNL.1202/2023	15-Dec-2023	1	Tahunan	3.227.000	3.227.000	0	Sdr. Yani Mulyani	Kantin	120/SEK/SK.PL1.2/II/2024	29-Jan-2024	272a/SEK.PN.W16-U2/RT1/II/2024	1-Feb-2024	1-Feb-2024	31-Jan-2025	7-Feb-2024	A5BD73CIFJU8031K	3.227.000	0	268.917	268.917	0
376	005010500098111000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Surabaya	640/SEK.W14.U/PL.1.2.5/I/2024	S-402/MK.6/KNL.1001/2023	20-Dec-2023	1	tahunan	30.000.000	30.000.000	0	Koperasi Dharma Yustisia PN Surabaya	Koperasi	116/SEK/SK.PL1.2/II/2024	26-Jan-2024	1270/SEK.W14.U1/RT1/1/2024	29-Jan-2024	29-Jan-2024	31-Dec-2024	7-Mar-2024	C25E50NA04A1CUMF	30.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0
377	005010500098150000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gresik	634/SEK.W14.U/PL.1.2.5/I/2024	S-8/MK.6/KNL.1001/2024	12-Jan-2024	2	Sekaligus	44.582.000	44.582.000	0	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Gresik	Bank	91/SEK/SK.PL1.2/I/2024	24-Jan-2024	Akta Notaris dan PPAT Muhamad Irwan Nur Asrori SH MKn No. 02	20-Feb-2024	20-Feb-2024	20-Feb-2026	20-Feb-2024	85F7D48VVEH12P0E	44.582.000	0	26.006.167	26.006.167	0
378	005011100098984000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lahat	441/Pih.SEK.PT.W6-U/PL.1.2.1/I/2024	S-1/MK.6/KNL.0403/2024	15-Jan-2024	5	Tahunan	7.658.000	7.658.000	0	Kodar	Kantin	86/SEK/SK.PL1.2/I/2024	23-Jan-2024	9/SEK.PN.W6-U3/PL.1.2.4/II/2024	13-Feb-2024	13-Feb-2024	12 Februari 2029	13-Feb-2024	CCB223CIFJUE70B9	7.658.000	0	638.167	638.167	0
379	005011800099401000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Poso	261/KPT.W21-U/PL1.2/12/2023	S-117/MK.6/KNL.1603/2023	18-Dec-2023	1	Sekaligus	3.450.000	3.450.000	0	Andiati Apulu	KANTIN	80/SEK/SK.PL1.2/I/2024	18-Jan-2024	763/SEK.PN.W21-U2/PL1.2.5/III/2024	4-Mar-2024	4-Mar-2024	3-Mar-2025	4 Maret 2024	A05DD0NA04A02EPD	3.450.000	0	575.000	575.000	0
380	005012300578871000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	96/SEK.PTTUN.W7-TUN/PL1.2/I/2024	S-3/MK.6/KNL.1403/2024	9-Jan-2024	1	Tahunan	1.469.926	1.469.926	0	Suryani Budi Astuti (kantin)	Kantin	79/SEK/SK.PL1.2/I/2024	15-Jan-2024	79/SEK/SK.PL1.2/I/2024	18-Jan-2024	13-Feb-2024	12-Feb-2025	13 Februari 2024	7CBF37QLUOQC6Q8D	1.469.926	0	122.494	122.494	0
381	005010100663161000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Militer Utama	1043/KPMU/PL1.2.1/X/2023	S-1/MK.6/KNL.0701/2024	2-Jan-2024	2	per tahun	25.251.000	25.251.000	0	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	ATM	49/SEK/SK.PL1.2/I/2024	12-Jan-2024	06/SEK.PMU/PL1.2/2024	1-Jan-2024	1-Jan-2024	31-Dec-2025	30-Jan-2024	C42D27QLUONSI3R2	25.251.000	0	0	0	0
382	005010500098192000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bondowoso	131/SEK.W14.U/PL.1.2.5/I/2024	S-111/MK.6/KNL.1004/2023	29-Dec-2023	3	Tahunan	500.000	500.000	0	Lilik Sulastri (Kantin)	Kantin	40/SEK/SK.PL1.2/I/2024	9-Jan-2024	104/SEK.W14.U6/PL.09/I/2024	2-Feb-2024	2-Feb-2024	1-Feb-2027	2-Feb-2024	F391B3CIFJU3JQ5T	500.000	0	41.667	41.667	0
383	005011900099581000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bukukumba	61/SEK.W22.U/PL1.2.3/I/2024	S-264/MK.6/KNL.1502/2023	11-Dec-2023	2	Tahunan	1.200.000	1.200.000	0	Syamsidar (Kantin)	Kantin	39/SEK/SK.PL1.2/I/2024	9-Jan-2024	624/SEK.PN.W22-U11/PL1.2.7/II/2024	7-Feb-2024	7-Feb-2024	6-Feb-2026	7-Feb-2024	CB2BB1JNFUPE0J54	1.200.000	0	650.000	650.000	0
384	005011700099312000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Manado	3160/SEK.PT.W19-U/PL.1.2/XII/2023	S-127/MK.6/KNL.1601/2023	21-Dec-2023	1	sekaligus	372.000	372.000	0	Fendy Mantiri	Kantin	25/SEK/SK.PL1.2/I/2024	5-Jan-2024	65/SEK.PT.W19-U/PL1.2/I/2024	6 Januari 2024	26 Januari 2024	25 Januari 2025	26 Januari 2024	E19208N3EJA5KGOD	372.000	0	31.000	31.000	0
385	005012900604723000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tigaraksa	59/SEK.PTA.W27-A/PL1.2/1/2024	S-109/MK.6/KNL.0603/2023	18-Dec-2023	1	Sekaligus	22.243.000	22.243.000	0	Koperasi Al Mahkamah Sejahtera	Koperasi	29/SEK/SK.PL1.2/I/2024	5-Jan-2024	161/KPA.W27-A5/PL.1.2/I/2024	31-Jan-2024	31-Jan-2024	30-Jan-2025	31-Jan-2024	B61F561QV3J4PNOG	22.243.000	0	1.853.583	1.853.583	0
386	005011600099308000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Balikpapan	11/SEK.PT.W18-U/PL1.2/I/2024	S-105/MK.6/KNL.1301/2023	20-Dec-2023	1	sekaligus	7.072.000	7.072.000	0	Norain	kantin	27/SEK/SK.PL1.2/I/2024	5-Jan-2024	130/SEK.PN.W18-U2/PL1.2/II/2024	27-Oct-2023	8-Feb-2024	7-Feb-2025	7-Feb-2024	F050B2G4VPBRK2HS	13.757.000	6.685.000	589.333	589.333	0
387	005011600099308000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Balikpapan	10/SEK.PT.W18-U/PL1.2/I/2024	S-104/MK.6/KNL.1301/2023	20-Dec-2023	1	sekaligus	6.685.000	6.685.000	0	Kamariah	kantin	28/SEK/SK.PL1.2/I/2024	5-Jan-2024	130/SEK.PN.W18-U2/PL1.2/II/2024	8-Feb-2024	8-Feb-2024	7-Feb-2025	7-Feb-2024	F050B2G4VPBRK2HS	13.757.000	7.072.000	557.083	557.083	0
388	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	3063/SEK.PT.W8.U/KU.00/XII/2023	S-94/MK.6/KNL.0501/2023	22-Nov-2023	1	Tahunan	1.500.000	1.500.000	0	Chairudin	Kantin	21/SEK/SK.PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	289/KPN.W8.U1/PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	2-Jan-2024	31-Dec-2024	27 Desember 2023	DA7883CIFBIKFUUJ	1.500.000	0	0	0	0
389	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	3063/SEK.PT.W8.U/KU.00/XII/2023	S-94/MK.6/KNL.0501/2023	22-Nov-2023	1	Tahunan	1.500.000	1.500.000	0	Sri Lestari	Kantin	22/SEK/SK.PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	290/KPN.W8-U1/PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	2-Jan-2024	31-Dec-2024	27 Desember 2023	7809248VV650STRA	1.500.000	0	0	0	0
390	005012600400110000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bengkulu	3063/SEK.PT.W8.U/KU.00/XII/2023	S-94/MK.6/KNL.0501/2023	22-Nov-2023	1	Tahunan	1.500.000	1.500.000	0	Zainal Arifin	Kantin	23/SEK/SK.PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	288/KPN.W8-U1/PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	2-Jan-2024	31-Dec-2024	27 Desember 2023	544D13CIFBIKPTLL	1.500.000	0	0	0	0
391	005011500099244000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tanjung	3941.A/KPT.W15-U/PL1.2.1/XII/2023	S-223/MK.6/KNL.1203/2023	6-Dec-2023	1	Tahunan	2.415.000	2.415.000	0	Heni Kumala Dewi	Kantin	20/SEK/SK.PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	25/SEK.PN.W15.U8/PL1.2.5/I/2024	2-Jan-2024	4-Jan-2024	3-Jan-2025	3-Jan-2024	84E542G4VP8OJEU2	2.415.000	0	0	0	0
392	005013400099642000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Polewali	2294/WKPN.W33-U3/PL1.2.1/XII/2023	S-121/MK.6/KNL.1501/2023	12-Dec-2023	1	Tahunan	1.321.250	1.321.250	0	Hamida	Kantin	16/SEK/SK.PL1.2/I/2024	2-Jan-2024	7a/SEK.PN.W33-U3/PL1.2/I/2024	4 Januari 2024	4 Januari 2024	3 Januari 2025	4 Januari 2024	DA7267QLUON1VFBE	1.321.250	0	0	0	0
393	005010500400580000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1053/SEK.W14.U/PL.1.2.1/XII/2023	S-124/MK.6/KNL.1003/2023	6-Dec-2023	2	Per Tahun	423.000	423.000	0	Agung Hermawan	Kantin	1724/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	28-Dec-2023	29/SEK.PN .W14-U22/PL1.2.1/I/2024	4-Jan-2024	4-Jan-2024	3-Jan-2026	4-Jan-2024	0BAB62G4VP8PN4KE	423.000	0	0	0	0
394	005010300097776000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Brebes	2727/KPT.W12.U/PL.1.2.1/XII/2023	S-62/MK.6/KNL.0904/2023	7 Desember 2023	2	Sekaligus	4.304.500	4.304.500	0	Sutriono, S.H.	Koperasi	1723/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	28-Dec-2023	1/SEK.PN.W12-U11/PL.01/I/2024	2 Januari 2024	2 Januari 2024	2 Januari 2026	2-Jan-2024	8899561QV3I94826	4.304.500	0	2.152.250	2.152.250	0
395	005010300400571000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Magelang di Mungkid	2746/KPT.W12.U/PL.1.2.1/XII/2023	S-365/MK.6/KNL.0901/2023	14-Dec-2023	3	Sekaligus	3.060.000	3.060.000	0	Muhamad Ridwan	kantin	1722/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	28-Dec-2023	25/SEK.PN/W12-U35/PL.03/1/2024	11-Jan-2024	11 Januari 2024	10 Januari 2027	11-Jan-2024	8778C2G4VP90BEJK	3.060.000	0	2.040.000	2.040.000	0
396	005010500400580000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1053/SEK.W14.U/PL.1.2.1/XII/2023	S-124/MK.6/KNL.1003/2023	6-Dec-2023	2	tahunan	423.000	423.000	0	Agung Hermawan	Kantin	1724/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	28-Dec-2023	29/SEK.PN .W14-U22/PL1.2.1/I/2024	4-Jan-2024	4 Januari 2024	3 Januari 2026	4 Januari 2024	0BAB62G4VP8PN4KE	423.000	0	0	0	0
397	005010300400571000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Magelang di Mungkid	2746/KPT.W12.U/PL.1.2.1/XII/2023	S-365/MK.6/KNL.0901/2023	14-Dec-2023	3	sekaligus	3.060.000	3.060.000	0	Sdr Muhamad Ridwan	kantin	1722/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	28-Dec-2023	25/SEK.PN/W12-U35/PL.03/1/2024	11-Jan-2024	11 Januari 2024	10 Januari 2027	11 Januari 2024	8778C2G4VP90BEJK	3.060.000	0	0	0	0
398	005010400098057000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Yogyakarta	2725/KPT.W13-U/PL1.2/XII/2023	S-167/MK.6/KNL.0905/2023	5 Desember 2023	3	Sekaligus	38.303.000	38.303.000	0	BRI Kanca Katamso	ATM BRI	1695/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	21-Dec-2023	62/SEK.W13-U1/PL.02/II/2024	5-Mar-2024	19 Februari 2024	18 Februari 2027	5-Mar-2023	061061JNFUS9FGTL	38.303.000	0	27.663.278	27.663.278	0
399	005010800098785000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Solok	3628/KPT.W3-U/PL1.2.5/XI/2023	S-84/MK.6/KNL.0301/2023	3 Nov 2023	1	Tahunan	3.109.000	3.109.000	0	Vivi Valona	Kantin	1199/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	16 Dec 2023	93/SEK.PN.W3-U7/PL1.2/II/2024	2-Feb-2024	15-Feb-2024	14-Feb-2025	2-Feb-2024	##########	3.109.000	0	259.083	259.083	0
400	005010500098281000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Malang	10.166/SEK.W14.U/RT.1.1.1/XII/2023	S-115/MK.6/KNL.1003/2023	23-Nov-2023	3	Sekaligus	6.487.500	6.487.500	0	KPRI Yustisia	Koperasi	1617/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	6810/SEK.PN.W14-U.2/RT1/XII/2023	28-Dec-2023	28-Dec-2023	27-Dec-2026	28-Dec-2023	4D2236U8ELS77QGT	6.487.500	0	4.325.000	4.325.000	0
401	005011200477306000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kota Agung	3427/SEK.PT.W9-U/PL.1.2.1/XII/2023	S-113/MK.6/KNL.0502/2023	24-Nov-2023	3	sekaligus	2.430.000	2.430.000	0	Ridwan	Kantin	1627/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	73/SEK.PN.W9-U10/PL1.2/I/2024	8-Jan-2024	16-Jan-2024	31-Dec-2026	16-Jan-2024	751CB2G4VP94QORA	2.430.000	0	1.687.500	1.687.500	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
402	00501120047730600OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kota Agung	3426/SEK.PT.W9-U/PL.1.2.1/XII/2023	S-113/MK.6/KNL.0502/2023	24-Nov-2023	3	sekaligus	2.313.000	2.313.000	0	Bany Winarto	Kantin	1626/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	72/SEK.PN.W9-U10/PL1.2/I/2024	8-Jan-2024	16-Jan-2024	31-Dec-2026	16-Jan-2024	3042E0NA044C0OKC	2.313.000	0	1.606.250	1.606.250	0
403	00501130068145000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Ngabang	2943a/SEK.PT.W17-U/PL1.2.1/XI/2023	S-62/MK.6/KNL.1102/2023	2-Nov-2023	3	sekaligus	4.714.250	4.714.250	0	Bahagia Barus	kantin	1628/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	241/SEK.PN.W17-U10/PL1.2.5/II/2024	30-Jan-2024	30-Jan-2024	29-Jan-2027	30-Jan-2023	2C1FE2G4VP9J0AM4	4.714.250	0	3.273.785	3.273.785	0
404	00501220009983700OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Amlapura	2425/KPT.W24-U/PL1.2.1/XII/2023	S-63/MK.6/KNL.1402/2023	4-Dec-2023	3	Sekaligus	3.600.000	3.600.000	0	Ni Kadek Kartini	Kantin	1616/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	64/SEK/PL1.2.1/XII/2023	21-Dec-2023	21 Desember 2023	20 Desember 2026	21-Dec-2023	1428B0N9VRR91R68	3.600.000	0	2.400.000	2.400.000	0
405	00501070009863300OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Binjai	W2.U/700S/Ku.01.10/12/2023	S-240/MK.6/KNL.0201/2023	20-Nov-2023	1	Sekaligus	3.249.000	3.249.000	0	Agustinus	Kantin	1629/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	285a/SEK.PN.W2.U3/PL.01/II/2024	14 Februari 2024	14 Februari 2024	14 Februari 2025	13 Februari 2024	905501JNFUPLEN1S	3.249.000	0	270.750	270.750	0
406	00501160065209700OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sangatta	1939/KPTA.W17-A/PL.1.2.1/XII/2023	S-9/MK.6/KNL.1304/2023	25-Oct-2023	1	per tahun	1.833.000	1.833.000	0	Darman	Kantin	1614/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	153.b/SEK.W17-A7/PL.01/I/2024	5 Januari 2024	5 Januari 2024	4 Januari 2025	5 Januari 2024	7C5A73CIFJR775UV	1.833.300	300	0	0	0
407	00501160065209700OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sangatta	1938/KPTA.W17-A/PL.1.2.1/XII/2023	S-8/MK.6/KNL.1304/2023	25-Oct-2023	1	per tahun	2.869.000	2.869.000	0	Nurlina	Kantin	1615/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	153.a/SEK.W17-A7/PL.01/I/2024	5 Januari 2024	5 Januari 2024	4 Januari 2025	5 Januari 2024	2E9C10NA044203Q4	2.869.000	0	0	0	0
408	00501320068930900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang	1221/KPTTUN.W1-TUN/PL1.2/X/2023	S-102/MK.6/KNP.0304/2023	10-Apr-2023	12	Bulanan	115.750	115.750	0	Awanda Eka Astuti	Kantin	1630/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	15-Dec-2023	15/SEK.PTUN.W1-TUNS/PL.01/I/2024	1-Dec-2023	12 JANUARI 2024	12 JANUARI 2025	12 Januari 2024	495B02G4VP91H228	115.750	0	0	0	0
409	00501030040100200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Blora	4993/KPTA.W11-A/PL1.2/XII/2023	S-316/MK.6/KNL.0901/2023	2-Nov-2023	3	Sekaligus	3.600.000	3.600.000	0	Emy Suprapti ningsih	kantin	1604/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	14-Dec-2023	203/SEK.PA.W11-A32/KU1.4/II/2024	1 Februari 2024	1 Februari 2024	31 Januari 2027	1-Feb-2024	CFB4B3CIFJU2FTRR	3.600.000	0	2.500.000	2.500.000	0
410	00501080009879200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pariaman	3888/KPT.W3-U/PL1.2/XII/2023	S-88/MK.6/KNL.0301/2023	16-Nov-2023	2	Sekaligus	2.080.000	2.080.000	0	Medi Wandri	Kantin	1597/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	13-Dec-2023	1/SEKPN.W3.U8/PL.07/I/2024	3 Januari 2023	3 Januari 2024	31 Desember 2025	3-Jan-2024	ACF75IJNFUMC71BN	2.080.000	0	1.040.000	1.040.000	0
411	00501100057883900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	35/SEK.PTTUN.W5-TUN/PL1.2/XII/2023	S-113/MK.6/KNL.0401/2023	17 Nov 2023	2	Tahunan	17.394.000	17.394.000	0	PT. BRI Persero Tbk Cabang Jambi	ATM BRI	1596/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	13 Dec 2023	B.474-IV/KC/LOG/01/2024	23-Jan-2024	26-Jan-2024	26-Jan-2026	25-Jan-2024	A2A7948VVEDVU9FO	17.394.000	0	9.421.750	9.421.750	0
412	00501230030791100OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Selong	2174/SEK.PTA.W22-A/PL1/XII/2023	S-95/MK.6/KNL.1403/2023	5-Dec-2023	2	Tahunan	1.200.000	1.200.000	0	Siti Rehanun	Kantin	1568/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	12-Dec-2023	62/SEK.PA.W22-A3/PL1.2/XII/2023	22-Dec-2023	22-Dec-2023	21-Dec-2025	22-Dec-2023	50B6555DF0N85GT1	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
413	00501070009862900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Medan	W2.U/7007/KU.01.10/12/2023	S-241/MK.6/KNL.0201/2023	20-Nov-2023	2	Sekaligus	36.006.000	36.006.000	0	PT. BRI (Persero)	Kantor Kas	1548/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	11-Dec-2023	02/SEK.PN.W2U1/PL1.2/XII/2023	29-Dec-2023	29-Dec-2023	29-Dec-2025	29-Dec-2023	5E3B70N9VRRHGEBC	36.006.000	0	18.003.000	18.003.000	0
414	00501070009862900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Medan	1547/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	S-241/MK.6/KNL.0201/2023	20-Nov-2023	2	Sekaligus	41.698.000	41.698.000	0	PT. BRI (Persero)	ATM	1547/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	11-Dec-2023	02/SEK.PN.W2U1/PL1.2/XII/2023	29-Dec-2023	29-Dec-2023	29-Dec-2025	29-Dec-2023	103850N9VRRHGEF4	41.698.000	0	20.849.000	20.849.000	0
415	00501290041784400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pandeglang	4302/KPT.W29-U/PL1.2/XII/2023	S-64/MK.6/KNL.0601/2023	24-Oct-2023	1	per tahun	1.319.000	1.319.000	0	MA'RUF ARDIANSYAH	Kantin	1421/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	6-Dec-2023	5/KPA.W29.U2/KU1.4/I/2024	2 Januari 2024	2 Januari 2024	2 Januari 2025	24 Januari 2024	B97310NA044JP1MI	1.319.000	0	0	0	0
416	00501070009861200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Medan	6631/W2-U/PL.04.05/11/2023	S-218/MK.6/KNL.0201/2023	27-Oct-2023	2	Tahunan	3.943.200	3.943.200	0	Santi Indriani	Kantin	1355/SEK/SK.PL1.2/XII/2023	4-Dec-2023	7436/W2.U/KU.04.2/12/2023	4 Desember 2023	4 Desember 2023	2 Desember 2025	2-Dec-2024	541B648VVFE9H73N	3.943.200	0	3.614.600	3.614.600	0
417	00501030009772000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Semarang	2466/KPT.W12-U/PL1.2.5/XI/2023	S-301/MK.6/KNL.0901/2023	27 Oktober 2023	2	Sekaligus	5.000.000	5.000.000	0	Muhamad Akhmad Supraja	Kantin	1280/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	24-Nov-2023	3665/SEK.PN.W12-U1/PL.01/XII/2023	5 Desember 2023	5 Desember 2023	4 Desember 2025	30-Nov-2023	E19957QLUGBLTP2E	5.000.000	0	2.291.667	2.291.667	0
418	00501080053184000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	140SC/SEK.PTTUN.W1-TUN/PL1.2/XI/2023	S-83/MK.6/KNL.0301/2023	3-Nov-2023	1	Sekaligus	6.738.000	6.738.000	0	Ade Febrianto	Kantin	1279/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	24-Nov-2023	207/SEK.PTUN.W1-TUN2/PL1.2.1/I/2024	2-Jan-2024	19-Jan-2024	18-Jan-2025	18 Januari 2024	76CC73CIFJRJFDPD	6.738.000	0	561.500	561.500	0
419	00501050009831000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lumajang	9163/SEK.W14.U/PL 1.2.5/XI/2023	S-86/MK.6/KNL.1004/2023	1-Nov-2023	1	Sekaligus	1.500.000	1.500.000	0	Bayuangga	Kantin	1248/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	23-Nov-2023	239/SEK.PN.W14-U14/PL.1.2/1/2024	24 Januari 2024	24 Januari 2024	23 Januari 2025	24-Jan-2024	404648N3EJA3G4S7	1.500.000	0	125.000	125.000	0
420	00501190030750900OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Watampone	3131/SEK.PTA.W20-A/PL1.2/XI/2023	S-43/MK.6/KNL.1503/2023	10-Nov-2023	5	tahunan	5.746.140	5.746.140	0	WAHIDAH	Kantin	1249/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	23-Nov-2023	160/SEK.PA.W20-A2/SK.PL1.2.2/XII/2023	8-Dec-2023	8 Desember 2023	7 Desember 2028	2 Desember 2024	A0A253CIFKRT5T79	5.746.140	0	5.267.295	5.267.295	0
421	00501030009776200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pati	2460/KPT.W12-U/PL1.2.5/XI/2023	S-297/MK.6/KNL.0901/2023	25-Nov-2023	2	Sekaligus	3.000.000	3.000.000	0	Sudarmi	Kantin	1214/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	21-Nov-2023	4031/SEK.PN.W12-U10/RT1/XI/2023	7 Desember 2023	7 Desember 2023	6 Desember 2025	4-Dec-2023	250538N3EB098NQP	3.000.000	0	1.375.000	1.375.000	0
422	00501030009797500OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karanganyar	2347/SEK.W12-U/PL1.2.5/XI/2023	S-92/MK.6/KNL.0902/2023	30 Oktober 2023	2	Tahunan	1.575.000	1.575.000	0	Warsini	Kantin	1194/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	16-Nov-2023	3227/SEK.PN.W12-U31/PL1.2.5/XI/2023	30-Nov-2023	30-Nov-2023	29-Nov-2025	29-Nov-2023	92AB00N9VROHLJOQ	3.150.000	-1.575.000	1.443.750	1.443.750	0
423	00501030009797500OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karanganyar	2348/SEK.W12-U/PL1.2.5/XI/2023	S-92/MK.6/KNL.0902/2023	30 Oktober 2023	2	Tahunan	3.600.000	3.600.000	0	Tuhus Widyastomo	Kantin	1195/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	16-Nov-2023	3226/SEK.PN.W12-U31/PL1.2.5/XI/2023	30-Nov-2023	30-Nov-2023	29-Nov-2025	29-Nov-2023	6C1B46U8ELP8DIH1	7.200.000	-3.600.000	3.300.000	3.300.000	0
424	00501040040017200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bantul	2396/KPT.W13-U/PL1.2/XI/2023	S-149/MK.6/KNL.0905/2023	24 Oktober 2023	2	Sekaligus	1.954.000	1.954.000	0	Chotimah	kantin	1198/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	16-Nov-2023	1/SEK.PN.W13-U5/PL1.2/XII/2023	18 Desember 2023	18 Desember 2023	17 Desember 2025	18-Dec-2023	7A3F36U8ELRTI4TD	1.954.000	0	977.000	977.000	0
425	00501020009766000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Cianjur	W11.U/4008/PL.09/7/2023	S-127/MK.6/KNL.0803/2023	25-Sep-2023	3	Tahunan	2.046.250	2.046.250	0	K. Sukandi	Kantin	1174/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	13-Nov-2023	1686//SEK/W11.U11/PL.1.2.7/XII/2023	22-Dec-2023	22 Desember 2023	22 Desember 2026	20-Dec-2024	FC91048VVFERAROI	2.046.250	0	2.046.250	2.046.250	0
426	00501020040075000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Cirebon	3139/SEK.W10-A/PL.1.2/X/2023	S-61/MK.6/KNL.0806/2023	24-Oct-2023	3	Sekaligus	17.461.500	17.461.500	0	Agus syairozi	Warung Pecel Lele	1147/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	6-Nov-2023	2453/SEK.PA.W10-A16/PL.1.2.5/XI/2023	23-Nov-2023	23-Nov-2023	23-Nov-2026	21-Nov-2023	BDR521JNFMAMB3PV	17.461.500	0	11.155.958	11.155.958	0
427	00501020040075000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Cirebon	3297/SEK.W10-A/PL.1.2/X/2023	S-61/MK.6/KNL.0806/2023	24-Oct-2023	3	Sekaligus	2.100.000	2.100.000	0	Emon Kusman	Kantin	1148/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	6-Nov-2023	2454/SEK.PA.W10-A16/PL.1.2.5/XI/2023	23-Nov-2023	23-Nov-2023	23-Nov-2026	22-Nov-2023	FAB7B48VV61SM830	2.100.000	0	1.341.667	1.341.667	0
428	00501050009828100OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Malang	8953.1/SEK.W14.U/PL1.2.5/X/2023	S-66/MK.6/KNL.1003/2023	30 Agustus 2023	2	Sekaligus	1.912.500	1.912.500	0	Tutik Handayani	Kantin	1101/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	2-Nov-2023	6204/SEK.PN.W14-U.2/RT1/XI/2023	17-Nov-2023	17-Nov-2023	16-Nov-2025	17-Nov-2023	F019248VV61OAR9C	3.825.000	-1.912.500	876.563	876.563	0
429	00501050009828100OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Malang	8953.2/SEK.W14.U/PL1.2.5/X/2023	S-66/MK.6/KNL.1003/2023	30 Agustus 2023	2	Sekaligus	1.912.500	1.912.500	0	Mohammad Khamid	Kantin	1100/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	2-Nov-2023	6205/SEK.PN.W14-U.2/RT1/XI/2023	17-Nov-2023	17-Nov-2023	16-Nov-2025	17-Nov-2023	F019248VV61OAR9C	3.825.000	-1.912.500	876.563	876.563	0
430	00501070009872200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Padangsidimpuan	6173/W2-U/PL.04.05/10/2023	S-46/MK.6/KNL.0204/2023	12-Oct-2023	2	Sekaligus	2.000.000	2.000.000	0	Nurhamidah Harahap	Kantin	1105/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	2-Nov-2023	1105 /SEK/SK.PL.1.2/XI/2023	1-Dec-2023	1-Dec-2023	1-Dec-2025	5-Dec-2023	D61331JNFMD653OB	2.000.000	0	916.667	916.667	0
431	00501070040037000OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Simalungun	6172/W2.U/PL.04.05/10/2023	S-31/MK.6/KNL.0202/2023	13-Oct-2023	2	Sekaligus	7.158.000	7.158.000	0	Lisa Listiyorini	Kantin	1104/SEK/SK.PL1.2/XI/2023	2-Nov-2023	48/SEK.PN.W2-U16/PL.1.1.2/I/2024	15-Jan-2024	1 5 Januari 2024	1 5 Januari 2026	15-Jan-2024	04B752G4VP93P8SE	7.158.000	0	3.579.000	3.579.000	0
432	00501020040085400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Purwakarta	2441/SEK.PA.W10-A11/PL.02/X/2023	S-48/MK.6/KNL.0804/2023	22-Sep-2023	2	Sekaligus	5.014.000	5.014.000	0	Hilma Yusuf	Kantin	1000/SEK/SK.PL1.2/X/2023	24-Oct-2023	2952/SEK.PA.W10-A11/KU.01/XII/2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	30-Nov-2025	28-Nov-2023	E02F655DF0KEDV1D	5.014.000	0	2.298.083	2.298.083	0
433	00501020047729200OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Depok	W11.U/358/PL.09/1/2023	S-157MK.6/KNL.0803/2022	30 Desember 2022	3	Sekaligus	48.200.000	48.200.000	0	Bank BRI	ATM	51/SEK/SK/I/2023	24-Oct-2023	W11.U21/1429a/UM.01.07/III/2023	13 Maret 2023	1 Maret 2023	28 Februari 2026	8-Mar-2023	133466U8EL0PQ7DH	48.200.000	0	18.744.444	18.744.444	0
434	00501010040021400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5874/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/X/2023	S-213/MK.6/KNL.0701/2023	19-Sep-2023	2	Sekaligus	41.758.000	41.758.000	0	PT. BTN Persero, Tbk.	ATM	924/SEK/SK.PL1.2/X/2023	17-Oct-2023	W10.U3/22231/PL.01/11/2023	17-Nov-2023	17-Nov-2023	17-Nov-2025	17-Nov-2023	6FCC955DF0K2GRCP	41.758.000	0	19.139.083	19.139.083	0
435	00501010040021400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5873/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/X/2023	S-213/MK.6/KNL.0701/2023	19-Sep-2023	2	Sekaligus	49.428.000	49.428.000	0	PT. BTN Persero, Tbk.	Payment Point	923/SEK/SK.PL1.2/X/2023	17-Oct-2023	W10.U3/22232/PL.01/11/2023	17-Nov-2023	17-Nov-2023	17-Nov-2025	17-Nov-2023	9C4191JNFMAGSQ7F	49.428.000	0	22.654.500	22.654.500	0
436	00501010040021400OKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5872/SEK.PT.W10-U/PL1.2.5/X/2023	S-213/MK.6/KNL.0701/2023	19-Sep-2023	2	Sekaligus	70.190.000	70.190.000	0	Hj. Sri Harti Supangat	Kantin	922/SEK/SK.PL1.2/X/2023	17-Oct-2023	W10.U3/22232/PL.01/11/2023	22-Nov-2023	22-Nov-2023	22-Nov-2025	21-Nov-2023	6C95061QUR6KAI3Q	70.190.000	0	32.170.417	32.170.417	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
437	005010500098310000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lumajang	8280/SEK.W14.U/PL1.2.5/X/2023	S-75/MK.6/KNL.1004/2023	5 Oktober 2023	5	Sekaligus	14.188.500	14.188.500	0	Febby Verlinda	Kantin	921/SEK/SK.PL1.2/X/2023	17-Oct-2023	1281/SEK.PN.W14-U14/PL1.2/X/2023	24 Oktober 2023	24 Oktober 2023	23 Oktober 2028	24-Oct-2023	904B11LJNFM7QE0IH	14.188.500	0	10.877.850	10.877.850	0
438	005010700098701000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pematangsiantar	5746/W2-U/PL.04.05/10/2023	S-23/MK.6/KNL.0202/2023	11-Sep-2023	2	Sekaligus	8.020.000	8.020.000	0	Elly W. Nainggolan	Kantin	787/SEK/SK.PL1.2/X/2023	10-Oct-2023	2913/SEK/UM.01.10/PL.02/XI/2023	23-Nov-2023	22-Nov-2023	21-Nov-2025	12-Nov-2023	19EED7QLUGBD7922	8.020.000	0	3.675.833	3.675.833	0
439	005010500098256000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tulunggagung	8137/SEK.W14.U/PL1.2.5/X/2023	S-56/MK.6/KNL.1003/2023	3 Agustus 2023	2	Sekaligus	3.000.000	3.000.000	0	Wiwik Wahyuningsih	Kantin	790/SEK/SK.PL1.2/X/2023	9-Oct-2023	1494/SEK.PN.W14-U26/PL1.2/X/2023	11-Oct-2023	11-Oct-2023	10-Oct-2025	11-Oct-2023	0A82F48VV5UIP2GU	3.000.000	0	1.125.000	1.125.000	0
440	005010500401240000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Surabaya	W13-A/3845/PL.01/8/2023	S-218/MK.6/KNL.1001/2023	18 Juli 23	3	Sekaligus	63.429.000	63.429.000	0	BTN CABANG MULYOSARI	ATM	705/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	7626/SEK.PA.W13-A1/HM2.1/X/2023 dan 57/PKS/MLY/OPT-GS/2023	18-Oct-2023	18-Oct-2023	18-Oct-2026	17 Oktober 2023	9CE3C0N9VRL3B6NQ	63.429.000	0	38.762.167	38.762.167	0
441	005010200531823000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	1024/KPTTUN.W2/PL1.2.3/IX/2023	S-214/MK.6/KNL.0801/2023	29 Agustus 2023	3	Sekaligus	1.125.000	1.125.000	0	Sagiyo	Kantin	688/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	1978/SEK/PL1.2/XI/2023	29-Nov-2023	29-Nov-2023	28-Nov-2026	28-Nov-2023	AED8955DF0KEGG5B	1.150.000	-25.000	718.750	718.750	0
442	005010300097872000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Batang	1774/KPT.W12.U/PL1.2/08/2023	S-24/MK.6/KNL.0903/2023	18-Aug-2023	5	Sekaligus	8.000.000	8.000.000	0	Karmono	Kantin	658/SEK/SK/PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	W12.U33/2070/UM.02/10/2023	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	19 Oktober 2028	19-Oct-2023	79C176U8ELLVHABA	8.000.000	0	6.133.333	6.133.333	0
443	005010300098015000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Cilacap	2348/SEK.W12-U/PL1.2.5/XI/2023	S-59/MK.6/KNL.0906/2023	14-Jul-2023	2	Sekaligus	3.600.000	3.600.000	0	Irene Ratih Parwita	Kantin	668/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	1507/ SEK.PN.W12-U7/PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	29-Sep-2023	28-Sep-2025	29-Sep-2023	A65D77QLUG5MKG2H	3.600.000	0	1.350.000	1.350.000	0
444	005010400401200000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sleman	1544/SEK.PTA.W12-A/PL1.2.5/VIII/2023	S-112/MK.6/KNL.0905/2023	1 Agustus 2023	3	Tahunan	4.638.750	4.638.750	0	Doly Maria Dona	kantin	662/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	2/SEK.PA.W12-A2/PL1.2.1/IX/2023	29 Sept 2023	30-Oct-2023	29-Oct-2026	30-Oct-2024	079D30NA04VK08VF	4.638.750	0	3.865.625	3.865.625	0
445	005010700098629000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Medan	5621/W2-U/PL.04.05/10/2023	S-176/MK.6/KNL.0201/2023	29-Aug-2023	2	Sekaligus	11.502.000	11.502.000	0	PT. BTN (persero)	Kantor cabang	710/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	1/SEK.PN.W2U1/XI/2023	24-Nov-2023	24-Nov-2023	24-Nov-2025	24-Nov-2023	C84F955DF0KBAE9H	11.502.000	0	5.271.750	5.271.750	0
446	005010800098771000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Batusangkar	W3.U/2177/TURT/VII/2023	S-6/MK.6/KNL.0302/2022	17 Mei 2022	3	Tahunan	948.000	948.000	0	Meghi Okta Adpelra	Kantin	662/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	W3.U6/01/UM/VI/2023	14 Juni 2023	14 Juni 2023	13 Juni 2024	12-Jun-2024	1A2FF55DF9F3APKG	948.000	0	395.000	395.000	0
447	005011300670227000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sambas	2331/KPT.W17-U/PL1.2.1/IX/2023	S-50/MK.6/KNL.1102/2023	6-Sep-2023	3	tahunan	2.902.500	2.902.500	0	Wahju Windajati, SP	kantin	709/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	29-Sep-2023	W17-U8/1645/SEK/SK.PL1.2/X/2023	19-Oct-2023	19-Oct-2023	19-Oct-2026	19-Oct-2023	CC18C48VV5UPALNI	8.707.500	5.805.000	5.321.250	5.321.250	0
448	005010800098832000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Payakumbuh	W3.U/2225/TURT/VII/2023	S-22/MK.6/KNL.0302/2023	25-Jul-2023	3	Sekaligus	6.333.000	6.333.000	0	Kantin	Kantin	652/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	27-Sep-2023	1009/SEK.PN.W3-U4/PL1.2.7/X/2023	20 Oktober 2023	1-Nov-2023	31 Oktober 2026	20-Oct-2023	EA29548VV5UP7PK2	6.333.000	0	3.870.167	3.870.167	0
449	005010200400729000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Bogor	2455/SEK.W10-A/PL.1.2.5/VIII/2023	S-102/MK.6/KNL.0803/2023	9-Aug-2023	2	Sekaligus	43.966.000	43.966.000	0	Bank BRI	ATM	654/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	27-Sep-2023	4508/KPA.W10-A18/PL.01/X/2023	19-Oct-2023	19-Oct-2023	19-Oct-2025	19 Oktober 2023	715EF0N9VRL6IU3G	43.966.000	0	18.319.167	18.319.167	0
450	005011300681450000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Ngabang	2345/KPT.W17-U/PL1.2.1/IX/2023	S-46/MK.6/KNL.1102/2023	25-Aug-2023	3	tahunan	1.170.000	1.170.000	0	Albert Sitohang	kantin	605a/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	22-Sep-2023	W17-U10/1142/PL.01/10/2023	2 Oktober 2023	1-Oct-2023	30-Sep-2026	31-Oct-2024	922E761QV4DSA59N	1.170.000	0	877.500	877.500	0
451	005010200613519000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Cibinong	5546/SEK.PT.W11-U/PL.1.2.5/IX/2023	S-94/MK.6/KNL.0803/2023	12-Jul-2023	3	Tahunan	31.461.250	31.461.250	0	Bank BTN	Penempatan Mesin ATM & Ruang Layanan Booth Bank BTN	651b/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	22-Sep-2023	W11.U20/4631/UM.01.10/VII/2023	13-Jul-2023	13-Jul-2023	13-Jul-2026	28 Agustus 2024	44E4E2G4VPFFLRLK	31.461.250	0	15.730.625	15.730.625	0
452	005010200097500000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Bandung	5023/SEK.PT.W11-U/PL/1/2//III/2023	S-204/MK.6/KNL.0801/2023	23-Aug-2023	3	sekaligus	46.047.000	46.047.000	0	BANK BRI	ATM	651A/SEK/SK.PL1.2/IX/2023	4-Sep-2023	B2329/KC-VI/LYI/10/2023	2 Oktober 2023	2 Oktober 2023	1 Oktober 2026	27-Oct-2023	B38FC0N9VRL9Q9EG	46.047.000	0	26.860.750	26.860.750	0
453	005010300097776000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Brebes	W12.U/1591/PL.01/7/2023	S-30/MK.6/KNL.0904/2023	25 Juli 2023	2	Sekaligus	3.755.000	3.755.000	0	Sutriono, S.H.	Kantin	642/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	10-Aug-2023	W12-U11/816/PL.01/8/2023	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023	23 Agustus 2025	22-Aug-2023	DA5313CIFB6H4NBF	3.755.000	0	1.251.667	1.251.667	0
454	005010500098324000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangil	W14.U/6368/PL.01/08/2023	S-67/MK.6/KNL.1002/2023	14 Juli 2023	3	Tahunan	744.063	744.063	0	Sri Rahayu	Kantin	643/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	10-Aug-2023	3302/SEK./W14-U21/PL1.2/X/2023	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	16 Oktober 2026	16-Oct-2023	F37791JNFM7HT7HN	744.063	0	620.053	620.053	0
455	005010500098324000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bangil	W14.U/6368/PL.01/08/2023	S-67/MK.6/KNL.1002/2023	14 Juli 2023	3	Tahunan	1.488.333	1.488.333	0	Sukri	Kantin	643/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	10-Aug-2023	3303/SEK./W14-U21/PL1.2/X/2023	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	16 Oktober 2026	16-Oct-2023	F37791JNFM7HT7HN	1.488.333	0	1.240.278	1.240.278	0
456	005011400402443000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Muara Teweh	W16-A/1204/PL.01/VIII/2023	S-68/MK.6/KNL.1201/2023	24-Jul-2023	3	per tahun	1.055.000	1.055.000	0	Erni Herawati	Kantin	647/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	10-Aug-2023	1317/SEK.PA.W16-A5/PL.1.2/XI/2013	1-Nov-2023	1-Nov-2023	30 Oktober 2026	27-Oct-2023	B33D60N9VRLFAEQQ	1.055.000	0	1.934.167	1.934.167	0
457	005011600099286000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Samarinda	W18-U/2260/PL.02/VIII/2023	S-54/MK.6/KNL.1302/2023	2-Aug-2023	2	sekaligus	37.422.000	37.422.000	0	BTN Samarinda	ATM	646/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	10-Aug-2023	107/SMR/PKS/OPT/X/2023	27-Oct-2025	27 Oktober 2023	26-Oct-2025	27-Oct-2023	FE0497QLUG8IFKUE	37.422.000	0	15.592.500	15.592.500	0
458	005011600099286000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Samarinda	W18-U/2261/PL.02/VIII/2023	S-53/MK.6/KNL.1302/2023	27-Jul-2023	3	sekaligus	46.560.000	46.560.000	0	BTN Samarinda	Payment Point BTN	645/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	10-Aug-2023	108/SMR/PKS/OPT/X/2023	27-Oct-2023	27 Oktober 2023	26 Oktober 2026	27-Oct-2023	0522761QUR3PLLEU	46.560.000	0	28.453.333	28.453.333	0
459	005013100400208000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Limboto	W20-U/1371/PL.02/VII/2023	S-614/KNL.1602/2023	27-Jun-2023	2	sekaligus	2.467.000	2.467.000	0	Hamid Hanggai	kantin	639/SEK/SK.PL1.2/VIII/2023	1-Aug-2023	W20-U/2218/PL.02/VIII/2023	25 Agustus 2023	1-Sep-2023	31-Aug-2025	25 Agustus 2023	8EF9861QUQTQL98Q	2.467.000	0	822.333	822.333	0
460	005011000098900000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Muara Bungo	W5-U/1640/PL.01/VII/2023	S-41/MK.6/KNL.0401/2023	15 Mei 2023	2	Sekaligus	1.200.000	1.200.000	0	Tusinah	Kantin	634/SEK/SK.PL1.2/VII/2023	26-Jul-2023	2250/SEK.PN.W5-U2/PL.1.2.5/XII/2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2025	7-Dec-2023	247F26U8ELRIPNFF	1.200.000	0	550.000	550.000	0
461	005010200400483000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bale Bandung	W11.U/3521/PL.02/6/2023	S-136/MK.6/KNL.0801/2023	13-Jun-2023	3	Sekaligus	2.830.500	2.830.500	0	Iwan Budi Sofyan, SH	koperasi	545/SEK/SK/VI/2023	27-Jun-2023	(tidak ada nomor di perjanjian sewa)	13-Jun-2023	13-Jun-2023	13-Jun-2026	7-Sep-2023	5D8F06U8ELIKQ1SF	2.830.500	0	1.336.625	1.336.625	0
462	005012600400239000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Arga Makmur	W8-U/1557/KU.00/06/2023	S-37/MK.6/KNL.0501/2023	19-May-2023	3	tahunan	656.000	656.000	0	Kartini	Kantin	543/SEK/SK/VI/2023	27-Jun-2023	W8-U4/ 1981/PL.04/6/2023	27 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2026	12 Juni 2023	97D0755DF04VK5T5	1.968.000	1.312.000	929.333	929.333	0
463	005010300097797000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kendal	W12-U/1392/PL.02/6/2023	S-18/MK.6/KNL.0903/2023	24-May-2023	3	Sekaligus	5.550.000	5.550.000	0	Koperasi Dharmayukti Pengadilan Negeri Kendal	koperasi	546/SEK/SK/VI/2023	27-Jun-2023	W12.U22/1082/PL.02/8/2023	10-Aug-2023	20-Sep-2022	20-Sep-2025	07 Agustus 2023	68E1D3CIFB64882J	5.550.000	0	1.387.500	1.387.500	0
464	005011000098895000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jambi	W5-U/1526/PL.01/VI/2023	S-44/MK.6/KNL.0401/2023	26 Mei 2023	2	Sekaligus	10.000.000	10.000.000	0	Tatap U Situngkir	Kantin	524/SEK/SK/VI/2023	23-Jun-2023	1604.b/SEK/SK.PL.1/VI/2023	19 Juni 2023	19 Juni 2023	18 Juni 2025	19-Jun-2023	4C44C2G4VGE3VLJ0	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0
465	005010700526746000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	W1-TUN/770/PL.01/6/2023	S-109/MK.6/KNL.0201/2023	9-Jun-2023	2	Sekaligus	35.814.000	35.814.000	0	PT. BRI MEDAN	ATM	484/SEK/SK/VI/2023	16-Jun-2023	W1-TUN1/842.A/KS.00/08/2023	24-Jul-2023	15-May-2023	15-May-2025	25-Jul-2023	071F86U8ELD2O4BB	35.814.000	0	5.969.000	5.969.000	0
466	005012000099659000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kendari	S-41/MK.6/KNL.1505/2023	S-41/MK.6/KNL.1505/2023	30-May-2023	3	Bulanan	400.000	400.000	0	Nurlince	kanitin	453/SEK/SK/VI/2023	13-Jun-2023	W23-U1/2052/PL.01/7/2023	17 Juli 2023	17 Juli 2023	16 Juli 2026	17 Juli 2023	C2D708N3EAHOD0AJ	650.000	250.000	0	0	0
467	005012000099659000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kendari	S-41/MK.6/KNL.1505/2023	S-41/MK.6/KNL.1505/2023	30-May-2023	3	Bulanan	250.000	250.000	0	Rasmiati	Kantin	453/SEK/SK/VI/2023	13-Jun-2023	W23-U1/2052/PL.01/7/2023	17 Juli 2023	17 Juli 2023	16 Juli 2026	17 Juli 2023	C2D708N3EAHOD0AJ	650.000	400.000	0	0	0
468	005011200099031000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	W9-U/1586/KU.01/6/2023	S-50/MK.6/KNL.0502/2023	5-Jun-2023	3	Tahunan	569.063	569.063	0	Joko Agus Suryanto	Kantin	450/SEK/SK/VI/2023	12-Jun-2023	W9-U1/2100.A/KU.04.2/06/2023	13/6/2023	13-Jun-2023	12-Jun-2026	6 Juni 2024	E7D0061QV41A7429	569.063	0	237.110	237.110	0
469	005012300099912000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Praya	W25-U/ 1454 /PL.01/5/2023	S-35/MK.6/KNL.1403/2023	23-May-2023	3	Sekaligus	1.547.200	1.547.200	0	RUSDI	Kantin	424/SEK/SK/V/2023	30-May-2023	W25-U6/1862/PL.09/6/2023	26 Juni 2023	1 Juni 2023	31 Mei 2026	26-Jun-2023	C737455DF05FLRC7	1.547.200	0	730.622	730.622	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/L ainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarka n NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
470	005010200401915000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Cikarang	W11.U/3135/PL.02/5/2023	S-10/MK.6/KNL.0802/2023	17-May-2023	3	Tahunan	4.481.875	4.481.875	0	Rinto E. Paulus	Kantin	407/SEK/SK/V/2023	30-May-2023	W11.U23/2075/PL.08.01/VII/2023	3-Jul-2023	3 Juli 2023	30 Juni 2026	1-Jul-2024	A71A70NA04LQLJD3	4.481.875	0	2.240.938	2.240.938	0
471	005010300097802000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Demak	W12-U/1211/PL.01/5/2023	S-87/MK.6/KNL.0901/2023	12-Apr-2023	2	Sekaligus	3.574.000	3.574.000	0	Sdr. Ngari	kantin	4 /SEK/SK/V/2023	30-May-2023	W12.U23/415/UM.09/4/2023	27-Apr-2023	19 Juni 2023	18 Juni 2025	19 Juni 2023	E777348VV5ISOE64	3.574.000	0	893.500	893.500	0
472	005011700099312000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Manado	W19-U/1366/PL.02/5/2023	S-42/MK.6/KNL.1601/2023	22-May-2023	3	tahunan	6.108.000	6.108.000	0	Rukhmawanty Daeng	kantin	374/SEK/SK/V/2023	29-May-2023	W19-U/1692/PL.02/06/2023	19-Jun-2023	19-Jun-2023	18-Jun-2026	12 Juni 2023	AFD110N9VR94HOIO	6.108.000	0	3.054.000	3.054.000	0
473	005012000477224000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Unaaha	W23.U/1594/PL.07/V/2023	S-36/MK.6/KNL.1505/2023	22 Mei 2023	3	sekaligus	1.972.800	1.972.800	0	Ritna	Kantin	372/SEK/SK/V/2023	29-May-2023	W23-U5/1235/PL.07/6/2023	7 Juni 2023	1 Juni 2023	31 Mei 2026	9 Juni 2023	7CB1B1JNFLRE0BK5	1.972.800	0	931.600	931.600	0
474	005010200400781000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kuningan	W10-A/1582A/PL.04/V/2023	S-26/MK.6/KNL.0806/2023	12 Mei 2023	3	Tahunan	3.450.000	3.450.000	0	Agus Nuryadin, S.H	Koperasi Al-Hikmah Pengadilan Agama Kuningan	328/SEK/SK/V/2023	25-May-2023	W10-A14/2616/PL.02/VI/2023	6 Juni 2023	5 Juni 2023	5 Juni 2026	5-Jun-2023	512C648VV5IFL676	3.450.000	0	1.437.500	1.437.500	0
475	005010500400580000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	W14.U/3761.1/PL.01/05/2023	S-24/MK.6/KNL.1003/2023	4-Apr-2023	3	Tahunan	2.409.688	2.409.688	0	Heriyanti	Kantin	315/SEK/SK/V/2023	22-May-2023	W14.U22/1357/PL.02/05/2023	23 Mei 2023	23 Mei 2023	22 Mei 2026	23-May-2024	733A72G4VGB8BHQI	2.409.688	0	1.004.037	1.004.037	0
476	005010200400766000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Indramayu	W10-A/1508/PL.04/V/2023	S-23/MK.6/KNL.0806/2023	13-Apr-2023	3	Tahunan	2.325.000	2.325.000	0	Drs. Agus Gunawan, M.H.	Koperasi	274/SEK/SK/V/2023	10-May-2023	W10-A2/2987/PL.02/VII/2023	11 Juli 2023	11 Juli 2023	10 Juli 2026	11-Jul-2023	658266U8ELCQ4JIF	2.325.000	0	1.162.500	1.162.500	0
477	005010400098057000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Yogyakarta	W13-U/1507/PL.01/V/2023	S-97/MK.6/KN.4/2023	15-Apr-2023	5	per tahun	6.600.000	6.600.000	0	Sulistyowati - Waljiyem	kantin	233/SEK/SK/V/2023	4-May-2023	W13-U1/2126/MH.01.1/V/2023, W13-U1/2127/MH.01.1/V/2023	3 Mei 2023	3-May-2023	31 April 2028	5-Feb-2024	6191E3CIFK71F57Q	6.600.000	0	2.200.000	2.200.000	0
478	005012200099773000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Denpasar	W24-U/794/PL.01/4/2023	S-49/MK.6/KNL.1401/2023	13-Apr-2023	3	sekaligus	13.302.750	13.302.750	0	Siti Cholitijah	Kantin	207/SEK/SK/IV/2023	17-Apr-2023	W24-U/1685/PL.01/7/2023	17 juli 2023	1 Agustus 2023	31 Juli 2026	11 Juli 2023	E0C883CIFB38HCKR	13.500.000	197.250	7.125.000	7.125.000	0
479	005010300097830000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Ungaran	W12-U/959/PL.01/4/2023	S-84/MK.6/KNL.0901/2023	11-Apr-2023	3	Sekaligus	24.596.000	24.596.000	0	PT Bank Rakyat Indonesia KC Ungaran	ATM	206/SEK/SK/IV/2023	17-Apr-2023	W12.U18/1196/PL.07/05/2023	5-May-2023	5 Mei 2023	4-May-2026	03 Mei 2023	D52DE3CIFAT1A9P9	24.596.000	0	10.931.556	10.931.556	0
480	005010200400710000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Garut	W10-A/1325/PL.04/IV/2023	S-15/MK.6/KNL.0805/2023	16-Mar-2023	3	tahunan	5.342.500	5.342.500	0	Koperasi Al-Amanah	Koperasi	205/SEK/SK/IV/2023	17-Apr-2023	W10-A17/3259/PL.05/VI/2023	22-Jun-2023	1 Januari 2023	31-Dec-2025	21 Juni 2023	6304255DF0SBBED1	5.342.500	0	0	0	0
481	005012300099890000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Selong	W25-U/ 1137 /PL.02/4/2023	S-24/MK.6/KNL.1403/2023	3-Apr-2023	2	sekaligus	2.415.000	2.415.000	0	Ni Wayan Sumarni	Kantin	203/SEK/SK/IV/2023	14-Apr-2023	W25-U4/1606/PL.01/5/2023	15-May-2023	15-May-2023	15-May-2025	15 Mei 2023	BDE003CIFATDA1P9	2.415.000	0	805.000	805.000	0
482	005010200682150000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	W10-A/1245/PL.04/IV/2023	S-21/MK.6/KNL.0805/2023	31-Mar-2023	3	Sekaligus	1.800.000	1.800.000	0	Yanto Heryanto	kantin	186/SEK/SK/IV/2023	5-Apr-2023	W10-A23/1358/PL.01/IV/2023	17-Apr-2023	1 Maret 2023	28-Feb-2026	12-Apr-2023	0981D0N9VR35O116	1.800.000	0	700.000	700.000	0
483	005010300097954000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Wonogiri	W12.U/823/PL.01/03/2023	S-21/MK.6/KNL.0805/2023	7 Maret 2023	3	Sekaligus	2.520.000	2.520.000	0	Suryati	Kantin	155/SEK/SK/III/2023	31-Mar-2023	W12.U29/392/PL.01/04/2023	3-Apr-2023	3-Apr-2023	2-Apr-2026	4-May-2023	FA7491JNFLO9MA17	2.520.000	0	1.050.000	1.050.000	0
484	005011600307182000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tanah Grogot	W17-A/614/PL.02/III/2023	S-11/MK.6/KNL.1301/2023	13-Feb-2023	1	sekaligus	1.676.000	1.676.000	0	Muhamad Saupil	kantin	W17-A/614/PL.02/III/2023	31-Mar-2023	W17-A4/488.a/PL.02/III/2023	28-Mar-2023	28-Mar-2023	28-Mar-2024	27 Maret 2023	3361A2G4VG5DKO44	1.676.000	0	139.667	139.667	0
485	005012000400540000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Kendari	W23-U/1098/PL.01/3/2023	S-25/MK.6/KNL.1505/2023	24-Mar-2023	3	Bulanan	100.000	100.000	0	Tina Susanti	Kantin	157/SEK/SK/III/2023	31-Mar-2023	W23.U/1207 /KU.01/IV/2023	13-Apr-2023	13-Apr-2023	12-Apr-2026	12-Apr-2023	228E23CIFAQAUM0T	100.000	0	0	0	0
486	005011400400358000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	W16-U/616/KU.00/3/2023	S-20/MK.6/KNL.1201/2023	17-Mar-2023	2	sekaligus	52.548.000	52.548.000	0	PT. BRI Persero KC Palangkaraya	ATM	153/SEK/SK/III/2023	30-Mar-2023	W16-U/1004/KU.05.2/V/2023	2 Mei 2023	2 Mei 2023	30-Apr-2025	28-Apr-2023	57AD848VV5D6PS5O	52.548.000	0	8.758.000	8.758.000	0
487	005012000099663000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Baubau	W23-U/1094/PL.01/III/2023	S-23/MK.6/KNL.1505/2023	24-Mar-2023	3	Tahunan	1.800.000	1.800.000	0	LA NURU	Kantin	154/SEK/SK/III/2023	30-Mar-2023	W23.U2/999/PL.02/IV/2023	13-Apr-2023	13-Apr-2023	12 Maret 2024	7 Juni 2024	7FC2D3CIFKA63RM1	1.800.000	0	450.000	450.000	0
488	005010500098150000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Gresik	W14.U/2756/PL.01/3/2023	S-104/MK.6/KNL.1001/2023	14 Maret 23	3	Sekaligus	36.669.000	36.669.000	0	Choilifah	Kantin	151/SEK/SK/III/2023	28-Mar-2023	151/SEK/SK/III/2023	29-Mar-2023	1 Januari 2023	31 Desember 2025	2-May-2023	C319048VV5FDM3QK	36.669.000	0	12.223.000	12.223.000	0
489	005012200099780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Denpasar	W24-U/583/PL.01/3/2023	S-37/MK.6/KNL.1401/2023	8-Mar-2023	3	Tahunan	7.500.000	7.500.000	0	Ni Made Wangi	Kantin	146/SEK/SK/III/2023	20-Mar-2023	W24-U1/2962/PL.03/4/2023	10-Apr-2023	10-Apr-2023	9-Apr-2026	10-Apr-2023	B51497QLUFM7N0IG	7.500.000	0	3.125.000	3.125.000	0
490	005010700098675000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Rantauprapat	W2.U/1825/KU.04.2/3/2023	S-154/KNL.0203/2023	23 Februari 2023	3	Tahunan	2.862.917	2.862.917	0	Radhitya Wiguna,S.H.	Kantin	144/SEK/SK/III/2023	16-Mar-2023	1654/SEK.W2-U13/PL.2.7/V/2024	29 Mei 2024	30 Mei 2024	29 Mei 2025	29-May-2024	4C9557QLUP3PCJRE	2.862.917	0	1.192.882	1.192.882	0
491	005010700526746000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	W1-TUN/370/PL.01/3/2023	S-32/MK.6/KNL.0201/2023	27 Februari 2023	3	Sekaligus	10.983.000	10.983.000	0	Irwan H. Turnip	Kantin	126/SEK/SK/III/2023	7-Mar-2023	W1-TUN1/474.a/PL.02/4/2023	15-Mar-2023	8 Januari 2023	7 Januari 2026	29-Dec-2023	FA7BE7QLUFJAG4EC	10.983.000	0	3.661.000	3.661.000	0
492	005010300401055000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Kebumen	W11A/1076/PL.02/III/2023	S-20/MK.6/KNL.0906/2023	22-Feb-2023	2	Sekaligus	3.000.000	3.000.000	0	Arif Riyadi	kantin	124/SEK/SK/III/2023	6-Mar-2023	W11-A10/1639/PL.01/III/2023	27-Mar-2023	27-Mar-2023	26-Mar-2025	21 Maret 2023	6CA446U8EL15I20F	3.000.000	0	375.000	375.000	0
493	005012600400126000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Curup	W8-U/738/KU.00/03/2023	S-9/MK.6/KNL.0501/2023	8-Feb-2023	3	Tahunan	1.068.750	1.068.750	0	Syarifudin	Kantin	123/SEK/SK/III/2023	3-Mar-2023	661/WKPN.W8.U2/KS.00/3/2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024	28 Maret 2025	30 Maret 2023	499B76U8EL1F04ED	1.068.750	0	267.188	267.187	1
494	005010300097797000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kendal	W12.U/598/PL.01/3/2023	S-6/MK.6/KNL.0903/2023	6-Feb-2023	3	Sekaligus	4.635.000	4.635.000	0	KPRI Dharmayukti Pengadilan Negeri Kendal	koperasi	122/SEK/SK/III/2023	2-Mar-2023	W12.U22/612/PL.02/4/2023	17-Apr-2023	20-Sep-2022	20-Sep-2025	13-Apr-2023	4162C55DEVV4TBC5	4.635.000	0	1.158.750	1.158.750	0
495	005010200097514000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bandung	W11.U/1150/PL.07/2/2023	S-32/MK.6/KNL.0801/1/2023	6-Feb-2023	3	Sekaligus	15.000.000	15.000.000	0	Ahmad Halimuddin	koperasi	103/SEK/SK/II/2023	22-Feb-2023	W11.U1/2311/KU.04.2/III/2023	3-May-2023	3-May-2023	2-May-2026	4 Mei 2023	F6C052G4VGALTJV0	15.000.000	0	6.666.667	6.666.667	0
496	005012600673009000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tais	W8-U/484/KU.00/02/2023	S-2/MK.6/KNL.0501/2023	20-Jan-2023	3	sekaligus	4.263.000	4.263.000	0	Helmiati	Kantin	90/SEK/SK/II/2023	8-Feb-2023	W8.U6/488/PL.01.10/III/2023	16-Mar-2023	16-Mar-2023	16-Mar-2026	16 Maret 2023	B561C0N9VR0AE6PS	4.263.000	0	1.776.250	1.776.250	0
497	005010300098036000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Purbalingga	W12.U/225/PL.01/01/2023	S-4/MK.6/KNL.0906/2023	17-Jan-2023	2	Sekaligus	1.900.000	1.900.000	0	Iswanti	Kantin	58/SEK/SK/I/2023	30-Jan-2023	W12.U25/229/PL.07/02/2023	16 FEBRUARI 2023	16-Feb-2023	16-Feb-2025	16-Feb-2023	2BD4561QUQBKEI70	1.900.000	0	158.333	158.333	0
498	005010700401905000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Sei Rampah	W2.U/654/KU.04.2/I/2023	S-162/MK.6/KNL.0201/2022	18-Nov-2022	3	Tahunan	1.125.000	1.125.000	0	Ricca Maulina	Kantin	53/SEK/SK/I/2023	26-Jan-2023	W2.U19/537/UM.01.10/01/2023	30-Jan-2023	31-Jan-2023	30-Jan-2026	30-Jan-2023	682662G4VFVHRH6	3.375.000	2.250.000	1.218.750	1.218.750	0
499	005010200477292000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Depok	W11.U/360/PL.09/1/2023	S-158/MK.6/KNL.0803/2022	12 Januari 2023	3	Sekaligus	81.474.000	81.474.000	0	Bank BTN	ATM	50/SEK/SK/I/2023	24-Jan-2023	W11.U21/1894/UM.01.07/IV/2023	3-Apr-2023	3-Apr-2023	3-Apr-2026	31-Mar-2023	D5B9755DEVSM7KIB	81.474.000	0	33.947.500	33.947.500	0
500	005010200400678000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Sumedang	W10-A/ 0329/PL.01/1/2023	S-317/MK.6/KNL.0801/2022	11-Nov-2022	3	Sekaligus	6.466.500	6.466.500	0	H. Juju Herlina, S.H.	Koperasi	41/SEK/SK/I/2023	17-Jan-2023	W10-A10/1658/PL.02/III/2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	28 Februari 2026	21-Feb-2023	AE0367QLUFGC6A8O	6.466.500	0	2.514.750	2.514.750	0
501	005010500098387000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Negeri Magetan	W14.U/381/PL.01/1/2023	S-1/MK/KNL.1006/2023	4-Jan-2023	3	Sekaligus	2.115.000	2.115.000	0	Parti (Kantin)	Kantin	30/SEK/SK/I/2023	16-Jan-2023	W14-U25/147/PL.01/01/2023	16 Januari 2023	17 Januari 2023	16 Januari 2026	17-Jan-2023	C45E02G4VFV4SU6C	2.115.000	0	763.750	763.750	0
502	005010500098387000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Magetan	W14.U/381/PL.01/1/2023	S-1/MK/KNL.1006/2023	4-Jan-2023	3	Sekaligus	764.000	764.000	0	Asiyatun (Laundry)	Laundry	30/SEK/SK/I/2023	16-Jan-2023	W14-U25/151/PL.01/01/2023	17 Januari 2023	17 Januari 2023	16 Januari 2026	17-Jan-2023	C45E02G4VFV4SU6C	764.000	0	275.889	275.889	0
503	005011300402669000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Mempawah	W14-A/190/PL.02/I/2023	S-2/MK.6/KNL.1102/2023	6-Jan-2023	2	Tahunan	1.200.000	1.200.000	0	Ismayanita	Kantin	31/SEK/SK/I/2023	16-Jan-2023	W14-A3/351/PL.07/I/2023	27-Jan-2023	27-Jan-2023	27-Jan-2025	27 Januari 2023	C7DB248VV547IM2M	1.200.000	0	50.000	50.000	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
504	00501190067292700 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Masamba	W22.U/11/KU/I/2023	S-19/MK.6/KNL.1504/2022	5-Dec-2022	3	sekaligus	4.961.250	4.961.250	0	Jumatia	Kantin	17/SEK/SK/I/2023	4-Jan-2023	W22.U21/310/2/2022	10-Feb-2023	10-Feb-2023	9-Feb-2026	17-May-2024	3BBA62G4VPL369F1	1.653.750	-3.307.500	137.813	137.813	0
505	00501230068227400 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Taliwang	W22-A/91/PL.06/I/2023	S-3/MK.6/KNL.1404/2023	2-Jan-2023	3	tahunan	600.000	600.000	0	Jaweriah	Kantin	19/SEK/SK/I/2023	4-Jan-2023	W22-A8/0079.a/PL.01/II/2023	5-Jan-2023	5-Jan-2023	31-Dec-2025	28 Februari 2023	9F03C2G4VG2FGCB	600.000	0	0	0	0
506	00501170067303400 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Amurang	W19-U/4996/PL.02/12/2022	S-102/MK.6/KNL.1601/2022	6-Dec-2022	3	sekaligus	1.483.000	1.483.000	0	Rommy R. Werung	kantin	1694/SEK/SK/XII/2022	9-Dec-2022	W19-U7/168/PL.01/2023	20-Jan-2023	20-Jan-2023	31-Dec-2025	24-Jan-2023	400411JNFLD01STN	1.483.000	0	535.528	535.528	0
507	00501030009784400 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jepara	W12.U/2004/PL.01/11/2022	S-250/MK.6/KNL.0901/2022	9-Nov-2022	3	Sekaligus	6.047.000	6.047.000	0	Suhadi	Kantin	1588/SEK/SK/XI/2024	30-Nov-2022	W12.U19/2317/UM.01/II/2022	4 Oktober 2022	4 Oktober 2022	3 Oktober 2025	15-Feb-2023	496051JNFLFMB76H	6.047.000	0	1.511.750	1.511.750	0
508	00501030009793300 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Surakarta	W12.U/1832/PL.01/11/2022	S-67/MK.6/KNL.0902/2022	17 Oktober 2022	3	Sekaligus	13.500.000	13.500.000	0	Sri Astani	Kantin	1466/SEK/SK/XI/2022	7-Nov-2022	W12-U2/110/PL.09/12/2022	5 Desember 2022	5 Desember 2022	4 Desember 2025	1-Dec-2022	B84733CIF27QN2G7	13.500.000	0	4.125.000	4.125.000	0
509	00501190009958100 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bulukumba	W22-U11/2288/UM.00/11/2022	S-210/MK.6/KNL.1502/2022	18-Oct-2022	3	Tahunan	5.581.000	5.581.000	0	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	ATM	1464/SEK/SK/XI/2022	1-Nov-2022	W22-U11/112/01/2023	10-Jan-2023	10-Jan-2023	9-Jan-2023	13-Jan-2023	7004D6U8EK800IVP	16.743.000	-11.162.000	5.581.000	5.581.000	0
510	00501190009950700 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Enrekang	W22.U/4239/KU/X/2022	S-14/MK.6/KNL.1504/2022	28-Sep-2022	3	sekaligus	2.680.000	2.680.000	0	PT. Bank Tabungan Negara	Kantor Kas	1352/SEK/SK/X/2022	27-Oct-2022	W22.U13/1206/PL.09/11/2022	1-Nov-2023	1-Nov-2023	31-Oct-2025	5-Nov-2024	CEFFD1JNFVK7ONKJ	894.000	-1.786.000	745.000	745.000	0
511	00501020040070400 0KD	Pengadilan Agama Tasikmalaya	Pengadilan Agama Tasikmalaya	W10-A/1245/PL.04/IV/2023	S-37/MK.6/KNL.0805/2022	12-Oct-2022	3	Sekaligus	2.500.000	2.265.105	0	Firman Nurdiansyah	kantin	1324/SEK/SK/X/2022	24-Oct-2022	W10-A6/ 4494 /KU.04.2/XI/2022	3-Nov-2022	1 Oktober 2022	30-Sep-2025	3-Nov-2023	1E8271JNFMA52NMK	2.500.000	0	1.875.000	1.875.000	0
512	00501070009862900 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Medan	W2.U/8439/PL.04.2/10/2022	S-121/MK.6/KNL.0201/2022	6 Oktober 2022	3	Sekaligus	40.932.000	40.932.000	0	Koperasi PN Medan	Koperasi	1321/SEK/SK/X/2022	19-Oct-2022	W2-U1/22929/PL.01/XII/2022	21 Desember 2022	20 Desember 2022	20 Desember 2025	20-Dec-2022	1DD5F48VUSQPSJNQ	40.932.000	0	13.644.000	13.644.000	0
513	00501070010802500 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Stabat	W2.U/8440/PL.04.2/10/2022	S-113/MK.6/KNL.0201/2022	27-Sep-2022	3	Sekaligus	5.985.000	5.985.000	0	SUMADI	Kantin	1322/SEK/SK/X/2022	19-Oct-2022	W2.U15/6141/PL.07/XII/2022	9 Desember 2022	9 Desember 2022	9-Nov-2025	9-Dec-2022	548157QLU7409DCS	5.985.000	0	1.828.750	1.828.750	0
514	00501019966315700 0KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi		S-101/MK.6/KN.4/2022	20-Sep-2022	5	Sekaligus	78.000.000	78.000.000	0	PT Bank Mandiri Persero	ATM	1215/SEK/SK/IX/2022	27-Sep-2022	7/PKS/MA/2022	25 Oktober 2022	25 Oktober 2022	24 Oktober 2027	25 Oktober 2022	76F7P61QUHPNU718	78.000.000	0	44.200.000	44.200.000	0
515	00501290009759800 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tangerang	W29.U/2808/PL.06/IX/2022	S-64/MK.6/KNL.0603/2022	29-Aug-2022	3	sekaligus	42.069.000	42.069.000	0	CV Tri Lanang Kopi	Kantin	1173/SEK/SK/IX/2022	26-Sep-2022	W29.U4/10383/PL.02.02/11/2022	25-Nov-2022	25-Nov-2022	25-Nov-2025	24-Nov-2022	7B11C2G4V71ULD3K	42.069.000	0	12.854.417	12.854.417	0
516	00501280009974800 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tobelo	W28-U/1462/PL.01/9/2022	S36/MK.6/KNL.1604/2022	15-Aug-2022	3	tahunan	3.057.500	3.057.500	0	Arey R. Paliaky	Kantin	1155/SEK/SK/IX/2022	26-Sep-2022	1341/SEK.W28-U4/SP.KU.01.1/X/2023	30 Oktober 2022	30 Oktober 2025	30 Oktober 2024	31 Oktober 2023	746AD3CIFBCPPG99	3.057.500	0	2.547.917	2.547.917	0
517	00501020009762400 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Karawang	W11.U/4349/PL.07/8/2022	S-38/MK.6/KNL.0804/2022	15 Agustus 2022	3	Sekaligus	30.630.000	30.630.000	0	PT. Bank BNI	ATM	1099/SEK/SK/VIII/2022	31-Aug-2022	W11.U10/2539/PL.01/10/2022	13 Oktober 2022	7 Oktober 2022	6 Oktober 2022	10-Nov-2022	UE2067QLU711LJE4	30.630.000	0	7.657.500	7.657.500	0
518	00501020040258700 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Subang	W10-A/2655/PL.01/VIII/2022	S-32/MK.6/KNL.0804/2022	4-Aug-2022	3	Sekaligus	13.524.000	13.524.000	0	Indri Betrik	Kantin	1092/SEK/SK/VIII/2022	29-Aug-2022	W10-A9/2113/PL.07/VIII/2022	12 Juli 2022	12 Juli 2022	12 Juli 2025	20-Dec-2022	A67CD6U8ECHUDER7	13.524.000	0	2.254.000	2.254.000	0
519	00501120065204100 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Gunung Sugih	W8-A/1941/PL.02/8/2022	S-14/MK.6/KNL.0503/2022	15 Juli 2022	3	Sekaligus	2.241.000	2.241.000	0	Yatini	Kantin	1089/SEK/SK/VIII/2022	24-Aug-2022	W8-A8/1499/PL.02/11/2022	10-Nov-2022	9-Nov-2022	9-Nov-2025	25 Agustus 2022	11CBC8N3E1ATIIKR	2.241.000	0	622.500	622.500	0
520	00501020030816600 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	W10-A/2538/PL.04/VIII/2022	S-227/MK.6/KNL.0801/2022	5 Agustus 2022	3	Tahunan	2.696.000	2.696.000	0	Masngud	Kantin	1064/SEK/SK/VIII/2022	18-Aug-2022	W10-A/3151/PL.01/IX/2022	30-Sep-2022	30-Sep-2022	30-Sep-2025	1-Oct-2024	6C45A55DP9QMCCN7	3.370.000	674.000	2.527.500	2.527.500	0
521	00501120009903100 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	W9-U/1933/KU.01/8/2022	S-42/MK.6/KNL.0502/2022	7-Jun-2022	3	Sekaligus	35.836.000	35.836.000	0	Bank BRI	ATM	1019/SEK/SK/VII/2022	3-Aug-2022	W9.U1/2189/KU.04.2/07/2022	1 Juli 2022	1 Juli 2022	30 Juni 2025	8-Sep-2022	2E72B7QLU6QVO6Q2	35.836.000	0	5.972.667	5.972.667	0
522	00501030009789000 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Magelang	satker salah upload di esadewa, harusnya surat ini yg diupload https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jdGdOamU9YXu6n99zhdYyn5MWMDipX4	S-119/MK.6/KNL.0901/2022	23-Jun-2022	3	Tahunan	1.598.400	1.598.400	0	Ny. Wiwik Utami	kantin	946/SEK/SK/VII/2022	22-Jul-2022	W12.U6/37/UM.BMN.01/7/2022	31 Juli 2022	1 Agustus 2022	31 Juli 2025	3 Agustus 2022	11C3E8N3E1A9ALSD	1.598.400	0	932.400	932.400	0
523	00501030009798000 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kebumen	W12.U/2065/PL.01/12/2022	S-78/MK.6/KNL.0906/2022	9-Nov-2022	3	Sekaligus	2.250.000	2.250.000	0	Siti Basriyah	Kantin	1700/SEK/SK/XII/2022	14-Jul-2022	W12-U13/122/PL.02/I/2023	13 Januari 2023	1 Januari 2023	31 Desember 2025	12-Jan-2023	FE2D51JNFLCKESTL	2.250.000	0	750.000	750.000	0
524	00501020053182300 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	W2-TUN/758/PL.01/VII/2022	S-158/MK.6/KNL.0801/2022	8 Juni 2022	3	Sekaligus	69.660.000	69.660.000	0	PT. BRI	ATM	841/SEK/SK/VII/2022	6-Jul-2022	W2-TUN2/1297/KU.01/6/2022	8 Juni 2022	1 Juni 2022	31 Mei 2025	14-Nov-2022	425900N9VIE2IIS8	69.660.000	0	9.675.000	9.675.000	0
525	00501050009824200 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Nganjuk	3125/SEK.PT.W9-U/PL.1.2.5/XII/2024	S-8/MK.6/KNL.1006/2022	24 Maret 2022	3	Sekaligus	12.000.000	12.000.000	0	Basori	Kantin	704/SEK/SK/VI/2022	21-Jun-2022	W.14.U.27/58/PL.01.09/02/2022	14 Maret 2022	Juni 2022	Juni 2025	21 Juni 2022	DE00E2G4V7458CGU	12.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
526	00501010040063100 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Barat	W9-A/2436/PL.05/06/2022	S-98/MK.6/KNL.0701/2022	7 Juni 2022	3	Sekaligus	17.013.000	17.013.000	0	PT. BSI Tbk Kancab Jakarta Barat	Bank	689/SEK/SK/VI/2022	15-Jun-2022	W9-A2/5799/HM.01.1/9/2022	15-Sep-2022	1 Juni 2022	31 Mei 2025	28-Sep-2022	96B5E48VUSHS2SCK	17.013.000	0	2.362.917	2.362.917	0
527	00501030009804000 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Banjarnegara	W12.U/915/PL.01/6/2022	S-22/MK.6/KNL.0906/2022	18-May-2022	3	Sekaligus	1.543.500	1.543.500	0	Agus Triyono	kantin	687/SEK/SK/VI/2022	15-Jun-2022	W12.U26/732/PL.02/6/2022	17-Jun-2022	17 Juni 2022	16 Juni 2025	17-Jun-2022	B10268N3E14NTDBF	1.543.500	0	257.250	257.250	0
528	00501090063199900 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Pangkalan Kerici	W4-A/1579/PL.02/6/2022	S-38/MK.6/WKN.03032022	6 Juni 2022	3	Tahunan	4.800.000	4.800.000	0	Rosidi	Kantin	690/SEK/SK/VI/2022	15-Jun-2022	W4-A15/791/PL.02/7/2022	25 Juli 2022	25 Juli 2022	24 Juli 2025	25-Jul-2022	5P6723CIF1PKGQCT	4.800.000	0	933.333	933.333	0
529	00501290009759800 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tangerang	W29-U/1518/PL.06/V/2022	S-18/MK.6/KNL.0603/2022	26-Apr-2022	3	sekaligus	72.894.000	72.894.000	0	BTN	Kantor Kas	639/SEK/SK/V/2022	24-May-2022	W29.U4/7185/PL.02.01/08/2022	1 Agustus 2022	1 Agustus 2022	31 Juli 2025	28 Juli 2022	A656B7QLU6LLQ0PM	72.894.000	0	14.173.833	14.173.833	0
530	00501030009771300 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tinggi Semarang	W12.U/677/PL.01/04/2022	S-75/MK.6/KNL.0901/2022	27-Apr-2022	3	Sekaligus	27.166.000	27.166.000	0	PT Bank Rakyat Indonesia	ATM	568/SEK/SK/IV/2022	28-Apr-2022	W12.U/755/PL.01/06/2022	2 Juni 2022	2 Juni 2022	31 Mei 2025	30 Mei 2022	RD25161QUHAQFL48	27.166.000	0	3.773.056	3.773.056	0
531	00501290009759800 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Tangerang	W29-U/3071/PL.06/XI/2021	S-8/MK.6/WKN.06/KNL.03/2022	9-Feb-2022	3	sekaligus	61.620.000	61.620.000	0	PT Bank Rakyat Indonesia	ATM	371/SEK/SK/III/2022	28-Mar-2022	W29.U4/5813/PL.02.02/06/2022	20 Juni 2022	21 Juni 2022	21 Juni 2025	16 Juni 2022	BBE677QLU6I84BCO	61.620.000	0	10.270.000	10.270.000	0
532	00501290041785000 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Pandeglang	W27-A/604/PL.01/III/2022	S-20/MK.6/WKN.06/KNL.01/2022	25-Feb-2022	3	sekaligus	3.156.000	3.156.000	0	Sdri Undayah	Kantin	369/SEK/SK/III/2022	23-Mar-2022	W27-A2/778/PL.02/4/2022	19-Apr-2022	19-Apr-2022	18-Apr-2025	18-Apr-2022	FD3A00N9VHPARCM6	3.156.000	0	350.667	350.667	0
533	00501030009786500 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Rembang	W12.U/431/PL.01/03/2022	S-27/MK.6/KNL.0901/2022	17 Maret 2022	3	Tahunan	925.000	925.000	0		Kantin	359/SEK/SK/III/2022	21-Mar-2022	W12-U30/394/PL.09/04/2022	18-Apr-2022	18-Apr-2022	17-Apr-2025	17-Apr-2024	C2C5048VVEMSSRGK	925.000	0	308.333	308.333	0
534	00501190009961700 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Makale	W22.U/705/KU/II/2022	S-1/MK.6/WKN.15/KNL.04/2022	31-Jan-2022	3	Sekaligus	1.174.500	1.174.500	0	Yuspin Nete'	Kantin	262/SEK/SK/II/2022	25-Feb-2022	W22.U10/273/PL.09/3/2022	11 Maret 2022	11 Maret 2022	11 Maret 2025	11 Maret 2022	BD3FF6U8EBMRUT7N	1.174.500	0	65.250	65.250	0
535	00501240047723000 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lembata	W26-U/447/PL.03/II/2022	S-28/MK.6/WKN.14/KNL.05/2022	11-Feb-2022	3	Tahunan	1.410.000	1.410.000	0	Maria Florentina Nai	Kantin	252/SEK/SK/II/2022	22-Feb-2022	W26-U13/436/PL.02/III/2022	17 Maret 2022	17 Maret 2022	28 februari 2025	21-Mar-2024	F67A261QV3OQL673	1.410.000	0	352.500	352.500	0
536	00501050040138100 0KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Tulungagung	W13-A/1264/PL.02/2/2022	S-9/MK.6/WKN.10/KNL.03/2022	17 Januari 2022	3	Tahunan	6.417.500	6.417.500	0	Bank Jatim	ATM	237/SEK/SK/II/2022	18-Feb-2022	W13-A11/1461/HM.01.1/3/2022	8-Mar-2022	8 Maret 2022	7 Maret 2025	27-Feb-2023	58BR061QUQBRU59S	6.417.500	0	1.069.583	1.069.583	0

Bagian Administrasi Penghapusan																				Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/Lainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
537	005010500401350000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Situbondo	W13-A/1180/PL.01/2/2022	S-8/MK.6/WKN.10/KNL.04/2022	7 Februari 2022	3	Sekaligus	2.539.000	2.539.000	0	Suanggak	Kantin	222/SEK/SK/II/2022	15-Feb-2022	W13-A19/534/PL.02/3/2022	9 Maret 2022	10 Maret 2025	9 Maret 2022	9-Mar-2022	3856261QUH4CCTLM	2.539.000	0	141.056	141.056	0
538	005010900631999000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Pangkalan Kerici	W4-A/582/PL.01/2/2022	S-15/MK.6/WKN.03/KNL.03/2022	8 Februari 2022	3	Tahunan	27.528.000	27.528.000	0	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	ATM	221/SEK/SK/II/2022	15-Feb-2022	W4-A15/345.a/PL.02/3/2022	9 Maret 2022	9 Maret 2022	8 Maret 2025	10-Mar-2022	769E58N3E0RIKF8N	27.528.000	0	1.529.333	1.529.333	0
539	005012600673041000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Kepahiang	W8-U/306/KU.00/01/2022	S-2/MK.6/WKN.05/KNL.01/2022	20-Jan-2022	3	Tahunan	1.027.500	1.027.500	0	Sabirul Huda	Kantin	104/SEK/SK/I/2022	31-Jan-2022	W8-U7/423a/PL.01/02/2023	10 Februari 2023	7 Februari 2024	7 Februari 2025	7 Februari 2024	A0A0B3CIFJU80FK6	1.284.375	256.875	107.031	107.031	0
540	005010200652062000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Depok	W10-A/4401/PL.04/XII/2021	S-176/MK.6/WKN.08/KNL.03/2021	21 Dsember 2021	3	Sekaligus	4.533.750	4.533.750	0	Tedi Permana	Kantin	35/SEK/SK/I/2022	17-Jan-2022	W10-A22/0514/PL.07/I/2022	25 Januari 2022	25 Januari 2022	24 Januari 2025	28-Jan-2022	1C1A20N9VHGKL924	4.533.750	0	125.938	125.938	0
541	005010800400333000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	W3.U/104/TURT/1/2022	S-31/MK.6/WKN.03/KNL.02/2021	7 Dec 2021	3	Tahunan	3.600.000	3.600.000	0	Samsi	Kantin	19/SEK/SK/I/2022	17 Jan 2022	W3.U11/67/UK/I/2022	18-Jan-2022	18-Jan-2022	17-Jan-2025	17-Jan-2025	66C1D7QLV21H1D1Q	3.600.000	0	100.000	100.000	0
542	005010500098260000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Trenggalek	W14-U/10699/PL.01/12/2021	S-130/MK.6/WKN.10/KNL.03/2021	7 Desember 2021	3	Tahunan	1.200.000	1.200.000	0	Kusriati	Kantin	18/SEK/SK/I/2022	13-Jan-2022	W14-U28/136/KU.04.2/1/2022	19 Januari 2022	19-Jan-2022	25-Jan-2025	5-Jan-2024	36E801JNFUMDD2M3	1.200.000	0	100.000	100.000	0
543	005012600401910000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Mukomuko	W8-U/3237/KU.00/12/2021	S-92/MK.6/WKN.05/KNL.01/2021	9-Dec-2021	3	Tahunan	1.568.750	1.568.750	0	Hairul	Kantin	9/SEK/SK/I/2022	10-Jan-2022	W8-U9/231/PL.01/01/2022	27 Januari 2022	25 Januari 2022	25 Januari 2025	25 Januari 2024	464180NA044KTINK	1.960.938	392.188	163.412	163.412	0
544	005011900099485000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jeneponto	W22-U/2964/KU/IX/2021	S-299/MK.6/WKN.15/KNL.02/2021	17-Nov-2021	3	sekaligus	5.415.000	5.415.000	0	Samsinah	Kantin	1388/SEK/SK/XII/2021	30-Dec-2021	W22.U18/201/PL.02/01/2022	17 Januari 2022	17 Januari 2022	17 Januari 2025	17 Januari 2022	7D15C3CIF17H9PAR	5.415.000	0	150.417	150.417	0
545	005012400400007000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Larantuka	W26-U/447/PL.03/II/2022	S-181/MK.6/WKN.14/KNL.05/2021	2 Des 2021	1	sekaligus	2.192.000	2.192.000		Mery M.N Langkamau	Kantin	1294/SEK/SK/XII/2021	9 Dec 2021	surat perjanjian sewa ada, tapi tidak bernomor	19-Apr-2024	19-Apr-2024	18-Apr-2025		A2ECC1JNFUVNM5V6	2.200.000	8.000	733.333	733.333	0
546	005012400400007000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Larantuka	W26-U/447/PL.03/II/2022	S-181/MK.6/WKN.14/KNL.05/2021	2 Des 2021	1	sekaligus	2.192.000	2.192.000		Maria Regina Lein	Kantin	1294/SEK/SK/XII/2021	9 Dec 2021	surat perjanjian sewa ada, tapi tidak bernomor	10-Mar-2023	10-Mar-2023	10-Mar-2024					0	0	0
547	005012400400007000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Larantuka	W26-U/447/PL.03/II/2022	S-181/MK.6/WKN.14/KNL.05/2021	2 Des 2021	1	sekaligus	2.192.000	2.192.000		Maria Regina Lein	Kantin	1294/SEK/SK/XII/2021	9 Dec 2021	surat perjanjian sewa ada, tapi tidak bernomor	21-Jan-2022	21-Jan-2022	21-Jan-2023					0	0	0
548	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	-	S-168/MK.6/KN.5/2021	29-Aug-2021	5	Sekaligus	92.767.000	92.767.000	0	PT Dhost Telekomunikasi Indonesia	Kantor	887/SEK/SK/IX/2021	1-Sep-2021	6/PKS/MA/2021	24-Sep-2021	24-Sep-2021	23-Sep-2026	24-Sep-2021	F5FFD6U8E2V1QEPD	92.767.000	0	32.468.450	32.468.450	0
549	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	-	S-150/MK.6/KN.5/2021	31-Jul-2021	5	Sekaligus	406.531.000	406.531.000	0	PT Bank Syariah Indonesia	ATM	815/SEK/SK/VIII/2021	19-Aug-2021	5A/PKS/MA/2021	22-Sep-2021	22-Sep-2021	21-Sep-2026	22-Sep-2021	D3E278N3DO3QLSJD	406.531.000	0	142.285.850	142.285.850	0
550	005010100097471000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	W10.U1/190/KS.00/IV/2021	S-73/MK.6/KN.5/2021	31-Mar-2021	5	tahunan	7.100.000	7.100.000	0	Rika Fatmawati	Fotocopy dan ATK	307A/SEK/SK/IV/2021	13-Apr-2021	W10-U1/218/KS.00/V/2021	25 Mei 2021	1 Juli 2021	30 Juni 2026	24 Mei 2021	204698N3DNNUMEBH	7.100.000	0	0	0	0
551	005010100097471000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	W10.U1/190/KS.00/IV/2021	S-73/MK.6/KN.5/2021	31-Mar-2021	5	tahunan	25.000.000	25.000.000	0	Rosida	Kantin	307A/SEK/SK/IV/2021	13-Apr-2021	W10-U1/218/KS.00/V/2021	25 Mei 2021	1 Juli 2021	30 Juni 2026	24 Mei 2021	E51EF1JNF34RE4UL	25.000.000	0	0	0	0
552	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	500/BUA.7/UI/10/2020	S-219/MK.6/KN.5/2020	16-Oct-2020	5	Sekaligus	76.959.000	76.959.000	0	PT Bank BRI	ATM	801/SEK/SK/XII/2020	16-Dec-2020	02/PKS/MA/2021	2 Februari 2021	2 Februari 2021	1 Februari 2026	2 Februari 2021	CE8C50N9V88SFEQ1	76.959.000	0	16.674.450	16.674.450	0
553	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	500/BUA.7/UI/10/2020	S-219/MK.6/KN.5/2020	16-Oct-2020	5	Sekaligus	806.873.000	806.873.000	0	PT Bank BNI Syariah	Kantor Cabang	801/SEK/SK/XII/2020	16-Dec-2020	01/PKS/MA/2021	13 Januari 2021	13 Januari 2021	12 Januari 2026	12 Januari 2021	A9ACCBN3DNBLM39D	806.873.000	0	161.374.600	161.374.600	0
554	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	500/BUA.7/UI/10/2020	S-219/MK.6/KN.5/2020	16-Oct-2020	5	Sekaligus	134.502.500	134.502.500	0	Koperasi Pusat Mahkamah Agung	Koperasi	801/SEK/SK/XII/2020	16-Dec-2020	03/PKS/MA/2021	16 Februari 2021	16 Februari 2021	15 Februari 2026	16 Februari 2021	F589D55DED57RDSH	134.502.500	0	31.383.917	31.383.917	0
555	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	500/BUA.7/UI/10/2020	S-219/MK.6/KN.5/2020	16-Oct-2020	5	Sekaligus	185.305.000	185.305.000	0	PT Pos Indonesia	Kantor	801/SEK/SK/XII/2020	16-Dec-2020	93/Bua.7/PKS/02/2021	26 Februari 2021	26 Februari 2021	25 Februari 2026	26 Februari 2021	58FEA6U8E2AAZGKL	185.305.000	0	43.237.833	43.237.833	0
556	005010199663157000KP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Badan Urusan Administrasi	-	S-16/MK.6/KN.5/2019	7-Jan-2019	5	Sekaligus	309.140.000	309.140.000	0	Koperasi Pusat Mahkamah Agung	Koperasi	970/SEK/SK/XII/2019	2-Dec-2019	01/Bua.7/PKS/01/2020	8 Januari 2020	8 Januari 2020	8 Januari 2025	8 Januari 2020	7CDC63CIEEJ5PK6V	309.140.000	0	0	0	0
557	005012900689313000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	-	S-39/MK.6/WKN.06/KNL.01/2018	30-Sep-2019	5	sekaligus	40.000.000	40.000.000	0	PT BRI Cabang Serang	ATM	857A/SEK/SK/X/2019	16-Oct-2019	W2.TUN7/PL.01/111/2020	2 Maret 2020	01 Maret 2020	01 Maret 2025	5 Juni 2020	39DE848VU9K8UG2G	40.000.000	0	1.333.333	1.333.333	0
558	005013500477270000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Nunukan	Tidak Ada	S-37/MK.6/KNL.1303/2024	15-Oct-2024	1	Sekaligus	586.500			Nurhaedi	Kantin	Belum Diajukan		785/SEK.PN.W34-U3/PL1/X/2024	16 Oktober 2024	4 November 2024	3-Nov-2025	4-Nov-2024	C8C2855DF9TM329A	803.100	803.100	489.000	489.000	0
559	005013500477270000KD	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Nunukan	Tidak Ada	S-37/MK.6/KNL.1303/2024	15-Oct-2024	1	Sekaligus	216.600			DYK Cabang Nunukan	DYK	Belum Diajukan		784/SEK.PN.W34-U3/PL1/X/2024	16 Oktober 2024	4 November 2024	3-Nov-2025	4-Nov-2024	C8C2855DF9TM329A	803.100	803.100	180.500	180.500	0
560	005010100400647000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Timur				5	Sekaligus	23.976.000	23.976.000		PT Bank BRI Tbk Kantor Cimanggis	Bank			W9-A/3256/KU.0.4.2/7/2020	9 Juli 2020	13 Juni 2020	12 Juni 2025	28 Juli 2020	FF6FA7QLTK1JASUM	23.976.000	0	1.998.000	1.998.000	0
561	005010200400483000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Tidak Ada	S-260/MK.6/KNL.0801/2022	14-Sep-2022	3	Sekaligus	3.000.000	3.000.000	0	Farid D Wijaya	kantin	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak ada nomor suratnya	2 Januari 2023	2 Januari 2023	31 Desember 2026	20 Januari 2023	339EF48VV5418J20	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
562	005010500098391000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Pamekasan	Tidak Ada	S-47/MK.6/KNL.1005/2024	1-Oct-2024	1	Tahun	1.431.000	0	0	Vera Januar Astutik	Kantin	Tidak Ada	Tidak Ada	1284/SEK.W14-U7/PL1.2/X/2024	23-Oct-2024	23-Oct-2024	22-Oct-2025	23-Oct-2024	299746U8EV044CPF	1.341.000	90.000	1.117.500	1.117.500	0
563	005010500401271000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jombang	Tidak Ada	S-117/MK.6/KNL.1003/2024	27-Aug-2024	1	Tahunan	1.166.466	1.166.466	0	Agus Hariadi	Kantin	Tidak Ada	Tidak Ada	2691/SEK.W13-A13/PL1.2/IX/2024	23-Sep-2024	23-Sep-2024	22-Sep-2025	23-Sep-2024	B44B77QLUPFGVMBB	1.166.466	0	874.850	874.850	0
564	005011100098942000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Palembang	W6.U/2688/ku.01/VIII/2023	S-136/MK.6/KNL.0402/2023	27-Jul-2023	3	Sekaligus	24.490.000	24.490.000	0	PT. BTN Tbk	ATM	tidak Ada	tidak ada	3782/SEK.W6-U1/PL.1.2/X/2023 dan 21/PKS/PLB.II/X/2023	19-Oct-2023	1-Sep-2023	31-Aug-2026	19 Oktober 2024	4120355DF0H19R99	24.490.000	0	13.605.556	13.605.556	0
565	005011100098942000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Palembang	W6.U/2687/KU.01/VIII/2023	S-137/MK.6/KNL.0402/2023	27-Jul-2023	2	Sekaligus	20.765.000	20.765.000	0	PT. BRI Tbk	ATM	tidak Ada	tidak ada	3635/SEK.W6-U1/PL.1.2/X/2023 dan B.5978-KC/IV/LOG/10/2023	13-Oct-2023	9 Oktober 2023	8 Oktober 2025	13 Oktober 2024	8887C55DF0GQO7F9	20.765.000	0	7.786.875	7.786.875	0
566	005011100402298000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	Tidak Ada	S-4/MK.6/KNL.0403/2023	25-Jan-2023	3	Sekaligus	28.795.000	28.795.000	0	Bank BSI	ATM	tidak Ada	Tidak ada	Nomor 22	6-Apr-2023	25 Januari 2023	25 Januari 2026	26-Apr-2023	36C140N9VR3JOQAU	28.795.000	0	10.398.194	10.398.194	0
567	005011100402298000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	Tidak Ada	S-3/MK.6/KNL.0403/2023	25-Jan-2023	3	Sekaligus	28.800.000	28.800.000	0	Bank BRI	ATM	Tidak Ada	Tidak ada	W6-A6/710.a/PL02/IV/2023	3-Apr-2023	25 Januari 2023	25 Januari 2026	6-Apr-2023	74B106U8EL1F3R5P	28.800.000	0	10.400.000	10.400.000	0
568	005011900099532000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Watampone	tidak ada	S-27/MK.6/KNL.1503/2024	12-Sep-2024	1	sekaligus	4.659.000	4.659.000	0	Marlina	Kantin	tidak ada	tidak ada	976/KPA.W22-U6/RT1.1/X/2024	9 Oktober 2024	18 Oktober 2024	17 Oktober 2025	8 Oktober 2024	F56E60NA04UUTHUA	4.659.000	0	3.882.500	3.882.500	0
569	005011900099532000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Watampone	tidak ada	S-27/MK.6/KNL.1503/2024	12-Sep-2024	1	sekaligus	4.659.000	4.659.000	0	Nurhayati	Kantin	tidak ada	tidak ada	975/KPA.W22-U6/RT1.1/X/2024	9 Oktober 2024	18 Oktober 2024	17 Oktober 2025	8 Oktober 2024	4C46F55DF9QSUGNM	4.659.000	0	3.882.500	3.882.500	0

Bagian Administrasi Penghapusan																			Bagian PNBP				Bagian Akuntansi		
No	Kode Satuan Kerja	Jenis BMN	Satuan Kerja	Nomor Surat Tingkat Banding	Nomor Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Tanggal Surat Persetujuan Sewa KPKNL	Jangka Waktu (Tahun)	Periodesitas	Nilai Sewa pada Persetujuan KPKNL (Rp)	Nilai Sewa pada SK (Rp)	Penambahan Nilai Sewa (Biaya Listrik, air, & operasional) (Rp)	Penyewa	Jenis BMN yang Disewakan (Kantin/Bank/ Kafe/Koperasi/ Dharmayukti/L ainnya)	Nomor SK	Tanggal SK	Nomor Perjanjian Sewa	Tanggal Perjanjian Sewa	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhirnya Sewa	Tanggal Penyetoran	NTPN	Nominal Penyetoran (Berdasarkan NTPN)	Selisih	Pendapatan Diterima Dimuka (MA)	Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)	Nilai yang diusulkan untuk dikoreksi
570	005012900097577000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	Tidak Ada	S-13/MK.6/WKN.06/KNL.01/2022	8-Feb-2022	3	sekaligus	4.899.000	4.899.000	0	Tabroni	Kantin	Tidak Ada	Tidak Ada	W29.U3/592/UK.02.02/III/2022	4 Maret 2022	1 Maret 2022	25 Februari 2025	2 Maret 2022	E996B2G4V6QKEROH	4.899.000	0	272.167	272.167	0
571	005012600672994000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Bintuhan	1159/SEK.PT.W8.U/PL1.2/V/2024	S-29/MK.6/KNL.0501/2024	5-Apr-2025	1	Tahunan	1.250.000	1.250.000	0	Titin Marlena	Kantin	tidak ada	Tidak ada	W8.U5/499.d/UM.01/05/2024	03 Mei 2024	03 Mei 2024	02 Mei 2025	03 Mei 2024	A324F61QV3U6NDE4	1.250.000	0	416.667	416.667	0
572	005012100539117000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon		S-96/MK.6/KNL.1701/2023	27 November 2023	5	Sekaligus	2.698.000	2.698.000		Randy Hehanussa		Tidak ada	Tidak ada	surat perjanjian sewa ada, tapi tidak bernomor	27-Nov-2023	27-Nov-2023	27-Nov-2028	17 Oktober 2024	595260NA04V7NRQ6	2.700.000	2.000	2.113.433	2.113.433	0
573	005010100400631000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Barat	Tidak Ada	S-93/MK.6/KNL.0701/2024	2 Mei 2024	3	Sekaligus	35.562.000	35.562.000	0	Bank BRI	Payment Point	Tidak Ada	-	2567/SEKPA.W9-A2/PS.RT1/VII/2024	11 Juli 2024	11 Juli 2024	10 Juli 2027	11 Juli 2024	492743CIFKD6KGSV	35.562.000	0	29.635.000	29.635.000	0
574	005010100400631000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Agama Jakarta Barat	Tidak Ada	S-93/MK.6/KNL.0701/2024	2 Mei 2024	3	Sekaligus	47.835.000	47.835.000	0	Bank BRI	ATM	Tidak Ada	-	2566/SEKPA.W9-A2/PS.RT1/VII/2024	11 Juli 2024	11 Juli 2024	10 Juli 2027	11 Juli 2024	D302B3CIFKD6K113	47.835.000	0	39.862.500	39.862.500	0
575	005012200099780000KD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pengadilan Negeri Denpasar	489/SEK.W24-U/PL1.2.7/IX/2024	134/MK.6/KNL.1401/2024	23-Sep-2024	3	sekaligus	6.029.000	6.029.000	0	Ni Ketut Mahyuni	Kantin	-	-	270/SEK.PN.W24-U1/PL1.2/IX/2024	6-Sep-2024	6-Sep-2024	5-Sep-2027	4-Sep-2024	8ED652G4VQ0KU5M0	6.029.000	0	5.359.111	5.359.111	0

KAS BENDAHARA PENGELUARAN DKK

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2024

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor		Link Dokumen
						Tgl. Dok.	NTPN	
005.01.	500	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	2.160.000,00	Terdapat kelebihan uang persediaan (UP) yang belum disetorkan pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2024 namun telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2025.	06 Januari 2025	60A796QTC93R0150	PERMINTAAN DATA BPK KAS DI BENLU
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran (Akun 111611)				**2.160.000,00**				
005.01.	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	24.031.534,00	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah dari kurang pungut dan setor PPN kegiatan Profile Assessment Calon Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2024 Nomor : 69/LHPt/XVI/01/2025 tanggal 31 Januari 2025. Nilai tersebut merupakan temuan Pmeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pajak yang dibebankan kepada pihak ketiga (Rekanan) saat pelaksanaan kegiatan Tipikor Tahun 2024 dalam hal ini Biro Kepegawaian memberikan informasi akan di setorkan ke Kas Negara Tahun ini.	-	-	Belum Setor
005.01.	200	097542	Pengadilan Negeri Garut	582.566,00	Terdapat 3 setoran pajak yang terlewat belum disetorkan dikarenakan pada saat setoran pajak tersebut dipungut di spby tapi pada saat sudah input kuitansi terlewat di catat pungutan pajaknya sehingga tidak masuk di buku pajak dan jadi saldo pajak total Rp582.566,- sdh disetor pd tgl 6 januari 2025	17 dan 20 desember 2024	D1BAF0T8DE4OTG52/6C8204EUCOEATHTN/118B81PLT8N53HFE	Permintaan Data BPK
005.01.	1200	401952	Pengadilan Agama Mesuji	980.000,00	Terdapat 2 setoran pajak yang terlewat belum disetorkan dikarenakan pada saat setoran pajak tersebut dipungut di spby tapi pada saat sudah input kuitansi terlewat di catat pungutan pajaknya sehingga tidak masuk di buku pajak dan jadi saldo pajak total Rp980.000,- namun telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2025.	2 Januari 2025	57A394EUCO7IVJNR/1A2A01PLT8GDUQ0N	https://drive.google.com/file/d/1y2k8kksXbGNYpq9T8BToU8jxHu2HxuZp/view?usp=sharing
005.01.	700	403083	Pengadilan Agama Simalungun	736.345,00	Terdapat 4 setoran pajak yang terlewat belum disetorkan dikarenakan pada saat setoran pajak tersebut dipungut di spby tapi pada saat sudah input kuitansi terlewat di catat pungutan pajaknya sehingga tidak masuk di buku pajak dan jadi saldo pajak total Rp736.345,- namun telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 16 Januari 2025.	16 Januari 2025	85FCE0T8DF6LQ7PF/7D47B0T8DF6LTI6V/F05DC00QTKK9SSLO/D120C3IGSUTR9Q47	https://drive.google.com/drive/folders/1JkAdl-FFhg4uYvoRUnyhovOjKJ3jscSw?usp=sharing
005.06.	199	610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	23.771.646,00	Terdapat 9 setoran pajak yang terlambat setor karena bpp telat merekap setoran pajak sehingga baru menyetorkan pada tanggal 01 januari 2025	01 Januari 2025	13FD14EU9R1UHHV5, AEF9C0T8AGOD4AM3, 4FB7D746PAP4BS40, DFA9C00QQM60J1VA, 175C200QQM60VK8P, DDA4F0T8AGOD1VDG, A01AB0T8AGOCRFDJ, 1A58867P9G6NSOLN, BCDC70T8DDSQSSUV	https://drive.google.com/drive/folders/10DgLyP1_WEwkxDM170hGT_QF06j1O1UJ?usp=sharing
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Akun 111821)				**50.102.091,00**				
JUMLAH KAS LAINNYA DAN SETARA KAS				**52.262.091,00**				

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor		Link Dokumen
						Tgl. Dok.	NTPN	
005.01.	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	24.031.534,00	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah dari kurang pungut dan setor PPN kegiatan Profile Assessment Calon Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2024 Nomor : 69/LHPt/XVI/01/2025 tanggal 31 Januari 2025. Nilai tersebut merupakan temuan Pmeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pajak yang dibebankan kepada pihak ketiga (Rekanan) saat pelaksanaan kegiatan Tipikor Tahun 2024 dalam hal ini Biro Kepegawaian memberikan informasi akan di setorkan ke Kas Negara Tahun ini.	-	-	Belum Setor
005.01.	200	097542	Pengadilan Negeri Garut	582.566,00	Terdapat 3 setoran pajak yang terlewat belum disetorkan dikarenakan pada saat setoran pajak tersebut dipungut di spby tapi pada saat sudah input kuitansi terlewat di catat pungutan pajaknya sehingga tidak masuk di buku pajak dan jadi saldo pajak total Rp582.566,-dan sudah disetor pd tgl 6 januari 2025	7 dan 20 desember 202	D1BAF0T8DE4OTG52/6C8204EUCOEATHTN/118B81PLT8N53HFE	Pemintaan Data BPK
005.01.	1200	401952	Pengadilan Agama Mesuji	980.000,00	Terdapat 2 setoran pajak yang terlewat belum disetorkan dikarenakan pada saat setoran pajak tersebut dipungut di spby tapi pada saat sudah input kuitansi terlewat di catat pungutan pajaknya sehingga tidak masuk di buku pajak dan jadi saldo pajak total Rp980.000,- namun telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2025.	2 Januari 2025	57A394EUCO7IVJNR/1A2A01PLT8GDUQ0N	https://drive.google.com/file/d/1y2k8kksXbGNYpq9T8BToU8jxHu2HxuZp/view?usp=sharing
005.01.	700	403083	Pengadilan Agama Simalungun	736.345,00	Terdapat 4 setoran pajak yang terlewat belum disetorkan dikarenakan pada saat setoran pajak tersebut dipungut di spby tapi pada saat sudah input kuitansi terlewat di catat pungutan pajaknya sehingga tidak masuk di buku pajak dan jadi saldo pajak total Rp736.345,- namun telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 16 Januari 2025.	16 Januari 2025	85FCE0T8DF6LQ7PF/7D47B0T8DF6LTI6V/F05DC00QTKK9SSLO/D120C3IGSUTR9Q47	https://drive.google.com/drive/folders/1JkAdl-FFhg4uYvoRUnyhovOjKJ3jscSw?usp=sharing
005.06.	199	610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	23.771.646,00	Terdapat 9 setoran pajak yang terlambat setor karena bpp telat merekap setoran pajak sehingga baru menyetorkan pada tanggal 01 januari 2025	01 Januari 2025	13FD14EU9R1UHHV5, AEF9C0T8AGOD4AM3, 4FB7D746PAP4BS40, DFA9C00QQM60J1VA, 175C200QQM60VK8P, DDA4F0T8AGOD1VDG, A01AB0T8AGOCRFDJ, 1A58867P9G6NSOLN, BCDC70T8DDSQSSUV	https://drive.google.com/drive/folders/10DgLyP1_WEwkxDM170hGT_QF06j1O1UJ?usp=sharing
Jumlah Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (Akun 219961)				**50.102.091,00**				

LKJIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG

2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI

Sugiyanto

KATA PENGANTAR

> *Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara*

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun terakhir, maka Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2024.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Amanat yang tercermin dalam visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Mahkamah Agung.

Jakarta, 24 Februari 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Sugiyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2024 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	97,93%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	1.000%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
		1) Banding	1) 175,44%
		2) Kasasi	2) 59,15%
		3) Peninjauan Kembali	3) 147,26%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	85,48%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	111,46%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			**284,43%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	120,62%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			**136,55%**
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	105,26%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	99,90%
		c. Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum;	100,00%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			**101,29%**
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	124,57%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			**124,57%**
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	b. Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	913,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			**913,29%**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	127,45%
		b. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	185,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			**156,38%**
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100,00%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			**103,34%**
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	94,79%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	99,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			**97,34%**
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2024			**239,65%**

Sebagian besar sasaran strategis Mahkamah Agung memperoleh capaian lebih dari 100%, hanya sasaran "Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset" yang capaiannya masih di bawah 100% yaitu:

1. Indikator "Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima" dengan realisasi sebesar 80,57% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.
2. Indikator "Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)" dengan realisasi sebesar 99,88% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Selain itu, terdapat beberapa sasaran strategis yang memperoleh capaian terlampau tinggi antara lain:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan dengan capaian sebesar 913,29%. Hal ini disebabkan karena capaian indikator "Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial" pada Badan Peradilan Agama terlampau tinggi yaitu sebesar 1.835,54% dan capaian pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara mencapai 277,25%.
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capaian sebesar 284,43%. Hal ini disebabkan karena capaian indikator "Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung" telah jauh melampaui target. Tahun 2024 capaian indikator ini sebesar 1.000%.
3. Meningkatnya Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas dengan capaian sebesar 156,38%. Capaian tertinggi diperoleh pada indikator "Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya" sebesar 185,30%.
4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar 136,55%. Capaian tertinggi diperoleh pada indikator "Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" sebesar 152,49%.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar 124,57% dengan target 80%. Hal ini disebabkan karena indikator "Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sejak tahun 2020 telah mencapai 130% dengan target 75%.

Daftar Isi

Kata Pengantar V

Ringkasan Eksekutif VIII

Daftar Isi XII

Daftar Tabel XIV

Daftar Gambar XVII

I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 4

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi 6

C. Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung 9

D. Sistematika Laporan 15

II Perencanaan Kinerja 16

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 18

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 22

III Akuntabilitas Kinerja 26

A. Pengukuran Capaian Kinerja 28

B. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 82

C. Kinerja Prioritas Nasional 84

D. Realisasi Anggaran 87

IV Penutup 98

+ Lampiran 102

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	IX
Tabel 1.2	Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	22
Tabel 2.3	Alokasi Awal Anggaran Per Program Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	24
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024 Setelah Revisi	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024	28
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	28
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 3.5	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	28
Tabel 3.6	Tabel Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif	28
Tabel 3.7	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	28
Tabel 3.8	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024	28
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024	28
Tabel 3.10	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	28
Tabel 3.11	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	28
Tabel 3.12	Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2024	28
Tabel 3.13	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan	28
Tabel 3.14	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	28
Tabel 3.15	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan	28
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	28
Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	30
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024	32
Tabel 3.5	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	34
Tabel 3.6	Tabel Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif	35
Tabel 3.7	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	37
Tabel 3.8	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat PertamaTahun 2024	38
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024	38
Tabel 3.10	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	39
Tabel 3.11	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	40
Tabel 3.12	Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2024	41
Tabel 3.13	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan	41
Tabel 3.14	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	43
Tabel 3.15	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan	43
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024	44
Tabel 3.17	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	44
Tabel 3.18	Lamanya Proses Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024	45
Tabel 3.19	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	46
Tabel 3.20	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2024	47
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	47
Tabel 3.22	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2020 – 2024	48
Tabel 3.23	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2020 - 2024	48
Tabel 3.24	Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024	50
Tabel 3.25	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2020-2024	50
Tabel 3.26	Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan pada Tahun 2024	51
Tabel 3.27	Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2020-2024	52

Tabel 3.28 Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2020-2024 53

Tabel 3.29 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024 54

Tabel 3.30 Data Layanan Posbakum Tahun 2020-2024 54

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024 56

Tabel 3.32 Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti 56

Tabel 3.33 Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti 56

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024 58

Tabel 3.35 Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun) 59

Tabel 3.36 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum 59

Tabel 3.37 Bimbingan Teknis Peradilan Umum 60

Tabel 3.38 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama 61

Tabel 3.39 Bimbingan Teknis Peradilan Agama 61

Tabel 3.40 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer 62

Tabel 3.41 Bimbingan Teknis Peradilan Militer 63

Tabel 3.42 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara 63

Tabel 3.43 Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 64

Tabel 3.45 Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian 66

Tabel 3.46 Judul Naskah Kebijakan yang DItindaklanjuti Tahun 2024 66

Tabel 3.47 Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya 69

Tabel 3.48 Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan 69

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024 71

Tabel 3.50 Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 71

Tabel 3.51 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung 72

Tabel 3.52 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung 73

Tabel 3.53 Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi 73

Tabel 3.54 Hukuman Disiplin Tahun 2024 74

Tabel 3.55 Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024 75

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024 76

Tabel 3.57 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1) 77

Tabel 3.58 Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2) 78

Tabel 3.59 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3) 78

Tabel 3.60 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima 79

Tabel 3.61 Komposisi Jumlah Pejabat/Pegawai Mahakamah Agung berdasarkan Kewajiban Melakukan Evaluasi Kinerja 81

Tabel 3.62 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 81

Tabel 3.63 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung 83

Tabel 3.64 Capaian Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 85

Tabel 3.65 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 87

Tabel 3.66 Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada masing-masing Sasaran Strategis 88

Tabel 3.67 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung 89

Tabel 3.68 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 90

Tabel 3.69 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 91

Tabel 3.70 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 91

Tabel 3.71 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 92

Tabel 3.72 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan 92

Tabel 3.73 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas 93

Tabel 3.74 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan

	Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	94
Tabel 3.75	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	94
Tabel 3.76	Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024	96

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Penyerahan Produk Sidang Terpadu Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Sumenep	iv

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

C. Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung

D. Sistematika Laporan

MAHKAMAH AGUNG

Bab I
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum.

Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *Good Governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP Mahkamah Agung disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang.
3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
c) Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
d) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
e) Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
f) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 39 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009).
b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:

- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal

35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. ISU STRATEGIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara berkontribusi merealisasikan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan arah kebijakan dan regulasi yang disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung.

Arah kebijakan dan regulasi tersebut sebagai dasar menentukan program dan kegiatan dengan Indikator kinerja yang valid sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi serta pengendalian pelaksanaan program.

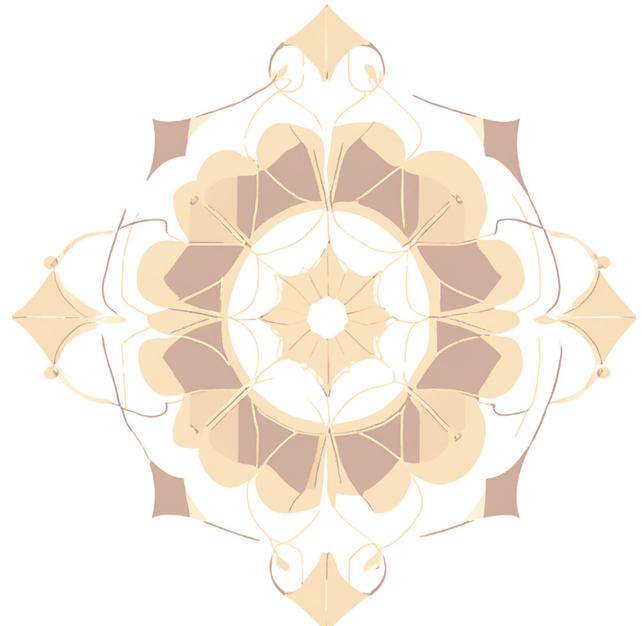

Tabel 1.2
Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	-Pembatasan perkara kasasi dan PK -Penerapan sistem kamar secara konsisten, Penyederhanaan proses berperkara -Penguatan akses pada keadilan, Modernisasi manajemen perkara. -Penataan ulang Organisasi manajemen perkara. -Penataan ulang proses menajemen perkara -Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu -Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. -Penyempurnaan sistem kamar -Implementasi e-litigasi -Penyempurnaan sistem eksekusi -Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif -Penyelesaian perkara hak uji materiil	- Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung - Evaluasi pelaksanaan sistem kamar - Sosialisasi e-litigasi - Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita - Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal - Melakukan kajian terkait perkara hak uji materiil	- Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasill rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk Penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara - SOP sistem kamar - Pemberlakuan e-litigasi keseluruh pengadilan - SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN - SK KMA tentang RJ - SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil
2	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo. - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
3	Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.
4	Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementas i SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.
5	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan, - Peningkatan SDM aparatur 20 jam setahun	- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	- Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. - Pembuatan SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil
6	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata Kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi
7	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. - Standarisasi sarana pendukung kinerja	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan - Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana
8	Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA R	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradila

Peran Strategis Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, yaitu sebagai berikut:

1) Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
2) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi pembangunan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
3) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar data penegak hukum termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
4) Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan edukasi publik dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
5) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola.
6) Percepatan penyelesaian perkara.
7) Penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.
8) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   a. Capaian Kinerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

   b. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

      Pada subbab ini diuraikan evaluasi internal atas evaluasi mandiri APIP atas implementasi SAKIP di Mahkamah Agung, langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) hasil rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Mahkamah Agung pada tahun 2024.

   c. Kinerja Prioritas Nasional

      Pada sub bab ini diuraikan kontribusi Mahkamah Agung dalam pencapaian Prioritas Nasional (PN), dengan rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan capaian output yang mendukung Prioritas Nasional.

   d. Realisasi Anggaran

      Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 2020-2024

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".** Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/ dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) Indentitas Hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini dimiliki oleh Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.

c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

d) Peningkatan Ketetalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.

e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.

h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.

k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.

l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.

o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.

p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.

b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini dimiliki oleh Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.

b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.

c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.

e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.

f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.

h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.

k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.

n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp11.155.491.139.000,00 (sebelas triliun seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Awal Anggaran Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	10.974.562.718.000,-
	JUMLAH	**11.155.491.139.000,-**

Namun demikian, hasil pengukuran pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang terlampau tinggi, sehingga dilakukan revisi target pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Revisi Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu Rp11.904.208.120.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus empat miliar dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024 Setelah Revisi

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	11.723.279.699.000,-
	JUMLAH	**11.904.208.120.000,-**

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. **Capaian Kinerja Organisasi**
B. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
C. Kinerja Prioritas Nasional
D. Realisasi Anggaran

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	97,93%	97,93%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%	100%	1.000%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		1) Banding	1) 55%	1) 96,49%	1) 175,44%
		2) Kasasi	2) 55%	2) 32,53%	2) 59,19%
		3) Peninjauan Kembali	3) 55%	3) 80,99%	3) 147,26%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%	8,55%	85,48%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	94,74%%	111,46%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					**284,43%**
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%	96,50%	120,62%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	38,12%	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					**136,55%**
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%	100,00%	105,26%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	99,90%	99,90%
		3. Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum;	100%	100,00%	100,00%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100,00%	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					**101,29%**
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	99,65%	124,57
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					**124,57%**
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					**913,29%**
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	60%	76,47%	127,45%
		2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%	120,45%	185,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					**156,38%**
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%	96,02%	106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					**103,34%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	80,57%	94,79%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					**97,34%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	100%	97,93%	97,93%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%	15%	100%	1.000%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;				127,28%
	1) Banding	1) 55%	1) 50%	1) 96,49%	1) 175,44%
	2) Kasasi	2) 55%	2) 50%	2) 32,53%	2) 59,19%
	3) Peninjauan Kembali	3) 55%	3) 50%	3) 80,99%	3) 147,26%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%	25%	8,55%	85,48%
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	80%	92,32%%	111,46%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					**284,43%**

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yaitu paling lama 250 hari sejak diterimanya berkas perkara. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	30.653	267.218	586.745	4.005	888.621
Jumlah perkara yang diselesaikan	30.908	282.484	589.586	4.440	907.418
Realisasi					**97,93%**
Target					**100%**
Capaian Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu					**97,93%**

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	97,93%	97,92	98,11	99,05	97,77	96,65

Berbeda dengan tahun 2021, yang mengukur penyelesaian perkara tepat waktu hanya pada Kepaniteraan, sejak tahun 2022 indikator tersebut turut mengukur penyelesaian perkara tepat waktu pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 97,93%, lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 98,11%, hal ini dikarenakan:

1. Jumlah Hakim Agung pada tahun 2022 sejumlah 48 orang dan tahun 2023 sejumlah 42 orang namun pada tahun 2024 hanya bertambah 3 orang menjadi 45 orang. Sedangkan beban perkara Mahkamah Agung meningkat pada tahun 2024 sebesar 11,46% jika dibandingkan pada tahun 2023.
2. Jumlah Hakim pada Tahun 2023 sebanyak 7.674 orang sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 7.082 orang, sehingga berkurang sebanyak 592 orang. Sedangkan beban perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 meningkat sebesar 4,27% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dalam rangka penyelesaian perkara tepat waktu antara lain:

1. Rekrutmen Hakim telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2023, namun masih dalam proses magang di pengadilan pada Tahun 2024 selama 1 tahun, penempatan pertama dan pelantikan akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
2. Penerapan *reward* bagi Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.
3. Kepaniteraan Mahkamah Agung memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, dimana pengiriman berkas oleh pengadilan pengaju, proses penerimaan, penelaahan kelengkapan, penilaian formalitas, registrasi dan distribusi berkas hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA Terintegrasi.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara.
   - Aplikasi info perkara digunakan untuk monitoring jalannya perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Mahkamah Agung.
   - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
   - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
   - Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
   - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
   - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
   - Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan secara terintegrasi dan *real time*. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, barang milik negera, peta dan profil pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, data pegawai, data Kepaniteraan (upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), informasi perkara yang menarik perhatian publik, dan data tenaga teknis (data hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan hakim yustisial).
   - Aplikasi Opera & e-Pelaporan untuk melakukan monitoring laporan perkara Militer dan TUN.
5. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.
7. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis administrasi dan layanan peradilan.
8. Pemerataan persebaran tenaga teknis peradilan agama.
9. Penguatan integritas melalui pola pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (E-Binwas).

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI MAHKAMAH AGUNG

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 1.425 perkara, dan yang diselesaikan dengan keadilan *restorative justice* sebanyak 1.425 perkara, sehingga realisasinya sebesar 100%. Target yang ditetapkan sebesar 10% dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 1.000%.

Tabel 3.5
Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%	100%	1000%	274,00	28,92	166,5	107,5

Capaian tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 telah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan *Restorative* menyatakan hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan *Restorative* apabila terpenuhinya salah satu dari tindak pidana dibawah ini:

a) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
b) Tindak pidana merupakan delik aduan;
c) Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
d) Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
e) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Capaian pada tahun 2023 hanya diukur berdasarkan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi yang membandingkan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat/diajukan diselesaikan secara diversi.

Sedangkan capaian pada tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang berlaku dibulan Mei tahun 2024.

Tabel 3.6
Tabel Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif

No	Perkara	Jenis Perkara	Total
1	Pidana Anak	Informasi dan Transaksi Elektronik	2
2	Pidana Anak	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	3
3	Pidana Anak	Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang	1
4	Pidana Anak	Lain-Lain	3
5	Pidana Anak	Lalu Lintas	3
6	Pidana Anak	Narkotika	18
7	Pidana Anak	Pembunuhan	1
8	Pidana Anak	Pencurian	43
9	Pidana Anak	Penganiayaan	8
10	Pidana Anak	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	2
11	Pidana Anak	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	16
12	Pidana Anak	Penggelapan	1
13	Pidana Anak	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1
14	Pidana Anak	Perlindungan Anak	35
15	Pidana Anak	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	32
16	Pidana Biasa	Informasi dan Transaksi Elektronik	9
17	Pidana Biasa	Kejahatan terhadap Kesusilaan	5
18	Pidana Biasa	Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang	1
19	Pidana Biasa	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
20	Pidana Biasa	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertamban-gan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	1
21	Pidana Biasa	Kesehatan	4
22	Pidana Biasa	Lain-Lain	8

No	Perkara	Jenis Perkara	Total
23	Pidana Biasa	Lalu Lintas	18
24	Pidana Biasa	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	3
25	Pidana Biasa	Narkotika	108
26	Pidana Biasa	Pemalsuan Surat	3
27	Pidana Biasa	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3
28	Pidana Biasa	Pembunuhan	4
29	Pidana Biasa	Pemerasan dan Pengancaman	2
30	Pidana Biasa	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	30
31	Pidana Biasa	Pencurian	104
32	Pidana Biasa	Pengancaman	5
33	Pidana Biasa	Penganiayaan	89
34	Pidana Biasa	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	19
35	Pidana Biasa	Penggelapan	21
36	Pidana Biasa	Penghancuran atau Perusakan Barang	5
37	Pidana Biasa	Penipuan	22
38	Pidana Biasa	Perbuatan Curang	1
39	Pidana Biasa	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1
40	Pidana Biasa	Perlindungan Anak	43
41	Pidana Biasa	Pertambangan Mineral dan Batubara	2
42	Pidana Biasa	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	1
43	Pidana Biasa	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	5
44	Pidana Cepat	Kejahatan	2
45	Pidana Cepat	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1
46	Pidana Cepat	Lain-Lain	3
47	Pidana Cepat	Pelanggaran	158
48	Pidana Cepat	Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum	2
49	Pidana Cepat	Pelanggaran Ketertiban Umum	47
50	Pidana Cepat	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	7
51	Pidana Cepat	Pemerasan dan Pengancaman	1
52	Pidana Cepat	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	1
53	Pidana Cepat	Pencurian	445
54	Pidana Cepat	Penganiayaan	39
55	Pidana Cepat	Penggelapan	3
56	Pidana Cepat	Penghancuran atau Perusakan Barang	5
57	Pidana Cepat	Penghinaan	2
58	Pidana	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	1
59	Pidana	Sah atau tidaknya penyitaan	1
60	Pidana	Penggelapan	1
Total Perkara Pidana Yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif			**1.425**

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan para pihak Beperkara apabila dirasa tidak puas dengan putusan hakim dalam persidangan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak Beperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.7
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
Banding	55%	96,49%	175,44%	192,33	193,95	192,62	193,08
Kasasi	55%	32,53%	59,15%	79,95	53,83	101,70	94,58
Peninjauan kembali	55%	80,99%	147,26%	75,12	163,02	180,44	178,82

Meningkatnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2024 disebabkan oleh kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat kasasi. Menurunnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga melakukan upaya hukum yang lebih tinggi dan semakin mudahnya akses untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi serta semakin cepatnya penyampaian informasi putusan kepada para pihak pencari keadilan. Indikator ini dimaksudkan untuk

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, namun berdasarkan hasil evaluasi indikator ini tidak lagi relevan karena upaya hukum merupakan hak para pencari keadilan.

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2024 sebanyak 849.791 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 819.992 perkara (96,49%). Target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 175,44%.

Tabel 3.8
Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat PertamaTahun 2024

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	232.720	584.322	2.950	819.992
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	258.393	586.965	4.433	849.791
Realisasi Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding				**96,49%**
Target				**55,00%**
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				**175,44%**

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2024 sebanyak 30.200 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9.825 perkara (32,53%). Target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 59,15%.

Tabel 3.9
Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	7.681	1.684	460	9.825
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	25.882	2.621	1.697	30.200
Realisasi Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi				**32,53%**
Target				**55,00%**
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				**59,15%**

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2024 sebanyak 20.319 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 16.457 perkara (80,99%). Target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 147,26%.

Tabel 3.10
Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	14.598	717	1.142	16.457
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	18.240	937	1.142	20.319
Realisasi perkara yang Tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali				**80,99%**
Target				**55,00%**
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				**147,26%**

Seperti halnya *adagium fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan), maka dari itu Mahkamah Agung RI selaku pemegang kekuasaan kehakiman senantiasa berusaha menghadirkan putusan yang memiliki unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya pada tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama;
2. Penyusunan dan Implementasi kebijakan yustisial dan administratif peradilan agama; serta
3. Penguatan eksaminasi putusan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tabel 3.11
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	8,55%	85,48	30,77	23,24	13,32	8,56

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Keberhasilan diversi disebabkan:

Masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian

1. Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan
3. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
4. Koordinasi dengan instansi terkait

Tabel 3.12
Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	4.960	996	424	173	399

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2024 sebanyak 4.960 perkara. jumlah perkara pidana khusus anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 424 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi. tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi).

Realisasi persentase perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 8,55% dengan capaian sebesar 85,48%, kenaikan capaian dikarenakan angka target di tahun 2024 mengalami penurunan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 5
INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP PELAYANAN PERADILAN

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.13
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	85%	94,74%	111,46	116,98	114,30	115,19	113,01

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

   Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

   Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan pengaduan,saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Badan Urusan Administrasi	Rata
1	Persyaratan	97,75	96,50	97,00	93,72	-	96,24
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,25	96,25	96,50	93,22	90,25	94,69
3	Waktu Pelayanan	97,00	95,75	94,50	93,23	85,75	93,25
4	Biaya/Tarif	97,75	93,25	97,50	92,83	-	95,33
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	97,75	95,75	96,00	93,09	-	95,65
6	Kompetensi Pelaksana	97,50	96,50	95,75	93,66	83,25	93,33
7	Perilaku Pelaksana	97,75	96,50	96,50	94,39	83,50	93,73
8	Sarana dan Prasarana	97,25	96,00	96,25	93,28	82,75	93,11
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	99,50	98,50	97,50	93,77	-	97,32
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							**94,74**

Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat, Mahkamah Agung mendapat nilai sebesar 94,74 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik" dan lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 dengan nilai 93,58. Nilai terendah terdapat pada unsur “Sarana dan Prasarana” sebesar 93,11. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat ingin pemenuhan sarana dan prasarana pengadilan dioptimalkan.

Adapun nilai tertinggi terdapat pada aspek “Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan” sebesar 97,32, hal ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 3.15
Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelo-laan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%	20%	96,50%	120,62%
	Persentase perkara yang disele-saikan melalui mediasi.	25%	25%	38,12%	152,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					**136,55%**

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara, yaitu 3 (tiga) bulan setelah perkara diputus sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.17
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%	96,50%	120,62	451,62	326,70	83,65	167,15

Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan minutasi perkara dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan sebanyak 30.070 perkara dari total minutasi sebanyak 31.162 perkara atau 96,50%, dengan capaian 120,62% lebih rendah dari tahun sebelumnya karena adanya revisi target. Revisi target dilakukan karena capaian yang terlampau tinggi sejak tahun 2022 sebesar 326,70% dan tahun 2023 sebesar 451,62% dengan target 20%, sehingga target indikator tersebut direvisi menjadi 80% pada tahun 2024.

Namun demikian, realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 96,50% meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32% dan menjadi realisasi tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung jika dibandingkan dengan realisasi periode 2015-2021 yang realisasinya rata-rata hanya sebesar 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasi terjadi dalam tiga tahun terakhir seiring dengan penerapan sistem *reward* atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta modernisasi manajeman perkara.

Tabel 3.18
Lamanya Proses Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.021	39	23	29	19	2.131
2	Pidana Khusus	10.105	166	65	88	55	10.479
3	Perdata	7.344	450	84	2	0	7.880
4	Perdata Khusus	1.392	27	2	0	0	1.421
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	0	0	0	0	1.122
6	Pidana Militer	452	2	2	0	0	456
7	Tata Usaha Negara	7.634	26	8	5	0	7.673
Jumlah		**30.070**	**710**	**184**	**124**	**74**	**31.162**
%		**96,50%**	**2,28%**	**0,59%**	**0,40%**	**0,24%**	

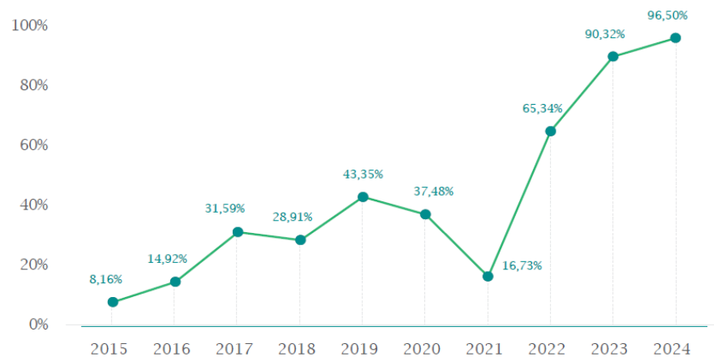

Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasi perkara Mahkamah Agung periode 2015—2024

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.19
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	38,12%	152,49	101,80	76,29	39,68	21,64

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 77.295 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 29.466 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 47.829 perkara sehingga realisasinya sebesar 38,12% dengan capaian sebesar 152,49%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan hakim mediasi. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berakibat pada ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya (paling lama 30 hari);
2. Faktor dari para pihak beperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan;
3. Faktor ketidakhadiran pihak beperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;
4. Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat.

Tabel 3.20
Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2024

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Umum	18.326	1.716	16.610
2	Agama	58.969	27.750	31.219
Jumlah		**77.295**	**29.466**	**47.829**
Persentase (%)			**38,12%**	**152,49%**

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%	30%	100,00%	105,26%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	99,90%	99,90%
	3. Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum;	100%	100%	100,00%	100,00%
	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100,00%	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					**101,29%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.22
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95%	100%	105,26	325,76	333,33	332,67	333,33

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.23
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2020 - 2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2020	28	624
	2021	36	50
	2022	37	166
	2023	88	437
	2024	220	1.229
Peradilan Agama	2020	397	19.190
	2021	408	33.879
	2022	408	36.671
	2023	408	23.372
	2024	411	26.867
Peradilan Tata Usaha Negara	2020	30	9
	2021	30	11
	2022	34	13
	2023	31	14
	2024	31	42

Perkara prodeo yang diajukan pada tahun 2024 sebanyak 28.138 yang seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga realisasinya sebesar 100% dengan capaian sebesar 105,26%. Realisasi tersebut dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas. Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan, antara lain:

- Dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI.
- Di dalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskanan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukan dokumen stastus kependudukan lainya.
- Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan.
- Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni) melalui kerja sama dengan Pemda setempat yang anggaran biaya nya dibebankan oleh Pemda.
- Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang Beperkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terkait

pelayanan prodeo di satkernya masing-masing.

- Satker pengadilan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan prodeo.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.24
Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	99,90%	99,90	100	100	99,88	99,75

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.25
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2020-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2020	54	3.840
	2021	105	2.038
	2022	169	1.059
	2023	67	4.171
	2024	160	6.710
Peradilan Agama	2020	290	37.450
	2021	324	38.287
	2022	342	56.039
	2023	343	35.208
	2024	355	39.027
Peradilan Militer	2020	60	291
	2021	60	311
	2022	64	371
	2023	62	435
	2024	62	418

Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 sebanyak 46.155 perkara dari 46.200 perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, sehingga realisasinya sebesar 99,90%. Realisasi tersebut dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas.

Tabel 3.26
Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan pada Tahun 2024

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
6.710	39.027	463	46.200

Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, antara lain:

- Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan yang variatif dimana sidang diluar gedung dapat dilakukan baik secara tetap maupun insidentil sehingga bisa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan akses hukum masyarakat.
- Selain itu adanya rasa kepercayaan dari masyarakat bahwa kualitas layanan pengadilan terutama produk layanannya akan tetap dijaga standar kualitasnya sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat bukan sebaliknya, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.
- Kinerja Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sesuai dengan target yang ditentukan.
- Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.
- Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan merupakan program prioritas nasional sehingga menjadi motivasi lebih bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

- Penguatan kelembagaan dengan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pengadilan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) IDENTITAS HUKUM

Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara pemohonan (*Voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang keliling terpadu pada prinsipnya adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan identitas hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memudahkan pencari keadilan menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran pasca putusan pemeriksaan pengadilan. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya.

Tabel 3.27
Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100

Gambar 3.1 Penyerahan Produk Sidang Terpadu Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Sumenep

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) serta Kantor Urusan Agama (KUA) sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pelibatan instansi lain yang berwenang mengeluarkan akta identitas hukum, dapat mempercepat proses penerbitan akta-akta dimaksud pada hari itu juga sehingga masyarakat pencari keadilan tidak perlu lagi melakukan pengurusan secara mandiri, dan tentu memudahkan urusan administrasi kependudukan dan perkawinan bagi masyarakat.

Tabel 3.28
Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2020-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara *Voluntair* yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2020	6.412
	2021	6.502
	2022	11.543
	2023	7.878
	2024	7.691

Perkara *Voluntair* yang diajukan pada tahun 2024 sebanyak 7.691 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Besaran jumlah perkara yang ada mengindikasikan antusiasme masyarakat akan program ini. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Masyarakat Republik Indonesia yang belum terpenuhi administrasi catatan sipilnya. Lebih lanjut, keberhasilan tersebut oleh disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Penegasan pelaksanaan kegiatan sidang terpadu melalui penyusunan petunjuk teknis berupa Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
2. Penguatan kelembagaan dengan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pengadilan dengan pemerintah daerah serta Kantor Urusan Agama setempat; serta
3. Sidang Terpadu merupakan Program Prioritas Nasional yang didukung dengan pagu anggaran.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.29
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.30
Data Layanan Posbakum Tahun 2020-2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2020	382	42.497
	2021	382	47.930
	2022	382	53.122
	2023	382	67.444
	2024	382	79.385
Peradilan Agama	2020	329	229.844
	2021	351	281.167
	2022	412	346.229
	2023	412	211.979
	2024	409	235.522
Peradilan Militer	2020	30	591
	2021	30	597
	2022	34	1.790
	2023	38	3.425
	2024	38	3.372

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 318.279 orang dengan realisasi 100%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, yang didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang Beperkara karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.
2. Satker pengadilan terus berinovasi dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil cukup mudah diakses oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan.
3. Seringkali pegawai di meja registrasi perkara memberikan advis kepada masyarakrat tidak mampu untuk memilih layanan bantuan hukum daripada beracara dengan biaya sendiri, sehingga masyarakat merasa terbantu dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
4. Pasal 26 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 memberikan amanah bagi pengadilan untuk membuat kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum baik swasta maupun pemerintahan maupun lembaga konsultasi bantuan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga mendapatkan tenaga advokasi bantuan hukum professional dan berdampak pula pada keberhasilan program layanan bantuan hukum di pengadilan agama;
5. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara berikutnya pada tahun berjalan.
6. Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan posbakum.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanju-ti (dieksekusi).	80%	75%	99,65%	124,57%

SASARAN IV – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.32
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	80%	99.65%	124,57	133,05	129,64	131,17	131,60

Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2024 sebanyak 558.578 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 556.636 perkara (99,65%) sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 124,57%.

Capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya karena adanya revisi target pada tahun 2024 yang semula 75% menjadi 80%.Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2024 sebanyak 558.578 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 556.636 perkara (99,65%) sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 124,57%.

Tabel 3.33
Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	51.264	50.635	629
Putusan Perkara Agama yang Ditindaklanjuti	505.762	504.614	1.148
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	1.552	1.387	165
Jumlah	558.578	556.636	1.942

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Perbandingan jumlah perkara berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan eksekusi dengan perkara berkekuatan hukum tetap sebesar 99,65%. Tingginya capaian indikator ini menunjukan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan.

Selain itu, eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak diperlukan, karena eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat otomatis. Hal ini didasarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlunya peningkatan pemahaman kepada satuan kerja, masyarakat, serta *stakeholder* terkait bahwa proses eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara telah selesai ketika:

1. Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan tanpa ada Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Termohon Eksekusi melaksanakan putusan pengadilan pasca Penetapan Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan telah menyampaikan Pemberitahuan atas Penetapan Eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat (Pasal 116) .
4. Pencabutan Eksekusi.
5. Eksekusi Non Eksekutabel.

Monitoring pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Umum dilaksanakan melalui Aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi). PERKUSI merupakan aplikasi yang menampilkan data serta statistik pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan eksekusi serta monitoring dan evaluasi.

Aplikasi Perkusi sudah dapat diberlakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

Monitoring pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dilaksanakan melalui Aplikasi MoneksTUN

(Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN). Aplikasi MoneksTUN berfungsi untuk monitoring seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan TUN mulai dari permohonan eksekusi sampai dengan selesai, yang datanya terintegrasi dengan data SIPP satuan kerja.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diantaranya untuk:

1. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
2. Membangun karakter, sikap, dan perilaku (*personal capacity building*).
3. Membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
4. Memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
5. Membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	913,29%	913,29%

SASARAN V - INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE SDM TEKNIS YUSTISIAL YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DI BIDANG TEKNIS YUDISIAL (UMUM, AGAMA DAN MILTUN)

Sumber daya tenaga teknis yustisial merupakan sumber daya manusia di bidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses yustisial. Sumber daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim dan Panitera dan kesemuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan.

Tabel 3.35
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29	100,49	100,09	96,17	100

Capaian indikator ini terlampau tinggi jika dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek tidak hanya pada saat pelaksanaan secara *luring* tetapi juga peserta yang mengikuti bimtek secara daring.

A. Badan Peradilan Umum

Tabel 3.36
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	138,21%	138,21

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan program penegakan dan pelayanan hukum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tenaga teknis baik hakim, panitera maupun jurusita.

Pembinaan teknis yang dilaksanakan meliputi: Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Lebih lanjut rincian tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga teknis dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37
Bimbingan Teknis Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur - daring)	108
2	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang)	104
3	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin)	104
4	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Palembang)	52
5	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Ambon dan PT Papua Barat)	49
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Bandung)	71
7	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Bandung)	50
8	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur)	48
9	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Makassar dan Sulawesi Barat)	92
10	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Riau dan PT Kepulauan Riau)	82
11	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum PT Banten)	27
12	Koordinasi SATGAS SIPP	40
13	Pelayanan Hukum Disabilitas I	50
14	Pelayanan Hukum Disabilitas II	40
15	Bimbingan Teknis SIPP I	21
16	Bimbingan Teknis SIPP II	15
17	Bimbingan Teknis SIPP III	15
18	Bimbingan Teknis SIPP IV	15
19	Sosialisasi Regulasi Kepegawaian	30
20	Koordinasi Ditjen Badilum dengan KPT dan WKPT	27
21	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HAKI /PHI	25
22	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IA Khusus dan IA	27
23	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IB-Gelombang 1	65
24	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IB - Gelombang 2	53
25	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 1	50
26	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 2	61
27	Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 3	82
28	Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri	30
29	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara	40
30	FGD Kepaniteraan	44
31	Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum	31
	TOTAL	**1.548**

Target 1.120 dengan Realisasi tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis tahun 2024 yaitu 1.548 orang (jumlah peserta tenaga teknis peradilan) dengan capaian sebesar 138.21%.

B. Badan Peradilan Agama

Tabel 3.38
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	1.835,54%	1.835,54

Dalam rangka pemberian layanan yang prima kepada Masyarakat pencari keadilan, selama tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 23.862 orang dari 1.300 orang jumlah SDM yang ditargetkan.

Tabel 3.39
Bimbingan Teknis Peradilan Agama

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis Secara Luring		
1.	Problematika Eksekusi Putusan Perdata di Lingkungan Peradilan Agama	35 Orang
Bimbingan Teknis Secara Daring		
1.	Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3.183 Orang
2.	Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Sebagai Bentuk Ketidakadilan (Refleksi Hasil Pembacaan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Januari-April 2024)	391 Orang
3.	*Contra Legem*	3.151 Orang

4.	Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	3.788 Orang
5.	Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	3.973 Orang
6.	Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	4.088 Orang
7.	Perlawanan Eksekusi	4.424 Orang
8.	Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kewarisan di Indonesia	450 Orang
9.	Teknik Mengonstatir, Mengkualifisir dan Mengkonstituir Perkara yang Tepat dan Benar	379 Orang
TOTAL		**23.862 Orang**

Capaian kinerja yang luar biasa tersebut dikarenakan oleh antusiasme dari seluruh tenaga teknis pada Lingkungan Ditjen Badilag. Sehingga para peserta tenaga teknis yustisial yang mengikuti bimtek, tidak hanya dari kalangan hakim, melainkan bimtek tersebut diikuti oleh seluruh tenaga teknis, baik dari tenaga kepaniteraaan dan kejurusitaan.

Lebih lanjut, untuk mengakomodir antusiasme tersebut, pada tahun 2024 Ditjen Badilag meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIPINTAR). Sistem ini disusun sebagai jawaban atas pelaksanaan bimbingan teknis yang selama ini belum optimal, belum terukur, datanya tidak terpusat, belum terintegrasi dengan SIKEP dan *E-Learning* Badilag, belum diberikan sertifikat sebagai *reward* bagi yang lulus, dan sebagai sarana untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan peradilan agama. Sistem tersebut juga merekam data berupa masukan-masukan atau *feedback* dari para tenaga teknis. Hal tersebut menjadi penting karena dapat membangun kualitas layanan serta efisiensi maupun efektivitas dari pelaksanaan bimbingan teknis. Kemudian tidak sedikit juga terdapat masukan terkait pemilihan tema bimbingan teknis, sehingga tema yang dihadirkan selalu *fresh* dan relevan dengan kejadian terkini, khususnya di lingkungan peradilan agama.

C. Badan Peradilan Militer

Tabel 3.40
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	111,07%	111,07%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera peradilan Militer di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 280 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 311 orang.

Tabel 3.41
Bimbingan Teknis Peradilan Militer

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Kepaniteradi Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Kepaniteraan Militer dalam Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembal	41 Peserta
3.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Tidak Pidana Pelanggran Pemilu di Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer	48 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Lingkungan Peradilan Militer	62 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkung Peradilan Militer	12 orang secara *Offline/ Luring* & 28 Peserta Daring)
TOTAL		**311 Peserta**

Jumlah SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Karena minat para tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan/bimtek lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
2. Karena sebagian bimtek bisa dilaksanakan dengan tatap muka/luring.

D. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 3.42
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	277,25%	277,25

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 167 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 463 orang.

Tabel 3.43
Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	41 orang (10 Peserta Luring & 31 Peserta Daring)
2.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa TUN Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 orang (10 Peserta Luring & 30 Peserta Daring)
3.	Bimbingan Teknis Pendalaman Gugatan Melalui CLS(Citizen Law Suit) Class Action dan legal Standing bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	46 orang (10 orang peserta Luring dan 36 orang peserta Daring)
4.	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 orang (10 orang peserta Luring dan 30 orang peserta Daring)
5.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	40 orang (10 orang peserta Luring dan 30 orang peserta Daring)
6.	Bimbingan Teknis Upaya Hukum secara Elektronik bagi Panitera Muda Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 orang (10 orang peserta Luring dan 30 orang peserta Daring)
7.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara	46 orang (10 orang peserta Luring dan 36 orang peserta Daring)
8.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	94 Orang (16 Peserta Luring & 78 Peserta Daring)
9.	Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	76 Orang (8 Peserta Luring & 68 Peserta Daring)
TOTAL		**463**

Jumlah SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 disebabkan karena minat para tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan/ bimtek lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja untuk indikator ini pada 4 (empat) wilayah peradilan Mahkamah Agung mengalami peningkatan yang terlampau tinggi dikarenakan semakin tingginya antusiasme para tenaga teknis untuk mengikuti berbagai bimbingan teknis dengan peserta tidak hanya berasal dari kalangan hakim saja namun juga dari kepaniteraan dan juru sita. Selain itu, pelaksanaan bimbingan teknis yang lebih fleksibel tidak hanya secara daring tapi juga secara luring, sehingga perlu dilakukan revisi target untuk menyesuaikan capaian kinerja pada indikator ini.

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44 Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Persentase Regulasi Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	60%	60%	76.47%	127.45%
	2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%	65%	120.45%	185.30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					**156,38%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE REGULASI KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan. Kajian kebijakan merupakan tugas pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan dalam menyusun rekomendasi dan evaluasi strategi kebijakan hukum dan peradilan, advokasi kebijakan, kerja sama antarlembaga, penyediaan bahan hukum dalam rangka mendukung terhadap fungsi mengadili dan manajemen pengetahuan.

Tabel 3.45
Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%	76,47%	127,45	90,28	-	-	-

Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebanyak 39 rekomendasi dari jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan yaitu sebanyak 51 dengan rincian pada tahun 2023 sebanyak 31 rekomendasi dan tahun 2024 sebanyak 20 rekomendasi. Target yang ditetapkan sebanyak 60% dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga capaiannya 127,45%.

Rekomendasi kebijakan tidak selalu dapat dihitung ditahun berjalan. Capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 merupakan capaian dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 ditambah dengan tahun berjalan tahun 2024

Tabel 3.46
Judul Naskah Kebijakan yang DItindaklanjuti Tahun 2024

No	Judul Naskah Urgensi
1	Naskah Urgensi Fasilitas Dan Keuangan Hakim Ad Hoc
2	Naskah Kebijakan Tinjauan Efektivitas Diklat Sertifikasi Hakim
3	Naskah Urgensi Sistem Pembuktian Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga
4	Naskah Kebijakan Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali
5	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung
6	Naskah Urgensi Pembentukan Peraturan Tentang Pemberian Pertimbangan Dan Nasihat Bidang Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Lembaga Penasihat (*Advieserende Functie*)
7	Naskah Akademik (Rancangan) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan, Dan Pengajuan Hakim Konstitusi Oleh Mahkamah Agung
8	Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*)
9	Naskah Urgensi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
10	Naskah Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung Atas Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI
11	Naskah Kebijakan Tentang Korelasi Nikah Siri Dengan Dispensasi Kawin Pengaruhnya Terhadap Isbat Nikah
12	Naskah Kebijakan Mahkamah AgungTentang Eksekusi Putusan Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama
13	Naskah Urgensi Sertifikasi Hakim Dalam Menangani Sengketa Pertanahan
14	Naskah Kebijakan mengenai Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Badan Pengawasan melalui Perbaikan Pola Rekrutmen dan Pengembangan SDM
15	Naskah Urgensi Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekfronik (ITE)
16	Naskah Kebijakan Evaluasi Terhadap Pengisian, Pengangkatan, Pembinaan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pada Lingkungkan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
17	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
18	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Narkotika
19	Naskah Urgensi Pembentukan Pengadilan Kelas Ia Khusus Di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Perubahan Perma Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan
20	Naskah Akademik Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*Khes*)
21	Naskah Urgensi Grand Design Tata Kelola Arsip Perkara Secara Digital Mahkamah Agung 2024 – 2028
22	Naskah Urgensi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Standar Peningkatan Pelayanan Publik Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
23	Naskah Urgensi Implementasi Pasal 136 HIR/ 162 RBg dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
24	Naskah Urgensi Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik
25	Naskah Urgensi rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Tetap dan Sementara Hakim Agung, Hakim dan PNS Di Lingkungan Mahkamah Agung yang terlibat tindak pidana
26	Naskah Kebijakan Tentang Harmonisasi Peraturan Dan Sinergitas Penegakan Kode Etik Hakim Dan Kode Etik Panitera Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

27	Naskah Urgensi Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
28	Naskah Urgensi Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
29	Naskah Kajian Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
30	Panduan Tata Kelola Penyusunan Kajian Kebijakan, Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan
31	Naskah Urgensi Pejenjangan Kinerja Berdasarkan *Logical Framework* Dan *Critical Success Factor* (CSF) Pada Mahkamah Agung
32	Naskah Urgensi Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
33	Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural Pimpinan Pengadilan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
34	Pembentukan Balai Diklat Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali
35	Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Mendukung Fungsi Regulator pada Mahkamah Agung RI
36	Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/ KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
37	Naskah Kebijakan tentang Implementasi Putusan Peninjauan Kembali terhadap Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer
38	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi di Indonesia
39	Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara dan Fungsi Kehumasan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Penelitian pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan setiap tahunnya tidak selalu dapat ditindaklanjuti pada tahun berjalan, sehingga persentase regulasi kebijakan tidak dapat dibandingkan setiap tahun, oleh karena itu perhitungan persentase regulasi kebijakan disepakati dihitung setiap 2 (dua) tahun;
2. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung tentang perubahan Nomenklatur Penelitian dan Pengembangan yang beralih menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
3. Perubahan Nomenklatur Penelitian dan Pengembangan menjadi Strategi Kebijakan pada Mahkamah Agung membuat perubahan terhadap tugas dan fungsi pada Penelitian dan Pengembangan menjadi Penyusunan Naskah Kebijakan.

Capaian rekomendasi pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan di tahun 2024 dirasakan masih belum maksimal, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan tusi baru yaitu bidang advokasi hukum yang baru berjalan di tahun 2024.

Untuk meningkatkan capaian rekomendasi ditahun mendatang, bidang advokasi bertugas untuk melakukan komunikasi kepada para penentu kebijakan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi kebijakan.

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE SDM MAHKAMAH AGUNG MENINGKAT KOMPETENSINYA

Indikator ini digunakan untuk mengukur Peserta Pendidikan dan Pelatihan dinyatakan lulus dengan minimal predikat memuaskan setelah mengikuti pelatihan. Meningkat kompetensi dinilai berdasarkan dari kehadiran, keaktifan peserta, nilai ujian sebelum dan sesudah pelatihan serta hasil monitoring dan evaluasi peserta selama mengikuti penyelenggaraan pelatihan:

Tabel 3.47
Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%	120,45%	185,30	150,14	98,62	109,04	280,75

Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya sebanyak 7.269 orang dari jumlah seluruh peserta pelatihan pada Tahun 2024. Target yang ditetapkan sebanyak 6.035 orang sehingga realisasinya sebesar 120,45% dan capaiannya sebesar 185,30%

Tabel 3.48
Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	3.965	4.242	106,98
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	2.070	3.027	146,23
Jumlah Total		**6.035**	**7.269**	**120,45%**

Persentase SDM Mahkamah Agung meningkat kompetensinya pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya penerimaan calon hakim pada Mahkamah Agung dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung di tahun 2024 menjadikan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan juga Latihan Dasar CPNS;
2. Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RENJA-KL) tahun anggaran 2024 serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menetapkan target peserta sebanyak 2.070 orang. Namun seiring terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 13/ KMA/SK.DL1/I/2024, Tanggal 15 Januari 2024, Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, Pusdiklat Teknis Peradilan merubah pola pelatihan dengan memasukkan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu dan mengurangi program reguler yang semula sudah direncanakan;
3. Adanya Pelatihan Calon Hakim Terpadu, Pusdiklat Teknis Peradilan memprioritaskan pada pelatihan Prioritas Nasional, pelatihan Calon Hakim Terpadu dan beberapa pelatihan reguler. Sedangkan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan kegiatan Latihan Dasar CPNS dan beberapa pelatihan lainnya diluar kampus BSDK dan melakukan kerjasama dengan K/L lainnya

Capaian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Kedepannya akan dilakukan reviu target untuk menyesuaikan dengan realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – tahun 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Menigkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	85%	100%	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	90%	85%	96,02%	106,69%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					**103,34%**

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENGADUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.50
Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2023	2022	2021	2020
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti	100%	100%	100	117,65	117,65	117,65	117,65

Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 4.318 pengaduan, dan sebanyak 4.318 pengaduan telah ditindaklanjuti, sehingga realisasinya sebesar 100%. Target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaiannya 100%. Tindaklanjut atas surat pengaduan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.51
Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		**172**
2.	Selesai diproses		**4.146**
	a. Diperiksa Tim Bawas	211	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	91	
	c. Konfirmasi	220	
	d. Klarifikasi	1.063	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	111	
	f. Dijawab Surat	1.172	
	g. Pelaksanaan Pemantauan	68	
	h. Diarsipkan	98	
	i. Gabung berkas	1.086	
	j. Dicabut	26	
Jumlah			**4.318**

Target kinerja tahun 2024 tercapai 100% meskipun capaian kinerjanya lebih rendah dari tahun 2023 (117,65%) dimana hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan target kinerja dari semula 85% menjadi 100%.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dicapai melalui sinergi seluruh unit dalam mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIWAS yang telah diintegrasikan dengan Aplikasi Persuratan Badan Pengawasan, Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (ePost), serta penerapan tanda tangan elektronik pada surat pengaduan. Integrasi ini secara signifikan mempercepat proses tindak lanjut pengaduan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian pengaduan.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dan penyesuaian prosedur kerja di beberapa unit. Untuk mengatasi hal ini, telah dilakukan pelatihan intensif bagi pegawai serta penyusunan pedoman teknis yang komprehensif guna mendukung transisi ke sistem baru.

Strategi yang diterapkan untuk mencapai kinerja meliputi peningkatan koordinasi antar unit, penguatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi aplikasi, serta pengembangan fitur aplikasi yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan pengaduan secara menyeluruh.

Salah satu keberhasilan dari beberapa strategi tersebut adalah bahwa untuk tahun 2024 terdapat peningkatan pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SIWAS yaitu sebanyak 2.301 pengaduan (53,29%), lebih besar dari tahun 2023 sebanyak 1.351 pengaduan (32,65%) sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Tabel 3.52
Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.811
2.	Pengaduan dari instansi (stakeholder Mahkamah Agung)	206
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	2.301
Jumlah Total		**4.318**

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DIPUBLIKASI

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.53
Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	90%	96,02%	106,69	109,30	98,00	104,28	104,20

Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan oleh Badan Pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 4.318 pengaduan, dan sebanyak 4.146 pengaduan selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan, sehingga realisasinya sebesar 96,02%. Target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaiannya 106,69%.

Capaian kinerja tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 109,30% yang disebabkan adanya kenaikan target kinerja dari 85% menjadi 90%, namun untuk realisasi kinerjanya tetap dapat tercapai. Capaian kinerja dapat diraih disebabkan Badan Pengawasan konsisten dalam melakukan monitoring data pengaduan secara periodik serta optimalisasi dalam pemanfaatan aplikasi SIWAS yang telah mutahirkan ke versi 4, disamping itu tindak lanjut pengaduan juga selalu dimonitor oleh Kepala Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS, sehingga setiap terjadi kendala dapat langsung diselesaikan.

Pada tahun 2024 Badan Pengawasan sudah berupaya untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI yaitu dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku maupun kedisipilinan dimana untuk jumlah aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dikenakan sanksi/hukuman disipilin untuk tahun 2024 sejumlah 244 orang sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.54
Hukuman Disiplin Tahun 2024

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	31	13	65	109
	Hakim *Ad Hoc*	-	-	3	3
2.	Panitera	6	-	6	12
3.	Sekretaris	1	2	1	4
4.	Panitera Muda	7	1	4	12
5.	Panitera Pengganti	17	6	12	35
6.	Jurusita	8	2	8	18
7.	Jurusita Pengganti	5	2	2	9
8.	Pejabat Struktural	6	5	2	13
9.	Pejabat Fungsional	1	1	2	4
10.	Pelaksana	12	9	3	24
11.	PPNPN	-	-	1	1
Jumlah		**94**	**41**	**109**	**244**

Terkait publikasi pengaduan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Pasal 42 angka (4) menyatakan bahwa Badan Pengawasan wajib menyampaikan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, dengan menyebutkan inisial nama, pangkat/jabatan dan satuan kerjanya secara berkala per triwulan melalui *website* Badan Pengawasan.

Adapun terhadap pengaduan yang Terlapornya tidak terbukti melakukan perbuatan yang diadukan, maka Kepala Badan Pengawasan menyatakan Pengaduan ditutup dan terhadap Terlapor akan dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya tampak seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.55
Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	121
2.	Panitera	17
3.	Sekretaris	-
4.	Panitera muda	12
5.	Panitera Pengganti	14
6.	Jurusita	7
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	-
9.	Staf	2
10.	Calon hakim	-
11.	PPNPN	4
Jumlah		**179**

Kendala yang dihadapi terkait penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaduan yang sudah selesai tindak lanjut namun masih tercatat dalam proses tindak lanjut pada aplikasi SIWAS sehingga berpengaruh pada capaian kinerja penanganan pengaduan.
2. Belum terintegrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik dengan aplikasi SIWAS.
3. Terdapat penerbitan surat keputusan penjatuhan sanksi / hukuman disiplin belum sesuai dengan ketetentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.

Strategi yang digunakan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan.
2. Melakukan integrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik pada aplikasi SIHANTER (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Pengaduan Terintegrasi) dengan aplikasi SIWAS.
3. Melakukan rekonsiliasi data penjatuhan sanksi / hukuman disiplin dengan dirjen terkait untuk memastikan bahwa sanksi / hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan.

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	85%	80,57%	94,79%
	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	99,88%	99,88
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					**97,34%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA GEDUNG YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang memadai, modern dan profesional bagi para pencari keadilan. Dari sisi regulasi, pedoman Standar Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan layanan peradilan saat ini.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan peradilan saat ini, kriteria dalam mengukur kebutuhan standar minimal sarana dan prasarana gedung pengadilan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: (1) 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.57
Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	415
2.	Peradilan Agama	432
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	37
	Jumlah	**906**

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 906 satuan kerja atau sebesar 98,16% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Selanjutnya untuk kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi semua orang, terutama bagi yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya standar layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, *guiding blocks* untuk disabilitas netra, jalur landai (*ramp*) dan pegangan, kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus.

Berdasarkan kriteria kedua ini, berikut data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.58
Pengadilan dengan Layanan Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	219
2.	Peradilan Agama	162
3.	Peradilan Militer	17
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	11
Jumlah		**409**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 409 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 44,31%.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok *E-Court*, Fasilitas *e-Banking*, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang *Teleconference*.

Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.59
Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	413
2.	Peradilan Agama	442
3.	Peradilan Militer	23
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	38
Jumlah		**916**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 916 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 99,24%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan *prototype ideal* gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.60
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	80,57%	94,79	89,48	85,48	82,35	75,29

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di Tahun 2024 sudah tercapai sebesar 80,57% {(K1+K2+K3):3} berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah realisasi terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 80,57% dari 85% yang ditargetkan sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 94,79%. Realisasi pada indikator ini selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan moratorium renovasi dan pembangunan gedung. Sehingga untuk dapat melaksanakan renovasi atau pembangunan gedung, perlu mengajukan permohonan pembukaan moratorium yang ditujukan kepada Sekretariat Kabinet, tetapi jumlah gedung pengadilan yang disetujui untuk direnovasi atau dibangun selalu lebih rendah dari jumlah yang diajukan. Namun demikian, realisasi pada tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,43% dari tahun 2023. Peningkatan kinerja di setiap kriteria (K1,K2 dan K3) terjadi karena adanya kebijakan dan program Mahkamah

Agung sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung terus berkomitmen menghadirkan layanan peradilan yang layak dan modern dengan membangun pengadilan baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Baru (85 pengadilan baru secara keseluruhan) dengan standar (prototipe). Pembangunan ini dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan renovasi, rehabilitasi dan penambahan fasilitas penunjang layanan gedung pengadilan di beberapa satuan kerja sesuai dengan standardisasi yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik. Hal ini membuat seluruh pengadilan berusaha meningkatkan layanan peradilan kepada publik sesuai dengan pedoman, standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk peningkatan pelayanan disabilitas, terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan pada tahun 2024 berdasarkan data dari Aplikasi e-BIMA.

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM (SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang sangat baik dan baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi ekinerja BKN, dengan alamat pada https://kinerja.bkn.go.id. Manajemen evaluasi kinerja pegawai Mahkamah Agung RI diatur pada dua regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi e-Kinerja.

Regulasi mengenai manajemen kinerja pegawai yang disebutkan diatas salah satunya mengatur mengenai batas waktu evaluasi kinerja kinerja periodik (triwulan) dan batas waktu evaluasi kinerja tahunan, sehingga data laporan kinerja pegawai yang lengkap dan valid hanya bisa didapatkan setelah batas waktu evaluasi kinerja tersebut. Batas waktu evaluasi kinerja berdasarkan regulasi manajamen kinerja pegawai (Lampiran Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 120/SEK/SK/II/2023, bagian I angka 5) adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai (evaluasi siklus pendek) yang dilakukan setiap triwulan dan dinilai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai (evaluasi siklus penuh) yang dilakukan setiap akhir Bulan Desember tahun berjalan dan dinilai paling lambat akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 3.61
Komposisi Jumlah Pejabat/Pegawai Mahakamah Agung berdasarkan Kewajiban Melakukan Evaluasi Kinerja

KETERANGAN	JUMLAH	
Pejabat/Pegawai Yang Wajib Mengisi SKP di E-Kinerja		**31.704**
Seluruh pegawai ASN	31.619	
Pegawai Militer Yang Menjabat Struktural	70	
Hakim Ad Hoc Yang Berasal dari PNS	15	
Pejabat/Pegawai Yang Wajib Mengisi SKP diluar E-Kinerja (Diupload di SIKEP)		**452**
Hakim Ad Hoc Yang Bukan Berasal dari PNS	452	
Total Pejabat/Pegawai yang wajib melakukan evaluasi kinerja		**32.156**
Pejabat/Pegawai Yang Belum Ditetapkan Mekanisme Penilaian Kinerjanya		**496**
Hakim Agung	45	
Militer	451	
Jumlah Seluruh Pegawai MA Per 31 Desember 2024		**32.652**

*Data diperoleh dari aplikasi SIKEP dan e-Kinerja TW IV per 31 Desember 2024

Tidak semua pejabat/pegawai wajib melakukan evaluasi kinerja. Jumlah pegawai dan pejabat yang wajib melakukan evaluasi kinerja adalah sebanyak 32.156 orang dari seluruh total pegawai Mahkamah Agung, dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Tabel 3.62
Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88	99,88	100	99,4	99,08

Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang sangat baik dan baik pada evaluasi SKP Triwulan 4 adalah sebanyak 31.546 orang, sedangkan jumlah pegawai yang sudah mengisi SKP tahunan adalah sebanyak 31.583 orang, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99.88%. Dari data tersebut juga disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang belum melakukan evaluasi penilaian kinerja sampai dengan triwulan 4 sebanyak 573 orang.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan *awareness* pegawai dan pejabat penilai kinerja melalui pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
2. Kebijakan penggunaan aplikasi e-kinerja untuk pengusulan kenaikan pangkat pegawai yang terintegrasi dengan SIASN BKN.
3. Pemantauan kinerja yang digunakan untuk pengembangan karier pegawai dalam rangka proses penerapan Sistem Merit di Mahkamah Agung.

B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Mahkamah Agung melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Mahkamah Agung berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan para pencari keadilan melalui tindaklanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara berjenjang

   Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung. Sedangkan seluruh Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dasar pelaksanaan evaluasi tersebut dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

   Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja pada masing-masing entitas kinerja Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mendapat penilaian SAKIP minimal BB pada tahun 2024 sebanyak 784 Satker atau 84,30% dari jumlah seluruhnya yaitu 930 Satker.

2. Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

   Hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.63
Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

No	Komponen	Nilai		
		Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,05
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,49	21,49
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,89	12,93
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,17	14,38
Nilai Hasil Evaluasi			**72,55**	**72,85**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**BB**

Hasil evaluasi tersebut menunjukan bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada pusat dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB yang telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Urgensi Penjenjangan Kinerja Mahkamah Agung sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip *logical framework* dan *critical success factor.*
2. Revisi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk menyempurnakan keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dengan dokumen perencanaan tahunan dengan menyesuaikan targetnya berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
3. Seluruh dokumen SAKIP dan dokumen perencanaan terbaru telah dipublikasikan pada *website* Mahkamah Agung dan *Website* unit kerja masing-masing.
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja menyusun rencana aksi untuk mengawal pencapaian kinerja yang diperjanjikan dan kemudian mengunggah dokumen rencana aksi tersebut pada e-SAKIP.
5. Koordinasi dengan seluruh Unit Eselon I untuk membahas persiapan pra-evaluasi SAKIP Mahkamah Agung Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja agar dapat menyajikan kinerja yang sudah diperjanjikan

sebelumnya, kemudian membandingkan realisasi kinerja pada tahun laporan dengan beberapa tahun sebelumnya, dilengkapi dengan analisa pendukung dan penghambat kinerja pada setiap indikator.

6. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Manajemen telah dilakukan Pengukuran data kinerja dari tiap indikator kinerja pada Laporan Kinerja Mahkamah Agung dan Laporan Kinerja unit kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan menggunakan perhitungan indikator kinerja yang sesuai dengan formulasi indikator yang sudah ditetapkan yang spesifik sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja kedepannya;
7. Telah dilakukan rapat perbaikan target kinerja atas dasar realisasi target kinerja sebelumnya yang terdapat pada laporan kinerja sebelumnya, dan hasil rapat memutuskan bahwa target kinerja akan diubah menunggu Renstra 2025-2029 disusun.
8. Meskipun belum terdapat rumusan mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja, namun dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 perihal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 menegaskan agar seluruh unit kerja melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang diberikan oleh BAWAS selaku APIP.

C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Mahkamah Agung mendapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional dengan rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional III yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing dengan alokasi sebesar Rp7.363.042.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.062.798.276,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program Prioritas yaitu:

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan dengan Kegiatan Prioritas yaitu Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan. Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan.
2. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dilaksanakan dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yaitu:
   - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
   - Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah lainnya.
   - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan.
   - Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Perlindungan Perempuan dari Kekerasan.

b. Prioritas Nasional VI yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan alokasi sebesar Rp3.256.997.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.144.595.439,00 yang dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan dan Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakkan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

c. Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp94.334.161.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.787.165.624,00 yang dilaksanakan melalui Program Prioritas Penegakkan Hukum Nasional dan Kegiatan Prioritas Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Mahkamah Agung berkontribusi dalam Proyek Prioritas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Tabel 3.64
Capaian Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas(Pro P)/ Rincian Output	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
(PP) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (KP) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (Pro P) Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan							
1	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	7.226 Perkara	7.686 Perkara	106,37%	2.777.813.000	2.747.888.020	98,92%
(PP) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda (KP) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (Pro P) Perlindungan Perempuan dari Kekerasan							
2	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240 Orang	267 Orang	111,25%	1.226.675.000	1.186.067.142	96,69%
(KP) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan (Pro P) Proyek Prioritas Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah lainnya							
3	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	160 Orang	159 Orang	99,38%	3.358.554.000	3.128.843.114	93,16%
Prioritas Nasional III - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing				**105,66%**	**7.363.042.000**	**7.062.798.276**	**95,92%**
(PP) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (KP) Penguatan Kelembagaan dan Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Pro P) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakkan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							

1	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	80 Orang	83 Orang	103,75%	3.256.997.000	3.144.595.439	96,55%
Prioritas Nasional VI - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim				**103,75%**	**3.256.997.000**	**3.144.595.439**	**96,55%**
(PP) Penegakkan Hukum Nasional (KP) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Pro P) Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha							
1	Pengembangan Aplikasi e-Court Upaya Hukum Kasasi dan PK	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	494.100.000	493.946.451	99,97%
2	Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	1.931.900.000	1.929.044.842	99,85%
3	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	80 Orang	80 Orang	100,00%	2.034.400.000	1.947.981.956	95,75%
4	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	80 Orang	83 Orang	103,75%	892.067.000	892.040.379	100,00%
(Pro P) Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan							
5	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100,00%	1.500.000.000	1.497.846.106	99,86%
(Pro P) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif							
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	350 Orang	350 Orang	100,00%	1.744.960.000	1.743.655.892	99,93%
7	Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	1 Pedoman	1 Pedoman	100,00%	824.701.000	824.689.027	100,00%
(KP) Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Pro P) Penguatan Layanan Keadilan							
8	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	49.972 Orang	112,32%	13.134.500.000	13.092.500.866	99,68%
9	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	786 Perkara	978 Perkara	124,43%	538.390.000	217.896.845	40,47%
10	Sidang di luar Gedung Pengadilan	6.580 Perkara	6.384 Perkara	97,02%	8.247.925.000	7.961.664.242	96,53%
11	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	213.405 Orang	234.784 Orang	110,02%	22.455.902.000	22.409.345.202	99,79%
12	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25.197 Perkara	26.841 Perkara	106,52%	11.791.763.000	11.350.880.770	96,26%
13	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	37.194 Perkara	39.026 Perkara	104,93%	24.446.350.000	24.334.057.373	99,54%
14	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Orang	3.088 Orang	105,46%	1.007.400.000	1.003.967.239	99,66%
15	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	21 Perkara	110,53%	626.550.000	531.756.048	84,87%
16	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	402 Perkara	437 Perkara	108,71%	2.663.253.000	2.555.892.386	95,97%
Prioritas Nasional VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				**105,23%**	**94.334.161.000**	**92.787.165.624**	**98,36%**

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Mahkamah Agung mendapatkan pagu awal sebesar Rp11.904.208.120.000 (sebelas triliun sembilan ratus empat miliar dua ratus delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Mahkamah Agung Tahun 2024. Namun, terjadi beberapa kali revisi sehingga pagu akhirnya menjadi sebesar Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.65
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	**Badan Urusan Administrasi**	**11.050.043.729.000**	**10.764.861.320.863**	**97,42%**	**285.182.408.137**	**2,67%**
	Program Dukungan Manajemen	11.050.043.729.000	10.764.861.320.863	97,42%	285.182.408.137	2,67%
2	**Kepaniteraan**	**222.006.897.000**	**220.611.539.527**	**99,37%**	**1.395.357.473**	**2,28%**
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.773.175.000	15.126.510.524	95,90%	646.664.476	1,95%
	Program Dukungan Manajemen	206.233.722.000	205.485.029.003	99,64%	748.692.997	2,30%
3	**Ditjen Badan Peradilan Umum**	**149.234.382.000**	**144.951.583.957**	**97,13%**	**4.282.798.043**	**1,13%**
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.576.210.000	84.975.800.975	97,03%	2.600.409.025	1,86%
	Program Dukungan Manajemen	61.658.172.000	59.975.782.982	97,27%	1.682.389.018	0,11%

4	**Ditjen Badan Peradilan Agama**	**135.205.164.000**	**127.712.844.615**	**94,46%**	**7.492.319.385**	**0,79%**
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.467.161.000	70.862.835.903	97,79%	1.604.325.097	0,93%
	Program Dukungan Manajemen	62.738.003.000	56.850.008.712	90,61%	5.887.994.288	0,62%
5	**Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**	**31.161.153.000**	**30.486.926.868**	**97,84%**	**674.226.132**	**0,48%**
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.444.425.000	9.175.142.661	97,15%	269.282.339	1,27%
	Program Dukungan Manajemen	21.716.728.000	21.311.784.207	98,14%	404.943.793	0,15%
6	**Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan**	**249.828.011.000**	**240.060.488.602**	**96,09%**	**9.767.522.398**	**0,90%**
	Program Dukungan Manajemen	249.828.011.000	240.060.488.602	96,09%	9.767.522.398	0,90%
7	**Badan Pengawasan**	**88.013.162.000**	**83.238.482.905**	**94,58%**	**4.774.679.095**	**1,44%**
	Program Dukungan Manajemen	88.013.162.000	83.238.482.905	94,58%	4.774.679.095	1,44%
Total		**11.925.492.498.000**	**11.611.923.187.337**	**97,37%**	**313.569.310.663**	**2,59%**

* Berdasarkan *https://monsakti.kemenkeu.go.id/* per 21 Januari 2024

Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 mencapai Rp11.611.923.187.337,00 (sebelas triliun enam ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,37% dari total alokasi yaitu Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan alokasi masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.66
Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada masing-masing Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	296.979.713.000	292.404.952.564	98,46%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.744.960.000	1.776.441.188	101,80%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	87.709.790.000	86.325.175.842	98,42%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.500.000	4.471.041	99,36%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	5.595.730.000	5.621.759.763	100,47%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	249.828.011.000	240.060.488.602	96,09%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	88.013.162.000	83.238.482.905	94,58%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	11.195.615.012.000	10.902.119.482.688	97,38%
TOTAL		**11.925.492.898.000**	**11.611.923.187.337**	**97,37%**

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 memuat 8 (delapan) sasaran strategis, dengan anggaran sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

Tabel 3.67
Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	98,46%	284,43%	185,97%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	101,80%	136,55%	34,75%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	98,42%	101,29%	2,87%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	99,36%	124,57%	25,21%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	100,47%	913,29%	812,82%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	96,09%	156,38%	60,29%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	94,58%	103,34%	8,76%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	97,38%	97,34%	-0,04%

Seluruh kegiatan pada Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” yang juga ditunjang dengan terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.68
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	01-Peningkatan Penyelesaian Perkara	15.773.175.000	15.126.510.524	95,90%
	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01-Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum	62.683.760.000	60.610.201.439	96,69%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	03-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara jinayah di lingkungan peradilan agama	949.666.000	942.173.327	99,21%
		04-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	7.691.935.000	6.750.824.037	87,76%
	1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyariahan	709.123.000	688.874.099	97,14%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	01-Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer	2.034.346.000	1.955.489.402	96,12%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	01-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	901.736.000	843.600.733	93,55%
	1061-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	01-Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	1.125.000	1.125.000	100,00%
	1062-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	01-Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	1.125.000	1.125.000	100,00%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	01-Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan	206.233.722.000	205.485.029.003	99,64%
Total Realisasi Anggaran			**296.979.713.000**	**292.409.196.564**	**98,46%**

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 284,43%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 98,46% sehingga terjadi efisiensi sebesar 185,97% atau sebesar Rp552.290.201.122,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.69
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	02-Terselenggaranya proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1.744.960.000	1.776.441.188	101,80%
Total Realisasi Anggaran			**1.744.960.000**	**1.776.441.188**	**101,80%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebesar 136,55% melampaui realisasi anggaran yang hanya mencapai 101,80%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 34,75% atau sebesar Rp606.301.692,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.70
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	21.920.815.000	21.296.713.304	97,15%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	01-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama	61.471.828.000	60.842.171.365	98,98%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	2.663.253.000	2.640.092.386	99,13%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.653.894.000	1.546.198.787	93,49%
Total Realisasi Anggaran			**87.709.790.000**	**86.325.175.842**	**98,42%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebesar 101,29 % lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 98,42% sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,87 % atau sebesar Rp2.516.070.449,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.71
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	04-Tersedianya Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4.500.000	4.471.041	99,36%
Total Realisasi Anggaran			**4.500.000**	**4.471.041**	**99,36%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan adalah sebesar 124,57% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,36% sehingga terjadi efisiensi sebesar 25,21% atau sebesar Rp1.134.609 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.72
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.226.675.000	1.288.201.044	105,02%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	1.644.609.000	1.638.793.075	99,65%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	1.078.896.000	1.078.643.723	99,98%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.105.550.000	1.104.396.589	99,90%
	6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	540.000.000	511.725.332	94,76%
Total Realisasi Anggaran			**5.595.730.000**	**5.621.759.763**	**100,47%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan adalah sebesar 913,29% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 100,47% sehingga terjadi efisiensi sebesar 812,82% atau sebesar Rp45.483.482.754 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.73
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005. WA-Program Dukungan Manajemen	1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Teknis Peradilan	108.676.631.000	104.922.089.094	96,55%
	1074-Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	01-Terwujudnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan dibidang Hukum dan Peradilan.	14.085.330.000	13.862.282.366	98,42%
	1075-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	01-Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Efektif dan Efisien	89.028.527.000	86.371.131.068	97,02%
	1076-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	38.037.523.000	34.904.986.074	91,76%
Total Realisasi Anggaran			**249.828.011.000**	**240.060.488.602**	**96,09%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas adalah sebesar 156,38% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 96,09% sehingga terjadi efisiensi sebesar 60,29% atau sebesar Rp150.620.555.000 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.74
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	01-Pelaksanaan Pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I, II, III dan IV	25.568.129.000	25.383.441.970	99,28%
	1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	01-Dukungan Manajemen Eselon I dan Teknis Lainnya	62.445.033.000	57.855.040.935	92,65%
Total Realisasi Anggaran			**88.013.162.000**	**83.238.482.905**	**94,58%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal adalah sebesar 103,34% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 94,58% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,76% atau sebesar Rp7.714.318.706 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.75
Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	01-Pengelolaan Bantuan Hukum	33.948.905.000	33.870.612.450	99,77%
		02-Pengelolaan regulasi dan Tata Kelola yang baik	18.766.046.000	18.370.374.853	97,89%
		03-Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan	1.500.000.000	1.497.846.106	99,86%
		05-Pengelolaan Data dan Informasi	5.959.000.000	5.320.735.250	89,29%
	1065-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	01-Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan Parameter Obyektif	7.718.881.000	7.431.863.895	96,28%
	1066-Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	01-Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	3.304.923.693.000	3.169.569.234.079	95,90%
	1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	02-Pengelolaan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pembaruan Peradilan	5.691.226.000	5.163.404.032	90,73%
		01-Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	8.271.701.000	7.503.462.117	90,71%
	1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	01-Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan	5.964.602.000	5.827.704.927	97,70%
	1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	01-Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	23.681.438.000	22.630.024.025	95,56%
	1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	01-Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI	220.108.186.000	219.911.872.772	99,91%
	1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	01-Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	1.071.360.904.000	1.051.297.079.172	98,13%
	6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum	53.382.164.000	51.704.295.171	96,86%
	6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	57.100.477.000	51.317.557.858	89,87%

	6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	18.963.093.000	18.559.449.881	97,87%
	6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.521.388.000	5.504.933.935	99,70%
	6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	01-Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal	2.754.620.000	2.766.553.876	100,43%
	6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	3.012.969.000	3.018.700.054	100,19%
	6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	01-Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	2.084.557.000	2.002.025.468	96,04%
	6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1.135.166.000	1.134.235.177	99,92%
	6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	1.618.469.000	1.618.099.149	99,98%
	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	01-Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi Publik	6.342.147.527.000	6.216.467.107.185	98,02%
Total Realisasi Anggaran			**11.195.616.632.000**	**10.902.487.171.432**	**97,38%**

Sasaran strategis dengan capaian kinerja paling rendah adalah Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset dengan capaian sebesar 97,34%. Capaian kinerja tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya yang mencapai 97,38% sehingga terjadi inefisiensi sebesar 0,04% atau sebesar Rp4.673.941.843 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.76
Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024

Alokasi	Realisasi	% w	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
11.925.492.498.000	**11.611.923.187.337**	**97,37%**	**239,65%**	**142,28%**

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis Mahkamah Agung sebesar 239,65% lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 97,37% sehingga terjadi efisiensi sebesar 142,28%.

Bab IV
Penutup

Bab IV
Penutup

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun terakhir pelaksanaan Ranstra Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun terdapat beberapa indikator yang perlu dianalisis lebih dalam karena capaiannya yang terlampau tinggi. Selain itu diperlukan identifikasi kendala dan permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 secara keseluruhan yaitu sebesar 239,65% dengan realisasi anggaraan sebesar Rp11.611.923.187.337,00 (sebelas triliun enam ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 97,37% dari alokasi pagu tahun 2024 sebesar Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sebagian besar sasaran strategis Mahkamah Agung memperoleh capaian lebih dari 100%.

Beberapa sasaran strategis yang memperoleh capaian terlampau tinggi yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan dengan capaian sebesar 913,29%.
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capaian sebesar 284,43%.
3. Meningkatnya Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas dengan capaian sebesar 156,38%.
4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar 136,55%.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar 124,57%.

Dari sisi anggaran, terjadi inefisiensi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset meskipun hanya sebesar 0,04% atau sebesar Rp4.673.941.843,00 (Empat Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Selain itu, capaian sasaran strategis VIII paling rendah jika dibandingkan dengan sasaran strategis lainnya yaitu sebesar 97,34% dan hanya diukur dengan 2 indikator, sehingga belum menggambarkan kinerja organisasi secara maksimal dengan alokasi anggaran yang begitu besar, karena belum ada indikator yang menggambarkan transparansi keuangan.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 930 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 80 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja tersebut dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada sesuai dengan ekspektasi *stakeholders*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI

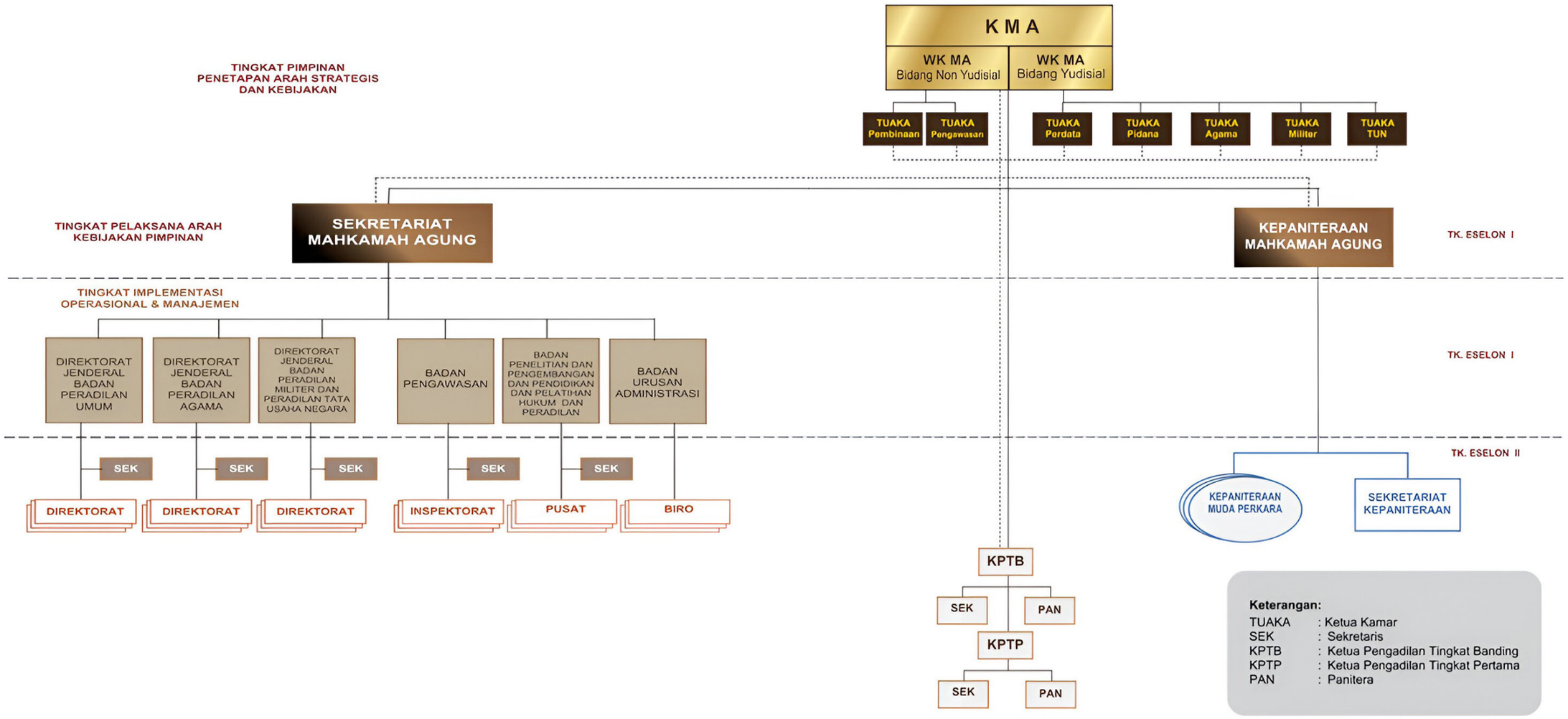

2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkmah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil
6.	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil
		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20.31	53,41	58,52	65,69	66,56	
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparasi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4
		b) Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	65,69%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Jakarta, 1 Januari 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR *Code* atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (https://bsre.bssn.go.id/repository).

4. REVISI RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2024
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Jakarta, 3 Juni 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

SUGIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

5. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto
Jabatan : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2024
PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SUGIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 180.928.421.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 10.974.562.718.000
JUMLAH		Rp 11.155.491.139.000

Jakarta, 2 Januari 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

SUGIYANTO

6. REVISI PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Juni 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 180.928.421.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 11.723.279.699.000
JUMLAH		**Rp 11.904.208.120.000**

Jakarta, 3 Juni 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

SUGIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

7. INVENTARISIR KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JANUARI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%									98,72%	98,72%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		790	20.592	43.861	180	-	-	-	65.423		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		793	21.237	44.032	206	-	-	-	66.268		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%									100,00%	1000,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	102	-	-	-	-	-	102		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	102	-	-	-	-	-	102		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									-21,20%	-38,55%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	19.050	43.810	126	-	-	-	62.986	96,20%	175%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	21.237	44.032	206	-	-	-	65.475		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	-60	74	-7	-	-	-	7	0,25%	0%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	2.433	203	138	-	-	-	2774		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-994	-	-	-	-	-	-	-994	-160,06%	-291%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		621	-	-	-	-	-	-	621		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%									12,37%	124%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	36	-	-	-	-	-	36		
			Jumlah perkara		-	291	-	-	-	-	-	291		
			pidana anak											
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,20%	45,62%	45,62%	54%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									94,54%	118,17%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		2.978	-	-	-	-	-	-	2.978		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		3.150	-	-	-	-	-	-	3.150		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									15,38%	61,52%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	145	924	-	-	-	-	1069		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	2.154	4.797	-	-	-	-	6951		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									27,68%	29,14%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	29	741	1	-	-	-	771		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	29	2.755	1	-	-	-	2785		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	102	2.642	16	-	-	-	2760		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	102	2.642	16	-	-	-	2760		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	118	-	-	-	-	118		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	118	-	-	-	-	118		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan		-	6.395	11.886	244	-	-	-	18525		

			bantuan hukum (posbakum)										
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	6.395	11.886	244	-	-	-	18525		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	3.420	30.170	189	-	-	-	33779	99,73%	124,67%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	3.483	30.184	202	-	-	-	33869		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	0	0	0	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	0	0	0	-	-	-	0		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	9,00	-	9	17,65%	29,41%
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	0,00	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	0	-	0		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	596	-	-	596	100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	596	-	-	596		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,83%	109,81%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	589	-	-	589		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	596	-	-	596		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%										
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	FEBRUARI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%									98,92%	98,92%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		2.531	39.588	89.598	334	-	-	-	132.051		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		2.345	40.844	89.914	391	-	-	-	133.494		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%									100,00%	1000,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	195	-	-	-	-	-	195		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	195	-	-	-	-	-	195		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									17,88%	32,50%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	36.740	89.481	235	-	-	-	126.456	96,42%	175%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	40.844	89.914	391	-	-	-	131.149		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	-179	232	-36	-	-	-	17	0,34%	1%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	4.332	466	233	-	-	-	5031		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-823	-	-	-	-	-	-	-823	-43,13%	-78%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		1.908	-	-	-	-	-	-	1.908		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%									10,41%	104%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	74	-	-	-	-	-	74		
			Jumlah perkara pidana anak		-	711	-	-	-	-	-	711		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,20%	45,58%	45,58%	54%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									94,84%	118,56%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		5.354	-	-	-	-	-	-	5.354		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		5.645	-	-	-	-	-	-	5.645		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									18,53%	74,12%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	277	2.243	-	-	-	-	2.520		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	3.939	9.660	-	-	-	-	13.599		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									57,09%	60,10%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	75	4.132	4	-	-	-	4.211		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	75	7.297	4	-	-	-	7.376		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,94%	99,94%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	323	8.225	110	-	-	-	8.658		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	323	8.225	115	-	-	-	8.663		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	700	-	-	-	-	700		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	700	-	-	-	-	700		

		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	12.809	34.528	526	-	-	-	47.863	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	12.809	34.528	526	-	-	-	47.863	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%								99,81%	124,77%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	7.003	64.148	304	-	-	-	71.455	
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	7.111	64.148	329	-	-	-	71.588	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%								128,07%	128,07%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	251	0	41	-	-	-	292	
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	187	0	41	-	-	-	228	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%								17,65%	29,41%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	9,00	-	9	
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51	
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%								23,45%	36,07%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	1.415,00	-	1.415	
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035	

7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.015	-	-	1.015	
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	1.015	-	-	1.015	
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%								99,01%	110,02%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	1.005	-	-	1.005	
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.015	-	-	1.015	
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%								0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0	
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0	
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%								0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	MARET									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%									98,78%	98,78%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		5.339	60.310	133.289	504	-	-	-	199.442		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		5.155	62.325	133.797	620	-	-	-	201.897		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%									100,00%	1000,00 %
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	321	-	-	-	-	-	321		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	321	-	-	-	-	-	321		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									37,38%	67,96%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	56.092	133.155	362	-	-	-	189.609	96,37%	175%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	62.325	133.797	620	-	-	-	196.742		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	585	364	72	-	-	-	1021	13,56%	25%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	6.379	706	442	-	-	-	7527		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		83	-	-	-	-	-	-	83	2,20%	4%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		3.776	-	-	-	-	-	-	3.776		
		d.	Persentase perkara pidana	10%									9,29%	93%
			anak yang diselesaikan dengan diversi;											
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	104	-	-	-	-	-	104		
			Jumlah perkara pidana anak		-	1.119	-	-	-	-	-	1119		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	97,25	0,00%	-	-	85,10%	2476,78%	2476,78%	2914%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									93,42%	116,78%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		6.664	-	-	-	-	-	-	6.664		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		7.133	-	-	-	-	-	-	7.133		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									26,16%	104,65%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	434	4.834	-	-	-	-	5.268		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	5.834	14.301	-	-	-	-	20.135		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									78,38%	82,50%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	140	7.899	7	-	-	-	8.046		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	140	10.119	7	-	-	-	10.266		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,93%	99,93%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	600	13.369	132	-	-	-	14.101		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	600	13.369	142	-	-	-	14.111		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas		-	-	1.156	-	-	-	-	1.156		

			hukum yang diselesaikan										
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	1.156	-	-	-	-	1.156	
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	12.809	34.528	790	-	-	-	48.127	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	12.809	34.528	790	-	-	-	48.127	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,82%	124,77%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	10.833	96.691	508	-	-	-	108.032	
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	10.989	96.691	548	-	-	-	108.228	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									705,37%	705,37%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	451	3.183	41	-	-	-	3.675	
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	280	200	41	-	-	-	521	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									39,22%	65,36%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	20,00	-	20		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		

		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									35,16%	54,09%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	2.122,00	-	2.122		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.353	-	-	1.353		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	1.353	-	-	1.353		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,89%	109,88%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	1.338	-	-	1.338		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.353	-	-	1.353		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi		-	-	-	-	-	-	0	0		

			kepegawaian (SIKEP)											

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	APRIL									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdi	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%									98,66%	98,66%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		7.202	74.695	159.019	626	-	-	-	241.542		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		7.006	77.322	159.721	768	-	-	-	244.817		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%									100,00%	1000,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	386	-	-	-	-	-	386		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	386	-	-	-	-	-	386		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									27,24%	49,53%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	69.343	158.914	423	-	-	-	228.680	96,16%	175%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	77.322	159.721	768	-	-	-	237.811		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.352	484	71	-	-	-	1907	19,65%	36%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	8.313	864	528	-	-	-	9705		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-1.816	-	-	-	-	-	-	-1.816	-34,09%	-62%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		5.327	-	-	-	-	-	-	5.327		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%									8,65%	87%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	122	-	-	-	-	-	122		
			Jumlah perkara pidana anak		-	1.410	-	-	-	-	-	1410		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,00%	45,52%	45,52%	54%

			pelayanan peradilan.										
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%								93,94%	117,43%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		8.704	-	-	-	-	-	-	8.704	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		9.265	-	-	-	-	-	-	9.265	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%								27,56%	110,24%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	556	6.176	-	-	-	-	6732	
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	7.245	17.181	-	-	-	-	24426	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%								77,91%	82,01%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	182	9.620	12	-	-	-	9814	
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	182	12.403	12	-	-	-	12597	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%								99,94%	99,94%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	730	16.345	157	-	-	-	17232	
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	730	16.345	168	-	-	-	17243	
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	1.355	-	-	-	-	1355	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	1.355	-	-	-	-	1355	
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	24.724	75.261	1.047	-	-	-	101032	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	24.724	75.261	1.047	-	-	-	101032	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%								99,80%	124,75%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi										
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	14.390	126.150	578	-	-	-	141118	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%								504,45%	504,45%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	595	3.218	41	-	-	-	3854	
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	373	350	41	-	-	-	764	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%								39,22%	65,36%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	20,00	-	20	
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51	
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%								40,00%	61,54%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	2.414,00	-	2414	
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6035	
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.593	-	-	1593	
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	1.593	-	-	1593	
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%								98,74%	109,72%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	1.573	-	-	1573	
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.593	-	-	1593	
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%								0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal		-	-	-	-	-	-	0	0	

			dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi										
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	14.390	126.150	578	-	-	-	141118		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									504,45%	504,45%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	595	3.218	41	-	-	-	3854		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	373	350	41	-	-	-	764		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									39,22%	65,36%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	20,00	-	20		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									40,00%	61,54%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	2.414,00	-	2414		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.593	-	-	1593		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	1.593	-	-	1593		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,74%	109,72%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	1.573	-	-	1573		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.593	-	-	1593		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal		-	-	-	-	-	-	0	0		
			gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria											
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

			yang puas terhadap pelayanan peradilan.											
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									94,34%	117,92%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		10.998	-	-	-	-	-	-	10.998		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		11.658	-	-	-	-	-	-	11.658		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									30,49%	121,96%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	710	8.746	-	-	-	-	9.456		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	9.063	21.950	-	-	-	-	31.013		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									79,89%	84,09%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	285	12.774	17	-	-	-	13.076		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	285	16.066	17	-	-	-	16.368		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,92%	99,92%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	1.064	21.250	180	-	-	-	22.494		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	1.064	21.250	197	-	-	-	22.511		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	1.909	-	-	-	-	1.909		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	1.909	-	-	-	-	1.909		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	31.815	97.598	1.357	-	-	-	130.770		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	31.815	97.598	1.357	-	-	-	130.770		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,81%	124,76%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	18.192	151.915	636	-	-	-	170.743		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	18.412	151.961	700	-	-	-	171.073		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									825,19%	825,19%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	726	6.760	81	-	-	-	7.567		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	467	450	0	-	-	-	917		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									58,82%	98,04%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	30,00	-	30		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									45,62%	70,18%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	2.753,00	-	2.753		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.839	-	-	1.839		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	1.839	-	-	1.839		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,53%	109,48%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	1.812	-	-	1.812		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	1.839	-	-	1.839		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	0	0		

			memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria										
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	JUNI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		12.167	######	260.444	919	-	-	-	388.588	98,57%	98,57%
			Jumlah perkara yang diselesaikan		11.975	######	261.593	1.158	-	-	-	394.232		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%										
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	605	-	-	-	-	-	605	100,00%	1000,00%
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	605	-	-	-	-	-	605		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									10,12%	18,41%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	######	260.450	624	-	-	-	368.310	96,35%	175%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	######	261.593	1.158	-	-	-	382.257		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.847	644	37	-	-	-	2528	18,14%	33%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	12.052	1.193	693	-	-	-	13938		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-6.825	-	-	-	-	-	-	-6.825	-84,11%	-153%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		8.114	-	-	-	-	-	-	8.114		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%										
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	213	-	-	-	-	-	213	9,29%	93%
			Jumlah perkara pidana anak		-	2.293	-	-	-	-	-	2293		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	96,5	0,00%	-	-	85,10%	2458,06%	2458,06%	2892%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke	80%									95,01%	118,76%

	penyelesaian perkara		pengadilan pengaju tepat waktu;										
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		13.578	-	-	-	-	-	-	13.578	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		14.291	-	-	-	-	-	-	14.291	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	889	12.352	-	-	-	-	13.241	35,15%	140,61%
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	10.869	26.798	-	-	-	-	37.667	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	389	16.220	22	-	-	-	16.631	85,92%	90,44%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	389	18.945	22	-	-	-	19.356	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	1.456	26.512	231	-	-	-	28.199	99,93%	99,93%
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	1.456	26.512	251	-	-	-	28.219	
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	2.789	-	-	-	-	2.789	100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	2.789	-	-	-	-	2.789	
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	38.589	119.798	1.644	-	-	-	160.031	100,00%	100,00%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	38.589	119.798	1.644	-	-	-	160.031	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	22.327	192.234	742	-	-	-	215.303	99,84%	124,80%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	22.549	192.280	816	-	-	-	215.645	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai	100%									569,41%	569,41%

	bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan		kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)										
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	726	6.760	127	-	-	-	7.613		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	560	650	127	-	-	-	1.337		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									60,78%	101,31%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	31,00	-	31		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									54,71%	84,18%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	3.302,00	-	3.302		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	2.136	-	-	2.136		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	2.136	-	-	2.136		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,31%	109,24%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	2.100	-	-	2.100		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	2.136	-	-	2.136		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		

			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JULI								CAPAIAN (%)
					REALISASI								
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%									98,30%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		15.326	140.169	322.321	1.095	-	-	-	478.911	
			Jumlah perkara yang diselesaikan		15.401	146.606	323.811	1.378	-	-	-	487.196	
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%									100,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	729	-	-	-	-	-	729	
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	729	-	-	-	-	-	729	
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									67,48%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding										
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	133.235	322.398	742	-	-	-	456.375	96,73%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	146.606	323.811	1.378	-	-	-	471.795	
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi										
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	4.739	831	30	-	-	-	5600	33,39%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	14.530	1.434	805	-	-	-	16769	
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali										
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		7.352	-	-	-	-	-	-	7.352	72,31%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		10.167	-	-	-	-	-	-	10.167	
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%									9,81%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	268	-	-	-	-	-	268	
			Jumlah perkara pidana anak		-	2.731	-	-	-	-	-	2731	
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,10%	45,56%	45,56%

CAPAIAN (%)
98,30%
1000,00%
122,69%
176%
61%
131%
98%
54%

			terhadap pelayanan peradilan.											
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									95,09%	118,87%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		16.127	-	-	-	-	-	-	16.127		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		16.959	-	-	-	-	-	-	16.959		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									36,87%	147,49%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.168	14.726	-	-	-	-	15894		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	12.174	30.930	-	-	-	-	43104		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									100,00%	105,26%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	487	20.224	25	-	-	-	20736		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	487	20.224	25	-	-	-	20736		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,93%	99,93%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	3.676	30.506	270	-	-	-	34452		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	3.676	30.506	293	-	-	-	34475		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	3.905	-	-	-	-	3905		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	3.905	-	-	-	-	3905		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	46.569	144.883	1.958	-	-	-	193410		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	46.569	144.883	1.958	-	-	-	193410		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,71%	124,64%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	27.307	277.920	884	-	-	-	306111		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	27.646	278.379	979	-	-	-	307004		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									742,93%	742,93%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	949	10.548	167	-	-	-	11664		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	653	750	167	-	-	-	1570		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									60,78%	101,31%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	31,00	-	31		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									73,59%	113,21%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	4.441,00	-	4441		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035	-	6035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	2.530	-	-	2530		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	2.530	-	-	2530		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,26%	109,18%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	2.486	-	-	2486		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	2.530	-	-	2530		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	0	0		

			memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria										
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	AGUSTUS									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		17.683	162.807	373.465	1.224	-	-	-	555.179	98,29%	98,29%
			Jumlah perkara yang diselesaikan		17.765	170.262	375.266	1.548	-	-	-	564.841		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%										
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	867	-	-	-	-	-	867	100,00%	1000,00 %
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	867	-	-	-	-	-	867		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									63,35%	115,18%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	155.254	373.621	809	-	-	-	529.684	96,82%	176%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	170.262	375.266	1.548	-	-	-	547.076		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	3.098	890	33	-	-	-	4021	21,02%	38%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	16.586	1.610	932	-	-	-	19128		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		8.514	-	-	-	-	-	-	8.514	72,20%	131%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		11.792	-	-	-	-	-	-	11.792		
		d.	Persentase perkara pidana	10%									9,55%	96%

			anak yang diselesaikan dengan diversi;										
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	302	-	-	-	-	-	302	
			Jumlah perkara pidana anak		-	3.162	-	-	-	-	-	3162	
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,10%	45,59%	45,59%	54%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									95,59%	119,49%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		18.810	-	-	-	-	-	-	18.810		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		19.677	-	-	-	-	-	-	19.677		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									35,72%	142,90%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.347	17.319	-	-	-	-	18.666		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	14.197	38.053	-	-	-	-	52.250		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									100,00%	105,26%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	646	21.896	27	-	-	-	22.569		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	646	21.896	27	-	-	-	22.569		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,94%	99,94%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	4.380	33.215	299	-	-	-	37.894		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	4.380	33.215	322	-	-	-	37.917		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang		-	-	5.196	-	-	-	-	5.196		

			diselesaikan										
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	5.196	-	-	-	-	5.196	
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	53.902	163.418	2.257	-	-	-	219.577		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	53.902	163.418	2.257	-	-	-	219.577		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,65%	124,56%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	32.096	325.773	962	-	-	-	358.831		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	32.646	326.363	1.077	-	-	-	360.086		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									871,61%	871,61%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.123	14.521	167	-	-	-	15.811		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	747	900	167	-	-	-	1.814		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									62,75%	104,58%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	32,00	-	32		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM	65%									78,81%	121,24%

			Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya										
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	4.756,00	-	4.756		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	3.095	-	-	3.095		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	3.095	-	-	3.095		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,32%	109,24%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	3.043	-	-	3.043		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	3.095	-	-	3.095		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SEPTEMBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		20.913	184.551	423.342	1.360	-	-	-	630.166	98,32%	98,32%
			Jumlah perkara yang diselesaikan		21.013	192.869	425.341	1.714	-	-	-	640.937		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%										
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	987	-	-	-	-	-	987	100,00%	1000,00%
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	987	-	-	-	-	-	987		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									62,92%	114,40%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	176.289	423.471	909	-	-	-	600.669	96,89%	176%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	192.869	425.341	1.714	-	-	-	619.924		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	3.118	1.027	32	-	-	-	4177	19,25%	35%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	18.821	1.825	1.051	-	-	-	21697		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		10.008	-	-	-	-	-	-	10.008	72,62%	132%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		13.781	-	-	-	-	-	-	13.781		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%										
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	333	-	-	-	-	-	333	9,35%	93%
			Jumlah perkara pidana anak		-	3.562	-	-	-	-	-	3562		
		e.	Indeks responden pencari keadilan	85%	-	97%	95,50%	0,00%	-	-	85,20%	69,51%	69,51%	82%

			yang puas terhadap pelayanan peradilan.											
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									96,00%	120,00%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		21.433	-	-	-	-	-	-	21.433		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		22.326	-	-	-	-	-	-	22.326		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									36,15%	144,59%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.482	19.698	-	-	-	-	21.180		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	15.884	42.710	-	-	-	-	58.594		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									100,00%	105,26%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	757	23.028	30	-	-	-	23.815		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	757	23.028	30	-	-	-	23.815		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,93%	99,93%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	4.921	35.200	321	-	-	-	40.442		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	4.921	35.200	351	-	-	-	40.472		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	6.629	-	-	-	-	6.629		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	6.629	-	-	-	-	6.629		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	53.902	163.418	2.534	-	-	-	219.854		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	53.902	163.418	2.534	-	-	-	219.854		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,65%	124,56%

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	36.734	370.223	1.115	-	-	-	408.072		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	37.318	370.948	1.240	-	-	-	409.506		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									995,81%	995,81%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.210	18.609	167	-	-	-	19.986		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	840	1.000	167	-	-	-	2.007		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									64,71%	107,84%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	33,00	-	33		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									100,98%	155,35%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	6.094,00	-	6.094		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	3.507	-	-	3.507		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	3.507	-	-	3.507		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									98,23%	109,15%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	3.445	-	-	3.445		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	3.507	-	-	3.507		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	0	0		

			memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria											
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET	OKTOBER									CAPAIAN (%)
						REALISASI									
						Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;		100%									98,33%	98,33%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu			24.604	209.682	479.609	1.533	-	-	-	715.428		
			Jumlah perkara yang diselesaikan			24.714	219.057	481.923	1.913	-	-	-	727.607		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;		10%									100,00%	1000,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif			-	1.164	-	-	-	-	-	1164		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif			-	1.164	-	-	-	-	-	1164		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)		55%									63,67%	115,76%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			-	198.687	479.766	1.030	-	-	-	679.483	96,67%	176%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama			-	219.057	481.923	1.913	-	-	-	702.893		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi			-	3.788	1.126	-21	-	-	-	4893	19,87%	36%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding			-	21.401	2.057	1.173	-	-	-	24631		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali			11.941	-	-	-	-	-	-	11.941	74,47%	135%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi			16.035	-	-	-	-	-	-	16.035		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;		10%									9,64%	96%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			-	379	-	-	-	-	-	379		
			Jumlah perkara pidana anak			-	3.930	-	-	-	-	-	3930		
		e.	Indeks responden pencari keadilan		85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,10%	45,62%	45,62%	54%

			yang puas terhadap pelayanan peradilan.											
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									96,31%	120,39%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		24.160	-	-	-	-	-	-	24.160		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		25.085	-	-	-	-	-	-	25.085		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									36,75%	147,01%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.622	22.478	-	-	-	-	24100		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	17.433	48.140	-	-	-	-	65573		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									100,00%	105,26%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	958	24.874	34	-	-	-	25866		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	958	24.874	34	-	-	-	25866		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,91%	99,91%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	5.752	36.773	379	-	-	-	42904		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	5.752	36.773	417	-	-	-	42942		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	6.633	-	-	-	-	6633		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	6.633	-	-	-	-	6633		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	67.797	197.598	2.824	-	-	-	268219		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	67.797	197.598	2.824	-	-	-	268219		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,65%	124,56%

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	41.480	414.278	1.264	-	-	-	457022		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	42.091	415.144	1.399	-	-	-	458634		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									932,36%	932,36%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.286	19.059	167	-	-	-	20512		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	933	1.100	167	-	-	-	2200		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									72,55%	120,92%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	37,00	-	37		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									106,58%	163,97%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	6.432,00	-	6432		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	3.941	-	-	3941		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	3.941	-	-	3941		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									97,77%	108,63%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	3.853	-	-	3853		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	3.941	-	-	3941		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	0	0		

			memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria										
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	NOVEMBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		27.438	230.919	528.116	1.677	-	-	-	788.150	98,34%	98,34%
			Jumlah perkara yang diselesaikan		27.578	241.207	530.610	2.077	-	-	-	801.472		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%										
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1.327	-	-	-	-	-	1327	100,00%	1000,00%
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	1.327	-	-	-	-	-	1327		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									66,83%	121,50%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	218.409	528.231	1.119	-	-	-	747.759	96,62%	176%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	241.207	530.610	2.077	-	-	-	773.894		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	5.304	1.352	-21	-	-	-	6635	24,72%	45%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	23.342	2.287	1.216	-	-	-	26845		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		14.655	-	-	-	-	-	-	14.655	79,14%	144%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		18.517	-	-	-	-	-	-	18.517		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%										
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	402	-	-	-	-	-	402	9,38%	94%
			Jumlah perkara pidana anak		-	4.285	-	-	-	-	-	4285		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas	85%	-	97%	0,00%	0,00%	-	-	85,10%	45,59%	45,59%	54%

			terhadap pelayanan peradilan.											
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									96,43%	120,53%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		27.136	-	-	-	-	-	-	27.136		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		28.142	-	-	-	-	-	-	28.142		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									37,71%	150,82%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.698	25.173	-	-	-	-	26.871		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	18.189	53.077	-	-	-	-	71.266		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									100,00%	105,26%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	1.102	26.128	37	-	-	-	27.267		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	1.102	26.128	37	-	-	-	27.267		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,90%	99,90%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	6.230	38.314	402	-	-	-	44.946		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	6.230	38.314	446	-	-	-	44.990		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	7.285	-	-	-	-	7.285		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	7.285	-	-	-	-	7.285		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	74.100	213.752	3.087	-	-	-	290.939		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	74.100	213.752	3.087	-	-	-	290.939		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,65%	124,56%

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	45.872	458.843	1.324	-	-	-	506.039		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	46.499	459.850	1.469	-	-	-	507.818		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									1094,46%	1094,46%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.439	23.862	167	-	-	-	25.468		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.027	1.300	0	-	-	-	2.327		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									74,51%	124,18%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	38,00	-	38		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									119,45%	183,77%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	7.209,00	-	7.209		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.237	-	-	4.237		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	4.237	-	-	4.237		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									96,67%	107,41%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	4.096	-	-	4.096		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.237	-	-	4.237		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	0	0		

			memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria										
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	DESEMBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%									97,93%	97,93%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		30.653	267,218	586.745	4.005	-	-	-	888.621		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		30.908	282,484	589.586	4.440	-	-	-	907.418		
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%									100,00%	1000,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1,425	-	-	-	-	-	1425		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	1,425	-	-	-	-	-	1425		
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%									70,01%	127,28%
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	232,720	584.322	2.950	-	-	-	819.992	96,49%	175,44%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	258,393	586.965	4.433	-	-	-	849.791		
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	7.681	1.684	460	-	-	-	9825	32,53%	59,15%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	25.882	2.621	1.697	-	-	-	30200		
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		16.457	-	-	-	-	-	-	16.457	80,99%	147,26%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		20.319	-	-	-	-	-	-	20.319		
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%									8,55%	85,48%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	424	-	-	-	-	-	424		
			Jumlah perkara pidana anak		-	4.960	-	-	-	-	-	4960		
		e.	Indeks responden pencari keadilan	85%	-	97,72%	96,11%	93,47%	96,39%	-	85,10%	94,74%	94,74%	111,46%

			yang puas terhadap pelayanan peradilan.											
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	80%									96,50%	120,62%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		30.070	-	-	-	-	-	-	30.070		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		31.162	-	-	-	-	-	-	31.162		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%									38,12%	152,49%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.716	27.750	-	-	-	-	29.466		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	18.326	58.969	-	-	-	-	77.295		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%									100,00%	105,26%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	1.229	26.867	42	-	-	-	28.138		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	1.229	26.867	42	-	-	-	28.138		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%									99,90%	99,90%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	6.710	39.027	418	-	-	-	46.155		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	6.710	39.027	463	-	-	-	46.200		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	7.691	-	-	-	-	7.691		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	7.691	-	-	-	-	7.691		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	79.385	235.522	3.372	-	-	-	318.279		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	79.385	235.522	3.372	-	-	-	318.279		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%									99,65%	124,57%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	50.635	504.614	1.387	-	-	-	556.636		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	51.264	505.762	1.552	-	-	-	558.578		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%									913,29%	913,29%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.548	23.862	774	-	-	-	26.184		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	1.120	1.300	447	-	-	-	2.867		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									76,47%	127,45%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	39,00	-	39		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	51,00	-	51		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%									120,45%	185,30%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	7.269,00	-	7.269		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.035,00	-	6.035		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%									100,00%	100,00%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.318	-	-	4.318		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	4.318	-	-	4.318		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%									96,02%	106,69%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	4.146	-	-	4.146		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.318	-	-	4.318		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									80,57%	94,79%
			Jumlah pengadilan yang		-	-	-	-	-	-	744	744		

			memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria											
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	923	923		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									99,88%	99,88%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	31.546	31.546		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	31.583	31.583		

8. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG

Sasaran Strategis I

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis I "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel"				**284,43%**	**Rp296.979.713.000**	**Rp292.409.196.564**	**98,46%**
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,93%	97,93%				
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	10%	100,00%	1000,00%				
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%	70,01%	127,29%				
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	10%	8,55%	85,48%				
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	85%	94,74%	111,46%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.01 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di Mahkamah Agung				**103,19%**	**Rp15.773.175.000**	**Rp15.126.510.524**	**95,90%**
Prosentase perkara pidana khusus, pidana umum, pidana militer dan PHI dengan gugatan di bawah 150 jt yang diselesaikan tepat waktu melalui Aplikasi SIAP (Perkara)	95%	98,70%	103,89%				
Prosentase perkara perdata umum, perdata khusus, agama dan TUN yang diselesaikan tepat waktu melalui Aplikasi SIAP (Perkara)	95%	97,36%	102,48%				
1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara							
1044.01-Peningkatan Penyelesaian Perkara				**191,88%**	**Rp15.773.175.000**	**Rp15.126.510.524**	**95,90%**
Persentase penyelesaian perkara sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	50%	99,17%	198,35%				
Persentase penyelesaian perkara sesuai dengan percepatan penanganan perkara (kurang dari atau sama dengan 120 hari) hari	20%	96,15%	480,75%				
Persentase salinan putusan perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%	99,03%	101,05%				
Persentase penurunan tunggakan perkara dari perkara aktif	35%	67,18%	191,94%				
Persentase berkas perkara yang tidak dikembalikan kepengadilan pengaju	80%	98,61%	123,26%				
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%	49,75%	55,90%				
1044.01.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				**124,41%**	**Rp15.773.175.000**	**Rp15.126.510.524**	**95,90%**
1044.01.BCAU01-Putusan Perkara Pidana	8.914 Perkara	11.740 Perkara	131,70%		Rp14.832.896.000	Rp14.293.641.484	96,36%
1044.01.BCAU02-Putusan Perkara Pidana Militer	325 Perkara	460 Perkara	141,54%		Rp306.818.000	Rp259.100.000	84,45%
1044.01.BCAU03-Penyesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt	759 Perkara	759 Perkara	100,00%		Rp633.461.000	Rp573.769.040	90,58%
005.BF.02 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				**53,31%**	**Rp62.683.760.000**	**Rp60.614.445.439**	**96,70%**
Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 Perkara	78.761 Perkara	59,94%				
Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah	1 Naskah	100,00%				96,70%
Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	0	0,00%				
1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							
1049.01-Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum				**159,48%**	**Rp62.683.760.000**	**Rp60.614.445.439**	**96,70%**
Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100,00%				
Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	131.404 Perkara	149.325 perkara	113,64%				96,70%
Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	3371 kegiatan	264,81%				
1049.01.AEA-Koordinasi				**263,90%**	**Rp5.833.797.000**	**Rp5.577.591.781**	**95,61%**
1049.01.AEA.001-Percepatan Penyelesaian Perkara	1.277 Perkara	3.370 Perkara	263,90%		Rp5.833.797.000	Rp5.577.591.781	95,61%
1049.01.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				**100,00%**	**Rp222.075.000**	**Rp208.910.300**	**94,07%**
1049.01.AEF.002-Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	71 Orang	71 Orang	100,00%		Rp222.075.000	Rp208.910.300	94,07%
1049.01.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				**100,15%**	**Rp56.627.888.000**	**Rp54.827.943.358**	**96,82%**
1049.01.BCA.U01-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	7.396	9.462	127,93%		Rp2.533.448.000	Rp2.529.573.726	99,85%
1049.01.BCA.U02-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	644	634	98,45%		Rp383.486.000	Rp380.587.445	99,24%
1049.01.BCA.U03-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	81.329	81.939	100,75%		Rp34.013.593.000	Rp33.212.871.528	97,65%
1049.01.BCA.U04-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	1.204	1.169	97,09%		Rp1.201.931.000	Rp1.133.532.177	94,31%
1049.01.BCA.U05-Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	1.895	1.706	90,03%		Rp1.495.254.000	Rp1.333.201.087	89,16%
1049.01.BCA.U06-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	3.186	3.501	109,89%		Rp1.208.674.000	Rp1.201.752.443	99,43%
1049.01.BCA.U07-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	308	327	106,17%		Rp225.659.000	Rp206.108.768	91,34%
1049.01.BCA.U08-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	31.037	31.283	100,79%		Rp12.702.354.000	Rp12.264.215.926	96,55%
1049.01.BCA.U09-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	672	665	98,96%		Rp615.818.000	Rp584.752.062	94,96%
1049.01.BCA.U10-Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	357	325	91,04%		Rp252.241.000	Rp193.788.175	76,83%
1049.01.BCA.U11-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	336	336	100,00%		Rp175.372.000	Rp165.826.024	94,56%

005.BF.03	**Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama**			**11080,33%**	**Rp9.350.724.000**	**Rp8.381.871.463**	**89,64%**
Jumlah perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu	361 Perkara	159.278 Perkara	44121,33%				
Jumlah rekomendasi kebijakan Kesyariahan di Lingkungan Peradilan Agama	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%				89,64%
Jumlah kegiatan peningkatan manajemen pelayanan peradilan	421 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%				
Jumlah pedoman implementasi restorative justice perkara jinayah	1 pedoman	1 pedoman	100,00%				
1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan							
1056.01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyariahan				**100,00%**	**Rp709.123.000**	**Rp688.874.099**	**97,14%**
Jumlah naskah kesyariahan yang disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%				97,14%
1056.01.ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				**100,00%**	**Rp709.123.000**	**Rp688.874.099**	**97,14%**
1056.01.ABD.001-Naskah Kesyariahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%		Rp709.123.000	Rp688.874.099	97,14%
1053.03-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara jinayah di lingkungan peradilan agama				**100,55%**	**Rp949.666.000**	**Rp942.173.327**	**99,21%**
Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	361 Perkara	365 perkara	101,11%				99,21%
Jumlah Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	1 pedoman	1 pedoman	100,00%				
1053.03.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				**101,38%**	**Rp124.965.000**	**Rp117.484.300**	**94,01%**
1053.03.BCA.001-Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	362 Kegiatan	367 Kegiatan	101,38%		Rp124.965.000	Rp117.484.300	94,01%
1053.03.PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				**100,00%**	**Rp824.701.000**	**Rp824.689.027**	**100,00%**
1053.03.PFA.001-Pedoman Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		Rp824.701.000	Rp824.689.027	100,00%
1053.04-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				**100,00%**	**Rp7.691.935.000**	**Rp6.750.824.037**	**87,76%**
Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan	421 Kegiatan	421 kegiatan	100,00%				87,76%
1053.04.AEA-Koordinasi				**100,71%**	**Rp7.691.935.000**	**Rp6.750.824.037**	**87,76%**
1053.04.AEA.001-Peningkatan dan Pemantauan Layanan Pengadilan	421 Kegiatan	424 Kegiatan	100,71%		Rp7.691.935.000	Rp6.750.824.037	87,76%
005.BF.04	**Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**			**75,59%**	**Rp2.938.332.000**	**Rp2.801.340.135**	**95,34%**
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	2.917 Perkara	2.186 Perkara	74,94%				
Jumlah Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer	1 NSPK	1 NSPK	100,00%				
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Militer	17 Kegiatan	13 Kegiatan	76,47%				95,34%
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	23 Kegiatan	17 Kegiatan	73,91%				
Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38 Layanan	20 Layanan	52,63%				
1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer							
1058.01-Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer				**103,78%**	**Rp2.034.346.000**	**Rp1.955.489.402**	**96,12%**
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	2.917 Perkara	3.248 perkara	111,35%				
Jumlah Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer	1 NSPK	1 NSPK	100,00%				96,12%
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan	17 Kegiatan	17 kegiatan	100,00%				
1058.01.AEA-Koordinasi				**129,41%**	**Rp293.720.000**	**Rp291.999.102**	**99,41%**
1058.01.AEA.001-Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	17 Kegiatan	22 Kegiatan	129,41%		Rp293.720.000	Rp291.999.102	99,41%
1058.01.AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				**100,00%**	**Rp133.840.000**	**Rp133.757.128**	**99,94%**
1058.01.AFA.001-NSPK Tata Kelola Administrasi Peradilan Militer	1 NSPK	1 NSPK	100,00%		Rp133.840.000	Rp133.757.128	99,94%
1058.01.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				**116,46%**	**Rp1.606.786.000**	**Rp1.529.733.172**	**95,20%**
1058.01.BCA.U01-Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	7 Perkara	6 Perkara	85,71%		Rp3.905.000	Rp2.131.500	54,58%
1058.01.BCA.U02-Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	385 Perkara	426 Perkara	110,65%		Rp149.890.000	Rp141.032.898	94,09%
1058.01.BCA.U03-Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1.880 Perkara	1.885 Perkara	100,27%		Rp1.233.401.000	Rp1.179.130.759	95,60%
1058.01.BCA.U04-Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	280 Perkara	360 Perkara	128,57%		Rp195.769.000	Rp187.742.500	95,90%
1058.01.BCA.U05-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	315 Perkara	364 Perkara	115,56%		Rp21.021.000	Rp16.905.515	80,42%
1058.01.BCA.U06-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	50 Perkara	79 Perkara	158,00%		Rp2.800.000	Rp2.790.000	99,64%
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
1059.01-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				**91,30%**	**Rp901.736.000**	**Rp843.600.733**	**93,55%**
Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38 Kegiatan	38 kegiatan	100,00%				93,55%
Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	23 Kegiatan	19 kegiatan	82,61%				
1059.01.AEA-Koordinasi				**100,00%**	**Rp901.736.000**	**Rp843.600.733**	**93,55%**
1059.01.AEA.002-Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	23 Kegiatan	23 kegiatan	100,00%		Rp439.937.000	Rp428.950.808	97,50%
1059.01.AEA.003-Dukungan Penyelesaian Perkara	38 Kegiatan	38 kegiatan	100,00%		Rp461.799.000	Rp414.649.925	89,79%
1061-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer							

	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (TUN)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%				100,00%
	1062.01.AEA-Koordinasi				**100,00%**	**Rp1.125.000**	**Rp1.125.000**	**100,00%**
	1062.01.AEA.001-Monitoring dan Evaluasi	1 Kegiatan	1 kegiatan	100,00%		Rp1.125.000	Rp1.125.000	100,00%
005.WA	**Program Dukungan Manajemen**							
005.WA.7	**Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung**				**50,00%**	**Rp206.233.722.000**	**Rp205.485.029.003**	**99,64%**
	Jumlah rumusan hasil pleno kamar	6 Kebijakan	0 Kebijakan	0,00%				
	Jumlah layanan manajemen administrasi Non justisial (kesekretariatan) Kepaniteraan Justisial	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00%				
	6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan							
	6242.01-Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan				**100,00%**	**Rp206.233.722.000**	**Rp205.485.029.003**	**99,64%**
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	Layanan Manajemen SDM Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	Layanan Manajemen dan Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	6242.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp204.816.537.000**	**Rp204.187.419.385**	**99,69%**
	6242.01.EBA.956-Layanan BMN	2 Layanan	2 Layanan	100,00%		Rp30.925.000	Rp26.750.000	86,50%
	6242.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13 Layanan	13 Layanan	100,00%		Rp5.823.010.000	Rp5.433.417.487	93,31%
	6242.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp198.962.602.000	Rp198.727.251.898	99,88%
	6242.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				**100,00%**	**Rp285.666.000**	**Rp246.309.000**	**86,22%**
	6242.01.EBB.951-Layanan Sarana Internal	48 Layanan	48 Layanan	100,00%		Rp285.666.000	Rp246.309.000	86,22%
	6242.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp597.834.000**	**Rp591.285.058**	**98,90%**
	6242.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	420 Layanan	420 Layanan	100,00%		Rp597.834.000	Rp591.285.058	98,90%
	6242.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp533.685.000**	**Rp460.015.560**	**86,20%**
	6242.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10 Layanan	10 Layanan	100,00%		Rp713.000	Rp0	0,00%
	6242.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	5 Layanan	5 Layanan	100,00%		Rp532.972.000	Rp460.015.560	86,31%

Sasaran Strategis II-V

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis II "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara"				**136,55%**	**Rp1.744.960.000**	**Rp1.776.441.188**	**101,80%**
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%	96,50%	120,62%				
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	38,12%	152,49%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.05 Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				**48010,00%**	**Rp1.744.960.000**	**Rp1.776.441.188**	**101,80%**
Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%	2%	20,00%				
Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	960 Laporan	96000,00%				
1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum							
1046.02-Terselenggaranya proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif				**2435,86%**	**Rp1.744.960.000**	**Rp1.776.441.188**	**101,80%**
Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Bimbingan Teknis Restorative Justice	350 Orang	251 Orang	71,71%				
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	2%	96%	4800,00%				
1046.02.UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				**100,00%**	**Rp15.773.175.000**	**Rp15.126.510.524**	**95,90%**
1046.02.UAC.001-Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	350 Orang	350 Orang	100,00%		Rp1.744.960.000	Rp1.776.441.188	101,80%

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis III "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan"				**101,29%**	**Rp87.709.790.000**	**Rp86.325.175.842**	**98,42%**
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	95%	100%	105,26%				
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	99,90%				
Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100,00%				
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100,00%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.06 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum				**75,61%**	**Rp21.920.815.000**	**Rp21.296.713.304**	**97,15%**
Jumlah Laporan layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	0 Laporan	0%				
Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	60.615 Orang	136,24%				
Jumlah Perkara yang diselesaiakan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	757 Perkara	96,56%				
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	4.582 Perkara	69,64%				
1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							
1049.02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				**65,15%**	**Rp21.920.815.000**	**Rp21.296.713.304**	**97,15%**
01-Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	60.615 Orang	136,24%				
02-Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	784 Perkara	121 Perkara	15,43%				
03-Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	6.580 Perkara	2.881 Perkara	43,78%				
1049.02.QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				**112,25%**	**Rp15.773.175.000**	**Rp15.126.510.524**	**95,90%**
1049.02.QBA.032-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	49.943 Orang	112,25%		Rp13.134.500.000	Rp13.096.022.217	99,71%
1049.02.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				**68,89%**	**Rp8.786.315.000**	**Rp8.200.691.087**	**93,33%**
1049.02.QCA.001-Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	786 Perkara	976 Perkara	124,17%		Rp538.390.000	Rp220.849.845	41,02%
1049.02.QCA.002-Sidang di luar Gedung Pengadilan	6.580 Perkara	6.367 Perkara	96,76%		Rp8.247.925.000	Rp7.979.841.242	96,75%
005.BF.11 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama				**89,22%**	**Rp61.471.828.000**	**Rp60.842.171.365**	**98,98%**
Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	213.405 Orang	177.209 Orang	83,04%				
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	25.197 Perkara	22.902 Perkara	90,89%				
Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama	37.194 Perkara	34.800 Perkara	93,56%				
Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama	7.226 Perkara	6.458 Perkara	89,37%				

	1053.01.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				**105,75%**	**Rp39.015.926.000**	**Rp38.432.826.163**	**98,51%**
	1053.01.QCA.001-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	25.345 Perkara	26.867 Perkara	106,01%		Rp11.791.763.000	Rp11.350.880.770	96,26%
	1053.01.QCA.002-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	37.236 Perkara	39.027 Perkara	104,81%		Rp24.446.350.000	Rp24.334.057.373	99,54%
	1053.01.QCA.003-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	7.226 Perkara	7.691 Perkara	106,44%		Rp2.777.813.000	Rp2.747.888.020	98,92%
005.BF.12	**Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**				**77,83%**	**Rp4.317.147.000**	**Rp4.186.291.173**	**96,97%**
	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	15 Perkara	78,95%				
	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Orang	2.384 Orang	81,42%				
	Jumlah Perkara yang diselesaiakan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	32 Perkara	21 Perkara	65,63%				
	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	402 Perkara	343 Perkara	85,32%				
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer							
	1058.02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer				**107,46%**	**Rp2.663.253.000**	**Rp2.640.092.386**	**99,13%**
	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan	402 Perkara	432 Perkara	107,46%				
	1058.02.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				**108,71%**	**Rp2.663.253.000**	**Rp2.640.092.386**	**99,13%**
	1058.02.QCA.001-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	402 Orang	437 Orang	108,71%		Rp2.663.253.000	Rp2.640.092.386	99,13%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
	1059.02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				**109,60%**	**Rp1.653.894.000**	**Rp1.546.198.787**	**93,49%**
	01-Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Perkara	3.097 Perkara	105,77%				
	02-Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN	32 Orang	36 Orang	112,50%				
	03-Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	21 Perkara	110,53%				
	1059.02.BCA-Perkara Hukum Perseorangan				**93,75%**	**Rp19.944.000**	**Rp12.875.500**	**64,56%**
	1059.02.BCA.001-Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	32 Perkara	30 Perkara	93,75%		Rp19.944.000	Rp12.875.500	64,56%
	1059.02.QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				**105,46%**	**Rp1.007.400.000**	**Rp1.001.567.239**	**99,42%**
	1059.02.QBA.001-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.928 Orang	3.088 Orang	105,46%		Rp1.007.400.000	Rp1.001.567.239	99,42%
	1059.02.QCA-Perkara Hukum Perseorangan				**110,53%**	**Rp626.550.000**	**Rp531.756.048**	**84,87%**
	1059.02.QCA.002-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	19 Perkara	21 Perkara	110,53%		Rp626.550.000	Rp531.756.048	84,87%

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis IV "Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan"				**124,57%**	**Rp4.500.000**	**Rp4.471.041**	**99,36%**
Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	99,65%	124,57%				
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
005.BF.13 Terselenggaranya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan di Lngkungan Peradilan Tata Usaha Negara				**100,00%**	**Rp4.500.000**	**Rp4.471.041**	**99,36%**
Jumlah Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
1059.04-Tersedianya Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				**100,00%**	**Rp4.500.000**	**Rp4.471.041**	**99,36%**
Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1059.04.AEA-Koordinasi				**100,00%**	**Rp4.500.000**	**Rp4.471.041**	**99,36%**
1059.04.AEA.004-Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		Rp4.500.000	Rp4.471.041	99,36%

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase

Sasaran Strategis V "Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan"				**913,29%**	**Rp5.595.730.000**	**Rp5.621.759.763**	**100,47%**
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29%				
005.BF **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**							
005.BF.07 **Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum**				**42,54%**	**Rp1.226.675.000**	**Rp1.288.201.044**	**105,02%**
Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	251 Orang	42,54%				
1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum							
1046.03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Berbasis Responsif Gender di Lingkungan Peradilan Umum				**104,58%**	**Rp1.226.675.000**	**Rp1.288.201.044**	**105,02%**
Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan hukum	240 Orang	251 Orang	104,58%				
1046.03.UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				**111,25%**	**Rp1.226.675.000**	**Rp1.288.201.044**	**105,02%**
1046.03.UAC.002-Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240 Orang	267 Orang	111,25%		Rp1.226.675.000	Rp1.288.201.044	105,02%
005.WA.11 **Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama**				**0,00%**	**Rp540.000.000**	**Rp511.725.332**	**94,76%**
Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan layanan SDM	68 Orang	0 Orang	0,00%				
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama							
6983.02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				**220,59%**	**Rp540.000.000**	**Rp511.725.332**	**94,76%**
Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis dan TOT	68 Orang	150 Orang	220,59%				
6983.02.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp540.000.000**	**Rp511.725.332**	**94,76%**
6983.02.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	68 Orang	68 Orang	100,00%		Rp540.000.000	Rp511.725.332	94,76%
005.BF.14 **Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**				**77,76%**	**Rp2.184.446.000**	**Rp2.183.040.312**	**99,94%**
Jumlah Tenaga Teknis dan Aparatur Pengadilan Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	286 Orang	215 Orang	75,17%				
Jumlah Tenaga Teknis dan Aparatur Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan TUN	356 Orang	286 Orang	80,34%				
1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer							
1058.03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer				**111,89%**	**Rp1.078.896.000**	**Rp1.078.643.723**	**99,98%**
Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	286 Orang	320 Orang	111,89%				
1058.03.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				**123,43%**	**Rp1.078.896.000**	**Rp1.078.643.723**	**99,98%**
1058.03.AEF.001-Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara	286 Orang	353 Orang	123,43%		Rp1.078.896.000	Rp1.078.643.723	99,98%
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							
1059.03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				**101,12%**	**Rp1.105.550.000**	**Rp1.104.396.589**	**99,90%**
Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan ata Usaha Negara	356 Orang	360 Orang	101,12%				
1059.03.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				**109,55%**	**Rp1.105.550.000**	**Rp1.104.396.589**	**99,90%**
1058.03.AEF.002-Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara	356 Orang	390 Orang	109,55%		Rp1.105.550.000	Rp1.104.396.589	99,90%
005.WA.15 **Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama**				**8,93%**	**Rp1.644.609.000**	**Rp1.638.793.075**	**99,65%**
Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Agama	1.500 Orang	134 Orang	8,93%				
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
1053.02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				**106,67%**	**Rp1.644.609.000**	**Rp1.638.793.075**	**99,65%**
Jumlah orang yang dilakukan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama	1.500 Orang	1.600 Orang	106,67%				
1053.02.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi				**100,13%**	**Rp1.644.609.000**	**Rp1.638.793.075**	**99,65%**
1053.02.AEF.001-Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	1.500 Orang	1.502 Orang	100,13%		Rp1.644.609.000	Rp1.638.793.075	99,65%

Sasaran Strategis VI

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis VI "Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas"				**913,29%**	**Rp249.828.011.000**	**Rp240.060.488.602**	**96,09%**
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	913,29%	913,29%				
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.04 Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten				**115,94%**	**Rp249.828.011.000**	**Rp240.060.488.602**	**96,09%**
% Rekomendasi Kebijakan dimanfaatkan Sebagai Referensi Penyelesaian Perkara dan Pembentukan Kebijakan	60,00%	5,88%	9,80%				
% Peserta pendidikan dan pelatihan lulus ujian dengan predikat minimal baik	75,00%	132,94%	177,25%				
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	92,08 Nilai	87,13 Nilai	94,62%				
Indeks pemanfaatan informasi bidang penelitian dan pelatihan berbasis TIK	3,45 Indeks	4,00 Indeks	115,94%				
1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan							
1073.01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Teknis Peradilan				**156,88%**	**Rp108.676.631.000**	**Rp104.922.089.094**	**96,55%**
% SDM MA Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Teknis Peradilan	33,59%	99,00%	294,73%				
Jumlah dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%				
Indeks Kepuasaan Penyelenggaraan Pelatihan	3,45 Indeks	4,53 Indeks	131,30%				
Nilai/kategori akreditasi lembaga pengakreditasi program	81,00 Nilai	82,19 Nilai	101,47%				
1073.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp99.134.613.000**	**Rp95.808.628.206**	**96,64%**
1073.01.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.406 Orang	2.406 Orang	100,00%		Rp99.134.613.000	Rp95.808.628.206	96,64%
1073.01.TBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp9.542.018.000**	**Rp9.113.460.888**	**95,51%**
1073.01.EBC.001-Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp2.034.400.000	Rp1.947.981.956	95,75%
1073.01.EBC.002-Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp892.067.000	Rp892.040.379	100,00%
1073.01.EBC.003-Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp3.256.997.000	Rp3.144.595.439	96,55%
1073.01.EBC.004-Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	160 Orang	160 Orang	100,00%		Rp3.358.554.000	Rp3.128.843.114	93,16%
1074-Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan							
1074.01-Terwujudnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan dibidang Hukum dan Peradilan.				**204,17%**	**Rp14.085.330.000**	**Rp13.862.282.366**	**98,42%**
Jumlah topik dokumen rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan lembaga	2 Dokumen	5 Dokumen	250,00%				
% laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang di publikasikan	60,00%	100,00%	166,67%				
Jumlah dokumen kebijakan dibidang pengelolaan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%				
Nilai akreditasi jurnal ilmiah	B	B	100,00%				
1074.01.ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				**100,00%**	**Rp14.085.330.000**	**Rp13.862.282.366**	**98,42%**
1074.01.ABD.002-Naskah Akademik	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	100,00%		Rp12.633.618.000	Rp12.410.573.742	98,23%
1074.01.ABD.007-Pengembangan Kebijakan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%		Rp1.451.712.000	Rp1.451.708.624	100,00%
1075-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan							
1075.01-Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Efektif dan Efisien				**727,78%**	**Rp89.028.527.000**	**Rp86.371.131.068**	**97,02%**
Jumlah dokumen kebijakan dukungan pengelolaan dan penyelenggaraan penelitian dan pelatihan	2 Dokumen	100 Dokumen	5000,00%				
Tingkat penerapan kebijakan dukungan pengelolaan dan penyelenggaraan berdasarkan pedoman tata kelola	100,00%	100,00%	100,00%				
% SDM Badan Litbang Diklat Kumdil yang mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan	95,00%	97,00%	102,11%				
% SDM Badan Litbang Diklat Kumdil yang mengakses knowledge management	50,00%	67,00%	134,00%				
Nilai SAKIP	75	74,4	99,20%				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	BAIK	BAIK	100,00%				
% Informasi yang dipublikasikan melalui sistem TIK	3,45 Indeks	4,51 Indeks	130,72%				
Tingkat layanan jaringan dan sistem informasi (downtime)	80,00 Indeks	125,00 Indeks	156,25%				
1075.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp14.085.330.000**	**Rp13.862.282.366**	**98,42%**
1075.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.028.374.000	Rp1.028.371.352	100,00%
1075.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.066.761.000	Rp4.869.407.478	96,10%
1075.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.012.060.000	Rp1.012.059.232	100,00%
1075.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp59.052.281.000	Rp58.485.488.448	99,04%
1075.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				**100,00%**	**Rp17.984.566.000**	**Rp16.640.454.722**	**92,53%**
1075.01.EBB.951-Layanan Sarana Internal	945 Layanan	945 Layanan	100,00%		Rp9.898.777.000	Rp8.555.738.347	86,43%
1075.01.EBB.971-Layanan Prasarana Internal	5 Layanan	5 Layanan	100,00%		Rp8.085.789.000	Rp8.084.716.375	99,99%
1075.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp2.794.783.000**	**Rp2.794.775.118**	**100,00%**
1075.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	135 Layanan	135 Layanan	100,00%		Rp114.964.000	Rp114.962.777	100,00%
1075.01.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	434 Layanan	434 Layanan	100,00%		Rp2.679.819.000	Rp2.679.812.341	100,00%

1076-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan							
1076.01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Manajemen dan Kepemimpinan				**126,60%**	**Rp38.037.523.000**	**Rp34.904.986.074**	**91,76%**
% SDM MA Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang manajemen dan kepemimpinan	33,59%	100,00%	297,71%				
Jumlah Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%				
Jumlah dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
Indeks Kepuasaan Penyelenggaraan Pelatihan	3,45 Indeks	4,67 Indeks	135,36%				
Nilai/kategori akreditasi program	92,08 Nilai	92,00 Nilai	99,91%				
1076.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp38.037.523.000**	**Rp34.904.986.074**	**91,76%**
1076.01.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.965 Layanan	3.965 Layanan	100,00%		Rp38.037.523.000	Rp34.904.986.074	91,76%

Sasaran Strategis VII

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis VII "Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal"				**103,34%**	**Rp88.013.162.000**	**Rp83.238.482.905**	**94,58%**
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%				
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%	96,02%	106,69%				
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.02 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan				**91,07%**	**Rp88.013.162.000**	**Rp83.238.482.905**	**94,58%**
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	48,29%	48,29%				
Persentase pengaduan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%				
Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100,00%	100,00%				
Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%	100,00%	100,00%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjuti	100%	100,34%	100,34%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	99,95%	99,95%				
Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%	88,91%	88,91%				
1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV							
1077.01-Pelaksanaan Pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I, II, III dan IV				**97,82%**	**Rp25.568.129.000**	**Rp25.383.441.970**	**99,28%**
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%				
Persentase pengaduan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%				
Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100,00%	100,00%				
Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%	97,16%	97,16%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjuti	100%	98,25%	98,25%				
Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	97,22%	97,22%				
Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%	92,10%	92,10%				
1077.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp25.568.129.000**	**Rp25.383.441.970**	**99,28%**
1077.01.EBD.965-Layanan Audit Internal	917 Layanan	917 Layanan	100,00%		Rp25.568.129.000	Rp25.383.441.970	99,28%
1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung							
1079.01-Dukungan Manajemen Eselon I dan Teknis Lainnya				**100,00%**	**Rp62.445.033.000**	**Rp57.855.040.935**	**92,65%**
Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Layanan Internal Eselon 1	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
Dukungan kebijakan penanganan pengaduan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
1079.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp54.241.991.000**	**Rp50.044.731.430**	**92,26%**
1079.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	38 Layanan	38 Layanan	100,00%		Rp593.820.000	Rp593.456.272	99,94%
1079.01.EBA.962-Layanan Umum	13 Layanan	13 Layanan	100,00%		Rp430.946.000	Rp329.780.000	76,52%
1079.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	12 Layanan	12 Layanan	100,00%		Rp350.000.000	Rp349.286.770	99,80%
1079.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp52.867.225.000	Rp48.772.208.388	92,25%
1079.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				**100,00%**	**Rp4.543.950.000**	**Rp4.530.122.000**	**99,70%**
1079.01.EBB.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	309 Layanan	309 Layanan	100,00%		Rp4.543.950.000	Rp4.530.122.000	99,70%
1079.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**115,00%**	**Rp1.631.866.000**	**Rp1.631.856.340**	**100,00%**
1079.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	200 Layanan	230 Layanan	115,00%		Rp1.631.866.000	Rp1.631.856.340	100,00%
1079.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**104,94%**	**Rp2.027.226.000**	**Rp1.648.331.165**	**81,31%**
1079.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan	4 Layanan	100,00%		Rp289.231.000	Rp24.476.875	8,46%
1079.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	81 Layanan	93 Layanan	114,81%		Rp1.237.995.000	Rp1.186.285.373	95,82%
1079.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	32 Layanan	32 Layanan	100,00%		Rp500.000.000	Rp437.568.917	87,51%

Sasaran Strategis VIII

Uraian	Capaian Kinerja				Anggaran		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase
Sasaran Strategis VIII "Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset"				**97,34%**	**Rp11.195.616.632.000**	**##################**	**97,38%**
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	80,57%	94,79%				
Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88%				
005.WA Program Dukungan Manajemen							
005.WA.01 Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan				**92,32%**	**Rp9.978.681.205.000**	**Rp9.713.564.241.691**	**97,34%**
Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 Sistem	13 Sistem	81,25%				
Jumlah pengembangan SDM kepagawaian berdasarkan parameter obyektif	10 Orang	11 Orang	110,00%				
Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	40 Laporan	42 Laporan	105,00%				
Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%				
Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	8 Laporan	4 Laporan	50,00%				
Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00%				
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00%				
1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan							
1064.01-Pengelolaan Bantuan Hukum				**208,33%**	**Rp33.948.905.000**	**Rp33.870.612.450**	**99,77%**
Pemenuhan layanan bantuan hukum Advokasi internal Mahkamah Agung yang prima	12 Kegiatan	38 Kegiatan	316,67%				
Jumlah gugatan kepada Mahkamah Agung yang telah putus	4 Perkara	4 Perkara	100,00%				
1064.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp33.948.905.000**	**Rp33.870.612.450**	**99,77%**
1064.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp33.948.905.000	Rp33.870.612.450	99,77%
1064.02-Pengelolaan regulasi dan Tata Kelola yang baik				**127,05%**	**Rp18.766.046.000**	**Rp18.370.374.853**	**97,89%**
Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan	41 Dokumen	78 Dokumen	190,24%				
Pemenuhan Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
Jumlah Sosialiasi Kebijakan Mahkamah Agung	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%				
Pemenuhan Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung	20 Dokumen	24 Dokumen	120,00%				
Pemenuhan Layanan dan Tata Kelola Lembaga Sertifikasi Mediator Non Hakim	4 Lembaga	5 Lembaga	125,00%				
1064.02.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp2.707.883.000**	**Rp2.555.569.763**	**94,38%**
1064.02.EBA.957-Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp2.707.883.000	Rp2.555.569.763	94,38%
1064.02.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp16.058.163.000**	**Rp15.814.805.090**	**98,48%**
1064.02.EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp16.058.163.000	Rp15.814.805.090	98,48%
1064.03-Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan				**102,54%**	**Rp1.500.000.000**	**Rp1.497.846.106**	**99,86%**
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terintegrasi termasuk pilot project SPPT TI	382 Pengadilan	405 Pengadilan	106,02%				
Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	15 Sistem	16 Sistem	106,67%				
Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	1.000 Mbps	1.000 Mbps	100,00%				
Layanan dan Pemeliharaan Perangkat Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) Mahkamah Agung	100%	100%	100,00%				
Persentase Pengadilan yang mendapatkan peningkatan fungsi sistem peradilan pidana terpadu (SPPT TI)	100%	100%	100,00%				
1064.03.UAB-Sistem Informasi Pemerintahan				**100,00%**	**Rp1.500.000.000**	**Rp1.497.846.106**	**99,86%**
1064.03.UAB.001-Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.500.000.000	Rp1.497.846.106	99,86%
1064.05-Pengelolaan Data dan Informasi				**121,24%**	**Rp5.959.000.000**	**Rp5.320.735.250**	**89,29%**
Pemenuhan Data dan Informasi bagi Aparatur Penegak Hukum dan Para Pencari Keadilan	100%	100%	100,00%				
Jumlah pengguna aplikasi e-library	9.500 Pengguna	9.729 Pengguna	102,41%				
Jumlah Penerbitan dan Pencetakan Bahan Pustaka Perpustakaan Mahkamah Agung	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%				
Pengelolaan dan Penataan Perpustakaan	8 Kegiatan	10 Kegiatan	125,00%				
Pemenuhan Tata Kelola PPID Mahkamah Agung	100%	100%	100,00%				
Layanan Streaming dan Koordinasi IT	4 Layanan	8 Layanan	200,00%				
1064.05.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp2.959.000.000**	**Rp2.897.743.957**	**97,93%**

Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	85,31%	82,90%	97,18%				
Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	99,51%	71,86%	72,21%				
1066.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp3.267.387.838.000**	**Rp3.137.366.152.748**	**96,02%**
1066.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp3.267.387.838.000	Rp3.137.366.152.748	96,02%
1066.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp37.535.855.000**	**Rp32.203.081.331**	**85,79%**
1066.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp37.535.855.000	Rp32.203.081.331	85,79%
1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung							
1067.01-Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien				**73,56%**	**Rp8.271.701.000**	**Rp7.503.462.117**	**90,71%**
Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif	70,00%	85,23%	121,76%				
Jumlah kesesuaian antara rencana kerja dengan RKAKL	923 Satker	923 Satker	100,00%				
Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%				
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai LKJiP (BB)	592 Satker	715 Satker	120,78%				
Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana program dan anggaran	73 Laporan	0 Laporan	0,00%				
Jumlah laporan pelaksanaan monitoring rencana program dan anggaran	12 Laporan	0 Laporan	0,00%				
Jumlah laporan strategi nasional	3 Laporan	3 Laporan	100,00%				
Jumlah dokumen evaluasi atas hasil penyelenggaraan program kerja	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%				
Jumlah laporan kinerja	3 Laporan	4 Laporan	133,33%				
Tersusunnya Rencana Kerja Mahkamah Agung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
Tersusunnya Rencana Strategis Mahkamah Agung	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
1067.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp8.271.701.000**	**Rp7.503.462.117**	**90,71%**
1067.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Layanan	3 Layanan	100,00%		Rp6.400.611.000	Rp5.750.857.304	89,85%
1067.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Layanan	6 Layanan	100,00%		Rp1.871.090.000	Rp1.752.604.813	93,67%
1067.02-Pengelolaan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pembaruan Peradilan				**0,00%**	**Rp5.691.226.000**	**Rp5.163.404.032**	**90,73%**
Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	5 Regulasi	0 Regulasi	0,00%				
Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung	1 Laporan	0 Laporan	0,00%				
1067.02.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp5.691.226.000**	**Rp5.163.404.032**	**90,73%**
1067.02.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.691.226.000	Rp5.163.404.032	90,73%
1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya							
1068.01-Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan				**163,23%**	**Rp5.964.602.000**	**Rp5.827.704.927**	**97,70%**
Persentase tanah/bangunan pinjam pakai yang sudah diselesaikan	18,00%	18,00%	100,00%				
Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu	170 SK Peneteapan	170 SK Peneteapan	100,00%				
Persentase nilai asset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP)	70 SK Peneteapan	70 SK Peneteapan	100,00%				
Persentase usulan RK BMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	28,00%	98,82%	352,93%				
1068.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp5.964.602.000**	**Rp5.827.704.927**	**97,70%**
1068.01.EBA.956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.964.602.000	Rp5.827.704.927	97,70%
1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya							
1069.01-Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya				**99,96%**	**Rp23.681.438.000**	**Rp22.630.024.025**	**95,56%**
Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100,00%	99,96%	99,96%				
1069.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Interna				**100,00%**	**Rp23.681.438.000**	**Rp22.630.024.025**	**95,56%**
1069.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp17.981.438.000	Rp17.705.024.025	98,46%
1069.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.700.000.000	Rp4.925.000.000	86,40%
1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung							
1070.01-Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI				**99,96%**	**Rp220.108.186.000**	**Rp219.911.872.772**	**99,91%**
Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100,00%	99,96%	99,96%				
1070.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Interna				**100,00%**	**Rp220.108.186.000**	**Rp219.911.872.772**	**99,91%**
1070.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.232.160.000	Rp1.115.990.725	90,57%
1070.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp218.876.026.000	Rp218.795.882.047	99,96%
6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							
6986.01-Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi Publik				**99,96%**	**Rp6.342.147.527.000**	**Rp6.216.467.107.185**	**98,02%**
Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100,00%	99,96%	99,96%				
6986.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Interna				**99,96%**	**Rp6.342.147.527.000**	**Rp6.216.467.107.185**	**98,02%**
6986.01.EBA.956-Layanan BMN	34 Layanan	34 Layanan	100,00%		Rp296.160.000	Rp279.652.632	94,43%
6986.01.EBA.962-Layanan Umum	184 Layanan	184 Layanan	100,00%		Rp559.530.000	Rp521.560.858	93,21%
6986.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	934 Layanan	933 Layanan	99,89%		Rp6.341.291.837.000	Rp6.215.665.893.695	98,02%
005.WA.06 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan				**1,30%**	**Rp1.071.362.524.000**	**Rp1.051.297.079.172**	**98,13%**
Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung	103.592 m2	0 m2	0,00%				

	Jumlah pengadaan/renovasi gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi	558.943 m2	194 m2	0,03%				
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung	6.794 Unit	59 Unit	0,87%				
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung	16.574 Unit	530 Unit	3,20%				
	Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung	85.177 Unit	2.059 Unit	2,42%				
	1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							
	1071.01-Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan				**100,00%**	**Rp1.071.362.524.000**	**Rp1.051.297.079.172**	**98,13%**
	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	1071.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				**101,64%**	**Rp1.071.362.524.000**	**Rp1.051.297.079.172**	**98,13%**
	1071.EBB.951-Layanan Sarana Internal	2.177 Layanan	2.097 Layanan	96,33%		Rp96.531.976.000	Rp88.013.096.376	91,18%
	1071.EBB.971-Layanan Prasarana Internal	36.711 Layanan	39.265 Layanan	106,96%		Rp974.830.548.000	Rp963.283.982.796	98,82%
005.WA.08	**Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum**				**34,73%**	**Rp61.658.172.000**	**Rp59.975.782.982**	**97,27%**
	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100,00%				
	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	557 Unit	62 Unit	11,13%				
	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	250 Orang	62,50%				
	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi , PK dan Grasi	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%				
	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	0 Orang	0,00%				
	6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum							
	6243.01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum				**51,17%**	**Rp53.382.164.000**	**Rp51.704.295.171**	**96,86%**
	Jumlah Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	0 Layanan	0,00%				
	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal	665 Unit	31 Unit	4,66%				
	Jumlah layanan Manajemen SDM Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	Jumlah layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%				
	6243.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp41.155.201.000**	**Rp39.480.983.387**	**95,93%**
	6243.EBA.956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.100.000	Rp980.100	89,10%
	6243.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp918.610.000	Rp916.697.217	99,79%
	6243.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp5.604.892.000	Rp5.422.046.857	96,74%
	6243.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp34.630.599.000	Rp33.141.259.213	95,70%
	6243.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				**100,00%**	**Rp8.151.346.000**	**Rp8.147.999.886**	**99,96%**
	6243.EBB.951-Layanan Sarana Internal	1.140 Unit	1.140 Unit	100,00%		Rp7.898.346.000	Rp7.895.825.186	99,97%
	6243.EBB.971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100,00%		Rp253.000.000	Rp252.174.700	99,67%
	6243.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp798.078.000**	**Rp797.381.120**	**99,91%**
	6243.EBBC.954-Layanan Manajemen SDM	80 Orang	80 Orang	100,00%		Rp798.078.000	Rp797.381.120	99,91%
	6243.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp3.277.539.000**	**Rp3.277.930.778**	**100,01%**
	6243.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		Rp1.227.114.000	Rp1.226.453.396	99,95%
	6243.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		Rp579.523.000	Rp579.501.932	100,00%
	6243.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		Rp1.470.902.000	Rp1.471.975.450	100,07%
	6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum							
	6627.01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum				**106,38%**	**Rp5.521.388.000**	**Rp5.504.933.935**	**99,70%**
	Layanan Manajemen SDM Internal	601 Orang	716 Orang	119,13%				
	6627.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**133,33%**	**Rp5.521.388.000**	**Rp5.504.933.935**	**99,70%**
	6627.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%		Rp1.124.430.000	Rp1.152.191.129	102,47%
	6627.EBA.954-Layanan Manajemen SDM	400 Orang	400 Orang	100,00%		Rp4.310.239.000	Rp4.270.492.851	99,08%
	6627.EBA.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%		Rp86.719.000	Rp82.249.955	94,85%
	6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum							
	6630.01-Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp2.754.620.000**	**Rp2.766.553.876**	**100,43%**
	Layanan Dukungan Manajemen dan SDM Internal	2 Layanan	2 Layanan	100,00%				
	6630.01.ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				**100,00%**	**Rp368.130.000**	**Rp371.110.792**	**100,81%**
	6630.01.ABD.001-Tata Kelola Administrasi Peradilan Umum	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,00%		Rp368.130.000	Rp371.110.792	100,81%
	6630.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp1.303.817.000**	**Rp1.303.641.643**	**99,99%**
	6630.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Unit	1 Unit	100,00%		Rp1.020.670.000	Rp1.020.610.237	99,99%
	6630.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Unit	1 Unit	100,00%		Rp283.147.000	Rp283.031.406	99,96%
	6630.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp1.082.673.000**	**Rp1.091.801.441**	**100,84%**
	6630.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	130 Orang	130 Orang	100,00%		Rp1.082.673.000	Rp1.091.801.441	100,84%
005.WA.09	**Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama**				**42,88%**	**Rp62.198.003.000**	**Rp56.338.283.380**	**90,58%**
	Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama	2 Layanan	2 Layanan	100,00%				
	Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Agama	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%				
	Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5 Layanan	5 Layanan	100,00%				
	Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	6 Dokumen	2 Dokumen	33,33%				
	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	684 Unit	25 Unit	3,65%				

6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)							
6244.01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama				**88,74%**	**Rp57.100.477.000**	**Rp51.317.557.858**	**89,87%**
Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5 Layanan	5 Layanan	100,00%				
Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%				
Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	684 Unit	376 Unit	54,97%				
Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilayani di bidang kepegawaian	167 Orang	167 Orang	100,00%				
6244.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp35.972.788.000**	**Rp34.717.705.730**	**96,51%**
6244.01.EBA.956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp778.130.000	Rp779.561.000	100,18%
6244.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp1.982.351.000	Rp1.819.346.934	91,78%
6244.01.EBA.962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp159.752.000	Rp159.737.395	99,99%
6244.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp672.912.000	Rp668.539.694	99,35%
6244.01.EBA.994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp32.379.643.000	Rp31.290.520.707	96,64%
6244.01.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal				**100,00%**	**Rp17.404.124.000**	**Rp13.070.650.400**	**75,10%**
6244.01.EBB.951-Layanan Sarana Internal	684 Unit	684 Unit	100,00%		Rp17.404.124.000	Rp13.070.650.400	75,10%
6244.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp966.950.000**	**Rp966.934.678**	**100,00%**
6244.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	167 Unit	167 Unit	100,00%		Rp966.950.000	Rp966.934.678	100,00%
6244.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp2.756.615.000**	**Rp2.562.267.050**	**92,95%**
6244.01.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		Rp760.075.000	Rp757.590.413	99,67%
6244.01.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		Rp1.996.540.000	Rp1.804.676.637	90,39%
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama							
6631.01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				**173,70%**	**Rp3.012.969.000**	**Rp3.018.700.054**	**100,19%**
Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mendapat layanan SDM	4.984 Orang	8.657 Orang	173,70%				
6631.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp3.012.969.000**	**Rp3.018.700.054**	**100,19%**
6631.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	4.984 Orang	4.984 Orang	100,00%		Rp3.012.969.000	Rp3.018.700.054	100,19%
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama							
6983.01-Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama				**100,00%**	**Rp2.084.557.000**	**Rp2.002.025.468**	**96,04%**
Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama	2 Layanan	2 Layanan	100,00%				
Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%				
6983.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp1.068.672.000**	**Rp990.439.093**	**92,68%**
6983.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp362.906.000	Rp312.839.068	86,20%
6983.01.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp705.766.000	Rp677.600.025	96,01%
6983.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp1.015.885.000**	**Rp1.011.586.375**	**99,58%**
6631.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%		Rp1.015.885.000	Rp1.011.586.375	99,58%
005.WA.10 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				**40,49%**	**Rp21.716.728.000**	**Rp21.311.784.207**	**98,14%**
Jumlah Layanan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	6 Layanan	1 Layanan	16,67%				
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	7 Dokumen	2 Dokumen	28,57%				
Jumlah Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	46 Unit	4 Unit	8,70%				
Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di	95 Orang	95 Orang	100,00%				
Jumlah Dokumen Manajemen Internal Peradilan Militer	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%				
Jumlah Dokumen Manajemen Internal Peradilan Tata Usaha Negara	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00%				
Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mendapat Layanan SDM	314 Orang	90 Orang	28,66%				
Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mendapat Layanan SDM	383 Orang	160 Orang	41,78%				
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00%				
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara	9 Dokumen	5 Dokumen	55,56%				
6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)							
6245.01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				**67,89%**	**Rp18.963.093.000**	**Rp18.559.449.881**	**97,87%**
Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	2 Layanan	33,33%				
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46 Unit	20 Dokumen	43,48%				
Layanan Manajemen SDM Internal	95 Orang	90 Unit	94,74%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen	7 Orang	100,00%				
6245.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp16.471.370.000**	**Rp16.132.438.100**	**97,94%**
956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%		Rp286.388.000	Rp286.369.401	99,99%

6245.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp945.974.000**	**Rp921.327.781**	**97,39%**
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		Rp423.219.000	Rp398.715.236	94,21%
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		Rp96.093.000	Rp96.050.656	99,96%
955-Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		Rp426.662.000	Rp426.561.889	99,98%
6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer							
6984.01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer				**100,00%**	**Rp1.135.166.000**	**Rp1.134.235.177**	**99,92%**
Layanan Manajemen Internal	314 Orang	314 Orang	100,00%				
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%				
6984.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp71.700.000**	**Rp71.700.000**	**100,00%**
6984.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		Rp71.700.000	Rp71.700.000	100,00%
6984.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp866.064.000**	**Rp865.411.154**	**99,92%**
6984.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	314 Orang	314 Orang	100,00%		Rp866.064.000	Rp865.411.154	99,92%
6984.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp197.402.000**	**Rp197.124.023**	**99,86%**
6984.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%		Rp197.402.000	Rp197.124.023	99,86%
6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara							
6985.01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara				**103,70%**	**Rp1.618.469.000**	**Rp1.618.099.149**	**99,98%**
Layanan Manajemen SDM Internal	383 Orang	383 Orang	100,00%				
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%				
Layanan Manajemen Kinerja Internal	9 Dokumen	10 Dokumen	111,11%				
6985.01.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				**100,00%**	**Rp266.558.000**	**Rp266.523.034**	**99,99%**
6985.01.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%		Rp266.558.000	Rp266.523.034	99,99%
6985.01.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				**100,00%**	**Rp1.185.004.000**	**Rp1.184.791.807**	**99,98%**
6985.01.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	383 Orang	383 Orang	100,00%		Rp1.185.004.000	Rp1.184.791.807	99,98%
6985.01.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				**100,00%**	**Rp166.907.000**	**Rp166.784.308**	**99,93%**
6985.01.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%		Rp166.907.000	Rp166.784.308	99,93%

9. NASKAH URGENSI PENJENJANGAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG

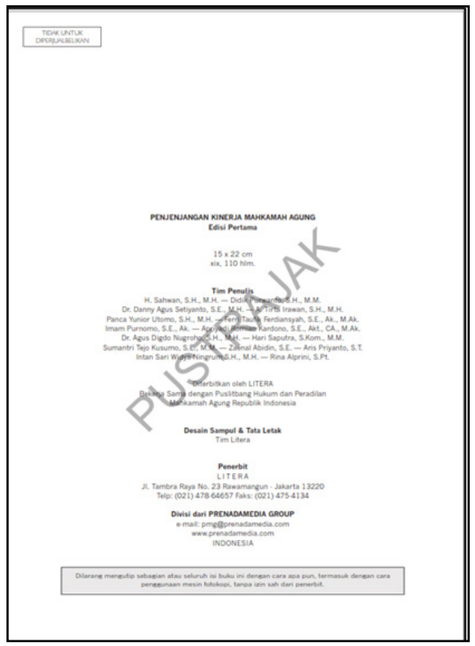

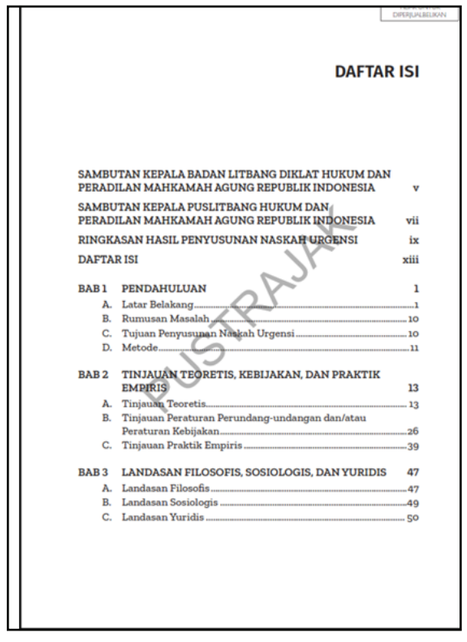

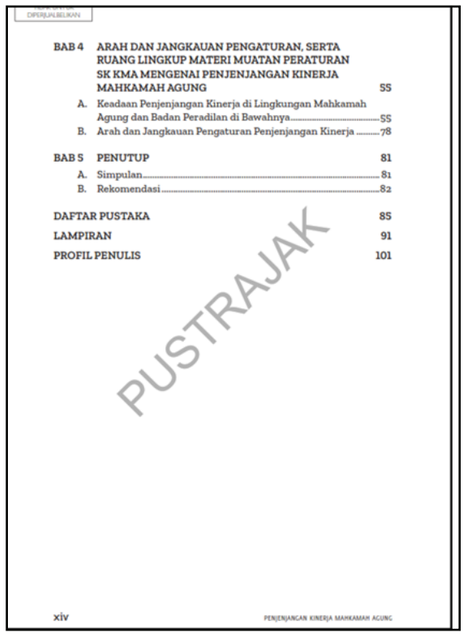

10. PUBLIKASI DOKUMEN SAKIP DI BERBAGAI WEBSITE PENGADILAN

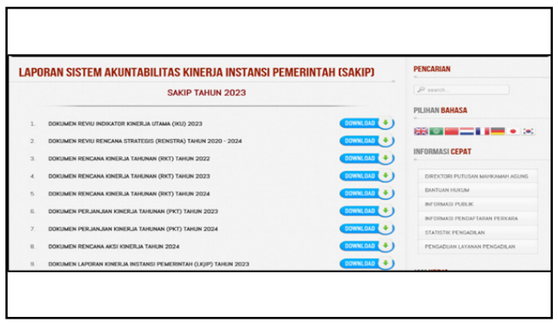

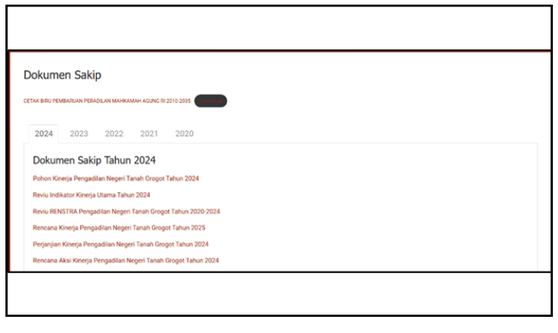

RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA
Informasi Cepat
Jam Pelayanan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II
RENCANA AKSI KINERJA
PANDUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KLAS II

ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA
MATARAM KELAS I.A.

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I A
ANDA MEMASUKI KAWASAN INTEGRITAS
DARI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

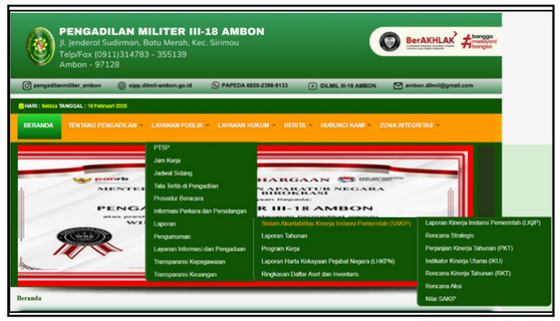
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON
Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kec. Sirimau
Telp/Fax (0911)314783 - 355139
Ambon - 97128

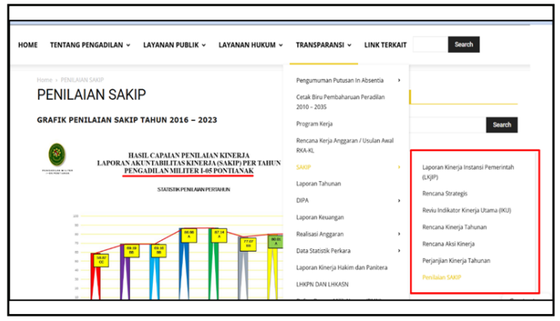
PENILAIAN SAKIP
GRAFIK PENILAIAN SAKIP TAHUN 2016 – 2023
HASIL CAPAIAN PENILAIAN KINERJA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) PER TAHUN
PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
Jl. Sultan Amay, Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96135
SAKIP
AKUNTABILITAS KINERJA

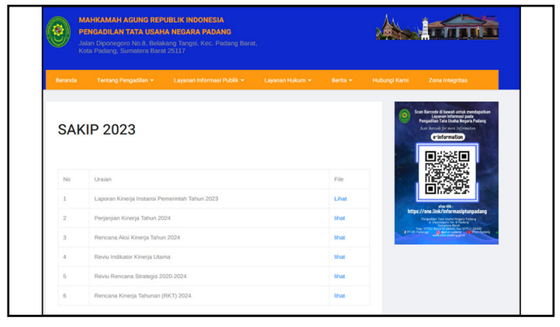
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
SAKIP 2023

11. SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4505/SEK/OT1.6/XII/2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Jakarta, 24 Desember 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
pada Empat Lingkungan Peradilan

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Tahun 2024.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2025 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link https://esr.menpan.go.id/
2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link https://komdanas.mahkamahagung.go.id/
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP, dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Sugiyanto

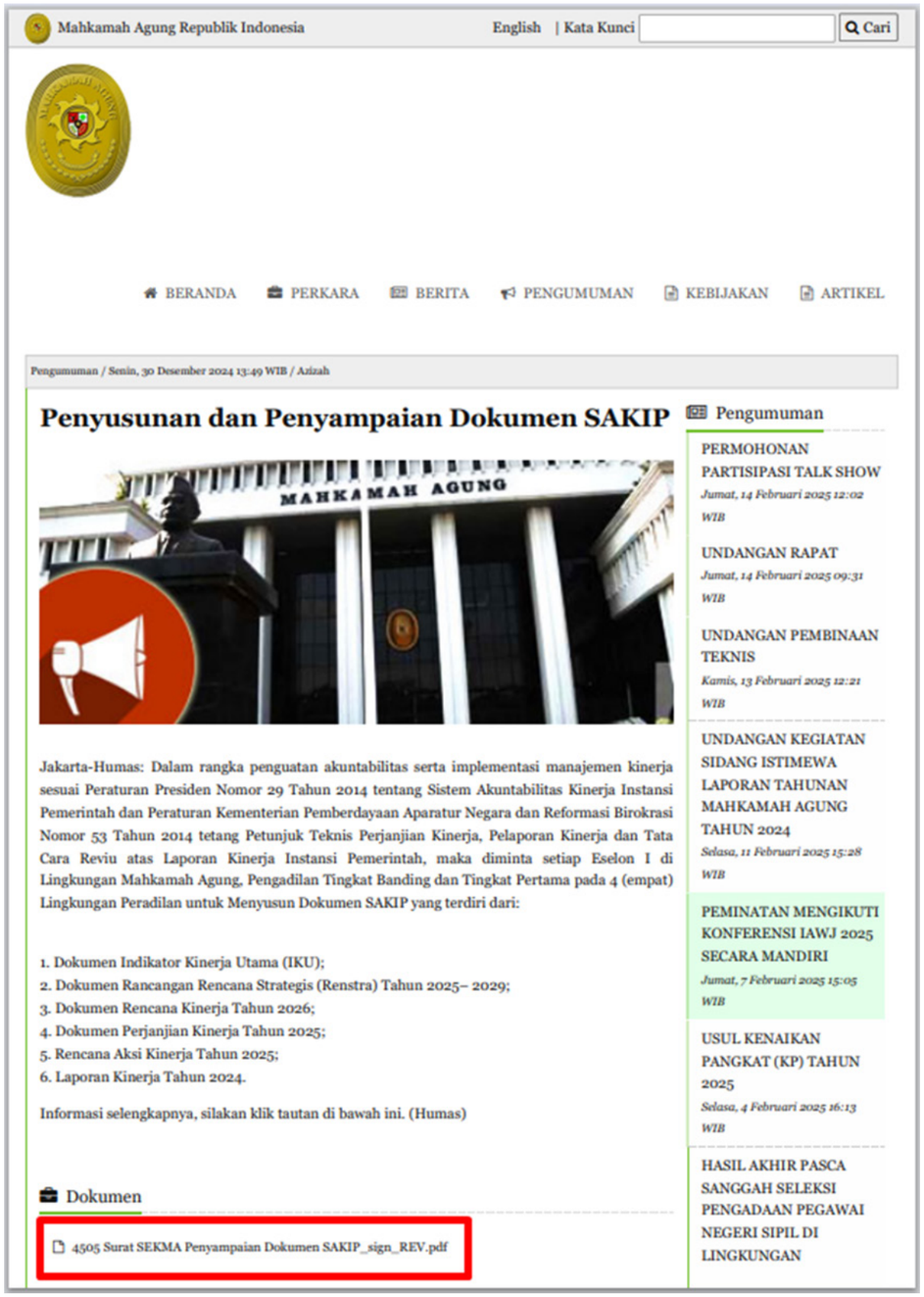

12. SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1282/SEK/OT.01.1/7/2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 17 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/772/AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Mahkamah Agung Tahun 2022, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja dilaksanakan setiap triwulan.
2. Laporan Kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.
3. Laporan Kinerja memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar.
4. Menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya.
5. Matriks monitoring dan evalusi Rencana Aksi, Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja, Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan format pernyataan telah direviu terlampir dalam surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

13. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG

1. Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sahwan, S.H., M.H. meraih penghargaan juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kategori kelompok III kualitas pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang didampingi oleh Direktur Jenderal DJKN Rionald Silaban, pada hari Kamis, 5 Desember 2024, bertempat di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

3. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H. menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Mahkamah Agung pada Rabu, 14 Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dr. Rudiarto Sumarwono, selaku Komisioner Pokja Pengawasan Pengisian Bidang Pengisian JPT Wilayah 1 KASN.

4. Ketua Kamar Pembinaan pada Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D. menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum pada Kamis, 22 Agustus 2024 di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta.

5. Menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai. Penghargaan diterima langsung Kepala Biro Kepegawaian MA Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H. yang diberikan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen, S.Kom, M.Si. Saat dikonfirmasi Sahlanudin mengatakan, penghargaan yang diberikan BKN sangat berharga bagi Mahkamah Agung.

6. Meraih penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penghargaan diterima langsung Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H yang diberikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

NOTA KESEPAKATAN FINAL, LAMPIRAN JURNAL KOREKSI, DAN SURAT REPRESENTASI

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG (BA005) TAHUN 2024

Nomor: NKF-44/005/PB.6/2025

Pada hari **Kamis, 08 Mei 2025**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **MAHKAMAH AGUNG (BA 005)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2024 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 09 Mei 2024.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Rama Rahim, Kepala Bagian Akuntansi	KEMENTERIAN MAHKAMAH AGUNG – selaku Penyusun LKKL
2	Idris Aswin , Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara III	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Alexander, Ketua Tim	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor :
Tanggal :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

K/L : Mahkamah Agung

BA : 005

URAIAN	REALISASI *UNAUDITED*	KOREKSI		REALISASI *AUDITED*
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	105.803.944.468	2.700.000	2.700.000	105.803.944.468
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan PNBP Lainnya	105.803.944.468	2.700.000	2.700.000	105.803.944.468
Pendapatan Hibah	-			-
TOTAL PENDAPATAN	**105.803.944.468**	**2.700.000**	**2.700.000**	**105.803.944.468**
Belanja Pegawai	7.565.805.289.661			7.565.805.289.661
Belanja Barang dan Jasa	2.957.012.815.204			2.957.012.815.204
Belanja Modal	1.104.407.066.362			1.104.407.066.362
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
TOTAL BELANJA	**11.627.225.171.227**	**-**	**-**	**11.627.225.171.227**
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-			-
Dana Alokasi Khusus	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Keistimewaan DIY	-			-
Dana Desa	-			
Insentif Fiskal	-			
TOTAL TKD	**-**	**-**	**-**	**-**
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-			-
TOTAL PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**	**-**

LAMPIRAN NOTA
KESEPAKATAN
Nomor :
Tanggal :

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

K/L : Mahkamah Agung

BA : 005

URAIAN	*UNAUDITED*	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	**31.765.973.920.689**			**31.765.973.920.689**
SURPLUS/DEFISIT LO	**(11.292.218.033.797)**	16.087.307.991	24.484.389.664	**(11.285.885.765.056)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	**-**	-	-	-
Penyesuaian SILPA	**-**	-	-	
Koreksi Nilai Persediaan	**(380.261)**	-	-	(380.261)
Revaluasi Aset	**-**	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	**(82.012.541.703)**	24.920.860.175	23.831.009.351	(83.102.392.527)
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset	**461.047.245**	88.000.454	193.490.908	566.537.699
Koreksi atas Transaksi BMN Lainnya	**-**	-	-	
Koreksi Lain-lain	**(158.062.779)**	4.301.779	-	(162.364.558)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	**(81.709.937.498)**	**25.013.162.408**	**24.024.500.259**	(82.698.599.647)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**11.736.376.395.076**	69.608.370	69.608.370	**11.736.376.395.076**
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	**362.448.423.781**	**41.170.078.769**	**48.578.498.293**	**367.792.030.373**
EKUITAS AKHIR	**32.128.422.344.470**	**41.170.078.769**	**48.578.498.293**	**32.133.765.951.062**

LAMPIRAN NOTA
KESEPAKATAN
Nomor :
Tanggal :

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

K/L : Mahkamah Agung
BA : 005

URAIAN	*UNAUDITED*	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**-**	**-**	**-**	**-**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	-	
Penerimaan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	90.363.684.951	-	2.700.000	90.366.384.951
Pendapatan Badan Layanan Umum	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**90.363.684.951**	**-**	**2.700.000**	**90.366.384.951**
PENDAPATAN HIBAH		-	-	
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	**-**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**90.363.684.951**	**-**	**2.700.000**	**90.366.384.951**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	7.564.819.412.008	100.542.965	102.807.543	7.564.817.147.430
Beban Persediaan	87.107.531.342	47.162.142	46.031.676	87.108.661.808
Beban Barang dan Jasa	1.848.930.354.731	500.769.163	221.945.113	1.849.209.178.781
Beban Pemeliharaan	539.856.326.982	43.926.115	312.937.020	539.587.316.077
Beban Perjalanan Dinas	522.686.143.631	424.134.800	530.726.366	522.579.552.065
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	813.219.002.611	1.394.922.480	301.426.857	814.312.498.234
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(194.358.422)	36.823.376	-	(157.535.046)
Beban Lain-lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**11.376.424.412.883**	**2.548.281.041**	**1.515.874.575**	**11.377.456.819.349**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(11.286.060.727.932)**	**(2.548.281.041)**	**(1.513.174.575)**	**(11.287.090.434.398)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				**-**
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				**- 7.811.570.468**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5.381.048.355	2.700.000	-	5.378.348.355
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	13.189.918.823	-	-	13.189.918.823
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**(7.808.870.468)**	**2.700.000**	**-**	**(7.811.570.468)**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				**9.016.239.810**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.727.551.765	18.632.889.032	25.997.564.239	9.092.226.972
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	75.987.162	-	-	75.987.162
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.651.564.603**	**18.632.889.032**	**25.997.564.239**	**9.016.239.810**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(6.157.305.865)**	**18.635.589.032**	**25.997.564.239**	**1.204.669.342**
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**-**	**-**	**-**	**-**
SURPLUS/(DEFISIT) LO	**(11.292.218.033.797)**	**16.087.307.991**	**24.484.389.664**	**(11.285.885.765.056)**

LAMPIRAN NOTA
KESEPAKATAN
Nomor :
Tanggal :

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

K/L : Mahkamah Agung
BA : 005

AKUN	*UNAUDITED*	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.160.000	-	-	2.160.000
Kas di Bendahara Penerimaan	389.500	-	-	389.500
Kas Lainnya dan Setara kas	32.752.557	24.031.534	6.682.000	50.102.091
Kas pada BLU	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka *(prepaid)*	19.989.174.240	7.077.798	18.596.085	19.977.655.953
Uang Muka Belanja *(prepayment)*	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-
Piutang Perpajakan	-	-	-	-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-	-	-	-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	1.110.093.546	7.364.675.207	-	8.474.768.753
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(95.603.939)	-	36.823.376	(132.427.315)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.014.489.607	7.364.675.207	36.823.376	8.342.341.438
Bagian Lancar TPA	-	-	-	-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-	-	-	-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	14.989.992	-	-	14.989.992
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	(74.950)	-	-	(74.950)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	14.915.042	-	-	14.915.042
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-	-	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Nett	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-	-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	24.388.936.121	46.031.676	17.911.142	24.417.056.655
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-	
Jumlah Aset Lancar	**45.442.817.067**	**7.441.816.215**	**80.012.603**	**52.804.620.679**
ASET TETAP				
Tanah	20.014.331.807.703	-	-	20.014.331.807.703
Peralatan dan Mesin	4.992.428.910.599	13.113.533.630	77.799.537	5.005.464.644.692
Gedung dan Bangunan	13.263.717.485.166	5.565.632.000	16.530.731.012	13.252.752.386.154
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.350.280.852	-	-	58.350.280.852
Aset Tetap Lainnya	51.619.330.318	-	-	51.619.330.318
Konstruksi Dalam Pengerjaan	480.698.447.679	1.589.023.725	7.024.412.380	475.263.059.024
Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.100.076.869.750)	23.849.507	1.267.276.938	(4.101.320.297.181)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.663.625.080.394)	263.125.567	714.186.474	(2.664.076.141.301)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(24.164.506.704)	-	-	(24.164.506.704)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(587.141.571)	-	-	(587.141.571)
Akumulasi Peyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	**32.072.692.663.898**	**20.555.164.429**	**25.614.406.341**	**32.067.633.421.986**
PROPERTI INVESTASI		-	-	
Properti Investasi	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
Jumlah Properti Investasi	**-**	**-**	**-**	**-**

LAMPIRAN NOTA
KESEPAKATAN
Nomor :
Tanggal :

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

K/L : Mahkamah Agung
BA : 005

AKUN	*UNAUDITED*	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-	
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	3.747.514	-	-	3.747.514
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(18.738)	-	-	(18.738)
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	3.728.776	-	-	3.728.776
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	578.845.030	-	-	578.845.030
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	(578.845.030)	-	-	(578.845.030)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	**3.728.776**	**-**	**-**	**3.728.776**
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	111.501.438.267	199.142.079	12.896.683.604	98.803.896.742
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	62.522.083.798	-	-	62.522.083.798
Dana Penjaminan	-	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
Aset Lain-lain	148.670.452.374	12.736.273.487	34.349.430	161.372.376.431
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ketiga	-	-	-	-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(135.696.538.652)	12.987.805	17.370.337	(135.700.921.184)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(61.659.315.721)	12.061.077.162	21.361.625	(49.619.600.184)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(1.331.775.030)	21.361.625	11.967.136.708	(13.277.550.113)
Jumlah Aset Lainnya	**124.006.345.036**	**25.030.842.158**	**24.936.901.704**	**124.100.285.490**
JUMLAH ASET	**32.242.145.554.777**	**53.027.822.802**	**50.631.320.648**	**32.244.542.056.931**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	110.818.867.974	3.926.120.382	954.984.410	107.847.732.002
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.876.111.776	-	-	2.876.111.776
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	2.160.000	-	-	2.160.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	26.070.557	-	24.031.534	50.102.091
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**113.723.210.307**	**3.926.120.382**	**979.015.944**	**110.776.105.869**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**113.723.210.307**	**3.926.120.382**	**979.015.944**	**110.776.105.869**
EKUITAS	**32.128.422.344.470**	**56.953.943.184**	**51.610.336.592**	**32.133.765.951.062**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**32.242.145.554.777**	**60.880.063.566**	**52.589.352.536**	**32.244.542.056.931**

LAMPIRAN NOTA
KESEPAKATAN
Nomor :
Tanggal :

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

K/L : Mahkamah Agung
BA : 005

AKUN	*UNAUDITED*	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
-				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Kukuh	00501	2100	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	Koreksi atas BMN Motor Jupiter yang hilang dengan Nilai Perolehan Rp17.000.000 dan Nilai Buku Rp0 - NUP 1 (TGR: SKTJM a/n Subhan Attamimi), namun masih tercatat di SIMAN TUN Ambon, TGR sudah lunas NTPN 74EE861QV3M0DDKJ tanggal 29-02-2024 sebesar Rp2.200.000			***Perubahan Kondisi menjadi RUSAK BERAT Sepeda Motor NUP 1***								
									tidak terbentuk jurnal								
									Penghentian Penggunaan Sepeda Motor NUP 1								
						dilakukan transaksi rusak berat dan penghentian penggunaan, serta dinfokan kepada satuan kerja agar melakukan usulan penghapusan terhadap aset tersebut di tahun anggaran 2025		391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							17,000,000	
								132111	*Peralatan dan Mesin*				17,000,000				
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*			17,000,000					
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								17,000,000
								166112	*Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan*			17,000,000					
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								17,000,000
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							17,000,000	
								169122	*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan*				17,000,000				
2	Kukuh	00501	2100	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	Realisasi Kegiatan Perjalanan Dinas menggunakan MAK 533111 namun tidak dapat di kapitalisasi ke Belanja Modal 53 sebesar Rp138.129.076	Rp 138,129,076	***Koreksi Nilai Berkurang "Bangunan Gedung Kantor Permanen"***									
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							138,129,076	
								133111	*Gedung dan Bangunan*				138,129,076				
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			1,381,291					
								591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						1,381,291		
								Jurnal Manual									
								524111	*Beban Perjalanan Dinas Biasa*					138,129,076			
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								138,129,076
3	Sefti	00507	0199	663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	Koreksi Persediaan Lebih dan Kurang Hasil Stok Opname Tim BPK dan Pengelola Persediaan Bawas per 4 Maret 2025											
						- Koreksi Kurang Catat Persediaan	Rp 43,262,100	***Koreksi Nilai Bertambah Persediaan - Barang Konsumsi***									
								117111	*Barang Konsumsi*			43,262,100					
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*						43,262,100		
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp -14,509,400	***Koreksi Nilai Berkurang Persediaan - Barang Konsumsi***									
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*					14,509,400			
								117111	*Barang Konsumsi*				14,509,400				
4	Andi	00501	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		*Opname Fisik Persediaan*									
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp 970,642	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					970,642			
								117111	*Barang Konsumsi*				970,642				
						- Koreksi Kurang Catat Persediaan	Rp 2,347,356	117111	*Barang Konsumsi*			2,347,356					
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*						2,347,356		
5	Sefti	00501	0200	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		***Opname Fisik Persediaan***									
						- Koreksi Kurang Catat Persediaan	Rp 256,400	117111	*Barang Konsumsi*			256,400					
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*						256,400		
6	Sefti	00501	0200	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		***Opname Fisik Persediaan***									
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp -150,000	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					150,000			
								117111	*Barang Konsumsi*				150,000				
7	Sefti	00503	0200	477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		***Opname Fisik Persediaan***									
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp -185,000	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					185,000			
								117111	*Barang Konsumsi*				185,000				
8	Sefti	00501	0200	097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		***Opname Fisik Persediaan***									
						- Koreksi Kurang Catat Persediaan	Rp 92,720	117111	*Barang Konsumsi*			92,720					
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*						92,720		

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp -663,300	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					663,300			
								117111	*Barang Konsumsi*				663,300				
9	Sefti	00503	0200	099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		***Opname Fisik Persediaan***									
						- Koreksi Kurang Catat Persediaan	Rp 18,500	117111	*Barang Konsumsi*			18,500					
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*						18,500		
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp -392,750	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					392,750			
								117111	*Barang Konsumsi*				392,750				
10	Sefti	00501	0200	400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	Koreksi persediaan hasil stok opname BPK		***Opname Fisik Persediaan***									
						- Koreksi Kurang Catat Persediaan	Rp 54,600	117111	*Barang Konsumsi*			54,600					
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*						54,600		
						- Koreksi Lebih Catat Persediaan	Rp -455,050	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					455,050			
								117111	*Barang Konsumsi*				455,050				
11		00501	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Koreksi Tunjangan Khusus/Kegiatan Tahun 2024	Rp 63,669,603	**Koreksi Nilai Berkurang Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar**									
								212111	*Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar*			63,669,603					
								512411	*Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)*						63,669,603		
12	Endang	00501	0100	097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	Penghentian penggunaan software yang sudah tidak digunakan	Rp 139,070,548		***Penghentian Penggunaan Software NUP 1 & 3***								
						informasikan kepada satuan kerja agar tahun anggaran 2025 segera lakukan usulan pemusnahan dan penghapusan		166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			139,070,548					
								162151	*Software*				139,070,548				
								169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			132,195,548					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				132,195,548				
								592118	*Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*					6,875,000			
								592115	*Beban Amortisasi Software*						6,875,000		
13	Endang	005	0100	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	Penghentian penggunaan software yang sudah tidak digunakan	Rp 2,145,000		***Penghentian Penggunaan Software NUP 1 & 2***								
						informasikan kepada satuan kerja agar tahun anggaran 2025 segera lakukan usulan pemusnahan dan penghapusan		166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			2,145,000					
								162151	*Software*				2,145,000				
								169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			2,145,000					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				2,145,000				
								592118	*Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*					268,125			
								592115	*Beban Amortisasi Software*						268,125		
14	Endang	005	0100	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	Penghentian penggunaan software dan aset tak berwujud lainnya yang sudah tidak digunakan	Rp 191,855,000		***Penghentian Penggunaan Software NUP 7, 9, 10, 11& 13***								
						informasikan kepada satuan kerja agar tahun anggaran 2025 segera lakukan usulan pemusnahan dan penghapusan		166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			108,015,000					
								162151	*Software*				108,015,000				
								169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			108,015,000					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				108,015,000				
								162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			83,840,000					
								391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								83,840,000
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							83,840,000	
								162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*				83,840,000				
15	Sefti	00507	0199	663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	Penghentian penggunaan software yang sudah tidak digunakan	Rp 812,277,846		***Penghentian Penggunaan Software NUP 17, 19, 20, 21, 32, 33, 34 & 35***								
						informasikan kepada satuan kerja agar tahun anggaran 2025 segera lakukan usulan pemusnahan dan penghapusan		166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			812,277,846					
						NUP 3, 25,26,27,28,29,30,31 tidak ada di history BMN sehingga dikeluarkan dari usulan koreksi		162151	*Software*				812,277,846				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
								169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			812,277,846					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				812,277,846				
16	Andi	00505	0199	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Penghentian penggunaan software dan aset tak berwujud lainnya yang sudah tidak digunakan	Rp 1,105,140,746		***Penghentian Penggunaan Software NUP 2,3,4,5,6,7,8,9,10 & 11***								
						informasikan kepada satuan kerja agar tahun anggaran 2025 segera lakukan usulan pemusnahan dan penghapusan		166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			848,092,168					
								162151	*Software*				848,092,168				
								169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			848,092,168					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				848,092,168				
									Penghentian Penggunaan Aset Tak Berwujud Lainnya NUP 4								
								166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			257,048,578					
								162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*				257,048,578				
17	Sefti	00503	0199	097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Penghentian penggunaan software yang sudah tidak digunakan	Rp2,046,367,994		***Penghentian Penggunaan Software NUP 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21,22 & 23***								
						informasikan kepada satuan kerja agar tahun anggaran 2025 segera lakukan usulan pemusnahan dan penghapusan		166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			2,046,367,994					
								162151	*Software*				2,046,367,994				
								169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			2,046,367,994					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				2,046,367,994				
18	Sam	00501	2000	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 dan 523121 yang menjadi aset belum dibukukan, serta pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan.			**Perolehan Lainnya 4 Rak Lemari Nilai Satuan 1.054.500, Pompa Air Shimizu (1 unit) Nilai Satuan 5.000.000 Perolehan Lainnya 1 Printer canon TS207 Nilai Satuan 725000,1 Storage 5 shelf rack Nilai Satuan 599900,1 Lemari besi Nilai Satuan 1.665.000,1 Canon Printer MG2570S Nilai Satuan 810000,1 Gerobak Dorong Nilai Satuan 685000**								
								132111	*Peralatan dan Mesin*			10,883,000					
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						10,883,000		
								591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					945,443			
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				945,443				
									jurnal Manual								
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					4,218,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						4,218,000		
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					5,000,000			
								523121	*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*						5,000,000		
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					1,665,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						1,665,000		
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					2,819,900			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						2,819,900		
									pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan total 540.000								

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*					540,000			
								523121	*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*						540,000		
19	Sam	00501	2000	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 523121 yang menjadi aset belum dibukukan (ekstra), serta pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan tetapi sudah digunakan			**Perolehan Lainnya 3 Webcam PC Nilai Satuan 340.000, total 1.020.000**								
									Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
															0		
									Jurnal Manual								
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					1,020,000			
								523121	*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*						1,020,000		
									pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan total 13.605.000								
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*					13,605,000			
								523121	*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*						13,605,000		
20	Andi	00501	2200	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 523111 dan 523121 yang menjadi aset belum dibukukan			**Perolehan Lainnya Exhaust kamar mandi (1 unit) Nilai Satuan 1.054.500, 1 Meja sidang Nilai Satuan 14.985.000, 1 CCTV (1 set) Nilai Satuan 9.906.750**								
								132111	*Peralatan dan Mesin*			25,946,250					
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						25,946,250		
								591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					2,594,625			
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				2,594,625				
									Jurnal Manual								
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					16,039,500			
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						16,039,500		
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					9,906,750			
								523121	*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*						9,906,750		
									Pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan berupa Plakat (22 buah) yang telah digunakan (habis pakai) namun belum dibukukan dengan nilai total 6.600.000								
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*					6,600,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						6,600,000		
21	Kukuh	00501	2100	099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan			**Perolehan Lainnya 1 Biaya Burung Garuda Nilai Satuan 1200000, 1 Biaya Pajangan Burung Garuda Nilai Satuan 1200000, 1 Biaya Pajangan Burung Garuda Nilai Satuan 1300000, 1 Biaya Pohon Sakura Untuk Dekorasi Nilai Satuan 1100000, 1 Biaya Pohon Sakura Untuk Dekorasi Nilai Satuan 1100000**								
								132111	*Peralatan dan Mesin*			5,900,000					
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						5,900,000		
								591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					590,000			
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				590,000				
									Jurnal Manual								
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					5,900,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						5,900,000		
22	Sam	00501	2000	099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 523121 dan 523111 yang menjadi aset belum dibukukan			**PM : Perolehan Lainnya 1 Exhaust fan (4 unit @Rp1,054,500) , 1 AC (1 unit) Nilai Satuan 6.105.000, total : 10.323.000** **Ekstrakomptabel PM : Perolehan Lainnya 1 Router Nilai Satuan 80.000, 1 TP Link switch Nilai Satuan 85.000 (menggunakan 523111) total 165.000, Switch port Nilai 875.000, CCTV Nilai 975.000, Sarung kursi Nilai 1.500.000, Gorden Nilai 1.850.000, Hard disk CCTV Nilai 3.100.000 total : 8.300.000 (menggunakan 523121)**								
								132111	*Peralatan dan Mesin*			10,323,000					
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						10,323,000		
								591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					727,050			
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				727,050				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
									Jurnal Manual								
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					10,323,000			
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						10,323,000		
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					1,650,000			
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						1,650,000		
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					8,328,000			
								523121	*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*						8,328,000		
23	Endang	00501	0100	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan			**Perolehan Lainnya 1 Karpet di Pintu Masuk Nilai Satuan 4106500,5 Nakas 2 Laci Nilai Satuan 331980,5 Nakas 2 Laci Nilai Satuan 332180,5 Nakas 2 Laci Nilai Satuan 331980,2 Frame Photo Nilai Satuan 650000**								
								132111	*Peralatan dan Mesin*			4,106,500					
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						4,106,500		
								591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					410,650			
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				410,650				
									Jurnal Manual								
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					4,106,500			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						4,106,500		
									Jurnal manual inputan perolehan lainnya PM Ekstrakomptabel								
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					6,280,700			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						6,280,700		
24	Sefti	00501	0200	401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan.			**pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan total 6.390.915**								
								593113	*Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan*					6,390,915			
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						6,390,915		
25	Sam	00501	2000	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521119 yang menjadi aset belum dibukukan			**Perolehan Lainnya 1 Honeywell Kamera Outdoor (CCTV) Nilai Satuan 900000,1 Kipas angin uap Nilai Satuan 981000,1 Kipas angin uap Nilai Satuan 985000,1 Teko listrik 11 liter Nilai Satuan 999000,1 Lemari kaca Nilai Satuan 999000,2 standing mirror Nilai Satuan 250000,1 mainan kuda karet Nilai Satuan 140000,3 Kipas desk fan Miyako Nilai Satuan 230000,1 Digital body weight Nilai Satuan 270000,3 Bunga plastik Nilai Satuan 150000,1 Tanaman kaktus buatan Nilai Satuan 100000,1 Meja pojok Nilai Satuan 200000,2 Karpet flooring royal single Nilai Satuan 200000,1 Mainan perosotan anak Nilai Satuan 995000,1 Papan Pengumuman Nilai Satuan 990000 dengan total 9.599.000**								
									Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
									Jurnal Manual								
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					9,599,000			
								521119	*Beban Barang Operasional Lainnya*						9,599,000		
26	Kukuh	00501	3100	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521119 yang menjadi aset belum dibukukan, serta pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan.			**Perolehan Lainnya 1 parang buaya Nilai Satuan 38000,7 Papan Etiket Tempel Nilai Satuan 47500,1 sekop pasir Nilai Satuan 69000,2 Bingkai Nilai Satuan 76356,1 parang buaya Nilai Satuan 118000,1 Fixed Fixture Nilai Satuan 207900,2 meja bulat Nilai Satuan 250000,1 lilin elektrik Nilai Satuan 295000,1 key box Nilai Satuan 306400,3 Burung Garuda Nilai Satuan 310000,1 meja kecil Nilai Satuan 325000,2 Burung Garuda Nilai Satuan 351000,1 Fixed Fixture Nilai Satuan 439900,1 Stand microphone Nilai Satuan 450000,2 tripod Nilai Satuan 500000,2 Bendera MA Nilai Satuan 500000,2 Tiang Bendera Nilai Satuan 531250,3 Bendera MA Nilai Satuan 561667,1 Stand microphone wireless Nilai Satuan 985000**								
									Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
									Jurnal Manual								
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					12,690,913			
								521119	*Beban Barang Operasional Lainnya*						12,690,913		

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
27	Sefti	00501	0200	400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan			**Perolehan Lainnya 2 Kipas Angin Nilai Satuan 1762040,3 Tanaman hias Nilai Satuan 1533000,3 Kursi Nilai Satuan 1497000,4 Tanaman hias Nilai Satuan 1111500,3 Pot Nilai Satuan 1107000,2 Kursi Nilai Satuan 998000,2 Tempat Sampah Nilai Satuan 959800,3 Kursi Nilai Satuan 841820,2 Tanaman hias Nilai Satuan 831000,1 Tanaman hias Nilai Satuan 749500,2 Pot Nilai Satuan 738000,1 Dispenser Nilai Satuan 700000,2 Cermin Toilet Nilai Satuan 700000,1 Kursi Nilai Satuan 665420,3 Kursi Nilai Satuan 645820,1 Dispenser Nilai Satuan 626193,6 Bingkai + Gambar Nilai Satuan 510000,1 Tanaman hias Nilai Satuan 505800,1 PLAKAT BOLPOIN PELANTIKAN LOGO MA Nilai Satuan 400000,2 Tanaman hias Nilai Satuan 398000,1 Storage Shelving Nilai Satuan 369900,1 Plakat Nilai Satuan 280000,1 Bunga Nilai Satuan 278000,1 Bunga Nilai Satuan 278000,1 TAPLAK MEJA Nilai Satuan 270000,1 Meja Nilai Satuan 253820,2 Coffe table Nilai Satuan 197800,2 Microphone Nilai Satuan 183280,1 Tripod Nilai Satuan 172050,1 RAK BUKU Nilai Satuan 145000,1 Struktur Organisasi Nilai Satuan 142500,1 Bunga Nilai Satuan 139000,1 Pot Nilai Satuan 99500**								
									Perolehan Aset Esktrakomptabel								
									Tidak membentuk lurnal								
									Jurnal Manual								
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					23,972,833			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						23,972,833		
28	Sefti	00501	0200	652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan, serta pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan.			**Perolehan Lainnya 2 Fleco HW-8R Megaphone Nilai Satuan 300000,1 alat otomatis pintu dekson Nilai Satuan 375000,1 Dispenser Nilai Satuan 380000,1 bunga loby atas Nilai Satuan 575000,2 pot bunga meja Nilai Satuan 590000,2 wifan Nilai Satuan 700000,1 Dispenser Nilai Satuan 750000,2 Dispenser Nilai Satuan 800000,2 Dispenser Nilai Satuan 800000,1 Dispenser Nilai Satuan 850000,1 Dispenser Nilai Satuan 850000,1 bunga ruangnan media center Nilai Satuan 910000,2 kipas angin Nilai Satuan 999900,2 wall fan Nilai Satuan 999900,2 wall fan Nilai Satuan 999900,2 wall fan Nilai Satuan 999900,1 wall fan Nilai Satuan 999900,1 tanaman/bunga ruangan Nilai Satuan 1335000,1 Tripot, USB Hub vention dan webcame jete Nilai Satuan 1745000,1 tanaman/bunga ruangan Nilai Satuan 1902000,1 lemari arsip Nilai Satuan 1980000,1 lemari arsip Nilai Satuan 1980000,1 lemari arsip Nilai Satuan 1980000,1 lemari arsip Nilai Satuan 1980000,1 steering wheel lock red Nilai**								
								132111	*Peralatan dan Mesin*			13,137,000					
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						13,137,000		
								591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					1,637,400			
								137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				1,637,400				
									Jurnal Manual								
								491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					13,137,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						13,137,000		
									pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan total 3.803.600								
								593111	*Beban Persediaan konsumsi*					3,200,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						3,200,000		
								593113	*Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan*					603,600			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						603,600		
									pencatatan jurnal manual atas pembelian aset ekstra namun belum dibukukan total 22.044.000								
								521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					22,044,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						22,044,000		
29	Sefti	00501	0200	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan.			**pencatatan jurnal manual atas pembelian persediaan yang telah digunakan namun belum dibukukan total 32.588.000**								
								593113	*Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan*					32,588,000			
								521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						32,588,000		

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
30	Sam	00501	2000	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	Belanja pemeliharaan yg seharusnya dikapitaliasasi menggunakan akun belanja 523111			**Koreksi Nilai Bertambah Gedung Bangunan**								
								133111	*Gedung dan Bangunan*			135,402,000					
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								135,402,000
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							32,200,419	
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				32,200,419				
								591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					4,914,361			
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				4,914,361				
									Jurnal Manual								
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							135,402,000	
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						135,402,000		
31	Sam	00501	2000	400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	Belanja pemeliharaan yg seharusnya dikapitaliasasi menggunakan akun belanja 523111			**Koreksi Nilai Bertambah Gedung Bangunan**								
								133111	*Gedung dan Bangunan*			43,300,000					
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								43,300,000
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				433,000				
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							433,000	
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				866,000				
								591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					866,000			
									Jurnal Manual								
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							43,300,000	
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						43,300,000		
32	Andi	00501	2200	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	Belanja pemeliharaan yg seharusnya dikapitaliasasi menggunakan akun belanja 523111			**Koreksi Nilai Bertambah Gedung Bangunan**								
								133111	*Gedung dan Bangunan*			53,284,000					
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								53,284,000
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							3,633,000	
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				3,633,000				
								591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					2,422,000			
								137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				2,422,000				
									Jurnal Manual								
								391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							53,284,000	
								523111	*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*						53,284,000		
33	Andi	00501	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Penghentian Penggunaan Software, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang sudah tidak digunakan			**Penghentian Penggunaan Software NUP 1-15, 25-44, 46-53, 55, 125, dan 128**								
							6,992,863,170	166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			6,992,863,170					
								162151	*Software*				6,992,863,170				
							6,962,025,720	169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			6,962,025,720					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				6,962,025,720				
							30,837,450	592118	*Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*					30,837,450			
								592115	*Beban Amortisasi Software*						30,837,450		
									Penghentian Penggunaan Lisensi NUP 3-14, dan 18								
							1,222,597,266	166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			1,222,597,266					
								162161	*Lisensi*				1,222,597,266				
							1,056,017,432	169316	*Akumulasi Amortisasi Lisensi*			1,056,017,432					
								169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				1,056,017,432				
							28,461,121	592118	*Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*					28,461,121			
								592116	*Beban Amortisasi Lisensi*						28,461,121		
									Penghentian Penggunaan Aset Tak Berwujud Lainnya NUP 4-5								
							269,063,955	166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			269,063,955					
								162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*				269,063,955				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	NILAI (Rp)	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
34		00501	1400	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGA	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 645,390,189	115212	Piutang Lainnya			645,390,189					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						645,390,189		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					3,226,951			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				3,226,951				
35		00501	0600	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 141,918,885.00	115212	Piutang Lainnya			141,918,885					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						141,918,885		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					709,594			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				709,594				
36		00501	0600	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 516,136,958	115212	Piutang Lainnya			516,136,958					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						516,136,958		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					2,580,685			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				2,580,685				
37		00501	1400	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 786,583,164	115212	Piutang Lainnya			596,825,349					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						596,825,349		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					2,984,127			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				2,984,127				
38		00501	1400	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 2,298,471,872	115212	Piutang Lainnya			2,152,881,218					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						2,152,881,218		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					10,764,406			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				10,764,406				
39		00501	1100	401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 163,675,674	115212	Piutang Lainnya			413,799,850					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						413,799,850		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					2,068,999			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				2,068,999				
40		00501	1100	401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	Jurkor Piutang atas LHP BPK Tahun 2024	Rp 348,071,709	115212	Piutang Lainnya			278,275,000					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						278,275,000		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					1,391,375			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				1,391,375				
41	MR	00501	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Piutang berdasarkan LHP BPK atas belanja barang pada Biro Sekretariat Pimpinan oleh PT Imageri Kreatif Indonesia	300,000,000	115212	Piutang Lainnya			300,000,000					
								425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu						300,000,000		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					1,500,000			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				1,500,000				
42	MR	00501	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Piutang berdasarkan LHP BPK atas belanja modal pada Biro Umum oleh PT Brahmakerta Adiwira	2,192,466,350	115212	Piutang Lainnya			2,192,466,350					
								425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu						2,192,466,350		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					10,962,332			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				10,962,332				
43	MR	00501	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berdasarkan LHP BPK atas kekurangan pungut PPN pada Biro	24,031,534	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			24,031,534					
								219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor				24,031,534				
44	Ignasia	00501	0500	098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	Piutang berdasarkan LHP BPK atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Gaji dan/atau Tunjangan Hakim sebesar Rp140.943.508,00, namun sudah dilakukan penyetoran sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp13.962.100,00. Sisa pengembalian belanja pegawai yang belum disetorkan sebesar Rp126.981.408,00 diakui sebagai Piutang Lainnya.	126,981,408	115212	Piutang Lainnya			126,981,408					
								425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu						126,981,408		
								594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					634,907			
								116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya				634,907				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Hendro	00501	0800	098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	Kesalahan Lebih Catat Gedung Bangunan Kantor NUP 11 - 12 senilai Rp 232.272.633	**Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor NUP 11-12**									
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							232,272,633	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				232,272,633				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			2,322,727					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						2,322,727		
						Terdapat lebih catat nilai ekstrakomptable gedung dan bangunan, akibat adanya void BAST sebesar 27.463.258, tidak berpengaruh pada beban ekstrakomptabel dikarenakan tidak terbentuk jurnal ketika melakukan transaksi koreksi pencatatan dibawah nilai kapitalisasi		**Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan (ekstrakomptable)**							
						Catatan BPK: void BAST ~ ekstrakompt apakah tidak berpengaruh pada nilai beban ekstrakomptabel (59511x)?? Penjelasan: Berpengaruh pada laporan aset ekstrakomptabel.		*Tidak membentuk jurnal*								
2	Sefti	00501	0600	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	Kesalahan pencatatan atas perjalanan dinas untuk KDP sebagai NUP baru KDP yang saat ini telah definitif menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 3 senilai 1.847.055. Seharusnya nilai perjalanan dinas tersebut menambah nilai KDP yang sudah ada sebelumnya, yang saat ini telah definitif menjadi Bangunan Gedung Kantor NUP 2.		***Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel***								
								Tidak membentuk jurnal								
								Koreksi Nilai Bertambah pada Bangunan Gedung Kantor								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			1,847,055					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								1,847,055
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					15,416			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				15,416				
								Jurnal Manual								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							1,847,055	
							595113	*Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan*						1,847,055		
3	Sefti	00507	0199	663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	Terdapat SK Penghapusan Persediaan Nomor 1622/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2024 tanggal 25 November 2024 senilai 1.928.500 belum diinput transaksi Penghapusan (Rusak/Usang) pada aplikasi SAKTI		***Penghapusan (Usang/Rusak)***								
								Tidak membentuk jurnal (hanya menambah transaksi pada Daftar Transaksi Persediaan Periode 14)								
4	Sefti	00501	1200	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	Terdapat kurang input transaksi 911-Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan dan 301-Penghapusan atas 19 NUP barang senilai 12.987.805 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1896/SEK/SK.PL1.2.3/XII/2024		**Penghentian Penggunaan Facsimile NUP 1 dan Kursi Besi Metal NUP 23**								
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*			370,337					
							132111	*Peralatan dan Mesin*				370,337				
							166112	*Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan*			370,337					
							169122	*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan*				370,337				
								Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan								
							166112	*Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan*				12,987,805				
							169122	*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan*			12,987,805					

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
								Penghapusan								
								Tidak membentuk jurnal								
5	Sam	00504	0199	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Terdapat BAST Aset Tetap Nomor 0167/SEK.PA.W10-A9/PL1.2.5/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dari Badan Peradilan Agama kepada Pengadilan Agama Subang berupa 1 unit laptop senilai 17.450.000 yang belum diinput transaksi transfer keluar pada aplikasi SAKTI periode 2024		***Transfer Keluar***							
							313211	*Transfer Keluar*							17,450,000	
							132111	*Peralatan dan Mesin*				17,450,000				
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*			2,181,250					
							313211	*Transfer Keluar*								2,181,250
6	Sefti	00501	0200	402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	Penerimaan aset tetap dari Badan Peradilan Agama berdasarkan BAST Nomor 0167/SEK.PA.W10-A9/PL1.2.5/IV/2025 tanggal 14 April 2025 berupa 1 unit laptop senilai 17.450.000 yang belum dicatat transaksi transfer masuk pada aplikasi SAKTI		***Transfer Masuk***							
							132111	*Peralatan dan Mesin*			17,450,000					
							313221	*Transfer Masuk*								17,450,000
							313221	*Transfer Masuk*							2,181,250	
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				2,181,250				
7	Sefti	00503	0199	097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Terdapat BAST Aset Tetap Nomor 377/DJU.1/SK/PL1.2.4/XII/2024 dan 377/DJU.1/SK/PL1.2.4/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 dari Badilum kepada PN Pamekasan dan PN Takalar berupa 4 unit AC Split (masing-masing satker 2 unit) yang belum diinput transaksi transfer keluar pada aplikasi SAKTI periode 2024		***Transfer Keluar***							
							313211	*Transfer Keluar*							42,979,200	
							132111	*Peralatan dan Mesin*				42,979,200				
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*			4,297,920					
							313211	*Transfer Keluar*								4,297,920
8	Endang	00501	1900	099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	Penerimaan aset tetap dari Badan Peradilan Umum berdasarkan BAST Nomor 376/DJU.1/SK/PL1.2.4/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 berupa AC Split 2 unit @ 10.744.800 yang belum dicatat transaksi transfer masuk pada aplikasi SAKTI		***Transfer Masuk***							
							132111	*Peralatan dan Mesin*			21,489,600					
							313221	*Transfer Masuk*								21,489,600
							313221	*Transfer Masuk*							2,148,960	
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				2,148,960				
9	Andhi	00501	0500	098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	Penerimaan aset tetap dari Badan Peradilan Umum berdasarkan BAST Nomor 377/DJU.1/SK/PL1.2.4/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 berupa AC Split 2 unit @ 10.744.800 yang belum dicatat transaksi transfer masuk pada aplikasi SAKTI		***Transfer Masuk***							

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
							132111	*Peralatan dan Mesin*			21,489,600					
							313221	*Transfer Masuk*								21,489,600
							313221	*Transfer Masuk*							2,148,960	
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				2,148,960				
10	Jihan	00501	1100	526728	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	- Terdapat pembangunan sarana lingkungan dan pengadaan peralatan dan mesin senilai .... berupa 2 unit gedung pos jaga, pagar permanen, bangunan rumah genset dan peratalan mesin yang masuk dalam nilai bangunan gedung kantor, sehingga akan dilakukan koreksi nilai berkurang atas bangunan gedung kantor dan input perolehan lainnya atas aset-aset yang belum tercatat.		***Koreksi Nilai Berkurang "Bangunan Gedung Kantor Permanen"***							
					dilakukan koreksi pencatatan / koreksi susulan		391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							233,345,491	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				233,345,491				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			2,333,455					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						2,333,455		
								Koreksi Susulan								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							1,084,707,294	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				1,084,707,294				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			10,847,073					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						10,847,073		
								Perolehan Lainnya Pos Jaga, Rumah Genset dan Pagar								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			1,248,567,988					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						1,248,567,988		
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					12,485,680			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				12,485,680				
								Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin								
							132111	*Peralatan dan Mesin*			133,355,844					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						133,355,844		
							591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					13,335,575			
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				13,335,575				
								Koreksi Nilai Berkurang Pos Jaga								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							63,871,047	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				63,871,047				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			638,711					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						638,711		
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					1,381,923,832			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								1,381,923,832

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
11	Sefti	00501	0200	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	Terdapat pembangunan sarana lingkungan dan pengadaan peralatan dan mesin senilai 6.709.384.615 berupa gedung pos jaga, pagar permanen, bangunan rumah genset dan peratalan mesin yang masuk dalam nilai bangunan gedung kantor, sehingga akan dilakukan koreksi nilai berkurang atas bangunan gedung kantor dan input perolehan lainnya atas aset-aset yang belum tercatat.		***Koreksi Nilai Berkurang "Bangunan Gedung Kantor Permanen"***								
						Terdapat peralatan dan mesin ekstrakomptabel berupa 30 buah exhaust fan sebesar 24.692.490	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							6,709,384,615	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				6,709,384,615				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			134,187,692					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						134,187,692		
								Perolehan Lainnya Pos Jaga, Pagar, dan Rumah Genset								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			1,472,817,219					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						1,472,817,219		
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					14,728,172			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				14,728,172				
								Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin								
							132111	*Peralatan dan Mesin*			5,211,874,906					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						5,211,874,906		
							591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					502,342,240			
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				502,342,240				
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					6,684,692,125			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								6,684,692,125
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					24,692,490			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								24,692,490
12	Sefti	00501	0200	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	Terdapat pengadaan peralatan dan mesin senilai 6.008.224.147 yang masuk dalam nilai bangunan gedung kantor, sehingga akan dilakukan koreksi nilai berkurang atas bangunan gedung kantor dan input perolehan lainnya atas aset-aset peralatan dan mesin yang belum tercatat.		***Koreksi Nilai Berkurang "Bangunan Gedung Kantor Permanen" NUP 2***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							6,008,224,147	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				6,008,224,147				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			60,082,241					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						60,082,241		
								Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin								
							132111	*Peralatan dan Mesin*			5,780,576,254					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						5,780,576,254		
							591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					564,693,340			
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				564,693,340				
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					5,780,576,254			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								5,780,576,254
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					227,647,893			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								227,647,893
								Akumulasi Amortisasi Software								
13	Endang	00501	0100	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		***Reklasifikasi Keluar***								
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			5,940,000					
							162151	*Software*				5,940,000				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							11,550,000	
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								11,550,000
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			5,940,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								5,940,000
14	Eka	00501	0300	401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Penggunaan Kembali**								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							2,500,000	
							166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				2,500,000				
							169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			2,500,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								2,500,000
							162151	*Software*			2,500,000					
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								2,500,000
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							2,500,000	
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*				2,500,000				
								Reklasifikasi Keluar								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							2,500,000	
							162151	*Software*				2,500,000				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			2,500,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								2,500,000
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			2,500,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								2,500,000
								Penghentian Penggunaan								
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							2,500,000	
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*				2,500,000				
							166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			2,500,000					
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								2,500,000
15	Eka	00501	0300	401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Penggunaan Kembali**								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							2,500,000	
							166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				2,500,000				
							169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			2,500,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								2,500,000
							162151	*Software*			2,500,000					
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								2,500,000
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							2,500,000	
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*				2,500,000				
								Reklasifikasi Keluar								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							2,500,000	
							162151	*Software*				2,500,000				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			2,500,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								2,500,000

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			2,500,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								2,500,000
								Penghentian Penggunaan								
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							2,500,000	
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*				2,500,000				
							166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			2,500,000					
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								2,500,000
16	Hendro	00501	0900	477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Reklasifikasi Keluar**								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							24,200,000	
							162151	*Software*				24,200,000				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			24,200,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								24,200,000
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			24,200,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								24,200,000
17	Jihan	00501	1100	672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Reklasifikasi Keluar**								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							23,015,000	
							162151	*Software*				23,015,000				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			23,015,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								23,015,000
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			23,015,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								23,015,000
18	Jihan	00501	1400	099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Reklasifikasi Keluar**								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							12,181,829	
							162151	*Software*				12,181,829				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			12,181,829					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								12,181,829
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			12,181,829					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								12,181,829
19	Jihan	00501	1400	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		***Penggunaan Kembali***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							16,361,625	
							166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*				16,361,625				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
							169318	*Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			16,361,625					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								16,361,625
							162151	*Software*			16,361,625					
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								16,361,625
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							16,361,625	
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*				16,361,625				
								Reklasifikasi Keluar								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							16,361,625	
							162151	*Software*				16,361,625				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			16,361,625					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								16,361,625
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			16,361,625					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								16,361,625
								Penghentian Aset dari Penggunaan								
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*							16,361,625	
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*				16,361,625				
							166113	*Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan*			16,361,625					
							391118	*Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi*								16,361,625
20	Jihan	00501	1400	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Reklasifikasi Keluar**								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset*							3,392,000	
							162151	*Software*				3,392,000				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			3,392,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset*								3,392,000
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			3,392,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset*								3,392,000
21	Hendro	00501	1800	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	Terdapat Aset Tak Berwujud berupa website yang dicatat sebagai software		**Reklasifikasi Keluar**								
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*							3,850,000	
							162151	*Software*				3,850,000				
							169315	*Akumulasi Amortisasi Software*			3,850,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								3,850,000
								Reklasifikasi Masuk								
							162191	*Aset Tak Berwujud Lainnya*			3,850,000					
							391151	*Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya*								3,850,000
22	Endang	00501	1900	099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	Terdapat kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA		***Koreksi Nilai Berkurang KDP***								
					seluruh KDP selesai pada Januari 2025	Sudah ditambahkan BAPP 31 Desember 2024 pembobotan item perencanaan dicek ke dok pembayarannya 65% atau 85%?	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							721,489,081	

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
						Sudah disesuaikan 65% untuk nilai koreksi perencanaan	136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*				721,489,081				
								Jurnal Manual								
							212191	*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*			721,489,081					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								721,489,081
23	Hendro	00501	1800	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	Terdapat kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA 3.9784.000		***koreksi pencatatan untuk pembangunan pagar permanen, selesai pada Desember 2024 senilai 1.015.954.289***								
					1.015.954.289 untuk pembangunan pagar selesai pada 7 Januari 2025	harusnya dikembalikan lagi menjadi KDP atas seluruh pekerjaan yg belum selesai per 31 Des 2024?	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							1,015,954,289	
					208.240.000 untuk pembangunan halaman, selesai pada Desember 2024	untuk 208.240.000 sudah tercatat sebagai taman permanen NUP 1	133111	*Gedung dan Bangunan*				1,015,954,289				
						Tambahkan BAST 31 Desember 2024 dan Surat Keterangan bahwa pembangunan halaman senilai 208.240.000 telah selesai										
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			10,159,543					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						10,159,543		
								perolehan lainnya KDP senilai 976.170.289								
							136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*			976,170,289					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						976,170,289		
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					976,170,289			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								976,170,289
								Jurnal Manual								
							212191	*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*			39,784,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								39,784,000
24	Sefti	00501	0600	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	Terdapat kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA		***Koreksi Nilai Berkurang KDP***								
					Seluruh pekerjaan selesai pada 24 Maret 2025		391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							895,202,340	
					Terhadap pematangan lahan akan definitif menambah nilai tanah NUP 3 pada tahun 2025		136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*				895,202,340				
						Tambahkan BAST 31 Desember 2024										
						sudah ditambahkan BAST 31 Desember 2024										
								Jurnal Manual								
							212191	*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*			895,202,340					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								895,202,340
25	Jihan	00501	2600	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	Terdapat kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA		***Koreksi Nilai Berkurang KDP (Lebih Catat RPATA)***								
					Interior selesai pada tahun 2024 senilai .... ditambah PPN 11%	akan definitif menambah nilai bangunan gedung kantor pada periode audited 2024	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							440,889,152	
					Pembangunan lainnya selesai pada Januari 2025		136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*				440,889,152				
						Tambahkan BAST 31 Desember 2024 dan Surat Keterangan bahwa aset berupa interior telah digunakan pada tahun 2024		***Koreksi Nilai Berkurang KDP (Penyelesaian Pekerjaan Interior)***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							512,167,888	
							136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*				512,167,888				
								Koreksi Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			512,167,888					

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								512,167,888
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							5,121,679	
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				5,121,679				
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					10,243,358			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				10,243,358				
								Jurnal Manual								
							212191	*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*			440,889,152					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								440,889,152
26	Eka	00501	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	Terdapat kesalahan pencatatan berupa lebih catat atas aset yang terbentuk dari transaksi RPATA		***Koreksi Nilai Berkurang KDP***								
					Gedung BAST tanggal 31 Januari 2025		391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							1,466,020,266	
					Sarana Lingkungan BAST Maret 2025		136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*				1,466,020,266				
					Peralatan mesin AC, CCTV dll sudah terpasang pada tahun 2024 (rincian aset PM yang akan dipisahkan)											
						Tambahkan BAST 31 Desember 2024 dan Surat Keterangan bahwa terdapat pembelian aset berupa peralatan mesin serta rincian asetnya		***Jurnal Manual***								
							212191	*Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya*			1,466,020,266					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								1,466,020,266
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							227,665,139	
							212191	*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*				227,665,139				
27	Eka	00501	1500	663232	PENGADILAN MILITER I 06 DI BANJARMASIN	Terdapat pengadaan peralatan dan mesin senilai 190.682.840 yang masuk dalam nilai bangunan gedung kantor, sehingga akan dilakukan koreksi nilai berkurang atas bangunan gedung kantor dan input perolehan lainnya atas aset-aset peralatan dan mesin yang belum tercatat.		***Koreksi Nilai Berkurang "Bangunan Gedung Kantor Permanen"***								
						perbaiki dokumen sumber pada nilai bangunan gedung nup 1 (4.128.765.000 - 190.682.840)	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							190,682,840	
						(sudah diuload dokumen terbaru)	133111	*Gedung dan Bangunan*				190,682,840				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			27,240,406					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								27,240,406
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			4,190,832					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						4,190,832		
								Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin								
							132111	*Peralatan dan Mesin*			182,782,840					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						182,782,840		
							591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					18,929,834			
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				18,929,834				
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					182,782,840			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								182,782,840
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					7,900,000			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								7,900,000

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
28	Kukuh	00501	2100	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Terdapat kurang catat aset atas progres RPATA tahun 2024		***Perolehan Lainnya KDP***								
					Pekerjaan lanjutan pagar, pos jaga, dan interior	Tambahkan BAST 31 Desember 2024	136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*			612,853,436					
					BAST Tanggal 14 Januari 2025		491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						612,853,436		
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					612,853,436			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								612,853,436
								Jurnal Manual								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							612,853,436	
							212191	*Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*				612,853,436				
29	Endang	00501	1900	099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	Terdapat penambahan daya listrik sebesar 50.557.000 yang tercatat sebagai NUP baru Bangunan Gedung Kantor Permanen, sehingga dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor NUP 1		***Koreksi Pencatatan "Bangunan Gedung Kantor Permanen" NUP 3***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							50,557,000	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				50,557,000				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			505,570					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						505,570		
								Koreksi Nilai Bertambah pada Bangunan Gedung Kantor NUP 1								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			50,557,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								50,557,000
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							8,015,135	
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				8,015,135				
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					1,233,098			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				1,233,098				
30	Eka	00501	1000	402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	satuan kerja mencatat baru Bangunan Rumah Genset yang seharusnya menambah nilai gedung kantor permanen		***Koreksi Pencatatan Bangunan Rumah Genset***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							50,000,000	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				50,000,000				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			500,000					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						500,000		
								Koreksi Nilai Bertambah"Bangunan Gedung Kantor Permanen Nup 2"								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			50,000,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								50,000,000
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							7,228,917	
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				7,228,917				
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					1,204,820			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				1,204,820				
31	Eka	00501	0300	097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	Terdapat lebih catat NUP Gedung akibat renovasi jaringan listrik yang seharusnya menambah nilai gedung utama		***Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 7***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							149,700,000	
							133111	*Gedung dan Bangunan*				149,700,000				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			1,497,000					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						1,497,000		
								Koreksi Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			149,700,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								149,700,000
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							30,972,415	
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				30,972,415				
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					5,162,069			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				5,162,069				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
32	Eka	00501	0300	097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	Terdapat lebih catat NUP Gedung akibat hibah renovasi PTSP yang seharusnya menambah nilai gedung utama		***Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 4 & 5***								
						tambahkan dokumen BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) dan rincian barangnya	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							573,902,580	
						(sudah diuload dokumen terbaru)	133111	*Gedung dan Bangunan*				573,902,580				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			5,739,026					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						5,739,026		
								Koreksi Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			548,613,180					
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				548,613,180				
								Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin								
							132111	*Peralatan dan Mesin*			25,289,400					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						25,289,400		
							591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					2,528,940			
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				2,528,940				
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					25,289,400			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								25,289,400
33	Eka	00501	0300	400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	Terdapat lebih catat NUP Gedung akibatpenambahan sarana disabilitas yang seharusnya menambah nilai gedung utama		***Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6***								
						Tambahkan dokumen SPM yang menerangan angka 30.000.000	391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							30,000,000	
						(sudah diuload dokumen terbaru)	133111	*Gedung dan Bangunan*				30,000,000				
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			900,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								900,000
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*			600,000					
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*						600,000		
								Koreksi Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			30,000,000					
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								30,000,000
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							10,285,713	
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				10,285,713				
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					1,714,285			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				1,714,285				
34	Eka	00501	1300	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	Terdapat pembangunan sarana lingkungan dan pengadaan peralatan dan mesin senilai 2.993.955.200 berupa gedung pos jaga, pagar permanen, bangunan rumah genset dan peratalan mesin yang masuk dalam nilai KDP, sehingga akan dilakukan koreksi nilai berkurang atas KDP dan input perolehan lainnya atas aset-aset yang belum tercatat.		***Koreksi Nilai Berkurang KDP Nup 1***								
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*							2,988,643,653	
							136111	*Konstruksi Dalam pengerjaan*				2,988,643,653				
								Perolehan Lainnya Pos Jaga, Pagar, dan Rumah								
							133111	*Gedung dan Bangunan*			1,269,375,670					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						1,269,375,670		
							591211	*Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan*					12,693,757			
							137211	*Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan*				12,693,757				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
ASET

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
								Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin								
							132111	*Peralatan dan Mesin*			1,648,929,436					
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*						1,648,929,436		
							591111	*Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin*					152,062,671			
							137111	*Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin*				152,062,671				
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					70,338,547			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								70,338,547
								Jurnal Manual								
							491429	*Pendapatan Perolehan Aset Lainnya*					2,918,305,106			
							391116	*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*								2,918,305,106
35	Jihan	00501	1400	670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	Terdapat pemakaian 2024 yg blm dicatat di persediaan	593111	*Beban Persediaan konsumsi*					585,000			
							117111	*Barang Konsumsi*				585,000				

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
SALAH PEMBEBANAN ANGGARAN

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Sam	00501	2000	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 1 Standing Misty Fan 75 w Black Nilai Satuan 980900,1 Karpet Nilai Satuan 780000**								
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					1,760,900			
							521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						1,760,900		
2	Sam	00501	2000	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 6 Cermin Nilai Satuan 180000**								
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					1,080,000			
							521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						1,080,000		
3	Sam	00501	2000	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 1 Printer canon TS207 Nilai Satuan 725000,1 Storage 5 shelf rack Nilai Satuan 599900,2 Lemari rak kecil Nilai Satuan 832500,1 Canon Printer MG2570S Nilai Satuan 810000,1 Gerobak Dorong Nilai Satuan 685000**								
						pindah ke sheet usulan BPK, digabung										
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					0			
							521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						0		
4	Sam	00501	2000	099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 18 Gorden 18 lubang Nilai Satuan 250000,12 Gorden 12 lubang Nilai Satuan 160000,4 Gorden 4 lubang Nilai Satuan 205000,2 HT Nilai Satuan 900000,4 HT Nilai Satuan 900000,2 HT Nilai Satuan 900000,2 Kursi Nilai Satuan 850000,1 Printer Nilai Satuan 950000,1 Kursi Nilai Satuan 850000,15 Sarung kursi Nilai Satuan 90000,20 Sarung kursi Nilai Satuan 90000,1 Rempel Meja Nilai Satuan 350000,1 Printer Nilai Satuan 950000,1 CCTV (dahua) Nilai Satuan 600000,1 CCTV (ezviz+micro SD) Nilai Satuan 670000,1 Webcam Nilai Satuan 375000,1 Tangga Nilai Satuan 809550,1 Kipas angin Nilai Satuan 843900,10 Gorden 10 lubang Nilai Satuan 150000,25 Sarung kursi Nilai Satuan 75000,1 Wet n dry vacuum cleaner Nilai Satuan 879900,1 Smart vacuum cleaner Nilai Satuan 649000,4 Kursi Nilai Satuan 329000,8 Bosara Nilai Satuan 150000,25 Sarung kursi Nilai Satuan 75000,1 File cabinet Nilai Satuan 519600,6 Gorden Nilai Satuan 100000,1 Karpet Nilai Satuan 200000,3 Gorden Nilai Satuan 80000**								
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					36,542,950			
							521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						36,542,950		

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)
SALAH PEMBEBANAN ANGGARAN

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
									Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
5	Andi	00501	2200	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 4 Cermin Wastafel Nilai Satuan 220000,1 Dispenser Miyako 389 Nilai Satuan 880000,1 Cover Galon Nilai Satuan 120000,1 Speaker Cst 6000 Nilai Satuan 860000,1 Foto Presiden ukuran 20R Nilai Satuan 450000,1 Foto Wakil Presiden ukuran 20R Nilai Satuan 450000,1 Akrilik PTSP (set) Nilai Satuan 220000,2 Akrilik Jadwal Pelayanan Nilai Satuan 330000,1 Pigura Costum ukuran 44 x 48 cm Nilai Satuan 440000,1 Akrilik Tanda Istirahat Nilai Satuan 75000,2 Tempat Brosur Akrilik Nilai Satuan 70000**								
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					5,175,000			
							521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						5,175,000		
6	Endang	00501	1900	307534	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 1 Pembayaran Biaya Pembelian Dispenser Miyako Untuk Keperluan Kantor Di Ruang Pelayanan Ptsp Di Toko Prima Abadi Jaya Nilai Satuan 190000,1 Pembayaran Biaya Pembelian Rak Dispenser Ruang Wakil Ketua Untuk Keperluan Kantor Lainnya Di Tok Surya Utama Nilai Satuan 125000,1 Pembayaran Biaya Pembelian Rak Dispenser Untuk Ruang Panitera Di Toko Surya Utama Nilai Satuan 125000,1 Pembayaran Biaya Pembelian Dispenser Untuk Ruang Hakim Di Stand Elsa Nilai Satuan 210000**								
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					650,000			
							521111	*Beban Keperluan Perkantoran*						650,000		
7	Jihan	00501	2600	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	Terdapat kesalahan dalam pembebanan anggaran pada MAK 521111 yang menjadi aset belum dibukukan		**Perolehan Lainnya 1 BELANJA POMPA AIR, SOK PVC, LEM PIPA DAN ISOLATIP KANTOR Nilai Satuan 775000, 1 PEMBAYARAN BIAYA PEMBELIAN POMPA AIR UNTUK DISTRIBUSI AIR TANDON LANTAI 2 DI TOKO PELITA JAYA Nilai Satuan 721000**								
								Tidak terbentuk jurnal karena ekstrakomptabel								
								Jurnal Manual								
							521252	*Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel*					1,496,000			
							521119	*Beban Barang Operasional Lainnya*						1,496,000		

USULAN KOREKSI BPK PERIODE 14 (AUDITED)

No	Pembina	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Uraian	Reff.	Kode Akun	Jurnal	LRA		Neraca		LO		LPE	
										Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Ignasia	00501	0500	401441	PENGADILAN AGAMA BANGIL	Koreksi atas kesalahan jurnal akrual yang seharusnya merupakan akrual Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar namun pada periode 13 tercatat sebagai Belanja Barang Dibayar Dimuka dan koreksi atas beban langganan air yang dicatat dalam aplikasi SAKTI sebagai Belanja Langganan Air		522113	Beban Langganan Air					927,580			
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				927,580				
								522113	Beban Langganan Air					927,580			
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				927,580				
2	Ika	00501	1200	663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	Kesalahan pembebanan akun pada jurnal akrual belanja Tunjangan pejabat negara		212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar			17,900,000					
								511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara						17,900,000		
								511124	Beban Tunj. Fungsional PNS					17,900,000			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				17,900,000				
						Kesalahan pembebanan akun pada jurnal akrual PPh tunjangan pejabat negara		212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar			809,612					
								511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara						809,612		
								511125	Beban Tunj. PPh PNS					809,612			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				809,612				
						double pencatatan jurnal akrual atas tagihan telepon		212112	Belanja barang yang masih harus dibayar			114,000					
								522112	Beban Langganan Telepon						114,000		
						Kesalahan pencatatan jurnal akrual prepaid		521111	Beban Keperluan Perkantoran					374,625			
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				374,625				
3	Ika	00501	0600	098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	Kesalahan pembebanan akun pada jurnal akrual PPh tunjangan pejabat negara		212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar			575,448					
								511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara						575,448		
								511125	Beban Tunj. PPh PNS					575,448			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				575,448				
4	Fita	00501	0200	400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	Koreksi atas double catat jurnal akrual atas tagihan air yang dicatat sebagai belanja yang masih harus dibayar dan belanja di bayar dimuka, sehingga untuk		521111	Beban Keperluan Perkantoran					2,534,300			
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				2,534,300				
5	Syafar	00501	2900	097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	Kurang catat belanja barang yang masih harus dibayar berupa Langganan Telepon		522112	Beban Langganan Telepon					766,800			
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				766,800				

6	Egla	00501	1700	401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	Lebih catat Belanja Dibayar Dimuka atas pembayaran Web Hosting dan Domain.		522141	Beban Sewa					146,166				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				146,166					
7	Egla	00501	1900	401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	Kesalahan pembebanan akun atas pembayaran Web Hosting yang direalisasikan menggunakan akun 521119.		521111	Beban Keperluan Perkantoran					124,875				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				124,875					
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			124,875						
								521119	Beban Barang Operasional Lainnya						124,875			
								522141	Beban Sewa					277,500				
								521119	Beban Barang Operasional Lainnya						277,500			
								521119	Beban Barang Operasional Lainnya					124,875				
								522141	Beban Sewa						124,875			
8	Egla	00501	1900	632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	Lebih catat Belanja Dibayar Dimuka atas pembayaran Web Hosting selama 1 tahun dimulai 12 Juli 2024 - 11 Juli 2025 sebesar Rp960.000.		522141	Beban Sewa					481,833				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				481,833					
9	Fadhli	00501	0900	400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	Koreksi kurang catat Belanja Barang yang masih harus dibayar atas langganan internet dan lisensi video	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					3,000				
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				3,000					
						Koreksi kurang catat Belanja Barang yang masih harus dibayar atas	Akrual	522112	Beban Langganan Telepon					9,000				
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				9,000					
10	Fadhli	00501	1800	099375	PENGADILAN NEGERI PALU	Koreksi kurang catat Belanja Pegawai yang masih harus dibayar atas uang makan PNS bulan Desember 2024.	Akrual	511129	Beban Uang Makan PNS					3,410,000				
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				3,410,000					
11	Fadhli	00501	2300	307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas langganan web hosting selama 1 tahun dari bulan Agustus 2024 s.d. Juli 2025.	Akrual	522141	Beban Sewa					40				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				40					
						Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas langganan video conference selama 1 tahun dari bulan November	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					3				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				3					
12	Egla	00501	3400	526710	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	Koreksi kesalahan pembebanan yang seharusnya menggunakan akun 521111 dan koreksi lebih catat Belanja Dibayar Dimuka atas Zoom sebesar Rp4 karena pembulatan.		522141	Beban Sewa					1,211,607				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				1,211,607					
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			1,211,603						
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1,211,603			
						Koreksi lebih catat Belanja Dibayar Dimuka atas Domain sebesar Rp7 karena pembulatan.		522141	Beban Sewa					7				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				7					
13	Fita	00501	0200	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	Koreksi kurang catat atas Belanja Dibayar Dimuka atas Domain, Hosting, dan Video Conference		114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			3						
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1			
								522141	Beban Sewa						2			

14	Fita	00501	0200	097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	Koreksi kurang catat atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Gaji)		511111	Beban Gaji Pokok PNS					111,800			
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS					11,180			
								511122	Beban Tunj. Anak PNS					2,236			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				125,216				
15	Fita	00503	0199	097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Koreksi kurang catat atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Gaji)		511119	Beban Pembulatan Gaji PNS					585			
								511124	Beban Tunj. Fungsional PNS					16,856,000			
								511125	Beban Tunj. PPh PNS					315,369			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				17,171,954				
						Koreksi kurang catat atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan		524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa					4,566,858			
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				4,566,858				
						Jurnal Koreksi SPM dari beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					89,647,660			
								524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa						89,647,660		
16	Nugroho	00504	1700	401998	PENGADILAN AGAMA BOROKO	Koreksi kesalahan pencatatan atas saldo rekening koran RPL melalui modul bendahara penerimaan		212192	Dana Pihak Ketiga			6,682,000					
								111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan				6,682,000				
17	Fita	00501	0200	400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	Koreksi kurang catat atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Gaji TA 2024)		511111	Beban Gaji Pokok PNS					1,435,000			
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS					143,500			
								511122	Beban Tunj. Anak PNS					57,400			
								511119	Beban Pembulatan Gaji PNS					100			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				1,636,000				
						Koreksi kurang catat atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Gaji TA 2023)		391119	Koreksi Lainnya							1,081,874	
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				1,081,874				
18	Egla	00501	1900	099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	Koreksi lebih catat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar yang merupakan pembayaran kekurangan gaji Gaji Januari 2025.		212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar			231,291					
								511111	Beban Gaji Pokok PNS						220,300		
								511119	Beban Pembulatan Gaji PNS						91		
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS						10,900		
19	Egla	00501	1900	099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	Koreksi kurang catat atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Langganan Pos) karena nilai yang		521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					2,000			
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				2,000				
20	Ignasia	00501	2200	402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	Koreksi kurang catat akrual Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan gaji pegawai Tahun 2023 yang di bayarkan di Tahun 2025 namun		391119	Koreksi Lainnya							1,175,472	
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				1,175,472				
						Koreksi kurang catat akrual Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan gaji pegawai Tahun 2024 yang di bayarkan di Tahun 2025)		511111	Beban Gaji Pokok PNS					1,446,900			
								511119	Beban Pembulatan Gaji PNS					36			
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS					144,690			
								511122	Beban Tunj. Anak PNS					57,876			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				1,649,502				

21	Hoiril	00501	0800	401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	Koreksi atas kesalahan penggunaan akun sewa dibayar dimuka atas lisensi zoom meeting		522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya					1,957,994			
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				1,957,994				
						Koreksi antar beban atas realisasi pembayaran lisensi zoom meeting		521111	Beban Keperluan Perkantoran					2,610,659			
								522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya						2,610,659		
						Perbaikan pencatatan akrual belanja dibayar dimuka atas lisensi zoom meeting		114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			1,957,994					
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1,957,994		
22	Ika	00501	0400	547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	Kesalahan pembebanan akun pada jurnal akrual sewa vps cctv		523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					549,450			
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				549,450				
						Koreksi antar beban atas realisasi pembayaran sewa vps cctv		522141	Beban Sewa					2,197,800			
								523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						2,197,800		
						Perbaikan jurnal akrual sewa vps cctv		114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			549,450					
								522141	Beban Sewa						549,450		
23	Fadhli	00501	2300	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	Koreksi kurang catat Belanja dibayar dimuka atas langganan web hosting selama 1 tahun dari bulan Agustus 2024	Akrual	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			4					
								522141	Beban Sewa						4		
						Koreksi kurang catat Belanja dibayar dimuka atas langganan video conference selama 1 tahun dari bulan Maret 2024	Akrual	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			1					
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1		
24	Fadhli	00501	1800	604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	Kekurangan pembayaran tunjangan fungsional PNS bulan November s.d. Desember 2024 untuk satu orang PNS yang dibayarkan pada bulan Maret 2025.	Akrual	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS					120,000			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				120,000				
25	MR	00501	1300	670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	Koreksi kurang catat Belanja dibayar dimuka atas langganan video conference (zoom) Januari s.d. Juli 2025.	Akrual	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			1,615,118					
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1,615,118		
26	MR	00501	1500	402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	Koreksi kurang catat atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Tunjangan Kemahalan Hakim) Tahun 2024	Akrual	511125	Beban Tunj. PPh PNS					484,465			
								511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim					1,350,000			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				1,834,465				
27	MR	00501	1500	663232	PENGADILAN MILITER I 06 DI BANJARMASIN	Koreksi kurang catat Belanja Barang yang masih harus dibayar atas langganan telepon bulan Desember 2024.	Akrual	522112	Beban Langganan Telepon					531,750			
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				531,750				

28	MR	00501	3500	526720	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas sewa gedung dikarenakan kelebihan input jumlah nominal pembulatan	Akrual	522141	Beban Sewa					333				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				333					
29	Egla	00501	1700	401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas sewa Web Hosting dan Zoom	Akrual	522141	Beban Sewa					1,471,350				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				1,471,350					
30	Egla	00501	1700	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas sewa Web Hosting dan Zoom	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					2,750,000				
								522141	Beban Sewa					1,583,333				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				4,333,333					
31	Egla	00501	1700	531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas sewa Web Hosting periode 11 Juli 2024 - 10 Januari 2025 (6 bulan).	Akrual	522141	Beban Sewa					750,000				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				750,000					
32	Egla	00501	1700	099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	Koreksi kurang catat atas kesalahan perhitungan belanja dibayar dimuka atas sewa Zoom dan kesalahan realisasi belanja menggunakan akun 522141.	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					1,387,500				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				1,387,500					
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)			1,618,750						
								522141	Beban Sewa						1,618,750			
								521111	Beban Keperluan Perkantoran					2,775,000				
								522141	Beban Sewa						2,775,000			
								522141	Beban Sewa					1,618,750				
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1,618,750			
33	Ignasia	00501	2200	402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	Koreksi lebih catat Belanja dibayar dimuka atas sewa Web Hosting	Akrual	522141	Beban Sewa					3				
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				3					
34	Siti	00501	1100	672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	Koreksi Kesalahn Jurnal Akrual Uang Makan	Akrual	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar			11,699,000						
								511129	Beban Uang Makan PNS						11,699,000			
						Perbaikan Jurnal Akrual Uang Makan		511129	Beban Uang Makan PNS					14,696,000				
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				14,696,000					
35	Siti	00501	1100	402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	Koreksi Kesalahan Pembebanan Akun	Akrual	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar			4,492,000						
								522113	Beban Langganan Air						4,492,000			
						Perbaikan Jurnal Akrual Uang Makan		511129	Belanja Uang Makan					4,492,000				
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				4,492,000					
36	Siti	00501	1400	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	Koreksi Kesalahn Jurnal Akrual Uang Makan	Akrual	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar			1,036,000						
								511628	Belanja Uang Makan PPPK						1,036,000			
						Perbaikan Jurnal Akrual Uang Makan		511628	Belanja Uang Makan PPPK					1,036,000				

								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				1,036,000						
37	Hoiril	00501	0800	098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	Jurnal Koreksi SPM dari beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat menjadi beban Langganan Telepon	Akrual	522112	Beban Langganan Telepon					84,085					
								521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat						84,085				
38	Hoiril	00501	0800	400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	Jurnal Koreksi SPM dari bebanPemeliharaan Peralatan dan Mesin menjadi beban Keperluan Perkantoran	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					1,119,000					
								523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						1,119,000				
39	Hoiril	00501	3000	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat menjadi beban Keperluan Perkantoran	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					420,000					
								521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat						420,000				
40	Hoiril	00501	0800	401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	Jurnal Koreksi SPM dari beban Pemeliharaan Gedung Bangunan menjadi beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin No SPM 00046T	Akrual	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2,000,000					
								523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan						2,000,000				
41	Hoiril	00501	0800	401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	Jurnal Koreksi SPM dari beban Keperluan Perkantoran menjadi beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Akrual	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					75,000					
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						75,000				
42	Hoiril	00501	0800	402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Keperluan Perkantoran menjadi beban Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Akrual	593111	Beban Persediaan konsumsi					1,006,000					
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						1,006,000				
43	Hoiril	00501	0800	402035	PENGADILAN AGAMA TALU	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Keperluan Perkantoran menjadi beban Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Akrual	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan					778,300					
								521111	Beban Keperluan Perkantoran						778,300				
44	Ika	00501	0600	401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	Jurnal Koreksi Ralat Akun SPM	Akrual	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya					150,000					
								523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						150,000				
45	Ika	00501	0600	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	Jurnal akrual kekurangan gaji Tahun 2024		511111	Beban Gaji Pokok PNS					3,104,400					
								511119	Beban Pembulatan Gaji PNS					105					
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS					310,440					
								511122	Beban Tunj. Anak PNS					36,218					
								511124	Beban Tunj. Fungsional PNS					15,400,000					
								511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara					6,886,589					
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				25,737,752						
						Koreksi kesalahan jurnal akrual kekurangan gaji Tahun 2024 (akun belanja tunjangan PPh Pejabat Negara)		212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar			6,886,589							
								511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara						6,886,589				

						Jurnal akrual kekurangan gaji Tahun 2024 (akun belanja tunjangan PPh Pejabat Negara)		511125	Beban Tunj. PPh PNS					6,886,589			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				6,886,589				
46	MR	00501	0300	097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	Jurnal koreksi SPM dari Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang tercatat ganda pada periode 08 dan 13	Akrual	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa					300,000			
								523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						300,000		
47	Fadhli	00501	1800	604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	Koreksi kurang catat Belanja Pegawai yang masih harus dibayar atas gaji dan tunjangan untuk satu orang PNS dari bulan Februari 2023 s.d. Desember 2023 (SPM Nomor 00044A tanggal 17 Maret	Akrual	391119	Koreksi Lainnya							2,044,433	
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				2,044,433				
						Koreksi kurang catat Belanja Pegawai yang masih harus dibayar atas gaji dan tunjangan untuk satu orang PNS dari bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024 (SPM Nomor 00044A tanggal 17 Maret 2025)	Akrual	511111	Beban Gaji Pokok PNS					1,537,200			
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS					153,720			
								511122	Beban Tunj. Anak PNS					61,488			
								511125	Beban Tunj. PPh PNS					477,883			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				2,230,291				
48	Fita	00501	0200	097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	Koreksi atas kelebihan jurnal balik akrual atas tagihan air	Akrual	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya					552,850			
								522113	Beban Langganan Air						552,850		
49	Siti	00501	2600	400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	Koreksi atas kelebihan jurnal balik akrual	Akrual	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					313,000			
						523121		521111	Beban Keperluan Perkantoran						313,000		
50	Ika	00501	0400	400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	Jurnal akrual kekurangan gaji Tahun 2024		511111	Beban Gaji Pokok PNS					186,700			
								511119	Beban Pembulatan Gaji PNS					60			
								511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS					18,670			
								511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara					26,706			
								212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar				232,136				
51	Fita	00503	1700	099341	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	Jurnal Koreksi SPM dari beban Perjalanan Dinas Dalam Kota menjadi beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					142,500			
								524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota						142,500		
52	Fita	00503	0600	099178	PENGADILAN NEGERI LANGSA	Jurnal balik atas jurnal koreksi spm yang membentuk persediaan		593111	Beban Persediaan konsumsi					1,500,000			
								521211	Beban Bahan						1,500,000		
53	Fita	00503	2000	099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	Jurnal balik atas jurnal koreksi spm yang membentuk persediaan		593111	Beban Persediaan konsumsi					2,400,000			
								524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota						2,400,000		
54	Syafar	00501	2500	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa menjadi beban Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					7,200,000			
								524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa						7,200,000		
55	Syafar	00501	2500	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa menjadi beban Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					2,240,000			

								524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa						2,240,000		
56	Syafar	00501	2500	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa menjadi beban Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					177,926,606			
								524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa						177,926,606		
57	Nugroho	00504	0199	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Jurnal Koreksi SPM dari Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa menjadi beban Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota					2,129,600			
								524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa						2,129,600		
58	Nugroho	00504	0800	401979	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	Jurnal Koreksi SPM dari beban Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota menjadi Beban Persediaan Konsumsi		593111	Beban Persediaan konsumsi					400,000			
								524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota						400,000		
59	Nugroho	00504	0200	690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	Kesalahan melakukan Jurnal Koreksi SPM dari beban Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota menjadi Beban Jasa Konsultan. Seharusnya tidak perlu melakukan jurnal karena pembayaran dengan LS. Sudah dilakukan penghapusan Jurnal dgn melakukan jurnal balik di SAKTI		524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota					1,995,000			
								522131	Beban Jasa Konsultan						1,995,000		
60	Ignasia	00505	0199	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Koreksi atas pembatalan jurnal akrual Belanja barang yang masih harus dibayar atas perjalan dinas untuk mutasi pegawai tahun 2024 namun SK terbit di bulan Desember Tahun 2024.	Akrual	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar			248,640,000					
								524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa						248,640,000		
61	Ignasia	00501	0500	626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	Jurnal Koreksi kelebihan catat nilai sebesar Rp50.000,00 atas jurnal Ralat SPM yang dicatat pada periode Unaudited sebesar Rp100.000,00.	Akrual	521119	Beban Barang Operasional Lainnya					50,000			
								523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						50,000		
62	Ignasia	00501	0500	401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	Jurnal atas kesalahan penyajian akrual belanja lisensi ZM untuk 1 tahun yang dibayarkan dengan KKP, karena pembayaran tagihan KKP di Tahun Anggaran 2025 maka tidak diakui sebagai Belanja Barang Dibayar Dimuka namun diakui sebagai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar.	Akrual	521111	Beban Keperluan Perkantoran					2,345,086			
								114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)				2,345,086				
								521111	Beban Keperluan Perkantoran					2,814,103			
								212112	Belanja barang yang masih harus dibayar				2,814,103				
63	Ignasia	00501	2200	099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	Jurnal koreksi antar beban atas Ralat SPM semula menggunakan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya menjadi Beban Langganan Air.	Akrual	522113	Beban Langganan Air					484,000			
								523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya						484,000		

64	Syafar	00501	2100	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	Kesalahan Penyetoran Akun Sewa Kantin sehingga dilakukan ralat ke KPPN dari akun 425121 ke akun 425131	Kas	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,700,000				2,700,000			
								313121	Diterima dari Entitas Lain								2,700,000
								313121	Diterima dari Entitas Lain							2,700,000	
								425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		2,700,000				2,700,000		